BUMN UNTUK INDONESIA

PERTAMINA GAS NEGARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

LAPORAN TAHUNAN 2024 ANNUAL REPORT

RESILIENCE TO DELIVER

SANGKALAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB (*DISCLAIMER*)

Disclaimer and Limits of Responsibility

Laporan Tahunan ini berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai pandangan masa depan yang menunjukkan proyeksi, asumsi, dan ekspektasi. Meski disusun melalui pertimbangan yang matang berdasarkan pengalaman selama ini, namun PGN tidak bisa memberikan jaminan hal-hal itu bisa direalisasikan di masa depan karena kemungkinan perubahan-perubahan yang terjadi, di antaranya: perubahan kondisi ekonomi dan politik baik nasional maupun global, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan harga, permintaan dan penawaran pasar, perubahan kompetisi Perusahaan, perubahan regulasi dan prinsip-prinsip akuntansi, serta perubahan kebijakan dan pedoman lainnya.

Dalam Laporan Tahunan ini nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk disingkat "PGN", penulisan "Perusahaan", "PGN Grup", "Subholding Gas", Pertamina Gas Negara, atau "Perseroan" diasosiasikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan ini juga memuat kata pekerja, pegawai, karyawan dan insan Perwira PGN, merujuk pada Perwira Subholding Gas.

Notasi angka dalam Laporan Tahunan ini menggunakan kaidah penulisan dalam Bahasa Indonesia.

This Annual Report contains some statements that can be considered as forward looking, which comprise projections, assumptions, and expectations. Although it is prepared through careful considerations based on our experiences so far, yet PGN cannot guarantee they can be materialized in the future due to possible changes, which may occur such as: economic and political changes at the national and global levels, fluctuation of exchange rates, price changes, market demand and supply, changes in corporate competition, changes in regulation and accounting principles, and changes in other policies and guidelines.

In this Annual Report, the name PT Perusahaan Gas Negara Tbk abbreviated as "PGN", the writing 'Company', "PGN Group", "Gas Subholding", Pertamina Gas Negara, or "Company" is associated with PT Perusahaan Gas Negara Tbk. This Annual Report also contains the words workers, employees, employees and PGN Officers, referring to the Gas Subholding Officers.

Number notation in this Annual Report applies the writing rules applicable in Indonesian language.

FLOW GAS

RESILIENCE

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis selama tahun 2024 untuk menghasilkan kinerja positif Perseroan. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui penerapan strategi bisnis yang konsisten yaitu terus melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat bisnis utama distribusi dan transmisi gas bumi, melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan dan optimalisasi infrastruktur yang dimiliki Perseroan, menjalankan bisnis baru LNG *trading* serta pengembangan bisnis hijau untuk memastikan komitmen Perseroan dalam upaya keberlanjutan dan mengakselerasi energi bersih yang lebih luas.

Perseroan terus beradaptasi dan bertransformasi untuk memimpin perubahan guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan melalui pengembangan teknologi dan inovasi untuk membangun infrastruktur gas bumi yang terintegrasi serta membangun bisnis energi rendah karbon agar dapat memperluas aksesibiltas gas bumi bagi masyarakat Indonesia. Perseroan secara aktif melakukan *engagement* dengan seluruh pemangku kepentingan serta melakukan kolaborasi strategis dengan seluruh pelanggan dan mitra bisnis untuk memberikan nilai terbaik serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta memberikan kontribusi bagi Negara.

TO DELIVER

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) has consistently demonstrated its ability to face various challenges and business dynamics during 2024 to generate positive performance for the Company. This achievement was accomplished through the implementation of a consistent business strategy, namely continuing to increase the utilization of natural gas to strengthen the main business of natural gas distribution and transmission, diversifying the business through the development and optimization of the Company's infrastructure, running a new LNG trading business, and developing a green business to ensure the Company's commitment to sustainability efforts and accelerating wider clean energy.

The Company continues to adapt and transform to lead change in order to achieve a balance between energy needs and environmental preservation through the development of technology and innovation to build integrated natural gas infrastructure and build a low-carbon energy business in order to expand the accessibility of natural gas for Indonesians. The Company actively engages with all stakeholders and carries out strategic collaboration with all customers and business partners to provide the best value and create a positive impact on society and the environment while contributing to the State.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2020

ANSWERING THE CHALLENGES

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menantang bagi PGN karena berbagai dinamika yang terjadi. Namun, tantangan bukanlah halangan, juga bukan situasi yang dihadapi dengan keluhan, apalagi menyerah. PGN menyikapi tantangan sebagai bagian dari proses perjalanan. Tantangan yang ada menjadi wahana mengasah kemampuan, inovasi, dan kesiapan seluruh Perwira PGN untuk menjawabnya. Tak sekadar untuk melewatinya dengan selamat, juga menjadikannya sebagai pijakan untuk berkembang.

The year 2020 was quite a challenging year for PGN due to various dynamics that occurred. However, challenges are not obstacles, nor situations to be faced with complaints, let alone with giving up. The PGN deals with the challenges as part of a journey process. Those challenges serve as a medium for honing skills, innovation, and the readiness of all PGN employees to answer them. Not only to get through the challenging situations safely, but we are also committed to treating them as a foothold for further development.

2021

GREATER COLLABORATION STRONGER SYNERGY

Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), PGN berkomitmen membangun jaringan gas bumi di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2021, semangat "One Energy, One Pertamina" diwujudkan dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik demi masa depan berkelanjutan yang sejahtera. Kini saatnya, PGN memantapkan langkah, menyongsong tantangan ke depan dengan percaya diri serta bertransformasi untuk menjadi lebih baik, lebih besar dan lebih kuat.

As a Gas Subholding company and part of PT Pertamina (Persero) Oil and Gas Holding, PGN is committed to establishing natural gas networks in various regions. Throughout 2021, the spirit of One Energy, One Pertamina is manifested by promoting synergy and collaboration to support the Government in providing better energy sources for a prosperous and sustainable future. It is now time for PGN to steady its steps, face future challenges with confidence, and transform to become better, bigger, and stronger.

2022

GROWING TOWARDS ENERGY SOLUTION

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memiliki peran penting dalam upaya memastikan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui upaya memperkuat pasokan dan memperluas pembangunan infrastruktur gas bumi. PGN sebagai Subholding Gas, juga memiliki peran pada masa transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) di 2060. Gas bumi yang memiliki sifat pembakaran lebih bersih dibandingkan energi lain, dapat menurunkan emisi hingga 40% dan akan menjadi salah satu solusi untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia hingga 377 ton CO_2 pada 2035. Untuk mendukung upaya tersebut, selama tahun 2022 PGN terus melakukan terobosan bisnis, mengembangkan infrastruktur serta peningkatan pemanfaatan gas bumi menuju Perusahaan yang menyediakan solusi energi bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk sektor komersial, industri, kelistrikan, transportasi dan rumah tangga.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) plays an important role in ensuring national energy resilience through efforts to strengthen supply and expand the development of natural gas infrastructure. As a Gas Subholding, PGN also plays a role during Indonesia's energy transition phase toward Net Zero Emission (NZE) by 2060. Natural gas, which has cleaner combustion properties compared to other energies, can reduce emissions by up to 40% and will become one of the solutions to meet the target of Indonesia's emission reduction by up to 377 tons of CO_2 in 2035. To support these efforts, throughout 2022 PGN continued to make business breakthroughs, develop infrastructure and increase the utilization of natural gas toward a Company that provides energy solutions for the people of Indonesia, mainly for commercial, industrial, electricity, transportation and household sectors.

2023

STRENGTHENING PRESENCE

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen untuk terus memperkuat kehadirannya dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk itu, PGN menerapkan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk memperkokoh keberadaannya di tengah pasar yang dinamis.

Selama tahun 2023, PGN telah menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensi, baik melalui ekspansi infrastruktur, peningkatan kapabilitas teknologi, kolaborasi strategis dengan pemangku kepentingan, maupun secara konsisten menambah portofolio pelanggan baru untuk mencapai target volume pengelolaan gas bumi. Beragam inisiatif yang telah dilakukan mencerminkan tekad PGN untuk tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri, tetapi juga menjelajahi peluang baru dan memimpin perubahan di bidangnya.

PGN akan terus menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Dengan fokus penguatan fundamental dan inovasi, PGN siap mengukir masa depan energi yang mengedepankan keberlanjutan.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is committed to continuing to strengthen its presence in the natural gas transmission and distribution sector. To that end, PGN is implementing strategic and innovative measures to strengthen its presence in a dynamic market.

Throughout 2023, PGN has made various efforts to increase its presence, both through infrastructure expansion, improvement of its technological capabilities, strategic collaboration with stakeholders and consistently adding new customer portfolios to achieve the target volume of natural gas management. The various initiatives that have been undertaken reflect PGN's determination to not only be a major player in the industry, but also to explore new opportunities and lead change in its field.

PGN will continue to deliver value to customers, stakeholders and society at large. With a focus on strengthening fundamentals, innovation and sustainability, PGN is ready to build a more sustainable energy future.

2024

RESILIENCE TO DELIVER

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis selama tahun 2024 untuk menghasilkan kinerja positif Perseroan. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui penerapan strategi bisnis yang konsisten yaitu terus melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat bisnis utama distribusi dan transmisi gas bumi, melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan dan optimalisasi infrastruktur yang dimiliki Perseroan, menjalankan bisnis baru LNG trading serta pengembangan bisnis hijau untuk memastikan komitmen Perseroan dalam upaya keberlanjutan dan mengakselerasi energi bersih yang lebih luas.

Perseroan terus beradaptasi dan bertransformasi untuk memimpin perubahan guna mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi dan pelestarian lingkungan melalui pengembangan teknologi dan inovasi untuk membangun infrastruktur gas bumi yang terintegrasi serta membangun bisnis energi rendah karbon agar dapat memperluas aksesibiltas gas bumi bagi masyarakat Indonesia. Perseroan secara aktif melakukan *engagement* dengan seluruh pemangku kepentingan serta melakukan kolaborasi strategis dengan seluruh pelanggan dan mitra bisnis untuk memberikan nilai terbaik serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta memberikan kontribusi bagi Negara.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) has consistently demonstrated its ability to face various challenges and business dynamics during 2024 to generate positive performance for the Company. This achievement was accomplished through the implementation of a consistent business strategy, namely continuing to increase the utilization of natural gas to strengthen the main business of natural gas distribution and transmission, diversifying the business through the development and optimization of the Company's infrastructure, running a new LNG Trading business, and developing a green business to ensure the Company's commitment to sustainability efforts and accelerating wider clean energy.

The Company continues to adapt and transform to lead change in order to achieve a balance between energy needs and environmental preservation through the development of technology and innovation to build integrated natural gas infrastructure and build a low-carbon energy business in order to expand the accessibility of natural gas for Indonesians. The Company actively engages with all stakeholders and carries out strategic collaboration with all customers and business partners to provide the best value and create a positive impact on society and the environment while contributing to the State.

DAFTAR ISI
Contents

2 KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity
4 DAFTAR ISI
Contents
10 IKHTISAR CAPAIAN 2024
Performance Highlights 2024
12 STRATEGI KORPORAT G-A-S
Corporate Strategy g-a-s

01. KILAS KINERJA
Performance Highlights

16 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Important Financial Data Highlights
18 KINERJA KEUANGAN
Financial Performance
20 KINERJA OPERASIONAL
Operational Performance
21 PORTOFOLIO INFRASTRUKTUR PIPA SUBHOLDING GAS
Infrastructure Operational Performance
24 KINERJA SAHAM
Stock Performance
26 AKSI KORPORASI
Corporate Action
26 PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/ PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM
Temporary Suspension of Shares Trading/Delisting of Shares
27 KINERJA OBLIGASI
Bond Performance
28 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications
45 PERISTIWA PENTING 2024
Important Events 2024

02. LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

58 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report of the Board of Commissioners
60 TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI
Macroeconomic and Industrial Review
61 PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI
Assessment of the Board of Directors' Performance
63 PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI
Oversight of Strategy Implementation by the Board of Directors
63 FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI
Oversight and Advisory Functions to the Board of Directors
64 PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI
Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors
65 PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KEBERLANJUTAN
Views on Governance and Sustainability Implementation
67 PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Committee Performance Assessment
68 PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Changes in the Composition of the Board of Commissioners
69 PENUTUP
Closing
70 DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
72 LAPORAN DIREKSI
Report of the Board of Directors
74 TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI
Macroeconomic and Industrial Review
76 STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
Strategy and Strategic Policies
77 Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis
The Role of the Board of Directors in Developing Strategies and Strategic Policies
78 Proses Penerapan Strategi dan Kebijakan Strategis yang Efektif
The Process of Effective Strategy and Strategic Policy Implementation
79 PENCAPAIAN KINERJA 2024
2024 ACHIEVEMENTS
79 Perbandingan Kinerja Keuangan Year on Year
Year-on-Year Comparison of Financial Performance
80 Perbandingan Kinerja Operasional Year on Year
Year-on-Year Operational Performance Comparison
81 Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan
Comparison Between Achieved and Targeted Results
82 Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Mitigasinya
Challenges Faced And Mitigation Measures
83 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Human Resources and Information Technology Development
85 PROSPEK USAHA
Business Prospect
87 PENERAPAN TATA KELOLA
Governance Practice
89 PENERAPAN NILAI KEBERLANJUTAN
Applying Sustainability Values
90 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
Increased Use of Domestic Products (P3DN)
91 PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI
Changes in the Composition of the Board of Directors
93 PENUTUP
Closing
94 DIREKSI
Directors
96 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Liability Statement Letter
96 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Statement of the Board of Commissioners on Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
97 SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
Statement of the Board of Directors on Responsibility for the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk

03. PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

100 SEKILAS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
About PT Perusahaan Gas Negara Tbk
102 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Brief History of the Company
104 PERKEMBANGAN BISNIS PERUSAHAAN
Development of the Company's Business
106 LOGO PERUSAHAAN
Company Logo
108 SUBHOLDING GAS
Gas Subholding
109 LINGKUP BISNIS SUBHOLDING GAS
Gas Subholding's Scope of Businesses
109 PENYEDIA SOLUSI ENERGI TERINTEGRASI
Provider of Integrated Energy Solution
110 PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL
Operator of National Natural Gas Infrastructures
112 VISI DAN MISI
Vision and Mission
112 VISI
Vision
112 MISI
Mission
113 BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture
114 BIDANG USAHA
Nature of Businesses
114 KEGIATAN USAHA
Business Activites
117 PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN
Products or Services
119 WILAYAH OPERASI PGN
PGN Operation Regions
120 STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure
122 STRUKTUR USAHA
Business Structures
123 PROFIL DEWAN KOMISARIS
Profile of the Board of Commissioners
130 PROFIL DIREKSI
Profile of the Board of Directors
137 PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PGN SELAMA TAHUN BUKU 2024 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2024
Changes in the Composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners During the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year
138 PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS
Profile of Gas Subholding Employees
138 JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Subholding Gas Employees by Employment Status
139 JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA
Number of Gas Subholding Employees by Education and Ages
140 JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Gas Subholding Employees by Position Group and Employment Status
141 JAMINAN KESETARAAN GENDER DAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GENDER
Gender Equality Guarantee and the Number of Employees by Genders
142 PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*
The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners
147 KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
Occupational Health and Safety Policies
148 INFORMASI PEMEGANG SAHAM
Information of Shareholders
152 STRUKTUR SUBHOLDING GAS
Subholding Gas Structure
154 ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Information on Subsidiary Entities and Affiliates
161 KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Share Listing
161 *MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN* (MSOP/ESOP)
Management and Employee Stock Option Plan (MSOP/ESOP)
162 PEMECAHAN SAHAM
Stock Split
162 PEMBELIAN SAHAM KEMBALI
Share Buyback
165 KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI
Chronology of Bond Listing
165 UTANG OBLIGASI PGN
PGN Bonds Payable
166 UTANG OBLIGASI SEI
SEI Bonds Payable
167 INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Information on Public Accounting Services and Public Accounting Firms
167 KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Public Accounting Firm
168 NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Name and Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions
168 BIRO ADMINISTRASI EFEK
Securities Administration Bureau
168 BURSA EFEK INDONESIA
Indonesia Stock Exchange
168 LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK
Securities Rating Agency
168 LEMBAGA PEMERINGKAT ESG *RISK RATING*
ESG Risk Rating Agency
169 DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI
List of Association Memberships
170 INFORMASI PADA *WEBSITE* PERUSAHAAN
Information on Company's Website

04. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

174 TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI
Macroeconomic and Industrial Overview
176 TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operational Review Per Business Segment
176 SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI
Trading and Transmission Business Segment
182 SEGMEN USAHA EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS
Oil and Gas Exploration and Production Business Segment
184 SEGMEN USAHA LAINNYA
Other Business Segments
187 URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN
Description of Financial Performance
188 LAPORAN LABA RUGI
Income Statement
188 Pendapatan
Income
189 Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenue
189 Laba Bruto
Gross Profit
189 Beban Umum dan Administrasi
General and Administrative Expenses
189 Pendapatan/(Beban) Lain-Lain - net
Other Income/(Expenses) - net
189 Laba Operasi
Operating Profit
189 Pendapatan Keuangan
Financial Income
190 Beban Keuangan
Financial Expenses
190 Laba/(Rugi) Selisih Kurs
Profit/(Loss) Exchange Difference
190 Bagian Laba Ventura Bersama
Joint Venture Profit Share
190 Provisi atas Kontrak yang Memberatkan
Provision for Onerous Contracts
191 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Profit/(Loss) Before Income Tax
191 Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense
191 Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income/(Loss)

192 **Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk**
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity
192 **Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non- Pengendali**
Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests
192 **Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk**
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity
192 **Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali**
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests
192 **LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Statement of Financial Position
192 **Total Aset**
Total Assets
193 **Aset Lancar**
Current Assets
193 **Aset Tidak Lancar**
Non-Current Assets
194 **Liabilitas**
Liabilities
194 **Liabilitas Jangka Pendek**
Short-term Liabilities
194 **Liabilitas Jangka Panjang**
Long Term Liabilities
195 **Ekuitas**
Equity
195 **LAPORAN ARUS KAS**
Cash Flow Statement
196 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
Report of Changes in Equity
198 **KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG**
Ability to Pay Debt
198 **TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG**
Receivables Collectibility Level
199 **STRUKTUR MODAL**
Capital Structure
200 **IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL**
Material Commitment for Capital Expenditure
201 **REALISASI INVESTASI BARANG MODAL**
Realization of Capital Expenditure
203 **INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**
Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Report Date
204 **PROSPEK USAHA**
Business Outlook
210 **PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2024**
Comparison of Target and Realization 2024
210 **ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/PRODUKSI DAN PEMASARAN**
Analysis of Operations/ Production and Marketing Realization Achievement
211 **ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/RUGI DAN STRUKTUR MODAL**
Analysis of Profit/Loss and Capital Structure Realization Achievement
212 **ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM**
Analysis of HR Development Achievements
213 **RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG**
Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year
217 **ASPEK PEMASARAN**
Marketing Aspects
217 **PANGSA PASAR**
Market Share
218 **PROFIL PELANGGAN**
Customer Profile
219 **PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN**
Adjustment of PGN Natural Gas Selling Price
220 **PERBANDINGAN DAYA SAING HARGA JUAL GAS BUMI PGN DENGAN BAHAN BAKAR LAIN**
Comparison of Competitiveness of PGN Natural Gas Selling Prices with Other Fuels
223 **STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN**
Marketing Communication Strategies
224 **PENGEMBANGAN PRODUK**
Product Development
226 ***POSITIONING* PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN**
Product Positioning in the Market and Consumers
226 **ALOKASI DANA/BIAYA PEMASARAN/BIAYA PENGELOLAAN PELANGGAN DAN EFISIENSI**
Allocation of Funds/ Marketing Costs/ Customer Management Fees and Efficiency
227 **TEKNOLOGI INFORMASI**
Information Technology
228 **FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS**
Strategic Focus and Policy
229 **REALISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Realization of Information Technology Implementation Program
231 **TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN/ATAU PENILAIAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Follow-Up of Audit and/or Information Technology Assessment Results
232 **REALISASI RENCANA PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI**
Realization of Information Technology Financing Plan
232 **PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK AKSES INFORMASI PERUSAHAAN**
Utilization of Technology for Access to Company Information
232 **TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER**
Information Technology Governance and Cyber Security
234 **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI**
Development of HR Competence in Information Technology
234 **RENCANA DAN STRATEGI ICT 2025**
Plans and Strategies for 2025
235 **KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN**
Dividend Payment Policy
235 **PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN**
Announcement and Payment of Dividends
236 **REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**
Realization of Use of Proceeds from Public Offering
236 **INFORMASI MENGENAI REALISASI ATAS RENCANA AKSI KORPORASI**
Information Regarding the Realization of the Corporate Action Plan
237 **INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL**
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring
239 **INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI**
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring
239 **PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Amendments to Laws and Regulations
242 **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**
Changes in Accounting Policies
244 **KONTRIBUSI KEPADA NEGARA**
Contribution to the Country
244 **PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN**
Achievement of KPIs and Company Health Level
245 **RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2024**
Details of Issues Arising During 2024
255 **LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN**
Report on the Utilization of Additional PMN
255 **PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN**
Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments
256 **INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA**
Information on Business Continuity
256 **HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA**
Factors with Significant Impact Potentials on Business Continuity
256 **ASESMEN MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA**
Management Assessment to Manage Potentials with Significant Influence on Business Continuity
257 **ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN**
Assumptions Used by Management in Conducting Assessments
257 **ASESMEN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN TERHADAP PENGARUH TERSEBUT**
Management Assessments and Decisions Regarding these Influences

05. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

260 TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance
260 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Implementation of Good Corporate Governance
261 DASAR HUKUM
Legal Basis
262 KILAS BALIK GCG
GCG Milestones
266 TUJUAN PENERAPAN GCG
Objectives of GCG Implementation
266 PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Good Corporate Governance Principles
267 KEBIJAKAN GCG DI PGN
GCG Policy at PGN
268 MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG PGN
Strengthening GCG Implementation at PGN
270 VISI PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN
Company Vision in Supporting Sustainable Company Performance
270 STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Structure
271 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
271 PEMEGANG SAHAM
Shareholders
272 Hak Pemegang Saham
Shareholders' Rights
273 Tanggung Jawab Pemegang Saham
Shareholders' Responsibilities
274 PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2024
Implementation of the 2024 GMS
281 PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023
GMS Implementation in 2023
291 DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
291 TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Responsibilities of the Board of Commissioners
292 PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS
Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners
293 *BOARD MANUAL* DEWAN KOMISARIS
Board Manual of the Board of Commissioners
293 RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN
Concurrent Positions and Conflicts of Interest
294 KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Policy on Prohibition of Obtaining Loans from the Company to the Board of Directors and Board of Commissioners
294 PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS
Implementation of Duties of the Board of Commissioners
297 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Meeting of the Board of Commissioners and Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors
315 PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Performance Assessment of the Company's Board of Commissioners
316 PENILAIAN KINERJA DIREKSI PERSEROAN
Performance Assessment of the Company's Board of Directors
317 PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS
Assessment on the Performance of Committees of the Board of Commissioners
319 KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioners
319 KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN
Criteria for the Appointment of Independent Commissioners
319 KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN
Composition and Membership of Independent Commissioners
320 PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN
Independence Statement of Independent Commissioners
321 DIREKSI
Board of Directors
322 RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI
Scope of Works and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors
324 *BOARD MANUAL* DIREKSI
Board Manual of the Board of Directors
325 RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI
Concurrent Positions and Conflicts of Interest of the Board of Directors
325 KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Policy on Prohibition of Receiving Loans from the Company for the Board of Directors and the Board of Commissioners
325 RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI
Meetings and Decisions of the Board of Directors
350 PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI
Assessment on Performance of Committees Under the Board of Directors
351 KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Nomination and Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors
351 KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI
Policy and Nomination Process for Members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors
353 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Procedure and Implementation of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors
359 PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors
359 KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Training Policy and/or Competency Improvement of the Board of Commissioners and Board of Directors
359 PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024
Training and/or Competency Improvement of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2024
363 KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU
Policy on Introduction Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
363 PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2024
Induction Program for the New Board of Commissioners and Board of Directors in 2024
364 KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
365 PENGALAMAN DAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Experience and Competency of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
365 KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Representation of Women in Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
366 HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI
Affiliated Relationship Among Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders
367 KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Committees Under the Board of Commissioners
367 KOMITE AUDIT
Audit Committee
382 KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG
Nomination, Remuneration, and GCG Committee
392 KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA
Risk Management and Business Development Monitoring Committee
401 KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
Integrated Governance Committee
406 SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Secretary
407 PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Training Programs for the Board of Commissioners Secretary

407 PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2024
Duties of the Board of Commissioners Secretary 2024
408 KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Committees Under the Board of Directors
408 KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Committee
409 SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary
409 DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Basis for Appointment of Corporate Secretary
410 FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY
Functions and Responsibilities of the Corporate Secretary
410 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY
Appointment and Dismissal of Corporate Secretary
410 STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure
410 PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY TAHUN 2024
Implementation of Corporate Secretary Duties in 2024
411 KETERBUKAAN INFORMASI
Disclosure of Information
411 PROGRAM PELATIHAN CORPORATE SECRETARY
Training Program for Corporate Secretary
412 INTERNAL AUDIT
Internal Audit
412 PROFIL *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*
Profile of Chief Audit Executive
413 DASAR PENGANGKATAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*
Basis of Appointment of the Chief Audit Executive
413 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*
Appointment and Dismissal of Chief Audit Executive
414 KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN
Position of Internal Audit in the Company's Structure
414 PIAGAM AUDIT
Audit Charter
414 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Duties and Responsibilities
415 Tugas dan Tanggung Jawab
Duties and Responsibilities
416 Wewenang
Authority
417 KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DENGAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT
Policy and Implementation of Meeting Frequency with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee
417 JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT
Number of Internal Audit Personnel
417 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Competency Development of Human Resources
418 SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT
Internal Audit Professional Certification
418 PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2024
Implementation of Internal Audit Activities during 2024
419 TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT
Follow-Up to Audit Recommendations
421 PENDAMPINGAN AUDITOR EKSTERNAL
Assistance for External Auditors
421 LAIN-LAIN
Others
422 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System
422 KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Conformity of the Internal Control System
422 PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN
Financial and Operational Control, as Well as Compliance eith Legislations
423 KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018
Conformity of Internal Control System with ISO 31000:2018
423 EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Evaluation on the Effectiveness of the Internal Control System
424 PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System
425 FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Function
425 STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN
Compliance Function Organizational Structure
425 AUDIT KEPATUHAN DI PGN
Compliance Audit at PGN
426 PENGADAAN BARANG/JASA
Procurement of Goods/Services
429 KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI
Anti-Bribery and Corruption Policy
429 PROGRAM DAN PROSEDUR
Programs and Procedures
430 PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI
Anti-Corruption Training/Sosialization
431 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Gratification Control
431 PENGELOLAAN GRATIFIKASI
Gratification Management
431 ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI
Ethics Related to Gratification
432 LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2024
Gratification Control Report 2024
432 BUDAYA ANTI GRATIFIKASI
Anti-Gratification Culture
433 PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM
Prevention Against Insider Trading
434 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Management of State Officials' Wealth Reports
434 KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN
State Officials' Wealth Reports (LHKPN) Submission and Management Policy
434 WAJIB LAPOR LHKPN
LHKPN Compulsory Report
434 PENGELOLA LHKPN PGN
PGN LHKPN Management
434 PELAKSANAAN LHKPN TAHUN 2024
LHKPN Implementation in 2024
435 SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System
436 PROFIL GROUP HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY
Profile of Group Head Operational Risk, Internal Control & Business Continuity
436 PROFIL DIVISION HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE
Profile of Division Head Risk Strategy And Integrated Governance
437 PROFIL DIVISION HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK
Profile of Division Head Project Risk, Portfolio & Counterparty Risk
437 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO
Duties and Responsibilities of Risk Management
438 TUGAS DAN FUNGSI *RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM*
Risk Management Champions Team Duties and Functions
439 IMPLEMENTASI *FRAMEWORK* ISO 31000:2018
Implementation of ISO 31000:2018 Framework
439 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Information Systems Development
440 EVALUASI ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Risk Management System Evaluation
441 *ROADMAP* PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Roadmap
442 SERTIFIKASI PERSONEL
Personnel Certification
443 STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN
Risk Management in the Company
444 PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Risk Management in the Company
445 STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Governance Structure
445 PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN
Program to Improve Company's Risk Awareness Culture

447 IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS
Business Continuity Management System Implementation
447 PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System
449 PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI
Legal Cases
458 INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
Information on Administrative Sanctions
459 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN SERTA ASPEK KEBERLANJUTAN
Management and Control of Tax and Sustainability Aspects
460 IMPLEMENTASI KONSEP KEBERLANJUTAN DAN INTEGRASINYA DALAM PROSES BISNIS PERUSAHAAN
Implementation of the Sustainability Concept and Its Integration in the Company's Business Process
461 PROSEDUR DAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN
Procedure and Information System for Preparing Sustainability Report
463 KODE ETIK PERUSAHAAN
Company's Code of Ethics
463 POKOK-POKOK KODE ETIK
Code of Ethics Principles
465 PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI
Code of Ethics Commitments for All Levels
465 PELATIHAN TAHUNAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK
Code of Ethics Annual Training and Socialization
465 UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK
Code of Ethics Implementation and Enforcement Efforts
466 SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK
Sanctions for Code of Ethics Violation
466 PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2024
Violation of the Code of Ethics and Sanctions in 2024
466 *MONITORING* DAN EVALUASI
Monitoring and Evaluation
467 PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP PERUSAHAAN
PGN Corporate Culture Development and Employee Engagement Improvement
471 PROGRAM ESOP/MSOP
ESOP/MSOP Program
473 URAIAN SINGKAT KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN
Brief Description of Management Share Ownership Disclosure Policy
474 *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
Whistleblowing System
474 CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN
Mechanism to Submit Violation Report
475 PROSES *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
Whistleblowing System Process
476 PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*
Protection for Whistleblower
476 PENANGANAN PENGADUAN
Handling of Complaints
477 PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN
Parties Authorized to Manage Reports
478 HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA
Complaint Handling Results and Its Follow-Up
478 PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2024
Complaints Via the Whistleblowing System in 2024
479 PENYUSUNAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
Financial Statements Preparations
480 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN
Transparency of Financial and Non-Financial Conditions
480 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN
Transparency of Company's Financial Conditions
480 TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN
Transparency of Company's Non-Financial Conditions
481 PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
Conflict of Interest Guidelines
484 AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor
484 PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL
EXTERNAL AUDITOR APPOINTMENT PROCESS
486 JASA LAIN
OTHER SERVICES
487 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
Access to Company Information and Data
488 AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Information and Communication Access
489 PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance
489 PENERAPAN PARAMETER ACGS (*ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD*) (DATA RILIS MARET 2025)
Implementation of ACGS (Asean Corporate Governance Scorecard) Parameters (March 2025 Data Release)
490 PEMENUHAN PUGKI DAN POJK
PUGKI and POJK Fulfillment
491 PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to the Financial Services Authority (OJK) Regulations
501 PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)
Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)
525 RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2025
GCG Strengthening Plan for 2025

06. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibilities

528 IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN
Sustainability Performance Highlights
530 IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN
Sustainability Implementation
534 PILAR LINGKUNGAN
Environmental Pillar
538 PILAR SOSIAL
Social Pillars
543 PILAR TATA KELOLA
Governance Pillar

07. LAPORAN KEUANGAN
Financial Statement

550 LAPORAN KEUANGAN
Financial Statement

08. REFERENSI
References

816 REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
Reference of Circular of the Financial Services Authority Number 16/SEOJK.04/2021 on Forms and Contents of Issuer's or Public Listed Company's Annual Report
833 LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Appendix VII - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises

IKHTISAR CAPAIAN 2024

Performance Highlights 2024

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

Pendapatan
Revenue
USD 3.789 juta million

Laba
Net Profit
USD 339 juta million

KINERJA OPERASIONAL

Operational Performance

Distribusi
Distribution
852 BBTUD

Transmisi
Transmission
1.543 MMSCFD

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Company Soundness Level

Peringkat Berdiri Sendiri
Stand Alone Rating
bb+/aa (idn)

Peringkat Akhir
Final Rating
BBB-/AA+ (idn)/ *Stable*

Tingkat Kesehatan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada Tahun Buku 2024
The Soundness Level for PT Perusahaan Gas Negara Tbk in Financial Year 2024

AAA Sangat Sehat / Excellent Soundness

TATA KELOLA

Governance

PUGKI
Apply Untuk "Seluruh Prinsip"
"All Principles" applied

ACGS
ACGS
91,11%

OJK
FSA
Comply untuk seluruh aspek
Fully Complied

(dari standar yang diharapkan untuk diterapkan dan melebihi standar minimum)
(of the standards expected to be applied and above the minimum standards)

KEPUASAN PELANGGAN

Customer Satisfaction

Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index (CSI)
4,66 | Sangat Baik / Very Good

Indeks Loyalitas Pelanggan
Customer Loyalty Index (CLI)
4,36 | Sangat Baik / Very Good

Indeks Skala 1-5
Scale Index 1-5

Tingkat Keinginan Pelanggan Memberikan Rekomendasi untuk Menggunakan Produk dan Layanan PGN (*Net Promoter Score*)
Level of Customer Eagerness to Recommend PGN Products and Services (Net Promoter Score)
60,36 | *High to promote*

Indeks Skala <-30 - >30
Scale Index <-30 - >30

KINERJA SAHAM & DIVIDEN

Stock Performance & Dividend

Kinerja saham PGAS meningkat sebesar **40,7%** jika dibandingkan dengan harga penutupan pada periode tahun lalu.

PGAS stock performance increased by 40.7% compared to the closing price in the previous year.

Tren Dividen *Payout Ratio* Tiga Tahun Terakhir
Trends in Dividend Payout Ratio Over the Last Three Years
>60%

Tren Dividen *Yield* Tiga Tahun Terakhir
Dividend Yield Trends Over the Last Three Years
>7%

ESG RISK RATING
ESG Risk Rating

Pencapaian Skor ESG Risk Rating PGN 2024 mencerminkan kemampuan kita mengelola risiko ESG dengan baik sesuai prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

PGN's earned ESG Risk Rating Score in 2024 reflects our ability to manage ESG risks well in adherence to environmental, social, and governance principles.

ESG Risk Rating
ESG Risk Rating

20,2 | *Medium Risk*
Medium Risk

Negliable	Low	Medium	High	Severe
0 - 10	10 -20	20 - 30	30 - 40	40+

Universe	Rank (1st = Lower Risk)	Percentile (1st = Top Score)
Global Universe	**4.431** / 15.104	**30th**
Utilities (Industry)	**103** / 648	**17th**
Gas Utilities (Subindustry)	**9** / 86	**10th**

OPERATIONAL EXCELLENCE
Operational Excellence

PGN senantiasa mewujudkan *Operation Excellent* melalui upaya implementasi Sistem Manajemen Aset Infrastruktur Gas berbasiskan standar internasional ISO 55001 dan penerapan berbagai Kebijakan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur gas PGN yang merupakan tulang punggung penyaluran gas bumi nasional didukung dengan teknologi yang memadai untuk memastikan operasional infrastruktur dan penyaluran gas dapat berjalan dengan menjamin faktor kehandalan, keselamatan, keamanan dan lingkungan.

PGN terus melakukan peninjauan kesesuaian untuk memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan demi peningkatan mutu dan layanan operasional infrastruktur serta penyaluran gas.

PGN is committed to achieve operational excellence by adopting Asset Management System for Natural Gas Infrastructure aligned with the ISO 55001 International Standard, complemented by the implementation of various strategic policies.

The availability and functionality of PGN gas infrastructure, serving as the backbone of the national natural gas transmission and distribution network, are supported by fit-to-purpose technologies designed to ensure seamless operations for gas transmission and distribution. This approach prioritizes reliability, safety, security, and adherence to environmental standards.

PGN continuously conducts compliance evaluations to ensure improvements in the quality and operational performance of its gas infrastructure for transmission and distribution services.

KINERJA HSSE
HSSE Performance

PGN mencatatkan total 44.472.719 jam kerja aman dengan 490.585.951 jam kerja aman kumulatif pada tahun 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

PGN recorded a total of 44,472,719 safe working hours which has accumulated to 490,585,951 safe working hours in 2024 and successfully maintained ISO 14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Environmental Management System) certifications.

PERWIRA SUBHOLDING GAS
Gas Subholding Employees

3.322 Pekerja
Employees

2,83% Tingkat *Turnover*
Turnover Level

Keterikatan Pegawai
Employee Engagement

80,68 dari 100
out of 100

STRATEGI KORPORAT G-A-S

Corporate Strategy G-A-S

PT Perusahaan Gas Negara (Tbk) terus berupaya memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui strategi korporat G-A-S yang merupakan singkatan dari *Grow*, *Adapt*, dan *Step-out*. PGN berfokus pada pengembangan dan pengelolaan gas yang lebih efisien serta responsif terhadap perubahan iklim industri domestik dan pasar global.

PT Perusahaan Gas Negara (Tbk) continues to strive to ensure sustainable growth through the G-A-S corporate strategy, which stands for Grow, Adapt, and Step-out. PGN focuses on developing and running a more efficient gas management that is responsive to changes in the domestic industrial climate and the global market.

GROW

Mengembangkan dan mempertahankan bisnis eksisting yang diwujudkan dengan menjalankan inisiatif proyek dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Grow and maintain existing businesses, which are manifested by carrying out project initiatives with the following scope:

Transmission, Distribution and Regasification Infrastructure

Memperluas pengembangan infrastruktur gas untuk transmisi, distribusi, dan regasifikasi

Continuing broaden the gas infrastructure for transmission, distribution, and regasification

City Gas Network

Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk jaringan gas rumah tangga

Continuing infrastructure development for the household gas network

Upstream Development

Meningkatkan valuasi SAKA dalam bisnis upstream minyak dan gas bumi

Increase SAKA's valuation in the upstream oil and gas business

Oil/BBM Infrastructure Support

Mendukung pengembangan Infrastruktur minyak bumi

Supporting the development of crude oil infrastructure

ADAPT

Adaptasi terhadap segala macam tantangan yang dihadapi dan mengejar peluang bisnis yang berdampingan dengan bisnis eksisting seperti:

Adapting to all kinds of challenges encountered while pursuing opportunities that come along with existing businesses, such as:

LNG Bunkering & Trading

Mengembangkan infrastruktur dan bisnis niaga LNG

Developing LNG infrastructure and trading business

Domestic Upstream* LNG *infrastructure

Mengembangkan infrastruktur *upstream* LNG di dalam negeri

Developing domestic upstream LNG infrastructure

Total Solutions Energy Services

Solusi total layanan energi seperti jasa operasi dan pemeliharaan, jasa engineering dan konstruksi, penyediaan layanan teknologi informasi, dan layanan energi lainnya

Total solutions energy services, such as operation and maintenance services, engineering and construction services, provision of information technology services, and other energy services

STEP-OUT

Secara *ambidextrous* mengembangkan bisnis yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dengan pemanfaatan sumber energi yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi target *Net Zero Emission* Indonesia tahun 2060. Bisnis baru yang saat ini tengah dijajaki oleh PGN yaitu:

Ambidextrously developing a business that focuses on reducing carbon emissions by using more sustainable energy sources to face Indonesia's Net Zero Emission target in 2060. New businesses PGN is currently exploring are:

- ***Gas to chemicals***
- ***Hydrogen***
- **Ammonia**
- ***Biomethane***
- **CO_2 *Transport***

01.

KILAS KINERJA

Performance Highlights

PERTAMINA
PERTAMINA

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Important Financial Data Highlights

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Pendapatan	3.788.619.187,00	3.646.304.165,00	3.568.594.775,00	3.036.100.956,00	2.885.536.105,00	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(3.031.238.285,00)	(2.912.724.687,00)	(2.788.052.353,00)	(2.449.252.234,00)	(2.415.518.454,00)	Cost of Revenues
Laba Bruto	757.380.902,00	733.579.478,00	780.542.422,00	586.848.722,00	470.017.651,00	Gross Profit
Beban Umum & Administrasi	(201.214.919,00)	(196.895.201,00)	(198.664.089,00)	(167.098.168,00)	(144.106.334,00)	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lain-lain	40.293.915,00	24.623.337,00	29.097.489,00	37.477.725,00	41.956.047,00	Other Income
Beban Lain-lain	(73.802.786,00)	(18.890.000,00)	(18.800.468,00)	(36.912.649,00)	(64.152.453,00)	Other Expenses
Laba Operasi	522.657.112,00	542.417.614,00	592.175.354,00	420.315.630,00	303.714.911,00	Operating Profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain	55.632.766,00	(18.530.605,00)	(49.471.093,00)	47.623.265,00	(479.070.456,00)	Other Income (Expenses)
Laba/(rugi) sebelum Pajak Penghasilan	578.289.878,00	523.887.009,00	542.704.261,00	467.938.895,00	(175.355.545,00)	Profit/(loss) beforeIncome Tax
Beban Pajak Penghasilan	(138.652.608,00)	(147.271.108,00)	(141.361.720,00)	(103.404.760,00)	(40.412.269,00)	Income Tax Expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	439.637.270,00	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00	(215.767.814,00)	Profit/(loss) for the Year
Jumlah Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	10.236.286,00	14.934.137,00	(11.436.356,00)	(11.540.867,00)	4.480.897,00	Total Other Comprehensive Income/(Loss)
Total Penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan	449.873.556,00	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00	(211.286.917,00)	Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year
Laba/(rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Profit/(loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	339.427.774,00	278.091.179,00	326.239.697,00	303.823.865,00	(264.773.584,00)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	100.209.496,00	98.524.722,00	75.102.844,00	60.710.270,00	49.005.770,00	Non-controlling Interests
Total	439.637.270,00	376.615.901,00	401.342.541,00	364.534.135,00	(215.767.814,00)	Total
Total Penghasilan/(rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk	349.664.060	293.025.316,00	314.803.341,00	292.213.202,00	(260.154.344,00)	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	100.209.496,00	98.524.722,00	75.102.844,00	60.780.066,00	48.867.427,00	Non-controlling Interests
Total	449.873.556,00	391.550.038,00	389.906.185,00	352.993.268,00	(211.286.917,00)	Total
Laba/(rugi) bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – Dasar dan Dilusian	0,014	0,0115	0,013	0,013	(0,011)	Earning/(Loss) per share attributable to owners of the parent entity – basic and diluted
EBITDA	1.076.683.217,00	1.085.552.739*)	1.218.815.618,00*)	855.001.519,87	696.855.137,55	EBITDA

*) Memperhitungkan laba/(rugi) selisih kurs dan bagian laba dari ventura bersama
Taking into account the gain/(loss) on foreign exchange and profits from joint ventures

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Financial Position

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Total Aset Lancar	1.986.961.762	1.892.425.055,00	2.212.365.073,00	2.191.174.530,00	2.005.785.786,00	Total Current Assets
Total Aset Tidak Lancar	4.428.987.968	4.706.813.414,00	4.982.494.909,00	5.319.774.372,00	5.528.200.609,00	Total Non-current Assets
Total Aset	6.415.949.730	**6.599.238.469,00**	**7.194.859.982,00**	**7.510.948.902,00**	**7.533.986.395,00**	**Total Assets**
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.134.487.375	1.462.417.579 ,00	992.569.575,00	863.911.451,00	1.183.155.336,00	Total Current Liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.609.935.071	1.596.417.511,00	2.760.519.769,00	3.362.112.893,00	3.395.392.204,00	Total Non-current Liabilites
Total Liabilitas	2.744.422.446	**3.058.835.090,00**	**3.753.089.344,00**	**4.226.024.344,00**	**4.578.547.540,00**	**Total Liabilities**
Total Ekuitas	3.671.527.284	**3.540.403.379,00**	**3.441.770.638,00**	**3.284.924.558,00**	**2.955.438.855,00**	**Total Equity**
Belanja Modal	255.374.464	**231.898.089,00**	**214.818.556,00**	**260.602.127,00**	**906.273.915,00**	**Capital Expenditure**
Modal Kerja Bersih	852.474.387	**430.007.476,00**	**1.219.795.498,00**	**1.310.264.730,00**	**822.630.450,00**	**Net Working Capital**
Jumlah Investasi pada Entitas Lain	311.953.210	**307.204.288,00**	**302.802.841,00**	**338.967.517,00**	**341.091.360,00**	**Total Investments in Associated**

ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Consolidated Statements of Cash Flows

Dalam USD (Telah Diaudit) | In USD (Audited)

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Arus kas dari aktivitas operasi	785.214.989	723.688.604,00	969.699.872,00	581.705.258,00	416.874.630,00	Cash flows from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi	(48.538.485)	(57.667.488,00)	30.381.919,00	(117.178.339,00)	41.041.668,00	Cash flows from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(568.061.771)	(878.205.110,00)	(995.743.678,00)	(133.687.716,00)	(312.509.912,00)	Cash flows from financing activities
Kas setara kas awal tahun	1.244.731.682	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00	1.179.044.518,00	1.040.376.489,00	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas setara kas akhir tahun	1.383.182.362	1.244.731.682,00	1.447.650.817,00	1.503.293.693,00	1.179.044.518,00	Cash and cash equivalents at end of year

RASIO KEUANGAN
Financial Ratios

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratios						
Current Ratio (X)	1,75	1,29	2,23	2,49	1,70	Current Ratio (X)
Cash Ratio (X)	1,24	0,85	1,46	1,71	1,00	Cash Ratio (X)
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratios						
Gross Profit Margin (%)	19,99	20,12	21,87	19,33	16,29	Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)	8,96	7,63	9,14	10,01	(9,18)	Net Profit Margin (%)
ROE (%)	9,24	7,85	9,48	9,25	(8,96)	ROE (%)
ROA (%)	5,29	4,21	4,53	4,05	(3,51)	ROA (%)
Rasio Pertumbuhan | Growth Ratios						
Sales Growth Rate (%)	3,90	2,18	17,54	5,22	(25,03)	Sales Growth Rate (%)
Net Profit Growth Rate (%)	22,06	(14,76)	7,38	214,75	(491,77)	Net Profit Growth Rate (%)
Rasio Pemodalan | Leverage Ratios						
Debt to Equity (%)	34,63	43,65	62,46	89,82	104,66	Debt to Equity (%)
Debt to Asset (%)	19,82	23,42	29,88	39,28	41,06	Debt to Asset (%)
Rasio Saham | Stock Price Ratios						
Price to Earning (X)	7,03	6,36	8,61	7,41	(10,67)	Price to Earning (X)
Price to Book Value (X)	0,363	0,283	0,443	0,398	0,548	Price to Book Value (X)

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

PENDAPATAN NETO
Net Revenues
Juta USD | Millions USD

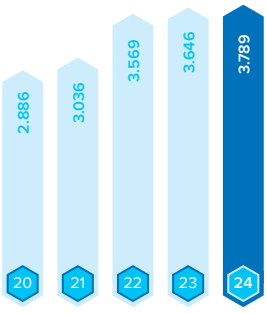

EBITDA
EBITDA
Juta USD | Millions USD

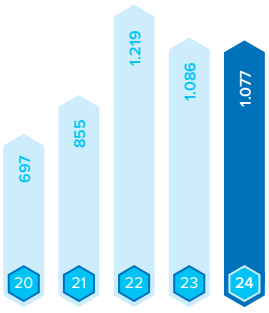

LABA OPERASI
Operating Profit
Juta USD | Millions USD

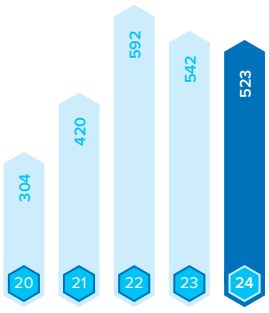

LABA BERSIH*)
Net Profit*)
Juta USD | Millions USD

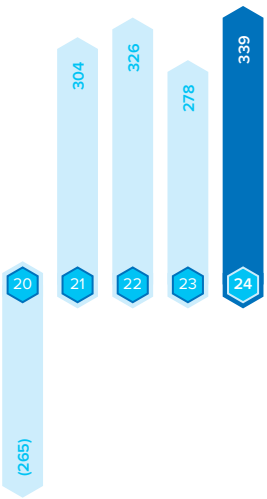

TOTAL ASET
Total Assets
Juta USD | Millions USD

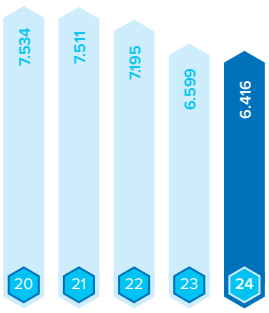

TOTAL LIABILITAS
Total Liabilities
Juta USD | Millions USD

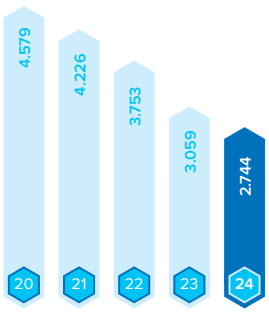

*) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Profit for the year attributable to owners of the parent entity

TOTAL EKUITAS
Total Equities
Juta USD | Millions USD

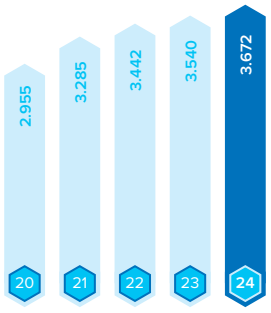

DEBT TO EQUITY RATIO
Debt to Equity Ratio
dalam % | in %

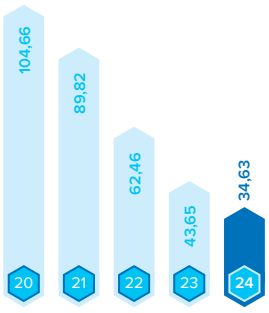

CURRENT RATIO
Current Ratio
dalam X | in X

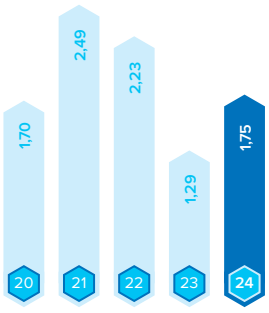

SALES GROWTH RATIO
Sales Growth Ratio
dalam % | in %

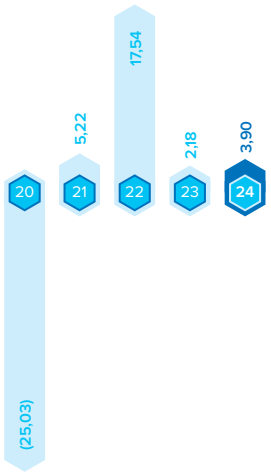

PRICE TO EARNING RATIO
Price to Earning Ratio
dalam X | in X

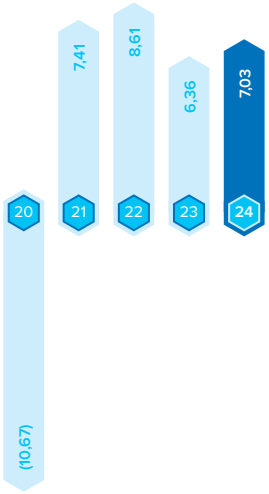

ROE
ROE
dalam X | in X

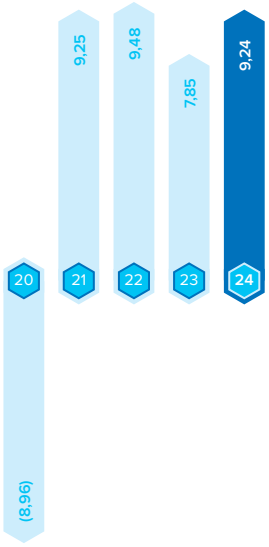

KINERJA OPERASIONAL

Operational Performance

VOLUME NIAGA
Trading Volumes
BBTUD | BBTUD

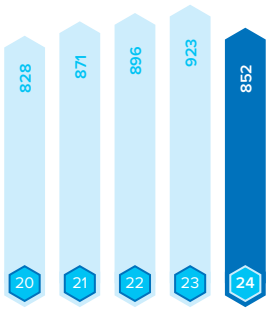

VOLUME TRANSMISI
Transmission Volumes
MMSCFD | MMSCFD

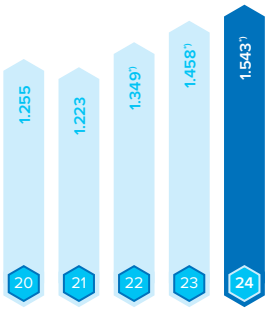

[1] Termasuk Volume Eliminasi
Include Elimination Volume

VOLUME *LIFTING*
Lifting Volumes
MMBOE | MMBOE

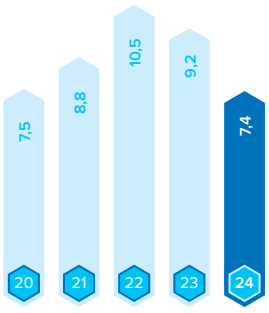

JUMLAH PELANGGAN
Number of Customers
Pelanggan | Customers

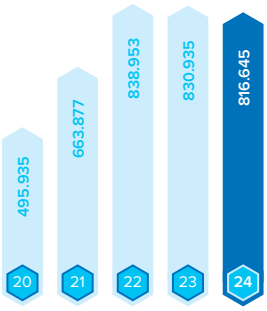

PANJANG PIPA[**)]
Pipe Lengths
Km | Km

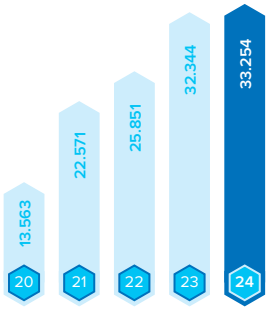

[**)] Termasuk Jargas Pemerintah
Include Goverment City Gas Network

PORTOFOLIO INFRASTRUKTUR PIPA SUBHOLDING GAS

Infrastructure Operational Performance

Subholding Gas mengoperasikan 7.669 km Pipa Distribusi, 5.884 km Pipa Transmisi dan Pipa AP/Afiliasi, serta 19.701 km Pipa Jargas APBN. Kegiatan operasional infrastruktur gas bumi PGN dikelola oleh Satuan Kerja *Operation and Maintenance Management* yang tersebar di 12 Provinsi serta terdapat operasional infrastruktur lainnya yang dikelola oleh Anak Perusahaan/Afiliasi PGN.

The Gas Subholding operates 7,669 km of Distribution Pipelines, 5,884 km of Transmission Pipelines and AP/Affiliate Pipelines, as well as 19,701 km of Government City Gas Network Pipelines. PGN's natural gas infrastructure operations are managed by the Operation and Maintenance Management spread across 12 Provinces, there are other infrastructure operations managed by PGN's Subsidiaries/Affiliates.

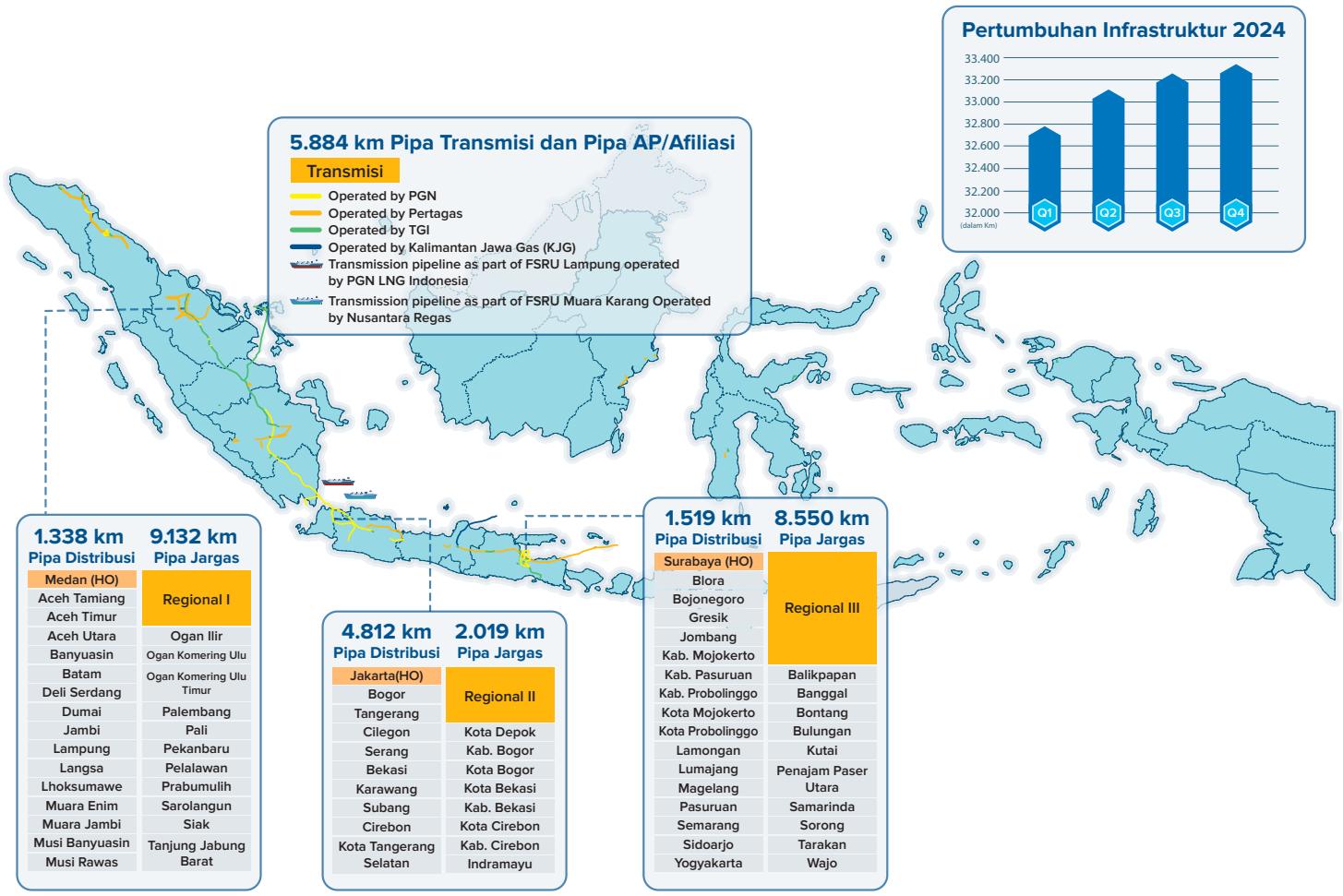

Dalam Kilometer | In Kilometers

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Distribusi | Distribution						
Region I						Region I
Medan	692	676	661	655	649	Medan
Pekanbaru	15	15	15	15	15	Pekanbaru
Batam	193	185	171	166	164	Batam
Dumai	81	80	70	68	67	Dumai
Palembang	219	202	195	194	193	Palembang
Lampung	138	135	100	98	98	Lampung
Region II						Region II
Jakarta	930	913	782	754	759	Jakarta
Bogor	740	736	660	657	645	Bogor
Tangerang	1413	1.090	512	505	482	Tangerang
Cilegon	195	135	124	124	124	Cilegon
Bekasi	724	595	495	487	459	Bekasi
Karawang	348	266	230	216	213	Karawang
Cirebon	461	461	433	414	408	Cirebon
Region III						Region III
Sidoarjo	433	425	422	419	413	Sidoarjo
Pasuruan	225	221	217	217	216	Pasuruan
Surabaya	661	635	604	606	600	Surabaya
Semarang	195	97	23	18	18	Semarang
Bojonegoro	1	1	-	-	-	Bojonegoro
Tarakan	-	-	-	-	-	Tarakan
Bangai	2	2	-	-	-	Bangai
Sorong	1	1	-	-	-	Sorong
Total Distribusi	**7.669**	**6.872**	**5.715**	**5.613**	**5.525**	**Total Distribution**
Transmisi | Transmission						
Transmisi Medan	37	37	37	37	37	Medan Transmission
Grissik Duri	536	536	536	536	536	Grissik Duri
Grissik-Batam-Singapore	469	469	469	469	469	Grissik-Batam-Singapore
SSWJ	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	SSWJ
LNG Jakarta[*)]	15	15	15	15	15	LNG Jakarta
LNG Lampung[*)]	21	21	21	21	21	LNG Lampung
Kepodang-Tambak Lorok	201	201	201	201	201	Kepodang-Tambak Lorok
Total Transmisi	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**2.286**	**Total Transmission**
Pertagas | Pertagas						
Pipa Gas	2.993	2.930	2.896	2.615	2.526	Gas Pipe
Pipa Minyak	605	605	629	262	262	Oil Pipe
Total Pertagas	**3.598**	**3.535**	**3.525**	**2.877**	**2.788**	**Total Pertagas**
Total Infrastruktur Subholding Gas	**13.553**	**12.693**	**11.525**	**10.776**	**10.599**	**Total Gas Subholding Infrastructure**
Jargas Pemerintah[**)]	**19.701**	**19.651**	**14.326**	**11.795**	**2.964**	**Government City Gas Network**
Total Pengelolaan Jaringan Pipa	**33.254**	**32.344**	**25.851**	**22.571**	**13.563**	**Total Management of Pipeline Network**

[*)] Pipa transmisi sebagai bagian fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG
Transmission pipeline as part of LNG receiving and regasification terminal facilities

[**)] Jargas Pemerintah terdiri dari Jaringan gas yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jaringan gas yang merupakan Barang Milik Negara yang telah diinbrengkan kepada Pertamina sebagai Penambahan Penyertaan Modal Negara melalui PP 50 tahun 2020 dan PP 48 tahun 2023. Sejak tahun 2015, Jargas Pemerintah tersebut dikelola operasionalnya oleh PGN Group
Government City Gas Network consists of gas networks built using the State Budget and gas networks that are State Property that have been transferred to Pertamina as Additional State Capital Participation through PP 50 of 2020 and PP 48 of 2023. Since 2015, the Government City Gas Network has been managed operationally by PGN Group

SUMP TANK 2
52-V-2110
PERHATIAN

KINERJA SAHAM

Stock Performance

Pergerakan saham PGN dengan kode saham PGAS yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024, dibuka berada pada level Rp1.130. Kinerja saham PGAS meningkat sebesar 40,7% jika dibandingkan dengan harga penutupan pada periode tahun lalu. Harga saham PGAS berada pada titik terendah sebesar Rp 1.090 pada 1 Maret 2024 dan harga tertinggi tercatat sebesar Rp1.700 pada 26 Agustus 2024. PGAS masuk ke dalam beberapa indeks seperti LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, BISNIS-27, Sminfra18, Investor 33, IDXVESTA28, ISSI, JII, JII70, IDX-MES BUMN 17, IDXSHAGROW, IDX BUMN 20, IDX SMC Liquid, IDX SMC Composite, IIDX LQ 45 Low Carbon Leaders, IDX Value 30, Main Board Index/MBX. Likuiditas saham PGAS sangat tinggi dengan rata-rata volume perdagangan harian mencapai 470 ribu lot selama 2024. Sampai dengan 31 Desember 2024, PGAS ditutup pada harga sebesar Rp1.590 dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp38.544 miliar.

In 2024, the movement of PGN shares with ticker code PGAS listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) was opened at the level of Rp1,130. The performance of PGAS's shares increased by 40.7% compared to the closing price in the previous period. Its share price was at the lowest point of Rp1,090 on March 1, 2024, and the highest price was recorded at Rp1,700 on August 26, 2024. PGAS is included in several indices such as LQ 45, IDX 30, IDX 80, Kompas 100, BISNIS-27, Sminfra18, Investor 33, IDXVESTA28, ISSI, JII, JII70, IDX-MES BUMN 17, IDXSHAGROW, IDX BUMN 20, IDX SMC Liquid, IDX SMC Composite, IIDX LQ 45 Low Carbon Leaders, IDX Value 30, Main Board Index/MBX. The liquidity of PGAS shares is very high, with an average daily trading volume of 470 thousand lots in 2024. On December 31, 2024, PGAS was closed at Rp1,590 with a market capitalization value of Rp38,544 billion.

INFORMASI KINERJA SAHAM 5 TAHUN TERAKHIR

Information of Stock Performance within the Past 5 Years

Uraian		2024	2023	2022	2021	2020	Description
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)		24.242	24.242	24.242	24.242	24.242	Number of Outstanding Shares (million shares)
Kapitalisasi Pasar (RpTriliun)	Q4	39	27	43	33	40	Market Capitalization (trillion Rp)
	Q3	35	33	37	29	22	
	Q2	37	32	39	24	28	
	Q1	33	33	34	32	19	
Volume Perdagangan Rata-rata (Lot)	Q4	376.797	391.958	562.979	1.661.361	2.100.650	Average Trading Volume (lot)
	Q3	466.460	572.466	1.143.847	1.122.143	1.179.820	
	Q2	562.850	605.447	1.305.070	1.267.694	1.984.197	
	Q1	491.481	397.913	866.224	2.409.008	766.208	
Harga Saham Tertinggi (Rp)	Q4	1.665	1.420	1.995	1.640	1.895	Highest Share Price (Rp)
	Q3	1.700	1.535	1.990	1.215	1.350	
	Q2	1.650	1.475	1.860	1.345	1.185	
	Q1	1.385	1.770	1.620	1.315	2.200	
Harga Saham Terendah (Rp)	Q4	1.430	1.060	1.720	1.205	920	Lowest Share Price (Rp)
	Q3	1.435	1.310	1.500	960	905	
	Q2	1.275	1.295	1.325	995	730	
	Q1	1.090	1.325	1.260	1.290	605	
Harga Saham Penutupan (Rp)	Q4	1.590	1.130	1.760	1.375	1.655	Closing Share Price (Rp)
	Q3	1.435	1.375	1.535	1.190	925	
	Q2	1.540	1.305	1.590	1.005	1.135	
	Q1	1.360	1.380	1.405	1.315	775	

RASIO SAHAM
Stock Price Ratios

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Earning per Share (USD)	0,01	0,01	0,01	0,01	(0.01)	Earning per Share (Rp)
Price to Earning (x)	7,03	6,38	8,31	7,69	(10,74)	Price to Earning (x)
Price to Book Value (x)	0,65	0,50	0,79	0,71	0,96	Price to Book Value (x)
Return on Equity (%)	9,24	7,85	9,48	9,25	(8,96)	Return on Equity (%)
Dividend Payout Ratio (%)	80,00%	70,00%	67,79%	0,00%	100,00%	Dividend Payout Ratio (%)
Dividend Yield (%)	10,46%	9,73%	7,01%	0,00%	1,85%	Dividend Yield (%)

GRAFIK HARGA PENUTUPAN DAN VOLUME PERDAGANGAN RATA-RATA PERIODE 2020-2024
Graphic of Average Trading Volumes and Closing Price for Period of 2020-2024

Lot | Lot

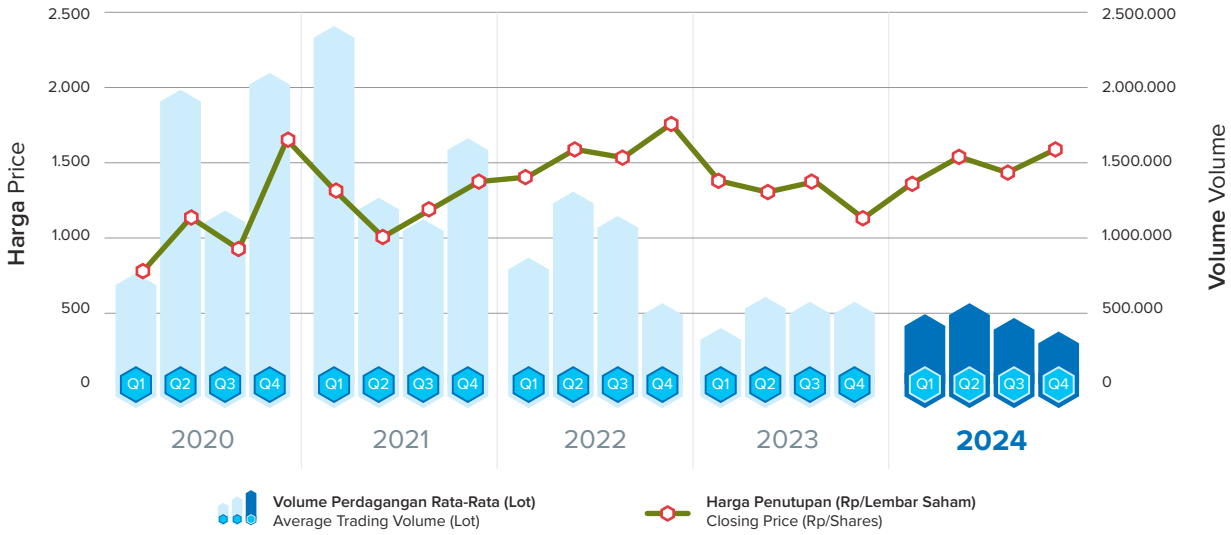

KAPITALISASI PASAR
Market Capitalization

Rp Triliun | Rp Trillion

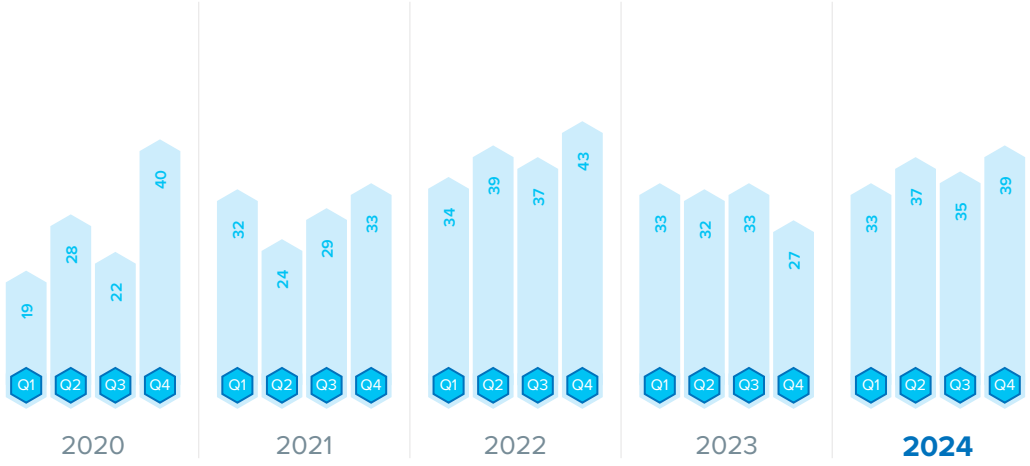

AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2024, PGN tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal. PGN juga tidak mencatatkan realisasi atas rencana aksi korporasi lainnya seperti penjualan aset, penerbitan surat utang, setoran modal, dan lainnya yang terjadi pada tahun 2024.

CORPORATE ACTION

During 2024, PGN undertook no corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital additions and reductions. Furthermore, PGN also did not record the realization of other corporate action plans, such as asset sales, issuance of debt securities, capital deposits, and others that occurred in 2024.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM/PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak terdapat penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) saham PGAS.

TEMPORARY SUSPENSION OF SHARES TRADING/ DELISTING OF SHARES

As of the end of the financial year on 31 December 2024, there were no suspension and/or delisting of PGAS shares.

KINERJA OBLIGASI

Bond Performance

PERINGKAT KREDIT OBLIGASI PGN 2023-2024

PGN Bond's Price Credit Rating 2023-2024

Jenis Efek Type	Nilai Per 1 Januari 2024 Value as of January 1, 2024	Tingkat Bunga Interest Rates	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Kredit 2023-2024 Credit Rating 2023-2024					Nilai Per 31 Desember 2024 Value as of December 31, 2024
				Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	2024		2023		
					Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
PGN *Senior Unsecured Fix Rate Notes*	USD396.709.000	5,125%	16 Mei 2024 May, 16 2024	Moodys	Baa2	*Stable*	Baa2	*Stable*	USD 0
				Fitch	BBB-	*Stable*	BBB-	*Stable*	

PERGERAKAN OBLIGASI PGN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

PGN Bond's Movement within the Past Five Years

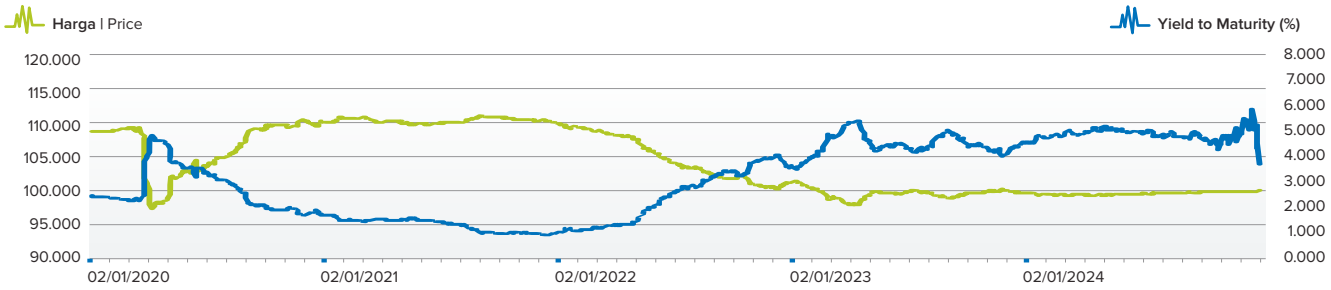

PERINGKAT KREDIT OBLIGASI SEI 2023-2024

SEI Bond's Price Credit Rating 2023-2024

Jenis Efek Type	Nilai Per 1 Januari 2024 Value as of January 1, 2024	Tingkat Bunga Interest Rates	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Kredit 2023-2024 Credit Rating 2023-2024					Nilai Per 31 Desember 2024 Value as of December 31, 2024
				Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	2024		2023		
					Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
SEI *Senior Unsecured Fix Rate Notes*	USD156.252.000	4,450%	5 Mei 2024 May, 5 2024	Moodys	B2	*Stable*	B2	*Stable*	USD 0
				Fitch	B+	*Stable*	B+	*Stable*	

PERGERAKAN OBLIGASI SEI DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

SEI Bond's Movement within the Past Five Years

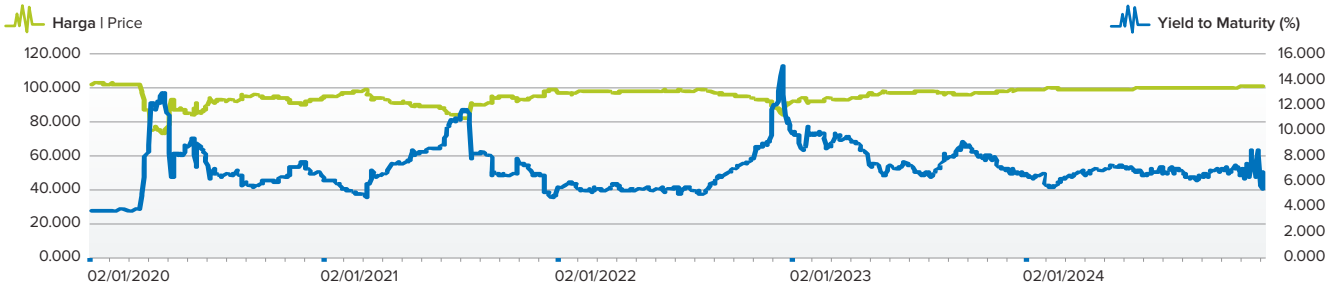

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

PENGHARGAAN

Awards

ALPHA SOUTHEAST ASIA 14th INSTITUTIONAL INVESTOR CORPORATE AWARDS 2024

Alpha Southeast Asia 14th Institutional Investor Corporate Awards 2024

Oleh Alpha Southeast Asia
By Alpha Southeast Asia

PGN menerima beberapa penghargaan dari Alpha Southeast Asia 14th Institutional Investor Corporate Awards 2024 diantaranya adalah:
1. Best Senior Management IR Support (Top 4)
2. Most Consistent Dividend Policy (Top 4)
3. Top 4 Best Strategic CSR (Top 4)

PGN received several awards from Alpha Southeast Asia 14th Institutional Investor Corporate Awards 2024 including:
1. Best Senior Management IR Support (Top 4)
2. Most Consistent Dividend Policy (Top 4)
3. Top 4 Best Strategic CSR (Top 4)

ASIAN IMPACT AWARDS 2024

Asian Impact Awards 2024

La Tofi School of Social Responsibility (LSSR) dan PORTMAN College (Malaysia)
By La Tofi School of Social Responsibility (LSSR) and PORTMAN College (Malaysia)

PGN berhasil melaksanakan program CSR yang mencerminkan ESG – *Environmental, Social, Governance*, dengan menguji dampak program CSR berdasarkan kriteria penilaian dari *Asian Impact Awards 2024.*

PGN memperoleh 4 penghargaan *Platinum CSR Leading Impact Awards* yang merupakan penghargaan tertinggi pada *Asian Impact Awards 2024*, dan 3 penghargaan untuk *CSR Leader Impact Awards.* Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha dari PGN juga menerima 4 penghargaan *Platinum CSR Leading Impact Awards* dan 2 penghargaan *CSR Leader Impact Awards.*

PGN successfully implemented CSR programs that reflect ESG – Environmental, Social, Governance, by testing the impact of the CSR program based on the assessment criteria of the 2024 Asian Impact Awards.

On the same occasion, PT Pertamina Gas (Pertagas) as a subsidiary of PGN also received 4 Platinum CSR Leading Impact Awards and 2 CSR Leader Impact Awards.

ARC AWARDS

ARC Awards

Oleh MerComm
By MerComm

PGN berhasil memenangkan dalam 2 kategori:
- *Bronze Winner in the category/class: Chairman's/President's Letter-Energy*
- *Honors Winner in the category/class: Traditional Annual Report-Energy.*

PGN successfully won in 2 categories:
- Bronze Winner in the category/class: Chairman's/President's Letter-Energy
- Honors Winner in the category/class: Traditional Annual Report-Energy.

ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARD (AREA) 2024 DAN INTERNATIONAL CSR & SUSTAINABILITY (ICS)

Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2024 and International CSR & Sustainability (ICS)

Oleh Enterprise Asia
By Enterprise Asia

PT Pertagas meraih penghargaan *Green Leadership* Tingkat Asia atas komitmennya dalam menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penghargaan ini diterima dalam *Awarding Night Asia Responsible Enterprise Awards* (AREA) 2024 dan *International* CSR & *Sustainability* (ICS) *Summit* 2024 di Hilton Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam.

PT Pertagas received the Asia Green Leadership award for its commitment to implementing environmentally sustainable and responsible business practices. This award was received at the 2024 Awarding Night Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) and the International CSR & Sustainability (ICS) Summit 2024 at the Saigon Hilton, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING (ASRRAT) 2024

2024 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)

Oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR)
By National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Ajang *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT) 2024 menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis berkelanjutan. Diikuti oleh 70 organisasi dari berbagai sektor, ASRRAT 2024 menilai laporan keberlanjutan berdasarkan standar internasional dan regulasi OJK.

The 2024 Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) event highlights transparency and accountability in sustainable business. Attended by 70 organizations from various sectors, the 2024 ASRRAT assesses sustainability reports based on international standards and OJK regulations.

BIXPO AWARDS 2024

2024 BIXPO Awards

Oleh International Federation of Inventors' Associations (IFIA)
By International Federation of Inventors' Associations (IFIA)

PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatatakan prestasi internasional dengan meraih penghargaan di Bitgram *International Exposition of Electric Power Technology* (BIXPO) *Awards* 2024. Pertagas sukses meraih *Gold Prize* untuk inovasi perwira pertagas dari gugus *Continuos Improvement Program* (CIP) PC Prove Kopi 89 dan *Silver Prize* serta *Special Awards* dari Pemerintah Korea Selatan untuk inovasi gugus PC Prove Alon-Alon Asal Klakon.

PT Pertamina Gas (Pertagas) recorded an international achievement by winning an award at the 2024 Bitgram International Exposition of Electric Power Technology (BIXPO) Awards. Pertagas received the Gold Prize for the innovation of Pertagas employees from the PC Prove Kopi 89 Continuos Improvement Program (CIP) group, as well as the Silver Prize and Special Awards from the South Korean Government for the innovation of the PC Prove Alon-Alon Asal Klakon group.

STEVIE AWARDS

Stevie Awards

Oleh Stevie International
By Stevie International

PGN meraih penghargaan internasional *Bronze Winner Stevie Awards* dengan kategori *Best Annual Report – Publicly Held Corporations. Stevie Awards* digelar setiap tahun oleh International Business Awards, PGN mengikutsertakan *Annual Report* (AR) 2023 yang mengangkat tema "*Strengthening Presence*".

PGN received the international Bronze Winner Stevie Awards in the Best Annual Report – Publicly Held Corporations category. The Stevie Awards are held annually by the International Business Awards, PGN submitted its 2023 Annual Report (AR) with "Strengthening Presence" as the theme.

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2024

STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS 2024

Oleh Stevie International
By Stevie International

Dilaksanakan Stevie International untuk perusahaan di seluruh dunia. PGN meraih *Utility Company of The Year*.

Organized by Stevie International for companies worldwide. PGN received the Utility Company of The Year.

WORLD BRANDING AWARDS

World Branding Awards

Oleh World Branding Forum
By World Branding Forum

PGN meraih penghargaan internasional dari ajang bergengsi *World Branding Awards*, London, UK. Penghargaan *Brand of The Year* dalam Kategori Energi mengapresiasi brand jaringan gas bumi rumah tangga, GasKita.

PGN received an international award from the prestigious World Branding Awards, London, UK. The Brand of The Year Award in the Energy Category recognized Gaskita, the household natural gas network brand.

WORLD SAFETY ORGANIZATION (WSO) INDONESIA-PAKISTAN SAFETY CULTURE AWARD (WISCA-WPSCA) 2024

World Safety Organization (WSO) Indonesia-Pakistan Safety Culture Award (WISCA-WPSCA) 2024

Oleh World Safety Organization (WSO)
By World Safety Organization (WSO)

WSO Indonesia-Pakistan *Safety Culture Award* (WISCA-WPSCA) merupakan penghargaan yang diberikan pada perusahaan yang menerapkan nilai – nilai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kuat.

- PT Nusantara Regas meraih kategori bintang 4
- PT PGN Solution meraih kategori *Gold* bintang 4
- PT Pertagas meraih kategori *Gold*

WSO Indonesia-Pakistan Safety Culture Award (WISCA-WPSCA) is an award for companies that implement strong Occupational Safety and Health (OSH) values.

- PT Nusantara Regas received the 4 star category
- PT PGN Solution received the 4-star Gold category
- PT Pertagas received the Gold category

CSR DAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN (PDB) AWARDS 2024

2024 CSR and Sustainable Village Development (PDB) Awards

Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)
By Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendes PDTT)

PGN – Pagardewa dan Pertagas meraih 5 penghargaan bergengsi di Ajang CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan (PDB) Award 2024. Prestasi ini mendorong PGN untuk terus berkontribusi pada pembangunan inklusif dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

PGN – Pagardewa and Pertagas received 5 prestigious awards at the 2024 CSR and Sustainable Village Development (PDB) Awards. This achievement encourages PGN to continue contributing to inclusive and environmentally friendly development for the community.

CSR EXCELLENCE AWARDS 2024

2024 CSR Excellence Awards

Oleh First Indonesia Magazine
By First Indonesia Magazine

PT Nusantara Regas meraih penghargaan Indonesia CSR Excellence Awards 2024. PT Nusantara Regas berdedikasi dalam menjalankan program CSR yang berkualitas dan berdampak positif untuk masyarakat dan lingkungan operasional perusahaan selama tahun 2023.

PT Nusantara Regas received the 2024 Indonesia CSR Excellence Awards. PT Nusantara Regas is dedicated to implementing high-quality CSR programs that have a positive impact on the community and the Company's operational environment during 2023.

CSR INDONESIA AWARDS 2024

2024 CSR Indonesia Awards

Oleh CSR-INDONESIA.COM
By CSR-INDONESIA.COM

CSR Indonesia Awards diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program CSR terbaik, dengan beragam kategori penghargaan, berdasarkan jenis program CSR yang dijalankan.

1. PGN Solution meraih tiga penghargaan, yaitu:
   - Reka Karsa Sosial untuk kategori CSR di bidang sosial.
   - Bangun Karsa Rupa untuk CSR dukungan korban bencana.
   - Didaktika Pratama Unggul untuk CSR di bidang pendidikan.
2. PT Nusantara Regas: program CSR unggulan PT Nusantara Regas, Muke Bule (Muara Angke Budidaya Lele), yang telah memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar Muara Angke melalui paket program budidaya lele.

The CSR Indonesia Awards are given to companies that have implemented the best CSR programs, with various award categories, based on the type of CSR program implemented.

1. PGN Solution received three awards, namely:
   - Reka Karsa Sosial for the CSR category in the social sector.
   - Bangun Karsa Rupa for CSR support for disaster victims.
   - Didaktika Pratama Unggul for CSR in the field of education.
2. PT Nusantara Regas: PT Nusantara Regas' flagship CSR program, Muke Bule (Muara Angke Catfish Cultivation), which has contributed to empowering local communities around Muara Angke through catfish cultivation program packages.

ESG NUSANTARA PLAUDIT 2024

2024 ESG Nusantara Plaudit

Oleh La Tofi School of Social Responsibility
By La Tofi School of Social Responsibility

PT Pertagas meraih penghargaan atas kinerja unggul dalam menerapkan prinsip ESG melalui inisiasi program yang positif dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada SDGs.

PT Pertagas achieved this award for superior performance in the implementation of ESG principles through the initiation of positive and sustainable programs for the environment and Indonesian society that refer to the SDGs.

INDONESIA BEST COMPANIES IN HSE IMPLEMENTATION 2024

Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2024

Oleh Majalah SWA Network
By SWA Network Magazine

PT Nusantara Regas meraih penghargaan *Best Companies in HSE Implementation* yang diselenggarakan. Nusantara Regas berhasil mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan dengan baik, dan meraih nilai *Very Good.*

PT Nusantara Regas received the Best Companies in HSE Implementation Award. Nusantara Regas successfully implemented the Occupational Safety and Health Management System (OSH Management System) in the Company properly, and achieved a Very Good score.

INDONESIA GREEN AWARD (IGA) 2024

2024 Indonesia Green Award (IGA)

Oleh La Tofi School of Social
By La Tofi School of Social

PT Pertagas meraih dua penghargaan di ajang Indonesia Green Award (IGA) 2024. Penghargaan diraih Pertagas OCSA melalui kategori pengorganisasian tanggung jawab sosial Perusahaan dengan program Tempat Wisata Ramah dan Sadar Lingkungan "Embung Senja" mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat dan menjadi destinasi wisata Desa Gajah Mati Kabupaten Musi Banyuasin.

PT Pertagas received two awards at the 2024 Indonesia Green Award (IGA) event. The award was received by Pertagas OCSA in the category of organizing corporate social responsibility with the program of Friendly and Environmentally Conscious Tourist Destination "Embung Senja", which was able to provide an impact on increasing the community's economy and become a tourist destination at the Gajah Mati Village, Musi Banyuasin Regency.

INDEKS INTEGRITAS BISNIS LESTARI

Indeks Integritas Bisnis Lestari

Oleh Tempo Data Science
By Tempo Data Science

PGN mendapat apresiasi Indeks Integritas Bisnis Lestari 2024, kategori Ruby dalam penilaian indeks Aspek Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Score Indeks 75 – 84). PGN dinilai sebagai perusahaan yang telah mengintegrasikan prinsip penghormatan pada hak asasi manusia ke dalam program sosialnya untuk publik serta pemangku kepentingan dengan baik.

PGN received appreciation for its 2024 Sustainable Business Integrity Index, which falls into the Ruby category in the Business and Human Rights Aspects index assessment (Index Score of 75 – 84). PGN is considered to be a Company that has successfully integrated the principle of respect for human rights into its social programs for the public and stakeholders.

INDONESIA SAFETY EXCELLENCE AWARDS 2024

2024 Indonesia Safety Excellence Awards

Oleh First Indonesia
By First Indonesia

PGN Group meraih penghargaan 13 penghargaan utama di ajang Indonesia Safety Excellence Award 2024. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen PGN Group terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang kuat di setiap aktivitas operasional. Budaya K3 tertanam menjadi landasan utama untuk menjamin kehandalan penyaluran energi di seluruh wilayah operasi perusahaan.

PGN Group won 13 main awards at the 2024 Indonesia Safety Excellence Award. This achievement is clear evidence of PGN Group commitment to occupational safety and health (OSH) through the implementation of a strong OSH culture in every operational activity. The embedded OSH culture is the main foundation for ensuring the reliability of energy distribution throughout its operational areas.

INDONESIAN SOCIAL RESPONSIBILITY AWARDS (ISRA) 2024

Indonesian Social Responsibility Awards (ISRA) 2024

Oleh Indonesia Social Responsibility Award (ISRA)
By Indonesia Social Responsibility Award (ISRA)

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil menjalankan program CSR dan berkontribusi terhadap 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

- PGN Cimanggis (*Silver*)
- PGN Panaran (*Silver*)
- PGN SOR III (*Bronze*)
- Pertagas: Perisai Jaga Bumi, Kidung Tanggulangin, dan Permata Borneo.

This award is given to companies that have successfully implemented CSR programs and contributed to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

- PGN Cimanggis (Silver)
- PGN Panaran (Silver)
- PGN SOR III (Bronze)
- Pertagas: Perisai Jaga Bumi, Kidung Tanggulangin, and Permata Borneo.

OSH ASIA'S SUMMIT 2024

OSH Asia's Summit 2024

Oleh Majalah First Indonesia
By First Indonesia Magazine

OSH Asia's Summit 2024 merupakan konferensi global terkemuka yang didedikasikan untuk mempromosikan dan memajukan praktik keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh industri. Pada ajang tersebut, PGN Solution berhasil meraih nominasi:

1. *The Best OSH in Oil & Gas Category*
2. *Excellence in Safety Application Program*
3. *The Best Program in Conscientious Effort in Maintaining Safety with Zero Accident Goals.*

OSH Asia's Summit 2024 is a leading global conference dedicated to promoting and advancing occupational safety and health practices across industries. At the event, PGN Solution successfully received a nomination for:

1. The Best OSH in Oil & Gas Category
2. Excellence in Safety Application Program
3. The Best Program in Conscientious Effort in Maintaining Safety with Zero Accident Goals.

PENGHARGAAN ENSIA (ENVIRONMENTAL & SOCIAL INNOVATION AWARDS)

ENSIA (Environmental & Social Innovation Awards)

Oleh Sucofindo
By Sucofindo

SOR II PT PGN Tbk. dianugerahi Penghargaan ENSIA pada tahun 2024 pada kategori Inovasi Lingkungan dengan Topik 3R Limbah Padat Non B3 untuk Program Enzymis, yaitu Program produksi eco-enzyme dengan pemanfaatan kembali sampah organik melalui kegiatan kolaborasi Stasiun Gas Cimanggis II dengan warga Kelurahan Harjamukti.

SOR II PT PGN Tbk. received the ENSIA Award in 2024 in the Environmental Innovation category with the Topic of 3R Non-B3 Solid Waste for the Enzymis Program, namely an eco-enzyme production program by reusing organic waste through collaborative activities between the Cimanggis II Gas Station and residents of Harjamukti Village.

PENGHARGAAN FORTUNE INDONESIA SUMMIT 2024

2024 Fortune Indonesia Summit Award

Oleh IDN Times
By IDN Times

PGN mendapatkan penghargaan ini atas komitmen besar pada program ESG (*Environmental, Social, and Governance*) atau aksi korporasi yang bertujuan memberikan dampak positif kepada para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, masyarakat, karyawan, lingkungan, dan lainnya.

PGN received this award for its strong commitment to the ESG (Environmental, Social, and Governance) program or corporate actions aimed at providing a positive impact on stakeholders, including consumers, communities, employees, the environment, and others.

PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS

Oil and Gas Safety Award

Oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia
By Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

PGN Group memboyong 18 Penghargaan Keselamatan Migas 2024 yang terdiri atas Patra Nirbhaya Karya dan Patra Karya Raksa dari Kementerian ESDM RI. Hal ini menunjukkan PGN merealisasikan komitmennya dalam mengutamakan keselamatan kerja serta menjaga jam kerja aman secara maksimal dari tahun ke tahun.

PGN Group brought home 18 2024 Oil and Gas Safety Awards consisting of Patra Nirbhaya Karya and Patra Karya Raksa from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources. The feat shows that PGN is delivering on its commitment to place priority on work safety and maintaining maximum safe working hours over the years.

PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Occupational Safety and Health (OSH) Award

Oleh Kementerian Tenaga Kerja RI
By Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

PGN Group meraih Penghargaan K3 2024 setelah melalui serangkaian penilaian ketat terkait implementasi budaya K3 di lingkungan kerja perusahaan.

PGN Group received the the 2024 OSH Awards after going through a series of strict assessments related to the implementation of OSH culture within the Company.

PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI ACEH 2024

2024 Aceh Province Occupational Safety and Health Award

Oleh Pemerintah Provinsi Aceh
By Aceh Provincial Government

Perta Arun Gas (PAG) mendapat Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja mobilisasi Penduduk Aceh (Disnakermobduk Aceh). PAG menjadi salah satu dari 65 perusahaan di Aceh yang menerima penghargaan tersebut.

Perta Arun Gas (PAG) received the Safety and Health (OSH) Award organized by the Aceh Population Mobilization Manpower Office (Disnakermobduk Aceh). PAG is one of 65 companies in Aceh that received the award.

PENGHARGAAN TRANSPARANSI DAN PENURUNAN EMISI KORPORASI TERBAIK 2024

Best Corporate Transparency and Emission Reduction Awards 2024

Oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation & Investortrust
By Bumi Global Karbon (BGK) Foundation & Investortrust

PGN meraih penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024. BGK Foundation melakukan penilaian berdasarkan laporan keberlanjutan perusahaan, serta mengacu pada GHG Protocol salah satu standar global yang digunakan banyak lembaga di banyak negara untuk mengevaluasi kemajuan penerapan program penurunan emisi korporasi.

PGN received the 2024 Best Corporate Emission Reduction Transparency Awards. The BGK Foundation conducted an assessment based on the Company's sustainability report, and referred to the GHG Protocol, one of the global standards used by many institutions in many countries to evaluate the progress of corporate emission reduction program implementation.

TOP CSR AWARDS 2024

TOP CSR Awards 2024

Oleh Top Business
By Top Business

PGN Group meraih penghargaan *Top CSR Awards 2024* dalam beberapa kategori atas komitmen menjalankan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat, lingkungan dan berkelanjutan.

PGN Group received the Top CSR Awards 2024 in several categories for its commitment to carrying out activities that have an impact on society, the environment, and sustainability.

URBAN FARMING CHAMPION (UFC) 2024 KOTA SEMARANG

Urban Farming Champion (UFC) 2024 Kota Semarang

Oleh Pemerintah Kota Semarang
By Semarang City Government

Mitra Binaan Saka Energi Muriah Limited Kelompok Tani Tambakrejo memperoleh Juara I Urban Farming Champion (UFC) 2024 Kota Semarang untuk kategori Kelompok Tani. Kelompok Tani (KT) Tambakrejo merupakan Mitra Binaan SEML bekerja sama dengan LPPM Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Saka Energi Muriah Limited's Fostered Partner, Tambakrejo Farmers Group, received the First Place in the 2024 Urban Farming Champion (UFC) in Semarang City for the Farmers Group category. Tambakrejo Farmers Group (KT) is a SEML Fostered Partner in collaboration with the LPPM of Universitas Negeri Semarang (UNNES).

ANUGERAH BUMN 2024

2024 BUMN Award

Oleh Media BUMN Track
By SOE Media Track

Atas visi jangka panjang dalam memimpin arah perkembangan bisnis PGN ke depan, Anugerah BUMN 2024 menobatkan Direktur Utama PT PGN Tbk sebagai *The Best CEO Visionary Leadership* kategori CEO BUMN & Anak Perusahaan BUMN Tbk.

Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN juga mendapatkan apresiasi pada Anugerah BUMN 2024 Tahun Ke-13 yaitu:
1. PT PGN Solution
2. PT PGN Telekomunikasi Indonesia (PGNCOM).

For the long-term vision in leading the direction of PGN's future business development, the 2024 BUMN Award named the President Director of PT PGN Tbk as The Best CEO Visionary Leadership in the CEO of SOE & Subsidiary of Publicly Listed SOE category.

PGN's Subsidiaries and Affiliates also received appreciation at the 13th Annual BUMN Awards 2024, namely:
1. PT PGN Solution
2. PT PGN Telekomunikasi Indonesia (PGNCOM).

APRESIASI MITRA BUMN CHAMPION 2024

2024 SOE Champion Partner Appreciation

Oleh Kementerian BUMN RI
By Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia

PT PGAS Solution (PGN Solution) meraih penghargaan National Champion Terbaik 2, dengan kategori perusahaan Pemasok/Vendor pada ajang Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024. Sebagai anak perusahaan BUMN, PGN Solution terus mendukung program dan operasional BUMN demi mendukung BUMN sebagai pilar perekonomian nasional.

PT PGAS Solution (PGN Solution) received Rank 2nd in the Best National Champion award, in the Supplier/Vendor company category at the 2024 SOE Champion Partner Appreciation event. As a SOE subsidiary, PGN Solution continues to support SOE programs and operations in order to support SOEs as a pillar of the national economy.

BUMN ENTREPRENEURIAL MARKETING AWARDS 2024

BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2024

Oleh MarkPlus, Inc.
By MarkPlus, Inc.

PT PGN Tbk beserta Anak Perusahaan yakni PT PGN Solution meraih BUMN *Entrepreneurial Marketing Award* (BEMA) 2024 yang diselenggarakan. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan Direktur Utama PGN Mas Ivanna Laksmini Devi juga mendapatkan predikat sebagai Dewi BUMN 2024.

PT PGN Tbk and its subsidiary, namely PT PGN Solution, received the 2024 BUMN Entrepreneurial Marketing Award (BEMA), which was organized by PGN. PGN's Director of Strategy and Business Development, Rosa Permata Sari, and PGN's President Director, Mas Ivanna Laksmini Devi, also received the title as the 2024 Dewi BUMN.

FORUM DIGITAL BUMN SUMMIT 2024

2024 BUMN Summit Digital Forum

Oleh Kementerian BUMN RI
By Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia

Saka Energi Indonesia (PGN Saka) juara 3 kategori *Revenue Generation* pada *BUMN Technology Adaptation Award* di acara Forum Digital BUMN Summit 2024 untuk inovasi *iSquare Digital Twin Initiative* dan menjadi perwakilan dari Pertamina Group.

Saka Energi Indonesia (PGN Saka) won 3rd place in the Revenue Generation category at the BUMN Technology Adaptation Award at the 2024 BUMN Summit Digital Forum for the iSquare Digital Twin Initiative innovation and became a representative of the Pertamina Group.

INDONESIA BEST BUMN AWARDS 2024

Indonesia Best BUMN Awards 2024

Oleh Warta Ekonomi
By Warta Ekonomi

PGN mendapatkan penghargaan Indonesia BUMN *Awards* 2024 *for Maintaining Energy Supply Security to Fulfill Customer Needs* kategori Sub-Holding/*Energy, Oil and Gas Industry.* BUMN diharapkan dapat terus menguatkan strategi bisnis sesuai kapabilitasnya dan membangun ekosistem bisnis yang semakin baik.

PGN received the 2024 Indonesia BUMN Award for Maintaining Energy Supply Security to Fulfill Customer Needs in the Sub-Holding/ Energy, Oil and Gas Industry category. The SOEs are expected to continue to strengthen their business strategies according to their capabilities and build a better business ecosystem.

PENGHARGAAN BPH MIGAS 2024

BPH Migas Awards 2024

Oleh BPH Migas
By BPH Migas

PGN meraih tiga penghargaan dalam ajang *BPH Migas Awards* 2024 kategori:
- Badan Usaha Niaga Gas Bumi Terbaik Kategori Besar (kontribusi volume di atas 10 persen)
- Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Kategori Menengah Kecil (kontribusi volume di bawah 10 persen)
- Badan Usaha Penugasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan Volume Terbesar.

Anak Perusahaan/Afiliasi juga meraih *BPH Migas Awards* 2024:
- PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), PT Pertamina Gas dan PT Kalimantan Jawa Gas sebagai Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Terbaik Kategori Besar
- PT Pertamina Gas sebagai Badan Usaha Niaga Gas Bumi Terbaik Kategori Kecil.

PGN received three awards at the 2024 BPH Migas Awards in the following category:
- Best Natural Gas Trading Business Entity in Large Category (volume contribution of 10 percent and above)
- Small Medium Category Natural Gas Transportation Business Entity (volume contribution below 10 percent)
- Business Entity Assigned with Certain Natural Gas Prices (HGBT) with the Largest Volume.

Subsidiaries/Affiliates also received several 2024 BPH Migas Awards:
- PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), PT Pertamina Gas and PT Kalimantan Jawa Gas as the Best Natural Gas Transport Business Entity in the Large Category
- PT Pertamina Gas as the Best Natural Gas Trading Business Entity in the Small Category.

PENGHARGAAN SUBROTO 2024

Subroto Awards 2024

Oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia
By Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

PGN melalui SOR II mendapatkan apresiasi *Subroto Awards 2024* yang merupakan penghargaan tertinggi pada sektor energi dan sumber daya mineral dari Kementerian ESDM dalam kelompok Keselamatan, Keteknikan dan Perlindungan Lingkungan.

Through SOR II, PGN received the 2024 Subroto Awards, which is the highest award in the energy and mineral resources sector from the Ministry of Energy and Mineral Resources in the field of Safety, Engineering and Environmental Protection.

PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN LISTRIK INDONESIA

The Indonesian Electricity Honorary Awards

Oleh Majalah Listrik Indonesia
By Listrik Indonesia Magazine

Atas perannya dalam pemenuhan energi bagi sektor kelistrikkan, PGN memperoleh Penghargaan Tanda Kehormatan Listrik Indonesia. PGN mendapatkan Tanda kehormatan pada kategori Produsen/ Pemasok Energi Atas Komitmennya dalam Mendorong Pemanfaatan Gas di Pembangkit Listrik.

For its role in meeting energy for the electricity sector, PGN received the Indonesian Electricity Honorary Award. PGN received the Honorary Award in the Energy Producer/Supplier category for its Commitment in Encouraging the Use of Gas in Power Plants.

PIALA PERAIH ADITAMA 2024

Piala Peraih Aditama 2024

Oleh Kementerian ESDM
By Ministry of Energy and Mineral Resources

Diberikan pada Malam Apresiasi Kinerja *Stakeholder* EBTKE 2024. PGN Mas-Truntum Gasblock Borobudur Meraih Juara 1 Efisiensi Energi.

Awarded at the 2024 EBTKE Stakeholder Performance Appreciation Night. PGN Mas-Truntum Gasblock Borobudur received 1st Place in Energy Efficiency.

THE 9th PR INDONESIA AWARDS (PRIA) 2024

The 9th PR Indonesia Awards (PRIA) 2024

Oleh PR INDONESIA
By PR INDONESIA

PT Gagas Energi Indonesia mendapatkan *Bronze Winner* - Sektor Anak Usaha BUMN, Kategori *Owned* Media Sub Kategori *Video Profile.*

PT Gagas Energi Indonesia received the category Product Campaign in Multiplatform.

TOP HUMAN CAPITAL AWARDS 2024

2024 TOP Human Capital Awards

Oleh Majalah Top Business
By Top Business Magazine

The 2024 TOP Human Capital Awards (TOP HC Awards) mendorong perusahaan berkontribusi pada tercapainya ketahanan energi nasional melalui pengelolaan SDM yang kompeten dan adaptif.

- PT Nusantara Regas (NR) meraih prestasi tertinggi, Bintang Lima #5
- PT Transgasindo Indoensia (TGI) meraih # *four* (4) *stars* dan *The High Performing Human Capital Director* 2024 (Sahat Simarmata)

The 2024 TOP Human Capital Awards (TOP HC Awards) encourages companies to contribute to achieving national energy security through competent and adaptive HR management.

- PT Nusantara Regas (NR) received the highest achievement, Five Star #5
- PT Transgasindo Indonesia (TGI) achieved # four (4) stars and The 2024 High Performing Human Capital Director (Sahat Simarmata)

7 MOST POPULAR BRAND OF THE YEAR 2024

7 Most Popular Brand of the Year 2024

Oleh Jawa Pos
By Jawa Pos

PGN meraih 7 *Most Popular Brand of the Year* 2024 pada kategori Energi (Migas & Listrik).

PGN received 7 Most Popular Brands of the Year 2024 in the Energy category (Oil, and Gas & Electricity).

BBMA 2024

BBMA 2024

Oleh Marketeers
By Marketeers

PT PGAS Solution (PGN Solution) meraih 2 nominasi penghargaan pada ajang BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) 2024:

- "*Contributing to National Image and Economic Growth*" dengan kategori *GOLD*
- "*Employer & Employee Branding in Building Competent and Agile BUMN Personnel*" dengan kategori *SILVER*.

PT PGAS Solution (PGN Solution) received 2 award nominations at the 2024 BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) event:

- "Contributing to National Image and Economic Growth" with GOLD category
- "Employer & Employee Branding in Building Competent and Agile BUMN Personnel" with SILVER category.

BISNIS INDONESIA AWARDS 2024

Bisnis Indonesia Awards 2024

Oleh Bisnis Indonesia
By Bisnis Indonesia

PGN meraih Kategori Kategori Minyak & Gas dalam Bisnis Indonesia Award 2024 mengusung tema *Agility in Uncertainty*. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia usaha selama lima tahun terakhir, di mana perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan cepat dan efektif untuk tetap bertahan dan berkembang.

PGN received the Oil & Gas Category in the 2024 Bisnis Indonesia Awards with the theme of Agility in Uncertainty. This theme is highly relevant to the global business conditions over the past five years, in which companies must adapt quickly and effectively to continue to survive and thrive.

BEST STOCK AWARDS 2024

Best Stock Awards 2024

Oleh Investortrust.id
By Investortrust.id

Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada *stakeholders* emiten atas kemampuan dalam meraih pertumbuhan kinerja fundamental dan teknikal perusahaan di tengah tantangan ekonomi, serta dapat menjadi referensi tambahan kepada investor dalam mengidentifikasi saham yang berkualitas.

This award is an appreciation to stakeholders of issuers for the ability to achieve fundamental and technical performance growth in the company amidst economic challenges, and can serve as an additional reference for investors in identifying quality stocks.

CONSTRUCTION INDONESIA AWARD 2024

2024 Construction Indonesia Award

Oleh Kementerian PUPR RI
By Ministry of Public Works and Public Administration of the Republic of Indonesia

Construction Indonesia Awards 2024 merupakan salah satu rangkaian acara dari *Indonesia Energy & Engineering Series*, dan merupakan pekan raya perushaan konstruksi nasional dan internasional yang diadakan di Indonesia. Pada ajang tersebut, PGN Solution dianugerahi sebagai "Perusahaan Konstruksi Ramah Lingkungan."

Construction Indonesia Awards 2024 is one of the series of events from the Indonesia Energy & Engineering Series and is a national and international construction company fair held in Indonesia. At the event, PGN Solution was awarded as an "Environmentally Friendly Construction Company."

CSA AWARDS 2024

CSA Awards 2024

Oleh CSA Community & Asosiasi Analis Efek Indonesia
By CSA Community & Indonesian Securities Analysts Association

PGN berhasil meraih predikat sebagai *The Outstanding Contribution on Clean Energy Transition and Stability in Gas Industry.*

PGN successfully obtained the title as The Outstanding Contribution on Clean Energy Transition and Stability in Gas Industry.

DHARMA KARYA MUDA

Dharma Karya Muda

Oleh Kementerian ESDM RI
By Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

- Saka Indonesia Pangkah Limited mendapatkan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral 2024 kategori MUDA untuk inovasi PGN Saka berupa optimasi produksi LPG dengan Instalasi LPG Plant Recycle Line di Area LPG Processing Facility (LPGF) yang berlokasi di Onshore Processing Facility (OPF) Gresik
- Pertagas menerima Penghargaan Dharma Karya atas inovasi tim Operation Rokan Area melalui alat MAC NING. Alat ini meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi paparan minyak mentah dan menghemat biaya operasional hingga Rp519 juta, dengan biaya pembuatan hanya Rp36,9 juta.

- Saka Indonesia Pangkah Limited received the 2024 Dharma Karya Energy and Mineral Resources Award in the MUDA category for PGN Saka's innovation in the form of optimizing LPG production with the LPG Plant Recycle Line installation in the LPG Processing Facility (LPGF) Area located at the Gresik Onshore Processing Facility (OPF)
- Pertagas received the Dharma Karya Award for the innovation of the Operation Rokan Area team through the MAC NING tool. This tool improves work safety by reducing exposure to crude oil and saving operational costs of up to Rp519 million, with a manufacturing cost of only Rp36.9 million.

INDONESIA BEST CMO AWARDS 2024

2024 Indonesia Best CMO Awards

Oleh Warta Ekonomi

By Warta Ekonomi

PT Pertagas mendukung transisi energi melalui infrastruktur andal dengan tagline "*Delivering Reliable Energy.*" Meraih penghargaan Best CMO Awards, Pertagas mengoperasikan 2.993 km pipa gas, 605 km pipa minyak, dan LPG Plant Gresik, berkontribusi pada swasembada energi dan sektor energi berkelanjutan di Indonesia.

PT Pertagas supports energy transition through reliable infrastructure with the tagline "Delivering Reliable Energy." Received the Best CMO Awards, Pertagas operates 2,993 km of gas pipelines, 605 km of oil pipelines, and the Gresik LPG Plant, contributing to energy self-sufficiency and sustainable energy sector in Indonesia.

INDONESIA MOST EXTRAORDINARY WOMEN BUSINESS LEADERS DAN TOP WOMEN BUSINESS LEADERS 2024

Indonesia Most Extraordinary Women Business Leaders dan Top Women Business Leaders 2024

Oleh Majalah SWA
By SWA Magazine

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Rosa Permata Sari dinobatkan sebagai salah satu *Indonesia Most Extraordinary Women Business Leaders* dan *Top Women Business Leaders* 2024. Ajang ini mendukung dan mengapresiasi para pemimpin perempuan yang telah menunjukkan kemampuannya dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai kesuksesan.

The Director of Strategy and Business Development, Rosa Permata Sari, was named as one of Indonesia's Most Extraordinary Women Business Leaders and Top Women Business Leaders in 2024. This event supports and appreciates female leaders who have demonstrated their ability to drive organizations to achieve success.

INDONESIA QUALITY EXCELLENCE FESTIVAL (IQEF) 2024

2024 Indonesia Quality Excellence Festival (IQEF)

Oleh Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI)
By Indonesian Quality Management and Productivity Association (AMMPI)

Komitmen dan inovasi Pertagas dalam pengelolaan manajemen mutu diakui dengan dua penghargaan pada Indonesia *Quality Excellence Festival* 2024. Acara tahunan ini berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen mutu di berbagai sektor industri.

Pertagas' commitment and innovation in quality management was recognized with two awards at the 2024 Indonesia Quality Excellence Festival. This annual event serves as a platform to promote best practices in quality management across various industrial sectors.

LOCAL CHAMPION AWARD 2024

2024 Local Champion Award

Oleh Global Center on Adaption
By Global Center on Adaption

Sutrisno "Petani Jamur Binaan Pertagas meraih penghargaan Local Champion Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan inovasi Sutrisno dalam mengembangkan usaha pertanian jamur yang berkelanjutan di wilayah Kutai Timur.

Sutrisno "Mushroom Farmer Assisted by Pertagas" received the 2024 Local Champion Award. This award was given as a form of recognition to Sutrisno's dedication and innovation in developing sustainable mushroom farming businesses in the East Kutai region.

MARKETEERS OMNI BRAND OF THE YEAR 2024

Marketeers OMNI Brand of the Year 2024

Oleh Marketeers
By Marketeers

PGN meraih kategori *Online - Offline* CX Program

PGN received the Online - Offline CX Program category

OMNI BRAND OF THE YEAR

OMNI Brand of the Year

Oleh Marketeers
By Marketeers

PT Gagas Energi Indonesia meraih kategori *Product Campaign in Multiplatform.*

PT Gagas Energi Indonesia received the category Product Campaign in Multiplatform.

PENGHARGAAN PROKLIM KUTAI TIMUR

Kutai Timur PROKLIM Award

Oleh Pemerintah Kabupaten Kuta Timur
By Kutai Timur Regency Government

Pertagas OKA meraih penghargaan sebagai Perusahaan Pendukung Program Kampung Iklim Tingkat Madya dari Pemkab Kutai Timur atas kontribusinya membina Dusun Batang Bengkal, Desa Martadinata, yang mendapat predikat Kampung Iklim Madya dari KLHK. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Pertagas OKA mendukung peningkatan kualitas lingkungan sesuai tujuan SDGs.

Pertagas OKA received an award as a Supporting Company for the Middle Level Climate Village Program from the Kutai Timur Regency Government for its contribution in developing Batang Bengkal Hamlet, Martadinata Village, which received the title of Middle Climate Village from the Ministry of Environmental Affairs and Forestry. This award demonstrates Pertagas OKA's commitment to supporting environmental quality improvement in accordance with the SDGs goals.

PENGHARGAAN SIDDHAKARYA 2024

2024 Siddhakarya Award

Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
By DKI Jakarta Provincial Government

PT PGAS Solution (PGN Solution) meraih Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. PGN Solution berhasil meraih predikat "Unggul" dalam ajang ini, berkat inovasi dan efisiensi yang diterapkan dalam berbagai aspek operasionalnya.

PT PGAS Solution (PGN Solution) received the 2024 Siddhakarya Productivity Award at the DKI Jakarta Provincial Level. PGN Solution succeeded in achieving the "Excellent" predicate in this event due to the innovation and efficiency applied in various aspects of its operations.

SATYALANCANA PEMBANGUNAN

Satyalancana Pembangunan

Oleh Kementerian ESDM RI
By Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

PGN Solution meraih Penghargaan Satyalancana Pembangunan, dan diberikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Penghargaan ini merupakan suatu bentuk tanda kehormatan atas jasa dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi, untuk penyaluran gas bumi sektor rumah tangga, UMKM, dan komersial dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional.

PGN Solution received the Satyalancana Pembangunan Award, and was given directly by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo through the Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia. This award is a form of honor for services in the development and provision of natural gas network infrastructure, for the distribution of natural gas for households, MSMEs, and commercial sectors to meet national energy needs.

THE BEST CONTACT CENTER INDONESIA 2024

The Best Contact Center Indonesia 2024

Oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA)
By Indonesia Contact Center Association (ICCA)

PGN meraih dua medali silver. Pertama, Kategori *The Best Contact Center Operation* atas inovasi pelayanan pelanggan, dengan memperhatikan proses bisnis, kualitas, dan pengelolaan sumber daya dalam menjalankan operasional *contact center*. Kedua, kategori *The Best Technology Innovation* atas penerapan teknologi CRM, *Analytics, Quality* pada operasional *contact center.*

PGN received two silver medals. First, The Best Contact Center Operation category for customer service innovation, by considering business processes, quality, and resource management in running contact center operations. Second, The Best Technology Innovation category for the application of CRM, Analytics, Quality technology in contact center operations.

TKMPN 2024
(TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIFITAS NASIONAL KE-28)

2024 TKMPN (28th National Quality & Productivity Work Meeting)

Oleh Wahana Kendali Mutu
By Wahana Kendali Mutu

PT Perta Arun Gas mendapatkan penghargaan kategori PCP Seulawah (*Gold*). Ajang ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik melalui sinergi dan kerja sama. Diikuti oleh 231 Perusahaan Se-Indonesia dengan Jumlah 650 Tim (2450 peserta).

PT Perta Arun Gas received the PCP Seulawah (Gold) category award. This event is more than awards, but also about building a better future through synergy and cooperation. Participated by 231 Companies Throughout Indonesia with a Total of 650 Teams (2,450 participants).

TOP DIGITAL AWARDS 2024

2024 TOP Digital Awards

Oleh Majalah ItWorks
By ItWorks Magazine

Ajang penghargaan tahunan di bidang teknologi digital di Indonesia. PT Pertagas meraih:
1. *Top Digital Implementation* 2024 dengan predikat Sangat Baik
2. *Top Leader on Digital Implementation* 2024 untuk Direktur Utama, Gamal Imam Santoso.

Annual award event in the field of digital technology in Indonesia. PT Pertagas won:
1. Top Digital Implementation 2024 with Very Good predicate
2. Top Leader on Digital Implementation 2024 for the President Director, Gamal Imam Santoso.

TOP GRC AWARDS 2024

2024 TOP GRC Awards

Oleh Top Business
By Top Business

1. PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) meraih 3 (tiga) penghargaan TOP GRC Awards 2024.
2. *TOP GRC Awards 2024 #5 Star*
3. *The Most Committed GRC Leader 2024* (Anak Agung Putu Bagus Putra)
4. *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2024.*

1. PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) received 3 (three) awards at the 2024 TOP GRC Awards.
2. TOP GRC Awards 2024 #5 Star
3. The Most Committed GRC Leader in 2024 (Anak Agung Putu Bagus Putra)
4. The High Performing Board of Commissioners on GRC in 2024.

SERTIFIKASI
Certifications

Sertifikat Certificate	Sertifikasi Certification	Diterbitkan oleh Issued by	Masa Berlaku Valid Until
	ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Manajemen Transmisi dan Distribusi Gas Bumi untuk Pelanggan Industri, Komersial, dan Rumah Tangga Natural Gas Transmission and Distribution Management for Industrial, Commercial, and Residential Customers	Lloyd's Register	30 Januari 2027 January 30, 2027
	ISO 37001: 2016 *Management System* Management System	PT LRQA Business Assurance and Inspection Services Indonesia	4 Februari 2027 February 4, 2027
	ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset Asset Management System	BSI Group Indonesia	20 Oktober 2027 October 20, 2027
	ISO 22301:2019 Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis Business Continuity Management System	BSI Group Indonesia	25 November 2027 November 25, 2027
	ISO/IEC 27001: 2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Penyediaan IT Infrastruktur Manajemen Meliputi Pengelolaan EndPoint Device, Data Communication, dan Server Information Security Management System in IT Infrastructure Provision Management Includes Management of EndPoint Devices, Data Communication, and Servers	Bureau Veritas Certification	27 Desember 2026 December 27, 2026

Sertifikat Certificate	Sertifikasi Certification	Diterbitkan oleh Issued by	Masa Berlaku Valid Until
	Risk Maturity Assessment Skor Risk Maturity Index sesuai PER-2 BUMN 3,4 (skala 1-5) "Fase Praktik yang Baik" Risk Maturity Assessment Risk Maturity Index Score according to PER-2 BUMN 3.4 (scale 1-5) "Good Practice Phase"	Indonesia Risk & Business Advisory (IRBA)	9 Desember 2025 December 9, 2025
	Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety Management System (OHS) Award Certificate	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Minister of Manpower of the Republic of Indonesia	6 Agustus 2027 August 6, 2027
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan - PT PGN Tbk Sales and Operation Region I Area Batam Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region I Area Batam	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	6 Desember 2025 December 6, 2025
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengaman - PT PGN Tbk Station Gas Bojonegara Banten Security Management System Audit Certificate - PT PGN Tbk Bojonegara Banten Gas Station	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	9 Desember 2027 December 9, 2027
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT PGN Tbk Sales and Operation Region II Area Tangerang St Gas Bitung 2,3,4 Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region II Area Tangerang St Gas Bitung 2,3,4	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	15 Desember 2026 December 15, 2026
	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan – PT PGN Tbk Sales and Operation Region III ST Gas Semare Jatim Audit Certificate Security Management System - PT PGN Tbk Sales and Operation Region III ST Gas Semare Jatim	Kepolisan Negara Republik Indonesia Indonesian National Police	15 Desember 2026 December 15, 2026

PERISTIWA PENTING 2024

Important Events 2024

JANUARI

January

PGN SALURKAN LNG KE PELANGGAN SMELTER DI SULAWESI TENGGARA

PGN Distributes LNG to Smelter Customers in Southeast Sulawesi

PGN melalui PT Pertagas Niaga ("PTGN") menyalurkan LNG ke pelanggan smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Penyaluran LNG dari Kalimantan Utara ini sebagai realisasi dari Perjanjian Jual Beli LNG dengan Kayan. PTGN menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft sebagai moda transportasi LNG. Proyek ini merupakan pengembangan LNG skala kecil yang pertama di Indonesia.

Through PT Pertagas Niaga ("PTGN"), PGN distributes LNG to smelter customers located in Southeast Sulawesi. The distribution of LNG from North Kalimantan is a realization of the LNG Sales and Purchase Agreement with Kayan. PTGN uses 25 Isotanks measuring 40 ft as the mode of LNG transportation. This is the first small-scale LNG development project in Indonesia.

FEBRUARI

February

PGN *DEAL* JUAL BELI LNG INTERNASIONAL

PGN International LNG Sale and Purchase Deal

PGN laksanakan bisnis jual beli LNG Trading Internasional dengan tujuan negara China. Pengiriman pertama LNG kargo Internasional PGN dikirim ke pasar China sesuai dengan cita-cita *Going Global Business.*

Manuver ini menjadi realisasi ekspansi bisnis global dan diversifikasi bisnis PGN untuk masuk ke dalam bisnis LNG internasional.

PGN carries out the LNG Trading International sale and purchase business with China as the destination. The first shipment of PGN's International LNG cargo was sent to the Chinese market in accordance with the aspirations of Going Global Business.

This maneuver is a realization of PGN's global business expansion and business diversification to enter the international LNG business.

FEBRUARI
February

PGN DAN HOEGH LNG LAMPUNG OPTIMALKAN KERJASAMA KOMERSIAL & PEMANFAATAN FSRU LAMPUNG
PGN and Hoegh LNG Lampung Optimize Commercial Cooperation & Utilization of Lampung FSRU

PT PGN LNG Indonesia ("PLI") selaku Anak Perusahaan PGN dan PT Hoegh LNG Lampung ("HLL") melaksanakan kesepakatan baru untuk lebih mengoptimalkan kerjasama kedua belah pihak dalam pengelolaan Terminal LNG FRSU Lampung. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut proses arbitrase atas Perjanjian Sewa, Operasi dan Pemeliharaan FSRU Lampung ("*LOM Agreement*") yang telah berlangsung sejak beberapa bulan ke belakang.

PT PGN LNG Indonesia ("PLI") as a subsidiary of PGN and PT Hoegh LNG Lampung ("HLL") executed a new agreement to further optimize cooperation between the two parties in managing the Lampung FRSU LNG Terminal. This agreement is a follow-up to the arbitration process over the Lampung FSRU Lease, Operation and Maintenance Agreement ("LOM Agreement") that has been ongoing for the past few months.

FEBRUARI
February

PGN PASOK GAS BUMI KE INDUSTRI KACA DI KIT BATANG
PGN Supplies Natural Gas to Glass Industry in KIT Batang

PGN memasok gas bumi ke pabrik milik KCC Glass Indonesia yang memproduksi kaca lembaran di Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). PGN telah melengkapi infrastruktur distribusi gas bumi di dalam kawasan industri sepanjang 5 Km dari Pipa Transmisi Cisem Tahap I. Penyaluran gas ke KCC Glass berasal dari PEPC Jambaran Tiung Biru dan akan meningkatkan utilisasi dari Pipa Transmisi Cisem Tahap 1.

PGN supplies natural gas to KCC Glass Indonesia's factory that manufactures flat glass in the Batang Integrated Industrial Estate (KIT Batang). PGN has completed the natural gas distribution infrastructure within the industrial estate along 5 km of the Cisem Transmission Pipeline Phase I. Gas distribution to KCC Glass comes from the Jambaran Tiung Biru PEPC and will increase the utilization of the Cisem Transmission Pipeline Phase 1.

MARET
March

PGN DAN CONRAD ENERGY JAJAKI POTENSI PASOKAN GAS BUMI DOMESTIK DARI ACEH
PGN and Conrad Energy Explore Potential Domestic Natural Gas Supply from Aceh

PGN dan Conrad Energy Asia Ltd. kerja sama dalam penyediaan pasokan gas/ LNG dan pengembangan infrastruktur gas/LNG. Adapun potensi tersebut berlokasi di tepi laut Wilayah Aceh dan saat ini masih dalam tahap eksplorasi lebih lanjut.

PGN and Conrad Energy Asia Ltd. cooperate in providing gas/ LNG supply and developing gas/ LNG infrastructure. This potential is located on the coast of Aceh Region and is currently still in further exploration stage.

MARET
March

PGN DAN PIS KERJASAMA INFRASTRUKTUR, MODA MARITIM, & PEMANFAATAN ENERGI BERBAHAN BAKAR RENDAH KARBON

PGN and PIS Cooperate on Infrastructure, Maritime Mode, and Utilization of Low Carbon Energy

PGN dan Pertamina International Shiping (PIS) kerja sama dalam pembangunan, pemanfaatan infrastruktur dan moda pengangkutan maritim. PGN dan PIS mengkaji berbagai potensi bisnis dalam pembangunan, pemanfaatan infrastruktur dan moda pengangkutan maritim yang terkait dengan produk berbahan bakar rendah karbon. Bahan bakar rendah karbon yang dimaksud yaitu CNG, LNG, hydrogen, ammonia atau bahan bakar lainnya untuk kendaraan dan kapal-kapal milik PIS.

PGN and Pertamina International Shipping (PIS) cooperate in the development, utilization of infrastructure and maritime transportation modes. PGN and PIS analyze various business potentials in the development, utilization of infrastructure and maritime transportation modes related to low-carbon fuel products. The low-carbon fuels include CNG, LNG, hydrogen, ammonia, or other fuels for PIS' vehicles and ships.

MEI
May

PGN SUPLAI GAS BUMI 9,49 BBTUD KE PT FREEPORT INDONESIA

PGN Supplies 9.49 BBTUD of Natural Gas to PT Freeport Indonesia

PGN mengoptimasi layanan gas bumi untuk mendukung program hilirisasi dengan menyalurkan gas bumi sampai dengan 9,49 BBTUD kepada PT Freeport Indonesia sektor smelter tembaga. Smelter ini merupakan salah satu tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia untuk saat ini. Gas bumi diperuntukkan pada sektor smelter, acid plant dan PMR.

PGN optimizes natural gas services to support the downstream program by distributing natural gas up to 9.49 BBTUD to PT Freeport Indonesia's copper smelter sector. Currently, this smelter is one of the largest copper processing facilities in the world. Natural gas is intended for the smelter, acid plant and PMR sectors.

MEI
May

PGN LUNCURKAN LAYANAN PEMANFAATAN LNG DOMESTIK UNTUK INDUSTRI

PGN Launches Domestic LNG Utilization Services for Industry

PGN memasuki era baru dalam layanan komoditas *Liquified Natural Gas* (LNG) dalam rangka keberlanjutan pemanfaatan gas bumi domestik. Layanan *beyond pipeline* akan memperkuat integrasi infrastruktur untuk melayani seluruh sektor pelanggan termasuk industri.

Keberminatan pasar akan LNG ini cukup baik, terbukti dengan penyerapan industri pada tahap awal sebesar 15 BBTUD dan akan terus meningkat sesuai *demand* yang ada.

PGN is entering a new era in Liquified Natural Gas (LNG) commodity services in order to sustain the use of domestic natural gas. Beyond pipeline services will strengthen infrastructure integration to serve all customer sectors, including industry.

Market interest in LNG is encouraging, as evidenced by the industry's absorption in the initial stage of 15 BBTUD and will continue to increase according to existing demand.

MEI
May

PGN SAKA RESMI PERPANJANG KONTRAK WK KETAPANG BERSAMA DENGAN PETRONAS

PGN Saka Officially Extended Ketapang Working Area Contract with Petronas

PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) melalui PT Saka Ketapang Perdana mendapatkan perpanjangan kontrak dengan skema *Production Sharing Contract* (PSC) untuk Wilayah Kerja (WK) Ketapang yang berlokasi di laut jawa bersama dengan Petronas Carigali Ketapang II Ltd. (PCK2L) selaku operator. Kontrak WK Ketapang akan habis masa berlakunya pada 2028 dan diperpanjang kembali selama 20 tahun.

Through PT Saka Ketapang Perdana, PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka) obtained a contract extension with a Production Sharing Contract (PSC) scheme for the Ketapang Working Area (WK) located in the Java Sea together with Petronas Carigali Ketapang II Ltd. (PCK2L) as the operator. The Ketapang WK contract will expire in 2028 and will be extended for 20 years.

MEI
May

RUPST PGN 2023 TETAPKAN PENGURUS BARU PERSEROAN DAN BAGIKAN DEVIDEN USD 222,43 JUTA

PGN 2023 AGM Determines New Management of the Company and Distributes Dividends in the amount of USD 222.43 Million

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) selaku Subholding Gas Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) yang bertempat di Auditorium Graha PGAS, Kantor Pusat PGN, Jakarta (30/5/2024). RUPST ini memiliki 7 mata acara rapat.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) as Pertamina Gas Subholding held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year (“AGMS”) which took place at Graha PGAS Auditorium, PGN Head Office, Jakarta (30/5/2024). There were 7 meeting agenda items at the AGMS.

JUNI
June

PGN TINGKATKAN ALIRAN GAS BUMI 48 BBTUD KE JATENG

PGN Increases the Flow of Natural Gas by 48 BBTUD to Central Java

PGN menyelesaikan pekerjaan interkoneksi ruas Pipa Distribusi CNG Cluster Tambak Aji dengan ruas Pipa Distribusi Kendal - Mangkang yang terkoneksi dengan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang Tahap 1 (Pipa Cisem Tahap 1). Hal ini menjadi pioneer suplai gas untuk Kawasan Industri Tambak Aji dan Wijaya Kusuma yang selama 10 tahun belakangan menggunakan *Compressed Natural Gas* (CNG) dapat dialihkan ke sumber gas pipa. Volume pengaliran gas di Jawa Tengah meningkat menjadi 48 BBTUD.

PGN has completed the interconnection work of the Tambak Aji Cluster CNG Distribution Pipeline section with the Kendal - Mangkang Distribution Pipeline section, which is connected to Phase I of Cirebon-Semarang Transmission Pipeline (Cisem Pipeline Phase 1). This is a pioneer in gas supply for the Tambak Aji and Wijaya Kusuma Industrial Areas that have used Compressed Natural Gas (CNG) for the past 10 years, which can be switched to piped gas sources. The volume of gas flow in Central Java has increased to 48 BBTUD.

JUNI
June

PGN PEROLEH PASOKAN LNG TANGGUH
PGN Obtained Tangguh LNG's Supply

PGN memperoleh tambahan pasokan gas baru berbentuk LNG dari domestik. Adapun penandatanganan yang dilakukan telah menyepakati kontrak payung pembelian LNG melalui *Master Ex-Ship LNG Sale and Purchase Agreement* ("MSA"). Komitmen tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Confirmation Notice* ("CN") untuk rencana pembelian LNG pada bulan Juni 2024 sebesar 1 kargo atau setara 2,6 juta MMBTU.

PGN obtained additional new gas supplies in the form of domestic LNG. The signing that was carried out has agreed to an umbrella contract for the purchase of LNG through the Master Ex-Ship LNG Sale and Purchase Agreement ("MSA"). The commitment has also been followed up with the signing of the Confirmation Notice ("CN") for the LNG purchase plan in June 2024 of 1 cargo or equivalent to 2.6 million MMBTU.

JULI
July

SOWAN KE SULTAN HB X, PGN PASTIKAN KELANCARAN PEMBANGUNAN JARGAS DI DIY
PGN visited the Sultan HB X to ensure Smooth Construction of Gas Network in DIY

PGN sowan ke Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam rangka pengembangan jargas di Kota Yogyakarta. Pertemuan PGN dengan Sultan HB X dilaksanakan untuk memastikan pembangunan jargas di DIY berjalan lancar agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. PGN juga memastikan bahwa pembangunan jargas dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan pesan dari Sultan HB X.

PGN visited the Governor of Special Region of Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X in the context of developing a gas network in the City of Yogyakarta. PGN's meeting with Sultan HB X was held to ensure that the construction of the gas network in DIY runs smoothly, allowing it to provide real benefits to the community. PGN also ensures that the construction of the gas network is carried out carefully and considers environmental sustainability in accordance with the message from Sultan HB X.

JULI
July

PGN DAN PREMIER OIL TUNA JAJAKI PELUANG PEMANFAATAN GAS BUMI DARI WK TUNA
PGN and Premier Oil Tuna Explore Opportunities to Utilize Natural Gas from Tuna Working Area

PGN dan Premier Oil Tuna B.V., akan menjajaki peluang kerja sama sehubungan dengan potensi komersialisasi (penjualan dan pembelian) gas bumi dari Wilayah Kerja Tuna (WK Tuna), Kepulauan Natuna, serta pengembangan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas WK Tuna.

PGN and Premier Oil Tuna B.V. will explore opportunities for cooperation in relation to the potential for commercialization (sale and purchase) of natural gas from the Tuna Working Area (WK Tuna), Natuna Islands, as well as the development of natural gas infrastructure to support the utilization of WK Tuna's gas.

AGUSTUS
August

PGN SEPAKATI KONTRAK DENGAN DONGGI-SENORO LNG
PGN Contract Agreement with Donggi-Senoro LNG

PGN mendapatkan tambahan pasokan LNG baru dari sumber domestik yang dikelola oleh PT Donggi-Senoro LNG ("DSLNG"). PGN dan DSLNG telah menyepakati kontrak payung pembelian LNG melalui *Master LNG Sale and Purchase Agreement* (MSPA). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Confirmation* Memorandum untuk rencana pembelian satu (1) kargo LNG pada bulan September 2024 (CM September) sebesar 135.000 m3 setara 3.159.000 MMBTU.

Kesepakatan ini menambah pasokan gas hasil regasifikasi LNG untuk area Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Tengah.

PGN received additional new LNG supply from domestic sources, which is managed by PT Donggi-Senoro LNG ("DSLNG"). PGN and DSLNG have agreed to an umbrella contract for LNG purchases through the Master LNG Sale and Purchase Agreement (MSPA). The agreement was followed up with the signing of a Confirmation Memorandum for the planned purchase of one (1) LNG cargo in September 2024 (CM September) of 135,000 m3, equivalent to 3,159,000 MMBTU.

This agreement increases the supply of LNG regasification gas for the areas of West Java, as well as South and Central Sumatra.

AGUSTUS
August

PGN AMANKAN PASOK GAS DARI BLOK CEPU DAN BLOK MURIAH
PGN Secured Gas Supply from Cepu Block and Muriah Block

PGN dan Pertamina EP Cepu menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk pasokan gas dari Blok Cepu dan Amandemen PJBG dengan Saka Energi Muriah Ltd untuk pasokan gas dari Blok Muriah.

Dari Blok Cepu, PGN akan melanjutkan pengelolaan jaringan gas rumah tangga (jargas) Lamongan yang sebelumnya mendapatkan pasok gas dari Madura Offshore, beralih disalurkan dari Jambaran Tiung Biru (JTB). Besaran volume gas sebesar 0,2 MMSCFD s.d 2029 atau sampai berakhirnya produksi gas bumi Lapangan JTB.

Selanjutnya amandemen PJBG dari Blok Muriah, PGN memperoleh kesepakatan untuk menambah jumlah volume kontrak sebesar 5.000 BBTU dari Lapangan Kepodang, Wilayah Kerja (WK) Muriah. Jumlah kontrak secara keseluruhan sebesar 19.000 BBTU untuk. sektor kelistrikan dan industri domestik.

PGN and Pertamina EP Cepu signed a Gas Sales and Purchase Agreement (PJBG) for gas supply from the Cepu Block and an Amendment to the PJBG with Saka Energi Muriah Ltd for gas supply from the Muriah Block.

From the Cepu Block, PGN will continue the management of the Lamongan household gas network, which previously received gas supplies from Madura Offshore, switching to being distributed from Jambaran Tiung Biru (JTB). The volume of gas amounted to 0.2 MMSCFD until 2029 or until the end of JTB Field natural gas production.

Furthermore, resulting from the amendment of PJBG from Muriah Block, PGN obtained an agreement to increase the contract volume by 5,000 BBTU from Kepodang Field, Muriah Working Area (WK). The total contract amount is 19,000 BBTU for the electricity and domestic industry sectors.

AGUSTUS
August

HUT RI KE-79, PGN PASTIKAN GAS BUMI MENGALIR KE IKN
79th Anniversary of the Republic of Indonesia, PGN Ensured the Natural Gas Distribution to IKN

Pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 79 pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), PGN memastikan bahwa gas bumi telah mengalir dan siap digunakan. PGN menyediakan gas bumi di IKN menggunakan kombinasi layanan dengan moda *beyond pipeline* berupa *Compressed Natural Gas* (CNG).

On the commemoration of the 79th Indonesian Independence Day on August 17 in Ibu Kota Nusantara (IKN), PGN ensured that natural gas was flowing and ready to be used. PGN provides natural gas in IKN using a combination of services with beyond pipeline mode in the form of Compressed Natural Gas (CNG).

SEPTEMBER
September

PERHELATAN IAF 2024, PGN INISIATIF KERJASAMA *LOW CARBON BUSINESS*
2024 IAF Event, PGN Initiated Low Carbon Business Cooperation

PGN mendukung penuh perhelatan Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 sebagai ajang memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui jalinan kerjasama tingkat internasional di berbagai sektor. Dalam forum ini, PGN siap mendukung Holding Migas memainkan peran dalam rangka ekspansi *Go Global* di sektor energi sesuai *roadmap* menuju *Net Zero Emission* (NZE).

PGN fully supports the Indonesia Africa Forum (IAF) 2024 as an event to strengthen economic growth through international cooperation in various sectors. In this forum, PGN is ready to support the Oil and Gas Holding to play a role in the Go Global expansion in the energy sector according to the roadmap towards Net Zero Emission (NZE).

SEPTEMBER
September

PGN INCAR PELUANG PEMANFAATAN GAS ANDAMAN DI AJANG IAF 2024
PGN Aim Andaman Gas Utilization Opportunities at the 2024 IAF

PGN mendapatkan peluang kerja sama untuk optimalisasi potensi pasokan gas bumi dari Blok Andaman dari pagelaran Indonesia – Africa Forum (IAF) 2024. PGN juga mendapatkan kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi domestik. Potensi pasokan dari Blok Andaman untuk memenuhi demand yang beragam berkisar 2 – 5,5 TCF.

PGN obtains a cooperation opportunity to optimize the potential of natural gas supply from the Andaman Block from the 2024 Indonesia-Africa Forum (IAF). PGN also acquires cooperation in order to improve domestic energy security. The potential supply from the Andaman Block to meet diverse demand ranges from 2 – 5.5 TCF.

SEPTEMBER
September

PEMBAYARAN TAGIHAN GAS BUMI JARGAS BISA LEWAT APLIKASI MYPERTAMINA
Payment of Natural Gas Bills for Gas Networks Can Be Made Through the MyPertamina Application

PGN bersinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) melalui kerja sama layanan pembayaran tagihan gas bumi melalui aplikasi My Pertamina. PGN dan PPN merealisasikan harapan Pelanggan atas perluasan *channel* pembayaran tagihan gas bumi, dan sekaligus harapan Pertamina selaku induk perusahaan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar Subholding.

PGN synergizes with PT Pertamina Patra Niaga (PPN) through cooperation in natural gas bill payment services through My Pertamina application. PGN and PPN realize Customer expectations for the expansion of natural gas bill payment channels, and at the same time Pertamina's expectations as the parent company to increase synergy and collaboration between Subholdings.

SEPTEMBER
September

KOMITMEN TEKAN EMISI KARBON, PGN-POSCO INTERNASIONAL TEKEN JOINT STUDY AGREEMENT TERKAIT CCS
Commitment to Reduce Carbon Emissions, PGN-POSCO International Signed Joint Study Agreement Regarding CCS

PGN ikut serta dalam *Joint Study* dengan POSCO International terkait *Carbon Capture and Storage* (CCS). Kerja sama strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan *Joint Study Agreement* (JSA) dan tindak lanjut dari penandatangan MoU antara Pertamina Group dan POSCO. JSA ini memberikan nilai tambah untuk solusi upaya pengurangan emisi karbon melalui penyimpanan emisi karbon (CCS) di Lapangan milik Pertamina Group. Selain itu, sebagai optimasi *Right of Way* (ROW) transmisi milik PGN dan potensi integrasi *carbon aggregator* industri di *customer* eksisting.

PGN participated in the Joint Study with POSCO International on Carbon Capture and Storage (CCS). The strategic cooperation was marked by the signing of the Joint Study Agreement (JSA) and a follow-up to the signing of the MoU between Pertamina Group and POSCO. This JSA provides added value for solutions to efforts to reduce carbon emissions through carbon emission storage (CCS) in the fields of Pertamina Group. In addition, it also serves as an optimization of PGN's transmission Right of Way (ROW) and the potential for industrial carbon aggregator integration at existing customers.

OKTOBER
October

PGN DUKUNG PEMANFAATAN PIPA CISEM TAHAP II
PGN Supports Utilization of Cisem Pipelines Phase II

PGN dan Anak Perusahaan yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) mendukung pemanfaatan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang Tahap II (Pipa Cisem Tahap II) yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin, 30/9/2024. Proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I selesai dibangun pada tahun 2023 dan sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal serta Kawasan Industri Terpadu Batang.

PGN and its subsidiary, PT Pertamina Gas (Pertagas), support the utilization of the Phase II of Cirebon-Semarang Gas Transmission Pipeline (Cisem Pipeline Phase II), the construction of which was inaugurated by the Minister of Energy and Mineral Resources Bahlil Lahadalia on Monday, 30/9/2024. The Cisem Phase II project will complement Cisem Phase I, which was completed in 2023 and is already operating to supply natural gas needs in the Kendal Industrial Area and the Batang Integrated Industrial Area.

OKTOBER
October

PERTAGAS DAN PERTAMINA PATRA NIAGA SINERGI DALAM PEMBANGUNAN PIPA BBM CIKAMPEK-PLUMPANG

Pertagas and Pertamina Patra Niaga Synergized in the Construction of Cikampek-Plumpang Fuel Pipeline

PGN meneken Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek – Plumpang.Melalui proses lelang, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menunjuk Pertagas untuk mengerjakan pembangunan proyek pipa BBM sepanjang ±96 kilometer dari Cikampek ke Plumpang.

PGN signs a Cooperation Agreement for the Provision of Cikampek – Plumpang Fuel Pipeline Services. Through an auction process, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) appointed Pertagas to work on the construction of a fuel pipeline project of ±96 kilometers from Cikampek to Plumpang.

OKTOBER
October

PGN AGRESIF KEMBANGKAN MARKET GAS BUMI DI KAWASAN INDONESIA TIMUR

PGN Aggressively Develops Natural Gas Market in Eastern Parts of Indonesia

PGN mempercepat niaga gas bumi di Kawasan Indonesia Timur. Pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara masif di wilayah tersebut. PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi.

PGN accelerates natural gas trade in the Eastern Indonesia Region. Integrated management of natural gas, including pipeline gas, LNG, and CNG, are PGN's main capital for massive market expansion in the region. PGN has been aggressive and transparent to collaborate with strategic partners related to the provision of natural gas supplies and infrastructure.

OKTOBER
October

PGN TEKEN 2 MOU PEMANFAATAN GAS BUMI INDUSTRI DI SULAWESI

PGN Signed 2 MoUs on Industrial Natural Gas Utilization in Sulawesi

PGN membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi. PGN menandatangani 2 (dua) *Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan:

1. PGN kerjasama dengan KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati untuk memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.
2. PGN dan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene akan memperluas penetrasi pasar gas bumi.

PGN target the potential for developing natural gas for the industrial sector of 15 BBTUD in the Sulawesi region. PGN signed 2 (two) Memorandums of Understandings (MOUs) on the potential for developing the use of natural gas in South Sulawesi.

1. PGN cooperates with KSO Indogawa and Siantar Tara Sejati to meet natural gas demand for power plants in South Sulawesi. The potential supply of natural gas for this need amounted to 5 BBTUD.
2. PGN and Pattene Industrial Estate. Pattene Industrial Estate will expand natural gas market penetration.

NOVEMBER
November

SINERGI KRAKATAU STEEL DAN PERTAGAS BANGUN INFRASTRUKTUR PIPANISASI BBM
Synergy of Krakatau Steel and Pertagas to Build Fuel Pipeline Infrastructure

Pertagas dan Karakatau Steel menandatangani kontrak payung untuk penyediaan jasa pipanisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal BBM Cikampek menuju Terminal BBM Plumpang.

Proyek pipanisasi BBM Cikampek-Plumpang akan membawa BBM dari Kilang Minyak PT Kilang Pertamina Internasional Balongan, Indramayu, melalui Terminal BBM Balongan Jawa Barat menuju Terminal BBM Cikampek dan Terminal BBM Plumpang dengan volume sekitar 4,6 juta kilo liter/tahun.

Pertagas and Krakatau Steel signed an umbrella contract for the provision of fuel pipeline services from the Cikampek Fuel Terminal to the Plumpang Fuel Terminal.

The Cikampek-Plumpang fuel pipeline project will carry fuel from the Oil Refinery of PT Kilang Pertamina Internasional in Balongan, Indramayu, via the Balongan Fuel Terminal in West Java to the Cikampek Fuel Terminal and Plumpang Fuel Terminal with a volume of approximately 4.6 million kiloliters/year.

NOVEMBER
November

TGI KERJASAMA PEMBANGUNAN PIPA HIDROGEN INDONESIA – SINGAPURA
TGI Cooperated in the Development of IndonesiaSingapore Hydrogen Pipeline

PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Sembcorp Utilities Pte Ltd. (Sembcorp), dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI) menandatangani *Joint Development Framework Agreement* (JDFA). JDFA ini merupakan perjanjian mengenai kerangka kerja untuk membangun pipa transportasi hidrogen untuk menghubungkan Sumatera dan Kepulauan Riau di Indonesia ke Singapura. Nantinya, infrastruktur tersebut akan memfasilitasi pembentukan pusat hidrogen hijau.

PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Sembcorp Utilities Pte Ltd. (Sembcorp), and PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI) signed the Joint Development Framework Agreement (JDFA). The JDFA is an agreement on the framework for building a hydrogen transportation pipeline to connect Sumatra and the Riau Islands in Indonesia to Singapore. Going forward, the infrastructure will facilitate the establishment of a green hydrogen hub.

NOVEMBER
November

PGN TANDATANGANI PJB LNG DENGAN PELANGGAN INDUSTRI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA
Indonesia PGN Signed LNG Sale and Purchase Agreement with Industrial Customers in Eastern Parts of Indonesia

PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Liquefied Natural Gas (PJB LNG) dengan pelanggan industri di Kawasan Timur Indonesia, yakni Kerja Sama Operasi (KSO) PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati.

Kerja sama ini memanfaatkan LNG dari Wilayah Kerja Simenggaris, Kalimantan Utara, melalui fasilitas PT Kayan LNG Nusantara, dengan total volume maksimal 2.888.000 MMBTU.

PGN signed a Liquefied Natural Gas Sales and Purchase Agreement (PJB LNG) with industrial customers in the Eastern Indonesia Region, namely the Joint Operations (KSO) of PT Indogawa Teknologi Indonesia and PT Siantar Tara Sejati.

This collaboration utilizes LNG from the Simenggaris Working Area, North Kalimantan, through PT Kayan LNG Nusantara facilities, with a maximum total volume of 2,888,000 MMBTU.

DESEMBER
December

PGN DAN BADAN GIZI NASIONAL KERJASAMA JARGAS RUMAH TANGGA DUKUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PEMERINTAH

PGN and Board of National Nutrition Collaborated on Household Gas Network to Support Government's Free Nutritious Meal Program

PGN dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui penyediaan jaringan gas rumah tangga bagi Satuan Pelayanan Gizi.

Kerjasama menindaklanjuti penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program MBG Presiden Prabowo.

PGN and the National Nutrition Agency (BGN) are collaborating in the distribution of natural gas to support the Free Nutritious Meals (MBG) program, by providing a household gas network for Nutrition Service Units.

The collaboration is a follow-up of the assignment from the Minister of SOEs, Erick Thohir, to eight SOEs, one of which is PGN, to fully support the collaboration between the Ministry of SOEs and the National Nutrition Agency through President Prabowo's Free Nutritious Meals Program.

DESEMBER
December

PGN LNG INDONESIA GABUNG PROYEK PENGEMBANGAN GASIFIKASI PAPUA UTARA

PGN LNG Indonesia Joins North Papua Gasification Development Project

PT PGN LNG Indonesia (Anak Perusahaan PGN) bergabung dalam pengembangan proyek gasifikasi di Papua Utara. Proyek ini memperkuat rantai pasok gas melalui pembangunan infrastruktur LNG untuk pembangkit listrik di wilayah Papua Utara.

Proyek gasifikasi Papua Utara akan mendukung operasional tujuh pembangkit listrik utama dengan total kapasitas 168 MW. Proyek ini membutuhkan rata-rata pasokan gas sebesar 20,83 BBTUD selama 20 tahun ke depan.

PT PGN LNG Indonesia (a subsidiary of PGN) joined the development of a gasification project in North Papua. This project strengthens the gas supply chain through the development of LNG infrastructure for power plants in the North Papua region.

The North Papua gasification project will support the operation of seven main power plants with a total capacity of 168 MW. The project requires an average gas supply of 20.83 BBTUD over the next 20 years.

02.

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Pemegang Saham yang Terhormat,
Dear Shareholders,

Perusahaan mengembangkan usaha utamanya sebagai penyedia gas bagi berbagai kalangan masyarakat baik pembangkit listrik, industri, pelanggan kecil dan pelanggan rumah tangga. Ketersediaan pasokan gas bagi pelanggan berasal dari gas bumi hasil lapangan konvensional maupun regasifikasi *Liquified Natural Gas* (LNG). Untuk mendukung bisnis Perusahaan, pembangunan infrastruktur bagi penyaluran, penyimpanan dan distribusi gas bumi dan LNG secara nasional menjadi salah satu hal yang penting bagi keberlanjutan usaha Perusahaan ke depan.

The Company develops its main business as a gas provider for various groups of people, including power plants, industries, small customers, and household customers. The gas supply comes from natural gas sourced from conventional fields and through the regasification of Liquefied Natural Gas (LNG). To support the Company's business, developing infrastructure for the national distribution, storage, and delivery of both natural gas and LNG is one of the important things for the sustainability of the Company's business in the future.

Tahun 2024 masih menjadi tahun yang menantang bagi Perusahaan, dengan tantangan eksternal seperti volatilitas pasar, perubahan regulasi, serta kondisi makroekonomi yang fluktuatif menuntut strategi bisnis yang adaptif dan responsif. Dewan Komisaris dan Direksi beserta Perwira Subholding Gas menghadapi kompleksitas dan dinamika industri yang melibatkan berbagai aspek. Meski demikian, melalui usaha bersama, kami dapat meraih pencapaian yang positif serta menjadi tanda bagi bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

2024 remained a challenging year for the Company, with external factors such as market volatility, regulatory changes, and fluctuating macroeconomic conditions requiring an adaptive and responsive business strategy. The Board of Commissioners and Directors along with the Gas Subholding Officers faced the complexity and dynamics of an industry that involves various aspects. Nevertheless, through joint efforts, we were able to achieve positive achievements and mark the Company's sustainable business.

Kami terus menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024 dan kesesuaian dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap perumusan serta penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi untuk memastikan PGN tetap berada di jalur yang tepat selaras dengan visi jangka panjang Perusahaan serta prinsip governansi korporat.

We continue to carry out our supervisory duties and responsibilities over the management of the Company by the Board of Directors, including overseeing the implementation of the 2024 Company Work and Budget Plan (RKAP) and ensuring its alignment with the Company's Long-Term Plan (RJPP). The Board of Commissioners also monitors the development and implementation of strategies and policies by the Board of Directors, ensuring that PGN remains on the right track in line with its long-term vision and adheres to corporate governance principles.

Dalam pandangan kami, pada tahun 2024 Direksi telah mampu melaksanakan strategi Perseroan dengan kontrol yang baik, dengan terus menjaga target pencapaian kinerja Perusahaan sekaligus memberikan manfaat yang lebih kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat dari pencapaian kinerja Perusahaan yang positif, tingginya tingkat kepuasan pelanggan, serta hasil *assessment* GCG PGN yang sangat baik.

In our view, the Board of Directors successfully executed the Company's strategy in 2024 with sound control, consistently maintaining performance targets while delivering greater value to stakeholders. This is reflected in the Company's positive performance achievements, high levels of customer satisfaction, and the excellent results of PGN's Good Corporate Governance (GCG) assessment.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Ketegangan politik global yang masih tinggi pada awal tahun 2024 akibat berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina, makin meningkat setelah serangan Israel ke Palestina. Menjelang akhir tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* kembali meningkatkan ketidakpastian global karena berpotensi mengubah lanskap geopolitik dan perekonomian dunia. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2025, International Monetary Fund (IMF) mempublikasikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 diestimasi sebesar 3,2% yoy.

Dari sisi domestik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,03%, relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,05%. Inflasi dalam negeri per Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahun 2023 sebesar 2,61%. Nilai tukar Rupiah berdasarkan JISDOR pada tahun 2024 sebesar Rp16.157/USD, lebih tinggi dari nilai tukar rupiah tahun 2023 sebesar Rp15.439/USD, yang diakibatkan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat serta ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dari sisi industri migas, harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2024 berada pada kisaran USD71,6 per barel, lebih rendah dibanding rata-rata ICP tahun 2023 sebesar USD71,8 per barel. Harga minyak Indonesia (ICP) cenderung mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2024 yang dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional, yang antara lain didorong oleh konflik geopolitik yang masih eskalatif.

Dari sisi pasokan gas bumi, terjadi keterbatasan pasokan gas dari lapangan konvensional yang berdampak pada dinamika pengelolaan dan penyaluran gas bagi pelanggan Perusahaan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah yang sudah disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPST Tahun Buku 2023. Salah satu penugasan adalah penyediaan gas bumi dengan memberlakukan harga gas bumi USD6 per MMBTU bagi pelanggan industri dan pelanggan pembangkit mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Bidang Industri yang mulai berlaku 9 Oktober 2024 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Pembangkit Tenaga Listrik yang mulai berlaku 2 Agustus 2021.

MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Global political tensions remained high in early 2024 due to the ongoing Russia-Ukraine conflict, and these tensions intensified following Israel's attack on Palestine. Toward the end of 2024, the re-election of President Trump in the United States, along with his America First policy, contributed to increased global uncertainty, potentially reshaping the geopolitical and economic landscape. In the January 2025 World Economic Outlook (WEO), the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth for 2024 at 3.2% year-on-year.

Domestically, based on data from the Central Statistics Agency, Indonesia's economic growth in 2024 was expected to be 5.03%, slightly lower than 5.05% in 2023. Domestic inflation in December 2024 was 1.57%, an improvement compared to the 2.61% rate in 2023. The Rupiah exchange rate based on JISDOR for 2024 was Rp16,157/USD, reflecting a weaker currency than the 2023 of Rp15,439/USD, which mainly due to to the increase in US benchmark interest rates and ongoing global economic uncertainties.

In 2024, the average Indonesian Crude Price (ICP) was around USD 71.6 per barrel, slightly lower than the average ICP in 2023 of USD71.8 per barrel. Throughout the year, the Indonesian Crude Price (ICP) tended to fluctuate, which was influenced by the decline of major crude oil prices in the global market, which are due to, among others, the intensifying geopolitical conflict.

In terms of natural gas supply, gas availability from conventional fields is limited, affecting gas management and distribution to the Company's customers. As a State-Owned Enterprise, the Company received a specific assignment from the Government, which was approved by Shareholders at the 2023 Fiscal Year Annual General Meeting (AGM). One of the responsibilities is to supply natural gas at a price of USD6 per MMBTU to industrial and power plant customers. This pricing is in accordance with the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 on Certain Natural Gas Users and Prices (HGBT) within the Industrial Sector, effective from October 9, 2024, and the Decree No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 on Certain Natural Gas Prices (HGBT) at Electric Power Plants, effective from August 2, 2021.

Penugasan khusus lainnya adalah untuk menyediakan jaringan gas kepada Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Perusahaan mendapatkan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 85K/16/MEM/2020.

Adapun penyediaan Bahan Bakar Gas bagi Transportasi Jalan, Perusahaan mendapatkan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Keputusan Menteri ESDM No. 2436.K/15/MEM/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan dan No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Dewan Komisaris mendukung agar penugasan khusus dari Pemerintah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mengharapkan dukungan *stakeholder* sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Secara umum kami menilai, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2024. Kami mengapresiasi kinerja Direksi yang membawa Perseroan dapat membukukan kinerja Pendapatan sebesar USD3,79 miliar tumbuh sekitar 4% dari tahun sebelumnya, serta Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Induk mencapai USD339 juta, naik 22% dari tahun sebelumnya. Adapun, belanja modal pada tahun 2024 tercatat sebesar USD255 juta, meningkat 10,12% dibandingkan tahun 2023. Di tahun 2024, tingkat Kesehatan Perusahaan adalah Sangat Sehat (AAA).

Peningkatan pendapatan ditopang oleh kinerja operasional beberapa produk. Volume niaga gas selama tahun 2024 tercatat sebesar 852 BBTUD yang menurun dibandingkan 2023 dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan gas sebagai akibat dari penurunan volume dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Mengantisipasi hal ini, PGN memasok gas dari sumber gas yang berada di luar Sumatera dan Jawa dengan menggunakan moda transportasi LNG sebelum akhirnya diregasifikasi dan dialirkan melalui pipa ke pelanggan. Adapun volume transmisi gas, volume regasifikasi LNG dan volume transportasi minyak mengalami kenaikan di tahun 2024.

Another specific assignment for the company is to provide gas networks to homes and small customers. This assignment was authorized pursuant to the Minister of Energy and Mineral Resources' Decree No. 85K/16/MEM/2020.

The Company has also received a responsibility for the supply of Gas Fuel for Road Transportation, based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 2436.K/15/MEM/2014, dated April 23, 2014, regarding the Assignment of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk in Supplying and Distributing Gas Fuel for Road Transportation, and Decree No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021, dated March 16, 2021, regarding the Roadmap for Utilization of Gas Fuel for Road Transportation and Assignment of Provision and Distribution of Gas Fuel for Road Transportation for 2020 to 2024 to PT Pertamina (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

The Board of Commissioners supports the implementation of these special assignments from the Government and encourages continued support from stakeholders in line with applicable laws and regulations.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Overall, we believe the Board of Directors has effectively carried out its duties and responsibilities throughout 2024. We appreciate the performance of the Board of Directors, which has resulted in the Company achieving a revenue of USD3.79 billion, around 4% increase from the prior year, and a Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity of USD339 million, an increase of 22% from the previous year. Additionally, capital expenditure in 2024 amounted to USD255 million, reflecting an 10.12% increase compared to 2023. As of 2024, the Company's health status is rated as Very Healthy (AAA).

The growth in revenue was driven by the strong performance of various products. Gas trading volume in 2024 reached 852 BBTUD, which was lower than in 2023 due to a reduced gas supply from suppliers in the Sumatra and West Java regions. In response to this situation, PGN sourced gas from outside Sumatra and Java, using LNG transportation to deliver the gas, which was then regasified and distributed through pipelines to customers. Meanwhile, the volumes of gas transmission, LNG regasification, and oil transportation increased in 2024.

Hingga akhir tahun 2024, jumlah pelanggan gas bumi PGN Group yang memanfaatkan pipa gas dan *beyond pipeline* seperti CNG dan LNG Ritel sebanyak 816.645 pelanggan dimana sebanyak 810.830 merupakan pelanggan rumah tangga, sementara lainnya merupakan pelanggan kecil, komersial dan industri. Pelanggan gas bumi yang memanfaatkan infrastruktur lain yaitu *beyond pipeline* terus diperluas ke Kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Terkait infrastruktur, di tahun 2024 total pengelolaan jaringan pipa mengalami peningkatan menjadi 33.254 km atau tumbuh 2,81% dibandingkan tahun 2023, yang terdiri dari pipa distribusi, pipa transmisi, pipa AP/Afiliasi, dan pipa jaringan gas APBN kepada pelanggan dan pipa jaringan transmisi.

Beberapa indikator positif yang berhasil didapatkan PGN di antaranya, Indeks Kepuasan Pelanggan PGN atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) mencapai 4,66 dari skala 5 atau masuk kategori sangat baik (2023: 4,58), indeks *employee engagement* pada aspek budaya AKHLAK dengan skor 80,68 dari skor maksimal 100, hingga pengelolaan *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE) dengan *Number of Accident* nihil (2023: 0). Perusahaan melakukan *Cybersecurity Maturity Assessment* yang menunjukkan bahwa PGN sudah memiliki kontrol dalam tata kelola keamanan siber, deteksi ancaman, dan respon insiden.

PGN juga terus melakukan penguatan digitalisasi dalam pengembangan produk dan layanan seperti integrasi Pertamina Call Center 135 yang membuat seluruh pelanggan Pertamina Group akan mendapatkan layanan *call center* yang sama.

Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan beberapa penugasan khusus dari Pemerintah menyangkut pembangunan jaringan gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, penyediaan bahan bakar gas bumi untuk transportasi dan penyaluran gas bumi dengan harga tertentu.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian tersebut di atas memperlihatkan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik, di tengah tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan dan inisiatif untuk menjaga kinerja Perusahaan tetap positif.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi di tahun 2024 karena Perusahaan mampu melakukan berbagai upaya kuat untuk mengatasi keterbatasan pasokan gas bumi dan memperkenalkan LNG bagi pelanggan dengan harga yang dapat terjangkau oleh konsumen. Perusahaan juga berinisiatif melakukan diversifikasi bisnis termasuk menjalankan bisnis baru LNG *Trading*. Ditengah berbagai tantangan penyediaan gas bumi, Perusahaan mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan pasokan gas melakukan *cost optimization* dan *liability management* sehingga hal ini memberikan kinerja keuangan yang baik.

By the end of 2024, PGN Group had a total of 816,645 natural gas customers using both gas pipelines and beyond pipelines, such as CNG and Retail LNG, of whom 810,830 are household customers, and the remainder are small, commercial, and industrial customers. The number of customers utilizing other infrastructure, which is beyond the pipeline, continues to grow, particularly in Central and Eastern Indonesia. In terms of infrastructure, In 2024, the total pipeline network management increased to 33,254 km or grew 2.81% compared to 2023, consisting of distribution pipelines, transmission pipelines, AP/Affiliate pipelines, and APBN gas network pipelines to customers and transmission network pipelines.

Several positive indicators demonstrate PGN's success, including the PGN Customer Satisfaction Index (CSI) reaching 4.66 out of 5, placing it in the "very good" category (compared to 4.58 in 2023). The employee engagement index for the AKHLAK culture aspect scored 80.68 out of a maximum of 100. Additionally, PGN maintained excellent Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) management with zero accidents (same as in 2023). The Company conducted a Cybersecurity Maturity Assessment, which shows that PGN already has controls in cybersecurity governance, threat detection, and incident response.

PGN continues to enhance its digitalization efforts in product and service development, such as the integration of Pertamina Call Center 135, ensuring that all Pertamina Group customers receive the same call center service.

The Company has also continuously carried out special assignments from the Government, including the construction of gas networks for households and small customers, providing natural gas fuel for transportation, and distributing natural gas at specific prices.

Overall, the Board of Commissioners believes that these achievements demonstrate the Board of Directors' effective management of the Company, successfully navigating challenges by implementing various strategies, policies, and initiatives to sustain the Company's positive performance.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors for their efforts in 2024, as the Company successfully navigated challenges related to natural gas supply limitations and introduced LNG to customers at affordable prices. The Company also proactively diversified its business by launching a new LNG Trading business. Despite the challenges in providing natural gas, the Company was able to optimize gas supply utilization through cost optimization and liability management, resulting in strong financial performance.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga senantiasa mendorong Direksi untuk meningkatkan pengelolaan ketersediaan pasokan gas, peningkatan realisasi investasi, percepatan pembangunan jaringan gas bagi Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil serta peningkatan berkelanjutan atas kompetensi Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini dan masa mendatang.

However, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to enhance the management of gas supply availability, increase the realization of investments, accelerate the development of gas networks for Household and Small Customers, and consistently improve the competence of Human Resources to align with both current and future business developments.

PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan dukungan, saran, serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian lebih atas penerapan strategi oleh Direksi, dalam mendukung pencapaian RKAP dan RJPP.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris juga mencermati serta mengawasi rencana investasi pembangunan infrastruktur yang dijalankan Direksi dengan memperhatikan kelayakan teknis dan keekonomian, serta mendukung pemanfaatan berbagai opsi teknologi terkini dalam industri minyak dan gas, dengan tetap menjaga kepatuhan kepada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibantu oleh Komite Dewan Komisaris, secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, kinerja operasional serta *Top Risk* Perusahaan, termasuk pengelolaan operasional bisnis, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan teknologi informasi serta pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan fluktuasi harga saham.

Dalam pandangan kami, pada tahun 2024 Direksi telah mampu melaksanakan strategi Perseroan dengan kontrol yang baik, dengan terus menjaga target pencapaian kinerja Perusahaan sekaligus memberikan manfaat yang lebih kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat dari pencapaian kinerja Perusahaan yang positif, tingginya tingkat kepuasan pelanggan, serta hasil *assessment* GCG PGN yang sangat baik.

OVERSIGHT OF STRATEGY IMPLEMENTATION BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners oversees and provides support, advice, and recommendations necessary for the development and implementation of the Company's strategies and policies. The Board of Commissioners place particular emphasis on monitoring the Board of Directors' implementation of these strategies to ensure alignment with the achievement of the RKAP and RJPP goals.

In addition, the Board of Commissioners closely monitors the investment plans for infrastructure development carried out by the Board of Directors, assessing both technical and economic feasibility. They also support the utilization of the latest technologies in the oil and gas industry, ensuring that all actions comply with internal policies and relevant laws and regulations. With the support from the Board of Commissioners Committee, the Board of Commissioners conducts periodic evaluations on the Company's financial and operational performance, as well as on the Top Risk areas, including business operations, human resource development, information technology management, and oversight of risk management practices, internal control systems, and stock price fluctuations.

In our view, the Board of Directors has effectively implemented the Company's strategy in 2024, maintaining effective control while achieving performance targets and delivering greater benefits to stakeholders. This is reflected in the Company's positive performance outcomes, high customer satisfaction levels, and excellent results in the PGN GCG assessment.

FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, pemberian saran, dan nasihat kepada Direksi melalui komunikasi yang dilakukan secara rutin, baik melalui Rapat Gabungan dengan Direksi maupun sarana komunikasi lainnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat juga dilakukan dengan memberikan persetujuan atas hal-hal yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris dan penelaahan atas hal-hal yang dianggap perlu bagi keberlangsungan Perusahaan.

OVERSIGHT AND ADVISORY FUNCTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners carries out its oversight and advisory role by regularly communicating with the Board of Directors, either through Joint Meetings with the Board of Directors or other communication channels. In carrying out this function, the Board of Commissioners also provides approval for matters within its authority and reviews issues deemed essential for the long-term sustainability of the Company.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 56 (lima puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Gabungan dengan Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga melaksanakan 8 (delapan) kali kegiatan berupa kunjungan kerja dan *management walk through*. Adapun persetujuan, nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2024 di antaranya, sebagai berikut:

In 2024, the Board of Commissioners held 56 (fifty-six) meetings, including Joint Meetings with the Board of Directors. Additionally, the Board of Commissioners conducted 8 (eight) working visits and management walk-throughs. Throughout the year, the Board of Commissioners provided approvals, advice, and suggestions to the Board of Directors, which included the following:

PERSETUJUAN, NASIHAT DAN SARAN DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI
The Board of Commissioners Provided Approvals, Advice, and Suggestions to the Board of Directors

Perihal Matter	**Persetujuan/Nasihat/Saran**	Approval/Advice/Suggestions
Strategi, Pengelolaan Bisnis dan Investasi Strategy, Business Management, and Investment	1. Persetujuan RJPP 2024 - 2029, Suplemen 2024, Revisi RKAP 2024, RKAP 2025. 2. Persetujuan investasi pembangunan pipa BBM Cikampek - Plumpang, N2 Injection LNG Tank No. 1, 3, 5, jaringan gas pelanggan industri, kecil dan rumah tangga, pengeboran sumur di Wilayah Kerja Pangkah/Ketapang/Muara Bakau, terminal LNG di Teluk Lamong, upgrading stasiun Panaran. 3. Penelaahan atas kebijakan operasional Perusahaan dan proses bisnis turunannya. 4. Penelaahan berkala terkait kinerja Perusahaan, baik kinerja operasional, keuangan, HSSE, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Harga Saham.	1. Approval of RJPP 2024 - 2029, Supplement 2024, Revision of RKAP 2024, RKAP 2025. 2. Approval of investments in the construction of the Cikampek - Plumpang fuel pipeline, N2 Injection LNG Tank Nos. 1, 3, and 5, the gas network for industrial, small, and household customers, drilling wells in the Pangkah/Ketapang/Muara Bakau Working Area, the LNG terminal in Teluk Lamong, and the upgrading of the Panaran station. 3. Review the Company's operational policies and the processes related to its derivative businesses. 4. Periodic reviews of the Company's performance, including operational performance, financial performance, HSSE, Human Resources, Information Technology, and stock price.
Audit Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Internal Control Audit and Risk Management	1. Pembentukan fungsi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko. 3. Penelaahan hasil audit internal dan proses audit investigasi internal. 4. Penelaahan risiko utama Perusahaan dan rencana mitigasinya.	1. Establishment of a Risk Management function in compliance with prevailing regulations. 2. Approval of the Risk Management Policy. 3. Evaluation of internal audit results and internal investigation audit process. 4. Evaluation of the Company's main risks and their mitigation plans.
Sumber Daya Manusia dan GCG Human Resources and GCG	1. Persetujuan Pergantian Corporate Secretary dan Chief Audit Executive. 2. Persetujuan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan. 3. Persetujuan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*). 4. Penelaahan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan GCG, penerapan tata kelola terintegrasi, implementasi ESG. 5. Pemantauan perkembangan kasus-kasus hukum utama yang dihadapi Perusahaan.	1. Approval of the Change of Corporate Secretary and the Chief Audit Executive. 2. Approval of Changes in Subsidiary Management. 3. Approval of the Code of Conduct. 4. Evaluation of Human Resources development plan, GCG improvement, implementation of integrated governance, ESG implementation. 5. Monitoring the progress of significant legal cases involving the Company.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Memasuki tahun 2025, kami berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan peluang di tengah dinamika industri energi global dan nasional. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global yang stabil, dengan estimasi sebesar 3,3% pada tahun 2025 diperkirakan akan memberikan landasan bagi peningkatan permintaan energi, khususnya gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 - 5,5% pada tahun 2025. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi energi domestik, termasuk gas bumi. Selain itu, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diperpanjang mulai tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendorong permintaan gas bumi.

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

As we enter 2025, we are in a strategic position to seize opportunities amid the dynamics of the global and national energy industry. The IMF forecasts steady global economic growth of approximately 3.3% in 2025, which is expected to boost energy demand, particularly for natural gas as a cleaner energy option.

At the national level, the Indonesian government is targeting an economic growth of 5.1 - 5.5% in 2025. This growth is expected to drive an increase in domestic energy consumption, including natural gas. In addition, the extension of the Specific Natural Gas Price (HGBT) policy starting 2025 is anticipated to enhance the competitiveness of the domestic industry and stimulate natural gas demand.

Secara global, investasi dalam transisi energi mencapai rekor lebih dari USD2 triliun pada tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan energi bersih. Sebagai Subholding Gas, PGN memiliki peluang untuk berperan aktif dalam inisiatif ini melalui pengembangan infrastruktur dan layanan gas bumi yang efisien dan ramah lingkungan.

Kendati dihadapkan pada sejumlah peluang pertumbuhan bisnis, PGN juga dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, seperti fluktuasi harga energi global dan tekanan untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Dengan demikian, tahun 2025 menawarkan prospek yang menjanjikan bagi PGN untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri gas bumi nasional dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi Indonesia.

Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi dalam mencapai RKAP 2025 dengan mengimplementasikan strategi G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*) sebagai langkah optimalisasi pasokan, pengembangan infrastruktur, peningkatan bisnis LNG, serta ekspansi ke sektor energi hijau. Dengan strategi yang adaptif, diversifikasi portofolio, dan peningkatan efisiensi operasional, kami yakin serta optimis dapat mengatasi tantangan tersebut dan Direksi dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa peluang pertumbuhan di masa mendatang tetap terbuka dan terus mendukung segala upaya yang akan dijalankan Direksi dalam rangka memperkuat bisnis PGN ke depan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KEBERLANJUTAN

Penerapan GCG di PGN tidak hanya untuk mematuhi peraturan, namun lebih dari itu, untuk memelihara budaya integritas dan kepatuhan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Untuk itu, PGN menjaga keberlangsungan usaha dengan berperilaku sebagai perusahaan yang baik dengan menerapkan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) atau governansi korporat serta keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya, termasuk membangun budaya integritas bagi Perwira Subholding Gas.

Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi dalam memperkuat penerapan GCG sepanjang tahun 2024. Mencermati perkembangan terkini, Direksi telah melakukan pembaruan terhadap beberapa *GCG Softstructure* di antaranya pembaruan *Board Manual*, Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*), serta beberapa pedoman lainnya yang bertujuan untuk menyelaraskan operasional Perseroan dengan *best practice*.

Globally, investment in the energy transition reached a record of more than USD 2 trillion last year, reflecting a strong commitment to developing clean energy. As a Gas Subholding, PGN has the opportunity to actively participate in this initiative by developing efficient and environmentally friendly natural gas infrastructure and services.

Despite a number of business growth opportunities, PGN encounters significant challenges, including fluctuations in global energy prices and the pressure to transition to renewable energy. As a result, 2025 presents a promising opportunity for PGN to strengthen its position as a leader in Indonesia's natural gas sector while also contributing significantly to the country's energy security.

The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' efforts to meet the 2025 RKAP through the implementation of the G-A-S (Grow-Adapt-Step Out) strategy. This strategy seeks to optimize supply, enhance infrastructure, grow the LNG industry, and enter the green energy sector. With an adaptive strategy, diversified portfolio, and improved operational efficiency, we are confident and optimistic that we are able to manage the challenges, and the Board of Directors is able to utilize the available opportunities to ensure sustainable growth. Overall, the Board of Commissioners believes that future growth prospects are promising, and it continues to support all initiatives carried out by the Board of Directors to strengthen PGN's business going forward.

VIEWS ON GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION

At PGN, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) goes beyond regulatory compliance; it is fundamental to upholding a culture of integrity and ensuring adherence to standards while considering the needs and expectations of stakeholders. To ensure business continuity, PGN strives to operate as a responsible company by integrating GCG and sustainability into all aspects of its operations, including fostering a culture of integrity among Subholding Gas Officers.

The Board of Commissioners supports the Board of Directors' efforts to enhance the implementation of GCG throughout 2024. In response to recent developments, the Board of Directors has updated several GCG Softstructures, including the Board Manual, Code of Conduct, and other guidelines, to ensure the Company's operations align with best practices.

Kami juga melihat upaya peningkatan *awareness* GCG dan anti penyuapan berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan penyebaran konten GCG yang konsisten melalui berbagai media komunikasi Perusahaan. Kami juga mengapresiasi upaya Direksi dalam menjalankan Survey Pemahaman GCG agar meningkatkan pemahaman GCG di internal serta menciptakan budaya perusahaan yang berintegritas, yang dapat mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

We recognize that efforts to raise awareness of GCG and anti-bribery measures are progressing effectively through consistent socialization and the dissemination of GCG-related content across various Company communication channels. We also appreciate the Board of Directors for conducting the GCG Understanding Survey, which aims to enhance internal understanding of GCG and foster a culture of integrity that supports the long-term sustainability of the business.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, Dewan Komisaris mendukung penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dengan melakukan pengawasan secara komprehensif dan memastikan diterapkannya sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami juga menilai penerapan WBS di PGN sudah sesuai dengan adanya Pedoman WBS No. P-002/A011 yang mengatur mengenai cara penyampaian pelanggaran, proses kerja WBS, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan hingga tindak lanjut penanganan pengaduan pelanggaran. Dalam rangka sinergi kolaborasi Holding dan Subholding untuk penerapan WBS seperti tercantum dalam Piagam Internal Audit Tahun 2024, Perseroan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengelolaannya. Selama pelaksanaan pada tahun 2024 terdapat 22 (dua puluh dua) pengaduan yang masuk melalui saluran WBS PT Pertamina (Persero) dengan status *ongoing progress* dan 14 (empat belas) pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perseroan dengan status 9 (sembilan) *closed* dan 5 (lima) *ongoing progress*.

As part of GCG implementation, the Board of Commissioners supports the Whistleblowing System (WBS) implementation by overseeing its operation comprehensively and ensuring that sanctions are imposed on individuals found to have committed violations. We also assess that the WBS implementation at PGN is in accordance with the WBS Guidelines No. P-002/A011, which outlines the process for reporting violations, the WBS work process, protecting whistleblowers, complaint handling, parties managing the complaints, and follow-up on handling complaints of violations. In order to synergize the collaboration of Holding and Subholding for the implementation of WBS, as outlined in the 2024 Internal Audit Charter, the Company has partnered with PT Pertamina (Persero) for management of the system. In 2024, 22 (twenty two) complaints were received through the PT Pertamina (Persero) WBS channel with ongoing progress status, and 14 (fourteen) complaints were received through the Company's WBS channel, with 9 (nine) having been resolved and 5 (five) still under investigation (ongoing progress).

Pada tahun 2024, capaian KPI GCG Implementation Compliance sebesar 96,05% berada di atas target 94,05%. Selain itu, PGN juga melakukan pengukuran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2024 menggunakan paramater ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), revisi Oktober 2023 (versi 2 Maret 2024), dengan hasil bahwa PGN telah menerapkan 91,11% dan melebihi standar minimum. Lebih lanjut, PGN melakukan evaluasi tata kelola dengan kriteria yang tercantum dalam PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan kualifikasi: "*Apply*" untuk "Seluruh Prinsip", serta Penerapan GCG berdasarkan parameter Peraturan POJK No. 21/POJK.04/2015 yang mencapai predikat "*Comply*" untuk "Seluruh Aspek".

In 2024, the achievement of the GCG Implementation Compliance KPI reached 96.05%, exceeding the target of 94.05%. PGN also measured the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2024 using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameters from the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), revised October 2023 (version 2 March 2024), with the result that PGN has implemented 91.11% and exceeded the minimum standards. Additionally, PGN conducted a governance assessment based on the criteria outlined in the PUGKI (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance) 2021, receiving an "Apply" qualification for "All Principles". The GCG implementation, in accordance with POJK Regulation No. 21/POJK.04/2015, obtained the "Comply" predicate for "All Aspects".

Prinsip-prinsip keberlanjutan juga senantiasa diintegrasikan ke dalam setiap proses bisnis, mulai dari perumusan strategi dan kebijakan hingga pembuatan program-program Perseroan. Seluruhnya disesuaikan dengan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola/LST (*Environment, Social and Governance*/ ESG) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals*/SDGs).

Sustainability principles are consistently integrated into every business process, from strategy and policy development to the establishment of the Company's programs. These processes are aligned with Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, as well as the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Dewan Komisaris juga mendukung upaya Direksi dalam rangka persiapan implementasi ISO 37301:2021 dengan meningkatkan kompetensi personil *Compliance* melalui Sertifikasi CCP (*Certified Compliance Professional*). Survey Pemahaman GCG juga terus dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, dan penerapan prinsip-prinsip governansi korporat di lingkungan Perusahaan.

The Board of Commissioners also supports the Board of Directors' efforts in preparing for the implementation of ISO 37301:2021 by improving the competence of Compliance personnel through CCP (Certified Compliance Professional) Certification. The GCG Understanding Survey is also continuously conducted to measure the level of understanding, awareness, and implementation of corporate governance principles in the Company's environment.

Dewan Komisaris bersama Direksi, berkomitmen untuk bertanggung jawab, akuntabel serta transparan atas penerapan governansi/tata kelola keberlanjutan, termasuk mengintegrasikannya dengan strategi, prioritas dan target keberlanjutan Perusahaan. Kami senantiasa memasukkan pertimbangan keberlanjutan saat menjalankan peran kami, termasuk dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat untuk pengembangan dan penerapan strategi Perusahaan, rencana bisnis, hingga manajemen risiko. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendukung Direksi dalam memperkuat komitmen Perusahaan untuk terus bertanggung jawab terhadap lingkungan, memiliki tata kelola yang baik dan bertanggung jawab secara sosial.

The Board of Commissioners, alongside the Board of Directors, is committed to ensuring responsibility, accountability, and transparency in the implementation of sustainability governance. This includes integrating it with the Company's sustainability strategy, priorities, and targets. Sustainability considerations are consistently factored into our roles, particularly in supervision and offering guidance for the development and implementation of the Company's strategy, business plans, and risk management. Moving forward, the Board of Commissioners will continue to support the Board of Directors in reinforcing the Company's commitment to environmental responsibility, strong governance, and social responsibility.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki 4 (empat) Komite Penunjang Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, selaras dengan rencana kerja dan fungsi yang dimiliki masing-masing Komite. Penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria di antaranya rekomendasi yang diberikan komite, capaian kinerja selama tahun buku 2024, kompetensi yang dimiliki dan tingkat kehadiran dalam rapat.

BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEE PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Commissioners is supported by 4 (four) committees: the Audit Committee, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee. In 2024, the Board of Commissioners evaluated the performance of these committees and determined that they had effectively carried out their duties and responsibilities, in accordance with the work plans and functions assigned to each committee. This assessment was based on several criteria, including committee recommendations, performance achievements during the 2024 fiscal year, member competencies, and attendance at meetings.

Komite Audit menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pengawasan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan proses audit Perseroan yang dilakukan dalam 44 (empat puluh empat) pertemuan. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan rekomendasi dalam sistem nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pengembangan organisasi serta penerapan pengelolaan tata kelola, yang dilakukan dalam 13 (tiga belas) pertemuan. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung pengawasan sistem manajemen risiko serta memberikan rekomendasi pengembangan usaha atau rencana investasi, yang dilakukan dalam 47 (empat puluh tujuh) pertemuan. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pengawasan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal secara terintegrasi pada Perusahaan dan Anak Usaha, yang dilakukan dalam 5 (lima) pertemuan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 30 Mei 2024. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, kebutuhan strategi bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, hasil evaluasi kinerja, serta dinamika industri dan tantangan usaha ke depan.

RUPST mengusulkan pengukuhan pemberhentian Bapak Luky Alfirman sebagai Komisaris, dan Bapak Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024. RUPST juga mengangkat Bapak Luky Alfirman sebagai Komisaris untuk periode kedua, Bapak Christian H. Siboro sebagai Komisaris Independen untuk periode kedua, dan Bapak Tony Setia Boedi Hoesodo sebagai Komisaris Independen.

The Audit Committee has carried out its duties and functions to support the oversight of the internal control system and the implementation of the Company's audit process by holding 44 (forty-four) meetings. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee has carried out its duties and functions to provide recommendations on the nomination and remuneration system of the Board of Commissioners and Board of Directors, organizational development, and governance management implementation, which were conducted in 13 (thirteen) meetings. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee has carried out its duties and functions to support the oversight of the risk management system and provide recommendations for business development or investment plans by holding 47 (forty-seven) meetings. The Integrated Governance Committee has carried out its duties and responsibilities to supervise risk management, compliance, and internal control in an integrated manner across the Company and its subsidiaries by holding 5 (five) meetings.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, a change in the composition of the Board of Commissioners was made following the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on May 30, 2024. The changes were part of the Company's efforts to enhance supervisory effectiveness, address business strategy needs, ensure regulatory compliance, respond to performance evaluation outcomes, and adapt to industry dynamics and future business challenges.

During the AGMS, the dismissal of Mr. Luky Alfirman as Commissioner and Mr. Christian H. Siboro as Independent Commissioner, effective May 30, 2024, was confirmed. The AGMS also appointed Mr. Luky Alfirman for a second term as Commissioner, Mr. Christian H. Siboro for a second term as Independent Commissioner, and Mr. Tony Setia Boedi Hoesodo as an Independent Commissioner.

Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai Keputusan RUPST tanggal 30 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Subsequently, the members of the Board of Commissioners based on the AGMS Resolution dated May 30, 2024, are as follows:

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
The Members of the Board of Commissioners

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Amien Sunaryadi**	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Tony Setia Boedi Hoesodo**	Independent Commissioner

PENUTUP

Menutup laporan ini, kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang tulus kepada jajaran Direksi, Perwira Subholding Gas, serta para pemegang saham yang selama ini terus berkontribusi dan mendukung kepada pencapaian kinerja PGN. Semoga, kerja keras yang telah kita dedikasikan di PGN dapat membawa manfaat yang tidak hanya kepada diri kita masing-masing, melainkan juga kepada pemangku kepentingan yang lebih besar.

Akhir kata, kami mengajak agar kita menyambut tahun yang akan datang dengan semangat dan optimisme. Kami yakin, bersama-sama kita dapat melewati segala tantangan yang membentang, meraih peluang yang akan datang, dan terus berkontribusi untuk Indonesia.

CLOSING

In closing this report, on behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our sincere gratitude to the Board of Directors, Subholding Gas Officers, and shareholders for their continuous contributions and support in PGN's performance achievements. We hope that the hard work we have dedicated in PGN will bring benefits not only to us but also to a wider range of stakeholders.

Finally, let us embrace the coming year with enthusiasm and optimism. We are confident that, together, we can overcome the challenges ahead, seize the opportunities that arise, and continue to contribute to Indonesia.

Jakarta, 28 April 2025
Jakarta, April 28, 2025

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

CHRISTIAN H. SIBORO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LUKY ALFIRMAN
Komisaris
Commissioner

AMIEN SUNARYADI
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
President Commissioner and
Independent Commissioner

TONY SETIA BOEDI HOESODO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

ABDULLAH AUFA FUAD
Komisaris Independen
Independent Commissioner

WARIH SADONO
Komisaris
Commissioner

DINI SHANTI PURWONO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors

ARIEF S. HANDOKO
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham yang Terhormat,
Dear Shareholders,

Selama tahun 2024, Perusahaan secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis untuk menghasilkan kinerja positif. Pencapaian tersebut dihasilkan melalui penerapan strategi bisnis yang konsisten yaitu terus melakukan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat bisnis utama niaga dan transmisi gas bumi, melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan dan optimalisasi infrastruktur yang dimiliki Perusahaan, termasuk menjalankan bisnis baru LNG *trading* serta pengembangan bisnis hijau untuk memastikan komitmen dalam upaya keberlanjutan dan mengakselerasi energi bersih yang lebih luas.

Menghadapi kondisi ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan gas, Perusahaan menunjukkan resiliensinya dengan terus beradaptasi dan bertransformasi melakukan penyesuaian dengan inovasi, pengembangan produk dan pengembangan teknologi untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi serta membangun bisnis energi rendah karbon agar dapat memperluas aksesibiltas gas bumi bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan juga menanggapi regulasi di bidang bisnis minyak, gas dan energi serta kondisi makro ekonomi, geopolitik global dengan melakukan *engagement* ke seluruh pemangku kepentingan, melakukan kolaborasi strategis dengan seluruh pelanggan dan mitra bisnis untuk memberikan nilai terbaik serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta memberikan kontribusi bagi Negara.

In 2024, the Company consistently demonstrated its ability to overcome various challenges and business dynamics, resulting in positive performance. This success was achieved through the implementation of a consistent business strategy, which focused on increasing the use of natural gas to strengthen its core trading and transmission business. The Company also diversified its operations by enhancing its infrastructure, launching a new LNG trading business, and expanding into green energy to fulfill its commitment to sustainability and promote clean energy.

With resilience, the Company effectively addressed imbalances in gas supply and demand by adapting and transforming, incorporating innovation, product development, and technological advancements to optimize integrated natural gas infrastructure. This is also supported by building a low-carbon energy business to expand natural gas access for the Indonesian people. Additionally, the Company proactively responded to regulations in the oil, gas, and energy sectors, as well as global macroeconomic and geopolitical conditions, by engaging with stakeholders and conducting strategic collaborations with customers and partners to deliver optimal value, positively impact society and the environment, and contribute to the nation.

PGN kembali dapat melewati tantangan selama tahun 2024 dengan baik. Pencapaian kinerja di tahun 2024 merupakan wujud upaya PGN untuk terus melakukan pengelolaan bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal, dan aman serta tetap menghadirkan *value* bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PGN was able to get through the challenges of 2024 successfully, with its performance reflecting the company's ongoing efforts to manage the downstream natural gas business efficiently, reliably, and securely, while also delivering value to shareholders and other stakeholders.

Dapat kami sampaikan bahwa tingkat Kesehatan Perusahaan pada tahun buku 2024 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Disamping itu, dalam tiga tahun terakhir kami terus mencatatkan tren positif *Dividend Payout Ratio* dalam kisaran di atas 60% serta *Dividend Yield* di atas 7%. Hal ini membuktikan komitmen PGN menjaga tingkat kesehatan keuangan yang kuat serta prospek pertumbuhan Perusahaan yang lebih baik untuk memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

We are pleased to report the Company's Health level in the financial year 2024 is Very Healthy (AAA), as defined by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023. Over the past three years, we have consistently demonstrated a positive trend in our Dividend Payout Ratio, maintaining levels above 60%, with a Dividend Yield exceeding 7%. This highlights PGN's commitment to upholding strong financial health and fostering robust growth prospects to deliver added value to our shareholders.

Kami juga terus memastikan pengelolaan bisnis Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Hal ini terlihat dari perbaikan *ESG Risk Rating* Perseroan di tahun 2024 menjadi 20,2 meningkat dari skor tahun sebelumnya 24,7 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat ESG, Morningstar Sustainalytics. PGN berkomitmen untuk senantiasa menjaga penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis Perusahaan dan secara aktif terus melakukan insiatif strategis agar bisnis yang dilakukan dapat selaras dengan standar-standar ESG internasional dalam rangka menghadapi perubahan iklim global yang dapat mempengaruhi *sustainability* Perusahaan.

Additionally, we remain dedicated to ensuring that the Company's business operations are based on sustainability and good governance principles. This commitment is reflected in the Company's improved ESG Risk Rating in 2024, scoring 20.2, compared to 24.7 in the previous year, based on evaluations from the ESG rating agency, Morningstar. PGN is committed to continuously integrating sustainability into our business strategy and advancing strategic initiatives to align with international ESG standards, addressing global climate change impacts that could affect the Company's sustainability.

TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

Sepanjang tahun 2024, ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan dengan tiga tantangan besar, yaitu konflik geopolitik, pelemahan ekonomi global, dan perubahan kepemimpinan politik di banyak negara. Efek perang Ukraina-Rusia masih terasa, sementara konflik geopolitik di Timur Tengah dan Laut Cina Selatan masih berlanjut. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 sebesar 3,2% dengan aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antar kawasan. Negara-negara maju masih menunjukkan ketahanan, meski lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Pada tahun 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,8%, ekonomi Eropa stagnan dengan pertumbuhan 1,1%, ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan, sedangkan kawasan ASEAN tetap tangguh ditengah menurunnya permintaan global. Sementara itu, terjadi banyak pergantian pemimpin negara dunia, yang akan menimbulkan perbedaan arah kebijakan negara masing-masing dan berpotensi mempengaruhi situasi global.

MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

In 2024, the global economy continued to face several challenges, with three major challenges: geopolitical conflicts, changes in political leadership across many countries, and a weakening global economy. The effects of the Ukraine-Russia war were still being felt, while geopolitical conflicts in the Middle East and the South China Sea continued. The International Monetary Fund (IMF) projected a 3.2% global economic growth in 2024 with less bustling global economic activities as global regions were sending mixed signals of performance . Developed nations were showing resilience, although at levels lower than before the pandemic. The United States economy grew by 2.8% in 2024, while Europe stagnated with a growth of 1.1%. China's economy was slowing while the ASEAN region remained resilient despite the declining trend in global demand. Adding to that were the many changes in world leaders, potentially triggering different policy directions amongst nations and impacting the global situation.

Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan dinamika perekonomian global, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Pencapaian ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri terutama didorong konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja baru, dan meningkatnya aktivitas wisata dan bisnis.

While uncertainty persisted in the global dynamics, the Central Statistics Agency (BPS) registered a growth of 5.03% in Indonesia's economy, higher than global average. This growth was mainly driven by stable household consumption along with the implementation of policies aimed at preserving purchasing power, government spending that supports domestic demand, job creation, and an increase in tourism and business activities.

Dalam data Kementerian Keuangan, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.162 atau lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp15.000 karena berbagai faktor global seperti kebijakan suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun tercatat mencapai 7% dan harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar USD 71,6 per barel.

According to the Ministry of Finance, inflation in 2024 was recorded at 1.57%, with the Rupiah exchange rate against the US dollar at Rp16,162, higher than the APBN target of Rp15,000 due to various global factors, including the US Federal Reserve's benchmark interest rate policy. The interest rate on 10-year Government Securities (SBN) was recorded at 7%, and the price of Indonesian crude oil in 2024 was USD 71.6 per barrel.

Komoditas minyak bumi dan gas bumi (migas) merupakan salah satu komoditas terpenting bagi perekonomian Indonesia. Dalam rilis kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *lifting* minyak dan gas Indonesia tercatat, masing-masing sebesar 579,7 MBOPD dan 5.481 MMSCFD. Pemanfaatan gas bumi pada tahun 2024 digunakan untuk ekspor sejumlah 33% dan untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 67% atau setara 3.881 BBTUD, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.745 BBTUD.

Meanwhile, in the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) performance report, oil lifting was recorded at 579.7 MBOPD, while natural gas lifting reached 5,749.5 MMSCFD. Domestic natural gas usage in 2024 accounted for 67%, or 3,881 BBTUD, an increase from 3,745 BBTUD in the previous year.

Pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya gas bumi dalam rangka mendukung transisi energi menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan gas domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri pengguna gas bumi.

Fossil fuels, particularly oil and natural gas, remain crucial in securing the national energy supply, especially natural gas, which contributes a significant part in supporting the energy transition toward Net Zero Emissions by 2060. The Indonesian government continues to prioritize the use of natural gas for domestic consumption and supports the downstream development of natural gas industries.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2024 tersebut paling signifikan dikontribusikan oleh pemanfaatan LNG karena Tangguh Train 3 telah beroperasi secara penuh dan sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor kelistrikan dan pupuk. Sedangkan pemanfaatan di sektor industri mengalami penurunan akibat penurunan alamiah (*natural decline*) di beberapa sumber pasokan gas pipa yang belum ada sumber pasokan pengganti yang signifikan.

In 2024, the LNG sector saw the greatest increase in domestic natural gas usage, owing to the full operation of Tangguh Train 3, which is primarily used for electricity generation and fertilizer production. Quite the opposite, the industrial sector saw a decrease in utilization due to the natural reduction of several piped gas sources, with no significant replacements available.

Kondisi makro ekonomi global dan Indonesia serta volume produksi dan *lifting* migas domestik memberikan tantangan dan pengaruh bagi PGN dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan terjadinya keterbatasan pasokan gas dari lapangan konvensional, PGN berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan gas hasil regasifikasi LNG dan mengoptimalkan fasilitas FSRU Lampung untuk regasifikasi LNG bagi sektor kelistrikan melalui kontrak Terminal Usage Agreement (TUA). Perusahaan juga mulai melaksanakan bisnis LNG Global melalui penjualan kargo LNG yang berasal dari Asia Tenggara kepada pasar di China, dimana PGN telah merealisasikan penjualan LNG sebanyak 7 kargo. Dengan strategi bisnis yang komprehensif, PGN berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba bersih, masing masing sebesar 4% dan 22% dari tahun sebelumnya.

PGN faced challenges in improving its performance, which is influenced by global and Indonesian macroeconomic conditions, as well as the volume of domestic oil and gas production and lifting. With limited supply from conventional gas fields, PGN is addressing customer demand by utilizing LNG regasification gas. The company is also maximizing the Lampung FSRU facility through the Terminal Usage Agreement (TUA) contract to support electricity needs and has begun engaging in the Global LNG business by selling LNG cargoes from Southeast Asia to the Chinese market. PGN has successfully sold 7 LNG cargoes, and through a comprehensive business strategy, PGN has achieved a 4% increase in revenue and 22% in net profit compared to the previous year.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Memahami perkembangan ekonomi makro dan industri selama tahun 2024, PGN berinisiatif untuk menerapkan strategi yang adaptif dan inovatif untuk menjaga daya saing serta memastikan pencapaian target bisnis. Strategi dan kebijakan tersebut mencakup inisiatif pertumbuhan (*growth initiatives*) serta inisiatif penggerak (*enabler initiatives*). Penerapan inisiatif tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan bisnis, efisiensi operasional, serta perlindungan terhadap kepentingan Perseroan di tengah dinamika industri energi yang terus berkembang.

Salah satu fokus utama Perusahaan pada tahun 2024 adalah menjalankan strategi pemenuhan gas bumi di tengah tantangan penurunan pasokan gas, terutama di wilayah Jawa Bagian Barat, Lampung, Riau, dan Kepulauan Riau. Menghadapi hal ini, Perusahaan mengambil langkah-langkah mitigasi, seperti menyediakan LNG sebagai alternatif pasokan gas untuk memenuhi *gap* antara pasokan gas konvensional yang tersedia dengan *demand* pelanggan. Selain itu sejak bulan Maret 2024, Perusahaan juga terus melakukan edukasi secara intensif kepada pelanggan untuk memberikan pemahaman tentang perbedaan dalam rantai penyediaan LNG yang menjadi komponen penyusun harga jual gas regasifikasi LNG. Upaya ini dilakukan guna memastikan transparansi serta memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan dalam menyerap gas regasifikasi LNG. Perusahaan juga melakukan *product development* sebagai *value added* yang dapat dirasakan oleh pelanggan, dengan tetap menjaga keandalan dan keberlanjutan distribusi atau niaga gas, terutama dalam kondisi *unbalanced supply*.

Selain memastikan pemenuhan kebutuhan energi, PGN juga menjalankan program *Cost Optimization* yang mencakup strategi *Cost Saving* dan *Revenue Growth*. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi beban operasional, sehingga optimalisasi laba bersih dapat tercapai. Di samping itu, PGN juga menjalankan langkah *Liability Management Bond* PGN Grup yang dilakukan untuk menurunkan beban bunga, sehingga struktur keuangan Perusahaan menjadi lebih sehat dan berdaya saing.

Dalam aspek manajemen Sumber Daya Manusia, Perusahaan menerapkan strategi *Workforce and Competence Management* untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan PGN Grup. Program ini meliputi perencanaan dan pemenuhan tenaga kerja yang kompeten, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, dalam menghadapi digitalisasi, Perusahaan melakukan upaya-upaya memperkuat keamanan data dan informasi, dengan menerapkan teknologi keamanan siber (*cyber security*) serta menerapkan governansi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko siber secara komprehensif.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

In response to the macroeconomic and industrial developments during 2024, PGN proactively implemented adaptive and innovative strategies to maintain competitiveness and achieve business goals. These strategies and policies, which include both growth and enabler initiatives, are intended to ensure the sustainability of the business, enhance operational efficiency, and protect its interests in an ever-changing energy sector.

One of the Company's main focuses in 2024 was on how to run a strategy that could meet natural gas demand amidst the challenge of decreasing gas supply, especially in West Java, Lampung, Riau, and the Riau Islands. The Company responded the challenges with mitigation measures, which involved providing LNG as an alternative gas supply to meet the gap between the available conventional gas supply and customer demand. The Company went further, and has since March of the year continued to provide intensive education to customers to provide an understanding of the differences in the LNG supply chain which are components of the selling price of LNG regasification gas. This effort is made to ensure transparency and provide opportunities for customers to adjust their needs and capabilities in absorbing LNG regasification gas. The Company also made product development as an added value that can be felt by customers, while maintaining the reliability and sustainability of gas distribution or trade, especially in unbalanced supply conditions.

In addition to ensuring energy needs were met, PGN also ran a Cost Optimization program, which involved strategies for Cost Savings and Revenue Growth. The goal of this initiative was to enhance operational cost efficiency, thereby optimizing net profits. Furthermore, PGN also made the PGN Group Liability Management Bond steps to reduce interest expenses, improve the Company's financial structure, and make it more competitive.

In terms of Human Resource management, the Company implements a Workforce and Competence Management strategy to ensure that the Company has a workforce aligned with the needs of PGN Group. This program focuses on planning and acquiring a competent workforce, thereby supporting the overall effectiveness and efficiency of the Company's operations.

Moreover, to address the growing threat of digital risks, the Company is reinforcing its data and information security by implementing cybersecurity technologies and implementing governance and policies to manage cyber risks comprehensively.

Sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan hukum dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan senantiasa mengedepankan penyelesaian sengketa dengan berbagai pendekatan yang dapat menjaga keberlanjutan kegiatan bisnis Perusahaan.

Dengan penerapan strategi dan kebijakan yang terstruktur serta berbasis pada prinsip governansi korporat, Perusahaan optimis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta menjaga daya saing di industri energi. Keberhasilan implementasi strategi ini juga semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia solusi energi yang andal dan inovatif bagi para pemangku kepentingan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi berperan aktif dalam mendukung seluruh proses bisnis dan operasional termasuk dalam hal perumusan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan. Direksi memiliki kewenangan untuk mengkaji, memonitor dan mengawasi implementasi strategi Perusahaan. Implementasi strategi dan kebijakan strategis akan mengarahkan Perusahaan agar mencapai sasaran strategi yang ditetapkan.

Beberapa tugas dan peranan utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya menganalisis situasi internal dan eksternal Perusahaan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, mendukung aspirasi Holding Migas PT Pertamina (Persero), serta menentukan tujuan strategis Perusahaan.

Pada tahun 2024, Direksi melakukan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan Perseroan tersebut tetap relevan dengan perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan Perusahaan, serta selaras dengan peran Subholding Gas di dalam ekosistem bisnis Holding Migas yaitu menjamin ketersediaan gas bumi di era transisi energi melalui agregasi komoditas dan integrasi infrastruktur. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PGN Tahun 2025 – 2029, suplemen hingga 2034 dan memperbaharui visi misi pada 29 Mei 2024.

Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, Direksi berperan penting dalam memastikan penerapannya dijalankan dengan baik dalam seluruh lapisan organisasi. Direksi melakukan komunikasi, koordinasi internal dan *monitoring* secara aktif untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Direksi juga memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan penerapan tata kelola dan nilai keberlanjutan Perusahaan.

As part of our efforts to protect our business interests, we take legal action to resolve disputes and arbitration. This measure protects the Company's legal interests, allowing business operations to run smoothly without disruptions that could harm the Company.

By implementing well-structured strategies and policies grounded in corporate governance principles, the Company is confident in its ability to achieve sustainable growth and maintain its competitiveness in the energy industry. The successful implementation of these strategies further reinforces the Company's position as a trusted and innovative energy solutions provider for its stakeholders.

The Role of the Board of Directors in Developing Strategies and Strategic Policies

The Board of Directors plays an active role in supporting all business and operational processes, including the development and implementation of strategies and policies. The Board of Directors has the authority to review, monitor, and oversee the implementation of the Company's strategies, ensuring they align with the Company's strategic targets.

Some of the main roles and responsibilities of the Board of Directors in strategy development include analyzing both the Company's internal and external factors to understand the business environment and challenges ahead. They also support the aspirations of PT Pertamina (Persero) Oil and Gas Holding and define the Company's strategic objectives.

In 2024, the Board of Directors assesses the strategies and policies to ensure they remain relevant to the evolving business environment and the Company's needs. This includes aligning with the role of Subholding Gas in the Oil and Gas Holding ecosystem, which focuses on ensuring natural gas availability during the energy transition through commodity aggregation and infrastructure integration. With the Board of Commissioners' approval, the Board of Directors has developed the Company's strategic strategies and policies for the PGN Long-Term Company Plan (RJPP) for 2025-2029, with supplements extending to 2034, and redefined the Company's vision and mission on May 29, 2024.

In developing and implementing these strategies and policies, the Board of Directors played an important role to ensure they were effective across all levels of the organization. The Board facilitated communication, internal coordination, and active monitoring to ensure the strategies and policies are implemented properly and on target. The Board of Directors also ensures that these strategies and policies are in line with governance principles and the Company's sustainability value.

Proses Penerapan Strategi dan Kebijakan Strategis yang Efektif

Direksi melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Perusahaan serta implementasinya di seluruh level organisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan Perseroan masih relevan dengan perkembangan bisnis dan penerapannya telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Direksi mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memahami serta menerapkan strategi Perseroan secara konsisten. Di samping itu, Direksi juga terlibat langsung dalam pengawasan penerapan strategi, dalam mengawasi realisasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan agar berada di jalur yang tepat.

Untuk memastikan penerapan strategi dan kebijakan tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh fungsi dalam level unit bisnis dan berjalan efektif, Direksi telah melakukan beberapa hal antara lain melakukan komunikasi secara langsung kepada level manajemen senior untuk memastikan pemahaman strategi dan kebijakan tersebut sehingga dapat mengaplikasikannya secara tepat; melakukan tinjauan manajemen atau rapat bersama unit terkait untuk memeriksa perkembangan penerapan strategi dan kebijakan; melakukan *town hall meeting* dengan seluruh pekerja secara berkala; meninjau lokasi kerja secara langsung untuk memonitor penerapan strategi dan kebijakan (*management visit*); serta memeriksa laporan audit internal dan eksternal untuk meninjau efektivitas implementasi strategi dan kebijakan tersebut.

Direksi melakukan pemantauan dan analisis berbagai indikator dalam pelaksanaan proses evaluasi dan *monitoring* penerapan strategi dan kebijakan. Dalam proses penerapannya, Direksi dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan apabila diperlukan.

Sebagai Subholding Gas, Direksi juga memastikan potensi sinergi dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero) dapat diwujudkan dan mendorong pertumbuhan Perusahaan. Pada tahun 2024, telah direalisasikan sinergi dengan Subholding Commercial & Trading melalui pembangunan Pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) Cikampek - Plumpang dengan skema Build-Maintenance-Transfer (BMT) untuk jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian. Direksi juga konsisten mendukung sinergi pengadaan kontrak-kontrak pekerjaan di lingkungan PGN Group dengan Anak Perusahaan/Afiliasi Pertamina untuk menciptakan nilai tambah bagi Holding Migas serta berkontribusi dalam mendukung kebijakan PT Pertamina (Persero) terkait dekarbonisasi, terutama di bidang transportasi CO_2 dan H_2 melalui pipa sesuai dengan *core business* Perusahaan. Perusahaan bersama tim lintas Subholding di Pertamina telah melakukan *Joint Study Agreement* dengan POSCO International Group dan mendukung Business Development Pertamina Group dalam pembuatan MoU studi Pengembangan

The Process of Effective Strategy and Strategic Policy Implementation

The Board of Directors regularly evaluates the Company's strategies and policies, as well as their implementation across all organizational levels. This evaluation ensures that the strategies and policies remain relevant to business developments and that they are being implemented in alignment with the established goals and targets.

The Board of Directors plays an active role in ensuring that every part of the organization understands and consistently implements the Company's strategies. Additionally, the Board of Directors is directly involved in overseeing the implementation of these strategies, ensuring that the realization of the implementation of the Company's strategies and policies is on the right track.

To ensure the effective implementation of strategies and policies, the Board of Directors ensures that all functions at the relevant business unit levels understand and implement them properly. This includes direct communication with senior management to ensure their understanding and proper implementation of the strategies and policies. The Board also conducts management reviews and meetings with relevant units to assess the progress of strategy and policy implementation, conducts management visits to work locations to monitor the strategies and policies implementation, and reviews internal and external audit reports to evaluate the effectiveness of the strategies and policies.

The Board of Directors monitors and analyzes various indicators as part of the evaluation and oversight process for the implementation of strategies and policies. During this process, the Board of Directors can make adjustments to strategies and policies if necessary to ensure their effectiveness.

As a Gas Subholding, the Board of Directors also ensures that the potential synergies within PT Pertamina (Persero)'s Oil and Gas Holding are realized and encourage the Company's growth. In 2024, a synergy with the Commercial & Trading Subholding was achieved through the construction of the Cikampek - Plumpang Fuel Oil (BBM) Pipeline, utilizing the Build-Maintenance Transfer (BMT) scheme for a 10-year operational period. Additionally, the Board of Directors consistently supports synergy in the procurement of work contracts within the PGN Group and Pertamina's Subsidiaries/Affiliates, aiming to create added value for the Oil and Gas Holding and contribute to PT Pertamina's (Persero) policies on decarbonization. This includes efforts related to CO_2 and H_2 transportation via pipelines in line with the Company's core business. Collaborating with the cross-Subholding team at Pertamina, a Joint Study Agreement has been conducted with the POSCO International Group. This partnership supports the Pertamina Group's Business Development and helps prepare

Carbon Capture Storage (CCS)/*Carbon Capture Utilization Storage* (CCUS) antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

a Memorandum of Understanding (MoU) for a Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) Development study between PT Pertamina (Persero) and PT Pupuk Indonesia (Persero).

PENCAPAIAN KINERJA 2024

2024 ACHIEVEMENTS

Perbandingan Kinerja Keuangan Year on Year

Pada tahun 2024, Perusahaan mencatatkan pencapaian kinerja keuangan konsolidasian yang lebih baik dibandingkan pencapaian kinerja keuangan di tahun 2023.

Pendapatan konsolidasi tahun 2024 sebesar USD3,79 miliar, meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD3,65 miliar. Hal ini terutama didorong oleh kinerja bisnis LNG *trading* internasional, peningkatan pendapatan dari transmisi gas serta regasifikasi.

Implementasi strategi yang efektif berkontribusi kepada peningkatan pendapatan konsolidasi dan laba bruto dan dengan optimalisasi operasional, *cash and liability management* yang berdampak pada turunnya beban keuangan setelah pelunasan obligasi, serta peningkatan laba *joint venture* dan keuntungan selisih kurs menjadi faktor yang mendukung Perusahaan tetap dapat mempertahankan profitabilitas sehingga dapat mencatatkan peningkatan Laba Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Induk tahun 2024 sebesar USD339 juta atau naik 22% dibandingkan tahun 2023.

Total Aset Perusahaan tahun 2024 sebesar USD6,42 miliar, terjaga stabil dibandingkan tahun 2023 sebesar USD6,60 miliar. Posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 merupakan hasil dari implementasi *liability management* yaitu pelunasan obligasi di triwulan 2 tahun 2024 sehingga total liabilitas tercatat sebesar USD2,74 miliar dan total ekuitas sebesar USD3,67 miliar sehingga mampu menjaga rasio keuangan yang mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan stabil dengan *debt to equity ratio* 2024 sebesar 34,6%.

Arus Kas konsolidasian per 31 Desember 2024 menunjukkan posisi yang kuat didorong oleh arus kas operasi yang positif sebesar USD785 juta atau naik sekitar 9% dari USD 724 juta tahun 2023, dengan saldo kas dan setara kas akhir tahun tercatat sebesar USD1,38 miliar, meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi belanja modal 2024 sebesar USD255 juta, naik sekitar 10% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD232 juta dengan penyerapan dominan oleh segmen niaga dan transmisi dan selebihnya diserap oleh segmen Explorasi dan Produksi Minyak dan Gas dan segmen operasi lainnya.

Year-on-Year Comparison of Financial Performance

In 2024, the company achieved better consolidated financial results compared to 2023.

Consolidated revenue in 2024 reached USD3.79 billion, an increase of around 4% from USD3.65 billion posted in 2023. The increase was mainly driven by the performance of the international LNG trading business and an increase in revenue from gas transmission and regasification.

Effective strategy execution contributed to the increase in consolidated revenue and gross profit and with operational optimization, cash and liability management, which resulted in a decrease in financial expenses after bond settlement, and an increase in joint venture profit and foreign exchange profit that became factors that supported the Company to maintain profitability, allowing it to post an increase in Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity in 2024 of USD339 million or an increase of 22% compared to 2023.

The Company's Total Assets in 2024 stood at USD6.42 billion, or stable compared to 2023 of USD6.60 billion. The Company's financial position as of December 31, 2024 was the result of its sound of liability management, after the settlement of bonds in the second quarter of 2024 that brought total liabilities and total equity to USD2.74 billion and USD3.67 billion respectively, resulting in the Company registering a financial ratio that reflected a healthy and stable financial structure with a debt to equity ratio of 2024 of 34.6%.

Consolidated Cash Flow as of December 31, 2024 showed a strong position driven by positive operating cash flow of USD785 million or an increase of around 9% from USD724 million in 2023, with cash and cash equivalents at the end of the year recorded at USD1.38 billion, an increase of around 11% compared to 2023.

Realized capital expenditure in 2024 was USD255 million, an increase of around 10% compared to USD232 million in 2023 with dominant absorption by the commercial and transmission segments and the rest was absorbed by the Oil and Gas Exploration and Production segment and other operating segments.

Perbandingan Kinerja Operasional *Year on Year*

Pada tahun 2024, Perusahaan menghadapi kondisi ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan gas, terutama di wilayah Jawa Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau, yang berdampak pada kinerja penyerapan volume niaga gas. Pencapaian volume niaga gas pada tahun 2024 sebesar 852 BBTUD dibandingkan 923 BBTUD pada tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi keterbatasan (defisit) pasokan gas yang disebabkan kondisi *natural decline* di blok pemasok utama di wilayah tersebut. Berdasarkan sumber gas, mayoritas pasokan gas berasal dari Corridor Block dan Pertamina Grup, dan selebihnya berasal dari pemasok gas lainnya. Kondisi ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan gas, serta belum terhubungnya wilayah yang memiliki surplus gas ke wilayah yang mengalami defisit gas dengan infrastruktur pipa gas bumi, menyebabkan Perusahaan harus memasok gas dari sumber gas yang berada di luar Sumatera dan Jawa melalui moda LNG yang kemudian diregasifikasi dan dialirkan melalui pipa ke pelanggan.

Pencapaian dari bisnis transmisi gas di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 1.543 MMSCFD dari 1.458 MMSCFD pada tahun 2023 sejalan dengan peningkatan transportasi gas dari ruas Gresik – Semarang dari sumber pasokan di Jawa Timur untuk pelanggan sektor Listrik (*power*) dan peningkatan volume transportasi gas untuk pelanggan kilang di Kalimantan.

Pencapaian volume penyaluran regasifikasi LNG dengan optimalisasi FSRU Lampung melalui *Terminal Usage Agreement* (TUA) untuk pelanggan sektor kelistrikan di Jawa Barat mencapai 72 BBTUD atau meningkat 34% dari 54 BBTUD di tahun 2023. Sementara volume penyaluran regasifikasi LNG *onshore* di Aceh mengalami penurunan sejalan dengan alokasi LNG yang diperoleh pelanggan sektor kelistrikan dan pupuk sebagai pengguna fasilitas regasifikasi LNG *onshore* Arun.

Pada tahun 2024, segmen bisnis hulu mencapai volume *lifting* sebesar 20.181 BOEPD atau menurun dari 25.085 BOEPD pada tahun 2023. Penurunan volume *lifting* terutama disebabkan oleh penurunan produksi akibat *natural decline* di sumur minyak dan gas di blok migas Pangkah, Ketapang, Muriah dan Bangkanai serta belum adanya sumur baru yang dapat diproduksi dari lapangan Fasken di Texas, Amerika Serikat.

Realisasi belanja modal (*capital expenditure/capex*) pada tahun 2024 mencapai sebesar USD255 juta, mencakup antara lain revitalisasi Tank F-6004 di Arun, pembangunan pipa BBM Cikampek Plumpang, pengembangan blok hulu antara lain Pangkah (lapangan Ronggolawe, Ujung Pangkah, dan West Pangkah), perpanjangan KKKS blok Ketapang, pengembangan lapangan Jangkrik North East (blok Muara Bakau), pemasangan pipa ke calon pelanggan industri, komersial dan pelanggan kecil, pembangunan jaringan gas rumah tangga, serta pembangunan infrastruktur kehandalan jaringan guna mendukung kehandalan penyaluran gas ke seluruh pelanggan.

Year-on-Year Operational Performance Comparison

In 2024, the Company faced a gap in gas supply and demand, especially in the areas of West Java, South Sumatra, Riau, and the Riau Islands, which had an impact on the absorption performance of gas trading volume. The achievement of gas trading volume in 2024 was 852 BBTUD compared to 923 BBTUD in 2023. This was mainly driven by the limited (deficit) gas supply conditions caused by natural decline conditions in the main supplier blocks in the region. Based on gas sources, the majority of gas supplies come from the Corridor Block and Pertamina Group while the rest comes from other gas suppliers. The gap in gas supply and demand, as well as the fact that areas with a gas surplus to areas were still not connected with those with gas deficit with natural gas pipeline infrastructure, means that the Company still had to supply gas from gas sources outside Sumatra and Java through LNG mode which was then regasified and distributed through pipelines to customers.

The achievement of the gas transmission business in 2024 increased by 6% to 1,543 MMSCFD from 1,458 MMSCFD in 2023 in line with the increase in gas transportation from the Gresik - Semarang section from supply sources in East Java for customers in the power sector and the increase in gas transportation volume for those in refinery in Kalimantan.

The achievement of LNG regasification distribution volume by optimizing the Lampung FSRU through the Terminal Usage Agreement (TUA) for electricity sector customers in West Java reached 72 BBTUD or increased by 34% from 54 BBTUD in 2023. Meanwhile, the volume of onshore LNG regasification distribution in Aceh decreased in line with the LNG allocation obtained by power and fertilizer sector customers as users of the Arun onshore LNG regasification facility.

In the upstream business segment, lifting volume in 2024 was 20,181 BOEPD, a decline from 25,085 BOEPD in 2023. The reduction was primarily due to a natural decline in production from oil and gas wells in the Pangkah, Ketapang, Muriah, and Bangkanai blocks, along with the absence of new wells that could be produced from the Fasken field in Texas, USA.

Capital expenditure (capex) in 2024 reached USD255 million. Key projects included the revitalization of Tank F-6004 in Arun, construction of the Cikampek-Plumpang fuel pipeline, the development of the Ketapang block (including Ronggolawe, Pangkah, and West Pangkah fields), the extension of the Ketapang block KKKS, development of the Jangkrik North East field (Muara Bakau block), installation of pipes for prospective industrial, commercial, and small customers, construction of household gas networks, and infrastructure improvements to ensure reliable gas distribution to all customers.

Selama tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan penugasan dan mendukung program-program strategis Pemerintah yang mencakup di antaranya pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Pada tahun 2024, PGN berhasil menambah jaringan pipa jargas lebih dari 200 km dan memasang sambungan rumah tangga sebanyak 35.487 Sambungan Rumah (SR), serta menyalurkan volume gas bumi sebesar 27 juta m^3 untuk lebih dari 800 ribu pelanggan rumah tangga. Subholding Gas juga turut melaksanakan penugasan Pemerintah lainnya yaitu penyediaan bahan bakar gas bumi (BBG) untuk transportasi di 12 kota/kabupaten sebesar 1,56 MMSCFD dan penyaluran gas bumi dengan harga tertentu atau HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) kepada 7 sektor industri dan pembangkit tenaga listrik dengan volume sebesar 448 BBTUD.

In 2024, the Company continued to support the government's strategic initiatives, including the development of a household gas network as part of the National Strategic Projects. Further in the year, PGN successfully added more than 200 km of gas pipelines and installed 35,487 household connections (SR), and distributed a volume of natural gas of 27 million m^3 to more than 800 thousand household customers. Subholding Gas also carried out other government assignments, namely the provision of natural gas fuel (BBG) for transportation in 12 cities/regencies of 1.56 MMSCFD and the distribution of natural gas at a certain price or HGBT (Certain Natural Gas Price) to 7 industrial sectors and power plants with a volume of 448 BBTUD.

Perbandingan antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

PGN kembali dapat melewati tantangan selama tahun 2024 dengan baik. Pencapaian kinerja di tahun 2024 merupakan wujud upaya PGN untuk terus melakukan pengelolaan bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal dan aman serta tetap menghadirkan value bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Meski demikian, kami juga menyadari terdapat beberapa hal yang tidak mencapai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), baik dari sisi operasional maupun keuangan.

Realisasi Niaga Gas mencapai sebesar 852 BBTUD atau 89% dari target 2024 disebabkan kondisi penurunan volume dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa, yang dipengaruhi oleh kondisi penurunan alamiah di lapangan gas dan adanya kegiatan *maintenance* dari pemasok gas Perusahaan. Mengantisipasi hal ini, PGN menjalankan beberapa strategi di antaranya melalui perluasan jangkauan infrastruktur pipa gas serta optimalisasi terminal regasifikasi LNG untuk pengembangan produk (*product development*) melalui diversifikasi sumber pasokan dengan menyediakan gas hasil regasifikasi LNG.

Dengan mengoptimalkan terminal regasifikasi LNG di Lampung melalui *Terminal Usage Agreement* (TUA), volume penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kelistrikan mencapai 72 BBTUD atau 144% dari target 2024, sementara penyaluran volume gas regasifikasi LNG fasilitas di Arun mencapai 146 BBTUD atau 76% dari target disebabkan penurunan alokasi LNG pelanggan sektor pupuk dan pengaturan pola operasional *plant* pelanggan.

Pencapaian dari bisnis transmisi gas di tahun 2024 tercatat sebesar 1.543 MMSCFD atau mencapai 102% dari target 2024 dikontribusikan dari adanya peningkatan transportasi gas dari ruas Gresik - Semarang dari sumber pasokan di Jawa Timur untuk pelanggan sektor listrik (*power*) dan peningkatan volume transportasi gas untuk pelanggan kilang di Kalimantan.

Comparison Between Achieved and Targeted Results

PGN was able to get through the challenges of 2024 successfully, with its performance reflecting the company's ongoing efforts to manage the downstream natural gas business efficiently, reliably, and securely, while also delivering value to shareholders and other stakeholders. However, there were areas where results did not fully meet the Company's Work Plan and Budget (RKAP), both in operations and finances.

Gas trading realization in 2024 reached 852 BBTUD, or 89% of the targeted volume. This shortfall was primarily due to a decrease in volume from suppliers in the Sumatra and Java regions, which was influenced by natural conditions in the gas fields and maintenance activities by the Company's gas suppliers. To address this, PGN is implementing several strategies, including expanding the gas pipeline infrastructure and optimizing the LNG regasification terminal for product development, through diversifying supply sources by utilizing gas from LNG regasification.

By optimizing the LNG regasification terminal in Lampung through the Terminal Usage Agreement (TUA), we achieved 72 BBTUD or 144% of target in the distribution volume to meet electricity customer needs, while the distribution volume of LNG regasification gas facilities in Arun reached 146 BBTUD or 76% of the target due to a decrease in LNG allocation for fertilizer sector customers and the regulation of customer plant operational patterns.

The gas transmission business in 2024 was recorded at 1,543 MMSCFD or reaching 102% of the 2024 target contributed by an increase in gas transportation from the Gresik - Semarang section from supply sources in East Java for customers in the power sector and an increase in gas transportation volume for refinery customers in Kalimantan.

Realisasi *lifting* Minyak dan Gas mencapai 20.181 BOEPD atau 87% dari target 2024, disebabkan perubahan jadwal pengeboran sumur WPA-06 di WK Pangkah, penundaan tambahan kegiatan *drilling* di Wilayah Kerja Fasken dan penyesuaian volume produksi di Wilayah Kerja Muriah.

Dari aspek kinerja keuangan, pendapatan konsolidasi 2024 sebesar USD 3,79 miliar, atau 83% dari target, dipengaruhi oleh penyerapan volume niaga gas dan kelanjutan implementasi harga gas untuk industri tertentu serta realisasi LNG trading global dan volume *lifting* migas. Atas kontribusi dari kenaikan pendapatan dari bisnis transmisi, dari usaha regasifikasi LNG dengan optimalisasi FSRU Lampung dan regasifikasi *onshore* Arun, didukung penerapan optimalisasi operational, *cash & liability management*, yang berdampak pada peningkatan pendapatan keuangan dan turunnya beban keuangan, serta peningkatan laba dari *joint venture* dan laba selisih kurs, Perusahaan dapat mencatatkan pencapaian laba bersih sebesar USD 339 juta yang melebihi target RKAP 2024.

Oil and Gas lifting Realization reached 20,181 BOEPD or 87% of the 2024 target, due to changes in the WPA-06 well drilling schedule in the Pangkah Working Area, more delays in drilling activities in the Fasken Working Area and adjustments to production volumes in the Muriah Working Area.

In terms of financial performance, we delivered USD 3.79 billion in consolidated revenue, or 83% of the target, driven by the absorption of gas trading volume and the continuation of the implementation of gas prices for certain industries as well as the realization of global LNG trading and oil and gas lifting volume. Due to the contribution of increased revenue from the transmission business, from the LNG regasification business with the optimization of the Lampung FSRU and the Arun onshore regasification, supported by the implementation of operational optimization, cash & liability management, which increased financial income and decreased financial expenses while increasing profits from joint ventures and foreign exchange profit, we posted a net profit of USD 339 million or above 2024 RKAP target.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Mitigasinya

Sepanjang tahun 2024, kami menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran sebagai Subholding Gas di Indonesia terutama kondisi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan gas. Fluktuasi harga energi global, ketidakpastian geopolitik, serta meningkatnya tuntutan terhadap transisi energi menjadi faktor eksternal yang memengaruhi bisnis gas bumi. Selain itu, perubahan regulasi dan dinamika pasar domestik, termasuk peningkatan kebutuhan energi bersih dan efisiensi distribusi gas, turut menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Dalam rangka merespons tantangan yang ada, PGN menerapkan strategi mitigasi secara komprehensif. Kami memperkuat fleksibilitas rantai pasok dengan diversifikasi sumber pasokan gas dan optimalisasi infrastruktur transmisi serta distribusi. Dalam rangka memperluas jangkauan penyaluran gas bumi yang lebih rendah karbon, pada tahun 2024 PGN juga telah merealisasikan penyaluran LNG retail menggunakan isotank (*beyond pipeline*) ke pelanggan di Kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

Digitalisasi operasional juga terus ditingkatkan untuk mendukung penerapan efisiensi, transparansi, dan ketahanan bisnis. Selain itu, PGN berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan energi berbasis gas yang lebih ramah lingkungan seperti biomethane. Melalui berbagai langkah strategis yang telah diterapkan, PGN berupaya menjaga keberlanjutan bisnis serta memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi nasional.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan pasokan pipa gas dari pemasok utama yaitu di blok Corridor dan blok gas lainnya, Perusahaan telah melakukan upaya-upaya penyediaan pasokan dari regasifikasi LNG domestik. Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada pelanggan terkait disparitas harga untuk memastikan *willingness to pay* terhadap gas regasifikasi LNG.

Challenges Faced And Mitigation Measures

In 2024, we encountered several challenges in our role as Subholding Gas in Indonesia. External factors such as fluctuations in global energy prices, geopolitical uncertainty, and the growing demand for energy transition significantly impacted the natural gas business. Additionally, changes in regulations and domestic market dynamics, including the rising demand for clean energy and the need for more efficient gas distribution, presented further challenges.

To address these issues, PGN implemented a comprehensive mitigation strategy. The company enhanced the flexibility of its supply chain by diversifying gas supply sources and optimizing transmission and distribution infrastructure. In an effort to expand the reach of lower-carbon natural gas, PGN also initiated retail LNG distribution using isotanks (beyond pipeline) to customers in Central and Eastern Indonesia in 2024.

Operational digitalization efforts were also intensified to support efficiency, transparency, and business resilience. Furthermore, PGN collaborated with various stakeholders to develop more environmentally friendly gas-based energy solutions, such as biomethane. Through these strategic measures, PGN aims to ensure business sustainability and make a significant contribution to national energy security.

The Company dealt with the gap of gas pipeline supply from its main suppliers, namely in the Corridor block and other gas blocks, with efforts to provide supplies from domestic LNG regasification. The Company also conducted socialization to customers regarding price disparities to ensure willingness to pay for LNG regasification gas.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2024, PGN melalui *Human Capital Management Division* terus berupaya dalam mencapai tujuan bisnis Perusahaan dengan mengembangkan talenta Perwira Subholding Gas, mengendalikan proses strategi Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengembangkan kompetensi pekerja. Perusahaan menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi hal krusial bagi keberlanjutan bisnis yang kian dinamis di tengah-tengah kemajuan transformasi bisnis yang dipicu pesat oleh teknologi informasi dan digitalisasi.

Menyikapi hal ini, kami menjalankan beberapa inisiatif dalam proyek strategis Perusahaan tahun 2024 antara lain melakukan penyesuaian organisasi yang sejalan dengan kebutuhan proyek/program strategis, melakukan pemenuhan tenaga kerja dalam organisasi keproyekan, memenuhi kompetensi melalui program *learning* dan profesional sertifikasi, serta mengindentifikasi dan menyusun tata laksana dengan pemenuhan Dokumen Acuan Kerja sebagai implementasi *quality management*. Selain itu, kami juga menjalakan program strategis lainnya yaitu *Leader Readiness Program* dengan program *succession plan* pada posisi–posisi kritikal di Perusahaan, keikutsertaan pekerja Subholding Gas pada setiap program pengembangan pekerja untuk *leadership* & *managerial competency* yang diselenggarakan Pertamina sebagai Holding, keikutsertaan pekerja Subholding Gas pada program sertifikasi kompetensi berstandar BNSP dan internasional, menjalankan program *upskilling* untuk memberikan pembekalan bagi pekerja, serta melakukan pengukuran efektifitas dari program dan aktivitas program pelatihan. Berkenaan dengan tantangan bisnis yang dihadapi PGN ke depan, dalam hal aspek pengembangan sumber daya manusia, pada tahun 2024 PGN mengadakan program *Xperiential Learning Exploring LNG Topics* (Xplore LNG) sebagai upaya pemenuhan kompetensi karyawan guna menghadapi tantangan bisnis LNG kedepannya.

Dalam pengembangan teknologi informasi, pada tahun 2024 PGN berfokus untuk mendukung transformasi digital Perusahaan dengan mengimplementasikan program-program pengembangan teknologi yang terstruktur, berkelanjutan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam menciptakan inovasi secara efektif. Untuk itu, PGN melaksanakan 5 (lima) tema program strategis Teknologi Informasi untuk memperkuat transformasi digital Perusahaan, yaitu: *Data Driven Solution, Application as Business Enabler, ERP Solution, Infrastructure Reliability & Availability, ICT Governance, Synergy & Strategic.*

Adapun tujuan dan manfaat dari program strategis teknologi informasi tersebut antara lain:

a. *Data Driven Solution*, yaitu implementasi solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien;
b. *Application as Business Enabler*, yaitu pengembangan aplikasi yang mendukung operasional bisnis, seperti PGN Mobile dan PGN Partner, untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan;

HUMAN RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

In 2024, PGN, through the Human Capital Management Division, continues to focus on achieving the company's business objectives by developing the talents of Subholding Gas employees, managing the HR strategy process, and enhancing employee competencies. The Company recognizes that human resource development is essential for sustaining growth in an increasingly dynamic business environment, particularly with the rapid pace of business transformation driven by information technology and digitalization.

To address these needs, we are implementing several initiatives in the Company's strategic projects for 2024 among others, making organizational adjustments in line with the needs of strategic projects/programs, fulfilling workforce requirements in project organizations, enhancing competencies through learning programs and professional certifications, and developing procedures by completing the Work Reference Document as part of quality management implementation. Additionally, we are running other strategic programs, such as the Leader Readiness Program with a succession plan for critical positions, ensuring Subholding Gas employees participate in leadership and managerial competency development programs organized by the Holding, engaging in BNSP and international standard competency certification programs, providing upskilling opportunities for workers, and assessing the effectiveness of training programs. With regard to the business challenges faced by PGN in the future, in terms of human resource development aspects, in 2024 PGN held the Xperiential Learning Exploring LNG Topics (Xplore LNG) program as an effort to fulfill employee competencies to face the challenges of the LNG business in the future.

In 2024, PGN focused on advancing the company's digital transformation by implementing structured and sustainable technology development programs, aiming to optimize digital technology for effective innovation. To achieve this, PGN is rolling out five strategic IT program themes to strengthen its digital transformation. These themes include data-Driven Solutions, Application as a Business Enabler, ERP Solutions, Infrastructure Reliability & Availability, and ICT Governance, Synergy & Strategic Planning.

The objectives and benefits of the information technology strategic program include:

a. Data Driven Solution, namely the implementation of data-driven solutions to support more accurate and efficient decision making;
b. Application as Business Enabler, namely the development of applications that support business operations, such as PGN Mobile and PGN Partner, to improve efficiency and customer service;

c. ERP *Solution*, yaitu penerapan sistem ERP untuk integrasi proses bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data;
d. *Infrastructure Reliability* & *Availability*, yaitu penguatan infrastruktur TI untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem yang mendukung operasional Perusahaan; dan
e. ICT *Governance*, *Synergy* & *Strategic Planning*, yaitu peningkatan tata kelola TI, sinergi antar departemen, dan perencanaan strategis untuk memastikan alignment TI dengan tujuan bisnis Perusahaan.

Perusahaan juga merealisasikan berbagai program strategis lainnya meliputi antara lain: program Digitalisasi Berlangganan Gas Fase 2, program Penguatan Infrastruktur TI, program Integrasi *Surrounding* Aplikasi, program Sentralisasi Pengembangan & Pemeliharaan untuk *Enterprise Application*, dan Keselarasan Inisiatif *Master Plan* TI (MPTI) 2021-2026 & Kebijakan IT *Holding*.

Program Digitalisasi Berlangganan Gas Fase 2 merupakan pengembangan PGN Mobile Fase 2 dan Aplikasi Berlangganan Gas Fase 2. Program ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan gas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional; program Penguatan Keamanan Siber pada Aspek People, Process, Technology bertujuan untuk penguatan keamanan di area Teknologi Operasional (OT) dan peningkatan indeks kematangan siber, yang bertujuan meningkatkan keamanan data dan sistem Perusahaan; program Penguatan Infrastruktur TI untuk meningkatkan resiliensi keamanan siber yang merupakan implementasi *Backup Management* dan penguatan Pusat Pemulihan Bencana untuk memastikan kontinuitas operasional dan mitigasi risiko terkait keamanan siber; program Integrasi *Surrounding* Aplikasi yang merupakan integrasi aplikasi pendukung untuk meningkatkan efisiensi operasional dan konsistensi data di seluruh sistem Perusahaan; program Sentralisasi Pengembangan & Pemeliharaan untuk Enterprise Application yang merupakan Sentralisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di ICT untuk pengembangan aplikasi pendukung bisnis inti, memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengembangan aplikasi; serta program Keselarasan Inisiatif MPTI 2021-2026 & Kebijakan IT *Holding*, yaitu pelaksanaan 4 (empat) inisiatif sesuai *Master Plan* TI untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan IT *Holding*, mendukung strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Implementasi program-program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap digitalisasi di PGN, meningkatkan efisiensi operasional, keamanan siber, dan kemampuan adaptasi Perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pasar.

c. ERP Solution, namely the implementation of an ERP system for better business process integration, improving operational efficiency and data accuracy;
d. Infrastructure Reliability & Availability, namely strengthening IT infrastructure to ensure the availability and reliability of systems that support the Company's operations; and
e. ICT Governance, Synergy & Strategic Planning, namely improving IT governance, inter-departmental synergy, and strategic planning to ensure IT alignment with the Company's business objectives.

The Company also realized various other strategic programs including: Phase 2 Gas Subscription Digitalization program, IT Infrastructure Strengthening program, Application Surrounding Integration program, Development & Maintenance Centralization program for Enterprise Application, and Alignment of IT Master Plan Initiative (MPTI) 2021-2026 & IT Holding Policy.

The Phase 2 Gas Subscription Digitalization Program was a development of PGN Mobile Phase 2 and the Phase 2 Gas Subscription Application. This program aimed to facilitate customers in accessing gas services, increase customer satisfaction and operational efficiency; the Cyber Security Strengthening program in the People, Process, Technology Aspect aimed to strengthen security in the Operational Technology (OT) area and increase the cyber maturity index where the objective was to improve the security of the Company's data and systems; the IT Infrastructure Strengthening program to improve cybersecurity resilience which is the implementation of Backup Management and strengthening the Disaster Recovery Center to ensure operational continuity and mitigation of cybersecurity-related risks; the Application Surrounding Integration program which was the integration of supporting applications to improve operational efficiency and data consistency throughout the Company's system; Centralization of Development & Maintenance program for Enterprise Application which was the Centralization of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in ICT for the development of core business support applications, ensuring consistency and efficiency in application development; and the MPTI 2021-2026 Initiative Alignment program & IT Holding Policy, which was implementation of 4 (four) initiatives according to the IT Master Plan to ensure alignment with the IT Holding policy, supporting the company's overall business strategy.

The implementation of these programs has had a significant impact on digitalization at PGN, increasing operational efficiency, cyber security, and the Company's ability to adapt to changes in technology and the market.

PROSPEK USAHA

Memasuki tahun 2025, kami berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan peluang di tengah dinamika industri energi global dan nasional. Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan stagnan di 3,2% dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5%.

Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen pemuktahiran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025 (KEM & PPKF 2025) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laju perekonomian Indonesia diharapkan tumbuh dalam rentang 5,1% - 5,5% di 2025 yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tingkat inflasi terjaga dalam rentang 1,5% - 3,5% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300 – Rp15.900, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9% - 7,2%. Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan bergerak dalam rentang USD 75 – USD 85 per barrel yang masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+.

Dalam merancang strategi pertumbuhan yang berkelanjutan, kami menggunakan asumsi internal tahun 2025 berdasarkan kinerja operasional tahun 2024 dan *cascading* RJPP 2025-2029 suplemen 2034. Asumsi ini menjadi dasar dalam penyusunan target operasional yang realistis dan terukur di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan nilai kontrak eksisting serta potensi penetrasi pasar baru.

Pada aspek niaga gas, PGN memproyeksikan volume niaga gas dengan range sekitar 873 - 958 BBTUD. Target ini didukung oleh optimalisasi kontrak yang telah berjalan serta strategi ekspansi ke pasar yang lebih luas. Untuk transportasi gas, PGN memproyeksikan volume transportasi sebesar 1.435 MMSCFD, yang diperoleh dari kontrak eksisting. Di sektor minyak dan gas, proyeksi volume transportasi minyak mentah sebesar 178.347 BOEPD serta *lifting* minyak dan gas sebesar 17.227 BOEPD menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kestabilan pasokan energi nasional. Target operasional yang dicanangkan oleh Perusahaan pada tahun 2025 bersifat dinamis dan terbuka untuk menyesuaikan dengan kebijakan PT Pertamina (Persero) selaku Holding Migas dan kondisi pasar.

Dalam menjaga keandalan infrastruktur, PGN menargetkan *availability* infrastruktur gas minimal mencapai 98%, guna memastikan kontinuitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, efisiensi dalam distribusi dan transmisi gas juga menjadi prioritas, dengan asumsi *Unaccounted Gas* Distribusi maksimal -0,4% dan *Unaccounted Gas* Transmisi maksimal -0,4%.

BUSINESS PROSPECT

As we enter 2025, we are strategically positioned to seize opportunities amidst the evolving dynamics of the global and national energy industry. Rising geopolitical tensions are expected to continue posing challenges to the global economy. The IMF forecasts global economic growth to stagnate at 3.2% in 2025, with inflation remaining relatively high at 4.5%.

Amidst these challenges, in its latest document of the Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles 2025 (KEM & PPKF 2025) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Indonesian economy is expected to grow in the range of 5.1% - 5.5% in 2025 supported by strong domestic demand and fiscal policies in maintaining economic stability. Inflation looks stable as it will grow milder at 1.5% - 3.5% and the Rupiah exchange rate against the US Dollar is estimated to hover around IDR 15,300 - IDR 15,900, while the yield of 10-year SBN is estimated to be in the range of 6.9% - 7.2%. The price of Indonesian crude oil (Indonesia Crude Price/ICP) is estimated to move in the range of USD 75 - USD 85 per barrel which is still influenced by the dynamics of Middle Eastern geopolitics, global economic conditions, and OPEC + policies.

In developing a sustainable growth strategy, we rely on internal assumptions for 2025 based on operational performance in 2024 and the RJPP 2025-2029 supplement 2034. These assumptions serve as the foundation for establishing realistic and measurable operational targets, considering existing contracts and the potential for market expansion.

For the gas trading sector, PGN targets a gas trading volume of 873 - 958 BBTUD, supported by optimizing existing contracts and expanding into broader markets. In gas transportation, PGN expects a volume of 1,435 MMSCFD from current contracts. In the oil and gas sector, PGN anticipates a crude oil transportation volume of 178,347 BOEPD and oil and gas lifting of 17,227 BOEPD, contributing to the stability of the national energy supply. The Company has set dynamic operational targets for the upcoming 2025 yet remain open to adjustments to the policies of PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas Holding and market conditions.

To maintain infrastructure reliability, PGN has set a target for a minimum gas infrastructure availability of 98% to ensure continuity service and customer satisfaction. Efficiency in gas distribution and transmission remains a key priority, with goals of maintaining a maximum of -0.4% Unaccounted Distribution Gas and -0.4% Unaccounted Transmission Gas.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan, PGN menetapkan fokus strategis pada tiga aspek utama, yaitu HSSE & ESG, Operasional Utama, serta *Growth* (*Learning & Growth*). HSSE & ESG menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan bisnis, dengan fokus pada pencapaian *HSSE Excellence* melalui target *Total Recordable Incident Rate* (TRIR) 0,17, serta peningkatan budaya keselamatan melalui keterlibatan manajemen dan HSSE *Committee*. Pada aspek lingkungan, PGN menargetkan reduksi emisi karbon sebesar ≥ 4.732 ton CO_2e serta mempertahankan *Rating ESG* pada skor 20,2 (*Medium Risk/Sustainalytics*) atau Level C. Selain itu, pengelolaan aset menjadi prioritas melalui implementasi *Asset Integrity Management,* yang mencakup perbaikan registrasi aset, pemenuhan sertifikasi personil, dan kajian peralatan kritis guna memastikan keandalan infrastruktur.

Pada aspek operasional utama, PGN menargetkan peningkatan volume niaga gas, transportasi gas, *lifting* migas, dan transportasi minyak secara konsolidasi dibandingkan prognosa 2024. PGN juga mengoptimalkan bisnis LNG *trading*, dengan target tujuh kargo LNG kepada pelanggan di China serta pencapaian laba operasi yang signifikan dari kegiatan ini. Dalam aspek layanan, fokus diberikan pada peningkatan *Customer Satisfaction Index* (CSI) hingga 4,5 dari skala 5, serta *Gas Pipeline Availability* sebesar 98% untuk memastikan keandalan pasokan. Sejalan dengan program energi nasional, PGN menargetkan akselerasi pembangunan jaringan gas rumah tangga sebanyak 200.000 Sambungan Rumah (SR), serta peningkatan akuisisi pelanggan baru sebanyak 114 pelanggan (CA) dengan tambahan volume mencapai 14,7 BBTUD. Selain itu, pengelolaan Penanaman Modal Negara (PMN) Aset Jargas terus dioptimalkan untuk meningkatkan utilisasi pelanggan Jargas APBN dan pendapatan dari aset tersebut.

Dalam strategi *Growth* (*Learning & Growth*), PGN berkomitmen untuk mempercepat pengembangan investasi dengan target anggaran biaya investasi sebesar USD 337,7 juta. Hal ini sejalan dengan upaya transisi energi, dengan pengembangan bisnis *biomethane* dan pengembangan *Carbon Capture Storage/ Utilization* (CCS/CCUS). Selain itu, PGN juga terus berupaya menurunkan *vacancy rate* di Subholding Gas menjadi 10%, meningkatkan penggunaan TKDN hingga mencapai 40%, serta memastikan 80% kontrak selesai terverifikasi. Dalam aspek manajemen risiko, target *Total Capacity at Risk* sebesar 18% dan *Risk Maturity Index* (RMI) pada 3,7 menjadi indikator utama dalam menjaga stabilitas bisnis.

Dalam menghadapi dinamika industri energi dan memastikan keberlanjutan bisnis ke depan serta dalam rangka mencapai RKAP 2025, kami akan menerapkan strategi G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*) sebagai langkah optimalisasi pasokan, pengembangan infrastruktur, peningkatan bisnis LNG, serta ekspansi ke sektor energi hijau. Pada aspek *Grow*, kami akan fokus pada keberlanjutan pasokan gas bumi dengan mengoptimalkan kontrak pasokan melalui perpanjangan,

To achieve sustainable growth, PGN has outlined a strategic focus on three key areas: HSSE & ESG, Main Operations, and Growth (Learning & Growth). HSSE & ESG are fundamental pillars for supporting business sustainability. The company aims to achieve HSSE Excellence with a Total Recordable Incident Rate (TRIR) target of 0.17, while also fostering a strong safety culture through active management and HSSE Committee involvement. In terms of environmental impact, PGN aims to reduce carbon emissions by ≥ 4,732 tons of CO_2e and maintain an ESG Rating of 20.2 (Medium Risk/Sustainalytics) or Level C. Additionally, asset management is a priority, with efforts focused on implementing Asset Integrity Management. This includes improving asset registration, ensuring personnel certification, and reviewing critical equipment to ensure the continued reliability of infrastructure.

In the main operational aspects, PGN aims to increase the volume of gas trading, gas transportation, oil and gas lifting, and oil transportation on a consolidated basis compared to the 2024 prognosis. PGN is also optimizing its LNG trading business, targeting the delivery of seven LNG cargoes to customers in China and achieving substantial operating profits from this activity. In terms of service, PGN focuses on raising the Customer Satisfaction Index (CSI) to 4.5 out of 5 and maintaining gas pipeline availability at 98% to ensure supply reliability. In alignment with the national energy program, PGN targets accelerating the construction of a household gas network, with the goal of connecting 200,000 households (House Connections, SR), acquiring 114 new customers (Customer Acquisitions, CA), and increasing volume by 14.7 BBTUD. Additionally, the management of State Capital Investment (PMN) for Jargas Assets continues to be optimized to boost the utilization of APBN Jargas customers and income from these assets.

For the Growth (Learning & Growth) strategy, PGN is committed to driving investment development with a target investment budget of USD 337.7 million. This aligns with energy transition efforts, with the development of biomethane business and the development of Carbon Capture Storage/Utilization (CCS/ CCUS). Further, PGN will also continue to strive to reduce the vacancy rate in Subholding Gas to 10%, increase the use of TKDN to 40%, and ensure that 80% of contracts are verified. In terms of risk management, the Total Capacity at Risk target of 18% and the Risk Maturity Index (RMI) of 3.7 are the main indicators in maintaining business stability.

To address the dynamics of the energy industry and ensure future business sustainability, we will implement the G-A-S (Grow-Adapt-Step Out) strategy to achieve the 2025 RKAP. This strategy focuses on optimizing supply, expanding infrastructure, increasing the LNG business, and venturing into the green energy sector. In the Grow aspect, we will prioritize the sustainability of natural gas supply by optimizing existing supply contracts through extensions, innovations, and securing

inovasi, dan kontrak baru untuk gas pipa serta LNG alokasi Perusahaan. Selain itu, advokasi kepada regulator terus dilakukan guna memperoleh tambahan pasokan gas dan LNG dengan harga yang dapat terjangkau konsumen, advokasi terkait kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) pasca tahun 2024, serta advokasi harga jual gas non-HGBT. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan infrastruktur terus dilakukan secara intensif, termasuk pembangunan pipa gas Tegal-Cilacap untuk memasok gas ke Kilang Pertamina Internasional (KPI) Cilacap, pembangunan pipa distribusi gas di wilayah eksisting dan baru, serta pengembangan infrastruktur BBM Cikampek-Plumpang. Perusahaan juga mendukung proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan Pipa Cirebon-Semarang tahap 2 untuk meningkatkan konektivitas pasokan gas di Indonesia.

Dalam strategi *Adapt*, PGN akan meningkatkan bisnis LNG melalui penyelesaian revitalisasi tangki F-6004 di Arun dan optimalisasi kontrak Terminal Usage Agreement (TUA) di FSRU Lampung. Selain itu, PGN juga ikut serta dalam proyek *Clusters of Gas Power Plants in Indonesia*, khususnya untuk Kluster Papua Utara, yang diselenggarakan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia. PGN juga akan mengoptimalkan bisnis layanan energi total (*Total Solutions Energy Services*), seperti pengelolaan infrastruktur telekomunikasi, EPC dan O&M, serta fasilitas manajemen di Pertamina Group.

Terakhir, dalam strategi *Step Out*, sejalan dengan tren energi hijau, kami juga mengembangkan bisnis berbasis keberlanjutan yaitu pengembangan *biomethane* sebagai solusi penyediaan *renewable natural gas*. Langkah ini didukung dengan pembangunan fasilitas *Injection Point* dan penyertaan modal untuk mendirikan *Biomethane Plant* guna mempercepat transisi energi bersih.

Dengan strategi yang terstruktur dan inovatif, kami akan terus berupaya mengatasi berbagai tantangan industri serta menangkap peluang pertumbuhan di sektor energi di masa mendatang. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kami optimis dapat mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, meningkatkan efisiensi operasional, serta berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

PENERAPAN TATA KELOLA

Kami meyakini penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) atau yang saat ini juga dikenal dengan governansi korporat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing mereka dalam kancah persaingan global serta berkontribusi positif atas pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. PGN menerapkan governansi korporat selaras dengan praktik bisnis yang mendorong pengelolaan Perusahaan dengan lebih profesional, memperkuat daya saing perusahaan secara berkesinambungan dan meningkatkan nilai Perusahaan (*corporate value*).

new contracts for pipeline gas and LNG allocations. Continuous advocacy with regulators will be carried out to secure additional gas supplies and maintain the sustainability of certain natural gas price policies (HGBT) post-2024. Additionally, PGN will advocate for more affordable pricing of non-HGBT gas and LNG. Infrastructure development continues to be carried out intensively, including the construction of the Tegal-Cilacap Distribution Pipeline to supply gas to the Pertamina Internasional (KPI) Cilacap Refinery and expanding distribution pipes in both existing and new areas. PGN will also support strategic infrastructure projects, such as the construction of the Cirebon-Semarang Pipeline phase 2, to enhance gas supply connectivity across Indonesia.

In the Adapt aspect, PGN will grow its LNG business by completing the revitalization of the F-6004 tank in Arun and optimizing the Terminal Usage Agreement (TUA) contract at the Lampung FSRU. PGN will also engage in the Clusters of Gas Power Plants in Indonesia project, particularly the North Papua Cluster, organized by PT PLN Energi Primer Indonesia. Furthermore, PGN will expand its Total Solutions Energy Services business, which includes telecommunications infrastructure management, EPC and O&M services, and facility management for the Pertamina Group.

Lastly, in the Step Out strategy, aligned with the growing green energy trend, we are focusing on developing sustainability-driven businesses, such as the development of biomethane as a renewable natural gas solution. This initiative is supported by the construction of Injection Point facilities and capital participation to establish a Biomethane Plant, accelerating the clean energy transition.

With a structured and innovative strategy in place, we will continue to address industry challenges and seize growth opportunities within the energy sector. Through a holistic and sustainable approach, we remain confident in our ability to meet business targets, enhance operational efficiency, and contribute to national energy security.

GOVERNANCE PRACTICE

We believe that the implementation of Good Corporate Governance (GCG), also known as corporate governance, is crucial for enhancing the trust of investors and stakeholders. It also boosts competitiveness in the global market and positively contributes to environmental sustainability and social welfare. PGN adheres to corporate governance practices that promote more professional management, strengthen the Company's long-term competitiveness, and enhance its overall value (corporate value).

Prinsip-prinsip governansi korporat yang mencakup Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK), terus diterapkan dalam organ tata kelola secara menyeluruh, termasuk dalam Anggaran Dasar, *Board Manual,* Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku Etika, Pedoman *Whistleblowing Systems,* penyusunan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip GCG, pengendalian internal, hingga peningkatan *awareness* GCG melalui sosialisasi dan internalisasi.

Pada tahun 2024, upaya penguatan governansi korporat yang dilakukan PGN berhasil mencapai KPI GCG *Implementation Compliance* sebesar 96,05% (dari target 94,05%). Perolehan ini merupakan wujud perlindungan kepentingan Perusahaan dari segi hukum dan terlaksananya kepatuhan hukum dalam penyusunan kontrak Perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, kami juga telah melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap GCG *Soft Structure* yang dimiliki PGN yang menjadi pedoman dalam menjalankan operasional Perseroan selaras dengan prinsip governansi korporat, di antaranya upaya penyempurnaan:

1. Board Manual,
2. Pedoman GCG,
3. Pedoman Benturan Kepentingan dan
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Selain itu penyempurnaan yang telah dilakukan diantaranya:

1. Komitmen Manajemen dalam bidang HSSE,
2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan LNG *trading* Internasional,
3. Pedoman Pengelolaan Community Involvement and Development, dan
4. Pedoman Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN).

Penyempurnaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 telah dilakukan yaitu dengan memperluas ruang lingkup satuan kerja yang memiliki resiko diatas rendah dan resertifikasi.

PGN melakukan pengukuran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2024 menggunakan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan parameter ASEAN Capital Market Forum (ACMF), revisi Oktober 2023 (versi 2 Maret 2024), dengan hasil bahwa PGN telah menerapkan 91,11% dan melebihi standar minimum. Selain itu, kami melakukan evaluasi tata kelola berdasarkan POJK 21/2015 mencapai predikat *Comply* untuk "Seluruh Aspek", dan kami juga melakukan evaluasi tata kelola dengan metode terbaru yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) yaitu PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan mencapai predikat: *Apply* untuk "Seluruh Prinsip".

The principles of corporate governance, including Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK), are consistently applied across the governance framework, encompassing the Articles of Association, Board Manual, Governance Guidelines, Ethical Code of Conduct, Whistleblowing Systems Guidelines, strategy and policy development in alignment with GCG principles, internal controls, and efforts to raise GCG awareness through socialization and internalization.

In 2024, PGN successfully achieved a GCG Implementation Compliance KPI of 96.05% (from the target of 94.05%). This achievement reflects the protection of the Company's interests from a legal standpoint and the successful implementation of legal compliance in the Company's contract preparation.

Throughout 2024, we have also made continuous improvements to PGN's GCG Soft Structure, which serves as a guideline in running the Company's operations in line with the principles of corporate governance, including efforts to improve:

1. Board Manual ,
2. GCG Guidelines,
3. Conflict of Interest Guidelines and
4. Gratification Control Guidelines.

In addition, improvements that have been made include:

1. Management Commitment in the field of HSSE,
2. Guidelines for the Implementation of International LNG trading Activities,
3. Guidelines for Managing Community Involvement and Development and
4. Guidelines for Managing the Increased Use of Domestic Products (P4DN).

Improvement of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System has been carried out by expanding the scope of work units that have risks above low and recertification.

PGN measured the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2024 using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) with ASEAN Capital Market Forum (ACMF) parameters, revised October 2023 (March 2, 2024 version), with the result that PGN has implemented 91.11% and exceeded the minimum standards. Additionally, we conducted a governance evaluation based on POJK 21/2015 and awarded the "Comply" predicate for all aspects. Furthermore, PGN conducted a governance evaluation with the latest method issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG), the PUGKI 2021 (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance), and achieved the "Apply" predicate for all principles.

Pada tahun 2024 PGN juga melaksanakan audit *Cyber Security Maturity* (CSM) oleh auditor eksternal, untuk memastikan bahwa PGN sudah memiliki kontrol dalam tata kelola keamanan siber, deteksi ancaman, dan respons insiden.

Selain itu, PGN juga melakukan Survey Pemahaman GCG untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, dan penerapan prinsip-prinsip governansi korporat di lingkungan Perseroan. Survei ini diharapkan dapat mengidentifikasi serta menginternalisasi aspek prinsip governansi dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kami juga meningkatkan kompetensi personil Compliance dengan Sertifikasi CCP (*Certified Compliance Professional*) dalam rangka persiapan implementasi ISO 37301:2021.

PENERAPAN NILAI KEBERLANJUTAN

PGN memahami pentingnya integritas lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dalam setiap keputusan bisnisnya. Guna memastikan hal ini, nilai keberlanjutan telah terintegrasi dalam program kerja Perseroan, sebagai upaya kami untuk mengelola dampak operasi bisnis secara bertanggung jawab dan transparan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pada tahun 2024, PGN memperkuat komitmen terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini diwujudkan melalui Kebijakan Keberlanjutan yang disahkan pada Juni 2024, yang berlaku bagi karyawan, mitra, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan ini menetapkan 4 (empat) fokus keberlanjutan: mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) melalui peningkatan penggunaan gas bumi pada masa transisi energi, melindungi alam, membangun program masyarakat yang kohesif dan tangguh, serta menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Keempat fokus ini diterjemahkan ke dalam 14 inisiatif keberlanjutan, yang terintegrasi dengan upaya operasional yang unggul. Strategi keberlanjutan PGN selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan akan terus dijalankan hingga tahun 2030.

Kami memfokuskan upaya keberlanjutan pada peran PGN dalam masa transisi energi menuju NZE 2060. Gas bumi, yang dapat menurunkan emisi sekitar 40% dibandingkan energi lain, menjadi solusi penting untuk mencapai target penurunan emisi sektor energi nasional sebesar 377 juta ton CO_2 pada 2035. Oleh karena itu, PGN mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih melalui penyaluran gas bumi nasional. Pada tahun 2024, sebagai wujud kontribusi nyata, PGN berhasil mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 1 dan Scope 2 secara konsolidasian mencapai 29.723 Ton CO_2eq.

In 2024, PGN also had an external auditor audit its Cyber Security Maturity (CSM), to ensure that PGN has adequate controls over cybersecurity governance, threat detection, and incident response.

To further enhance corporate governance, PGN conducted a GCG Understanding Survey to measure the level of understanding, awareness, and application of corporate governance principles within the Company. This survey aims to help internalize governance principles in daily business activities. Furthermore, PGN has continued to improve the competence of Compliance personnel, with CCP (Certified Compliance Professional) certification in preparation for the implementation of ISO 37301:2021.

APPLYING SUSTAINABILITY VALUES

PGN recognizes the critical role of environmental integrity and social responsibility in all business decisions. The integration of sustainability values into PGN's work programs is an essential component of the company's operations. This commitment reflects PGN's commitment to responsible business practices, with an emphasis on economic, environmental, and social (ESG) impacts.

In 2024, we developed four sustainability focuses and 14 initiatives/strategies to achieve our sustainability goals. The Company's focus and strategies for achieving the Sustainable Development Goals/SDGs are also integrated into all aspects of its work and will be implemented sustainably until 2030. The four goals are to help achieve the Net Zero Emissions (NZE) target by increasing natural gas use during the energy transition, protecting nature, developing cohesive and resilient community programs, and implementing responsible business practices. These four focuses have been translated into 14 sustainability initiatives, which are integrated with operational excellence efforts. PGN's sustainability strategy aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs) with a scheme to implement it until 2030.

Our main sustainability focus is in line with PGN's role in the energy transition towards NZE in 2060, which includes supporting the government's program to increase the use of clean energy through the distribution of national natural gas. Natural gas, which has the potential to reduce emissions by around 40% when compared to other energy sources, could help the energy sector meet its emission reduction target of 377 million tons of CO_2 by 2035. In 2024, PGN successfully contributed to reducing Scope 1 and Scope 2 Greenhouse Gas (GHG) emissions by 29,722.54 tons of CO_2eq on a consolidated basis.

Secara berkelanjutan, PGN mengembangkan program gasifikasi di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor kelistrikan nasional, yang berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi. PGN juga terus melaksanakan berbagai program yang mempromosikan pemanfaatan gas bumi di sektor ritel dan rumah tangga, memperluas akses energi bersih bagi masyarakat. Upaya-upaya ini secara langsung mendukung target transisi energi nasional dan pencapaian NZE 2060.

Sebagai hasil dari upaya-upaya tersebut, kami telah mencatatkan berbagai pencapaian yang cukup berarti dalam implementasi strategi keberlanjutan sepanjang tahun 2024, sekaligus menunjukkan komitmen kuat Perseroan terhadap prinsip-prinsip ESG:

1. Peningkatan Skor *ESG Risk Rating*
   PGN berhasil mencetak skor *ESG Risk Rating* sebesar 20,2, yang masuk dalam kategori "Medium Risk" menurut penilaian Morningstar Sustainalytics. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian skor 24,7, yang mencerminkan komitmen dan keberhasilan Perusahaan dalam mengintegrasikan praktik keberlanjutan kedalam seluruh aspek operasionalnya.
2. Pengurangan Emisi dan Efisiensi Energi
   Dalam rangka mendukung penurunan emisi karbon sebagaimana target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, PGN berhasil mengurangi emisi karbon hingga 29.722,54 ton CO_2eq serta meningkatkan efisiensi energi sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menunjukkan efektivitas inisiatif keberlanjutan yang diterapkan perusahaan.
3. Kinerja Keselamatan dan Kepatuhan Sertifikasi
   PGN mencatat lebih dari 490 juta jam kerja aman kumulatif sampai dengan tahun 2024, yang merupakan bukti keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, Perseroan juga memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan dan keselamatan dengan mempertahankan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Pencapaian ini menegaskan peran PGN sebagai pelopor dalam mendukung transisi energi bersih dan keberlanjutan operasional, sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Kami mendukung penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri, guna meningkatkan daya saing industri nasional. PGN sebagai Subholding Gas yang merupakan bagian dari Holding Migas,

PGN is developing gasification programs in a number of strategic sectors that convert natural gas-based energy, including the national electricity sector, in a sustainable manner. PGN also continues to implement a variety of interesting programs that encourage the use of natural gas in the retail and household sectors.

Furthermore, we have recorded several significant achievements in implementing sustainability strategies throughout 2024, demonstrating the Company's strong commitment to ESG principles:

1. ESG Risk Rating Score Improvement
   PGN has achieved an ESG Risk Rating of 20.2, placing it in the "Medium Risk" category as per Morningstar Sustainalytics. This marks a significant improvement from the previous year's score of 24.7, highlighting the Company's commitment and effectiveness in incorporating sustainability practices across its operations.
2. Emission Reduction and Energy Efficiency
   PGN has made significant strides in decarbonization, successfully reducing carbon emissions by 29,722.54 tons of CO_2eq. Additionally, the Company has increased its energy efficiency by 5% compared to the previous year. These efforts not only contribute to mitigating environmental impacts but also highlight the effectiveness of PGN's sustainability initiatives.
3. Safety Performance and Certification Compliance
   PGN has achieved over 490 million safe working hours accumulated until 2024, underscoring its commitment to creating a safe and healthy work environment. The company has further reinforced its commitment to environmental and safety management by maintaining ISO 14001 (Environmental Management System) and ISO 45001 (Occupational Safety and Health Management System) certifications.

This accomplishment highlights PGN's leadership in supporting the transition to clean energy and promoting operational sustainability, while delivering beneficial outcomes for the environment, society, and stakeholders.

INCREASED USE OF DOMESTIC PRODUCTS (P3DN)

We support the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) as a strategic government policy aimed at promoting the use of local products and services, thereby enhancing the competitiveness of the national industry. As a Gas Subholding within the Oil and Gas Holding, PGN requires the

dalam pengadaan barang/jasa untuk seluruh kegiatan operasional dan investasi telah mensyaratkan pemenuhan TKDN sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri sekaligus sebagai komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan oleh Pemerintah. Melalui upaya ini, PGN berkontribusi dalam penciptaan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian Indonesia.

Pada periode tahun buku 2024, hasil verifikasi atas capaian TKDN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PGN sebagai Subholding Gas melebihi target KPI minimal sebesar 40% yaitu sebesar 73,66% untuk Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Pipa Gas Distribusi Area Kendal dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, serta mencapai 57,93% untuk Pekerjaan *Provision of Coiled Tubing Services* berdasarkan hasil verifikasi oleh Surveyor Independen. Komitmen TKDN atas seluruh pengadaan barang/jasa sampai dengan Periode Kuartal 4-2024 adalah sebesar 63,31%. Adapun ketentuan perhitungan TKDN ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Selain pencapaian TKDN tersebut, PGN juga ikut serta dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian Indonesia dengan pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa melalui platform Pasar Digital (PaDi) UMKM BUMN dimana selama tahun 2024 terdapat transaksi langsung kepada UMKM sebesar Rp 19 Miliar.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pada tahun 2024, susunan anggota Direksi PGN mengalami perubahan yang dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 30 Mei 2024. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kepemimpinan, meningkatkan kinerja operasional, serta menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika industri dan tantangan di masa depan.

Keputusan RUPST 2024 mengubah nomenklatur jabatan Direksi antara lain Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan DIrektur Manajemen Risiko

fulfillment of TKDN in the procurement of goods and services for all operational and investment activities. This is part of our support for the domestic industry and our commitment to the Government's Domestic Product Utilization Increase Program (P3DN). Through this initiative, PGN contributes to building a business ecosystem that fosters the growth and strengthening of the Indonesian economy.

In the 2024 fiscal year, the verification results for TKDN achievements in PGN's procurement of goods and services as a Gas Subholding exceeded the minimum KPI target of 40%. Which is 73.66% for the development of gas distribution pipe infrastructure in the Kendal Area and Batang Integrated Industrial Area (KIT), and 57.93% for the provision of Coiled Tubing Services, based on verification by an independent surveyor. The overall TKDN commitment for all goods/services procurement through the 4th quarter of 2024 stands at 63.31%. The calculation of TKDN is based on the provisions outlined in the Minister of Industry Regulation No. 16/M-IND/PER/2/2011, concerning the Provisions and Procedures for Calculating Domestic Component Levels, and the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2023, regarding the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities.

In addition to achieving TKDN, PGN also participates in supporting the growth and strengthening of the Indonesian economy by implementing procurement transactions for goods/services through the BUMN UMKM Digital Market (PaDi) platform where during 2024 there were direct transactions to UMKM amounting to IDR 19 billion.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the composition of PGN's Board of Directors was modified following the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 30, 2024. These changes were made to strengthen leadership, enhance operational performance, and align business strategies with industry dynamics and upcoming challenges.

The decision made at the 2024 AGMS resulted in changes to the nomenclature of the Board of Directors positions. Specifically, the Director of Finance and Risk Management

serta Direktur Sales dan Operasi menjadi Direktur Komersial. Atas perubahan nomenklatur tersebut, maka RUPST 2024 mengalihkan penugasan Bapak Fadjar Harianto Widodo yang semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menjadi Direktur Keuangan, serta mengalihkan penugasan Ibu Ratih Esti Prihatini semula sebagai Direktur Sales dan Operasi, menjadi Direktur Komersial.

RUPST 2024 juga memberhentikan dengan hormat Bapak Beni Syarif Hidayat sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi, dedikasi dan kerja keras yang diberikan selama menjabat di Perusahaan dan mengangkat Bapak Rachmat Hutama sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis dan Bapak Arief Kurnia RIsdianto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

Perubahan komposisi anggota Direksi ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 18 tanggal 10 Juni 2024 di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.09.0212762 tanggal 11 Juni 2024.

Dengan demikian, komposisi anggota Direksi sesuai Keputusan RUPST tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

was renamed to the Director of Finance and the Director of Risk Management, while the Director of Sales and Operations became the Commercial Director. As a result of these changes, the 2024 AGMS reassigned Mr. Fadjar Harianto Widodo, formerly the Director of Finance and Risk Management, to the role of Director of Finance, and Mrs. Ratih Esti Prihatini, formerly the Director of Sales and Operations, to the role of Commercial Director.

The 2024 AGM also honorably dismissed Mr. Beni Syarif Hidayat from his position as Director of Human Resources and Business Support, expressing gratitude and high appreciation for his contributions, dedication, and hard work during his tenure at the company. Mr. Rachmat Hutama was appointed as the new Director of Human Resources and Business Support, and Mr. Arief Kurnia Risdianto was appointed as the Director of Risk Management.

The changes in the composition of the Board of Directors are documented in the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 18, dated June 10, 2024, before Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, in Jakarta. The changes in the company's management have also been submitted to and received by the Minister of Law and Human Rights, as per the Minister's letter No. AHU-AH.01.09.0212762 dated June 11, 2024.

Subsequently, the composition of the Board of Directors, pursuant to the AGM Resolution dated May 30, 2024, is as follows:

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN DIREKSI
The Composition of the Board of Directors

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Keuangan	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance
Direktur Manajemen Risiko	**Arief Kurnia Risdianto**	Director of Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Rosa Permata Sari**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Harry Budi Sidharta**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Komersial	**Ratih Esti Prihatini**	Director of Commerce
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Rachmat Hutama**	Director of HR and Business Support

PENUTUP

Mewakili Direksi Perusahaan, kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung pencapaian Perusahaan. Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Dewan Komisaris atas arahan, saran dan masukan yang diberikan kepada Direksi selama periode berjalan. Penghargaan yang sama juga kami berikan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Holding Perusahaan, para pemegang saham, pelanggan, mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perwira Subholding Gas atas kontribusi, dedikasi dan kerja keras yang diberikan melalui fungsinya masing-masing.

Hasil kinerja PGN 2024 telah membuktikan ketahanan Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika bisnis untuk menghasilkan kinerja positif. Pencapaian di tahun ini menunjukkan bahwa dengan strategi Manajemen yang komprehensif, komitmen yang kuat dan optimisme dan keyakinan dari seluruh Perwira Subholding Gas, Perusahaan akan mampu menangkap peluang kedepan untuk mewujudkan visi menjadi Penyedia Solusi Energi Bersih untuk Dunia yang Lebih Hijau dan Berkelanjutan.

CLOSING

On behalf of the Company's Board of Directors, we would like to extend our gratitude to all parties who have supported the Company's achievements. Our deepest appreciation goes to the Board of Commissioners for their guidance, suggestions, and input provided to the Board of Directors during this period. We would also like to express our sincere gratitude to PT Pertamina (Persero) as the holding company, shareholders, customers, business partners, and all stakeholders for their continued support and strong cooperation. Further, we would like to convey our sincere gratitude and highest appreciation to all Subholding Gas Officers for their valuable contributions, dedication, and hard work in fulfilling their respective functions.

PGN's 2024 performance highlights the Company's ability to overcome challenges and business dynamics, delivering positive results. This year's achievements demonstrate that, with a comprehensive management strategy, strong commitment, and the optimism and confidence of all Subholding Gas Officers, The company will be able to capture future opportunities to realize its vision of becoming a Clean Energy Solution Provider for a Greener and Sustainable World.

Jakarta, 28 April 2025
Jakarta, April 28, 2025

ARIEF S. HANDOKO
Direktur Utama
President Director

DIREKSI
Directors

ARIEF KURNIA RISDIANTO
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

ARIEF S. HANDOKO
Direktur Utama
President Director

RACHMAT HUTAMA
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

RATIH ESTI PRIHATINI
Direktur Komersial
Director of Commerce

HARRY BUDI SIDHARTA
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

FADJAR HARIANTO WIDODO
Direktur Keuangan
Director of Finance

ROSA PERMATA SARI
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Liability Statement Letter

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

We the undesigned declare that all the information included in the Annual Report 2024 of PT Perusahaan Gas Negara Tbk has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 28 April 2025
Jakarta, 28 April, 2025

Amien Sunaryadi
Komisaris Utama dan Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Luky Alfirman
Komisaris
Commissioner

Warih Sadono
Komisaris
Commissioner

Dini Shanti Purwono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Christian H. Siboro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Tony Setia Boedi Hoesodo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Abdullah Aufa Fuad
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

We the undesigned declare that all the information included in the Annual Report 2024 of PT Perusahaan Gas Negara Tbk has been fully disclosed and we are responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 28 April 2025
Jakarta, 28 April, 2025

Arief S. Handoko
Direktur Utama
President Director

Fadjar Harianto Widodo
Direktur Keuangan
Director of Finance

Rosa Permata Sari
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

Ratih Esti Prihatini
Direktur Komersial
Director of Commerce

Harry Budi Sidharta
Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

Rachmat Hutama
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

Arief Kurnia Risdianto
Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

03.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PERTAMINA
GAS NEGARA
PERTAMINA
GAS NEGARA

SEKILAS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

About PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Nama dan Domisili Perseroan Company's Name and Domicile	**PT Perusahaan Gas Negara Tbk** berdomisili di Jakarta domiciled in Jakarta	
Tanggal Pendirian Date of Establishment	**13 Mei 1965** May 13, 1965	
Bidang Usaha Line of Business	Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Transmission and Distribution of Natural Gas	
Alamat Perseroan Company Address	**Kantor Pusat** Head Office Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20 DKI Jakarta 11140 F : +62 21 397 00645; +62 21 6334 838 T : +62 21 6333 080	**Kantor Korespondensi** Correspondence Office Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20 DKI Jakarta 11140 F : +62 21 397 00645; +62 21 6334 838 T : +62 21 6333 080
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued Capital and Paid-Up Capital	Rp2.424.150.819.600 (dua triliun empat ratus dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) Rp2.424.150.819.600 (two trilion four hundred twenty-four bilion one hundred fifty milion eight hundred nineteen thousand and six hundred rupiah)	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah) Rp7,000,000,000,000 (seven trillion rupiah)	
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis for It's Establishment	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) Government Regulation No. 19 of 1965 concerning Dissolution of the Governing Body of the State Electricity Company (PLN) and the State Gas Company (PGN)	
Pencatatan di Bursa Listing of the Stock Exchange	Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 15 Desember 2003 The Company's shares have been listed at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange (currently: Indonesia Stock Exchange) on December 15, 2003	

Kepemilikan
Ownership

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2024
Shareholder Structure as of December 31, 2024

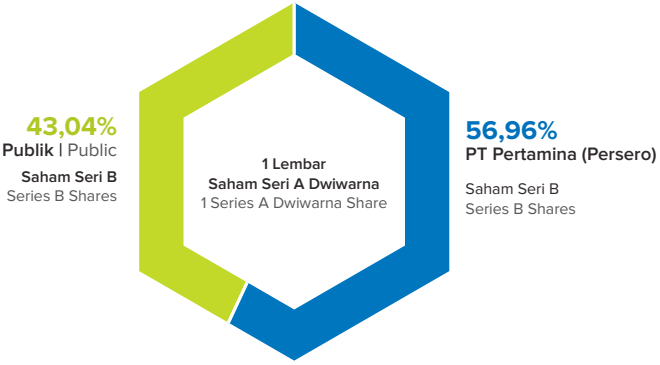

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholders Composition

Pemegang Saham Shareholders	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
Saham Seri A Dwiwarna | Series A Dwiwarna Shares				
Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	1	0	1	0
Saham Seri B | Series B Shares				
PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96%	13.809.038.755	56,96%
Publik | Public	10.432.469.440	43,04%	10.432.469.440	43,04%
Total	**24.241.508.196**	**100%**	**24.241.508.196**	**100%**

Kode Saham
Stock Code

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

PGAS

Media Sosial
Social Media

135
pcc135@pertamina.com
www.pgn.co.id
@gas_negara
Perusahaan Gas Negara
@Gas_Negara
@PerusahaanGasNegaraPGN

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

1859
FIRMA L.J.N. EINDHOVEN & CO GRAVENHAGE

Pertama kali Perusahaan didirikan oleh keluarga Eindhoven.
Firstly established by an Eindhoven family.

1863
NV NETHERLAND INDISCHE GAS MAATSCHAPPIJ (NIGM)

Pemerintah Belanda mengambil alih usaha keluarga Eindhoven dan mengubah nama Perusahaan menjadi NIGM. Pada 1879, NIGM mengoperasikan dua pabrik gas di Jakarta dan Surabaya.
The Dutch Government took over Eindhoven family business and changed its name to NIGM. In 1879, NIGM operated two gas plants in Jakarta and Surabaya.

1950
NV OVERZEESE GAS EN ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ (NV OGEM)

Pemerintah Belanda mengoperasikan 11 pabrik gas dari 33 pembangkit listrik, menggabungkan NIGM dengan Perusahaan listrik Pemerintah Belanda, lalu mengubah namanya jadi NV OGEM.
The Dutch Government operated 11 gas plants from 33 power plants, combining NIGM with the Dutch Government's power plants and changed its name to NV OGEM.

1958
BADAN PENGAMBIL ALIH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LISTRIK DAN GAS (BP3LG)

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
The Indonesian Government then nationalized foreign companies.

1961
BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (BPU-PLN)

Peleburan Perusahaan gas dan Perusahaan listrik negara.
Dissolution of the state gas and electricity companies.

1965
PERUSAHAAN GAS NEGARA

Pada 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, PGN ditetapkan sebagai Perusahaan Negara.
On 13 May 1965, based on Government Regulation No. 19 Year 1965, PGN was given the status of State Enterprise.

1984
PERUSAHAAN UMUM GAS NEGARA

Perubahan bentuk usaha menjadi Perusahaan Umum (Perum).
The state changed its companies into public companies (Perum).

1994
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)

Perubahan status perseroan diiringi penambahan ruang lingkup usaha. Selain di bidang distribusi gas bumi, PGN juga berfungsi sebagai transporter di bidang transmisi.
Such change of corporate status was followed with additional business scopes. In addition to distribution of natural gas, PGN also serves as a transporter in transmission business.

2003
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk

Saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan PGAS.
PGN shares were listed at the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange on December 15, 2003 and its trading code is PGAS.

2018
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Pada 11 April 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018, Pemerintah mengalihkan 56,96% saham seri B kepada PT Pertamina (Persero), sejalan inisiatif pembentukan Holding BUMN Migas dan PGN sebagai Subholding Gas.
On April 11, 2018, based on Government Regulation No. 6 of year 2018, the Government handed over 56.96% of its series B shares to PT Pertamina (Persero), in line with its initiative in establishing Holding BUMN Migas and PGN as a Subholding Gas.

PERTAMINA

PERKEMBANGAN BISNIS PERUSAHAAN

Development of the Company's Business

1998

PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi Ruas Grissik-Duri yang diikuti dengan pembentukan Entitas Anak di bidang transmisi yaitu PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) pada 2002 yang akan mengoperasikan pipa transmisi tersebut.
PGN managed to complete Grissik-Duri Transmission Pipeline and established a Subsidiary Entity for transmission business called PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) in 2002 that will operate the transmission pipeline.

2003

Penyelesaian Pipa Transmisi Grissik- Batam-Singapura yang merupakan pipa hilir gas bumi pertama yang melintasi batas negara. Pipa transmisi ini dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia.
Grissik-Batam-Singapore Transmission Pipeline, which is the first natural gas pipeline across the border, was completed. This pipeline is run by PT Transportasi Gas Indonesia.

2007

Pada 25 Oktober 2007, PGN berhasil menyelesaikan Pipa Transmisi South Sumatera West Java terdiri dari SSWJ I dengan Ruas Stasiun Penerima Gas Pagardewa-Bojonegara dan SSWJ II dengan Ruas Grissik-Muara Bekasi. Pada tahun ini, PGN mendirikan Entitas Anak di bidang telekomunikasi, yaitu PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM), yang mengoperasikan dan memelihara jaringan kabel *fiber optic* yang dibangun untuk pengoperasian SCADA untuk menjaga keandalan penyaluran gas bumi di sepanjang jaringan pipa transmisi Grissik-Batam-Singapura.
On October 25, 2007, PGN managed to complete the installation of South Sumatera-West Java transmission pipeline, which consists of SSWJ I connecting gas receiving stations of Pagardewa-Bojonegara and SSWJ II connecting Grissik-Muara Bekasi. In the same year, PGN established a subsidiary entity dealing with telecommunication business called PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM). PGASCOM operates and maintains fiber optic cables so as to operate SCADA in order to maintain proper supply of natural gas along transmission pipeline of Grissik-Batam-Singapore.

2009

PGN membentuk Entitas Anak bernama PT PGAS Solution yang bergerak di bidang usaha rekayasa teknik, operasi dan pemeliharaan, kontraktor EPC, serta perdagangan.
PGN established a subsidiary entity called PT PGAS Solution dealing with technical engineering, operation and maintenance, EPC contractor, and trading.

2010

PT Pertamina (Persero) dan PGN mendirikan Perusahaan patungan di bidang LNG, yaitu PT Nusantara Regas sebagai tonggak baru pemanfaatan LNG untuk domestik.
PT Pertamina (Persero) and PGN established a joint venture in the LNG sector, namely PT Nusantara Regas as a new milestone for domestic use of LNG.

2011

PGN membentuk dua Entitas Anak di bidang hulu dan hilir bisnis gas bumi. PT Saka Energi Indonesia di bidang hulu dan PT Gagas Energi Indonesia di bidang hilir.
PGN established two Subsidiary Entities in the upstream and downstream natural gas business, namely PT Saka Energi Indonesia in the upstream sector and PT Gagas Energi Indonesia in the downstream sector.

2018

Sejalan dengan inisiatif Pemerintah membentuk Holding BUMN Migas, pada 11 April 2018, PGN menjadi bagian dari PT Pertamina (Persero) dengan dialihkannya saham seri B milik negara RI yang menandai terbentuknya Holding BUMN Migas. Selanjutnya pada 28 Desember 2018, PGN resmi menjadi Subholding Gas dengan pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas.
In line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding State Owned Enterprises, on April 11, 2018, PGN became part of PT Pertamina (Persero) following the acquisition of the State's B series shares, which marked the establishment of Oil and Gas Holding SOEs. On December 28, 2018, PGN officially became a Gas Subholding by taking over 51% shares of PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas.

2015

Pada Agustus 2015, PGN melalui entitas afiliasi PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) berhasil menyelesaikan pembangunan ruas pipa Transmisi Kalija I dari lapangan gas bumi Kepodang ke PLTG Tambak Lorok Semarang sepanjang 201 km dan dilanjutkan dengan komersialisasi pipa tersebut. Di tahun yang sama, Pertagas menyelesaikan pembangunan Pipa Transmisi Ruas Arun Belawan sepanjang 350 kilometer untuk mendukung keandalan penyaluran gas bumi di wilayah Sumatera Bagian Utara. PT Perta Arun Gas berhasil menyelesaikan revitalisasi kilang LNG Arun menjadi terminal penerima dan regasifikasi LNG. Menambah lengkap fasilitas terminal penerima dan regasifikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Teluk Jakarta dan Lampung.
In August 2015, PGN through an affiliated entity, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) managed to complete the construction of a 201 km-long Kalija I transmission pipeline connecting Kepodang natural gas field and Tambak Lorok Gas Power Plant in Semarang, subsequently commercializing it. In the same year, Pertagas completed the construction of the 350 km-long Arun Belawan Transmission Pipeline to support the reliability of natural gas distribution in the Northern part of Sumatra. PT Perta Arun Gas managed to complete the revitalization of LNG Arun plant to become a receiving terminal and regasification of LNG. In addition, the Company also provided additional facilities for receiving terminal and regasification of existing plants in Teluk Jakarta and Lampung.

2014

PGN mendirikan entitas anak PT Permata Graha Nusantara dengan lingkup usaha antara lain pengelolaan properti, penyediaan jasa tenaga kerja, fasilitas manajemen, serta profitisasi sumber daya dan aset Perusahaan. Di tahun ini, dimulai pengoperasian FSRU Lampung secara komersial untuk mendukung keandalan pasokan gas bumi di Jawa Bagian Barat dengan menggunakan LNG.
PGN established a subsidiary entity called PT Permata Graha Nusantara with a scope of business including property management, provision of labor services, management facilities, and profitability of the Company's resources and assets. This year, the commercial operation of the Lampung FSRU was started to support the reliability of natural gas supply in the Western part of Java using LNG.

2012

Pada tahun 2012, PGN mendirikan Entitas Anak PT PGN LNG Indonesia (PLI) dengan lingkup usaha antara lain pengadaan pasokan LNG dan niaga, penyimpanan termasuk regasifikasi kepada pembeli, serta kegiatan usaha lainnya di bidang LNG.
In 2012, PGN established a Subsidiary Entity called PT PGN LNG Indonesia (PLI) with a scope of business including procurement of LNG supply and trade, storage including regasification for buyers, as well as other business activities in the LNG sector.

2019

PGN melakukan pelunasan atas akuisisi 51% saham PT Pertamina Gas pada bulan Maret 2019 sebagai bagian dari rangkaian Holding Migas.
PGN paid off the acquisition of 51% shares of PT Pertamina Gas in March 2019 as part of the Oil and Gas Holding.

2020

PGN melakukan Restrukturisasi Organisasi Subholding Gas yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis gas guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun ini juga, PGN mencanangkan program strategis korporat yaitu Tujuh Program Gasifikasi Nasional atau Sapta PGN. Sebagai bentuk peran Subholding Gas mendukung Pemerintah dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan industri nasional di masa pandemi, PGN mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM No.89 & 91 tahun 2020, di mana sektor industri dan kelistrikan mendapatkan gas harga khusus hingga diharapkan perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
PGN restructured the organization of the Gas Subholding to improve its management efficiency and effectiveness in achieving sustainable development. Also this year, PGN launched a strategic corporate program, namely Seven National Gasification Programs or Sapta PGN. In its capacity as a Gas Subholding, PGN supported the Government and national industries amid the pandemic by implementing Minister of Energy and Mineral Resources Decrees (MEMR) Number 89 and 91 of 2020, enabling the industrial and electricity sectors to obtain special gas prices so that the national economy can grow faster and more sustainably.

2021

PGN sebagai Subholding Gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero), meluncurkan logo Pertamina Gas Negara dengan semangat Satu Pertamina mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Program konversi penggunaan energi seperti coal & diesel ke gas bumi dalam masa transisi menjadikan peran gas bumi semakin penting. Oleh karenanya Perusahaan terus melakukan inisiasi dan penyelesaian program-program investasi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi yang semakin luas.
PGN, as a Gas Subholding of Oil and Gas Holding PT Pertamina (Persero), launched the Pertamina Gas Negara logo with the spirit of `One Pertamina' to promote synergy and collaboration to support the Government in providing better and more sustainable energy. Conversion programs to replace coal & diesel with natural gas in the transition period has resulted in an increasingly important role for natural gas. Therefore, the Company continued to initiate and complete various investment programs to support the wider utilization of natural gas.

2022

PGN sebagai Subholding Gas semakin memperkuat sinergi di dalam Holding Migas Pertamina melalui penyelesaian Pembangunan Pipa Minyak mentah koridor Minas-Duri Dumai & koridor Batam-Bangko-Dumai serta Pembangunan Pipa Transmisi Gas Ruas Gresik-Semarang untuk pasokan gas dari Jimbaran Tiung Biru. PGN juga terus memberi dampak positif bagi negeri di antaranya melalui Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan menggunakan investasi mandiri dan mendukung pertumbuhan industri nasional melalui implementasi Keputusan Menteri ESDM No. 134 & 135 tahun 2021 (revisi atas Keputusan Menteri ESDM No. 89 dan 91 tahun 2020). Selain itu, PGN memperoleh predikat *Medium Risk* dari badan sertifikasi internasional dalam implementasi ESG.
PGN as a Gas Subholding further strengthened the synergy within Pertamina Oil and Gas Holding through the completion of the Construction of the Minas- Duri-Dumai Corridor Crude Oil Pipeline and that of the Batam-Bangko-Dumai as well as the construction of the Gresik-Semarang Gas Transmission Pipeline for gas supply from Jimbaran Tiung Biru. PGN also continued to positively impact the country, including through the Development of Household Gas Networks by means of independent investment, and to support the growth of the national industry through the implementation of Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) Decrees Number 134 and 135 of 2021 (amendment to MEMR Decrees Number 89 and 91 of 2020). In addition, PGN also received a Medium Risk rating from an international certification body for implementing ESG.

2023

PGN sebagai Subholding Gas terus bersinergi di dalam Holding Migas Pertamina melalui penyelesaian Pembangunan Pipa Senipah – RU V Balikpapan serta turut berperan untuk mensukseskan program transisi energi Pertamina melalui uji coba penggunaan *Diesel Dual Fuel* (DDF) untuk truk tangki PT Pertamina Patra Niaga. PGN juga melaksanakan Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan lebih agresif. Selain itu, PGN juga melakukan diversifikasi bisnis melalui pengembangan bisnis anak perusahaan dengan membangun LNG Hub Arun serta mengembangkan *green energy business* melalui pemanfaatan biometana dari limbah pabrik kelapa sawit.
PGN as the Gas Subholding continues to synergize within Pertamina's Oil and Gas Holding through the completion of the Senipah - RU V Balikpapan Pipeline and contributes to the success of Pertamina's energy transition program through the trial use of Diesel Dual Fuel (DDF) for PT Pertamina Patra Niaga's tank trucks. PGN is also implementing the National Strategic Project, namely the Construction of Household Gas Networks more aggressively. In addition, PGN also diversified its business through the development of a subsidiary business by building the Arun LNG Hub and developing a green energy business through the utilization of biomethane from palm oil mill waste.

2024

PGN mengesahkan visi dan misi yang baru sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depannya. Pada visi dan misi yang baru, PGN berfokus untuk mengakselerasi transisi energi dan mendukung energi berkelanjutan di Indonesia yang diwujudkan dalam pembangunan LNG Hub Arun, pembangunan pipa BBM Cikampek-Plumpang untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia, dan memulai bisnis energi terbarukan dalam bentuk pemanfaatan biomethane. PGN juga melakukan Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengurangi subsidi dan impor LPG.
PGN ratified its new vision and mission as a form of adaptation to face the business challenges ahead. In the new vision and mission, PGN focuses on accelerating the energy transition and supporting sustainable energy in Indonesia, which is realized in the construction of the Arun LNG Hub, the construction of the Cikampek-Plumpang fuel pipeline to maintain energy resilience in Indonesia, and starting a renewable energy business in the form of biomethane utilization. PGN also carried out a National Strategic Project, namely the construction of the Household Gas Network to support the Government's efforts to reduce LPG subsidies and imports.

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo

1859-1965

Logo yang digunakan saat Perusahaan bernama Firma L.J.N Eindhoven & CO Gravenhage.
Logo used when the Company's name was registered as Firma L.J.N. Eindhoven & CO Gravenhage.

1965-1994

Melambangkan sifat pelayanan utilitas gas dengan bumi sebagai sumbernya, serta misi Perusahaan dalam kegiatan produksi, instalasi, transmisi, dan distribusi.
It symbolizes the nature of gas utility services with the earth as its source, and the Company's mission in production, installation, transmission, and distribution activities.

1994-2003

Gambar lidah api dengan kesan dinamis. Semangat dan inovasi menjadi tekad Perusahaan dalam memberikan pelayanan. Lingkaran hitam melambangkan bumi dan pipa sebagai sarana penghantar gas bumi.
It is an image of a dynamic flame. The Company is determined to provide services with spirit and innovation. The black circle represents the earth and the pipe as a means to distribute natural gas.

2003-2011

Mencerminkan visi Perusahaan yang berorientasi global, menjadi Perusahaan publik terkemuka di bidang penyedia gas bumi. Tulisan "Gas Negara" menjadi bagian yang tak terpisahkan dari logo, menyiratkan sifat Perusahaan yang dinamis dan terus berkembang.
It reflects the Company's globally oriented vision to be a leading public Company in the natural gas sector. "Gas Negara" or State Gas is an integrated part of the logo, indicating its nature as a dynamic and continuously growing Company.

2011-2018

Menyimbolkan api yang terdiri dari lima elemen yang mewakili lima pemangku kepentingan utama: konsumen, investor, pekerja, negara, dan PGN.
It symbolizes five elements of flame, representing five major stakeholders, namely customers, investors, employees, the State, and PGN.

2018-2021

Penambahan tagline "A MEMBER OF PERTAMINA" menandakan kedudukan PGN sebagai bagian dari Pertamina sejalan dengan inisiatif Pemerintah membentuk Holding BUMN Migas.
The addition of "A MEMBER OF PERTAMINA" tagline indicates PGN's position as part of Pertamina in line with the Government's initiative to establish Oil and Gas Holding SOEs.

2021-Sekarang | 2021-Present

PGN sebagai Subholding Gas bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) meluncurkan logo Pertamina Gas Negara dengan semangat satu Pertamina mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung Pemerintah dalam menghadirkan energi yang lebih baik dan berkelanjutan.
PGN, as a Gas Subholding part of the Oil and Gas Holding of PT Pertamina (Persero), launched the Pertamina Gas Negara logo that encapsulates the spirit of One Pertamina and promotes synergy and collaboration to support the Government in providing better and more sustainable energy.

PERTAMINA GAS NEGARA

Perusahaan energi nasional dengan jaringan terlengkap yang menyinergikan seluruh kekuatannya, dalam proses transformasi menuju era energi bersih untuk kehidupan yang lebih baik.

Menyinergikan kekuatan Perusahaan melalui inovasi, teknologi dan manusia di dalamnya, melalui jaringan terlengkap yaitu *downstream*, *midstream* serta pendukung lainnya secara terintegrasi.

Pada tanggal 12 Juni 2020, didirikan 6 subholding di bawah Pertamina yaitu Subholding Upstream, Subholding Gas, Subholding Power & NRE, Subholding Commercial & Trading, Subholding Refinery & Petrochemical, dan Subholding Shipping.

Menyusul pembentukan dan pemberian peran kepada Perusahaan sebagai Subholding Gas, Pertamina telah menyelesaikan secara bertahap pembentukan lima Subholding lainnya dan telah mencapai legal endstate dan efektif berlaku per tanggal 1 September 2021, yaitu Subholding Upstream, Subholding Commercial & Trading, Subholding Refining & Petrochemical, Subholding Power & New, Renewable Energi dan Subholding Integrated Marine Logistics.

Logo Pertamina Gas Negara menyimbolkan transformasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina. Penyesuaian pada struktur *masterbrand* mengikuti identitas *Brand Holding* Pertamina dengan prinsip “One Brand” yang ditetapkan oleh Pertamina bagi anak usahanya.

Identitas baru masih memiliki arti yang sama jika dijadikan kependekan menjadi PGN. Selain itu memiliki arti kepemilikan baru, Pertamina Gas Negara.

Pertamina Gas Negara dipilih oleh mayoritas *stakeholder* karena masih mengadopsi identitas PGN, yaitu Gas Negara. PGN dinilai sudah memiliki *brand value* yang kuat di publik, sehingga ketika berubah perlu nama yang juga mudah bagi publik untuk mengenal identitas baru PGN.

Dengan konsisten menggemakan semangat “Satu Energi, Satu Pertamina”, sinergi segala upaya dan kegiatan dalam penyediaan energi menjadi kekuatan gabungan yang akan memberdayakan Perusahaan untuk memberikan dampak yang lebih besar dalam rangka mencari solusi untuk tantangan energi masa depan. Transformasi menjadi strategi dalam menyelaraskan identitas subholding gas pertamina.

PERTAMINA GAS NEGARA

The national energy Company with the most complete network synergizes all the strengths in the process of transforming towards the era of clean energy for a better life.

The synergy of the Company’s strength is carried out through innovation, technology, and people, with the most complete network of downstream, midstream, and other supports in an integrated manner.

On June 12, 2020, six subholdings were established under Pertamina, namely Upstream Subholding, Gas Subholding, Power and NRE Subholding, Commercial & Trading Subholding, Refinery & Petrochemical Subholding, and Shipping Subholding.

Following the establishment and new assignment role of gas Subholding to the Company, Pertamina has finally completed the establishment of five other Subholdings that all have reached legal endstate and came into effect as of September 1, 2021: Upstream Subholding, Commercial & Trading Subholding, Refining & Petrochemical Subholding, Power & New, Renewable Energy Subholding and Integrated Marine Logistics Subholding.

The Pertamina Gas Negara logo symbolizes the transformation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) as the Gas Subholding of Pertamina. Adjustments to the masterbrand structure follow Pertamina’s brand-holding identity with the “One Brand” principle set by Pertamina for its subsidiaries.

The new identity still has the same meaning if it is shortened to PGN. In addition, it has a new ownership meaning of Pertamina Gas Negara.

Pertamina Gas Negara was chosen by the majority of PGN stakeholders as it still adopts PGN’s identity, namely Gas Negara. PGN is considered to already have a strong brand value in the public, so if it is changed, it needs a name that is also easy for the public to recognize the PGN’s new identity.

Consistently echoing the spirit of “One Energy, One Pertamina”, the synergy of all of the efforts and activities in the provision of energy becomes a combined strength that will empower the Company to have greater impacts in order to seek solutions to future energy challenges. Transformation becomes a strategy in aligning Pertamina’s Gas Subholding identity.

SUBHOLDING GAS

Gas Subholding

Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN menambah Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PGN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Pertamina (Persero).

Saham Seri B yang diserahkan Negara Republik Indonesia (Kementerian BUMN) kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 56,96%, sedangkan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna tetap dipegang Negara Republik Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan No. 286/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara dalam Modal Saham PT Pertamina (Persero). Pemerintah menetapkan nilai penambahan modal negara ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) sebesar Rp38.136.346.046.696 yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara kepada PGN sebanyak 13.809.038.755 lembar. Proses ini dilengkapi dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham antara Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) yang berlaku efektif pada 11 April 2018.

Selanjutnya, sebagai bagian dari rangkaian pembentukan Holding BUMN Migas, PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada 29 Juni 2018.

Dengan ditandatanganinya Amendemen dan Pernyataan kembali Perjanjian Jual Beli Saham, pada 28 Desember 2018 dilakukan transaksi pengambilalihan 51% saham milik PT Pertamina (Persero) pada PT Pertamina Gas oleh PGN, termasuk lima anak usaha PT Pertamina Gas yakni:

1. PT Pertagas Niaga,
2. PT Perta Arun Gas,
3. PT Perta Daya Gas,
4. PT Perta-Samtan Gas, dan
5. PT Perta Kalimantan Gas.

The Government, through Ministry of State-Owned Enterprises, increased state capital participation of the Republic of Indonesia in PT Pertamina (Persero) originating from the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia to PGN as stipulated in Government Regulation Number 6 of 2018. This is the measure taken by the Government to strengthen the capital structure and increase the business capacity of PT Pertamina (Persero).

The B Series shares handed over by the Government (the Ministry of State-Owned Enterprises)to PT Pertamina (Persero) amounted to 56.96%, while 1 A Series Dwiwarna share is still held by the State in accordance with the mandate of Government Regulation Number 72 of 2016 on Amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 on Participation and Administration of State Capital in State- Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

The Government Regulation Number 6 of 2018 was followed up with the signing of Decree of Minister of Finance Number 286/KMK.06/2018 on Determination of the Value of State Capital Participation in the Share Capital of PT Pertamina (Persero). The Government has determined the value of additional state capital into PT Pertamina (Persero)'s share capital of Rp38,136,346,046,696 originating from the transfer of all State-owned B Series shares to PGN of 13,809,038,755 shares. The process was complemented by the signing of the Deed of Entry into the Company (Inbreng) between the Ministry of State-Owned Enterprises and PT Pertamina (Persero) which took effect as of April 11, 2018.

As part of the series of establishment of the Oil and Gas State-Owned Enterprises Holding, PGN signed an Agreement on Conditional Sales of Share to acquire PT Pertamina Gas and its subsidiaries on June 29, 2018.

With the signing of the Amendment and Restatement of the Agreement on Share Sale, on December 28, 2018 an acquisition of 51%shares owned by PT Pertamina (Persero) in PT Pertamina Gas was carried out by PGN, including five subsidiaries of PT Pertamina Gas, namely:

1. PT Pertagas Niaga,
2. PT Perta Arun Gas,
3. PT Perta Daya Gas,
4. PT Perta-Samtan Gas, and
5. PT Perta Kalimantan Gas.

Dengan demikian, PT Pertamina (Persero) secara resmi menjadi Holding BUMN Migas dan PGN menjadi Subholding Gas. Sebagai Subholding Gas, PGN melaksanakan seluruh kegiatan proses bisnis hilir gas bumi, mulai dari pengadaan pasokan gas bumi dari sumber domestik maupun internasional, serta mengelola infrastruktur yang dilakukan sendiri maupun Entitas Anak/Afiliasi, sampai dengan penyaluran gas bumi kepada seluruh segmen pengguna akhir yaitu rumah tangga, pelanggan kecil, SPBG, komersial, industri dan pembangkit listrik.

Thus, PT Pertamina (Persero) officially became the Oil and Gas State-Owned Enterprises Holding and PGN became the Gas Subholding. As Gas Subholding, PGN carries out all natural gas downstream business process activities, including procuring natural gas supplies from domestic and international sources, managing infrastructure carried out by PGN and its Subsidiaries/ Affiliates, and distributing natural gas to all end-user segments, namely households, small-scale customers, gas stations, commercial entities, industry and power plants.

LINGKUP BISNIS SUBHOLDING GAS

GAS SUBHOLDING'S SCOPE OF BUSINESSES

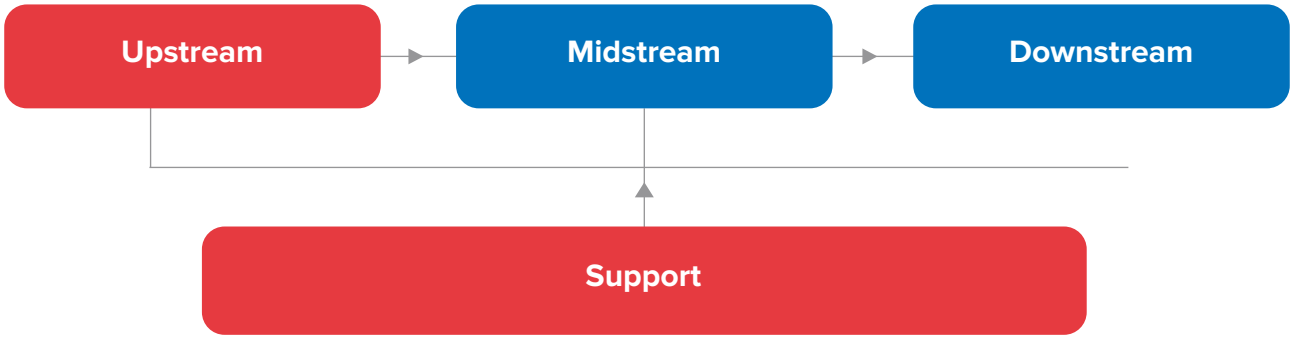

PENYEDIA SOLUSI ENERGI TERINTEGRASI

PGN dan Entitas Anak serta Afiliasi sebagai bagian Subholding Gas saling mendukung dan memberikan nilai tambah dalam penyediaan gas bumi kepada pengguna akhir. Penyediaan gas bumi yang berkualitas dan andal dapat terjadi berkat dukungan dari Entitas Anak dan Afiliasi yang berperan serta pada bisnis inti penyediaan gas bumi melalui:

a. Bidang Usaha *Upstream*
   Anak usaha PGN yang mengelola produksi minyak dan gas bumi yaitu SEI. Saat ini SEI mengelola 11 Wilayah Kerja (WK) yang terdiri dari 10 WK dalam negeri dan 1 WK internasional.
b. Bidang Usaha *Midstream*
   Regasifikasi dan Transportasi gas (melalui pipa dan moda transportasi lain non-pipa) (*midstream*) PGN, PT Pertamina Gas, PT Transportasi Gas Indonesia, dan PT Kalimantan Jawa Gas berfokus dalam mengelola pipa transportasi gas bumi serta PT PGN LNG Indonesia dan PT Perta Arun Gas berfokus dalam penyediaan jasa regasifikasi.
c. Niaga gas bumi dalam bentuk gas pipa, LNG dan CNG (*downstream*) PGN, PT Pertagas Niaga dan PT Gagas Energi Indonesia berfokus dalam penyedia gas bumi pada pelanggan akhir (pembangkit listrik, industri, komersial, pelanggan transportasi, pelanggan kecil, dan rumah tangga) baik dalam bentuk gas pipa maupun CNG ataupun LNG.

PROVIDER OF INTEGRATED ENERGY SOLUTION

PGN and its Subsidiaries and Affiliates as part of the Gas Subholding support each other and provide added value in the provision of natural gas to end users. The provision of quality and reliable natural gas can occur thanks to the support of Subsidiaries and Affiliates that participate in the core business of natural gas supply through:

a. Upstream Business Sector
   PGN's subsidiary that manages oil and gas production is SEI. SEI currently manages 11 Working Areas (WK) consisting of 10 domestic WK and 1 international WK.
b. Midstream Business Sector
   Gas Regasification and Transportation (pipeline) Gas Regasification and Transportation (through pipelines and other non-pipeline transportation modes) (midstream) PGN, PT Pertamina Gas, PT Transportasi Gas Indonesia, and PT Kalimantan Jawa focus on managing natural gas transportation pipelines and PT PGN LNG Indonesia and PT Perta Arun Gas focus on providing regasification services.
c. PGN, PT Pertagas Niaga and PT Gagas Energi Indonesia focus on providing natural gas to end customers (power plants, industrial, commercial, transportation customers, small customers, and households) both in the form of piped gas and CNG or LNG.

d. Bisnis Lainnya (*Support*)
Bisnis lain yang mendukung pertumbuhan bisnis inti PGN yaitu penyedia jasa teknologi informasi, jasa operasi, pemeliharaan, dan konstruksi termasuk manajemen aset. Pengembangan bidang usaha tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

d. Other Businesses (Support)
Other businesses that support the growth of PGN's core business are information technology service providers, operation, maintenance and construction services including asset management. The development of these business sectors is of course with due regard to the prevailing laws and regulations and in accordance with the principles of good corporate governance.

PENGELOLA INFRASTRUKTUR GAS BUMI NASIONAL

OPERATOR OF NATIONAL NATURAL GAS INFRASTRUCTURES

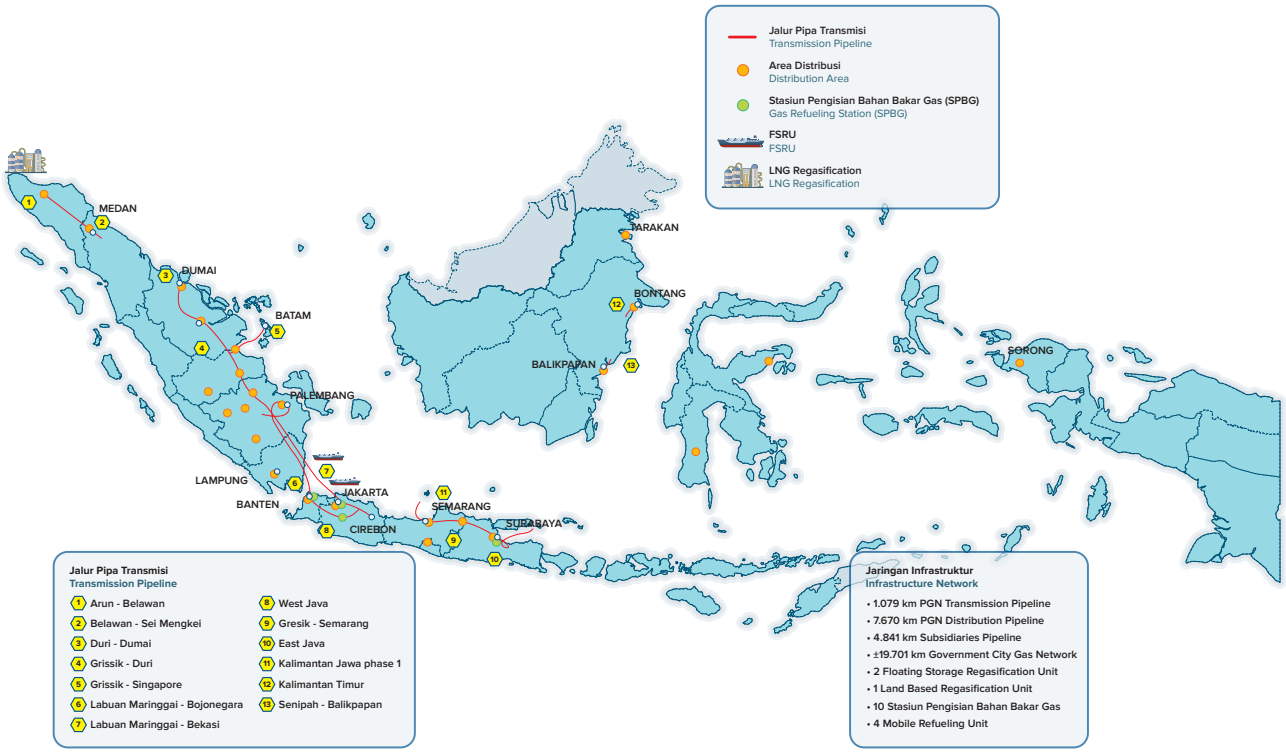

PGN sebagai Subholding Gas, mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di Indonesia dan mengupayakan peningkatan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat baik melalui moda infrastruktur pipa maupun non-pipa. Segmen usaha niaga gas bumi adalah kegiatan penyaluran dan penjualan gas bumi ke pengguna akhir, meliputi pelanggan komersial dan industri manufaktur, pembangkit listrik, pelanggan kecil (UMKM), serta pelanggan rumah tangga. Segmen usaha ini dikelola PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, dan PT Pertamina Gas Niaga.

PGN, as a Gas Subholding, integrates natural gas infrastructure in Indonesia and strives to increase energy access to all levels of the community through both pipeline and non-pipeline infrastructure modes. The natural gas trading business segment is the natural gas distribution and sales activities to end users, including commercial and industrial manufacturing customers, power plants, small-scale customers (MSMEs), and household customers. This business segment is managed by PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, and PT Pertamina Gas Niaga.

PERTAMINA

VISI DAN MISI

Vision and Mission

Dewan Komisaris dan Direksi PGN telah menyetujui Visi dan Misi Perseroan. Visi dan Misi Perseroan sebagai Subholding Gas juga telah diperbarui dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.062000.K/PR.00/PDO/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Suplemen hingga 2034 dan Visi Misi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sedangkan budaya Perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.037800.K/OT.04/PDO/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Penerapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di Lingkungan Subholding Gas.

PGN's Board of Commissioners and Board of Directors approved the Company's Vision and Mission. The Company's Vision and Mission as a Gas Subholding has also been updated and stipulated through the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.062000.K/PR.00/PDO/2024 dated September 25, 2024, regarding the Determination of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025-2029 Supplement to 2034 and the Vision and Mission of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Meanwhile, the Company's culture is stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No.037800.K/OT.04/PDO/2020 dated October 16, 2020, regarding the Implementation of AKHLAK Core Values within the Gas Subholding.

Visi | Vision

Menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan
To be the clean energy solution provider for a greener and more sustainable world

Misi | Mission

Menjalankan bisnis gas di bidang *midstream* dan *downstream* dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan:

1. **Menyediakan energi berbasis gas yang memberi nilai tambah bagi seluruh pelanggan.**
2. **Mengakselarasi transisi energi di Indonesia.**

Conducting midstream and downstream gas business and other supporting businesses committed to increasing the value for all stakeholders through:

1. Providing gas-based energy that adds value to all customers.
2. Accelerating the energy transition in Indonesia.

BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

AKHLAK

Untuk mendukung peran PGN sebagai Subholding Gas dan pengelola utama bisnis gas bumi di Indonesia, PGN menjadikan penerapan budaya perusahaan "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai faktor kunci dalam mencapai Visi Misi Subholding Gas. Budaya AKHLAK memastikan bahwa perilaku seluruh organisasi sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, yang berlaku bagi semua Perwira Subholding Gas.

To support PGN's role as the Gas Subholding and the main operator of the natural gas business in Indonesia, PGN adopts the corporate culture of "AKHLAK" (*Amanah* - Trustworthy, *Kompeten* - Competent, *Harmonis* - Harmonious, *Loyal* - Loyal, *Adaptif* - Adaptive, and *Kolaboratif* - Collaborative) as a key factor in achieving the Vision and Mission of the Gas Subholding. The AKHLAK culture ensures that the behaviors of the entire organization align with the company's values, applying to all Gas Subholding personnel.

AMANAH
TRUSTWORTHY

Kalimat afirmatif:
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Perilaku AMANAH:
- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Affirmative statement:
We uphold the trust that has been given
TRUSTWORTHY Behavior:
- Fulfilling promises and commitments.
- Taking responsibility for tasks, decisions, and actions.
- Adhering to moral and ethical values.

KOMPETEN
COMPETENT

Kalimat afirmatif:
Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Perilaku KOMPETEN:
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Affirmative statement:
We continue to learn and develop capabilities
COMPETENT Behavior:
- Improving self-competence to respond to everchanging challenges.
- Helping others to learn.
- Completing tasks with the highest quality.

HARMONIS
HARMONIOUS

Kalimat afirmatif:
Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
Perilaku HARMONIS:
- **Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.**
- **Suka menolong orang lain.**
- **Membangun lingkungan kerja yang kondusif.**

Affirmative statement:
We care for each other and respect differences
HARMONIOUS Behavior:
- Respecting everyone regardless of background.
- Willing to help others.
- Building a conducive work environment.

LOYAL
LOYAL

Kalimat afirmatif:
Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Perilaku LOYAL:
- Menjaga nama baik sesama Perwira Subholding Gas, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Affirmative statement:
We are dedicated and prioritize the interests of the Nation and State
LOYAL Behavior:
- Maintaining the reputation of fellow Gas Subholding Employees, leaders, SOEs, and the State.
- Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
- Obeying the leadership as long as it is not against the law and ethics

ADAPTIF
ADAPTIVE

Kalimat afirmatif:
Kami terus berinovasi & antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Perilaku ADAPTIF:
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

Affirmative statement:
We continue to innovate & be enthusiastic in driving or facing change
ADAPTIVE Behavior:
- Quickly adapting to become better.
- Making continuous improvement following technological developments.
- Being proactive.

KOLABORATIF
COLLABORATIVE

Kalimat afirmatif:
Kami membangun kerja sama yang sinergis
Perilaku KOLABORATIF:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Affirmative statement:
We build synergistic cooperation
COLLABORATIVE Behavior:
- Providing opportunities for various parties to contribute.
- Being open about working together to generate added value.
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

BIDANG USAHA

Nature of Businesses

KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 28 tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha PGN adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
b. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan (gas hidrokarbon).
c. Pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam, karbonasi dan gasifikasi batu bara atau bahan hidrokarbon lain, termasuk proses regasifikasi LNG (KBLI 35201).
d. Penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar sampai dengan 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan (KBLI 35202).
e. Penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
f. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair kepada konsumen melalui saluran dan transportasi darat maupun laut (KBLI 35202).
g. Perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas (KBLI 35202).
h. Pengangkutan gas dalam bentuk gas dan cair dari produsen ke tempat konsumen dengan saluran pipa maupun moda transportasi darat dan laut atas dasar fee atau kontrak (KBLI 49300).

BUSINESS ACTIVITES

Bussiness Activities Pursuant to Articles of Association

In accordance with Article 3 of PGN's Articles of Association as last amended by Deed Number 28 dated 11 May 2021 made before a Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, PGN's business activities are as follows:

Main Business Activities

a. Carrying out planning, construction, management and downstream business development in the natural gas sector including processing, transportation, storage and trading activities.
b. Carrying out planning, construction, production development, supplying, and distribution of artificial gas (hydrocarbon gas).
c. Processing gas fuel that can be used directly as fuel where the production is accompanied by gas quality improvement, such as by refining, blending, and other processes produced from natural gas, carbonation and coal gasification, or other hydrocarbon materials, including LNG regasification process (ISIC 35201).
d. Distributing gas through pipeline networks with extra high pressure (more than 10 bar); high pressure (between 4 bar to 10 bar); and medium to lower pressure (below 4 bar) be it from own production or from other parties to consumers (ISIC 35202).
e. Carrying out transmission, distribution, and procurement of all types of gas fuel, in gas and liquid form through the pipeline system and land and sea transportation (ISIC 35202).
f. Trading gas in gas and liquid form to consumers through the pipeline system and land and sea transportation (ISIC 35202).
g. Trading gas in gas and liquid form through the gas distribution system operated by other parties and carrying out operations of commodity exchange and gas fuel transportation (ISIC 35202).
h. Transporting natural gas in gas and liquid form from producers to the consumers using the pipeline system and land and sea transportation on a fee or contract basis (ISIC 49300).

i. Pengoperasian gardu pompa (KBLI 49300).
j. Penyimpanan gas dalam bentuk gas dan cair sementara sebelum gas tersebut dikirim ke konsumen (KBLI 52101; KBLI 52109).
k. Perdagangan bahan bakar gas dan cair, serta produk sejenisnya dalam skala industri maupun retail (KBLI 46610).
l. Instalasi gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal (KBLI 43223).
m. Pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran gas (KBLI 43223).

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang lain yang berkaitan langsung dan/atau yang mendukung kegiatan usaha utama, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Penyertaan modal di bidang usaha hulu minyak dan gas, infrastruktur pipa minyak, LNG termasuk LNG *carrier*, NGL, LPG, CNG, jasa konstruksi, *engineering*, kelistrikan, informasi dan komunikasi, properti dan manajemen aset, kawasan pariwisata, penyediaan jasa tenaga kerja, konsultasi, dan bidang usaha lainnya.
b. Kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.
c. Optimalisasi pemanfaatan aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki Perseroan.

i. Operating pumping substations (ISIC 49300).
j. Providing temporary storage for gas in gas and liquid form before the gas is sent to the consumers (ISIC 52101; ISIC 52109).
k. Trading gas and liquid fuels, as well as similar products on industrial and retail scales (ISIC 46610).
l. Installing gas in buildings for both residential and nonresidential purposes (ISIC 43223).
m. Maintaining and repairing gas line installations (ISIC 43223).

In addition to the main business activities, the Company is entitled to carry out other supporting business activities that are directly related and/or that support the main business activities, including but not limited to:

a. Capital participation in the oil and gas upstream businesses, oil pipes infrastructure, LNG including LNG carrier, NGL, LPG, CNG, construction services, engineering, electricity, information and communication, property and asset management, tourism area, labor services, consulting services, and other businesses.
b. Service activities related to natural gas mining carried out on a fee or contract basis.
c. Optimization of the Company's assets and resources.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun Buku

PGN menjalankan kegiatan usaha di bidang transmisi dan niaga gas bumi. Pada bidang transmisi gas bumi, PGN dan entitas anak/afiliasi memiliki jaringan pipa transmisi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi.

Dalam bidang niaga gas bumi, PGN membeli gas bumi dari produsen lalu dijual ke berbagai segmen pengguna akhir, mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan kecil, pelanggan komersial dan industri, pembangkit listrik, kilang, pupuk, smelter, hingga ke sektor transportasi baik melalui moda pipa distribusi gas bumi, CNG, maupun LNG.

PGN mengoperasikan berbagai infrastruktur gas bumi secara terintegrasi, guna mendukung kegiatan usaha niaga gas bumi. PGN menjamin penyaluran gas bumi kepada para pengguna akhir gas bumi, memenuhi kualitas produk (komposisi, tekanan, temperatur gas bumi), dan menyediakan layanan pelanggan (kontak pelanggan, penanganan gangguan) sesuai standar internasional.

Pengelolaan pelanggan dilakukan PGN berdasarkan segmentasi pelanggan yang dibagi menjadi:

1. Pelanggan Rumah Tangga (RT)
2. Pelanggan Kecil (PK)
3. Pelanggan Sektor Transportasi (SPBG)
4. Pelanggan Komersial dan Industri (KI)

Pada bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas, PGN melalui Anak Perusahaan PT Saka Energi Indonesia (SEI) melakukan kegiatan usaha di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan usaha minyak dan gas bumi. Produk-produk yang dihasilkan yaitu minyak bumi, gas bumi, dan LPG.

Sementara pada bidang usaha lainnya, produk yang dihasilkan oleh PGN antara lain jasa sewa fiber optik, jasa konstruksi dan perbaikan (*operation & maintenance*), serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

Business Activities in the Financial Year

PGN conducts business activities in the transmission and trading of natural gas. In the field of natural gas transmission, PGN and its subsidiary entities/affiliates own transmission pipelines in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra, Riau, Jambi, South Sumatra, Riau Islands, West Java, Central Java, East Java and East Kalimantan to connect the locations of natural gas sources with those of end users of natural gas through the transmission pipeline mode.

In the natural gas trading sector, PGN buys natural gas from producers and then sells it to various end-user segments, ranging from household customers, small-scale customers, commercial and industrial customers, power plants, refinery, fertilizer, smelter, to those of the transportation sector through the natural gas distribution pipeline mode, CNG, as well as LNG.

To support natural gas trading business activities, PGN operates various natural gas infrastructures in an integrated manner. PGN guarantees the distribution of natural gas to the natural gas end-users, meets product quality (composition, pressure, temperature of natural gas), and provides customer service (customer contact, troubleshooting) in accordance with international standards.

PGN carried out customer management based on customer segmentation which is divided into:

1. Household Customers (RT)
2. Small-scale Customers (PK)
3. Customers in Transportation Sectors (SPBG/Gas Refueling Station)
4. Commercial and Industrial Customers (KI)

In the oil and gas exploration and production sector, PGN through its subsidiary PT Saka Energi Indonesia (SEI) conducts business activities in the exploration, exploitation, and development of the oil and gas business. They produce petroleum, natural gas, and LPG.

Meanwhile in other business sectors, the PGN provides fiber optic rental services, construction and repair services (operation & maintenance), as well as management and rental of buildings and equipment.

PRODUK ATAU JASA YANG DIHASILKAN

Dalam bisnis niaga, PGN menawarkan produk-produk yang berbeda kepada masing-masing segmentasi pelanggan, di antaranya:

PRODUCTS OR SERVICES

In the commercial business, PGN offers different products to each customer segment, among others:

gasline – *Your Energy Efficiency Partner*

Solusi pemanfaatan energi terintegrasi yang andal dan berfokus pada pelanggan melalui *excellent customer experience* untuk segmen pelanggan komersial dan industri.
Reliable customer-focused integrated energy utilization solutions through excellent customer experience in the commercial and industrial customer segments.

gaskita – *Juaranya Gas Ngalir Terus*

Solusi pemanfaatan energi yang praktis, aman, dan ramah lingkungan untuk segmen pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil.
Practical, safe and ecofriendly energy utilization solutions for households and retail customer segments.

gasku – *Melaju Dengan Bersih*

Solusi penyediaan bahan bakar gas yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien dengan moda CNG untuk segmen pelanggan transportasi.
Solution for providing clean, ecofriendly and efficient gas fuel using CNG mode in the transportation customer segment.

gaslink – *Bring Energy to You*

Solusi penyediaan gas bumi untuk lokasi tanpa jaringan distribusi gas bumi melalui *Gas Transport Module* (GTM), yaitu kendaraan yang membawa gas bumi dengan moda CNG untuk segmen pelanggan Industri, Komersial dan UMKM.
Solution for providing natural gas for locations without a natural gas distribution network through the Gas Transport Module (GTM), where natural gas in transported using CNG mode for the Industrial, Commercial and MSME customer segments.

PGN menyediakan gas bumi dalam dua bentuk utama: gas pipa dan *beyond pipeline*. Untuk kategori gas pipa, PGN menawarkan produk GasLine dan GasKu, sementara dalam kategori *beyond pipeline*, tersedia produk GasKu dan GasLink.

Produk *gasline* menawarkan pilihan solusi terintegrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi pemanfaatan gas bumi pelanggan melalui berbagai kriteria kontrak ke beberapa kelompok berdasarkan jumlah pemakaian gas bumi, yaitu:

a. *Bronze* 1, pemakaian 1.001-10.000 m^3/bulan;
b. *Bronze* 2, pemakaian 350-1.750 mmbtu/bulan;
c. *Bronze* 3, pemakaian 1.751-17.500 mmbtu/bulan;
d. *Silver*, pemakaian 17.501-125.000 mmbtu/bulan;
e. *Gold*, pemakaian 125.001-350.000 mmbtu/bulan;
f. *Platinum*, pemakaian lebih besar dari 350.000 mmbtu/bulan.

Selain *gasline*, PGN juga menghadirkan gaslink sebagai solusi bagi segmen pelanggan komersial dan industri melalui moda transportasi gas atau Gas Transport Module (GTM) dalam bentuk CNG dan LNG. Produk ini dirancang khusus untuk calon pelanggan yang belum terjangkau oleh jaringan pipa PGN, memastikan akses energi yang lebih luas dan fleksibel.

PGN provides natural gas in two main forms: pipeline gas and beyond pipeline gas. For the pipeline gas category, PGN offers GasLine and GasKu products, while in the beyond pipeline category, GasKu and GasLink products are available.

Gasline products offer a choice of integrated solutions tailored to the operational needs of customers' natural gas utilization through various contract criteria, divided into several groups based on the amount of natural gas usage, namely:

a. Bronze 1, usage of 1,001-10,000 m^3/month;
b. Bronze 2, usage of 350-1,750 mmbtu/month;
c. Bronze 3, usage of 1,751-17,500 mmbtu/month;
d. Silver, usage of 17,501-125,000 mmbtu/month;
e. Gold, usage of 125,001-350,000 mmbtu/month;
f. Platinum, usage of more than 350,000 mmbtu/month.

In addition to gasline, PGN also presents gaslink as a solution for the commercial and industrial customer segments through gas transportation modes or Gas Transport Module (GTM) in the form of CNG and LNG. This product is specifically designed for prospective customers who have not been reached by PGN's pipeline network, ensuring wider and more flexible access to energy.

Pada segmen pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, produk gaskita disiapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kategori produk berikut:

a. Produk Gaskita Praktis: diperuntukkan untuk pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan fitur yang praktis namun tetap dapat memenuhi kebutuhan gas pelanggan.
b. Produk Gaskita Pintar: dirancang khusus untuk pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, dilengkapi dengan fitur tambahan yang meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan gas bumi PGN.

Sedangkan untuk segmen pelanggan transportasi, PGN menyediakan produk gasku dalam bentuk CNG yang dapat diakses pada SPBG dan MRU yang telah tersedia di Sumatera bagian selatan, jawa, dan Balikpapan.

In the Household and Small Customer segments, Gaskita products are prepared to meet customer needs in the following product categories:

a. Gaskita Praktis products: intended for Household and Small Customer customers with practical features but still able to meet customer gas needs.

b. Gaskita Pintar products: designed specifically for Household and Small Customer customers, equipped with additional features that increase convenience in the use of PGN natural gas.

As for the transportation customer segment, PGN provides gasku products in the form of CNG that can be accessed at SPBG and MRUs that are already available in southern Sumatra, Java, and Balikpapan.

WILAYAH OPERASI PGN

PGN Operation Regions

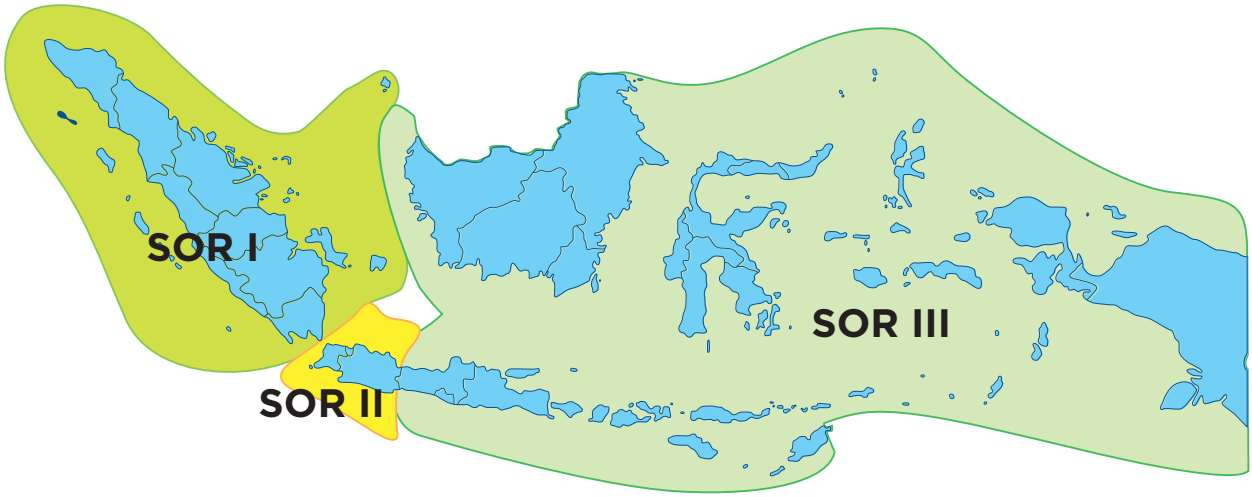

Wilayah kegiatan usaha PGN tersebar di 18 provinsi dan 78 kota/kabupaten di Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, portofolio pengelolaan infrastruktur hilir gas bumi PGN Group mencakup 97% dari infrastruktur hilir gas bumi yang sudah terbangun dan beroperasi. Kegiatan operasional usaha niaga gas bumi PGN dikelola oleh Sales and Operation Region (SOR) yang terbagi dalam SOR I, II, dan III dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

1. Wilayah SOR I meliputi pulau Sumatera & Kepulauan Riau, dengan Area terdiri dari Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam dan sekitarnya.
2. Wilayah SOR II meliputi provinsi Jawa Barat, DKJ Jakarta, Banten, dengan Area terdiri dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon dan sekitarnya.
3. Wilayah SOR III meliputi provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, serta pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku dengan Area terdiri dari Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang, Kalimantan (Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan) dan Kawasan Timur Indonesia (Makassar, Banggai dan Sorong).

Anak Perusahaan dan Afiliasi PGN memiliki wilayah operasi yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan PT Saka Energi Indonesia memiliki area operasi di luar negeri, yaitu pada Lapangan Fasken di Texas, Amerika Serikat.

The area of PGN's business activities is spread across 18 provinces and 78 cities/regencies in Indonesia. Until the end of 2024, PGN Group's downstream natural gas infrastructure management portfolio covers 97% of the built and operating downstream natural gas infrastructure. PGN's natural gas trading business operations are managed by the Sales and Operation Region (SOR), which is divided into SOR I, II, and III with the following details of each SOR area:

1. SOR I Region covers the island of Sumatra & Riau Islands, with Areas consisting of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Batam, and surrounding areas.
2. SOR II Region covers the provinces of West Java, DKJ Jakarta, Banten, with Areas consisting of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Cirebon, and surrounding areas.
3. SOR III Region covers the provinces of Central Java, Special Region of Yogyakarta, East Java, Bali, as well as Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku islands with Areas consisting of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang, Kalimantan (Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan) and Eastern Indonesia (Makassar, Banggai, and Sorong).

PGN's Subsidiaries and Affiliates have operating areas spread throughout the territory of the Republic of Indonesia. While PT Saka Energi Indonesia has an overseas operating area, namely in the Fasken Field in Texas, United States.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 30 Mei 2024, memutuskan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan. Adapun susunan organisasi Perusahaan sesuai Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 036800.K/OT.00/HCGS/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 004100.K/OT.00/HCGS/2023 Tentang Struktur Organisasi Beserta PRL dan Formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Penyesuaian Struktur Organisasi Level BOD-1) sebagai berikut:

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 30, 2024, decided to make changes to the composition of the Company's management. The Company's organizational structure is in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number: 036800.K/OT.00/HCGS/2024 dated 18 September 2024 concerning Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number 004100.K/OT.00/HCGS/2023 concerning the Organizational Structure and PRL and Formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Adjustment of BOD-1 Level Organizational Structure) as follows:

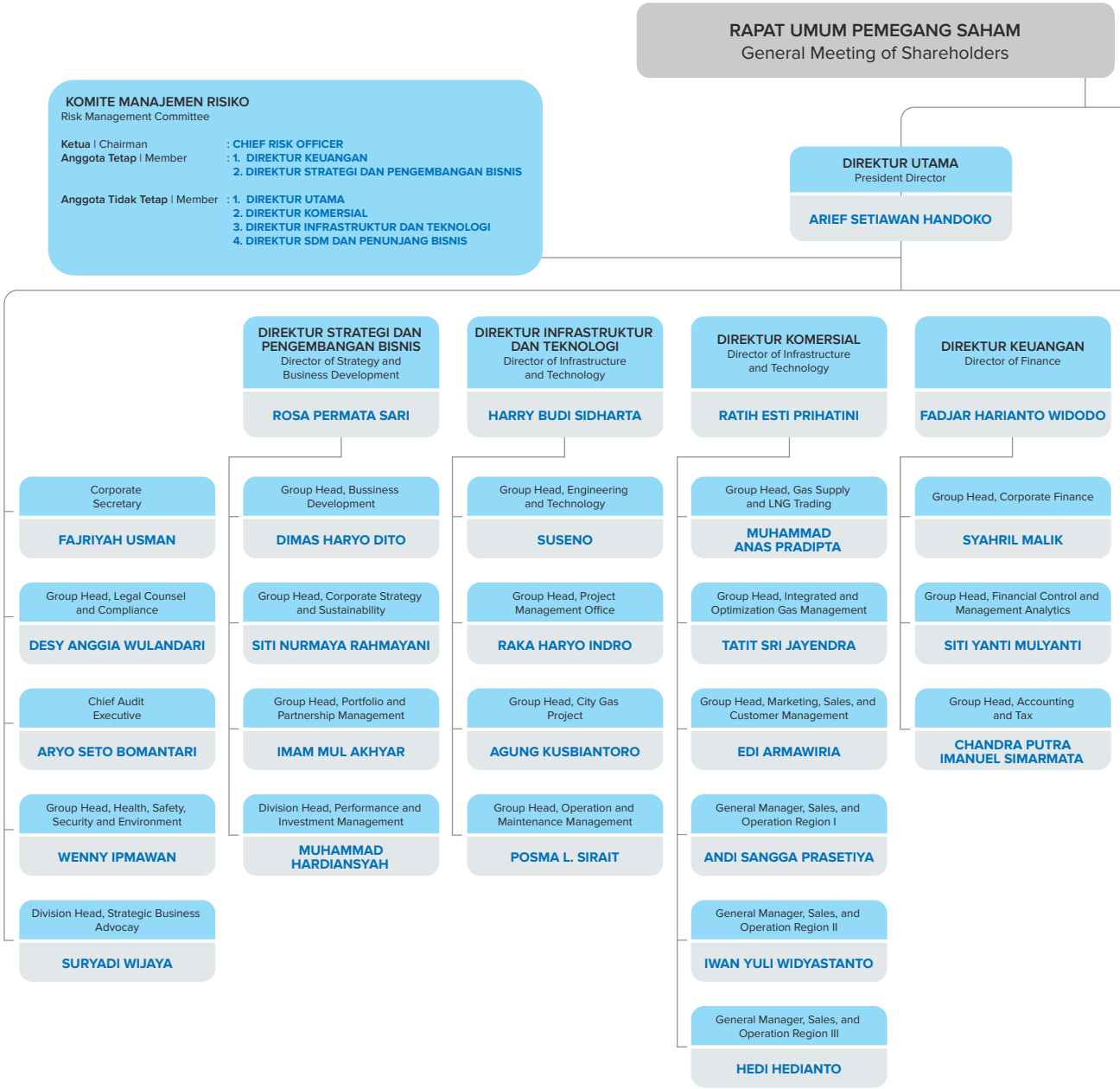

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG
Nomination, Remuneration and GCG Committee

Ketua | Chairman : **CHRISTIAN H. SIBORO**
Anggota | Member :
1. **LUKY ALFIRMAN**
2. **PRADONO WICAKSONO**
3. **SIMON L. HIMAWAN**
4. **VERA SUJATNA**

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA
Risk Management and Business Development Monitor Committee

Ketua | Chairman : **WARIH SADONO**
Anggota | Member :
1. **TONY S.B. HOESODO**
2. **YUDO ANGGORO**
3. **YOVITA L. HANDINI**
4. **MOCH. HATTA FILSAFAWAN**

KOMITE AUDIT
Audit Committee

Ketua | Chairman : **DINI SHANTI PURWONO**
Anggota | Member :
1. **ABDULLAH AUFA FUAD**
2. **YAN RAHADIAN**
3. **RINI YULIUS**
4. **FAJAR ARIWINADI**

* semua jabatan pada Komite TKT bersifat Ex Officio
all positions on the TKT Committee are Ex Officio

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI*
Integrated Governance Committee

Ketua | Chairman : **Komisaris Utama PGN** | President Commissioner of PGN
Wakil Ketua | Vice Chairman : **Ketua Komite NRGCG PGN** | Chairman of PGN NRGCG Committee
Sekretaris | Secretary : **Direktur Manajemen Risiko** | Director of Risk Management
Anggota | Member :
1. **Ketua Komite Audit PGN** | Chairman of PGN Audit Committee
2. **Ketua Komite PMRPU PGN** | Chairman of PGN RMBDM Committe
3. **Komut/Komisaris Independen/Perwakilan Komisaris Anak dan Cucu Perusahaan PGN** | President Commissioner/Independent Commissioner/ Representative Commissioner of PGN's Subsidiaries

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioner Secretary

STRASFIATRI AULIANA

per 31 Desember 2024
as of December 31, 2024

DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS
Director of HR and Bussiness Support

RACHMAT HUTAMA

- Group Head, Human Capital Management — **LINDA DELINA**
- Group Head, Information and Communication Technology — **MUHAMMAD IRWAN SANTOSO**
- Group Head, Procurement — **AHMAD CAHYADI**
- Division Head, Asset and Facility Management — **TRI SETYO UTOMO**

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO
Director of Risk Management

ARIEF KURNIA RISDIANTO

- Division Head, Risk Strategy & Integrated Governance — **REZKI ANINDHITO**
- Group Head, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity — **ERI SURYA KELANA**
- Division Head, Project Risk. Portfolio and Counterparty Risk — **MUHAMAD ROFIQ ARROSYID**

STRUKTUR USAHA

Business Structures

PERTAMINA GAS NEGARA

pgn SAKA power to discover	pgn LNG born to make it happen	pgn MAS commitment to service	pgn COM always reliable	pgn SOLUTION action for excellence
PT. Saka Energi Indonesia (SEI) (99,997%)	**PT PGN LNG Indonesia (PLI) (99,999%)**	**PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS) (99,99%)**	**PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) (99,93%)**	**PT PGAS Solution (PGASOL) (99,91%)**
Hulu Minyak dan Gas Bumi Upstream Oil and Gas	LNG *Wholesales* & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastructure	Pengelolaan Aset, *Facility Management*, *Enterpreneur Real Estate*, Pengelolaan Arsip Asset & Facility Management, Enterpreneur Real Estate, Archive Management	ICT dan *Operation Technology*, Konstruksi, dan Perdagangan ICT and Operation Technology, Construction, and Trading	*Engineering*, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan Engineering, Construction, Operation & Maintennance

pgn GAGAS brings energy to you	Transgasindo energy connect synergy	PERTAMINA GAS	PERTAMINA NUSANTARA REGAS
PT Gagas Energi Indonesia (GEI) (99,88%)	**PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) (59,87%)**	**PT Pertamina Gas (Pertagas) (51%)**	**PT Nusantara Regas (NR) (40%)**
Bisnis SPBG, Transportasi CNG dan LNG Retail Gas Refuelling Station Bussiness, CNG Transportation, and LNG Retail	Transportasi Gas Bumi Transportation of Natural Gas	Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Transmission of Oil and Natural Gas	Bisnis Jasa Regasifikasi & Pengembangan Infrastruktur LNG Regasification Bussiness Services, LNG Infrastructure, Development

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners

AMIEN SUNARYADI

Komisaris Utama dan Komisaris Independen

President Commissioner and Independent Commissioner

14 November 2023-Sekarang | November 14, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	64 tahun per 31 Desember 2024 64 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Malang, 23 Januari 1960 Malang, January 23, 1960
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. First appointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on the 2023 Decision of Extraordinary GMS held on November 14, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	2023-sekarang (Periode Pertama) 2023-present (First Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Ketua Umum Forum Manajemen Risiko BUMN (2024-sekarang) • Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI (2023-sekarang) • Komisaris Utama PT PLN (Persero) (2019-2023) • Partner AHP Law Firm (2019-2023) • Wakil Komisaris Utama of PT Freeport Indonesia (2018-2019) • Kepala SKK Migas (2014-2018) • Partner, Fraud Investigations and Dispute Services, EY Indonesia (2012-2014) • Staf Senior Governance & Anti Corruption, the World Bank (2008-2012) • Staf Ahli Kepala PPATK (2008) • Wakil Ketua KPK (2003-2007) • Senior Manajer, Dispute Analysis and Investigation, PwC (2000-2003) • Auditor, BPKP (1982-2000) • Chairman of Risk Management Forum, BUMN (2024-present) • Chairman of the Tax Oversight Committee, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2023-present) • President Commissioner of PT PLN (Persero) (2019-2023) • Partner at AHP Law Firm (2019-2023) • Vice President Commissioner of PT Freeport Indonesia (2018-2019) • Head of SKK Migas (2014-2018) • Partner, Fraud Investigations and Dispute Services, EY Indonesia (2012-2014) • Senior Officer for Governance & Anti Corruption, the World Bank (2008-2012) • Expert Staff to the Chairman, PPATK (2008) • Deputy Chairman of the Corruption Eradication Committee (2003-2007) • Senior Manager, Dispute Analysis and Investigation, PwC (2000-2003) • Government Auditor, BPKP (1982-2000)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988) • Master Degree College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta (1992) • State College of Accountancy (1988) • Master's Degree from College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta (1992)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi CACP (*Certification in Audit Committee Practices*) 2. Sertifikasi CRGP (*Certified Risk Governance Professional*) 3. Sertifikasi Arbiter 1. CACP Certification (Certification in Audit Committee Practices) 2. CRGP Certification (Certified Risk Governance Professional) 3. Arbitrator Certification
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Bapak Rizal (Komite PIMR Pertamina) tanggal 2 Mei 2024 2. Arbitrase Lanjutan oleh IARBI tanggal 6-7 Agustus 2024 3. Forum Manajemen Risiko BUMN-*Conflict of Interest* tanggal 27 Agustus 2024 4. Sertifikasi Arbiter oleh IARBI tanggal 28 Agustus 2024 5. LNG *Fundamental* & *Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 1. Business Process and Investment Workshop by Mr. Rizal (Pertamina PIMR Committee) on May 2, 2024 2. Follow-up Arbitration by IARBI on August 6-7, 2024. 3. SOE Risk Management Forum-Conflict of Interest on August 27, 2024 4. Certification of Arbitrator by IARBI on August 28, 2024 5. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman of Integrated Governance Committee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | Other Listed Companies Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Chairman of TAX Supervision Committee Ministry of Finance Republic of Indonesia

DINI SHANTI PURWONO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 Mei 2021-Sekarang | May 3 2021-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	50 tahun per 31 Desember 2024 50 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 29 April 1974 Jakarta, April 29, 1974
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2021. Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 3, 2021.
Periode Jabatan Term of Office	2021-sekarang (Periode Pertama) 2021-present (First Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Anggota Majelis Disiplin Profesi (Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan) (2024-sekarang) • Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) (2019-2024) • Staf Khusus Presiden RI (2019-2024) • Partner Pendiri Firma Hukum Purwono & Widyayanti (2018-sekarang) • Anggota Komite Investasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Staf Khusus Menteri Keuangan (2013-2014) • Partner di Firma Hukum Christian Teo & Partners (2011-2018) • Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2012-2013) • Partner di Firma Hukum Roosdiono & Partners (2008-2010) • Kepala Divisi Hukum PT Danareksa (Persero) (2005-2008) • Senior Associate di Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners (Kantor Koresponden Firma Hukum Internasional Baker & McKenzie) (1997-2005) • Member of the Professional Disciplinary Board (for Medical Personnel & Health Workers) (2024-present) • Secretary of the Investment Acceleration Task Force (Presidential Working Team (2019-2024) • Special Staff to the President of the Republic of Indonesia (2019-2024) • Founding Partner of Purwono & Widyayanti Law Firm (2018-present) • Member of the Investment Committee of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Special Staff to the Minister of Finance (2013-2014) • Partner at Christian Teo & Partners Law Firm (2011-2018) • Special Staff to the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) (2012-2013) • Partner at Roosdiono & Partners Law Firm (2008-2010) • Head of Legal Division of PT Danareksa (Persero) (2005-2008) • Senior Associate at Hadiputranto, Hadinoto & Partners Law Firm (Baker & McKenzie International Law Firm Correspondent Office) (1997-2005)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Master (LL.M) di bidang Hukum Keuangan Internasional dari Harvard Law School (2002) • Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1997) • Master of Law in International Finance Law from Harvard Law School (2002) • Bachelor of Law from Universitas Indonesia (1997)
Sertifikasi Certification	1. Anggota Profesi Penunjang Pasar Modal 2. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 3. Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) 4. CACP (*Certification in Audit Committee Practices*) 1. Member of Capital Market Supporting Professional 2. Member of Association of Capital Market Legal Consultants 3. Member of PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) 4. Member of CACP (Certification in Audit Committee Practices)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Sertifikasi CACP oleh IKAI tanggal 23-25 Januari 2024 2. *Cyber Security Fundamental for Top Management* oleh Pertamina tanggal 2 April 2024 3. LNG *Fundamental* & *Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 1. CACP certification by IKAI, January 23-25, 2024. 2. Cyber Security Fundamentals for Top Management by Pertamina on April 2, 2024 3. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Ketua Komite Audit PGN Chairperson of the PGN's Audit Committee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** • Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) • Staf Khusus Presiden RI • Secretary of the Investment Facilitator Tas Force (Presidential Work Team) • Special Staff to the President of the Republic of Indonesia

WARIH SADONO

Komisaris
Commissioner

15 Mei 2020-Sekarang | May 15, 2020-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	61 tahun per 31 Desember 2024 61 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Tegal, 1 Maret 1963 Tegal, March 1, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2020. Appointed for the first time as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 15, 2020.
Periode Jabatan Term of Office	2020-sekarang (Periode Pertama) 2020-present (First Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN (2023-2024) • Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN (2020-2023) • Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019-2020) • Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI (2017-2019) • Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2016-2017) • Deputi Penindakan KPK (2012-2015) • Expert Staff for Litigation at the Ministry of SOE (2023-2024) • Expert Staff for Strategic Policy Implementation of the Ministry of SOE (2020-2023) • Head of the Jakarta District Attorney Office (2019-2020) • Director of JAM PIDSUS Investigations at the Indonesian General Office (2017-2019) • Head of the West Kalimantan District Attorney Office (2016-2017) • Deputy for Corruption Eradication Commission (2012-2015)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Doktor dari Universitas Airlangga, Surabaya (2018) • Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) • Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta (2001) • Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1987) • Doctoral degree from Universitas Airlangga, Surabaya (2018) • Master of Law from Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) • Master Degree in Management from STIE IPWI, Jakarta (2001) • Bachelor's of Law from Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1987)
Sertifikasi Certification	CRP (*Certified Risk Professional*) CRP (Certified Risk Professional)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Seri Workshop Bersama Komite PIMR Holding tanggal 25 April 2024 2. Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Bapak Rizal (Komite PIMR Pertamina) tanggal 2 Mei 2024 3. *Anti-Fraud Risk Management Implementation* oleh IRMAPA tanggal 4 Juni 2024 4. Pelatihan Dasar Arbitrase oleh Institut Arbiter Indonesia tanggal 10-11 September 2024 5. Sertifikasi *Risk Management* (CRP) oleh IRBA tanggal 10 Oktober 2024 6. LNG *Fundamental & Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 7. Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina tanggal 4 Desember 2024 1. Workshop Series with the PIMR Holding Committee on April 25, 2024 2. Business and Investment Process Workshop by Mr. Rizal (Pertamina PIMR Committee) on May 2, 2024 3. Anti-Fraud Risk Management Implementation by IRMAPA on June 4, 2024 4. Basic Arbitration Training by the Indonesian Institute of Arbitrators on September 10-11, 2024 5. Risk Management Certification (CRP) by IRBA on October 10, 2024 6. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024 7. Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina on December 4, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali. Selain menjadi Komisaris PGN, Bapak Warih Sadono juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN. Affiliated with the main and/or controlling shareholder. In addition to being a PGN Commissioner, Mr. Warih Sadono also serves as an Expert in Litigation for the Ministry of SOE.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

LUKY ALFIRMAN

Komisaris
Commissioner

26 April 2019-25 Maret 2025 | April 26, 2019-March 25, 2025

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	54 tahun per 31 Desember 2024 54 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 27 Maret 1970 Bandung, March 27, 1970
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 April 2019. Diangkat kembali untuk Periode Kedua sebagai Komisaris berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed for the first time as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on April 26, 2019. Reappointed for a Second Term as Commissioner based on the Annual GMS held on May 30, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	• 2019 - 2024 (Periode Pertama) • 2024 - 25 Maret 2025 (Periode Kedua)[1] • 2019 - 2024 (First Term) • 2024 - March 25, 2025 (Second Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (2022-sekarang) • Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2020-sekarang) • Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (2023-sekarang) • Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan (2017-2022) • Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan Penerimaan Negara di Kementerian Keuangan (2017) • Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2015-2017) • Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kementerian Keuangan (2012-2015) • Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2011) • Director General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance (2022-present) • Commissioner Board at Indonesia Deposit Insurance Corporation (2020-present) • Supervisory Board of Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Central Management (2023-present) • Director General of Financing and Risk Management at the Ministry of Finance (2017-2022) • Expert Staff to the Minister of Finance for State Revenue Policy at the Ministry of Finance (2017) • Head of Center for Policy Analysis and Harmonization at the Secretariat General of the Ministry of Finance (2015-2017) • Head of the Center for Macroeconomic Policy, BKF Ministry of Finance (2012-2015) • Head of the Center for State Revenue and Expenditure Budget Policy (2011)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Ph.D. bidang Ekonomi dari University of Colorado, AS (2004) • Master bidang Ekonomi dari University of Colorado, AS (2000) • Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994) • Ph.D in Economics University of Colorado, USA (2004) • Master degree in Economics from University of Colorado, USA (2000) • Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994)
Sertifikasi Certification	CRP (*Certified Risk Professional*) CRP (Certified Risk Professional)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Sertifikasi *Risk Management* (CRP) oleh IRBA tanggal 10 Oktober 2024 2. LNG *Fundamental & Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 3. *Master Class Series - Risk Beyond International Conference on ERM* oleh IRMAPA tanggal 4 Desember 2024 1. Risk Management Certification (CRP) by IRBA on October 10, 2024 2. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024 3. Master Class Series - Risk Beyond International Conference on ERM by IRMAPA on December 4, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali. Selain menjadi Komisaris PGN, saat ini Bapak Luky Alfirman juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Affiliated with major and/or controlling shareholders. In addition to being a Commissioner of PGN, Mr. Luky Alfirman also currently serves as the Director General of Fiscal Balance and the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN (1 Januari-6 Juni 2024) • Anggota Komite Nominasi Remunerasi dan GCG PGN (7 Juni 2024-sekarang) • Member of PGN's Risk Management and Business Development Monitoring Committee (January 1-June 6, 2024) • Member of the PGN Nomination, Remuneration and GCG Committee (June 7, 2024-present) **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** • Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan • Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan • Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno • Director General of Fiscal Balance • Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation • Supervisory Board of tKomplek Gelanggang Olahraga Bung Karno Management Center

*) Per tanggal 25 Maret 2025 Bapak Luky Alfirman diangkat sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
As of March 25, 2025 Mr. Luky Alfirman was appointed as Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Riwayat Jabatan Work Experience	• Staf Khusus Menteri Koordinator Politik & Keamanan (2024-sekarang) • Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2016-2024) • Penasihat Ahli POLRI Bidang Organisasi dan SDM (2004-2016) • Founder & Director PT Netika Indonesia (2007-2019) • Special Staff to the Coordinating Minister of Politics & Security (2024-present) • Special Staff to the Chief of State Intelligence Agency (2016-2024) • Expert Advisor in Indonesian Police for Organization and Human Resources (2004-2016) • Founder & Director of PT Netika Indonesia (2007-2019)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Doctor of Business Administration-HR and Strategic Management dari Paris School of Business (2022) • Magister Manajemen bidang Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM (1995) • Sarjana Geofisika dan Meteorologi dari Institut Teknologi Bandung (1993) • Doctor of Business Administration-HR and Strategic Management from Paris School of Business (2022) • Master of Management in International Management from (Management Education and Coaching) PPM School of Management (1995) • Bachelor of Geophysics and Meteorology from Bandung of Institute Technology (1993)
Sertifikasi Certification	Harvard *Business Analytics Program*-Harvard University (2023-2024) Harvard Business Analytics Program-Harvard University (2023-2024)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. *Gartner Reimagine HR Conference* oleh Gartner Inc tanggal 17-18 September 2024 2. LNG *Fundamental* & *Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 1. Gartner Reimagine HR Conference by Gartner Inc. September 17-18, 2024 2. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Chair of the Nomination, Remuneration and GCG Committee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | Other Listed Companies Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution • Staf Khusus Menteri Koordinator Politik & Keamanan (2024-sekarang) • Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2016-2024) • Special Staff to the Coordinating Minister for Politics & Security (2024-present) • Special Staff to the Head of the State Intelligence Agency (2016-2024)

CHRISTIAN H. SIBORO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

30 Agustus 2019-Sekarang | August 30, 2019-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	56 tahun per 31 Desember 2024 56 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Pontianak, 3 Desember 1968 Pontianak, December 3, 1968
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2019. Diangkat kembali untuk Periode Kedua sebagai Komisaris berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 30, 2019. Reappointed for a Second Term as Commissioner based on the Annual GMS held on May 30, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	• 2019 - 2024 (Periode Pertama) • 2024 - sekarang (Periode Kedua) • 2019 - 2024 (First Term) • 2024 - present (Second Term)

ABDULLAH AUFA FUAD

Komisaris Independen
Independent Commissioner

14 November 2023-Sekarang | November 14, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	33 tahun per 31 Desember 2024 33 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Kediri, 5 April 1991 Kediri, April 5, 1991
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2023. Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on November 14, 2023.
Periode Jabatan Term of Office	2023-sekarang (Periode Pertama) 2023-present (First Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• PT Kawal Sidang Indonesia (2022-2023) • PA Staf Khusus Presiden (2019-2023) • PT Speaktograph Digital (2019-2021) • PT Kawal Sidang Indonesia (2022-2023) • PA Special Staff to the President (2019-2023) • PT Speaktograph Digital (2019-2021)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2 Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquée, Lyon, France (2018) • S1 Fisika, Universitas Airlangga (2015) • Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquée, Lyon, France (2018) • Bachelor Degree in Physics, Airlangga University (2015)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi CACP (*Certification in Audit Committee Practices*) 2. Sertifikasi CRP (*Certified Risk Professional*) 1. CACP Certification (Certification in Audit Committee Practices) 2. CRP Certification (Certified Risk Professional)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Sertifikasi CACP oleh IKAI tanggal 5-7 Maret 2024 2. Peran Stategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman oleh IKAI tanggal 1 Agustus 2024 3. *Risk Management* (CRP) oleh IRBA tanggal 10 Oktober 2024 4. LNG *Fundamental & Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 5. Lemhanas Group IV oleh Pertamina tanggal 21-27 Oktober 2024 6. Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina tanggal 4 Desember 2024 1. CACP by IKAI, March 5-7, 2024 2. The Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Landscape held by IKAI on August 1, 2024 3. Risk Management (CRP) by IRBA on October 10, 2024 4. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16-17, 2024 5. Lemhanas Group IV by Pertamina on October 21-27, 2024 6. Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina on December 4, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Anggota Komite Audit PGN Member of PGN's Audit Comittee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

TONY SETIA BOEDI HOESODO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

30 Mei 2024-Sekarang | May, 30 2024-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	70 tahun per 31 Desember 2024 70 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Tulungagung, 6 Maret 1954 Tulungagung, March 6 1954
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed for the first time as Commissioner based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2024.
Periode Jabatan Term of Office	2024-sekarang (Periode Pertama) 2024-present (First Term)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Staf Khusus Ketum KONI Pusat • Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Pusat • Tenaga Profesional Bidang Sosbud dan Hankam Lemhanas • Deputi Pendidikan Lemhanas RI • Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Tannas Lemhanas RI • Direktur Materi Pendidikan Lemhanas RI • Direktur Program Pendidikan Lemhanas RI • Dan Pusdikif TNI AD (2006) • Danrem 151 Binaiya Maluku (2003-2004) • Asops Kasdam Pattimura (2000-2003) • Dandim Timika Papua (1995-1996) • Karo Bangpur Koopskam Timtim (1989-1990) • Special Staff for the Chairman of the Central KONI • Head of Central KONI Achievement Development Division • Professional Staff for Social and Cultural Affairs and Defense and Security Lemhanas • Deputy for Education at Lemhanas RI • Expert Reviewer in the National Tannas Field of Lemhanas RI • Director of Educational Materials at Lemhanas RI • Director of Education Programs at Lemhanas RI • Dan Pusdikif TNI AD (2006) • Danrem 151 Binaiya Maluku (2003-2004) • Assistant Chief of Staff of Pattimura Military Command (2000-2003) • Dandim Timika Papua (1995-1996) • Karo Bangpur Koopskam East Timor (1989-1990)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S3 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada • S2 MSDM di American World University • S2 MSDM di STM IMMI, Jakarta • S2 Hukum di STIH IBLAM • S1 Administrasi Negara STIA Bandung • S1 MSDM di STIA-LAN Jakarta • S1 Administrasi Pembangunan di UT Bandung • KRA 38 Lemhannas RI Tahun 2005 • SESKOAD Lulus Tahun 1992 • AKABRI DARAT lulus tahun 1977 • Doctoral Degree in National Resilience at Gadjah Mada University • Master of HRM at American World University • Master of HRM at STM IMMI, Jakarta • Master of Law at STIH IBLAM • Bachelor of State Administration at STIA Bandung • Bachelor of HRM at STIA-LAN Jakarta • Bachelor of Development Administration at UT Bandung • KRA 38 Lemhannas RI 2005 • SESKOAD Graduated in 1992 • AKABRI DARAT graduated in 1977
Sertifikasi Certification	CRP (*Certified Risk Professional*) CRP (Certified Risk Professional)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. *Project Management - PMP Exam Training* oleh Avenews tanggal 15-19 Juli 2024 2. Pelatihan Dasar Arbitrase oleh Institut Arbiter Indonesia tanggal 10-11 September 2024 3. *Risk Management* (CRP) oleh IRBA tanggal 10 Oktober 2024 4. LNG *Fundamental & Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 5. Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina tanggal 4 Desember 2024 1. Project Management - PMP Exam Training by Avenews, July 15-19, 2024 2. Basic Arbitration Training by the Indonesian Institute of Arbitrators on September 10 - 11, 2024 3. Risk Management (CRP) by IRBA on October 10, 2024 4. LNG Fundamentals & Trading by S&P, October 16 - 17, 2024 5. Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina on December 4, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or with the majority and/or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors

ARIEF SETIAWAN HANDOKO

Direktur Utama
President Directors

30 Mei 2023-Sekarang | May 30, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2024 57 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 9 Agustus 1967 Jakarta, August 9, 1967
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023. Appointed for the first time as President Director based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2023.

Riwayat Jabatan Work Experience	• Expert Adviser PT Medco Energi • Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) (2019-2022) • Sekretaris SKK Migas (2017-2019) • Vice President of Supply Chain Management & General Services at ConocoPhillips Indonesia (2016-2017) • Senior Manager Audit & Ethics at ConocoPhillips Indonesia (2009-2016) • Manager Audit ConocoPhillips Indonesia (2008-2009) • Manajer Audit Industri Perminyakan (hulu & hilir) (eselon ketiga di BPK-RI) (2005-2008) • Analis Non Performing Loan (NPL) di Industri Perbankan di BPK-RI (2002-2005) • Konsultan dan Auditor Industri Penerbangan di BPK-RI (2001-2002) • Auditor Industri Telekomunikasi • Auditor IT dan Dosen Audit IT • Pembicara beberapa seminar Pendidikan • Expert Adviser at PT Medco Energi • Deputy for Finance and Monetization of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) (2019-2022) • Secretary of SKK Migas (2017-2019) • Vice President of Supply Chain Management & General Services at ConocoPhillips Indonesia (2016-2017) • Senior Manager Audit & Ethics at ConocoPhillips Indonesia (2009-2016) • Audit Manager at ConocoPhillips Indonesia (2008-2009) • Petroleum Industry Audit Manager (upstream & downstream) (third echelon at BPK-RI) (2005-2008) • Non-Performing Loan (NPL) Analyst in the Banking Industry at BPK-RI (2002-2005) • Aviation Industry Consultant and Auditor at BPK-RI (2001-2002) • Telecommunications Industry Auditor • IT Auditor and IT Audit Lecturer • Speaker at several educational seminars
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Magister Administrasi Bisnis, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, Amerika Serikat (1999-2001) • World University Service of Canada (WUSC), Calgary, Kanada-Audit TI Tingkat Lanjut dan Lampiran Praktis (1992-1993) • Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1986-1989) • Master of Business Administration, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, United States (1999-2001) • World University Service of Canada (WUSC), Calgary, Canada-Advanced IT Audit and Practical Attachments (1992-1993) • Bachelor of Accounting, State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1986- 1989)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi Akuntan Publik dari Universitas Indonesia (2002-2003) 2. Kursus Audit TI di Kuala Lumpur (1990-1990) 1. Public Accountant Certification from the University of Indonesia (2002 – 2003) 2. IT Audit Course in Kuala Lumpur (1990-1990)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. *Onboarding Directorship* Program Angkatan VII - 2024 tanggal 2-3 Februari 2024 2. *Executive Training*: LNG *Fundamentals* & *Trading* tanggal 16-17 Oktober 2024 1. Onboarding Directorship Program Batch VII - 2024 on February 2-3, 2024 2. Executive Training: LNG Fundamentals & Trading on October 16-17, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

FADJAR HARIANTO WIDODO

Direktur Keuangan
Director of Finance

31 Mei 2021-Sekarang | May 31, 2021-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2024 57 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Kudus, 20 Mei 1967 Kudus, May 20, 1967
Domisili Domicile	Bekasi Bekasi
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2021. Appointed for the first time as Director of Finance based on the Resolution of the Annual GMS on May 3, 2021.

Riwayat Jabatan Work Experience	• SVP Controller PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Pengawas Dana Pensiun Pertamina (2019 - 2021) • Komisaris PT Pertamina EP (akhir 2019 - Triwulan I 2020) • Director of Finance & Business Support, PT Pertamina EP (2018) (Purnawaktu) • Board of Commissioners PT Pertamina Bina Medika (2018) (Paruhwaktu) • Vice President, Management Accounting (2014-2018) • Manager, Budgeting and Forecasting, PT Pertamina (2011-2014) • Manager, Finance Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat (2010-2011) • Manager, Finance Marketing Operation Region VI Kalimantan (2009-2010) • Berkarier di PT Pertamina (Persero) sejak 1993 • SVP Controller PT Pertamina (Persero) (2019-2021) • Supervisory Board of Pertamina Pension Fund (2019 - 2021) • Commissioner of PT Pertamina EP (end of 2019 - Quarter I 2020) • Director of Finance & Business Support, PT Pertamina EP (2018) (Full-time) • Board of Commissioners PT Pertamina Bina Medika (2018) (Part-time) • Vice President, Management Accounting (2014-2018) • Manager, Budgeting and Forecasting, PT Pertamina (2011-2014) • Manager, Finance Marketing Operation Region III West Java (2010-2011) • Manager, Finance Marketing Operation Region VI Kalimantan (2009-2010) • Pursued a career at PT Pertamina (Persero) since 1993
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1992) Bachelor of Economics from University of Diponegoro (1992)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi Risk Professional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (2023-2026) 2. Certified Professional Management Accountant dari Institut Akuntansi Manajemen Indonesia (2024) 1. Risk Professional Certification from the Capital Market Professional Certification Institute (2023-2026) 2. Certified Professional Management Accountant from Institut Akuntansi Manajemen Indonesia (2024)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	• Workshop Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability 19 Januari 2024 • Workshop Gas Insurance Forum - Sosialisasi Polis Asuransi Aset Operasional PGN SSWJ Dan Non-SSWJ Periode 2023-2025 11-12 Juli 2024 • Professional Recognition Program ("PRP") Sertifikasi CPMA (Certified Professional Management Accountant) '26 September 2024 • Pelaksanaan Audit Supreme PGN Tahun 2024 tanggal 30 September - 4 Oktober 2024 • LNG *Fundamental* & *Trading* oleh S&P tanggal 16-17 Oktober 2024 • PERTAMINA - Sustainability Transcendence Forum 01 November 2024 • Workshop Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability January, 19 2024 • Workshop Gas Insurance Forum - Sosialisasi Polis Asuransi Asuransi Operasional PGN SSWJ Dan Non SSWJ Periode 2023-2025 11-12 July 2024 • Professional Recognition Program ("PRP") Sertifikasi CPMA (Certified Professional Management Accountant) '26 September 2024 • PGN Supreme Audit Year 2024 on September 30 - October 4, 2024 • LNG Fundamental & Trading by S&P on October 16-17, 2024 • PERTAMINA - Sustainability Transcendence Forum November, 01 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya | Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya | Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

HARRY BUDI SIDHARTA

Direktur Infrastruktur dan Teknologi
Director of Infrastructure and Technology

14 November 2023-Sekarang | November 14 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2024 47 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Denpasar, 27 Desember 1977 Denpasar, December 27, 1977
Domisili Domicile	Tangerang Selatan South Tangerang
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023. Appointed for the first time as Director of Infrastructure and Technology based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2023.

Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Mei-November 2023) • Direktur Utama PT Nusantara Regas (NR) (2022-2023) • Direktur Niaga PT Pertamina International Shipping (PIS) (2021-2022) • VP Strategic Planning & Business Development of PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) (2019-2021) • Director of Strategy and Business Development of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (May-November 2023) • President Director of PT Nusantara Regas (NR) (2022-2023) • Commercial Director of PT Pertamina International Shipping (PIS) (2021-2022) • VP Strategic Planning & Business Development of PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) (2019-2021)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S-2 MBA Prasetiya Mulya Business School (2008) • S1-Teknik Mesin, Universitas Brawijaya (1996-2002) • Master's Degree MBA Prasetiya Mulya Business School (2008) • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Brawijaya University (1996-2002)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi *Enterprise Risk Management* dari Indonesia Risk & Business Advisory (2023) 2. Sertifikasi *Risk Professional* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Lembaga sertifikasi Profesi Pasar Modal (2023) 1. Enterprise Risk Management Certification from Indonesia Risk & Business Advisory (2023) 2. Risk Professional Certification from the National Professional Certification Agency (BNSP), Capital Markets Professional Certification Institution (2023)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	1. Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik UGM Angkatan XIII tanggal 25 Februari 2024 2. *Executive Course on Strategic Management and Leadership Programme* tanggal 14 Agustus-27 Agustus 2024 3. *Executive Training* LNG: *Fundamentals* & *Trading* tanggal 16 - 17 Oktober 2024 4. Program Chief Technology Officer (CTO) School Tahun 2024 tanggal 21 - 23 November 2024 1. Engineering Profession Program Faculty of Engineering UGM Batch XIII on February 25, 2024 2. Executive Course on Strategic Management and Leadership Program on August 14-27, 2024 3. Executive Training LNG: Fundamentals & Trading on October 16-17, 2024 4. Chief Technology Officer (CTO) School Program in 2024 on November 21-23, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya | Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya | Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Teknik dan Operasi, PT Pertamina Gas (2019-2023) (Purnawaktu) • Komisaris Perusahaan PT Solusi Energy Nusantara (2018-2019) (Purnawaktu) • Group Head, Program Management Office Infrastructure, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2017-2019) • Division Head, Infrastructure Program, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2015-2017) • AVP Construction Division, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2012-2015) • Director of Engineering and Operations, PT Pertamina Gas (2019-2023) (Full-time) • Commissioner of PT Solusi Energy Nusantara (2018-2019) Full-time) • Group Head, Program Management Office Infrastructure, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2017-2019) • Division Head, Infrastructure Program, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2015-2017) • AVP Construction Division, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2012-2015)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Doctoral Student of DSM ITB (2023-sekarang) • Magister Global Leadership MBA dari SBM ITB & AALTO Finland University, Jakarta-Singapore (2016) • Magister Industrial and System Engineering dari National University of Singapore (2009) • Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2002) • Doctoral Student of DSM ITB (2023-present) • Master Degree in Global Leadership MBA from SBM ITB & AALTO Finland University, Jakarta-Singapore (2016) • Masters Degree in Industrial and Systems Engineering from the National University of Singapore (2009) • Bachelor Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (2002)
Sertifikasi Certification	1. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pertamina Group Angkatan I (2023) 2. Certified Public Private Parthership Professional (2021) 3. Program Prime Directorship 3-Pertamina (2020) 4. Program Executive Development Program-PGN (2016) 5. Program Technical Courses "LNG Process Operation" (2014) 6. Program Sertifikasi The FIDIC Contracts (2013) 1. Strengthening National Values for Pertamina Group Batch I (2023) 2. Certified Public Private Partnership Professional (2021) 3. Prime Directorship Program 3 – Pertamina (2020) 4. Executive Development Program – PGN (2016) 5. Technical Courses Program "LNG Process Operation" (2014) 6. The FIDIC Contracts Certification Program (2013)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	• Executive Training: LNG Fundamentals & Trading 16 - 17 Oktober 2024 • Program Business Essential of Excellence Batch III - Leading Organizations and Change 7 Oktober - 3 November 2024 • Program Business Essential of Excellence Batch III - Managing Organization Transformation Course 7 Oktober - 29 November 2024 • Executive Training: LNG Fundamentals & Trading 16 - 17 October 2024 • Business Essentials of Excellence Batch III Program - Leading Organizations and Change 7 October - 3 November 2024 • Business Essentials of Excellence Batch III Program - Managing Organizational Transformation Course 7 October - 29 November 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya** | Other Listed Companies Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | Other Institution Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

ROSA PERMATA SARI

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
Director of Strategy and Business Development

14 November 2023-Sekarang | November 14, 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	44 tahun per 31 Desember 2024 44 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Palembang, 4 Desember 1980 Palembang, December 4, 1980
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023. Appointed for the first time as Director of Strategy and Business Development based on the Resolution of the 2023 Extraordinary GMS on November 14, 2023.

RATIH ESTI PRIHATINI

Direktur Komersial

Director of Commerce

14 November 2023-Sekarang | November 14 2023-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	58 tahun per 31 Desember 2024 58 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 29 Desember 1966 Jakarta, December 29, 1966
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Sales dan Operasi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023 dan diangkat sebagai Direktur Komersial pada tanggal 30 Mei 2024 (perubahan nomenklatur Direktur Sales dan Operasi) Appointed for the first time as Director of Sales and Operations based on the 2023 Extraordinary GMS on November 14, 2023 and appointed as Commercial Director on May 30, 2024 (change in nomenclature of Director of Sales and Operations)

Riwayat Jabatan Work Experience	• Direktur Sales dan Operasi PT PGN Tbk (November 2023-Mei 2024) • Direktur Pengembangan Usaha Elnusa (2021-2023) • Vice President Commercial and Monetization SHU PT Pertamina Hulu Energi (2020-2021) • Vice President Commercial PT Pertamina Hulu Energi (2019-2020) • Director of Sales and Operations PT PGN Tbk (November 2023 - May 2024) • Elnusa Business Development Director (2021-2023) • Vice President Commercial and Monetization SHU PT Pertamina Hulu Energi (2020-2021) • Vice President Commercial PT Pertamina Hulu Energi (2019-2020)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Magister Manajemen dari IPMI Business School, Jakarta (2004) • Sarjana Perminyakan dari Universitas Trisakti, Jakarta (1991) • Master of Management from IPMI Business School, Jakarta (2004) • Bachelor Degree in Petroleum from Trisakti University, Jakarta (1991)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	• Executive Training: LNG Fundamentals & Trading 16 - 17 Oktober 2024 • Executive Training: LNG Fundamentals & Trading 16 - 17 October 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya | Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya | Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

RACHMAT HUTAMA

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis
Director of HR and Business Support

30 Mei 2024 – Sekarang | May 30, 2024-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2024 51 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Jakarta, 13 Juli 1973 Jakarta, July 13, 1973
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur SDM dan Penunjang Bisnis berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed for the first time as Director of Strategy and Business Development based on the Resolution of the 2024 Extraordinary GMS on May 30, 2024.

Riwayat Jabatan Work Experience	• Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2018-Mei 2024) • Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa (2019) (Purnawaktu) • Plt. Corporate Secretary, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2017-2018) • Division Head Legal, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2014-2017) • Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2018-May 2024) • President Commissioner of PT Permata Karya Jasa (2019) (Full-time) • Act. Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2017-2018) • Division Head Legal of PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (2014-2017)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2, Magister Hukum, Universitas Al-Azhar (2021) • S1, Hukum Perdata Dagang, Universitas Diponegoro (1996) • Masters of Law, Al-Azhar University (2021) • Bachelor of Commercial Civil Law, Diponegoro University (1996)
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	• Program Pelatihan Leadership Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Lemhanas RI tanggal 29 Juli - 4 Agustus 2024 • Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future" 13 September 2024 • Employee and Industrial Relations Conference 2024 oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN 19 - 20 September 2024 • BUMN Learning Festival 2024 "Building Sustainable Learning Culture : Empowering Growth Through Agile Learning" 03 Oktober 2024 • The 19th Indonesia "HR Expo" (2024) (Strategy to Manage Human Resources with New Energy, Innovation and Technology Basis) 11 - 12 Desember 2024 • Leadership Training Program for Strengthening National Values by Lemhanas RI on July 29 - August 4, 2024 • SOE Deputy Minister Workshop "SOE Strategic Programs and Risk Management for Indonesia's Future" 13 September 2024. • 2024 Employment and Industrial Relations Conference by Forum Human Capital Indonesia (FHCI) SOEs September 19-20, 2024 • SOE Learning Festival 2024 "Building a Sustainable Learning Culture: Empowering Growth Through Agile Learning" October 03, 2024 • The 19th Indonesia "HR Expo" (2024) (Strategies for Managing Human Resources on the Basis of New Energy, Innovation and Technology) December 11-12, 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya** | **Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya** | **Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

ARIEF KURNIA RISDIANTO

Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

30 Mei 2024 – Sekarang | May 30, 2024-Present

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Usia Age	46 tahun per 31 Desember 2024 46 years old as of December 31, 2024
Tempat & Tanggal Lahir Place & Date of Birth	Bandung, 28 September 1978 Bandung, September 28, 1978
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024. Appointed for the first time as Director of Risk Management based on the Resolution of the Annual GMS on May 30, 2024.

Riwayat Jabatan Work Experience	• Senior Vice President Logistics, Integration & Optimization PT Pertamina (Persero) (Purnawaktu) (2022-2024) • Director of Operation PT Pertamina International Shipping (2020-2022) • Ship Operation Manager (2017-2020) • Senior Vice President Logistics, Integration & Optimization PT Pertamina (Persero) (Full-time) (2020-2022) • Director of Operation at PT Pertamina International Shipping (2020-2022) • Ship Operation Manager (2017-2020)
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• S2, Teknologi Kelautan, World Maritime University (2010) • S1, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (2000) • Master of Marine Technology, World Maritime University (2010) • Bachelor of Legal Studies, Padjadjaran University (2000)
Sertifikasi Certification	1. Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified Contract Drafter) Angkatan VLVII) (2024) 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Utama (Certified Risk Professional) oleh BNSP 2024 1. Certification of Contract Drafter (Certified Contract Drafter) Class VLVII) (2024) 2. Master Risk Management Certification (Certified RiskProfessional) by BNSP 2024
Pelatihan di 2024 Trainings in 2024	• Enterprise Risk Management Training For CRP Certification 13 - 14 Agustus 2024 • Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak (Certified Contract Drafter) 04 - 07 September 2024 • Leadership Program BUMN - BSE Top Gun Program Batch II Tahun 2024 - 09 - 12 September 2024 • Executive Training LNG: Fundamentals & Trading 16 - 17 Oktober 2024 • Global Immersion-Perspektif dan Leadership 21 - 24 Oktober 2024 • Enterprise Risk Management Training For CRP Certification 13 - 14 August 2024 • Certified Contract Drafter Training and Certification 04 - 07 September 2024 • SOE Leadership Program - BSE Top Gun Program Batch I Year 2024 - 09 - 12 September 2024 • Executive Training LNG: Fundamentals & Trading 16 - 17 October 2024 • Global Immersion-Perspective and Leadership 21 - 24 October 2024
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan/atau pengendali. Having no affiliation either with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with the majority and/ or controlling shareholders.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	**PGN** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions **Perusahaan Terbuka Lainnya | Other Listed Companies** Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota komite di Perusahaan tercatat lainnya. Has no concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Committees of other listed companies. **Institusi Lainnya | Other Institution** Tidak ada rangkap jabatan | No concurrent positions

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PGN SELAMA TAHUN BUKU 2024 DAN SETELAH TAHUN BUKU 2024

Changes in the Composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners During the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year

Sepanjang tahun buku 2024, terdapat beberapa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PGN yang dilakukan dengan tujuan memperkuat kepemimpinan dalam merespons tantangan pasar. Infomasi secara rinci perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PGN, sebagai berikut:

Throughout the 2024 financial year, there were several changes to the composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners, which are being carried out with the aim of strengthening leadership in responding to market challenges. Detailed information on changes to the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PGN is as follows:

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PGN
Changes to the Composition of PGN's Board of Directors and Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Terakhir Latest Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Tanggal Pemberhentian Date of Termination
1.	Tony S.B Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	30 Mei 2024 May 30, 2024	-
2.	Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	30 Mei 2024 May 30, 2024	-
3.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	30 Mei 2024 May 30, 2024	-
4.	Beni Syarif Hidayat	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	15 Mei 2020 May 15, 2020	30 Mei 2024 May 30, 2024

PROFIL PERWIRA SUBHOLDING GAS

Profile of Gas Subholding Employees

Perwira Subholding Gas memiliki peran penting dalam membentuk budaya, inovasi, daya saing, serta kesuksesan dan pertumbuhan bisnis PGN dalam jangka panjang. Memahami hal ini, selama tahun 2024 PGN menempatkan Perwira Subholding Gas sebagai aset strategis untuk mendorong kinerja PGN Group dalam mencapai kinerja terbaik.

PGN Group senantiasa berupaya untuk menjamin lingkungan kerja yang profesional, aman, dan nyaman bagi Perwira Subholding Gas. Komitmen ini menjadikan Perwira Subholding Gas dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan kesempatan yang sama. Lebih lanjut, PGN juga memastikan keberagaman di Subholding Gas tanpa diskriminasi di tempat kerja, sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan *Respectful Workplace Commitment* oleh Direksi Subholding Gas.

PGN senantiasa mengutamakan kesehatan pekerja sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan Pekerja di tengah menjalani tantangan operasi dan bisnis Perusahaan. Perwira Subholding Gas menjadi garda terdepan dalam perjalanan mencapai tujuan bisnis, yang terus merespons dinamika pasar, mengembangkan potensi, serta menciptakan inovasi. Dengan sinergi antara pengetahuan, keterampilan, dan komitmen, Perwira Subholding Gas membuka jalan untuk keunggulan kompetitif. Dengan demikian memahami, merawat, dan mengelola Perwira Subholding Gas dengan bijak menjadi langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan kesuksesan PGN.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Hingga akhir tahun 2024, PGN secara Group tercatat memiliki sebanyak 3.322 Pekerja. Pekerja yang berkontribusi di Perusahaan induk PGN Group/Subholding Gas sebanyak 1.088 dan Pekerja yang berkontribusi di entitas anak (termasuk afiliasi dan Perusahaan patungan) sebanyak 2.234 orang. Jumlah Pekerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 4 orang dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh adanya penambahan pekerja yang diperbantukan di SH Gas, rekrutmen pekerja baru, serta pengurangan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Gas Subholding Employees have an important role in shaping PGN's culture, innovation, competitiveness, and long-term business success and growth. Understanding this, during 2024 PGN places the Gas Subholding Employees as a strategic asset to encourage the performance of the PGN Group to achieve the best performance.

PGN Group always strives to ensure a professional, safe, and comfortable work environment for Gas Subholding Employees. This commitment means that Gas Subholding Employees can work wholeheartedly and with the same opportunities. Furthermore, PGN also ensures that the diversity of Gas Subholding Employees without discrimination in the workplace is in accordance with Collective Labor Agreement and Respectful Workplace Commitment by the Directors of Gas Subholding.

PGN always prioritizes workers' health as part of its efforts to maintain workers' welfare and health amidst the challenges of the Company's operations and business. Gas Subholding Employees are at the forefront of the journey to achieve business goals, continuing to respond to market dynamics, developing potential, and creating innovation. With a synergy of knowledge, skills, and commitment, Gas Subholding Employees pave the way for competitive advantage. Thus, understanding, caring for, and managing Gas Subholding Employees wisely is an important step in building a strong foundation for PGN's sustainability and success.

NUMBER OF SUBHOLDING GAS EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS

Until the end of 2024, PGN as a group is recorded as having 3,322 employees. There are 1,088 workers contributing to the parent company PGN Group/Subholding Gas and 2,234 workers contributing to subsidiaries (including affiliates and joint companies). The number of workers this year increased by 4 people compared to the previous year, which was partly due to the addition of workers seconded to SH Gas, open recruitment and reduction in workers who retired.

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Number of Gas Subholding Employees by Employment Status

Status Kepegawaian	2024	2023	2022	Employment Status
PKWTT	3.109	3.103	3.012	Tenured Employees
PKWT	213	215	186	Non-Tenured Employees
Jumlah	**3.322**	**3.318**	**3.198**	**Total**

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA

Pada tahun 2024, berdasarkan latar belakang pendidikan, Perwira Subholding Gas terbesar adalah Sarjana sebanyak 1.941 orang. Disusul kemudian adalah pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 633 orang, Magister sebanyak 527 orang, SLTA/setara ke bawah sebanyak 216 orang, dan Doktor 5 orang. Berikut ini data Perwira Subholding Gas berdasarkan pendidikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

NUMBER OF GAS SUBHOLDING EMPLOYEES BY EDUCATION AND AGES

In 2024, based on educational background, the largest number of Gas Subholding Employees were Bachelors with 1,941 people. Followed by 633 workers with a diploma educational background, 527 people with a master's degree, 216 people with a high school/equivalent background, and 5 people with a doctorate. The following is data for Gas Subholding Employees based on education over a period of 3 (three) years:

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN PENDIDIKAN
Number of Gas Subholding Employees by Education

Pendidikan Education	2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Strata 3 (S3) | PhD Degree	5	0	5	4	0	4	3	0	3
Strata 2 (S2) | Master's Degree	388	139	527	389	136	526	378	132	510
Strata 1 (S1) | Bachelor's Degree	1.425	515	1.941	1.393	486	1.879	1.307	460	1.767
Diploma | Diploma	526	108	633	552	130	682	557	119	676
SLTA | Senior High	201	15	216	210	17	227	222	20	242
Jumlah | Total	**2.545**	**777**	**3.322**	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**

Komposisi Perwira Subholding Gas berdasarkan usia komposisi didominasi oleh pekerja berusia 40 tahun ke bawah sebanyak 1.270 orang yang merupakan kelompok usia pekerja produktif, yang dapat meningkatkan produktivitas Perusahaan. Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan berdasarkan usia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

The composition of Gas Subholding Employees based on age is dominated by 1,270 workers aged 40 years and under, who are the age group of productive workers who can increase the Company's productivity. The following table presents data regarding the number of Gas Subholding and Subsidiary Employees based on age over a period of 3 (three) years:

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN USIA
Number of Gas Subholding Employees by Age

Usia Age	2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
≥51 tahun | years old	296	72	371	295	65	360	283	61	344
41-50 tahun | years old	941	241	1.179	908	215	1.123	851	184	1.035
31-40 tahun | years old	980	298	1.270	1.011	331	1.342	1.038	360	1.398
≤30 tahun | years old	328	166	502	335	158	493	295	126	421
Jumlah | Total	**2.545**	**777**	**3.322**	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Kelompok jabatan yang ada di PGN Group terdiri dari manajemen puncak, manajemen madya, manajemen dasar, dan tingkat jabatan lainnya di bawah manajemen dasar atau Pelaksana. Pada tahun 2024, total jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan yang terbanyak yaitu pada jabatan manajemen dasar sebanyak 1.674 orang, diikuti oleh Perwira Subholding Gas terbanyak kedua yaitu jabatan pelaksana sebanyak 990 orang, disusul dengan jabatan Manajemen Madya sebanyak 417 orang serta manajemen puncak sebanyak 241 orang. Berikut ini tabel yang menampilkan data jumlah Perwira Subholding Gas dan Anak Perusahaan berdasarkan kelompok jabatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

NUMBER OF GAS SUBHOLDING EMPLOYEES BY POSITION GROUP AND EMPLOYMENT STATUS

The position groups in the PGN Group consist of top management, middle management, low management, and other position levels below basic or executive management. In 2024, the highest total number of Gas Subholding and Subsidiary Employees is in low management positions with 1,674 people, followed by the second highest number of Gas Subholding Employees in executive positions with 990 people, followed by Middle Management positions with 417 people and top management with 241 people. The following table displays data on the number of Gas Subholding and Subsidiary Employees based on position groups over a period of 3 (three) years:

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

Number of Gas Subholding Employees by Position Group

Kelompok Jabatan Position Group	2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
Manajemen Puncak Top Management	198	39	241	195	40	235	202	34	236
Manajemen Madya Middle Management	323	94	417	341	96	437	324	93	417
Manajemen Dasar Low Management	1.246	430	1.674	1.214	402	1.616	1.034	328	1.362
Pelaksana | Staff	778	214	990	799	231	1.030	907	276	1.183
Jumlah | Total	**2.545**	**777**	**3.322**	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**

Terkait dengan status kepegawaian, karyawan PGN Group dan Anak Perusahaan dibagi menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja Tetap dan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Pekerja Tidak Tetap. Pada tahun 2024, jumlah pekerja tetap tercatat sebanyak 3.092 orang, sedangkan pekerja tidak tetap sebanyak 230 orang. Terlampir berikut ini data yang lebih rinci mengenai jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan status kepegawaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

Regarding employment status, employees of the PGN Group and Subsidiaries are divided into Tenured Employees (PKWTT)/ Permanent Employees and Non-Tenured Employees (PKWT)/ Non-Permanent Employees. In 2024, the numbers of permanent employees were recorded at 3,092 people, while temporary employees were 230 people. Attached below is more detailed data regarding the number of Gas Subholding Employees based on employment status over a period of 3 (three) years:

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Number of Gas Subholding Employees by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2024			2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total	Pria Male	Wanita Female	Total
PKWTT | Tenured Employees	2.371	721	3.092	2.369	719	3.088	2.315	697	3.012
PKWT | Non-Tenured Employees	174	56	230	180	50	230	152	34	186
Jumlah | Total	**2.545**	**777**	**3.322**	**2.549**	**769**	**3.318**	**2.467**	**731**	**3.198**

JAMINAN KESETARAAN GENDER DAN JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN GENDER

Hingga akhir Desember 2024, jumlah pekerja laki-laki sebanyak 2.545 orang. Jumlah pekerja wanita yaitu sejumlah 777 orang, dengan perbandingan 76,61% dan 23,39%. Jumlah perempuan yang masuk dalam *nominated talent* adalah 25 orang dari 98 orang *talent* (laki-laki dan perempuan), dengan presentase 25,51%, hal ini melebihi target KPI rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 16% di tahun 2024.

PGN senantiasa mengimplementasikan prinsip non diskriminasi, kesempatan yang sama dan setara tanpa membedakan gender dalam pengelompokan jabatan. Dengan komitmen ini, penentuan posisi jabatan Perwira Subholding Gas didasarkan atas hasil penilaian, kemampuan, dan kecakapan pekerja.

Jumlah Perwira Subholding Gas berdasarkan gender dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

GENDER EQUALITY GUARANTEE AND THE NUMBER OF EMPLOYEES BY GENDERS

Until the end of December 2024, the numbers of male employees were 2,545. The numbers of female employees were 777 people, with a ratio of 76.61% and 23.39%. The number of women included in the nominated talent is 25 out of 98 talents (male and female), with a percentage of 25.51%, this exceeds the KPI target of the ratio of women in nominated talent of 16% in 2024.

PGN always implements the principles of non-discrimination and equal opportunities without distinguishing gender in position groupings. With this commitment, the determination of the position of Gas Subholding Employees is based on the results of the employee's assessment, abilities, and skills.

The number of Gas Subholding Employees based on gender over a period of 3 (three) years is as follows:

JUMLAH PERWIRA SUBHOLDING GAS BERDASARKAN GENDER

Number of Gas Subholding Employees by Gender

Jenis Kelamin	2024	2023	2022	Gender
Laki-laki	2.545	2.549	2.467	Male
Perempuan	777	769	731	Female
Jumlah	**3.322**	**3.318**	**3.198**	**Total**

PERAN *HUMAN CAPITAL MANAGEMENT* SEBAGAI *STRATEGIC BUSINESS PARTNERS*

The Role Human Capital Management as Strategic Business Partners

PGN melalui Human Capital Management Divison telah meningkatkan perannya di Perusahaan dalam pengelolaan bisnis yang bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya, mengembangkan talenta khususnya Perwira Subholding Gas, mengendalikan proses strategi sumber daya manusia, serta mengembangkan kompetensi karyawannya. Peran tersebut tentunya dibutuhkan untuk mewujudkan 4 Program Strategis Bidang HC Tahun 2024, meliputi:

a. Dukungan Human Capital Pada Proyek Strategis Perusahaan Tahun 2024;
b. *Leader Readiness Program* dengan program *succession plan* pada posisi-posisi kritikal di Perusahaan;
c. Implementasi HSSE *Matrix Training* dan Budaya Perusahaan; dan
d. Peningkatan nilai sinergi group Pertamina sehingga dapat dihasilkan *Revenue Enhancement*; dan/atau *Cost Optimation/ Efficiency*.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PGN melalui Human Capital Management senantiasa mengelola SDM secara terus menerus dan konsisten untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tercapainya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Pengelolaan SDM PGN yang tepat juga dapat meningkatkan kinerja pekerja yang unggul melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi teknis dan manajerial *inhouse* maupun *public training*, sertifikasi dan *sharing knowledge*.

Pada tahun 2024, PGN kembali melaksanakan pengukuran hasil Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2) dengan hasil capaian sebesar 123,48% untuk mengukur efektivitas dari pelatihan yang dilaksanakan sehingga dapat berkontribusi meningkatkan kinerja Perusahaan. PGN juga menyediakan fasilitas *online learning management system* untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta *sharing knowledge*.

PGN, through the Human Capital Management Division, has increased its role in the Company in business management, which aims to help the company achieve its business goals, develop talent, especially Gas Subholding Employees, control the human resource strategy process, and develop the competence of its employees. This role is certainly needed to realize the 4 Strategic Programs in the HC Sector for 2024, including:

a. Human Capital Support for Company Strategic Projects in 2024;
b. Leader Readiness Program with a succession plan program for critical positions in the Company;
c. Implementation of HSSE Matrix Training and Company Culture; and
d. Increasing the synergy value of the Pertamina group so that Revenue Enhancement and/or Cost Optimization/ Efficiency can be generated.

COMPETENCY DEVELOPMENTS

PGN, through Human Capital Management, always manages HR continuously and consistently to support sustainable business growth and achieve the Company's Long-Term Plan (RJPP). Proper management of PGN's human resources can also improve superior employee performance through in-house education and training programs as well as public training, certification, and knowledge sharing.

In 2024, PGN carried out measurements of Level 2 (L2) Training Evaluation results with an achievement of 123.48% to measure the effectiveness of the training carried out so that it can contribute to improving the Company's performance. PGN also provides online learning management system facilities to improve services in implementing education and training programs as well as sharing knowledge.

TALENT DEVELOPMENT PROGRAM

PGN mengimplementasikan program *leadership development* secara berjenjang guna mempersiapkan talenta terbaik yang berkualitas tinggi dan *agile* untuk menjadi *succesor leader* PGN berikutnya. PGN mengembangkan dan mempersiapkan program ini untuk seluruh level Perwira Subholding Gas, baik level *first line management, middle management* hingga *senior management*. Melalui program-program ini, PGN membagi menjadi 2 (dua) jenis program *leadership development* yaitu:

- Program *mandatory* merupakan pembekalan kepada Perwira Subholding Gas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan level jabatannya saat ini.
- Program *talent development* sebagai wujud komitmen Manajemen PGN dalam rangka mempersiapkan pengembangan Perwira Subholding Gas yang berpotensi untuk menjadi bagian dari suksesi kepemimpinan.

PGN menggunakan pendekatan 70:20:10, yaitu 70% *assignment*, 20% *coaching*, dan 10% *training* sebagai acuan efektifitas program pengembangan. Para peserta program ditempa dengan *experiential learning*, yaitu belajar melalui *assignment* atau penugasan yang diharapkan tidak hanya memperkuat kompetensi teknis para peserta namun juga berkontribusi terhadap Perusahaan melalui *continuous improvement*. Sedangkan kegiatan *coaching* menjadi ajang diskusi, *networking*, serta ajang menajamkan kompetensi *coaching* bagi para *leader* muda.

PGN juga melakukan penyelarasan strategi dengan Pertamina sebagai induk Perusahaan, salah satunya dengan penyelarasan program *leadership* dan kesiapan *talent mobility* melalui *succession planning* untuk posisi-posisi kunci di Perusahaan. Untuk itu, PGN terlibat dalam program-program pengembangan Pertamina di antaranya Program Akselerasi *Trailblazer* dan *Catalyzer* Pertamina.

Program *Catalyzer* yang merupakan program *top talent development* untuk mempersiapkan *talent* di posisi-posisi strategis. Program ini bertujuan untuk mengembangkan *leadership skill* bagi Perwira Subholding Gas *top talent* yang diharapkan dapat mengisi posisi *top level* di Perusahaan. Pada tahun 2024, sebanyak 5 peserta terbaik di level *top management* Subholding Gas mengikuti program *Catalyzer* Pertamina.

Pada program *Trailblazer* yaitu program yang mempersiapkan Perwira Subholding Gas *talent pool/successor* di level *Middle Management* menjadi *Operational Leader* dalam hal *leadership skills* dan *managing business*. Program ini bertujuan agar Perwira Subholding Gas mampu mengelola operasional fungsi, berperan efektif mendukung Visi & Misi Pertamina, serta memiliki wawasan, kepekaan dan ketajaman bisnis Perusahaan (*Business Acumen*).

TALENT DEVELOPMENT PROGRAM

PGN implements a leadership development program in stages to prepare the best talents who are high quality and agile to become PGN's next succesor leaders. PGN developed and prepared this program for all levels of Gas Subholding Employees, including first-line management, middle management, and senior management levels. Through this programs, PGN divides it into 2 (two) types of leadership development programs, namely:

- The mandatory program is a provision for Subholding Gas Employees in carrying out their roles and responsibilities in accordance with the demands of their leadership level.
- The talent development program is a form of PGN Management's commitment to preparing the development of Gas Subholding Employees who have the potential to become part of the leadership succession.

PGN uses a 70:20:10 approach, namely 70% assignments, 20% coaching, and 10% training as a reference for the effectiveness of the development program. The program participants are trained in experiential learning, namely learning through assignments that are expected to not only strengthen the technical competence of the participants but also contribute to the Company through continuous improvement. Meanwhile, coaching activities become a place for discussion, networking, and a place to sharpen coaching competencies for young leaders.

PGN also aligns strategies with Pertamina as the parent company, one of which is by aligning leadership programs and talent mobility readiness through succession planning for key positions in the Company. For this reason, PGN is involved in Pertamina's development programs, including the Strategic Pertamina Trailblazer, and the Catalyzer Acceleration Program.

The Catalyzer program is a top talent development program to prepare talent for strategic positions. This program aims to develop leadership skills for top talent Gas Subholding Employees who are expected to fill top-level positions in the Company. In 2024, as many as 5 best participants at the top management level of Subholding Gas took part in the Pertamina Catalyzer program.

The Trailblazer program is a program that prepares a talent pool/successor Gas Subholding Employees at the Middle Management level to become Operational Leaders in terms of leadership skills and managing business. This program aims to enable Gas Subholding Employees to be able to manage operational functions, play an effective role in supporting Pertamina's Vision & Mission, and have the insight, sensitivity, and business acumen of the Company.

Selain program *talent*, PGN juga menyelenggarakan program *mandatory/regular leadership* baik untuk level *first line* sampai dengan *middle management* yaitu *Junior Management Development Program* (JMDP) dan *Senior Management Development Program* (SMDP). Tujuannya untuk membekali pekerja yang baru menduduki jabatan strategis memiliki kapabilitas dan kemampuan *leadership* yang dibutuhkan pada jabatan yang diemban.

Kemudian dalam rangka meningkatkan wawasan terkait *leadership,* PGN mengimplementasikan program yang bertajuk *Leaders' Talk.* Program ini merupakan forum interaksi dan *sharing knowledge* antara *executive management* PGN dengan *Inspirational Leader* dari tokoh-tokoh eksternal.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

PGN menjalankan *knowledge management* dalam pengelolaan SDM, yang dirancang dan dikembangkan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimiliki oleh Perwira Subholding Gas sebagai individu agar dapat digunakan kembali di dalam Perusahaan. *Knowledge Management* dibagi menjadi beberapa program, yaitu *GAS Talk, Knowledge Harvesting, e-Library,* dan *Innovation Award.*

Program *GAS Talk* merupakan *sharing knowledge* yang melibatkan Perwira Subholding Gas sebagai narasumber. Melalui program ini, Perwira Subholding Gas dapat menambah wawasan tentang berbagai hal terkait bisnis Perusahaan sehingga memiliki pengetahuan lebih komprehensif tentang posisi Perusahaan dalam perkembangan bisnis industrinya. Program ini dilaksanakan setiap kuartal dengan format *talkshow.*

Program *Knowledge Harvesting* merupakan kegiatan mendokumentasikan pengetahuan yang masih melekat pada diri setiap individu ke dalam bentuk dokumen. Kegiatan ini bertujuan menangkap, memelihara dan mengembangkan pengetahuan di PGN ke dalam *Knowledge Guide Book PGN* serta *Harvesting Talk* dalam format *talkshow.*

PGN juga menyelenggarakan Innovation Award Program sebagai bentuk pengakuan bagi Perwira Subholding Gas yang telah bekerja ekstra dalam meningkatkan kemampuan Perusahaan melalui ide dan inovasi kreatif. Program ini mengadaptasi metode *Continuous Improvement* Program Pertamina yang bertujuan membangun sinergi Subholding Gas, meningkatkan kreativitas dan pemikiran inovatif, menciptakan lingkungan bagi Perwira Subholding Gas untuk mengeksplorasi peluang bisnis demi keberlanjutan Perusahaan, dan meningkatkan keterlibatan Perwira Subholding Gas melalui pengakuan terhadap inovasi mereka. Perwira Subholding Gas terbaik yang telah mengikuti program ini akan diikutsertakan ke tahap *Annual Pertamina Quality Award.*

In addition to talent programs, PGN also organizes mandatory/regular leadership programs for both first-line and middle management levels, namely the Junior Management Development Program (JMDP) and Senior Management Development Program (SMDP). The aim is to equip employees who have just occupied strategic positions with the capabilities and leadership abilities needed in the positions they hold.

Furthermore, in order to increase insight regarding leadership, PGN implemented a program entitled Leaders' Talk. This program is a forum for interaction and knowledge sharing between PGN executive management and Inspirational Leaders from external figures.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

PGN carries out knowledge management in HR management, which is designed and developed to identify, create, explain, and distribute the knowledge possessed by Gas Subholding Employees as individuals so that it can be reused within the Company. Knowledge Management is divided into several programs, namely GAS Talk, Knowledge Harvesting, e-Library, and Innovation Award.

The GAS Talk program is a knowledge-sharing initiative that involves Gas Subholding Employees as resource persons. Through this program, Gas Subholding Employees can gain insight into various matters related to the Company's business so that they have more comprehensive knowledge about the Company's position in the development of its industrial business. This program is carried out every quarter in a talk show format.

The Knowledge Harvesting program is an activity to document the knowledge that is still attached to each individual in the form of documents. This activity aims to capture, maintain, and develop knowledge at PGN into the PGN Knowledge Guide Book and Harvesting Talk in talk show format.

PGN also held an Innovation Award Program as a form of recognition for Gas Subholding Employees who have worked extra hard to improve the Company's capabilities through creative ideas and innovation. This program adapts Pertamina's Continuous Improvement Program method, which aims to build Gas Subholding synergy, increase creativity and innovative thinking, create an environment for Gas Subholding Employees to explore business opportunities for the Company's sustainability, and increase the involvement of Gas Subholding Employees through recognition of their innovation. The best Gas Subholding Employees who have participated in this program will be included in the Annual Pertamina Quality Award stage.

PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Perwira Subholding Gas juga telah mengikuti 23 program sertifikasi teknik yang diikuti oleh 16 orang dan 18 program sertifikasi non teknik yang diikuti oleh 18 orang. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme Perwira Subholding Gas agar makin mampu mengambil peluang-peluang bisnis yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Perusahaan.

PGN memiliki komitmen untuk tiada henti mengembangkan kompetensi teknis Perwira Subholding Gas. Komitemen ini diwujudkan dengan menyelenggarakan beragam program pengembangan yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan dengan menggunakan metode komprehensif 70:20:10, di mana 70% disampaikan melalui *project assignment*, 20% melalui *coaching*, dan 10% melalui program *in class training*. Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) program pengembangan yang dilaksanakan untuk mendukung kinerja dan performa Perusahaan di bidang komersial, operasional, dan pengembangan bisnis, yaitu:

- *Special Development to Unleash Performance* (SUPER), merupakan program pengembangan kompetensi teknis bagi Pekerja level Staf dan Senior Staff yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program strategis Perusahaan serta memperkuat kompetensi inti bisnis gas. Pada pelaksanaan program di tahun 2024, peserta diberikan pembekalan mengenai kompetensi inti Infrastruktur dan komersialisasi gas bumi kemudian peserta diterjunkan langsung untuk melaksanakan aktivitas Pembangunan konstruksi dan penjualan gas bumi.
- *Sales & Project Infrastructure Development Program (SPRINT)*, merupakan program pengembangan kompetensi teknis bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi Pekerja di bidang Sales & Project Infrastructure, khususnya terkait dengan Bisnis Jargas.
- *Xperiential Learning Exploring LNG Topics* (Xplore LNG), merupakan program pengembangan kompetensi teknis bagi pekerja untuk mendukung pelaksanaan bisnis LNG *trading*, termasuk kegiatan operation LNG, meningkatkan kompetensi di bidang LNG *trading* & LNG *operation*, dan mengembangkan *network* dengan *sister company* di lingkungan Pertamina Group yang terkait dengan bisnis LNG.

TRAINING AND CERTIFICATION PROGRAM

Subholding Gas Employees have also participated in 23 technical certification programs, which were attended by 16 people, and 18 non-technical certification programs, which were attended by 18 people. This certification program aims to improve the skills and professionalism of Gas Subholding Employees, allowing them to be more able to take advantage of business opportunities that can improve the quality of service and performance of the Company.

PGN is committed to continuously developing the technical competence of Gas Subholding Employees. This commitment is realized by organizing various structured, tiered, and sustainable development programs using the comprehensive 70:20:10 method, where 70% is delivered through project assignments, 20% through coaching, and 10% through in-class training programs. In 2024, there were 3 (three) development programs implemented to support the Company's performance and performance in the commercial, operational, and business development sectors, namely:

- Special Development to Unleash Performance (SUPER) is a technical competency development program for Staff and Senior-Staff level employees that aims to support the achievement of the Company's strategic programs and strengthen the core competencies of the gas business. During the implementation of the program in 2024, participants are given training regarding the core competencies of infrastructure and commercialization of natural gas, and then participants are sent directly to carry out construction development activities and sales of natural gas.
- Sales & Project Infrastructure Development Program (SPRINT) is a technical competency development program for employees to increase employee competency in the field of Sales & Project Infrastructure, especially related to the Natural Gas Network for Households Business.
- Xperiential Learning Exploring LNG Topics (Xplore LNG) is a technical competency development program for employees to support the implementation of the LNG trading business, including LNG operation activities, increasing competency in the field of LNG trading & LNG operation, and developing networks with sister companies within the Pertamina Group related to the LNG business.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Education and Training Programs

Kategori	Jumlah Program Number of Programs		Jumlah Peserta Number of Participants		Categories
	2024	2023	2024	2023	
Pendidikan					Education
S2 Dalam Negeri (*Full Scholarship*)	1	2	2	-	Master's Degree in Indonesia (Full Scholarship)
S2 Luar Negeri (Swakelola Reguler)	2	1	2	-	Master's Degree in overseas (Regular Self-Management)
S2 Dalam Negeri (Swakelola Reguler)	6	1	7	2	Master's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)
S1 Dalam Negeri (Swakelola Reguler)	1	1	3	-	Bachelor's Degree in Indonesia (Regular Self-Management)
Inhouse* dan *Public Training					Inhouse and Public Training
Kompetensi Manajerial (Publik)	3	3	236	128	Managerial Competence (Public)
Kompetensi Teknik	143	145	4.127	3.877	Technical Competence
Sertifikasi					Certification
Sertifikasi Teknik	23	5	16	45	Technical Certification
Sertifikasi Non Teknik	18	7	18	34	Non-technical Certification
Program *Talent*					Talent Program
Catalyzer	1	15	5	1	Catalyzer
Trailblazer	3	20	6	3	Trailblazer
Knowledge Management					Knowledge Management
GAS Talk	9	5	1.256	657	GAS Talk
Knowledge Harvesting	4	13	456	276	Knowledge Harvesting
Program Magang Kementerian					Ministry Internship Program
Magang Reguler	2	1	341	218	Regular Internship
Magang Bersertifikat dari Kementerian BUMN	1	1	38	18	Certified Internship from Ministry of State-owned Enterprises

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Selama tahun 2024, biaya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan Perwira Subholding Gas mencapai Rp11,2 miliar atau naik sebesar 7,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp10,4 miliar.

EXPENSES

In 2024, the cost of implementing the Gas Subholding Employees development and management program reached Rp11.2 billion, or an increase of 7.69% compared to 2023, which was recorded at Rp 10.4 billion.

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Occupational Health and Safety Policies

PGN berkomitmen penuh dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis dengan menjunjung kaidah dan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi (SMK3P2L-E).

Dalam rangka memastikan implementasi SMK3P2L-E berjalan dengan maksimal, PGN menetapkan kebijakan serta target yang diterapkan di seluruh wilayah operasional Perusahaan. Kebijakan tersebut ditetapkan guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Target HSSE PGN Tahun 2024 mencakup:

- *Number of Accident* (NoA)* = 0
- TRIR ≤ 0, 19
- *Process Safety Event* Level 1 = 0
- Penyakit Akibat Kerja = 0
- *Total Emission Reduction* ≥ 1.205 Ton CO_2eq
- TRIS *Significant* dan/atau *Catastrophic* = 0

*Kategori NoA mencakup:

- *Fatality* (diluar korban meninggal dunia dari pihak ketiga).
- Jumlah kejadian (*event*) *safety process incident* yang parah, termasuk korban meninggal dunia dari pihak ketiga, *Major oil spill* (≥15 bbl), *Major property damage* (*direct loss* ≥USD1 juta).

Informasi lebih lengkap terkait K3 dibahas lebih lanjut pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

PGN is committed to implementing its operational activities by upholding the principles of Occupational Safety and Health (OHS) through the implementation of the Occupational Safety and Health, Security and Environmental and Energy Management System (SMK3P2L-E).

In order to ensure a successful implementation of SMK3P2L-E, PGN has made policies and targets to achieve throughout the Company's operational areas. The policy is implemented to minimize the risk of work accidents and work-related diseases. PGN's HSSE targets 2024 include:

- Number of Accidents (NoA)* = 0
- TRIR ≤ 0.19
- Process Safety Event Level 1 = 0
- Occupational Diseases = 0
- Total Emission Reduction ≥ 1,205 Tons CO_2eq
- TRIS Significant and/or Catastrophic = 0

*NoA category include:

- Fatality (excluding third party fatalities).
- Number of serious safety process incident events, including third party fatalities, Major oil spill (≥15 bbl), Major property damage (direct loss ≥USD1 million).

A more detailed explanation on OHS is disclosed in the Company's Sustainability Report.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Information of Shareholders

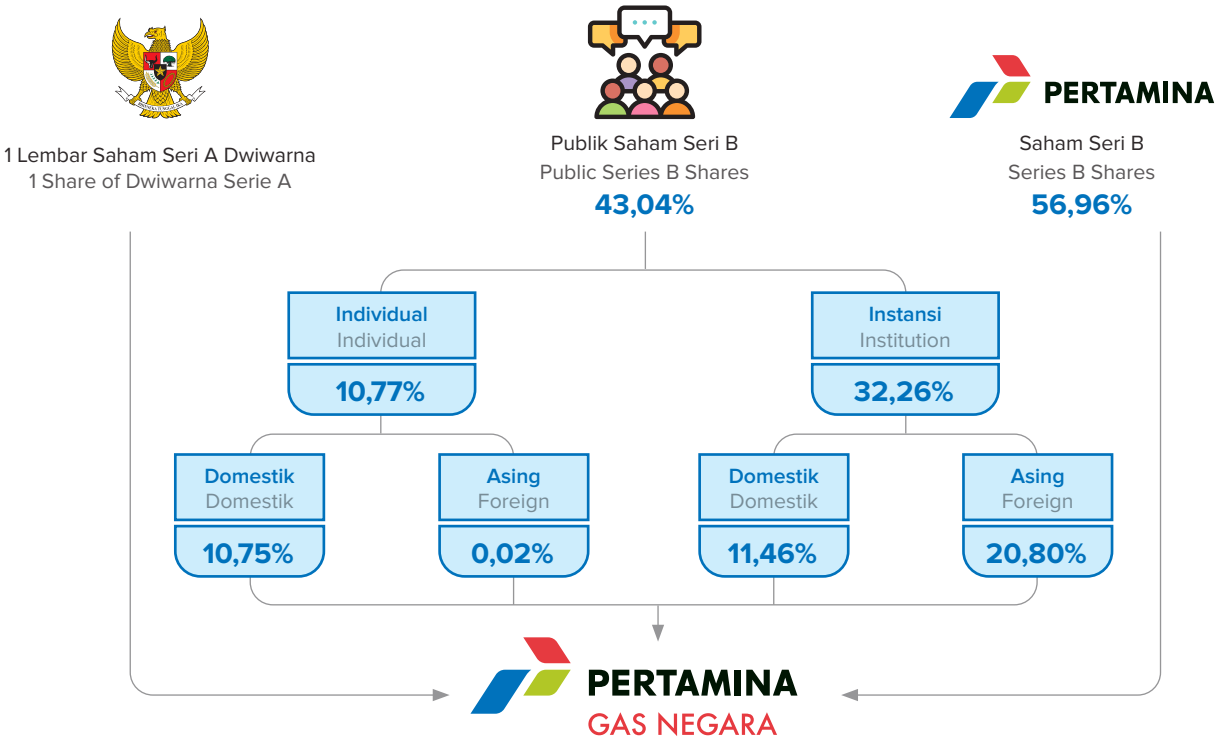

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PGN

Total jumlah saham PGN yang ditempatkan dan disetor penuh hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar saham. PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% (lima puluh enam koma sembilan enam persen) saham Seri B atas Perseroan dan Negara Republik Indonesia memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara istimewa.

Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahtangankan, memiliki hak-hak istimewa dalam hal perubahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan likuidasi Perusahaan.

Adapun untuk pemegang saham publik berjumlah 43,04% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, dengan rincian jumlah pemegang saham individual sebesar 10,77% dan jumlah pemegang saham instansi sebesar 32,26%.

PGN SHAREHOLDERS COMPOSITION

As of December 31, 2024, PGN had a total of 24,241,508,196 (twenty-four billion two hundred forty-one million five hundred eight thousand one hundred ninety-six) authorized and fully paid-up shares. PT Pertamina (Persero) is the majority shareholder which owns 56.96% (fifty-six point ninety-six percent) of the Company's Series B shares, while the Republic of Indonesia owns one Series A Dwiwarna share which has special voting rights.

Series A Dwiwarna shares are non-transferable, have special rights in terms of changes in capital, appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, Articles of Association, merger, consolidation, acquisition, dissolution and liquidation of the Company.

Meanwhile, public shareholders represent 43.04% of the total issued and fully paid shares, with individual shareholders accounting for 10.77% and total institutional shareholders representing 32.26%.

Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia

Share Ownership of the Republic of Indonesia

KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Share Ownership of the Republic of Indonesia

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1.	Negara Republik Indonesia | Republic of Indonesia	1	0	1	0

Kepemilikan Saham PGN yang Mencapai 5% atau Lebih

PGN Share Ownership with 5% or More

KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH
Share Ownership of 5% or More

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1.	PT Pertamina (Persero)	13.809.038.755	56,96	13.809.038.755	56,96

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Selama tahun 2024, terdapat pembelian Saham oleh sebagian anggota Dewan Komisaris dan sebagian Direksi PGN, sebagaimana yang diungkapkan pada tabel di bawah ini:

PGN Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors

During 2024, there were purchases of shares by some members of the Board of Commissioners and some members of the Board of Directors of PGN, as disclosed in the following table:

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors Shareholding

No.	Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
			Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
1.	Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	0	0	0	0
2.	Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	0	0	886.700	0,0036578
3.	Warih Sadono	Komisaris Commissioner	0	0	1.016.000	0,0041912
4.	Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
5.	Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
6.	Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
7.	Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0	0	0
8.	Arief S. Handoko	Direktur Utama President Director	0	0	472.200	0,0019479
9.	Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director Infrastructure and Technology	0	0	401.400	0,0016558
10.	Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	0	0	1.861.300	0,0076782

No.	Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
			Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
11.	Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	0	0	95.900	0,0003956
12.	Ratih Esti Prihatini	Direktur Komersial* Director of Commerce	0	0	95.900	0,0003956
13.	Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	0	0	2.500	0,0000103
14.	Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	0	0	0	0

*Diangkat sebagai Direktur Komersial pada tanggal 30 Mei 2024 (perubahan nomenklatur Direktur Sales dan Operasi)
*Appointed as Commercial Director on May 30, 2024 (change in nomenclature of Director of Sales and Operations)

Klasifikasi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat (Kepemilikan Saham Masing-Masing Kurang dari 5%)

Classification of Community Shareholder Groups (Each Share Ownership Less Than 5%)

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Public Shareholders Less Than 5%

No.	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024			31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding
Pemodal Domestik | Domestic Investor							
1.	Perseorangan Indonesia Individual Indonesian	108.647	3.521.066.767	14,53%	77.900	2.606.351.768	10,75%
2.	Koperasi Cooperative	6	1.723.600	0,01%	5	158.800	0,00%
3.	Yayasan Foundation	22	31.238.400	0,13%	16	25.312.300	0,10%
4.	Dana Pensiun Pension Fund	131	1.268.381.700	5,23%	97	1.213.138.900	5,00%
5.	Asuransi Insurance	126	418.803.797	1,73%	124	459.276.358	1,90%
6.	Bank Bank	1	2.500.000	0,01%	1	2.500.000	0,01%
7.	Perseroan Terbatas Limited Company	218	506.950.146	2,09%	176	582.404.924,00	2,40%
8.	Lembaga Pemerintah Government Institution	1	500	0,00%	1	500	0,00%
9.	Reksa Dana Mutual Fund	135	471.082.094	1,94%	156	495.118.857	2,04%
Subtotal		**109.289**	**6.221.747.004**	**25,67%**	**78.476**	**5.384.262.407**	**22,21%**
Pemodal Asing | Foreign Investors							
10	Perorangan Asing Individual Foreign	300	7.464.200	0,03%	283	4.964.200	0,02%
11	Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	420	4.203.258.235	17,34%	488	5.043.242.833	20,81%
Subtotal		**720**	**4.210.722.435**	**17,37%**	**771**	**5.048.207.033**	**20,83%**
Total		**110.009**	**10.432.469.439**	**43,04%**	**79.247**	**10.432.469.440**	**43,04%**

10 Pemegang Saham Terbesar PGAS Per 31 Desember 2024

PGAS 10 Largest Shareholders as of December 31, 2024

No.	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Kepemilikan (%) Shareholding	Status
1.	Pertamina (Persero), PT	13.809.038.755	56,96%	Pengendali | Controller
2.	BPJS Ketenagakerjaan	1.126.569.100	4,65%	Publik | Public
3.	Panin Sekuritas, PT	461.859.500	1,91%	Publik | Public
4.	Vanguard	409.320.300	1,69%	Publik | Public
5.	Petronas	307.260.500	1,27%	Publik | Public
6.	Lo Kheng Hong	264.403.000	1,09%	Publik | Public
7.	Sucorinvest	205.435.400	0,85%	Publik | Public
8.	Blackrock	195.330.100	0,81%	Publik | Public
9.	Wisdomtree	153.677.272	0,63%	Publik | Public
10.	Suwantara Gotama	133.252.200	0,55%	Publik | Public

STRUKTUR SUBHOLDING GAS

Subholding Gas Structure

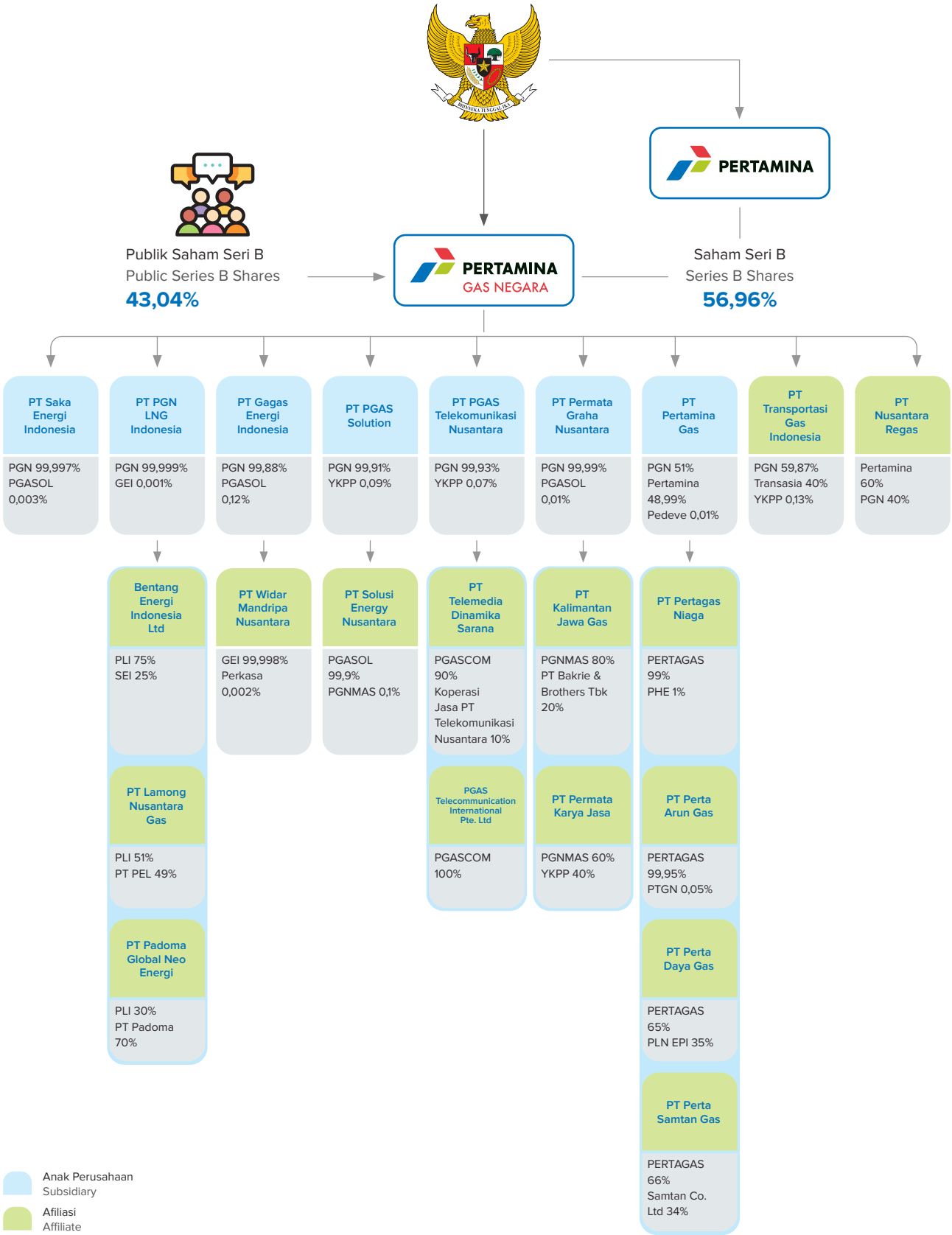

ENTITAS ANAK DAN AFILIASI

Information on Subsidiary Entities and Affiliates

ENTITAS ANAK DAN AFILIASI
Subsidiary Entities and Affiliates

Nama Perusahaan Company Name	Anak Perusahaan Subsidiaries/ Afiliates	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	Bidang Usaha Nature of Businesses	Jumlah Aset 2024 (juta USD) 2024 Total Assets (million USD)	Status Operasi Operational Status
PT Pertamina Gas	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-51% • PT Pertamina (Persero)-48,99% • PT Pertamina Pedeve Indonesia-0,01%	Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Transmission of Oil and Natural Gas	2.409	Beroperasi Operating
PT Saka Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,997% • PT PGAS Solution-0,003%	Hulu Minyak dan Gas Bumi Upstream Oil and Gas	1.209	Beroperasi Operating
PT Gagas Energi Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,88% • PT PGAS Solution-0,12%	Pengelolaan bisnis SPBG Transportasi, CNG dan LNG Retail Household & Small Scale Customer Business Management, Gas Station, SPV Sub WNT Management	80	Beroperasi Operating
PT PGN LNG Indonesia	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,999% • PT Gagas Energi Indonesia-0,001%	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastructure	604	Beroperasi Operating
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,93% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara-0,07%	ICT dan Operation Technology, Konstruksi, dan Perdagangan ICT and Operation Technology, Construction, and Trading	47	Beroperasi Operating
PT PGAS Solution	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,91% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara-0,09%	Enjinering, Konstruksi, Operasi & Pemeliharaan Engineering, Construction, Operation & Maintenance	116	Beroperasi Operating
PT Permata Graha Nusantara	Anak Perusahaan Subsidiary	• Perseroan-99,99% • PT PGAS Solution-0,01%	Pengelolaan Aset, Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Pengelolaan Arsip Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Archive Management	58	Beroperasi Operating
PT Transportasi Gas Indonesia	Afiliasi Affiliate	• Perseroan-59,87% • Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd-40% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara-0,13%	Transportasi Gas Bumi Transportation of Natural Gas	276	Beroperasi Operating
PT Nusantara Regas	Afiliasi Affiliate	• Perseroan-40% • PT Pertamina (Persero)-60%	Bisnis Jasa Regasifikasi & Pengembangan Infrastrutur LNG untuk Kilang Cilacap Regasification Business Services, LNG Infrastructure Development for Cilacap Refinery	280	Beroperasi Operating
PT Kalimantan Jawa Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara-80% • PT Bakrie & Brothers Tbk-20%	Transportasi Gas Gas Transportation	15	Beroperasi Operating
PT Permata Karya Jasa	Afiliasi Affiliate	• PT Permata Graha Nusantara-60% • Yayasan Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Umum Gas Negara-40%	Penyedia Tenaga Kerja Labor Service Provider	21	Beroperasi Operating
PT Solusi Energi Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Solution-99,9% • PT Permata Graha Nusantara-0,1%	Enjinering, Konsultasi, dan Jasa Engineering, Consultant, and Services	12	Beroperasi Operating

Nama Perusahaan Company Name	Anak Perusahaan Subsidiaries/ Afiliates	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders	Bidang Usaha Nature of Businesses	Jumlah Aset 2024 (juta USD) 2024 Total Assets (million USD)	Status Operasi Operational Status
PT Widar Mandripa Nusantara	Afiliasi Affiliate	• PT Gagas Energi Indonesia -99,998% • PT Permata Karya Jasa-0,002%	Bisnis Kelistrikan Electricity Business	7	Beroperasi Operating
PT Telemedia Dinamika Sarana	Afiliasi Affiliate	• PT PGAS Telekomunikasi Nusantara-90% • Koperasi Jasa PGASCOM-10%	Telekomunikasi Telecommunication	6	Beroperasi Operating
PT Pertagas Niaga	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas-99% • PT Pertamina Hulu Energi-1%	Bisnis CNG, Penyimpanan CNG dan LNG Retail CNG Business, CNG Storage and LNG Retail	190	Beroperasi Operating
PT Perta Arun Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas-99,95% • PT Pertagas Niaga-0,05%	Penyediaan Infrastruktur LNG & Komersialisasi Infrastruktur LNG LNG Infrastructure Provider & LNG Infrastructure Commercialize	287	Beroperasi Operating
PT Perta-Samtan Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas-66% • Samtan Co.Ltd-34%	Pemrosesan LPG LPG Processing	143	Beroperasi Operating
PT Perta Daya Gas	Afiliasi Affiliate	• PT Pertamina Gas-65% • PT PLN Energi Primer Indonesia-35%	Penyimpanan CNG untuk PLN CNG Storages for PLN	22	Beroperasi Operating
PT Gas Energi Jambi	Afiliasi Affiliate	• Perseroan-40% • PT Wahana Catur Mas-40% • PT Jambi Indoguna Internasional-10% • PT Bukaka Corporindo-10%	Pengangkutan Gas Bumi Natural Gas Transmission	N/A	Tidak Beroperasi Not Operating
PT Baskara Asri GHAS	Afiliasi Affiliate	• Perseroan 0,14% • PT Asri Prima Baskara-93% • PT Banten Global Synergi-4,304% • Izma Agyano Bursman-2,652%	Jasa Pengangkutan, Perdagangan dan Pertambangan Gas bumi Transportation, Trading and Mining Services	7	Beroperasi Operating
Bentang Energi Indonesia Ltd	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia-75% • PT Saka Energi Investasi-25%	Perdagangan dan Transportasi Minyak dan LNG Trading and Transportation of Oil and LNG	1	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Padoma Global Neo Energi	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia-30% • PT Papua Doberai Mandiri-70%	Penyediaan LNG Provision of LNG	N/A	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PT Lamong Nusantara Gas	Afiliasi Affiliate	• PT PGN LNG Indonesia-51% • PT Pelindo Energi Logistik-49%	Pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian Terminal LNG Construction, Management and Operation of LNG Terminal	9	Aktif (Tidak Beroperasi) Active (Not Operating)
PGAS Telecommunication International Pte. Ltd	Afiliasi Affiliate	PT PGAS Telekomunikasi Nusantara-100%	Industri Informasi, Komunikasi & Teknologi, Penjualan *leased circuit service*, Transit IP, Layanan Internet Information, Communication & Technology Industry, Sales of Leased Circuit Service, IP Transit, Internet Service	4	Beroperasi Operating

PROFIL ENTITAS ANAK

PROFILE OF SUBSIDIARY

PT Pertamina Gas (Pertagas)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	23 Februari 2007	February 23, 2007
Kantor Pusat Head Office	Graha Pertamina, Pertamax Tower, Lantai 20-23, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Jakarta Pusat, 10110 Indonesia	Graha Pertamina, Pertamax Tower, 20th-23th Floor, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Central Jakarta, 10110 Indonesia
Kontak Contact	Telp. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com	Tel. +62 21 3190 6825 Fax. +62 21 3190 6831 Web: www.pertagas.pertamina.com
Bidang Usaha Industry	Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	Oil and Gas Transportation
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	3 Anak Perusahaan dan 2 Afiliasi	3 Subsidiaries and 2 Affiliates

Pertagas bergerak di bidang usaha transportasi gas, transportasi minyak, pemrosesan, distribusi gas, niaga gas bumi dan bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produk turunannya. Pertagas juga melakukan kegiatan usaha pemrosesan gas bumi melalui dua LPG Plant yakni LPG Plant ENP yang bekerja sama dengan PT Energi Nusantara Perkasa dan LPG Plant Sumatera Selatan yang dikelola oleh Anak Perusahaan: PT Perta-Samtan Gas. Sedangkan kegiatan usaha regasifikasi LNG dijalankan Anak Perusahaan: PT Perta Arun Gas melalui pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG di Arun Lhokseumawe Aceh sejak awal 2015.

Pertagas memiliki wilayah operasional kerja di Indonesia, meliputi pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah kerja Perusahaan terbagi dalam delapan wilayah operasional, dengan enam daerah operasi menangani jaringan pipa gas bumi, dan dua daerah operasi menangani jaringan pipa minyak.

Pertagas operates in the gas transportation, oil transportation, processing, gas distribution, natural gas trading business and other businesses related to natural gas and its derivative products. Pertagas also carries out natural gas processing business activities through two LPG Plants, ENP LPG Plant in collaboration with PT Energi Nusantara Perkasa and the South Sumatra LPG Plant under the management of a Subsidiary: PT Perta-Samtan Gas. Meanwhile, LNG regasification business activities are assigned to another subsidiary: PT Perta Arun Gas through the operation of the LNG Reception and Regasification Terminal in Arun Lhokseumawe Aceh since early 2015.

Pertagas has operational work areas in Indonesia, covering the islands of Sumatra, Java and Kalimantan. The Company's operational area is divided into eight operational areas, with six operational areas handling natural gas pipeline networks, and two operational areas handling oil pipeline networks.

PT Saka Energi Indonesia (SEI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 26 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 26th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com	Tel. +62 21 2995 1000 Fax. +62 21 2995 1001 E-mail: contact.us@sakaenergi.com Web: www.sakaenergi.com
Bidang Usaha Industry	Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	Oil and Gas (Upstream)
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	28 Anak Perusahaan dan 4 Afiliasi	28 Subsidiaries and 4 Affiliates

PT SAKA Energi Indonesia (SEI) adalah Anak Perusahaan yang melaksanakan usaha dan investasi di bidang hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan usaha di bidang minyak dan gas alam, gas metana batu bara (CBM), serta sumber energi lainnya.

SEI memiliki hak partisipasi (*Participating Interest*) atas sembilan PSC di Indonesia dan satu blok shale gas Amerika Serikat, empat di antaranya dioperasikan penuh oleh SEI dengan kepemilikan *participating interest* 100%. Keempat PSC tersebut adalah Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC dan Wokam II PSC.

PT SAKA Energi Indonesia (SEI) is a Subsidiary that runs business and investment in the upstream Oil and Gas (Migas) sector, including exploration, exploitation, business development activities in the fields of oil and natural gas, coalbed methane gas (CBM), as well as other energy sources.

SEI has participation interests in nine PSCs in Indonesia and one shale gas block in the United States, four of which are fully operated by SEI with 100% participating interest ownership. The four PSCs are Pangkah PSC, Muriah PSC, South Sesulu PSC and Wokam II PSC.

PT Gagas Energi Indonesia (GEI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	27 Juni 2011	June 27, 2011
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 9-10 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 9th-10th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 2907 1415/2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 E-mail: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id	Tel. +62 21 2907 1415/2907 1421 Fax. +62 21 2907 1138 E-mail: info@gagas.co.id Web: www.gagas.co.id
Bidang Usaha Industry	Pengelolaan bisnis SPBG Transportasi, CNG dan LNG Retail	Household & Small Scale Customer Business Management, Gas Station, SPV Sub WNT Management
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	1 Anak Perusahaan	1 Subsidiaries

PT Gagas Energi Indonesia (GEI) adalah Anak Perusahaan PGN yang bergerak dalam bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi untuk serta energi lainnya. GEI menyediakan gas bumi sektor transportasi, industri dan sektor kegiatan usaha komersial melalui CNG dan mini LNG, SPBG dan Mobile Refueling Unit (MRU). Dalam rangka mendukung program Pemerintah dan memperluas distribusi dan utilisasi gas bumi untuk sektor transportasi (Gasku), GEI telah mengelola 11 SPBG dan 4 MRU serta mengelola 3 SPBG Pertamina lokasinya tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Batam. GEI terus melakukan inovasi dan memperluas pasar dengan menghadirkan produk CNG Cylinder dengan target pasar para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau industri kecil.

PT Gagas Energi Indonesia (GEI) is a subsidiary of PGN engaged in processing, transporting, storing and trading oil and natural gas business and other energy business. GEI supplies natural gas for the transportation, industrial and commercial business activity sectors through CNG and mini LNG, SPBG and Mobile Refueling Unit (MRU). To support Government programs and expand the distribution and utilization of natural gas for the transportation sector (Gasku), GEI now manages 11 SPBGs and 4 MRUs and manages 3 Pertamina SPBGs in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Lampung and Batam. GEI looks to innovate and expand the market by presenting CNG Cylinder products with Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs") or small industries as the markets.

PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	10 Januari 2007	January 10, 2007
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 3 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 3rd Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 633 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id	Tel. +62 21 633 1345 Fax. +62 21 633 1381 E-mail: sales@pgncom.co.id dan cs@pgncom.co.id Web: www.pgncom.co.id
Bidang Usaha Industry	*Information & Communication Technology*	Information & Communication Technology
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	2 Anak Perusahaan	2 Subsidiaries

PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) merupakan Anak Perusahaan PGN yang bergerak dalam bisnis jaringan telekomunikasi yang didirikan pada 2007. Sebagai penyedia layanan ICT, PGASCOM memiliki layanan *connectivity, managed service*, dan *business solution* yang dapat digunakan oleh semua Perusahaan dari kelas *large corporation* sampai ke *Small Medium Enterprise* (SME).

Produk dan layanan PGASCOM terdiri dari *connectivity* seperti IPLC dan DPLC, Global internet dan internet akses yang disediakan melalui anak usahanya PT Telemedia Dinamika Sarana, layanan *business solution* seperti pengembangan aplikasi, video, *video conference*, infrastruktur IT maupun OT (SCADA), dan *managed service* baik untuk IT, SCADA, maupun *seat management*. PGASCOM juga mengembangkan usahanya untuk IoT seperti *smart office* maupun *smart home/building*. Dengan tenaga profesional dan berkompeten, PGASCOM membantu pelanggan untuk mencapai tujuan bisnisnya.

PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) is a subsidiary of PGN engaged in the telecommunications network business that was founded in 2007. As an ICT service provider, PGASCOM offers connectivity services, managed services and business solutions to businesses of all sizes, from large corporations to small Medium Enterprise (SME).

PGASCOM products and services consist of connectivity such as IPLC and DPLC, Global internet and internet access offered through its subsidiary PT Telemedia Dinamika Sarana, business solution services such as application development, video, video conferencing, IT and OT infrastructure (SCADA), and managed services for IT, SCADA, and seat management. PGASCOM is also developing its business for IoT such as smart offices and smart homes/buildings. With professional and competent personnel, PGASCOM helps customers with their business aspirations.

PT PGAS Solution (PGASOL)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	6 Agustus 2009	August 6, 2009
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building C Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +62 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id	Tel. +62 21 6385 4572/4506 Fax. +62 21 6385 4572/4506 E-mail: info@pgn-solution.co.id Web: www.pgn-solution.co.id
Bidang Usaha Industry	*Engineering, Construction, Operation & Maintenance*	Engineering, Construction, Operation & Maintenance
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	1 Anak Perusahaan	1 Subsidiaries

PT PGAS Solution (PGASOL) merupakan Anak Perusahaan PGN dengan 4 (empat) fokus bidang utama, yaitu: *Engineering Procurement Construction* (EPC), *Operation and Maintenance* (O&M), *Supply Chain*, dan *Engineering*. PGASOL memegang peranan penting dalam bisnis PGN. Kegiatan Operasi & Pemeliharaan jaringan pipa dan infrastruktur PGN di seluruh area operasi Indonesia dipercayakan kepada PGAS Solution. Keandalan jaringan merupakan hal prioritas agar penyaluran gas bumi dari hulu sampai ke pelanggan terakhir PGN berjalan secara aman. Dengan dukungan sumber daya manusia berpengalaman dan teknologi modern, PGASOL mampu melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pipa gas PGN.

PT PGAS Solution (PGASOL) is a subsidiary of PGN with 4 (four) main focus areas: Engineering Procurement Construction (EPC), Operation and Maintenance (O&M), Supply Chain, and Engineering. PGASOL plays an important role in PGN's business. Operation & Maintenance activities of PGN's pipeline networks and infrastructure throughout Indonesia's operational areas are assigned to PGAS Solution. Network reliability is a priority to ensure natural gas from upstream is safely distributed to PGN's final customers. With the support of experienced human resources and edge-cutting technology, PGASOL is able to run operations and carry out maintenance activities for PGN's gas pipeline infrastructure.

PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	24 April 2014	April 24, 2014
Kantor Pusat Head Office	Kompleks Perkantoran PGN, Gedung B, Lantai 6-8 Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140	Kompleks Perkantoran PGN, Building B, 6th-8th Floor Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Jakarta 11140
Kontak Contact	Telp. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id	Tel. +62 21 633 180 E-mail: info@pgnmas.co.id Web: www.pgnmas.co.id
Bidang Usaha Industry	Pengelolaan Aset, *Facility Management, Enterpreneur Real Estate* dan *Design & Build*	Asset & Facility Management, Entrepreneur Real Estate, Archive Management
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	2 Anak Perusahaan	2 Subsidiaries

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) merupakan Anak Perusahaan PGN yang mempunyai kegiatan usaha di bidang *Facility Management, Asset Management,* ERE/*Developer*, dan *Design & Build*. PGN MAS konsisten menjalankan kegiatan usaha utamanya dengan terus berupaya mengembangkan potensi yang ada. Dalam pelaksanaan hal tersebut, PGN MAS bersinergi dengan Anak Perusahaan Pertamina melaksanakan jasa di bidang *Facility Management.* PGN MAS mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan di bidang *Facility Management,* Manajemen Kearsipan, dan Penyediaan Jasa Transportasi. Selain itu PGN MAS juga melaksanakan kegiatan di Gedung Sinergi 8 dalam bentuk penyediaan *private office, coworking space* dan penyediaan tempat untuk *tenant.*

PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) is a subsidiary of PGN sengaged in the Facility Management, Asset Management, ERE/Developer, and Design & Build business. PGN MAS consistently carries out its main business activities by continuing to strive to develop existing potential. In implementing this, PGN MAS synergizes with the subsidiaries of Pertamina to provide services in the field of Facility Management. PGN MAS has been trusted to carry out work in the fields of Facility Management, Archives Management and Providing Transportation Services. Other than the above, PGN MAS also carries out activities at the Sinergi 8 Building where it provides private offices, co-working spaces and provides space for tenants.

PT PGN LNG Indonesia (PLI)

Jenis Type	Anak Perusahaan	Subsidiary
Pendirian Establishment	26 Juni 2012	June 26, 2012
Kantor Pusat Head Office	The Manhattan Square, Lantai 29 Jl. TB Simatupang Kav 1S, Jakarta Selatan 12560	The Manhattan Square, 29th Floor Jl. TB Simatupang Kav 1S, South Jakarta 12560
Kontak Contact	Telp. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id	Tel. +62 21 2903 7505/2907 3266/2907 3267 Fax. +62 21 2907 1132/ 2907 1133 E-mail: contact.center@pgnlng.co.id Web: www.pgnlng.co.id
Bidang Usaha Industry	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastucture	LNG Wholesales & Infrastruktur LNG LNG Wholesales & LNG's Infrastucture
Jumlah Entitas Anak Total Subsidiary Entities	3 Anak Perusahaan	3 Subsidiaries

PT PGN LNG Indonesia (PLI) merupakan Anak Perusahaan PGN bergerak di bidang *Liquefied Natural Gas*, namun tidak terbatas pada pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Didirikan pada tahun 2012. Sejak tahun 2014, PLI telah mengoperasikan FSRU Lampung yang berlokasi di Labuhan Maringgai, dengan kapasitas 1,5–1,7 MTPA dan volume penyaluran mencapai 240 MMscfd. FSRU Lampung terintegrasi dengan fasilitas pipa transmisi SSWJ yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi di Sumatera dengan pelanggan potensial terbesar di Jawa Barat.

PT PGN LNG Indonesia (PLI) is a subsidiary of PGN engaged in the Liquefied Natural Gas sector and runs the processing, transportation, storage and trading business among many. Founded in 2012. Since 2014, PLI has operated the Lampung FSRU located in Labuhan Maringgai with a capacity of S1.5–1.7 MTPA and a distribution volume of 240 MMscfd. FSRU Lampung is integrated to the SSWJ transmission pipeline facility which connects natural gas sources in Sumatra with the largest potential customers in West Java.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Listing

Pada 5 Desember 2003, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu) saham yang terdiri dari 475.309.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu) saham dari divestasi saham Negara Republik Indonesia dan 820.987.000 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham baru, dengan total lembar saham dicatatkan sebanyak 4.320.987.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham. Harga penawaran umum saham senilai Rp1.500 per lembar saham. Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan ”PGAS”.

On December 5, 2003, the Company received an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to conduct an Initial Public Offering of Shares to the public for its 1,296,296,000 (one billion two hundred ninety six million two hundred ninety six thousand) shares consisting of 475,309,000 (four hundred seventy five million three hundred nine thousand) shares from the divestment of shares of the Government of the Republic of Indonesia and 820,987,000 (eight hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) new shares, with a total share of 4,320,987,000 (four billion three hundred twenty million nine hundred eighty seven thousand) shares. The public offering price of shares was Rp1,500 per share. The Company’s shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta Stock Exchange) on December 15 2003, under “PGAS” ticker code.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Sampai akhir 2007 jumlah saham dicatatkan Perseroan meningkat sebanyak 218.898.805 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima) saham menjadi 4.539.885.805 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima) saham sebagai akibat pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan dan *Management Stock Option Plan* (MSOP).

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MSOP/ESOP)

Until the end of 2007 the Company’s shares had increased in number by 218,898,805 (two hundred eighteen million eight hundred ninety-eight thousand eight hundred five) shares to 4,539,885,805 (four billion five hundred thirty nine million eight hundred eighty five thousand eight hundred five) shares as a result of the conversion of Government debt to the Company and the Management Stock Option Plan (MSOP).

Pada 15 Januari sampai 14 Februari 2008, *Exercise Window Employee Stock Option Plan* (ESOP) tercatat 54.012.338 (lima puluh empat juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) hak opsi saham yang dibagikan. Dari jumlah tersebut, tercatat 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) opsi saham dieksekusi dan menghasilkan saham Seri B baru sebanyak 53.551.388 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham. Sehingga, total jumlah saham dicatatkan Perseroan bertambah menjadi 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham.

From January 15 to February 14 2008, the Employee Stock Option Plan (ESOP) Window Exercise 54,012,338 (fifty four million twelve thousand three hundred thirty-eight) share option rights were distributed. Of this figure, 53,551,388 (fifty-three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) stock options were exercised that resulted in 53,551,388 (fifty three million five hundred fifty one thousand three hundred eighty eight) new Series B shares. The above actions left the Company with a larger number of shares of 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety-three million four hundred thirty-seven thousand one hundred ninety-three) shares.

PEMECAHAN SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pada 13 Juni 2008, dilaksanakan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) PGAS dengan rasio 1 (satu) saham dengan nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ditukar dengan 5 (lima) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, sehingga jumlah saham yang semula 4.593.437.193 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) saham menjadi 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham. Pecahan saham baru berlaku efektif di Bursa Efek Indonesia pada 4 Agustus 2008. Pada tahun 2024, tidak dilakukan pemecahan saham.

STOCK SPLIT

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk on June 13 2008, a nominal share value split (stock split) of PGAS was exercise with a ratio of 1 (one) share with a nominal value of Rp500 (five hundred rupiah) per share to 5 (five) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred rupiah) per share, so the number of shares multiplied from previously 4,593,437,193 (four billion five hundred ninety-three million four hundred thirty-seven thousand one hundred ninety-three) shares to 22,967,185,965 (two twenty-two billion nine hundred sixty-seven million one hundred eighty-five thousand nine hundred and sixty-five) shares. The new share split came into effect on the Indonesia Stock Exchange on August 4, 2008. In 2024, no share split took place.

PEMBELIAN SAHAM KEMBALI

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, pada 22 Desember 2008, Perseroan melakukan pembelian kembali atas saham yang beredar sebesar 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham pada 24 Oktober 2008. Dengan pembelian saham kembali, maka pada akhir 2008 Perseroan memiliki 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham sebagai Saham Treasuri dan total jumlah saham beredar sebesar 22.967.185.965 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham.

SHARE BUYBACK

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, on 22 December 2008, the Company repurchased 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) outstanding shares on 24 October 2008. With the buyback, the Company had 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) shares as Treasury Shares at the end of 2008 where the total number of outstanding shares was 22,967,185,965 (twenty-two billion nine hundred sixty-seven million one hundred eighty-five thousand nine hundred and sixty-five) shares.

Sampai akhir 2009, jumlah saham Perseroan meningkat sebanyak 1.274.322.231 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) saham, sebagai akibat dari pelaksanaan konversi utang Pemerintah ke Perseroan pada April dan Oktober 2009 hingga total jumlah saham dicatatkan Perseroan menjadi 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham.

Until the end of 2009, the Company's total shares had increased by 1,274,322,231 (one billion two hundred seventy four million three hundred twenty two thousand two hundred thirty one) shares, as a result of the conversion of Government debt to the Company in April and October 2009 leaving the Company with a total of 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred ninety six) shares.

Jumlah saham akhir tahun buku 2010 sampai akhir tahun 2015 adalah 24.241.508.196 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus sembilan puluh enam) saham dengan kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 13.809.038.756 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham (56,96%) dan publik sebesar 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham (43,04%) yang terdiri dari 10.430.619.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh) saham *free float* dan 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham treasuri. Saham treasuri sejumlah 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu) saham Seri B, telah dijual kembali seluruhnya pada Maret 2016.

Total shares at the end of the 2010 financial year to the end of 2015 was 24,241,508,196 (twenty four billion two hundred forty one million five hundred eight thousand one hundred and ninety six) shares with the ownership of the Government of the Republic of Indonesia amounting to 13,809,038,756 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred fifty six) shares (56.96%) with the public holding 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty two million four hundred sixty nine thousand four hundred and forty) shares (43.04 %) consisting of 10,430,619,440 (ten billion four hundred thirty million six hundred nineteen thousand four hundred and forty) free float shares and 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) treasury shares. 1,850,000 (one million eight hundred and fifty thousand) of Treasury shares Series B shares, were completely resold in March 2016.

Pada 2018 terjadi pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia di Perseroan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka pembentukan Holding BUMN Migas, di mana Negara tetap mempertahankan kepemilikan 1 saham Seri A dwiwarna sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

In 2018, there was a transfer of all the Series B shares of the Republic of Indonesia in the Company to PT Pertamina (Persero) in the context of the formation of the Oil and Gas BUMN Holding, where the State retained ownership of 1 Series A dwiwarna share as mandated by Government Regulation No 72 of 2016 on Amendments to Government Regulations No. 44 of 2005 on Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

Setelah pengalihan seluruh saham Seri B Negara kepada PT Pertamina (Persero), maka PT Pertamina (Persero) menggantikan kedudukan Negara sebagai pemegang saham pada Perseroan dengan kepemilikan sebesar 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham, dan kepemilikan publik 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham.

After the transfer of all of the State's Series B shares to PT Pertamina (Persero), PT Pertamina (Persero) took the position of the State as shareholder in the Company with ownership of 13,809,038,755 (thirteen billion eight hundred nine million thirty eight thousand seven hundred and fifty five) shares, and public ownership of 10,432,469,440 (ten billion four hundred thirty-two million four hundred sixty-nine thousand four hundred and forty) shares.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Chronology of Shares Listing

No.	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Negara Republik Indonesia (lembar) The State (shares)	Pertamina (lembar) (shares)	Publik (lembar) Public (shares)	Treasury (lembar) Treasury (shares)	Total (lembar) (shares)	Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia Percentage of Ownership by the State (%)	Persentase Kepemilikan Pertamina Percentage of Ownership by Pertamina (%)
1.	Sebelum IPO Before IPO		3.500.000.000				3.500.000.000	100,00	
2.	IPO (15 Desember 2003) dicatatkan di BEJ dan BES IPO (December 15, 2003) listed on the JSE and SSE								
3.	Divestasi Divestment		-864.198.000		864.198.000				
	Penerbitan Saham Baru tanpa HMETD Issuance of New Shares without HMETD	Rp500			820.987.000				
		Rp500	**2.635.802.000**		**1.685.185.000**		**4.320.987.000**	**61,00**	
4.	Konversi DPP 1 (2004) Conversion of DPP 1 (2004)	Rp500	56.943.305						
	MSOP 1 (2005-2006)	Rp500			108.024.675				
	MSOP 2 (2006-2007)	Rp500			53.930.825				
		Rp500	**2.692.745.305**		**1.847.140.500**		**4.539.885.805**	**59,31**	

No.	Aksi Korporasi Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value (Rp)	Negara Republik Indonesia (lembar) The State (shares)	Pertamina (lembar) (shares)	Publik (lembar) Public (shares)	Treasury (lembar) Treasury (shares)	Total (lembar) (shares)	Persentase Kepemilikan Negara Republik Indonesia Percentage of Ownership by the State (%)	Persentase Kepemilikan Pertamina Percentage of Ownership by Pertamina (%)
5.	Divestasi Desember 2006 Divestment December 2006	Rp500	-185.802.000		185.802.000				
		Rp500	**2.506.943.305**		**2.032.942.500**		**4.539.885.805**	**55,22**	
6.	MSOP 3 (2007-2008)	Rp500			53.551.388				
		Rp500	**2.506.943.305**		**2.086.493.888**		**4.593.437.193**	**54,58**	
7.	Stock Split 5:1 (Agustus 2008) Stock Split 5:1 (August 2008)	Rp100	12.534.716.525		10.432.469.440		22.967.185.965	54,58	
8	Buy Back (Oktober 2008) Buy Back (October 2008)	Rp100			-1.850.000	1.850.000			
		Rp100	**12.534.716.525**		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**22.967.185.965**	**54,58**	
9	Konversi DPP 2 tahap 1 (April 2009) Conversion of DPP 2 stages 1 (April 2009)	Rp100	992.724.172						
			13.527.440.697		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**23.959.910.137**	**56,46**	
10	Konversi DPP 2 tahap 2 (Oktober 2009) Conversion of DPP 2 stages 2 (October 2009)	Rp100	281.598.059						
			13.809.038.756		**10.430.619.440**	**1.850.000**	**24.241.508.196**	**56,96**	
11	Penjualan Kembali saham Treasury Maret 2016 Resale of Treasury shares March 2016	Rp100	13.809.038.756		10.432.469.440		24.241.508.196	56,96	
12	Pengalihan Saham Seri B Negara RI ke Pertamina 2018 Transfer of RI State Series B Shares to Pertamina 2018	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96
13	Jumlah Saham Akhir Tahun Number of Share End Year	Rp100	1	13.809.038.755	10.432.469.440		24.241.508.196	0,00	56,96

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI

Chronology of Bond Listing

UTANG OBLIGASI PGN

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan USD1.350.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,037%. Wali amanat atas obligasi ini adalah The Bank of New York Mellon. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,125% per tahun yang terutang setengah tahunan setiap tanggal 16 Mei dan 16 November, dimulai pada tanggal 16 November 2014. Obligasi ini dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited. Dana dari obligasi diterima pada tanggal 16 Mei 2014 dan dipergunakan untuk penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya.

Sebagai langkah proaktif dalam mengelola obligasi yang jatuh tempo 16 Mei 2024, PGN telah melakukan serangkaian kegiatan *liability management* berupa pembelian kembali obligasi yang dimulai sejak 2022 s.d. 2023. Selama periode tahun 2022-2023 telah dilakukan *liability management* obligasi PGN senilai USD953.291.000 yang terdiri dari:

1. *Liability management/Cash Tender Offer* tahap I senilai USD400.000.000 pada 28 November 2022 s.d. 9 Desember 2022, menggunakan 100% dana internal;
2. *Liability management/Cash Tender Offer* tahap II senilai USD499.851.000 pada 18 Mei 2023 s.d. 25 Mei 2023, menggunakan dana internal dan dana pinjaman komersial dari bank USD300.000.000;
3. *Liability management/Open Market Purchase* senilai USD53.440.000 pada 22 Agustus 2023 s.d. 5 September 2023, menggunakan 100% dana internal.

Sehingga saldo Obligasi PGN setelah pelaksanaan *Liability Management* tahun 2022-2023 adalah senilai USD396.709.000. Pada 16 Mei 2024, PGN telah melakukan pelunasan obligasi yang jatuh tempo USD396.709.000 dengan menggunakan pendanaan dari dana pinjaman komersial dari bank USD300.000.000 juta dan sisanya menggunakan dana internal. Sehingga, saldo Obligasi PGN per 31 Desember 2024 adalah senilai USD0.

Berdasarkan Moody's Investors Services, dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa2 dan BBB- pada tanggal 31 Desember 2024.

PGN BONDS PAYABLE

On May 12, 2014, the Company issued USD1,350,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will mature on May, 16 2024, with an issuance price of 99.037%. The trustee for these bonds is The Bank of New York Mellon. These bonds bear interest of 5.125% per annum, which is payable semi-annually every May 16 and November 16, starting on November, 16 2024. These bonds are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The proceeds from these bonds were received on May 16, 2014 and had been allocated as additional working capital and other general purposes.

As a proactive measure in managing bonds that matured on May 16, 2024, PGN has carried out a series of liability management activities in the form of bond buybacks starting from 2022 to 2023. During the period of 2022 - 2023, PGN has carried out liability management of bonds worth USD953,291,000 consisting of:

1. Phase I of Liability management/Cash Tender Offer, valued at USD400,000,000 on November 28, 2022 to December 9, 2022, using 100% internal funds;
2. Phase II of Liability management/Cash Tender Offer, valued at USD499,851,000 on May 18, 2023 to May 25, 2023, using internal funds and commercial loan funds from banks valued at USD300,000,000;
3. Liability management/Open Market Purchase valued at USD53,440,000 on August 22, 2023 to September 5, 2023, using 100% internal funds.

Subsequently, the balance of PGN Bonds after the implementation of Liability Management in 2022 - 2023 was valued at USD396,709,000. On May, 16 2024, PGN paid off the maturing bonds in the amount of USD396,709,000 using funding from commercial bank loans in the amount of USD300,000,000 while the remain uses internal funds. Therefore, the balance of PGN Bonds as of December 31, 2024 is USD 0.

Based on Moody's Investors Services, and Fitch Rating, the ratings of these bonds were Baa2 and BBB- respectively as of December 31, 2024.

PERBANDINGAN PERINGKAT KREDIT UTANG OBLIGASI PGN 2023-2024

Comparation of PGN's Bond Credit Rating 2023-2024

Rating Agencies	2024		2023		Rating Agencies
	Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
Moodys	Baa2	*Stable*	Baa2	*Stable*	Moodys
Fitch Ratings	BBB-	*Stable*	BBB-	*Stable*	Fitch Ratings

UTANG OBLIGASI SEI

Pada tanggal 26 April 2017, SEI menerbitkan USD625.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 100%. Wali amanat atas obligasi ini adalah Citicorp International Limited. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 4,45% per tahun yang terutang setengah tahunan setiap tanggal 5 Mei dan 5 November, dimulai pada tanggal 5 November 2017. Obligasi ini dicatatkan pada Singapore Exchange Securities Trading Limited. Dana dari obligasi diterima pada tanggal 5 Mei 2017 dan dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi, mendanai aktivitas investasi, aktivitas akuisisi, penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya.

Sebagai langkah proaktif dalam mengelola obligasi yang jatuh tempo 5 Mei 2024, SEI telah melakukan serangkaian kegiatan liability management berupa pembelian kembali obligasi yang dimulai sejak 2022 s.d. 2023. Selama periode tahun 2022-2023 telah dilakukan *liability management* obligasi SEI senilai USD468.748.000 yang terdiri dari:

1. *Liability management/Open Market Purchase* tahap I senilai USD11.981.000 pada 10 Januari 2022 s.d. 10 Februari 2022, menggunakan 100% dana internal;
2. *Liability management/Cash Tender Offer* tahap I senilai USD220.000.000 pada 28 Februari 2022 s.d. 30 Maret 2022, menggunakan 100% dana internal;
3. *Liability management/Open Market Purchase* tahap II senilai USD16.767.000 pada 14 Oktober 2022 s.d. 9 Desember 2022, menggunakan 100% dana internal;
4. *Liability management/Cash Tender Offer* tahap II senilai USD220.000.000 pada 6 Juli 2023 s.d. 4 Agustus 2023, menggunakan 100% dana internal.

Sehingga saldo Obligasi SEI setelah pelaksanaan *Liability Management* tahun 2022 - 2023 adalah senilai USD156.252.000. Pada 5 Mei 2024, SEI telah melakukan pelunasan obligasi yang jatuh tempo USD156.252.000 dengan menggunakan dana internal. Sehingga, saldo Obligasi SEI per 31 Desember 2024 adalah senilai USD0.

Berdasarkan Moody's Investors Services dan Fitch Rating, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah B2 dan B+ pada tanggal 31 Desember 2024.

SEI BONDS PAYABLE

On April 26, 2017, SEI issued USD625,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will mature on May 5, 2024, with an issuance price of 100%. The trustee for these bonds is Citicorp International Limited. These bonds bear interest of 4.45% per annum, which is payable semi-annually every May 5, and November 5, starting on November 5, 2017. These bonds are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The proceeds from the bonds were received on May 5, 2017, and used to pay off syndicated loans, fund investment activities, acquisition activities, as additional working capital and for other general purposes.

As a proactive measure in managing bonds that matured on May 5, 2024, PGN has carried out a series of liability management activities in the form of bond buybacks starting from 2022 to 2023. During the period of 2022 - 2023, SEI has carried out liability management of bonds valued at USD468,748,000 consisting of:

1. Phase I of Liability management/Open Market Purchase valued at USD11,981,000 on January 10, 2022 – February 10, 2022, using 100% internal funds;
2. Phase I of Liability management/Cash Tender Offer valued at USD220,000,000 on February 28, 2022 to March 30, 2022, using 100% internal funds;
3. Phase II of Liability management/Open Market Purchase valued at USD16,767,000 on October 14, 2022, to December 9, 2022, using 100% internal funds;
4. Phase II of Liability management/Cash Tender Offer valued at USD220,000,000 on July 6, 2023, to August 4, 2023, using 100% internal funds.

Subsequently, the balance of SEI Bonds after the implementation of Liability Management in 2022 - 2023 is valued at USD156,252,000. On May 5, 2024, SEI paid off the maturing bonds in the amount of USD156,252,000 using internal funds. Therefore, the balance of SEI Bonds as of December 31, 2024 is USD0.

Based on Moody's Investors Services and Fitch Rating, the ratings of these bonds were B2 and B+ respectively as of December 31, 2024.

PERBANDINGAN PERINGKAT UTANG OBLIGASI SEI 2023-2024

Comparation of SEI's Bond Credit Rating 2023-2024

Rating Agencies	2024		2023		Rating Agencies
	Rating	*Outlook*	*Rating*	*Outlook*	
Moodys	B2	*Stable*	B2	*Stable*	Moodys
Fitch Ratings	B+	*Stable*	B+	*Stable*	Fitch Ratings

INFORMASI JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Information on Public Accounting Services and Public Accounting Firms

KANTOR AKUNTAN PUBLIK	PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Purwantono, Sungkoro & Surja a member firm of Ernst & Young Global Limited

Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Irwan Haswir	
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Buliding, Tower 2, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia	Indonesia Stock Exchange Buliding, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia
Jasa yang Diberikan Services Provided	• Jasa Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024. • Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil Terkait Program Tanggung Jawab Sosial Tahun Buku 2024. • Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan dan Pengendalian Internal (PSA62) tahun buku 2024. • Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Direksi.	• General audit services of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year. • General audit of the financial statements of the Partnership and Community Development Program of PGN for the 2024 Fiscal Year. • Compliance audit on laws and regulations and internal control (PSA62) for the 2024 Fiscal Year. • Implementation of Agreed Procedures on Performance Evaluation Reports of Corporate KPIs and Board of Directors KPIs.
Jasa Lain Other Services	Tidak ada jasa lain yang diberikan kecuali yang telah disebutkan.	No other services were provided except those mentioned
Biaya Fee	Rp10.720.720.721 (tidak termasuk PPN)	Rp10,720,720,721 (excluding VAT)
Periode Penugasan Assignment Period	Tahun Buku 2024	Fiscal Year 2024

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Name and Address of Capital Market Supporting Agencies and/or Professions

BIRO ADMINISTRASI EFEK

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

PT Datindo Entrycom

Alamat Address	Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Pusat 10220 Telp. +62 21 570 9009, Fax. +62 21 570 9020	Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Pusat 10220 Telp. +62 21 570 9009, Fax. +62 21 570 9020

BURSA EFEK INDONESIA

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Bursa Efek Indonesia

Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp. 0800-100-9000 Web: callcenter@idx.co.id	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, South Jakarta 12190, Indonesia Tel. 0800-100-9000 Web: callcenter@idx.co.id

Kustodian Sentral Efek Indonesia

Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 2190, Indonesia Telp. +62 21 515 2855, Fax +62 21 5299 1199	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 2190, Indonesia Telp. +62 21 515 2855, Fax +62 21 5299 1199

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK

SECURITIES RATING AGENCY

Moody's Investors Services Singapore Pte. Ltd.

Alamat Address	71 Robinson Road Singapore, 05-01 Singapore 068895 Telp. +91 (865) 792 0807	71 Robinson Road Singapore, 05-01 Singapore 068895 Tel. +91 (865) 792 0807

Fitch Ratings Ltd

Alamat Address	30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN Telp. +44 20 3530 1000, Fax +44 20 3530 1000	30 North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5GN Tel. +44 20 3530 1000, Fax +44 20 3530 1000

LEMBAGA PEMERINGKAT ESG *RISK RATING*

ESG RISK RATING AGENCY

Morningstar-Sustainalytics

Alamat Address	Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Netherlands inquiries.EMEA@sustainalytics.com (+44)20 4526 5640	Hoogoorddreef 11, 1101 BA Amsterdam, Netherlands inquiries.EMEA@sustainalytics.com (+44)20 4526 5640

DAFTAR KEANGGOTAAN ASOSIASI

List of Association Memberships

Nama Asosiasi Name of Association	Status Keanggotaan Membership Status
Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprises (SOEs) Legal Forum	Anggota Aktif Active Member
Indonesian Gas Society Indonesian Gas Society	Anggota Aktif Active Member
Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Issuers Association	Anggota Aktif Active Member
National Investor Relations Institute National Investor Relations Institute	Anggota Aktif Active Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Indonesian Human Capital Forum (FHCI)	Anggota Aktif Active Member
The Institute of Internal Auditors Indonesia The Institute of Internal Auditors Indonesia	Anggota Aktif Active Member
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Internal Oversight Unit Communication Forum (FKSPI)	Anggota Aktif Active Member
Ikatan Perusahaan Gasbumi Indonesia (PGI) Indonesian Gas Association (PGI)	Anggota Aktif Active Member
Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants	Anggota Aktif Active Member
Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA) Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA)	Anggota Aktif Active Member

INFORMASI PADA *WEBSITE* PERUSAHAAN

Information on Company's Website

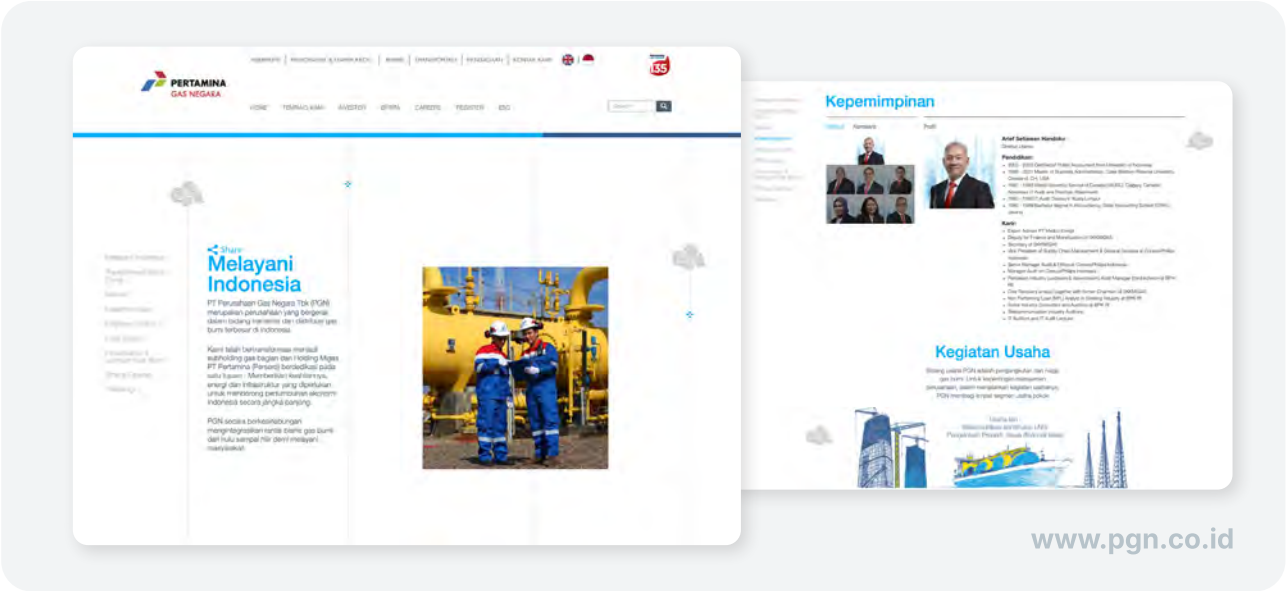

Situs *website* utama PGN yakni www.pgn.co.id, dibuat serta dikelola dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang *website* emiten atau Perusahaan Publik. Situs PGN dapat diakses dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang juga ditujukan untuk memenuhi komitmen Perusahaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, pelanggan, masyarakat, Pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Situs website PGN telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan peraturan OJK, di mana Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Secara rinci, informasi yang ada di dalam *website* PGN, memuat beragam data dan informasi seperti:

1. Informasi pemegang saham. Terdapat pada menu "investor";
2. Kode Etik. Terdapat pada menu "tata kelola";
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) meliputi bahan mata acara yang dibahas, ringkasan risalah, tanggal pengumuman, tanggal pemanggilan, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah diumumkan. Terdapat pada menu "investor";
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir). Terdapat pada menu "investor";
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Terdapat pada menu "Tentang kami"; dan
6. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, dan Unit Audit Internal. Terdapat pada menu "tata kelola".

In line with the OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on the Websites of Issuers or Public Companies, PGN has a main website, namely www.pgn.co.id. Our site can be accessed in Indonesian and English. In addition, our website is also intended to fulfill the Company's commitment to implement Law No. 8 of 1995 on the Capital Market and improve the implementation of Good Corporate Governance, especially for shareholders, customers, the public, the Government, and other stakeholders.

The Company's website contains information that must be published in accordance with the OJK Regulations, where Issuers or Public Companies are required to submit information in accordance with applicable provisions. In detail, the information on the PGN website contains various data such as:

1. Shareholder information. Available in the "investor" menu.
2. Code of Ethics. Available in the "management" menu.
3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) includes agenda items discussed, summary of minutes, date of announcement, date of invitation, date of GMS, date of summary of minutes announced. Available in the "investor" menu.
4. Separate annual financial statements (the last 5 years). Available in the "investor" menu.
5. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors. Available in the "About us" menu.
6. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit. Available in the "management" menu.

04.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

TINJAUAN MAKRO EKONOMI DAN INDUSTRI

Macroeconomic and Industrial Overview

Pada tahun 2024, ekonomi global masih menghadapi berbagai ketidakpastian yang berdampak pada kinerja Perseroan. Ekonomi global dibayangi oleh sejumlah tantangan, seperti tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, peningkatan proteksionisme, dinamika sosial politik, fluktuasi harga komoditas, hingga disrupsi rantai pasok global.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook* yang terbit pada Januari 2025 mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 sekitar 3,2%, dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan dan perbaikan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Meskipun beberapa negara, terutama negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, juga telah mencapai pertumbuhan yang cukup baik.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh 5,03% dari sebelumnya sebesar 5,05%, yang didorong permintaan domestik. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%.

Bank Indonesia (BI) mencatat investasi domestik tetap tumbuh kuat, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas juga tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas.

Data Bank Indonesia menunjukkan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai 1,57% pada Desember 2024. Sementara stabilitas nilai tukar Rupiah juga terjaga di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar global yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat, dampaknya terhadap nilai tukar Rupiah relatif terbatas. Data Bank Indonesia mencatat hingga 31 Desember 2024, nilai tukar Rupiah melemah 4,34% (*point-to-point*) atau 3,74% (rerata) dibandingkan dengan level 2023. Pelemahan ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai tukar mata uang negara berkembang lainnya.

In 2024, the global economy was still facing various uncertainties that impacted the Company's performance. The global economy is overshadowed by several challenges, such as geopolitical tensions, geoeconomic fragmentation, increasing protectionism, socio-political dynamics, fluctuation in commodity prices, and disruption of the global supply chain.

In its World Economic Outlook published in January 2025, the International Monetary Fund (IMF) estimated global economic growth in 2024 was at around 3.2%, with a slowing trend. Global inflation is on a downward and improving trend, encouraging convergence of moderate monetary policy, particularly in developed countries. Although several countries, especially low-income developing countries, have also achieved decent growth.

Domestically, the Central Statistics Agency (BPS) stated that the Indonesian economy in 2024 grew by 5.03%, 5.05% in the previous year driven by domestic demand. In terms of production, the highest growth occurred in the Other Service Business Field at 9.80%. Meanwhile, the highest growth in terms of expenditure was achieved by the Consumption Expenditure Component of Non-Profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) at 12.48%.

Bank Indonesia (BI) noted that domestic investment continued to have strong growthy, especially investment in buildings, in line with the completion of various National Strategic Projects (PSN). Household consumption, particularly in the upper middle class, also remained stable. Non-oil and gas exports grew positively amid the global economic slowdown and declining commodity prices.

Bank Indonesia data revealed that the inflation in Consumer Price Index (CPI) was low across all components, reaching 1.57% in December 2024. Amid geopolitical dynamics and global market uncertainty that encouraged the strengthening of the US dollar, the stability of the Rupiah exchange rate was maintained, resulting in a relatively limited impact on the Rupiah exchange rate. Bank Indonesia data recorded that as of December 31, 2024, the Rupiah exchange rate had weakened by 4.34% (point-to-point) or 3.74% (average) compared to the level in 2023. This weakening was lower compared to the exchange rates of other developing countries' currencies.

Selaras dengan tren ekonomi dalam negeri yang berdaya tahan, Perseroan terus berupaya mencapai tren kinerja yang positif. Volume penjualan niaga gas di tahun 2024 mencapai 852 BBTUD, sedangkan untuk volume transmisi gas bumi sebesar 1.543 MMSCFD. Segmen hulu minyak dan gas bumi masih menunjukkan kinerja positif, dengan volume *lifting* sebesar 7.386 MBOE. Realisasi volume regasifikasi gas bumi mencapai sebesar 146 BBTUD dan pencapaian volume transportasi minyak bumi sebesar 58.990 MBOE. Perseroan juga mencatatkan penjualan LNG global yang mencapai 59,7 BBTUD.

Secara konsisten, PGN dalam perannya sebagai Subholding Gas Pertamina mengedepankan performa kualitas layanan kepada pelanggan melalui penyediaan pasok gas bumi, infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan. Diversifikasi pasokan gas dalam bentuk CNG dan LNG untuk membantu keandalan ketersediaan pasokan gas ke depannya diupayakan untuk memperkaya portofolio keandalan gas bumi domestik.

Ke depan, Subholding Gas akan terus memastikan kinerja yang bertumbuh dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif di antaranya strategi optimasi melalui penambahan pelanggan dan penetrasi pasar, perluasan layanan rumah tangga, diversifikasi bisnis untuk menopang keberlanjutan bisnis Perusahaan melalui pengembangan bisnis turunan hilir gas, pengelolaan biaya yang efektif serta program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan.

In line with domestic economic trends, which remained resilient, the Company continued to strive to achieve a positive performance trend. The volume of commercial gas sales in 2024 reached 852 BBTUD, while the volume of natural gas transmission was 1,543 MMSCFD. The upstream oil and gas segment delivered equally positively, with a lifting volume of 7,386 MBOE. The realization of the natural gas regasification volume reached 146 BBTUD and the achievement of the oil transportation volume was 58,990 MBOE. The Company also recorded global LNG sales reaching 59.7 BBTUD.

In its role as Pertamina 's Gas Subholding, PGN consistently emphasizes on the performance of service quality to customers through the provision of natural gas supply, infrastructure, and sustainable innovation. Diversification of gas supply in the form of CNG and LNG to assist the reliability of gas supply in the future is being sought to enrich the portfolio of domestic natural gas reliability.

Going forward, the Gas Subholding will continue to ensure growing performance by implementing various initiatives, including optimization strategies through customer additions and market penetration, expansion of household services, business diversification to support the sustainability of the Company's business through the development of downstream gas derivative businesses, effective cost management, as well as and sustainable Human Resources (HR) development programs.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operational Review Per Business Segment

PGN menjalankan 3 (tiga) segmen usaha utama, yaitu Segmen Usaha Niaga & Transmisi Gas Bumi, Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas, Segmen Usaha Operasi Lainnya berupa telekomunikasi, pemrosesan gas, transportasi minyak, jasa regasifikasi, konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa, serta layanan pengelolaan fasilitas dan manajemen aset.

PGN has 3 (three) main business segments, namely Natural Gas Trading & Transmission Business Segment, Oil and Gas Exploration and Production Business Segment, and Other Operation Business Segment, which includes telecommunication, gas processing, oil transportation, regasification services, pipeline network construction and maintenance, as well as facility and asset management services.

PROFITABILITAS PER SEGMEN USAHA

Profitability per Business Segment

Juta USD | Million USD

Segmen Usaha Business Segment	Niaga & Transmisi Gas Bumi Trading and Transmission		Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Exploration and Production of Oil and Gas		Operasi Lainnya Other Operation		Eliminasi Elimination		Konsolidasian Consolidation	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Pendapatan Netto Net Revenue	3.271,6	3.089,5	369,5	453,0	519,4	491,6	(379,7)	(387,8)	3.788,6	3.646,3
Beban Segmen Segment Expenses	(2.808,0)	(2.788,5)	(316,3)	(382,3)	(396,0)	(247,8)	391,2	392,4	(3.232,5)	(3.026,1)
Laba Segmen Segment Profit	471,4	301,0	53,2	70,7	123,4	243,8	11,5	4,7	556,2	620,2

SEGMEN USAHA NIAGA DAN TRANSMISI

Segmen Usaha Niaga

Segmen usaha niaga gas bumi merupakan kegiatan penyaluran dan penjualan gas bumi ke pengguna akhir, meliputi pelanggan komersial dan industri manufaktur, pembangkit listrik, pelanggan kecil (UMKM), serta pelanggan rumah tangga dengan menggunakan moda penjualan gas bumi melalui pipa maupun non-pipa. Segmen usaha niaga gas bumi juga termasuk kegiatan usaha LNG *trading* yang mencakup kegiatan pembelian dan penjualan gas alam dalam bentuk LNG di pasar global. Segmen usaha ini dikelola PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, dan PT Pertagas Niaga. Wilayah kegiatan usahanya tersebar di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten di Indonesia.

PGN melalui Sales and Operation Region (SOR) melaksanakan kegiatan operasional usaha niaga gas bumi yang terbagi dalam SOR I, II, dan III dengan rincian wilayah masing-masing SOR sebagai berikut:

- Wilayah SOR I meliputi pulau Sumatera & Kepulauan Riau, dengan Area terdiri dari Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, dan Batam.

TRADING AND TRANSMISSION BUSINESS SEGMENT

Trading Business Segment

Natural gas trading business segment is an activity of distributing and selling natural gas to end users, comprising customers of commerce and manufacturing industry, power plants, small-scale businesses (MSMEs), as well as households through pipeline and non-pipeline natural gas trading mode. The natural gas trading business segment also includes LNG trading business activities, which include the purchase and sale of natural gas in the form of LNG on the global market. This business segment is managed by PGN, PT Gagas Energi Indonesia, PT Pertamina Gas, and PT Pertagas Niaga. The business activity areas are spread in 18 provinces and 74 cities/regencies in Indonesia.

Through its Sales and Operation Regions (SORs), PGN carries out natural gas trading business operational activities, which are divided into SOR I, II, III and IV with the following details for each SOR area:

- SOR I covers Sumatra island and Riau Islands, with Areas consisting of Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, and Batam.

- Wilayah SOR II meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dengan Area terdiri dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, dan Cirebon.
- Wilayah SOR III meliputi provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dengan Area terdiri dari Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang serta pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kepulauan Maluku, dengan Area terdiri dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, dan Sorong.

Segmentasi Pelanggan Gas Bumi PGN

PGN melakukan segmentasi pasar untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang berfokus kepada pengelompokan pelanggan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang spesifik, fleksibilitas klausul komersial dan operasi, serta simplifikasi dan akurasi layanan dengan menghadirkan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pelanggan gas bumi PGN dibagi 4 (empat) segmen, yaitu:

a. Pelanggan Rumah Tangga
   Mencakup perumahan, rumah susun yang dikelola Pemerintah maupun swasta, rumah dinas pemerintahan (termasuk TNI dan Polri), kondominium, apartemen, serta pengembang kawasan hunian dan *real estate*.

b. Pelanggan Kecil
   Mencakup rumah sakit, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan Pemerintahan dan swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, kantor Pemerintah dan swasta, hotel, restoran, pertokoan/mall/swalayan. Segmentasi Pelanggan Kecil mengacu kepada Peraturan BPH Migas No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, sehingga dalam penyajian jumlah pelanggan dan volume niaga gas bumi tetap ditampilkan. Adapun untuk penyajian dalam Laporan Keuangan Konsolidasian, pendapatan segmen Pelanggan Kecil dimasukkan ke dalam segmen Komersial dan Industri.

c. Pelanggan BBG Transportasi
   Mencakup pelanggan yang menggunakan gas pada kegiatan pengisian bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor. Dalam penyajian volume niaga, segmen pelanggan BBG Transportasi dimasukkan ke dalam segmen pelanggan Komersial dan Industri.

d. Pelanggan Komersial dan Industri
   Mencakup pelanggan komersial dan industri serta pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar dan/atau bahan baku dalam kegiatan usaha di bidang jasa, komersial, manufaktur sektor industri kimia, keramik, logam dasar, logam fabrikasi, pupuk, kertas, kaca, kayu, semen, makanan, tekstil, *lifting oil*, *refinery*, pembangkit listrik dan industri manufaktur lainnya.

- SOR II covers the provinces of West Java, Jakarta Special Capital Region, and Banten, with Areas consisting of Jakarta, Bogor, Tangerang, Cilegon, Bekasi, Karawang, and Cirebon.
- SOR III covers the provinces of Central Java, East Java, Bali, and Nusa Tenggara, with Areas consisting of Surabaya, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Semarang, as well as the islands of Kalimantan, Sulawesi, Papua, and Maluku Islands, with Areas consisting of Balikpapan, Kutai Kartanegara, Tarakan, Banggai, and Sorong

PGN Natural Gas Customer Segmentation

In order to improve customer loyalty, PGN segmented the market, which focuses on categorizing customers based on identification of their specific needs, flexibility of commercial and operational clauses, as well as service simplification and accuracy by providing products and services that provide added value to customers. PGN natural gas customers are divided into 4 (four) segments, namely:

a. Household Customers
   This includes housing complexes, low-cost apartments run by the Government and private sectors, Government official residence (including residence of the Indonesian National Defense Forces/ TNI and Indonesian National Police/ Polri), condominiums, apartments, and developers of residential areas and real estates.

b. Small-scale Customers
   This includes hospitals, community health centers, orphanages, places of worship, educational institutions run by the Government and private sectors, religious institutions, social institutions, Government and private company offices, hotels, restaurants, and stores/ malls/ supermarkets. The segmentation of Small-scale Customers refers to BPH Migas No. 4 of 2021 on the Second Amendment to BPH Migas Regulation No. 22/P/BPH MIGAS/VII/2011 on the Stipulation of Natural Gas Prices for Households and Small-scale Customers. Therefore, in the presentation, the number of customers and volume of natural gas trading remain on display. In the Consolidated Financial Statements, revenue from the Small-scale Customer segment is under the Commerce and Industry segment.

c. Fuel Gas (BBG) Transportation Customers
   This includes customers who use gas for gas refueling activities for motorized vehicles. In the presentation of trading volume, the Fuel Gas Transportation customers are under the Commerce and Industry customer segment.

d. Commerce and Industry Customers
   This includes commerce and industry customers, as well as power plants using natural gas as fuel and/or raw material in business activities in the service sector, commercial sector, and manufacturing sector, covering chemical, ceramic, base metal, metal fabrication, fertilizer, paper, glass, timber, cement, food, textile, lifting oil, refinery, power plants, and other manufacturing industries.

Hingga 31 Desember 2024, jumlah pelanggan PGN Group mencapai 816.645, dengan rincian 810.830 pelanggan rumah tangga, 2.539 pelanggan kecil, dan 3.276 pelanggan komersial dan industri.

Segmen Usaha Transmisi/Transportasi

Segmen usaha transmisi gas bumi/minyak bumi adalah kegiatan pengangkutan gas bumi/minyak bumi milik *shipper* dari titik terima di lapangan gas bumi/minyak bumi atau sumber lain ke titik serah *offtaker* melalui ruas pipa transmisi bertekanan tinggi/pipa minyak bumi. Pada segmen usaha ini, PGN mengoperasikan ruas pipa transmisi untuk menyalurkan gas bumi/minyak bumi milik *shipper* dan mendapatkan imbalan berupa *toll fee* yang besarannya ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Selain PGN, terdapat PT Transportasi Gas Indonesia, PT Kalimantan Jawa Gas, dan PT Pertamina Gas yang bertindak sebagai operator atas ruas pipa transmisi yang dimilikinya.

Pipa transmisi yang dimiliki PGN juga digunakan untuk mengangkut gas bumi milik sendiri guna menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi PGN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi kemudian terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009. Kegiatan pengangkutan gas bumi milik sendiri ini tidak untuk mencari keuntungan, sehingga PGN tidak mendapatkan imbalan berupa *toll fee*.

As of December 31, 2024, the number of PGN customers reached 816,645, consisting of 810,830 household customers, 2,539 small-scale customers, and 3,276 commercial and industrial customers.

Transmission/Transportation Business Segment

The natural gas/oil transmission business segment is the transportation of natural gas/oil owned by shippers from the receiving point in the natural gas/oil field or other sources to the offtaker handover point via a high-pressure transmission pipeline/oil pipeline. In this business segment, PGN operates transmission pipelines to distribute natural gas/oil owned by shippers and receives compensation in the form of a toll fee, in which the amount is set by the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). Apart from PGN, there are PT Transportasi Gas Indonesia, PT Kalimantan Jawa Gas, and PT Pertamina Gas, also act as operators for their transmission pipelines.

PGN's transmission pipeline is used to transport its own natural gas to support PGN's natural gas trading business activities, as regulated in Government Regulation No. 36 of 2004 on Oil and Gas Downstream Business Activities, as most recently amended by Government Regulation No. 30 of 2009. This self-owned natural gas transportation activity is not intended to seek profit. Hence, PGN does not receive compensation in the form of a toll fee.

Dalam penyajian informasi kinerja di segmen transmisi, kinerja PT Transportasi Gas Indonesia disajikan pada akun Bagian Laba dari Ventura Bersama.

Portofolio Infrastruktur Perusahaan

Sebagai Perusahaan gas nasional yang terdepan dalam pemanfaatan gas bumi, infrastruktur penyaluran gas bumi menjadi aset terpenting bagi Perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi bagi pelanggan. Di samping itu, portofolio infrastruktur perusahaan juga mencakup infrastruktur untuk kegiatan usaha transportasi minyak melalui pipa.

Hingga dengan 31 Desember 2024, total panjang pipa yang dikelola Perusahaan secara keseluruhan mencapai 33.254 km atau tumbuh 2,8% atau 910 km dibandingkan tahun 2023. Pipa yang dikelola tersebut terdiri dari: Pipa Distribusi sepanjang 7.669 km, Pipa Transmisi sepanjang 2.286 km, Pipa Pertagas 3.598 km, dan Pipa Jargas Pemerintah sepanjang 19.701 km.

In presenting performance information in the transmission segment, the performance of PT Transportasi Gas Indonesia is presented in the Profit Section of Joint Ventures account.

Corporate Infrastructure Portfolio

As a leading state-owned gas company in natural gas utilization, natural gas distribution infrastructure is the Company's most important asset to ensure energy availability for customers. Furthermore, the Company's infrastructure portfolio also includes infrastructure for oil transportation business via pipelines.

As of December 31, 2024, the Company's overall length of pipeline reached 33,254 km or a growth of 2.8% or 910 km compared to 2023. The managed pipes consist of: Distribution Pipes of 7,669 km, Transmission Pipes of 2,286 km, Pertagas Pipes of 3,598 km, and Government Jargas Pipes of 19,701 km.

Kinerja Segmen Usaha Niaga dan Transmisi Terkait Operasi/Produksi

Commercial and Transmission Business Segment Related to Operations/Production

Kinerja Segmen Usaha Niaga

Performance of Commercial Business Segment

Uraian Segmen Usaha Niaga Description of Commercial Business Segment	2024	2023	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
Volume Niaga (BBTUD) Trading Volume (BBTUD)	852	923	(71)	(8)
LNG Trading (BBTUD) LNG Trading (BBTUD)	59,7	-	59,7	-
Jumlah Pelanggan (Pelanggan) Total Subscribers (Customers)	816.645	830.935	(14.290)	(2)

Pada tahun 2024, PGN berhasil melaksanakan niaga gas kepada seluruh pelanggan hingga 852 BBTUD, menurun sebesar 71 BBTUD atau 8% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat mencapai 923 BBTUD. Sedangkan sampai akhir tahun 2024, PGN telah mengirimkan kargo LNG rata-rata sebesar 59,7 BBTUD.

In 2024, PGN successfully carried out up to 852 BBTUD of gas trading to all customers, decreasing by 71 BBTUD or 8% compared to 2023, which was recorded at 923 BBTUD. Meanwhile, as of the end of 2024, PGN had sent an average of 59.7 BBTUD in LNG cargo.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Niaga

Pencapaian volume niaga dipengaruhi oleh penurunan pasokan dari beberapa pemasok utama karena *natural decline* dan kegiatan maintenance di tahun 2024. Sementara pada tahun 2024, PGN telah mengirimkan 7 kargo LNG ke pelanggan di China.

Pencapaian kinerja niaga menunjukkan komitmen Subholding Gas untuk terus mendukung dan melaksanakan penugasan Kepmen ESDM No.91.K/2023, Kepmen No.255.K/2024, serta Kepmen No.135.K/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu untuk Industri dan Pembangkit Listrik. Di samping itu terkait Proyek Jargas/Gas Untuk Rumah Tangga, Kementerian ESDM telah menugaskan Pertamina dan PGN untuk mengembangkan

Explanation on Increase/Decrease of Trading Performance

The achievement of trading volume was influenced by a decline in supply from several major suppliers due to natural decline and maintenance activities in 2024. Meanwhile, in 2024, PGN has sent 7 LNG cargoes to customers in China.

The achievement of trading performance demonstrates the commitment of Gas Subholding to continue to support and carry out the assignment of Decrees of the Minister of MEMR No. 91.K/2023 and No. 135.K/2021 on Specific Natural Gas Prices for Industry and Power Generation. In addition, for the Gas Network Project/Gas for Households, the Ministry of MEMR has assigned Pertamina and PGN to develop gas networks

Jargas untuk kebutuhan bagi rumah tangga. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingginya impor LPG dan memiliki potensi volume +/- 10 BBTUD dengan target 4 juta Sambungan Rumah (SR) sampai dengan 2025.

for household needs. This project is expected to reduce LPG imports and has potential volume of +/-10 BBTUD, targeting 4 million household connections in 2025.

Kinerja Segmen Usaha Transmisi

Performance of Transmission Business Segment

Uraian Segmen Usaha Transmisi Description of Transmission Business Segment	2024	2023	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
Volume (MMSCFD)	1.543	1.458	85	6

Pada tahun 2024, volume gas bumi yang ditransportasikan melalui infrastruktur pipa transmisi gas bumi PGN adalah sebesar 1.543 MMSCFD (tidak termasuk TGI) sedangkan pada tahun 2023 sebesar 1.458 MMSCFD. Realisasi volume pada tahun ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan volume dari *Shipper*.

In 2024, the volume of natural gas transported through PGN's natural gas transmission pipeline infrastructure amounted to 1,543 MMSCFD (excluding TGI), compared to 1,458 MMSCFD in 2023. Realized volume this year increased by 6% compared to the previous year, in line with the increase in volume from Shippers.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Transmisi

Volume penyaluran transmisi pada tahun 2024 meningkat 5,82%. Kinerja transmisi gas bumi dikontribusikan dari PGN, PT Pertamina Gas dan PT Kalimantan Jawa Gas. Peningkatan volume transmisi dikontribusikan dari peningkatan volume dari shipper di Area Jawa Timur, kenaikan volume dari Jambaran Tiung Biru, dan kenaikan volume pengaliran untuk kebutuhan kilang Pertamina di Balikpapan.

Explanation on Increase/Decrease of Transmission Performance

Transmission distribution volume in 2024 increased by 5.82%. Natural gas transmission performance was contributed by PGN, PT Pertamina Gas, and PT Kalimantan Jawa Gas. The increase in transmission volume was contributed by an increase in volume from shippers in the East Java Area, an increase in volume from Jambaran Tiung Biru, and an increase in flow volume for the needs of the Pertamina refinery in Balikpapan.

VOLUME TRANSMISI BERDASARKAN OPERATOR

Transmission Volume Based on Operator

MMSCFD | MMSCFD

Uraian Description	2024	2023	Δ	
	Nilai Value	Nilai Value	Nilai Value	%
PGN	2	2	0	0
KJG	9	13	(4)	(30,77)
Pertagas	1.531	1.442	89	6,17
Jumlah | Total	**1.543**	**1.458**	**85**	**5,83**

Kinerja Segmen Usaha Niaga dan Transmisi Terkait Pendapatan/Profitabilitas

Performance of Commercial and Transmission Business Segment in terms of Revenue/Profitability

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Pendapatan Niaga Gas	2.519,8	2.573,1	(53,3)	-2,1%	Gas Commercial Revenue
LNG Trading	221,5	-	221,5	-	LNG Trading
Pendapatan Transmisi Gas	250,7	215,1	35,6	16,5%	Gas Transmission Revenue
Total Pendapatan Segmen	2.992,0	2.788,2	203,8	7,3%	Total Revenue Segment
Laba Segmen Niaga/Transmisi	471,4	301,0	170,4	56,6%	Commercial and Transmission Segment Profitability

Segmen usaha Niaga dan Transmisi adalah kontributor utama pendapatan PGN, dimana sekitar 79% pendapatan Perseroan dikontribusikan dari segmen ini. Pada tahun 2024, pendapatan Niaga dan Transmisi, setelah eliminasi, mencapai USD2,99 miliar yang meningkat 7,3% atau setara USD203,8 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD2,79 miliar.

Kontributor utama untuk pendapatan segmen Niaga dan Transmisi adalah dari aktivitas niaga gas, yang pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sejalan dengan penurunan volume niaga gas. Pendapatan niaga gas turun sekitar 2,1% atau USD53,3 juta dibanding periode 2023 menjadi sebesar USD2,52 miliar.

Sementara, kegiatan LNG *trading* dan transmisi gas menjadi penunjang untuk kenaikan pendapatan segmen niaga dan transmisi di tahun 2024. Pendapatan LNG *trading* di tahun 2024 mencapai sebesar USD221,1 juta. Sedangkan pendapatan transmisi gas tumbuh seiring dengan peningkatan volume di tahun 2024. Pendapatan transmisi gas bumi mencapai sebesar USD249,8 juta atau naik sebesar 16,1% atau sebesar USD34,7 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD215,1 juta.

Kontribusi pendapatan transmisi dari Afiliasi yaitu KJG dan TGI, penyajian pada Laporan Keuangan Konsolidasian dicatatkan dalam bentuk Pendapatan Niaga Gas untuk KJG, sementara untuk TGI dicatat sebagai bagian laba dari ventura bersama. Kegiatan Transmisi Gas Bumi yang dilakukan KJG merupakan transportasi gas dari SAKA ke PGN sehingga pendapatan transmisi gas KJG tersebut pada akhirnya menyatu dengan pendapatan Niaga Gas di PGN. Kontribusi Pendapatan Transmisi Gas dari TGI yang dicatatkan sebagai bagian laba dari ventura bersama pada tahun 2024 sebesar USD37,7 juta.

Profitabilitas segmen usaha Niaga dan Transmisi Gas Bumi di 2024 adalah sebesar USD471,4 juta atau mengalami kenaikan USD170,4 juta atau 56,6% dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD301,0 juta.

SEGMEN USAHA EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS

Segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah kegiatan usaha dan investasi PGN di bidang hulu minyak dan gas bumi. Segmen usaha ini meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha ini menjadi wujud upaya PGN untuk memperluas portofolio pada rantai bisnis energi melalui PT Saka Energi Indonesia (SEI).

SEI memperoleh pendapatan yang berasal dari *lifting* minyak bumi, gas bumi, LPG dan LNG. Sementara beban pokok yang diperlukan dalam kegiatan usaha ini antara lain biaya produksi dan *lifting*, biaya penyusutan aset minyak dan gas, serta alokasi biaya terkait eksplorasi dan eksploitasi.

The Trading and Transmission business segment is the main contributor to PGN's revenue, accounting for around 79% of the Company's total revenue. In 2024, Trading and Transmission revenue, after elimination, reached USD2.99 billion, an increase of 7.3% or USD203.8 million compared to 2023 which was recorded at USD2.79 billion.

The main contributor to the Trading and Transmission segment's revenue is from gas trading activities, which in 2024 experienced a slight decline as gas trading volume declined. Gas trading revenue fell by around 2.1% or USD53.3 million compared to the 2023 period to USD2.52 billion.

Meanwhile, LNG trading and gas transmission activities supported the increase in the trading and transmission segment's revenue in 2024. LNG trading revenue in 2024 reached USD 221.1 million. Meanwhile, gas transmission revenue grew along with the increase in volume in 2024. Natural gas transmission revenue reached USD249.8 million or increased by 16.1% or USD34.7 million compared to 2023, which was recorded at USD215.1 million.

The transmission revenue contribution from Affiliates, namely KJG and TGI, presented in the Consolidated Financial Statements is posted as Gas Trading Income for KJG, while for TGI is posted as part of profit from joint ventures. The Natural Gas Transmission activity carried out by KJG is gas transportation from SAKA to PGN, meaning that KJG's gas transmission income is ultimately integrated with PGN's Niaga Gas income. The contribution to Gas Transmission Revenue from TGI posted as part of profit from joint ventures in 2023 was USD37.7 million.

The profitability of the Natural Gas Commercial and Transmission business segment in 2023 was USD471.4 million or a decrease of USD170.4 million or 56.6% compared to USD301.0 million posted in 2023.

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION BUSINESS SEGMENT

The oil and gas exploration and production business segment is PGN's business and investment activities in the upstream oil and gas sector. This business segment includes exploration, exploitation, and business development activities in the oil and gas sector. This business activity is a manifestation of PGN's efforts to expand its portfolio in the energy business chain through PT Saka Energi Indonesia (SEI).

SEI generates income from lifting of oil, natural gas, LPG, and LNG. Meanwhile, the main expenses required in this business activity include costs of production and lifting, depreciation of oil and gas assets, as well as cost allocation related to exploration and exploitation.

Pada tahun 2024, SEI mengelola portofolio blok minyak dan gas bumi sebanyak 11 blok dengan status 6 blok telah berproduksi dan 5 blok dalam tahap eksplorasi, 10 blok berlokasi di Indonesia dan 1 blok di Amerika Serikat.

In 2024, SEI managed the portfolio of 11 oil and natural gas blocks with the status of 6 blocks in production and 5 blocks in the exploration stage, with 10 blocks located in Indonesia and 1 block in the United States of America.

PORTOFOLIO BLOK MINYAK DAN GAS SEI
SEI Oil and Gas Block Portfolio

No.	Blok Block	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Operator Operator	Status Status
1.	Pangkah PSC	100	SEI	Produksi | Production
2.	Fasken	36	Silverbow	Produksi | Production
3.	Ketapang PSC	19,4	Petronas	Produksi | Production
4.	Bangkanai PSC	30	Medco	Produksi | Production
5.	Muriah PSC	100	SEI	Produksi | Production
6.	Muara Bakau PSC	11,7	ENI	Produksi | Production
7.	West Bangkanai PSC	30	Medco	Eksplorasi | Exploration
8.	South Sesulu PSC	100	SEI	Eksplorasi | Exploration
9.	Pekawai PSC	100	SEI	Eksplorasi | Exploration
10.	West Yamdena PSC	100	SEI	Eksplorasi | Exploration
11.	Sangkar PSC	100	SEI	Eksplorasi | Exploration

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas terkait Operasi dan Produksi

Pada tahun 2024, SEI secara berkelanjutan melakukan aktivitas produksi dan eksplorasi atas portofolio blok minyak dan gas bumi yang dimiliki. Dari aktivitas ini, SEI menghasilkan beberapa komoditas yaitu minyak bumi, gas bumi, LPG, dan LNG. Volume *lifting* dari masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment regarding Operations and Production

In 2024, SEI continuously carried out production and exploration activities for its portfolio of oil and natural gas blocks. From this activity, SEI generated several commodities, namely petroleum, natural gas, LPG, and LNG. The following is the lifting volume of each product:

KINERJA *LIFTING* SEI
SEI Lifting Performance

Uraian Description	2024	2023	Δ	
			Nilai Value	%
Minyak Bumi (MMBBL) Oil (MMBBL)	2,6	2,7	(0,1)	(3,2)
Gas Bumi (TBTU) Natural Gas (TBTU)	21,5	27,6	(6,1)	(22,1)
LPG ('000 Ton) LPG ('000 Ton)	36,5	41,5	(5)	(12,1)
LNG (BSCF) LNG (BSCF)	3,7	6,8	(3,1)	(46,0)
Total *Lifting* (MMBOE) Total Lifting (MMBOE)	**7,4**	**9,2**	**(1,8)**	**(19,7)**

Pada tahun 2024, kinerja *lifting* SEI total mencapai 7,4 MMBOE, mengalami penurunan sebesar 1,7 MMBOE atau 18,5% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 9,2 MMBOE.

In 2024, SEI's lifting performance reached 7.4 MMBOE in total, a decrease of 1.7 MMBOE or 18.5% compared to 2023, which was recorded at 9.2 MMBOE.

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Penurunan kinerja operasi SEI terutama dipengaruhi penurunan produksi dari beberapa blok, seperti blok Pangkah, Ketapang, Fasken, Muara Bakau, dan Muriah, karena adanya *water handling,* tertundanya pengeboran karena keekonomian, dan penyesuaian volume produksi.

Explanation on Increase/Decrease of Oil and Gas Exploration and Production Business Performance

The decline in SEI's operational performance was mainly influenced by a decrease in production from several blocks, such as the Pangkah, Ketapang, Fasken, Muara Bakau, and Muriah blocks, due to water handling, drilling delays due to economics, and production volume adjustments.

Kinerja Segmen Usaha Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas terkait Pendapatan/Profitabilitas

Performance of Oil and Gas Exploration and Production Business Segment in terms of Revenue/ Profitability

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Crude Oil	206,4	216,1	(9,7)	-4,5%	Crude Oil
Gas Bumi	111,1	140,2	(29,0)	-20,7%	Natural Gas
LPG	22,3	25,3	(3,0)	-11,8%	LPG
LNG	29,8	71,5	(41,7)	-58,3%	LNG
Total Pendapatan Segmen	**369,5**	**453,0**	**(83,5)**	**-18,4%**	**Total Revenue Segment**
Total Laba Segmen	**53,2**	**70,7**	**(17,5)**	**-24,8%**	**Total Profit Segment**

Pada tahun 2024, pendapatan dari segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sebelum eliminasi, tercatat sebesar USD 369,5 juta, mengalami penurunan 18,4% atau setara dengan USD83,5 juta dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD453,1 juta. Penurunan ini disebabkan volume *lifting* minyak dan gas bumi yang turun dari tahun sebelumnya. Rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) sepanjang tahun 2024 di level USD78,3/BBL, sama dengan rata-rata di tahun 2023 yang sebesar USD78,4/BBL.

In 2024, revenue from the oil and gas exploration and production business segment, before elimination, was recorded at USD369.5 million, a decrease of 18.4% or equivalent to USD83.5 million compared to USD453.1 million recorded in 2023. The decrease was due to the volume of oil and gas lifting which declined from the previous year. the average price of Indonesian ICP throughout 2023 to the level of USD78.3/BBL, the same in average as USD78.4/BBL in 2023.

Penurunan pendapatan mempengaruhi profitabilitas segmen usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Pada tahun 2024, profitabilitas segmen ini mencapai USD53,2 juta, turun hingga 25% atau setara USD17,5 juta dibandingkan profitabilitas tahun sebelumnya yang mengalami keuntungan sebesar USD70,7 juta. Penurunan profitabilitas disebabkan dari penurunan volume *lifting*.

The decline in revenue affected the profitability of the oil and gas exploration and production business segment. In 2024, the profitability of this segment reached USD53.2 million, down by 25% or equivalent to USD17.5 million compared to the previous year's profitability of USD70.7 million. The decline in profitability was due to a decrease in lifting volume.

SEGMEN USAHA LAINNYA

Segmen usaha lainnya adalah kegiatan usaha lain yang langsung berkaitan dengan dan/atau mendukung usaha utama PGN sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku melalui Entitas Anak dan Afiliasi. Kegiatan usaha lainnya antara lain:

1. **Telekomunikasi**

   PT PGAS Telekomunikasi Nusantara atau PGNCOM adalah Entitas Anak PGN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan layanan Informasi dan Teknologi Komunikasi. Sebagai penyedia jaringan *fiber optic* (FO), PGNCOM telah memiliki pengalaman dan telah mengoperasikan jaringannya mulai dari Singapura dan Jakarta sampai kota-kota besar lainnya di bagian barat Indonesia dan menyediakan layanan *connectivity*, *managed service* dan *business solution*.

2. **Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Pipa**

   PT PGAS Solution atau PGAS Solution adalah Entitas Anak yang bergerak di bidang *supporting service* dengan konsentrasi pada 4 (empat) bidang usaha meliputi pengelolaan EPC (konstruksi pipa dan stasiun gas bumi), pengelolaan operasi dan pemeliharaan (O&M), *supply chain*, dan *engineering*.

OTHER BUSINESS SEGMENTS

Other business segments consist of other business activities that are directly related to and/or support PGN's main business in accordance with the prevailing laws and regulations through its Subsidiaries and Affiliates. Other business activities include:

1. **Telecommunication**

   PT PGAS Telekomunikasi Nusantara or PGNCOM is a Subsidiary of PGN engaging in the telecommunication services and Information and Communication Technology services. As a provider of fiber optic (FO) networks, PGNCOM has experience and has operated its networks, ranging from Singapore, Jakarta, to other major cities in western Indonesia as well as providing connectivity services, managed service, and business solutions.

2. **Construction, Operation, and Maintenance of Pipeline Network**

   PT PGAS Solution or PGAS Solution is a Subsidiary engaging in the supporting services with a concentration on 4 (four) business fields, including EPC management (natural gas pipeline and station construction), management of operation and maintenance (O&M), supply chain, and engineering.

3. ***Facility & Asset Management***
PT Permata Graha Nusantara atau PERMATA adalah Entitas Anak yang bergerak di 4 (empat) bidang usaha yaitu *facility management*, manajemen aset, *entrepreneurial real estate*, serta *design & build*. Produk layanannya meliputi properti dan jasa antara lain penyediaan fasilitas untuk mendukung operasional bisnis pelanggan seperti pengelolaan gedung, layanan perkantoran, layanan transportasi, penunjang migas, pendayagunaan dan optimalisasi aset, penyediaan produk properti komersial dan residensial, serta jasa lainnya.

4. **Transportasi Minyak, Pemrosesan Gas, dan Jasa Regasifikasi**
Dalam bisnis transportasi minyak, PT Pertamina Gas menerima *toll fee* atas penyaluran minyak bumi melalui infrastruktur pipa yang dimilikinya. Sedangkan untuk pemrosesan gas, PT Pertamina Gas memproduksi LPG yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan LPG di pasar domestik. PT Pertamina Gas juga melakukan bisnis Jasa Regasifikasi yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan jasa regasifikasi LNG utamanya kepada PLN. Jasa regasifikasi juga mencakup aktivitas pemanfaatan terminal LNG Lampung, yang dioperasikan PT PGN LNG Indonesia, untuk regasifikasi dan penyaluran hasil regasifikasi ke pembangkit listrik PLN.

3. **Facility & Asset Management**
PT Permata Graha Nusantara or PERMATA is a Subsidiary engaging in 4 (four) business fields, namely facility management, asset management, entrepreneurial real estate, and design & build. Its service products include properties and services to provide facilities to support customers' business operations, such as building management, office services, transportation services, oil and gas support, asset utilization and optimization, provision of commercial and residential property products, and other services.

4. **Oil Transportation, Gas Processing, and Regasification Services**
In the oil transportation business, PT Pertamina Gas receives a toll fee for distributing oil via its pipeline infrastructure. As for gas processing, PT Pertamina Gas produces LPG used to meet the domestic LPG demand. PT Pertamina Gas also carries out the Regasification Services business by providing its LNG regasification services primarily to PLN. Regasification services also include the utilization of the Lampung LNG terminal, which is operated by PT PGN LNG Indonesia, for regasification and distribution of regasification results to PLN power plants.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Produksi/Operasi

Segmen usaha lainnya terdiri dari sektor telekomunikasi, transportasi minyak, sewa pembiyaan, pemrosesan gas, jasa regasifikasi, *facility & asset management*, serta konstruksi dan O&M. Untuk segmen konstruksi dan O&M serta *facility & asset management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

Pada tahun 2024, kinerja segmen usaha lainnya turut memberikan kontribusi bagi bisnis Perusahaan yang dapat ditunjukan dalam tabel berikut:

Performance of Other Business Segment Related to Production/Operations

Other business segments consist of telecommunications, oil transportation, leasing, gas processing, regasification service, facility & asset management, construction, and O&M. As for the construction and O&M as well as facility & asset management segments, most of the performance was eliminated by the Holding Entity since most of its businesses were to support PGN's performance.

In 2024, the performance of other business segments also contributed to the Company's business, which can be shown in the following table:

SEGMEN USAHA LAINNYA
Other Business Segments

Uraian Description	2024	2023	Δ	
			Nilai Value	%
Telekomunikasi (MBPS) Telecommunication (MBPS)	27.619.301	20.167.945	7.451.356	37,0
Pemrosesan Gas (TPD)[1] Gas Processing (TPD)	108	106	2	1,9
Transportasi Minyak (Barel) Oil Transportation (Barrel)	58.989.840	56.857.837	2.132.003	3,7
Jasa Regasifikasi (BBTUD) Regasification Services (BBTUD)	146	158	(12)	(7,6)
Volume Terminal Usage Agreement (BBTUD) Volume Terminal Usage Agreement (BBTUD)	72	54	18	33,3

[1] Tanpa PT Perta Samtan Gas
Except PT Perta Samtan Gas

Penjelasan Peningkatan/Penurunan Kinerja Segmen Usaha Lainnya

Pada tahun 2024, kinerja sektor telekomunikasi mengalami peningkatan sebesar 37% dibandingkan 2023. Peningkatan ini didukung adanya *upgrade* kapasitas yang berdampak pada peningkatan kapasitas penjualan *bandwith* kepada pelanggan eksternal.

Pada sektor pemrosesan gas di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,9% dibandingkan tahun 2023 yang disebabkan dari kenaikan pasokan *feed* gas di LPG ENP Plant.

Sektor transportasi minyak pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2023, karena adanya 3 *shipper* baru.

Untuk sektor jasa regasifikasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,6% dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya permintaan regasifikasi di Perta Arun Gas.

Untuk segmen Konstruksi dan O&M serta *Facility & Asset Management* sebagian besar kinerja tereliminasi dengan Entitas Induk karena sebagian besar usahanya untuk mendukung kinerja PGN.

Explanation on Increase/Decrease of Other Business Segment Performance

In 2024, the performance of the telecommunications sector increased by 37% compared to 2023. This increase is supported by capacity upgrades, which have an impact on increasing bandwidth sales capacity to external customers.

In the gas processing sector, there was a increase of 1.9% in 2024 compared to 2023, due to a increase in feed gas supply at the LPG ENP Plant.

In 2024, the oil transportation sector experienced increase of 3.7% compared to 2023, due to the addition of 3 new shippers.

In 2024, the regasification services sector experienced a decline of 7.6% compared to 2023. The decline was mainly due to an increase in demand for regasification at Perta Arun Gas.

As for the Construction, O&M, and Facility & Asset Management sectors, most of their performance was eliminated by the Holding Entity since most of its businesses were to support PGN's performance.

Kinerja Segmen Usaha Lainnya Terkait Pendapatan/ Profitabilitas

Performance of Other Business Segments in terms of Revenue/Profitability

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Pemrosesan Gas	25,7	66,2	(40,6)	-61%	Gas Processing
Transportasi Minyak	154,2	161	(6,8)	-4%	Oil Transportation
Jasa Regasifikasi	172,4	127,6	44,4	35%	Regasification Services
Sewa Fiber Optic	26,1	22,4	3,5	17%	Fiber Optic Rental
Lain-lain	63,6	49,2	14,4	29%	Others
Total Pendapatan Segmen	**442,1**	**426,5**	**15,6**	**3,7%**	**Total Revenue Segment**
Total Laba Segmen	**123,4**	**243,8**	**(135,1)**	**-55%**	**Total Profit Segment**

Pada tahun 2024, pendapatan dari segmen usaha lainnya mencapai USD 441,2 juta atau meningkat 3,7%, dari USD426,5 juta pada tahun 2023. Kenaikan pendapatan dikontribusikan dari peningkatan kinerja jasa regasifikasi, sewa fiber optic dan segmen lainnya (konstruksi, O&M, dan Facility Mangement). Sedangkan segmen pemrosesasn gas dan transportasi minyak mengalami penurunan.

Adapun profitabilitas segmen usaha lainnya mengalami penurunan 49% atau USD120,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan beban pokok pendapatan untuk segmen-segmen tersebut di atas.

In 2024, revenue from other business segments reached USD441.2 million or an increase of 3.7%, from USD426.5 million in 2023. The increase in revenue was contributed by the increase in the performance of regasification services, fiber optic rentals, and other segments (construction, O&M, and Facility Management). Meanwhile, the gas processing and oil transportation segments experienceed a decline.

The profitability of other business segments decreased by 49% or USD120.4 million compared to the previous year due to an increase in cost of revenues for the abovementioned segments.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN

Description of Financial Performance

Uraian atas kinerja keuangan berikut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. PGN menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, serta telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited, dengan opini audit menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Secara umum, kinerja keuangan konsolidasian pada tahun 2024 mencatatkan kinerja yang tetap positif. Hal ini terlihat dari capaian laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD339,4 juta, sementara pada tahun sebelumnya mencapai sebesar USD278,1 juta. Dari sisi capaian posisi keuangan, Perusahaan berhasil mencatatkan total aset sebesar USD6,42 miliar turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar USD6,60 miliar. Perolehan kinerja keuangan tersebut dicapai seiring upaya-upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasi dan berdampak pada peningkatan pendapatan, yang juga diikuti dengan alokasi biaya yang optimal berhasil menjaga profitabilitas Perusahaan tetap positif.

The Description of financial performance analysis has been prepared based on the Consolidated Financial Report of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and Subsidiaries ended on December 31, 2024, and December 31, 2023. PGN prepared the Consolidated Financial Report in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia, and had been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of the Ernst & Young Global Limited network, with an audit opinion presents fairly in all material respects.

In general, consolidated financial performance in 2024 remained positive. This is reflected from the current year's profit of USD339.4 million attributable to the owners of the parent entity compared to USD278.1 million that was reached in the previous year. In terms of financial position achievements, the Company managed to record total assets of USD6.42 billion, a decrease of 2,8% compared to the previous year, which amounted to USD6.60 billion. The financial performance achievement was achieved along with the company's efforts to improve operational performance and generate more revenue, which was also associated by optimal cost allocation, which translated into a positive bottom line.

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Perusahaan memperoleh pendapatan berasal dari tiga segmen usaha yaitu niaga/transmisi gas, eksplorasi dan produksi minyak dan gas, dan usaha lainnya yang mencakup (1) pemrosesan gas, (2) transportasi minyak, (3) Jasa Jaringan dan (4) lainnya berupa: konstruksi dan operasi dan pemeliharaan. Pada tahun 2024, kontribusi masing-masing usaha terhadap pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

INCOME STATEMENT

Income

The Company's revenue comes from three business segments, namely gas trading/transmission, oil and gas exploration and production, and other businesses, which cover (1) gas processing, (2) oil transportation, (3) Network Services and (4) others in the form of: construction and operations and maintenance. In 2024, the contribution of each business to income was as given below:

PENDAPATAN
Income

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Niaga gas	2.519,8	2.573,1	(53,3)	97,9%	Gas Commercial
LNG *trading*	221,5	-	221,5	~	LNG trading
Transmisi gas	250,7	215,1	35,6	116,5%	Gas Transmission
Minyak dan gas	354,5	431,6	(77,1)	82,1%	Oil and Gas
Lainnya:					Others:
Pemrosesan gas	25,7	66,2	(40,5)	38,9%	Processing Gas
Transportasi minyak	154,2	161,0	(6,8)	95,8%	Oil Transportation
Pendapatan jasa regasifikasi	172,4	127,6	44,8	135,1%	Regasification
Jasa jaringan	26,1	22,4	3,7	116,7%	Fiber Optic Rental
Lainnya	63,6	49,2	14,4	129,3%	Others
Total pendapatan usaha	**3.788,6**	**3.646,3**	**142,3**	**103,9%**	**Total Revenue**
Total beban pokok pendapatan	**(3.031,2)**	**(2.912,7)**	**(118,5)**	**104,1%**	**Total Cost of Revenue**
Total laba kotor	**757,4**	**733,6**	**23,8**	**103,2%**	**Total Gross Profit**

Pada tahun 2024, PGN membukukan pendapatan sebesar USD3,79 miliar, naik 3,9% dibanding 2023, yang tercatat sebesar USD3,65 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan transmisi gas, jasa regasifikasi, jasa jaringan dan pendapatan usaha lainnya, serta pendapatan dari LNG *trading*. Tercatat pendapatan Transmisi Gas dan LNG Trading pada 2024 masing-masing sebesar USD250,7 juta dan USD221,5 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, pendapatan transmisi gas naik 16,5% sedangkan LNG *trading* merupakan segmen pendapatan baru di tahun 2024.Pendapatan segmen usaha niaga gas yang memberikan kontribusi sebesar 72,1% terhadap pendapatan konsolidasi, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat penurunan volume. Pendapatan niaga gas sampai Desember 2024 mencapai USD2,30 miliar atau turun 2% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan pendapatan, namun manajemen dapat mengantisipasi penurunan tersebut dengan mengoptimalkan operasional perusahaan sehingga secara total konsolidasi pendapatan usaha meningkat dari tahun sebelumnya.

In 2024, PGN posted USD3.79 billion in revenue, an increase of 3.9% compared to 2023, which was recorded at USD3.65 billion. The increase in revenue was due to an increase in gas transmission revenue, regasification services, network services and other business revenues, as well as revenue from LNG trading. The revenue of Gas Transmission and LNG trading in 2024 was posted at USD250.7 million and USD221.5 million, respectively. Compared to 2023, gas transmission revenue increased by 16.5%, while LNG trading was a new revenue segment in 2024. Revenue from the gas trading business segment, which contributed 72.1% to consolidated revenue, decreased compared to the previous year's corresponding period due to a decrease in volume. Gas trading revenue until December 2024 reached USD2.30 billion or decreased by 2% compared with the year earlier. While there was a decrease in revenue, management was able to anticipate it by optimizing the company's operations so that the total consolidated business revenue increased from the previous year.

Beban Pokok Pendapatan

Realisasi beban pokok pendapatan tahun 2024 mencapai USD3,0 miliar, mengalami peningkatan 4,1% atau USD118,5 juta, dari tahun 2023 yang tercatat sebesar USD2,91 miliar. Peningkatan beban pokok pendapatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan.

Cost of Revenue

The realization of cost of revenue in 2024 reached USD3.0 billion, an increase of 4.1% or USD118.5 million, from 2023 which was recorded at USD2.91 billion. The increase in cost of revenue is in line with the increase in revenue.

BEBAN POKOK PENDAPATAN
Cost of Revenue

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Pembelian gas bumi	1.819,6	1.914,8	(95,2)	-5%	Purchase of Natural Gas
LNG *trading*	208,7	-	208,7	0%	LNG trading
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi	305,7	366,7	-61,0	-17%	Oil and Gas Operations
LNG	64,8	63,6	1,2	2%	LNG
Pemrosesan gas	25,7	27,7	-2,0	-7%	Gas Processing
Sewa dan jasa lainnya	43,3	28,1	15,2	54%	Rent & Other Services
Beban niaga & infrastruktur	563,5	511,8	51,7	10%	Direct Cost
Total	**3.031,2**	**2.912,7**	**118,5**	**4%**	**Total**

Laba Bruto

Laba bruto PGN tahun 2024 naik 3,2% menjadi USD757,4 juta, dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD733,6 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya Pendapatan LNG *trading* USD 221,5 juta dimana tahun 2023 belum ada pendapatan tersebut.

Gross Profit

PGN's gross profit in 2024 increase by 3.2% to USD757.4 million compared to 2023, which was recorded at USD733.6 million. This increase was mainly due to LNG trading Revenue of USD221.5 million where in 2023 there was no such revenue.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi naik USD4,3 juta atau 2,2 % menjadi USD201,2 juta di tahun 2024, dari USD196,9 juta di 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban Imbalan Pascakerja dan Jangka Panjang lainnya, Jasa Umum, dan Beban Perbaikan dan Pemeliharaan.

General and Administrative Expenses

General and administrative expenses increased by USD4.3 million or 2.2% to USD201.2 million in 2024, from USD196.9 million in 2023. This increase was primarily due to increases in Post-Employment and Other Long-Term Benefits, General Services, and Repair and Maintenance Expenses.

Pendapatan/(Beban) Lain-Lain - net

Pendapatan/(Beban) Lain-lain - net meningkat (USD 39,2 juta) terutama disebabkan adanya kenaikan cadangan penurunan nilai piutang sebesar USD 36,5 juta terutama atas putusan arbitrase KJG.

Other Income/(Expenses) - net

Other Income/(Expenses) - net increased (USD 39.2 million) mainly due to an increase in the allowance for impairment of receivables in the amount of USD 36.5 million mainly due to the KJG arbitration decision.

Laba Operasi

Pada tahun 2024, PGN mengalami penurunan laba operasi sebesar 3,6% menjadi USD522,7 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD542,4 juta. Penurunan ini terutama disebabkan kenaikan Beban Lain-lain.

Operating Profit

In 2024, PGN experienced a decrease of 3.6% in operating profit to USD522.7 million compared to 2023, which was posted at USD542.4 million. This decrease was mainly due to an increase in Other Expenses.

Pendapatan Keuangan

Pada tahun 2024, pendapatan keuangan mengalami kenaikan sebesar 24,2% menjadi sebesar USD60,2 juta dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD48,5 juta. Kenaikan pendapatan keuangan disebabkan keberhasilan manajemen dalam memanfaatan kas & setara kas yang dikelola melalui giro dan deposito untuk mengoptimalkan pendapatan keuangan.

Financial Income

In 2024, financial income increased by 24.2% to USD60.2 million compared to 2023, which was posted at USD48.5 million. The increase in financial income was due to management's success in utilizing cash & cash equivalents, which was managed through current accounts and deposits to optimize financial income.

Beban Keuangan

Beban Keuangan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 22,8 % menjadi sebesar USD75,3 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD97,6 juta. Penurunan beban keuangan terutama disebabkan *liability management* yang dilaksanakan dengan melakukan *buyback* obligasi PGN dan SAKA.

Financial Expenses

In 2024, financial income decreased by 22.8% to USD75.3 million compared to 2023, which was recorded at USD97.6 million. The decrease in financial income was due to liability management, which was implemented by buying back PGN and SAKA bonds.

Laba/(Rugi) Selisih Kurs

Pada tahun 2024, terdapat laba kurs-neto sebesar USD11,1 juta, naik 51,3 % atau sebesar USD3,8 juta jika dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD7,4 juta. Kenaikan laba kurs neto ini terutama disebabkan adanya pelemahan mata uang JPY terhadap USD (2024 : 157,84; 2023 : 140,93), sehingga menimbulkan laba kurs translasi atas pinjaman jangka panjang PGN dalam mata uang JPY.

Profit/(Loss) Exchange Difference

In 2024, there was a net foreign exchange gain of USD11.1 million, an increase of 51.3% or USD3.8 million compared to 2023, which was posted at USD7.4 million. The increase in net foreign exchange gain was mainly due to the weakening of the JPY against the USD (2024: 157.84; 2023: 140.93), resulting in a translation foreign exchange gain on PGN's long-term loans in JPY.

Bagian Laba Ventura Bersama

Bagian laba dari ventura bersama terdiri dari bagian laba TGI, NR, PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD7,4 juta menjadi sebesar USD72,2 juta dari tahun 2023 sebesar USD64,8 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan laba, PT Transportasi Gas Indonesia dan PT Nusantara Regas.

Joint Venture Profit Share

The profit share from joint ventures consists of the profit shares from TGI, NR, PT Permata Karya Jasa, PT Perta-Samtan Gas, and PT Perta Daya Gas. In 2024, the profit share from associated entities and joint ventures increased by USD7.4 million to USD 72.2 million, compared to USD 64.8 million in 2023. This increase was primarily driven by the higher profits of PT Transportasi Gas Indonesia and PT Nusantara Regas.

Provisi atas Kontrak yang Memberatkan

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Jika Grup terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

Provision for Onerous Contracts

An onerous contract is a contract that may incur unavoidable costs in fulfilling the contractual obligations, where such costs exceed the expected economic benefits to be received. The unavoidable costs in a contract reflect the lowest net cost of exiting the contract, which is the lower amount between the cost of fulfilling the contract and the penalty or compensation payable if the entity does not fulfil the contract. If the Group is bound by an onerous contract, the present obligation under the contract is measured and recognized as a provision.

Pada tahun 2022 Perusahaan menandatangani komitmen kontrak pembelian LNG jangka Panjang dengan Petronas LNG Ltd (jangka waktu 2024-2025) dan PT Kayan LNG Nusantara (jangka waktu 2023-2028) serta komitmen kontrak penjualan LNG jangka Panjang dengan China National Technical IMP.&EXP. CORP (jangka waktu 2024-2025) dan Gunvor Singapore Pte Ltd (jangka waktu 2024-2027).

In 2022, the Company signed long-term LNG purchase commitment contracts with Petronas LNG Ltd (for the period 2024–2025) and PT Kayan LNG Nusantara (for the period 2023–2028), as well as long-term LNG sales commitment contracts with China National Technical IMP.&EXP.CORP (for the period 2024–2025) and Gunvor Singapore Pte Ltd (for the period 2024–2027).

Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian dan penjualan tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam PSAK 237 (dahulu PSAK 57) mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi untuk kontrak memberatkan dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain harga, pembelian dan penjualan per tanggal pelaporan. Suatu estimasi nilai manfaat ekonomis telah dihitung dan dibandingkan dengan estimasi ganti rugi apabila perusahaan tidak menjalankan komitmen sesuai kontrak.

Management has estimated the economic benefit value for all these purchase and sales commitment contracts in accordance with the criteria set out in PSAK 237 (formerly PSAK 57) on provisions, contingent liabilities, and contingent assets for onerous contracts. This estimation considers several parameters, including prices, purchases, and sales as of the reporting date. The estimated economic benefit value has been calculated and compared with the estimated compensation if the Company does not fulfil its contractual commitments.

Untuk komitmen kontrak penjualan LNG internasional jangka panjang, Perusahaan mengakui nilai yang lebih rendah antara estimasi nilai manfaat ekonomis dibandingkan dengan estimasi ganti rugi sebagai provisi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang memberatkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD72.027.462, dan dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD3.486.935.

For long-term international LNG sales commitment contracts, the Company recognizes the lower amount between the estimated economic benefit value and the estimated compensation as a provision, which is measured and presented as a provision for onerous LNG contracts in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, amounting to USD 72,027,462, and in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2024, amounting to USD3,486,935.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2024, PGN mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar USD578,3 juta naik sekitar 10 % atau sebesar USD54,4 juta dibandingkan 2023 yang tercatat laba sebesar USD523,9 juta. Kenaikan ini disebabkan kenaikan Bagian Laba ventura bersama, Pendapatan Keuangan, dan Laba Selisih Kurs. Selain itu terdapat penurunan Beban Keuangan, dan Provisi atas Kontrak yang Memberatkan. Pada tahun 2024 juga tidak terdapat provisi sengketa pajak.

Profit/(Loss) Before Income Tax

In 2024, PGN recorded USD 578.3 million in profit before income tax, an increase of around 10% or USD54.4 million compared to 2023, when the profit was posted at USD 523.9 million. This increase was driven by the rise in Profit Share from Joint Ventures, Financial Income, and Foreign Exchange Gains. Additionally, there was a decrease in Financial Expenses and Provisions for Onerous Contracts. Furthermore, in 2024, no provisions for tax disputes were recorded.

Beban Pajak Penghasilan

Pada tahun 2024, beban pajak-neto turun 5,9 % menjadi USD138,6 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD147,3 juta. Pajak kini yang diperhitungkan pada 2024 mengalami kenaikan sebesar USD21,7 juta menjadi USD111,2 juta dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD89,5 juta. Kenaikan tersebut searah dengan peningkatan laba sebelum pajak. Beban pajak tangguhan sendiri mengalami penurunan menjadi USD27,4 juta di mana tahun sebelumnya sebesar USD57,7 juta. Penurunan ini disebabkan karena Impairment Piutang Pokok SHL KJG.

Income Tax Expense

In 2024, net tax expenses decreased by 5.9% to USD 138.6 million, compared to USD 147.3 million in 2023. The current tax expense recognized in 2024 increased by USD 21.7 million to USD 111.2 million, compared to USD 89.5 million in 2023. This increase was in line with the increase in profit before tax. Meanwhile, deferred tax expenses decreased to USD 27.4 million from USD 57.7 million in the previous year. This decline was primarily due to the impairment of SHL KJG Principal Receivables.

Adapun rincian beban pajak penghasilan berdasarkan wilayah operasional di berbagai negara adalah sebagai berikut:

The following are details of income tax expenses based on operational areas in various countries:

BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Income Tax Expense

Juta USD | Million USD

Negara Country	Bidang Usaha Line of Business	Laba Sebelum Pajak Earning Before Tax	Tarif Pajak Negara Country Tax Rate	Pajak Kini Current Tax	Pajak Tangguhan Deferred Tax
Indonesia	Transportasi dan Distribusi Gas Gas Transportation and Distribution	569.753.893	22%	144.592.686	3.487.028
United States	Eksplorasi Minyak dan Gas Oil and Gas Exploration	-	29%	-	-
Singapore	Layanan Telekomunikasi Telecommunication Services	521.177	17%	69.700	16.100

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain

1. Pada tahun 2024, dari perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak, PGN mengalami kerugian sebesar USD0,02 juta setelah sebelumnya pada 2023 juga mencatat kerugian sebesar USD0,09 juta.
2. Pada tahun 2024, rugi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar USD7,0 juta, sedangkan tahun 2023 mencatatkan laba selisih kurs sebesar USD17,5 juta.

Other Comprehensive Income/(Loss)

1. In 2024, due to changes in the fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, after tax, PGN recorded a loss of USD0.02 million, following a loss of USD0.09 million in 2023.
2. In 2024, foreign exchange losses from financial statement translation amounted to USD 7.0 million, whereas in 2023, a foreign exchange gain of USD 17.5 million was recorded.

3. Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan pendapatan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja setelah pajak aktuaria neto adalah sebesar USD17,3 juta naik USD19,7 juta dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan beban sebesar USD2,5 juta. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja setelah pajak merupakan hasil perhitungan aktuaris atas imbalan kerja Perusahaan di mana setiap akhir periode terdapat penyesuaian variabel/asumsi sesuai dengan kondisi pada saat tersebut.

3. In 2024, the Company recorded income from the remeasurement of post-employment benefit liabilities after net actuarial tax amounting to USD17.3 million, an increase of USD19.7 million compared to 2023, which recorded an expense of USD2.5 million. The remeasurement of post-employment benefit liabilities after tax is based on actuarial calculations of the Company's employee benefits, where adjustments to variables/assumptions are made at the end of each period in accordance with prevailing conditions at that time.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2024, PGN mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD339,4 juta atau naik 22,1 % dibandingkan 2023 sebesar USD278,1 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penuruan laba sebelum pajak dan peningkatan beban pajak tangguhan.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2024, PGN posted USD339.4 million in profit for the year attributable to the owners of the parent entity, an increase of 22.1% compared to USD278.1 million in 2023. The decrease was primarily driven by the decrease in profit before tax and an increase in deferred tax expenses.

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non- Pengendali

Pada tahun 2024, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD100,2 juta sedangkan di 2023 laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar USD98,5 juta.

Profit/(Loss) for the Year Attributable to Non-Controlling Interests

In 2024, the profit for the year attributable to non-controlling interests amounted to USD100.2 million, compared to USD 98.5 million in profit for the year attributable to non-controlling interests in 2023.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Pada tahun 2024, PGN menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD349,7 juta, naik 19,3% dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD293,0 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Entity

In 2024, PGN generated a total comprehensive income for the year attributable to the owners of the parent entity amounting to USD349.7 million, an increase of 19.3% compared to USD293.0 million in 2023.

Penghasilan/(Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali di 2024 adalah sebesar USD100,2 juta dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD98,5 juta.

Comprehensive Income/(Loss) Attributable to Non-Controlling Interests

Total comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests in 2024 amounted to USD100.2 million, compared to USD98.5 million in 2023.

PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NON-PENGENDALI
Comprehensive Income/(Loss) Attributable to NonControlling Interests

Uraian	2024	2023	Δ%	Description
Marjin Laba Bersih	9,0	7,6	118%	Net Profit Margin
Imbal Hasil atas Aset	5,3	4,2	126%	Return on Asset
Imbal Hasil atas Ekuitas	9,2	7,9	117%	Return on Equity

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Total Aset

Pada tahun 2024, PGN mencatatkan total aset tercatat sebesar USD6,42 miliar. Nilai total aset ini turun 2,8% dibandingkan 2023 sebesar USD6,60 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, penurunan piutang usaha, depresiasi aset tetap, amortiasi aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortiasi properti minyak dan gas.

Total Assets

In 2024, PGN recorded USD6.42 billion in total assets. The value of total assets decreased by 2.8% compared to USD6.60 billion in 2023. This decline was primarily due to a decrease in cash and cash equivalents, a reduction in trade receivables, depreciation of fixed assets, amortization of right-of-use assets, as well as depreciation, depletion, and amortization of oil and gas properties.

Aset Lancar

Aset lancar PGN pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,4% menjadi USD1,98 miliar jika dibandingkan 2023 yang sebesar USD1,89 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan kas & setara kas. Kenaikan kas & setara kas ini terutama disebabkan arus kas pendanaan yang digunakan pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 PGN melakukan pelunasan seluruh obligasi.

Current Assets

PGN's current assets in 2024 increased by 4.4% to USD1.98 billion, compared to USD1.89 billion in 2023. This increase was primarily driven by an increase in cash and cash equivalents. The growth in cash and cash equivalents was mainly due to lower financing cash outflows in 2024 compared to 2023 when PGN buyback all of its outstanding bonds. In 2024 PGN will pay off all bonds.

ASET LANCAR
Current Assets

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Kas dan setara kas	1.383,2	1.244,7	138,5	111,1%	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya	21,2	14,4	6,8	147,4%	Restricted cash
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	23,2	(23,2)	0,0%	Financial assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Investasi jangka pendek	0,6			~	Short-term Investment
Piutang usaha	385,8	448,2	(62,4)	86,1%	Trade receivables
Piutang sewa pembiayaan - pihak berelasi	6,5	0	6,5	~	Finance lease receivables - related parties
Piutang lain-lain	27,8	37,7	(9,9)	73,7%	Other receivables
Persediaan	81,9	71	10,9	115,4%	Inventories
Taksiran nilai pajak	34,2	16	18,2	213,6%	Estimated claim tax for refund
Uang muka	18,5	11	7,5	168,6%	Current maturities of advance
Beban dibayar di muka	27,2	26,3	0,9	103,4%	Prepaid expenses
Total	**1.987,0**	**1.892,40**	**94,6**	**105,0%**	**Total**

Aset Tidak Lancar

Pada tahun 2024, Aset tidak lancar turun sebesar 5,8% menjadi USD4,43 miliar jika dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD4,71 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap, aset hak guna, dan depresiasi, deplesi dan amortiasi properti minyak dan gas.

Non-Current Assets

In 2024, non-current assets decreased by 5.8% to USD4.43 billion, compared to USD4.71 billion in 2023. This decline was primarily due to the depreciation of fixed assets, right-of-use assets, as well as the depreciation, depletion, and amortization of oil and gas properties.

ASET TIDAK LANCAR
Non-Current Assets

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Kas yang dibatasi penggunaannya	148,4	128,8	19,6	115,2%	Restricted cash
Piutang usaha-pihak ketiga	-	45,8	(45,8)	0,0%	Trade receivables
Piutang sewa pembiayaan-pihak berelasi	77,0	0	77,0	~	Finance lease receivable - related party
Piutang lain-lain	46,1	63,9	(17,8)	72,2%	Other long-term receivables
Uang muka, bagian tidak lancar	37,5	35	2,5	107,1%	Advances - net of current maturities
Beban Dibayar di Muka, Bagian Tidak Lancar	30,3	37,4	(7,1)	81,1%	Prepaid expenses, non-current portion
Penyertaan saham	312,0	307,2	4,8	101,5%	Investment in shares of stock
Aset tetap	2.509,3	2.621,20	(111,9)	95,7%	Fixed assets
Aset hak guna	371,3	413,2	(41,9)	89,9%	Right-of-use asset
Aset eksplorasi dan evaluasi	65,2	11,1	54,1	587,7%	Exploration and evaluation assets
Properti minyak dan gas	695,8	870,1	(174,3)	80,0%	Oil and gas properties
Aset tak berwujud - neto	2,2	2,5	(0,3)	89,0%	Goodwill and other intangible assets
Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak	30,8	51,5	(20,7)	59,9%	Estimated claim tax for refund
Aset pajak tangguhan	95,8	111,4	(15,6)	86,0%	Deferred tax assets
Lain-lain	7,2	7,7	(0,5)	93,4%	Others
Total	**4.429,0**	**4.706,8**	**(277,8)**	**94,1%**	**Total**

Liabilitas

Pada tahun 2024, PGN membukukan total liabilitas sebesar USD2,74 miliar. Nilai total liabilitas ini turun 10% jika dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD3,06 miliar. Penurunan total liabilitas sebesar USD314,4 juta terutama disebabkan pelunasan seluruh utang obligasi.

Liabilities

In 2024, PGN recorded USD2.74 billion in total liabilities, a decrease of 10% compared to USD3.06 billion in 2023. The USD 314.4 million decline in total liabilities was primarily due to the completion of the settlement of all outstanding bond.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2024, liabilitas jangka pendek turun 23% menjadi USD1,13 miliar jika dibandingkan tahun 2023 sebesar USD1,46 milyar. Penurunan ini terutama disebabkan utang obligasi yang telah seluruhnya dilakukan pelunasan.

Short-term Liabilities

In 2024, short-term liabilities decreased by 23% to USD1.13 billion, compared to USD1.46 billion in 2023. This decline was primarily due to the full settlement of outstanding bond.

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Short-term Liabilities

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Utang Usaha	237,4	245,2	(7,8)	96,8%	Trade payables
Utang Lain-Lain	98,4	117,3	(18,9)	83,8%	Other payables
Utang bank jangka pendek	100,0	2,6	97,4	3846,2%	Accrued liabilities
Utang obligasi	-	552,6	(552,6)	0,0%	Short-term bank loans
Liabilitas yang masih harus dibayar jangka pendek	425,6	352,7	72,9	120,7%	Short-term portion of long-term bank loans
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	72,4	39,7	32,7	182,5%	Short-term portion of shareholder loan
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	41,4	34,8	6,6	118,9%	Short-term portion of lease liabilities
Utang pajak jangka pendek	41,5	33,6	7,9	123,7%	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	87,0	75,9	11,1	114,6%	Short-term employee benefits liabilities
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	30,8	8	22,8	385,1%	Short-term portion of deferred revenues
Total	**1.134,5**	**1.462,40**	**(327,9)**	**77,6%**	**Total**

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang naik di tahun 2024 sekitar 1% menjadi USD1,61 miliar dibandingkan 2023 sebesar USD1,59 miliar. Kenaikan USD22 juta tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan pinjaman bank jangka panjang. Kenaikan Pinjaman Bank jangka panjang ini terutama digunakan sebagian untuk pelunasan obligasi.

Long Term Liabilities

In 2024, long-term liabilities increased by 1% to USD1.61 billion, compared to USD1.59 billion in 2023. The USD22 million increase was primarily due to an increase in long-term bank loans, which were partially used to fund the bond settlement.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Long Term Liabilities

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Pinjaman bank jangka panjang	703,7	520	183,7	135,3%	Non-current bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	353,9	395,9	(42,0)	89,4%	Non-current lease liabilities
Utang pajak jangka panjang	5,5	57,3	(51,8)	9,7%	Non-current taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	123,1	116,4	6,7	105,7%	Deferred tax liabilities
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka Panjang	72,0	68,5	3,5	105,1%	Accrued liabilities-Non-current
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	146,1	146,7	(0,6)	99,6%	Asset abandonment and site restoration obligations
Liabilitas imbalan pascakerja	107,5	136,1	(28,6)	79,0%	Post-employment benefit obligation
Pendapatan ditangguhkan	98,1	155,5	(57,4)	63,1%	Deferred revenues
Total	**1.609,9**	**1.596,4**	**13,5**	**100,8%**	**Total**

Ekuitas

Pada tahun 2024, ekuitas Perusahaan mengalami kenaikan 3,7% menjadi USD3,67 miliar jika dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar USD3,54 miliar. Hal ini disebabkan pada 2024 Perusahaan kembali berhasil mencatatkan peningkatan perolehan laba bersih.

Equity

In 2024, the Company's equity increased by 3.7% to USD3.67 billion, compared to USD3.54 billion in 2023. This increase was driven by the Company's continued success in recording higher net profit in 2024.

EKUITAS
Equity

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	344,0	344,0	0,0	100,0%	Equity attributable to owner of the Parent Entity
Tambahan modal disetor	(467,6)	(467,6)	0,0	100,0%	Other paid-in capital
Saldo Laba					Retained earnings
Dicadangkan	2.647,8	2.592,2	55,6	102,1%	Appropriated
Tidak dicadangkan	339,4	278,1	61,3	122,1%	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	(37,6)	(47,9)	10,3	78,6%	Other components of equity
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.826,0	2.698,9	127,1	104,7%	Total Equity attributable to owner of the Parent Entity
Kepentingan nonpengendali	845,5	841,5	4,0	100,5%	Non-controlling interests
Total	**3.671,5**	**3.540,4**	**131,1**	**103,7%**	**Total**

LAPORAN ARUS KAS

Pada tahun 2024, posisi kas dan setara kas naik sebesar 13% menjadi USD1,38 miliar jika dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD1,24 miliar. Kenaikan saldo kas dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penurunan penggunaan arus kas untuk aktivitas investasi, dan adanya penerimaan pinjaman jangka panjang di tahun 2024.

CASH FLOW STATEMENT

In 2024, cash and cash equivalents increased by 13% to USD1.38 billion, compared to USD1.24 billion in 2023. The increase in cash balance was driven by higher cash receipts from customers, reduced cash outflows for investment activities, and the receipt of long-term loans in 2024.

LAPORAN ARUS KAS
Cash Flow Statement

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Arus kas dari aktivitas Operasi	785,2	723,7	61,5	109%	Cash Flow from Operating Activities
Arus kas dari aktivitas Investasi	(48,5)	(57,7)	9,2	84%	Cash Flows from Investing Activities
Arus kas dari aktivitas Pendanaan	(568,1)	(878,2)	310,1	65%	Cash Flows from Financing Activities
Pengaruh perubahan Kurs Neto dari Kas dan Setara Kas	(30,2)	9,3	(39,5)	-324%	Net Effects of Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents
Kenaikan/(Penurunan) - neto Kas dan Setara Kas	138,5	(202,9)	341,4	-68%	Net Increase/(Decrease) Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.244,7	1.447,7	(203,0)	86%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	1.383,2	1.244,7	138,5	111%	Cash and Cash Equivalents at End of Year

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2024, arus kas dari aktivitas operasi naik sebesar 9% menjadi USD785,2 juta jika dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar USD723,7 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan penerimaan dari pelanggan, penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran pajak, dan penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran beban keuangan.

Cash Flow from Operating Activities

In 2024, cash flows from operating activities increased by 9% to USD785.2 million, compared to USD723.7 million in 2023. This increase was primarily driven by higher customer receipts, reduced cash outflows for tax payments, and lower cash outflows for financial expense payments.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2024, arus kas dari aktivitas investasi sebesar negatif USD48,5 juta, turun 16% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar negatif USD 57,7 juta. Penurunan penggunaan kas untuk aktivitas Investasi ini terutama disebabkan terdapat penerimaan pelepasan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan penurunan pengeluaran kas untuk penambahan aset eksplorasi dan evaluasi.

Cash Flows from Investing Activities

In 2024, cash flows from investing activities amounted to negative USD48.5 million, a 16% decrease compared to negative USD57.7 million in 2023. The reduction in cash outflows for investing activities was primarily due to proceeds from the disposal of financial assets at fair value through other comprehensive income and lower cash outflows for the addition of exploration and evaluation assets.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024 tercatat negatif USD568,1 juta, atau turun USD310,1 juta dari tahun 2023 sebesar USD878,2 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penerimaan pinjaman bank, serta *buyback* obligasi yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

Cash Flow from Financing Activities

Cash outflow used for financing activities in 2024 was recorded at negative USD568.1 million, or a decrease of USD310,1 million from USD878.2 million recorded in 2023. This was mainly due to the receipt of bank loans, as well as smaller bond buybacks compared to the previous year.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

REPORT OF CHANGES IN EQUITY

The consolidated statement of changes in equity for the year ended December 31, 2024 is as follows:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Report of Changes in Equity

Uraian Description	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
			Saldo Laba Profit Balance	
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Share Capital	Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	Dicadangkan Reserved	Tidak Dicadangkan Not Reserved
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023 **Balance as of January 1, 2023**	344,0	(467,6)	2.494,3	326,2
Laba tahun berjalan Profit for the Year				278,1
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year				
Pembayaran dividen Dividend payment				(228,4)
Penyisihan cadangan umum Provision for general reserves			97,9	(97,9)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 **Balance as of December 31, 2023**	344,0	(467,6)	2.592,2	278,1
Laba tahun berjalan Profit for the Year				339,4
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year				
Pembayaran dividen Dividend payment				(222,5)
Penyisihan cadangan umum Provision for general reserves			55,6	(55,6)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024 **Balance as of December 31, 2024**	344,0	(467,6)	2.647,8	339,4

Equity Attributable to Owners of the Parent Entity						
	Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components					
	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan Entitas Anak Difference in Translation of Financial Statements of Subsidiaries	**Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja, setelah Pajak** Remeasurement of Post-employment Benefit Liabilities, net of Taxes	**Perubahan Nilai Wajar dari Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain** Changes in Fair Value of Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	**Total Komponen Ekuitas Lainnya** Total Other Equity Components	**Kepentingan Nonpengendali** Non-controlling interest	**Ekuitas Neto** Net Equity
	(48,4)	(14,5)	0,1	(62,8)	807,6	3.441,8
				-	98,5	376,6
	17,5	(2,5)	(0,1)	14,9		14,9
				-	(64,5)	(292,9)
				-		-
	(30,9)	(16,9)	(0,0)	(47,9)	841,5	3.540,4
				-	100,2	439,6
	(7,0)	17,2	(0,0)	10,2		10,2
				-	(96,3)	(318,7)
				-		-
	(37,9)	0,3	(0,1)	(37,6)	845,5	3.671,5

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Ability to Pay Debt

Kemampuan membayar utang Perusahaan diukur melalui *debt to equity ratio* dan *debt service coverage ratio*. Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, *debt to equity ratio* mengalami penurunan menjadi 34,6% dari 43,6% pada 31 Desember 2023, dan *debt service coverage ratio* mengalami peningkatan menjadi 1,5 kali dari 1,1 kali di tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memiliki tingkat kemampuan membayar utang yang baik.

The Company's debt repayment ability is measured through the debt to equity ratio and debt service coverage ratio. As of the financial year ended December 31, 2024, the debt to equity ratio had decreased to 34.6% from 43.6% on December 31, 2023, and the debt service coverage ratio the increase to 1.5 times from 1.1 times in the previous year. This demonstrates the Company's ability to settle its financial obligations.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
Ability to Pay Debt

Uraian	2024	2023	Δ%	Description
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%)	34,6	43,6	79,3%	Debt to Equity Ratio (%)
Utang Bersih/EBITDA (x)	-0,1	0,3	-37,5%	Net Debt/EBITDA (X)
EBITDA/Beban Bunga (x)	14,3	11,1	128,5%	EBITDA/Interest Expense (X)
EBITDA/Beban Bunga + Pokok Pinjaman (x)	1,5	1,1	134,3%	EBITDA/Interest Expense+Principle (X)

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Receivables Collectibility Level

Perusahaan mengukur tingkat kolektibilitas piutang dengan menggunakan *cash convertion cycle*. Hingga akhir 2024, PGN memerlukan hampir 19 hari untuk menghasilkan kas dari kegiatan usahanya, sedangkan pada tahun sebelumnya memerlukan hampir 28 hari.

The company measures the collectability of its receivables using the cash conversion cycle. By the end of 2024, PGN needs almost 19 days to generate cash from its business activities, while in the previous year it took almost 28 days.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Receivables Collectibility Level

Uraian	2024	2023	Unit	Description
Pendapatan	3.788,6	3.646,3	juta | million USD	Revenue
Piutang Usaha	385,8	494,0	juta | million USD	Trade Receivable
***Collection Period* dalam hari**	**37,3**	**49,5**	**hari | days**	**Collection Period in days**
HPP	3.031,2	2.912,7	juta | million USD	COGS
Inventory	81,9	71,0	juta | million USD	Inventory
***Inventory Turnover* dalam hari**	**9,9**	**8,9**	**hari | days**	**Inventory Turnover in days**
HPP	3.031,2	2.912,7	juta | million USD	COGS
Utang Usaha	237,4	245,2	juta | million USD	Trade Payable
***Payment* Period dalam hari**	**28,7**	**30,7**	**hari | days**	**Payment Period in days**
Jumlah hari	366,0	365,0	juta | million USD	Number days
Jumlah Hari Konversi Kas	**18,5**	**27,6**	**hari | days**	**Cash Conversion Cycle**

STRUKTUR MODAL

Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

PGN memperhitungkan struktur modal dengan perimbangan antara komposisi pinjaman yang dikenakan bunga serta ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2024 struktur modal PGN adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Company's capital structure takes into account the balance between the composition of loans bearing interest and equity. Based on the 2024 Financial Statements, PGN's capital structure is as follows:

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Capital Structure Details

Juta USD | Million USD

Uraian	2024	2023	Δ	Δ%	Description
Total Pinjaman	**1.271,4**	**1.545,60**	**(274,2)**	**82,3%**	**Interest Bearing Debt**
Utang bank jangka pendek	100,0	2,6	97,4	3846,2%	Current bank loans
Utang obligasi	-	552,6	(552,6)	0,0%	Bonds payable
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	72,4	39,7	32,7	182,5%	Current portion of non-current bank loans
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	41,4	34,8	6,6	118,9%	Current portion of lease liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	703,7	520	183,7	135,3%	Non-current bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	353,9	395,9	(42,0)	89,4%	Non-current lease liabilities
Ekuitas	**3.671,5**	**3.540,40**	**131,1**	**103,7%**	**Equity**
Komposisi Struktur Modal (Pinjaman : Ekuitas)	**26 : 74**	**30:70**			**(Debt : Equity) Capital Structure Composition**

Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang kepada entitas yang berelasi dengan Pemerintah, serta utang obligasi. Total Komposisi utang berbunga (*interest bearing debt*) Perusahaan tahun 2024 adalah sebesar USD1,27 miliar menurun sebesar 18% dibandingkan dengan komposisi utang berbunga tahun 2023 disebabkan karena adanya pelunasan utang obligasi dan liabilitas sewa yang dilakukan oleh Perusahaan.

The composition of the Company's interest bearing debt consists of short-term loans, long-term loans to entities related to the Government, and bonds payable. The Company's total interest bearing debt composition in 2024 was USD1.27 billion, a decrease of 18% compared to the interest bearing debt composition in 2023 settlement of bond debt and lease liabilities made by the Company.

Komposisi ekuitas Perusahaan sebesar USD3,67 miliar, terdiri dari modal saham disetor, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya. Pada Desember 2003, saham Perusahaan mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas Negara Republik Indonesia, dan sejak 2018, PT Pertamina (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas setelah pembentukan holding migas.

The Company's equity composition was USD3.67 billion, consisting of paid-in share capital, retained earnings and other equity components. In December 2003, the Company's shares was first listed on the Indonesian Stock Exchange with majority shares owned by the Republic of Indonesia, and since 2018, PT Pertamina (Persero) has become the majority shareholder after the establishment of the oil and gas holding company.

Pada tahun 2024, tidak terdapat aksi korporasi yang mengubah struktur ekuitas PGN.

In 2024, there were no corporate actions that would've changed PGN's equity structure.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. PGN telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar. Manajemen juga senantiasa memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas dan *debt service ratio*. Lebih lanjut, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan peninjauan kesesuaian struktur modal dan utang Perseroan dengan tujuan strategis dan selera risiko Perusahaan (*risk appetite*).

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

PGN strives to maintain an optimal capital structure in order to achieve business objectives, including by maintaining a healthy capital ratio and maximizing shareholder value. Certain debt instruments of the Group have financial ratios that require a maximum leverage ratio. PGN has complied with all capital requirements set by creditors. Similarly, the management constantly monitors capital using a variety of financial leverage ratios, most notably the debt-to-equity and debt service ratios. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors also review the conformity of the Company's capital and debt structure with the Company's strategic objectives and risk appetite.

DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

PGN menetapkan kebijakan struktur modal dengan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas sesuai (tidak lebih) dari *financial covenant* dalam perjanjian pinjaman PGN kepada pihak kreditur sebesar 70%:30%. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung berdasarkan pembagian antara porsi utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan.

BASIS OF MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE

PGN sets a capital structure policy by maintaining a debt-to-equity ratio in accordance with (not exceeding) the financial covenant in the PGN loan agreement with creditors at 70%:30%. The debt-to-equity ratio is calculated based on the division of the interest-bearing debt portion to the Company's equity.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitment for Capital Expenditure

Pada akhir 2024, tidak terdapat adanya ikatan yang material terkait dengan investasi barang modal di PGN.

At the end of 2024, there were no material commitments related to capital expenditure at PGN.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realization of Capital Expenditure

Setiap tahun PGN mengalokasikan investasi barang modal (*capex*) yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan pertumbuhan. Penjelasan atas realisasi investasi barang modal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Jenis Pengeluaran Barang Modal**
   Pada 2024, PGN melakukan investasi barang modal di beberapa sektor yaitu sektor *Upstream, Midstream, Downstream*, dan *Supporting/Related*.

2. **Tujuan Pengeluaran Barang Modal**
   Investasi pada sektor *Upstream* merupakan pengembangan lapangan hulu minyak dan gas bumi, yang bertujuan meningkatkan produksi pada lapangan yang sudah beroperasi. Investasi juga dilakukan pada lapangan yang berada pada tahap pengembangan dan eksplorasi sebagai komitmen Perusahaan kepada Pemerintah dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi. Investasi pada sektor *Midstream* dan *Downstream* terdiri dari pembangunan jaringan pipa dan fasilitas penunjang distribusi gas bumi serta pembangunan LNG, yang bertujuan untuk *customer attachment*, meningkatkan keandalan integritas jaringan, dan meningkatkan kapasitas fasilitas penunjang. Hal ini merupakan upaya PGN memberikan layanan prima kepada pelanggan. Investasi pada sektor *Supporting/Related* bertujuan mendukung bisnis utama PGN yaitu niaga dan transportasi gas bumi seperti telekomunikasi, *property & services*, serta *construction & operation maintenance.*

3. **Jumlah Pengeluaran Barang Modal**

Each year, PGN allocates capital expenditure (capex) to develop its business and spur growth. The followig is the description for capital expenditure realization in 2024:

1. **Types of Capital Expenditure**
   In 2024, PGN invested in capital goods in several sectors, namely the Upstream, Midstream, Downstream, and Supporting/Related sectors.

2. **Capital Expenditure Objectives**
   Investment in the Upstream sector is a development of the upstream oil and natural gas field, with the objective of scaling up production in fields that are already operational. Investment is also made in fields that are in the development and exploration stages as the Company's commitment to the Government in developing oil and natural gas fields. Investment in the Midstream and Downstream sectors consisted of the construction of pipeline networks, supporting facilities for natural gas distribution, and the construction of LNG. The purpose is to achieve customer attachment, improve the reliability of network integrity, and increase the capacity of supporting facilities. These are PGN's efforts to provide excellent service to customers. Investment in the Supporting/Related sector aims to support the main business of PGN, namely natural gas trading and transportation, such as telecommunications, property & services, as well as construction & operation maintenance.

3. **Capital Expenditure Amount**

Nilai Belanja Modal Capital Expenditure Value	**Target 2024 (USD Juta)** (USD Million)	**Realisasi 2024** 2024 Realization	
		USD Juta USD Million	**(%) *Full Year***
Downstream, Midstream & Others	228,01	164,62	72,20
Upstream (SAKA Energi Indonesia)	133,42	90,75	68,02
Total	**361,43**	**255,37**	**70,66**

4. **Sumber Pendanaan**
   Sumber pendanaan untuk biaya investasi tersebut di atas menggunakan dana internal perusahaan.

4. **Source of Funding**
   The fund for the above mentioned investment was sourced from the Company's internal fund.

5. **Mata Uang yang Menjadi Denominasi**
   Masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS. Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada aset dan liabilitas, moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan yakni dalam bentuk Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

5. **Currency Denomination**
   Each entity in the Group considers key indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company has determined to use the United States dollar ("USD" or "US dollar") as its functional currency and use the same currency in the presentation of its consolidated financial statements. Monetary balances in non-US Dollar denominations are posted in assets and liabilities, monetary in foreign currencies owned by the Company, namely are in the form of Indonesian Rupiah, Japanese Yen and Singapore Dollars.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Subsequent to Accountant's Report Date

Setelah tanggal periode laporan yang berakhir pada 31 Desember 2024 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, terdapat informasi dan fakta material yang terjadi di PGN dan Entitas Anak maupun Afiliasi, sebagai berikut:

1. Perpanjangan pinjaman bank
   Pada tanggal 26 Februari 2025, SEI melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Jangka waktu pinjaman adalah selama tiga bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2025.

2. Proses arbitrase oleh Gunvor LCIA atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN

   Pada 20 Januari 2025 LCIA telah menyampaikan penetapan pembentukan formasi tribunal. Pada 17 Febuari 2025, Gunvor melalui konsultan hukumnya telah menyampaikan Statement of Case ("SOC") kepada konsultan hukum PGN, Mayer Brown. Pada 20 Februari 2025, Case Management Conference ("CMC") pertama telah dilaksanakan secara daring.

   LCIA menyepakati bahwa tanggal penerimaan SOC Gunvor oleh para pihak terhitung pada 28 Februari 2025 (sesuai penyampaian kembali SOC oleh Gunvor pada tanggal tersebut), dan perusahaan diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan berupa Statement of Defense ("SOD") sampai dengan 31 Maret 2025.

After the reporting period date ending on December 31, 2024 until this Annual Report is published, there is material information and facts that occurred at PGN and its Subsidiaries and Affiliates, as follows:

1. Extension of bank loan
   On February 26, 2025, SEI extended the loan term with PT Bank SMBC Indonesia Tbk. The loan term is for three months which will be due on May 26, 2025.

2. Arbitration request from Gunvor to LCIA due to Notification of Force Majeure in the Implementation of the MSPA and CN
   On January 20, 2025, LCIA submitted a determination on the formation of the tribunal. On February 17, 2025, Gunvor, through its legal consultant, submitted a Statement of Case ("SOC") to PGN's legal consultant, Mayer Brown. On February 20, 2025, the first Case Management Conference ("CMC") was held online.

   The LCIA agreed that the date of receipt of Gunvor's SOC by the parties is counted from February 28, 2025 (as per Gunvor's resubmission of the SOC on that date), and the Company is given time to provide a response in the form of a Statement of Defense ("SOD") until March 31, 2025.

Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan sedang dalam proses penyusunan SOD dan berpendapat bahwa belum terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha. Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktifitas bisnis Perusahaan.

3. Pengakhiran Masa Jabatan Komisaris
Terkait dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") BMRI Tahun Buku 2024 tanggal 25 Maret 2025, yang mengangkat Sdr. Luky Alfirman sebagai anggota Dewan Komisaris BMRI berdasarkan Ringkasan Risalah RUPST BMRI Tahun Buku 2024 tanggal 26 Maret 2025.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN lain, maka terhitung sejak penutupan RUPST BMRI Tahun Buku 2024, masa jabatan Sdr. Luky Alfirman sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Sdr. Luky Alfirman sebagai anggota Dewan Komisaris BMRI tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan bisnis Perseroan.

Direksi Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri BUMN terkait rangkap jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

As of the date of the report, the Company is in the process of preparing the SOD and believes that there has not been any material impact on its financial condition and business continuity. The Company respects the ongoing legal process and continues to monitor the situation to ensure that there are no disruptions to the Company' operations and business activities.

3. Termination of Commissioners' Term of Office
Related to the decision of the BMRI Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") for the 2024 Financial Year dated March 25, 2025, which appointed Mr. Luky Alfirman as a member of the BMRI Board of Commissioners based on the Summary of Minutes of the BMRI AGM for the 2024 Financial Year dated March 26, 2025.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources which states that members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other SOEs, then effective from the closing of the BMRI AGM for the 2024 Financial Year, Mr. Luky Alfirman's term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ends because he no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and laws and regulations.

The appointment of Mr. Luky Alfirman as a member of the BMRI Board of Commissioners has no impact on the Company's operations, finances, and business continuity.

The Company's Board of Directors will submit a notification to the Minister of SOEs regarding the dual position in question, to then carry out the process of determining the dismissal in accordance with applicable laws and regulations.

PROSPEK USAHA

Business Outlook

KONDISI MAKRO EKONOMI 2025

Pada tahun 2025 IMF memprediksi ekonomi global mencapai 3,3% hingga tahun 2026, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Meskipun begitu, kondisi tahun 2025 masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan ekonomi, mulai dari ketidakpastian kebijakan hingga ketegangan geopolitik.

Di tengah stagnasi ekonomi global, IMF memprediksi ekonomi dalam negeri dapat mencapai 5,1%. Sementara Bank Dunia juga memprediksi di angka sama dengan kecenderungan akan terus bertumbuh yang ditopang oleh peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor barang, pemulihan sektor pariwisata serta memperluas program hilirisasi.

Berdasarkan RAPBN 2025, Pemerintah Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,2%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2025 antara lain ADB sebesar 5%, World Bank dan IMF sebesar 5,1%, serta OECD sebesar 5,2%.

Pertumbuhan dalam negeri di atas dijbarkan dalam Program Prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan pada 10 Februari 2025. Peran gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

a. Memperluas jangkauan pelayanan gas bumi dengan cara mengembangkan jaringan distribusi dan transmisi gas bumi;
b. Melanjutkan penugasan jaringan gas rumah tangga;
c. Mendukung rencana pengembangan hilirisasi tambang;
d. Mendukung rencana pengembangan hilirisasi gas bumi pada industri petrokimia;
e. Menyalurkan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan Kawasan Industri dan atau Kawasan Ekonomi Khusus;
f. Membantu upaya dekarbonisasi pada sektor industri dengan cara mengkonversi penggunaan bahan bakar industri menjadi menggunakan energi yang lebih bersih;
g. Membantu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan meningkatkan pemanfaatan gas terbarukan seperti biomethane.

MACROECONOMIC CONDITIONS IN 2025

The global economy is predicted still face significant challenges in 2024. Risks that will weaken the global economy in 2024 are predicted to start from geopolitical conflicts and tensions, as well as global inflation that will remain high, interest rates that are held at high levels, and the ongoing weakening of the Chinese economy, which affects the weakening of global trade, as well as shocks due to climate change.

In its January 2024 World Economic Outlook (WEO), the IMF estimates that economic growth in 2024 will reach 3.1%. Compared with the October 2023 WEO forecast, the forecast for 2024 is approximately 0.2 percentage points higher, reflecting improvements in China, the United States, as well as emerging markets and developing countries. Moreover, the World Bank estimates that it will only grow by 2.4% in 2024, lower than growth in 2023, which stood at 2.6%.

Based on the 2024 RAPBN, the Indonesian Government has set a target of 5.2% for Indonesia's economic growth in 2024, higher than projected global economic growth. Several institutions have projected Indonesia's economic growth in 2024 include the World Bank, which projected 4.9%, the ADB and IMF, which projected 5.0%, and the OECD, which projected 5.2%.

The domestic growth above is outlined in the Priority Programs listed in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which was established on February 10, 2025. Here are the roles of natural gas in supporting Indonesia's economic growth as outlined in the 2025-2029 RPJMN:

a. Expanding the reach of natural gas services by developing a natural gas distribution and transmission network;
b. Continuing the assignment of household gas networks;
c. Supporting the mining downstream development plan;
d. Supporting the natural gas downstream development plan in the petrochemical industry;
e. Distributing natural gas to meet the needs of Industrial Areas and/or Special Economic Zones;
f. Assisting decarbonization efforts in the industrial sector by converting the use of industrial fuels to using cleaner energy;
g. Helping reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions by increasing the use of renewable gases such as biomethane.

Untuk dapat menjawab harapan besar Pemerintah dalam hal peningkatan pengelolaan gas bumi, PGN melakukan penyelaraskan target yang akan dicapai oleh Perusahaan dalam beberapa aspek. Pada aspek niaga gas, PGN memproyeksikan volume niaga gas bumi sekitar 958 BBTUD pada tahun 2025 atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Target ini didukung oleh optimalisasi kontrak yang telah berjalan dan ekspansi ke wilayah baru. Untuk transportasi gas, PGN memproyeksikan volume transportasi sebesar 1.435 MMSCFD. Di transportasi minyak mentah, proyeksi volume transportasi minyak mentah sebesar 178.347 BOEPD.

Pencapaian target-target pertumbuhan tersebut memerlukan kehandalan atas ketersediaan pasokan, dimana saat ini pasokan gas eksisting yang berasal dari cadangan konvensional yang cenderung mengalami penurunan karena *natural decline*.

PGN berupaya memenuhi kebutuhan gas dan minyak bumi dengan menargetkan lifting sebesar 17.227 BOEPD pada tahun 2025. Namun strategi jangka panjang untuk menjaga kestabilan pasokan energi nasional yaitu dengan mendapatkan alokasi pada temuan-temuan cadangan gas baru dan juga perluasan atas kapasitas produksi LNG domestik eksisting, pemenuhan kebutuhan *demand* domestik yang diproyeksikan semakin meningkat akan dipenuhi dengan supply LNG.

Dengan dinamika lingkungan bisnis yang dihadapi Perusahaan, masih terdapat gap antara pencapaian Perusahaan di tahun 2024 dengan target dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2026, di antaranya gap dalam volume pengelolaan niaga gas bumi yang disebabkan ketidakseimbangan pasokan gas bumi pasokan gas serta terdapat beberapa proyek strategis yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Menghadapi kondisi ini, PGN telah menyiapkan program strategis pengembangan usaha dengan tujuan untuk tetap menumbuhkan bisnis di tengah situasi yang menantang, mengambil momentum perbaikan ekonomi, percepatan transisi energi, serta kebutuhan untuk mengembangkan segmen bisnis/ produk turunan di masa depan yang mendukung penurunan emisi karbon (*low carbon business*) yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar pengembangan bisnis, yaitu *Grow*, *Adapt*, dan *Step-out* (GAS).

Adapun program strategis GAS tersebut meliputi:

1. *Grow and maintain gas business.*
   Program peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan infrastruktur gas, CNG, maupun LNG. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya: penyediaan infrastruktur transmisi, distribusi, dan regasifikasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmentasi pelanggan (Industri, Komersial, dan Rumah Tangga), penambahan portofolio pasokan gas pipa (dan LNG sesuai kebutuhan), penyediaan infrastruktur *beyond pipeline* (CNG & LNG), optimasi bisnis upstream melalui peningkatan kegiatan produksi dan eksplorasi, serta

To meet the Government's high expectations of improving natural gas management, PGN is aligning the targets to be achieved by the Company in several aspects. In the gas trade aspect, PGN projects a natural gas trade volume of around 958 BBTUD in 2025, or an increase of 3.6% compared to the previous year's realization. This target is supported by the optimization of existing contracts and expansion into new areas. For gas transportation, PGN projects a transportation volume of 1,435 MMSCFD. The projected crude oil transportation volume is 178,347 BOEPD.

The achievement of these growth targets requires the availability of reliable supply, in which the existing gas supplies originating from conventional reserves currently tend to decrease due to natural decline.

PGN seeks to meet gas and oil needs by targeting a total lifting of 17,227 BOEPD in 2025. In the long run, the strategy to maintain the stability of the national energy supply entails getting allocations for new gas reserve discoveries while expanding existing domestic LNG production capacity. That means meeting the projected increasing domestic demand with LNG supply.

With the dynamics of the business environment faced by the Company, there are still gaps between the Company's achievements in 2024 and the targets in the Company's Long Term Plan (RJPP) 2021-2026, including gaps in the volume of natural gas trading management due to imbalances in natural gas supply gas supply and there are several strategic projects that cannot be implemented as planned.

In addressing such conditions, PGN has prepared a strategic business development program with the aim of continuing to grow the business in the midst of a challenging situation, taking the momentum of economic improvement, acceleration in the energy transition, as well as the need to develop derivative business/ product segments in the future that support the reduction in carbon emissions (low carbon business), which is outlined in 3 (three) pillars of business development, namely Grow, Adapt, and Step-out (GAS).

The GAS strategic program includes:

1. Grow and maintain gas business.
   Program to increase the use of natural gas through the development of gas, CNG, and LNG infrastructure. Some of the work programs that will be implemented include the provision of natural gas transmission, distribution, and regasification infrastructure to meet the needs of various customer segments (Industrial, Commercial, and Household), increasing the gas supply pipeline portfolio (and LNG as needed), and the provision of beyond pipeline (CNG & LNG) infrastructure, the optimization of upstream business by increasing production and exploration

pembangunan infrastruktur guna mendukung kegiatan penyaluran BBM melalui pipa maupun peningkatan *lifting* migas dengan bersinergi bersama Pertamina Group.

2. *Adapt business, pursue adjacent opportunities.*
   Program penyediaan layanan bisnis turunan yang mendukung peningkatan kinerja melalui diversifikasi produk maupun optimalisasi portofolio yang sudah dimiliki oleh PGN. Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di antaranya: pelaksanaan strategi pertumbuhan secara organik dan penjajakan secara anorganik dalam penyediaan fasilitas untuk LNG Bunkering, LNG Trading dan Global Venture, pengembangan bisnis LNG Hub; serta *total energy solution* dalam rangka penyediaan jasa dan layanan penunjang kepada pelanggan.

3. *Step-out and scale to new businesses.*
   Program penyiapan bisnis baru mendukung hilirisasi industri berbasis gas (*petrochemical*), bisnis clean and *renewable energy* (*biomethane*), dan program pendukung *Net Zero Emission* lainnya (seperti Hidrogen/Amonia dan CO_2 *transport*) dengan terlebih dahulu mengembangkan kompetensi, akses ke pasar, dan pasokan yang saat ini belum dimiliki oleh PGN melalui kemitraan strategis bersama badan usaha

PENGEMBANGAN USAHA

Beberapa langkah strategis telah disiapkan PGN dalam menghadapi tantangan mendatang dan upaya pengembangan bisnis yang menyebar ke seluruh potensi energi di bidang gas khususnya di Indonesia. Harapannya adalah PGN tidak hanya dominan di bidang *midstream* yaitu infrastruktur dan distribusi gas bumi tetapi juga menguasai ke seluruh rantai bisnis gas bumi dari hulu ke hilir.

LNG Hub Arun

Di Indonesia, penggunaan gas bumi ke depannya diperkirakan akan bergeser dari pemanfaatan gas bumi melalui pipa menjadi penggunaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG). Terlebih dengan adanya temuan gas baru di Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku, dan Blok Andaman di lepas pantai utara Sumatera.

LNG Hub Terminal LNG Arun terletak di jalur perdagangan yang strategis di antara negara tujuan pemasok dan pembeli LNG serta dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Oleh sebab itu, Terminal LNG Arun diusung menjadi LNG Hub leader di Asia pada tahun 2030.

activities; and infrastructure development to support fuel distribution through pipelines and an increase in oil and gas lifting in synergy with Pertamina Group.

2. Adapt business, pursue adjacent opportunities.
   Program to provide derivative business services that support performance improvement through product diversification and optimization of PGN's existing portfolio. Some of the work programs that will be implemented include: implementation of organic growth strategies and inorganic exploration in the provision of facilities for LNG Bunkering, LNG Trading, and Global Venture, development of the LNG Hub business, development of mini LNG liquefaction plant infrastructure; as well as total energy solutions in order to provide services and supporting services to customers.

3. Step-out and scale to new businesses.
   Program to prepare new businesses to support the downstream gas-based industry (petrochemical), clean and renewable energy (biomethane) business, and other Net Zero Emission supporting programs (such as Hydrogen/Ammonia and CO_2 transport) by first developing competence, access to markets, and supply which is not currently owned by PGN through strategic partnerships with other business entities.

BUSINESS DEVELOPMENTS

PGN has prepared several strategic steps to address future challenges and business development efforts that span all energy potential in the gas sector, particularly in Indonesia. The goal is for PGN to dominate not only the midstream sector, including natural gas infrastructure and distribution, but also the entire value chain, from upstream to downstream.

Arun LNG Hub

In Indonesia, the use of natural gas in the future is expected to shift from the use of piped natural gas to the use of liquefied natural gas (LNG), especially with the discovery of new gas in the Abadi Field, the Masela Block in Maluku, and the Andaman Block off the north coast of Sumatra.

LNG Hub Arun LNG Terminal is located on a strategic trade route between the destination countries of LNG suppliers and buyers near the growing LNG market in Southeast Asia and South Asia. Therefore, the Arun LNG Terminal will be promoted as the LNG Hub leader in Asia in 2030.

Untuk mewujudkan visi sebagai pemimpin LNG Hub di Asia, diperlukan penambahan jumlah tangki yang dapat dioperasikan. Targetnya tersedia tujuh tangki pada tahun 2029, dengan salah satu tangki saat ini masih dalam tahap revitalisasi dan diperkirakan selesai pada kuartal I tahun 2025.

To realize the vision of being a leading LNG hub in Asia, it is necessary to increase the number of operational tanks . The target is to have seven tanks available by 2029, with one of the tanks currently still in the revitalization stage and expected to be completed in the first quarter of 2025.

LNG Bunkering Pertama di Indonesia

PGN sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi dan sebagai Subholding Gas terus berupaya untuk memperkuat perannya dalam menyalurkan energi baik sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan membangun LNG Bunkering pertama di Indonesia. Salah satu faktor pendorongnya adalah wilayah perairan Indonesia yang merupakan lokasi yang sangat strategis bagi rute pelayaran internasional, di mana dalam satu tahun jumlah kapal yang berlayar melalui perairan Indonesia mencapai ratusan ribu kapal.

Indonesia's First LNG Bunkering

PGN, as a Company engaged in the transmission and distribution of natural gas and as a Gas Subholding, continues to strive to strengthen its role in distributing good energy as a driver of economic growth in Indonesia by building Indonesia's first LNG Bunkering. One of the driving factors is that Indonesia's territorial waters are a very strategic location for international shipping routes where the number of ships sailing through Indonesian waters reaches hundreds of thousands of ships in one year.

Selat Malaka dan Selat Makassar merupakan salah satu rute pelayaran internasional yang terpadat di Indonesia. Mengingat saat ini sudah ada *bunkering station* eksisting milik Singapura dan Malaysia di sekitar Selat Malaka yang telah beroperasi sejak lama, maka potensi pengembangan *bunkering station* di area Selat Makassar lebih menjanjikan.

The Malacca Strait and Makassar Strait are one of Indonesia's busiest international shipping routes. With the existing bunkering stations owned by Singapore and Malaysia, located around the Malacca Strait, which have long been operating, the potential for developing bunkering stations in the Makassar Strait area is more promising.

International Maritime Organization (IMO) di tahun 2020 telah menerapkan aturan IMO Sulphur Cap 2020 di mana untuk kapal – kapal rute pelayaran internasional yang melaui wilayah ECA (*Emission Control Area*) harus menghasilkan sulphur maksimal 0,1% dari hasil pembakaran, dan yang melalui wilayah Global Cap harus menghasilkan sulphur maksimal sebesar 0,5% dari hasil pembakaran. Untuk mendapatkan nilai sulphur di bawah 0,5% dapat menggunakan beberapa alternatif bahan bakar salah satunya adalah LNG. Di beberapa negara telah menjalankan proyek LNG *bunkering* untuk memenuhi kebutuhan LNG bagi kapal yang menggunakan bahan bakar LNG, di antaranya Singapura, Malaysia, Belanda, Norwegia, China, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Perancis.

Since 2020, the International Maritime Organization (IMO) has adopted the IMO 2020 Sulphur Cap regulation whereby ships on international shipping routes passing through the ECA (Emission Control Area) zones must not exceed the 0.1% sulfur content limit generated from the combustion; and ships entering the Global Cap zones must not exceed the sulfur content limit of 0.5% generated from the combustion. Several alternative fuels can be used to obtain a sulfur content below 0.5%; for example, Liquefied Natural Gas (LNG). Several countries have operated LNG bunkering projects to meet LNG needs for ships using LNG fuel, including Singapore, Malaysia, the Netherlands, Norway, China, the United States, Belgium, Canada, South Korea, Japan, and France.

Dengan adanya peraturan IMO Sulphur Cap 2020 dan lokasi perairan Indonesia yang sangat strategis bagi rute pelayaran internasional, potensi pengembangan LNG bunkering di Indonesia sangat menjanjikan. Manfaat yang didapatkan oleh PGN dengan menjalankan program LNG bunkering adalah meningkatkan pendapatan dari penjualan gas (LNG), meningkatkan utilisasi infrastruktur yang dimiliki oleh Pertamina Group (PT Badak NGL dan PT Perta Arun Gas) serta sebagai pionir untuk membentuk pasar LNG bagi dunia pelayaran domestik.

Considering the adoption of IMO 2020 Sulphur Cap regulation and the strategic location of Indonesian waters for international shipping routes, the potential for developing LNG bunkering in Indonesia is very promising. Through the implementation of the LNG bunkering program, PNG gained benefits, namely the increase in revenue from gas (LNG) sales, improvement in the utilization of infrastructure owned by Pertamina Group (PT Badak NGL and PT Perta Arun Gas), as well as being a pioneer in creating the LNG market for domestic shipping sector.

Pemanfaatan *Biomethane* dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Sebagai Upaya dalam Reduksi Emisi Karbon di Indonesia

Sebagai bagian dari strategi bisnis Step-out, PGN berupaya mengembangkan bisnis biomethane dengan memanfaatkan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) untuk menghasilkan biogas. Pemanfaatan *biomethane* berpotensi menggantikan bahan bakar minyak berbasis fosil sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah cair tersebut. Selain itu, proyek ini juga merupakan langkah diversifikasi bisnis PGN dalam menyediakan energi bersih guna memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan.

Utilization of Biomethane from Palm Oil Mill Effluent (POME) as an Effort to Reduce Carbon Emissions in Indonesia

As part of the step-out business strategy, PGN is trying to develop a biomethane business that uses Palm Oil Mill Effluent (POME) to produce biogas. Biomethane has the potential to replace fossil-based fuel oil while reducing environmental pollution from liquid waste. In addition, this project is also a step in diversifying PGN's business in providing clean energy to meet customers' natural gas needs.

Pilot project bisnis *biomethane* ini akan berlokasi di Sumatera, wilayah dengan dominasi perkebunan kelapa sawit. Mengingat PGN memiliki jaringan pipa gas transmisi di Sumatera, kami akan mengupayakan pengangkutan *biomethane* melalui jaringan pipa gas dari Sumatera ke berbagai wilayah, termasuk Jawa dan Sumatera sendiri. Proyek *biomethane* ini sendiri akan terus dikembangkan di daerah lain di Indonesia.

This biomethane business pilot project will be located in Sumatra, an area dominated by oil palm plantations. Given that PGN has a gas transmission pipeline network in Sumatra, we will try to transport biomethane through a gas pipeline network from Sumatra to various regions within the island and Java. The development of this biomethane project will extend to other areas in Indonesia.

Sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan optimalisasi jaringan pipa PGN, proyek ini juga mendukung implementasi *Grand Energy Strategy* (GENS) serta Program *Net Zero Emissions* (NZE). PGN melihat potensi besar dalam penyediaan energi bersih seperti *biomethane* sebagai alternatif energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

As part of PGN's business development and pipeline network optimization, this project also supports the implementation of the Grand Energy Strategy (GENS) and the Net Zero Emissions (NZE) Program. PGN sees great potential in providing clean energy such as biomethane as an alternative energy to drive economic growth in Indonesia.

Perluasan Pasar Gas Bumi

Salah satu upaya Pemerintah untuk memperkuat rantai pasokan gas bumi secara nasional yaitu dengan melanjutkan Pembangunan pipa transismi gas bumi Cirebon–Semarang Tahap II (Cisem II) yang ditargetkan selasai pada tahun 2026. Keberadaan proyek pipa Cisem tahap II ini memiliki kaitan erat dengan pengembangan potensi gas bumi yang lebih besar di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu rencana Pembangunan pipa Tegal - Cilacap untuk menyalurkan gas bumi kepada RU IV Cilacap yang ditargetkan dapat onstream pada tahun 2027.

Pada hilirisasi tambang, kebijakan Pemerintah dalam hilirisasi hasil tambang mineral telah membantu pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral. Dengan adanya regulasi lain yang mengatur tingkat emisi dalam proses produksi hilirisasi mineral, maka pemanfaatan gas untuk kebutuhan sektor pertambangan dapat meningkat secara gradual pada masa mendatang.

Untuk menjaga eksistensi PGN sebagai badan usaha penyedia gas bumi yang memiliki jaringan gas bumi terbesar, PGN terus mengembangkan jaringan gas pipa dan menyalurkan gas bumi pada Sektor Industri dan Komersial untuk meningkatkan market share PGN. Di samping itu, PGN juga terus berupaya mengembangkan jaringan gas di Kawasan Industri.

Pengembangan Jargas

PGN mendukung program Pemerintah dalam menurunkan impor LPG dengan cara memperluas pemanfaatan gas bumi kepada segmen rumah tangga, selaras dengan RPJMN 2025 - 2029.

Pada tahun 2025 PGN menargetkan tambahan 200 ribu sambungan rumah tangga yang mana lebih tinggi dari target sambungan rumah tangga yang telah ditetapkan pada RPJMN 2025 - 2029. Pembangunan jaringan gas (Jargas) ini akan dilaksanakan dengan pendanaan internal Perusahaan melalui program Gaskita Pintar.

Target Jargas PGN pada tahun 2025 lebih tinggi dari target pada RPJMN 2025 - 2029 dapat dicapai dengan dukungan dari Pemerintah dalam bentuk insentif harga beli gas dan subsidi harga jual kepada pelanggan. Selain itu, PGN juga berupaya memperluas kemitraan pembangunan Jargas dengan Badan Usaha.

Transportasi Minyak Mentah & BBM

Dengan pengalaman dan keahlian dalam bisnis transportasi melalui jaringan pipa serta sinergi dengan Pertamina Group, PGN mendukung Pertamina dalam pembangunan pipa minyak mentah Rokan sepanjang 360 km, yang telah beroperasi sejak Februari 2022 (*first oil in*). Pada tahun 2025, PGN berencana melanjutkan proyek pembangunan pipa BBM Cikampek–Plumpang, yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2026.

Natural Gas Market Expansion

One of the Government's efforts to strengthen the national natural gas supply chain is to continue the construction of the Cirebon-Semarang Phase II (Cisem II) natural gas transmission pipeline, which is targeted for completion in 2026. The Cisem Phase II pipeline project is closely related to the development of larger natural gas potential in Indonesia. One such development is the Tegal-Cilacap pipeline construction plan to distribute natural gas to RU IV Cilacap, which is targeted to be onstream in 2027.

In downstream mining, the Government's policy on downstream mineral mining products has helped the growth and development of the mineral processing and refining industry. Other regulations that regulate the level of emissions in the mineral downstream production process can gradually increase the use of gas for the needs of the mining sector.

To maintain its existence as a natural gas provider business entity with the largest natural gas network, PGN continues to develop a gas pipeline network and distribute natural gas to the Industrial and Commercial Sectors to increase its market share. In addition, PGN continues to strive to develop a gas network in the Industrial Area.

Gas Network Development

PGN supports the Government's program to reduce LPG imports by expanding the use of natural gas to the household segment, in line with the RPJMN 2025-2029.

In 2025 PGN targets an additional 200 thousand household connections, which is higher than the household connection target set in the RPJMN 2025 - 2029. The construction of the gas network (Jargas) will be implemented with the Company's internal funding through the Gaskita Pintar program.

PGN's Jargas target in 2025 is higher than the target in RPJMN 2025-2029, which can be achieved with support from the Government in the form of gas purchase price incentives and selling price subsidies to customers. In addition, PGN also seeks to expand Jargas development partnerships with business entities.

Transportation of Crude Oil and Fuel

With experience and expertise in the pipeline transportation business and synergy with Pertamina Group, PGN supported Pertamina in the construction of the 360 km Rokan crude oil pipeline, which has been in operation since February 2022 (first oil in). In 2025, PGN plans to continue the Cikampek-Plumpang fuel pipeline project, which is expected to be completed in 2026.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2024

Comparison of Target and Realization 2024

PGN kembali dapat melewati tantangan selama tahun 2024 dengan baik. Pencapaian kinerja di tahun 2024 merupakan wujud upaya PGN untuk terus melakukan pengelolaan bisnis hilir gas bumi yang optimal, andal dan aman serta tetap menghadirkan *value* bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PGN was able to navigate through the challenges during 2024 well. The performance achievement in 2024 is a manifestation of PGN's efforts to continue to manage the downstream natural gas business optimally, reliably and safely while still providing value for shareholders and other stakeholders.

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI OPERASI/ PRODUKSI DAN PEMASARAN

Realisasi Niaga Gas mencapai 852 BBTUD atau 89% dari target 2024 disebabkan kondisi penurunan volume dari pemasok di wilayah Sumatera dan Jawa, yang dipengaruhi oleh kondisi alamiah di lapangan gas dan adanya kegiatan *maintenance* dari pemasok gas Perusahaan. Mengantisipasi hal ini, PGN menjalankan beberapa strategi di antaranya melalui perluasan jangkauan infrastruktur pipa gas serta optimalisasi terminal regasifikasi LNG untuk pengembangan produk (*product development*) melalui diversifikasi sumber pasokan dengan menyediakan gas hasil regasifikasi LNG.

Dengan mengoptimalkan terminal regasifikasi LNG di Lampung melalui *Terminal Usage Agreement* (TUA), volume penyaluran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kelistrikan mencapai 72 BBTUD atau 144% dari target 2024, sementara penyaluran volume gas regasifikasi LNG fasilitas di Arun mencapai 146 BBTUD atau 76% dari target 2024 disebabkan penurunan alokasi LNG pelanggan sektor pupuk dan pengaturan pola operasional *plant* pelanggan.

Pencapaian dari bisnis transmisi gas di tahun 2024 tercatat sebesar 1.543 MMSCFD atau mencapai 102% dari target 2024 dikontribusikan dari adanya peningkatan transportasi gas dari ruas Gresik – Semarang dari sumber pasokan di Jawa Timur untuk pelanggan sektor listrik (*power*) dan peningkatan volume transportasi gas untuk pelanggan kilang di Kalimantan.

Realisasi *Lifting* Minyak dan Gas mencapai 20.181 BOEPD atau 87% dari target 2024, disebabkan perubahan jadwal pengeboran sumur WPA-06 di WK Pangkah, penundaan tambahan kegiatan drilling di Wilayah Kerja Fasken dan penyesuaian volume produksi di Wilayah Kerja Muriah.

ANALYSIS OF OPERATIONS/ PRODUCTION AND MARKETING REALIZATION ACHIEVEMENT

Gas Trading Realization reached 852 BBTUD or 89% of the 2024 target due to the decreasing volume from suppliers in the Sumatra and Java regions, which were influenced by natural conditions in the gas fields and maintenance activities from the Company's gas suppliers. In anticipation of this, PGN implemented several strategies, including by expanding the reach of gas pipeline infrastructure and optimizing LNG regasification terminals for product development through diversification of supply sources by providing LNG regasification gas.

By optimizing the LNG regasification terminal in Lampung through the Terminal Usage Agreement (TUA), the distribution volume to meet the needs of electricity customers reached 72 BBTUD or 144% of the 2024 target, while the distribution volume of LNG regasification gas facilities in Arun reached 146 BBTUD or 76% of the 2024 target due to a decrease in the LNG allocation of fertilizer sector customers and regulation of customer plant operational patterns.

The achievement of the gas transmission business in 2024 was recorded at 1,543 MMSCFD or reaching 102% of the 2024 target, contributed by an increase in gas transportation from the Gresik - Semarang section from supply sources in East Java for power sector customers and increased gas transportation volumes for refinery customers in Kalimantan.

Oil and Gas Lifting Realization reached 20,181 BOEPD or 87% of the 2024 target, due to changes in the WPA-06 well drilling schedule in the Pangkah Working Area, additional delays in drilling activities in the Fasken Working Area, and production volume adjustments in the Muriah Working Area.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI OPERASI

Comparison of Operational Target and Realization

Uraian	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Δ	Description
Volume Niaga Gas (BBTUD)	954,1	852,0	(102,1)	Gas Trading Volume (BBTUD)
Volume Transportasi Gas (MMSCFD)	1.515,9	1.542,6	26,7	Gas Transportation Volume (MMSCFD)
LNG Trading (BBTUD)	125,3	59,7	(65,6)	LNG Trading (BBTUD)
Lifting Minyak & Gas (MMBOE)	8,4	7,4	(1,0)	Oil & Gas Lifting (MMBOE)
Regasification (BBTUD)[1]	241,7	218,1	(23,6)	Regasification (BBTUD)[1]
Transportasi Minyak (MBOE)	55.522,7	58.989,8	3.467,1	Oil Transportation (MBOE)
Pemrosesan LPG (TPD)	120,0	107,9	(12,1)	LPG Processing (TPD)

[1] Termasuk volume TUA
Include TUA volume

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI LABA/RUGI DAN STRUKTUR MODAL

ANALYSIS OF PROFIT/LOSS AND CAPITAL STRUCTURE REALIZATION ACHIEVEMENT

Keterangan	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 Realization 2024	Description
Pendapatan (Juta USD)	4.586,9	3.788,6	Revenue (Million USD)
BPP (Juta USD)	3.894,0	3.031,2	BPP (Million USD)
Laba Bruto (Juta USD)	692,9	757,4	Gross Profit (Million USD)
Beban Operasi (Juta USD)	201,4	201,2	Operating Expenses (Million USD)
Laba Operasi (Juta USD)	506,3	522,7	Operating Profit (Million USD)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Juta USD)	251,2	339,4	Profit for the year attributable to owners of the parent entity (Million USD)
Struktur Modal Rasio utang terhadap ekuitas[1]	38,8%	34,6%	Capital Structure Debt to equity ratio[1]

[1] Utang yang dikenakan bunga
Interest-bearing debt

Pendapatan Bersih 2024 terealisasi USD3,79 miliar atau 82,5% dari target yang dipengaruhi volume operasional niaga gas, *lifting* minyak dan gas, LNG trading serta pemrosesan gas yang masih di bawah target. Namun untuk bisnis transportasi gas dan transportasi minyak, PGN meraih pendapatan yang optimal seiring dengan peningkatan penyaluran minyak dari PHR dan optimalisasi penyaluran gas di ruas Gresik - Semarang.

Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk terealisasi USD339,4 juta atau 135,1% karena optimalisasi BPP niaga gas dengan mengoptimalkan pasokan dengan harga yang lebih rendah (volume pasokan MEPG dan HCML-BD lebih tinggi dari target) dan optimalisasi beban niaga infra melalui program *cost optimization*, realisasi laba ventura yang di atas target, serta optimasi dana internal melalui penempatan *idle cash* yang meningkatkan pendapatan keuangan dan LM Obligasi PGN Group sebagian menggunakan dana internal. Realiasi Biaya Pokok Pendapatan sebesar USD3.031,2 juta atau 77,8% dari target. Realisasi pendapatan keuangan sebesar USD60,2 juta atau 477,1% dari target.

Net Revenue in 2024 was realized at USD3.79 billion or 82.5% of the target influenced by the volume of gas trading operations, oil and gas lifting, LNG trading and gas processing which were still below the target. However, for the gas transportation and oil transportation businesses, PGN achieved optimal revenue along with the increase in oil distribution from PHR and the optimization of gas distribution on the Gresik - Semarang section.

Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity reached USD 339.4 million, or 135.1% of the target, supported by several factors: optimization of Cost of Gas Sold (BPP) through securing lower-priced supply (with actual supply volumes from MEPG and HCML-BD surpassing targets), and optimization of infra trading expenses through cost optimization programs, realization of venture profits above target, and optimization of internal funds through placement of idle cash that increases financial income and LM PGN Group Bonds partly using internal funds. Realization of Cost of Revenue of USD3,031.2 million or 77.8% of the target. Realization of financial income of USD60.2 million or 477.1% of the target.

ANALISIS PENCAPAIAN REALISASI PENGEMBANGAN SDM

PGN terus meningkatkan program pengembangan pekerja yang komprehensif dan konsisten dengan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknikal dan *leadership*, sertifikasi, dan *sharing knowledge*. Program-program tersebut dirancang dengan sistematis agar sesuai perkembangan bisnis Perusahaan sehingga setiap pekerja PGN memiliki kompetensi dan dapat bekerja secara profesional sesuai bidang dan posisi jabatannya, serta mencapai visi, misi dan mendukung peran PGN sebagai Subholding Gas.

PGN berkomitmen melakukan pengembangan pekerja untuk membekali dan memenuhi gap kompetensi pekerja PGN, sehingga mampu menjalankan perannya dengan baik. PGN memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial melalui *inhouse* dan *public training* serta sertifikasi. Pada tahun 2024, PGN menetapkan target pelaksanaan program pelatihan *inhouse* kompetensi teknis sebanyak 55 program, dengan realisasi sebanyak 56 program. Tingkat partisipasi pekerja dalam program pengembangan mencapai 127,9% dari target sebesar 85%.

ANALYSIS OF HR DEVELOPMENT ACHIEVEMENTS

PGN continues to improve its comprehensive and consistent employee development program with functional/technical and leadership education and training programs, certification, and knowledge sharing. These programs were systematically devised to be in accordance with the Company's business development, to ensure that each PGN employee has the competence and ability to work professionally in their field and position.

PGN is committed to employee capacity building to equip them and narrow down the competency gap among PGN employees, to ensure that they can perform their roles effectively. PGN has technical and managerial competence development programs through in-house and public training as well as certifications. In 2024, PGN set a target to carry out 55 programs of in-house technical competency training with a realization of 56 programs. The employee participation rate for the development program reached 127,9% out of the target of 85%.

PROGRAM *LEARNING DEVELOPMENT*

Learning Development Program

No.	Uraian Description	2024		2023	
		Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
1.	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Teknis Technical Competency Inhouse Training Program	55	56	53	56
2.	Program Pelatihan Inhouse Kompetensi Manajerial Managerial Competency Inhouse Training Program	2	6	2	2
3.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis Technical Competency Public Training Program	72	74	77	89
4.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial Managerial Competency Public Training Program	1	1	1	1
5.	Tingkat Partisipasi Pekerja Employee Participation Rate	85%	127,9%	85%	107,95%

RENCANA DAN STRATEGI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN MENDATANG

Plans, Strategies, and Outlook for the Next Year

Proyeksi-proyeksi berikut mengandung ketidakpastian dan risiko. Hasil, kinerja, atau pencapaian aktual dapat berbeda dengan yang diproyeksikan dalam laporan ini karena faktor-faktor seperti antara lain perubahan kondisi ekonomi dan politik nasional dan regional; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; pergeseran harga, permintaan, dan penawaran pasar komoditas; perubahan lanskap persaingan; perubahan hukum, peraturan, prinsip-prinsip akuntansi, kebijakan, atau pedoman; dan revisi terhadap asumsi-asumsi yang mendasari pernyataan-pernyataan yang bersifat *forward looking*.

The following projections carry uncertainties and risks. Actual results, performance, or achievements may differ materially from those projected in this report due to certain factors such as changes in national and regional economic and political conditions; fluctuations in foreign exchange rates; shifts in commodity market prices, demand, and supply; changes in the competitive landscape; changes in laws, regulations, accounting principles, policies or guidelines; and revisions to the assumptions underlying the forward-looking statements.

PROYEKSI STRATEGIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan strategi pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan G-A-S (*Grow-Adapt-Step Out*), program strategis Perusahaan pada tahun 2025 terdiri dari:

Growth - Pengembangan Bisnis Eksisting

1. Pengembangan Customer Attachment Pelanggan Industri dan Jargas (tambahan volume 15,9 BBTUD dan 200 ribu Sambungan Rumah Tangga (SRT))
2. Komersialisasi Stranded Gas di lapangan Ogan, Tempiral, Puspa dan Sengeti
3. Pengembangan CNG Retail: penambahan vol. ~1.45 BBTUD & ~1000 CNG-Cylinder (C-Cyl);
4. Pipa Tegal-Cilacap untuk RU IV Cilacap (~36 BBBTUD)
5. Pengembangan Kawasan Indonesia Tengah & Timur:
   a. Gasifikasi Sektor Tambang (PT STM), Pembangkit Papua Utara, Pembangkit PT STS (IPP)
   b. Quick-win Pengembangan KI Makassar

Adapt – Pengembangan Bisnis baru dengan karakteristik berdekatan dengan bisnis eksisting

1. Pengembangan LNG Bunkering
2. LNG Trading CNTIC dan Gunvor
3. Penyelesaian Revitalisasi tangki F-6004 LNG Arun
4. Penyelesaian FBT LNG Jatim untuk kehandalan pasokan

COMPANY'S STRATEGIC PROJECTION

In alignment with the company's business growth achievement strategy G-A-S (Grow-Adapt-Step Out), the Company's strategic program in 2025 consists of:

Growth - Development of Existing Business

1. Development of Customer Attachment for Industrial and Jargas Customers (additional volume 15.9 BBTUD and 200 thousand household connection)
2. Commercialization of stranded gas in the Ogan, Tempiral, Puspa, and Sengeti fields.
3. Expansion of retail CNG: additional ~1.45 BBTUD and ~1,000 CNG-Cylinders (C-Cyl).
4. Tegal–Cilacap pipeline for Refinery Unit (RU) IV Cilacap (~36 BBTUD).
5. Development in Central and Eastern Indonesia:
   a. Gasification for the mining sector (PT STM), Papua Utara power plant, and PT STS (IPP) power plant.
   b. Quick-win development of the Makassar Industrial Zone.

Adapt – New Business Development with Adjacency to Existing Operations

1. Development of LNG bunkering services.
2. LNG trading with CNTIC and Gunvor.
3. Completion of the revitalization of LNG Arun's F-6004 storage tank.
4. Completion of East Java LNG FBT to ensure supply reliability.

Step Out – Pengembangan bisnis baru

1. Pengembangan bisnis biomethane
2. Pengembangan Roadmap Bisnis Amonia dan CCS/CCUS

Untuk mendukung strategi pencapaian pertumbuhan bisnis perusahaan G-A-S, perusahaan menetapkan strategi dan program kerja utama lainnya, terdiri dari:

1. HSSE & Sustainability
   a. HSSE Excellence dan peningkatan budaya HSSE menuju level budaya generative.
   b. Reduksi Emisi Karbon 2025 ≥ 4372 Ton
   c. Mempertahankan Rating ESG skor 20.2 pada level Medium Risk (Sustainalytics) atau Level C (MSCI)
2. Penyediaan Pasokan Gas dan LNG
   a. Optimasi pasokan gas (perpanjangan kontrak, novasi kontrak, dan kontrak baru) untuk gas pipa dan LNG alokasi PGN.
   b. Perjanjian simpan-pinjam LNG dengan PLN
   c. FSRU Lampung dan NR beroperasi full capacity
3. Demand
   a. Sosialiasi kepada pelanggan untuk meningkatkan Ability to Pay pelanggan SOR I dan SOR II dalam rangka menjaga margin agregat dan komersialisasi LNG alokasi PGN
   b. Sinergi bersama Patra Niaga (penyelarasaan bauran energi di wilayah target jargas)
   c. Alokasi harga pasokan Jargas menjadi USD2/mmbtu
4. Program Strategis Lainnya
   a. Optimasi collecting period, rasio CPS, & internal funding
   b. Unlock Value Saka melalui optimasi aset eksisting
   c. Pengalihan Bisnis LNG Portofolio, SPBG & Jargas, dan gas JTB
   d. Rencana pengalihan saham PT Petro Oxo Nusantara
   e. Rencana pengalihan saham PT Badak NGL

Step Out – New Business Ventures

1. Biomethane business development
2. Ammonia and CCS/CCUS Business Roadmap Development

To support the company's G-A-S business growth achievement strategy, the company has set other main strategies and work programs, consisting of:

1. HSSE & Sustainability
   a. HSSE Excellence and improving HSSE culture towards a generative culture level.
   b. Carbon Emission Reduction 2025 ≥ 4372 Tons
   c. Maintaining an ESG Rating score of 20.2 at the Medium Risk level (Sustainalytics) or Level C (MSCI)
2. Provision of Gas and LNG Supply
   a. Optimization of gas supply (contract extension, contract novation, and new contracts) for pipeline gas and PGN-allocated LNG.
   b. LNG savings and loan agreement with PLN
   c. Lampung and NR FSRUs operating at full capacity
3. Demand
   a. Socialization to customers to increase the Ability to Pay of SOR I and SOR II customers in order to maintain aggregate margins and commercialization of PGN-allocated LNG
   b. Synergy with Patra Niaga (alignment of energy mix in target areas of Jargas)
   c. Allocation of Jargas supply price to USD2/mmbtu
4. Other Strategic Programs
   a. Optimization of collecting period, CPS ratio, & internal funding
   b. Unlock Value Saka through optimization of existing assets
   c. Transfer of LNG Portfolio Business, SPBG & Jargas, and JTB gas
   d. Plan to transfer shares of PT Petro Oxo Nusantara
   e. Plan to transfer shares of PT Badak NGL

PROYEKSI PEMASARAN DAN OPERASIONAL

PGN optimis dapat terus meningkatkan kinerja pemasaran dan operasional dengan target peningkatan volume operasi pada tahun mendatang sebagai berikut:

MARKETING AND OPERATIONAL OUTLOOK

PGN is optimistic that it can continue to improve its marketing and operational performance with the following target of increasing operating volume in the coming year:

PROYEKSI PEMASARAN DAN OPERASIONAL
Marketing and Operational Outlook

Uraian	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2025 2025 Target	Description
Volume Niaga Gas (BBTUD)	852,2	873,0 - 958,0	Gas Trading Volume (BBTUD)
Volume Transportasi Gas (MMSCFD)	1.542,6	1.434,8	Gas Transportation Volume (MMSCFD)
Lifting Minyak & Gas (MBOE)	7.466,7	6.287,9	Oil & Gas Lifting (MBOE)
LNG Trading (BBTUD)	59,7	126,6	LNG Trading (BBTUD)
Pemrosesan LPG (TPD)	107,9	100,0	LPG Processing (TPD)
Transportasi Minyak (MMBOE)	58.989,8	65.096,6	Oil Transportation (MMBOE)
Regasification (BBTUD) (termasuk volume TUA)	218,1	168,0	Regasification (BBTUD) (including TUA volume)

PROYEKSI PENDAPATAN, LABA, STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada tahun 2025, PGN memproyeksikan target Pendapatan dapat selaras dengan peningkatan kinerja operasi. Dalam rangka menjaga kinerja keuangan, PGN tetap fokus dalam mengelola bisnis niaga gas bumi dan berkomitmen mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah melalui pelaksanaan Harga Gas Bumi Tertentu dan pembangunan Jargas. PGN juga memperkuat perannya sebagai Subholding Gas melalui sinergi dan kolaborasi di lingkungan Pertamina Grup untuk mengoptimalkan bisnisnya, dan di sisi lain tetap berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan segmen bisnis lainnya yang telah berhasil meningkat di tahun sebelumnya.

Dengan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian target operasi tersebut, PGN memproyeksikan Pendapatan pada satu tahun mendatang akan akan tumbuh pada kisaran *low to mid double digit*. Kemudian seiring dengan proyeksi peningkatan pasokan gas melalui LNG, maka proyeksi Laba Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk akan menyesuaikan seiring dengan proyeksi peningkatan Beban Pokok Pendapatan. Struktur modal, yang diukur dengan Rasio Utang terhadap Ekuitas, diproyeksikan sekitar 30%. Sementara untuk kebijakan *dividend*, diproyeksikan Rasio Pembayaran Dividend di sekitar 50 - 70%.

REVENUE, PROFIT, CAPITAL STRUCTURE, AND DIVIDEND POLICY PROJECTIONS

In 2025, PGN projects that its revenue target will be in line with the improvement in operating performance. In order to maintain financial performance, PGN remains focused on managing the natural gas trading business and is committed to supporting the implementation of Government policies through the implementation of Specific Natural Gas Prices and the development of Jargas. PGN is also strengthening its role as a Gas Subholding through synergy and collaboration within the Pertamina Group to optimize its business, and on the other hand continues to strive to continue the growth of other business segments that have successfully increased in the previous year.

With these efforts to improve the achievement of operating targets, PGN projects that revenue in the coming year will grow in the low to mid double digit range. Then along with the projected increase in gas supply through LNG, the projected Profit Attributable to Owners of the Parent Entity will adjust along with the projected increase in Cost of Revenue. Capital structure, as measured by Debt to Equity Ratio, is projected to be around 30%. As for dividend policy, the Dividend Payout Ratio is projected to be around 50 - 70%.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Ke depan, PGN senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi pekerja melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan. Pada tahun 2025, program pelatihan *inhouse* kompetensi teknis diproyeksikan sebanyak 57 program, dan inhouse kompetensi manajerial sebanyak 2 program. Selaras dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2025 PGN akan terus mengembangkan modul *online learning* yang diharapkan membantu proses transformasi digital di PGN, memudahkan jangkauan proses pengembangan pekerja di seluruh wilayah operasi PGN, serta meningkatkan efisiensi kinerja dan biaya PGN.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OUTLOOK

In 2024, PGN will remain committed to investing in employee development through 55 in-house technical competency training programs and 2 in-house managerial competency training programs. In line with technological advancements, in 2024, PGN will develop online learning modules that are expected to assist in PGN's digital transformation process, facilitate the reach of the employee development process in all of PGN's operational areas, as well as enhance PGN's cost and performance efficiency.

PROGRAM *LEARNING DEVELOPMENT* 2025

2025 Learning Development Programs

No.	Keterangan	Proyeksi 2025 2025 Projection	Description
1.	Program Pelatihan *Inhouse* Kompetensi Teknis	57	Technical Competency Inhouse Training Program
2.	Program Pelatihan *Inhouse* Kompetensi Manajerial	2	Managerial Competency Inhouse Training Program
3.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Teknis	77	Technical Competency Public Training Program
4.	Program Pelatihan Publik Kompetensi Manajerial	2	Managerial Competency Public Training Program
5.	Tingkat Partisipasi Pekerja	85%	Employee Participation Rate

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspects

PANGSA PASAR

Secara nasional, realisasi penyaluran gas bumi pada tahun 2024 untuk domestik mencapai 5.785,92 *Billion British Thermal Unit per Day* (BBTUD), sedangkan pemanfaatan gas untuk ekspor, jumlahnya mencapai 1.904,57 BBTUD. Pemanfaatan gas bumi untuk domestik tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3.745 BBTUD dan ekspor sebesar 1.749 BBTUD.

Dari total pemanfaatan gas bumi domestik, penyaluran paling besar adalah untuk sektor Industri yang mencapai 1.472,71 BBTUD atau sekitar 37,94%. Kemudian diikuti oleh pemanfaatan gas bumi untuk Kelistrikan sebesar 706,98 BBTUD atau sekitar 18,21%. Sementara pemanfaatan gas bumi untuk LNG Domestik sebesar 695,34 BBTUD, Pupuk sebesar 690,26 BBTUD, *Lifting* Minyak 219,52 BBTUD, LPG Domestik 77,13 BBTUD, *City Gas* 15,48 BBTUD dan BBG sebesar 3,95 BBTUD.

MARKET SHARE

Nationally, the realized natural gas distribution in 2024 for domestic purposes reached 5,785.92 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD), while the utilization of gas for export reached 1,904.57 BBTUD. The utilization of natural gas for domestic purposes increased when compared to 2023 of 3,745 BBTUD and exports of 1,749 BBTUD.

Of the total utilization of domestic natural gas, the largest distribution was for the Industrial sector which reached 1,472.71 BBTUD or around 37.94%. Next was the utilization of natural gas for Electricity of 706.98 BBTUD or around 18.21%. Meanwhile, the utilization of natural gas for Domestic LNG was 695.34 BBTUD, Fertilizer was 690.26 BBTUD, Oil Lifting was 219.52 BBTUD, Domestic LPG was 77.13 BBTUD, City Gas was 15.48 BBTUD.

REALISASI PEMANFAATAN PRODUKSI GAS BUMI INDONESIA
Realization of Indonesia's Natural Gas Utilization

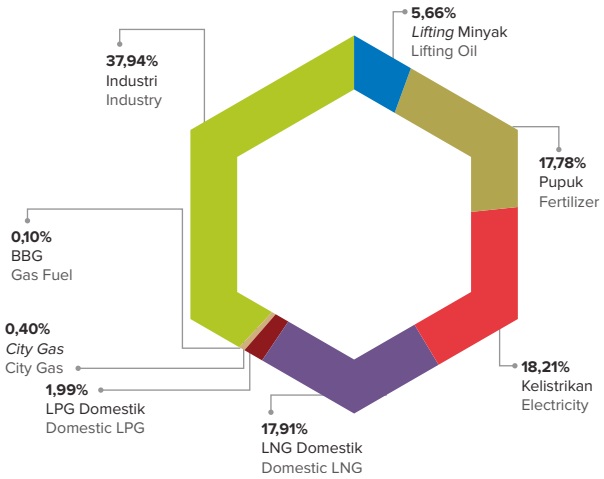

Selama tahun 2024, PGN Grup menguasai sekitar 91,24% pangsa pasar niaga hilir gas bumi melalui pipa distribusi di Indonesia, dengan volume niaga gas mencapai 924,43 BBTUD (termasuk volume LNG dari pemanfaatan TUA). Perhitungan *market share* Niaga hilir gas bumi dilakukan berdasarkan *nature* bisnis kegiatan hilir niaga gas bumi berfasilitas melalui pipa distribusi.

During 2024, PGN Group controlled around 91.24% of the downstream natural gas trading market share through distribution pipelines in Indonesia, with a gas trading volume reaching 924.43 BBTUD (including LNG volume from TUA utilization). The calculation of the downstream natural gas trading market share is carried out based on the nature of the business of downstream natural gas trading activities facilitated through distribution pipelines.

PANGSA PASAR NIAGA PGN KESELURUHAN
Overall Commercial Market Share of PGN

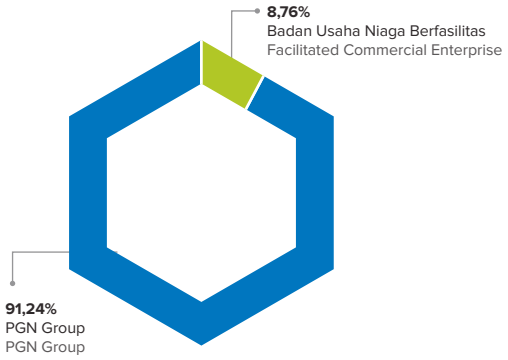

PROFIL PELANGGAN

Sepanjang tahun 2024, PGN menyalurkan gas bumi ke Pelanggan Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Stasiun Pengisian BBG, maupun Pelanggan Komersial dan Industri sebanyak 816.645 pelanggan, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 830.935 pelanggan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah Pelanggan sektor Rumah Tangga sebanyak 15,026 pelanggan, sementara jumlah pelanggan segmen pelanggan kecil meningkat 28% dan pelanggan industri/komersial meningkat 6%.

Jumlah pelanggan PGN saat ini masih didominasi oleh segmen pelanggan Rumah Tangga yaitu lebih dari 99% dari total pelanggan gas bumi PGN. Berkaca dari *market share* dan jumlah pelanggan, PGN senantiasa menunjukkan dominansinya dalam bisnis gas bumi seiring bertumbuhnya infrastruktur jaringan gas.

CUSTOMER PROFILE

During 2024, PGN distributed natural gas to Household Customers, Small-scale Customers, Gas Fuel Filling Stations, as well as Commercial and Industrial customers, serving a total of 830,935 customers, this number has decreased compared to 2023, which stood at 838,953 customers. This was due to a decrease of 8,305 customers in the number of Household customers, while the number of customers in the small-scale customer segment increased by 3% and industrial/commercial customers increased by 8%.

Currently, the number of PGN customers dominated by the Household customer segment, with more than 99% of the total PGN natural gas customers. Based on the market share and number of customers, PGN continues to demonstrate its dominance in the natural gas business, in line with the growth of gas network infrastructure.

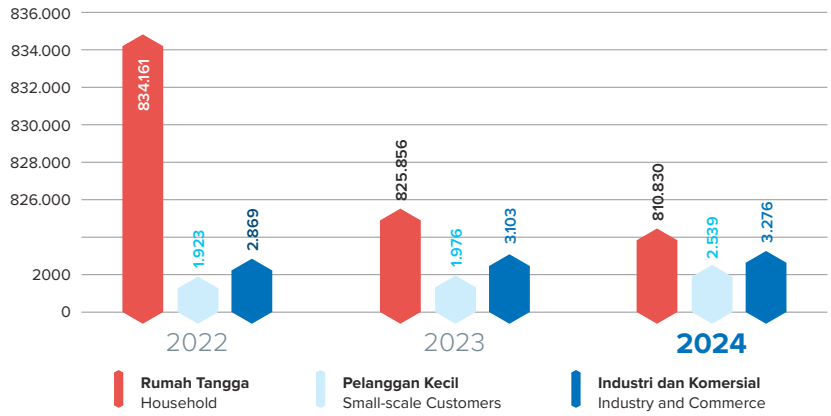

Berdasarkan portofolio volume penyaluran niaga gas bumi ke pelanggan, porsi volume penyaluran terbesar adalah segmen pelanggan komersial dan industri yaitu sebesar 98,8% dari total penyaluran niaga gas bumi PGN.

The portfolio based on the volume of distribution of natural gas to customers, the commercial and industrial customer segment has the largest portion of distribution volume, accounting for 98.9% of PGN's total natural gas distribution.

KONTRIBUSI VOLUME NIAGA GAS
Contribution of Gas Trading Volume

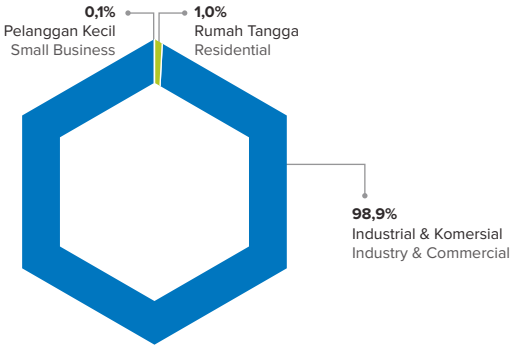

PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI PGN

PGN telah mengimplementasikan berbagai kebijakan harga jual gas bumi bagi beberapa wilayah distribusi maupun harga jual atas diferensiasi produk dan layanan guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi bagi Pelanggan eksisting serta memperluas cakupan wilayah usaha PGN untuk segmen komersial dan industri, sebagai berikut:

1. Harga Gas untuk Pelanggan Komersial dan Industri Selain Pelanggan Korporat
2. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan selain Pelanggan Korporat.
3. Harga Gas untuk Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Pelanggan *Captive Power* atau Pelanggan dengan Kontrak Bersyarat lainnya.
4. Harga Gas untuk Harga Gas Industri Tertentu untuk Pelanggan Korporat.
5. Harga Gas untuk Pelanggan Pupuk.
6. Harga Gas untuk Pelanggan Kelistrikan.
7. Harga gas untuk Pelanggan Kilang.

Untuk sektor Rumah Tangga, Pemerintah melalui BPH Migas telah menetapkan peraturan mengenai harga jual gas bumi per kota/kabupaten untuk segmen pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Pada 2024, PGN melakukan penetapan harga jual gas bumi sesuai dengan Peraturan dari BPH Migas untuk Produk GasKita Pintar dengan harga jual gas sebesar Rp10.000/ m^3 di wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Kota Dumai
2. Kabupaten Deli Serdang
3. Kota Pasuruan
4. Kabupaten Pasuruan

ADJUSTMENT OF PGN NATURAL GAS SELLING PRICE

In order to increase the use of natural gas for existing Customers as well as expanding the coverage of PGN's business area for the commercial and industrial segments, PGN has implemented various natural gas selling price policies for several distribution areas, as well as selling prices for product and service differentiation as follows:

1. Gas Prices for Commercial and Industrial Customers other than Corporate Customers
2. Gas Prices for Certain Industries for Customers other than Corporate Customers.
3. Gas Prices to Optimize Natural Gas Utilization for Captive Power Customers or Customers with other Conditional Contracts.
4. Gas Prices for Certain Industrial Gas Prices for Corporate Customers.
5. Gas Prices for Fertilizer Customers.
6. Gas Prices for Electricity Customers.
7. Gas Prices for Refinery Customers.

For the household sector, the Government, through the BPH Migas has set regulations regarding the selling price of natural gas per city or regency for the Households and Small-scale customer segments. In 2023, PGN has determined Rp10,000/ m3 as the selling price of natural gas in accordance with the Regulation from BPH Migas for GasKita Pintar products in the following areas:

1. Dumai City
2. Deli Serdang Regency
3. Pasuruan City
4. Pasuruan Regency

PERBANDINGAN DAYA SAING HARGA JUAL GAS BUMI PGN DENGAN BAHAN BAKAR LAIN

COMPARISON OF COMPETITIVENESS OF PGN NATURAL GAS SELLING PRICES WITH OTHER FUELS

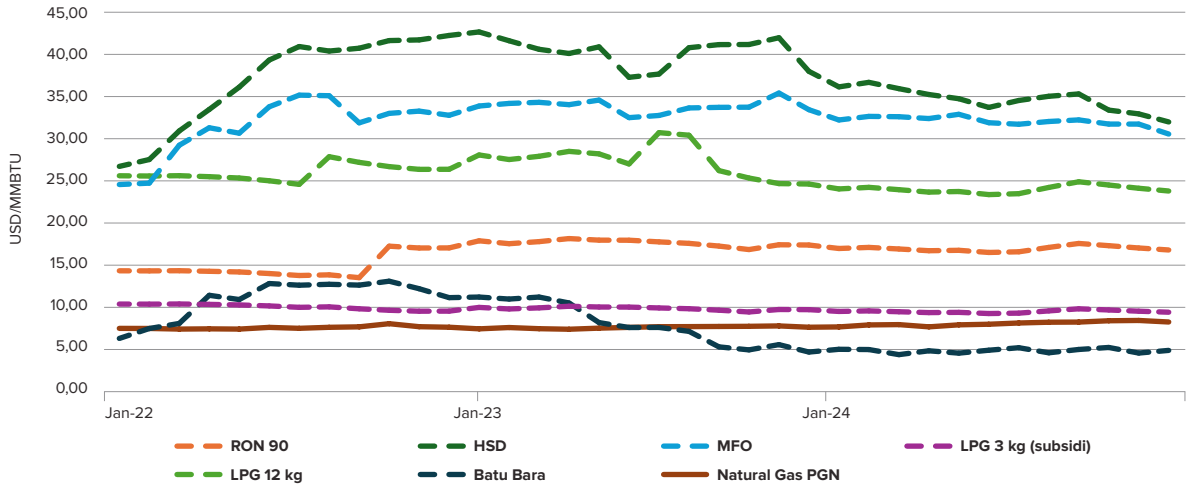

Dalam tiga tahun terakhir, harga rata-rata gas bumi PGN masih lebih kompetitif dibanding harga produk bahan bakar lain. Harga gas PGN cenderung stabil karena tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dan selain itu pemerintah juga menjamin harga pasokan/harga hulu tetap. Berbeda dengan harga HSD dan MFO, bahan bakar tersebut sangat terpengaruh oleh kondisi harga mintak global sehingga cenderung berfluktuasi. Harga sebagaimana grafik di atas merupakan harga energi di titik serah Pelanggan.

The average price of PGN's natural gas has been more competitive than the prices of other fuel products over the past three years. PGN gas prices tend to be stable as they are not influenced by external factors. In addition, the government also guarantees fixed supply/ upstream prices. In contrast to HSD and MFO prices, these fuels are highly influenced by global demand price conditions, making them easily fluctuate. The prices shown in the above chart are energy prices at the Customers' delivery point.

STRATEGI PEMASARAN

PGN terus melakukan berbagai upaya peningkatan bisnis sepanjang tahun 2024, yang membutuhkan penyesuaian strategi bisnis, perubahan pola operasi dan struktur biaya yang lebih efisien. Selama tahun 2024, PGN terus fokus pada kinerja komersial dengan meningkatkan digitalisasi proses bisnis dan menjaga keberlangsungan kerja sama jangka panjang melalui program layanan kepelangganan serta strategi *customer acquisition* yang dilakukan secara tepat.

PGN kembali berhasil melakukan penetrasi pasar dan pengembangan pasar eksisting untuk mendukung pemanfaatan gas bumi dan efisiensi penggunaan bahan bakar, di mana selama 2024 PGN telah menyalurkan gas bumi ke berbagai sektor industri dalam segmen Pelanggan Komersial dan Industri di seluruh wilayah operasi niaga PGN. Perluasan pemanfaatan gas bumi itu, di antaranya:

a. Peningkatan penyaluran untuk ke sektor pupuk sebesar rata-rata 2,7 BBTUD setahun;
b. Dimulainya penyaluran gas ke sektor Smelter sebesar rata-rata 1,9 BBTUD setahun;
c. Dimulainya penyaluran gas regasifikasi LNG untuk sekotor IPP sebesar 1.410 MMBTU (rata-rata sebesar 3,8 BBTUD setahun);
d. Penambahan titik serah pembangkit PLN Batam pada *Terminal Usage Agreement* (TUA) dengan konsep swap serta peningkatan penyaluran gas regasifikasi untuk sektor PLN dengan skema TUA sebesar rata-rata 16 BBTUD setahun.

MARKETING STRATEGY

PGN continues to carry out various efforts to improve its business in the post-pandemic era in 2024, which requires adjustments to its business strategy, changes in operating patterns, and a more efficient cost structure. During 2024, PGN focused on commercial performance by continuously increasing the digitization of business processes and maintaining the continuity of long-term cooperation through the appropriate customer service programs and customer acquisition strategies.

PGN has succeeded in conducting market penetration and new market development to support natural gas utilization and fuel efficiency, in which PGN distributed natural gas to various industrial sectors in the Commercial and Industrial customer segments across PGN's commercial operations in 2024. Expansion of natural gas utilization, includes:

a. An average annual increase of 2.7 BBTUD to the fertilizer sector;
b. The commencement of gas distribution to the Smelter sector with an annual average capacity of 1.9 BBTUD;
c. The commencement of LNG regasification gas distribution for the IPP sector by 1,410 MMBTU (average of 3.8 BBTUD per year);
d. The addition of PLN Batam power plant delivery points to the Terminal Usage Agreement (TUA) with a swap concept and an average annual increase of 16 BBTUD in gas distribution for the PLN sector under the TUA scheme.

Semangat kolaborasi dan sinergi dengan badan usaha lain menjadi dorongan PGN untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pengelola Kawasan Industri, dan pihak swasta lainnya) dengan prinsip saling menguntungkan. Beberapa kerja sama yang telah PGN jalin pada 2024 di antaranya:

a. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dengan PT Kalimantan Industrial Park Indonesia tentang Kerja Sama Penyediaan Gas Alam
b. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dengan PT Indonesia Pomalaa Industry Park tentang Penyediaan LNG & Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi di IPIP.
c. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dan PT Bintan Inti Industrial Estate tentang Rencana Penyediaan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Kawasan Bintan Industrial Estate.
d. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dengan PT Bintan Resort Cakrawala tentang Rencana Penyediaan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Kawasan Bintan Resort Cakrawala.
e. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dan PT Panbil Utilitas Sentosa tentang Rencana Penyediaan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Kawasan Industri Panbil Tembesi.
f. Pokok-Pokok Perjanjian antara PGN dan PT Galang Bumi Industri tentang Penyediaan Pasokan Gas Bumi dan Infrastruktur Pendukungnya di Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park.
g. MoU antara PGN dan Badan Pelaksana Otorita Danau Tobat tentang Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba berbasis Eco-Tourism.

Dalam upaya untuk meningkatkan performa bisnis, Perusahaan juga terus memperkuat digitalisasi seperti:

1. Integrasi Pembayaran Tagihan Gas Rumah Tangga di aplikasi MyPertamina.
2. Penambahan fitur chatbot pada WhatsApp Official PGN 081541500645, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi 50% lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Integrasi dengan Pertamina *Call Center* 135, menyederhanakan pengalaman layanan pelanggan Pertamina Group pada saluran *call center* yang sama.
4. *Landing page* www.pgas.id telah mudah ditemukan dari *search engine* paling populer di Indonesia untuk mendapatkan *product knowledge* produk Gaskita (Segmen Residensial & UMKM) dan form berlangganan Gaskita.
5. Landing page www.pgas.id/business telah dilengkapi dengan *product knowledge* Gasline (Segmen Industri & Komersial), fitur "*book an online meeting*" untuk *meeting* dengan Tim Sales PGN serta *self-service energy cost efficiency comparison*.

The spirit of collaboration and synergy with other business entities encourages PGN to collaborate with third parties (State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Industrial Estate Management, and other private parties) under the principle of mutual benefit. A number of cooperation that PGN established in 2024 include:

a. Key Points of Agreement between PGN and PT Kalimantan Industrial Park Indonesia on Cooperation in the Provision of Natural Gas
b. Key Points of the Agreement between PGN and PT Indonesia Pomalaa Industry Park on the Provision of LNG and Development of Natural Gas Infrastructure in IPIP.
c. Key Points of Agreement between PGN and PT Bintan Inti Industrial Estate on Plan for Provision of Natural Gas Supply and Infrastructure in Bintan Industrial Estate Area.
d. Key Points of the Agreement between PGN and PT Bintan Resort Cakrawala on the Plan for providing Natural Gas Supply and Infrastructure in the Bintan Resort Cakrawala Area.
e. Key Points of Agreement between PGN and PT Panbil Utilitas Sentosa on Plan for Provision of Natural Gas Supply and Infrastructure in Panbil Tembesi Industrial Area.
f. Key Points of Agreement between PGN and PT Galang Bumi Industri on Provision of Natural Gas Supply and Supporting Infrastructure in Wiraraja Green Renewable Energy Industrial Estate and Smart-Eco Industrial Park.
g. MoU between PGN and the Lake Tobat Executive Authority Agency on the Lake Toba Tourism Area Development Plan based on Eco-Tourism.

In an effort to improve business performance, the Company also continues to strengthen digitalization, such as:

1. The integration of Household Gas Bill Payments in the MyPertamina application.
2. An addition of a chatbot feature to the Official PGN WhatsApp 081541500645 to facilitate customers in getting information 50% faster than the previous year.
3. The integration with Pertamina Call Center 135, which simplifies the Pertamina Group customer service experience on the same call center channel.
4. It is now much easier to find www.pgas.id landing page using the most popular search engines in Indonesia to get product knowledge of Gaskita products (Residential & MSME Segments) and Gaskita subscription forms.
5. The landing page www.pgas.id/business now comes with Gasline product knowledge (Industrial & Commercial Segments), a "book an online meeting" feature for meetings with the PGN Sales Team, and self-service energy cost efficiency comparison.

6. Penambahan kanal sosial media pada platform TikTok yaitu @gas_negara, untuk memperluas cakupan target audience yang lebih muda, dan tetap konsisten pada kanal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube.
7. Penambahan fitur pada PGN Mobile, yaitu Catat Meter Mandiri dan *tracking* layanan teknis yang mempermudah pelanggan untuk memeriksa progres perbaikan yang diminta melalui PGN Contact Center.
8. Peningkatan fitur pada *Operation Support System* sehingga sistem informasi untuk keperluan administratif dalam proses berlangganan gas dan program layanan lainnya dapat terintegrasi serta menghasilkan *output* yang lebih optimal.
9. Enhancement PGN Mobile
   Aplikasi resmi PGN Mobile version terbaru yang dapat diunduh melalui Apps Store dan Google Play Store, kini telah di-*update* dengan berbagai informasi mengenai pemakaian dan tagihan gas bumi, produk & layanan, lokasi SPBG, catat meter mandiri dan fitur lainnya. Pengembangan fitur dilakukan secara berkelanjutan yaitu fitur untuk monitor progres Berlangganan gas, pengajuan layanan baik komersial & teknis serta Gas Poin. Penambahan fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan dan *engagement* ke Pelanggan.
10. PGN Partner, merupakan aplikasi resmi PGN untuk pelaporan aktivitas lapangan, termasuk pada pelaporan gas in pelanggan rumah tangga. Sehingga seluruh proses bisnis pemasangan gas bumi ke pelanggan dapat terekam secara digital. PGN Partner juga telah ditambahkan fitur *tagging* koordinat untuk mengetahui lokasi pelanggan yang telah dilakukan Gas In oleh petugas lapangan sehingga data tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang memperbaharui jaringan pipa gas. PGN Partner sedang dilakukan pengembangan untuk pelaporan pekerjaan pemasangan pipa servis, pipa instalasi dan meter Gas. Sehingga memberikan kemudahan monitoring progres pekerjaan konstruksi di Pelanggan serta mendukung digitalisasi dan otomatisasi.
11. Registrasi dan Layanan *Online* PGN (*Rely On* PGN)
    Digitalisasi proses administrasi berlangganan gas rumah tangga menggunakan sistem Registrasi dan Layanan *Online* (*Rely On*) PGN telah dimanfaatkan lebih dari 750 ribu data pendaftar gas rumah tangga. Peningkatan *security* aplikasi ini terus dilakukan untuk menjaga data pribadi dari pendaftar gas bumi.
12. Laman Pertiwi
    Kini akses informasi mengenai pengunaan gas harian, sudah dapat diakses oleh pelanggan Industri dan Komersial melalui pertiwi.pgn.co.id; memudahkan pengelolaan energi bagi pelanggan non-residensial.
13. Saluran Pembayaran
    PGN terus menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan maupun penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk mempermudah mekanisme pembayaran

6. Addition of social media channels on the TikTok platform, namely @gas_negara, to expand the reach of a younger target audience and remain consistent on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube channels.
7. Additional features on PGN Mobile, namely Independent Meter Recording and technical service tracking, which make it easier for customers to check the progress of repairs requested through the PGN Contact Center.
8. Improved features on the Operation Support System so that the information system for administrative purposes in the gas subscription process and other service programs can be integrated and produce more optimal output.
9. Enhancement PGN Mobile
   The latest official PGN Mobile application version that can be downloaded via the Apps Store and Google Play Store, has now been updated with various information regarding natural gas usage and bills, products & services, SPBG locations, independent meter recording and other features. Feature development is carried out continuously, namely features to monitor gas subscription progress, submitting commercial & technical services and Gas Points. The addition of these features is expected to improve service and engagement with Customers.
10. PGN Partner, is the official PGN application for reporting field activities, including reporting gas in household customers. This means that PGN can now record the entire business process of installing natural gas to customers digitally. PGN Partner has also added a coordinate tagging feature to find out the location of customers who have been Gas In by field officers so that the data can be integrated with the application that updates the gas pipeline network. PGN Partner is currently developing reporting on the installation of service pipes, installation pipes and Gas meters. This means that it provides easy monitoring of the progress of construction work for Customers and supports digitalization and automation.
11. PGN Online Registration and Services (Rely On PGN)
    Digitalization of the household gas subscription administration process using the PGN Online Registration and Services (Rely On) system has been utilized by more than 750 thousand household gas registrant data. The security of this application continues to be improved to protect the personal data of natural gas registrants.
12. Pertiwi Page
    Now access to information regarding daily gas usage can be accessed by Industrial and Commercial customers via pertiwi.pgn.co.id; facilitating energy management for non-residential customers.
13. Payment Channels
    PGN continues to collaborate with financial institutions and financial service providers to improve customer service and satisfaction. The objective is to facilitate the payment mechanism for customers, especially household

pelanggan terutama pelanggan rumah tangga. PGN telah menyediakan berbagai macam saluran pembayaran, di antaranya:

a. Aplikasi: MyPertamina, Gojek, Shopee, Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, BNI Mobile Banking, Livin by Mandiri, BSI Mobile, Klik Indomaret, Bank Lampung
b. E-commerce: Tokopedia, Blibli
c. E-wallet: LinkAja, Gopay, DANA
d. Bank (ATM): BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, dan CIMB Niaga
e. Minimarket: Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Alfamidi
f. Lain-lain: Payment Point Online Banking (PPOB), Pos Indonesia, Pegadaian

Hal ini merupakan bentuk peningkatan layanan prima dan untuk mempermudah pelanggan melaksanakan kewajiban pembayaran.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN

Pada tahun 2024, selain pemasaran *offline*, PGN melanjutkan langkah-langkah kreatif secara digital yang berkesinambungan guna mencapai target pemasaran, sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion*
   Melakukan *Focus Group Discussion* dengan *stakeholder* seperti Kementrian Perindustrian guna bersinergi dalam pengembangan Kawasan Industri di Indonesia berbasis gas bumi

   Selain itu PGN juga melaksanakan *Focus Group Discussion* bersama Kawasan-Kawasan Industri yang membutuhkan gas bumi terutama untuk Wilayah Timur Indonesia.
2. Transformasi *Hybrid Prospecting*
   Perubahan kebiasaan calon pelanggan dimana mereka lebih memilih untuk berinteraksi melalui multi-channel (*online-offline*) dan *self-service* diakomodir PGN dengan pembuatan laman www.pgas.id/business dengan adanya fitur *Calculate Saving* dan *Book an Online Meeting*.

   Fitur *Calculate Saving* memberikan ilustrasi estimasi penghematan biaya energi yang didapatkan bila beralih menggunakan gas bumi.

   Fitur *Book an Online Meeting* memberikan kemudahan kepada calon pelanggan untuk memilih jadwal meeting dengan Tim Sales PGN. Fitur ini akan men-*generate link online meeting* menggunakan MS Teams antara calon Pelanggan dengan Tim Sales PGN.

customers. PGN has provided various payment channels, including:

a. Applications: MyPertamina, Gojek, Shopee, Tokopedia, Mitra Tokopedia, Blibli, BNI Mobile Banking, Livin by Mandiri, BSI Mobile, Klik Indomaret, Bank Lampung
b. E-commerce: Tokopedia, Blibli
c. E-wallet: LinkAja, Gopay, DANA
d. Banks (ATMs): BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, BCA, and CIMB Niaga
e. Minimarkets: Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Alfamidi
f. Others: Payment Point Online Banking (PPOB), Pos Indonesia, Pegadaian

PGN takes this action as a way to improve excellent services and make it easier for customers to pay their bills.

MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES

The COVID-19 pandemic has accelerated digital interactions between Customers and Companies, therefore in 2023, in addition to offline marketing, PGN started sustainable digital creative measures to achieve marketing targets.

1. Focus Group Discussion
   Conducting Focus Group Discussions with stakeholders such as the Ministry of Industry to synergize in the development of natural gas-based Industrial Estates in Indonesia

   In addition, PGN also conducts Focus Group Discussions with Industrial Estates that need natural gas, especially in the Eastern Region of Indonesia.
2. Hybrid Prospecting Transformation
   Changes in potential customers' habits where they prefer to interact via multi-channel (online and offline) and self-service are accommodated by PGN by creating the www.pgas.id/business page with the Calculate Saving and Book an Online Meeting features.

   The Calculate Saving feature provides an illustration of the estimated energy cost savings obtained for converting to natural gas.

   The Book an Online Meeting feature facilitates potential customers to select a meeting schedule with the PGN Sales Team. This feature will generate an online meeting link using MS Teams between potential customers and the PGN Sales Team.

3. Temu Pelanggan
   Melalui Temu Pelanggan, PGN bisa mendapatkan informasi mengenai rencana pertumbuhan permintaan gas bumi dari pelanggan. Kegiatan yang dilakukan baik kepada pelanggan Rumah Tangga maupun Komersial dan Industri ini juga menjadi momentum bagi PGN untuk menyapa pelanggan secara langsung, menjalin interaksi yang lebih erat, menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan melalui saluran komunikasi dalam format kegiatan temu bisnis, sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh kategori pelanggan, baik itu *Bronze, Silver, Gold,* maupun *Platinum*.

   PGN sebagai Subholding Gas berkomitmen untuk melakukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi dengan *stakeholder* untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan utilisasi gas bumi serta memberikan nilai tambah terhadap layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tujuannya untuk tumbuh bersama-sama secara berkelanjutan.
4. *City Gas Tour*
   Tahun 2024 merupakan tahun ketiga diadakannya *City Gas Tour,* yaitu kegiatan *food truck* keliling kota sebagai sarana jaringan gas rumah tangga. Kegiatan lain yang dilakukan adalah demo memasak dan senam bersama. Titik singgah City Gas Tour tahun ini adalah kota Jakarta, Palembang, Lampung, Bogor, Tangerang, dan Semarang.
5. Media Sosial
   PGN secara konsisten memberikan konten promosi dan *product knowledge* di semua kanal media sosial.

PENGEMBANGAN PRODUK

Pada tahun 2024, PGN terus melakukan pengembangan produk untuk meningkatkan performa penjualan di tiap segmen pelanggan. Informasi pengembangan produk yang dilakukan PGN di antaranya:

1. Gas Hasil Regasifikasi
   PGN perlu meningkatkan ketersediaan pasokan gas termasuk penambahan pasokan dari regasifikasi LNG. Pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diperlukan sebagai *balancer* dari fluktuasi pasokan gas pipa eksisting, baik karena terjadinya gangguan pada sumur gas maupun adanya pemeliharaan rutin oleh pemasok.
2. Pengembangan Produk untuk Memfasilitasi Fleksibilitas Kontrak
   Pemberlakuan basis kontrak kepada Pelanggan yang semula hanya tersedia basis kontrak bulanan menjadi tersedia beberapa pilihan basis kontrak antara lain bulanan, tahunan dan harian. Pengembangan produk berbasis kontrak tersebut memberikan *value* bagi Pelanggan melalui fleksibilitas dalam menggunakan gas sesuai dengan rencana dan kebutuhan Pelanggan. Pengembangan produk tersebut merupakan suatu langkah *continuous improvement* yang dilakukan PGN dan sebagai aksi nyata tindak lanjut PGN atas *customer voice* yang disampaikan Pelanggan dalam survei kepuasan Pelanggan.

3. Meeting Customers
   Customer meeting activities enable PGN to obtain information from customers regarding plans for growth in natural gas demand. The activity, which aims at both Households and Commercial and Industrial customers, has become a momentum for PGN to greet customers directly, to establish closer interactions, to create new experiences for customers through communication channels in business meeting activities setting while showing appreciation to all categories of customers, both Bronze, Silver, Gold, or Platinum.

   As a Gas Subholding, PGN is committed to enabling synergy, collaborations, and integration with stakeholders to promote infrastructure development and natural gas utilization while adding value to services provided to communities across the country. The objective is to grow together in a sustainable manner.
4. City Gas Tour
   2024 is the third year of the City Gas Tour, which is a food truck activity around the city as a means of household gas networks. Other activities include cooking demonstrations and gymnastics. This year's City Gas Tour stops were Jakarta, Palembang, Lampung, Bogor, Tangerang and Semarang.
5. Social Media
   PGN consistently provides promotional content and product knowledge on all social media channels.

PRODUCT DEVELOPMENT

In 2024, PGN has carried out several product developments to improve sales performance in each customer segment.

1. Regasified Gas
   PGN needs to increase the availability of gas supply including additional supply from LNG regasification. What it needs further is the supply of gas from LNG regasification as a balancer for fluctuations in the existing pipeline gas supply due either to disruptions in gas wells or routine maintenance by suppliers.
2. Product Development to Facilitate Contract Flexibility

   The application of a contract basis to customers, which was previously only available on a monthly contract basis, now provides several contract basis options, including daily, monthly, and annually. The contract-based product development provides value for customers through flexibility in using gas according to customer plans and needs. The product development is a continuous improvement measure carried out by PGN and as a concrete follow-up action by PGN for the customers' voice in the Customer satisfaction survey.

Selain produk berbasis kontrak tersebut di atas, PGN juga memberikan pilihan-pilihan produk tambahan kepada Pelanggan seperti "*Spot Gas*" untuk Pelanggan yang membutuhkan gas lebih dari Pemakaian Maksimum per Bulan Kontrak Pelanggan, "Gas Substitusi" untuk memenuhi kebutuhan energi Pelanggan dalam kondisi terjadi gangguan penyaluran gas pipa dan "Multi Destinasi" untuk memberikan fleksibilitas Pelanggan Group dalam menggunakan gas.

3. *Positioning* Produk di Pelanggan dan Pasar
   Pada tahun 2024, PGN memberlakukan berbagai promosi-promosi kepada Pelanggan Komersial dan Industri melalui pemberian harga gas yang kompetitif (program promosi *Overage*, *Slice* dan *Early Flare*, *Starter Pack*) dan fleksibilitas atas ketentuan komersial (program promosi *Breakout*) sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.

   Adapun tujuan PGN memberlakukan promosi tersebut adalah untuk memberikan manfaat secara optimal dan peningkatan efisiensi biaya dalam penggunaan gas kepada Pelanggan sebagaimana *positioning* produk Gasline.

   Dalam menjaga *positioning* produk kepada Pelanggan serta untuk memberikan dan menciptakan *customer experience* serta kemudahaan dalam pelaksanaan komersialisasi Gas kepada Pelanggan dan *improvement* proses bisnis, PGN mengembangkan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Pertiwi. Aplikasi Pertiwi ini merupakan bentuk transformasi digital dimana seluruh proses *acquisition, evaluation, retetention* dan *attrition* dilakukan dalam suatu platform yang akan memberikan kemudahan bagi PGN dan Pelangan dalam melakukan interaksi.

4. Pengembangan Solusi *Beyond Pipeline*
   Pada tahun 2024, PGN terus memperluas wilayah pemasaran untuk produk GasLink kepada pelanggan sektor Komersial dan Industri. Produk ini merupakan solusi penyaluran gas bumi *beyond pipeline*, baik itu berupa CNG maupun LNG untuk calon pelanggan sektor Komersial dan Industri. GasLink LNG, mulai dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga upaya penurunan karbon dari pelaku industri hotel dan restoran. Sampai dengan akhir tahun 2024, tercatat terdapat 527 pelanggan yang sudah menjadi pengguna GasLink.

In addition to the abovementioned contract-based products, PGN also provides additional product options to Customers such as "Spot Gas" for Customers requiring more Gas than the Customer Contract's Maximum Gas Usage, "Gas Substitusi" to meet Customer energy needs in the event of disruptions in the pipeline Gas distribution, and "Multi Destinasi" to provide Gas usage flexibility for Group Customers.

3. Product Positioning in Customers and Markets
   In 2023, PGN implemented a variety of promotions for Commercial and Industrial Customers by providing competitive gas prices (Overage, Slice and Early Flare, and Starter Pack promotional programs) and flexibility over commercial terms (Breakout promotional program) in accordance with applicable terms and conditions.

   PGN's aim in implementing this promotion is to provide optimal benefits and increase cost efficiency in gas usage to Customers as per the positioning of the Gasline product.

   In terms of maintaining product positioning for Customers and to provide and create customer experience as well as convenience in implementing Gas commercialization for Customers and improving business processes, PGN developed a web-based application, namely the Pertiwi application. The Pertiwi application is a form of digital transformation in which the entire acquisition, evaluation, retention, and attrition processes are carried out on a platform that facilitates PGN and Customers to interact.

4. Development of Beyond-Pipeline Solutions
   In 2024, PGN expanded its marketing areas for GasLink products to customers in the Commercial and Industrial sector. This product is a solution for distributing natural gas in CNG and LNG, using beyond pipeline modes, for prospective customers in the Commercial and Industrial sector. GasLink LNG began to be marketed to meet energy needs and serve as efforts to reduce carbon from industrial actors in the hotel-restaurant sector. Until the end of 2024, there were 527 customers recorded as GasLink users.

POSITIONING PRODUK DI PASAR DAN KONSUMEN

Positioning dari produk gas bumi PGN secara umum adalah untuk pemenuhan bahan bakar gas bumi yang selalu tersedia, praktis tanpa ruang penyimpanan, ekonomis dan paling ramah lingkungan. Pembagian produk gas bumi disesuaikan dengan kategori segmen konsumen yakni Gaskita untuk Pelanggan Residensial & Usaha Kecil diposisikan sebagai "Juaranya Gas Ngalir Terus" karena nilai jualnya sebagai bahan bakar yang selalu tersedia. Gasline untuk Pelanggan Industri & Komersial diposisikan sebagai "Your Energy Efficiency Partner". Gaslink untuk Pelanggan Industri & Komersial diposisikan sebagai "Bring Energy to You" karena diperuntukan untuk pelanggan yang berada jauh dari pipa gas PGN sehingga disalurkan melalui CNG. Gasku khusus untuk pelanggan transportasi diposisikan sebagai "Melaju Dengan Bersih" karena moda transportasi yang menggunakan gas bumi lebih ramah lingkungan dibanding energi fosil lainnya.

PRODUCT POSITIONING IN THE MARKET AND CONSUMERS

In general, the positioning of PGN's natural gas products is to fulfill natural gas needs as a fuel that is always available, practical with no need for storage, economical, and the most environmentally friendly. The division of natural gas products is adjusted to the consumer segment category, namely Gaskita (literally Our Gas in Bahasa) for Residential & Small Business Customers and positioned as the "Juaranya Gas Mengalir (Undisputed Flowing Gas) as a fuel for its at-all-time availability. Gasline for Industrial & Commercial Customers is positioned as "Your Energy Efficiency Partner". Gaslink for Industrial & Commercial Customers is positioned as "Bring Energy to You" because it is intended for customers residing not anywhere near PGN gas pipes, so the gas needs to be distributed via CNG. Gasku is for transportation customers and is positioned as "Melaju dengan Bersih" (literally Driving Cleanly) since gas-powered transportation mode is more eco-friendly than other modes run on fossil energy.

ALOKASI DANA/BIAYA PEMASARAN/BIAYA PENGELOLAAN PELANGGAN DAN EFISIENSI

Pada tahun 2024, PGN melakukan komunikasi pemasaran melalui *online channel* yang kembali terbukti berhasil meningkatkan efisiensi untuk mengenalkan produk gas bumi milik PGN dan mendapatkan data registrasi calon pelanggan. Aktivitas ini dilakukan melalui pengiklanan/promosi pada *platform* Google Ads dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga bekerja sama dengan *influencer sosial media*.

Secara konsisten, PGN juga berupaya untuk meningkatkan standar layanan guna menciptakan pelayanan prima bagi pelanggan. Hal ini merupakan cara PGN untuk membuktikan kesungguhan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan bisnis maupun kompetitor di masa yang akan datang. Untuk itu, PGN melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index* – CSI) tahun 2024 dengan menggunakan acuan 5 aspek kualitas layanan yang diperkenalkan oleh Zeithaml, Bitner dan Parasuraman, yaitu *Reliability, Responsive, Assurance, Empathy* dan *Tangible* (RRAET).

Pada tahun 2024, PGN berhasil mendapatkan nilai CSI sebesar 4,66 dari skala 5 (SANGAT BAIK). Sementara itu, untuk Indeks Loyalitas Pelanggan (*Customer Loyalty Index* - CLI) tahun 2024 mendapatkan nilai 4,36 dari skala 5 (SANGAT BAIK). Lebih jauh lagi, PGN juga melakukan pengukuran *Net Promoter Score* atau tingkat keinginan pelanggan memberikan rekomendasi untuk menggunakan produk dan layanan PGN sebesar 60.36. Sepanjang tahun 2024, PGN telah mengeluarkan biaya sebesar USD1,92 juta untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan kepada pelanggan.

ALLOCATION OF FUNDS/ MARKETING COSTS/ CUSTOMER MANAGEMENT FEES AND EFFICIENCY

In 2024, PGN carried out marketing communications through online channels, which have again proven successful in increasing efficiency in introducing PGN's natural gas products and obtaining registration data for potential customers. These activities include carrying out digital marketing activities through advertising/ promotions on the Google Ads platform and social media, such as Facebook, Instagram, Twitter and collaborating with social media influencers.

PGN also consistently improves service standards to provide excellent services for customers. Through this measure, PGN demonstrates its commitment to increasing customer satisfaction and loyalty while also preparing to face various future business challenges and competitors. To that end, PGN conducted the 2024 Customer Satisfaction Index (CSI) using the five service quality aspects introduced by Zeithaml, Bitner, and Parasuraman, namely Reliability, Responsive, Assurance, Empathy, and Tangible (RRAET).

In 2023, PGN managed to get a CSI score of 4.66 on a 5 (VERY GOOD) scale. Meanwhile, the Customer Loyalty Index (CLI) for 2023, with a score of 4.36 on a 5 (VERY GOOD) scale. Furthermore, PGN also measured the Net Promoter Score, or the willingness of customers to recommend PGN's products and services, at 58.18. during 2023, PGN spent USD1,630,934.63 to promote improved service quality and customer satisfaction.

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Dalam era digital saat ini, Teknologi Informasi (TI) memainkan peran penting dalam transformasi bisnis, menciptakan peluang baru, dan mendorong efisiensi operasional di seluruh sektor. PGN menyadari bahwa TI telah berkembang dari sekadar fungsi pendukung menjadi elemen strategis inti yang esensial untuk menavigasi tantangan pasar yang dinamis. Oleh karena itu, pengembangan TI sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing Perusahaan.

PGN secara proaktif mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan keandalan infrastruktur dan mendukung transformasi ekonomi hijau. Transformasi digital ini mencakup seluruh rantai proses bisnis gas, mulai dari operasi hingga manajemen pelanggan, melalui solusi TI yang menggabungkan Teknologi Operasional (OT) dan Teknologi Informasi (IT).

In the current digital era, Information Technology (IT) is pivotal in business transformation, creating new opportunities, and driving operational efficiency across all sectors. PGN recognizes that IT has evolved from a mere support function to a core strategic element, essential for navigating dynamic market challenges. Consequently, IT development is vital in enhancing the Company's efficiency, productivity, and competitiveness.

PGN has proactively integrated technology to improve infrastructure reliability and support green economic transformation. This digital transformation encompasses the entire gas business process chain, from operations to customer management, through IT solutions that merge Operational Technology (OT) and Information Technology (IT).

Ke depan, PGN mengakui beberapa tantangan TI global yang dapat mempengaruhi operasinya, antara lain:

- **Ancaman Keamanan Siber**
  Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, risiko serangan siber menjadi lebih nyata, sehingga diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dan infrastruktur.
- **Kemajuan Teknologi yang Pesat**
  Kecepatan inovasi teknologi yang cepat memerlukan adaptasi dan investasi berkelanjutan untuk tetap kompetitif dan memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.
- **Manajemen dan Analisis Data**
  Pertumbuhan data yang eksponensial menghadirkan tantangan dalam manajemen dan analisis yang efektif, yang penting untuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang tepat.

Dengan secara proaktif menghadapi tantangan-tantangan ini melalui integrasi dan inovasi TI yang strategis, PGN menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di sektor energi yang terus berkembang.

FOKUS DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Pada tahun 2024, PGN terus memperkuat fokus strategis dan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) guna mendukung pencapaian target strategis Perusahaan, inisiatif strategis yang menjadi landasan utama dalam transformasi Perusahaan. ICT berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung operasi perusahaan yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada data.

ICT PGN telah menetapkan lima fokus utama untuk mendorong transformasi digital, yaitu solusi berbasis data (*Data-Driven Solution*) untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, aplikasi sebagai pendukung bisnis (*Application as Business Enabler*) yang memungkinkan integrasi proses operasional, serta solusi ERP (*ERP Solution*) untuk memastikan efisiensi dan transparansi proses bisnis. Selain itu, keandalan infrastruktur (*Infrastructure Reliability & Availability*) menjadi prioritas utama untuk memastikan kesinambungan operasional, diikuti dengan tata kelola ICT yang sinergis (*ICT Governance, Synergy & Strategic Planning*) guna memastikan harmonisasi antara teknologi dan strategi bisnis.

Sebagai bagian dari *roadmap* ICT 2021-2026, PGN berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas digitalisasi yang mencakup penguatan tata kelola data, integrasi infrastruktur IT dan OT, serta penerapan teknologi canggih untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan operasional. Strategi ini tidak hanya memperkuat fondasi teknologi perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui efisiensi, produktivitas, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Looking ahead, PGN acknowledges several global IT challenges that could impact its operations:

- **Cybersecurity Threats**
  As dependence on digital technology increases, the risk of cyber-attacks becomes more pronounced, necessitating robust security measures to protect data and infrastructure.
- **Rapid Technological Advancements**
  The swift pace of technological innovation requires continuous adaptation and investment to stay competitive and meet evolving market demands.
- **Data Management and Analysis**
  The exponential growth of data presents challenges in effective management and analysis, essential for informed decision-making and strategic planning.

By proactively addressing these challenges through strategic IT integration and innovation, PGN demonstrates its commitment to maintaining a competitive edge and ensuring sustainable growth in the evolving energy sector.

STRATEGIC FOCUS AND POLICY

In 2024, PGN has continued to strengthen its strategic focus and policies in the field of Information and Communication Technology (ICT) to support the achievement of the Company's strategic targets, strategic initiatives that serve as the main foundation in the Company's transformation. ICT serves as a key role in supporting the increasingly integrated and data-oriented company operations.

ICT PGN has identified five key focus areas to drive digital transformation, namely Data-Driven Solutions for more accurate decision-making, Applications as Business Enablers that allows the integration of operational processes, and ERP Solutions to enhance efficiency and transparency in business operations. Additionally, Infrastructure Reliability and Availability is a top priority to ensure business continuity, complemented by ICT Governance, Synergy, and Strategic Planning to align technology with business strategies.

As part of its 2021-2026 ICT roadmap, PGN is committed to enhancing digital capabilities by strengthening data governance, integrating IT and OT infrastructures, as well as adopting advanced technologies to support innovation and sustainable operations. This strategy not only fortifies the Company's technological foundation but also delivers added value through improved efficiency, productivity, and risk management.

REALISASI PROGRAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tujuan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi selain untuk mendukung proses bisnis Perusahaan, juga untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis, serta mengakomodir perubahan yang terjadi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang melalui peningkatan keandalan, keamanan, dan kapabilitas internal Teknologi Informasi. PGN mengembangkan Teknologi Informasi yang terarah dan efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan serta mampu memberikan nilai lebih terhadap percepatan pertumbuhan bisnis.

Selama tahun 2024, PGN telah menjalankan berbagai program kerja utama dalam bidang Teknologi Informasi agar dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk pengembangan bisnis Perusahaan.

Beberapa realisasi program penyelenggaraan Teknologi Informasi pada tahun 2024, sebagai berikut:

Aplikasi PGN Mobile

Aplikasi PGN Mobile adalah aplikasi berbasis mobile yang diluncurkan oleh PGN untuk mendukung digitalisasi layanan kepada pelanggan rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK). Program ini dirancang dan dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui fitur-fitur baru seperti self-meter recording, monitoring penggunaan gas, pembayaran tagihan, notifikasi layanan, dan akses pengaduan langsung. Aplikasi ini juga mengintegrasikan teknologi terbaru untuk menjamin keandalan, keamanan, dan kemudahan akses.

Pencapaian ini menunjukkan progres yang signifikan dalam mendukung transformasi digital PGN, dengan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pelanggan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelanggan dan operasional perusahaan. Evaluasi atas program PGN Mobile mencakup:

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION PROGRAM

The purpose of optimizing the use of Information Technology is not only to support the Company's business processes but also to accelerate business growth, as well as adapt to both short-term and long-term changes by improving the reliability, security, and internal capabilities of Information Technology. PGN develops targeted and effective Information Technology tailored to the needs and capable of adding value to accelerating business growth.

Throughout 2024, PGN has implemented a number of significant work programs in the field of Information Technology with the objective of becoming one of the driving factors in the Company's business development.

Some of the primary programs are part of the Digital Transformation Program series, including:

Aplikasi PGN Mobile

The PGN Mobile application is a mobile-based application that was launched by PGN to support the digitalization of services to household customers and small-scale customers. This program is designed and developed to improve customer experience through new features, such as self-meter recording, gas usage monitoring, bill payments, service notifications, and direct complaint access. This application also integrates the latest technology to ensure reliability, security, and ease of access.

This achievement exhibits significant progress in supporting PGN's digital transformation, while still focusing on improving the quality of customer service, subsequently able to provide maximum benefits for customers and company operations. Evaluation of the PGN Mobile program includes:

KATEGORI DAMPAK
Impact Category

Kategori Dampak Impact Category	Penjelasan	Explanation
Business	Program PGN Mobile memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya operasional perusahaan. Dengan fitur *self-meter recording* dan digitalisasi pembayaran, program ini telah mengurangi biaya operasional, yang mencerminkan efisiensi dari total biaya manual operasional terkait pencatatan dan pembayaran pelanggan. Dampak ini berkontribusi secara langsung pada kinerja keuangan PGN.	The PGN Mobile program has a positive impact on the efficiency of the Company's operational costs. With the self-meter recording and payment digitization features, this program has reduced operational costs, which reflects the efficiency of the total manual operational costs related to customer recording and payments. This impact contributes directly to PGN's financial performance.
Process Improvement	PGN Mobile mempercepat proses bisnis Perusahaan, terutama dalam pencatatan meter gas pelanggan dan pengelolaan pengaduan. Proses pencatatan meter kini dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, sementara waktu penyelesaian pengaduan pelanggan mengalami penurunan dari rata-rata hari kerja.	PGN Mobile accelerates the Company's business processes, especially in recording customer gas meters and managing complaints. The meter recording process can now be completed faster, compared to the previous manual method, while the time to resolve customer complaints has decreased in terms of average working day.
System Improvement	Program ini mendukung peningkatan kapabilitas sistem TI PGN melalui penerapan teknologi modern untuk pemantauan performa aplikasi dan untuk integrasi data. Peningkatan ini menghasilkan sistem dengan *uptime* sesuai target minimum dan mengurangi laporan gangguan sistem dengan memberikan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya.	This program supports the improvement of PGN's IT system capabilities through the implementation of modern technology for monitoring application performance and for data integration. This improvement results in a system with an uptime that is in accordance with the minimum target and reduces system disruption reports by providing higher reliability compared to the previous version.

Kategori Dampak Impact Category	Penjelasan	Explanation
Regulatory	Program ini memastikan kepatuhan PGN terhadap regulasi pemerintah, termasuk UU ITE dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Implementasi aplikasi ini mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan data pelanggan dan keamanan sistem informasi.	This program ensures PGN's compliance with government regulations, including the ITE Law and Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The implementation of this application complies with all provisions related to customer data protection and information system security.
Others	Program ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dengan antarmuka yang lebih modern dan intuitif. Dengan demikian, aplikasi ini berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan yang tercermin dalam survei, di mana tingkat kepuasan meningkat dalam periode pelaporan.	The program also improves the overall customer experience with a more modern and intuitive interface. Accordingly, the application has managed to increase customer satisfaction as reflected in the survey, where satisfaction levels have increased during the reporting period.

Aplikasi PGN Partner

Aplikasi PGN Partner adalah aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan pelanggan, pekerjaan teknis, dan manajemen pendapatan di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Aplikasi ini mencakup integrasi sistem *mobile* dan CMS (*Content Management System*) yang memungkinkan pengelolaan pekerjaan konstruksi, layanan pelanggan, serta pengawasan operasional secara *real-time*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keandalan sistem, serta memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Dengan menggunakan teknologi terkini, aplikasi ini memastikan fleksibilitas dan kemampuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Evaluasi atas program PGN Partner mencakup:

PGN Partner Application

The PGN Partner application is a digital application designed to support customer management, technical work, and revenue management at PT Perusahaan Gas Negara Tbk. This application includes the integration of mobile systems and CMS (Content Management System), which allows the management of construction work, customer service, and operational monitoring in real-time. This program aims to improve operational efficiency, system reliability, and ensuring a better customer experience.

By using the latest technology, this application ensures flexibility and the ability to support the Company's business growth. Evaluation of the PGN Partner program includes:

KATEGORI DAMPAK
Impact Category

Kategori Dampak Impact Category	Penjelasan	Explanation
Business	Program PGN Partner memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya operasional perusahaan. Dengan fitur pengelolaan pekerjaan konstruksi, layanan pelanggan, serta pengawasan operasional, program ini telah mengurangi biaya operasional.	The PGN Partner program has a positive impact on the efficiency of the Company's operational costs. With construction work management, customer service, and operational supervision features, this program has reduced operational costs.
Process Improvement	PGN Partner mempercepat proses bisnis perusahaan, terutama dalam pengelolaan pelanggan, pekerjaan teknis, dan manajemen pendapatan.	PGN Partner accelerates the Company's business processes, especially in customer management, technical work, and revenue management.
System Improvement	Program ini mendukung peningkatan kapabilitas sistem TI PGN melalui penerapan teknologi modern untuk pemantauan performa aplikasi dan untuk integrasi data. Peningkatan ini menghasilkan sistem dengan *uptime* sesuai target minimum dan mengurangi laporan gangguan sistem dengan memberikan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya.	This program supports the improvement of PGN's IT system capabilities through the implementation of modern technology for monitoring application performance and for data integration. This improvement results in a system with an uptime that is in accordance with the minimum target and reduces system disruption reports by providing higher reliability compared to the previous version.
Regulatory	Program ini memastikan kepatuhan PGN terhadap regulasi pemerintah, termasuk UU ITE dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Implementasi aplikasi ini mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan data pelanggan dan keamanan sistem informasi.	This program ensures PGN's compliance with government regulations, including the ITE Law and Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The implementation of this application complies with all provisions related to customer data protection and information system security.
Others	Program ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dengan antarmuka yang lebih modern dan intuitif. Dengan demikian, aplikasi ini berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan yang tercermin dalam survei, di mana tingkat kepuasan meningkat dalam periode pelaporan.	The program also improves the overall customer experience with a more modern and intuitive interface. Accordingly, the application has managed to increase customer satisfaction as reflected in the survey, where satisfaction levels have increased during the reporting period.

Aplikasi Rely On

Aplikasi Rely On adalah aplikasi digital yang dikembangkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mendukung pengelolaan operasional, verifikasi data pelanggan, dan manajemen infrastruktur gas bumi. Pada tahun 2024, PGN mengimplementasikan Aplikasi Rely On, yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem, keamanan data, serta efisiensi operasional.

Program ini dirancang untuk memastikan sistem Rely On berjalan secara optimal, aman, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Evaluasi atas penyelenggaraan TI mencakup:

Rely On Application

The Rely On application is a digital application developed by PT Perusahaan Gas Negara Tbk to support operational management, customer data verification, and natural gas infrastructure management. In 2024, PGN implemented the Rely On Application, with the objective to improve system reliability, data security, and operational efficiency.

This program is designed to ensure that the Rely On system runs optimally, safely, and in line with business needs. Evaluation of IT implementation includes:

KATEGORI DAMPAK
Impact Category

Kategori Dampak Impact Category	Penjelasan	Explanation
Business	Aplikasi Rely On memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya operasional perusahaan. Dengan fitur pengelolaan operasional, verifikasi data pelanggan, dan manajemen infrastruktur gas bumi, program ini telah mengurangi biaya operasional.	The Rely On application has a positive impact on the efficiency of the Company's operational costs. With operational management features, customer data verification, and natural gas infrastructure management, this program has reduced operational costs.
Process Improvement	Aplikasi Rely On meningkatkan keandalan sistem, keamanan data, serta efisiensi operasional.	The Rely On application improves system reliability, data security, and operational efficiency.
System Improvement	Program ini mendukung peningkatan kapabilitas sistem TI PGN melalui penerapan teknologi modern untuk pemantauan performa aplikasi dan untuk integrasi data. Peningkatan ini menghasilkan sistem dengan *uptime* sesuai target minimum dan mengurangi laporan gangguan sistem dengan memberikan keandalan yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelumnya.	This program supports the improvement of PGN's IT system capabilities through the implementation of modern technology for monitoring application performance and for data integration. This improvement results in a system with an uptime that is in accordance with the minimum target and reduces system disruption reports by providing higher reliability compared to the previous version.
Regulatory	Program ini memastikan kepatuhan PGN terhadap regulasi pemerintah, termasuk UU ITE dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Implementasi aplikasi ini mematuhi semua ketentuan terkait perlindungan data pelanggan dan keamanan sistem informasi.	This program ensures PGN's compliance with government regulations, including the ITE Law and Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The implementation of this application complies with all provisions related to customer data protection and information system security.
Others	Program ini juga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dengan antarmuka yang lebih modern dan intuitif. Dengan demikian, aplikasi ini berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan yang tercermin dalam survei, di mana tingkat kepuasan meningkat dalam periode pelaporan.	The program also improves the overall customer experience with a more modern and intuitive interface. Accordingly, the application has managed to increase customer satisfaction as reflected in the survey, where satisfaction levels have increased during the reporting period.

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT DAN/ATAU PENILAIAN TEKNOLOGI INFORMASI

FOLLOW-UP OF AUDIT AND/OR INFORMATION TECHNOLOGY ASSESSMENT RESULTS

No.	Audit/Penilaian Audit/Assessment	Tahun Year	Asesor/Auditor (Internal/Eksternal) Assessor/Auditor (Internal/External)	Jumlah Tindak Lanjut Total Follow-up	Status	Persentase Tindak Lanjut Selesai Percentage of Follow-up Completed
1.	Tata Kelola TI IT Governance	2024	PT. Mulimatics Indonesia	30	BS	46,15%
2.	*Cyber Security Maturity Level* Cyber Security Maturity Level	2024	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) National Cyber and Crypto Agency (BSSN)	-	S	-
3.	*Surveillance* ISO 27001:2022 Surveillance of ISO 27001:2022	2024	TPT. Bureau Veritas Indonesia	-	S	-
4.	IcoFR	2024	PwC		S	

Keterangan | Description:
BS = Belum Selesai | Not Completed
S = Selesai | Completed
T = Terlambat | Late

REALISASI RENCANA PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI

REALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FINANCING PLAN

IT Spending	Rencana Tahun Plan Year	Realisasi Tahun Year Realization	Persentase terhadap Rencana Percentage of Plan (%)
IT Capex	-	-	-
IT Opex	Rp137.913.488.615	Rp125.201.866.011	90,78%

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK AKSES INFORMASI PERUSAHAAN

PGN berkomitmen untuk terus mengoptimalkan teknologi informasi sebagai pilar utama dalam mendukung keterbukaan informasi, keamanan data, dan efisiensi operasional. Platform teknologi informasi digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan terintegrasi, tepat waktu, dan sesuai sasaran. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, PGN memanfaatkan berbagai kanal digital, termasuk situs resmi Perusahaan www.pgn.co.id, sebagai pusat informasi yang transparan dan dapat diakses publik.

Selain itu, PGN memaksimalkan kehadiran di berbagai platform media sosial seperti Instagram, X, Facebook, dan YouTube, untuk memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Tidak hanya itu, portal Kementerian BUMN juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan dalam lingkungan BUMN.

Lebih jauh lagi, PGN melakukan digitalisasi di seluruh rantai proses bisnis, mulai dari operasional hingga dukungan strategis (*business support*). Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung kinerja Perusahaan agar lebih agile, efektif, dan efisien, baik dari sisi tata kelola bisnis maupun pengelolaan waktu. Digitalisasi ini sejalan dengan *roadmap* ICT PGN, yang mencakup implementasi *AI Analytics Platform*, integrasi data lintas sistem, dan peningkatan kapasitas infrastruktur TI untuk mendukung keberlanjutan operasional Perusahaan.

UTILIZATION OF TECHNOLOGY FOR ACCESS TO COMPANY INFORMATION

PGN is committed to continuously optimizing information technology as a cornerstone in supporting transparency, data security, and operational efficiency. The information technology platform is utilized to ensure that information provided to all stakeholders in an integrated, timely, and targeted manner. To achieve this, PGN utilizes various digital channels, including its official website www.pgn.co.id, as a hub for transparent and accessible public information.

In addition, PGN maximizes its presence on multiple social media platforms such as Instagram, X, Facebook, and YouTube, to expand the reach of its information and enhance interactions with the public. Furthermore, the Ministry of SOEs portal is utilized to strengthen communication among stakeholders within the SOE environment.

Moreover, PGN has undertaken a comprehensive digitalization of its entire business process chain, from operational activities to strategic business support. This initiative aims to enhance the Company's performance to be more agile, effective, and efficient in terms of both business governance and time management. This digital transformation aligns with PGN's ICT roadmap, encompassing the implementation of an AI Analytics Platform, cross-system data integration, and IT infrastructure capacity building to support sustainable business operations.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KEAMANAN SIBER

Tata kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) merupakan fondasi strategis yang dirancang untuk memastikan pengelolaan Teknologi Informasi di PGN dilakukan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan tujuan strategis Perusahaan. Fokus utama tata kelola ini adalah menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi dengan prioritas bisnis, memastikan keamanan informasi, serta mendukung adopsi teknologi yang berkontribusi pada keberlanjutan dan inovasi.

Sebagai pedoman yang mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, serta praktik terbaik internasional, tata kelola Teknologi Informasi di PGN terus ditingkatkan melalui evaluasi yang terukur dan sistematis. Pada tahun 2024, PGN

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AND CYBER SECURITY

Information Technology Governance (IT Governance) serves as a strategic foundation designed to ensure that the management of Information Technology at PGN is conducted effectively, efficiently, and aligned with the Company's strategic goals. The primary objectives of IT governance are to harmonize the utilization of information technology with business priorities, safeguard information security, and promote the adoption of innovative technologies that contribute to sustainability and operational excellence.

As a guideline that refers to compliance with government regulations, the regulations of the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), and international best practices, Information Technology governance at PGN continues to be enhanced through systematic and

telah melakukan pengukuran tingkat maturitas Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi menggunakan standar COBIT 2019, menghasilkan nilai skor rata-rata 3,56. Hasil ini mencerminkan bahwa tata kelola Teknologi Informasi di PGN berada pada level Defined, yang berarti proses-proses telah terdokumentasi, distandarisasi, dan digunakan secara konsisten di seluruh organisasi untuk mendukung operasional yang terintegrasi.

measurable evaluations. In 2024, PGN has conducted an assessment of IT Governance and Management maturity using the COBIT 2019 standards, achieving an average maturity score of 3.56. This result indicates that PGN's IT governance has reached the Defined level, where all processes are consistently documented, standardized, and implemented across the organization to support integrated operations.

Selain itu, dalam menghadapi meningkatnya risiko serangan siber, PGN berkomitmen untuk memperkuat ketahanan keamanan siber melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satunya adalah keberhasilan ICT PGN dalam mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 setelah pelaksanaan *audit surveilans* di tahun 2024. Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ini menjadi bukti bahwa PGN memiliki tata kelola keamanan informasi yang kuat, yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi perusahaan. Implementasi standar ini memastikan PGN mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko keamanan informasi dengan optimal.

In addition, in response to the increasing risk of cyber threats, PGN is committed to strengthening its cybersecurity resilience through a series of strategic initiatives. One of which is the success of PGN's ICT to obtain the ISO 27001:2022 after the surveillance audit in 2024. This Information Security Management System (ISMS) standard is proof that PGN has a robust information security governance, designed to protect the confidentiality, integrity, and availability of company information. The implementation of this standard ensures that PGN is able to identify, manage, and mitigate information security risks optimally.

Pada tahun yang sama, PGN juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan asesmen tingkat kematangan keamanan siber menggunakan standar Cyber Security Maturity Level. Hasil penilaiannya menunjukan bahwa PGN memiliki kontrol dalam tata kelola keamanan siber, deteksi ancaman, dan respon insiden. Untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber, PGN telah membentuk Cyber Incident Response Team (CIRT) melalui SK Direksi No. 039700.L/TI/HCGS/2023 serta menetapkan fungsi Leader Security Information Office (LISO) sebagai penanggung jawab utama keamanan siber di seluruh entitas Subholding Gas.

In the same year, PGN also collaborated with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) to conduct a Cybersecurity Maturity (CSM) using the Cyber Security Maturity Level. The assessment results show that PGN has controls in cybersecurity governance, threat detection, and incident response. To further enhance its cybersecurity posture, PGN has established the Cyber Incident Response Team (CIRT) through the Board of Director's Decree No. 039700.L/TI/HCGS/2023 and designated the Leader Security Information Office (LISO) as the primary function responsible for overseeing cybersecurity across all Gas Subholding entities.

Secara berkala, PGN juga melakukan berbagai upaya proaktif seperti vulnerability assessment dan penetration test terhadap sistem aplikasi yang digunakan, termasuk simulasi *phishing* kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber. Selain itu, kegiatan edukasi seperti webinar keamanan informasi juga diselenggarakan di lingkungan Subholding Gas Pertamina untuk membangun budaya keamanan siber yang tangguh.

Periodically, PGN also implements proactive measures, such as vulnerability assessments and penetration tests on its application systems, including phishing simulations for employees to increase cybersecurity awareness. In addition, educational activities such as information security webinars are also held within Pertamina's Gas Subholding to build a strong cyber security culture.

Dengan berbagai langkah strategis ini, PGN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi dan keamanan siber guna mendukung keberlanjutan bisnis, inovasi, serta perlindungan aset strategis Perusahaan di era transformasi digital.

With these various strategic measures, PGN underscores its unwavering commitment to advancing IT governance and cybersecurity to support business sustainability, innovations, and protect the Company's strategic assets in the digital transformation era.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM TEKNOLOGI INFORMASI

PGN terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi guna memastikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis. Hal ini mencakup pengembangan ide-ide inovatif yang mendukung penyediaan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi.

Pada tahun ini, ICT memiliki 27 Perwira yang telah mengikuti pelatihan bersertifikasi, termasuk 27 program pelatihan umum dan spesifik di bidang Teknologi Informasi. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi 30 kompetensi teknis berdasarkan kebutuhan profil jabatan, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengembangkan kapabilitas SDM yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, seluruh Perwira ICT PGN diwajibkan mengikuti program *e-learning mandatory* terkait Information *Security Easy Course* (i-SEC) secara berkala setiap tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh karyawan terhadap risiko siber yang semakin kompleks, sehingga mendukung keberlanjutan operasi perusahaan yang aman dan efisien.

RENCANA DAN STRATEGI ICT 2025

Pada tahun 2025, PGN melalui unit ICT berkomitmen untuk terus melaksanakan program strategis yang dirancang untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Subholding Gas. Fokus utama dari strategi ini adalah digitalisasi proses bisnis, dengan penekanan pada optimalisasi layanan berbasis teknologi, seperti implementasi *AI Analytics Platform*, integrasi data lintas sistem melalui *Integration Gateway*, serta pengembangan sistem pendukung untuk manajemen infrastruktur TI dan keamanan siber.

Selain itu, ICT PGN juga akan melanjutkan inisiatif strategis seperti penguatan keamanan informasi melalui audit berkala, penilaian risiko siber, serta penerapan standar ISO 27001:2022. ICT PGN telah memprioritaskan pengembangan kapasitas infrastruktur TI, optimalisasi proses, dan penyelarasan teknologi dengan visi bisnis perusahaan.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan memperkuat posisi PGN sebagai perusahaan energi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan *roadmap* yang terstruktur hingga 2026, PGN memastikan bahwa setiap inisiatif strategis ICT berjalan sesuai jadwal dan selaras dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

DEVELOPMENT OF HR COMPETENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY

PGN remains committed to enhancing the competencies of its Human Resources (HR) in the field of Information Technology to ensure a significant contribution to the company's success in business planning and management. This includes fostering innovative ideas that support the development of infrastructure and the optimization of natural gas utilization.

This year, ICT has trained 27 officers who have completed certified training programs, including 27 general and specialized training programs in Information Technology. These programs are designed to fulfill 30 technical competencies aligned with the job profile requirements, consistent with the Company's vision of building a highly competitive workforce.

Furthermore, all ICT PGN officers are required to periodically participate in mandatory annual e-learning programs related to the Information Security Easy Course (i-SEC) every year. This program aims to enhance employees' awareness and understanding of increasingly complex cybersecurity risks, thereby supporting the sustainability of safe and efficient company operations.

PLANS AND STRATEGIES FOR 2025

In 2025, through its ICT division, PGN is committed to continuing strategic programs designed to support digital transformation within the Gas Subholding. The main focus of this strategy is the digitalization of business processes, emphasizing on the optimization of technology-based services, such as the implementation of an AI Analytics Platform, cross-system data integration through the Integration Gateway, and the development of support systems for IT infrastructure management and cybersecurity.

Furthermore, PGN's ICT will continue its strategic initiatives, such as strengthening of information security through regular audits, cyber risk assessments, and the implementation of ISO 27001:2022 standards. PGN's ICT has prioritized the development of IT infrastructure capacity, process optimization, and the alignment of technology with the Company's business vision.

This strategy is expected to enhance productivity, accelerate innovation, and strengthen PGN's position as an energy company adaptive to technological advancements. With a structured roadmap extending to 2026, PGN ensures that all ICT strategic initiatives are executed on schedule and aligned with the Company's business needs.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividend Payment Policy

PGN mengimplementasikan kebijakan dividen yang terukur seperti target rasio pembayaran dividen atau target dividen per lembar sahamnya dengan memperhatikan kinerja dan kemampuan arus kas Perusahaan. PGN menetapkan kebijakan dividen *payout ratio* 50% setiap tahun dengan mengacu pada Prospektus Penawaran Umum Perdana (IPO) tahun 2003, namun penentuan jumlah dividen ini bergantung pada kemampuan Perusahaan dan persetujuan dari Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PGN implements a measurable dividend policy, such as a dividend payment ratio target or dividend per share target by taking into account the Company's performance and cash flow capabilities. Referring to the 2003 Initial Public Offering (IPO) Prospectus, the Company has targeted a dividend payout ratio policy of 50% every year, however, determining the amount of this dividend depends on the Company's capabilities and approval from Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Pada tahun 2024, Perusahaan melalui RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024 memutuskan membagikan dividen tunai sebesar USD222.472.943,20 (setara Rp3.595.162.762.112), atau 80% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2023 yang dibagikan Rp 148,21 per lembar saham.

Pada tahun 2023, Perusahaan melalui RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023 memutuskan membagikan dividen tunai sebesar USD228.367.788 (setara Rp3.419.350.889.793), atau 70% dari laba bersih (pada laporan perubahan ekuitas) dengan dividen tunai Tahun Buku 2022 yang dibagikan Rp141,05 per lembar saham.

Informasi detail mengenai pembagian jumlah dividen yang dibagikan Perusahaan sebagai berikut:

ANNOUNCEMENT AND PAYMENT OF DIVIDENDS

In 2024, through the Annual GMS on May 30, 2024, the Company decided to distribute cash dividends in the amount of USD222,472,943.20 (equivalent to IDR3,595,162,762,112), or 80% of net profit (in the statement of changes in equity) with Rp148.21 per share of cash dividends for the 2023 Financial Year.

In 2023, through the Annual GMS on May 30, 2023, the Company decided to distribute cash dividends in the amount of USD 228,367,788 (equivalent to Rp3,419,350,889,793), or 70% of net profit (as reported in the statement of changes in equity) with Rp141.05 per share of cash dividends for the 2022 Financial Year.

The following is detailed information regarding the distribution of dividends distributed by the Company:

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
Announcement and Payment of Dividends

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Laba Bersih (USD) Net Profit (USD)	278.091.179	326.239.697	303.823.865	(264.773.584)	67.584.090
Dividen (Rp) Dividend (Rp)	3.595.162.762.112	3.419.350.889.793	3.016.128.449.746		1.007.477.080.626
Dividen per saham (Rp) Dividend per share (Rp)	148.31	141,05	124,42		41,56
Jumlah Lembar Saham Number of Shares	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196	24.241.508.196
Dividen Pay Out Ratio (%) Dividend Pay Out Ratio (%)	80	70	68	0	100
Tanggal Pengumuman Announcement Date	05/30/2024	05/30/2023	05/27/2022	05/03/2021	5/15/2020
Tanggal Pembayaran Payment Date	6/26/2024	6/28/2023	6/29/2022		6/18/2020
Dividen setara USD Dividend equivalent in USD	222,472,943.20	228.367.788	205.955.966		67.584.090
Kurs | Currency Rates	16.160	14.973	14.645		14.907

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Hingga akhir tahun 2024, PGN tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

Up to the end of 2024, PGN has no obligation to report the use of funds from the public offering.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Rp Miliar | Rp Billion

Periode Period	Jumlah Hasil Penawaran Umum Total Proceeds of Public Offering	Biaya Penawaran Umum Public Offering Fee	Hasil Bersih Net Proceeds	Setoran ke Kas Negara Deposit to the State Treasury	Pendanaan Proyek SSWJ SSWJ Project Funding	Progres Pendanaan Proyek SSWJ Progress of SSWJ Project Funding	Saldo Akhir Ending Balance
31 Des 2003 Dec 31, 2003	2.527,78	147,239	2.380,54	1.217,21	1.163,33	-	1.163,33
31 Mar 2003 Mar 31, 2003	-	-	-	-	-	-	1.163,33
30 Jun 2004 Jun 30, 2004	-	-	-	-	-	-	1.163,33
30 Sep 2004 Sep 30, 2004	-	-	-	-	-	6.984	1.156,35
31 Des 2004 Dec 31, 2004	-	-	-	-	-	6.748	1.149,60
31 Mar 2005 Mar 31, 2005	-	-	-	-	-	1.19	1.148,41
30 Jun 2005 Jun 30, 2005	-	-	-	-	-	24.766	1.123,64
30 Sep 2005 Sep 30, 2005	-	-	-	-	-	61.249	1.062,39
31 Des 2005 Dec 31, 2005	-	-	-	-	-	516.877	545,517
31 Mar 2006 Mar 31, 2006	-	-	-	-	-	463.361	82,155
30 Jun 2006 Jun 30, 2006	-	-	-	-	-	82.155	-

INFORMASI MENGENAI REALISASI ATAS RENCANA AKSI KORPORASI

Information Regarding the Realization of the Corporate Action Plan

Selama tahun 2024, PGN tidak mencatatkan adanya realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat utang, dan setoran modal.

During 2024, PGN did not record any realization of corporate action plans, such as asset sales, issuance of debt securities, and capital deposits.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

Selama tahun 2024, PGN mencatatkan adanya transaksi material mengenai restrukturisasi utang/modal, yaitu:

During 2024, PGN recorded material transactions related to debt/capital restructuring, namely:

1. PELUNASAN SURAT UTANG SEI
Repayment of SEI Debt Securities

Tanggal Kejadian Date of Event	6 Mei 2024	May 6, 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts	Pelunasan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	Debt Securities and/or Sukuk Repayment
Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information or Facts	1. PT Saka Energi Indonesia (SEI), anak perusahaan yang 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, menerbitkan surat utang senior dengan nilai USD625.000.000 pada tanggal 5 Mei 2017 untuk jangka waktu selama 7 tahun yang dicatatkan di Singapore Exchange (SGX). 2. SEI telah melakukan pembelian kembali Surat Utang di sepanjang tahun 2022 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut: a. Pembelian kembali di tahun 2022 dengan nilai USD248.748.000; dan b. Pembelian kembali di tahun 2023 dengan nilai USD220.000.000. Dengan demikian, sisa surat utang yang masih beredar adalah senilai USD156.252.000. 3. Selanjutnya, atas nilai Surat Utang yang masih beredar sebesar USD156.252.000 telah dilakukan pelunasan pada 6 Mei 2024.	1. PT Saka Energi Indonesia (SEI), a subsidiary whose share are 99% owned by the Company, issued USD625,000,000 senior notes on May 5, 2017, which will mature after a period of 7 years which were listed on the Singapore Exchange (SGX). 2. SEI has conducted a buy back of the Notes during 2022 dan 2023, with the following details: a. Buy back in 2022 with the value of USD248,748,000; and b. Buy back in 2023 with the value of USD220,00,000. Thus, the remaining outstanding Notes amounted to USD156,252,000. 3. Furthermore, for the value of the outstanding Notes amounting to USD156.252.000 has been fully repaid on May 6, 2024.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity	Dampak yang teridentifikasi dari pelunasan Surat Utang adalah sebagai berikut: • Tidak ada nilai Surat Utang yang masih beredar setelah dilakukannya pelunasan pada 6 Mei 2024; • Penggunaan kas internal untuk pelunasan Surat Utang tidak berdampak terhadap likuiditas SEI dan Perseroan.	The impacts identified from the implementation of the repayment of the Notes are as follows: • There were no outstanding Notes after the repayment on May 6,2024. • The internal cash used for the repayment of the Notes has no impact on SEI and the Company's liquidity.

2. PELUNASAN SURAT UTANG PGN

Repayment of PGN Debt Securities

Tanggal Kejadian Date of Event	16 Mei 2024	May 16, 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Type of Material Information or Facts	Pelunasan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	Debt Securities and/or Sukuk Repayment
Uraian Informasi atau Fakta Material Description of Material Information or Facts	1. Perseroan menerbitkan surat utang senior dengan nilai USD1.350.000.000 pada tanggal 16 Mei 2014 untuk jangka waktu selama 10 tahun yang dicatatkan di Singapore Exchange (SGX). 2. Perseroan telah melakukan pembelian kembali Surat Utang di sepanjang tahun 2022 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut: a. Pembelian kembali di tahun 2022 dengan nilai USD400.000.000 pada tanggal 14 Desember 2022 dan USD499.851.000 pada tanggal 31 Mei 2022; dan b. Pembelian kembali di tahun 2023 dengan nilai USD53.440.000 pada tanggal 22 September 2023. Dengan demikian, sisa Surat Utang yang masih beredar adalah senilai USD396.709.000. 3. Selanjutnya, atas nilai Surat Utang yang masih beredar sebesar USD396.709.000 telah dilakukan pelunasan pada 16 Mei 2024.	1. The Company issued USD1,350,000,000 senior notes on May 16, 2014, which will mature after a period of 10 years which were listed on the Singapore Exchange (SGX). 2. Company has conducted a buy back of the Notes during 2022 dan 2023, with the following details: a. Buy back in 2022 with the value of USD400,000,000 on December 14, 2022, and USD499,851,000 on May 31, 2022; and b. Buy back in 2023 with the value of USD53,440,000 on September 22, 2023. Thus, the remaining outstanding Notes amounted to USD396,709,000. 3. Furthermore, for the value of the outstanding Notes in the amount of USD396,709,000 has been fully repaid on May 16, 2024.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha The impact of these material events, information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity	Dampak yang teridentifikasi dari pelunasan Surat Utang adalah sebagai berikut: • Tidak ada nilai Surat Utang yang masih beredar setelah dilakukannya pelunasan pada 16 Mei 2024; • Penggunaan kas internal untuk pelunasan Surat Utang tidak berdampak terhadap likuiditas Perseroan.	The impacts identified from the implementation of the repayment of the Notes are as follows: • There were no outstanding Notes after the repayment on May 16,2024. • The internal cash used for the repayment of the Notes has no impact on the Company's liquidity.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and Affiliated Transactions Merger/ Consolidation, Acquisition, and Debt/ Capital Restructuring

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, PGN tidak mencatatkan adanya transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ATAU BERELASI

Selama tahun 2024, PGN mencatatkan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan yang telah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PGN tanggal 31 Desember 2024, dalam Catatan atas Laporan Keuangan nomor 33 tentang Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi.

Direksi menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan PGN telah melalui prosedur yang memadai, dan terhadap transaksi afiliasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Dalam kegiatan usaha, PGN melakukan transaksi dengan pihak afiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Seluruh transaksi dengan pihak afiliasi dilaksanakan dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICTS OF INTEREST

During 2024, PGN did not record any material transactions containing a conflict of interest.

TRANSACTIONS WITH AFFILIATED OR RELATED PARTIES

During 2024, PGN recorded affiliated transactions as referred to in Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest, which are included in PGN's Consolidated Financial Report dated December 31, 202, in the Notes to the Financial Statements number 33 regarding Significant Balances and Transactions with Related Parties.

The Board of Directors stated that all transactions made by PGN have gone through adequate procedures and that the affiliated transactions have complied with the provisions of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest. In business activities, PGN transacts with affiliated parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with affiliated parties are made with generally accepted business practices and comply with the arm's length principle.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amendments to Laws and Regulations

PGN sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha pengangkutan dan niaga gas bumi serta LNG sesuai perannya sebagai Subholding Gas diwajibkan untuk tunduk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan dan/atau diubah yang terkait langsung dan berdampak signifikan terhadap bisnis operasional yang selama ini dijalankan PGN.

Ringkasan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan antara lain:

As a business entity engaged in the transportation and trading business of natural gas as well as LNG in accordance with its role as Gas Subholding, PGN is required to comply with the provisions of this law. Throughout 2024, there were several regulations issued and/or amended that were directly related and had a significant impact on the operational business carried out by PGN.

Summary of changes to statutory provisions that have a significant impact on the Company and their impact on financial statements are, among others:

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amendments to Laws and Regulations

Peraturan Perundang-undangan Statutory Provisions	Pokok dan Alasan Perubahan Subject and Reason for Change	Dampak terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Statements
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Merupakan peraturan yang mengatur mengenai daftar proyek strategis nasional. Peraturan ini mengubah/memperbaharui daftar proyek strategis nasional yang ditetapkan pada tahun 2021 dan kemudian terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 12 of 2024 on the Sixth Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 7 of 2021 on Amendments to the List of National Strategic Projects.	It is a regulation that regulates the list of national strategic projects. This regulation changes/updates the list of national strategic projects that were set in 2021 and most recently amended through Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 12 of 2024 on the Sixth Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 7 of 2021 on Amendments to the List of National Strategic Projects	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri.	Mengatur mengenai penetapan pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di bidang industri. Penetapan harga gas bumi tertentu terdiri atas volume gas bumi, harga penyesuaian, dan tarif penyaluran gas bumi yang terdiri atas biaya transportasi dan biaya *midstream*. Peraturan ini mengubah/memperbaharui daftar pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di bidang industri yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 of 2024 on Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 on Certain Natural Gas Users and Certain Natural Gas Prices in the Industrial Sector.	Regulates the determination of certain natural gas users and certain natural gas prices in the industrial sector. The determination of certain natural gas prices consists of natural gas volume, adjustment prices, and natural gas distribution tariffs, which consist of transportation costs and midstream costs. This regulation changes/updates the list of certain natural gas users and certain natural gas prices in the industrial sector as previously stipulated in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 173.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2024-2033	Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022-2031 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan gas bumi nasional. Peraturan ini mengatur mengenai rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional untuk tahun 2024 sampai 2033.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 173.K/MG.01/MEM.M/2024 on National Natural Gas Transmission and Distribution Network Master Plan for 2024-2033	This regulation revokes the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No 10.K/MG.01/MEM.M/2023 of 2023 on National Natural Gas Transmission and Distribution Network Master Olan for 2022-2031, which is no longer in accordance with the development and needs of national natural gas. This regulation regulates the national natural gas transmission and distribution network master plan for 2024 to 2033.	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka	Peraturan ini mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pelaporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan kewajiban pelaporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2024 on Reports on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies and Reports on Activities of Pledge of Shares of Public Companies	This regulation revokes the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 of 2017 on Reports of Ownership or Any Changes in Ownership of Shares of Public Companies, which is no longer in accordance with developments and legal requirements. This regulation regulates the obligation to report ownership or any change in ownership of shares of public companies and the obligation to report activities of pledging shares of public companies.	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

Peraturan Perundang-undangan Statutory Provisions	Pokok dan Alasan Perubahan Subject and Reason for Change	Dampak terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Statements
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	Merupakan peraturan yang mengatur mengenai pengembangan dan penguatan pengaturan pada emiten dan perusahaan publik. Salah satu pengaturannya mengubah ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam hal penyampaian laporan dan pengumuman atas informasi atau fakta material sehingga wajib dilakukan sesegera mungkin setelah emiten atau perusahaan publik mengetahui atau selayaknya mengetahui informasi atau fakta material serta penyampaian laporan dan pengumuman informasi atau fakta material paling lambat dilaporkan sebelum dimulainya sesi pertama perdagangan di bursa efek pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya informasi atau fakta material.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 on Development and Strengthening of Issuers and Public Companies	It is a regulation that regulates the development and strengthening of regulations on issuers and public companies. One of the regulations changes the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 of 2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies in terms of submitting reports and announcements of material information or facts to ensure that it must be conducted as soon as possible after the issuer or public company knows or should know the material information or facts and the submission of reports and announcements of material information or facts must be reported no later than prior to the start of the first trading session on the stock exchange on the following business day after the occurrence of material information or facts.	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prosedur Dan Tata Cara Lelang Ruas Transmisi Dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Pemberian Hak Khusus	Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi Dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur dan tata cara lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi untuk pemberian hak khusus.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 2 of 2024 on Auction Procedures and Methods for Transmission Sections and/or Natural Gas Distribution Network Areas for the Granting of Special Rights	This regulation revokes the Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 20 of 2019, on Auction of Transmission Sections and/or Distribution Network Areas of Natural Gas in the Framework of Granting Special Rights, which is no longer in accordance with legal developments and the needs of the Community. This regulation regulates the procedures and methods for auctioning transmission sections and/or distribution network areas of natural gas for the granting of special rights.	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan perubahannya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Peraturan ini mengatur teknis pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam hal pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa.	Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk periode berjalan atau periode tahun sebelumnya sama untuk semua perubahan peraturan.
Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 3 of 2024 on Joint Utilization of Natural Gas Transportation Facilities Through Pipelines	This regulation revokes the Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency No. 15/P/BPH MIGAS/VII/2008, on Joint Utilization of Natural Gas Transportation Facilities Through Pipelines and its amendments that are no longer in accordance with legal requirements. This regulation regulates the technical aspects of natural gas transportation through pipelines in terms of joint utilization of natural gas transportation facilities through pipelines.	It has no significant impact on the financial statements for the current period or the previous year's period.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Changes in Accounting Policies

PGN menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan untuk pertama kali menerapkan seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

1. Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
   Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:
   - hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
   - hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
   - klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
   - hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

   Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari perjanjian pinjaman yang diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.
2. Amendemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik
   Amendemen PSAK 116: Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.
3. Amendemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok
   Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk

PGN prepares Consolidated Financial Statements according to Financial Accounting Standards in Indonesia, which include Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Accounting Standards and Regulations as well as Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Reports issued by the Financial Services Authority (OJK).

The Company first applied all new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after 1 January 2023, including the following revised standards that affect the Group's consolidated financial statements:

1. Amendment of PSAK 201 (formerly PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants
   The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:
   - what is meant by a right to defer settlement,
   - the right to defer must exist at the end of the reporting period,
   - classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
   - only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

   In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.
2. Amendment of PSAK 116 (formerly PSAK 73): Lease liability in a Sale and Leaseback
   The amendment to PSAK 116: Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains
3. Amendment of PSAK 207 (formerly PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60): Supplier Finance Arrangements
   The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding

membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

4. Amendemen PSAK 221 (dahulu PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

   Amendemen tersebut mengklarifikasi bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dan bagaimana entitas harus menentukan nilai tukar spot ketika kemampuan tukarnya kurang, serta mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari adanya mata uang yang bisa ditukar. Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini.

   Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

5. PSAK 117 (dahulu PSAK 74): Kontrak Asuransi
   Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104 (dahulu PSAK 62): Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

   PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dan PSAK 115 (dahulu PSAK 72) pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

4. Amendment PSAK 221 (formerly PSAK 10): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability
   The amendments clarify how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking, as well as require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable. The amendments will be effective on January 1, 2025 and earlier application is permitted.

   The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

5. PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts
   A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104 (formerly PSAK 62): Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

   PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 (formerly PSAK 71) and PSAK 115 (formerly PSAK 72) on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Contribution to the Country

PGN berkomitmen untuk mendistribuskan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada negara. PGN yakin bahwa pencapaian kinerja operasional dan keuangan yang baik selaras dengan kontribusi Perusahaan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Pada tahun 2024, total kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:

- **Pajak**: Pada tahun 2024 PGN memberikan kontribusi kepada Negara berupa Pajak sebesar Rp4.552 miliar.
- **Dividen**: Pada tahun 2024, PGN membagikan dividen kepada negara selaku pemilik 1 lembar saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp148,21, dan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebesar Rp2.048 miliar atas kinerja Keuangan tahun buku 2023.
- **PNBP Lainnya**: Sedangkan kontribusi berupa PNBP lainnya adalah sebesar Rp289 miliar.

PGN, which operates and runs a business as a natural resource management company, embraces a steadfast commitment to the distribution of economic benefits both directly and indirectly to all stakeholders, including the state. PGN believes that achieving good operational and financial performance is consistent with the Company's better contribution to the nation and state.

In 2024, the total contribution to the state through fulfilling Tax and Non-Tax State Revenue (PNBP) obligations will be as follows:

- **Tax**: In 2024, PGN contributed to the State in the form of taxes to the amount of Rp4,552 billion.
- **Dividends**: In 2024, PGN distributed dividends to the state as the owner of 1 Series A Dwiwarna share amounting to Rp148.21, and to PT Pertamina (Persero) as the Proxy for the Series A Dwiwarna share amounting to Rp2,048 billion for the 2023 financial year performance.
- **Other PNBP**: Meanwhile, contributions in the form of other PNBP to the amount of Rp289 billion.

PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Achievement of KPIs and Company Health Level

Skor KPI PGN yang disajikan masih merupakan hasil evaluasi internal PGN mengacu pada Laporan Keuangan PGN Tahun 2024 Audited, dengan skor tercapai 103,05 dan jika memperhitungkan Boundary KPI menjadi sebesar 106,30. Dalam penilaian tingkat kesehatan Perusahaan, PGN mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-2/MBU/03/2023 dengan menggunakan lembaga pemeringkat.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

a. Peringkat Berdiri Sendiri (Stand Alone Rating): bb+/aa (idn);
b. Peringkat Akhir (Final Rating): BBB-/AA+(idn)/Outlook Stabil.

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Perusahaan Gas Negara, Tbk Tahun Buku 2024 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2023.

Tahun 2024 PT Perusahaan Gas Negara tbk dapat mempertahankan hasil Rating Tingkat Kesehatan Perusahaan seperti tahun 2023.

PGN's KPI score presented still represents of PGN's internal evaluation referring to the PGN's Consolidated Financial Statement as of December 31 December 2024 and for the year then ended with the score of 103.05 and 106.30 if Boundary KPI is included in the calculation. In assessing the Company's health level, PGN complies with the provisions of the Minister of SOE Regulation No.PER-2/MBU/03/2023 to use a rating agency.

Based on the rating results conducted by PT Fitch Ratings Indonesia signed on April 17, 2025 as follows:

a. Stand Alone Rating: bb+/aa (idn);
b. Final Rating: BBB-/AA+(idn)/Stable Outlook.

Thus, the Health Level for PT Perusahaan Gas Negara, Tbk for Financial Year 2024 is Very Healthy (AAA) as stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs No. 02/MBU/2023.

In 2024 PT Perusahaan Gas Negara tbk can maintain the results of the Company's Health Level Rating as in 2023.

RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2024

Details of Issues Arising During 2024

Rincian masalah yang timbul di sepanjang tahun 2024, dampak, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh PGN sebagai berikut:

Masalah Litigasi

a. **Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML**

Pada tanggal 29 Agustus 2018, PT Kalimantan Jawa Gas (“KJG”) mengajukan gugatan terhadap Petronas Carigali Muriah Ltd (“PCML”) dan PT PLN (Persero) ("PLN") di Arbitrase *International Chambers of Commerce* ("ICC") Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban *Ship Or Pay* (“SOP”) sebagaimana diatur dalam *Gas Transportation Agreement* ("GTA") oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi GTA, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan Tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018.

Sebagai bentuk sinergi BUMN dan untuk mendukung pengaliran kembali gas dari Lapangan Kepodang untuk pembangkit listrik Tambak Lorok, pada tanggal 26 Februari 2021, KJG dan PLN telah telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang pada intinya menyepakati nilai yang harus dikembalikan oleh PLN atas klaim pemotongan tagihan bulanan KJG dalam Arbitrase ICC.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Perdamaian tersebut, pada tanggal 31 Maret 2021 PLN telah melakukan pembayaran atas nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian yaitu sebesar USD1.054.495,26.

Hasil putusan arbitrase KJG pada 14 Juni 2024 yang disampaikan oleh Sekretariat ICC International *Court of Arbitration* melalui email pada tanggal 18 Juni 2024, bahwa: PCML harus membayar kepada KJG sebesar USD17.3 juta atas *Pre-Termination Claim* ditambah bunga sebesar USD5.2 Juta dan bunga terhitung sejak 1 Januari 2024 s.d. tanggal putusan;

1. PCML harus membayar kepada KJG USD17.300.000 atas *Pre-Termination Claim* dan bunga USD5.200.000.
2. KJG harus membayar legal costs & expenses serta ICC *advance cost* PCML dengan total USD5.266.250
3. KJG harus membayar *legal costs & expenses* PLN IDR3.600.000.000 dan biaya ICC *advance cost* USD286.250

KJG telah menerima pembayaran dari PCML terkait putusan arbitrase pada tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD18.430.000. Nilai yang diterima sesuai dengan saldo

Details of the problems that arose throughout 2024, their impact, and PGN’s handling efforts are as follows:

Litigation Cases

a. **Declaration of force majeure in the Kepodang - Tambak Lorok Gas Transportation Agreement by PCML**

On August 29, 2018, PT Kalimantan Jawa Gas (“KJG”) filed a lawsuit against Petronas Carigali Muriah Ltd (“PCML”) and PT PLN (Persero) (“PLN”) in the Hong Kong International Chambers of Commerce (“ICC”) Arbitration on the failure to implement the Ship Or Pay (“SOP”) obligations as stipulated in the Gas Transportation Agreement (“GTA”) by PCML and compensation for GTA termination, while the lawsuit against PLN was filed for the deduction of Monthly Bills from March 2018 to September 2018.

As a form of inter-SOE synergy and to support the re-flow of gas from the Kepodang Field to the Tambak Lorok power plant, on February 26, 2021, KJG and PLN have signed a Settlement Agreement where both have settled on the amount the latter must return for the claim for deduction of KJG’s monthly bill in the ICC Arbitration.

As a follow-up to the Peace Agreement, on March 31, 2021, PLN made a payment of USD1,054,495.26 as the agreed amount under the Peace Agreement.

Here is the result of the KJG arbitration decision on June 14, 2024, which was submitted by the ICC International Court of Arbitration Secretariat via email on June 18, 2024: PCML must pay KJG USD17.3 million for the Pre-Termination Claim plus interest of USD5.2 million and the accumulated interest from January 1, 2024, to the date of the decision;

1. PCML must pay KJG USD17,300,000 for the Pre-Termination Claim and interest of USD5,200,000.
2. KJG must pay legal costs & expenses and ICC advance cost of PCML to the amount of USD5,266,250
3. KJG must pay legal costs & expenses of PLN IDR3,600,000,000 and ICC advance cost of USD286,250

KJG has received payment from PCML related to the arbitration award on October 29, 2024 amounting to USD18,430,000. The value received corresponds

piutang sebesar USD22.500.000 dengan tambahan bunga hingga tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD1.200.00,- dan dikurangi dengan beban legal sebesar USD5.270.000.

to the receivable balance of USD22,500,000 with additional interest until October 29, 2024 amounting to USD1,200,000,- and reduced by legal expenses of USD5,270,000.

b. **Pengajuan tuntutan kepada PT Hoegh LNG Lampung**

Pada Agustus 2021, PT PGN LNG Indonesia (sebagai Penggugat), anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan seluruhnya oleh PGN, telah mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") terhadap PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Tergugat) terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan FSRU Lampung ("LOM Agreement") dengan tuntutan berupa pembatalan *LOM Agreement*, dan/atau pengakhiran *LOM Agreement*, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PT PGN LNG Indonesia. Atas pengajuan gugatan tersebut, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat Rekonpensi) telah menyampaikan tanggapan dan gugatan baliknya kepada PT PGN LNG Indonesia (sebagai Tergugat Rekonpensi).

Pada September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat) juga mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC terhadap Perusahaan (sebagai Tergugat) terkait dengan jaminan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban PT PGN LNG Indonesia atas *LOM Agreement* sebagaimana tertuang dalam Transferor Guarantee, dengan tuntutan antara lain berupa ganti rugi.

Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Pada tanggal 5 Februari 2024, PGN, PLI dan PT Hoegh LNG Lampung bersama-sama telah menandatangani *Settlement Agreement*/Perjanjian Perdamaian yang pada intinya memuat kesepakatan para pihak untuk mencabut perkara-perkara tersebut dan melanjutkan dengan iktikad baik negosiasi dan diskusi berbagai hal komersial yang berkaitan dengan Perjanjian LOM. Para Pihak juga telah memberitahu Tribunal dan SIAC perihal diatas pada tanggal yang sama.

Pada tanggal 12 Februari 2024, Tribunal dan SIAC telah menyatakan menerima notifikasi permohonan pencabutan perkara-perkara yang diajukan oleh PGN, PLI dan Hoegh. Pada tanggal 1 April 2024 SIAC telah menerbitkan *Termination Order*. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 Perkara Arbitrase FSRU Lampung telah dinyatakan berakhir.

b. **Submission of claim against PT Hoegh LNG Lampung**

In August 2021, PT PGN LNG Indonesia (as Plaintiff), a subsidiary solely owned and controlled by PGN, filed a notice of arbitration with the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") against PT Hoegh LNG Lampung (as Defendant) on the lease, operation, and maintenance agreement for the Lampung FSRU ("LOM Agreement") with demands in the form of cancellation of the LOM Agreement, and/or termination of the LOM Agreement, and/or provision of compensation to PT PGN LNG Indonesia. In response to the filing of the lawsuit, PT Hoegh LNG Lampung (as Counterclaim Plaintiff) has submitted its response and counterclaim to PT PGN LNG Indonesia (as Counterclaim Defendant).

In September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (as Plaintiff) also filed a notice of arbitration with SIAC against the Company (as Defendant) regarding the guarantee provided by the Company for the fulfillment of PT PGN LNG Indonesia's obligations under the LOM Agreement as stated in the Transferor Guarantee, with demands including compensation.

The Parties have agreed to withdraw the above cases. On February 5, 2024, PGN, PLI, and PT Hoegh LNG Lampung jointly signed a Settlement Agreement/Peace Agreement, which, in essence, contains the agreement of the parties to withdraw the cases and continue in good faith negotiations and discussions on various commercial matters related to the LOM Agreement. The Parties have also notified the Tribunal and SIAC regarding the above on the same date.

On February 12, 2024, the Tribunal and SIAC stated that they received notification of the request to withdraw the cases filed by PGN, PLI and Hoegh. On April 1, 2024, SIAC issued a Termination Order. Henceforth, as of April 1, 2024, the Lampung FSRU Arbitration Case has been declared over.

c. **Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)**

Pada 3 April 2023, SEI menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa SEI telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku

c. **Claim of the Customary Leadership Council of the Kamoro Tribe Customary Consultative Institution (LEMASKO)**

On April 3, 2023, SEI received a lawsuit with the main case that SEI had taken control of ex-PT Freeport Indonesia pipes claimed to be in the possession of the Customary Leadership Council of the Kamoro Tribe Customary

Kamoro ("LEMASKO") yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan PSC yang telah ditandatangani bersama dengan SKK Migas.

SEI telah menunjuk Kantor Hukum RAJ & Associates dan Kantor Hukum RIFA sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menjalani beberapa proses persidangan termasuk menghadirkan beberapa saksi penting baik dari PT Freeport Indonesia maupun dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar.

SEI telah dinyatakan memenangkan perkara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor Putusan Perkara No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg tertanggal 3 April 2024 yang pada menolak gugatan LEMASKO.

Pada Tanggal 17 April 2024, LEMASKO kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, dan atas kasus banding tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No 374/PDT/2024/PT Surabaya tertanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan menolak gugatan LEMASKO.

Atas Keputusan Banding tersebut, kemudian LEMASKO mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024, yang disampaikan ke SEI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain dari Relaas Pemberitahuan Permohonan tersebut, disampaikan juga Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024. Atas hal tersebut maka SEI menindaklanjuti dengan mengirimkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024. SEI telah menunjuk Kantor Hukum Yustisia sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Berdasarkan informasi dari website resmi Mahkamah Agung, bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan dengan amar menolak permohonan kasasi dari LEMASKO. PGN masih menunggu salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.

Consultative Institution ("LEMASKO") as the result of a grant from PT Freeport Indonesia. Management believes that the lawsuit is baseless considering that SEI only controls goods related to activities within the Oil and Gas, and the Oil and Gas assets controlled by SEI are State Property and are legally controlled by SEI based on applicable legal provisions and the PSC has been signed together with SKK Migas.

SEI has appointed RAJ & Associates Law Firm and RIFA Law Firm as legal counsel to handle the lawsuit. As of the completion date of these consolidated financial statements, the Company had undergone several trial processes, which involved presenting several key witnesses from both PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Management has remained with its previous opinion that the lawsuit filed is baseless.

SEI has been declared the winner of the case in accordance with the verdict of the Lamongan District Court Number Decision Case No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated April 3, 2024 which annulled LEMASKO's lawsuit.

Later on April 17, 2024, LEMASKO filed an appeal against the decision of the Lamongan District Court, and the appeal case has been decided by the Surabaya High Court with Decision No. 374/PDT/2024/PT Surabaya dated June 24, 2024 which essentially ruled in favour of the Verdict of the Lamongan District Court by rejecting LEMASKO's lawsuit.

Based on the Appeal Decision, LEMASKO later filed a Cassation Application to the Supreme Court in accordance with the Cassation Application Notification Release Number. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Number 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024, which was submitted to SEI through the South Jakarta District Court, in addition to the Notification Release of the Application, a Notification Release of the Submission of Cassation Memorandum Number. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Number 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024 was also submitted. Regarding this, SEI followed up by sending a Counter Cassation Memorandum on July 29, 2024. SEI has appointed the Yustisia Law Firm as legal counsel to handle the lawsuit. Based on information from the official website of the Supreme Court, on December 16, 2024, the Supreme Court issued a verdict that annulled the cassation application from LEMASKO. PGN is still waiting for an official copy of the decision from the Supreme Court.

d. **Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)**

Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah"). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingingasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Penguasahaan Hitan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972.

Adapun terhadap tanah milik PGN yang menjadi obyek gugatan, PGN telah memiliki SHGB atas tanah obyek tanah tersebut.

Pada tanggal 6 Februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Pada tanggal 29 Februari 2024, PTPN VII kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pertanahan milik PTPN VII dengan mengubah kedudukan PGN yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat I.

Pada tanggal 31 Juli 2024, PN Blambangan Umpu memutuskan gugatan yang diajukan PTPN VII *Niet Onvantkelijkverklaard* ("NO"). Pada 24 September 2024, PT Tanjung Karang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu. Pada 12 November 2024 PTPN VII telah melakukan upaya hukum kasasi. Sampai dengan Desember 2024, perkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan gugatan PTPN VII tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil dan imateriil yang ditujukan kepada PGN. Adapun konsekuensi hukum PGN sebagai Turut Tergugat I adalah PGN diminta untuk tunduk dan patuh atas putusan yang nantinya dijatuhkan Majelis Hakim.

d. **Lawsuit on a Disputed Land from PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)**

On November 30, 2023, PTPN VII filed a Lawsuit for Unlawful Acts against the Defendants (PGN as Defendant 13) and Co-Defendants on the ownership of 4,650 Ha of land in the Former HPH Forest Area of PT BG Dasaad ("Land"). PTPN VII stated that the land rights claim originated from PTP XI-XII (Persero) (SOE holding process), which previously received the transfer of assets in the form of concession land for Forestry Business Rights (HPH) of PT G. Dasaad Joint Venture Inc. based on the Decree of the Minister of Agriculture Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972.

In fact, PLN already had the land certificate for its land under the lawsuit.

On February 6, 2024, PTPN VII withdrew the lawsuit for the case as referred to. Furthermore, On February 12, 2024, PGN received notification of the withdrawal of the lawsuit from PTPN VII with the following verdicts:

1. Granting the Plaintiff's request;
2. Declaring case number 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu to be withdrawn;
3. Ordering the Plaintiff to pay court costs.

On February 29, 2024, PTPN VII re-filed a lawsuit for unlawful acts related to land owned by PTPN VII by changing PGN's status from Defendant to Co-Defendant I.

On July 31, 2024, the Blambangan Umpu District Court decided on the lawsuit filed by PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). On September 24, 2024, PT Tanjung Karang ruled in favor of the verdict of the Blambangan Umpu District Court. On November 12, 2024, PTPN VII filed a cassation appeal. As of December 2024, the case is still in the cassation examination process at the Supreme Court.

Based on the PTPN VII lawsuit, there are no material and immaterial claims to PGN. The legal consequences of PGN as Co-Defendant I are that PGN is asked to submit to and comply with the verdict that the Panel of Judges will issue later.

e. **Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL**

Terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PGASSOL yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda dan Febri Utama ("kreditor") dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

e. **Application for Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL**

There is an appeal for Postponement of Debt Payment Obligations ("PKPU") against PGASSOL filed by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, and Febri Utama ("creditors") where based on the Verdict of the Jakarta Commercial Court number 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst

tanggal 24 Agustus 2022, dengan hasil dikabulkannya permohonan PKPU. Adapun nilai permohonan yang dikabulkan dalam putusan adalah sebesar Rp38.874.128.785, dari Para Pemohon dan Kreditur Lain.

Pada tanggal 12 Oktober 2022 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian antara PGASSOL dan kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berakhir.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, terdapat permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PGASSOL yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, dan Syafnir.

Pada tanggal 16 Maret 2023, Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan Kasasi yang diajukan PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama dan Syafnir dengan amar putusan Tolak Kasasi.

Sampai dengan 30 September 2024, kreditor sudah mengajukan dokumen penagihan. Perusahaan sudah memproses identifikasi dan verifikasi dokumen penagihan tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 melalui surat No.041100-041400.S/HK.05/Dirut/2023 menyatakan bahwa dokumen penagihan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Sehingga, status kasus ini telah berakhir dengan tercapainya Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Putusan Homologasi) pada tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuktikan dengan Salinan Putusan Homologasi tanggal 12 Oktober 2022 dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

f. **Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME")**

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, ME menyatakan secara tegas dan sekaligus mengakui adanya utang kepada Perusahan. Terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa ME akan menyerahkan sebagian kepemilikan aset milik ME kepada Pertagas sebagai offsetting utang. Para pihak sepakat akan dilakukan serah terima aset kepada Pertagas setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang independen. Namun hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ME belum menyepakati nilai aset yang tercantum dalam laporan KJPP. Pertagas telah mengajukan gugatan perdata wanprestasi kepada ME di Pengadilan Negeri ("PN") Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2020.

dated August 24, 2022, which rules in favor of the granting of the PKPU application. The amount of the application granted in the verdict was IDR 38,874,128,785, from the Applicants and Other Creditors.

On October 12, 2022, the Commercial Court at the Central Jakarta District Court ratified the Settlement Agreement between PGASSOL and creditors at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and stated that the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) had ended.

On October 19, 2022, there was a cassation application to the Supreme Court of the Republic of Indonesia against the PGASSOL Settlement Ratification Decision (Homologation) filed by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, and Syafnir.

On March 16, 2023, the Supreme Court of the Republic of Indonesia decided on the Cassation application filed by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, and Syafnir with a verdict that annuls the Cassation.

As of September 30, 2024, creditors had submitted collection documents. The Company processed the identification and verification of the billing documents on July 31, 2023, through letter No.041100-041400.S/HK.05/Dirut/2023, stating that the billing documents do not meet the provisions in the Decision on Approval of the Settlement Agreement (Homologation). Henceforth, the status of this case ended with the achievement of the Verdict on Approval of the Settlement Agreement (Homologation Decision) on October 12, 2022, as evidenced by a Copy of the Homologation Verdict dated October 12, 2022, and data from the Case Tracking Information System ("SIPP") of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court.

f. **Default Lawsuit on Debt and Credit Settlement Agreement Filed by Pertagas to PT Mutiara Energi ('ME')**

Based on the Debt Settlement Agreement, ME expressly and simultaneously acknowledged the existence of a debt to the Company. Both parties reached an agreement that ME would transfer part of its asset ownership to Pertagas as a debt offset. The parties agreed that the asset handover to Pertagas would take place following an appraisal by an independent Public Appraisal Service Office ("KJPP"). However, as of the issuance date of these consolidated financial statements, ME has not yet agreed to the asset valuation stated in the KJPP report. Pertagas has filed a civil lawsuit for breach of contract against ME at the South Jakarta District Court ("PN"), under Case Registration Number 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dated April 13, 2020.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, ME menyampaikan surat permohonan perdamaian yang menyatakan bahwa ME bersedia memberikan hak kepemilikan pipa Pondok Tengah - Tegal Gede sebesar 60% kepada Pertagas sebagai penyelesaian utang ME. Namun, Pertagas belum menerima penawaran ini dan melanjutkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan wanprestasi dari Pertagas kepada ME.

On October 28, 2021, ME submitted a letter proposing a settlement, stating its willingness to transfer 60% ownership rights of the Pondok Tengah – Tegal Gede pipeline to Pertagas as settlement of its debt. However, Pertagas did not accept this offer and continued the civil lawsuit at the South Jakarta District Court. On November 22, 2022, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court rejected Pertagas' breach of contract claim against ME.

Pada tanggal 5 Desember 2022, manajemen telah mengajukan banding dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ("PTJ") dengan perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

On December 5, 2022, the management filed an appeal, which was accepted by the Jakarta High Court (PTJ) under Case Number 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, manajemen telah menerima putusan dari PTJ, dimana putusan tersebut menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan. Pertagas tidak melanjutkan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

On August 29, 2023, the management received a ruling from the Jakarta High Court, which upheld the decision of the South Jakarta District Court. Pertagas did not proceed with further legal action in the form of a cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih merencanakan upaya terbaik untuk dapat menagihkan seluruh piutang dari ME.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, the management is still planning the best course of action to recover the outstanding receivables from ME.

g. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas

Pertagas menjadi salah satu tergugat atas 2 (dua) gugatan hukum yang diajukan oleh GPS (Penggugat). Gugatan pertama ditujukan ke beberapa pihak, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") Republik Indonesia (Tergugat I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Tergugat II), PT Elnusa, Tbk. (Tergugat III), Pertagas (Tergugat IV), PT Ansi Mega Instrumenindo (Tergugat V) dan PT Pratiwi Putri Sulung (Tergugat VI). Dalil gugatan tersebut terkait dengan pembangunan pipa gas PT Cikarang Listrindo Tbk., yang dianggap melanggar Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghentikan sementara pembangunan dimaksud. Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR0,15 triliun. Selanjutnya, GPS juga melakukan gugatan terhadap ESDM Republik Indonesia (Tergugat I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Tergugat II), dan Pertagas (Tergugat III), dengan dalil para tergugat telah melakukan tindakan persekongkolan atau konspirasi atas penerbitan izin pembangunan pipa gas PT Cikarang Listrindo Tbk. sebagai cadangan. Dalam gugatan ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR1,88 triliun.

g. Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") on the Construction of Reserve Pipes Owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. Built by Pertagas

Pertagas is one of the defendants in 2 (two) lawsuits filed by GPS (Plaintiff). The first lawsuit was made against multiple parties, namely the Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") of the Republic of Indonesia (Defendant I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Defendant II), PT Elnusa, Tbk. (Defendant III), Pertagas (Defendant IV), PT Ansi Mega Instrumenindo (Defendant V) and PT Pratiwi Putri Sulung (Defendant VI). The argument of the lawsuit is about the construction of the gas pipeline of PT Cikarang Listrindo Tbk., which is considered to violate the Interim Verdict of the Jakarta State Administrative Court to temporarily stop the construction in question. The Plaintiff had asked for joint and several compensation of IDR0.15 trillion. Furthermore, GPS also filed a lawsuit against ESDM of the Republic of Indonesia (Defendant I), PT Cikarang Listrindo Tbk. (Defendant II), and Pertagas (Defendant III), on the grounds that the defendants had committed an act of conspiracy or collusion over the issuance of a gas pipeline construction permit for PT Cikarang Listrindo Tbk. as a reserve. In this lawsuit, the Plaintiff requested joint and several damages of IDR1.88 trillion.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR1 miliar

On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court granted part of the applicant's lawsuit and ordered the defendants to jointly and severally pay damages to the Plaintiff amounting to IDR1 billion for the first lawsuit and

untuk gugatan pertama dan IDR333,8 miliar untuk gugatan kedua. Pada tanggal 14 September 2021, Pertagas telah mengajukan banding kepada PTJ atas kedua gugatan tersebut.

Pada tanggal 14 Juni 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan pertama. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Februari 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan kedua dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR77,3 miliar. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Maret 2024, Mahkamah Agung menerbitkan putusan kasasi atas kedua perkara tersebut dengan hasil permohonan kasasi Pertagas ditolak. Pada tanggal 17 dan 24 April 2024, Pertagas telah menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Pertagas yakin memiliki posisi hukum yang kuat atas gugatan ini, maka dari itu, tidak ada penyisihan atas nilai tuntutan yang dibukukan oleh Pertagas.

h. **Perjanjian Tripartit terkait Penjualan, Pengisian Ulang dan Pembelian LNG ("Perjanjian Tripartit") antara PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE")**

Pada tanggal 12 November 2020, PAG, PPTETS, dan QE ("para pihak") menandatangani Perjanjian Tripartit yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penggantian LNG milik QE, yang terkontaminasi partikel asing ("Debris") dengan kuantitas sebanyak 3.345.759 MMbtu.

PAG diwajibkan untuk membayar ke PPTETS apabila harga aktual yang akan dibayarkan oleh PPTETS untuk penggantian LNG milik QE saat periode penggantian lebih tinggi dari nilai LNG Debris yang telah dijual oleh PPTETS, atau PAG akan menerima pengembalian dari PPTETS apabila harga aktual lebih rendah.

Pada tanggal 18 Januari 2021, PPTETS telah menjual LNG Debris. Penggantian LNG tersebut akan dilakukan oleh PPTETS (selaku pihak yang berkontrak penyimpanan LNG milik QE dengan PAG) yang dimulai dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 atau periode lain yang disepakati para pihak.

Pada tanggal 7 November 2023, para pihak telah melakukan amendemen Perjanjian Tripartit, yang merubah periode penggantian LNG menjadi 1 Juni 2026 sampai dengan

IDR333.8 billion for the second lawsuit. On September 14, 2021, Pertagas filed an appeal to PTJ regarding both lawsuits.

On June 14, 2022, PTJ ruled in favor of the Central Jakarta District Court's decision regarding the first lawsuit. On July 25, 2022, Pertagas filed a cassation application regarding the first lawsuit to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

On February 24, 2022, PTJ ruled in favor of the verdict of the Central Jakarta District Court on the second lawsuit and granted part of the Plaintiff's lawsuit and ordered the defendants to pay IDR77.3 billion jointly and severally. On May 17, 2022, Pertagas filed a cassation appeal for the second lawsuit to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

On March 4, 2024, the Supreme Court issued a cassation verdict on both cases with the result that Pertagas' cassation application was rejected. On April 17 and 24, 2024, Pertagas has taken extraordinary legal measures in the form of a judicial review.

Pertagas is confident that it has a strong legal position on this lawsuit, and therefore, there is no provision for the value of the claim recorded by Pertagas.

h. **Tripartite Agreement on Sale, Refueling and Purchase of LNG ("Tripartite Agreement") between PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), and Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE")**

On November 12, 2020, PAG, PPTETS, and QE ("the Parties") entered into a Tripartite Agreement aimed at regulating the replacement mechanism for QE's LNG, which was contaminated with foreign particles ("Debris") in the quantity of 3,345,759 MMbtu.

PAG is required to pay PPTETS if the actual price to be paid by PPTETS for the replacement of QE's LNG during the replacement period is higher than the value of the Debris LNG that has been sold by PPTETS, or PAG will receive a refund from PPTETS if the actual price is lower.

On January 18, 2021, PPTETS has sold the Debris LNG. The LNG replacement will be carried out by PPTETS (as the party contracting for QE's LNG storage with PAG) starting from April 1, 2023 to August 1, 2023 or another period agreed by the parties.

On November 7, 2023, the parties amended the Tripartite Agreement, which changed the LNG replacement period to June 1, 2026 to June 30, 2026, or another period

30 Juni 2026, atau periode lain yang disepakati para pihak. Karena masih terdapat ketidakpastian atas periode penggantian LNG yang harus disepakati para pihak, PAG berkeyakinan suatu provisi belum perlu dibukukan pada 31 Desember 2024.

agreed by the parties as there remained uncertainty over the LNG replacement period that must be agreed by the parties, PAG believes that a provision does not need to be recorded on December 31, 2024.

i. **Insiden Ledakan Pipa Gas di Rumah Makan Famili Medan**

Pada tanggal 15 Januari 2024, terjadi ledakan di Rumah Makan Famili, Kota Medan, yang berasal dari pipa milik PGN. Berdasarkan hasil olah TKP dan dugaan awal pihak kepolisian, hal ini disebabkan karena adanya upaya pencurian dengan cara memotong pipa PGN yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa dan adanya api yang berasal dari dari rokok yang dinyalakan oleh pelaku. Akibat dari meledaknya pipa tersebut mengakibatkan beberapa bangunan disekitar rumah makan tersebut mengalami kerusakan.

Kepolisian Resor Kota Besar Medan ("Polrestabes Medan") kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim pada tanggal 23 Januari 2024 ("Surat Perintah Penyelidikan"), dengan merujuk kepada dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 359 jo. Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat dan/atau Pasal 187 jo. Pasal 188 mengenai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran atau ledakan. Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan termaksud, telah dilakukan pemberian keterangan oleh PGN dengan panggilan terakhir pada tanggal 19 Februari 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2024 Polrestabes Kota Medan menerbitkan surat Ketetapan Nomor: S.TAP.Lidik/417- b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan. Adapun dasar penerbitan surat tersebut adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara.

i. **Gas Pipe Explosion Incident at Famili Restaurant, Medan**

On January 15, 2024, an explosion occurred at Famili Restaurant, Medan City, presumed to have been caused by one of PGN's pipes. Based on the results of the crime scene investigation and initial suspicions by the police, this was caused by an attempted theft by cutting the PGN pipe which resulted in a pipe leak and a fire from a cigarette lit by the perpetrator. The pipe explosion caused damages to some of the nearby buildings.

Later on, the Medan City Police ("Polrestabes Medan") issued an Investigation Order Number Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim on January 23, 2024 ("Investigation Order"), referring to the alleged criminal act under Article 359 in conjunction with Article 360 of the Criminal Code concerning negligence causing death or serious injury and/or Article 187 in conjunction with Article 188 concerning acts that intentionally cause fire or explosion. Based on the Investigation Order Letter, PGN has provided information with the last summons on February 19, 2024.

On June 10, 2024, the Medan City Police issued a Decree Number: S.TAP.Lidik/417- b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim concerning Termination of Investigation. The basis for issuing the letter is that no criminal incident has been found in the case.

j. **Permohonan arbitrase oleh Gunvor ke London Court of International Arbitration ("LCIA") atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN**

Sesuai dengan Klausul 2.1 MSPA, komitmen untuk menjual dan membeli LNG berdasarkan MSPA disepakati dengan menandatangani CN oleh para pihak. Pada 3 November 2023, PGN telah menyampaikan pemberitahuan Force Majeure kepada Pembeli terkait pelaksanaan CN.

Dalam pelaksanaan MSPA dan CN untuk tahun 2024, pada 13 September 2024 Gunvor mengajukan permohonan arbitrase ("PA") ke LCIA terhadap PGN sebagaimana diatur dalam MSPA dan CN, dengan Gunvor sebagai Pemohon Arbitrase dan PGN sebagai Termohon Arbitrase. Pada 31 Oktober 2024 Perusahaan telah menyampaikan Tanggapan atas PA melalui konsultan hukum Mayer Brown.

j. **Application for arbitration by Gunvor to the London Court of International Arbitration ("LCIA") for Force Majeure Notification in the Implementation of MSPA and CN**

In accordance with Clause 2.1 of the MSPA, the commitment to sell and purchase LNG based on the MSPA is agreed upon by signing a CN by the parties. On November 3, 2023, PGN has submitted a Force Majeure notification to the Buyer regarding the implementation of the CN.

In the implementation of the MSPA and CN for the year 2024, on September 13, 2024, Gunvor submitted a Request for Arbitration ("RfA") to the LCIA against PGN, as stipulated in the MSPA and CN, with Gunvor acting as the Claimant and PGN as the Respondent. On October 31, 2024, the Company submitted its Response to the RfA through its legal counsel, Mayer Brown.

Pada 30 Desember 2024, PGN memberitahu Gunvor bahwa kondisi force majeure masih berlangsung. Sampai 31 Desember 2024, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan.

On December 30, 2024, PGN notified Gunvor that the force majeure condition remained in effect. As of December 31, 2024, there has been no impact on the Company's operations, legal standing, financial condition, or business continuity.

k. **Sengketa PPN Dalam Niaga Gas Bumi PGN Untuk Periode Tahun 2012-2013**

Sengketa PPN 2012-2013 terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara DJP dan PGN terkait kegiatan niaga gas bumi yang dilakukan oleh PGN. DJP berpandangan bahwa untuk periode tahun 2012, gas yang dijual oleh PGN merupakan gas hasil pengolahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai barang sehingga dikenakan PPN sebesar 10% dan terdapat jasa distribusi atau pengangkutan gas dalam kegiatan niaga gas PGN sehingga dikenakan PPN untuk periode tahun 2013.

PGN berpandangan bahwa tidak terdapat proses pengolahan dalam gas yang dijual oleh PGN kepada pelanggan dan PGN menerima gas sesuai Gas Sales Agreement (GSA) dari KKKS dengan spesifikasi yang telah diatur oleh regulasi pemerintah dan lamgsung proses/pengolahan untuk periode tahun 2012. Untuk periode tahun 2013, PGN melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan titik serah di lokasi pelanggan sehingga kegiatan niaga gas dan penyaluran gas kepada pelanggan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan adanya komponen rupiah dalam harga jual gas bumi guna menghindari risiko kurs mengingat krisis moneter seperti tahun 1998.

Bahwa atas perkara tersebut pada tingkat PK yang dimohonkan oleh DJP, terdapat 18 (delapan belas) putusan yang mengabulkan permohonan DJP dan 6 (enam) perkara yang menolak permohonan DJP.

Atas 18 (delapan belas) perkara yang telah putus tersebut, PGN melakukan PK kedua dan atas 6 (enam) perkara yang memenangkan PGN, DJP juga mengajukan PK kedua.

Sampai Desember 2023, 15 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus NO (*Niet Onvantkelijkverklaard*). Adapun untuk 6 permohonan PK Kedua yang diajukan DJP juga telah diputus NO.

Sampai 31 Desember 2024, terdapat 2 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus NO dan terdapat 1 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN masih menunggu putusan.

k. **VAT Dispute in PGN's Natural Gas Trading for the Period 2012-2013**

The VAT dispute for 2012-2013 occurred due to differing views between the Directorate General of Taxes (DJP) and PGN regarding PGN's natural gas trading activities. DJP believes that for the 2012 period, the gas sold by PGN is processed gas, which results in added value, thus subjecting it to a 10% VAT. Additionally, DJP considers the distribution or transportation services of gas in PGN's trading activities to be taxable, thus subjecting it to VAT for the 2013 period.

PGN, on the other hand, contends that there was no processing involved in the gas sold to customers. PGN purchases gas according to the Gas Sales Agreement (GSA) from the Contractor of Cooperation Contract (KKKS), with specifications set by government regulations, and there is no processing involved for the 2012 period. For the 2013 period, PGN engages in natural gas trading with delivery points at customer locations, thus making the trading and delivery of gas to customers an inseparable process. Furthermore, PGN includes a Rupiah component in the price of natural gas to avoid currency risks, especially in light of the 1998 monetary crisis.

In relation to this matter, at the Supreme Court level (PK) requested by DJP, there were 18 (eighteen) decisions that granted DJP's petition, and 6 (six) decisions that rejected DJP's petition.

For the 18 (eighteen) cases that have been decided, PGN filed a second PK, and for the 6 (six) cases that ruled in favor of PGN, DJP also filed a second PK.

As of December 2023, 15 second PK petitions filed by PGN were ruled as NO (Niet Onvankelijkverklaard). For the 6 second PK petitions filed by DJP, these were also ruled as NO.

By December 31, 2024, 2 second PK petitions filed by PGN were ruled NO, and 1 second PK petition filed by PGN is still awaiting a decision.

Putusan *Niet Onvantkelijkverklaard* (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat formal. Konsekuensi atas Putusan NO tidak dapat disamakan dengan putusan ditolak, mengingat masih dimungkinkan untuk mengajukan kembali permohonan sepanjang telah memenuhi syarat formal.

The NO (Niet Onvankelijkverklaard) ruling indicates that the case was dismissed due to not meeting formal requirements. A NO ruling is not equivalent to a rejection ruling, as it is still possible to submit a new petition once the formal requirements are met.

Masalah Non Litigasi

Penerapan Harga Gas Bumi Tertentu Industri dan Penyediaan Tenaga Listrik

Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 juncto No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri Industri dan No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik *(Plant Gate)* yang berlaku efektif masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 dan 2 Agustus 2021. Kedua Keputusan Menteri ini mengatur tentang harga beli, harga jual dan alokasi harga gas bumi tertentu bagi industri dan pembangkit tenaga Listrik berdasarkan Perpres 121 Tahun 2020. Menteri ESDM juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan Serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum tanggal 13 Mei 2022 dan berlaku surut sejak April 2020, yang mengatur terkait pemrosesan, pelaporan dan evaluasi harga gas bumi tertentu.

Dalam implementasi harga gas bumi tertentu terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya *"Unutilized Volume"* yaitu kondisi dimana realisasi penyerapan pelanggan penerima HGBT masih lebih rendah dibandingkan dengan alokasi HGBT yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga terdapat sisa volume HGBT yang telah diterima oleh PGN dari pemasok Gas dengan harga beli HGBT namun tidak diserap oleh pelanggan penerima HGBT sehingga diserap oleh pelanggan lainnya dengan menggunakan harga sesuai Perjanjian Jual Beli Gas. Dalam hal ini, atas harga pembelian gas kepada pemasok yang telah menggunakan harga HGBT dikembalikan sesuai dengan GSA yang berlaku, serta atas selisih harga tersebut PGN diwajibkan untuk mengembalikan kepada Pemerintah. Sampai dengan tahun 2024, atas kondisi *Unutilized Volume* PGN Group diharuskan mengembalikan selisih harga pembelian pasokan gas bumi sebesar Rp334.265.285 kepada negara. Adapun jumlah yang telah dikembalian PGN kepada negara sejumlah Rp216.991.865 atas tagihan *Unutilized Volume* sampai dengan tahun 2023. Sehingga sisa kewajiban PGN Group atas *Unutilized Volume* sampai dengan tahun 2024 sejumlah Rp117.273.420.

Non-Litigation Cases

Implementation of Certain Industrial Natural Gas Prices and Electricity Provision

The Minister of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Decree No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 in conjunction with No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 concerning Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector and No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 concerning Natural Gas Prices at Power Plants (Plant Gate) which will be effective on October 8, 2024 and August 2, 2021 respectively. These two Ministerial Decrees regulate the purchase price, selling price and allocation of certain natural gas prices for industry and power plants based on Presidential Regulation 121 of 2020. The Minister of Energy and Mineral Resources also issued Ministerial Decree No. 134.K/MG.01/MEM.M/2022 concerning Guidelines for Determining and Evaluating Users and Prices of Certain Natural Gas in the Industrial Sector and the Sector of Electricity Provision for the Public Interest dated May 13, 2022 and retroactive since April 2020, which regulates the processing, reporting and evaluation of certain natural gas prices.

In the implementation of certain natural gas prices, there are conditions that cause "Unutilized Volume", which is a condition where the realization of absorption of HGBT recipient customers is still lower than the HGBT allocation set by the Government, resulting in a remaining HGBT volume that has been received by PGN from Gas suppliers at the HGBT purchase price but still not absorbed by HGBT recipient customers but by other customers instead using the price according to the Gas Sales and Purchase Agreement. In this case, the gas purchase price from suppliers who have used the HGBT price is returned in accordance with the applicable GSA, while PGN is required to return the difference in price to the Government. Until 2024, due to the Unutilized Volume condition, PGN Group was still required to return the difference in the purchase price of natural gas supply of IDR334,265,285 to the state. The amount that PGN has returned to the state is IDR216,991,865 for the Unutilized Volume bill up to 2023. It means that the remaining PGN Group obligation for the Unutilized Volume up to 2024 is IDR117,273,420.

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN

Report on the Utilization of Additional PMN

Selama tahun 2024, PGN tidak menerima tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga tidak dapat memberikan laporan penggunaan tambahan PMN tersebut.

During 2024, PGN did not receive additional State Capital Participation (PMN), so it cannot provide reports on the use of the additional PMN.

PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN

Implementation of National Strategic Projects or Other Assignments

Sepanjang tahun 2024, PGN melanjutkan mendapatkan mandat untuk melaksanakan proyek strategis nasional atau penugasan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga
   PGN senantiasa berkomitmen untuk melakukan perluasan pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga dan pelanggan kecil dengan pembangunan jaringan gas bumi. Program ini juga turut mendukung penurunan impor dan subsidi LPG dengan mengoptimalkan utilisasi gas bumi domestik. Sampai dengan tahun 2024, PGN telah melayani lebih dari 815 ribu Pelanggan Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)
   Sejak bulan April tahun 2020, PGN Group mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri melalui penerapan HGBT kepada 7 Sektor Industri dan pembangkit listrik dengan volume penyaluran rata-rata pada tahun 2024 sebesar 448 BBTUD.
3. Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Transportasi Jalan
   PGN melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas untuk sektor transportasi jalan dengan mengoperasikan 13 SPBG dan 3 MRU yang tersebar di 11 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.
4. Penugasan pembangunan Jargas IKN
   Sebagai bentuk dukungan penyediaan energi bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN), PGN telah membangun dan menyalurkan gas bumi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara sejak Agustus 2024. PGN senantiasa memperluas pemanfaatan gas bumi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur gas bumi di wilayah IKN.

Throughout 2024, PGN continues to receive mandates to implement national strategic projects or other assignments with the following details:

1. Household Gas Network Development Program
   PGN continues to be committed to expanding the utilization of natural gas for the household and small-scale business sector by building natural has networks. This program also supports the reduction of LPG imports and subsidies by utilizing domestic natural gas optimally. As of 2024, PGN has served more than 815 thousand Household and Small-Scale Business customers.
2. Implementation of Certain Natural Gas Prices (HGBT)
   Since April 2020, PGN Group has supported the Government's program to increase industrial competitiveness through HGBT implementation to 7 industrial sectors dan power plants with an average distribution volume of 448 BBTUD in 2024.
3. Assignment of Natural Gas Supply and Distribution for Road
   Transportation PGN carries out the assignment of supplying and distributing gas fuel for the road transportation sector by operating 13 SPBGs and 3 MRUs spread across 11 cities in Java and Sumatra.
4. Assignment of IKN Gas Network construction
   As a form of support for the provision of clean energy in Ibu Kota Nusantara (IKN), PGN has built and distributed natural gas in the Core Government Center Area of Ibu Kota Negara since August 2024. PGN continues to expand the use of natural gas by continuing the development of natural gas infrastructure in the IKN area.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan dihadapkan beberapa risiko yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian Laba Perusahaan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Risiko terkait sengketa arbitrase.
2. Risiko mengenai reviu tarif pipa transmisi.
3. Risiko mengenai penurunan *gross margin* niaga gas sektor industri dan kelistrikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
4. Risiko mengenai tidak optimalnya pemanfaatan pembayaran uang muka pembelian gas.
5. Risiko mengenai transaksi jual beli LNG yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan kontrak.
6. Risiko mengenai *impairment* piutang.
7. Risiko mengenai kehilangan/kerusakan/ kebocoran data pada sistem komputer *database* Perusahaan.
8. Risiko mengenai pelanggaran aspek HSSE.

FACTORS WITH SIGNIFICANT IMPACT POTENTIALS ON BUSINESS CONTINUITY

In carrying out business activities, the Company is faced with several risks that have the potential to have a significant impact on the achievement of the Company's Profit and performance targets that have been set by top management throughout 2024, including:

1. Risks relating to arbitration.
2. Risks regarding review of transmission pipeline tariff.
3. Risks regarding decrease in the gross margin of gas trading for the industrial and electricity sector with Certain Natural Gas Prices (HGBT).
4. Risk of suboptimal utilization of advance payments for gas purchases.
5. Risk regarding LNG sale and purchase transactions that cannot be carried out in accordance with the contract.
6. Risk regarding impairment of receivables.
7. Risk regarding data loss/ damage/ leak in the database computer system of the Company.
8. Risk regarding violations to the HSSE guidelines.

ASESMEN MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Secara berkala dan konsisten, Perusahaan menerapkan praktik terbaik manajemen risiko dalam melakukan evaluasi atas penyusunan rencana strategis dan melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk mencapai target dalam rangka menjamin kelangsungan usaha.

PGN senantiasa melakukan pengelolaan risiko korporat untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi Perusahaan, mengevaluasi risiko dan mengelola penanganan terhadap risiko sehingga dapat diterima pada tingkat yang sesuai dengan *Risk Appetite*.

Perusahaan secara rutin menelaah dan memperbarui kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di industri migas serta pemenuhan aspek kepatuhan pengelolaan korporasi.

Secara spesifik, pengelolaan risiko terkait aspek keuangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko yang dihadapi Perusahaan dengan tingkat pengembalian serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan PGN.

MANAGEMENT ASSESSMENT TO MANAGE POTENTIALS WITH SIGNIFICANT INFLUENCE ON BUSINESS CONTINUITY

The Company implements the best risk management practices in evaluating the preparation of strategic plans and assessing the Company's ability to achieve targets in a regular and consistent manner to ensure business continuity.

PGN always carries out corporate risk management to identify all risks faced by the Company, evaluate risks, and manage the handling of risks to ensure that they can be accepted at a level in accordance with the Risk Appetite.

The Company regularly reviews and updates its risk management policies and systems to adapt to the changes and dynamics occurring in the oil and gas industry as well as fulfilling the compliance aspects of corporate management.

Specifically, risk management related to the financial aspects aims to achieve an appropriate balance between the risks faced by the Company and the rate of return, as well as minimizing the potential negative impact on PGN's financial performance.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN

Manajemen puncak melakukan asesmen risiko atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha PGN. Asesmen didasarkan pada asumsi yang dituangkan dalam RKAP PGN yang merujuk pada APBN. Asumsi yang digunakan Perusahaan mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga ICP. Selain itu juga menggunakan asumsi internal yakni terkait ketersediaan pasokan gas dan LNG dengan harga yang kompetitif.

ASESMEN DAN KEPUTUSAN MANAJEMEN TERHADAP PENGARUH TERSEBUT

Perusahaan telah melakukan langkah-langkah praktik manajemen risiko terbaik untuk menjaga kelangsungan usaha berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, di antaranya:

- Fokus dalam menjalankan program kerja sehingga kinerja Perusahaan tercapai sesuai target yang sudah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP.
- Melaksanakan kegiatan operasi dan investasi secara *prudent* dengan mengutamakan skala prioritas, efektivitas dan efisiensi serta peningkatan produktivitas kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan penanganan risiko (mitigasi) secara efektif atas hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan.
- Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mendorong nilai tambah (*upside risk/opportunity*) Perusahaan.
- Mengupayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (*zero accident*)
- Mengupayakan pelaksanaan program sinergi antara PGN dengan Pertamina selaku Holding Migas dengan mengutamakan optimalisasi kinerja Perusahaan.
- Melaksanakan RKAP Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan Dokumen Acuan Kerja yang berlaku sesuai dengan prinsip *Governansi korporat*.
- Mengimplementasikan proteksi keamanan siber terhadap *database* dan sistem informasi yang dimiliki/dikelola Perusahaan.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENTS

Top management carries out risk assessments on matters that have the potential to have a significant negative impact on PGN's business continuity. The assessment is based on the assumptions outlined in PGN's Work Plan and Budget (RKAP), which refers to the State Budget (APBN). The assumptions used by the Company include economic growth rates, inflation rates, interest rates, exchange rates, and ICP prices. In addition, it also uses internal assumptions, namely regarding the availability of gas and LNG supplies at competitive prices.

MANAGEMENT ASSESSMENTS AND DECISIONS REGARDING THESE INFLUENCES

The Company has taken the best risk management practices to maintain business continuity based on the results of the assessments that have been carried out, including:

- Focus on executing work programs to ensure the Company's performance is in line with the targets set in the RJPP and RKAP.
- Carry out operational and investment activities in a prudent manner by emphasizing the priority scale, effectiveness, and efficiency, as well as improving the productivity of the Company's performance.
- Carry out effective risk management (mitigation) on matters that can affect the Company's performance achievement.
- Improve employee competence in order to encourage added value (upside risk/ opportunity) for the Company.
- Striving for occupational health and safety (zero accident)
- Strive to implement synergy programs between the PGN Group and Pertamina as the Oil and Gas Holding by prioritizing the optimization of the Company's performance.
- Implement the 2024 Work Plan and Budget while still taking into account the applicable Working Reference in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).
- Implement cyber security protection on database and information systems owned/ managed by the Company.

05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PERTAMINA
GAS NEGARA
PERTAMINA
GAS NEGARA

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") senantiasa memastikan struktur, mekanisme, dan kebijakan yang kuat dalam penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang saat ini disebut Governansi. Bagi PGN, implementasi praktik GCG menjadi fondasi utama bagi keberhasilan sebuah organisasi, untuk terus berkembang sejalan dengan dinamika lingkungan bisnis, regulasi, dan pencapaian aspek keberlanjutan Perusahaan.

PGN berkomitmen untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan serta mencapai tujuan strategis perusahaan. Salah satu upaya mewujudkan komitmen ini antara lain menjalankan GCG disertai dengan upaya pengembangan bisnis serta pencapaian target yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PGN akan terus melakukan penyempurnaan dan penerapan GCG mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional, yang pada akhirnya meyakinkan para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan bahwa PGN telah dikelola dengan baik dan tepat.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("PGN") always ensures robust structures, mechanisms, and policies in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) or what is currently called Governance. For PGN, the GCG practice implementation is the main foundation for the success of an organization, to continue to grow in line with the dynamics of the business environment, regulations, and the achievement of the Company's sustainability aspects.

PGN is committed to building stakeholder trust and achieving the Company's strategic objectives. One of the efforts to realize this commitment is by implementing GCG along with business development efforts and achieving predefined targets both in the short and long term. PGN will continue to refine and implement GCG in accordance with national and international guidelines and standards, ultimately assuring Shareholders and Stakeholders that PGN has been managed properly.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Implementation of Good Corporate Governance

PGN berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. PGN yakin penerapan GCG di lingkungan Perusahaan akan memberikan energi yang baik bagi Perseroan untuk menghadapi tantangan besar hingga dapat bertahan sampai saat ini. Untuk itu, PGN berkomitmen untuk menjalankan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikannya sebagai budaya kerja bagi seluruh Perwira Subholding Gas, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Pejabat, serta Pekerja PGN.

PGN is committed to implementing GCG principles as a foundation for conducting business activities and creating sustainable added value for Shareholders and all other Stakeholders. PGN believes that GCG implementation within the Company will provide good energy for the Company to overcome major challenges and survive today. For this reason, PGN is committed to implementing the best practices of GCG principles consistently and continuously and making it a work culture for all Gas Sub-holding Employees, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, and all PGN Officers and Workers.

DASAR HUKUM

Implementasi GCG atau governansi korporat di lingkungan PGN didasarkan pada ketentuan dan pedoman yang berlaku, meliputi:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Surat edaran dari kementerian BUMN nomor S-52/DKU.MBU/10/2024 tanggal 15 Oktober 2023 perihal Pelaksanaan *Assessment* GCG BUMN tahun 2023;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
- Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

LEGAL BASIS

The implementation of GCG or corporate governance within PGN is based on the applicable provisions and guidelines, including:

- Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
- Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023, on Revocation of the Decree of the Secretary to Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012, on Assessment and Evaluation Indicators/ Parameters for Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
- Circular letter from the Ministry of SOEs number S-52/DKU.MBU/10/2024 dated October 15, 2023, regarding the Implementation of GCG Assessment of SOEs in 2023;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, on Implementation of Governance Implementation for Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.04/2016 on Annual Report of Issuers or Public Companies;
- Circular of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16 /SEOJK.04/2021 Forms and Contents of Annual Report of Issuers or Public Companies;
- Circular of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Governance Guidelines for Public Companies;
- Articles of Association of the Company and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); and
- Company's Regulations and Policies.

KILAS BALIK GCG

Sejak tahun 2003, PGN terus mencatatkan jejak langkah nyata dalam meningkatkan penerapan best practice GCG, sebagai berikut:

GCG MILESTONES

Since 2003, PGN has continued to record concrete steps in improving the implementation of GCG best practices, as follows:

2003

- *Initial Public Offering* (IPO) PGN
- Penetapan Keputusan Direksi tentang GCG
- Pengangkatan Komisaris Independen
- Pembentukan Komite Dewan Komisaris (Audit, Nominasi, Remunerasi, dan GCG)
- Penetapan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit
- Pembentukan Satuan Kerja Fungsional bidang GCG & Budaya Perusahaan (GCG & BP) dan Analisis Bisnis & Manajemen Risiko (ABMR)
- Penetapan Manual Manajemen Risiko
- Initial Public Offering (IPO) by PGN
- Stipulation of Decision of BOD on GCG
- Appointment of Independent Commissioners
- Establishment of BOC Committee (for Audit, Nomination, Remuneration, and GCG)
- Installation of Independent Commissioner as the Head of Audit Committee
- Establishment of a Functional Work Unit for GCG and Corporate Culture (GCG & BP and Business Analysis & Risk Management
- Stipulation of Risk Management Manual

2004

- Pemetaan GCG
- Penyusunan Panduan GCG
- Penyusunan *Board Manual*
- Pembentukan Komite Asuransi dan Risiko Usaha
- Penetapan *Charter* Komite Audit
- GCG Mapping
- Preparation of GCG Guideline
- Preparation of Board Manual
- Establishment of Insurance and Business Risk Committee
- Determination on Audit Committee Charter

2005

- Penyusunan Kebijakan GCG
- Pelaksanaan Kerangka Kerja Implementasi GCG
- Penandatanganan Komitmen GCG oleh Direktur Utama, Komisaris Utama serta Ketua Serikat Pekerja
- Preparation of Policy on GCG
- Implementation of GCG Frameworks
- Signing of Commitment on GCG by President Director, President Commissioner, and Head of Labor Union

2006

- Pengesahan *soft structure* GCG: Pedoman GCG & *Board Manual*
- Penghargaan Emiten Terbaik 2006 dalam "*Capital Market Award*" oleh BEJ
- Penetapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
- Sosialisasi GCG
- Endorsement for GCG soft structure: GCG Guideline & Board Manual
- The Best Issuer Award 2006 in "the Capital Market Award" by Jakarta Stock Exchange
- Stipulation on Code of Conducts
- Dissemination on GCG

2007

- Pembentukan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT PGAS Telekomunikasi
- Persiapan GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Risk Management Unit under the Directorate for General Affairs
- Establishment of PT PGAS Telekomunikasi
- Preparation of GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2008

- Penetapan Budaya Perusahaan "ProCISE"
- Penggabungan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Pemindahan Bidang Manajemen Risiko dalam Direktorat Keuangan
- GCG *Assessment* pertama kali menggunakan *Company Corporate Governance Scorecard* yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation on "ProCISE" Corporate Culture
- Unification of Nomination and Remuneration Committees
- Transfer of Risk Management Unit under the Directorate of Finance
- GCG Assessment applied for the first time Company Corporate Governance Scorecard developed by the Ministry of State-Owned Enterprises

2009

- Pembaruan *Charter* Komite Audit
- Penetapan Pedoman Audit Internal
- Penetapan Pedoman Manajemen Risiko berbasis COSOERM
- Pendirian PT PGAS Solution
- Pengakuan dari *Governance Metrics International* (GMI) menaikkan peringkat PGN dari 1,5 (Maret 2008) menjadi 4,5 (September 2009)
- Sosialisasi GCG
- Stipulation on "ProCISE" Corporate Culture
- Unification of Nomination and Remuneration Committees
- Transfer of Risk Management Unit under the Directorate of Finance
- GCG Assessment applied for the first time Company Corporate Governance Scorecard developed by the Ministry of State-Owned Enterprises
- Dissemination on GCG

2010 - 2011

- Pembentukan Divisi Organisasi dan Proses Bisnis yang bertugas mengelola GCG dalam Direktorat Umum
- Pendirian PT Nusantara Regas
- GCG *Assessment*
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Business Process and Organization Division assigned to manage GCG within the Directorate of General Affairs
- Establishment of PT Nusantara Regas
- GCG Assessment
- Dissemination on GCG

2012

- Pembaruan Pedoman GCG
- Pelaksanaan Semiloka GCG
- Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (PMRPU)
- Penyusunan *Charter* Komite PMRPU
- Pendirian PT PGN LNG Indonesia
- Pelaksanaan LHKPN pertama kali
- Sosialisasi GCG
- Updates on GCG Guideline
- Implementation of GCG Seminar & Workshop
- Establishment of Monitoring Committee for Risk Management and Business Development
- Preparation of PMRPU Committee Charter
- Establishment of PT PGN LNG Indonesia
- Application of the first State Officials Wealth Report
- Dissemination on GCG

2013

- Penetapan *Whistleblowing System*
- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Piagam Komite Audit
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Whistleblowing System Guideline
- Updates on Board Manual
- Updates on Audit Committee Charter
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2014

- Penetapan SK benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
- Pendirian PT Permata Graha Nusantara
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Stipulation of Decree on Conflict of Interests and Gratification Control
- Establishment of PT Permata Graha Nusantara
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2015

- Pembentukan Komite Remunerasi, Nominasi, dan GCG
- Pembentukan Divisi Risk Management & GCG di bawah Direktorat Utama
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Establishment of Remuneration, Nomination and GCG Committee
- Transfer of Risk Management & GCG Division under the Principal Directorate
- LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2016

- Pembaruan *Board Manual*
- Penetapan Pedoman Tata Kelola Hubungan PGN sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan/Afiliasi
- Penetapan Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penetapan Penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Afiliasi
- Pelaksanaan LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Stipulation of Guidelines for PGN's Relations Governance as a Subsidiary/Affiliate Shareholder
- Stipulation of Guidelines for Appointment, Dismissal, and Determination of Income for Members of the BOD and Members of the BOC of Subsidiaries and Affiliates
- LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- Dissemination on GCG

2017

- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*-ACGS
- Sosialisasi GCG
- e-LHKPN Implementation
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ASEAN Corporate Governance Scorecard - ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2018

- Pembentukan PGN sebagai Subholding Gas ke dalam Holding Migas PT Pertamina (Persero)
- Akuisisi PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Asistensi *Soft Structure* GCG di 6 Anak Perusahaan/Afiliasi
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Establishment of PGN as Gas Sub-Holding Company under PT Pertamina's Oil and Gas Holding
- Acquisition of PT Pertamina Gas and its subsidiaries
- Updates on GCG Guidelines
- Updates on Code of Conduct
- Assistance for GCG Soft Structure in 6 Subsidiaries/Affiliates
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2019

- Pembaruan *Board Manual*
- Pembaruan Pedoman GCG
- Pembaruan Pedoman Etika
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Affiliasi
- Pengukuran Tingkat Maturitas GCG
- GCG *Self Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- Sosialisasi GCG
- Updates on Board Manual
- Update on GCG Guidelines
- Update on the Code of Conduct
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Document for Subsidiaries/ Affiliates
- Measuring GCG Maturity Rate
- GCG Self-Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Parameter)
- Dissemination on GCG

2020

- Penerapan dan Sertifikasi SMAP ISO 37001
- Penetapan Proses Subholding Gas
- Penetapan Budaya "AKHLAK"
- Penetapan Visi Misi
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Penyusunan Dokumen *Self Assessment* GCG untuk Anak Perusahaan/Afiliasi
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Paremeter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG
- Penetapan penggunaan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Implementation and Certification of SMAP ISO 37001
- Determination of Gas Subholding Process
- Determination of "AKHLAK" Culture
- Determination of Vision and Mission
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Preparation of GCG Self-Assessment Documents for Subsidiaries/ Affiliates
- GCG Assessment (SOE Parameter)
- GCG Self-Assessment (ACGS Paremeter)
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination on GCG
- Determination of GCG Online System (GOLS) Application

2021

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Antikorupsi Kolaborasi KPK dan PGN
- Penyempurnaan Pedoman Proses Bisnis Subholding Gas
- Pembaruan *Board Manual* dan Pedoman GCG, Etika, WBS, Benturan Kepentingan dan Gratifikasi
- Pembaruan *Charter* Komite-Komite
- Pembaruan Anggaran Dasar
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Pelaksanaan GCG *Self Assessment* Anak Perusahaan/Afiliasi
- Penerapan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyusunan Modul GCG *Self Assessment* untuk Anak Perusahaan/ Afiliasi
- Implementation of Anti-Corruption Technical Guidance in collaboration with the Corruption Eradication Commission/KPK and PGN
- Improvement of Gas Subholding Business Process Guidelines
- Updates on Board Manual and Guidelines for GCG, Ethics, WBS, Conflicts of Interest and Gratification
- Updates on Charter of the Committees
- Updates on Articles of Association
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Self-Assessment by Subsidiaries/ Affliates
- Implementation of GCG Online System Application
- Preparation of GCG Self-Assessment Module for Subsidiaries/ Affiliates

2022

- Penggabungan fungsi GCG ke dalam *Group Legal Counsel and Compliance* di bawah koordinasi Direktorat Utama
- GCG *Assessment* Parameter BUMN
- GCG *Self Assessment* Parameter ACGS
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* menggunakan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)
- Pelaksanaan *Branding* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Pelaporan Gratifikasi secara berkala melalui Aplikasi GOLS
- Capaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko "MANAGED"
- Pembaruan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja
- *Top 50 Big Capitalization Public Listed Company* dari IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*)
- Merging of GCG functions into Legal Counsel and Compliance Group under the coordination of President Director Office
- GCG Assessment based on Parameter of State-Owned Enterprises
- GCG Self-Assessment based on ACGS Parameter
- GCG Assessment based on Parameter of FSA Regulation Number 21/2015
- GCG Assessment used the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI) developed by the KNKG
- Implementation of GCG Branding
- e-LHKPN Implementation
- Dissemination of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation of GCG Online System (GOLS) Application
- Commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)
- Implementation of Gratification Reporting periodically through the GOLS Application
- Achievement of Risk Management Maturity Level "MANAGED"
- Updates on Guidelines for Good Corporate Governance and Code of Conduct
- Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dari IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship)

2023

- GCG *Self Assessment* (*review*) hasil tahun 2022 dengan Parameter BUMN (SK-16)
- GCG *Self Assessment* ACGS *new version* 2023
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh KNKG
- Pelaksanaan *awareness* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN
- Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001
- Penerapan dan pengembangan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)
- Penerapan Surat Pernyataan *Conflict of Interest* dan terkait Gratifikasi secara berkala
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja
- Pembuatan Komitmen BOD dan BOC : Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi
- Sertifikasi SMAP di Anak Perusahaan
- Perluasan ruang lingkup penerapan anti penyuapan (*Extend scope*)
- ISO Integrasi: HSSE, QM dan SMAP
- Pengelolaan UPG semula dari Internal Audit dipindahkan ke *Legal Counsel and Compliance*
- Mendapat penghargaan tata kelola yang baik: *the Best State Owned Enteprises* dari IICD dan perusahaan dengan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) Terbaik I dan Pengembangan Talenta & SDM Unggul Terbaik II dalam Anugerah BUMN 2023 yang diselenggarakan oleh BUMN Track

- GCG Self Assessment (review) of 2022 results with SOE Parameters (SK-16)
- GCG Self Assessment ACGS new version 2023
- GCG Assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG Assessment based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by KNKG
- Implementation of GCG awareness
- Implementation of e- LHKPN
- Socialization of GCG & SMAP ISO 37001
- Implementation and development of GCG Online System Application (GOLS)
- Implementation of World Anti-Corruption Day Commemoration (HAKORDIA)
- Implementation of Conflict of Interest Statement Letter and related Gratification periodically
- Work Reference Document Update
- Making BOD and BOC Commitment: Commitment Statement on the implementation of good corporate governance and business/work ethics as well as gratification control
- SMAP certification in subsidiaries
- Expansion of the scope of anti-bribery implementation (Extend scope)
- ISO Integration: HSSE, QM and SMAP
- UPG management has been transferred from Internal Audit to Legal Counsel and Compliance
- Received good governance awards: the Best State Owned Enteprises from IICD and the company with the Best Good Corporate Governance (GCG) I and the Best Talent & HR Development II in the BUMN Award 2023 organized by BUMN Track

2024

- GCG *Self Assessment* ACGS *new version* 2023
- *Assessment* GCG berdasarkan parameter POJK 21/2015
- GCG *Assessment* berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh KNKG
- Pelaksanaan *awareness* GCG
- Pelaksanaan e-LHKPN dengan capaian 100%
- Sosialisasi GCG, Anti Korupsi , Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan
- *Training* SMAP ISO 37001 dengan prinsip 4NO's
- Implementasi COMPOLS (*Compliance Online Systems*) dan pengembangan Aplikasi GCG *Online System* (GOLS)
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan lomba dan penyebaran publikasi
- Deklarasi Surat Pernyataan Sosialisasi GCG, COC, *Conflict of Interest* dan terkait Gratifikasi secara berkala
- Pembaruan Dokumen Acuan Kerja, diantaranya Pedoman Perilaku Etika, Pedoman Pengelolaan Optimasi Sinergi Barang dan atau Jasa di PGN Group, Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja (DAK) dan sebagainya
- Pembaharuan Komitmen BOD dan BOC: Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik dan etika usaha/kerja serta pengendalian gratifikasi
- Re-Sertifikasi SMAP Subholding Gas dengan perluasan ruang lingkup penerapan anti penyuapan (*Extend scope*)
- *Monitoring* dan Evaluasi per semester dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Meraih Penghargaan *Award for Implementation Prevention of Bribery Program* 2024 dalam puncak peringatan HAKORDIA
- Hasil Evaluasi Implementasi PPG oleh KPK meraih skor 81,6 (Baik)
- Peningkatan kompetensi personil *Compliance* dengan Sertifikasi CCP (*Certified Compliance Profesional*)

- GCG Self-Assessment by ACGS new version 2023
- GCG Assessment based on POJK 21/2015 parameters
- GCG Assessment based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) developed by KNKG
- Implementation of GCG awareness
- e-LHKPN implementation with 100% achievement
- Socialization of GCG, Anti-Corruption, Gratification Control, and Anti-bribery
- SMAP ISO 37001 Training with the 4NO's principle
- Implementation of COMPOLS (Compliance Online Systems) and development of the GCG Online System (GOLS) Application
- Organizing World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) with competitions and dissemination of publications
- Declaration of Statement Letter on the Socialization of GCG, COC, Conflict of Interest, and Gratification regularly
- Renewal of Work Reference Documents, including the Code of Conduct, Guidelines for the Management of Synergy Optimization of Goods and or Services in PGN Group, Guidelines for the Management of Work Reference Documents (DAK), etc.
- BOD and BOC Commitment Renewal: Statement of Commitment to the Implementation of good corporate governance and business/ work ethics as well as gratification control
- Gas Sub-holding SMAP Re-Certification with extended scope of anti-bribery implementation (Extend scope)
- Monitoring and Evaluation per semester with the Corruption Eradication Commission (KPK)
- Received the Award for Implementation of Prevention of Bribery Program 2024 at the highlight of HAKORDIA commemoration
- PPG Implementation Evaluation Results by KPK achieved a score of 81.6 (Good)
- Increased the competence of the Compliance employees with CCP Certification (certified compliance professional)

TUJUAN PENERAPAN GCG

Selaras dengan Pedoman GCG PGN, penerapan tata kelola bertujuan untuk:

a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
c. Mendorong Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
e. Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Perusahaan dan perubahan lingkungan usaha menuju budaya Perusahaan yang lebih baik;
f. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong terbentuknya identitas, karakter dan motivasi Perwira Subholding Gas untuk berperilaku dan bertindak sesuai tuntutan Perusahaan serta dilandasi dengan moral dan nilai-nilai etika yang sehat; dan
g. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PGN senantiasa menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya yang diterapkan dalam setiap proses kegiatan usaha, termasuk juga dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut kinerja dan pencapaian sasaran Perusahaan sesuai visi dan misi PGN. Prinsip GCG telah diterapkan di lingkungan Perusahaan sebagaimana yang tertuang sebagai berikut:

1. Transparansi
   Merupakan hak Pemegang Saham atas informasi Perusahaan yang benar dan tepat, ikut dalam pengambilan putusan mengenai perubahan mendasar Perusahaan, dan hak atas keuntungan Perusahaan. Dapat diartikan juga keterbukaan informasi dalam proses pengambilan putusan maupun pengungkapan informasi tentang Perusahaan.
2. Akuntabilitas
   Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan hingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban
   Merupakan kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

In line with PGN's GCG Guidelines, the implementation of governance aims to:

a. Optimizing the Company's value to have a robust competitiveness at the national and international levels, enabling it to maintain its presence and sustainable life to achieve the Company's purposes and objectives;
b. Encouraging professional, efficient, and effective management of the Company, as well as empowering functions and improving the independence of the Company's Organs;
c. Encouraging the Company's Organs to make decisions, take actions based on high moral values, comply with laws and regulations, and be aware of the Company's social responsibility to its Stakeholders as well as environmental sustainability around the Company;
d. Improving the Company's contribution to the national economy and creating a favorable environment for the development of national investment;
e. Developing attitudes and behaviors in line with the demands of the Company's development and business changes toward better corporate culture;
f. Creating a conducive climate, encouraging the formation of identity, characteristics and motivating Sub-holding Gas Employees to behave and act in line with the Company's guidelines based on sound moral and ethical values; and
g. Improving the Company's reputation.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

PGN always makes GCG principles a culture that is applied in every process of business activities, including in the process of making important decisions concerning the performance and achievement of the Company's targets in accordance with PGN's vision and mission. GCG principles have been applied within the Company as set out below:

1. Transparency
   Shareholders are entitled to obtain correct and appropriate information regarding the Company and participate in the decision-making process concerning basic changes to the Company and its profits. It is also interpreted as information transparency in the decision-making process and disclosure of information regarding the Company.
2. Accountability
   It is clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs to ensure an effective management of the Company.
3. Responsibility
   It is conformity of the Company's management to laws and regulations as well as sound corporate principles.

4. Kemandirian
   Merupakan keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran
   Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

KEBIJAKAN GCG DI PGN

Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan dan telah memiliki serta mengimplementasikan berbagai kebijakan maupun pedoman pendukung lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk menjaga agar penerapan GCG di PGN berjalan dengan baik, antara lain:

1. *Board Manual*;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
4. Pedoman Benturan Kepentingan;
5. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
6. Pedoman *Whistleblowing System*;
7. Pedoman Pengelolaan Risiko;
8. Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis;
9. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, serta Anti Penyuapan;
10. Pedoman Pengelolaan Dokumen Acuan Kerja (DAK);
11. Pedoman Pengelolaan *Community Involvement Development*;
12. Pedoman Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi;
13. Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan;
14. Pedoman Pengelolaan Optimasi Sinergi Barang dan atau Jasa di PGN Group;
15. Pedoman Anggaran;
16. Perjanjian Kerja Bersama;
17. Pedoman Perlakuan Akuntansi;
18. Pedoman Pengukuran Kepuasan Pelanggan;
19. Pedoman Berlangganan Gas;
20. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan;
21. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan LNG Trading Internasional;
22. Pedoman Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN);
23. Pedoman Penanganan Keadaan Darurat;
24. Pedoman Pengelolaan Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
25. Pedoman Pengelolaan Sistem Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset (PSAIMS);
26. Pedoman Pengelolaan Dana;
27. Pedoman Sistem Pengelolaan Kinerja;
28. Pedoman Pengelolaan Maturitas Investasi;
29. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit; dan
30. Piagam Audit Internal.

4. Independence
   A condition where the Company is professionally managed with no conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations as well as sound corporate principles.
5. Fairness
   Fairness and equality in meeting Stakeholders' rights that arise based on agreements as well as the laws and regulations.

GCG POLICY AT PGN

The Company constantly updates and already has and implements various policies and other supporting guidelines in accordance with applicable legislation to maintain GCG implementation in PGN, among others:

1. Board Manual;
2. Guidelines for Good Corporate Governance;
3. Guidelines for Code of Conduct;
4. Guidelines for Conflicts of Interest;
5. Guidelines for Gratification Control;
6. Guidelines for Whistleblowing System;
7. Guidelines for Risk Management;
8. Guidelines for Business Sustainability Management System;
9. Guidelines for Quality Management System, Occupational Health and Safety, Security, as well as Anti-Bribery;
10. Guidelines for Work Reference Document (DAK) Management;
11. Guidelines for Community Involvement Development Management;
12. Guidelines for Technology and Communication Governance;
13. Guidelines for Corporate Information Management;
14. Guidelines for the Management of Goods and or Services Synergy Optimization in PGN Group;
15. Guidelines for Budget;
16. Collective Work Agreement;
17. Guidelines for Accounting Treatment;
18. Guidelines for Measuring Customer Satisfaction;
19. Gas Subscription Guidelines;
20. Guidelines for Preparation of Financial Statements;
21. Guidelines for the Implementation of International LNG Trading Activities;
22. Guidelines for the Management of Increased Use of Domestic Products (P4DN);
23. Guidelines for Emergency Handling;
24. Guidelines for the Management of the Exercise of Rights and Fulfilment of Tax Obligations;
25. Guidelines for the Management of the Process Safety and Asset Integrity System (PSAIMS);
26. Guidelines for Funds Management;
27. Guidelines for the Performance Management System;
28. Guidelines for Investment Maturity Management ;
29. Guidelines for the Management of Internal Audit Unit Activities; and
30. Internal Audit Charter.

Kebijakan dan pedoman ini secara garis besar memuat panduan bagi Perusahaan dan seluruh Perwira Subholding Gas dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan pemangku kepentingan dalam aspek pemenuhan tata kelola.

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG PGN

Dalam rangka memperkuat penerapan GCG, PGN menjalankan berbagai program sosialisasi dan internalisasi baik secara *offline* maupun *online*. PGN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Etika Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Anti Penyuapan/Gratifikasi kepada seluruh Perwira Subholding Gas. Selama tahun 2024, kegiatan sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

These policies and guidelines generally contain a manual for the Company and all Gas Sub-holding Employees in carrying out business activities and dealing with stakeholders in the aspect of compliance with governance.

STRENGTHENING GCG IMPLEMENTATION AT PGN

To strengthen GCG implementation, PGN runs various offline and online socialization and internalization programs. PGN continuously socializes and internalizes the values of Corporate Ethics, Good Corporate Governance, Anti-bribery/Gratification to all Gas Sub-holding Employees. During 2024, the socialization and internalization activities carried out by the Company are as follows:

KEGIATAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI GCG TAHUN 2024

GCG Socialization and Internalization Activities in 2024

No.	Waktu Time	Kegiatan	Activity
1.	13 Februari 2024 February 13, 2024	*Sharing Knowledge* GCG tentang Hasil *self assessment* parameter ACGS tahun 2023 oleh konsultan PT RSM Indonesia Konsultan	GCG Knowledge Sharing on the results of the self-assessment with ACGS parameters 2023 by consultant PT RSM Indonesi Konsultan
2.	19 Februari 2024 February 19, 2024	*Awareness Compliance* tentang batas kewenangan Korporasi, BM, Monitoring implementasi GCG, ESG *rating*, imlementasi SMAP, Rakor *Compliance* dan GCG dengan Anak Perusahaan/Afiliasi	Awareness Compliance about the limits of Corporate authority, BM, Monitoring GCG implementation, ESG rating, SMAP implementation, Compliance and GCG Coordination Meetings with Subsidiaries/Affiliates
3.	29 Februari-1 Maret 2024 February 29-March 1, 2024	*Sharing Session* materi *compliance*, GCG dan SMAP ISO 37001:2016 dengan Tim LCC dan Anak Perusahaan/ Afiliasi di acara Rakor Legal Subholding Gas "*Workshop* Pengelolaan Kontrak Jangka Panjang"	Sharing Session on ISO 37001:2016 compliance, GCG, and SMAP materials with the LCC Team and Subsidiaries/Affiliates at the Gas Sub-holding Legal Coordination Meeting "Workshop on Long-Term Contract Management"
4.	6 Maret 2024 March 6, 2024	BIMTEK Pelaku Usaha Antikorupsi dengan KPK tema: Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas dalam rangka memberikan *refreshment* anti korupsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat serta Pekerja PT PGN Tbk dan Anak Perusahaan/Afiliasi-nya.	BIMTEK Anti-corruption Entrepreneurs with KPK: "By Building Integrity Values", to provide anti-corruption refreshment to the Board of Commissioners, Board of Directors, Officers and Employees of PT PGN Tbk and its Subsidiaries/Affiliates
5.	4 April 2024 April 4, 2024	Sosialisasi Internal : Anti Penyuapan dengan prinsip 4 No's	Internal Socialization: Anti-bribery with the 4 No's principle
6.	20 Mei 2024 May 20, 2024	Sosialisasi GCG dan SMAP di acara *Upskilling* dan *Coaching* Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan satker (*online*)	GCG and SMAP socialization at the Upskilling and Coaching for Procurement of Goods and Services Year 2024 event with work units (online)
7.	7 Juni 2024 June 7, 2024	Induksi materi Tata Kelola Perusahaan kepada BOD dan BOC yang baru diangkat	Induction of Corporate Governance material to newly appointed BOD and BOC
8.	6-8 Juni 2024 June 6-8, 2024	Pelatihan *In-House e-learning* KPK dengan tema : "Penguatan Pemahaman Gratifikasi"	KPK In-House e-learning training with the theme: "Strengthening Understanding of Gratification"
9.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Sosialisasi 4 NO's pekerja Jargas area CGP wilayah perumahan Bintaro	Socialization of the 4 NO's of Jargas workers in the CGP area of the Bintaro housing area
10.	1-30 Juni 2024 June 1-30, 2024	Pengisian Deklarasi/Lapor Gratifikasi periode Semester 1/2024 oleh seluruh Perwira SH Gas melalui aplikasi COMPOLS/GOLS	Filling out the Gratification Declaration/Report for the Semester 1/2024 by all SH Gas Employees through the COMPOLS/GOLS application
11.	Juni-Agustus 2024 June-August 2024	*Flyer* dan infografis Korupsi/Gratifikasi tersebar di *lift* TV *Frame* di lingkungan kantor PGN	Flyers and infographics on Corruption/Gratification spread in TV Frame elevators within the PGN office

No.	Waktu Time	Kegiatan	Activity
12.	3 Juli 2024 July 3, 2024	Sosialisasi 4 NO's area Palembang	Socialization of 4 NO's in Palembang area
13.	4 Juli 2024 July 4, 2024	Sosialisasi 4 NO's area Medan	Socialization of 4 NO's in Medan area
14.	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Penyelenggaraan *Talk Show* Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dengan tema "*Navigating Conflict of Interest in State-Owned Enterprises: Best Practices and Challenges" Keynote Speaker* : Komisaris Utama PT PGN Tbk	Organizing a Conflict of Interest Talk Show with the theme "Navigating Conflict of Interest in State-Owned Enterprises: Best Practices and Challenges" Keynote Speaker: President Commissioner of PT PGN Tbk
15.	10 September 2024 September 10, 2024	Sosialisasi Transaksi Material/Afiliasi dan *Board Manual,* Etika dalam acara Rakor *Compliance* dan GCG dengan Anak Perusahaan/Afiliasi	Socialization of Material/Affiliate Transactions and Board Manual, Ethics in Compliance and GCG Coordination Meeting with Subsidiaries/Affiliates
16.	25 September 2024 September 25, 2024	Sosialisasi SMAP dengan pekerja di Area cilegon dan site Bojonegoro	SMAP socialization with workers in Cilegon area and Bojonegoro site
17.	17-24 September 2024 September 17-24, 2024	*Awareness* GCG dalam Survei Pemahaman GCG	GCG Awareness in GCG Understanding Survey
18.	19 Desember 2024 December 19, 2024	Sosialisasi SMAP dgn pekerja di Area gudang Klender	SMAP socialization with workers in Klender warehouse area
19.	31 Desember 2024 December 31, 2024	Pelaksanaan Sosialisasi GCG, Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct)* dan Deklarasi Bebas Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) melalui aplikasi *Compliance Online System* (COMPOLS) dalam rangka pelaksanaan KPI *GCG Implementation Compliance* Tahun 2024 untuk seluruh Pekerja PGN dengan target yang telah tercapai pada akhir Desember 2024	Implementation of GCG Socialization, Code of Conduct, and Declaration of Free from Conflict of Interest through the Compliance Online System (COMPOLS) application to conduct KPI GCG Implementation Compliance 2024 for all PGN Employees with the targeted completed by the end of December 2024
20.	4-6 Desember 2024 December 4-6, 2024	*Sharing Session* FGD: "tindak pidana korupsi karena kebijakan" dengan Anak Perusahaan/Afiliasi	Sharing Session with FGD: "corruption crime due to policy" with Subsidiaries/Affiliates

VISI PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN

Visi Perusahaan untuk "Menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan" merupakan pernyataan aspiratif yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah strategis PGN. Dalam mendukung kinerja Perseroan secara berkelanjutan, visi Perusahaan menjadi panduan untuk seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Berikut adalah penjelasan tentang upaya mendukung kinerja Perusahaan yang berkelanjutan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik sesuai Prinsip GCG.

COMPANY VISION IN SUPPORTING SUSTAINABLE COMPANY PERFORMANCE

The Company's vision to "Become a provider of clean energy solutions for a greener and more sustainable world" is an aspirational statement that describes PGN's long-term goals and strategic direction. In supporting the Company's sustainable performance, vision becomes a guide for all elements of the organization in achieving goals that are in line with the sustainability principle. The following is an explanation of the efforts to support the Company's sustainable performance and the implementation of good corporate governance in accordance with GCG Principles.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

PGN memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara garis besar tergambar pada Organ Utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing Organ Tata Kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan GCG dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

PGN has a Corporate Governance structure based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is outlined in the Company's Main Organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each Corporate Governance Organ has a crucial role in the successful implementation of GCG and the execution of its duties, functions, and responsibilities for the Company's interests, as referred to in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

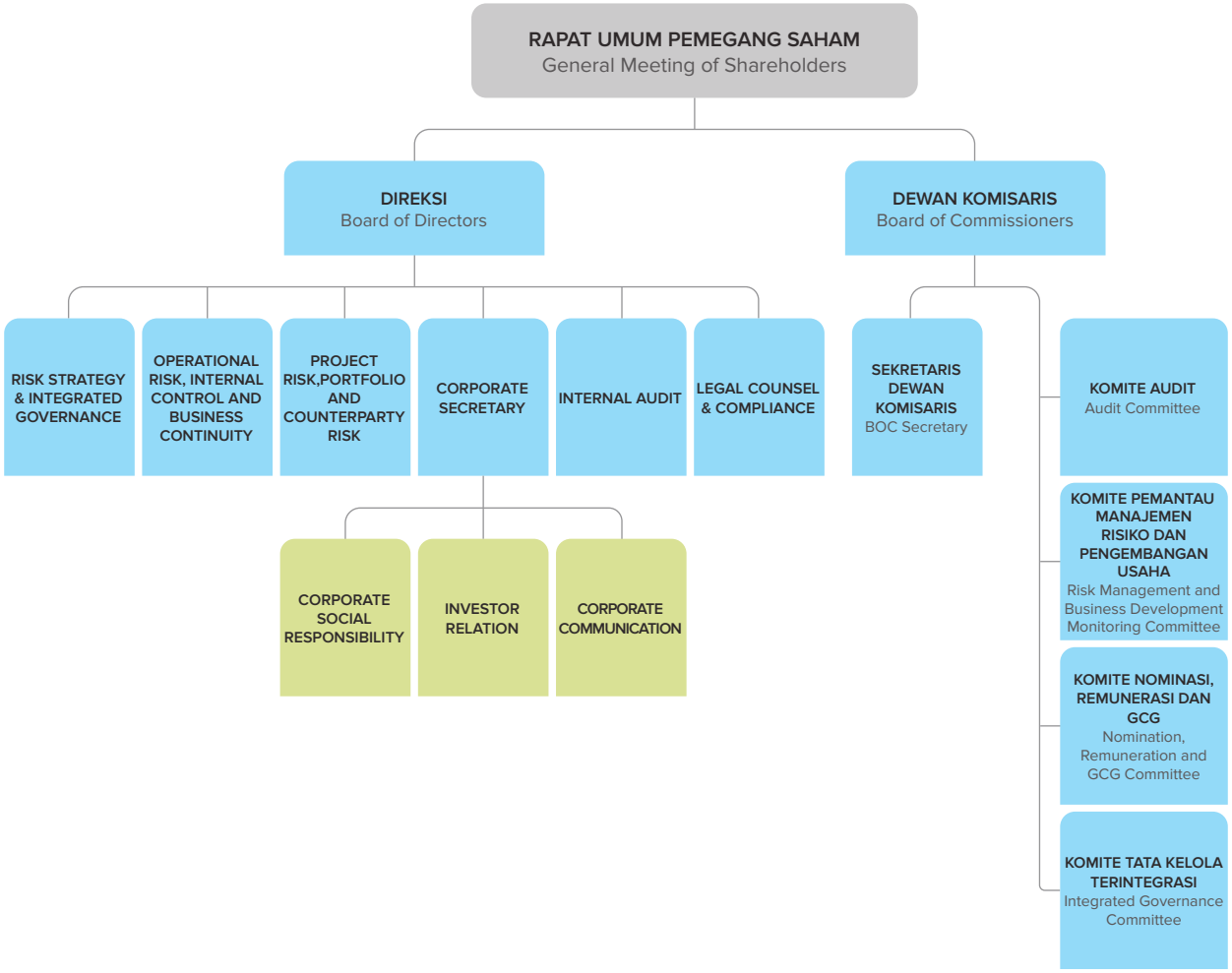

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola tertinggi Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Kekuasaan dalam RUPS lebih tinggi dibandingkan Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui penyelenggaraan RUPS, para Pemegang Saham dapat menerima informasi penting mengenai kinerja Perusahaan dan menggunakan haknya sehubungan dengan pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

PEMEGANG SAHAM

Komposisi pemegang saham PGN yaitu Negara Republik Indonesia memiliki satu saham seri A Dwiwarna, PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki 56,96% saham seri B, dan 43,04% saham seri B dimiliki oleh pemegang saham publik. Uraian mengenai informasi dan struktur pemegang saham telah dibahas pada Bab Profil Perusahaan bagian Informasi Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's highest governance organ and has authority that is not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits set by the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association. The power of the GMS is higher than that of the Board of Directors and Board of Commissioners. Through the GMS, Shareholders can receive important information on the Company's performance and exercise their rights in relation to the Company's strategic decision-making.

SHAREHOLDERS

PGN's shareholder composition, namely the Republic of Indonesia owns one series A Dwiwarna share, PT Pertamina (Persero) is the major shareholder with 56.96% of the series B shares, and 43.04% of the series B shares are owned by public shareholders. A description of the shareholder information and structure has been discussed in the Company Profile chapter of the Shareholder Information section of this Annual Report.

Hak Pemegang Saham

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
c. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
d. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama sepanjang Anggaran Dasar Perseroan tidak menetapkan lain.

Selaras dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya Hak Istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
   b. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
   c. Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham;
   d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran; serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan; dan
5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, dengan mekanisme penggunaan hak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Shareholders' Rights

Shareholders are entitled to:

a. Attending and casting their votes at the GMS;
b. Obtaining material information about the Company, in a timely, measurable, and regular manner;
c. Receiving payment of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares owned; and
d. Exercising other rights based on the Articles of Association and laws and regulations.

The Company's shares are shares in name and issued in the name of the owner registered in the Shareholder Register, consisting of:

- Series A Dwiwarna shares, which specifically can only be owned by the Republic of Indonesia; and
- Series B shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

Series A Dwiwarna Shareholders and Series B Shareholders have the same rights to the extent that the Company's Articles of Association do not stipulate otherwise.

Pursuant to the Company's Articles of Association, Series A Dwiwarna Shares are shares owned exclusively by the Republic of Indonesia which grants the holder Prerogative Rights as a Series A Dwiwarna Shareholder, namely:

1. The rights to agree at the GMS regarding the following matters:
   a. Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
   b. Approval of amendments to the Articles of Association;
   c. Approval of amendments to the shareholding structure;
   d. Approval regarding the merger, consolidation, separation and dissolution; as well as the takeover of the Company by another company.
2. The right to nominate Candidates for Members of the Board of Directors and Candidates for Members of the Board of Commissioners;
3. The right to propose GMS agenda items;
4. The right to request and access Company data and documents; and
5. The right to determine strategic policies to always aligned and in accordance with the policies and regulations that apply to Series B Shareholders with ownership of most of the Company's shares, with a mechanism for exercising rights in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and laws and regulations.

Pelaksanaan terhadap Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, kecuali pelaksanaan Hak Istimewa pada angka 1.c dan 1.d.

Kemudian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-10/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan kuasa khusus kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana tercantum di atas, termasuk hak untuk menyetujui usulan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

The exercise of the Series A Dwiwarna Shareholder's Prerogative Rights may be authorized to the Series B Shareholders with a majority ownership of the Company's shares, except for the exercise of the Prerogative Rights in points 1.c and 1.d.

Furthermore, pursuant to Special Power of Attorney No. SKK-10/MBU/05/2018 dated May 9, 2018, the Series A Dwiwarna Shareholders grant special power of attorney to PT Pertamina (Persero) as the Series B shareholders with a majority ownership of the Company's shares to take actions, which is the authority and/or rights of the Series A Dwiwarna Shareholders as stated above, including the right to approve the proposal of the Company's Board of Commissioners on the Board of Directors' actions as referred to in the Company's Articles of Association.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Selain memiliki hak, Pemegang Saham sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) UUPT, Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT bahwa Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUPT, yaitu:

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; dan
d. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Tanggung jawab Pemegang Saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan Pemegang Saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Shareholders' Responsibilities

In addition to having rights, Shareholders as capital owners also have responsibilities that must be carried out. Substantially, according to Article 3 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT), Shareholders are not personally responsible for the engagement made on behalf of the Company and are not responsible for the Company's losses over the shares owned. This principle is made clear in the Explanation section of Article 3 paragraph (1) of UUPT that Shareholders are solely responsible for the amount paid for all the shares they own and do not cover their assets.

In certain cases, this does not rule out the possibility of the elimination of the said limited liability if it is proven that the matters as referred to in Article 3 paragraph (2) UUPT occur, namely:

a. The Company's requirements as a legal entity have not been or are not met;
b. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, in bad faith exploits the Company for personal gain;
c. The relevant Shareholder is involved in an unlawful act committed by the Company; and
d. The relevant Shareholder, either directly or indirectly, unlawfully uses the Company's assets, which results in the Company's assets being insufficient to pay off the Company's debts.

Shareholders' responsibility in the amount of the deposit for all shares they own may be nullified if it is proven that, among other things, there is a mixing of the Shareholders' assets and the Company's assets so that the Company is established solely as a tool used by the Shareholders to fulfill their goals. As a form of accountability, Shareholders implement GCG in accordance with their authority and responsibility.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2024

RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2024

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Kamis, 30 Mei 2024
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.092.545.808 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 74,6345717% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Tahunan.
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Komisaris Utama RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh anggota Komisaris, yaitu:

IMPLEMENTATION OF THE 2024 GMS

Annual GMS dated May 30, 2024

1. Time and Place
   a. Day/date: Thursday, May 30, 2024
   b. Place: Graha PGAS Auditorium 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Annual GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of 18.092.545.808 shareholders, including Series A Dwiwarna shares representing 74,6345717% of the total issued shares, totaling 24.241.508.196 shares. Thus, the quorum required in the Company's Articles of Association has been fulfilled, and therefore, the Annual GMS is valid and has the right to make valid and binding decisions regarding matters discussed in accordance with the agenda of the Annual GMS.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the President Commissioner the GMS was attended in person by all members of the Commissioner, namely:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Amien Sunaryadi**	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama
   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director
   The GMS was attended in-person by all members of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama	**Arief Setiawan Handoko**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Rosa Permata Sari**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Harry Budi Sidharta**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Ratih Esti Prihatini**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

   Dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi, Perseroan dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari AdiWarsito, S.H.
6. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024
   Hingga Laporan tahunan ini diterbitkan, keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 seluruhnya telah dilaksanakan. Penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahunan Tahun 2024 tercantum dalam tabel di bawah ini.

5. Attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals.
   In carrying out the vote counting process and/or conducting validation, the Company was assisted by the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Results of the 2024 Annual GMS Resolutions
   Until the publication of this annual report, the resolutions of the 2024 Annual GMS have been fully implemented. An explanation of each agenda item of the 2024 Annual GMS is set out in the table below.

MATA ACARA PERTAMA
FIRST AGENDA

Mata Acara
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.

Agenda
Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2023 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.617.159.035	97,3724716%
Abstain	464.341.173	2,5664778%
Tidak Setuju	11.045.600	0,0610506%

Voting Results		
Agree	17,617,159,035	97.3724716%
Abstain	464,341,173	2.5664778%
Disagree	11,045,600	0.0610506%

Keputusan Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

First Agenda Resolutions
Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year, which ended on December 31, 2023, and provided full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the supervision of the Company that has been carried out during the fiscal year ended on December 31, 2023, as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Company's report books.

Tindak Lanjut
Keputusan langsung Berlaku

Follow-Up
Immediate resolution Applicable

MATA ACARA KEDUA
SECOND AGENDA

Mata Acara
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Agenda
Ratification of the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2023 Fiscal Year, and to grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2 orang

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: 2 people

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.614.883.735	97,3598957%
Abstain	466.616.473	2,5790537%
Tidak Setuju	11.045.600	0,0610506%

Voting Results		
Agree	17,614,883,735	97.3598957%
Abstain	466,616,473	2.5790537%
Disagree	11,045,600	0.0610506%

Keputusan Mata Acara Kedua
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 00188/2.1032/AU.1/02/1726-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/10/1726-2/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan

Second Agenda Resolutions
Ratified the Company's Consolidated Financial Statements audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) in accordance with Report Number 00188/2.1032/AU.1 /02/1726-2/1/III/2024 dated March 8, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects", and ratified the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Fiscal Year ended December 31, 2023, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) in accordance with Report Number 00083/2.1032/AU.2 /10/1726-2/1/II/2024 dated February 27, 2024, with an opinion of "fair, in all material respects", as well as granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the supervision of the Company in the Micro and Small Business Funding Program that has been carried out in the 2023 Fiscal Year as long as the action is not a criminal act and has been reflected in the Company's report books.

Tindak Lanjut
Keputusan langsung Berlaku

Follow-Up
Immediate resolution Applicable

MATA ACARA KETIGA
THIRD AGENDA

Mata Acara
Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023.

Agenda
Approval of the distribution of the Company's net profit, including the Dividend Distribution for 2023 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2 Orang

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: 2 people

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.710.085.721	97,8860903%
Abstain	339.265.087	1,8751650%
Tidak Setuju	43.195.000	0,2387447%

Voting Results		
Agree	17,710,085,721	97.8860903%
Abstain	339,265,087	1.8751650%
Disagree	43,195,000	0.2387447%

Keputusan Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2023 sebesar USD278,091,179 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
   a. Sebesar USD222,472,943.20 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2023 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPST;
   b. Sebesar USD55,618,235.80 (lima puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima koma delapan Dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk kegiatan pengembangan bisnis.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

Third Agenda Resolutions

1. Determined the use of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the 2023 Fiscal Year amounting to US$278,091,179 (two hundred seventy-eight million ninety-one thousand one hundred seventy-nine United States Dollars) as follows:
   a. US$222,472,943.20 (two hundred twenty-two million four hundred seventy-two thousand nine hundred forty-three point two United States Dollars) distributed as dividends to Shareholders in accordance with the portion of share ownership in the Company and paid in cash in Rupiah currency using the Bank Indonesia middle rate exchange rate according to the date of the 2023 Fiscal Year AGMS no later than 30 (thirty) calendar days after the announcement of the summary of the minutes of the AGMS;
   b. US$55,618,235.80 (fifty-five million six hundred eighteen thousand two hundred thirty-five point eight United States Dollars) is used as retained earnings for business development activities.
2. Granted authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedure for dividend distribution and announce it with due observance of the prevailing regulations on the stock exchange where the Company's shares are listed.

Tindak Lanjut
Tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 tercantum pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan melalui situs Perusahaan, Situs Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Mei 2024. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024.

Follow-Up
The procedure for paying cash dividends for the 2023 fiscal year is available in the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which was published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority on May 31, 2024. Cash dividends for the 2023 fiscal year were paid out on June 28, 2024.

MATA ACARA KEEMPAT
FOURTH AGENDA

Mata Acara
Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023.

Agenda
Determination of the amount of Board of Directors' Salary and Board of Commissioners' Honorarium in 2024, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year Performance.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.662.238.178	97,6216303%
Abstain	353.941.687	1,9562846%
Tidak Setuju	76.365.943	0,4220851%

Voting Results		
Agree	17,662,238,178	97.6216303%
Abstain	353,941,687	1.9562846%
Disagree	76,365,943	0.4220851%

Keputusan Mata Acara Keempat
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan
   b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi anggota Direksi:
   a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023; dan
   b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

Fourth Agenda Resolutions
1. Granted authority and power to PT Pertamina (Persero) as the Company's Majority Series B Shareholder with prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the members of the Board of Commissioners:
   a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Fiscal Year Performance; and
   b. Honorarium, allowances, and facilities for the 2024 Fiscal Year.
2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners with prior written approval from PT Pertamina (Persero) as the Company's Majority Series B Shareholder after consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the members of the Board of Directors:
   a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the 2023 Fiscal Year Performance; and
   b. Salaries, allowances, and facilities for the 2024 Fiscal Year.

Tindak Lanjut
Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor: R-053/C00000/2024-S8 tanggal 27 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan Remunerasi 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Dewan Komisaris menindaklanjuti penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Nomor: 63P/SKEL.00/D-KOM/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023, Remunerasi 2024 serta Pelaksanaan Pembayaran Tantiem Yang Ditangguhkan Tahun Buku 2022 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Follow-Up
Based on the Letter of the President Director of PT Pertamina (Persero) Number: R-053/C00000/2024-S8 dated September 27, 2024, regarding the Determination of Awards for the 2023 Fiscal Year Performance and 2024 Remuneration of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, the Board of Commissioners followed up the determination of the Board of Directors and Board of Commissioners' income through Letter Number: 63P/SKEL.00/D-KOM/2024 dated September 30, 2024, regarding the Determination of Awards for the 2023 Fiscal Year Annual Performance, 2024 Remuneration, and Implementation of Deferred Tantiem Payment for the 2022 Fiscal Year of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

MATA ACARA KELIMA
FIFTH AGENDA

Mata Acara
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.

Agenda
Determination of a Public Accounting Firm to carry out an Audit of Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of the Financial Statements of Micro and Small Enterprise Funding (PUMK) Related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Determination of Agreed Procedures for Report on Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Results for the 2024 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	16.939.469.369	93,6267872%
Abstain	339.267.587	1,8751788%
Tidak Setuju	813.808.852	4,4980339%

Voting Results		
Agree	16,939,469,369	93.6267872%
Abstain	339,267,587	1.8751788%
Disagree	813,808,852	4.4980339%

Keputusan Mata Acara Kelima
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
   a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
   b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.

Fifth Agenda Resolutions
1. Appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) to carry out the Audit of Consolidated Financial Statements for 2024 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of the Financial Statements of Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Implementation of Agreed Procedures on the Report on the Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Results for the 2024 Fiscal Year.
2. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees of the Public Accounting Firm approved in resolution number 1 above and the additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.
3. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners with prior approval from the Majority Series B Shareholders to:
   a. Appoint a Public Accountant and/or Substitute Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason based on capital market rules and regulations; and
   b. Determine the conditions, terms of appointment, and honorarium of the Substitute Public Accountant Firm.

Tindak Lanjut
Penetapan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro dan Surja (*a member firm of* Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PGN Nomor: 07/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sebagai Pelaksana Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Menengah Kecil (PUMK) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat Tahun Buku 2024.

Follow-Up
Determination of Public Accountant from Public Accounting Firm Purwantoro, Sungkoro and Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) based on the Decree of PGN's Board of Commissioners Number: 07/D-KOM/2024 dated June 6, 2024, concerning the Appointment of Public Accounting Firm as the Executor of the Audit of Consolidated Financial Statements, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Financial Statements of Funding for Small and Medium Enterprises (PUMK) related to Social and Environmental Responsibility, and Implementation of Agreed Procedures on the Report on the Corporate KPI Performance Evaluation Results for the 2024 Fiscal Year.

MATA ACARA KEENAM
SIXTH AGENDA

Mata Acara
Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.

Agenda
Approval of Special Assignment to the Company.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 orang

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: 1 person

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	14.968.474.283	82,7328251%
Abstain	353.962.179	1,9563979%
Tidak Setuju	2.770.109.346	15,3107770%

Voting Results		
Agree	14,968,474,283	82.7328251%
Abstain	353,962,179	1.9563979%
Disagree	2,770,109,346	15.3107770%

Keputusan Mata Acara Keenam

A. Penugasan Jaringan Gas di Ibu Kota Nusantara
   1. Menyetujui Penugasan kepada Perseroan untuk pelaksanaan Proyek Jaringan Gas di Ibu Kota Nusantara.
   2. Terkait dengan angka 1, menyetujui penugasan dari Pemerintah untuk pembangunan Jaringan Gas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 36.K/HK.02/MEM.S/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Gas Bumi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
   3. Menyetujui penugasan tahap selanjutnya untuk pembangunan pengelolaan Jaringan Gas Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam angka 1 di atas, melalui penetapan/penugasan kepada Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

B. Penugasan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
   Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

C. Penugasan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan
   Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

D. Penugasan Penyediaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Industri
   Mengukuhkan penugasan Pemerintah kepada Perseroan untuk penyediaan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk Pembangkit Tenaga Listrik dan Industri yang pelaksanaannya sesuai dengan:
   - Keputusan Menteri ESDM No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*);
   - Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/HK/02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi Tertentu di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate);
   - Keputusan Menteri ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 yang menyebutkan bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Sixth Agenda Resolutions

A. Assignment of Gas Network in the Nusantara Capital City
   1. Approved the Assignment to the Company for the implementation of the Gas Network Project in the Nusantara Capital City.
   2. In relation to number 1, approved the assignment from the Government for the construction of Gas Network in the Core Area of the Government Center of the Nusantara Capital City in accordance with the Decree of the Minister of EMR No. 36.K/HK.02/MEM.S/2023 dated February 23, 2023, concerning the Assignment of the Implementation of Electricity and Natural Gas Infrastructure Development for the Core Area of the Government Center of the Nusantara Capital City.
   3. Approved the assignment of the next stage for the construction of the Nusantara Capital City Gas Network management as stated in number 1 above, through the stipulation/assignment to the Company with due observance of Government Regulation No. 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies.

B. Assignment of Natural Gas Network for Households and Small Customers

Confirmed the Government's assignment to the Company to supply and distribute natural gas through natural gas transmission and/or distribution networks for households and small customers in accordance with the Decree of the Minister of EMR No. 85 K/16/MEM/2020 dated April 8, 2020, concerning the Assignment to PT Perusahaan Gas Negara Tbk to Carry out Natural Gas Supply and Distribution through Natural Gas Transmission and/or Distribution Networks for Households and Small Customers.

C. Assignment of Gas Fuel Utilization for Road Transportation
   Confirmed the Government's assignment to the Company for Gas Fuel utilization for road transportation in 2020-2024 for PT Pertamina (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara Tbk, the implementation of which is in accordance with the Decree of the Minister of EMR No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021 dated March 16, 2021, concerning Roadmap for Gas Fuel Utilization for Road Transportation and Assignment of Gas Fuel Supply and Distribution for Road Transportation in 2020 - 2024 to PT Pertamina (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

D. Assignment for the Provision of Specific Natural Gas Prices (HGBT) for Power Plant and Industry
   Confirmed the Government's assignment to the Company to provide specific natural gas prices (HGBT) for Power Plant and Industry. The implementation is in accordance with:
   - Decree of the Minister of EMR No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 dated June 30, 2021, concerning Specific Natural Gas Prices at Power Plants (Plant Gate);
   - Decree of the Minister of EMR No. 135.K/HK/02/MEM.M/2021 dated August 2, 2021, concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 concerning Specific Natural Gas Prices at Power Plants (Plant Gate);
   - Decree of the Minister of EMR No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 dated May 19, 2023, on Specific Natural Gas Users and Specific Natural Gas Prices in the Industrial Sector.

The approval takes into account the provisions of Article 66 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, Article 65 of Government Regulation No. 45 of 2005, Article 3 paragraph (3) of Regulation of the Minister of SOEs No. PER-1/MBU/03/2023, which states that if the assignment is financially unfeasible, the Government must compensate for all costs incurred by the SOE, including the expected margin, as long as it is within a reasonable level in accordance with the assignment.

Tindak Lanjut
Keputusan langsung berlaku.

Follow-Up
Immediate resolution Applicable.

MATA ACARA KETUJUH
SEVENTH AGENDA

Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agenda
Changes to the Composition of the Company's Management.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	14.119.593.115	78,0409416%
Abstain	650.052.087	3,5929277%
Tidak Setuju	3.322.900.606	18,3661307%

Voting Results		
Agree	14,119,593,115	78.0409416%
Abstain	650,052,087	3.5929277%
Disagree	3,322,900,606	18.3661307%

Keputusan Mata Acara Ketujuh

1. Mengusulkan pengukuhkan pemberhentian: Saudara Luky Alfirman sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 26 April 2024.
2. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Seventh Agenda Resolutions

1. Proposed the confirmation of the dismissal of: Mr. Luky Alfirman as Commissioner effective since April 26, 2024.
2. Proposed the honorable dismissal of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners:

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner

Dengan ucapan terima kasih dengan segala tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen dan Direktur SDM dan Penunjang Bisnis.

3. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:

With gratitude for all the energy and thoughts given by the person concerned during their tenure as Independent Commissioner and Director of HR and Business Support.

3. Proposed changes to the nomenclature of the Board of Directors positions as follows:

No.	Semula Initially	Menjadi Become
1.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Direktur Keuangan Director of Finance
		Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management
2.	Direktur Sales dan Operasi Director of Sales dan Operations	Direktur Komersial Director of Commerce

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.

4. Mengalihkan penugasan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:
   - Saudara Fadjar Harianto Widodo semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan
   - Saudari Ratih Esti Prihatini semula sebagai Direktur Sales dan Operasi menjadi Direktur Komersial

   Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengusulkan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

With the term of office continuing for the remainder of their terms, based on the General Meeting of Shareholders Resolution on Appointment of the person concerned.

4. Transferred the assignments of the members of the Board of Directors as follows:
   - Mr. Fadjar Harianto Widodo, previously as Director of Finance and Risk Management, became Director of Finance.
   - Mrs. Ratih Esti Prihatini, previously as Director of Sales and Operations, became Director of Commercial.

   With the term of office continuing for the remainder of their terms, based on the General Meeting of Shareholders Resolution on Appointment of the person concerned.
5. Proposed the appointment of the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners:

Direktur Manajemen Risiko	**Arief Kurnia Risdianto**	Director of Risk Management
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Rachmat Hutama**	Director of HR and Business Support
Komisaris untuk periode kedua	**Luky Alfirman**	Commissioner for the second term
Komisaris Independen untuk periode kedua	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner for the second term
Komisaris Independen	**Tony Setia Boedi Hoesodo**	Independent Commissioner

6. Pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 agar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hasil penetapan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan anggota-anggota Direksi Perseroan tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data Portal HC BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

6. Confirmation of dismissal, termination, change of position nomenclature, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 2, number 3, number 4, and number 5 to be determined at the General Meeting of Shareholders with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.
7. The results of the determination of the General Meeting of Shareholders on the changes in members of the Company's Board of Directors should be submitted to the Ministry of SOEs through updating the HC SOE Portal data as stipulated in Article 54 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Tindak Lanjut
Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 040900.S/KU.06.01/COS/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal informasi perubahan pengurus Perseroan.

Perubahan Pengurus Perseroan ini ditindaklanjuti oleh Direksi dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 18 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0212762 tanggal 11 Juni 2024.

Follow-Up
The dismissal and appointment of Members of the Board of Directors have been reported to OJK through Letter No. 040900.S/KU.06.01/COS/2024 dated May 31, 2024, regarding information on changes in the Company's management.

The changes in the Company's management were followed up by the Board of Directors with the Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 18 dated June 10, 2024, made before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The Amendment to the Company's Management has also been submitted and accepted by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.09-0212762 dated June 11, 2024.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023

Pada tahun 2023, PGN telah melaksanakan dua kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 30 Mei 2023 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 November 2023. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dilakukan sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Kamis, 30 Mei 2023
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.316.232.689 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 75,5573149% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Tahunan.sanksi
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Komisaris Utama RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh anggota Komisaris, yaitu:

GMS IMPLEMENTATION IN 2023

In 2023, PGN convened two GMSs: the Annual GMS on May 30, 2023, and one Extraordinary GMS on November 14, 2023. Both the Annual GMS and Extraordinary GMS were convened in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies.

Annual GMS dated May 30, 2023

1. Time and Place
   a. Day/date: Tuesday, May 30, 2023
   b. Place: Graha PGAS Auditorium, 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Annual GMS was attended by shareholders and their representatives/proxies of 18,316,232,689 shares, including Series A Dwiwarna shares or representing 75.5573149% of the total issued shares, a total of 24,241,508,196 shares. Therefore, the quorum required in the Company's Articles of Association has been fulfilled. Accordingly, the Annual GMS is valid and entitled to make valid and binding decisions regarding the matters discussed in accordance with the Annual GMS agenda.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the President Commissioner. The GMS was attended in-person by all members of Commissioners, namely:

Komisaris Utama	**Arcandra Tahar**	President Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama

   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director

   The GMS was attended in-person by all members of the Board of Directors, namely:

Direktur Utama	**M. Haryo Yunianto**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Heru Setiawan**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Mei 2023
   Hingga Laporan tahunan ini diterbitkan, keputusan RUPS Tahunan Tahun 2023, seluruhnya telah dilaksanakan. Penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahunan Tahun 2023 tercantum dalam tabel di bawah ini.

5. The attendance of Capital Market Supporting Institutions and Professionals in carrying out the vote counting process and/or conducting validation, namely the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Results of the Annual GMS Resolution dated May 30, 2023
   Until the publication of this annual report, the resolutions of the 2023 Annual GMS have been fully implemented. An explanation of each agenda item of the 2023 Annual GMS is set out in the table below.

MATA ACARA PERTAMA
FIRST AGENDA

Mata Acara
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.

Agenda
Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year and the Corporate Social and Environmental Responsibility Program Report for the 2022 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2022 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.944.455.777	97,9702326%
Abstain	362.265.212	1,9778369%
Tidak Setuju	9.511.700	0,0519304%

Voting Results		
Agree	17,944,455,777	97.9702326%
Abstain	362,265,212	1.9778369%
Disagree	9,511,700	0.0519304%

Keputusan Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

First Agenda Resolutions
Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2022 Fiscal Year and Implementation of the Social and Environmental Responsibility Report for the 2022 Fiscal Year, which ended on December 31, 2022, as well as granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been implemented during the fiscal year ending on December 31, 2022, as long as the actions do not constitute criminal acts and have been reflected in the Company's report book.

Tindak Lanjut
Keputusan langsung Berlaku

Follow-Up
Immediate resolution Applicable

MATA ACARA KEDUA
SECOND AGENDA

Mata Acara
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan Tahun Buku 2022, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.

Agenda
Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, including the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2022 Fiscal Year, and to grant full release and discharge to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.941.830.477	97,9558995%
Abstain	364.540.512	1,9902592%
Tidak Setuju	9.861.700	0,0538413%

Voting Results		
Agree	17,941,830,477	97.9558995%
Abstain	364,540,512	1.9902592%
Disagree	9,861,700	0.0538413%

Keputusan Mata Acara Kedua
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 0746/2.1032/AU.1/02/1726-I/I/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernst & Young) sesuai Laporan Nomor 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Uaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.

Second Agenda Resolutions
Ratified the Company's Consolidated Financial Statements, which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernest & Young) in accordance with Report No. 00746/2.1032/AU.1/02/1726-I/I/IV /2023 dated April 13, 2023, with a "fair, in all material respects" opinion, as well as ratifying the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year ending December 31, 2022, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report, which has been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernest & Young) in accordance with Report No. 00576/2.1032/AU.2/11/1726-1/1/III/2023 dated March 31, 2023, with an opinion of "fair, in all material respects", (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company in the Micro and Small Business Funding Program, which has been carried out in the 2022 Fiscal Year, as long as these actions do not constitute criminal acts and have been reflected in the reporting books of the Company.

Tindak Lanjut
Keputusan langsung Berlaku

Follow-Up
Immediate resolution Applicable

MATA ACARA KETIGA
THIRD AGENDA

Mata Acara
Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2022.

Agenda
Approval of the distribution of the Company's net profit, including the Dividend Distribution for 2022 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 Orang

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: 1 person

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	18.093.246.202	98,7825745%
Abstain	222.984.787	1,2174162%
Tidak Setuju	1.700	0,0000093%

Voting Results		
Agree	18,093,246,202	98.7825745%
Abstain	222,984,787	1.2174162%
Disagree	1,700	0.0000093%

Keputusan Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2022 sebesar USD326.239.697 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
   a. Sebesar USD228.367.788 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dalam RUPS Tahunan Perseroan ini.
   b. Sebesar USD97.871.909 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) sebagai Cadangan, termasuk untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian Dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.

Third Agenda Resolutions

1. Determined the use of Net Profit attributable to the Owner of the Parent Entity for the 2022 Fiscal Year of US$326,239,697 (three hundred twenty-six million, two hundred thirty-nine thousand, six hundred and ninety-seven United States Dollars) as follows:
   a. Dividends of US$228,367,788 (two hundred twenty-eight million, three hundred sixty-seven thousand, seven hundred eighty-eight United States Dollars) were distributed to Shareholders in accordance with their portion of share ownership in the Company and paid in cash in Rupiah currency using the Bank Indonesia middle exchange rate as of the date of the 2022 Annual GMS, no later than 30 (thirty) days after being determined at the Company's Annual GMS.
   b. Amounting to USD$7,871,909 (ninety-seven million, eight hundred seventy-one thousand, nine hundred and nine United States Dollars) as Reserves, including to support the Company's operational and development activities.
2. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to further regulate the procedures for distributing and announcing dividends in accordance with the applicable regulations of the stock exchange where the Company's shares are listed.

Tindak Lanjut

Tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 tercantum pada Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dipublikasikan melalui situs Perusahaan, situs Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2023. Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022 telah dilakukan pada tanggal 28 Juni 2023.

Follow-Up

The procedure for paying cash dividends for the 2022 fiscal year is available in the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, which was published on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Financial Services Authority on May 30, 2023. Cash dividends for the 2022 fiscal year were paid out on June 28, 2023.

MATA ACARA KEEMPAT
FOURTH AGENDA

Mata Acara

Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2023.

Agenda

Determination of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year, as well as Salary/Honorarium, along with Facilities and Allowances for the 2023 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	18.020.046.711	98,3829318%
Abstain	242.207.687	1,3223663%
Tidak Setuju	53.978.291	0,2947019%

Voting Results		
Agree	18,020,046.711	98.3829318%
Abstain	242,207,687	1.3223663%
Disagree	53,978,291	0.2947019%

Keputusan Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kementerian BUMN selaku institusi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Fourth Agenda Resolutions

Granted the authority and power to the largest Series B Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentives/special incentives for performance in 2022, as well as salaries/honorariums, allowances, and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 fiscal year, after consulting with the Ministry of SOE as the Series A Dwiwarna shareholder institution.

Tindak Lanjut

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan dan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-47/Wk1.MBU.A/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023, Dewan Komisaris menindaklanjuti penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat No. 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023 dan Tantiem 2022.

Follow-Up

Based on the Annual GMS Resolution and the Letter of the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna Shareholder No. SR-47/Wk1.MBU.A/07/2023 dated July 5, 2023, on 2023 Income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, the Board of Commissioners is following up on the determination of the income of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through Letter No. 67P/SKEL.00/D-KOM/2023 dated July 27, 2023, on the Determination of Income for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for 2023 and Tantiem for 2022.

MATA ACARA KELIMA
FIFTH AGENDA

Mata Acara
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.

Agenda
Appointment of a Public Accounting Firm to carry out an Audit of Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Small Medium Enterprise Funding Financial Statements Related to the Social and Environmental Responsibility Program, and Application of Agreed Procedures for Report on Corporate and Individual KPI Performance Evaluation Results for the 2023 Fiscal Year.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	17.189.492.845	93,8484083%
Abstain	223.039.487	1,2177149%
Tidak Setuju	903.700.357	4,9338768%

Voting Results		
Agree	17,189,492,845	93.8484083%
Abstain	223,039,487	1.2177149%
Disagree	903,700,357	4.9338768%

Keputusan Mata Acara Kelima

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of* Ernst & Young) untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2023.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
   a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
   b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.

Fifth Agenda Resolutions

1. Appointed the Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young) to carry out the Audit of the Consolidated Financial Report for the 2023 Fiscal Year, the PSA 62 Compliance Audit, the Audit of the Financial Report on Micro and Small Business Funding related to the Social and Environmental Responsibility Programme, and the Implementation of Agreed Procedures for the Report on the Performance Evaluation Results of Corporate KPIs and Individual KPIs for the 2023 Fiscal Year.
2. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of payment for the Public Accounting Firm's audit services as approved in resolution number 1 above, as well as extend the scope of work and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.
3. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners after obtaining approval from the majority of Series B shareholders to:
   a. Determined a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or carry out its duties for any reason under capital market rules and regulations; and
   b. Determined the conditions, requirements for appointment, and honorarium for the replacement Public Accounting Firm.

Tindak Lanjut
Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan akuntan publik (*signing partner*) Irwan Haswir, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 074000.S/PW.05.01/COS/2023 tanggal 5 September 2023.

Follow-Up
Appointment of the Public Accounting Firm ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, with public accountant (signing partner) Irwan Haswir, to conduct an audit of the company's financial statements ending on December 31, 2023, has been reported to the OJK through Letter No. 074000.S/PW.05.01/COS/2023 dated September 5, 2023.

MATA ACARA KEENAM
SIXTH AGENDA

Mata Acara
Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
1. No. PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. No. PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Agenda
Ratification of the Regulation of the Minister of SOEs:
1. No. PER-01/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.
2. No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises.
3. No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	18.091.936.002	98,7754213%
Abstain	224.235.987	1,2242473%
Tidak Setuju	60.700	0,0003314%

Voting Results		
Agree	18,091,936,002	98.7754213%
Abstain	224,235,987	1.2242473%
Disagree	60,700	0.0003314%

Keputusan Mata Acara Keenam
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari;

Sixth Agenda Resolutions
Confirming the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, as follows:
1. Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
2. Minister of SOE Regulation No. PER02/MBU/03/2023 on Guidelines for the Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;

and any future amendments;

Tindak Lanjut
Melakukan penyesuaian seluruh kebijakan dan prosedur internal PGN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang telah dikukuhkan pada RUPS Tahunan Tahun 2023 ini.

Follow-Up
Adjusting all PGN's internal policies and procedures in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs that has been confirmed at the 2023 Annual GMS.

MATA ACARA KETUJUH
SEVENTH AGENDA

Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agenda
Changes to the Composition of the Company's Management.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	13.884.122.456	75,8022826%
Abstain	539.198.087	2,9438264%
Tidak Setuju	3.892.912.146	21,2538911%

Voting Results		
Agree	13,884,122,456	75.8022826%
Abstain	539,198,087	2.9438264%
Disagree	3,892,912,146	21.2538911%

Keputusan Mata Acara Ketujuh

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama	**M. Haryo Yunianto**	President Director
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Heru Setiawan**	Director of Strategy and Business Development

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Harry Budi Sidharta**	Director of Strategy and Business Development

3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 agar ditetapkan dalam RUPS Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil penetapan RUPS atas pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan tersebut agar disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui pembaharuan data Portal HC BUMN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Seventh Agenda Resolutions

1. Respectfully dismissed the names below as members of the Company's Board of Directors:

2. Appointed the names below as members of the Company's Board of Directors:

3. The dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors, as referred to in numbers 1 and 2, must be determined at the Company's GMS in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations.
4. The GMS resolutions on the dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors must be submitted to the Ministry of SOE by updating the SOE HC Portal data, as required by Article 54 paragraph (4) of the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Tindak Lanjut

Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 055600.S/OT.02.00/COS/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal informasi perubahan pengurus Perseroan.

Perubahan Pengurus Perseroan ini ditindaklanjuti oleh Direksi dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 14 tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Atas Perubahan Pengurus Perseroan ini juga telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0126463 tanggal 12 Juni 2023.

Follow-Up

The dismissal and appointment of members of the Board of Directors have been reported to OJK through Letter No. 055600.S/OT.02.00/COS/2023 dated May 31, 2023, regarding information on changes in the Company's management.

Following the change in management, the Board of Directors issued a Deed of Statement of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 14 dated June 9, 2023, before Notary Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. This change in the Company's Management has also been submitted and accepted by the Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights, based on Letter No. AHU-AH.01.09-0126463 dated June 12, 2023.

RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2023

1. Waktu dan Tempat
   a. Hari/tanggal: Selasa, 14 November 2023
   b. Tempat: Auditorium Graha PGAS Lantai 2, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Kuorum
   RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 18.307.561.479 termasuk saham Seri A Dwiwarna atau mewakili 75,5215448% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, yang seluruhnya berjumlah 24.241.508.196 saham. Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dipenuhi dan karenanya RUPS Luar Biasa adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda RUPS Luar Biasa.
3. Kehadiran Dewan Komisaris dan Komite-Komite, termasuk Plt. Komisaris Utama. RUPS dihadiri secara luring oleh anggota Komisaris, yaitu:

Extraordinary GMS dated November 14, 2023

1. Time and Place
   a. Day/date: Tuesday, November 14, 2023
   b. Place: Graha PGAS Auditorium 2nd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta 11140
2. Quorum
   The Extraordinary GMS was attended by shareholders and representatives/proxies of shareholders of 18,307,561,479 shares, including Series A Dwiwarna shares, or 75.5215448% of the total issued shares of 24,241,508,196 shares. Therefore, the quorum required by the Company's Articles of Association has been met, and the Extraordinary GMS is valid, with the authority to make legal and binding decisions on matters discussed in accordance with the agenda of the Extraordinary GMS.
3. Attendance of the Board of Commissioners and Committees, including the Acting President Commissioner. The GMS was attended in-person by the following members of Commissioner:

Plt Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Paiman Raharjo**	Acting President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

4. Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama.

   RUPS dihadiri secara luring oleh seluruh Direksi, yaitu:

4. Attendance of the Board of Directors, including the President Director.
   The GMS was attended in-person by all Directors, as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Harry Budi Sidharta**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Achmad Muchtasyar**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Sales dan Operasi	**Faris Aziz**	Director of Sales dan Operations
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support

5. Kehadiran Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 November 2023
   Hingga Laporan tahunan ini diterbitkan, keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023, seluruhnya telah dilaksanakan. Penjelasan atas mata acara RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tercantum dalam tabel di bawah ini.

5. The presence of Capital Market Supporting Institutions and Professionals in the vote counting and/or validation process, namely the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
6. Results of the Extraordinary GMS Resolution dated November 14, 2023
   Up to the publication of this annual report, the resolutions of the 2023 Extraordinary GMS have been fully implemented. Explanation of the agenda of the 2023 Extraordinary GMS is listed in the table below.

MATA ACARA
AGENDA

Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agenda
Changes to the Composition of the Company's Management.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: Tidak ada

Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions: None

Hasil Pemungutan Suara		
Setuju	14.223.596.583	77,6924693%
Abstain	651.079.236	3,5563406%
Tidak Setuju	3.432.885.660	18,7511901%

Voting Results		
Agree	14,223,596,583	77.6924693%
Abstain	651,079,236	3.5563406%
Disagree	3,432,885,660	18.7511901%

Keputusan Mata Acara

1. Memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat saudara Paiman Raharjo dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat saudara Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Mengangkat saudara Abdullah Aufa Fuad sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Agenda Resolutions

1. Respectfully dismissed Arcandra Tahar from his position as President Commissioner of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and expressed high gratitude for his contributions to the Company during his tenure as President Commissioner.
2. Respectfully dismissed Paiman Raharjo from his position as Independent Commissioner of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and expressed high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as Independent Commissioner.
3. Appointed Amien Sunaryadi as the Company's President Commissioner and concurrently Independent Commissioner, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office as specified in the Company's Articles of Association.
4. Appointed Abdullah Aufa Fuad as the Company's Independent Commissioner, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office as specified in the Company's Articles of Association.
5. As a result, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	**Amien Sunaryadi**	President Commissioner and Independent Commissioner
Komisaris	**Luky Alfirman**	Commissioner
Komisaris	**Warih Sadono**	Commissioner
Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Independent Commissioner
Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Independent Commissioner

6. Memberhentikan dengan hormat saudara Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan.
7. Memberhentikan dengan hormat saudara Faris Aziz dari jabatannya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya kepada Perseroan selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan.
8. Mengangkat saudari Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi Perseroan, terhitung efekif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Mengangkat saudari Rosa Permata Sari sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
10. Mengalihtugaskan saudara Harry Budi Sidharta sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.
11. Dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

6. Respectfully dismissed Achmad Muchtasyar from his position as Director of Infrastructure and Technology of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and expressed high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as the Company's Director of Infrastructure and Technology.
7. Respectfully dismissed Fariz Aziz from his position as Director of Sales and Operations of the Company, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, and expressed high gratitude for his contribution to the Company during his tenure as the Company's Director of Sales and Operations.
8. Appointed Ratih Esti Prihatini as the Company's Director of Sales and Operations, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office, as specified in the Company's Articles of Association.
9. Appointed Rosa Permata Sari as the Company's Director of Strategy and Business Development, effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, for 1 (one) term of office, as specified in the Company's Articles of Association.
10. Assigned Harry Budi Sidharta as the Company's Director of Infrastructure and Technology effective as of the close of the General Meeting of Shareholders, with the term of office continuing for the remainder of his term, as specified in the Company's Articles of Association.
11. As a result, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Direktur Utama	**Arief S. Handoko**	President Director
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	**Beni Syarif Hidayat**	Director of HR and Business Support
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	**Harry Budi Sidharta**	Director of Infrastructure and Technology
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	**Fadjar Harianto Widodo**	Director of Finance and Risk Management
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	**Rosa Permata Sari**	Director of Strategy and Business Development
Direktur Sales dan Operasi	**Ratih Esti Prihatini**	Director of Sales dan Operations

12. Bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
13. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

12. If appointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors still hold positions that are prohibited by statutory regulations, agency/authority provisions, or internal regulations (including the Company's Articles of Association), they must resign or be dismissed from their position.
13. Granted authority with the substitution right to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the resolutions on this Agenda in accordance with applicable laws and regulations, including notifying the Ministry of Law and Human Rights of the composition of the Board Directors and Board of Commissioners in a separate Notarial Deed.

Tindak Lanjut

Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 093800.S/OT.02.00/COS/2023 tanggal 15 November 2023 perihal informasi perubahan pengurus Perseroan.

PGN telah mencatatkan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Akta Notaris Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.09-0189008 tanggal 24 November 2023.

Follow-Up

The dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners were reported to the OJK in Letter No. 093800.S/OT.02.00/COS/2023, dated November 15, 2023, regarding changes in the Company's management.

PGN recorded the dismissal and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners through Notarial Deed No. 32 of 2023 dated November 22, 2023, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia received notification of changes to company data through Letter No. AHU-AH.01.09-0189008 dated November 24, 2023.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

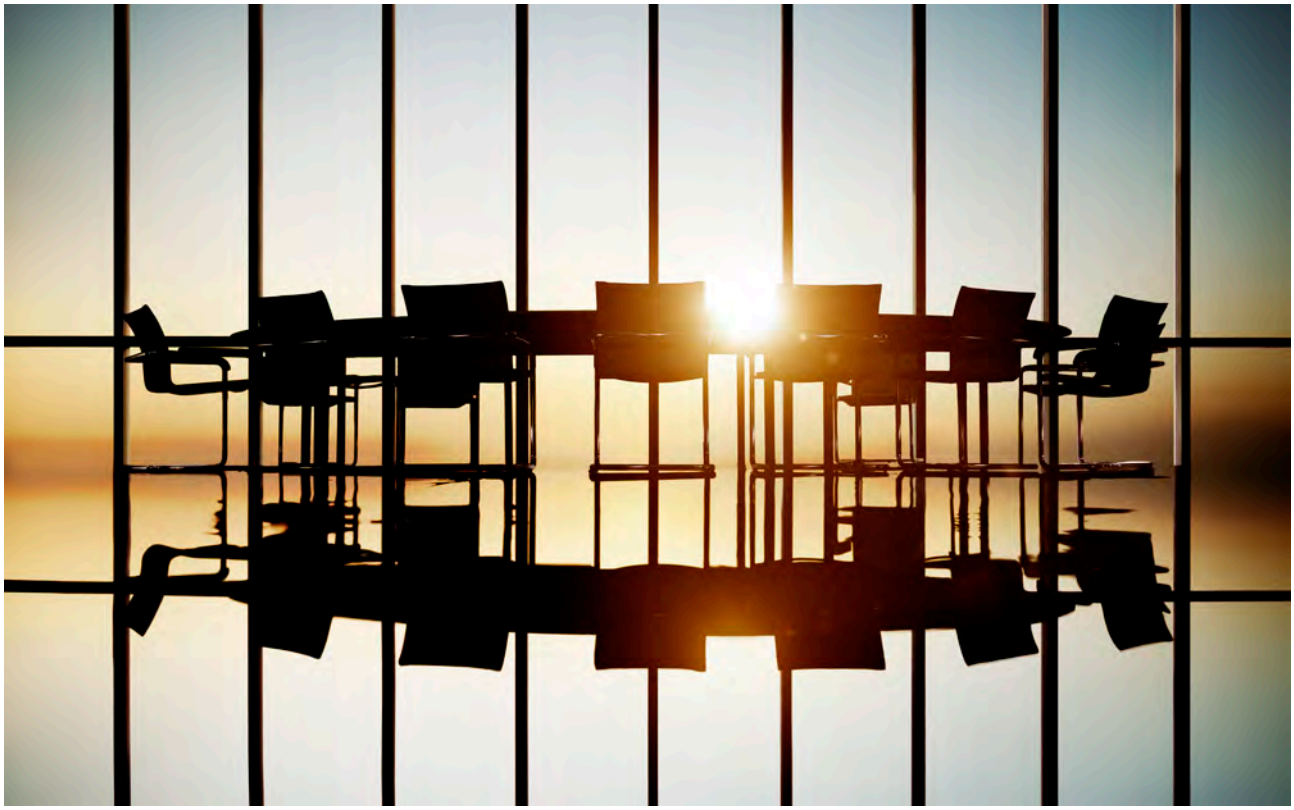

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan tata kelola, serta memberikan saran perbaikan sistem dan implementasi prinsip GCG.

The Board of Commissioners is the governance organ responsible for supervising the Company's management by the Board of Directors and ensuring that the Company has implemented governance principles in a sustainable manner.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each member of the Board of Commissioners must supervise the implementation of policies and the course of management carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company, according to the Company's goals and objectives. The Board of Commissioners also has the responsibility of monitoring the effectiveness of governance implementation, as well as providing suggestions for improving the GCG principles system and implementation.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk:

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
b. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
d. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna bila terjadi gejala turunnya kinerja Perseroan;
e. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan;
h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
i. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perseroan lain;
j. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
k. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang pasar modal;
l. Membentuk Komite Audit untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; dan
m. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris merujuk pada acuan tugas Dewan Komisaris, yaitu:

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan BUMN No PER-1/MBU/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan BUMN No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the obligation to:

a. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
b. Providing opinion and approval of the Company's Annual Budget and Operational Plan and other work plans prepared by the Board of Directors;
c. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions at the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
d. Reporting to the Series A (Dwiwarna) Shareholders if there are trends of a decline in the Company's performance;
e. Proposing to the GMS the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books;
f. Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual reports;
g. Providing explanations, opinions, and suggestions at the GMS regarding the annual report;
h. Making minutes of meetings of the Board of Commissioners and keeping the original copy;
i. Reporting to the Company regarding their and/or their family's share ownership in the Company and other companies;
j. Providing a report on supervisory duties that have been carried out during the recent fiscal year to the GMS;
k. Providing an explanation of all matters that are asked or requested by Series A Dwiwarna Shareholders with due observance of laws and regulations, especially those applicable in the capital market sector;
l. Set up an audit committee to effectively assist it with its duties and responsibilities; and
m. Carrying out other obligations in the context of supervisory and advisory duties if they do not conflict with the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.

GUIDELINES AND WORK PROCEDURES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory duties on the policies and management carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the reference of duties of the Board of Commissioners, namely:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- Regulation of SOE No. PER-1/MBU/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises;
- Regulation of SOE No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises;
- Regulation of SOE No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar Perseroan; dan
- *Board Manual* Perseroan.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Secara berkala, *Board Manual* dievaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. *Board Manual* menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual* Perseroan diatur secara khusus dalam Bab III yang mencakup:

a. Tugas-tugas Dewan Komisaris;
b. Batasan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
d. Lowong Jabatan Dewan Komisaris;
e. Rangkap Jabatan;
f. Independensi dan Etika Jabatan Dewan Komisaris;
g. Wewenang Dewan Komisaris;
h. Rapat Dewan Komisaris;
i. Rapat Gabungan;
j. Komite-Komite Dewan Komisaris;
k. Sekretaris Dewan Komisaris;
l. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris;
m. Kebijakan Suksesi Direksi;
n. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; dan
o. Waktu Kerja Dewan Komisaris.

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Selaras dengan ketentuan Pasal 14 ayat (29) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
- Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 the Establishment and Work Implementation Guidelines of the Audit Committee;
- Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/20120 on Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
- The Company's Articles of Association; and
- The Company's Board Manual.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has a Board Manual that serves as a guideline in the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Periodically, the Board Manual is evaluated and updated with reference to the prevailing rules and regulations in Indonesia. The Board Manual serves as a binding guideline and work order for each member of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out its duties efficiently, effectively, transparently, independently, and accountably.

The Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners in the Company's Board Manual are specifically regulated in Chapter III, which includes:

a. Duties of the Board of Commissioners;
b. Limitation of Responsibilities of the Board of Commissioners;
c. Preparation of the Annual Budget and Operational Plan;
d. Vacant Positions of the Board of Commissioners;
e. Concurrent Positions;
f. Independence and Work Ethics of the Board of Commissioners;
g. Authorities of the Board of Commissioners;
h. Board of Commissioners Meeting;
i. Joint Meetings;
j. Committees of the Board of Commissioners;
k. Secretary to the Board of Commissioners;
l. Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners;
m. Succession Policy of the Board of Directors;
n. Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
o. Work Hour of the Board of Commissioners.

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST

In line with the provisions in Article 14 paragraph (29) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding the following concurrent positions:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan;
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1. Member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or private-owned enterprise, except member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise that is the Corporation's B Series Majority Shareholder;
2. Political party officials and/or candidate/member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, Regional Legislative Council Level I and Level II, and/or regional head/deputy regional head;
3. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations; and/or
4. Other positions that may cause a conflict of interest.

KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual* PGN telah memiliki kebijakan bahwa untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mendapatkan pinjaman dari Perseroan.

POLICY ON PROHIBITION OF OBTAINING LOANS FROM THE COMPANY TO THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

As stipulated in the Board Manual, PGN has a policy prohibiting all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, their families, and other parties affiliated with them from prohibition loans from the Company.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:

A. Penyampaian Persetujuan atas topik:
   1. Perubahan Pengurus Anak Perusahaan;
   2. Piagam Audit Internal;
   3. *Annual Audit Plan Internal Audit Division* 2024;
   4. Penunjukan Perusahaan Jasa Pemeringkat Kredit Untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode 2023;
   5. Rencana Investasi:
      a. Pengeboran WK Pangkah Sumur UPB 12;
      b. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Ketapang dengan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran Eksplorasi Hikmah dan Perkasa;
      c. Pengeboran WK West Pangkah Sumur WP06;
      d. *Upgrading* Stasiun Panaran sebagai Penguatan Kehandalan Jaringan Batam;
      e. Pembangunan Pipa BBM Cikampek - Plumpang ("Cikamplung");
      f. Pengeboran Explorasi Sumur Ronggolawe-3;
      g. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Muara Bakau dengan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran 1 (Satu) Sumur Eksplorasi, 3D Seismik dan Studi G&G serta Bonus Tandatangan;
      h. Pengeboran WK Muara Bakau Sumur JNE-07 Sidetrack;
      i. Pengeboran WK Pangkah Sumur SID-05;
      j. Penambahan Anggaran Investasi terkait Proyek Pipa Minyak Rokan;
      k. Pengeboran WK Ketapang Sumur Bukit Tua BTJTB-T8 (NZ2);
      l. Pengeboran WK Pangkah Sumur UPA-17;

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, the Board of Commissioners performed the following duties and activities:

A. Submission of Approval of the following topics:
   1. Changes in the Management of Subsidiaries;
   2. Internal Audit Charter;
   3. Annual Audit Plan Internal Audit Division 2024;
   4. Appointment of Credit Rating Service Company for the Company's Soundness for 2023;
   5. Investment Plan:
      a. Drilling UPB 12 Well in Pangkah Working Area;
      b. Extension of Ketapang Working Area Cooperation Contract with Definitive Work Commitment of Hikmah and Perkasa Exploration Drilling;
      c. Drilling WP06 Well in West Pangkah Working Area;
      d. Upgrading Panaran Station to Strengthen the Reliability of Batam Network;
      e. Construction of Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline ("Cikamplung");
      f. Exploration Drilling of Ronggolawe-3 Well;
      g. Extension of Cooperation Contract of Muara Bakau Working Area with Defi-nite Work Commitment to Drill 1 (One) Exploration Well, 3D Seismic and G&G Study and Signing Bonus;
      h. Drilling JNE-07 Side-track Well in Muara Bakau Working Area;
      i. Drilling SID-05 Well in Pangkah Work-ing Area;
      j. Additional Investment Budget related to the Rokan Oil Pipeline Project;
      k. Drilling BTJTB-T8 (NZ2) Bukit Tua Well in Ketapang Working Area;
      l. Drilling UPA-17 Well in Pangkah Working Area;

m. Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA;
n. Pembangunan Pipa Distribusi Tegal-Cilacap untuk Penyaluran kepada RU IV Cilacap;
o. Pembangunan Infrastruktur Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping;
p. Pembangunan Jaringan Gas SOR III;
q. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG untuk Terminal LNG Jawa Timur (*Flat Bottom*).

6. Tindakan Direksi yang belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 terkait Rencana Kerja dan Anggaran:

   a. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Muara Bakau dengan *Signature Bonus* dan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran 1 (Satu) Sumur Eksplorasi (Konta), G&G *Study* dan Akuisisi & *Processing* 3D Seismik;
   b. Pengeboran WK Muara Bakau Sumur JNE-07 *Sidetrack*;
   c. Pengeboran WK Pangkah Sumur UPB-18;
   d. Revitalisasi Stasiun Gas PGN di Muara Karang;
   e. Pembangunan Jaringan Gas SOR III;
   f. *Restaging Compressor* C505J dan C306 SKG Cilamaya di Operation West Java Area;
   g. N2 Injection LNG Tank 1,3,5 PT Perta Arun Gas;
   h. Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendukung;
   i. Pengeboran WK Pangkah Sumur UPB-18.
7. Presentasi Kinerja PT PGN Tbk per 31 Desember 2023, TW I 2024, TW II 2024, dan TW III 2024;
8. Laporan Triwulanan Tahun 2024 PT PGN Tbk sesuai Per-2/MBU/03/2023;
9. RJPP 2024 – 2029 Suplemen 2034;
10. KPI Direksi Individual PT PGN Tbk Tahun 2024;
11. Pemberhentian dan Pengangkatan Chief Audit Executive;
12. Pemberhentian dan Pengangkatan Corporate Secretary Perusahaan;
13. Penyesuaian Struktur Organisasi Dasar (BOD-1);
14. KPI Direksi Individual Direktorat Komersial, Direktorat Keuangan dan Direktorat Manajemen Risiko Tahun 2024 Pasca RUPST 30 Mei 2024;
15. Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
16. KPI Direksi Individual Direktorat Strategi dan Pengembangan Bisnis, Direktorat Komersial dan Direktor Infrastruktur dan Teknologi Tahun 2024 Revisi Pasca Perubahan Struktur Organisasi;
17. Revisi RKAP 2024;
18. Tambahan *Top Risk* 2024; dan
19. RKAP Tahun 2025.

B. Penyampaian Penelaahan dan Nasihat/Saran/Tanggapan atas topik :
   1. Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group;
   2. Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Harga Saham;

m. Construction of PGN MIRRA Office Building;
n. Construction of Tegal-Cilacap Distribu-tion Pipeline for Distribution to RU IV Cilacap;
o. Construction of West Natuna Trans-portation System Pipeline Infrastruc-ture to Pemping Island;
p. Construction of SOR III Gas Network;
q. Construction of LNG Storage Facility for East Java LNG Terminal (Flat Bot-tom).

6. Board of Directors actions that have not been Determined in the 2024 ABOP re-lated to the Work Plan and Budget:
   a. Extension of Muara Bakau Working Area Cooperation Contract with Sig-nature Bonus and Definite Work Commitment Drilling 1 (One) Explora-tion Well (Konta), G&G Study and 3D Seismic Acquisition & Processing;
   b. Drilling JNE-07 Sidetrack Well in Muara Bakau Working Area;
   c. Drilling UPB-18 Well in Pangkah Working Area;
   d. Revitalization of PGN Gas Station in Muara Karang;
   e. Construction of SOR III Gas Network;
   f. Restaging Compressor C505J and C306 SKG Cilamaya in Operation West Java Area;
   g. N2 Injection for LNG Tank 1,3,5 PT Perta Arun Gas;
   h. Development of Infrastructure and Supporting Facilities;
   i. Drilling UPB-18 Well in Pangkah Working Area.
7. Presentation of PT PGN Tbk Performance as of December 31, 2023, Q1 2024, Q2 2024, and Q3 2024;
8. Quarterly Report 2024 of PT PGN Tbk in accordance with Per-2/MBU/03/2023;
9. RJPP 2024 - 2029 Supplement 2034;
10. KPIs of the Individual Directors of PT PGN Tbk in 2024;
11. Dismissal and Appointment of Chief Audit Executive;
12. Dismissal and Appointment of the Com-pany's Corporate Secretary;
13. Adjustment of Basic Organizational Struc-ture (BOD-1);
14. KPIs of Individual Directors of Commercial Directorate, Finance Directorate, and Risk Management Directorate for 2024 Post AGMS dated May 30, 2024;
15. Code of Conduct of PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
16. KPIs of Individual Directors of Strategy and Business Development Directorate, Commercial Directorate, and Infrastruc-ture and Technology Directorate for 2024 Revised Post Changes in Organizational Structure;
17. Revised 2024 ABOP;
18. Additional Top Risk 2024; and
19. ABOP Year 2025.

B. Submission of Review and Advice/Suggestion/Response on the following topics:
   1. Change in Management of Indirect Sub-sidiary/ Affiliated Company of Pertamina Group;
   2. Evaluation of Company Performance and Share Price;

3. Pengelolaan Anak Perusahaan;
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal;
5. Laporan Hasil Audit;
6. Kebijakan Perusahaan;
7. Usulan/Inisiatif dan Realisasi Investasi;
8. Kontrak Kerjasama;
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Struktur Organisasi; dan
11. GCG *Assessment.*

C. Penyampaian Usulan dan Rekomendasi Kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak atas topik:
1. Tindak Lanjut atas Aspirasi Perubahan Pengurus Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi Pertamina Group;
2. Rekomendasi Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PT PGN Tbk;
3. Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris serta Usulan Penilaian Kinerja Direksi PT PGN Tbk Tahun 2023;
4. Realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun PT PGN Tbk 2023, TW I 2024, TW II 2024, dan TW III 2024;
5. KPI Dewan Komisaris PT PGN Tbk Tahun 2024;

3. Subsidiary Management;
4. Risk Management and Internal Control;
5. Audit Report;
6. Company Policy;
7. Investment Proposal/Initiative and Realization;
8. Cooperation Contract;
9. Human Resources Development;
10. Organizational Structure; and
11. GCG Assessment.

C. Submission of Proposals and Recommendations to Majority Series B Shareholders on the following topics:
1. Follow-up on Aspirations for Changes in the Management of Indirect Subsidiar-ies/Affiliated Companies of Pertamina Group;
2. Recommendation on the Change in Man-agement of Subsidiaries of PT PGN Tbk;
3. Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners' Committee and the Proposed Performance Assessment of the Board of Directors of PT PGN Tbk in 2023;
4. Realization of KPIs of the Board of Com-missioners of PT PGN Tbk Year 2023, Q1 2024, Q2 2024, and Q3 2024;
5. KPI of the Board of Commissioners of PT PGN Tbk in 2024;

6. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023;
7. Usulan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Honorarium BOD BOC Tahun Buku 2024;
8. Usulan Penggunaan Laba (Dividen) PGN Tahun Buku 2023;
9. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) PT PGN Tbk (PGN) Tahun Buku 2024;
10. Tanggapan atas Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") Tahun 2024 terkait Penugasan Khusus kepada Perseroan; dan
11. Permohonan Izin dan Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dewan Komisaris.

6. Supervisory Report of the Board of Com-missioners for the 2023 Fiscal Year;
7. Proposed Tantiem for the 2023 Fiscal Year and Honorarium for BOD BOC for the 2024 Fiscal Year;
8. Proposed Use of PGN's Profit (Dividend) for the 2023 Fiscal Year;
9. Proposed Appointment of Public Account-ing Firm (KAP) of PT PGN Tbk (PGN) for the 2024 Fiscal Year;
10. Response to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Company") for the 2024 Fiscal Year related to Special Assignment to the Company; and
11. Request for Permission and Report on the Board of Commissioners' Overseas Official Travel.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Permen BUMN No PER-2/MBU/03/2023 Pasal 16 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak sebanyak 56 (lima puluh) kali termasuk Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, serta 1 (satu) kali RUPS Tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 Article 16 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Article 31 paragraphs (1) and (3) of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as the provisions of Article 16 of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners must hold meetings at least once every 2 (two) months and periodic joint meetings with the Board of Directors at least once every 4 (four) months. Throughout 2024, the Board of Commissioners held 56 (fifty) meetings, including Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, as well as 1 (one) Annual GMS, with details as follows:

PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2024
Period of January 1 - December 31, 2024

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
10 Januari 2024 January 10, 2024	1. Usulan Investasi UPB 12 2. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN 3. Rencana Diskusi Manajemen Risiko PGN Group 1. Proposed UPB 12 Investment 2. Proposed Changes in Management of PGN Subsidiaries 3. Plan for PGN Group Risk Management Discussion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
18 Januari 2024 January 18, 2024	1. Usulan Revisi Piagam Komite Audit 2. Usulan Revisi Piagam Komite NRGCG 3. Lain-lain 1. Proposed Revision of Audit Committee Charter 2. Proposed Revision of NRGCG Committee Charter 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
1 Februari 2024	1. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan SH Gas Laporan Management PT PGN Tbk Tahun 2023 *Unaudited* 2. Revisi Piagam Komite PMRPU 3. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Surat Direksi perihal Pre-FID Keikutsertaan Tender LNG Papua Utara 4. Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Surat Direksi perihal FID Perpanjangan WK Ketapang 5. *Update Progress* Audit Laporan Keuangan 2023 6. Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris 2023 7. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
February 1, 2024	1. Proposed Changes in the Management of SH Gas Subsidiary of the Unaudited 2023 Management Report of PT PGN Tbk 2. Revision of RMMBD Committee Charter 3. Board of Commissioners' Response to the Board of Directors' Letter regarding Pre-FID of North Papua LNG Tender Participation 4. Board of Commissioners' response to the Board of Directors' Letter regarding FID of Ketapang Working Area Extension 5. Update on Audit Progress of the 2023 Financial Statements 6. Realization of Board of Commissioners Work Plan 2023 7. Others							
5 Februari 2024	1. Usulan FID Perpanjangan WK Ketapang dengan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran Eksplorasi Hikmah dan Perkasa 2. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
February 5, 2024	1. Proposed FID of Ketapang Working Area Extension with Definite Work Commitment of Hikmah and Perkasa Exploration Drilling 2. Others							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
15 Februari 2024 February 15, 2024	1. Penilaian Kinerja Tahun 2023 bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite 2. Progres Audit Laporan Keuangan 2023 3. Revisi *Board Manual* 4. Bab Dewan Komisaris dan Komite Laporan Tahunan 2023 5. Rencana Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi 6. Lain-lain 1. Performance Appraisal Year 2023 for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees 2. Progress of Audit of the 2023 Financial Statements 3. Revised Board Manual 4. Board of Commissioners and Committee Chapters of the 2023 Annual Report 5. Plan for the Establishment of Integrated Governance Committee 6. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
29 Februari 2024 February 29, 2024	1. Penilaian Kinerja Tahun 2023 bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite 2. Diskusi tentang Proses Pengusulan Perubahan Pengurus AP PGN yang diinisasi oleh Holding. 3. Penjelasan tentang Hasil Evaluasi Fungsi Internal Audit 2023 4. Rencana Pembentukan Komite Tata kelola Terintegrasi 5. Lain-lain 1. Performance Appraisal Year 2023 for Board of Commissioners, Board of Directors, Committee 2. Discussion on the Process of Proposing Changes in PGN Subsidiary Management initiated by a Holding. 3. Explanation of the Evaluation Results of the Internal Audit Function in 2023 4. Plan for the Establishment of Integrated Governance Committee 5. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
1 Maret 2024 March 1, 2024	1. Pembahasan Hasil ABS Direksi 2. Masukan Komite atas KPI Kolegial Direksi 2023 dan KPI Direktorat 20232 3. Lain-lain 1. Discussion of ABS Results of the Board of Directors 2. Committee Input on Board of Directors Collegial KPI 2023 and Directorate KPI 2023 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
7 Maret 2024	1. Hasil Penilaian Kinerja Tahun 2023 Komite, Dewan Komisaris, Direksi, dan Diskusi Kalibrasi Penilaian Kinerja Direksi bersama Direktur Utama 2. Penelahaan ketentuan internal terkait proses usulan Pengurus AP oleh Pemegang Saham 3. Tanggapan terkait Laporan Tahunan 2023 *Unaudited.* 4. Tanggapan atas *Flow Chart* FID *Threshold* Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
March 7, 2024	1. Results of Performance Appraisal Year 2023 of Committees, Board of Commissioners, Board of Directors, and Discussion on Calibration of Directors' Performance Appraisal with President Director 2. Review of internal provisions related to the Subsidiary Management proposal process by Shareholders. 3. Response to the 2023 Unaudited Annual Report. 4. Response to the Flow Chart of FID Threshold of the Board of Commissioners							
14 Maret 2024	1. *Draft* Surat Dewan Komisaris Persetujuan FID West Pangkah 06 Saka 2. Melihat kembali Persetujuan Dewan Komisaris terkait Perpanjangan WK Ketapang Saka 3. Strategi dan Mekanisme Kerja Komite Audit 4. *Update* terkait Dispute Saka dengan PT Mahakarya Geo Survey (MGS) 5. *Update* terkait Penyiapan FID *Threshold* Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
March 14, 2024	1. Draft Letter from the Board of Commissioners for Approval of FID West Pangkah 06 Saka 2. Review of the Board of Commissioners' Approval of Ketapang Saka Working Area Extension 3. Audit Committee Strategy and Working Mechanism 4. Update on Saka's Dispute with PT Mahakarya Geo Survey (MGS) 5. Update on FID Threshold Preparation for the Board of Commissioners							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
28 Maret 2024 March 28, 2024	1. SK Dewan Komisaris PT PGN Tbk tentang Pembentukan, Pengangkatan Anggota-anggota dan Penetapan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PGN Tbk 2. Tanggapan Permohonan Persetujuan FID Insiatif Investasi Upgrading Stasiun Panaran Batam 3. Evaluasi Kajian Persiapan Jon Domain PGN Group 4. Lain-lain 1. Decree of the Board of Commissioners of PT PGN Tbk on the Establishment, Appointment of Members, and Determination of the Integrated Governance Committee Charter of PT PGN Tbk 2. Response to Application for FID Approval of Investment Initiative for Upgrading Panaran Station in Batam 3. Evaluation of Jon Domain PGN Group Preparation Study 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
4 April 2024 April 4, 2024	1. Penjelasan Kajian persiapan implementasi *single domain* pertamina.com di SH Gas 2. Penjelasan penyesuain struktur organisasi BOD-1 3. Penjelasan Program TJSL - Realisasi 2023 dan Rencana 2024 4. Realisasi Rencana Kerja dan KPI Dewan Komisaris TW I tahun 2024 5. Kalender Kegiatan Dewan Komisaris April 2024 1. Explanation of Study on the preparation of pertamina.com single domain implementation in SH Gas 2. Explanation of BOD-1 organizational structure adjustment 3. Explanation of the TJSL Program - 2023 Realization and 2024 Plan 4. Realization of Work Plan and KPI of Board of Commissioners in Q1 of 2024 5. Board of Commissioners Activity Calendar for April 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
2 Mei 2024	1. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan dan Draft Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PGN 2. Usulan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024 dan Draft Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Pertamina 3. Usulan Tantiem 2023 dan Remunerasi 2024 Direksi dan Dewan Komisaris dan Draft Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama Pertamina 4. Draft Surat Dewan Komisaris ke Direktur Utama PGN perihal tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penggabungan SOR IV kedalam SOR III dan perihal Tanggapan atas Laporan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) TJSL PGN 5. Draft Surat Dewan Komisaris kepada Dirut Pertamina perihal Laporan Realisasi KPI Dewan Komisaris TW I 2024 dan perihal Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 6. Rencana Jangka Panjang PGN Tahun 2024 - 2029 Suplemen 2034	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
May 2, 2024	1. Proposed Changes to the Management of Subsidiaries and Draft Letter from the Board of Commissioners to the President Director of PGN 2. Proposal of Public Accounting Firm for the 2024 Fiscal Year and Draft Letter from the Board of Commissioners to the President Director of Pertamina 3. Proposed 2023 Tantiem and 2024 Remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners and Draft Letter from Board of Commissioners to President Director of Pertamina 4. Draft Letter from the Board of Commissioners to PGN's President Director regarding response to Request for Approval of Merger of SOR IV into SOR III and regarding Response to PGN's CSR Micro and Small Business Funding Report (PUMK) 5. Draft Letter from the Board of Commissioners to the President Director of Pertamina regarding the KPI Realization Report of the Board of Commissioners for Q1 of 2024 and regarding the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year. 6. PGN Long-Term Plan 2024 - 2029 Supplement 2034							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
8 Mei 2024 May 8, 2024	1. Penetapan Pimpinan RUPST 2. Rencana Jangka Panjang PGN Tahun 2024-2028 Suplemen 2034 3. Lain-lain 1. Determination of AGMS Leadership 2. PGN Long-Term Plan 2024 - 2028 Supplement 2034 3. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
15 Mei 2024 May 15, 2024	1. Rencana Jangka Panjang PGN Tahun 2024 - 2029 Suplemen 2034 2. Usulan *Draft* KPI Direksi Individual PT PGN Tbk Tahun 2024 3. Lain-lain 1. PGN Long-Term Plan 2024 - 2029 Supplement 2034 2. Proposed KPI Draft for Individual Directors of PT PGN Tbk in 2024 3. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
27 Mei 2024 May 27, 2024	1. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Agenda RUPST PGN terkait Penugasan Khusus kepada Perseroan 2. Lain-lain 1. Board of Commissioners' Response to PGN's AGMS Agenda Proposal related to Special Assignment to the Company 2. Others	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
6 Juni 2024 June 6, 2024	1. Perkenalan Komisaris Independen Bapak Tony SB Hoesodo 2. Surat Tanggapan Dewan Komisaris ke Direksi : a. Usulan Pemberhentian CAE b. Evaluasi KAP atas Pelaksanaan Audit Konsolidasi 2023 3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris 4. Lain-lain 1. Introduction of Independent Commissioner, Mr. Tony SB Hoesodo 2. Response Letter from the Board of Commissioners to the Board of Directors: a. Proposed CAE Dismissal b. Evaluation of KAP on the Implementation of the 2023 Consolidated Audit 3. Division of the Board of Commissioners' Duties 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
20 Juni 2024 June 20, 2024	1. Tanggapan Usulan Pemberhentian *Corporate Secretary* PGN 2. Tanggapan Usulan *Corporate Secretary* PGN 3. Pendapat KPMRPU atas Penyampaian Tanggapan dan Dokumen Pendukung atas Persetujuan Inisiatif Investasi Kegiatan *Drilling* Ronggolawe 4. Usulan Pengangkatan Tenaga Ahli Dewan Komisaris 5. Lain-lain 1. Response to the Proposed Dismissal of PGN's Corporate Secretary 2. Response to the Proposed Corporate Secretary of PGN 3. The RMMBD Committee's Opinion on the Submission of Responses and Supporting Documents for the Approval of Investment Initiatives for Ronggolawe Drilling Activities 4. Proposed Appointment of Board of Commissioners Expert 5. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Juli 2024 July 8, 2024	1. Hasil Wawancara Dewan Komisaris dengan Kandidat *Corporate Secretary* 2. Lain-lain 1. Results of the Board of Commissioners Interview with Corporate Secretary Candidate 2. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 Juli 2024 July 15, 2024	1. Hasil Wawancara Dewan Komisaris dengan Kandidat *Corporate Secretary* 2. Lain-lain 1. Results of the Board of Commissioners Interview with Corporate Secretary Candidate 2. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 Juli 2024 July 23, 2024	1. Penelaahan Laporan Manajemen Juni 2024 2. Penelaahan *Executive Summary* Usulan Revisi *Board Manual* 3. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Dasar (BOD-1) 4. Lain-lain 1. Review of June 2024 Management Report 2. Review of Executive Summary of the Proposed Revision of the Board Manual 3. Response to Request for Approval of Proposed Adjustment of Basic Organizational Structure (BOD-1) 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
30 Juli 2024 July 30, 2024	1. Tanggapan atas Penaatan Kembali Usulan *Corporate Secretary* Perusahaan 2. Tanggapan atas Permohonan Arahan dan Persetujuan Draft KPI Direksi Individual Direktorat Komersial, Direktorat Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko Tahun 2024 Pasca RUPST PGN 30 Mei 2024 3. Lain-lain 1. Response to the Reorganization of the Company's Corporate Secretary Proposal 2. Response to Request for Direction and Approval of Draft KPI for Individual Directors of Commercial Directorate, Finance Directorate, and Risk Management Director for 2024 Post PGN AGMS dated May 30, 2024 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 & 12 Agustus 2024 August 11 & 12, 2024	Tanggapan atas Permohonan FID Investasi Perpanjangan WK Muara Bakau Response to Investment FID Request for Muara Bakau WK Extension	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 Agustus 2024 August 12, 2024	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Tindakan Yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 terkait Rencana Kerja dan Anggaran WK Muara Bakau Response to Request for Approval of Undetermined Actions in the 2024 ABOP related to the Muara Bakau WK Work Plan and Budget	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Tanggapan KPMRPU atas Perubahan Nilai Total Investasi Proyek Pipa Minyak Rokan 2. Usulan Persetujuan *Code of Conduct*, Benturan Kepentingan & Pengendalian Gratifikasi 3. *Update* Usulan RKA Muara Bakau 4. Lain-lain 1. The RMMBD Committee's response to the change in the total investment value of the Rokan Oil Pipeline Project; 2. Proposed Approval of Code of Conduct, Conflict of Interest & Gratification Control; 3. Update on Muara Bakau Work Plan and Budget Proposal; 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
30 Agustus 2024 August 30, 2024	Pembahasan Perubahan Nilai Total Investasi Proyek Pipa Minyak Rokan Discussion of Changes in the Total Investment Value of the Rokan Oil Pipeline Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 September 2024 September 5, 2024	1. Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan di Lingkungan Subholding Gas 2. Lain-lain 1. Proposed Changes in the Management of Subsidiaries within the Gas Sub-holding 2. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 September 2024 September 12, 2024	1. Sekilas *Cybersecurity* di PGN 2. Tanggapan Presentasi Kinerja Juni 2024 3. Tanggapan Usulan Revisi RKAP 2024 4. Lain-lain 1. About Cybersecurity in PGN 2. Response to the June 2024 Performance Presentation 3. Response to the 2024 ABOP Revision Proposal 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 September 2024 September 19, 2024	1. Tanggapan Usulan Revisi RKAP 2024 2. Tanggapan Usulan RKAP 2025 *Draft* 3 3. Lain-lain 1. Response to the 2024 ABOP Revision Proposal 2. Response to the 2025 ABOP Draft 3 Proposal 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30 September 2024 September 30, 2024	1. Pembahasan Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Remunerasi Tahun 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGN 2. Lain-lain 1. Discussion on the Determination of Annual Performance Awards in 2023 and Remuneration in 2024 for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PGN 2. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
9 Oktober 2024 October 9, 2024	1. Tanggapan Tindak Lanjut Penyesuaian Struktur Organisasi BOD -1 2. Tanggapan Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN 3. Tanggapan Usulan Revisi RKAP 2024 dan *Update* Proyek Rokan 4. Paparan *Review Annual Audit Plan* 2024 5. *Update* Usulan Revisi Pedoman COI dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi 6. Realisasi KPI Dewan Komisaris TW 3 2024 7. Lain-lain 1. Response to Follow-up on Adjustment of BOD Organizational Structure -1 2. Response to the Proposed Changes in the Management of PGN Subsidiaries 3. Response to the Proposed 2024 ABOP Revision and Rokan Project Update 4. Exposure of Annual Audit Plan 2024 Review 5. Update on the Proposed Revision of Guidelines for COI and Gratification Control 6. Realization of KPIs of the Board of Commissioners for Quarter 3 of 2024 7. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24 Oktober 2024 October 24, 2024	1. Tanggapan Tindak Lanjut Penyesuaian Struktur Organisasi BOD -1 2. Tanggapan Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN 3. Tanggapan Usulan Revisi RKAP 2024 dan *Update* Proyek Rokan 4. Paparan *Review Annual Audit Plan* 2024 5. *Update* Usulan Revisi Pedoman COI dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi 6. Realisasi KPI Dewan Komisaris TW 3 2024 7. Lain-lain 1. Response to Follow-up on Adjustment of BOD Organizational Structure -1 2. Response to the Proposed Changes in the Management of PGN Subsidiaries 3. Response to the Proposed 2024 ABOP Revision and Rokan Project Update 4. Exposure of Annual Audit Plan 2024 Review 5. Update on the Proposed Revision of Guidelines for COI and Gratification Control 6. Realization of KPIs of the Board of Commissioners for Quarter 3 of 2024 7. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
31 Oktober 2024	1. Tanggapan Permohonan Persetujuan FID dan Tindakan Yang Belum Ditetapkan RKAP 2024 Pengeboran Sumur UPB – 18 WK Pangkah PT Saka Energi Indonesia; 2. Tanggapan Laporan dan Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut atas Inisiatif *Unlock Value* PT Saka Energi Indonesia. 3. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
October 31, 2024	1. Response to the Request for FID Approval and Undetermined Action of ABOP 2024 Drilling UPB - 18 WK Pangkah Well of PT Saka Energi Indonesia 2. Response to the Report and Request for Approval of Follow-up on Unlock Value Initiative of PT Saka Energi Indonesia 3. Others							
7 November 2024	1. Tanggapan Permohonan Persetujuan Investasi dan Tindakan yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 atas Usulan Investasi Infrastruktur Gas Pipa *Customer Attachment* Rumah Tangga Gas Kita PGN Sayang Ibu (Jargas SOR III) 2. Tanggapan Permohonan Persetujuan Tindakan yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 Rencana Kerja dan Anggaran Revitalisasi Stasiun Gas PGN di Muara Karang 3. Tanggapan Permohonan Persetujuan Revisi RAT *Top Risk* 2024 terkait Gunvor 4. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
November 7, 2024	1. Response to the Request for Investment Approval and Undetermined Actions in the 2024 ABOP for the Proposed Investment in Gas Pipeline Infrastructure for Gaskita PGN Sayang Ibu Household Customer Attachment (Jargas SOR III) 2. Response to the Request for Approval of Undetermined Actions in the 2024 ABOP for Revitalization of PGN Gas Station in Muara Karang 3. Response to the Request for Approval of the Revision of RAT Top Risk 2024 related to Gunvor 4. Others							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
18 November 2024	1. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Tindakan Yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 Rencana Kerja dan Anggaran Restaging Compressor C505J dan C306 PT Pertamina Gas SKG Cilamaya di *Operation West Java Area* 2. *Update* terkait *Booster Pump* Pipa Minyak Rokan 3. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
November 8, 2024	1. Response to the Request for Approval of Undetermined Actions in the 2024 ABOP for Restaging Compressor C505J and C306 of PT Pertamina Gas SKG Cilamaya in West Java Operation Area 2. Update on Rokan Oil Pipeline Booster Pump 3. Others							
25 November 2024	1. *Review* Laporan Manajemen Periode Oktober 2024 2. Persetujuan KPI Dewan Komisaris, Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris Tahun 2025 3. Tanggapan Permohonan Persetujuan Tindakan Yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 terkait Rencana Kerja dan Anggaran N2 Injection LNG Tank 1,3,5 PT Perta Arun Gas 4. *Review* Usulan Revisi RKAP 2024 5. *Review* Usulan RKAP 2025 6. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
November 25, 2024	1. Review of Management Report for October 2024 2. Approval of the KPIs of the Board of Commissioners, the Work Plan of the Board of Commissioners and the Work Plan of the Board of Commissioners Committee for 2025 3. Response to Request for Approval of Undetermined Actions in the 2024 RKAP related to the Work Plan and Budget of N2 Injection LNG Tank 1,3,5 PT Perta Arun Gas 4. Review of the Proposed Revision of the 2024 RKAP 5. Review of the Proposed 2025 RKAP 6. Others							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
28 November 2024 November 28, 2024	1. *Review* Laporan Manajemen Periode Oktober 2024 2. *Review* Usulan Revisi RKAP 2024 3. *Review* Usulan RKAP 2025 Persetujuan KPI Dewan Komisaris, Rencana Kerja Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris Tahun 2025 4. Lain-lain 1. Review of Management Report for October 2024 2. Review of Proposed Revision of ABOP 2024 3. Review of Proposed ABOP 2025 Approval of KPIs of the Board of Commissioners, Board of Commissioners Work Plan and Board of Commissioners' Committee Work Plan 2025 4. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 Desember 2024 December 3, 2024	1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Review Usulan Perubahan Pengurus Anak Perusahaan PGN 3. Lain-lain 1. Risk Management Policy 2. Review of the Proposed Changes in the Management of PGN Subsidiaries 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 Desember 2024 December 6, 2024	1. Tanggapan atas Permohonan Usulan Tindakan Yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 atas Usulan Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga Gaskita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR III Tahun 2024 2. *Review* Usulan Revisi RKAP 2024 3. Lain-lain 1. Response to the Request for Proposed Undetermined Actions in the 2024 ABOP for the Proposed Investment in the Installation of Gas Pipeline Infrastructure for Gaskita PGN Sayang Ibu Household Customer Attachment ("PSI") SOR III Year 2024 2. Review of the Proposed 2024 ABOP Revision 3. Others	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
12 Desember 2024	1. Paparan *Review* Laporan Hasil Pengawasan Internal Audit TW II dan Tanggapan Laporan Kegiatan Fungsi Internal Audit TW III 2024 2. Paparan *Review* Laporan Pengelolaan Pengaduan SH Gas TW III 2024 dari PT Pertamina (Persero) 3. Update RKAP 2025 4. Lain-lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
December 12, 2024	1. Exposure to the Review of Internal Audit Monitoring Report for Q2 and Response to the Internal Audit Function Activity Report for Q3 of 2024 2. Exposure to the Review of SH Gas Complaint Management Report for Q3 of 2024 from PT Pertamina (Persero) 3. 2025 ABOP Update 4. Others							

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Amien Sunaryadi	Luky Alfirman	Warih Sadono	Christian H. Siboro	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
27 & 29 Desember 2024	1. Tanggapan terkait Permohonan Persetujuan Investasi (FID) atas Usulan Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA 2. Tanggapan terkait Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Pembangunan Infrastruktur Pipa West Natuna *Transportation System* ke Pulau Pemping 3. Tanggapan terkait Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Pembangunan Pipa Distribusi Tegal-Cilacap untuk Penyaluran kepada RU IV Cilacap 4. Tanggapan terkait Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG untuk Terminal LNG Jawa Timur (Flat Bottom) 5. Tanggapan terkait Penyampaian Dokumen Pelengkap untuk Usulan Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga Gas Kita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR III 6. Tanggapan terkait Usulan RAT *Top Risk* 2025 7. *Update* Usulan RKAP 2025 8. Lain-lain.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
December 27 & 29, 2024	1. Response to the Investment Approval Request (FID) for the Proposed Construction of PGN MIRRA Office Building 2. Response to the Request for Investment Approval (FID) for the Construction of West Natuna Transportation System Pipeline Infrastructure to Pemping Island 3. Response to the Request for Investment Approval (FID) for the Construction of the Tegal-Cilacap Distribution Pipeline for Distribution to RU IV Cilacap 4. Response to the Request for Investment Approval (FID) for the Construction of LNG Storage Facilities for East Java LNG Terminal (Flat Bottom) 5. Response to the Submission of Supplementary Documents for the Investment Proposal to Install Gas Pipeline Infrastructure for Gas Kita PGN Sayang Ibu Household Customer Attachment ("PSI") SOR III 6. Response related to the Proposed RAT Top Risk 2025 7. Update on the Proposed 2025 ABOP 8. Others							
Persentase Kehadiran Masing-masing Anggota **Attendance Percentage of Each Member**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda Agenda
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. Capaian Tahun 2023 2. *Learnings* dari Tahun 2023 Untuk Lebih Baik di Tahun 2024 3. Lain-lain 1. Achievement in 2023 2. Learnings from 2023 To Be Better in 2024 3. Others
2.	23 Februari 2024 February 23, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. Laporan Manajemen Januari 2023 khusus bagian a. Pengelolaan SDM b. Pengelolaan ICT 2. *Update* Kontrak LNG Gunvor 3. *Update Progress* Audit Laporan Keuangan 2023 1. January 2023 Management Report specific section a. HR Management; b. ICT Management; 2. Update on the LNG Gunvor Contract 3. Update on Progress of Audit of the 2023 Financial Statements
3.	22 Maret 2024 March 22, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. Melihat kembali ABI terkait perpanjangan WK Ketapang 2. Capaian operasional dan keuangan Februari 2024 dan *Top Risk* 2024 3. *Update* jadwal RUPST 2024 4. Penjelasan proses bisnis baru 1. Revisit the ABI regarding the Ketapang Working Area extension. 2. February 2024 operational and financial achievements and Top Risk 2024 3. Update on 2024 AGMS schedule 4. Explanation of new business process
4.	26 April 2024 April 26, 2024	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. Paparan Analisa Risiko Dampak Krisis Timur Tengah (Serangan Iran ke Israel) Terhadap Subholding Gas 2. Laporan Manajemen TW I Tahun 2024 3. RJPP Perusahaan 2024-2029 Suplemen 2034 1. Presentation of Risk Analysis of the Impact of the Middle East Crisis (Iran's Strikes on Israel) on the Gas Subholding 2. Management Report for the 1st Quarter of 2024 3. Company RJPP 2024-2029 Supplement 2034
5.	21 Mei 2024 May 21, 2024	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. RJPP 2024-2029 Suplemen 2034 2. *Update* Persiapan RUPST Tahun Buku 2023 3. Lain-lain 1. RJPP 2024-2029 Supplement 2034 2. Update on Preparation of the 2023 Fiscal Year AGMS 3. Others
6.	28 Mei 2024 May 28, 2024	• Amien Sunaryadi • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Beni S. Hidayat • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini	1. Usulan Keputusan RUPST 2024 2. Laporan Manajemen April 2024 3. Lain-lain 1. Proposal of the 2024 AGMS Resolutions; 2. April 2024 Management Report; 3. Others
7.	1 Juli 2024 July 1, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Penjelasan Usulan *Corporate Secretary* PGN 2. Progres dan Capaian Tugas Divisi Engineering and Technology, Divisi Project Management Office dan Divisi City Gas Project sampai dengan akhir Juni 2024 3. Laporan Manajemen Periode Mei Tahun 2024 4. *Update* kasus-kasus masa lalu 5. Lain-lain 1. Explanation of PGN Corporate Secretary Proposal 2. Progress and Achievements of Tasks of the Engineering and Technology Division, Project Management Office Division, and City Gas Project Division until the end of June 2024 3. Management Report for the period of May 2024 4. Update on past cases 5. Others

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda Agenda
8.	25 Juli 2024 July 25, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen TW 2 Tahun 202 2. Antisipasi Regulasi Baru terkait HGBT 3. Diskusi : Cara PGN menjadi Raksasa Gas – RUPG – Bisnis LNG 4. Lain-lain 1. Management Report for Q2 of 2024 2. Anticipation of New HGBT-related Regulations 3. Discussion: How PGN became a Powerhouse of Gas - RUPG - LNG Business 4. Others
9.	8 Agustus 2024 August 8, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	Klasterisasi Bisnis PGN Group Clustering PGN Group's Business
10.	22 Agustus 2024 August 22, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. *Update* Reviu Laporan Keuangan PGN Periode 30 Juni 2024 2. Laporan Manajemen Periode Juli 2024 3. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. Update on the Review of PGN's Financial Statements for June 30, 2024 2. July 2024 Management Report 3. Other important matters that need to be reported to the Board of Commissioners
11.	29 Agustus 2024 August 29, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Peningkatan Kinerja Operasional Jargas: a. Perbaikan Struktur Organisasi, Proses Bisnis dan Kompetensi Personel b. Perbaikan Program Pemasaran dan Penjualan c. Progres Pembangunan Jargas per akhir Juli 2024 2. Hal-hal penting lain yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. Improvement of Jargas Operational Performance: a. Improvement of Organizational Structure, Business Process and Employee Competence; b. Improvement of Marketing and Sales Program; c. Jargas Development Progress as of the end of July 2024. 2. Other important matters that need to be reported to the Board of Commissioners
12.	24 September 2024 September 24, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Bulan Agustus 2024 2. Usulan Revisi RKAP 2024 3. Lain-lain 1. August 2024 Management Report 2. Proposal for the 2024 ABOP Revision 3. Others
13.	17 Oktober 2024 October 17, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Usulan - 4 RKAP 2025 2. *Update* Kontrak Kerjasama Gunvor 3. Lain-lain 1. Proposal - Four ABOP for 2025 2. Update on the Gunvor Cooperation Contract 3. Others
14.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode September 2024 2. Rencana Pengembangan Bisnis LNG PGN Group al. *Scope of businesses, Units in Charge, People*, Pasokan 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. September 2024 Management Report 2. PGN Group LNG Business Development Plan a. Scope of businesses, Units in Charge, People, Supply 3. Other matters that need to be reported to the Board of Commissioners
15.	29 November 2024 November 29, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode Oktober 2024 2. *Update Unlock* Value PT Saka Energi Indonesia 3. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. October 2024 Management Report 2. Update on Unlock Value of PT Saka Energi Indonesia 3. Other matters that need to be reported to the Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Komisaris yang Hadir Commissioners Present	Direktur yang Hadir Directors Present	Agenda Agenda
16.	18 Desember 2024 December 18, 2024	• Amien Sunaryadi • Luky Alfirman • Warih Sadono • Christian H. Siboro • Dini Shanti Purwono • Abdullah Aufa Fuad • Tony S.B Hoesodo	• Arief S. Handoko • Fadjar H. Widodo • Harry Budi Sidharta • Rosa Permata Sari • Ratih Esti Prihatini • Rachmat Hutama • Arief Kurnia Risdianto	1. Laporan Manajemen Periode November 2024 2. Usulan RKAP 2025 3. Kalender Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2025 4. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris 1. November 2024 Management Report 2. Proposed ABOP 2025 3. Board of Commissioners Activity Calendar for 2025 4. Other matters that need to be reported to the Board of Commissioners
Persentase Kehadiran **Attendance Percentage**		**100%**	**100%**	

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-9/MBU/09/2021 perihal Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara bahwa Laporan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dilaporkan triwulanan kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina No. A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) tersebut, KPI Dewan Komisaris terdiri dari aspek perencanaan, aspek pengawasan dan nasihat, aspek pelaporan dan aspek dinamis, dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan pengurusan jalannya Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Adapun proses penilaian kinerja Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Pada akhir 2024, PT Pertamina melalui Surat Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan KPI Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan *self-assessment* realisasi KPI Dewan Komisaris dan hasil *Akhlak Behaviour Survey* (ABS) 360°;

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Circular Letter of the Minister of SOEs No. SE-9/MBU/09/2021 regarding Performance Evaluation of Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises that the Key Performance Indicator (KPI) Achievement Report is reported quarterly to the Minister of SOEs as the Series A Dwiwarna Shareholder. At the end of 2022, PT Pertamina (Persero), as the largest Series B Shareholder who received special authorization from the Series A Dwiwarna Shareholders, established the Guidelines for Performance Evaluation of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committee of the Board of Commissioners in Pertamina Sub-holding and Subsidiaries No. A05-002/K20000/2022-S9 based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

In line with the guidelines set by PT Pertamina (Persero), the KPIs of the Board of Commissioners consist of the planning aspect, the supervisory and advisory aspect, the reporting aspect and the dynamic aspect, in carrying out supervisory functions of the Company's management policies and advising the Board of Directors for the Company's interests and objectives. The assessment of the Board of Commissioners' performance for 2024 is carried out by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

At the end of 2024, PT Pertamina, through Letter Number 113/K00000/2024-S8 concerning Policy on Implementation of Annual Performance Assessment of Individual Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Supporting Committee of the Board of Commissioners in Sub-holding and Subsidiary of Pertamina in 2024, stated that the above guidelines are still valid.

Procedures for the Implementation of Performance Assessment of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners prepares and submits the KPIs of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder Receiving Special Power of Attorney from Series A Dwiwarna Shareholders;
2. The Board of Commissioners conducts performance assessment based on self-assessment of the realization of the KPIs of the Board of Commissioners and the results of the 360° Akhlak Behaviour Survey (ABS);

3. Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Realisasi KPI Dewan Komisaris:
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behavior Survey* (ABS) 360° yang dilakukan oleh sesama Anggota Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self-assessment* melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, kemudian dilaporkan kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI PERSEROAN

Penetapan KPI Direksi diantaranya mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri No PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara mengatur perihal Kontrak Manajemen Tahunan dan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*). KPI Direksi terdiri dari KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual.

KPI Direksi Kolegial disetujui dan ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Kementerian BUMN cq. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), terdiri atas:

- KPI Bersama (bobot 40%), merupakan KPI yang disepakati menjadi tanggung jawab seluruh Subholding di bawah PT Pertamina (Persero) sebagai Holding.
- KPI Subholding (bobot 60%), merupakan KPI Perseroan sebagai Subholding Gas.

Adapun KPI Direksi Individual disusun menggunakan kerangka sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan

3. The Board of Commissioners reports the results of the performance assessment of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder who Receives Special Proxy from the Series A Dwiwarna Shareholders.

Criteria for the Board of Commissioners' Performance Assessment

1. Realization of the Board of Commissioners' KPI;
2. Implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Commissioners as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the 360° AKHLAK Behavior Survey (ABS) conducted by fellow members of the Board of Commissioners.

Party Conducting the Board of Commissioners' Performance Assessment

The assessment of the BOC' performance is carried out by the Board of Commissioners through self-assessment through the Nomination, Remuneration, and GCG Committee and is reported to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

The determination of the KPIs of the Board of Directors, among others, refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Ministerial Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises regulating the Annual Management Contract and Key Performance Indicators. The KPIs of the Board of Directors consist of Collegial and Individual KPIs.

Collegial Board of Directors' KPIs are approved and signed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Ministry of SOEs cq. President Director of PT Pertamina (Persero), consisting of:

- Joint KPI (40% weight), a KPI agreed to be the responsibility of all Subholding under PT Pertamina (Persero) as Holding.
- Subholding KPI (60% weight), which is the Company's KPI as Gas Subholding.

The Individual Board of Directors' KPI is prepared using the framework as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and approved by the Board of Commissioners.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholders, established Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of

Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina No. A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

Pada akhir 2024, PT Pertamina melalui Surat Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

Proses penilaian Direksi tahun 2024 dilakukan oleh Dewan Komisaris bersama Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Aspek Penilaian Kinerja Direksi dan Perseroan

1. Direksi menyusun dan menyampaikan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual kepada Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Direksi berdasarkan realisasi KPI Direksi Kolegial dan KPI Direksi Individual hasil *Akhlak Behaviour Survey* (ABS) 360°;
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penilaian kinerja Direksi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi Perseroan

1. Realisasi KPI Kolegial Direksi dan KPI Individual Direksi;
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Direksi sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behavior Survey* (ABS).

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian diselenggarakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya mengusulkan hasil penilaian kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yaitu Komite Audit,

Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners in Pertamina's Sub-holdings and Subsidiaries based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

At the end of 2024, PT Pertamina, through Letter Number 113/K00000/2024-S8 on the Policy for the Implementation of Annual Performance Assessment of Individual Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Supporting Committee of the Board of Commissioners in Sub-holding and Subsidiary of Pertamina in 2024, stated that the above guidelines are still valid.

The assessment process of the Board of Directors in 2024 was carried out by the Board of Commissioners, together with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

Aspects of the Performance Assessment of the Board of Directors and the Company

1. The Board of Directors prepares and submits the realization of the Board of Directors' KPI Individually and Collegially to the Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the realization of the Board of Directors' Collegial KPI and the Board of Directors' Individual KPI as a result of the 360° Moral Behavior Survey (ABS);
3. The Board of Commissioners submits the proposal for the performance assessment of the Board of Directors to PT Pertamina (Persero) as Majority of Series B Shareholder that Receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

Criteria for the Board of Directors' Performance Assessment

1. Realization of the Board of Directors' Collegial KPI and Board of Directors' Individual KPI;
2. Implementation of AKHLAK cultural values by the Board of Directors as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the AKHLAK Behavior Survey (ABS).

Party Conducting the Board of Directors' Performance Assessment

The assessment is carried out by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee to be submitted to the Board of Commissioners and then proposes the assessment results to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the Majority Series B Shareholder that Receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholders.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities in supervising and providing advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by Committees, namely the

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Audit Committee, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, the Risk Management Monitoring and Business Development Committee, as well as the Integrated Governance Committee.

Pada akhir tahun 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina No. A05-002/K20000/2022-S9 berdasarkan Surat Nomor 193/K20000/2022-S8 tanggal 22 Desember 2022.

At the end of 2022, PT Pertamina (Persero) as the Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder, established Guidelines for Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supporting Committees of the Board of Commissioners in Pertamina's Sub-holdings and Subsidiaries based on Letter No. 193/K20000/2022-S8 dated December 22, 2022.

Pada akhir 2024, PT Pertamina melalui Surat Nomor 113/K00000/2024-S8 tentang Kebijakan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahunan Individu Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan AP Pertamina Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pedoman di atas masih berlaku.

At the end of 2024, PT Pertamina, through Letter Number 113/K00000/2024-S8 on Policy for the Implementation of Annual Performance Assessment of Individual Directors, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Board of Commissioners Supporting Committee in Sub-holding and Subsidiary of Pertamina in 2024, stated that the above guidelines are still valid.

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. Komite Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris yang merupakan penjabaran dari fungsi Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris berdasarkan *self assessment* realisasi Rencana Kerja Tahunan termasuk Tugas Khusus dan hasil *Akhlak Behaviour Survey (ABS) 360°;*
3. Dewan Komisaris melaporkan hasil penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang Menerima Kuasa Khusus dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Procedures for Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

1. Committees of the Board of Commissioners prepares and submits an Annual Work Plan to the Board of Commissioners which is an elaboration of the functions of the Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners evaluates the performance of Committees of the Board of Commissioners based on the self-assessment of the realization of the Annual Work Plan, including Special Assignments and the results of the 360° AKHLAK Behavior Survey (ABS);
3. The Board of Commissioners reports the results of the performance assessment of Committees of the Board of Commissioners to PT Pertamina (Persero) as the Majority of Series B Shareholder that receives Special Proxy from Series A Dwiwarna Shareholder.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

1. Realisasi Rencana Kerja dan Tugas Khusus Komite Dewan Komisaris.
2. Implementasi nilai-nilai budaya AKHLAK oleh Komite Dewan Komisaris sebagai *core values* yang diterapkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan hasil *Akhlak Behaviour Survey* (ABS).

Criteria for Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

1. Realization of the Work Plan and Special Assignment of Committees of the Board of Commissioners.
2. Implementation of AKHLAK cultural values by Committees of the Board of Commissioners as core values applied by the Ministry of SOEs based on the results of the AKHLAK Behavior Survey (ABS).

Hasil Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Hasil penilaian atas kinerja Komite Dewan Komisaris menyatakan bawah komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu pengawasan Dewan Komisaris.

Results of the Performance Assessment of Committees of the Board of Commissioners

The results of the performance assessment of Committees of the Board of Commissioners indicate that the committees have properly carried out their duties and responsibilities in assisting the supervision of the Board of Commissioners.

KOMISARIS INDEPENDEN

Independent Commissioners

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada bagian ketiga, pasal 15 ayat (4).

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

a. Bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir;
b. Tidak mempunyai saham pada Perseroan;
c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
d. Tidak mempunyai hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Pada periode 1 Januari - 30 Mei 2024 tahun 2024, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang dengan 4 (empat) anggota Komisaris Independen. Pada periode 31 Mei - 31 Desember 2024, anggota Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang dengan 5 (lima) anggota Komisaris Independen.

Jumlah Komisaris Independen ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menyebutkan setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

CRITERIA FOR THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders, or relationships with the relevant SOEs that may affect their ability to act independently. It is in line with that mentioned in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises in the third section, article 15 paragraph (4).

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who comes from outside the Company and meets the requirements of an Independent Commissioner according to Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:

a. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last six months;
b. Has no shares in the Company;
c. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company; and
d. Has no business relationship related to the Company's business activities.

COMPOSITION AND MEMBERSHIP OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In the period of January 1 - May 30, 2024, the Company's Board of Commissioners consisted of 6 (six) members with 4 (four) Independent Commissioners. On May 31 - December 31, 2024, there were 7 (seven) members of the Board of Commissioners with 5 (five) Independent Commissioners.

This number of Independent Commissioners complied with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which states that every public company must have an Independent Commissioner of at least 30% of the total number of members of the Board of Commissioners.

Jumlah Komisaris Independen PGN juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan bahwa dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

The number of PGN's Independent Commissioners also complied with the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which states that in the composition of the Board of Commissioners, at least 20% (twenty percent) are members of the Independent Board of Commissioners as stipulated in the decision on their appointment.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh Komisaris Independen telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

All Independent Commissioners have met the criterias in accordance with the applicable laws and regulations.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Independence Statement of Independent Commissioners

No.	Uraian Description	Amien Sunaryadi	Dini Shanti Purwono	Christian H. Siboro	Abdullah Aufa Fuad	Tony Setia Boedi Hoesodo
Pernyataan Independensi | Independence Statement						
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Corporation's activities for the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliations with the Company or the principal/ controlling shareholder or one of the members of Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect work/ professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
Pernyataan Kepatuhan | Compliance Statement						
1.	Memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai Piagam Dewan Komisaris dan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Meet the requirements to become a member of the Board of Commissioners in accordance with Charter of the Board of Commissioners and provisions in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.	✓	✓	✓	✓	✓

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ tata kelola yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Direksi melakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas pokoknya. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Perseroan, apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial. Masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil putusan sesuai pembagian tugas dan wewenang masing-masing Direktur. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

The Board of Directors is a governance organ that has the authority and responsibility for the management of the Company for the Company's interests, in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as representing the Company inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS.

The Board of Directors shall act in good faith and with full responsibility in every implementation of its main duties. Each member of the Board of Directors is fully responsible personally and collectively for the Company's losses if he/she is guilty or neglects to carry out his/her duties in accordance with the provisions of the laws and regulations.

The Board of Directors is tasked and responsible collegially. Each Director may act and make decisions in accordance with the division of duties and authority of each Director. However, the implementation of duties by each Director remains a shared responsibility. The position of members of the Board of Directors, including the President Director, is equal. The President Director's duty as primus inter pares is to coordinate the Board of Directors' activities.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang Direksi dapat diatur oleh RUPS, namun dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi melakukan penetapan sendiri atas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi secara lebih rinci melalui Keputusan Direksi No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 tanggal 24 Desember 2024.

Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan sebagai berikut:

SCOPE OF WORKS AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The division of duties and authorities of the Board of Directors can be regulated by the GMS, but if the GMS does not stipulate it, then the division of duties and authorities of members of the Board of Directors is determined based on the Board of Directors' decision. The Board of Directors determined the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in more detail through Board of Directors Decree No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 dated December 24, 2024.

Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described as follows:

LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Scope of Works and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
1.	Direktur Utama President Director	1. Pengelolaan relasi dan komunikasi dengan investor, pengelolaan strategi komunikasi korporat, pengelolaan relasi *stakeholder*, layanan dukungan BOD BOC, serta kegiatan CSR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyusunan kontrak, penanganan kasus litigasi dan non liligasi di lingkungan Perusahaan, serta memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG); 3. Pengelolaan kegiatan audit Perusahaan berikut tindak lanjutnya. serta memberikan konsultasi fungsi pengawasan dan pendampingan audit eksternal; 4. Pengelolaan penyusunan dan implementasi kebijakan, pedoman, dan program HSSE, berikut monitoringnya; 5. Pengelolaan kegiatan advokasi regulasi serta isu kritikal Perusahaan kepada *stakeholder* strategis.	1. Management of relations and communication with investors, management of corporate communication strategies, management of stakeholder relations, BOD BOC support services, and CSR activities in accordance with applicable laws and regulations; 2. Fulfillment of compliance with laws and regulations, contract preparation, handling of litigation and non-litigation cases within the Company, and ensuring the implementation of good corporate governance (GCG); 3. Management of the Company's audit activities and their follow-up, as well as providing consultation on the supervisory function and external audit assistance; 4. Management of the preparation and implementation of HSSE policies, guidelines, and programs, along with their monitoring; 5. Management of regulatory advocacy activities and critical issues of the Company to strategic stakeholders.
2.	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	1. Pengelolaan pengembangan bisnis baru dan portofolio hilir pemanfaatan gas bumi; pengelolaan dan pengembangan inkubasi bisnis; optimalisasi perencanaan infrastruktur *midstream* SH Gas, termasuk infrastruktur antar Wilayah Jaringan Distribusi serta Wilayah Niaga Tertentu (WJD/WNT); pengelolaan Rencana Umum Penyediaan Gas (RUPG) Subholding Gas, serta optimalisasi rantai pasokan untuk perencanaan sistem infrastruktur terintegrasi Subholding Gas; 2. Pengelolaan perencanaan dan *roadmap* strategis Perusahaan, pengelolaan Transformasi dan proses bisnis Perusahaan; pengelolaan program strategis Perusahaan; pengelolaan program *sustainability* Perusahaan (ESG); 3. Pengelolaan KPI Korporat & Direktorat; monitoring dan evaluasi kinerja investasi untuk Subholding Gas Group (secara fisik dan keuangan); Penyusunan kebijakan maturitas investasi, serta koordinator investasi & *office* proses persetujuan investasi; 4. Pengelolaan kegiatan portofolio Perusahaan, *strategic partnership*, mengoordinasikan proses kemitraan (termasuk M&A) Subholding Gas, menyusun pengikatan kemitraan untuk bisnis yang diinisiasi oleh Business Development.	1. Management of new business development and downstream portfolio of natural gas utilization; management and development of business incubation; optimization of SH Gas midstream infrastructure planning, including infrastructure between Distribution Network Areas and Specified Commercial Areas (WJD/WNT); management of the Gas Supply General Plan (RUPG) of Gas Sub-holding, as well as supply chain optimization for integrated infrastructure system planning of Gas Sub-holding; 2. Management of the Company's strategic planning and roadmap, management of the Company's Transformation and business processes; management of the Company's strategic programs; management of the Company's sustainability programs (ESG); 3. Management of Corporate & Directorate KPIs; monitoring and evaluation of investment performance for Gas Sub-holding Group (physically and financially); Preparation of investment maturity policy, as well as investment coordinator & investment approval process office; 4. Management of the Company's portfolio activities, strategic partnerships, coordinating the partnership process (including M&A) of Gas Sub-holding, drafting partnership agreements for businesses initiated by the Business Development.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
3.	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	1. Pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan *Engineering* dan *Technology*, serta standar dan prosedur pelaksanaan proyek infrastruktur; 2. Pengelolaan eksekusi proyek pengembangan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan non pipa), melakukan monitoring *progress* fisik atas kegiatan investasi Subholding Gas, serta melakukan *gap analysis* kinerja investasi dan *recovery plan*-nya; 3. Pengelolaan percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas rumah tangga (Jargas RT), *dashboarding* konstruksi proyek jargas RT; serta strategi optimasi aset Jargas RT; 4. Pengelolaan sasaran kinerja, standar, kebijakan kegiatan manajemen aset jaringan gas bumi (pipa dan non pipa), dan kegiatan *operation and maintenance* serta integritas infrastruktur gas bumi (pipa dan non pipa) sesuai *process safety and asset integrity management system*.	1. Management of policies and implementation of Engineering and Technology activities, as well as standards and procedures for infrastructure project implementation; 2. Management of the execution of pipeline and non-pipeline natural gas infrastructure development projects, monitoring the physical progress of Gas Sub-holding investment activities, as well as conducting gap analysis of investment performance and its recovery plan; 3. Management of the acceleration of household gas network infrastructure development (Jargas RT), dashboarding the construction of Jargas RT projects; and Jargas RT asset optimization strategies; 4. Management of performance targets, standards, policies for natural gas network asset management activities (pipeline and non-pipeline), operation and maintenance as well as natural gas infrastructure integrity (pipeline and non-pipeline) according to the process safety and asset integrity management system.
4.	Direktur Komersial Director of Commerce	1. Pengelolaan pasokan gas bumi (pipa dan non pipa), serta kegiatan Trading LNG PGN, termasuk kegiatan transportasi LNG; 2. Penguatan integrasi dalam kegiatan optimasi penyaluran gas ke pelanggan, serta pengelolaan keseimbangan pasok dan permintaan pelanggan; 3. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan program kegiatan niaga (*marketing, sales*, dan *customer management*); melakukan *market research* dan *canvasing* di wilayah baru; agregasi pengelolaan bisnis niaga gas bumi di Subholding Gas Group; melakukan penyusunan roadmap pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (Jargas) dan mengoordinasikan pengembangan Jargas; mengonsolidasikan realisasi pencapaian (kinerja) niaga gas bumi; serta kegiatan niaga untuk pelanggan korporat; 4. Pengelolaan kegiatan niaga di regional; melakukan pengembangan bisnis gas bumi di wilayah eksisting; melakukan pengelolaan anggaran biaya, relasi dengan *stakeholder*, layanan umum, dan berperan sebagai *Point of Contact* di Regional dan Area, serta memberikan *support* dalam kegiatan penanggulangan keadaan darurat.	1. Management of natural gas supply (pipeline and non-pipeline), as well as PGN LNG Trading activities, including LNG transportation activities; 2. Strengthening integration in gas distribution optimization activities to customers, and the management of supply balance and customer demand; 3. Management of strategies, policies, and programs of trading activities (marketing, sales, and customer management); conducting market research and canvasing in new areas; aggregating the management of natural gas trading business in Gas Sub-holding Group; preparing roadmap for the development of household natural gas network (Jargas) and coordinating the development of Jargas; consolidating the realization of achievement (performance) of natural gas trading; and trading activities for corporate customers; 4. Management of regional trading activities; developing natural gas business in existing areas; managing budget, stakeholder relations, public services, and acting as Point of Contact in Regional and Area, as well as providing support in emergency response activities.
5.	Direktur Keuangan Director of Finance	1. Pengelolaan kebijakan, strategi, dan standar untuk penyusunan RKAP, pengendalian RKAP serta *management analytics* Subholding Gas Group, Pengelolaan *cost, revenue analytics and reporting, investment tracking* dan *revenue management* Subholding Gas Group; 2. Pengelolaan kebijakan, sistem dan prosedur *corporate finance*, pendanaan, *trade finance* serta asuransi aset di Subholding Gas Group, Pengelolaan *cash flow* PGN, serta Pengelolaan kegiatan *revenue assurance* atas kegiatan usaha gas PGN dan pengelolaan piutang usaha PGN; 3. Pengelolaan kebijakan, strategi, perencanaan, pengendalian akuntansi dan kepatuhan perpajakan, perancangan dan monitoring implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) di PGN, serta Pengelolaan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang bertaku di Indonesia;	1. Management of policies, strategies, and standards for ABOP preparation, ABOP control and management analytics of Gas Sub-holding Group, Management of cost revenue analytics and reporting, investment tracking and revenue management of Gas Sub-holding Group; 2. Management of policies, systems, and procedures for corporate finance, funding, trade finance, and asset insurance in Gas Sub-holding Group, Management of PGN's cash flow, and Management of revenue assurance activities for PGN's gas business and management of PGN's trade receivables; 3. Management of policies, strategies, planning, accounting controls, and tax compliance, designing and monitoring the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) in PGN, as well as Management of the implementation and organization of financial reporting in accordance with applicable accounting standards in Indonesia.

No.	Direktorat Directorate	Fungsi	Function
6.	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	1. Pengelolaan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan bidang *Human Capital* dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan budaya perusahaan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.; 2. Pengelolaan pengembangan dan implementasi layanan *Information and Communication Technology* (ICT) Perusahaan terkait dengan teknologi informasi; infrastruktur ICT dan penyelarasan strategi bisnis dalam lingkup ICT dengan Holding Migas; 3. Pengelolaan kebijakan dan strategi pengadaan barang/jasa Perusahaan proyek infrastruktur gas bumi dan non keproyekan, serta pengelolaan penggunaan komponen dalam negeri; 4. Pengelolaan aset non jaringan, pengelolaan penggunaan lahan, pengelolaan fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan layanan umum Subholding Gas.	1. Management of Human Capital strategies, policies, and implementation in developing Human Resources (SOM) in accordance with corporate culture through effective and efficient management to achieve organizational goals; 2. Management of the development and implementation of the Company's Information and Communication Technology (ICT) services related to information technology; ICT infrastructure and alignment of business strategies within the scope of ICT with Oil and Gas Holding; 3. Management of policies and strategies for the procurement of goods/services for natural gas infrastructure projects and non-projects, as well as management of the use of domestic components; 4. Management of non-network assets, land use management, management of operational support facilities, and general services of Gas Sub-holding.
7.	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	1. Pengelolaan strategi manajemen risiko dan melaksanakan penerapan tata kelola manajemen risiko secara terintegrasi; 2. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan operasional Perusahaan, pengelolaan pengendalian internal dalam mendukung manajemen risiko, dan sistem manajemen keberlangsungan bisnis (*Business Continuity Management System*/BCMS); 3. Pengelolaan risiko terhadap kegiatan investasi Perusahaan serta pengelolaan risiko atas pengembangan bisnis dan kerja sama dengan pihak lain.	1. Management of risk management strategies and implementation of integrated risk management governance; 2. Risk management of the Company's operational activities, management of internal control in supporting risk management, and the business continuity management system (BCMS); 3. Risk management of the Company's investment activities, business development risk management, and cooperation with other parties.

Direksi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas risiko-risiko terkait dengan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), terhadap risiko bisnis korporasi yang juga menjadi bagian dari KPI Direksi. Dalam melakukan pengawasan atas risiko-risiko ESG tersebut, Direksi membentuk Komite Keberlanjutan yang diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direksi lainnya.

BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pertama kali disusun pada tahun 2006, *Board Manual* PGN terus diperbarui mengikuti perkembangan Perusahaan dengan perubahan terakhir pada 2021. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* PGN diatur secara khusus dalam Bab II yang mencakup:

1. Tugas Pokok Direksi;
2. Batasan Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas-tugas Direksi;
4. Hak dan Wewenang Direksi;
5. Pendelegasian Wewenang;
6. Independensi dan Etika Jabatan Direksi;
7. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perseroan;
8. Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
9. Lowong Jabatan Direksi;
10. Rangkap Jabatan;

Direksi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas risiko-risiko terkait dengan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), terhadap risiko bisnis korporasi yang juga menjadi bagian dari KPI Direksi. Dalam melakukan pengawasan atas risiko-risiko ESG tersebut, Direksi membentuk Komite Keberlanjutan yang diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direksi lainnya.

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and Board of Directors Manual (Board Manual) is a set of guidelines for the governance of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Initially prepared in 2006, PGN's Board Manual continues to be updated following the Company's development with the latest amendment in 2021. The Board of Directors Manual in PGN's Board Manual is specifically regulated in Chapter II, which includes:

1. Main Duties of the Board of Directors;
2. Limitations of Responsibilities of the Board of Directors;
3. Duties of the Board of Directors;
4. Rights and Authorities of the Board of Directors;
5. Delegation of Authority;
6. Independency and Code of Ethics of the Board of Directors;
7. Determination of Policies on Company Management;
8. Delegation of Duties and Authority of Members of the Board of Directors;
9. Vacant Positions of the Board of Directors;
10. Concurrent Positions;

11. Rapat Direksi;
12. Corporate Secretary;
13. Auditor Internal;
14. Manajemen Risiko;
15. *Whistleblowing System* dan gratifikasi;
16. Kinerja Perseroan; dan
17. Masa Jabatan Direksi.

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, hal ini selaras dengan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar PGN yang dimuat dalam Akta No. 28 tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta;
b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN;
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
d. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
e. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
g. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar PGN.

KEBIJAKAN DILARANG MENDAPATKAN PINJAMAN DARI PERSEROAN KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual* PGN telah memiliki kebijakan bahwa untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang mendapatkan pinjaman dari Perseroan.

RAPAT DAN KEPUTUSAN DIREKSI

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Anggaran Dasar Perseroan mewajibkan diadakannya rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan.

11. Meeting of the Board of Directors;
12. Corporate Secretary;
13. Internal Auditor;
14. Risk Management;
15. Whistleblowing System and gratification;
16. Corporate Performance; and
17. Term of Office of the Board of Directors.

CONCURRENT POSITIONS AND CONFLICTS OF INTEREST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on Article 11 paragraph (28) of the Article of Association of PGN stipulated in Deed No. 28 dated May 11, 2021, all members of the Board of Directors are prohibited from having the following concurrent positions:

a. Member of the Board of Directors of State-Owned Enterprise (SOEs), Regional-Owned Enterprises (ROE), and privately-owned enterprises;
b. Member of the Board of Commissioners and/or Supervisory Boards in SOEs;
c. Other structural and functional positions at a central and/or regional government institution/ agency;
d. Member of political party, the House of Representatives, the Regional Representatives Council, Regional Legislative Council Level I and Level II, and/or regional head/deputy regional head;
e. Candidate/member of the DPR, DPD, DPRD Level I and Level II, or regional head/deputy regional head;
f. Other positions that may cause a conflict of interest; and/or
g. Other positions based on the provisions of the applicable laws and regulations.

Throughout 2024, there were no members of the Board of Directors who held concurrent positions as stated in PGN's Articles of Association.

POLICY ON PROHIBITION OF RECEIVING LOANS FROM THE COMPANY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

As stipulated in the Board Manual, PGN has a policy for all members of the Board of Directors and Board of Commissioners to prohibition loans from the Company.

MEETINGS AND DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the Company's Articles of Association, it is required to hold regular Board of Directors meetings at least once every month and regular Board of Directors meetings with the Board of Commissioners at least once in four months.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kali Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors held 234 (two hundred thirty four) Meetings, with the following details:

AGENDA RAPAT DIREKSI

The Board Of Directors Meetings Agenda

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
02/01/24	*Update* Internal Audit Update on Internal Audit	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
02/01/24	Usulan Penyesuaian Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Proposed Adjustment of Business Process and Organizational Structure	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
02/01/24	*Update* Hasil Negosiasi Lelang Kluster Papua Utara Update on the Results of the North Papua Cluster Auction Negotiations	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
08/01/24	Upaya Optimalisasi Aset LNG Teluk Lamong Efforts to Optimize Teluk Lamong LNG Assets	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
08/01/24	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
08/01/24	*Unlock Value* PT Saka Energi Indonesia Unlock Value of PT Saka Energi Indonesia	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
08/01/24	*Update* Usulan Revisi Board Manual Update on the Proposed Revision of the Board Manual	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
15/01/2024	*Update* HSSE Update on HSSE	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
15/01/2024	Project Tango	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
15/01/2024	Analisa Internal Penerapan Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Internal Analysis of the Implementation of the Company Soundness Level Calculation	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
15/01/2024	Persetujuan Penandatanganan KB PHE WMO Approval of PHE WMO KB Signing	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/1/2024	Dry Run BOD BOC: Laporan Kinerja RKAP Desember 2023 Dry Run BOD BOC: December 2023 ABOP Performance Report	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/1/2024	*Update* Pembahasan Proses Persetujuan Pre-FID Inisiatif Investasi Pengembangan dan Pengoperasian Infrastruktur LNG untuk Gas *Power Plant* di Papua Utara PT PLN Energi Primer Indonesia Update on the Pre-FID Approval Process of Investment Initiative for the Development and Operation of LNG Infrastructure for Gas Power Plant in North Papua of PT PLN Energi Primer Indonesia	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/1/2024	Persetujuan RUPS Sirkuler PT Pertamina Gas tentang Pembentukan Konsorsium pada Proyek Pengembangan Infrastruktur Gasifikasi PLN di Papua Utara Approval of Circular GMS of PT Pertamina Gas on the Establishment of Consortium on Development Project PLN Gasification Infrastructure Development Project in North Papua	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/1/2024	Penawaran Portofolio LNG Pertamina Pertamina LNG Portfolio Offering	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
23/01/2024	*Update* Permohonan Persetujuan Pemegang Saham PT Pertamina Gas atas Pembentukan Konsorsium pada Proyek Pengembangan Infrastruktur Gasifikasi PLN di Papua Utara Update on the Request for Shareholder Approval of PT Pertamina Gas on the Establishment of a Consortium on the PLN Gasification Infrastructure Development Project in North Papua	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
23/01/2024	Usulan Penyesuaian Struktur Organisasi Proposed Adjustment of Organizational Structure	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
23/01/2024	Project Tango Petronas	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
23/01/2024	Konsep Bisnis dan Infrastruktur Terintegrasi dalam Bentuk Rencana Umum Penyediaan Gas (RUPG) Integrated Business and Infrastructure Concept in the Form of the Gas Supply General Plan (RUPG)	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/01/2024	*Update Review Unlock Value* SAKA Update on the Review of Unlock Value SAKA	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
29/01/2024	Persetujuan FID Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Ketapang dengan Pengeboran Sumur Eksplorasi Hikmah dan Perkasa FID Approval of Ketapang Working AreaCooperation Contract Extension with Drilling of the Hikmah and Perkasa Exploration Wells	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/01/2024	Penyampaian Strategi Hukum & *Decision Tree* Diagram PGN – Gunvor Submission of Legal Strategy & Decision Tree Diagram for PGN - Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/01/2024	Permohonan Persetujuan Penandatangan *Settlement Agreement* untuk Pencabutan Perkara Arbitrase FSRU Lampung Request for Approval to Sign Settlement Agreement for Revocation of FSRU Lampung Arbitration Case	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/02/24	*Update* Kontrak Bersyarat PT KCC Glass Indonesia Update on Conditional Contract of PT KCC Glass Indonesia	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/02/24	Pengalihan Bisnis SPBG dan Jargas SPBG and Gas Network Business Transfer	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/02/24	*Update* LNG Spot untuk Pasokan Kontrak Gunvor Update on Spot LNG for Gunvor Contract Supply	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
07/02/24	*Update* OC LNG Update on OC LNG	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
07/02/24	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	*Update* Usulan Revisi Pedoman Maturitas Investasi Update on Proposed Revision of Investment Maturity Guidelines	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	Permohonan FID Inisiatif Pengeboran WPA-06 WK Pangkah FID Request for the Drilling Initiative of WPA-06 WK Pangkah	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	Pengajuan FID Inisiatif Investasi NBD - *Upgrading* Stasiun Panaran sebagai Perkuatan Kehandalan Jaringan Batam Submission of FID for NBD Investment Initiative - Upgrading Panaran Station to Strengthen Batam Network Reliability	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
15/02/2024	Persetujuan Pembelian Kargo Spot 2024 untuk Pemenuhan Kontrak Gunvor Approval of the Spot 2024 Cargo Purchase for Gunvor Contract Fulfillment	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
19/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
19/02/2024	*Draft* Hasil Kajian Klusterisasi Portofolio Bisnis SH Gas Draft of Results of the SH Gas Business Portfolio Clustering Study	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
19/02/2024	*Dry Run* BOD BOC: HCM, ICT, CSR, HSSE	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/02/2024	Rencana Pemasangan Infrastruktur Gas PT PLN Batam - Titik Serah Batu Ampar & Sekupang Plan for Gas Infrastructure Installation of PT PLN Batam - Batu Ampar & Sekupang Handover Point	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/02/2024	*Draft* Audit Laporan Keuangan 2023 Draft Audit of the 2023 Financial Statements	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/02/2024	*Dry Run* BOD-BOC: *Update* Laporan Kinerja RKAP, *Top Risk* Januari 2024 dan *Summary* Kinerja PGAS Dry Run BOD-BOC: ABOP Performance Report Update, January 2024 Top Risk and PGAS Performance Summary	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Tindaklanjut Permasalahan PPN Gas Bumi Update on the Follow-up of Natural Gas VAT Issues	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	Permohonan Persetujuan Novasi Pokok-pokok HoA dan Persetujuan Fasilitas Treating Gas Banyu Urip Request for Approval of the HoA Principal Novation and Approval of Banyu Urip Gas Treating Facility	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Hasil FGD SH Gas dan SH Upstream Update on FGD Results of SH Gas and SH Upstream	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/02/2024	*Update* Pembahasan Proses Persetujuan FID Pembangunan Pipa BBM Cikampek – Plumpang Update on FID Approval Process Discussion of Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline Construction	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
14/03/2024	Permohonan Persetujuan FID Inisiatif Investasi Kegiatan *Drilling Explore* Ronggolawe-3 Request for FID Approval of the Investment Initiative for Explore Ronggolawe-3 Drilling Activities	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
14/03/2024	*Update* Maturitas Inisiatif Strategis Investasi Update on Maturity of the Investment Strategic Initiative	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/03/2024	*Dry Run* Rapat BOD-BOC: *Update Disbursement* Perpanjangan WK Ketapang Laporan Kinerja RKAP Februari 2024 Penyesuaian Proses Bisnis SH Gas Dry Run BOD-BOC Meeting: Update on Disbursement of Ketapang Working Area Extension February 2024 ABOP Performance Report Adjustment to SH Gas Business Process	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
25/03/2024	Usulan Pre-FID Inisiatif Investasi Proyek Pembangunan Pipa WNTS-Pemping Proposed Pre-FID Investment Initiative of the WNTS-Pemping Pipeline Construction Project	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
25/03/2024	Usulan FID Proyek 1st LNG Bunkering di Bontang Proposed FID of the 1st LNG Bunkering Project in Bontang	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
25/03/2024	Komersialisasi Gas Hasil Regasifikasi LNG untuk Industri JBB Lampung Commercialization of LNG Regasified Gas for the JBB Lampung Industry	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
03/04/24	*Update* HSSE: Investigasi Ledakan RM Famili HSSE Update: Investigation of RM Famili Explosion	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
03/04/24	Hasil *Rating* Tingkat Kesehatan Perusahaan Results of the Company Soundness Level Rating	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/04/24	*Update* Kontrak Gunvor Update on Gunvor Contract	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18/04/2024	Persetujuan Rencana Proyek Biomethane Approval of the Biomethane Project Plan	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18/04/2024	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
24/04/2024	Permohonan Persetujuan Ketentuan *Performance Guarantee Letter of Credit* GSA PGN – EMCL Request for Approval of the Terms of Performance Guarantee Letter of Credit GSA PGN - EMCL	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
24/04/2024	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Anak Perusahaan dan Afiliasi Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year of Subsidiaries and Affiliates	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
24/04/2024	*Dry Run* Rapat BOD-BOC: Dampak Konflik Geopolitik Timur Tengah Laporan Keuangan Maret 2024 Laporan Pencapaian Kinerja Maret 2024 Dry Run BOD-BOC Meeting: Impact of Middle East Geopolitical Conflict March 2024 Financial Report March 2024 Performance Achievement Report	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/02/24	Pengalihan Bisnis SPBG dan Jargas SPBG and Jargas Business Transfer	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/02/24	*Update* LNG Spot untuk Pasokan Kontrak Gunvor Update on Spot LNG for Gunvor Contract Supply	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
07/02/24	*Update* OC LNG Update on OC LNG	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
07/02/24	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	*Update* Usulan Revisi Pedoman Maturitas Investasi Update on Proposed Revision of Investment Maturity Guidelines	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	Permohonan FID Inisiatif Pengeboran WPA-06 WK Pangkah FID Application for Drilling Initiative WPA-06 WK Pangkah	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
12/02/24	Pengajuan FID Inisiatif Investasi NBD - *Upgrading* Stasiun Panaran sebagai Perkuatan Kehandalan Jaringan Batam Submission of FID for NBD Investment Initiative - Upgrading Panaran Station to Strengthen Batam Network Reliability	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
15/02/2024	Persetujuan Pembelian Kargo Spot 2024 untuk Pemenuhan Kontrak Gunvor Approval of the Spot 2024 Cargo Purchase for Gunvor Contract Fulfillment	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
19/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
19/02/2024	*Draft* Hasil Kajian Klusterisasi Portofolio Bisnis SH Gas Draft Results of the SH Gas Business Portfolios Clustering Study	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
19/02/2024	Dry Run BOD BOC: HCM, ICT, CSR, HSSE	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
20/02/2024	Rencana Pemasangan Infrastruktur Gas PT PLN Batam - Titik Serah Batu Ampar & Sekupang Gas Infrastructure Installation Plan of PT PLN Batam - Batu Ampar & Sekupang Delivery Point	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/02/2024	*Draft* Audit Laporan Keuangan 2023 Draft Audit of the 2023 Financial Statements	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/02/2024	Dry Run BOD-BOC: *Update* Laporan Kinerja RKAP, *Top Risk* Januari 2024 dan *Summary* Kinerja PGAS Dry Run BOD-BOC: Update on ABOP Performance Report, January 2024 Top Risk and PGAS Performance Summary	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
22/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Tindaklanjut Permasalahan PPN Gas Bumi Update on the Follow-up of Natural Gas VAT Issues	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	Permohonan Persetujuan Novasi Pokok-pokok HoA dan Persetujuan Fasilitas Treating Gas Banyu Urip Request for Approval of the HoA Novation and Approval of Banyu Urip Gas Treating Facility	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Hasil FGD SH Gas dan SH Upstream Update on SH Gas and SH Upstream FGD Results	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
26/02/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/02/2024	*Update* Pembahasan Proses Persetujuan FID Pembangunan Pipa BBM Cikampek – Plumpang Update on the Discussion of the FID Approval Process for the Construction of the Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
14/03/2024	Permohonan Persetujuan FID Inisiatif Investasi Kegiatan Drilling Explore Ronggolawe-3 Request for FID Approval of the Investment Initiative for Drilling Explore Ronggolawe-3 Activities	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
14/03/2024	*Update* Maturitas Inisiatif Strategis Investasi Update on Investment Strategic Initiative Maturity	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/03/2024	*Dry Run* Rapat BOD-BOC: *Update Disbursement* Perpanjangan WK Ketapang Laporan Kinerja RKAP Februari 2024 Penyesuaian Proses Bisnis SH Gas Dry Run BOD-BOC Meeting: Update on Ketapang Working Area Extension Disbursement February 2024 ABOP Performance Report Adjustment to SH Gas Business Process	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
25/03/2024	Usulan Pre-FID Inisiatif Investasi Proyek Pembangunan Pipa WNTS-Pemping Proposed Pre-FID of Investment Initiative of WNTS-Pemping Pipeline Construction Project	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
25/03/2024	Usulan FID Proyek 1st LNG Bunkering di Bontang FID Proposal for the 1st LNG Bunkering Project in Bontang	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
25/03/2024	Komersialisasi Gas Hasil Regasifikasi LNG untuk Industri JBB Lampung Commercialization of LNG Regasified Gas for the JBB Lampung Industry	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
03/04/24	*Update* HSSE: Investigasi Ledakan RM Famili HSSE Update: Investigation of RM Famili Explosion	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
03/04/24	Hasil Rating Tingkat Kesehatan Perusahaan Results of the Company Soundness Level Rating	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
05/04/24	*Update* Kontrak Gunvor Update on Gunvor Contract	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18/04/2024	Persetujuan Rencana Proyek Biomethane Approval for the Biomethane Project Plan	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18/04/2024	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
24/04/2024	Permohonan Persetujuan Ketentuan *Performance Guarantee Letter of Credit* GSA PGN – EMCL Request for Approval of the Terms of Performance Guarantee Letter of Credit GSA PGN – EMCL	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
24/04/2024	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Anak Perusahaan dan Afiliasi Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year of Subsidiaries and Affiliates	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
24/04/2024	*Dry Run* Rapat BOD-BOC: Dampak Konflik Geopolitik Timur Tengah Laporan Keuangan Maret 2024 Laporan Pencapaian Kinerja Maret 2024 Dry Run BOD-BOC Meeting: Impact of Middle East Geopolitical Conflict March 2024 Financial Report March 2024 Performance Achievement Report	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/04/2024	Rencana Pembelian Kargo LNG dari BP Tangguh Juni dan Agustus 2024 dan Penjualan kepada Pelanggan Plan to Purchase LNG Cargoes from BP Tangguh in June and August 2024 and Sales to Customers	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
29/04/2024	*Update* Opsi Penyaluran Gas PGN ke PT Cikarang Listrindo Plant MM2100 melalui Pemanfaatan Pipa KP72 - WJA Pertagas Update on PGN Gas Distribution Option to PT Cikarang Listrindo Plant MM2100 through Utilization of KP72 - WJA Pertagas Pipeline	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
29/04/2024	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
06/05/24	Usulan Treatment atas Kurang Bayar KPI RU VI Balongan untuk Pemakaian Gas Februari 2024 Proposed Treatment of Underpayment of KPI RU VI Balongan for Gas Usage in February 2024	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
06/05/24	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
06/05/24	Skenario Dividen Tahun Buku 2023 PT PGN Tbk Dividend Scenario for the 2023 Fiscal Year of PT PGN Tbk	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
16/05/2024	Laporan Manajemen PT PGN Tbk periode April 2024 Management Report of PT PGN Tbk for April 2024	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
16/05/2024	Persetujuan *Guideline* RKAP 2025 Approval of the 2025 ABOP Guideline	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
16/05/2024	Penyaluran Gas Regasifikasi LNG TUA untuk Pembangkit PLN wilayah Jawa Barat dan Sumatera Distribution of TUA LNG Regasified Gas for PLN Power Plant in West Java and Sumatera region	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
16/05/2024	Rencana Pasokan Gas dari Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah (*Update* WK Jabung dan Persetujuan WK Batanghari) Gas Supply Plan from South Sumatra and Central Sumatra (Update on Jabung Working Area and Approval of Batanghari Working Area)	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/05/2024	Dry Run Rapat BOD BOC: *Update* RJPP *Update* Persiapan RUPST Tindaklanjut Pembayaran *Success Fee* atas 6 Nomor Perkara PK PPN Gas Bumi Dry Run BOD BOC Meeting: RJPP Update Update on AGMS Preparation Follow-up on Success Fee Payments for Six Natural Gas VAT Review Case Numbers	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
20/05/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
28/05/2024	Usulan FID Jargas SOR I Tahun 2024 Proposed FID for Jargas SOR I in 2024	✓	✓	-	✓	✓	✓	-

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
28/05/2024	*Update* HoA Penyaluran Gas ke KPI RU IV Cilacap oleh SH Gas Update on HoA for Gas Distribution to KPI RU IV Cilacap by Gas SH	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
28/05/2024	Tindaklanjut Klaterisasi Bisnis SH Gas Follow-up of Gas SH Business Clustering	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
03/06/24	Rencana Pemberian Bantuan Hukum dan Penggunaan Polis Asuransi D&O dalam rangka Pelaksanaan Pendampingan Proses Hukum Plan for the Provision of Legal Aid and the Use of D&O Insurance Policy in the Context of Assistance Implementation Legal Process	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	Laporan Kinerja Mei 2024 Pertagas May 2024 Pertagas Performance Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	*Update* Kinerja HSSE Ytd Mei 2024 Update on HSSE Performance Ytd May 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	Restrukturisasi PT Nusantara Regas Restructuring of PT Nusantara Regas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	*Dry Run* Rapat Komisi VI Dry Run Meeting of Commission VI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	Penandatanganan HoA dengan *Dart Energy* The signing of HoA with Dart Energy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	*Update* Rencana Penandatanganan Dokumen pada Acara Forum SKK Migas Update on Document Signing Plan at the SKK Migas Forum Event	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/06/24	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/06/2024	PGNCOM Ytd *Performance*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/06/2024	GAGAS Ytd *Performance*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/06/2024	Laporan Kinerja Mei RKAP 2024 May 2024 ABOP Performance Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/06/2024	*Update* Organisasi *Ultimate* PGN Update on PHN Ultimate Organization	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/06/2024	*Update* Arbitrase PT Kalimantan Jawa Gas Update on PT Kalimantan Jawa Gas Arbitration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/06/2024	*Update* Arbitrase PT Kalimantan Jawa Gas Update on PT Kalimantan Jawa Gas Arbitration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/06/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
24/06/2024	Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kerjasama Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas JTB antara Pertamina dan PGN Request for Approval of the Extension of the Cooperation Period of the JTB Gas Management and Distribution Cooperation Agreement between Pertamina and PGN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	*Update* Hasil Diskusi Klasterisasi Bisnis SH Gas dengan Komisaris Utama Update on Gas SH Business Clustering Discussion Results with President Commissioner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	*Update* Usulan Perubahan Organisasi BOD-1 Update on BOD-1 Organization Change Proposal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	Usulan ABI RKAP 2025 SH Gas Proposal of the 2025 ABI ABOP of Gas SH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	*Update* Pengalihan Bisnis Jargas Pra Grace Period 2021-2023 Update on Jargas Business Transfer Pre Grace for 2021-2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	Rencana Penyelesaian Kerusakan Pipa SAKA Pangkah Plan to Resolve Damage to the SAKA Pangkah Pipeline	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/06/2024	*Dry Run* BOD BOC: Kinerja dan Capaian Divisi ET, PMO dan CGP Dry Run BOD BOC: Performance and Achievement of the ET, PMO, and CGP Divisions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03/07/24	Kajian Tindaklanjut Pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur Follow-up Study of LNG Terminal Development in East Java	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03/08/24	SAKA Ytd *Performance*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03/09/24	Persetujuan Pemegang Saham PT Pertamina Gas atas Kerjasama Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek - Plumpang antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Gas PT Pertamina Gas' Shareholders' Approval on the Cooperation for the Provision of Cikampek - Plumpang Fuel Pipeline Services between PT Pertamina Patra Niaga and PT Pertamina Gas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03/10/24	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/07/24	*Update* Program Jargas Update on Jargas Program	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/08/24	Usulan RKAP 2025 PGN Group *Draft* 1 PGN Group's 2025 ABOP Proposal Draft 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/09/24	Permohonan Persetujuan Hargas Gas PEP Jabar dan PHE ONWJ Request for Approval of Gas Price for PEP Jabar and PHE ONWJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
08/10/24	PLI Ytd Performance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/11/24	*Update* Arbitrase KJG - Analisis Putusan ICC Award KJG-PCML Update on KJG Arbitration - Analysis of ICC Award KJG-PCML Ruling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/07/2024	*Update* Kinerja HSSE Ytd Juni 2024 HSSE Performance Update Ytd June 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/07/2024	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/07/2024	Pembelian Kargo LNG Domestik dari Donggi Senoro LNG (DS LNG) periode September 2024 dan Penetapan Harga Jual LNG Purchase of Domestic LNG Cargo from Donggi Senoro LNG (DS LNG) for the period of September 2024 and Determination of LNG Selling Price	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/07/2024	NR Ytd *Performance*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/07/2024	Laporan Kinerja RKAP Juni 2024 June 2024 ABOP Performance Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/01/24	Revisi RKAP 2025 D2 Revised 2025 ABOP D2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/01/24	Ext Muara Bakau (SAKA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/05/24	*Unlock Value* SAKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/06/24	KSO JPEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/07/24	Rencana Pembangunan Kantor Area Office Area Construction Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/08/24	LNG Korea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/09/24	DS LNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/12/24	Kerjasama PGASSOL-ELNUSA PGASSOL-ELNUSA Cooperation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/13/24	Papua Utara North Papua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/14/24	HSSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/15/24	Ext Muara Bakau (SAKA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/19/24	Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/20/24	Laporan Pencapaian RKAP Juli 2024 July 2024 ABOP Achievement Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/21/24	*Update* Jargas Update on Jargas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/22/24	FID SOR I dan III FID SOR I and III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/20/24	*Update* Keikutsertaan PLI Lelang Papua Utara Update on PLI Participation in North Papua Auction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/21/24	*Dry Run* Rapat Pertamina: Jargas *Overlay* Dry Run Meeting Pertamina: Jargas Overlay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
08/26/24	Permohonan Persetujuan Penggunaan Lahan Labuhan Maringgai untuk *Ground Station Space* X Application for Approval of Labuhan Maringgai Land Use for the Space X Ground Station	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/27/24	*Update Risk* Update on Risk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
08/28/24	*Update* Audit SAKA Update on SAKA Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/02/24	Persetujuan *Public Expose* Public Expose Approval	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/03/24	Persetujuan Usulan KPI Kolegial Subholding Gas Tahun 2025 *Draft*-1 Pasca *One on One Discussion* dengan Group Performance Evaluation Direktorat SPPU Pertamina Approval of the Proposed 2025 Gas Sub-holding Collegial KPI Draft-1 Post One on One Discussion with the Group Performance Evaluation Directorate SPPU Pertamina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/04/24	*Update* Realisasi Inisiatif Investasi UPB-12 Workover Well Deepening Testing CD Ngimbang Carbonate & Ngimbang Clastic (Proyek Workover UPB-12 Update on the Realization of Investment Initiatives UPB-12 Workover Well Deepening Testing of CD Ngimbang Carbonate & Ngimbang Clastic (UPB-12 Workover Project)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/04/24	Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Investasi (FID) Restaging Compressor C505J dan C306 PT Pertamina Gas SKG Cilamaya di Operation West Java Area Request for PGN Board of Directors Approval of Investment (FID) in Restaging Compressor C505J and C306 PT Pertamina Gas SKG Cilamaya in West Java Operation Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/05/24	Permohonan Persetujuan Direksi Perpanjangan Alokasi Pasokan PGE WK B (*Update* dari 27 November 2023) Request for Board of Directors' Approval for the Extension of PGE WK B Supply Allocation (Update from November 27, 2023)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/09/24	*Update* HSSE Update on HSSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/10/24	*Dry Run Challenge Session* RKAP 2025 Dry Run Challenge Session of the 2025 ABOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/11/24	*Update* IR Update on IR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
09/10/24	Pembelian Kargo LNG Domestik Bulan Oktober 2024 & Penjualan kepada Pelanggan Retail dan Korporat Purchase of Domestic LNG Cargo in October 2024 & Sales to Retail Customers and Corporate Customers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/18/24	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/19/24	Permohonan Persetujuan Harga Gas dari *Dart Energy* Lapangan Tanjung Enim Request for Gas Price Approval from Dart Energy Tanjung Enim Field	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/20/24	Agenda Laporan Kinerja Agustus dan *Update* Prognosa Basis Real Agustus 2024 August Performance Report Agenda and Update on August 2024 Real Base Prognosis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/21/24	Usulan Pembangunan Gedung Kantor PGN Jl. M.I Ridwan Rais Proposed Construction of PGN Office Building at Jl. M.I Ridwan Rais	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/19/24	Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Investasi (FID) Pengeboran Sumur SID-05 pada Wilayah Kerja Pangkah Request for PGN Board of Directors' Approval of Investment (FID) in the SID-05 Well Drilling in the Pangkah Working Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/20/24	Permohonan Persetujuan Direksi PGN atas Investasi (FID) Pengeboran Sumur JNE-07 Sidetrack pada Wilayah Kerja Muara Bakau Request for Approval from PGN's Board of Directors for Investment (FID) in JNE-07 Well Drilling Sidetrack in Muara Bakau Working Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/21/24	Proyek Penyediaan Gas Untuk Mendukung Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Industri Tembaga Di Proyek Hu'u PT Sumbawa Timur Mining Gas Supply Project to Support Copper Industry Exploration and Production Activities at Hu'u Project of PT Sumbawa Timur Mining	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/23/24	*Dry Run* Ragab: Kinerja Agustus 2024, Revisi RKAP 2024 & *Update* Gunvor Dry Run Joint Meeting: August 2024 Performance, 2024 ABOP Revision & Gunvor Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09/24/24	Hasil Audit Rokan Rokan Audit Results	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/01/24	Usulan Tantiem Gaji Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Proposed Tantiem Salary for Directors and Commissioners of Subsidiaries and/or Affiliates	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
10/02/24	Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Gas *Customer Attachment* Komersial dan Pelanggan Kecil SOR II Tahun 2025 Approval of Bulk Budget for Gas Infrastructure Installation of Commercial and Small Customer Attachment SOR II Year 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/03/24	Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Gas *Customer Attachment* Komersial dan Pelanggan Kecil SOR III Tahun 2025 Approval of Bulk Budget for Gas Infrastructure Installation for Commercial and Small Customer Attachment SOR III Year 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/07/24	Status Kontrak PGN-Gunvor dan Tanggapan atas Permintaan Arbitrase dari Gunvor serta Opsi Terkait Konsultan Hukum Pendamping Status of the PGN-Gunvor Contract and Response to Gunvor's Request for Arbitration and Options Related to Accompanying Legal Consultants	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/07/24	*Update* Gunvor ke KBUMN dan *Update* RAT Top Risk Gunvor Gunvor Update to the Ministry of SOEs and Gunvor Top Risk RAT Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/07/24	FID Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga GasKita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR III Tahun 2024 FID for Gas Pipeline Infrastructure Installation for GasKita PGN Sayang Ibu Household Customer Attachment ("PSI") SOR III Year 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/07/24	Pengeboran Sumur UPB-18 Wilayah Kerja ("WK") Pangkah ("UPB-18 WK Pangkah") Drilling UPB-18 Well in Pangkah Working Area ("WK") ("UPB-18 WK Pangkah")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/14/24	*Update* HCM Update on HCM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/14/24	*Update* Gunvor Update on Gunvor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/14/24	*Dry Run* Materi Putaran 2 Konsinyering RKAP 2025 Dry Run Material Round 2 Consignment of the 2025 ABOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/14/24	Pengeboran Sumur Bukit Tua BTJTB T8 (NZ2) WK Ketapang Drilling of Bukit Tua Well BTJTB T8 (NZ2) in Ketapang Working Area (WK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/14/24	Permohonan Persetujuan Tindak Lanjut Negosiasi Tarif Regasifikasi PLN EPI di PAG Request for Approval of Follow-up for PLN EPI Regasification Tariff Negotiation at PAG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
10/15/2024	Perpanjangan Pasokan SEML SEML Supply Extension	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/15/2024	*Update* Skema Bisnis Penyaluran Gas ke KPI RU IV Cilacap Update on Gas Distribution Business Scheme to KPI RU IV Cilacap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/15/2024	*Update Issue* (Kinerja HSSE, *Update Overview* Hasil Audit Supreme PGN Th 2024) Issue Update (HSSE Performance, Update Overview of PGN Supreme Audit Results for 2024)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/15/2024	Pengeboran Sumur Bukit Tua BTJTB T6 (NZ1) WK Ketapang Drilling of Old Hill Well BTJTB T6 (NZ1) in Ketapang Working Area (WK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/15/2024	*Update* Proses Lelang PLN EPI: *Development and Operation of LNG Infrastructure Services for Gas Power Plant in* Papua Utara Update on PLN EPI Auction Process: Development and Operation of LNG Infrastructure Services for Gas Power Plant in North Papua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/15/2024	Laporan Pencapaian RKAP September 2024 September 2024 ABOP Achievement Report	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/10/2024	Persetujuan Usulan *Draft* 3 KPI Kolegial Subholding Gas Tahun 2025 yang akan disampaikan pada CS dengan Direktorat SPPU Pertamina 24 Oktober 2024 Approval of the Proposed Draft 3 Collegial KPIs for Gas Subholding Year 2025 to be submitted to CS with Directorate of SPPU of Pertamina dated October 24, 2024.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2024	Rencana Pengembangan Bisnis LNG PGN Group PGN Group LNG Business Development Plan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2024	*Update* Presentasi Mayer Brown atas RFA Gunvor Update on Mayer Brown's Presentation of Gunvor's RFA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2024	*Update* Proses Lelang PLN EPI: *Development and Operation of LNG Infrastructure Services for Gas Power Plant in* Papua Utara – Kesepakatan Tarif dan Persiapan Joint Development Agreement Update on PLN EPI Bidding Process: Development and Operation of LNG Infrastructure Services for Gas Power Plant in North Papua - Tariff Agreement and Joint Development Agreement Preparation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
28/10/2024	Permohonan Persetujuan Direksi Penandatangan atas Dokumen Perjanjian Induk Jargas & SPBG; Surat Kuasa SPBG antara PT Pertamina (Persero) & PGN; serta Surat Kuasa SPBG subtitusi PGN ke PT Gagas Energi Indonesia atas Alih Bisnis & Pengelolaan SPBG dari Pertamina ke SH Gas Request for the Board of Directors' Approval to Sign the Jargas & SPBG Master Agreement Document; SPBG Power of Attorney between PT Pertamina (Persero) & PGN; and SPBG Power of Attorney for PGN's substitution to PT Gagas Energi Indonesia for the Transfer of Business & Management of SPBG from Pertamina to Gas SH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2024	*Update* Inisiatif Bisnis Pembangunan Pipa WNTS-Pemping Update on Business Initiative for WNTS-Pemping Pipeline Development	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/10/2024	Persetujuan FID Pengeboran Sumur UPA-17 Wilayah Kerja (“WK”) Pangkah (“UPA-17 WK Pangkah") FID Approval of Drilling UPA-17 Well in Pangkah Working Area (“WK”) (“UPA-17 WK Pangkah”)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04/11/2024	Penjelasan Atas *Conflict of Interest* (’’COI’’) Oleh Konsultan Hukum A&O Shearman Dalam Penanganan Perkara Arbitrase di London Court of International Arbitration (LCIA) Explanation of Conflict of Interest (''COI'') by A&O Shearman's Legal Consultants in the Handling of Arbitration Cases at London Court of International Arbitration (LCIA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04/11/2024	Permohonan Persetujuan Direksi Perpanjangan Alokasi Pasokan PHE NSO, PHE OK dan Pertamina EP untuk PGN Medan Request for the Board of Directors' Approval to Extend the Supply Allocation of PHE NSO, PHE OK, and Pertamina EP to PGN Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04/11/2024	Penandatanganan KB Penyimpanan dan Regasifikasi PAG dan Rencana Penjualan LNG di Medan Signing of KB for PAG Storage and Regasification and LNG Sales Plan in Medan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04/11/2024	Usulan Penghapusan Aset Bangunan Simpang Kantor Medan untuk Mother Station CNG Proposed Asset Write-off of Medan Office Junction Building for CNG Mother Station	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
11/7/2024	Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Terminal LNG Jawa Barat dan Penyaluran Gas Hasil Regasifikasi LNG ke Jaringan Distribusi Pipa Gas Jawa Barat antara PGN dan NR Signing of Agreement on the Utilization of West Java LNG Terminal and Distribution of LNG Regasified Gas to West Java Gas Pipeline Distribution Network between PGN and NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/7/2024	*Update* Implementasi HGBT Update on HGBT Implementation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/7/2024	*Update Issue* Kinerja HSSE Update on HSSE Performance Issue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/11/2024	Kajian Masterplan Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) Study on Masterplan for the Development of Household Gas Network (Jargas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/11/2024	Persetujuan Tindak Lanjut Novasi Kontrak Pengelolaan Gas Jambaran Tiung Biru ("JTB") Approval of Follow-up Novation of Jambaran Tiung Biru ("JTB") Gas Management Contract	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/11/2024	Permohonan Persetujuan Anggaran Bulk kepada Direksi PGN atas Pengadaan Kendaraan 2025 PT Permata Graha Nusantara Request for Bulk Budget Approval to PGN's Board of Directors for PT Permata Graha Nusantara's 2025 Vehicle Procurement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/11/2024	Persetujuan Proposal Teknis Penyediaan Gas dan Infrastruktur serta Indikasi Tarif untuk Penyediaan Listrik Bagi *Second Smelter* Inalum di Kuala Tanjung – Dukungan kepada PNRE Approval of Technical Proposal for Gas and Infrastructure Supply and Tariff Indication for Electricity Supply for Inalum's Second Smelter in Kuala Tanjung - Support to PNRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/18/2024	Permohonan Persetujuan Konsultan Hukum Dalam Negeri Guna Penyusunan Kajian dan Pemetaan Risiko Hukum Dalam Perspektif Hukum Indonesia Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase The London Court of International Arbitration ("LCIA") Application for Approval of Domestic Legal Consultants for the Preparation of Legal Risk Assessment and Mapping in the Perspective of Indonesian Law Contained in the Arbitration Award of The London Court of International Arbitration ("LCIA")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
11/18/2024	Laporan Manajemen Oktober & *Update* Prognosa Basis Real Oktober 2024 October Management Report & October 2024 Real Base Prognosis Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/18/2024	Kajian Bersama PGN-PTBA atas Inisiatif Gasifikasi Batubara menjadi *Synthetic Natural Gas* (SNG) PGN-PTBA Joint Study on Coal Gasification Initiative into Synthetic Natural Gas (SNG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/18/2024	Persetujuan Proposal Teknis Penyediaan Gas dan Infrastruktur serta Indikasi Tarif untuk Penyediaan Listrik Bagi *Second Smelter* Inalum di Kuala Tanjung – Dukungan kepada PNRE Approval of Technical Proposal for Gas and Infrastructure Supply and Tariff Indication for Electricity Supply for Inalum's Second Smelter in Kuala Tanjung - Support to PNRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/18/2024	Persetujuan Tindakan yang Belum Ditetapkan dalam RKAP 2024 atas Usulan Pengeboran Sumur UPB-18 WK Pangkah ("UPB-18") Approval of Undetermined Action in the 2024 ABOP on the Proposed Drilling of UPB-18 well in Pangkah Working Area ("UPB-18")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/18/2024	Persetujuan atas *Update* Keekonomian dan Risiko Usulan FID Pengeboran Sumur Bukit Tua BTJTB-T6 (NZ1) WK Ketapang ("BTJTB-T6 WK Ketapang") Approval of the Update on the Economics and Risks of the Proposed FID for the Drilling of the Old Hill Well BTJTB-T6 (NZ1) in Ketapang Working Area ("BTJTB-T6 WK Ketapang")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/25/2024	Penawaran LNG Portofolio Pertamina Sumber Corpus Christi untuk Kebutuhan Domestik PGN Periode 2026-2030 Corpus Christi-Source Pertamina Portfolio LNG Offering for PGN Domestic Needs for 2026-2030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/25/2024	Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Pembangunan Infrastruktur Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping ("Pipa WNTS-Pemping") Request for Investment Approval (FID) for Infrastructure Development of West Natuna Transportation System Pipeline to Pemping Island ("WNTS-Pemping Pipeline")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
11/25/2024	Penyampaian *Business Plan* SAKA Tahun 2024 – 2034 Terkait Tindak Lanjut Inisiatif Strategis *Unlock Value* SAKA Submission of SAKA Business Plan Year 2024 - 2034 Related to the Follow-up of SAKA's Unlock Value Strategic Initiative	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/25/2024	Permohonan Persetujuan Investasi Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA Request for Investment Approval for the Construction of PGN MIRRA Office Building	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11/25/2024	*Update* & Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Risiko PGN Update & Follow-up on PGN Risk Management Policy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Tindak Lanjut Permohonan Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Gas *Customer Attachment* Komersial SOR II Tahun 2025 Follow-up on the Application for Bulk Budget Approval for the Installation of SOR II Commercial Gas Customer Attachment Infrastructure in 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Komersialisasi Gas Hasil Regasifikasi LNG Tahun 2025 Commercialization of LNG Regasified Gas in 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Permohonan Persetujuan Harga Gas Bongas periode 1 Januari - 31 Desember 2025 Request for Approval of Bongas Gas Price for January 1 - December 31, 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Pembahasan Revisi *Board Manual* PGN Discussion of the Revised PGN Board Manual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Persetujuan Tambahan *Top Risk* 2024 dan *Update* atas pembahasan RAT Gunvor dengan Komite PMRPU pada 25 November 2024 Approval of Additional Top Risk 2024 and Update on Gunvor RAT discussion with the RMMBD Committee on November 25, 2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Lain-lain (KPI, Surat VP LNG ttg Gunvor) Others (KPI, VP LNG Letter about Gunvor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Pemaparan GCG *Assessment* Parameter POJK dan PUG-KI Exposure of GCG Assessment in POJK and PUG-KI Parameters	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Permohonan Persetujuan atas Tambahan Volume Pasokan Gas West Natuna Exploration Ltd ("WNEL") Request for Approval of Additional Gas Supply Volume of West Natuna Exploration Ltd ("WNEL")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
12/09/2024	Permohonan Persetujuan Direksi atas *Update* Perpanjangan pasokan PEP Medan Request for the Board of Directors' Approval of Update on PEP Medan Supply Extension	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Persetujuan Hasil Valuasi Novasi Kontrak Pengelolaan Gas Jambaran Tiung Biru Approval of Valuation Result of Novation of the Jambaran Tiung Biru Gas Management Contract	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/13/2024	Pemohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan Pipa Distribusi Tegal - Cilacap untuk Penyaluran kepada RU IV Cilacap ("Pipa Tegal-Cilacap") Application for Investment Approval (FID) of Tegal - Cilacap Distribution Pipeline Construction Project for Distribution to RU IV Cilacap ("Tegal-Cilacap Pipeline")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/13/2024	Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan *Onshore Storage* Terminal LNG Jawa Timur Request for Investment Approval (FID) for the East Java LNG Onshore Storage Terminal Development Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/02/2024	Lain-lain (KPI, Surat VP LNG ttg Gunvor) Others (KPI, VP LNG Letter about Gunvor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Pemaparan GCG *Assessment* Parameter POJK dan PUG-KI Exposure of GCG Assessment in POJK and PUG-KI Parameters	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Permohonan Persetujuan atas Tambahan Volume Pasokan Gas West Natuna Exploration Ltd ("WNEL") Request for Approval of Additional Gas Supply Volume for West Natuna Exploration Ltd ("WNEL")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Permohonan Persetujuan Direksi atas *Update* Perpanjangan pasokan PEP Medan Request for the Board of Directors' Approval of PEP Medan Supply Extension Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/09/2024	Persetujuan Hasil Valuasi Novasi Kontrak Pengelolaan Gas Jambaran Tiung Biru Approval of Valuation Result of Novation of Jambaran Tiung Biru Gas Management Contract	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
12/13/2024	Pemohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan Pipa Distribusi Tegal - Cilacap untuk Penyaluran kepada RU IV Cilacap ("Pipa Tegal-Cilacap") Application for Investment Approval (FID) of Tegal - Cilacap Distribution Pipeline Construction Project for Distribution to RU IV Cilacap ("Tegal-Cilacap Pipeline")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/13/2024	Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan *Onshore Storage* Terminal LNG Jawa Timur Request for Investment Approval (FID) for the East Java LNG Onshore Storage Terminal Development Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	*Update* Kinerja HSSE Update on HSSE Performance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Laporan Kinerja November dan *Update* Prognosa Basis Real November 2024 November Performance Report and November 2024 Real Basis Prognosis Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Usulan RKAP 2025 *Draft* 6 Proposed ABOP 2025 Draft 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Amandemen KSO Rokan dan Revisi ABI RKAP 2024 Pertagas Amendment to Rokan KSO and Revision of ABI ABOP 2024 of Pertagas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Permohonan Persetujuan atas Tambahan Volume Pasokan Gas West Natuna Exploration Ltd. ("WNEL") Request for Approval of Additional Gas Supply Volume of West Natuna Exploration Ltd. ("WNEL")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Pembahasan Aspek HCM HCM Aspect Discussion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	*Update* Ketersediaan Kargo LNG dan Rencana Pembelian LNG s.d Maret 2025 Update on LNG Cargo Availability and LNG Purchase Plan up to March 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Persetujuan Kesepakatan Bersama Para Pembeli antara PGN dan PLN EPI tentang Pembelian Gas dan/atau LNG Approval of the Joint Buyer Agreement between PGN and PLN EPI regarding the Purchase of Gas and/or LNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Permohonan persetujuan Direksi PGN atas usulan *Roadmap* ESG Subholding Gas 2025 – 2034 Request for approval from PGN's Board of Directors on the proposed 2025 – 2034 ESG Roadmap for Gas Sub-holding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
12/23/2024	*Update* dan Permohonan Arahan terhadap tindak lanjut SAKA atas pelaksanaan rencana proposal perubahan Bentuk Kontrak KKS WK Pangkah pada masa Perpanjangan 2026-2046 dari skema Gross Split kembali ke skema *Cost Recovery* (Project Kenari) Update and Request for Direction on SAKA's follow-up on the implementation of the proposal plan to change the Form of Contract KKS of Pangkah Working Area in the 2026-2046 Extension period from the Gross Split scheme back to the Cost Recovery scheme (Project Kenari)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/31/2024	Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Jambaran Tiung Biru /JTB antara Pertamina dan PGN ("Dokumen Bridging") Extension of the Term of the Cooperation Agreement for the Management and Distribution of Jambaran Tiung Biru/JTB Gas between Pertamina and PGN ("Bridging Document")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/31/2024	Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas Customer Attachment Jargas GasKita Tahun 2025 Bulk Budget Approval for the Installation of Jargas GasKita Customer Attachment Gas Pipeline Infrastructure for 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/31/2024	Persetujuan Revisi Final Investment Decision (Re-FID) *Customer Attachment* Jargas GasKita Wilayah SOR I Area Batam Approval of Revision of Final Investment Decision (Re-FID) of GasKita Jargas Customer Attachment SOR I Batam Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/13/2024	Permohonan Persetujuan Investasi (FID) Proyek Pembangunan *Onshore Storage* Terminal LNG Jawa Timur Request for Investment Approval (FID) for the East Java Onshore Storage Terminal LNG Development Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	*Update* Kinerja HSSE Update on HSSE Performance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Laporan Kinerja November dan *Update* Prognosa Basis Real November 2024 November Performance Report and November 2024 Real Basis Prognosis Update	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Usulan RKAP 2025 *Draft* 6 Proposed ABOP 2025 Draft 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/16/2024	Amandemen KSO Rokan dan Revisi ABI RKAP 2024 Pertagas Amendment to Rokan KSO and Revision of ABI ABOP 2024 of Pertagas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
12/16/2024	Permohonan Persetujuan atas Tambahan Volume Pasokan Gas West Natuna Exploration Ltd. ("WNEL") Request for Approval of Additional Gas Supply Volume of West Natuna Exploration Ltd. ("WNEL")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Pembahasan Aspek HCM HCM Aspect Discussion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	*Update* Ketersediaan Kargo LNG dan Rencana Pembelian LNG s.d Maret 2025 Update on LNG Cargo Availability and LNG Purchase Plan up to March 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Persetujuan Kesepakatan Bersama Para Pembeli antara PGN dan PLN EPI tentang Pembelian Gas dan/atau LNG Approval of the Joint Buyer Agreement between PGN and PLN EPI regarding the Purchase of Gas and/or LNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	Permohonan persetujuan Direksi PGN atas usulan *Roadmap* ESG Subholding Gas 2025 – 2034 Request for approval from PGN's Board of Directors on the proposed Gas Sub-holding ESG Roadmap 2025 - 2034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/23/2024	*Update* dan Permohonan Arahan terhadap tindak lanjut SAKA atas pelaksanaan rencana proposal perubahan Bentuk Kontrak KKS WK Pangkah pada masa Perpanjangan 2026-2046 dari skema *Gross Split* kembali ke skema *Cost Recovery* (Project Kenari) Update and Request for Directives on SAKA's follow-up on the implementation of the proposal plan to change the Form of KKS Contract of Pangkah Working Area in the 2026-2046 Extension period from the Gross Split scheme back to the Cost Recovery scheme (Project Kenari).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/31/2024	Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Jambaran Tiung Biru /JTB antara Pertamina dan PGN ("Dokumen Bridging") Extension of the Term of the Cooperation Agreement for the Management and Distribution of Jambaran Tiung Biru/JTB Gas between Pertamina and PGN ("Bridging Document")	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/31/2024	Persetujuan Anggaran Bulk Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Jargas GasKita Tahun 2025 Bulk Budget Approval for the Installation of Gas Pipeline Infrastructure for Jargas GasKita Customer Attachment Year 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tanggal Date	Agenda	Arief Setiawan Handoko	Harry Budi Sidharta	Rachmat Hutama	Fadjar Harianto Widodo	Rosa Permata Sari	Ratih Esti Prihatini	Arief Kurnia Risdianto
12/31/2024	Persetujuan Revisi *Final Investment Decision* (Re-FID) Customer Attachment Jargas GasKita Wilayah SOR I Area Batam Approval of the Revised Final Investment Decision (Re-FID) of GasKita Jargas Attachment Customer for SOR I Batam Area	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Persentase Kehadiran Masing-masing Anggota **Attendance Percentage of Each Member**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Informasi mengenai keputusan-keputusan Direksi yang dilakukan secara sirkuler pada tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut:

Information regarding the Board of Directors' decisions made circularly in 2024, among others, are as follows:

KEPUTUSAN DIREKSI
The Board of Directors' Decision

Tanggal Date	Agenda	Agenda
28 November 2024 November 28, 2024	010/CS-BPD/2024 Persetujuan Tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP 2024 atas Usulan Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas CA RT Gaskita PSI SOR III 2024	010/CS-BPD/2024 Approval of Undetermined Actions in the 2024 ABOP for the Proposed Investment in the Installation of Gas Pipeline Infrastructure CA RT Gaskita PSI SOR III 2024

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Direksi PGN memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 tentang Pembentukan *Chief Risk Officer* (CRO) dan Komite Manajemen Risiko tanggal 16 Juli 2021. Direksi secara berkala melakukan penilaian terkait kinerja Komite di bawah Direksi melalui *self-assessment* yang didasarkan pada program kerja dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat komite.

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan agenda yang meliputi namun tidak terbatas pada penetapan strategi dalam penerapan pengelolaan risiko, *update* status level risiko perusahaan, pembangunan budaya sadar risiko dan evaluasi atas aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi.

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, berdasarkan program kerja dan kehadiran rapat dengan baik. Direksi juga melihat Komite Manajemen Risiko mampu mencapai kinerja yang baik serta memiliki anggota dengan kompetensi yang dibutuhkan Perseroan.

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

PGN's Board of Directors established a Risk Management Committee (RMC), determined based on the Decree of PGN's Board of Directors No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021 on the Establishment of Chief Risk Officer (CRO) and Risk Management Committee dated July 16, 2021. The Board of Directors periodically evaluates the performance of Committees under the Board of Directors through self-assessment, which is based on the work plan and attendance rate of members in committee meetings.

The Risk Management Committee meetings are held at least once every 3 (three) months with an agenda that includes but is not limited to the determination of strategies for risk management implementation, updating the status of the Company's risk level, promoting a risk-awareness culture, and evaluating activities that require approval from the Board of Directors.

Throughout 2024, the Risk Management Committee properly performed its duties and responsibilities based on the work program and satisfactory meeting attendance. The Board of Directors also considers that the Risk Management Committee can achieve good performance and has members with the competencies needed by the Company.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nomination and Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the Board of Directors

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU DIREKSI

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PGN yang mengatur pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga ditetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

POLICY AND NOMINATION PROCESS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND/OR THE BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners Nomination Procedure

The process of appointing prospective members of the Board of Commissioners is carried out in accordance with the statutory regulations that regulate the procedures for appointing members of the Board of Commissioners of SOE, in particular:

1. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. PGN's Articles of Association, which regulate the appointment of members of the Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, which is attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders, and the meeting decisions must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders, taking into account the provisions in the Articles of Association. The GMS resolution regarding the appointment of members of the Board of Commissioners is also determined when the appointment and dismissal come into effect. In the event that the GMS does not determine the appointment as a member of the Board of Commissioners, it will take effect from the closing of the GMS.

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period commencing from the date determined by the GMS appointing them and ending at the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, provided that they may not exceed a period of 5 (five) years, with due observance of the prevailing laws and regulations in the capital market sector, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of office expires.

After term of office expires, a Member of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.

Prosedur Nominasi Direksi

Proses pengangkatan calon anggota Direksi dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris BUMN khususnya:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Anggaran Dasar PGN yang mengatur pengangkatan anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi juga ditetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagai anggota Direksi mulai berlaku sejak penutupan RUPS.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Kebijakan Suksesi/Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Selaras dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana RUPS tersebut harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Pengangkatan anggota Direksi Perseroan oleh RUPS diambil dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Board of Directors Nomination Procedure

The process of appointing prospective members of the Board of Directors is carried out in accordance with the statutory regulations that regulate the procedures for appointing members of the Board of Commissioners of SOE, in particular:

1. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. PGN's Articles of Association, which regulate the appointment of members of the Board of Directors.

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, which is attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders, and the meeting decisions must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders, taking into account the provisions in the Articles of Association. The GMS resolution regarding the appointment of members of the Board of Directors is also determined when the appointment and dismissal come into effect. In the event that the GMS does not determine the appointment as a member of the Board of Directors, it will take effect from the closing of the GMS.

Members of the Board of Directors shall be appointed for a term commencing from the date determined by the GMS appointing them and ending at the closing of the 5th (fifth) annual general meeting of shareholders after the date of their appointment, provided that they may not exceed a period of 5 (five) years, with due observance of the prevailing laws and regulations in the field of capital markets, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Board of Directors at any time before his/her term of office expires.

After term of office expires, a Member of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for one term of office.

Board of Directors and Board of Commissioners Succession Policy

In line with what is stated in the Articles of Association, members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS), where the GMS must be attended, and the decisions must be approved by the Series A Dwiwarna shareholders.

The appointment of members of the Company's Board of Directors by the GMS is taken from candidates submitted by Series A Dwiwarna shareholders.

PGN menerapkan kebijakan suksesi/nominasi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum pada Pasal 140, adalah melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi BUMN serta menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

PGN implements a Board of Directors succession policy referring to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. One of the duties of the Remuneration and Nomination Committee stated in Article 140, is to evaluate the individual KPI proposal of members of the Board of Directors, as well as preparing a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of SOEs, which will become part of the Good Corporate Governance Policy and become a guideline for the Board of Commissioners and GMS in determining the remuneration and nomination of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan, yaitu antara lain jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau sebab lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian termaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

The GMS can dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners who no longer meet the requirements as members of the Board of Directors, namely if the person concerned commits an act that is detrimental to the Company or other grounds deemed appropriate by the GMS. The said dismissal decision is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself/herself, unless the person concerned has no objection to the dismissal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, yang ditindaklanjuti penyelenggaraan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya pengunduran diri tersebut.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners have the right to resign from their positions by notifying the Company, the Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors in writing, which is followed up by holding a GMS within 60 (sixty) days upon receipt of the letter of resignation. Members of the Board of Directors who resign are still held accountable since their appointment until the resignation is approved.

Pada tahun 2024, kebijakan nominasi dijalankan kepada anggota Direksi/Dewan Komisaris baru yakni dengan Dewan Komisaris memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Subholding Gas sesuai aturan untuk disampaikan kepada Holding Pertamina.

In 2024, the nomination policy was implemented for new members of the Board of Directors/Board of Commissioners, namely by the Board of Commissioners conducting a performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Gas Subholding in accordance with the regulations to be submitted to Holding Pertamina.

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROCEDURE AND IMPLEMENTATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Procedures and Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Commissioners

The determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER 3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi Direksi memiliki prosedur penetapan sebagai berikut:

a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian remunerasi bagi Dewan Komisaris.

b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyusun rekomendasi remunerasi bagi Dewan Komisaris.

c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
e. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi Dewan Komisaris kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
f. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atas remunerasi bagi Dewan Komisaris.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2024, PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan diberi wewenang dan kuasa dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris besaran Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun buku 2024.

Procedure for the Determination of Remuneration of the Board of Commissioners

The determination of remuneration for the Board of Commissioners has the following determination procedure:

a. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee conducts a review of remuneration for the Board of Commissioners.
b. The Nomination, Remuneration and GCG Committee prepares remuneration recommendations for the Board of Commissioners.
c. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee submits to the Board of Commissioners remuneration proposal for the Board of Commissioners.
d. The Board of Commissioners discusses the proposals of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.
e. The Board of Commissioners proposes remuneration for the Board of Commissioners to the Minister of SOE as the Series A Dwiwarna Shareholder.
f. The Minister of SOE, as the Series A Dwiwarna Shareholder, evaluates and grants written approval for the remuneration of the Board of Commissioners.

The Annual GMS for Financial Year 2023, which was held on May 30, 2024,PT Pertamina (Persero), as the largest Series B Shareholder, was authorized to determine, after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholder, the amount of Performance Bonus/Incentives/ Special Incentives for the Board of Commissioners based on the performance of the 2023 Financial Year, as well as salaries, benefits, and facilities for the 2024 Financial Year.

Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi memiliki prosedur penetapan sebagai berikut:

a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian remunerasi bagi Direksi.

b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi.

c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan remunerasi bagi anggota Direksi.
d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
e. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
f. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengevaluasi dan memberikan persetujuan tertulis atas remunerasi bagi Direksi.

Procedures and Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

Procedure for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

The determination of remuneration for the Board of Directors has the following determination procedures:

a. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee conducts a review of remuneration for the Board of Directors.
b. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee prepares recommendations for remuneration of members of the Board of Directors.
c. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee submits to the Board of Commissioners remuneration proposals for members of the Board of Directors.
d. The Board of Commissioners discusses the proposals of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee.
e. The Board of Commissioners proposes remuneration for the Board of Directors to the Minister of SOE as the Series A Dwiwarna Shareholder.
f. The Minister of SOE, as the Series A Dwiwarna Shareholder, evaluates and grants written approval for the remuneration of the Board of Directors.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada 30 Mei 2024 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi besaran Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2023, serta gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk Tahun buku 2024.

The AGMS for Financial Year 2023 held on May 30, 2024 granted authority and power to the Board of Commissioners, after obtaining written approval from PT Pertamina (Persero) as the largest Series B Shareholder, and after consulting the Series A Dwiwarna Shareholder, to set the Performance Bonus/Incentives/Special Incentives for the Board of Directors based on the performance of the 2023 Financial Year, as well as salaries, benefits, and facilities for the 2024 Financial Year.

Dasar Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi merujuk kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada BAB VII tentang Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors

The determination of remuneration for the Board of Directors refers to Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises in CHAPTER VII concerning Income of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE.

Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Structure of the Board of Directors and Board of Commissioners

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 30 Mei 2024 dan persetujuan tertulis Pemegang Saham Nomor R-053/C00000/2024-S8 tanggal 27 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023 dan Remunerasi 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk, serta Surat Dewan Komisaris Nomor 63P/SKEL.00/D-KOM2024 tanggal 30 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023, Remunerasi 2024 serta Pelaksanaan Pembayaran Tantiem yang Ditangguhkan Tahun Buku 2022 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners

The provision of remuneration to each member of the Board of Commissioners for the 2024 financial year has been carried out based on the Resolution of the Annual GMS for the 2023 Financial Year dated May 30, 2024 and written approval from Shareholders Number R-053/C00000/2024-S8 dated September 27, 2024 regarding the Determination of Awards for the Annual Performance of the 2023 Financial Year and the 2024 Remuneration for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, as well as the Board of Commissioners Letter Number 63P/SKEL.00/D-KOM2024 dated September 30, 2024, regarding Determination of Awards for the Annual Performance of the 2023 Financial Year and the 2024 Remuneration and Implementation of Deferred Tantiem Payments for the 2022 Financial Year for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Informasi mengenai struktur remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Information regarding the remuneration structure of the Board of Commissioners in 2024 is as follows:

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024
Remuneration Structure of the Board of Commissioners in 2024

Komponen Component	Ketetapan Decisions	
	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioners
Honorarium Honorarium	45% dari gaji Direktur Utama 45% of President Director's salary	90% dari honorarium Komisaris Utama 90% of President Commissioner's honorarium
Tunjangan | Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 x Honorarium 1 x Honorarium	
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium dalam satu tahun Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris per bulan 20% of honorarium of each member of the Board of Commissioners per month	
Fasilitas | Facilities		
Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk *inkind* atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of inkind or compensation for medical costs (at cost)	
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian At cost	
Tantiem Tantiem	45% dari tantiem Direktur Utama 45% of President Director's tantiem	90% dari tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's tantiem

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Prosedur dan Dasar Penetapan Remunerasi Direksi di atas. Informasi mengenai struktur remunerasi Direksi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure of member of the Board of Directors

The provision of remuneration to each member of the Board of Directors has been carried out based on the Procedure and Basis for the Determination of Remuneration of the Board of Directors above. Information regarding the remuneration structure of the Board of Directors in 2024 is as follows:

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2024
Remuneration Structure of member of the Board of Directors in 2024

Jenis Remunerasi/Fasilitas Type of Remuneration/Facility	Direktur Utama President Director	Direktur Lainnya Other Directors
Gaji Salary	100%	85% dari gaji Direktur Utama 85% of President Director's salary
Tunjangan | Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1x gaji 1x salary	
Asuransi Purna Jabatan Retirement Allowance	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun Maximum premium borne by the Company is 25% of one year honorarium	
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 Year 2023 on Organs and Human Resources of SOEs	
Fasilitas | Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan 1 (one) unit along with maintenance costs and operational costs, taking into account the Company's financial condition	
Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) In the form of health insurance or reimbursement of medical costs (at cost)	
Bantuan Hukum Legal Assistance	Sebesar pemakaian (*at cost*) At cost	
Tantiem Tantiem	100%	85% dari Tantiem Direktur Utama 85% of President Director's Tantiem

Besaran Remunerasi Masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Berikut merupakan informasi mengenai jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024.

Amount of Remuneration for Each Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners

The following is information regarding the amount of remuneration received by the Board of Directors and Board of Commissioners during the 2024 financial year.

BESARAN REMUNERASI MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
Amount of Remuneration for Each Member of the Board of Directors and Member of the Board of Commissioners

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Amount of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima Amount Received			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp	Jumlah Orang Number of People	Jumlah dalam juta Rp Amount in million Rp
Remunerasi | Remuneration				
Gaji | Salary	7	10.430	8	22.087
Tunjangan Perumahan | Housing Allowance	-	-	8	2.174
Tantiem | Tantiem	6	40.918	6	49.331
Tunjangan Transportasi | Transportation Allowance	7	2.086	-	-
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura | Facility in the Form of Benefit in Kind				
Perumahan (tidak dapat dimiliki) Housing (unable to be owned)	-	-	-	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki) Transportation (unable to be owned)	-	-	7	4.724
Asuransi Penuh (dapat dimiliki) Full Insurance (can be owned)	7	2.608	8	5.516
Kesehatan (tidak dapat dimiliki) Health (unable to be owned)	7	400	7	1.672
Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 Tahun | Amount of Remuneration Per Person in 1 Year				
Di atas Rp2 miliar | Above Rp 2 billion	6	52.339	8	73.593
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Above Rp1 billion up to Rp2 billion	1	1.096	-	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Above Rp500 million up to Rp1 billion	-	-	-	-
Rp500 juta kebawah | Below Rp500 million	-	-	-	-

Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam perumusan indikator remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan kajian terkait kesesuaian jenis dan tingkat remunerasi berdasarkan pencapaian kinerja, analisis perbandingan dengan jenis dan tingkat remunerasi perusahaan sejenis, serta aturan terkait remunerasi yang berlaku bagi BUMN.

Dalam menentukan remunerasi, pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang berhubungan dengan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) turut diperhitungkan. KPI terkait ESG menjadi bagian dari penilaian keseluruhan pencapaian KPI Subholding Gas dengan bobot total sebesar 29%, serta pemberian *reward & consequences* terhadap pencapaian keseluruhan KPI atas terjadinya insiden dan implementasi GCG.

Indicators for the Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In formulating remuneration indicators for the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee carries out studies regarding the appropriateness of the type and level of remuneration based on performance achievements, comparative analysis with the types and levels of remuneration of similar companies, as well as regulations related to remuneration that apply to SOE.

In determining remuneration, the achievement of Key Performance Indicators (KPI) related to Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects is also taken into account. ESG-related KPIs form part of the overall KPI assessment for Subholding Gas, with a total weighting of 29%. Additionally, rewards and consequences are applied based on the overall KPI achievement, including the occurrence of incidents and the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Pengembalian Tantiem dan Insentif Kinerja (*Clawback*) dan Tantiem Yang Ditangguhkan (*Malus*)

Clawback merupakan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan. BUMN dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (*clawback*) dituangkan dalam suatu perjanjian antara Menteri atau pihak yang diberikan kuasa oleh Menteri dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Kebijakan *clawback* diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut "BUMN") Nomor: PER3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen 3/2023");
2. Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor R-053/ C00000/2024-S8 tanggal 27 September 2024 perihal Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023 dan Remunerasi 2024 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023 ("Surat Dirut Pertamina");
3. Mekanisme pemberian TyD TB 2023 menggunakan skema yang sama dengan TyD TB 2022 sesuai dengan Surat Komisaris Utama PGN No. 63P/SKEL.00/D-KOM/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan Tahun Buku 2023, Remunerasi 2024 serta Pelaksanaan Pembayaran Tantiem Yang Ditangguhkan Tahun Buku 2022 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Surat Komut PGN"); dan
4. Keputusan Direksi Nomor 074200.K/KP.03/PDO/2024 Tanggal 13 November 2024 tentang Pengaturan Teknis Pelaksanaan Tantiem Yang Ditangguhkan Untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023 untuk selanjutnya disebut "Keputusan Direksi Penangguhan Tantiem".

Withdrawal of Tantiem and Performance Incentives (Clawback) and Deferred Tantiem Payments (Malus)

A clawback is a withdrawal of Tantiem and cash Performance Incentives that have been paid. SOE can postpone the payment of part or all of the deferred Tantiem and Performance Incentives (malus) or recoupment cash Tantiem and Performance Incentives that have been paid (clawback) to the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE under certain conditions determined by the Minister.

Approval for the withdrawal of Tantiem and Cash Performance Incentives that have been paid (clawback) is stated in an agreement between the Minister or a party authorized by the Minister and members of the Board of Directors or Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE.

The clawback policy is regulated based on the provisions as stated below:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as "SOE") Number: PER3/ MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises ("Permen 3/2023");
2. Letter from the President Director of PT Pertamina (Persero) Number R-053/C00000/2024-S8 dated September 27, 2024, regarding Determination of Awards for Annual Performance for the 2023 Financial Year and 2024 Remuneration for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk in 2023 ("Letter of the President Director of Pertamina");
3. The mechanism for providing TyD TB 2023 uses the same scheme as TyD TB 2022 in accordance with PGN President Commissioner Letter No. 63P/SKEL.00/D-KOM/2024 dated September 30, 2024, concerning the Determination of Awards for the Annual Performance of the 2023 Financial Year and the 2024 Remuneration and Implementation of Deferred Tantiem Payments for the 2022 Financial Year for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Letter of the President Commissioner of PGN"); and
4. The Board of Directors' Decree Number 074200.K/KP.03/ PDO/2024 dated November 13, 2024, concerning Technical Arrangements for the Implementation of Deferred Tantiem for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 Financial Year, hereinafter referred to as "Board of Directors' Decree on Deferred Tantiem".

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Training Programs to Improve the Competencies of the Board of Commissioners and Board of Directors

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengajukan usulan program pengembangan kompetensi untuk mengikuti *Forum Group Discussion*, seminar, sertifikasi dan *workshop* sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan tugas pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas serta kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
c. Setiap Komisaris dan Direktur yang mengikuti program peningkatan kompetensi seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk mempresentasikan kepada anggota Direksi atau Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); dan
d. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi dan disampaikan ke Dewan Komisaris atau Direksi.

TRAINING POLICY AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

To support the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors related to the duties of supervision and management of the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors can submit proposals for competency improvement programs to participate in Group Discussion Forums, seminars, certification, and workshops as needed to support the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors related to the duties of supervision and management of the Company. Provisions related to the capability and competency improvement program for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

a. The competency improvement program is implemented in order to increase the effectiveness of the work of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
b. Plans to implement competency improvement programs must be included in the Company's Work Plan and Budget;
c. Every Commissioner and Director who takes part in competency improvement programs such as seminars and/or training is asked to present to other members of the Board of Directors or the Board of Commissioners in order to share information and knowledge (knowledge sharing); and
d. The member of the Board of Commissioners or the Board of Directors concerned must make a report regarding the implementation of the Competency Improvement Program and submit it to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program pelatihan, seminar, dan *workshop* antara lain:

TRAINING AND/OR COMPETENCY IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Throughout 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors have participated in training programs, seminars, and workshops, including:

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS
Training of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Bapak Rizal (Komite Investasi Pertamina) Business and Investment Process Symposium by Mr. Rizal (Pertamina Investment Committee)

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		6 - 7 Agustus 2024 August 6-7, 2024	Jakarta	Arbitrase Lanjutan oleh IARBI Advanced Arbitration by IARBI
		28 Agustus 2024 August 28, 2024	Jakarta	Sertifikasi Arbiter oleh IARBI Arbitrator Certification by IARBI
		27 Agustus 2024 August 27, 2024	Jakarta	Forum Manajemen Risiko BUMN dengan tema *Conflict of Interest* SOE Risk Management Forum with the theme Conflict of Interest
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	23 - 25 Januari 2024 January 23-25, 2024	Jakarta	Sertifikasi CACP oleh IKAI CACP certification by IKAI
		2 April 2024 April 2, 2024	Jakarta	*Cyber Security Fundamental for Top Management* oleh Pertamina Cyber Security Fundamentals for Top Management by Pertamina
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	25 April 2024 April 25, 2024	Bandung	Seri Workshop Bersama KPIMR Holding Workshop Series with KPIMR Holding
		2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Bapak Rizal (Komite Investasi Pertamina) Business and Investment Process Symposium by Mr. Rizal (Pertamina Investment Committee)
		4 Juni 2024 June 4, 2024	Jakarta	*Anti-Fraud Risk Management Implementation* oleh IRMAPA Anti-Fraud Risk Management Implementation by IRMAPA
		10 - 11 September 2024 September 10-11, 2024	Jakarta	Pelatihan Dasar Arbitrase oleh Institut Arbiter Indonesia Basic Arbitration Training by the Indonesian Arbitrator Institute
		10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi Risk Management (CRP) oleh IRBA Risk Management Certification (CRP) by IRBA
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
		4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina
Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi Risk Management (CRP) oleh IRBA Risk Management Certification (CRP) by IRBA
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
		4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	*Master Class Series - Risk Beyond International Conference on ERM* oleh IRMAPA Master Class Series - Risk Beyond International Conference on ERM by IRMAPA
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	17 - 18 September 2024 September 17-18, 2024	London	Gartner Reimagine HR Conference oleh Gartner Inc Gartner Reimagine HR Conference by Gartner Inc
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	5 - 7 Maret 2024 March 5-7, 2024	Jakarta	Sertifikasi CACP oleh IKAI CACP certification by IKAI
		1 Agustus 2024 Agustus 1, 2024	Jakarta	Peran Srategis Komite Audit dalam Mewujudkan Ranah Siber yang Aman oleh IKAI The Strategic Role of Audit Committee in Realizing a Secure Cyberspace by IKAI
		10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi Risk Management (CRP) oleh IRBA Risk Management Certification (CRP) by IRBA
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
		21 - 27 Oktober 2024 October 21-27, 2024	Jakarta	Lemhanas Group IV oleh Pertamina Lemhanas Group IV by Pertamina
		4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina
Tony Setia Boedi Hoesodo	Komisaris Independen Independent Commissioner	15 - 19 Juli 2024 July 15-19, 2024	Jakarta	Project Management - PMP Exam Training oleh PT Avenews Project Management - PMP Exam Training by PT Avenews
		10 - 11 September 2024 September 10-11, 2024	Jakarta	Pelatihan Dasar Arbitrase oleh Institut Arbiter Indonesia Basic Arbitration Training by the Indonesian Arbitrator Institute
		10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi Risk Management (CRP) oleh IRBA Risk Management Certification (CRP) by IRBA
		16 - 17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	Bogor	*LNG Fundamental & Trading* oleh S&P LNG Fundamentals & Trading by S&P
		4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	Portfolio Forum 2024 dengan tema "*Orchestrating Winning Portfolio*" oleh Pertamina Portfolio Forum 2024 with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina

PELATIHAN DIREKSI
Training of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Arief Setiawan Handoko	Direktur Utama President Director	2-3 Februari 2024 Februari 2 - 3, 2024	Jakarta	*Onboarding Directorship Program* Angkatan VII - 2024 Onboarding Directorship Program Batch VII - 2024
		16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* oleh S&P Global Commodity Insights Consulting Executive Training: LNG Fundamentals & Trading by S&P Global Commodity Insights Consulting
Fajar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Finance Director	19 Januari 2024 January 19, 2024	Bali	*Workshop Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability* Workshop Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability
		11 - 12 Juli 2024 July 11 - 12, 2024	Batam	*Workshop Gas Insurance Forum* - Sosialisasi Polis Asuransi Aset Operasional PGN SSWJ dan Non-SSWJ Periode 2023-2025 Gas Insurance Forum Workshop - Socialization of PGN SSWJ and Non-SSWJ Operational Asset Insurance Policy Period 2023-2025
		26 September 2024 September 26, 2024	Jakarta	*Professional Recognition Program* ("PRP") Sertifikasi CPMA (*Certified Professional Management Accountant*) Professional Recognition Program ("PRP") Certification CPMA (Certified Professional Management Accountant)
		1 November 2024 November 1, 2024	Jakarta	PERTAMINA - *Sustainability Transcendence Forum* PERTAMINA - Sustainability Transcendence Forum
Ratih Esti Prihatini	Direktur Komersial Commercial Director	16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* oleh S&P Global Commodity Insights Consulting Executive Training: LNG Fundamentals & Trading by S&P Global Commodity Insights Consulting
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Strategy and Busniess Development Director	16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* oleh S&P Global Commodity Insights Consulting Executive Training: LNG Fundamentals & Trading by S&P Global Commodity Insights Consulting
		7 Oktober - 29 November 2024 OCtober 7 - November 29, 2024	Jakarta	Program *Business Essential Batch* III Program Business Essential Batch III

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Lokasi Location	Keterangan Description
Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Tekonologi Infrastructure and Technology Director	25 Februari 2024 February 25, 2024	Yogyakarta	Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik UGM Angkatan XIII Professional Engineer Program Faculty of Engineering UGM Batch XIII
		14 - 27 Agustus 2024 August 14 - 27, 2024	Jakarta	*Executive Course on Strategic Management and Leadership Programme* Executive Course on Strategic Management and Leadership Programme
		16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* oleh S&P Global Commodity Insights Consulting Executive Training: LNG Fundamentals & Trading by S&P Global Commodity Insights Consulting
		21 - 23 November 2024 November 21 - 23, 2024	Singapore	Program *Chief Technology Officer* (CTO) *School* Tahun 2024 Program Chief Technology Officer (CTO) School 2024
Rachmat Hutama	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Human Resource and Business Support Director	29 Juli - 4 Agustus 2024 July 29 - August 4, 2024	Jakarta	Program Pelatihan *Leadership* Pemantapan Nilai - Nilai Kebangsaan Leadership Training Program for Strengthening National Values
		13 September 2024 September 13, 2024	Jakarta	*Workshop* Wakil Menteri BUMN "*SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future*" SOE Deputy Minister Workshop "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"
		September 19 - 20, 2024 September 19 - 20, 2024	Bali	*Employee and Industrial Relations Conference* 2024 oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN Employee and Industrial Relations Conference 2024 by Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN
		3 Oktober 2024 October 3, 2024	Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur South Balikpapan, East Kalimantan	BUMN *Learning Festival* 2024 "*Building Sustainable Learning Culture: Empowering Growth Through Agile Learning*" BUMN Learning Festival 2024 "Building Sustainable Learning Culture : Empowering Growth Through Agile Learning"
		11 - 12 Desember 2024 December 11 - 12, 2024	Jakarta	*The 19th Indonesia "HR Expo" (2024) (Strategy to Manage Human Resources with New Energy, Innovation and Technology Basis)* The 19th Indonesia "HR Expo" (2024) (Strategy to Manage Human Resources with New Energy, Innovation and Technology Basis)
Arief Kurnia Risdianto	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	13 - 14 Agustus 2024 August 13 - 14, 2024	Indonesia Risk & Business Advisory	*Public Training* "Sertifikasi Manajemen Risiko Utama CRP Level executive" Public Training "CRP Executive Level Main Risk Management Certification"
		4 - 7 September 2024 September 4 - 7, 2024	Justitia Training Center	Pelatihan dan Sertifikasi Perancang Kontrak (*Certified Contract Drafter*) Angkatan VLVII) Training and Certification of Contract Drafters (Certified Contract Drafter) Class VLVII
		9 - 12 September 2024 September 4 - 7, 2024	Switzerland	*Leadership Program BUMN - BSE Top Gun Program Batch* II Tahun 2024 Leadership Program BUMN - BSE Top Gun Program Batch II 2024
		21 - 24 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Shenzhen, China	*Global Immersion* - Perspektif dan *Leadership* Global Immersion - Perspectives and Leadership
		16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* oleh S&P Global Commodity Insights Consulting Executive Training: LNG Fundamentals & Trading by S&P Global Commodity Insights Consulting

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU

Policy on Introduction Program for New Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

PGN memiliki dan menjalankan kebijakan pelaksanaan program pengenalan Perusahaan yang ditujukan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru pertama kali diangkat agar dapat segera mengenal proses bisnis Perusahaan, termasuk seluruh permasalahan yang telah, sedang dan akan dihadapi sehingga dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan Perusahaan. Diharapkan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang baru diangkat dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing secara efektif. Tanggung jawab mengadakan program pengenalan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi berada pada Corporate Secretary.

PGN has and implements a policy of a Company induction program implementation aimed at members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who have been appointed for the first time, allowing them to immediately become familiar with the Company's business processes, including all problems that have been, are being, and will be faced, ensuring that they can work optimally for the interests of the Company. It is hoped that newly appointed members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors can understand all aspects related to their roles and responsibilities, allowing them to carry out their respective duties effectively. The responsibility for holding an induction program for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors lies with the Corporate Secretary.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU TAHUN 2024

Pada tahun 2024, program pengenalan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru, yakni Tony Setia Boedi Hoesodo, Rachmat Hutama dan Arief Kurnia Risdianto.

Dalam pelaksanaan program tersebut, PGN melalui Corporate Secretary mempresentasikan berbagai hal terkait GCG dan kinerja Perusahaan yang mencakup: Bisnis & Posisi Bisnis Subholding Gas, Struktur & Proses Bisnis Subholding Gas, *Key Performance Indicator* Tahun 2024, *Overview* RJPP Subholding Gas, Program Strategis Subholding Gas, Profil Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta *Update* Aturan Internal PT PGN Tbk (Anggaran Dasar dan *Board Manual*).

INDUCTION PROGRAM FOR THE NEW BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2024

In 2024, an induction program was provided to new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, namely Tony Setia Boedi Hoesodo, Rachmat Hutama, and Arief Kurnia Risdianto.

In implementing this program, PGN, through the Corporate Secretary, presented various matters related to the GCG and Company's performance, which include: Gas Subholding Business & Position, Gas Subholding Business Structure & Process, Key Performance Indicators for 2024, Gas Subholding RJPP Overview, Gas Subholding Strategic Program, Profile of Subsidiaries and Affiliates, as well as Updates to PT PGN Tbk's Internal Rules (Articles of Association and Board Manual).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk RUPS memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. PGN memiliki dan menerapkan kebijakan dan target yang diperhitungkan dalam menerapkan kebijakan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan dengan senantiasa patuh dan menjalankan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan-peraturan di bawah ini:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menekankan pada keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

The composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners appointed by the GMS is diverse in terms of age, gender, educational background, and experience needed to support the implementation of their duties and responsibilities. PGN has and implements policies and targets that are considered in implementing the diversity policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners. This is done by always complying with and carrying out the requirements for appointing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by paying attention to the regulations below:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
3. Financial Services Authority Regulation no. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which emphasizes expertise, integrity, leadership, experience, good behavior, the ability to carry out legal actions, and high dedication to advancing and developing the Company.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Gender Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background			Pengalaman Experience					
			S1	S2	S3	Oil, & Gas Oil & Gas	Ekonomi Economy	Infrastruktur Infrastructure	Hukum Law	SDM HR	Sosial Politik Politics and Social
Dewan Komisaris | Board of Commissioners											
Amien Sunaryadi	Pria Male	64	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Luky Alfirman	Pria Male	54	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Warih Sadono	Pria Male	61	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
Christian H. Siboro	Pria Male	56	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
Dini Shanti Purwono	Wanita Female	50	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-
Abdullah Aufa Fuad	Pria Male	33	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Tony Setia Boedi Hoesodo[7]	Pria Male	70	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓

Nama Name	Gender Gender	Usia Age	Latar Belakang Pendidikan Educational Background			Pengalaman Experience					
			S1	S2	S3	Oil, & Gas Oil & Gas	Ekonomi Economy	Infrastruktur Infrastructure	Hukum Law	SDM HR	Sosial Politik Politics and Social
Direksi | Board of Directors											
Arief S. Handoko	Pria Male	57	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Harry Budi Sidharta	Pria Male	47	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Pria Male	57	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Rosa Permata Sari	Wanita Female	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Ratih Esti Prihantini	Wanita Female	58	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Rachmat Hutama[1]	Pria Male	51	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
Arief Kurnia Risdianto[1]	Pria Male	46	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-

[1] Diangkat tanggal 30 Mei 2024
Appointed on May 30, 2024

PENGALAMAN DAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PGN saat ini memiliki keahlian yang relevan dengan industri, serta pemahaman mendalam tentang dinamika, tantangan, dan peluang yang spesifik terutama pada sektor transmisi dan distribusi gas bumi. Keahlian ini mencakup pengalaman strategis dalam mengelola Perusahaan, kemampuan membaca tren pasar, serta wawasan terhadap regulasi dan teknologi yang relevan. Seluruh informasi mengenai pengalaman dan kompetensi anggota manajemen dapat dilihat melalui profil masing-masing anggota pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2024, Dewan Komisaris PGN terdiri atas 7 anggota, di mana satu di antaranya adalah perempuan dan 5 anggota (71%) merupakan Komisaris Independen. Sementara itu, Direksi PGN terdiri dari 5 pria dan 2 perempuan. Hal ini sudah sesuai dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang menyatakan terdapat keterwakilan minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai Direksi atau Komisaris yang independen.

EXPERIENCE AND COMPETENCY OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

All members of the PGN Board of Commissioners and Board of Directors currently have industry-relevant expertise, as well as a deep understanding of the specific dynamics, challenges, and opportunities, especially in the natural gas transmission and distribution sector. This expertise includes strategic experience in managing the Company, the ability to read market trends, and insight into relevant regulations and technology. All information regarding the experience and competency of management members can be seen through the profile of each member in the Company Profile Chapter, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

REPRESENTATION OF WOMEN IN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As of 31 December 2024, the Board of Commissioners of PGN comprised seven members, one of whom was a woman, while five members (71%) served as Independent Commissioners. Meanwhile, the Board of Directors consisted of five men and two women. This composition aligns with the standards of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), which stipulates that there must be at least one female representative serving as either an Independent Director or Commissioner.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Affiliated Relationship Among Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Familiy Relationship			Hubungan Keuangan Financial Relationship			Kepemilikan Saham di PGN Share Ownership in PGN
		Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	Direksi BOD	Komisaris BOC	Pemegang Saham Utama Majority Shareholders	
Dewan Komisaris | Board of Commissioners								
Amien Sunaryadi	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Luky Alfirman	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Warih Sadono	Komisaris Commissioner	-	-	-	-	-	✓	-
Christian H. Siboro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Dini Shanti Purwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Abdullah Aufa Fuad	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Tony Setia Boedi Hoesodo[1]	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-
Direksi | Board of Directors								
Arief S. Handoko	Direktur Utama President Director	-	-	-	-	-	-	-
Harry Budi Sidharta	Direktur Infrastruktur dan Teknologi Director of Infrastructure and Technology	-	-	-	-	-	-	-
Fadjar Harianto Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-	-	-	-	-	-
Rosa Permata Sari	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Director of Strategy and Business Development	-	-	-	-	-	-	-
Ratih Esti Prihantini	Direktur Komersial Director of Commerce	-	-	-	-	-	-	-
Rachmat Hutama[1]	Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Director of HR and Business Support	-	-	-	-	-	-	-
Arief Kurnia Risdianto[1]	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	-	-	-	-	-	-	-

[1] Diangkat tanggal 30 Mei 2024
Appointed on May 30, 2024

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, dibantu oleh 4 (empat) Komite. Hal ini selaras dengan Pasal 121 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal 2 Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite-Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi:

a. Komite Audit.
b. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha.
c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

In carrying out its duties and responsibilities to supervise the management of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) Committees. This is in line with Article 121 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, and Article 2 of OJK Regulation no. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee.

Committees under the Board of Commissioners include:

a. Audit Committee.
b. Risk Management and Business Development Monitoring Committee.
c. Nomination, Remuneration, and GCG Committee.
d. Integrated Governance Committee

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

PERIODE 1 JANUARI - 29 FEBRUARI 2024
Period of January 1 - February 29, 2024

Ketua/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Chairperson/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Rini Yulius**	Member
Anggota	**Luki Karunia**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member

PERIODE 1 MARET - 14 MARET 2024
Period of March 1 - March 14, 2024

Ketua/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Chairperson/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Rini Yulius**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member

PERIODE 15 MARET - 31 DESEMBER 2024
Period of March 15 - December 31, 2024

Ketua/Komisaris Independen	**Dini Shanti Purwono**	Chairperson/Independent Commissioner
Anggota/Komisaris Independen	**Abdullah Aufa Fuad**	Member/Independent Commissioner
Anggota	**Rini Yulius**	Member
Anggota	**Fajar Ariwinadi**	Member
Anggota	**Yan Rahadian**	Member

Profil Anggota Komite Audit

Profile of the Audit Committee Members

Dini Shanti Purwono - Ketua Komite Audit I Chairperson of the Audit Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada 29 April 1974. Usia 50 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Jakarta, on April 29, 1974. She is 50 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Master (LL.M) bidang Hukum Keuangan Internasional dari Harvard Law School	Education: Bachelor of Law from Universitas Indonesia and Master (LL.M) in International Finance Law from Harvard Law School
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 3 Mei 2021, serta bergabung dengan Komite Audit sejak 10 Mei 2021	Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the 2021 Financial Year Annual GMS dated May 3, 2021, and joined the Audit Committee on May 10, 2021
Riwayat pekerjaan: sebagai Anggota Majelis Disiplin Profesi (Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan) (2024-sekarang), Staf Khusus Presiden RI tahun 2019 - 2024, Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Investasi (Tim Kerja Presiden) tahun 2019 - 2024, Partner Pendiri firma hukum Purwono & Widyayanti tahun 2018 sampai sekarang, Anggota Komite Investasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019-2021, Staf Khusus Menteri Keuangan 2013-2014, Partner di firma hukum Christian Teo & Partners tahun 2011-2018, Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2012-2013, Partner di firma hukum Roosdiono & Partners tahun 2008-2010, Kepala Divisi Hukum PT Danareksa (Persero) tahun 2005-2008 dan sebagai Senior Associate di firma hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners (kantor koresponden firma hukum internasional Baker & McKenzie) tahun 1997-2005	Work Experience: as Member of the Professional Disciplinary Council (Medical & Health Personnel) (2024-present), Special Staff to the President of the Republic of Indonesia in 2019-2024, Secretary of the Investment Acceleration Task Force (Presidential Working Team) in 2019-2024, Founding Partner of the Purwono & Widyayanti law firm in 2018-present, Member of the Investment Committee of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) in 2019-2021, Special Staff to the Minister of Finance 2013-2014, Partner at the law firm Christian Teo & Partners in 2011-2018, Special Staff to the Head of the Investment Coordinating Board (BKPM) in 2012-2013, Partner at the law firm Roosdiono & Partners in 2008-2010, Head of the Legal Division of PT Danareksa (Persero) in 2005-2008 and as Senior Associate at the law firm Hadiputranto, Hadinoto & Partners (correspondent office of the international law firm Baker & McKenzie) in 1997-2005
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/DKOM/ 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/D-KOM/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris PT PGN Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024	Legal basis of appointment as member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/DKOM/ 2021 dated May 10, 2021, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. The legal basis for the assignment as Chairman of the Audit Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/D-KOM/2023 dated November 30, 2023, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk., and most recently updated with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/ 2024 dated June 6, 2024
Sertifikasi yang dimiliki: Anggota Profesi Penunjang Pasar Modal, Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), *Certification in Audit Committee Practices* (CACP)	Current certifications: Member of Capital Market Supporting Profession, Member of Association of Capital Market Legal Consultants, Member of PERADI (Indonesian Advocates Association), Certification in Audit Committee Practices (CACP)

Abdullah Aufa Fuad - Anggota Komite Audit I Member of the Audit Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri, pada 5 April 1991. Usia 33 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Kediri, on April 5, 1991. He is 33 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Fisika dari Universitas Airlangga; Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquee, France	Education: Bachelor of Physics from Airlangga University; Master Degree in Nanoscale Engineering, Institute National de Science Appliquee, France
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 14 November 2023, serta menjadi Anggota Komite Audit sejak 30 November 2023	Appointed for the first time as Independent Commissioner based on the Resolution of the 2023 Extraordinary GMS dated November 14, 2023, and has been a Member of the Audit Committee since November 30, 2023
Riwayat pekerjaan: Staf Khusus Presiden - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tahun 2019-2023; President Director - PT Kawal Sidang Indonesia tahun 2022 - 2023; Founder & Director - Speaktograph Digital tahun 2019-2021	Work experiences: Special Staff to the President - Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia in 2019-2023; President Director - PT Kawal Sidang Indonesia in 2022-2023; Founder & Director - Speaktograph Digital in 2019-2021
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/D-KOM/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk, diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis of appointment as member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-23/D-KOM/2023 dated November 30, 2023, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, last modified with the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 dated June 6, 2024 concerning the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki: *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Current Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP) and Certified Risk Professional (CRP)

Rini Yulius - Anggota Komite Audit I Member of the Audit Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 5 Mei 1978. Usia 46 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jabodetabek	Indonesian citizen, born in Jakarta on May 5, 1978. She is 46 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Akuntansi Universitas Indonesia dengan konsentrasi Sistem Informasi	Education: Bachelor's degree in accounting from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia and Master's degree in Accounting from the Universitas Indonesia, majoring in Information System
Riwayat pekerjaan: pernah menjabat sebagai Komite Audit PT Pertamina Geothermal Energy dan Komite Investasi PT Pertamina Geothermal Energy. Saat ini sebagai Dosen Tetap pada program Reguler, International Class dan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Senior Consultant pada Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	Work Experience: has served as the Audit Committee of PT Pertamina Geothermal Energy and the Investment Committee of PT Pertamina Geothermal Energy. Currently, she is a Permanent Lecturer in the Regular Program, International Class and Master of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia and Senior Consultant at the Management Institute, Faculty of Economics, Universitas Indonesia
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep- 09/D-KOM/2020 berlaku efektif tanggal 15 September 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-20/D-KOM/2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Rini Yulius Sebagai Anggota Komite Audit	Legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-09/D-KOM/2020 effective September 15, 2020, on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and Decree of the Board of Commissioners No. Kep-20/D-KOM/2023 on Extension of the Term of Service of Ms. Rini Yulius as Member of the Audit Committee
Sertifikasi yang dimiliki: *Certification in Audit Committee Practices* (CACP), *Enterprise Risk Management Certified Professional* (ERMCP), *Chartered Accountant* (CA), *Certified Wealth Manager* (CWM), dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Current Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP), Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP), Chartered Accountant (CA), Certified Wealth Manager (CWM), and Certified Risk Professional (CRP)

Fajar Ariwinadi - Anggota Komite Audit I Member of the Audit Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 16 Juli 1976. Usia 48 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Jakarta, July 16, 1976. He is 48 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Universitas Indonesia	Education: Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia and Master of Management, University of Indonesia
Riwayat pekerjaan: Saat ini bekerja sebagai General Corporate Finance di Bomba Group. Pernah bekerja sebagai GM Finance PT Urban Jakarta Properindo Tbk, Asisten VP PT Semen Indonesia dan AVP Finance PT Pemalang Batang Toll Road	Work experience: Currently, he served as General Corporate Finance at Bomba Group. Previously worked as General Manager of Finance at PT Urban Jakarta Properindo Tbk, Assistant VP at PT Semen Indonesia, and AVP of Finance at PT Pemalang Batang Toll Road
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2022 efektif berlaku tanggal 1 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Saudara Fajar Ariwinadi sebagai Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2022 effective October 1, 2022, on the Appointment of Mr. Fajar Ariwinandi as member of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Sertifikasi yang dimiliki: *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Current Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP) and Certified Risk Professional (CRP)

Yan Rahadian - Anggota Komite Audit I Member of the Audit Committee **(15 Maret 2024 hingga saat ini)** I (March 15, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 29 Juni 1977. Usia 47 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian citizen, born in Bandung on June 29, 1977. He is 47 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Education: Bachelor of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia and Master of Science in Accounting, Postgraduate Program, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia
Riwayat pekerjaan: Saat ini bekerja sebagai Staf Pengajar FEB UI, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Instruktur Pelatihan Accounting for Corporate Lawyer – Djakarta Legal Practice (DLP), Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI). Pernah menjadi Anggota Komite Audit PT. Asuransi Bintang (2013 – 2024)	Work Experience: Currently, he served as FEB UI Teaching Staff, Government Accounting Standards Committee (KSAP), Accounting for Corporate Lawyer Training Instructor – Djakarta Legal Practice (DLP), Financial Accounting Policy Drafting Committee of Bank Indonesia (KAKBI). Previously, he served as member of the Audit Committee of PT. Bintang Insurance (2013 – 2024)
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-02/D-KOM/2024 tanggal 14 Maret 2024 efektif berlaku tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengangkatan Saudara Yan Rahadian sebagai Anggota Komite Non Komisaris Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-02/D-KOM/2024 dated March 14, 2024, effective March 15, 2024, on the Appointment of Mr. Yan Rahadian as a Non-Commissioner Committee Member of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Sertifikasi yang dimiliki: *Chartered Accountant* (CA), *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS), *Certification in Audit Committee Practice* (CACP), *Certificate in Sustainability for Finance* (Cert SF), dan *Certified Risk Profesional* (CRP)	Current Certification: Chartered Accountant (CA), Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), Certification in Audit Committee Practice (CACP), Certificate in Sustainability for Finance (Cert SF), and Certified Risk Profesional (CRP)

R. Luki Karunia - Anggota Komite Audit I Member of the Audit Committee **(1 Januari - 29 Februari 2024)** I (January 1 - February 29 2024)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Demak pada 1 Juni 1971. Usia 53 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian citizen, born in Demak on June 1, 1971. He is 53 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia, Master of Art in Finance, University of Hiroshima, Jepang, dan Doktor Development Planning, IPB	Education: Bachelor of Economics in Accounting, Universitas Indonesia, Master of Art in Finance, University of Hiroshima, Japan, and Doctorate in Development Planning, IPB
Riwayat pekerjaan: pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PGN Tbk tahun 2018-2020 dan sebagai Dosen Politeknik Keuangan Negara-STAN dan Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Saat ini sebagai Dosen Magister Administrasi Public at Poltek STIA - LAN	Work Experience: Previously, he served as a member of the PT PGN Tbk Audit Committee in 2018-2020 and as a Lecturer at the State Finance Polytechnic-STAN and a Lecturer at the Universitas Indonesia Vocational Education Program. Currently, he is a Master of Public Administration Lecturer at Poltek STIA - LAN.
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Audit adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor Kep-02/D-KOM/2022 efektif berlaku tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for the appointment as a member of the Audit Committee is based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Number Kep-02/D-KOM/2022, effective March 1, 2022, on the Appointment of Members of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki: *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dan *Chartered Accountant* (CA), *Associate Wealth Planner* (AWP), dan Register Negara Akuntan (RNA): RNA 12101	Current Certification: Certification in Audit Committee Practices (CACP), Chartered Accountant (CA), Associate Wealth Planner (AWP), and State Register of Accountants (RNA): RNA 12101

Pengalaman Komite Audit

Komite Audit memiliki anggota independen yakni Dini Shanti Purwono, Abdullah Aufa Fuad, Rini Yulius, Fajar Ariwinadi, dan Yan Rahadian. Seluruh anggota independen Komite Audit tersebut memiliki keahlian di bidang keuangan atau industri.

Audit Committee Experience

The Audit Committee has independent members, namely Dini Shanti Purwono, Abdullah Aufa Fuad, Rini Yulius, Fajar Ariwinadi, and Yan Rahadian. All independent members of the Audit Committee have expertise in finance or industry.

Independensi Komite Audit

Komite Audit PGN dipimpin oleh Komisaris Independen. Komite Audit terdiri dari satu orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan tiga orang anggota yang profesional dari luar Perseroan.

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan di Perseroan baik entitas anak maupun perusahaan afiliasi, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Susunan keanggotaan Komite Audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit senantiasa menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pernyataan independensi masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

The PGN Audit Committee is led by an Independent Commissioner. The Audit Committee consists of one member who is a member of the Board of Commissioners and three professional members from outside the Company.

All members of the Audit Committee are independent parties who have no financial, management, share ownership, and/or familial relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company, either subsidiaries or affiliated companies, which could affect their ability to act independently.

The composition of the Audit Committee membership has complied with the provisions of Financial Services Authority Regulation no. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee. In carrying out its duties, the Audit Committee always implements the principles of professionalism and independence, without any intervention from any party. The statement of independence of each member of the Audit Committee is as follows:

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Independence of the Audit Committee

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Rini Yulius	Fajar Ariwinadi	Yan Rahadian
1.	Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner.	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Dini Shanti Purwono	Abdullah Aufa Fuad	Rini Yulius	Fajar Ariwinadi	Yan Rahadian
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/ controlling shareholders or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect business/professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓

Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite Audit mengacu kepada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Anggaran Dasar PGN; dan
- *Board Manual* PGN.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Maret 2004 dan telah diperbarui pada 18 Januari 2024.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab
- Wewenang
- Prosedur Kerja
- Persyaratan Anggota
- Masa Tugas
- Rapat
- Pelaporan
- Evaluasi Kinerja

Legal Basis

The legal basis for the formation of the Audit Committee refers to:

- Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines;
- OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
- OJK Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 concerning Guidelines for Public Company Governance;
- PGN's Articles of Association; and
- PGN Board Manual.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter, which was established for the first time on March 30, 2004, and updated on January 18, 2024.

The scope regulated in the Audit Committee Charter includes, among others:

- Duties and responsibilities
- Authority
- Work procedures
- Member Requirements
- Term of Service
- Meeting
- Reporting
- Performance Evaluation

Periode dan Masa Jabatan

- Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.
- Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Memiliki minimal satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Mematuhi Kode Etik Perusahaan dan menandatangani Pakta Integritas.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada pihak lain.
8. Tidak mempunyai:
   a. Hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
   b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
9. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
10. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Period and Term of Office

- The maximum term of office of the Chairman and Members of the Audit Committee who are members of the Board of Commissioners is the same as the term of office of the relevant Board of Commissioners.
- The term of office of Non-Commissioner Audit Committee Members shall be 3 (three) years at maximum and can be extended once for a period of 2 (two) years.
- Termination of the term of office of the Chairman and Members of the Audit Committee can be carried out at any time based on the results of the resolution of the Board of Commissioners meeting.

Audit Committee Membership Requirements

1. Have high integrity, adequate skills, knowledge, and experience in accordance with their educational background and are able to work together and communicate effectively.
2. Understand financial statements and company business, especially those related to the Company's business activities, audit processes, risk management, and laws and regulations in the Capital Market sector, as well as other related laws and regulations.
3. Have at least one member with an educational background and expertise in accounting and finance.
4. Comply with the Company's Code of Ethics and sign the Integrity Pact.
5. Not a person inside a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, or other party that provides assurance services, non-assurance services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners.
6. Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, or control the Company's activities within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners.
7. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Company. In the event that a member of the Audit Committee acquires shares as a result of a legal incident, then within a period of no later than 6 (six) months after acquiring the shares, they are obliged to transfer them to another party.
8. Does not have:
   a. Affiliated relationships with the company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company; and
   b. Business relationships, both direct and indirect, related to the Company's activities.
9. Does not have personal interests/relationships that could have a negative impact or conflict of interest on the Company.
10. Able to provide sufficient time to complete the task.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit PGN selaras dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 002/11/KOM-1/2004 tanggal 30 Maret 2004 yang dimutakhirkan pada 18 Januari 2024 yaitu memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan antara lain pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Eksternal.
   a. Mengkaji hasil pemeriksaan oleh Auditor Eksternal;
   b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
   c. Memastikan dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan kebutuhan sumber daya dari Unit Kerja Audit Internal.
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
9. Melakukan evaluasi perusahaan pemeringkat yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
10. Melakukan evaluasi terhadap usulan Piagam Audit Internal yang diusulkan Direksi.
11. Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dan dalam rangka penelaahan pelaksanaan peran Audit Internal sebagai lini ketiga dalam manajemen risiko.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

As stated in the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the PGN Audit Committee are in line with those stipulated in the Decree of the President Commissioner of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 002/11/KOM-1/2004 dated March 30, 2004, which was updated on January 18, 2024, to provide opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identify matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, including:

1. Review financial information that will be issued by the Company such as financial statements, projections, long-term plans, work plans, company budgets, management reports, and other reports related to the Company's financial information.
2. Review the Company's compliance with laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's activities.
3. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Public Accountant regarding the services provided.
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a Public Accountant based, among other things, on independence, scope of assignment, and compensation for services.
5. Review the results of the audit by the external auditor.
   a. Reviewing the results of examinations by external auditors;
   b. Evaluating the implementation of audit services for annual historical financial information by the Public Accounting Firm (KAP); and
   c. Ensure and review the effectiveness of the implementation of follow-up on examination results.
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and resource requirements of the Internal Audit Work Unit.
7. Review the implementation of audits by internal auditors and supervise the implementation of follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings.
8. Provide recommendations for improving the management control system and its implementation.
9. Evaluate the rating company that will be appointed by the Board of Commissioners to assess the Company's Health Level.
10. Evaluate the proposal for the Internal Audit Charter proposed by the Board of Directors.
11. Coordinate with the Risk Management and Business Development Monitoring Committee if there are indications/potential risks faced by the Company and in the context of reviewing the implementation of the role of Internal Audit as the third line in risk management.

12. Berkoordinasi dengan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG terkait dengan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan kualitas kinerja Audit Internal.
13. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
14. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan Perusahaan.
15. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
17. Menyusun Program Kerja Tahunan.
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit Perseroan juga memiliki kewajiban untuk melakukan peninjauan terhadap transaksi afiliasi yang material dan menyatakan bahwa transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Dalam hal Auditor Eksternal, Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas Auditor Eksternal, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal, serta memberikan rekomendasi atas pemberhentian Auditor Eksternal.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki kewenangan tertentu dalam mendukung fungsi dan tugas yang ditetapkan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan tugasnya.
2. Berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi keuangan dan akuntansi, Audit Internal, kepatuhan dan fungsi lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta dengan Kantor Akuntan Publik dari Perseroan.
3. Meminta bantuan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

12. Coordinate with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee regarding Corporate Governance, implementation of Environmental Social Responsibility (TJSL), and the quality of Internal Audit performance.
13. Review complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
14. Ensure that there are satisfactory review procedures for financial information issued by the Company.
15. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company.
16. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.
17. Prepare Annual Work Program.
18. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of applicable laws and regulations.

The Company's Audit Committee also has the obligation to review material affiliate transactions and certify that these transactions are in the interests of the company and shareholders. In the case of the External Auditor, the Audit Committee also has duties and responsibilities related to carrying out active supervision of the activities of the external auditor, monitoring and evaluating the implementation of audit services for annual historical financial information by the External Auditor, as well as providing recommendations for the dismissal of the External Auditor.

Authority of the Audit Committee

The Audit Committee has certain authority to support the functions and duties determined by the Board of Commissioners, namely:

1. Full, free, and unlimited access to the Company's documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and other company resources that are necessary and related to their duties.
2. Communicate and coordinate directly with employees, including the Board of Directors and parties who carry out financial and accounting functions, internal audit, compliance, and other functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee, as well as with the Company's Public Accounting Firm.
3. Request assistance from independent parties outside the Audit Committee as needed to assist in carrying out their duties (if necessary).
4. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan Anggota Komite Audit Non Komisaris

Training Programs for Non-Commissioner Audit Committee Members

PELATIHAN KOMITE AUDIT
Audit Committee Training

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Rini Yulius	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi *Certified Risk Professional* (CRP) oleh IRBA Certified Risk Professional (CRP) certification by IRBA
	26 Oktober 2024- 8 Februari 2025 October 26, 2024- February 8, 2025	Jakarta	Sertifikasi *Certified Public Accountant Professional* (CPA) oleh UI Certified Public Accountant Professional (CPA) certification by UI
	21-22 dan 25-26 November 2024 November 21-22 and 25-26, 2024	Jakarta	PSAK Terkini sesuai dengan Konvergensi IFRS oleh PGN The most recent PSAK in accordance with IFRS Convergence by PGN
Fajar Ariwinadi	5-7 Maret 2024 dan 12 Maret 2024 March 5-7 and 12, 2024	Jakarta	Sertifikasi *Certification in Audit Committee Practice* (CACP) oleh IKAI Certification in Audit Committee Practice (CACP) by IKAI
	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Pak Rizal (Komite Investasi Pertamina) Business and Investment Process Symposium by Mr. Rizal (Pertamina Investment Committee)
	24-25 Juni 2024 June 24-25, 2024	Jakarta	*Sustainability Reporting: Standards and Implementation* oleh IAI Sustainability Reporting: Standards and Implementation by IAI
	1 Agustus 2024 August 1, 2024	Jakarta	Seminar Peran Strategis Komite Audit Dalam Mewujudkan Ranah Siber Yang Aman – IKAI Seminar on the Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain - IKAI
	10 Oktober October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi Certified Risk Profesional (CRP) Certified Risk Professional (CRP) Certification
	21-22 November 2024 dan 25-26 Oktober 2024 November 21-22, 2024 and October 25-26, 2024	Jakarta	PSAK Terkini sesuai dengan Konvergensi IFRS The most recent PSAK in accordance with IFRS Convergence
Yan Rahadian	1 Agustus 2024 August 1, 2024	Jakarta	Seminar Peran Strategis Komite Audit Dalam Mewujudkan Ranah Siber Yang Aman - IKAI Seminar on the Strategic Role of the Audit Committee in Realizing a Safe Cyber Domain - IKAI
	28-29 Agustus 2024 August 28-29, 2024	Bali	*Asia Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact* - IIA Asia Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference Purposeful Impact - IIA
	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG - Tantangan di Era Pemerintahan Mendatang dengan tema Meningkatkan Kinerja Korporasi dengan Hati tidak Sesuka Hati oleh Rally Tama Indonesia GCG National Seminar - Challenges in the Future Era of Government with the theme Improving Corporate Performance with Hearts and Not As Willing by Rally Tama Indonesia
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	*Certified Risk Profesional* (CRP) Certified Risk Profesional (CRP)
	14 November 2024 November 14, 2024	Jakarta	*Board Governance Forum* (BGF) - "*Climate reporting in the financial statements*" Board Governance Forum (BGF) - "Climate reporting in the financial statements"
	21-22 November 2024 dan 25-26 Oktober 2024 November 21-22, 2024 and October 25-26, 2024	Jakarta	PSAK Terkini sesuai dengan Konvergensi IFRS The most recent PSAK in accordance with IFRS Convergence

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Penelaahan Rencana Perseroan atas:
   a. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024;
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025; dan
   c. Rencana Jangka Panjang Perusahaan ("RJPP") 2024-2029, suplemen 2034 PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
2. Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas:
   a. Pengadaan Jasa Audit Independen/Eksternal (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Keuangan Pendanaan UMK terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penetapan Prosedur Yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun 2024;
   b. Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2023;
   c. Persetujuan Piagam Audit Internal Tahun 2024;
   d. *Audit Annual Plan* Tahun 2024 Internal Audit; dan
   e. Penunjukan Chief Audit Executive PT PGN Tbk.
3. Melakukan pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik EY terkait:
   a. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2023;
   b. Audit Laporan Keuangan (LK) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023;
   c. Audit Kepatuhan PSA 62 Tahun 2023;
   d. Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat & KPI Direktorat PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak untuk Periode Tahun Buku 2023;
   e. *Review* Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk Semester I Tahun 2024; dan
   f. *Key Audit Matter*/Hal Utama Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023.
4. Melakukan penelaahan atas Laporan Internal Audit, antara lain:
   a. Laporan Triwulanan Internal Audit Triwulan IV Tahun 2023 serta Triwulan I, II dan III Tahun 2024;
   b. 20 (dua puluh) Laporan Hasil Pengawasan yang mencakup Audit, Konsultasi dan *Insight*.

Implementation of Audit Committee Activities

Throughout 2024, the Audit Committee has carried out various activities as follows:

1. Review the Company's Plan for:
   a. Revision of the 2024 Company Work Plan and Budget;
   b. Company Work Plan and Budget 2025; and
   c. Company Long Term Plan ("RJPP") 2024-2029, supplement 2034 PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
2. Discusses and provide recommendations on:
   a. Procurement of Independent/External Audit Services (KAP) for Audit of Consolidated Financial Statements, Audit of PSA 62 Compliance, Financial Audit of MSE Funding related to Social and Environmental Responsibility Programs, and Determination of Agreed Procedures for Reports on the Performance Evaluation Results of Corporate KPIs and Individual KPIs in 2024;
   b. Procurement of Company Rating Services to Assess Company Health Level for Financial Year 2023;
   c. Approval of the Audit Internal Charter in 2024;
   d. Internal Audit 2024 Annual Audit Plan; and
   e. Appointment of Chief Audit Executive PT PGN Tbk.
3. Discuss with EY Public Accounting Firm related to:
   a. Audit of the Consolidated Financial Statement of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for 2023;
   b. Audit of the Financial Statement (LK) of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) related to the Social and Environmental Responsibility (TJSL) of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the 2023 Financial Year;
   c. 2023 PSA 62 Compliance Audit;
   d. Implementation of Agreed Procedures for Report on the Performance Evaluation of Corporate KPI & KPI of Directorate of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and Subsidiaries for the 2023 Financial Year Period;
   e. Review of the Consolidated Financial Statement of PT Perusahaan Gas Negara Tbk Semester I 2024; and
   f. Key Audit Matters of Financial Statement December 31, 2023.
4. Reviewing the Internal Audit Report, including:
   a. Internal Audit Quarterly Report for Quarter IV 2023 and Quarters I, II, and III 2024;
   b. 20 (twenty) Monitoring Result Reports, which include Audit, Consultation, and Insight.

5. Melakuan penelaahan/evaluasi dan memberikan saran/masukan/nasihat atas:
   a. Laporan Keuangan PT PGN Tbk Tidak Diaudit Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2024;
   b. Laporan Kinerja Triwulanan PT PGN Tbk;
   c. Laporan Manajemen Bulanan PT PGN Tbk;
   d. Laporan Tahunan PT PGN Tbk Tahun 2024;
   e. Revisi *Board Manual*;
   f. Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman COI;
   g. Kebijakan *Procurement*, Kebijakan Mutu dan Kepuasan Pelayanan;
   h. Evaluasi Kinerja KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
   i. Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal; dan
   j. Evaluasi Kinerja Internal Audit Division.
6. Melakukan Rapat Koordinasi Komite Audit Holding-Subholding.
7. Melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Kerja Operasional ke SOR 2, dan Area Bekasi, Surabaya dan kunjungan ke Anak Perusahaan ke SAKA dan Pabrik PGASSOL.
8. Menghadiri 18 (delapan belas) BOC Meeting sesuai permintaan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Lainnya dalam Penyusunan dan Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan

Komite Audit Perseroan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan. Beberapa tindakan lain yang dilakukan oleh Komite Audit dalam proses ini meliputi:

1. Keterlibatan langsung dalam perkembangan proses audit laporan keuangan yaitu melalui keikutsertaan Komite Audit sejak *kick off meeting* dan pada setiap *progress meeting* pembahasan audit laporan keuangan 31 Desember 2023, termasuk pembahasan tentang *Key Audit Matters* (KAM);
2. Reviu mandiri dan memberikan masukan/koreksi atas *draft* laporan keuangan, baik *unaudited* maupun *audited*, baik interim maupun akhir tahun, sebelum laporan keuangan diterbitkan; dan
3. Membuka dan melakukan komunikasi langsung dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), jika diperlukan.

Berbagai tindakan yang dilakukan Komite Audit dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan mencerminkan tanggung jawab Komite Audit dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG.

5. Reviews/evaluates and provides suggestions/input/advice on:
   a. PT PGN Tbk unaudited Financial Statements for Quarter I and Quarter III 2024;
   b. PT PGN Tbk Quarterly Performance Report;
   c. PT PGN Tbk Monthly Management Report;
   d. Annual Report of PT PGN Tbk 2024;
   e. Revised Board Manual;
   f. Gratification Control Guidelines and COI Guidelines;
   g. Procurement Policy, Quality Policy, and Service Satisfaction;
   h. Evaluation of KAP Performance on the 2023 Financial Statement;
   i. Evaluation of Internal Control Effectiveness; and
   j. Internal Audit Division Performance Evaluation.
6. Holding Coordination Meetings of the Holding-Subholding Audit Committee.
7. Conducted work visits to Operational Work Areas SOR 2, Bekasi Area, and Surabaya and visits to Subsidiary Companies SAKA and PGASSOL Factory.
8. Attended 18 (eighteen) BOC Meetings as requested by the Board of Commissioners.

Implementation of Other Audit Committee Activities in the Preparation and Publication of Annual Financial Statements

The Company's Audit Committee has an important role in ensuring the quality of the preparation and publication of the Annual Financial Statement. Some other actions taken by the Audit Committee in this process include:

1. Direct involvement in the development of the financial statement audit process, namely through the participation of the Audit Committee since the kick-off meeting and at each progress meeting to discuss the financial report audit on December 31, 2023, including discussion of Key Audit Matters (KAM);
2. Independently review and provide input/corrections on draft financial statements, both unaudited and audited, both interim and year-end, before the financial reports are issued; and
3. Open and communicate directly with the Public Accounting Firm (KAP), if necessary.

The various actions taken by the Audit Committee in preparing and publishing the Company's Annual Financial Statement reflect the Audit Committee's responsibility in ensuring the transparency and accountability of the Company's annual financial statement in accordance with GCG principles.

Kendala/Tantangan Pelaksanaan Kinerja dan Antisipasi yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan kinerja sepanjang tahun buku 2024, Komite Audit tidak mengalami kendala dan atau tantangan yang signfikan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit. Komite Audit juga menegaskan bahwa pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2024 dapat dilaksanakan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Obstacles/Challenges in the Implementation of Performance and Anticipations Made

In implementing its performance throughout the 2024 financial year, the Audit Committee did not experience significant obstacles and/or challenges that could affect the implementation of the duties, responsibilities, and authority of the Audit Committee. The Audit Committee also emphasized that performance implementation throughout 2024 can be carried out independently without any intervention from any party.

Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit dinyatakan bahwa Komite Audit wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali pertemuan dalam rangka menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris dan menjalankan tugas-tugas Komite dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency of Audit Committee Meetings

Based on the Audit Committee Charter, it is stated that the Audit Committee is required to hold meetings at least once every 1 (one) month. During 2024, the Audit Committee held 44 (forty-four) meetings in order to follow up on the disposition of the Board of Commissioners and carry out the Committee's duties with the following attendance rate:

RAPAT KOMITE AUDIT
Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Dini S. Purwono	Ketua Chairperson	44	44	100
Abdullah Aufa Fuad	Anggota Member	44	44	100
Rini Yulius	Anggota Member	44	44	100
Fajar Ariwinadi	Anggota Member	44	44	100
Yan Rahadian	Anggota Member	38	38[*)]	100
Luki Karunia	Anggota Member	6	6[*)]	100

[*)] Sesuai masa tugas
According to the term of office

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	15 Januari 2024 January 15, 2024	Komite Audit dan Internal Audit Division Audit Committee and Internal Audit Division	Usulan *Annual Audit Plan* (AAP) Fungsi Internal Audit PT PGN Tbk Proposal for the Annual Audit Plan (AAP) of the Internal Audit Function of PT PGN Tbk
2.	29 Januari 2024 January 29, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2023 Audit Committee Activity Report for Quarter IV of 2023
3.	12 Februari 2024 February 12, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Kinerja Internal Audit Tahun 2023 dan Laporan Hasil Audit Tahun 2023 2023 Internal Audit Performance Report and 2023 Audit Results Report 2023
4.	13 Februari 2024 February 13, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Pembahasan Pertanyaan KAP EY perihal mengenai independensi, *fraud*, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Discussion of EY Public Accounting Firm's Questions regarding independence, fraud, and compliance with laws and regulations
5.	19 Februari 2024 February 19, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Pembahasan *Progress* Laporan Keuangan PT PGN Tbk per 31 Desember 2023 Discussion on Financial Report Progress of PT PGN Tbk as of December 31, 2023

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
6.	20 Februari 2024 February 20, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Hasil Pengadaan Jasa Pemeringkat Kredit Untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan Periode 2023 Report on the Results of Procurement of Credit Rating Services for Corporate Soundness Levels for the 2023 Period
7.	20 Februari 2024 February 20, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Update Kebijakan CSR CSR Policy Update
8.	20 Februari 2024 February 20, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen PT PGN Tbk Periode Januari 2024 PT PGN Tbk Management Report for the Period of January 2024
9.	20 Maret 2024 March 20, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Revisi *Boad Manual* tentang Penetapan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan Proses Bisnis dan Investasi (Ref. Undangan KNRGCG No.03/UND.01.KNRGCG/2024 tanggal 19 Maret 2024) Revision of the Board Manual on the Determination of Directors and Commissioners of Subsidiaries and Business and Investment Processes (Ref. KNRGCG Invitation No.03/UND.01.KNRGCG/2024 dated March 19, 2024)
10.	26 Maret 2024 March 26, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Presentasi Kinerja PT PGN Tbk per 31 Desember 2023 Presentation on PT PGN Tbk's Performance as of December 31, 2023
11.	3 April 2024 April 3, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Hasil Audit Laporan Keuangan (LK) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun Buku 2023 Audit Results of the Financial Report (LK) of the Micro and Small Business Funding Program related to the Social and Environmental Responsibility (TJSL) of PT Perusahaan Gas Negara Tbk for the 2023 Fiscal Year
12.	4 April 2024 April 4, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Harga Jual dan Biaya Pengelolaan Infrastruktur Gas Bumi Selling Price and Management Cost of Natural Gas Infrastructure
13.	26 April 2024 April 26, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Pending Matter* dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2024 - 2029 Pending Matters and the Company's Long-Term Plan for 2024 - 2029
14.	6 Mei 2024 May 6, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen PT PGN Tbk Periode Maret 2024 PT PGN Tbk Management Report for the Period of March 2024
15.	8 Mei 2024 May 8, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Hasil Audit Kepatuhan PSA 62 PT PGN Tbk Tahun 2023 PSA 62 Compliance Audit Report of PT PGN Tbk for 2023
16.	22 Mei 2024 May 22, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan OJK terkait Evaluasi Kinerja KAP Tahun 2023 OJK Report on Public Accounting Firm Performance Evaluation in 2023
17.	31 Mei 2024 May 31, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Kolegial dan KPI Individu PT PGN Tbk tahun 2023 Report on the Results of the Evaluation of the Collegial KPI and Individual KPI of PT PGN Tbk in 2023
18.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Pelaksanaan *Risk Maturity Assessment* (RMA) Pertamina Group Wide Tahun 2024 (ref Surat CAE Pertamina No.072/J00000/2024-S0) Implementation of Risk Maturity Assessment (RMA) Pertamina Group Wide in 2024 (ref Pertamina CAE Letter No.072/J00000/2024-S0)
19.	21 Juni 2024 June 21, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Pre-Concurrence* untuk Jasa Non-Asuran Pre-Concurrence for Non-Insurance Services
20.	16 - 17 Juli 2024 July 16-17, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Hasil Audit Audit Result Report
21.	19 Juli 2024 July 19, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Juni 2024 Management Report for the Period of June 2024
22.	26-29 Juli 2024 July 26-29, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Board Manual* Board Manual
23.	30 Juli 2024 July 30, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Negara Tbk Quarter II of 2024 Report of PT Perusahaan Negara Tbk

Implementation of Duties and Activities of the Risk

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
24.	5 Agustus 2024 August 5, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Pertanyaan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengenai independensi, *fraud*, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Questions from Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja regarding independence, fraud, and compliance with laws and regulations
25.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Gas Negara Tbk Proposal for the Revision of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
26.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Progress Meeting* Laporan Keuangan 30 Juni 2024 Progress of Financial Report Meeting on June 30, 2024
27.	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 PT Perusahaan Gas Negara Tbk Proposal for the Revision of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
28.	3 September 2024, September 3, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Presentasi Kinerja PT PGN Tbk per 30 Juni 2024 Presentation on PT PGN Tbk Performance as of June 30, 2024
29.	6 September 2024, September 6, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Agustus 2024 Management Report for the Period of August 2024
30.	13 September 2024 September 13, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023 PT PGN Tbk 2023 Annual Report and Sustainability Report of PT PGN Tbk
31.	30 September 2024 September 30, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Permohonan Persetujuan Hasil Reviu Annual Audit Plan Tahun 2024 Request for Approval of the 2024 Annual Audit Plan Review Results
32.	7 Oktober 2024 October 7, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Permohonan Persetujuan atas Penunjukan Chief Audit Executive PT PGN Tbk Request for Approval for the Appointment of Chief Audit Executive of PT PGN Tbk
33.	14 Oktober 2024 October 14, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Update* Kebijakan *Procurement* 2024 Update of the 2024 Procurement Policy
34.	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Penyusunan Audit Annual Plan 2025 Fungsi Internal Audit Preparation of the 2025 Audit Annual Plan for the Internal Audit Function
35.	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Revisi RKAP 2024 dan RKAP 2025 2024 RKAP and 2025 RKAP revision
36.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode September 2024 Management Report for the Period of September 2024
37.	6 November 2024 November 6, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Triwulan III Tahun 2024 Report on the Implementation of Internal Audit Functions for Quarter III of 2024
38.	19 November 2024 November 19, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Pengelolaan Pengaduan Subholding Gas TW III 2024 Complaint Management Report of Gas Subholding for Quarter III of 2024
39.	22 November 2024 November 22, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Laporan Manajemen Periode Oktober 2024 Management Report for the Period of October 2024
40.	2 Desember 2024 December 2, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Usulan Pengadaan Perusahaan Pemeringkat untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Buku 2024 Proposal for Procurement of Rating Company for the Assessment of Company Soundness Level for the 2024 Fiscal Year
41.	5 Desember 2024 December 5, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Usulan Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025-2027 Proposal for Procurement of Public Accounting Firm (PAF) for the 2025-2027 Fiscal Year
42.	18 Desember 2024 December 18, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	*Update* Kebijakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan Tahun 2024 Update of the 2024 Quality and Customer Satisfaction Policy
43.	24 Desember 2024 December 24, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Usulan *Annual Audit Plan* (AAP) Fungsi Internal Audit PT PGN Tbk Tahun 2025 dan Laporan Manajemen Periode November 2024 Proposal for Annual Audit Plan (AAP) of the Internal Audit Function of PT PGN Tbk for 2025 and Management Report for the Period of November 2024

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
44.	27 Desember 2024 December 27, 2024	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Internal Audit Division, Laporan Hasil Pengawasan Internal Audit Division s.d. TW III 2024 dan Laporan Hasil Evaluasi Realisasi Inisiatif Survei Akuisisi dan Pemrosesan Seismik 3D WK Pangkah di PT Saka Energi Indonesia Evaluation on the Effectiveness of Internal Control, Evaluation of the Performance of the Internal Audit Division, Internal Audit Division Supervision Report until Quarter III of 2024, and Evaluation Report on the Realization of the 3D Seismic Acquisition and Processing Survey Initiative for WK Pangkah at PT Saka Energi Indonesia

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT DENGAN AKUNTAN PUBLIK/PIHAK TERKAIT LAINNYA

Agenda of Audit Committee Meeting with Public Accountant/Other Related Parties

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
3.	12 Januari 2024 January 12, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	*Kick off meeting* laporan keuangan 31 Desember 2023 Kick off meeting for the financial report as of December 31, 2023
4.	19 Januari 2024 January 19, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	*Progress meeting* I Laporan Keuangan 31 Desember 2023 Progress meeting I for the Financial Report as of December 31, 2023
3.	26 Januari 2024 January 26, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	*Progress meeting* I Laporan Keuangan 31 Desember 2023 Progress meeting I for the Financial Report as of December 31, 2023
4.	2 Februari 2024 February 2, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	*Progress meeting* I Laporan Keuangan 31 Desember 2023 Progress meeting I for the Financial Report as of December 31, 2023
5.	26 Februari 2024 February 26, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	*Progress meeting* IV Laporan Keuangan 31 Desember 2023 Progress meeting IV for the Financial Report as of December 31, 2023
6.	29 Februari 2024 February 29, 2024	Komite Audit, Direktur Keuangan dan tim, KAP EY Audit Committee, Director of Finance and team, Public Accounting Firm EY	*Key Audit Matter* Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 Key Audit Matter for the Financial Report as of December 31, 2023
7.	21 Juni 2024 June 21, 2024	Komite Audit dan KAP EY Audit Committee and Public Accounting Firm EY	*Pre-Concurrence* untuk Jasa Non-Asurans Pre-Concurrence for Non-Insurance Services
8.	2 Agustus 2024 August 2, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 30 Juni 2024 Review of the Financial Report as of June 30, 2024
9.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 30 Juni 2024 Review of the Financial Report as of June 30, 2024
10.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 30 Juni 2024 Review of the Financial Report as of June 30, 2024

No.	Tanggal Rapat Date of Meeting	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
11.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Interim) Review of the Financial Report as of December 31, 2024 (Interim)
12.	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Interim) Review of the Financial Report as of December 31, 2024 (Interim)
13.	8 November 2024 November 8, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Interim) Review of the Financial Report as of December 31, 2024 (Interim)
14.	22 November 2024 November 22, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Interim) Review of the Financial Report as of December 31, 2024 (Interim)
15.	6 Desember 2024 December 6, 2024	Komite Audit, Dit. Keuangan, Satker, Direktur Keuangan AP, KAP EY Audit Committee, Directorate of Finance, Work Unit, Director of Finance of Subsidiaries, Public Accounting Firm EY	Reviu Laporan Keuangan 31 Desember 2024 (Interim) Review of the Financial Report as of December 31, 2024 (Interim)

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GCG

NOMINATION, REMUNERATION, AND GCG COMMITTEE

Komposisi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Membership Composition of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

PERIODE 1 JANUARI - 5 JUNI 2024
Period of January 1 - June 5, 2024

Ketua/Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Chairman/Independent Commissioner
Anggota	**Vera Sujatna**	Member
Anggota	**Pradono Wicaksono**	Member
Anggota	**Simon L. Himawan**	Member

PERIODE 6 JUNI - 31 DESEMBER 2024
Period of June 6 - December 31, 2024

Ketua/Komisaris Independen	**Christian H. Siboro**	Chairman/Independent Commissioner
Anggota/ Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/ Commissioner
Anggota	**Vera Sujatna**	Member
Anggota	**Pradono Wicaksono**	Member
Anggota	**Simon L. Himawan**	Member

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Profile of Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Christian H. Siboro - Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG I Chairman of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, 3 Desember 1968. Usia 56 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta.	Indonesian Citizen, born in Pontianak, on December 3, 1968. He is 56 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana bidang Geofisika & Meteorologi Institut Teknologi Bandung tahun 1993, Magister Manajemen bidang Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM tahun 1995 dan Doctor of Business Administration - HR and Strategic Management dari Paris School of Business (2022)	Education: Bachelor of Geophysics and Meteorology from Institut Teknologi Bandung in 1993, Master of Management in International Management from PPM School of Management in 1995, and Doctor of Business Administration (DBA), HR and Strategic Management, from Paris School of Business (2022)
Diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Agustus 2019	Appointed for the first time as an Independent Commissioner based on the Resolution of Extraordinary GMS on August 30, 2019
Riwayat pekerjaan: Saat ini sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Politik & Keamanan. Pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Intelijen Negara (2016 – 2024), Penasihat Ahli POLRI Bidang Organisasi dan SDM (2004 – 2016) dan Founder & Director PT Netika Indonesia (2007-2019)	Work experience: Currently serves as Special Staff to the Coordinating Minister for Political & Security Affairs. He served as Special Staff to the Head of the National Intelligence Agency (2016 - 2024), Expert Advisor to the Indonesian National Police Force for Organization and HR (2004 - 2016), and Founder & Director of PT Netika Indonesia (2007 - 2019)
Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-11/DKOM/ 2019 tanggal 16 September 2019 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris yang sudah diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan diperbarui kembali dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-06/D-KOM/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris dan diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris Kep-23/D-KOM/2023 tanggal 30 November 2023, serta terakhir diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024	Legal basis for assignment as Chairman of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. Kep-11/DKOM/ 2019 dated September 16, 2019, on the Division of Duties of the Board of Commissioners, which has been updated through the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2020 dated February 19, 2020, on the Division of Duties of the Board of Commissioners and updated with Decree of the Board of Commissioners No. Kep-06/D-KOM/2020 dated July 20, 2020, on the Division of Duties of the Board of Commissioners and updated by the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021 and updated through the Decree of the Board of Commissioners No.23/D-KOM/2023 dated November 30, 2023, and most recently updated through the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-06/D-KOM/2024 dated June 6, 2024
Sertifikasi yang dimiliki Harvard *Business Analytics Program*	Certification: Harvard Business Analytics Program

Luky Alfirman - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG I Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee **(6 Juni 2024 hingga saat ini)** I (June 6, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 27 Maret 1970. Usia 54 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Bandung on March 27, 1970. He is 54 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta.
Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1994), Master Ekonomi di University of Colorado, USA (2000), dan PhD Ekonomi di University of Colorado, USA (2004)	Education: Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994), Master degree in Economics from University of Colora-do, USA (2000), Ph.D in Economics University of Colorado, USA (2004).
Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan RI, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan RI (2017 – 2022), sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan (2017), Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2015 – 2017), Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kementerian Keuangan (2012 – 2015), dan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2011)	Work experience: Currently serving as Director General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance and Commissioner at Indonesia Deposit Insurance Corporation, and Supervisory Board of the Bung Karno Sports Complex Management Center. He previously served as Director General of Financing and Risk Management at the Ministry of Finance until November (2017 – 2022) and as Expert Staff to the Minister of Finance for State Revenue Policy at the Ministry of Finance (2017), Head of the Center for Policy Analysis and Harmonization, Secretariat General of the Ministry of Finance (2015 – 2017), Head of the Center for Macroeconomic Policy, BKF of the Ministry of Finance (2012 – 2015), and Head of the Center for State Budget Policy (2011).
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for appointment as member of the Nomination, Remuneratio, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 dated June 6, 2024, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Risk Professional (CRP)

Vera Sujatna - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** | (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 24 Mei 1963. Usia 61 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Bandung, May 24, 1963. She is 61 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Graduate Diploma Psikologi Organisasi di Western Australia Institute of Technology dan Sarjana Ilmu Psikologi di Western Australia Institute of Technology	Education: Graduate Diploma in Organizational Psychology at the Western Australia Institute of Technology and Bachelor of Psychological Science at the Western Australia Institute of Technology
Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai HR Director PT REA Kaltim Plantations dan sebagai Independent HR Advisor	Work experience: Currently serves as HR Director at PT REA Kaltim Plantations and as Independent HR Advisor
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 tanggal 15 April 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023	Legal basis of appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 dated April 15, 2020, on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 dated April 15, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023
Sertifikasi yang dimiliki: *Certified Governance Professional* (CGP) 30 September 2021 - 29 September 2024 dan General Manager SDM 26 Juni 2024 - 26 Juni 2027	Certification: Certified Governance Professional (CGP) September 30, 2021 - September 29, 2024, and HR General Manager June 26, 2024 - June 26, 2027

Pradono Wicaksono - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** | (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Februari 1983. Usia 41 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Jakarta, February 12, 1983. He is 41 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Psikologi di Persada Indonesia University, dan Master of Management di PPM School of Management, Jakarta	Education: Bachelor of Psychology at Persada Indonesia University, and Master of Management at PPM School of Management, Jakarta
Riwayat Pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Senior Partner pada Qunie Corporation Japan	Work Experience: Currently serves as Senio. Partner at Qunie Corporation Japan
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 tanggal 15 April 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023	Legal basis for appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2020 dated April 15, 2020, on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-02/D-KOM/2021 dated April 15, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Governance Professional* (CGP) 30 September 2021 – 29 September 2024 dan General Manager SDM 26 Juni 2024 – 26 Juni 2027	Certification: Certified Governance Professional (CGP) September 30, 2021 – September 29, 2024 and HR General Manager June 26, 2024 - June 26, 2027

Simon L. Himawan - Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG | Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** | (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang, 14 Oktober 1956. Usia 68 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jabodetabek	Indonesian Citizen, born in Jombang, October 14, 1965. He is 68 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Sarjana Teknik di Universitas Gajah Mada dan Master International Relation (Economics) di International University Of Japan, Japan	Education: Bachelor's degree in Engineering at Gajah Mada University and Master's degree in International Relation (Economics) at International University of Japan, Japan
Riwayat Pekerjaan: Pernah menjabat sebagai Kepala Unit Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2017-2024), sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM (2016 - 2024), sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (2015 - 2016), Asisten Deputi V Kementrian Daerah Tertinggal (2013 - 2015), sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Daerah Tertinggal (2011 - 2013)	Work Experience: He has served as Head of the Unit for Accelerating the Implementation of Infrastructure Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources (2017-2024), as an Expert to the Minister of Energy and Mineral Resources (2016-2024), as a Principal Expert to the Presidential Staff Office (2015-2016), as Assistant Deputy V of the Ministry of Disadvantaged Regions (2013-2015), as Head of the Planning and Foreign Cooperation Bureau of the Ministry of Disadvantaged Regions (2011-2013)
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2021 tanggal 1 Mei 2021. Diperbarui kembali melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 tanggal 11 April 2023	Legal basis for the appointment as a member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2020 dated April 30, 2020 on the Appointment of Members of the Nomination, Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-03/D-KOM/2021 dated May 1, 2021. Most recently updated through Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-11/D-KOM/2023 dated April 11, 2023
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Governance Professional* (CGP) 30 September 2021 – 29 September 2024 dan General Manager SDM 26 Juni 2024 – 26 Juni 2027	Certification: Certified Governance Professional (CGP) September 30, 2021 – September 29, 2024 and HR General Manager June 26, 2024 - June 26, 2027

Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diketuai Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan 3 (tiga) orang profesional/independen dari luar Perseroan. Dengan demikian, PGN memastikan bahwa keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagian besar (lebih dari 50%) adalah memiliki independensi, yang disertai dengan adanya anggota eksternal yang memenuhi kriteria independen.

Susunan keanggotaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ POJK.04/2014. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pernyataan mengenai independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dapat terlihat melalui tabel berikut:

Independency of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee is chaired by an Independent Commissioner, 1 (one) member who is a member of the Board of Commissioners and 3 (three) professional/ independent people from outside the Company. Therefore, PGN ensures that the majority of members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee (more than 50%) is independent, accompanied by external members who meet independent criteria.

The composition of the membership has complied with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014. The Nomination, Remuneration, and GCG Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party whatsoever that is not in accordance with the Laws and Regulations. The statement regarding the independence of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee can be viewed in the following table:

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG
Independency of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Christian H. Siboro	Vera Adjas	Pradono Wicaksono	Simon L. Himawan
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last 6 months.	✓	✓	✓	✓
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/ controlling shareholders or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect business/professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, berpedoman pada Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN yang ditetapkan pertama kali pada 1 Juni 2018. Kemudian, Piagam ini diperbarui serta ditetapkan kembali pada tanggal 18 Januari 2024.

Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refers to the PGN Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, which was first stipulated on June 1, 2018. Moreover, this Charter was updated and re-stipulated on January 18, 2024.

Periode dan Masa Jabatan

1. Masa tugas Ketua dan anggota Komite NRGCG yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Masa Tugas Anggota Komite NRGCG yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan; dan

Period and Term of Office

1. The term of office of the Chairman and members of the NRGCG Committee who are members of the Board of Commissioners shall be the same as the term of office of the relevant Board of Commissioners at maximum;
2. The term of office of NRGCG Committee members who are not members of the Board of Commissioners shall be 3 (three) years at maximum and can be extended once for a 2 (two) year term of office;

3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite NRGCG dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka,Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/ MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memiliki tugas untuk memberikan tanggapan, rekomendasi, dan saran kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. Fungsi Nominasi:
   - Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya;
   - Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
   - Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
   - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sesuai permintaan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan;
   - Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris;

3. The term of office of the Chairman and Members of the NRGCG Committee can be terminated at any time based on the results of a decision of the Board of Commissioners meeting.

Duties and Responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The implementation of the duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee refers to Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Governance Guidelines for Public Companies, OJK Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 on Governance Guidelines for Public Companies, OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies, and referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Based on the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee has the task of providing responses, recommendations, and suggestions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, including:

a. Nomination Function:
   - Conduct periodical reviews of the Company's Talent Management System as well as monitoring and evaluating its implementation;
   - Evaluate the Talent Classification system and procedures carried out by the Board of Directors;
   - Validate and calibrate the Talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talents), to generate a list of Talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/ Minister (Nominated Talents);
   - Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS according to the request of the Series A Dwiwarna Shareholder of the Company;
   - Evaluate and recommend candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of Subsidiaries to be submitted to the Board of Commissioners;

- Khusus untuk usulan persetujuan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Anak Perusahaan, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan surat dari Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
- Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi terkait;
- Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan atas usulan pengangkatan Kepala Internal Audit Division dan Sekretaris Perusahaan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk masukan atas usulan pengangkatan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perseroan;
- Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi dan masukan Kebijakan serta Program Pengembangan SDM sebagai penyiapan *Talent Pool* di Perseroan; dan
- Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.

b. Fungsi Remunerasi:
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Remunerasi Pengurus Perseroan yang terdiri dari:
  a. Struktur Remunerasi;
  b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  c. Besaran atas Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan *self-assessment* dan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan tentang sistem Remunerasi untuk Pekerja Perseroan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai usulan penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, Pekerja Sekretariat Dewan Komisaris, dan Anggota Komite Dewan Komisaris dari luar Perusahaan; dan
- Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pekerja yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.

- Specifically for the proposed approval of the appointment of the President Director and President Commissioner of Subsidiaries, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee provides recommendations to the Board of Commissioners as material for a letter from the Board of Commissioners to the Series A Dwiwarna Shareholders;
- Evaluate the proposed Individual Key Performance Indicators for relevant members of the Board of Directors;
- Prepare proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners for approval of the proposed appointment of the Chief Audit Executive and the Corporate Secretary;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners for input on the proposed appointment of Officials one level below the Board of Directors of the Company;
- Prepare proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the evaluation and input of policies as well as HR Development Programs as preparation for the Talent Pool in the Company; and
- Evaluate the proposal of the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.

b. Remuneration Function:
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the Company's Management Remuneration, which consists of:
  a. Remuneration Structure;
  b. Policy on Remuneration; and
  c. Amount of Remuneration.
- Assist the Board of Commissioners in conducting self-assessment and performance assessment according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input on the Remuneration system for the Company's Employees;
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the proposed salary for the Secretary to the Board of Commissioners, Secretariat Employees of the Board of Commissioners, and Committee Members of the Board of Commissioners from outside the Company; and
- Evaluate remuneration policies for employees that require approval/response from the Board of Commissioners.

c. Fungsi *GCG*:
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memantau dan memastikan bahwa *GCG* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan terhadap:
     a. Kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan;
     b. Perilaku Etika (*Code of Conduct*);
     c. *Whistleblowing System*;
     d. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
     e. Keterbukaan Informasi ;
     f. Kerahasiaan Informasi; dan
     g. Hal lain yang terkait dengan penerapan GCG.
   - Membantu Dewan Komisaris dalam mengkoordinasikan proses pemilihan asesor GCG oleh Direksi dan proses penilaian penerapan GCG dengan Pihak Penilai (Asesor) agar hasil penilaian sesuai dengan kondisi penerapan GCG di Dewan Komisaris;
   - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai masukan perbaikan penerapan GCG berdasarkan hasil pengawasan dan *Assessment*.

d. Fungsi HSSE:
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan *Human Capital*.

e. Fungsi Teknologi Informasi:
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan dan pemberian pandangan, saran serta nasihat terkait Operasional dan Penerapan Teknologi Informasi dari sisi pengelolaan tata kelola dan *Human Capital.*

f. Fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Berdasarkan PER 1/MBU/03/2023):
   Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan dan pemberian pandangan, saran serta nasehat terkait pelaksanaan Program TJSL.

c. GCG Function:
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners in order to monitor and ensure that GCG has been implemented effectively and sustainably towards:
     a. Policies and management of the Company;
     b. Code of Conduct;
     c. Whistleblowing System;
     d. Conflict of Interest;
     e. Transparency of Information;
     f. Confidentiality of Information; and
     g. Other matters related to GCG implementation.
   - Assist the Board of Commissioners in coordinating the process of selecting GCG assessors by the Board of Directors and the process of evaluating GCG implementation with the Assessors to ensure that the assessment results are in accordance with the conditions of GCG implementation by the Board of Commissioners;
   - Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding input for improving GCG implementation based on the supervision and Assessment results.

d. HSSE Function:
   Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice related to HSSE Operations and Implementation from the perspective of governance and Human Capital management.

e. Information Technology Function:
   Provide recommendations to the Board of Commissioners by reviewing and providing insights, suggestions, and advice regarding the Operations and Application of Information Technology from the perspective of governance and Human Capital management.

f. Social and Environmental Responsibility Function (Based on PER 1/MBU/03/2023):
   Providing recommendations to the Board of Commissioners by exercising oversight and providing views, suggestions and advice related to the implementation of TJSL Program.

Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Selaras dengan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PGN, wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah:

a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
b. Berkomunikasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan SDM, GCG, HSSE dan Teknologi Informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite NRGCG, sesuai tata kelola.

Authority of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

The authority of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee of PGN is in line with the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter, namely:

a. Have full, free, and unrestricted access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other company resources related to their duties.
b. Communicate directly with each party that carries out the HR, GCG, HSSE, and Information Technology management functions related to the duties and responsibilities of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, in accordance with governance

c. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

c. If deemed necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Committee may use independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in the implementation of its duties by using the company's budget.
d. Perform other authority granted by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan Anggota Komite Non Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengikuti program pelatihan, *workshop*, konferensi ataupun seminar terkait dengan bidang Nominasi, Remunerasi dan GCG antara lain sebagai berikut:

Training Program for Non-Commissioner Committee Members

Throughout 2024, Members of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee took part in training programs, workshops, conferences, or seminars related to the field of Nomination, Remuneration, and GCG including the following:

PELATIHAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG
Training for the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Vera Adjas	5-7 Juni 2024 June 5-7, 2024	Jakarta	Pelatihan dan Sertifikasi *General Manager* SDM HR General Manager Training and Certification
	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024	Jakarta	*19th HR Expo 2024 Conference* 19th HR Expo 2024 Conference
Pradono Wicaksono	5-7 Juni 2024 June 5-7, 2024	Jakarta	Pelatihan dan Sertifikasi *General Manager* SDM HR General Manager Training and Certification
	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG GCG National Seminar
	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024	Jakarta	*19th HR Expo 2024 Conference* 19th HR Expo 2024 Conference
Simon L. Himawan	5-7 Juni 2024 June 5-7, 2024	Jakarta	Pelatihan dan Sertifikasi *General Manager* SDM HR General Manager Training and Certification
	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024	Jakarta	*19th HR Expo 2024 Conference* 19th HR Expo 2024 Conference

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara internal dan merekomendasikan usulan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan kepada Pemegang Saham Dwi Warna Seri A;
2. Melakukan evaluasi terhadap Usulan Direksi mengenai pengangkatan Pengurus Anak Perusahaan dan memberikan rekomendasi atas calon-calon tersebut kepada Dewan Komisaris, dan khusus bagi Direktur Utama/ Komisaris Utama selanjutnya digunakan sebagai dasar pengajuan usulan dari Dewan Komisaris kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
3. Memberikan masukan terhadap revisi *Board Manual* sesuai dengan rekomendasi dari Assessor GCG serta kesepakatan antara Direksi dengan Dewan Komisaris terkait kegiatan lain yang perlu diatur dalam *Board Manual*;

Implementation of Duties of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

During 2024, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee has carried out the following duties and responsibilities:

1. Conduct a remuneration study for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, recommending remuneration proposals for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners, which will be used as a basis for submitting proposals to DwiWarna Series A shareholders;
2. Evaluating the Board of Directors' proposals regarding the appointment of Subsidiary Management and providing recommendations on these candidates to the Board of Commissioners, and specifically for the President Director/ President Commissioner, to be used as a basis for submitting proposals from the Board of Commissioners to the President Director of PT Pertamina (Persero);
3. Providing input on revisions to the Board Manual in accordance with recommendations from the GCG Assessor as well as agreements between the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding other activities that need to be regulated in the Board Manual;

4. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Pelaksanaan Program Kerja Triwulanan terkait pengelolaan sumber daya manusia, desain & budaya organisasi termasuk pengembangan digitalisasi dan sistem informasi;
5. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi LCGCG dan Internal Audit untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Laporan dan Implementasi Program GCG & ESG Perusahaan, termasuk melakukan evaluasi Sistem *Whistle Blowing System* (WBS), Keterbukaan Informasi dan penerapannya di Perusahaan;
6. Melaksanakan pertemuan berkala dengan Divisi HSSE untuk menelaah dan memberikan tanggapan terkait Operasional dan Penerapan HSSE dari sisi pengelolaan tata kelola dan *Human Capital;*
7. Melakukan koordinasi, memberikan masukan dan memastikan implementasi proses asesmen GCG Tahun 2024;
8. Melakukan evaluasi atas calon anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris;
9. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas remunerasi anggota Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris, sebagai masukan bagi Dewan Komisaris;
10. Melakukan kunjungan kerja dan *Management Walkthrough* ke wilayah-wilayah kerja Perusahaan;
11. Mengikuti program pengembangan kompetensi; dan
12. Menelaah dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
    a. Program kerja Direktorat SDM dan Penunjang Bisnis, Program Kerja Terkait GCG di tahun 2024 dan rencana 2025 dalam mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan Periode 2024-2029 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2025;
    b. Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan, khususnya terkait Sumber Daya Manusia dan Organisasi, GCG, IT dan HSSE;
    c. Restrukturisasi Organisasi Perusahaan;
    d. Perubahan Piagam Komite Dewan Komisaris;
    e. Rencana Investasi;
    f. Penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris tahun 2024;
    g. Kontrak Manajemen, KPI Korporat & Individual Direksi Tahun 2024 dan Revisi KPI Direksi Tahun 2024;
    h. Corporate Charter Pertamina Group;
    i. Perubahan Kebijakan sesuai cakupan kerja Komite NRGCG;
    j. Penyusunan RKAP Tahun 2025;
    k. Pedoman ABI terkait implementasi Investasi;
    l. Program peningkatan kompetensi teknis untuk mendukung pencapaian target Jargas;

4. Conducting regular meetings with the Directorate of HR and Business Support to review and provide feedback regarding the Quarterly Work Program Report and Implementation related to human resource management, organizational design & culture, including the development of digitalization and information systems;
5. Conducting regular meetings with the LCGCG and Internal Audit Divisions to review and provide feedback regarding the Report and Implementation of the Company's GCG & ESG Program, including evaluating the Whistle Blowing System (WBS), Information Disclosure and its application in the Company;
6. Conducting regular meetings with the HSSE Division to review and provide feedback regarding HSSE Operations and Implementation in terms of governance and Human Capital management;
7. Coordinating and providing input in the implementation of the 2024 GCG Assessment process;
8. Evaluating prospective members of Supporting Committees of the Board of Commissioners;
9. Evaluating and providing input on remuneration of members of the Committees of the Board of Commissioners and Secretary to the Board of Commissioners, as input for the Board of Commissioners;
10. Conduct work visits and Management Walkthroughs to the Company's work areas;
11. Participate in competency development programs; and
12. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners regarding:
    a. Work Program of the Directorate of HR and Business Support, Work Program related to GCG in 2024 and 2025 Plans in supporting the Company's Long-Term Plan for the 2024-2029 Period and the Company's Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2025;
    b. Monthly and Quarterly Management Reports, especially related to Human Resources and Organizations, GCG, IT, and HSSE;
    c. Restructuring of the Company's Organization;
    d. Changes to the Charter of Committees of the Board of Commissioners;
    e. Investment Plan;
    f. Performance assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees of the Board of Commissioners in 2024;
    g. Management Contract, Corporate and Individual KPI of Directors in 2024 and Revised KPI of Directors in 2024;
    h. Corporate Charter of the Pertamina Group;
    i. Policy Changes according to the scope of work of the NRGCG Committee;
    j. Preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget.
    k. ABI Guidelines in regard to Investment implementation;
    l. Technical competency improvement program to support achievement of Gas Network targets;

m. Permohonan persetujuan Struktur Organisasi Direksi -1;
n. Pembayaran tantiem yang ditangguhkan;
o. Kebijakan pengelolaan AP & SJV di SHG;
p. Kerjasama pengembangan bisnis;
q. Evaluasi kepatuhan terhadap UU dan perjanjian dengan pihak ketiga;
r. Laporan Tahunan PT PGN Tbk tahun 2024;
s. Model Proses Bisnis Subholding Gas;
t. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PGN Tbk Tahun Buku 2023;
u. Revisi Laporan Tahunan PT PGN Tbk Tahun 2023 *Unaudited*;
v. Surat Keterangan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
w. Usulan Penambahan Anggota Komite Audit;
x. Usulan Corporate Secretary PT PGN Tbk;
y. Permohonan Arahan dan Persetujuan atas *Draft Key Performance Indicator* (”KPI”) Direksi Individual Direktorat Komersial, Direktorat Keuangan dan Direktorat Manajemen Risiko Tahun 2024 Pasca RUPST PGN 30 Mei 2024;
z. Permohonan Persetujuan Terkait *Code of Conduct* (CoC), Benturan Kepentingan Dan Pedoman Gratifikasi;
aa. Penyampaian Usulan Revisi RKAP Tahun 2024 dan Usulan Buku RKAP Tahun 2025 PT PGN Tbk;
bb. Permohonan Arahan dan Persetujuan atas *Draft Key Performance Indicator* Dit. SPB, Dit. Komersial dan Dit. Infrastruktur dan Teknologi Tahun 2024 Revisi Pasca Perubahan Struktur Organisasi;
cc. Permohonan Arahan atas *Draft Key Performance Indicator* (“KPI”) Kolegial Direksi Subholding Gas Tahun 2025; dan
dd. Pemberlakuan GCG *Assessment* dengan Parameter selain BUMN dan Laporan Pelaksanaan GCG *Assessment* Parameter POJK dan PUGKI.

Frekuensi Pertemuan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Berdasarkan Piagam yang dimiliki, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2024, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah mengadakan 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

m. Request for approval of the Board of Directors' Organizational Structure -1;
n. Deferred bonus payments;
o. Subsidiary & SJV management policy in Gas Subholding;
p. Business development cooperation guidelines;
q. Evaluation of compliance with laws and agreements with third parties;
r. 2024 Annual Report of PT PGN Tbk;
s. Gas Subholding Business Process Model;
t. Financial Report of Funding Programs for Micro and Small Businesses related to Social and Environmental Responsibility (CSR) of PT PGN Tbk for Fiscal Year 2023;
u. Revision to the Unaudited 2023 Annual Report of PT PGN Tbk;
v. Certificate of Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk;
w. Proposal for the Addition of Members of the Audit Committee;
x. Proposal of the Corporate Secretary of PT PGN Tbk;
y. Request for Directives and Approval of the Draft Key Performance Indicators (“KPI”) of the Individual Directors of the Commercial Directorate, Finance Directorate, and Risk Management Directorate for 2024 Post the AGMS of PGN on May 30, 2024;
z. Request for Approval Regarding Code of Conduct (CoC), Conflict of Interest and Gratification Guidelines;
aa. Submission of the Proposed Revision of the 2024 Company Work Plan and Budget and the Proposed 2025 Company Work Plan and Budget Book of PT PGN Tbk;
bb. Request for Directive and Approval of the Draft Key Performance Indicator of the SPB Directorate, Commercial Directorate, and Infrastructure and Technology Directorate for 2024 Revision Post Change in the Organizational Structure;
cc. Request for Directives on the Draft of the Collegial Key Performance Indicator (“KPI”) of the Board of Directors of the Gas Subholding in 2025; and
dd. Implementation of GCG Assessment using other than SOE Parameters and GCG Assessment Implementation Report using POJK and PUGKI Parameters.

Meeting Frequency of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee

Based on its Charter, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee is required to hold meetings at least once every 1 (one) month. During 2024, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee held 13 (thirteen) meetings with the following attendance rate:

RAPAT KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG
Nomination, Remuneration, and GCG Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Christian H. Siboro	Ketua Chairman	13	13	100
Luky Alfirman	Anggota Member	7	7	100
Vera Sujatna	Anggota Member	13	13	100
Simon L. Himawan	Anggota Member	13	13	100
Pradono Wicaksono	Anggota Member	13	13	100

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko serta rencana dan pengembangan usaha Perseroan.

RISK MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT MONITORING COMMITTEE

The establishment of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is in line with Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises,

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee was established with the aim of assisting the Board of Commissioners in carrying out regular monitoring and providing recommendations on Risk Management policies and implementation as well as the business plans and development.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Membership Composition of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

PERIODE 1 JANUARI - 14 MARET 2024
Period of January 1 - March 14, 2024

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member

PERIODE 15 MARET - 5 JUNI 2024
Period of March 15 - June 5, 2024

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Luky Alfirman**	Member/Commissioner
Anggota	**Mugiono**	Member
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member
Anggota	**Yudo Anggoro**	Member

PERIODE 6 JUNI - 31 JULI 2024
Period of June 6 - July 31, 2024

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Tony S.B. Hoesodo**	Member/Commissioner
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member
Anggota	**Yudo Anggoro**	Member
Anggota	**Mugiono**	Member

PERIODE 1 AGUSTUS - 31 DESEMBER 2024
Period of August 1 - December 31, 2024

Ketua/Komisaris	**Warih Sadono**	Chairman/Commissioner
Anggota/Komisaris	**Tony S.B. Hoesodo**	Member/Commissioner
Anggota	**Yovita L. Handini**	Member
Anggota	**Yudo Anggoro**	Member
Anggota	**Moch Hatta Filsafawan**	Member

Profil Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Profile of Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Warih Sadono
Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2024 hingga saat ini) | (January 1, 2024 to present)

Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, 1 Maret 1963. Usia 61 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Tegal, March 1, 1963. He is 61 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1987), Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung (2005), serta Doktor di Universitas Airlangga Surabaya (2018)	Education: Bachelor of Laws from Atma Jaya University Yogyakarta (1987), Master of Laws at Padjajaran University Bandung (2005), and Doctorate at Airlangga University Surabaya (2018)
Riwayat pekerjaan: Pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Litigasi Kementerian BUMN (2023 – 2024), Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Kementerian BUMN (2020-2023). Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2019), Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI (2017-2019), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (2016-2017), Deputi Penindakan KPK (2012-2015)	Work experience: He served as Expert in the Litigation Division of the Ministry of SOEs (2023 - 2024), Expert Staff for Strategic Policy Implementation at the Ministry of SOE (2020-2023), Head of DKI Jakarta's Provincial Attorney Services (2019), Director of Investigation at the Attorney General Office (2017-2019), Head of West Kalimantan's Provincial Attorney Services (2016-2017), Deputy for Enforcement at the Corruption Eradication Commission (KPK) (2012-2015)
Dasar hukum penugasan sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris	Legal basis of appointment as Chairman of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-05/D-KOM/2021 dated May 10, 2021, and Kep-06/D-KOM/2024 dated June 6, 2024, on Division of Duties of the Board of Commissioners.
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Risk Professional (CRP)

Luky Alfirman
Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha
Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee
(1 Januari 2024 - 6 Juni 2024) | (January 1, 2024 - June 6, 2024)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 27 Maret 1970. Usia 54 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Bandung on March 27, 1970. He is 54 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1994), Master Ekonomi di University of Colorado, USA (2000), dan PhD Ekonomi di University of Colorado, USA (2004)	Education: Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994), Master degree in Economics from University of Colorado, USA (2000), Ph.D in Economics University of Colorado, USA (2004)
Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan RI, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan RI (2017 – 2022), sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan (2017), Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2015 – 2017), Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kementerian Keuangan (2012 – 2015), dan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2011)	Work experience: Currently serving as Director General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Commissioner at Indonesia Deposit Insurance Corporation. and Supervisory Board of Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno Central Management He previously served as Director General of Financing and Risk Management at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2017 - 2022), as Expert Staff to the Minister of Finance for State Revenue Policy at the Ministry of Finance (2017). Head of Center for Policy Analysis and Harmonization at the Secretariat General of the Ministry of Finance (2015-2017), Head of the Center for Macroeconomic Policy, BKF Ministry of Finance (2012 – 2015), and Head of the Center for State Revenue and Expenditure Budget Policy (2011)
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-01/D-KOM/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-01/D-KOM/2021 dated March 15, 2021, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Risk Professional (CRP)

Tony S. B. Hoesodo **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha** Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **(6 Juni 2024 hingga saat ini)** I (June 6, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Tulungagung pada 6 Maret 1954. Usia 70 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Bandung	Indonesian Citizen, born in Tulungagung on March 6, 1954. He is 70 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Bandung
Pendidikan: Sarjana Administrasi Negara STIA Bandung, S2 MSDM di American World University, dan S3 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada	Education: Bachelor's Degree in State Administration from STIA Bandung, Master's Degree in HR Management from American World University, and Doctorate in National Resiliency from Uni-versitas Gadjah Mada
Riwayat pekerjaan: pernah menjabat sebagai Direktur Land Defense System PT. TMI, Direktur Program Pendidikan Lemhannas RI, Direktur Materi Pendidikan Lemhannas RI, Pusdikif TNI AD, Danrem 151 Binaiya/ Maluku	Work experience: previously served as Director of Land Defense System of PT. TMI, Director of Education Program at Lemhannas RI, Director of Education Material at Lemhannas RI, Pusdikif TNI AD (Army), 151 Binaiya/ Maluku Military Resort Commander
Dasar hukum penugasan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for the assignment as a member of the Risk Manage-ment and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-06/D-KOM/2024 dated June 6, 2024, on the Division of Duties of the Board of Commissioners of PT Perus-ahaan Gas Negara Tbk
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Risk Professional (CRP)

Yovita L. Handini **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha** Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **(1 Januari 2024 hingga saat ini)** I (January 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 31 Mei 1972. Usia 52 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jabodetabek	Indonesian Citizen, born in Jakarta on May 31, 1972. She is 52 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Bachelor of Science in Construction Management dari Colorado State University pada tahun 1996 dan Master of Science in Construction Management dari University of Washington pada tahun 1999	Education: Bachelor of Science in Construction Management from Colorado State University in 1996 and Master of Science in Construction Management from University of Washington in 1999
Riwayat pekerjaan: saat ini bekerja sebagai Dosen di STIE Bhakti Pembangunan, pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT PGN Tbk (2015-2018), konsultan di CDR Consultant (2001-2003) dan Engineer di Sherman Homes (1999-2001)	Work experience: currently serving as Lecturer at STIE Bhakti Pembangunan, previously served as member of the Audit Committee of PGN (2015-2018), consultant at CDR Consultant (2001-2003), Engineer at Sherman Homes (1999-2001)
Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-24/D-KOM/2023 efektif berlaku tanggal 15 Desember 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Yovita L. Handini sebagai Anggota Komite Non Komisaris Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk	The legal basis for the appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-24/D-KOM/2023, effective from 15 December 2023, regarding the extension of Ms. Yovita L. Handini's tenure as a Non-Commissioner Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki *Qualified Risk Management Officer* (QRMO), *Project Management Certification* (PMC) dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Certifications: Qualified Risk Management Officer (QRMO), Project Management Certification (PMC) and Certified Risk Professional (CRP)

Mugiono **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha** Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **(1 Januari 2024 - 31 Juli 2024)** I (January 1, 2024 - July 31, 2024)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Purwodadi pada 17 Februari 1963. Usia 61 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian Citizen, born in Purwodadi on February 17, 1963. He is 61 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
Pendidikan: Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro tahun 1988 dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara tahun 2005	Education: Bachelor's Degree in Chemical Engineering from the University of Diponegoro in 1988 and Master of Management from the University of Sumatra Utara in 2005
Riwayat pekerjaan: Pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PGN LNG Indonesia pada 2015-2018, Komisaris PT Nusantara Regas pada 2015-2017, Koordinator Divisi Komersial dan Infrastruktur di PGN pada 2011-2014	Work experience: Previously served as President Director of PT PGN LNG Indonesia in 2015 – 2018, Commissioner at PT Nusantara Regas in 2015 – 2017, Coordinator of Commercial and Infrastructure Division at PGN in 2011 – 2014.
Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-18/D-KOM/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Perubahan dan Perbaikan Kep-06/D-KOM/2019 tentang Pengangkatan Saudara Mugiono sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Kep-07/ D-KOM/2021 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudara Mugiono sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk	The legal basis for the appointment as Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is the Decree of the Board of Commissioners No. Kep-18/D-KOM/2023, dated 21 July 2023, concerning Amendments and Improvements to Kep-06/D-KOM/2019 on the Appointment of Mr. Mugiono as a Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, and Kep-07/D-KOM/2021 on the Extension of Mr. Mugiono's Term of Duty in the same capacity.
Sertifikasi yang dimiliki Qualified Risk Management Officer (QRMO) dan Certified Risk Professional (CRP)	Certifications: Qualified Risk Management Officer (QRMO) and Certified Risk Professional (CRP)

Yudo Anggoro **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha** Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **(15 Maret 2024 hingga saat ini)** I (March 15, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Karanganyar pada 5 Mei 1981. Usia 43 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jabodetabek.	Indonesian Citizen, born in Karanganyar on May 5, 1981. He is 43 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Sarjana Industrial Engineering dari ITB pada tahun 2004, Master of Science Management Science dari ITB pada tahun 2009, dan PhD Public Policy, Economic Competitiveness di University of North Carolina (2015)	Education: Bachelor's degree in Industrial Engineering from ITB in 2004, and Master of Science Management Science from ITB in 2009, and PhD in Public Policy, Economic Competitiveness in University of North Caroline (2015)
Riwayat pekerjaan: Saat ini menjabat sebagai Director, Center for Policy and Public Management for School of Business and Management di ITB, pernah menjabat sebagai Komite Audit dan GCG di PT. Transportasi Jakarta (2019-2020), Graduate Assistant & Instructor di University of North Carolina (2010-2015), Service Relationship Manager di Citibank (2004 – 2007)	Work experience: Currently serving as Director, Center for Policy and Public Managemenyt for School of Business and Management at ITB, previously served as member of the Audit and GCG Commit-tee at PT. Transportasi Jakarta (2019-2020), Graduate Assistant & Instructor at University of North Carolina (2010-2015), Service Re-lationship Manager at Citibank (2004-2007).
Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-03/D-KOM/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Board of Commissioners Decree No. Kep-03/D-KOM/2024 dated March 14, 2024, on the Appointment of members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perus-ahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki *Certified Business Analysis Professional*, *Certified in Financial Risk Management*, dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Business Analysis Professional, Certified in Financial Risk Management, and Certified Risk Professional (CRP)

Moch Hatta Filsafawan **Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha** Member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee **(1 Agustus hingga saat ini)** I (August 1, 2024 to present)	
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 25 Mei 1964. Usia 60 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jabodetabek	Indonesian Citizen, born in Jakarta on May 25, 1964. He is 60 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Greater Jakarta
Pendidikan: Sarjana Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1990, dan Master Energy Management and Conservation from Faculty of Technology dari Middlesex University pada tahun 1997	Education: Bachelor's degree in Management from Universitas Pad-jadjaran in 1990, and Master'd degree in Energy Management and Conservation from Faculty of Technology from Middlesex Univer-sity in 1997
Riwayat pekerjaan: Pernah menjabat sebagai Vice President under Deputy of Finance and Monetization (2019), Vice President, Exploration PSC Audit Division (2017 – 2019), Vice President, Business Strategy, Risk Management and Taxation Division (2017), dan Vice President, Risk Management and Taxation Division (2015 – 2017) di SKKMigas	Work experience: Previously served as Vice President under Deputy of Finance and Monetization (2019), Vice President, Exploration PSC Audit Division (2017 – 2019), Vice President, Business Strategy, Risk Management and Taxation Division (2017), and Vice President, Risk Management and Taxation Division (2015 – 2017) di SKKMigas.
Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha melalui Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-09/D-KOM/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pengangkatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Legal basis for appointment as member of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee is through Board of Commissioners Decree No. Kep-09/D-KOM/2024 dated July 23, 2024, on the Appointment of members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perus-ahaan Gas Negara Tbk.
Sertifikasi yang dimiliki Certified Risk Professional (CRP)	Certification: Certified Risk Professional (CRP)

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Independency of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The Risk Management and Business Development Monitoring Committee always carries out its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without interference from any party.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA

Independency of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Tony S.B Hoesodo	Mugiono	Yovita L. Handini	Yudo Anggoro	Moch Hatta Filsafawan
1.	Tidak bekerja atau memiliki wewenang untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 bulan terakhir. Not working nor has the authority to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the last 6 months.	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Pernyataan Independensi Independency Statement	Tony S.B Hoesodo	Mugiono	Yovita L. Handini	Yudo Anggoro	Moch Hatta Filsafawan
2.	Tidak secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham di Perseroan. Has no direct or indirect shares in the Company.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan atau pemegang saham utama/pengendali atau salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Has no affiliated relationships with the Company or majority/ controlling shareholders or one of the members of the Board of Commissioners or Board of Directors.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tidak memiliki hubungan kerja/profesional langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Has no direct or indirect business/professional relationships with the Company.	✓	✓	✓	✓	✓

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berpedoman pada Piagam Komite yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 15 Agustus 2012, dan perubahan terakhir kali pada tanggal 1 Februari 2024.

Masa jabatan

1. Masa tugas Ketua dan anggota Komite PMRPU yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Masa Tugas Anggota Komite PMRPU yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan; dan
3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite PMRPU dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan serta memberikan rekomendasi terkait:
   a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
   b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
   c. Kebijakan Investasi (pengembangan/ekspansi) dan Divestasi, termasuk fungsi konsultansi untuk investasi di atas nilai tertentu;
   d. Laporan Monitoring realisasi rencana bisnis perusahaan dan/atau investasi;
   e. Pembentukan Anak Perusahaan;

Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refers to the Committee Charter, which was stipulated by the Decree of the Board of Commissioners on August 15, 2012, and most recently amended on February 1, 2024.

Term of Office

1. The term of office of the Chairman and members of the PMRPU Committee who are members of the Board of Commissioners shall be the same as the term of office of the relevant Board of Commissioners at maximum;
2. The term of office of members of the PMRPU Committee who are not members of the Board of Commissioners shall be 3 (three) years at maximum and can be extended once for a 2 (two) year term of office; and
3. The term of office of the Chairman and Members of the PMRPU Committee can be terminated at any time based on the results of the decision of the Board of Commissioners meeting.

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Duties and Responsibilities of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee as stated in the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter, which was stipulated by Decree of the Board of Commissioners on February 1, 2024, are as follows:

1. Conducting evaluation and/or monitoring and providing relevant recommendations regarding:
   a. Long-Term Plan of the Company;
   b. Company's Work Plan and Budget;
   c. Investment (development/expansion) and Divestment Policies, including consulting functions for investments exceeding certain values;
   d. Monitoring Report on the realization of the company's business and/or investment plan;
   e. Establishment of Subsidiaries;

f. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Penurunan Kinerja Perusahaan;
g. Manajemen Risiko Korporasi dan implementasi mitigasinya, utamanya melakukan pemantauan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko mencakup Sistem Manajemen Risiko, Potensi Risiko Strategis dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan yang dilakukan oleh fungsi kerja terkait;
h. Optimalisasi aset; dan
i. Menumbuhkan budaya sadar risiko dalam perusahaan.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Komite Audit apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Menyusun Program Kerja Tahunan; serta
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut:

a. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, Perwira Subholding Gas, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
b. Berkoordinasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi *Risk Management* serta *Business Investment* terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite PMRPU, dan sesuai tata kelola.
c. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak independen, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan.
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Program Pelatihan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Sepanjang tahun 2024, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, antara lain:

f. Impact of Business Environment on the Decline of Company Performance;
g. Corporate Risk Management and its mitigation implementation, mainly by monitoring the policies and implementation of risk management, including the Risk Management System, Potential Strategic Risks, and Corporate Risk Management Policies carried out by the relevant work functions;
h. Asset optimization; and
i. Fostering a risk-awareness culture within the company.

2. The Risk Management and Business Development Monitoring Committee collaborates with the Audit Committee if there are indications/potential risks faced by the Company;
3. Drafting the Annual Work Program; as well as
4. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.

Authority of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The following is the authority of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee:

a. Have full, free, and unrestricted access to records, Gas Subholding Employees, funds, assets, and other company resources related to the performance of its duties.
b. Directly coordinate with any party performing Risk Management and Business Investment functions related to the duties and responsibilities of the Committee and in accordance with governance.
c. If deemed necessary, upon written approval of the Board of Commissioners, the Committee may utilize independent parties, experts, or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, the costs of which shall be borne by the Company.
d. Perform other duties as assigned by the Board of Commissioners.

Training Programs for Members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Throughout 2024, members of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee have participated in several trainings, among others:

PELATIHAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA

Training of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Mugiono	29 Februari, 1 & 7 Maret, 25 April 2024 Februari 29, March 1 & 7, April 25, 2024	Surabaya & Bandung	Seri *Workshop* bersama KPIMR Holding Workshop Series with the KPIMR of the Holding
	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Pak Rizal (Komite PIMR Pertamina) Business Process and Investment Discussion by Mr. Rizal (PIMR Committee of Pertamina)
	28 Mei & 4 Juni 2024 May 28 & June 4, 2024	Jakarta	*Anti Fraud Risk Management Framework* oleh IRMAPA Anti Fraud Risk Management Framework by IRMAPA
	15 - 19 Juli 2024 July 15 - 19, 2024	Jakarta	*Project Management* - PMP *Exam Training* Project Management - PMP Exam Training
	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG GCG National Seminar
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi CRP oleh IRBA CRP Certification by IRBA
Yovita Lasti Handini	29 Februari, 1 & 7 Maret, 25 April 2024 Februari 29, March 1 & 7, April 25, 2024	Surabaya & Bandung	Seri *Workshop* bersama KPIMR Holding Workshop Series with the KPIMR of the Holding
	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Pak Rizal (Komite PIMR Pertamina) Business Process and Investment Discussion by Mr. Rizal (PIMR Committee of Pertamina)
	28 Mei & 4 Juni 2024 May 28 & June 4, 2024	Jakarta	*Anti Fraud Risk Management Framework* oleh IRMAPA Anti Fraud Risk Management Framework by IRMAPA
	15 - 19 Juli 2024 July 15 - 19, 2024	Jakarta	*Project Management* - PMP *Exam Training* Project Management - PMP Exam Training
	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG GCG National Seminar
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi CRP oleh IRBA CRP Certification by IRBA
Yudo Anggoro	25 April 2024 April 25, 2024	Surabaya & Bandung	Seri *Workshop* bersama KPIMR Holding Workshop Series with the KPIMR of the Holding
	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Pak Rizal (Komite PIMR Pertamina) Business Process and Investment Discussion by Mr. Rizal (PIMR Committee of Pertamina)
	28 Mei & 4 Juni 2024 May 28 & June 4, 2024	Jakarta	*Anti Fraud Risk Management Framework* oleh IRMAPA Anti Fraud Risk Management Framework by IRMAPA
	15 - 19 Juli 2024 July 15 - 19, 2024	Jakarta	*Project Management* - PMP *Exam Training* Project Management - PMP Exam Training
	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG GCG National Seminar
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi CRP oleh IRBA CRP Certification by IRBA
Moch Hatta Filsafawan	25 September 2024 September 25, 2024	Jakarta	Seminar Nasional GCG GCG National Seminar
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi CRP oleh IRBA CRP Certification by IRBA
	4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	*Master Class Series - Risk Beyond International Conference on* ERM Master Class Series - Risk Beyond International Conference on ERM

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha, sebagai berikut:

1. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait laporan progres investasi dan laporan *top risk* termasuk mitigasinya melalui hasil *review* terhadap Laporan Manajemen bulanan Perusahaan;
2. Menelaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan persetujuan investasi termasuk *risk analysis, risk treatment, dan risk mitigation* (RAT) terhadap:
   a. Inisiatif Investasi UPB-12 *Workover Well Deepening Testing* CD Ngimbang dan Ngimbang Clastic Reservoir
   b. Pre-FID atas Keikutsertaan Pertagas dalam Tender Pengembangan dan Pengoperasian Infrastruktur LNG untuk Gas Power Plant di Papua Utara PT PLN Energi Primer Indonesia
   c. Inisiatif Investasi Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Ketapang dengan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran Eksplorasi Hikmah dan Perkasa
   d. Inisatif Investasi Pengeboran Sumur West Pangkah WPA-06
   e. Investasi *Upgrading* Stasiun Panaran Sebagai Perkuatan Kehandalan Jaringan Batam
   f. Inisiatif Investasi Pembangunan Pipa BBM Cikampek - Plumpang
   g. Inisiatif Investasi Kegiatan *Drilling Explore* Ronggolawe-3
   h. Perubahan Nilai Total Investasi Proyek Pipa Minyak Rokan
   i. Investasi (FID) atas Usulan Perpanjangan Kontrak Kerja Sama WK Muara Bakau dengan Komitmen Kerja Pasti Pengeboran 1 (Satu) Sumur Eksplorasi, 3D Seismik dan Studi G&G serta Bonus Tandatangan
   j. Investasi Pengeboran Sumur JNE-07 *Sidetrack* Wilayah Kerja Muara Bakau
   k. Investasi Pengeboran Sumur UPB-18 Wilayah Kerja Pangkah
   l. Investasi Pengeboran Sumur SID-05 Wilayah Kerja Pangkah
   m. Investasi Pemasangan Infrastruktur Pipa Gas *Customer Attachment* Rumah Tangga GasKita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR III
   n. Investasi Revitalisasi Stasiun Gas PGN di Muara Karang
   o. Investasi *Restaging Compressor* C505J dan C306 PT Pertamina Gas SKG Cilamaya Di Operation West Java Area
   p. Investasi N2 Injection LNG Tank 1, 3, 5

Management and Business Development Monitoring Committee

During 2024, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee has carried out activities in order to carry out the Committee's duties as follows:

1. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners regarding investment progress reports and top risk reports, including its mitigation through review results of the Company's monthly Management Report;
2. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding investment approval pro-posals, including risk analysis, risk treatment, and risk mitigation (RAT) on:
   a. UPB-12 Workover Well Deepening Test-ing Investment Initiative at CD Ngimbang and Ngimbang Clastic Reser-voir
   b. Pre-FID for Pertagas' Participation in the Bid for the Development and Operation of LNG Infrastructure for the Gas Power Plant in North Papua PT PLN Energi Primer Indonesia
   c. Investment Initiative for the Extension of Ketapang Work Area Cooperation Con-tract with Hikmah and Perkasa Definite Work Commitment Exploration Drilling
   d. West Pangkah WPA-06 Well Drilling In-vestment Initiative
   e. Investment in Upgrading Panaran Station to Strengthen Batam Network Reliability
   f. Investment Initiative for the Cikampek – Plumpang Fuel Pipeline Development
   g. Investment Initiative for the Ronggo-lawe-3 Drilling Explore Activities
   h. Changes in Total Investment Value of Rokan Oil Pipeline Project
   i. Investment (FID) for the Proposed Extension of the Muara Bakau Work Area Cooperation Contract with a Definite Work Commitment for Drilling 1 (One) Exploration Well, 3D Seis-mic and G&G Study, as well as Signature Bo-nus
   j. Investment for JNE-07 Sidetrack Well Drilling in Muara Bakau Working Area
   k. Investment for UPB-18 Well Drilling at Pangkah Working Area
   l. Investment for SID-05 Well Drilling at Pangkah Working Area
   m. Investment in Gas Pipe Infrastructure Installation for Customer Attachment Household GasKita PGN Sayang Ibu ("PSI") SOR III
   n. Investment for PGN Gas Station Revital-ization in Muara Karang
   o. Restaging Compressor C505J and C306 Investment of PT Pertamina Gas SKG Cilamaya in West Java Area Operation
   p. Investment for N2 Injection at LNG Tank 1, 3, 5

q. Rencana Kerja dan Anggaran Investasi PGN *Stand Alone*
r. Investasi (FID) atas Pengeboran Sumur UPA-17 Wilayah Kerja Pangkah
s. Investasi (FID) atas Usulan Pengeboran Sumur Bukit Tua BTJTB-T8 (NZ2) Wilayah Kerja ("WK") Ketapang
t. Investasi Pengeboran Sumur UPB-18 Wilayah Kerja Pangkah
u. Persetujuan Investasi (FID) atas Usulan Pembangunan Gedung Kantor PGN MIRRA
v. Investasi (FID) Pembangunan Infrastruktur Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping
w. Persetujuan Investasi (FID) Pembangunan Pipa Distribusi Tegal-Cilacap untuk Penyaluran kepada RU IV Cilacap
x. Investasi (FID) Proyek Pembangunan Fasilitas Penyimpanan LNG untuk Terminal LNG Jawa Timur (*Flat Bottom*)

3. Menelaah dan memberikan rekomendasi terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2029 ("RJPP") Suplemen 2034, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2024 Revisi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025;
4. Menelaah dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait:
   a. Penyiapan FID Tahun 2024 Threshold Persetujuan Dewan Komisaris PGN
   b. KPI Direksi Kolegial dan Individual PT PGN Tbk Tahun 2024
   c. Penetapan Besaran Batasan Kewenangan Keputusan Investasi Direksi dan Dewan Komisaris PGN Tahun 2024
   d. Revisi *Board Manual*
   e. Revisi RAT *Top Risk* 2024
   f. Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan
   g. Kebijakan Manajemen Risiko
   h. Revisi Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi
   i. Pedoman Perilaku Etika
5. Melakukan kunjungan kerja ke Kantor SAKA, Kantor SOR 2, Pabrik Pipa PGASSOL, kantor PGN Area Bekasi, Jargas Bekasi, dan Kantor PGN Area Jawa Timur (SOR III, SAKA WK Pangkah, Teluk Lamong)

Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha adalah minimal 12 kali. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha mengadakan pertemuan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali, dengan rincian frekuensi kehadiran per masing-masing anggota sebagai berikut:

q. PGN Stand Alone Work Plan and In-vestment Budget
r. Investment (FID) for Drilling of UPA-17 Well in Pangkah Working Area
s. Investment (FID) for the Proposed Drill-ing of the Bukit Tua Well BTJTB-T8 (NZ2) Ketapang Working Area
t. Investment in UPB-18 Well Drilling at Pangkah Working Area
u. Investment (FID) Approval for the Pro-posed Construction of the PGN MIRRA Office
v. Investment (FID) for the Development of West Natuna Transportation System Pipeline Infrastructure to Pemping Island
w. Investment (FID) Approval for the Con-struction of the Tegal-Cilacap Distribu-tion Pipeline for Distribution to RU IV Ci-lacap
x. Investment (FID) for the LNG Storage Facility Development Project for East Java LNG Terminal (Flat Bottom)

3. Reviewing and providing recommendations regarding the Company's Long-Term Plan ("RJPP") for 2024-2029 Supplement 2034, the Revised 2024 Company Work Plan and Budget and the 2025 Company Work Plan and Budget;
4. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners regarding:
   a. Preparation of the 2024 FID Threshold Approval of PGN Board of Commissioners
   b. Collegial and Individual KPI of the Board of Directors of PT PGN Tbk in 2024
   c. Determination of the Amount of Limits on Investment Decision Authority of the Board of Directors and Board of Commissioners of PGN in 2024
   d. Board Manual Revision
   e. Revision of the 2024 RAT Top Risk
   f. Monthly and Quarterly management Reports
   g. Risk Management Policy
   h. Revision of the Conflicts of Interest and Gratification Control Guidelines
   i. Code of Conduct
5. Conducting work visits to the SAKA Office, SOR 2 Office, PGASSOL Pipe Factory, PGN Bekasi Area Office, Bekasi Gas Network, and PGN East Java Area Office (SOR III, SAKA WK Pangkah, Teluk Lamong)

Meeting Frequency of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee

The policy for implementing Risk Management and Business Development Monitoring Committee meetings based on the Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter is a minimum of 12 times. During 2024, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee held 47 (forty-seven) meetings, with the following details of attendance per each member:

RAPAT KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN PENGEMBANGAN USAHA
Risk Management and Business Development Montoring Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Warih Sadono	Ketua Chairman	47	47	100
Luky Alfirman	Anggota Member	13	13	100
Tony S.B Hoesodo	Anggota Member	33	33	100
Mugiono	Anggota Member	18	18	100
Yovita L. Handini	Anggota Member	47	47	100
Yudo Anggoro	Anggota Member	41	41	100
Moch Hatta Filsafawan	Anggota Member	29	29	100

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The establishment of the Integrated Governance Committee is in line with Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises,

The Integrated Governance Committee was established with the aim of assisting the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Composition of the Integrated Governance Committee

PERIODE 28 MARET – 31 DESEMBER 2024
Period of March 28 - December 31, 2024

No.	Jabatan Position	Jabatan dalam Komite Position in the Committee
1.	Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk* President Commissioner of PT Perusahaan Gas Negara Tbk*	Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently Member
2.	Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG PT Perusahaan Gas Negara Tbk* Chairperson of the Nomination Remuneration and GCG Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk*	Wakil Ketua merangkap Anggota Vice Chairman concurrently Member
3.	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk* Chairperson of the Risk Management and Business Development Monitoring Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk*	Anggota Member
4.	Ketua Komite Audit PT Perusahaan Gas Negara Tbk* Chairperson of the Audit Committee of PT Perusahaan Gas Negara Tbk*	Anggota Member
5.	Direktur Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara Tbk Director of Risk Management of PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Sekretaris (tidak merangkap Anggota) Secretary (Not concurrently a Member)
6.	Komisaris Utama PT Pertamina Gas* President Commissioner of PT Pertamina Gas*	Anggota Member
7.	Komisaris Utama PT PGAS Solution* President Commissioner of PT PGAS Solution*	Anggota Member
8.	Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi* Nusantara President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara*	Anggota Member
9.	Komisaris Utama PT Saka Energi Indonesia* President Commissioner of PT Saka Energi Indonesia*	Anggota Member

No.	Jabatan Position	Jabatan dalam Komite Position in the Committee
10.	Komisaris Utama PT Permata Graha Nusantara* President Commissioner of PT Permata Graha Nusantara*	Anggota Member
11.	Komisaris Utama PT Transportasi Gas Indonesia* President Commissioner of PT Transportasi Gas Indonesia*	Anggota Member
12.	Komisaris Utama PT Gagas Energi Indonesia* President Commissioner of PT Gagas Energi Indonesia*	Anggota Member
13.	Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia* President Commissioner of PT PGN LNG Indonesia*	Anggota Member
14.	Komisaris Utama PT Pertagas Niaga* President Commissioner of PT Pertagas Niaga*	Anggota Member
15.	Komisaris Utama PT Perta Daya Gas* President Commissioner of PT Perta Daya Gas*	Anggota Member
16.	Komisaris Utama PT Perta Samtan Gas* President Commissioner of PT Perta Samtan Gas *	Anggota Member
17.	Komisaris Utama PT Perta Arun Gas* President Commissioner of PT Perta Arun Gas*	Anggota Member
18.	Komisaris Utama PT Solusi Energi Nusantara* President Commissioner of PT Solusi Energi Nusantara*	Anggota Member
19.	Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa* President Commissioner of PT Permata Karya Jasa*	Anggota Member
20.	Komisaris Utama PT Widar Mandripa Nusantara* President Commissioner of PT Widar Mandripa Nusantara*	Anggota Member
21.	Komisaris Utama PT Telemedia Dinamika Sarana* President Commissioner of PT Telemedia Dinamika Sarana*	Anggota Member

Catatan | Notes * :
- Jabatan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat Ex Officio
  Positions on the Integrated Governance Committee are Ex Officio
- Apabila Komisaris Utama Anak Perusahaan atau Cucu Perusahaan tidak ada, maka diwakili oleh Komisaris Independen atau Komisaris dengan masa tugas yang paling lama
  If the President Commissioner of a Subsidiary or Indirect Subsidiary is not available, he/she will be represented by an Independent Commissioner or Commissioner with the longest term of office.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha berpedoman pada Piagam Komite yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 28 Maret 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PGN yang ditetapkan oleh Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 28 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan TKT, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait penyempurnaan kebijakan TKT tersebut, untuk kemudian dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretaris Komite TKT.

Independency of the Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee always carries out its duties and responsibilities in a professional and independent manner, without interference from any party.

Integrated Governance Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management and Business Development Monitoring Committee refers to the Committee Charter, which was stipulated by the Decree of the Board of Commissioners on March 28, 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

The duties and responsibilities of the Integrated Governance Committee as stated in the PGN Risk Management and Business Development Monitoring Committee Charter stipulated by the Decree of the Board of Commissioners' on March 28, 2024 are as follows:

1. Evaluate the IG policy and implementation, at least through an assessment on the adequacy of internal control and the implementation of the compliance function in an integrated manner, and provide recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding the improvement of the IG policy, to then be monitored for implementation by the Secretary of the IG Committee.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas keselarasan dan penerapan kebijakan TKT di Perseroan/Anak Perusahaan/ Cucu Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola, berupa upaya mitigasi dan solusi, atas isu strategis di Perseroan/ Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi yang terintegrasi.
4. Memfasilitasi *sharing* dan *benchmarking* dari entitas-entitas di dalam lingkup perusahaan para anggota Komite TKT, untuk mengakselerasi efektivitas penerapan tata kelola terintegrasi melalui *lesson learned* dari entitas yang dimaksud.
5. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite TKT.
6. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. Komite TKT berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas, atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite TKT dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan fungsi manajemen Perseroan (antara lain Audit Internal, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan aspek fungsi Operasional Usaha) dan entitas PGN Group serta Komite di bawah Dewan Komisaris Perseroan dan entitas PGN Group terkait dengan bidang tugas Komite TKT.
c. Apabila diperlukan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Komite TKT dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perseroan.

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite sejalan dengan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

a. *Top Risk Project* 2024 PGN *Group*
b. Hasil Audit Anak Perusahaan
c. *Board Manual* Anak Perusahaan
d. Kebijakan Manajemen Risiko SH Gas
e. Mitigasi Risiko RJPP serta *Top Risk* 2025 (*Operational* & *Project Risk*) SH Gas

2. Monitoring and evaluating the align-ment and implementation of IG policies in the Company/ Subsidiaries/ Indirect Subsidiaries.
3. Providing recommendations to im-prove governance, in the form of miti-gation efforts and solutions, for strate-gic issues in the Company/ Subsidiar-ies / Indirect Subsidiaries based on the integrated reviews and evaluation re-sults.
4. Facilitate sharing and benchmarking of entities within the scope of the IG Committee member companies, to accelerate the effectiveness of the implementation of integrated governance through lessons learned from the entities in question.
5. Preparing the IG Committee's Annual Work Plan and Budget.
6. Carry out other authorities, duties and responsibilities related to its functions.

Authority of the Integrated Governance Committee

The following is the Authority of the Integrated Governance Committee:

a. The IG Committee has the authority to have full, free, and unrestricted ac-cess to records on information relating to the implementation of duties in ac-cordance with applicable provisions.
b. In carrying out the abovemen-tioned authority, the IG Com-mittee can collaborate and co-ordinate with the Company's management functions (includ-ing Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Re-sources and aspects of the Business Operations function) and PGN Group entities as well as Committees under the Company's Board of Commis-sioners and PGN Group enti-ties related to the IG Commit-tee's duties.
c. If necessary, with the approval of the Board of Commissioners of the Company, the IG Com-mittee may use experts or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, funded by the Company.

Implementation of Duties and Activities of the Integrated Governance Committee

During 2024, the Integrated Governance Committee has carried out activities to carry out the Committee's duties in line with the Integrated Governance Committee Charter, as follows:

a. PGN Group Top Risk Project 2024
b. Audit results of Subsidiaries
c. Board Manual of Subsidiaries
d. Risk Management Policy of Gas Subholding
e. Risk Mitigation of the Company's Long-Term Plan and Top Risk 2025 (Operational & Project Risk) of Gas Subholding

Frekuensi Pertemuan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah minimal 4 kali. Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan pertemuan sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian frekuensi kehadiran per masing-masing anggota sebagai berikut:

Meeting Frequency of the Integrated Governance Committee

The policy for implementing Integrated Governance Committee meetings based on the Integrated Governance Committee Charter is a minimum of 4 times. During 2024, the Integrated Governance Committee held 5 (five) meetings, with the following details of attendance per each member:

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
Integrated Governance Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Amien Sunaryadi	Ketua Chairman	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Christian H. Siboro	Wakil Ketua Sekaligus Anggota Vice Chairman concurrently Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Warih Sadono	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Dini Shanti Purwono	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Pertamina Gas* President Commissioner of PT Pertamina Gas*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT PGAS Solution* President Commissioner of PT PGAS Solution*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara* President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Saka Energi Indonesia* President Commissioner of PT Saka Energi Indonesia*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Permata Graha Nusantara* President Commissioner of PT Permata Graha Nusantara*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Transportasi Gas Indonesia* President Commissioner of PT Transportasi Gas Indonesia*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Gagas Energi Indonesia* President Commissioner of PT Gagas Energi Indonesia*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT PGN LNG Indonesia* President Commissioner of PT PGN LNG Indonesia*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Pertagas Niaga* President Commissioner of PT Pertagas Niaga*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Daya Gas* President Commissioner of PT Perta Daya Gas*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Samtan Gas* President Commissioner of PT Perta Samtan Gas*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Perta Arun Gas* President Commissioner of PT Perta Arun Gas*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Sesuai Masa Tugas Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase (%) Percentage (%)
Komisaris Utama PT Solusi Energi Nusantara* President Commissioner of PT Solusi Energi Nusantara*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Permata Karya Jasa* President Commissioner of PT Permata Karya Jasa*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Widar Mandripa Nusantara* President Commissioner of PT Widar Mandripa Nusantara *	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%
Komisaris Utama PT Telemedia Dinamika Sarana* President Commissioner of PT Telemedia Dinamika Sarana*	Anggota Member	5 Rapat 5 Meetings	5 Rapat 5 Meetings	100%

Catatan | Notes * :
- Jabatan pada Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat Ex Officio
  Positions on the Integrated Governance Committee are Ex Officio
- Apabila Komisaris Utama Anak Perusahaan atau Cucu Perusahaan tidak ada, maka diwakili oleh Komisaris Independen atau Komisaris dengan masa tugas yang paling lama
  If the President Commissioner of a Subsidiary or Indirect Subsidiary is not available, he/she will be represented by an Independent Commissioner or Commissioner with the longest term of office.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Secretary

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Secretary Profile

Strasfiatri Auliana	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Sydney, Australia, pada 28 November 1961. Usia 63 tahun per 31 Desember 2024. Berdomisili di Jakarta	Indonesian citizen, born in Sydney, Australia, on November 28, 1961. Age: 63 years old as of December31, 2024. Domiciled in Jakarta
	Riwayat pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1986	Educational background in Electrical Engineering from the Bandung Institute of Technology in 1986
	Riwayat pekerjaan: Direktur Corporate Services dan Regional Koperasi Karyawan Indosat (2014-2018); Group Head Corporate Secretary PT Indosat Tbk (2006–2014) dan Group Head Risk Management PT Indosat Tbk (2009–2012)	Work experience: Director of Corporate Services and Regional of Indosat Employee Cooperatives (2014–2018); Group Head Corporate Secretary of PT Indosat Tbk (2006–2014); and Group Head Risk Management of PT Indosat Tbk (2009–2012)
	Perusahaan mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep- 14/D-KOM/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pengangkatan Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sesuai Keputusan Dewan Komisaris tersebut, masa tugas Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Masa tugas Saudari Strasfiatri Auliana diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-25/D-KOM/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Perpanjangan Masa Tugas Saudari Strasfiatri Auliana sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025	The Company appointed the Secretary to the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep- 14/D-KOM/2020 dated December 23, 2020, on the appointment of Ms. Strasfiatri Auliana as Secretary to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. In accordance with the Board of Commissioners' decree, Strasfiatri Auliana's term of office as Secretary to the Company's Board of Commissioners is 3 (three) years, starting from January 1, 2021, to December 31, 2023. Strasfiatri Auliana's term of office was extended through the Decree of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. Kep-25/D-KOM/2023 dated December 28, 2023, on the extension of the term of office of Strasfiatri Auliana as Secretary to the Board of Commissioners of PT Perusahaan Gas Negara Tbk from January 1, 2024, to December 31, 2025
	Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN, memiliki integritas yang baik, memahami fungsi kesekretariatan, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik	Based on the Minister of SOEs (MSOEs) Regulation No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Board of Supervisors for State-Owned Enterprises, the Secretary to the Board of Commissioners must understand the SOEs management, supervision, and development system, have good integrity, understand secretarial functions, and able to communicate and coordinate well
	Sertifikasi yang dimiliki *Certified Audit Committee Practices* (CACP) dan *Certified Risk Professional* (CRP)	Certification: Certified Audit Committee Practices (CACP). and Certified Risk Professional (CRP)

PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan selaras dengan kebutuhan Perusahaan, antara lain:

TRAINING PROGRAMS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

Throughout 2024, the Secretary to the Board of Commissioners has participated in various education and training programs in order to increase competence and knowledge in line with the Company's needs, including:

PELATIHAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Training of the Board of Commissioners Secretary

Nama Name	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Tempat Place	Keterangan Description
Strasfiatri Auliana	2 April 2024 April 2, 2024	Jakarta	*Cyber Security Fundamental for Top Management* oleh IKAI Cyber Security Fundamental for Top Management by IKAI
	2 Mei 2024 May 2, 2024	Jakarta	Sarasehan Proses Bisnis dan Investasi oleh Pak Rizal (Komite PIMR Pertamina) Business Process and Investment Discussion by Mr. Rizal (PIMR Committee of Pertamina)
	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Jakarta	Sertifikasi CRP oleh IRBA CRP Certification by IRBA
	16 - 17 Oktober 2024 October 16 - 17, 2024	Bogor	LNG Fundamental & Trading oleh S&P LNG Fundamental & Trading by S&P
	4 Desember 2024 December 4, 2024	Jakarta	Portofolio Forum 2024 dengan tema "Orchestrating Winning Portfolio" oleh Pertamina 2024 Portfolio Forum with the theme "Orchestrating Winning Portfolio" by Pertamina

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS 2024

Selama tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan beragam kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
f. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan huruf a sampai dengan e di atas tersimpan dengan baik; dan
g. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY 2024

Throughout 2024, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out various activities to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties in the form of:

a. Preparing meetings, including a briefing sheet for the Board of Commissioners;
b. Preparing minutes of meetings of the Board of Commissioners;
c. Administering the documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
d. Preparing a draft of the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
e. Preparing draft reports of the Board of Commissioners;
f. Ensuring that the documents for the implementation of activities stated in points a to e above are filed properly; and
g. Performing other duties of the Board of Commissioners.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Committees Under the Board of Directors

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko yang berpengaruh terhadap operasional bisnis Perusahaan. Komite ini berada di bawah Direksi untuk memastikan bahwa semua risiko, baik strategis, operasional, keuangan, maupun kepatuhan, dikelola dengan baik sesuai standar tata kelola perusahaan yang baik. Komite Manajemen Risiko dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 026100.K/PR.06.01/PDO/2021.

Susunan Keanggotaan

Susunan keangggotaan Komite Manajemen Risiko PGN adalah sebagai berikut:

I. Ketua Komite Manajemen Risiko:
   Chief Risk Officer
II. Anggota Tetap:
   - Direktur Keuangan
   - Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis
III. Anggota Tidak Tetap:
   - Direktur Utama
   - Direktur Operasi
   - Direktur Infrastruktur dan Teknologi
   - Direktur SDM dan Penunjang Bisnis

Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi penerapan Manajemen Risiko dan membangun budaya sadar risiko secara berkala;
2. Bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan pengelolaan risiko yang diambil oleh PGN secara keseluruhan yang meliputi antara lain mengevakuasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh manajemen risiko Korporat; dan
3. Mengevaluasi aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai kebijakan/prosedur yang berlaku apabila diperlukan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko 2024

Pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko dilakukan secara berkala setiap bulan, sesuai dengan pelaksanaan rapat Direksi bulanan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is in charge of identifying, evaluating, monitoring, and managing risks that affect the Company's business operations. This committee is under the Board of Directors to ensure that all risks, whether strategic, operational, financial, or compliance, are managed properly in accordance with good corporate governance standards. The Risk Management Committee was established in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 026100.K/PR.06.01/PDO/2021.

Membership Composition

The following is the membership composition of PGN's Risk Management Committee:

I. Chairman of Risk Management Committeee:
   Chief Risk Officer
II. Permanent Members:
   - Director of Finance
   - Director of Strategy and Business Development
III. Non-Permanenet Members:
   - President Director
   - Director of Operations
   - Director of Infrastructure and Technology
   - Director of HR and Business Support

Duties and Responsibilities

The following are the duties and responsibilities of the Risk Management Committee:

1. Establish the Risk Management implementation strategy and periodically build a risk-aware culture;
2. Responsible for monitoring the implementation of Risk Management policies and the overall risk management taken by PGN, which includes evacuating and providing directives based on reports submitted by the Corporate Risk Management; and
3. Evaluate activities that require the approval of the Board of Directors in accordance with applicable policies/procedures, if necessary.

Implementation of Risk Management Committee Activities in 2024

The implementation of the Risk Management Committee activities is carried out periodically every month, in accordance with the implementation of the monthly meeting of the Board of Directors.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Pada tahun 2024, terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan yang sebelumnya dijabat oleh Rachmat Hutama (1 Januari - 31 Mei 2024) kemudian digantikan oleh Fajriyah Usman, dengan keterangan profil masing-masing sebagai berikut:

In 2024, there was a change in the Corporate Secretary; the position which was previously held by Rachmat Utama Hutama (January 1 - May 31, 2024) is now held by Fajriyah Usman, whose profiles are given below:

	Profil	Profile
Rachmat Hutama	Profil secara lengkap telah diuraikan pada bab Profil Perusahaan sub bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini	His complete profile is described in the Company Profile chapter, sub-chapter of Directors' Profile of this Annual Report

Fajriyah Usman	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 16 November 1979. Usia 45 tahun per 31 Desember 2024. Domisili Jakarta	Indonesian citizen, born in Jakarta on November 16, 1979. She is 45 years old as of December31, 2024. Domiciled in Jakarta
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2002	Completed Bachelor's Degree in Economics from Universitas Indonesia in 2002
	Riwayat pekerjaan: Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak 31 Juli 2024. Mengawali karier di Pertamina Group sebagai Head of Investor Relations PT Elnusa Tbk (2009-2012), VP Corporate Secretary PT Elnusa Tbk (2012-2018), Direktur Utama PT Elnusa Trans Samudera (2018-2019), VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) (2019-2022), VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero) (2022-2024), Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024-sekarang)	Work experience: Serves as Corporate Secretary since July 31, 2024. Started her career at Pertamina Group as Head of Investor Relations at PT Elnusa Tbk (2009-2012), VP Corporate Secretary at PT Elnusa Tbk (2012-2018), President Director of PT Elnusa Trans Samudera (2018-2019), VP Corporate Communication at PT Pertamina (Persero) (2019-2022), VP CSR & SMEPP Management at PT Pertamina (Persero) (2022-2024), Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2024 -present)
	Penunjukan Corporate Secretary dilakukan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara	The appointment of the Corporate Secretary was carried out in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, which was last amended through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 on Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises
	Penunjukan Corporate Secretary yang kini menjabat dilaksanakan melalui Surat Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. 049200.K/KP.02.03/PDO/2024 tanggal 31 Juli 2024. Penunjukan Corporate Secretary itu telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 tanggal 31 Juli 2024	The appointment of the current Corporate Secretary was carried out through the Assignment Letter of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk No. 049200.K/KP.02.03/PDO/2024 dated July 31, 2024. The appointment of the Corporate Secretary has been submitted to the Financial Services Authority through Letter No. 049000.S/KU.06.01/PDO/2024 dated July 31, 2024

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Acuan dalam pembentukan, pengangkatan dan pelaksanaan Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk antara lain :

1. Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

BASIS FOR APPOINTMENT OF CORPORATE SECRETARY

Here are some of the references for the formation, appointment and implementation of the Corporate Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk:

1. Articles of Association of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as last amended by PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning

PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

4. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary menjalankan fungsi untuk mengelola kegiatan *stakeholder management*, komunikasi korporat, hubungan investor, layanan dukungan korporat, serta pelaksanaan program *corporate social responsibility* untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional *Subholding* Gas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Fungsi ini selaras dengan Keputusan Direksi No. 013000.K/OT/PDO/2022 tentang Tata Kerja Direktorat Utama tanggal 31 Maret 2022.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan fungsinya, *Corporate Secretary* dibantu oleh Divisi *Investor Relations*; Divisi *Corporate Communication*; Divisi *Government and Community Relations*; Divisi *Corporate Support and Services*; dan Divisi *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Secretary* juga bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Berikut struktur organisasi *Corporate Secretary* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 004100.K/OT.00/HCGS/2023, tanggal 24 Maret 2023 tentang struktur organisasi berserta PRL dan formasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

4. Law No. 19 of 2003 concerning the State-Owned Enterprises.

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary carries out its functions in managing stakeholder management, corporate communication, investor relations, corporate support, as well as the implementation of corporate social responsibility activities to support the operational smoothness of the Gas Subholding in accordance with applicable laws and regulations. This function is in line with the Decree of the Board of Directors No. 013000.K/OT/PDO/2022 on Work Procedures of Main Directorates, dated March 31, 2022.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors upon the approval of the Board of Commissioners.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In carrying out its functions, the Corporate Secretary is assisted by the following Investor Relations Division; Corporate Communication Division; Government and Community Relations Division; Corporate Support and Services Division; and Corporate Social Responsibility Division. The Corporate Secretary is also directly responsible to the President Director.

The following is the organizational structure of Corporate Secretary, which was stipulated pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 004100.K/OT.00/HCGS/2023, dated March 24, 2023, on organizational structure and formation of PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

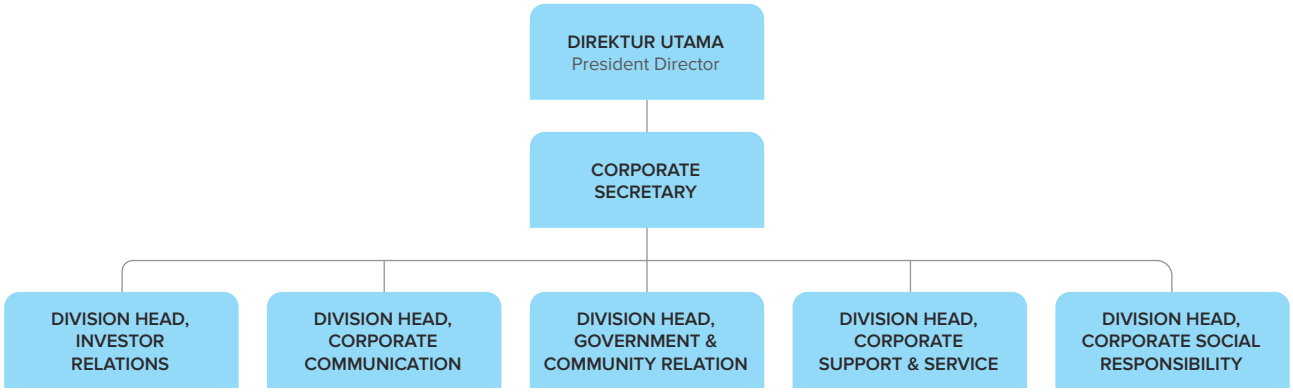

PELAKSANAAN TUGAS CORPORATE SECRETARY TAHUN 2024

Selama tahun 2024, *Corporate Secretary* telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan;

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES IN 2024

During 2024, the Corporate Secretary has carried out the following duties:

a. Organizing the Annual GMS;

b. Melaksanakan program orientasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru diangkat;

c. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan;
d. Menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sekretariat Negara, BPH Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Indonesian Capital Market Electronic Library* (ICaMEL), Biro Administrasi Efek (BAE), dan lembaga-lembaga terkait lainnya; serta menjadi penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham dan investor;
e. Mengkoordinasikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi DPR terkait dan kunjungan kerja dengan *stakeholders*;
f. Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi serta melakukan kegiatan administrasi notulen hasil rapat Dewan Komisaris dan rapat Direksi;
g. Mengelola keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta ketersediaan informasi dalam situs *web* Perusahaan;
h. Memastikan tersusun dan tersampaikannya Laporan Tahunan 2024 kepada publik dan otoritas regulator terkait;
i. Memastikan terselesaikannya seluruh arahan Dewan Komisaris dan Direksi PGN; dan
j. Mengelola kebijakan CSR PGN dan *corporate event* yang melibatkan pihak internal maupun eksternal dan berskala nasional atau internasional.

b. Conducting orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
c. Organizing the Annual Public Expose;
d. Establish communication with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), Ministry of Energy and Mineral Resources, State Secretariat, BPH Migas, Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Stock Exchange, the Indonesian Central Securities Depository, the Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL), the Stock Administration Bureau, and other related agencies; as well as act as liaison between the Company and its shareholders and investors;
e. Coordinating Hearing Session with a Commission of the House of Representatives concerning official visits with stakeholders;
f. Attending every Board of Commissioners and Board of Directors meetings and administering minutes of Board of Commissioners and Board of Directors meetings;
g. Managing information disclosure to the public, including information disclosure to the Financial Service Authority and the Indonesian Stock Exchange, as well as posting such information on the Company's website;
h. Ensuring the preparation and submission of the 2024 Annual Report to general public and related regulators;
i. Ensuring completion of all directives of the Board of Commissioners and Board of Directors of PGN; and
j. Manage PGN's CSR policies and corporate events involving internal and external stakeholders on the national or international scale.

KETERBUKAAN INFORMASI

Corporate Secretary bersama *Legal Counsel and Compliance Group* dan *Investor Relation* senantiasa melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

DISCLOSURE OF INFORMATION

The Corporate Secretary together with the Legal Counsel and Compliance Group as well as Investor Relations always report to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange as the capital market authority in order to comply with the obligation to disclose information to the public.

PROGRAM PELATIHAN CORPORATE SECRETARY

TRAINING PROGRAM FOR CORPORATE SECRETARY

Tanggal Date	Agenda	Penyelenggara Organizer
18-19 Januari 2024 January 18-19, 2024	*ESG Today's Practice Future Development within ASEAN Region* - di Singapura bersama ICSA ESG Today's Practice Future Development within ASEAN Region - in Singapore with ICSA	ICSA
31 Januari 2024 January 31, 2024	Webinar *Non Regulatory - Strategic Planning for listed Companies in 2024's Stock Market* Non-Regulatory Webinar - Strategic Planning for listed Companies in 2024's Stock Market	ICSA
1 Februari 2024 February 1, 2024	*Media Handling: Maintaining Company Reputation and Public Trust* Media Handling: Maintaining Company Reputation and Public Trust	ICSA
6 Februari 2024 February 6, 2024	*Understanding the Intersection of ESG and Cyber Security* oleh Hukumonline & ICSA Understanding the Intersection of ESG and Cyber Security by Hukumonline & ICSA	ICSA
16 Februari 2024 February 16, 2024	Seminar *Regulatory Framework: Carbon Trading Compliances for Listed Companies* Regulatory Framework Seminar: Carbon Trading Compliances for Listed Companies	ICSA
20-21 Februari 2024 February 20-21, 2024	*The 2nd Good Corporate Governance International Conference on* ESG - Olah Karsa & ICSA The 2nd Good Corporate Governance International Conference on ESG - Olah Karsa & ICSA	ICSA
16-17 Oktober 2024 October 16-17, 2024	*Executive Training: LNG Fundamentals & Trading* Executive Training: LNG Fundamentals & Trading	S&P Global Singapore

INTERNAL AUDIT

Internal Audit

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) kali perubahan Chief Audit Executive yakni dijabat oleh Evi Novita Dewi yang kemudian digantikan oleh R. Aryo Seto Bomantari, dengan keterangan sebagai berikut:

In 2024, there was 1 (one) change in the Chief Audit Executive, namely Evi Novita Dewi, who was then replaced by R. Aryo Seto Bomantari, with the following information:

PROFIL *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

PROFILE OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

Evi Novita Dewi	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo pada 30 November 1977. Berusia 47 tahun, per tanggal 31 Desember 2024. Domisili di Bogor	Indonesian Citizen, born in Purworejo on November 30, 1977. She is 47 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Bogor
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi pada tahun 2002 di Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama pada tahun 2016	Completed her Bachelor of Economics in Accounting in 2002 at Gadjah Mada University and completed her Masters in Management at the same university in 2016
	Riwayat pekerjaan: - 1 Desember 2003 bergabung di Satuan Kerja Internal Audit PT Pertamina (Persero) sebagai Auditor Ahli Madya - 17 Maret 2014 - 31 Mei 2015 menjabat sebagai Head of Internal Audit PT Perta Daya Gas - 1 Juni 2015 - 31 Agustus 2015 menjabat sebagai Head of Internal Audit PT Pertagas Niaga - 1 September 2015 - 30 Juni 2018 menjabat sebagai Chief Internal Audit PT Pertamina Patra Niaga - 1 Juli 2018 - 28 Februari 2019 menjabat sebagai Internal Audit Manager Pertamina Region Jawa Barat - 1 Maret 2019 - 15 Agustus 2020 menjabat sebagai Manager Audit Planning & Quality Assurance Pertamina - 15 Agustus 2020 - 31 Desember 2022 menjabat sebagai Vice President Internal Audit Policy Setting, Planning & Monitoring Pertamina - 1 Januari 2023 - 13 Mei 2024 menjabat sebagai Chief Audit Executive PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.	Work Experience: - Joined the Internal Audit Unit of PT Pertamina (Persero) as Junior Expert Auditor on December 1, 2023 - March 17, 2014 – May 31, 2015, served as Head of Internal Audit at PT Perta Daya Gas - June 1, 2015 – August 31, 2015, served as Head of Internal Audit at PT Pertagas Niaga - September 1, 2015 – June 30, 2018, served as Chief Internal Audit at PT Pertamina Patra Niaga - July 1, 2018 – February 28, 2019, served as Internal Audit Manager of Pertamina, West Java Region - March 1, 2019 – August 15, 2020, served as Audit Planning & Quality Assurance Manager at Pertamina - August 15, 2020 – December 31, 2022, served as Vice President of Internal Audit Policy Setting, Planning & Monitoring at Pertamina - January 1, 2023 – May 13, 2024, served as Chief Audit Executive at PT Perusahaan Gas Negara Tbk
	Beliau juga bergabung dalam kegiatan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) di lingkungan ESDM dan The Institute of Internal Auditors Indonesia.	She is also involved in the activities of the Internal Audit Unit Communication Forum (FKSPI) within ESDM and The Institute of Internal Auditors Indonesia
	Sertifikasi yang dimiliki: - *Certified Internal Auditors* (CIA) - *Qualified Internal Auditors* (QIA) - *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) - *Certified Risk Professional* (CRP) - *Chartered Accountant* (CA) Saat ini beliau menjabat sebagai Vice President Corporate Holding & Portfolio Internal Audit PT Pertamina (Persero)	Certifications held: - Certified Internal Auditors (CIA) - Qualified Internal Auditors (QIA) - Certification in Audit Committee Practices (CACP) - Certified Risk Professional (CRP) - Chartered Accountant (CA) Currently, she is serving as the Vice President of Corporate Holding & Portfolio Internal Audit at PT Pertamina (Persero)

R. Aryo Seto Bomantari	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Purwokerto pada 19 Mei 1967. Berusia 57 tahun, per tanggal 31 Desember 2024. Domisili di Tangerang Selatan	Indonesian citizen, born in Purwokerto on May 19, 1967. He is 57 years old as of December31, 2024. Domiciled in South Tangerang
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995 di Universitas Diponegoro dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Gajah Mada pada tahun 2000	Completed his Bachelor of Economics in Accounting in 1995 from Universitas Diponegoro and completed his Master in Management from Universitas Gajah Mada in 2000
	Beliau menjalani karier di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan riwayat sebagai berikut: - Auditor Ahli Pertama pada Subauditorat Pertamina (1996-2000) - Kepala Seksi BUMN Pertanian-2 (2000-2006) - Kepala Subauditorat Kalteng-Kaltim (2006) - Kepala Subauditorat Kalsel II (2006-2011) - Kepala Subauditorat Sumut I (2011-2016) - Kepala Subauditorat DKI Jakarta III (2016-2018) - Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta (2018-2019) - Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu (2019-2020) - Kepala Auditorat VII.D (2020-2022) - Kepala Auditorat VII.C (2022-2024) - Auditor Ahli Madya (Agustus 2024 - Oktober 2024)	He pursued a career at the Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) with the following positions: - First Expert Auditor at Subauditorate of Pertamina (1996-2000) - Section Head of Agriculture-2 SOE (2000-2006) - Head of Central Kalimantan - East Kalimantan Subauditorate (2006) - Head of South Kalimantan II Subauditorate (2006-2011) - Head of North Sumatra I Subauditorate (2011-2016) - Head of DKI Jakarta III Subauditorate (2016-2018) - Acting Head of BPK Representative Office of DKI Jakarta Province (2018-2019) - Head of BPK Representative Office of Bengkulu Province (2019-2020) - Head of Auditorate VII.D (2020-2022) - Head of Auditorate VII.C (2022-2024) - Junior Expert Auditor (August 2024 - October 2024)
	Pada tanggal 1 November 2024 - sekarang Beliau menjabat sebagai Chief Audit Executive PT Perusahaan Gas Negara, Tbk dalam rangka penugasan dari BPK RI	On November 1, 2024 - present, he is serving as the Chief Audit Executive at PT Perusahaan Gas Negara, Tbk in the context of assignment from BPK RI
	Sertifikasi yang dimiliki: - *Certified State Finance Auditor* (CSFA) - *Chartered Accountant* (CA)	Certifications: - Certified State Finance Auditor (CSFA) - Chartered Accountant (CA)

DASAR PENGANGKATAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

Chief Audit Executive pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 dijabat oleh Evi Novita Dewi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan *Senior Vice President Human Capital Management* PT Pertamina (Persero) Nomor SKMJ-00193/K20000/2022-S8 tanggal 14 Desember 2022 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023. Kemudian melalui Surat Keputusan *Senior Vice President Human Capital Management* PT Pertamina (Persero) Nomor SKMJ-00069/K20000/2024-S8 tanggal 14 Mei 2024, yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai *Chief Audit Executive* PT Perusahaan Gas Negara Tbk dikarenakan adanya penugasan ke entitas lainnya.

Chief Audit Executive saat ini dijabat oleh R. Aryo Seto Bomantari yang ditetapkan sejak 1 November 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 071900.K/KP/PDO/2024 tanggal 4 November 2024.

BASIS OF APPOINTMENT OF THE CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The Chief Audit Executive position in the period of January1, 2024 to May 13, 2024, was held by Evi Novita Dewi, who was appointed based on the Decree of the Senior Vice President of Human Capital Management of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00193/K20000/2022-S8 dated December 14. 2022, effective since January 1, 2023. Subsequently, based on the Decree of the Senior Vice President of Human Capital Management of PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00069/K20000/2024-S8 dated May 14, 2024, she no longer serves as Chief Audit Executive at PT Perusahaan Gas Negara Tbk due to an assignment to another entity.

The Chief Audit Executive position is currently held by R. Aryo Seto Bomantari, who was appointed on November 1, 2024, based on the Decree of the Board of Directors of PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. 071900.K/KP/PDO/2024 dated November 4, 2024.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *CHIEF AUDIT EXECUTIVE*

Pengangkatan dan pemberhentian *Chief Audit Executive* dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CHIEF AUDIT EXECUTIVE

The appointment and dismissal of Chief Audit Executive is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on Establishment and

Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Pasal 5 poin (1), Anggaran Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk, *Board Manual* Perseroan dan Piagam Audit Internal (Internal *Audit Charter*) tanggal 5 Februari 2024 poin (8.b). Pengangkatan dan pemberhentian *Chief Audit Executive* dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari *Chief Audit Executive* PT Pertamina (Persero).

Preparation Guidelines of the Internal Audit Unit Charter Article 5 point (1), Articles of Association of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Company Board Manual, and Internal Audit Charter dated February 5, 2024, point (8.b). The appointment and dismissal of Chief Audit Executive is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, after first obtaining the recommendation from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero).

KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR PERUSAHAAN

Satuan Kerja Internal Audit berkedudukan dalam struktur organisasi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

POSITION OF INTERNAL AUDIT IN THE COMPANY'S STRUCTURE

The Internal Audit Unit is within the organizational structure of PT Perusahaan Gas Negara, Tbk, and directly responsible to the President Director.

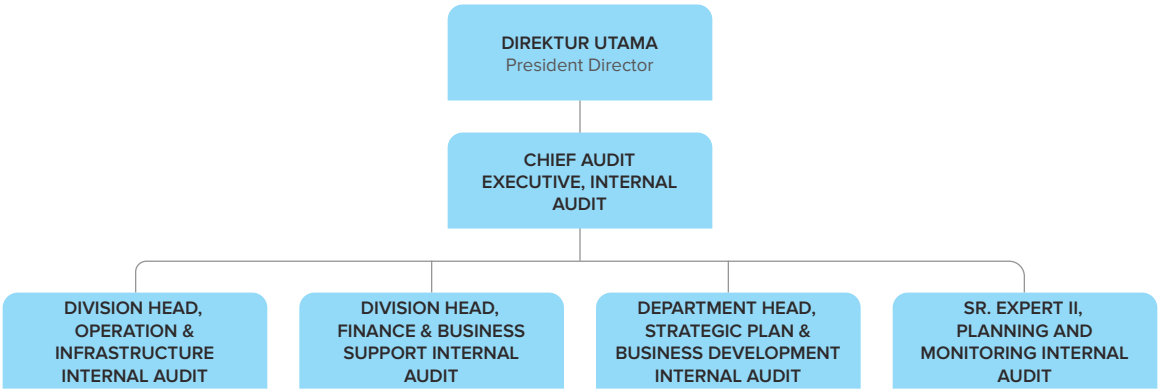

PIAGAM AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, *Internal Audit* berpedoman pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan oleh *Chief Audit Executive*, Direktur Utama dan Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen pada tanggal 5 Februari 2024. Piagam Audit Internal secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Utama, Persyaratan Auditor Internal, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan, Struktur dan Kedudukan, Independensi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab, Standar Pelaksanaan, serta Kode Etik Auditor.

AUDIT CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Internal Audit refers to the Internal Audit Charter, which has been established by the Chief Audit Executive, President Director, and President Commissioner, concurrently serving as Independent Commissioner on February 5, 2024. In general, the Internal Audit Charter contains the Vision, Mission, Objectives, Scope, Main Principles, Internal Auditor Requirements, Prohibition of Concurrent Duties and Positions, Structure and Position, Independence, Authority, Duties and Responsibilities, Implementation Standards, as well as the Code of Ethics of Internal Auditors.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Internal Audit (IA) mengacu pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*). Sedangkan dalam pelaksanaan penugasan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit No. P-001/18.00/2024 tanggal berlaku 29 Februari 2024. Secara garis besar Pedoman tersebut mengatur kebijakan umum dan khusus terkait pengelolaan Satuan Kerja Internal Audit (SKIA), kualifikasi pelaksana kegiatan SKIA, perencanaan kegiatan SKIA, penugasan *assurance*, penugasan konsultasi, pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi, *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

As previously stated, in performing its tasks and responsibilities, the Internal Audit refers to the Internal Audit Charter. While, in the implementation of the assignment, it refers to the Management Guidelines of the Internal Audit Unit Activities No. P-001/18.00/2024 effective date on February 29, 2024. In general, the Guidelines regulate the general and specific policies related to the management of the Internal Audit Unit (IAU), qualifications for implementing IAU activities, planning of IAU activities, assurance assignment, consulting assignment, implementation of monitoring of follow-up recommendations, Quality Assurance and Improvemenr Program (QAIP).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Internal Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui pemberian jasa *assurance*, *advice*, dan *insight* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Subholding Gas.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan *resources* yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
4. Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, *advice*, dan *insight* yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
7. Memastikan SKIA secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance, advice*, dan *insight* di lingkungan Internal Audit Pertamina Group.
9. Menguji serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
12. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
13. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
14. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama, Direktur lainnya yang relevan, dan Dewan Komisaris.
15. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit Internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
16. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/pemeriksaan oleh Auditor Eksternal.
17. Melaksanakan audit investigasi yang dikoordinasikan dengan Internal Audit Holding dan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) atau masyarakat/pihak lainnya dan/atau berdasarkan *red flag* yang telah diidentifikasi oleh Internal Audit.
18. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) kegiatan Internal Audit.

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit cover the following matters:

1. Carrying out supervisory activities by providing assurance, advice, and insight services in all areas of Gas Subholding's operational and business activities.
2. Ensuring that the integrity, objectivity, confidentiality and competence aspects are properly implemented.
3. Preparing and proposing an Annual Audit Plan (AAP), which includes, the assignment object, assignment schedule, and resources required to obtain approval from the President Director and the Board of Commissioners upon the recommendation of the Audit Committee.
4. Reviewing the ongoing AAP, to ensure its alignment with the Company's business processes and risks, as well as the scope and objectives of the assignment.;
5. Communicating resource limitations for carrying out assignments, changes to the AAP, and changes in policy direction to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Ensuring that each assignment is carried out with supervision and supported by adequate working papers, and that the recommendations, advice, and insights provided can be implemented by the Auditee.
7. Ensuring that the IAU collectively has/acquires adequate knowledge, skills, and competencies.
8. Coordinating the management of Internal Audit activities, which are not limited to assurance, advice, and insight activities within the Internal Audit of Pertamina Group.
9. Testing and evaluating the effectiveness of internal control and risk management system implementation in accordance with applicable policies.
10. Auditing the compliance with relevant laws and regulations
11. Identifying alternatives for improvement and increasing the Company's operational efficiency.
12. Performing special audits if necessary.
13. Coordinating with the Audit Committee.
14. Reporting the supervision results to the President Director, other relevant Directors, and the Board of Commissioners.
15. Monitoring the implementation of follow-up to the results of internal, external, and other supervisory institutions audits and report periodically to the President Director and Audit Committee.
16. Coordinating audit/ inspection activities by external auditors.
17. Carrying out investigative audits coordinated with the Internal Audit of the Holding and can be carried out as a follow-up to complaints via the Whistleblowing System (WBS) or the public/other parties and/or based on red flags that have been identified by the Internal Audit.
18. Carrying out evaluation and improvement program of Internal Audit activities.

19. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
21. Melakukan penyusunan dan pengkajian Internal Audit *Charter* (Piagam Audit Internal) secara periodik, minimal setahun sekali serta menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.

Wewenang

Satuan Kerja Internal Audit dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Auditor Eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
7. Berperan aktif dalam diskusi penunjukan dan/atau pengangkatan *Chief Audit Executive* di Anak Perusahaan dalam ruang lingkup Subholding Gas dengan memberikan rekomendasi dan/atau memutuskan persetujuannya.
8. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karier pekerja (mutasi dan/atau promosi), pengelolaan *manpower* pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan Internal Audit di Subholding Gas dan Anggota Subholding Gas setelah berkonsultasi dengan *Chief Audit Executive* Internal Audit PT Pertamina (Persero).
9. Mengelola kegiatan *assurance, advice, insight,* dan audit investigasi di lingkungan Subholding Gas melalui mekanisme yang ditentukan sebelumnya.
10. Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan Internal Audit dengan Internal Audit Holding dan Anggota Subholding sesuai dengan pola koordinasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama.

19. Reporting the results of Internal Audit activities to the President Director, and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
20. Carrying out other assignments as mandated by the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
21. Preparing and reviewing the Internal Audit Charter periodically, at least once a year, and submitting it to the President Director and the Board of Commissioners for approval.

Authority

In carrying out its duties, the Internal Audit has the following authorities:

1. Have unlimited access to all data, documents, functions, activities, and other Company resources, including requesting information or explanations from all officials/ employees in the context of carrying out the duties of the Internal Audit.
2. Determining the scope, methods, means, techniques, strategies, and audit approaches.
3. Carrying out direct communication with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. Carrying out coordination with external auditors and other supervisory institutions.
5. Requesting or obtaining assistance from internal Company employees or from parties outside the Company, in carrying out their duties.
6. Hold periodical meetings and when necessary, with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.
7. Actively participating in discussions on the appointment and/or promotion of the Chief Audit Executive in Subsidiaries within the scope of the Gas Subholding by providing recommendations and/or deciding its approval.
8. Determining the policy direction, organizational structure, management of employee career development (transfer and/or promotion), management of manpower for carrying out assignments, as well as coordinating and supervising Internal Audit activities at the Gas Subholding and Gas Subholding Members after consulting with the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero).
9. Managing assurance, advice, insight, and investigative audit activities within the Gas Subholding through mechanisms that have been established.
10. Coordinating the management of Internal Audit activities with Internal Audit of the Holding and Subholding Members in accordance with the coordination pattern approved by the President Director.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DENGAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

Secara berkala, Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Rapat juga dapat diselenggarakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2024, Satuan Kerja Audit Internal telah mengikuti rapat dengan Direksi sebanyak 61 (enam puluh satu) kali rapat, dan 15 (lima belas) kali rapat bersama dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF MEETING FREQUENCY WITH THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND/OR AUDIT COMMITTEE

The Internal Audit Unit regularly holds meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee. Meetings can also be held incidentally as needed. During 2024, the Internal Audit Unit attended 61 (sixty-one) meetings with the Board of Directors, and 15 (fifteen) meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.

JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT

Per tanggal 31 Desember 2024, jumlah personel *Internal Audit* sebanyak 16 (enam belas) personel, yang terdiri dari:

NUMBER OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL

As of December 31, 2024, the number of Internal Audit personnel is 16 (sixteen) personnel, consisting of:

JUMLAH PERSONEL INTERNAL AUDIT
Number of Internal Audit Personnel

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1.	Chief Audit Executive	1
2.	Division Head, Operation and Infrastructure Internal Audit	1
3.	Division Head, Finance and Business Support Internal Audit	1
4.	Department Head, Strategic Plan and Business Development Internal Audit	1
5.	Sr. Expert II, Planning and Monitoring Internal Audit	1
6.	Lead Auditor	4
7.	Sr. Auditor II	3
8.	Sr. Auditor I	1
9.	Auditor II	2
10.	Assistant, Planning and Monitoring Internal Audit	1
Jumlah | Total		**16**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme personel Internal Audit, selain standardisasi kompetensi melalui sertifikasi profesi, mengikuti pelatihan non sertifikasi yang dapat menunjang pengembangan manajerial maupun kompetensi audit secara langsung. Internal Audit juga berperan aktif mengikuti forum Seminar seperti Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA), *The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Regional Conference*, seminar Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) ESDM dan BUMN.

Pada tahun 2024, beberapa kegiatan pengembangan kompetensi personel Internal Audit meliputi :

- *Certification in Audit Committee* tanggal 5 -7 Maret 2024 diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI).
- Pelatihan Pembekalan *Certified Fraud Examiners* (CFE) tanggal 27 - 31 Mei 2024 difasilitasi oleh Pertamina Corporate University.
- Pelatihan *Certified Information System Audit* (CISA) tanggal 24 - 28 Juni 2024 difasilitasi oleh Pertamina Corporate University.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

In addition to competency standardization through professional certification, to improve the competence and professionalism, Internal Audit personnel also participate in non-certification training that can support managerial development and audit competency directly. Internal Audit also plays an active role in participating in seminar forums, such as the National Internal Auditor Seminar (SNIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Regional Conference, Seminar on the Communication Forum for the Internal Control Unit of EMR and SOEs.

In 2024, several Internal Audit personnel competency development activities include:

- Certification in Audit Committee on March 5-7, 2024, organized by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI).
- Certified Fraud Examiners (CFE) Briefing Training on May 27-31, 2024, facilitated by Pertamina Corporate University.
- Certified Information System Audit (CISA) training on June 24-28, 2024, facilitated by Pertamina Corporate University.

- Seminar FKSPI Komisariat ESDM tanggal 4 - 5 Juli 2024 diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern.
- Konferensi dan Wisuda *Qualified Internal Auditor* tanggal 5 - 6 Juli 2024 diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Pelatihan Pembekalan *Certified Internal Audit* (CIA) tanggal 22 Juli - 1 Agustus 2024 difasilitasi oleh Pertamina Corporate University.
- *Asian Confederation of Intitute of Internal Auditors* (ACIIA) *Regional Conference* tanggal 28 - 29 Agustus 2024 diselenggarakan oleh *The IIA Indonesia.*
- *National Anti Fraud Conference* 2024 tanggal 5 - 6 September 2024 diselenggarakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia.
- Pelatihan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) tanggal 28 - 29 November 2024 yang difasilitasi oleh Human Capital Management PGN.

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

Sebagai bentuk komitmen PGN dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan standar profesi *Internal Audit*, personel *Internal Audit* wajib mengembangkan pengetahuan dan kompetensi melalui sertifikasi profesi. Saat ini Auditor *Internal Audit* telah memperoleh sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional dengan rincian sebagai berikut:

- *Qualified Internal Auditors* (QIA) sebanyak 14 orang
- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) sebanyak 2 orang
- *Certified Risk Professional* (CRP) sebanyak 4 orang
- *Certified Fraud Examiners* (CFE) sebanyak 3 orang
- *Chartered Accountant* (CA) sebanyak 2 orang
- *Enterprise Risk Management Associate Professional* (ERMAP) sebanyak 1 orang
- *Certified Forensic Auditor* (CFrA) sebanyak 1 orang
- *Oxygen Forensic® Cloud Extraction* (OFCE) sebanyak 1 orang
- *Certified Governance Accounting Expert* (CGAE) sebanyak 1 orang
- *Certified Public Accountant* (CPA) sebanyak 1 orang
- *Certified State Finance Auditor* (CSFA) sebanyak 1 orang

PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT SELAMA TAHUN 2024

Insight

Internal Audit meningkatkan perannya sebagai *Insight Generator* dan *Trusted Advisor*. Internal Audit lebih proaktif memberikan *insights* dan *strategic advises* kepada Manajemen terutama pada aspek *Governance, Risk* dan *Compliance*. Sepanjang tahun 2024, Internal Audit telah menyampaikan 9 (sembilan) *insight* kepada Manajemen melalui *Management Letter.*

- FKSPI EMR Commissariat Seminar on July 4-5, 2024, organized by the Internal Audit Unit Communication Forum.
- Qualified Internal Auditor Conference and Graduation on July 5-6, 2024, organized by the Internal Audit Education Foundation (YPIA).
- Certified Internal Audit (CIA) Briefing Training on July 22 - August 1, 2024, facilitated by Pertamina Corporate University.
- Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) Regional Conference on August 28-29, 2024, organized by The IIA Indonesia.
- National Anti-Fraud Conference 2024 on September 5-6, 2024, organized by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia.
- Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Training on November 28-29, 2024, facilitated by Human Capital Management of PGN.

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

As a form of PGN's commitment to Human Resource development, Internal Auditor personnel are required to develop knowledge and competence through professional certifications in accordance with Internal Audit professional standards. Currently, Internal Audit Auditors have obtained national and international certification with the following details:

- Qualified Internal Auditors (QIA) owned by 14 people
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) owned by 2 people
- Certified Risk Professional (CRP) owned by 4 people
- Certified Fraud Examiners (CFE) owned by 3 people
- Chartered Accountant (CA) owned by 2 people
- Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) owned by 1 person
- Certified Forensic Auditor (CFrA) owned by 1 person
- Oxygen Forensic® Cloud Extraction (OFCE) owned by 1 person
- Certified Governance Accounting Expert (CGAE) owned by 1 person
- Certified Public Accountant (CPA) owned by 1 person
- Certified State Finance Auditor (CSFA) owned by 1 person

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES DURING 2024

Insight

Internal Audit increases its role as an Insight Generator and Trusted Advisor. Internal Audit is more proactive in providing insights and strategic advice to Management, particularly on aspects of Governance, Risk, and Compliance. Throughout 2024, Internal Audit has conveyed 9 (nine) insights to Management via Management Letters.

Pelaksanaan Audit dan Konsultasi

a. Berdasarkan *Annual Audit Plan* (AAP) 2024 yang terakhir kali dilaksanakan *review* pada Triwulan III tahun 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Utama serta Komisaris Utama, *Internal Audit* telah melaksanakan 11 (sebelas) penugasan audit/konsultasi.
b. Selain melaksanakan penugasan berdasarkan AAP 2024 *Internal Audit* juga telah melaksanakan 1 (satu) penugasan *Non* AAP 2024, 4 (empat) penugasan *Carry Over* AAP 2023 dan 1 (satu) penugasan *Carry Over Non* AAP 2023.
c. *Internal Audit* PGN secara aktif berkoordinasi dengan *Internal Audit* Pertamina dalam Holding Migas.
d. *Internal Audit* PGN juga secara aktif berkoordinasi dengan Internal Audit Entitas Anggota Subholding Gas.

Rotasi pekerja di lingkungan *Internal Audit* dilaksanakan mengacu pada kebijakan Fungsi Human Capital PGN dan melalui koordinasi dengan Internal Audit Holding selaku Pembina.

Implementation of Audits and Consultations

a. Based on the 2024 Annual Audit Plan (AAP), which was last reviewed in the third quarter of 2024 and has received approval from the President Director and President Commissioner, Internal Audit has carried out 11 (eleven) audit/ consultation assignments.
b. Apart from carrying out assignments based on the 2024 AAP, Internal Audit has also carried out Internal Audit has also carried out 1 (one) non-AAP assignment in 2024, 4 (four) 2023 AAP Carry Over assignment, and 1 (one) 2023 non-AAP Carry Over assignment.
c. PGN Internal Audit actively coordinates with Pertamina Internal Audit in the Oil and Gas Holding.
d. PGN Internal Audit also actively coordinates with the Internal Audit of Gas Subholding Member Entities.

Rotation of employees within the Internal Audit is carried out in reference to the PGN Human Capital Function policy and through coordination with the Internal Audit Holding as the Supervisor.

Pelaksanaan Audit Khusus

Pada tahun 2024, *Internal Audit* telah melaksanakan penelaahaan atas laporan pengaduan melalui *Whistle Blowing System* (WBS) yang terdiri dari 2 (dua) *Carry Over* 2023 dan 2 (dua) yang diterima di tahun 2024.

Implementation of Special Audit

In 2024, the Internal Audit function conducted a review of complaint reports submitted through the Whistle Blowing System (WBS), comprising two carried over from 2023 and two received in 2024.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT

Pelaksanaan monitoring penyelesaian tindak lanjut:

a. Realisasi monitoring tindak lanjut hasil Audit Internal yang dilakukan oleh *Internal Audit* PGN pada periode tahun 2024 sebagai berikut:

FOLLOW-UP TO AUDIT RECOMMENDATIONS

Monitoring completion of follow-ups:

a. The realization of follow-up monitoring of internal audit results conducted by PGN Internal Audit in the 2024 period is as follows:

TABEL REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE 1 JANUARI 2024 - 31 DESEMBER 2024

Table of Follow-up Internal Audit Results January 1, 2024 to December 31, 2024

No.	Uraian	Total	Description
A	*Outstanding* rekomendasi per 1 Januari 2024	169	Outstanding recommendations as of January 1, 2024
B	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024	104	Additional recommendations until December 31, 2024
C	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024	273	Total recommendations up to December 31, 2024
D	Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2024	192	Follow-up until December 31, 2024
E	*Outstanding* rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024	81	Outstanding recommendations until December 31, 2024
E1	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2024 yang telah melebihi *end date*	-	Outstanding recommendations as of December 31, 2024, which have passed the due date
E2	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2024 yang belum melebihi *end date*	81	Outstanding recommendations as of December 31, 2024, which did not exceed the due date
Persentase Pencapaian (F) =D/(D+E1) x 100%		**100%**	**Percentage of Achievement (F) =D/(D+E1) x 100%**

Sesuai dengan pelaksanaan monitoring tindak lanjut, Internal Audit akan menyampaikan kembali *reminder* penyelesaian tindak lanjut kepada *Auditee* pada Triwulan I 2025.

In accordance with the implementation of follow-up monitoring, Internal Audit will send a reminder to the Auditee to complete the follow-up by the first quarter of 2025.

b. Rekomendasi hasil audit eksternal (BPK RI dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit PSA 62).
   1. BPK RI
      Telah dilaksanakan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester I 2024 untuk 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersama dengan BPK RI pada tanggal 9 sampai dengan 13 September 2024. Realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI mencapai 62% (18 rekomendasi) dari keseluruhan *outstanding* rekomendasi yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan), sehingga tersisa sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai.

b. Recommendations of external audit results (BPK RI and Public Accounting Firm for PSA 62 Audit).
   1. BPK RI
      Updated Follow-up Recommendations for BPK RI Audit Results for Semester I 2024 Period for 3 (three) Audit Result Reports (LHP) with BPK RI from September 9 to September 13, 2024. The completion of follow-up on BPK RI audit results reached 62% (18 recommendations) of the total outstanding recommendations of 29 (twenty-nine) recommendations, with the remaining 11 (eleven) recommendations being declared Not Appropriate.

TABEL REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE 1 JANUARI 2024 - 31 DESEMBER 2024
Table of Follow-up Internal Audit Results January 1, 2024 to December 31, 2024

No.	Keterangan Description		Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations
A	*Outstanding* rekomendasi per 1 Januari 2024 *Outstanding* recommendations as of January 1, 2024		29
B	Tambahan rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024 Additional recommendations until December 31, 2024		-
C	Total rekomendasi sampai dengan 31 Desember 2024 Total recommendations up to December 31, 2024		29
D	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up to December 31, 2024	Sesuai Appropriate	18
		Belum Sesuai Not Appropriate	11
		Belum Ditindaklanjuti Not Followed up yet	-
		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Not Followed Up	-
E	*Outstanding* rekomendasi per 31 Desember 2024 Outstanding recommendations as of December 31, 2024		11

Selanjutnya Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK RI Periode Semester II 2024 akan dijadwalkan pelaksanaannya pada Triwulan I 2025.

Furthermore, an update on the follow-up to recommendations from the BPK RI audit results for the second semester of 2024 is planned for implementation in the first quarter of 2025.

2. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS)
   Pada Tahun 2024, terdapat 2 (dua) rekomendasi Audit PSA 62 Periode Tahun Buku 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal No.00154/2.1032/JL.0/02/1726-1/1/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dan 1 (satu) rekomendasi Audit PSA 62 Periode Tahun Buku 2023 berdasarkan Laporan Auditor Independen Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal No. 00029/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang perlu dimonitor tindaklanjutnya oleh Internal Audit. Internal Audit PGN telah melaksanakan *monitoring* tindak lanjut dan bukti tindak lanjut telah disampaikan kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja pada tanggal 3 Desember 2024. Per 31 Desember 2024, proses *review* bukti tindak lanjut tersebut masih dilaksanakan oleh KAP PSS dan hasil pemutakhirannya akan disampaikan melalui penerbitan Laporan Audit PSA 62 Periode Tahun Buku 2024.

PENDAMPINGAN AUDITOR EKSTERNAL

Internal Audit aktif melakukan pendampingan terhadap audit yang dilakukan Auditor Eksternal, sebagai berikut:

i. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) dalam melaksanakan Audit PSA 62 Tahun Buku 2023 dan 2024.
ii. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pendampingan penyelesaian permasalahan di PGN Group.

LAIN-LAIN

Internal Audit selain melakukan kegiatan audit dan pendampingan di atas, juga melakukan kegiatan:

i. Ikut serta dalam kegiatan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN dan ESDM.
ii. Mengikuti pelatihan, konferensi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi.
iii. Melaksanakan sosialisasi Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS).
iv. Mengimplementasikan *Audit Management System* (AMS) dalam menjalankan penugasan dan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2. Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja
   In 2024, there were 2 (two) recommendations for the PSA 62 Audit for the 2022 Fiscal Year Period based on the Independent Auditor's Report on Compliance with Internal Control No. 00154/2.1032/JL.0/02/1726-1/1/IV/2023 dated April 13, 2023, and 1 (one) recommendation for the PSA 62 Audit for the 2023 Fiscal Year Period based on the Independent Auditor's Report on Compliance with Internal Control No. 00029/2.1032/JL.0/02/1726-2/1/III/2024 dated March 8, 2024, the follow-up of which needs to be monitored by Internal Audit. PGN Internal Audit has carried out follow-up monitoring and evidence of follow-up has been submitted to KAP Purwantono, Sungkoro & Surja on December 3, 2024. As of December 31, 2024, the review process of the evidence of follow-up is still being carried out by KAP PSS and the updated results will be submitted through the issuance of the PSA 62 Audit Report for the 2024 Fiscal Year Period.

ASSISTANCE FOR EXTERNAL AUDITORS

Internal Audit actively facilitates audits conducted by the following External Auditors:

i. Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global Limited) in conducting the PSA 62 Audit form the 2023 and 2024 fiscal years.
ii. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in carrying out audits and assistance in problem resolutions in the PGN Group.

OTHERS

In addition to audit and facilitation above, Internal Audit also performs the following activities:

i. Participating in activities organized by a Communication Forum for Internal Audit Unit of SOEs and EMR.
ii. Participating in training, certification, and competency improvement programs.
iii. Disseminating Guidelines for the Whistle Blowing System.
iv. Implementing the Audit Management System (AMS) in carrying out assignments and monitoring the follow-up to recommendations from audit results.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PGN terus mengupayakan pengembangan sistem pengendalian internal dengan mengacu kepada ISO 31000:2018 *framework*, selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER 2-MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. PGN mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan mekanisme dan proses yang melibatkan Direksi, anggota manajemen, dan seluruh personel di Perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan atas pencapaian operasional Perusahaan, pelaporan keuangan yang andal, serta kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi dasar kuat bagi kegiatan operasional PGN yang sehat dan aman, mencegah kegagalan pencapaian tujuan, menghasilkan laporan keuangan terpercaya, serta memastikan kegiatan Perusahaan patuh pada aturan dan hukum. Upaya ini juga dapat memberikan informasi yang relevan dalam menilai kinerja Perusahaan.

CONFORMITY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

PGN continuously made efforts to develop an internal control system by referring to ISO 31000:2018 framework, in line with the provisions of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. PGN implements the internal control system using mechanisms and processes that involve the Board of Directors, members of management, and all personnel in the Company. This is conducted to provide confidence in the Company's operational achievements, reliable financial reporting, and compliance with applicable procedures and regulations.

The implementation of an effective internal control system serves as a strong basis for sound and safe operational activities of PGN, preventing failure to the achievement of goals, producing reliable financial reports, as well as ensuring that Company activities comply with laws and regulations. This effort can also provide relevant information in assessing the Company's performance.

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL SERTA KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN

PGN menerapkan sistem pengendalian internal dalam dua aspek, yaitu pengendalian operasional dan keuangan. Pengendalian operasional dilakukan melalui pengkajian ulang oleh Direksi terhadap kinerja operasional dan realisasi Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya kelemahan pengendalian terpasang, atau kurang memadainya rencana dan upaya mitigasi risiko.

Dalam melakukan pengendalian keuangan, PGN menjalankan pemisahan fungsi agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, secara rutin PGN melakukan pembaruan kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi sebagai acuan dalam kegiatan operasional yang aktual.

FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL, AS WELL AS COMPLIANCE WITH LEGISLATIONS

PGN implements an internal control system in two aspects, namely operational and financial control. Operational control is carried out through reviews by the Board of Directors on operational performance and realization of the Company's Work Plan and Budget. This is conducted with the aim of detecting control weaknesses, or inadequate risk mitigation plans and efforts.

In carrying out financial control, PGN carries out separation of functions to avoid errors or deviations in the implementation of its duties. In addition, the Company routinely updates policies, procedures, operational systems, and accounting standards to reflect actual operational activities.

Dalam rangka meningkatkan keandalan pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko kesalahan material atau salah saji, PGN telah mengembangkan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICoFR). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PGN secara *Standalone* telah melakukan perancangan dan pemutakhiran proses bisnis serta pengendalian tingkat Entitas (*Entity Level Control* - ELC), Teknologi Informasi (*Information Technology General Control* - ITGC) dan Transaksi (*Transaction Level Control* - TLC) atas siklus bisnis *Fixed Asset, Operating Expense, Payroll, Taxation, Treasury, Financial Closing & Reporting, Revenue* dan *Cost of Goods Sold* serta mendokumentasikannya ke dalam bentuk *Business Process Model* (BPM) dan *Risk Control Matrix* (RCM). Selain itu, telah dilakukan penyusunan Pedoman ICoFR yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masih dalam proses pengesahan Manajemen PGN.

In order to improve the reliability of financial reporting to reduce the risk of material errors or misstatements, PGN has developed Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR). As of December 31, 2024, PGN has independently designed and updated business processes and Entity Level Control (ELC), Information Technology (Information Technology General Control - ITGC), and Transactions (Transaction Level Control - TLC) for the Fixed Asset, Operating Expense, Payroll, Taxation, Treasury, Financial Closing & Reporting, Revenue, and Cost of Goods Sold business cycles and documented them in the form of a Business Process Model (BPM) and Risk Control Matrix (RCM). In addition, the preparation of the ICoFR Guidelines have been conducted, in which until December 31, 2024, are still in the process of being approved by PGN Management.

PGN juga telah melaksanakan diagnostik ICoFR dengan mengacu pada Surat Kementerian BUMN Nomor S-4/DKU. MBU/02/2024 tentang Diagnostik Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) bagi BUMN Sistemik A dan B, dan saat ini sedang dalam proses tindak lanjut sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

PGN has also carried out ICoFR diagnostics by referring to the Letter of the Ministry of SOEs No. S-4/DKU.MBU/02/2024 on Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR) Diagnostics for Systemic SOEs A and B, and is currently in the follow-up process according to the agreed time target.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN ISO 31000:2018

Sistem pengendalian internal PGN merujuk pada *Framework* Manajemen Risiko ISO 31000:2018 yang mencakup integrasi, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan Manajemen Risiko di semua bisnis unit Perusahaan. Siklus prosesnya dimulai dari perencanaan awal hingga integrasi faktor internal dan eksternal Perusahaan.

CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH ISO 31000:2018

PGN's Internal Control System refers to the ISO 31000:2018 Risk Management Framework, which covers integrating, planning, implementing, evaluating, and improving Risk Management in all business units in the Company. The process cycle starts from initial planning to integrate the Company's internal and external factors.

EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal diberlakukan kepada Direksi, anggota manajemen, dan personel Perusahaan. Tujuannya adalah memberikan keyakinan atas efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan, laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan.

Evaluasi atas efektivitas, efisiensi dan kepatuhan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan audit oleh *Internal Audit*. Sedangkan efektivitas sebagian sistem pengendalian internal diuji melalui Audit PSA 62 setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal control applies to the Board of Directors, members of the management, and Company personnel. The aim is to provide confidence in the effectiveness and efficiency of the Company's operations, reliable financial reports, and compliance with procedures and regulations.

Evaluation on the effectiveness, efficiency, and compliance in the implementation of the internal control system is carried out through the implementation of audit by the Internal Audit. Meanwhile, the effectiveness of some of the internal control systems is tested through the PSA 62 Audit every year by the Public Accounting Firm.

Berdasarkan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja atas Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dapat disimpulkan bahwa PGN telah mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan serta tidak terdapat masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya yang memiliki kelemahan material.

Based on the Report of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja on Compliance with Legislative Regulations ending on December 31, 2024, and the Report of Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja on Internal Control ending on December 31, 2024, it can be concluded that PGN has complied in all material aspects with certain articles of legislation, rules, contracts, and assistance obligations, and that there are no significant weaknesses in internal control and operations.

Perusahaan selalu menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Audit Internal dan Audit PSA 62 dalam upaya penyempurnaan sistem pengendalian internal, serta agar kegiatan pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan secara efektif. Secara umum sepanjang tahun 2024, sistem pengendalian internal PGN telah berjalan efektif dan efisien.

In an effort to improve the internal control system, the Company always follows up on recommendations resulting from the implementation of internal audits and the PSA 62 Audit, which enables the Company's operational activities to run effectively. In general, throughout 2024, the Internal Control System has been running effectively and efficiently.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Sistem pengendalian internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan tepat.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan yang dijalankan selama tahun 2024 telah memadai dan digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan pengendalian internal Perusahaan yang meliputi:

1. Operasi dijalankan secara efektif dan efisien;
2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;
3. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku; dan
4. Pengamanan aset Perusahaan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for implementing the internal control system as well as possible to achieve the Company's objectives. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, is responsible for carrying out supervision to ensure the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that determine internal control. The internal control system is designed to manage and control risks properly and appropriately.

The Board of Directors and Board of Commissioners stated that the Company's internal control system implemented throughout 2024 was adequate and used to achieve the Company's internal control objectives, which include:

1. Operations are carried out effectively and efficiently;
2. Accurate and reliable financial statements;
3. Compliance with applicable laws and regulations; and
4. Security of Company assets.

FUNGSI KEPATUHAN

Compliance Function

Dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan usaha, PGN senantiasa merujuk pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan untuk memastikan bahwa kegiatan Perseroan patuh pada aturan dan hukum. Fungsi kepatuhan juga merupakan bagian dari Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan di Perusahaan dijalankan oleh beberapa satuan kerja di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Bilahan Struktur Orgnisasi Dasar PT PGN Tbk yaitu:

1. Direktur Utama membawahi fungsi kepatuhan yang melekat kepada satuan kerja:
   a. Corporate Secretary
   b. Internal Audit
   c. Legal Counsel and Compliance
   d. HSSE
   e. Strategic Business Advocacy
2. Direktur Manajemen Risiko membawahi fungsi kepatuhan yang melekat kepada satuan kerja Risk Management.

AUDIT KEPATUHAN DI PGN

Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan. Selain audit laporan keuangan, Kantor Akuntan Publik juga telah melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal dan Peraturan Perundang-undangan (Audit PSA 62) di PGN yang merekomendasikan tindakan perbaikan atas kelemahan pengendalian internal yang berlaku dan interpretasi Perseroan atas implementasi peraturan perundang-undangan.

In making decisions and carrying out business actions, PGN always refers to high moral values and compliance with applicable laws and regulations.

The Company has a compliance function to ensure that the Company's activities comply with rules and laws. The compliance function is also part of Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

COMPLIANCE FUNCTION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The Company's compliance function is carried out by several work units under the Board of Directors in accordance with the Decree of the President Director Decree No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 dated December 24, 2024, on Basic Organizational Structure of PT PGN Tbk, namely:

1. The President Director manages the compliance function within the work unit:
   a. Corporate Secretary
   b. Internal Audit
   c. Legal Counsel and Compliance
   d. HSSE
   e. Strategic Business Advocacy
2. The Director of Risk Management manages the compliance function within the Risk Management work unit.

COMPLIANCE AUDIT AT PGN

The Company's Financial Reports are audited by the Public Accounting Firm (KAP) appointed in accordance with the Annual GMS Resolution. In addition to auditing financial reports, the Public Accounting Firm conducted a Compliance Audit with Internal Control and Legislative Regulations (PSA 62 Audit) at PGN, recommending corrective action for existing internal control weaknesses as well as the Company's interpretation of statutory regulation implementation.

PENGADAAN BARANG/JASA

Procurement of Goods/Services

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Pengadaan barang/jasa menjadi pintu masuk utama bagi penyedia barang/jasa dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional Perseroan. Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran strategis dalam menentukan kinerja Perseroan.

Implementasi proses pengadaan barang/jasa dilakukan untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Perseroan dalam mendukung kegiatan investasi maupun operasional, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik serta target waktu yang ditetapkan, dengan prinsip efektif dan efisien, serta strategi pengadaan barang/jasa yang matang.

Perseroan telah memiliki kebijakan dan ketentuan internal mengenai pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No P-001/31.00/2023 Rev.00 tanggal 30 Oktober 2023 yang berlaku tanggal 1 November 2023 disusun untuk pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, khususnya terkait kegiatan pengadaan barang/jasa. Selain itu Pedoman Pengadaan Barang/Jasa juga telah selaras dengan kebijakan dan ketentuan PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah SubHolding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group, yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-10/C00000/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberlakukan Pertamina Standar Pengadaan Barang/Jasa No. PS-S-022-390-2022 Edisi Ke – 2 tahun 2022. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No P-001/31.00/2023 Rev.00 tanggal 30 Oktober 2023 mengatur tentang:

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa;
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa;
3. Pemilihan penyedia barang/jasa;
4. Kontrak dan amandemen kontrak pengadaan barang/jasa;
5. Penilaian kinerja dan koreksi sanksi penyedia barang/jasa.

Procurement of goods/services becomes a crucial aspect in maintaining the Company's business sustainability. This activity is also the main gateway for goods/services providers in supporting the Company's investment and operating activities. The procurement of goods/services process has a strategic role in determining the Company's performance.

The implementation of the of goods/services procurement process is carried out to obtain goods/services needed by the Company to support investment and operational activities, the process of which starts from planning the need for goods/services to the handover of work results, with competitive prices and good quality, and within specified time target, with effective and efficient principles, as well as a thorough goods/services procurement strategy.

The Company has established internal policies and provisions regarding the procurement of goods/services stipulated in the Guidelines for Procurement of Goods/Services No. P-001/31.00/2023 Rev.00 dated October 30, 2023, effective November 1, 2023 which was prepared to comply with applicable regulatory provisions, namely Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03.2023 dated March 3, 2023, on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, particularly related to the procurement of goods/services. Furthermore, the procurement of goods/services is also in line with the policies and provisions of PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas Holding, in which the Company is a Gas Subholding as part of the Pertamina Group, namely the Decree of the President Director of Pertamina (Persero) No. Kpts-10/C00000/2023 dated July 17, 2023, on the Enforcement of Pertamina Standards for the Procurement of Goods/Services No. PS-S-022-390-2022 2nd Edition of 2022. Guidelines of Procurement of Goods/Services No. P-001/31.00/2023 Rev.00 dated October 30, 2023, regulates the following:

1. Registration of goods/services providers;
2. Planning for procurement of goods/services;
3. Selection of goods/services providers;
4. Contracts and amendments to procurement of goods/services; and
5. Performance assessment and correction of sanctions for goods/services providers.

Adapun metode pengadaan barang/jasa dilakukan Perseroan tidak terbatas pada:

1. Tender Terbuka, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara diumumkan guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa secara lebih luas.
2. Pemilihan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan mengundang lebih dari 1 (satu) penyedia barang/jasa yang diyakini terbatas sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Tender Terbatas, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang ditawarkan kepada seluruh penyedia barang/jasa teregistrasi atau terdaftar yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Tender Cepat, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang yang diikuti Penyedia barang/jasa teregistrasi atau terdaftar dengan membandingkan harga tanpa melalui penilaian kualifikasi khusus, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis dan masa sanggah.
5. Sinergi Pertamina Incorporated, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk 1 (satu) Subholding Pertamina/Anak Perusahaan Pertamina/Perusahaan Terafiliasi Pertamina.
6. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa, atau penunjukan berdasarkan hasil *Beauty Contest.*
7. Pengadaan Langsung, yaitu metode pemenuhan kebutuhan barang yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga pasar (*market price*), termasuk dalam hal ini E-Purchasing.

Untuk mendorong proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif dan efisien, Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa. Hal ini selaras dengan implementasi digitalisasi pengadaan barang/jasa yang dicanangkan oleh PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah SubHolding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan oleh Perseroan antara lain:

1. Aplikasi iVendor Pertamina dipakai oleh Perseroan sejak 31 Mei 2023, aplikasi ini membantu dalam standarisasi proses pendaftaran penyedia barang/jasa, dimana Perseroan dapat menggunakan *data base* penyedia barang/jasa yang ada di Pertamina Group.
2. Aplikasi SMART-GEP, dipakai oleh Perseroan sejak 12 Agustus 2024, aplikasi ini membantu dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dimana proses permintaan pengadaan, pengumuman/undangan pengadaan hingga kontrak dapat dilakukan melalui aplikasi ini.

The Company's methods for the procurement of goods/services are not limited to:

1. Open Bidding, namely a method a fulfilling the needs for goods/services that is caried out through announcements in order to provide opportunities to providers of goods/services more widely.
2. Direct Selection, namely a method of fulfilling the needs for goods/services that is implemented by inviting more than 1 (one) supplier of goods/services which are believed to be limited according to the work to be carried outs.
3. Selective Bidding, namely a method of fulfilling the needs for goods/services that is offered to all registered goods/services providers who meet the general qualification requirements according to the work to be carried out.
4. Fast Bidding, namely a method of fulfilling the needs for goods/services followed by registered goods/services Providers by comparing process without going through special qualification assessments, administrative offer evaluations, technical offer evaluations, and objection periods.
5. Sinergi Pertamina Incorporated, namely a method of fulfilling the needs for goods/services by appointing 1 (one) Pertamina Subholding/Pertamina Subsidiary/Pertamina Affiliated Company
6. Direct Appointment, namely a method of fulfilling the needs for goods/services that is implemented by appointing 1 (one) goods/services provider, or appointment based on Beauty Contest results.
7. Direct Procurement, namely a method of fulfilling the needs for goods that is available on the market based on the prevailing market price, in this case including E-Purchasing.

To encourage a more effective and efficient procurement process for goods/services, the Company utilizes the use of information technology in the form of applications to support the procurement process for goods/services. This is in line with the implementation of digitalization of procurement of goods/services initiated by PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas Holding, where the Company is a Gas SubHolding as part of the Pertamina Group. Some of the applications used by the Company include:

1. The Pertamina iVendor application, which has been used by the Company since May 31, 2023. This application assists in standardizing the registration process for providers of goods/services, in which the Company can use the database of goods/services providers in the Pertamina Group.
2. The SMART-GEP application, used by the Company since August 12, 2024, this application assists in the process of selecting goods/service providers, in which the procurement request process, procurement announcements/invitations, up to contracts can be carried out through this application.

Perseroan juga berupaya untuk mendorong proses pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan serta Kebijakan Sustainability yang telah ditetapkan oleh Perseroan, dengan tetap memperhatikan prinsip dan praktik yang berlaku umum (*best practice*). Pada tanggal 25 Juni 2024, Perseroan juga telah mengeluarkan Kebijakan *Green Procurement* - berkaitan dengan aspek lingkungan, dan Kebijakan Sosial Untuk *Supplier*, Vendor, dan Kontraktor - berkaitan dengan aspek sosial yaitu: ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, dalam pengadaan barang/jasa.

The Company has also made efforts to encourage a sustainable procurement process for goods/services, this is in line with the Quality, HSSE, and Anti-Bribery Policy, as well as Sustainability Policy that has been established by the Company, while still taking into account to generally applicable principles and practices (best practice). On June 25, 2024, the Company has also issued the Green Procurement Policy – related to environmental aspects, and Social Policy for Suppliers, Vendors, and Contractors – related to social aspects, namely labor and Human Rights, in the procurement of goods/services.

Perseroan senantiasa melakukan pembinaan kepada penyedia barang/jasa dengan mengadakan sosialisasi atau refreshment terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan, sesuai dengan porsi dan peruntukannya, antara lain:

1. Visi dan misi Perseroan;
2. Kebijakan pengadaan barang/jasa, khususnya terkait pendaftaran penyedia barang/jasa dan aplikasi SMART GEP;
3. Kebijakan *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE), khususnya terkait *Contractor Safety Management System* (CSMS); dan
4. GCG, etika usaha, dan anti penyuapan.

The Company always provides guidance to the provider of goods/services through dissemination or refreshment of the Company's applicable provisions, according to the portion and purpose, including:

1. The Company's vision and mission;
2. Goods/services procurement policy, particularly related to the registration of goods/services providers and the SMART GEP application;
3. Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) policy related to the Contractor Safety Management System (CSMS); and
4. GCG, business ethics, and anti-bribery.

Selain Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Perseroan juga telah memiliki Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri No. P-001/A050 tanggal 23 Desember 2022 yang memberikan kebijakan dan ketentuan internal mengenai penggunaan produk dalam negeri di Perseroan khususnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang/jasa. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan menjadi Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri No P-002/10.01/2024 Rev.00 tanggal 30 April 2024, yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2024, untuk menyelaraskan kebijakan dan ketentuan PT Pertamina (Persero) selaku Holding Minyak dan Gas, dimana Perseroan adalah Subholding Gas sebagai bagian dari Pertamina Group, yaitu Pedoman Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri No A3.5-03/L10000/2023-S9 tanggal 3 Oktober 2023.

In addition to the Guidelines for Procurement of Goods/Services, the Company has also established the Guidelines for Increasing the Use of Domestic Products No. P-001/A050 dated December 23, 2022, which provides internal policies and provisions regarding the use of domestic products in the Company, particularly the Domestic Component Level (TKDN) in the procurement of goods/services. This guidelines have been updated to Guideilnes for Increasing the Use of Domestic Products No P-002/10.01/2024 Rev.00 dated April 30, 2024, which took effect on July 1, 2024, to align with the policies and provisions of PT Pertamina (Persero) as the Oil and Gas Holding, where the Company is a Gas Subholding as part of the Pertamina Group, namely the Guidelines for the Managing the Increased Use of Domestic Products No. A3.5-03/L10000/2023-S9 dated October 3, 2023.

KEBIJAKAN ANTISUAP DAN KORUPSI

Anti-Bribery and Corruption Policy

PROGRAM DAN PROSEDUR

PGN berkomitmen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan serta menerapkan Kebijakan Antikorupsi, dengan menerapkan Sistem Manajeman Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dengan prinsip 4 NO's:

- *No Bribery,* tidak boleh ada suap-menyuap dan pemerasan;
- *No Kickback,* tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya;
- *No Gift,* tidak boleh ada hadiah/gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- *No Luxurious Hospitality,* tidak boleh ada penyambutan dan jamuan mewah yang berlebihan.

Pada tahun 2024, PGN telah mengembangkan ruang lingkup (*extend scope*) penerapan SMAP ISO 37001: 2016 untuk memastikan proses bisnis Perusahaan dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang bersih.

Selain itu beberapa anak perusahaan PGN telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di antaranya adalah PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution dan PT Permata Graha Nusantara.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Perusahaan berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab Legal Counsel and Compliance.

Program atau Prosedur dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Selama tahun 2024, PGN melaksanakan beragam program atau prosedur yang dapat mendorong dan memastikan tidak adanya praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi seperti:

1. Pembuatan Surat Pernyataan Komitmen Perwira Subholding Gas dalam menerapkan GCG dan Etika Usaha/Etika Kerja termasuk komitmen tidak menerima suap/gratifikasi atau tidak memberikan suap (anti suap) melalui aplikasi COMPOLS (*Compliance Online Systems*) dan GOLS (*GCG Online Systems*). Aplikasi GOLS digunakan untuk pekerja Anak Perusahaan, sedangkan aplikasi COMPOLS digunakan untuk para pekerja PGN.
2. Penandatanganan pakta integritas yang menyatakan pemahaman atas kebijakan anti penyuapan dan anti

PROGRAMS AND PROCEDURES

PGN is committed to carrying out business activities by adhering to and implementing the Anti-Corruption Policy and by enforcing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System with the 4 NO's principles:

- No Bribery, no bribery or extortion allowed;
- No Kickback, no commissions, and no receipts, either in the form of money or other forms;
- No Gift, no gifts/gratuities that are contrary to applicable rules and regulations; and
- No Luxurious Hospitality, no extravagant receptions, and no entertainment.

In 2024, PGN has extended the scope of implementing SMAP ISO 37001:2016 to ensure that the Company's business processes are carried out in accordance with the principles of clean governance.

In addition, several PGN subsidiaries have implemented the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, including PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution, and PT Permata Graha Nusantara.

The Company's Anti-Bribery Management System is under the management and responsibility of Legal Counsel and Compliance.

Programs or Procedures for Overcoming Corruption, Kickbacks, Fraud, Bribery, and/or Gratification Practices

During 2024, PGN implemented various programs or procedures that could encourage and ensure the absence of corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification, such as:

1. Issuing a Commitment Statement for Gas Subholding Employees in implementing GCG and Business Ethics/Work Ethics, including a commitment not to accept or give bribes (anti-bribery) through the COMPOLS (Compliance Online) and GOLS (GCG Online Systems) applications. The GOLS application was used for Subsidiary employees, while the COMPOLS application for PGN employees.
2. The signing of an integrity pact stating the understanding of the anti-bribery and corruption policy by all employees

korupsi oleh seluruh karyawan setiap tahunnya melalui aplikasi COMPOLS (*Compliance Online Systems*) dan GOLS (*GCG Online Systems*).

3. Penilaian aspek integritas pada proses rekrutmen bagi calon Perwira Subholding Gas dan *fit and proper test* pada proses promosi Perwira Subholding Gas.
4. Pembuatan Pakta Integritas bagi Perwira Subholding Gas yang diangkat jabatannya atau dipromosikan.
5. Pembuatan Pakta Integritas pada setiap dilakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa bagi Calon Penyedia Barang dan Jasa maupun Pengguna Barang Jasa.
6. Pembuatan Pakta Integritas bagi Pengelola Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Menayangkan Video Sosialisasi terkait Kebijakan Mutu, HSSE dan Anti Penyuapan pada setiap proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam tahap Rapat Penjelasan (*pre-bid meeting*) dan Rapat Klarifikasi & Negosiasi.
8. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penyuapan yang dituangkan dalam Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan.
9. Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 dilaksanakan menggunakan prinsip 4 NO's. Dengan perluasan ruang lingkup (*extend scope*) Sertifikasi ISO 37001:2016 semula 2 satuan kerja menjadi 9 satuan kerja.
10. Internalisasi prinsip 4 NO's dan Etika ke dalam program *self assesment* budaya AKHLAK.
11. Aktif dalam kegiatan HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia)
12. PGN melakukan proses *due diligence* untuk seluruh pekerja PGN melalui uji integritas berupa CISI *Test*.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTIKORUPSI

Setiap tahun, PGN secara rutin telah melakukan kampanye kesadaran anti korupsi, anti penyuapan, pengendalian gratifikasi, *fraud*, melalui channel digital berupa email blasting kepada seluruh pekerja, dan selama tahun 2024 Program *awareness*/pelatihan/sosialisasi Antikorupsi yang dilaksanakan Perusahaan, antara lain:

1. Pembaharuan pernyataan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik etika usaha/kerja, anti korupsi, anti suap serta pengendalian gratifikasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan Audit Internal SMAP tanggal 20 Juni s.d. 19 Juli 2024 .
3. *Sharing session* ke anak perusahaan dan area.
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Anti Korupsi (BIMTEK) dengan KPK dengan tema: "Mewujudkan Pelaku Usaha Antikorupsi melalui Penanaman Nila-nilai Integritas", bertujuan memberikan *refreshment* anti korupsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat serta Pekerja PT PGN Tbk dan Anak Perusahaan/Afiliasi-nya (*offline* dan *online*).
5. Meraih *The Best Implementation Prevention of Bribbery Program 2024* di lingkungan Pertamina Group.

every year through the COMPOLS (Compliance Online) and GOLS (GCG Online Systems) applications.

3. Assessment of integrity aspects in the recruitment process for prospective Subholding Gas Employees and fit and proper tests in the Subholding Gas Employee promotion process.
4. Making an Integrity Pact for Promoted Gas Subholding Employees.
5. Making an Integrity Pact at every stage of the Procurement of Goods and Services for Prospective Goods and Service Providers as well as Users of Goods and Services.
6. Making an Integrity Pact for Managers of the Procurement of Goods and Services.
7. Showing Socialization Videos related to Quality, HSSE, and Anti-Bribery Policies in each process of selecting goods/ service providers in the Pre-Bid Meeting and Clarification & Negotiation Meeting stages.
8. Overseeing the implementation of the procurement of goods and services that are free of Corruption, Collusion, and Nepotism, as well as Bribery, as outlined in the Preparation of Minutes of Investigation and Minutes of Work Handover.
9. The Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 was strengthened using the 4 NO's principle. With the extended scope of ISO 37001:2016 Certification from 2 work units to 9 work units.
10. Internalization of the 4 NO's and Ethics principles into the AKHLAK culture self-assessment program.
11. Active in the International Anti-Corruption Day activities.
12. PGN did a due diligence process for all PGN employees through an integrity test in the form of the CISI Test.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOSIALIZATION

Every year, PGN routinely conducts anti-corruption, anti-bribery, gratification control, and fraud awareness campaigns, through digital channels in the form of email blasting to all employees, and during 2024, Anti-corruption awareness/ training/ socialization programs implemented by the Company, among others:

1. Updating the statement of commitment to implementing good corporate governance, business/work ethics, anti-corruption, anti-bribery, and gratification control for the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Conducted an internal audit of SMAP on June 20 to July 19, 2024.
3. Sharing sessions to subsidiaries and areas.
4. Organizing Technical Guidance (BIMTEK) for Anti-Corruption Business Actors with the KPK with the theme: "Realizing Anti-Corruption Business Actors through the Instillment of Integrity Values", which aims to provide anti-corruption refreshment to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Officials and Employees of PT PGN Tbk and its Subsidiaries/ Affiliates (offline and online).
5. Received The Best Implementation Prevention of Bribery Program 2024 within the Pertamina Group.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control

PGN memiliki dan menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan BOD dan BOC pada tanggal 31 Desember 2024 Kebijakan tersebut menjadi dasar penerapan pengendalian gratifikasi untuk mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja, pencegah benturan kepentingan serta pencegah kecurangan.

PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pengendalian gratifikasi merupakan komitmen Perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengelolaan Gratifikasi melalui Tim UPG, di mana terdapat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di bawah *Legal Counsel and Compliance* (LCC)yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas No. 033700.ST/PW.05.02/LGL/2024 tertanggal 2 September 2024 dengan masa tugas tim terhitung sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi. UPG akan menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG baik yang dalam penanganan maupun tindak lanjut penetapan kepemilikan dan pemanfaatan gratifikasi kepada KPK secara berkala setiap bulan. Selain itu, secara berkala dalam setiap bulannya, UPG menyampaikan laporan perkembangan dan evaluasi hasil implementasi Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan kepada Direksi.

Apabila terdapat penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan melalui e-mail ke tim UPG (PGN.upg@pertamina.com) atau melalui website KPK (www.gol.kpk.go.id).

ETIKA TERKAIT GRATIFIKASI

Didalam Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) mengatur Etika mengenai Menerima dan Memberi Hadiah adalah sebagai berikut:

1. Perwira Subholding Gas tidak menerima hadiah/cendera mata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:
   a. Menerima *hospitality* dalam bentuk jamuan makan dalam suatu acara atau *event* tertentu yang berlaku umum dan wajar.
   b. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi yang berlaku umum dan bukan dimaksud untuk menyuap.

PGN has and implements Conflicts of Interest Guidelines and Gratification Control Guidelines, which have been established by the BOC and BOD on December31, 2024. these policies serve as the basis of gratification control implementation to encourage the implementation of business and work ethics, as well as to prevent conflicts of interest and fraud.

GRATIFICATION MANAGEMENT

Gratification control is the Company's commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance. Gratification Management through the UPG Team, which is under Legal Counsel and Compliance (LCC), that was ratified based on Assignment Letter No. 033700.ST/PW.05.02/LGL/2024 dated September 2, 2024, with the team's term of office starting from September 1, 2024, to December 31, 2024.

The Gratification Control Unit Team has duties as stated in the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines. GCU will submit a recapitulation report on the handling of reports on receiving gratification managed by GCU, both in handling and following up on determining the ownership and utilization of gratification to the Corruption Eradication Commission (KPK) on a monthly basis. In addition, GCU submits progress reports and evaluates the results of the implementation of the Gratification Control Program within the Company to the Board of Directors periodically every month.

Any gratuities received must be reported via e-mail to the UPG team (PGN.upg@pertamina.com) or via the KPK website (www.gol.kpk.go.id).

ETHICS RELATED TO GRATIFICATION

In the Code of Conduct, the ethics regarding receiving and giving gifts are regulated as follows:

1. Gas Subholding Employees do not accept gifts/ souvenirs/ gratification in any form related to their position or work, except:
   a. Receiving hospitality in the form of a banquet at a certain event that is generally accepted.
   b. Receiving promotional items that include the logo/ name of the giving company, which is generally accepted and is not intended to be bribery.

2. Perwira Subholding Gas dapat memberikan hadiah/ cenderamata, donasi/sumbangan dan *entertainment* kepada pihak lain dengan syarat:
   a. Menunjang kepentingan Perusahaan.
   b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap.
   c. Telah di rencanakan atau dianggarkan oleh Perusahaan.
   d. Telah mendapatkan otorisasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
   e. Bukan merupakan pemberian atau janji kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan yang diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penjabaran lebih lengkap terkait penerimaan dan pemberian Hadiah dijelaskan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

PGN dengan tegas melarang penerimaan gratifikasi. Setiap pihak yang mengetahui adanya Perwira Subholding Gas yang memberikan/menerima hadiah atau gratifikasi kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan pribadi maupun PGN, dapat melaporkan kepada Perusahaan melalui *Whistleblowing System.* Sepanjang tahun 2024, terdapat 2 (dua) laporan gratifikasi di Perusahaan yang telah dilaporkan ke KPK dan telah mendapatkan penetapan status oleh KPK.

BUDAYA ANTI GRATIFIKASI

PGN menanamkan budaya anti gratifikasi kepada seluruh Perwira Subholding Gas melalui berbagai cara, di antaranya:

1. *E-mail blast* tanggal 16 Agustus 2024 dari tim UPG ke ke Perwira Subholding misalnya dengan tema: suap, gratifikasi, pemerasan dan uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang diatur hukumannya dalam undang-undang, Katakan Tidak untuk Korupsi.
2. Penetapan Surat Edaran Direksi tentang Larangan Penerimaan dan/atau Pemberian Hadiah Terkait Hari Raya Keagamaan Atau Perayaan Hari Besar Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris Dan pekerja Di Lingkungan Subholding Gas yang diterbitkan 2 (dua) kali setahun, sebagai bentuk komitmen Perwira Subholding Gas untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.
3. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT PGN Tbk telah melaksanakan sosialisasi kepada Perwira Subholding Gas dan refreshment terkait pengendalian gratifikasi kepada Satuan Kerja dan Anak Perusahaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi juga mengkoordinasikan pelaksanaan pengisian Surat Pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun oleh seluruh Pekerja di lingkungan Subholding Gas melalui aplikasi COMPOLS (*Compliance Online Systems*) dan GOLS (GCG *Online Systems*).

2. Gas Subholding Employees may give gifts/ souvenirs, donations, and entertainment/ hospitality to other parties under the following conditions:
   a. Supporting the interests of the Company.
   b. Not intended as a bribery.
   c. Has been planned or budgeted by the Company.
   d. Have obtained the appropriate authorization and can be clearly accounted for.
   e. Not a gift or promise to parties related to the Company that are known or reasonably suspected to influence of affect the said party to perform or not perform something in its position, which is contrary to its obligations.

A detailed description of the acceptance and giving of gifts is stipulated in the Conflicts of Interest and Gratification Control Policy.

GRATIFICATION CONTROL REPORT 2024

PGN strictly prohibits receiving gratification. Any party who is aware of any Gas Subholding Employee giving/receiving gifts or gratification to/from stakeholders on behalf of themselves or PGN, can report it to the Company through the Whistleblowing System. During 2024, there were 2 (two) gratification report in the Company, which had been submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) and had obtained status by the Corruption Eradication Committee.

ANTI-GRATIFICATION CULTURE

PGN instills an anti-gratification culture among all Gas Subholding Employees through various means, including:

1. Email blast on August 16, 2024, from the GCU to Subholding Employees, for example with theme: bribery, gratuities, extortion, and kickbacks are forms of corruption for which the punishment is regulated by law. Say No to Corruption.
2. Determination of the Board of Directors' Circular Letter regarding the Prohibition of Accepting and/or Giving Gifts Related to Religious Holidays or Other Major Holiday Celebrations for the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees within the Gas Subholding, which is issued twice a year, which is a form commitment of Gas Subholding Employees to refuse gratification in any form.
3. The Gratification Control Unit (GCU) Team has conducted outreach to Gas Subholding Employees and refreshments regarding gratification control to Work Units and Subsidiaries. The Gratification Control Unit Team also coordinates the implementation of filling out Statement Letters regarding rejection, acceptance and/ or giving of Gratification periodically 2 (two) times a year by all Employees within the Gas Subholding through the COMPOLS (Compliance Online Systems) and GOLS (GCG Online Systems) applications.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM

Prevention Against Insider Trading

Perwira Subholding Gas memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan informasi yang belum dipublikasikan. Setiap Perwira Subholding Gas, yang dalam pekerjaannya memiliki akses ke informasi rahasia, dilarang untuk menggunakan atau berbagi informasi tersebut untuk tujuan lain, kecuali untuk kepentingan Perusahaan.

Seluruh informasi tentang Perseroan yang belum dipublikasikan dianggap sebagai informasi rahasia atau sebagai Informasi Orang Dalam. Jika informasi tersebut disalahgunakan, khususnya terkait perdagangan efek, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang dalam (*insider trading*). *Insider trading* dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Etika Perwira Subholding Gas memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang lebih memadai;
2. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
3. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja; dan
4. Menjaga kerahasiaan informasi dan data tentang pelanggan maupun jaringan/infrastruktur Perseroan serta data-data atau informasi lainnya yang dianggap informasi rahasia oleh Perseroan.

Gas Subholding Employees are committed to maintaining the confidentiality of Company information, especially ones that have yet been published. Every Gas Subholding Employee, who has access to confidential information, is prohibited from using or sharing such information for other purposes except for the interests of the Company.

All information about the Company that has yet been published shall be considered confidential information or as Insider Information. This information, when abused, especially regarding securities trading, may be categorized as insider trading. Insider trading is prohibited by provisions laws and regulations.

Based on Business Ethics and Work Ethics, Gas Subholding Employees utilize Company data and information to improve its added value and decision-making process by:

1. Using a more adequate data security system;
2. Preventing the dissemination of data and information to other unauthorized parties during and after their employment period;
3. Submit all data relating to the Company upon termination of employment; and
4. Maintaining the confidentiality of information and data on customers and the Company's network/infrastructure as well as other data or information deemed confidential by the Company.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Management of State Officials' Wealth Reports

KEBIJAKAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LHKPN

Kebijakan mengenai kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dijalankan PGN dengan mengacu pada Keputusan Direksi No. 012800.K/KP.00/HCGS/2017 tanggal 29 September 2017 dan Surat Keputusan Direktur Direksi PT Pertamina (Persero) Nomor: No. Kpts-03/C00000/2021-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Anak Perusahaan. Kebijakan ini mengatur pejabat di lingkungan PGN yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK, sanksi bagi wajib lapor yang tidak mengisi, melaporkan dan menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan koordinator unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN.

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORTS (LHKPN) SUBMISSION AND MANAGEMENT POLICY

The policy regarding compliance with the reporting of assets of state officials is implemented by PGN pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 012800.K/KP.00/HCGS/2017 dated September 29, 2017, and Decree of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) No. Kpts-03/C00000/2021-S0 on Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN) and Subsidiaries. This policy regulates officials within PGN who are obliged to fill in and submit LHKPN to KPK, sanctions for reporters who do not fill in, report, and submit LHKPN according to the predetermined time limit, and unit coordinators responsible for LHKPN management activities.

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan, pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN yaitu:

a. Direksi dan Dewan Komisaris PGN;
b. Pekerja PGN setingkat PRL 13 sampai dengan 24;
c. Pekerja PGN yang diperbantukan di Anak Perusahaan/ Afiliasi termasuk yang ditugaskan sebagai Direktur Anak Perusahaan/Afiliasi.

LHKPN COMPULSORY REPORT

Based on State Official's Wealth Report Policy, officials who are required to complete and report their wealth are:

a. PGN Board of Directors and Board of Commissioners
b. PGN employees at PRL 13 to 24 levels
c. PGN employees who are seconded to Subsidiaries/ Affiliates including those assigned as Directors of Subsidiaries/Affiliates

PENGELOLA LHKPN PGN

Pelaksanaan pelaporan LHKPN di PGN dikelola oleh unit Pengelolaan e-LHKPN dengan menunjuk Pejabat Struktural sebagai Koordinator Unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan e-LHKPN yang berada pada Human Capital Management Division.

PGN LHKPN MANAGEMENT

The implementation of LHKPN reporting at PGN is managed by the e-LHKPN Management unit by appointing a Structural Official as the Unit Coordinator responsible for e-LHKPN management in the Human Capital Management Division.

PELAKSANAAN LHKPN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, terdapat pelaksanaan pendampingan pengisian dan bimbingan teknis terkait LHKPN. Kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 Januari - 31 Maret 2024 oleh Human Capital Management Division. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada situs https://elhkpn.kpk.go.id. Informasi tingkat kepatuhan Pejabat yang wajib mengisi dan melaporkan LHKPN telah ditampilkan pada *website* Perusahaan bagian e-LHKPN. Hingga Desember 2024, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayawan pejabat PGN sebesar 100%.

LHKPN IMPLEMENTATION IN 2024

In 2024, there was an implementation of assistance in filling out and technical guidance regarding LHKPN. This activity was conducted in the period of January 01 to March 31, 2024, by the Human Capital Management Division. The reporting can be carried out through the e-LHKPN application on the website https://elhkpn.kpk.go.id. Information on the compliance level of officials who are required to fill out and report the LHKPN has been presented on the Company's e-LHKPN website. As of December 2024, the compliance rate for reporting the PGN officials' assets is 100%.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System

PGN memiliki dan menjalankan sistem manajemen risiko yang berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023, terutama pada BAB III Penerapan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan peraturan Menteri BUMN di atas, PGN menerapkan sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perusahaan melalui langkah-langkah:

- Penetapan kebijakan manajemen risiko;
- Perencanaan, penerapan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan; dan
- Proses pelaporan manajemen risiko baik kepada Pertamina selaku Holding Migas maupun Direksi dan Komisaris PGN sebagai manajemen puncak Perusahaan.

Berdasarkan PER-2, PGN dinilai harus memenuhi Organ Pengelola Risiko sesuai pasal 55, maka pada Rapat Pemegang Saham Tahunan 2024 tanggal 30 Mei 2024 ditetapkan Bapak Arief Kurnia Risdianto sebagai Direktur Manajemen Risiko yang membawahi 3 (tiga) satuan kerja yaitu :

1. *Risk Strategy and Integrated Governance*;
2. *Operational Risk, Internal Control & Business Continuity*;
3. *Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk.*

PGN has established and implements a risk management system that refers to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 (PER-2) on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which was stipulated on March 3, 2023, especially in CHAPTER III Risk Management Implementation for State-Owned Enterprises.

Pursuant to the abovementioned Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) regulation, the risk management system implemented by PGN aims to protect and create value for the Company through the following measures:

- Determination of risk management policy;
- Planning, implementation, monitoring, and evaluation of the Company's risk management implementation; and
- Risk management reporting process to both Pertamina as the Oil and Gas Holding and the Directors and Commissioners of PGN as the Company's top management.

Based on PER-2, PGN is considered to have fulfilled the Risk Management Organ, in accordance with Article 55, subsequently at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on May 30, 2024, Mr. Arief Kurnia Risdianto was appointed as the Director of Risk Management, which oversees 3 (three) work units, namely:

1. Risk Strategy and Integrated Governance
2. Operational Risk, Internal Control & Business Continuity
3. Project Risk, Portfolio, and Counterparty Risk

PROFIL GROUP HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY

PROFILE OF GROUP HEAD OPERATIONAL RISK, INTERNAL CONTROL & BUSINESS CONTINUITY

Eri Surya Kelana	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Padang pada 21 Maret 1971. Usia 53 tahun per 31 Desember 2024. Domisili di Jakarta	Indonesian citizen, born in Padang on March 21, 1971. 53 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti dan melanjutkan program Master Ilmu Administrasi pada Universitas Indonesia	Graduated from Trisakti University with Bachelor's Degree in Accounting and received a Master degree of Administrative Studies from Universitas Indonesia
	Riwayat pekerjaan: Pada tahun 1997 beliau memulai kariernya di PGN. Sejumlah posisi penting dicapai beliau di antaranya sebagai Kepala Divisi Akuntansi pada tahun 2010 – 2011, Direktur Keuangan PT Saka Energi Indonesia di tahun 2011 – 2013, Direktur Keuangan & Administrasi PT PGN LNG Indonesia tahun 2013 – 2017, Senior Officer Taxation PGN (2017 – 2019), Direktur Keuangan & Administrasi PT Gagas Energi Indonesia di tahun 2019 – 2021, Group Head Treasury PGN tahun 2021 – 2022 dan telah menjabat di manajemen risiko PGN sejak tahun 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Group Head Operational Risk, Internal Control and Business Continuity di tahun 2024	Work experience: In 1997 he started his career at PGN. He assumed a number of important positions, including Head of Accounting Division in 2010 - 2011, Finance Director of PT Saka Energi Indonesia in 2011 - 2013, Director of Finance & Administration of PT PGN LNG Indonesia in 2013 - 2017, Senior Officer Taxation PGN (2017 - 2019), Director of Finance & Administration of PT Gagas Energi Indonesia in 2019 – 2021, Group Head Treasury PGN in 2021 – 2022, and has served in Risk Management at PGN since 2022 with the last position as Group Head Operational Risk, Internal Control and Business Continuity in 2024
	Sertifikasi yang dimiliki: Certified Risk Professional (CRP), Certified Contract Drafter (CCD), Certified Professional Management Accountant (CPMA), Certified Risk Governance Professional (CRGP) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan CPA Australia	Certification: Certified Risk Professional (CRP), Certified Contract Drafter (CCD), Certified Professional Management Accountant (CPMA), Certified Risk Governance Professional (CRGP) by Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), and CPA Australia

PROFIL DIVISION HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE

PROFILE OF DIVISION HEAD RISK STRATEGY AND INTEGRATED GOVERNANCE

Rezki Anindhito	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 16 Agustus 1972. Usia 52 tahun per 31 Desember 2024. Domisili di Jakarta	Indonesian citizen, born in Surabaya on August 16, 1972. 52 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti lalu melanjutkan program Master of Science in Finance pada University of Denver dan Master of Science in Mineral Economics pada Colorado School of Mines. Kemudian mendapatkan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy in Economics pada Colorado State University	Graduated from Trisakti University with Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, then continued with Master of Science in Finance program at the University of Denver and Master of Science in Mineral Economics at the Colorado School of Mines. He then received his Doctorate of Philosophy in Economics from Colorado State University.
	Riwayat pekerjaan: Pada tahun 1999 beliau memulai kariernya di PGN. Mengawali karir di PGN di keproyekan, lalu melanjutkan karir di bagian Strategic Planning dan Corporate Finance. Telah menjabat di bidang Manajemen Risiko PGN sejak 2018 dan terakhir menjabat sebagai Division Head Risk Strategy and Integrated Governance sejak 2024	Work experience: He started his career at PGN in 1999. Beginning in project management, he continued his career in Strategic Planning and Corporate Finance. He has served in Risk Management at PGN since 2018 and most recently served as Division Head Risk Strategy and Integrated Governance since 2024
	Sertifikasi yang dimiliki: *Certified Risk Professional* (Manajemen Risiko Utama) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Certification: Certified Risk Professional (Primary Risk Management) by the National Professional Certification Agency

PROFIL DIVISION HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK

PROFILE OF DIVISION HEAD PROJECT RISK, PORTFOLIO & COUNTERPARTY RISK

Muhamad Rofiq Arrosyid	Profil	Profile
	Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 30 Agustus 1980. Usia 44 tahun per 31 Desember 2024. Domisili di Jakarta	Indonesian citizen, born in Bandung on August 30, 1980. 44 years old as of December 31, 2024. Domiciled in Jakarta
	Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sains Matematika dari Universitas Padjadjaran dan menyelesaikan program Master Practising Accounting dari Monash University	Graduated from Universitas Padjadjaran with a Bachelor of Science in Mathematics and completed the Master Practising Accounting program from Monash University
	Riwayat pekerjaan: Bergabung di PGN pada tahun 2021 di PGN sebagai satuan kerja Audit Internal, dan menjabat di manajemen risiko sejak 2023 dengan posisi terakhir adalah Division Head Project Risk, Portfolio & Counterparty Risk sejak 2024	Work experience: He joined PGN in 2021 as internal auditor, and served in risk management since 2023 with the last position as Division Head Project Risk Portfolio & Counterparty Risk since 2024
	Sertifikasi yang dimiliki: Certified Risk Professional (Manajemen Risiko Utama) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), *Certified Fraud Examiner* (CFE), Certified Internal Auditor (CIA)	Certification: Certified Risk Professional (Primary Risk Management) by the National Professional Certification Agency, Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Internal Auditor (CIA)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Manajemen Risiko secara satu direktorat tersendiri dalam Perusahaan mengalami beberapa pengembangan selama tahun 2024 dengan perkembangan terakhir ditetapkan dalam Keputusan Direksi PGN No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 tentang Tata Kerja Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko tanggal 24 Desember 2024 antara lain:

1. Mengelola strategi, kebijakan, prosedur, tingkat maturitas dan sistem manajemen risiko Perusahaan serta pelaksanaan dan pengelolaan risiko termasuk kegiatan *advisory* dan konsultasi atas implementasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan PGN dan Subholding Gas Group;
2. Mengelola keselarasan kebijakan dan implementasi kebijakan manajemen risiko di lingkup Subholding Gas;
3. Mengelola penyelerasan kebijakan risiko *ongoing business*, *project*/investasi, stratejik dengan Holding Migas;
4. Mengelola Budaya Sadar Risiko;
5. Mengelola profil risiko Korporat, melakukan *challenge session* atau FGD serta merumuskan dan mengelola profil risiko utama (*top risk*) PGN dan Subholding Gas Group;
6. Memonitor implementasi *risk treatment* sesuai dengan *acceptable residual risk level* PGN baik risiko *ongoing business* maupun risiko *project*;
7. Mengelola batas toleransi risiko;
8. Mengelola evaluasi dan monitoring *loss event* risiko baik *ongoing business* maupun *project*
9. Melakukan pengelolaan *early warning system* pada risiko *ongoing business* maupun *project*;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT

The duties and responsibilities of Risk Management as a separate directorate within the Company underwent several developments during 2024, with the most recent development as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PGN No. 085700.K/OT.00/PDO/2024 on Work Procedures of the Directorate of Finance and Risk Management dated December 24, 2024, including:

1. Managing the Company's risk management strategy, policies, procedures and systems as well as implementation and risks management, including advisory and consulting activities on the implementation of risk management policies within PGN and the Gas Subholding Group;
2. Managing the alignment of poilicies and implementation of risk management policies within the Gas Subholding;
3. Managing the alignment of ongoing business, project/investment, strategic risk policies with the Oil and Gas Holding;
4. Managing a risk awareness culture;
5. Managing the Corporate risk profiles, conducting challenge sessions or FGDs, as well as formulating and managing the top risks of PGN and Gas Group Subholding;
6. Monitoring the implementation of risk treatment in accordance with PGN's acceptable residual risk for both ongoing business risks and project risks;
7. Managing risk tolerance limits;
8. Managing the evaluation and monitoring of loss event risks for both ongoing business and projects;
9. Managing the early warning system for both ongoing business and projects;

10. Mengelola Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB) atau *Business Continuity Management System* (BCMS) serta *Contigency Plan;*
11. Mengelola *Cyber Security Risk, Aset Integrity* serta memulai pengembangan Internal *Control Testing*;
12. Mengelola *Risk Analysis* pada *Final Investment Decision* (Proyek Strategis), *Portfolio, Counterparty, Partnership*/ Kerja Sama Bisnis, *Emerging Risk* dan Risiko terkait ESG; dan
13. Menyusun laporan manajemen risiko kepada Direksi, fungsi manajemen risiko Holding Migas, maupun *stakeholder* lainnya yang terkait.

TUGAS DAN FUNGSI *RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM*

Pemilik risiko (*risk owner*) dapat dibantu *Risk Management Champions Team (RCT)* dalam melaksanakan proses manajemen risiko untuk masing-masing satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN. RCT adalah personel-personel terpilih, cakap dan mampu untuk bertugas berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 017701.K/PR.06.01/ FIN/2024 tanggal 30 April 2024.

Tugas RCT antara lain :

- Menjalankan fungsi manajemen risiko dengan cara melakukan koordinasi dan memfasilitasi proses manajemen risiko (penentuan konteks, kriteria, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, *monitoring*, kaji ulang, konsultasi, dokumentasi, melaporkan serta komunikasi) yang dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*);
- Melakukan pemantauan atas besaran biaya pengendalian risiko (*cost of risk*) yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dan menetapkan metode untuk pengukuran efisiensi dan efektivitas biaya pengendalian risiko tersebut dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai;
- Dengan persetujuan dari pemilik risiko (*risk owner*), melaporkan pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fungsi *Risk Management* selaku Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan melaporkannya secara periodik maupun sewaktu-waktu jika diperlukan oleh SKMR;
- Melaporkan pemantauan pelaksanaan penanganan risiko pada Satuan Kerja PGN atau Anak Perusahaan/Afiliasi PGN secara berkala. Untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan kategori *'Low', 'Low to Moderate', 'Moderate',* dan *'Moderate to High'* dilakukan monitoring melalui laporan triwulanan untuk kategori *'High'* monitoring dilakukan minimal sekali dalam setiap bulannya atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Manajemen PGN maupun SKMR. Untuk pemantauan pelaksanaan penanganan risiko dengan dengan kategori *Top Risk* diatur dalam ketentuan terpisah.

10. Managing Business Continuity Management System (BCMS) and Contingency Plan;
11. Managing Cyber Security Risk, Asset Integrity, and initiating the development of Internal Control Testing;
12. Managing Risk Analysis on Final Investment Decision (Strategic Project), Portfolio, Counterparty, Partnership/ Business Cooperation, Emerging Risk and ESG related Risk; and
13. Preparing risk management reports to the Board of Directors, the Oil and Gas Holding risk management function, and other relevant stakeholders.

RISK MANAGEMENT CHAMPIONS TEAM DUTIES AND FUNCTIONS

Risk owners can be assisted by the Risk Management Champions Team (RCT) in conducting the risk management process for each working unit in PGN and PGN's subsidiaries/ affiliates. RCTs are selected and capable personnel qualified to serve based on the Decree of the Board of Directors of PGN No. 017701.K/PR.06.01/FIN/2024 dated April 30, 2024.

The duties of the RCT include:

- Implementing the risk management function by coordinating and facilitating the risk management process (determining context, criteria, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk handling, monitoring, review, consultation, documentation, reporting and communication) conducted by the risk owner;
- Monitoring the amount for cost of risk control required by Working Units at PGN or PGN Subsidiaries/Affiliates and determine methods for measuring the efficiency and effectiveness of cost of risk control compared to the results that have been achieved;
- With the approval of the risk owner, reporting the implementation of risk management in the Working Unit at PGN or PGN Subsidiary/Affiliate by utilizing the information system application in accordance with the provisions stipulated by the Risk Management function as the Risk Management Working Unit and report it periodically or at any time if required;
- Reporting the implementation monitoring of risk management in PGN Working Units or PGN Subsidiaries/ Affiliates on a regular basis. To monitor the implementation of risk management in the 'Low', 'Low to Moderate', 'Moderate', and 'Moderate to High' categories, the monitoring is conducted through quarterly reports. For the 'High' category, monitoring is carried out at least once a month or as determined by PGN Management and Risk Management Working Units. Monitoring the implementation of risk management with the Top Risk category is regulated in separate provisions.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan peran RCT sebagai *Implementator* BCMS yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kapabilitas dalam penyusunan, evaluasi dan pembaruan dokumen (kertas kerja) dan dokumen pendukung lainnya dalam implementasi dan pengelolaan *Business Continuity Management System* (BCMS) berdasarkan ISO 22301:2019.

In 2024, there was an additional role for RCT as a BCMS Implementer who assumes the duties, responsibilities and capabilities to prepare, evaluate and update documents (working papers) and other supporting documents in the implementation and management of the Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301:2019

IMPLEMENTASI *FRAMEWORK* ISO 31000:2018

Perusahaan terus mengikuti perkembangan dan pemutakhiran konsep, prosedur dan pelaporan manajemen risiko, tidak hanya yang diterapkan oleh BUMN lainnya tetapi perusahaan-perusahaan lain yang lebih unggul dalam mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko.

Merujuk pada Survei Nasional Manajemen Risiko 2018 yang dilakukan '*Center for Risk Management Studies Indonesia*' (CRMS Indonesia), diketahui sekitar 67,5% perusahaan di Indonesia telah menerapkan ISO 31000 (versi 2009 maupun 2018) disusul COSO-ERM 15% dan standar lainnya 17,5%.

Secara keseluruhan ISO 31000 dapat digunakan luas pada berbagai industri, sebab sifat ISO 31000 tidak spesifik ditujukan untuk menyeragamkan implementasi manajemen risiko lintas perusahaan, tetapi memberikan standar pendukung acuan penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini menjadi landasan bagi Perusahaan untuk menerapkan standar ISO 31000:2018 dalam implementasi pengelolaan manajemen risiko kepada satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN.

IMPLEMENTATION OF ISO 31000:2018 FRAMEWORK

The Company continues to follow the development and updates of risk management concepts, procedures and reporting, not only those implemented by other State-Owned Enterprises but also by other companies deemed to have implemented better risk management.

The 2018 National Risk Management Survey conducted by the 'Center for Risk Management Studies Indonesia' (CRMS Indonesia) suggests that approximately 67.5% of companies in Indonesia have adopted ISO 31000 (2009 and 2018 versions), 15% COSO-ERM while the remaining 17.5% have adopted other standards.

Overall, ISO 31000 can be widely used in various industries, due to the nature of ISO 31000 that is not specifically aimed at uniting the implementation of risk management across companies but rather provides a standard supporting reference for the implementation of risk management to support the achievement of company goals. This is the basis for the Company to apply the ISO 31000:2018 standards in the implementation of Risk Management for working units at PGN and PGN subsidiaries/ affiliates.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Sejak tahun 2019, Perusahaan telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang digunakan dalam rangka registrasi risiko, *monitoring* pemantauan risiko dan penyusunan profil risiko secara *online* dan *real-time* sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan manajemen atas risiko terkait aspek operasional maupun proyek/investasi serta monitoring yang dilakukan oleh Pertamina selaku Holding Migas.

Kemudian pada tahun 2020, PGN mengembangkan serta menyempurnakan SIMR baik untuk '*Ongoing Business Risk*' maupun '*Project Risk*', dengan tetap mengutamakan kemudahan penggunaan aplikasi SIMR oleh RCT maupun pemantauan *dashboard* SIMR oleh manajemen PGN. Peningkatan implementasi dan utilisasi SIMR untuk seluruh RCT baik dalam lingkup satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN juga didukung dengan ditetapkannya Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Instruksi Kerja.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT

The Company has implemented the Risk Management Information System since 2019 which is used for risk register, risk monitoring, and risk profiles preparation by online and in real-time to facilitate management decision making on risks related to operational and project/ investment aspects while monitoring is exercised by Pertamina as the Oil and Gas Holding Company.

Furthermore, in 2020, PGN developed and refined RMIS for both 'Ongoing Business Risk' and 'Project Risk', while still prioritizing ease of use of the RMIS application by RCTs and monitoring the dashboard by PGN management. Improving the implementation and utilization of SIMR for all RCTs both within the scope of work units at PGN and PGN's subsidiaries/ affiliates, is also supported by the establishment of Work Reference Documents in the form of Work Instructions.

Pada tahun 2022, pengembangan dan penyempurnaan SIMR '*Ongoing Business Risk*' maupun '*Project Risk*' kembali dilakukan dengan konsentrasi pada penambahan fitur dan *tools* yang dapat melengkapi implementasi dan utilisasi SIMR seperti fungsi *auto-generate database*.

Pada tahun 2023, Pertamina selaku Holding Migas memberikan arahan strategis inisiatif untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi yaitu *Enterprise Risk Management Systems* versi 2.0 (ERMS 2.0) baik untuk risiko yang dimiliki oleh satuan kerja di PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN. Sehingga pada tahun 2023 pelaporan manajemen risiko PGN dan Pertamina telah terintegrasi dengan sempurna dan efektif dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2023, fungsi *Risk Management* PGN juga mengembangan Sistem *Database* Manajemen Risiko (DAMARA) sebagai salah satu inovasi yang ditujukan untuk mengelola digitalisasi surat, dokumen kajian risiko dan dokumen pendukung lainnya dalam memastikan kemudahan pencarian arsip yang diperlukan oleh Manajemen Puncak.

Kemudian pada tahun 2024, Perusahaan telah menggunakan sistem informasi risiko terintegrasi ERMS 2.0 yang telah diimplementasikan sampai dengan lingkup Anak Perusahaan/ Afiliasi PGN.

EVALUASI ATAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

PGN sebagai Subholding Gas telah menerapkan penilaian maturitas pengelolaan manajemen risiko. Pada tahun 2024, Perusahaan melakukan pengukuran *Risk Maturity Assessment* (RMA) menggunakan metode pengukuran berdasarkan ketentuan dan tata pelaksanaan dalam SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, setelah sebelumnya pada menggunakan metodologi yang ditetapkan dalam '*Pertamina Risk Maturity Self-Assessment*' (PRISMA).

Pelaksanaan RMA dilakukan atas 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Dimensi serta Aspek Kinerja.

- Pada aspek dimensi, parameter yang diukur mengadopsi 3 (tiga) pilar ISO 31000:2018, yaitu *Principles, Framework* dan *Process*. Adopsi ini dijabarkan menjadi 5 (lima) poin penilaian, yaitu budaya dan kapabilitas risiko, organisasi & tata kelola risiko, kerangka risiko & kepatuhan, proses kontrol risiko, dan model, data & teknologi risiko, yang dilaksanakan dengan pendekatan pengumpulan bukti dokumen, survei, dan wawancara yang mewakili semua organ risiko seperti *Risk Owner,* unit kerja manajemen risiko, unit satuan pengendali internal, unit kerja kepatuhan, Direksi dan Komisaris.

In 2022, the SIMR 'Ongoing Business Risk' and 'Project Risk' was further developed and improved with a concentration on the addition of more features and tools that complement the current implementation and utilization of SIMR, such as the auto-generate database function.

Moreover, as things were progressing in 2023, Pertamina as the Oil and Gas Holding gave strategic direction for the initiative to implement an integrated risk management information system, referred to as Enterprise Risk Management Systems version 2.0 (ERMS 2.0), for risks in working units at PGN and PGN subsidiaries/affiliates. Therefore, in 2023 PGN and Pertamina's risk management reporting was completely and effectively integrated in one budget year.

In 2023, PGN's Risk Management function also developed the Risk Management Database System as one of the innovations aimed at managing the digitization of letters, risk assessment documents, and other supporting documents for Top Management to search the archive with ease.

Furthermore, in 2024, the COmpany has utilized the integrated risk information system ERMS 2.0, which has been implemented up to the scope of PGN Subsidiaries/ Affiliates.

RISK MANAGEMENT SYSTEM EVALUATION

PGN as Gas Subholding has implemented a risk management maturity assessment. In 2024, the Company conducted the Risk Maturity Assessment (RMA) using a measurement method that is based on the implementation provisions and procedures in SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Instruction for Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises, after previously using the methodology specified in the 'Pertamina Risk Maturity Self-Assessment' (PRISMA).

RMA implementation is carried out based on 2 (two) aspects, namely the Dimension Aspect and the Performance Aspect.

- In the dimension aspect, the parameters are measured by adopting the 3 (three) pillars of ISO 31000:2018, namely Principles, Framework, and Process. This adoption is described in 5 (five) assessment points, namely risk culture and capabilities, risk organization & governance, risk & compliance framework, risk control process, and risk model, data & technology, which are implemented through the approach of collecting documentary evidence, surveys, and interviews representing all risk organs, such as Risk Owner, risk management unit, internal control unit, compliance unit, Board of Directors, and Board of Commissioners.

- Pada aspek kinerja, parameter yang diukur adalah berdasarkan tingkat kesehatan Perusahaan (*rating* Perusahaan) serta peringkat komposit risiko. Hasil penilaian akhir RMA adalah memperhitungkan skor dari parameter aspek dimensi dan aspek kinerja.

Skor penilaian dan pengukuran RMA PGN sebesar 3,4 dari skala 5, menunjukan Perusahaan berada pada Fase Praktik yang Baik.

Selanjutnya, pada tahun 2025, PGN terus melakukan monitoring dan perbaikan atas peluang perbaikan (OFI) yang telah dipetakan dalam laporan pelaksanaan RMA sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan capaian *Risk Maturity Index* (RMI) agar lebih optimal pada pelaksanaan evaluasi maturitas risiko berikutnya.

ROADMAP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Integrasi dan implementasi kebijakan pengelolaan risiko di Perusahaan diharapkan mencapai level optimal. Hal tersebut memerlukan proses dan implementasi dalam jangka waktu cukup panjang dan senantiasa dievaluasi atas pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan.

- In the performance aspect, the parameters are measured based on the Company's soundness level (Company rating) and the composite risk rating. The final RMA assessment result is by considering the scores of the dimensional and performance aspects' parameters.

The assessment and measurement score of PGN's RMA is 3.4 on a scale of 5, indicating that the company is in the Good Practice Phase.

Moreover, in 2025, PGN will continue to monitor and improve the opportunities for improvement (OFI) that have been mapped in the previous RMA implementation report. This aims to improve the achievement of the Risk Maturity Index (RMI) to be more optimal in the implementation of the next risk maturity evaluation.

RISK MANAGEMENT ROADMAP

The integration and implementation of risk management policies in the Company is expected to reach the optimal level. This requires a process and implementation in a long period of time and is constantly evaluated for the achievements that have been made.

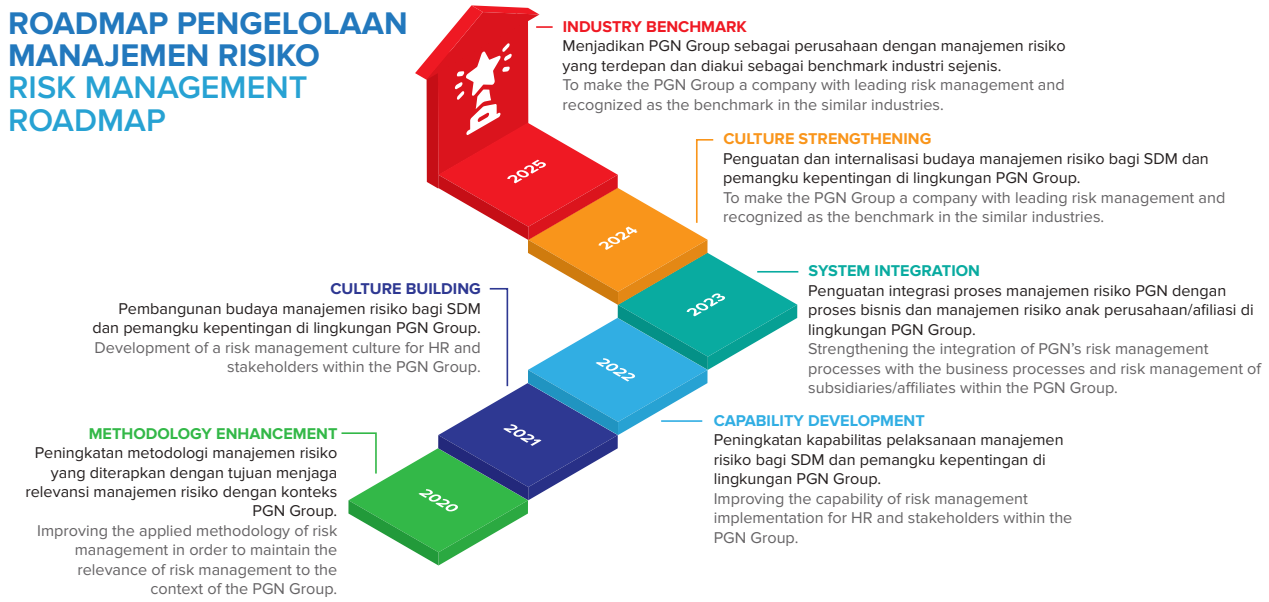

Pasca dilakukannya pengukuran maturitas tahun 2023 dan 2024, selanjutnya ditetapkan *Opportunity For Improvement* (OFI) dan *Action For Improvement* (AFI) sebagai bagian dan evaluasi dari Roadmap Pengelolaan Manajemen Risiko perusahaan secara berkesinambungan.

Following the successful maturity measurements in 2023 and 2024, Opportunity For Improvement (OFI) and Action For Improvement (AFI) were determined as part of the company's continuous Risk Management Roadmap.

SERTIFIKASI PERSONEL

Penyusunan dan pengawasan profil risiko memerlukan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memahami proses pengelolaan risiko mulai tahap identifikasi hingga penanganan risiko secara optimal. Selain itu, PER-2 BUMN juga mendorong persyaratan untuk organ pengelola risiko agar memenuhi sertifikasi yang sesuai dengan pengelolaan risiko. Hingga akhir tahun 2024, PGN telah memiliki beberapa personel yang memiliki sertifikasi manajemen risiko, antara lain:

PERSONNEL CERTIFICATION

Preparing and monitoring risk profiles require the availability in human resources with strong comprehension of the entire risk management process from the identification stage to running an optimum risk management. furthermore, PER-2 SOEs also encourages requirement for risk management organs to meet the certifications in accordance with risk management. By the end of 2024, PGN has a number of certified personnel in risk management certification, as listed below:

SERTIFIKASI PERSONEL MANAJEMEN RISIKO
Risk Management Personnel Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification			
		***Certified Risk Professional* oleh BNSP** Certified Risk Professional by BNSP	***Business Continuity Management Certified Professional* oleh BNSP** Business Continuity Management Certified Professional by BNSP	***Certified Risk Management Professional* oleh BNSP** Certified Risk Management Professional by BNSP	***Certified Risk Governance Professional* oleh BNSP** Certified Risk Governance Professional by BNSP
Eri Surya Kelana	Group Head, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity	✓	-	-	✓
Rezki Anindhito	Division Head, Risk Strategy and Integrated Governance	✓	-	-	-
M. Rofiq Arrosyid	Division Head, Project Risk, Portfolio and Counterparty Risk	✓	-	-	-
Amanarita	Principal Expert I, Risk Management Implementation	✓	✓	-	-
Diana Yulianty	Sr. Expert II, Business Support Risk Management	✓	✓	-	-
Leli Mulyani	Sr. Expert II, Risk Management Implementation	✓	✓	-	-
Puji Arman	Sr. Analyst II, Risk Management Implementation	✓	-	✓	-
Bima Satria Agung	Sr. Analyst I, Risk Management Implementation	✓	-	-	-
Heru Setiawan	Analyst II, Risk Management Implementation	✓	✓	✓	-
Kevin Jeremia Situmeang	Jr Analyst, Business Support Risk Management	✓	✓	✓	-
Muhammad Rizki Putranda	Jr Analyst, Business Support Risk Management	✓	-	-	-
Masaji Suryo Jatmiko	Assistant, Risk Management Implementation	-	✓	-	-

STRATEGI RISIKO PERUSAHAAN

a. Kebijakan Selera Risiko

Dalam rangka melindungi dan menciptakan nilai Perusahaan guna mencapai pertumbuhan perusahaan, Pernyataan selera risiko (*risk appetite statement)* sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki *zero appetite* terhadap aktivitas yang melanggar kepatuhan/*compliance* (*fraud*) serta berkomitmen untuk mencegah perilaku tersebut.
2. Perusahaan mengambil risk *appetite normal* dalam menetapkan Batas Toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima setelah melakukan tindakan penanganan risiko (*risk treatment*) sebagai perwujudan *medium appetite* terhadap *risk capacity* Perusahaan.
3. Perusahaan memiliki *high appetite* terhadap aktivitas investasi dengan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Perusahaan memiliki *zero appetite* terhadap pemenuhan *financial covenant*.
5. Perusahaan memiliki *medium appetite* terhadap aspek likuiditas Perusahaan.
6. Perusahaan memiliki preferensi *zero appetite* terhadap jumlah insiden yang terhitung sebagai NoA.
7. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap paparan fluktuasi pasar.
8. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap risiko reputasi, dengan menjaga *Corporate Index* agar tercipta kepercayaan publik terhadap Perusahaan.
9. Perusahaan memiliki preferensi *low appetite* terhadap tingkat nilai ESG, sehingga program ESG dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

b. Kebijakan Ambang Batas Risiko

Kebijakan ambang batas risiko menggambarkan tingkat risiko yang dapat diterima/ditoleransi oleh perusahaan yang terdiri dari *risk capacity* yang merupakan kemampuan financial perusahaan dalam menghadapi eksposur risiko, *risk tolerance* merupakan nilai ambang batas risiko yang dapat diterima oleh perusahaan untuk pengelolaan risiko agar tetap dalam *risk appetite*, dan *risk limit* yang merupakan nilai batas risiko yang dimiliki perusahaan untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi berdasarkan aktivitas yang direncanakan dalam mencapai target perusahaan.

RISK MANAGEMENT IN THE COMPANY

a. Risk Appetite Policy

In the context of protecting and creating the Company's value in order to achieve company growth, the following is the risk appetite statement:

1. The Company has zero appetite for activities that violate compliance (fraud) and is committed to preventing such behavior.
2. The Company adopts a normal risk appetite in determining the acceptable Risk Tolerance Limit after carrying out risk treatment measures as a manifestation of the medium appetite for the Company's risk capacity.
3. The Company has high appetite for investment activities while taking into account the principles of Good Corporate Governance.
4. The Company has zero appetite for fulfilling financial covenants.
5. The Company has medium appetite for the Company's liquidity aspect.
6. The Company has zero appetite preference for the number of incidents that count as NoA.
7. The Company has low appetite preference for exposure to market fluctuations.
8. The Company has low appetite preference for reputational risk, by maintaining the Corporate Index to create public confidence in the Company.
9. The Company has low appetite preference for ESG value levels, ensuring that ESG programs can provide benefits to society and the environment.

b. Risk Threshold Policy

The risk threshold policy describes the level of risk that can be accepted/ tolerated by the Company, consisting of risk capacity, which is the Company's financial ability to face risk exposure, risk tolerance, which is the risk threshold value that can be accepted by the Company for risk management to remain within the risk appetite, and risk limit, which is the risk limit value that the Company has to manage risks that may occur based on planned activities to achieve its targets.

PENGELOLAAN RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024, PGN sebagai Subholding Gas mengelola risiko korporat terintegrasi yang meliputi risiko dari masing-masing satuan kerja di PGN maupun risiko yang berasal dari anak perusahaan/afiliasi PGN.

Pelaporan dan *monitoring* pengelolaan risiko korporat disampaikan kepada Pertamina dan Manajemen Puncak PGN dalam bentuk '*Top Risk Subholding Gas 2024*' dengan periode *monitoring* yang dilakukan dalam jangka waktu 1 kali dalam sebulan secara berkesinambungan.

Proses penetapan *top risk* tersebut dilakukan menggunakan mekanisme identifikasi dan analisis 2 (dua) arah yaitu *top-down* dan *bottom-up* atas *all-risk* yang telah diregistrasi oleh pemilik risiko (*risk owner*). *All-risk* tersebut selanjutnya dilakukan seleksi kandidat *top risk* dengan menggunakan skema *funneling process* meliputi *threshold, self-asesment, sorting, scoring* dan *clustering,* yang selanjutnya kandidat *top risk* akan disahkan oleh Dewan Komisaris Subholding Gas sebagai *Top Risk Subholding Gas 2024* dalam buku RKAP 2024.

Penjabaran *Top Risk* Korporat Subholding Gas 2024 untuk kategori '*Ongoing Business*' untuk risiko yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif adalah sebagai berikut:

Top Risk Ongoing Business - 2024:

- Risiko terkait sengketa arbitrase;
- Risiko mengenai reviu tarif pipa transmisi;
- Risiko mengenai penurunan *gross margin* niaga gas sektor industri dan kelistrikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT);
- Risiko mengenai tidak optimalnya pemanfaatan pembayaran uang muka pembelian gas;
- Risiko mengenai transaksi jual beli LNG yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan kontrak;
- Risiko mengenai *impairment* piutang;
- Risiko mengenai kehilangan/kerusakan/kebocoran data pada sistem komputer *database* Perusahaan; dan
- Risiko mengenai pelanggaran aspek HSSE.

Adapun daftar nama proyek yang menjadi Top Risk 2024 meliputi:

Top Risk Project - 2024:

- Pembangunan Pipa Minyak Mentah Koridor Minas -Duri-Dumai dan Koridor Balam - Bangko – Dumai;
- Revitalisasi LNG Tank F-6004 & Fasilitas Pendukung Lainnya;
- Pembangunan Terminal LNG Jawa Timur "Proyek LNG Teluk Lamong";
- 4 (empat) Proyek Pembangunan Jargas yang terdiri dari Jargas Bekasi Selatan, Pasar Kemis, Periuk dan Bintaro;
- WK Pangkah – *Workover* UPB-12; dan
- WK Pangkah – *Drilling Explore* Ronggolawe-3.

RISK MANAGEMENT IN THE COMPANY

Throughout 2024, PGN as a Gas Subholding managed integrated corporate risks, which include risks from each work unit in PGN as well as risks originating from PGN subsidiaries/ affiliates.

Reporting and monitoring of corporate risk management is submitted to Pertamina and PGN Top Management in the form of 'Top Risk Subholding Gas 2024' with a monitoring period carried out once a month on an ongoing basis.

The top risk determination process was conducted using a 2 (two) way identification and analysis mechanism, namely top-down and bottom-up for all-risk registered by the risk owner. The all-risk candidates were then selected using a funneling process scheme including threshold, self-assessment, sorting, scoring and clustering, after which the top risk candidates were ratified by the Gas Subholding Board of Commissioners as the 2024 Gas Subholding Top Risk in the 2024 Company Work Plan and Budget.

The description of the 2024 Corporate Gas Subholding Top Risks for the 'Ongoing Business' category for quantitative and qualitative risks is as follows:

Top Risk Ongoing Business - 2024:

- Risks related to arbitrage;
- Risks on tariff review of transmission pipes;
- Risks on the decrease in gross margin of gas trading in the HGBT industrial and electricity sectors;
- Risks on suboptimal utilization of advance payments for gas purchases;
- Risks in LNG sale and purchase transactions that cannot be carried out in accordance with the contract;
- Risks of impairment of receivables;
- Risks in loss/ damage/ leakage of data on the Company's database computer system; and
- Risks of violation of HSSE aspects.

The list of project names that are the 2024 Top Risk includes:

Top Risk Project - 2024:

- Construction of the Crude Oil Pipelines for the Minas-Duri-Dumai Corridor and Balam-Bangko-Dumai Corridor;
- Revitalization of the F-6004 LNG Tank & Other Supporting Facilities;
- Construction of East Java LNG Terminal "Teluk Lamong LNG Project";
- 4 (four) Gas Network Development Projects consisting of South Bekasi, Pasar Kemis, Periuk and Bintaro Gas Networks;
- WK Pangkah – Workover UPB-12; and
- WK Pangkah – Drilling Explore Ronggolawe-3.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Sebagai pemenuhan terkait dengan Organ Pengelola Risiko sesuai dengan PER-2 BUMN, struktur tata kelola manajemen risiko di PGN di tahun 2024 mengalami perubahan signifikan sebagai berikut:

a. Setelah diangkatnya Direktur Manajemen Risiko pada Rapat Pemegang Saham Tahunan 2024 tanggal 30 Mei 2024, secara struktur organisasi fungsi manajemen risiko yang berada pada satuan kerja *Risk Management* menjadi satu-satunya divisi yang ada pada Direktorat Manajemen Risiko. Setelah itu, berdasarkan Keputusan Direksi PGN No. 036800.K/OT.0/HCGS/2024, struktur organisasi pada Direktorat Manajemen Risiko mengalami perubahan dengan adanya tiga satuan kerja, yaitu *Risk Strategic and Integrated Governance, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity dan Project Risk, Portfolio and Counterparty Risk*.

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

As a fulfillment related to the Risk Management Organ in accordance with PER-2 BUMN, the risk management governance structure at PGN in 2024 experienced the following significant changes:

a. After the appointment of the Director of Risk Management at the 2024 Annual Shareholders Meeting on May 30, 2024, in terms of organizational structure, the risk management function in the Risk Management unit became the only division in the Risk Management Directorate. Moreover, based on the Decree of the Board of Directors of PGN No. 036800.K/OT.0/HCGS/2024, the organizational structure of the Risk Management Directorate changed with the existence of three work units, namely Risk Strategic and Integrated Governance, Operational Risk, Internal Control and Business Continuity and Project Risk, Portfolio and Counterparty Risk.

b. Terkait sistem pelaporan, menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, sejak Juni 2024, fungsi manajemen risiko melaporkan pengelolaan manajemen risiko kepada Direktur Manajemen Risiko selaku 'Chief Risk Officer' (CRO).

b. Regarding the reporting system, in line with changes in the organizational structure, since June 2024, the risk management function reports the management of risk management to the Director of Risk Management as the 'Chief Risk Officer' (CRO).

Hingga saat ini PGN mengadopsi prinsip *Three Lines Model* sebagai acuan tata kelola pengelolaan risiko sejalan dengan pengelolaan risiko yang diimplementasikan oleh Holding Migas dan telah sesuai dengan persyaratan dari PER-2 BUMN. Penerapan *three lines model* juga ditujukan untuk memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban masing-masing lini dalam menghadapi serta mengelola taksonomi risiko yang dihadapi Perusahaan.

Until now, PGN has adopted the Three Lines Model principle as a reference for risk management governance in line with the risk management implemented by Oil and Gas Holding and has complied with the requirements in PER-2 BUMN. The application of the three lines model is also aimed at ensuring the accountability and responsibility of each line in facing and managing the taxonomy of risks faced by the Company.

PROGRAM MENINGKATKAN BUDAYA SADAR RISIKO PERUSAHAAN

Risk Management sebagai fungsi yang bertugas dalam mengelola manajemen risiko PGN pada tahun 2024 telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan *awareness* dan maturitas manajemen risiko Perusahaan melalui kegiatan sebagai berikut:

- *Upskilling dan Refreshment* Aplikasi ERMS 2.0 Pertamina, format pelaporan bulanan serta pelaporan risiko lainnya di lingkup Subholding Gas;
- *Refreshment* Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dan PER-2 BUMN melalui *cross-sharing* dengan satuan kerja PGN lainnya maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;

PROGRAM TO IMPROVE COMPANY'S RISK AWARENESS CULTURE

Risk Management, as the working unit that has duties in managing PGN's risk management in 2024 has implemented several programs to improve awareness and maturity of the Company's risk management through the following activities:

- Upskilling and Refreshment of Pertamina's ERMS 2.0, monthly reporting format, as well as the reporting of other risks in the Gas Subholding scope;
- Refreshment of Risk Management based on ISO 31000:2018 and PER-2 BUMN through cross-sharing with other PGN working units and PGN subsidiaries/affiliates;

- Pelaksanaan *Sharing Session* mengenai BCMS ISO 22301:2019 kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelaksanaan *Risk Management Forum* (RMF) Pertamina Across the Group pada bulan Desember 2024 dengan tema 'Indonesia *Global Outlook* 2025: *Beware of the Snake*';
- *Benchmark pengelolaan risiko dengan Angkasa Pura II, PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Patra Niaga*
- Pelaksanaan *Risk Management Forum* (RMF) di lingkup internal Subholding Gas yang diselenggarakan masing-masing Anak Perusahaan/Afiliasi;
- Penyelenggaraan Acara Budaya Sadar Risiko kepada RCT di satuan kerja PGN maupun anak perusahaan/afiliasi PGN;
- Pelatihan dan sertifikasi Auditor Internal BCMS ISO 22301:2019 lingkup Subholding Gas;
- Paparan implementasi *Living Core Values* (LCV) AKHLAK lingkup Pertamina Group tahun 2024;
- Pemberian RCT *Awards* dan BCMS *Awards* Tahun 2024; dan
- Pelaksanaan sertifikasi CRP dan sertifikasi BCMCP oleh BNSP.

- Implementation of a Sharing Session regarding Business Continuity Management System (BCMS) ISO 22301:2019 for RCTs at PGN working units and PGN subsidiaries/ affiliates;
- Implementation of Risk Management Forum (RMF) Pertamina Across the Group in December 2024 with the theme 'Indonesia Global Outlook 2025 Beware of the Snake'
- Risk management benchmark with Angkasa Pura II, PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Patra Niaga;
- Implementation of the Risk Management Forum (RMF) within the internal scope of Gas Subholding, which was organized in each Subsidiary/ Affiliated Company;
- Organizing Risk Awareness Cultural Events for RCTs in PGN work units and PGN subsidiaries/affiliates;
- Training and certification of Internal Auditors BCMS ISO 22301:2019 for the Gas Subholding scope;
- Exposure to the implementation of Living Core Values (LCV) AKHLAK within Pertamina Group in 2024;
- Presenting the 2024 RCT Awards and BCMS Awards; And
- Implementation of CRP certification and CRP certification by BNSP.

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN BISNIS

Selama tahun 2024, kondisi ekonomi global masih melanjutkan ketidakpastian dan ketidakstabilan, terutama akibat ketegangan geopolitik di Eropa Barat dan Timur Tengah yang secara tidak langsung mempengaruhi *supply demand* energi global bahkan hingga di regional Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tahun 2024, kinerja ekonomi dalam negeri mencatat pertumbuhan yang positif dan tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global meskipun dengan faktor ketidakpastian yang masih cukup tinggi dirasakan oleh industri domestik.

Menghadapi tantangan ini, PGN terus menerapkan sistem manajemen kelangsungan bisnis (*Business Continuity Management Systems*) atau Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (SMKB) dengan mengacu pada ISO 22301:2019 untuk satu siklus penuh (*full cycle)* sejak tahun 2022, serta pada tahun 2023, dilakukan perluasan lingkup implementasi SMKB sampai ke kantor Area, dan pada tahun 2024 juga memulai implementasi awal pada lingkup Anak Perusahaan/Afiliasi.

Pada triwulan terakhir 2024, PGN berhasil meraih Sertifikat ISO 22301 *Business Continuity Management System*, dengan lingkup sertifikasi meliputi Kantor Pusat, Sales Operation Region II, Area Jakarta dan Area Bekasi, sebagai wujud komitmen dan kesiapan dalam menghadapi disrupsi bisnis, membangun masa depan yang lebih stabil, dan berkembang secara berkelanjutan.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION

The global economic condition throughout 2024 was still marked with uncertainty and instability, especially due to geopolitical tensions in Western Europe and the Middle East which indirectly affected global energy supply and demand even in the Southeast Asia region, including Indonesia. In 2024, domestic economic performance recorded positive growth and remained strong amidst global economic challenges although certain industries still experienced quite high levels of uncertainty domestically.

Facing these challenges, PGN continues to implement Business Continuity Management Systems (BCMS) based on ISO 22301:2019 for one full cycle starting in 2022, and in 2023, the scope of BCMS implementation was expanded to Area offices, and in 2024, initial implementation will also begin in the scope of Subsidiaries/ Affiliates.

In the last quarter of 2024, PGN successfully obtained the ISO 22301 Business Continuity Management System Certificate, with the scope of certification covering the Head Office, Sales Operation Region II, Jakarta Area, and Bekasi Area, as a form of commitment and readiness in facing business disruption, building a more stable and developed future in a sustainable manner.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko di PGN tidak lepas dari komitmen Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Manajemen Puncak yang selaras dengan *frameworks* manajemen risiko ISO 31000:2018. Bentuk komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi Subholding Gas oleh seluruh Direksi PGN serta diketahui dan disetujui oleh seluruh Direktur Utama Anak Perusahaan/Afliliasi PGN. Piagam tersebut juga dilakukan pemutakhiran secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun sebagai bentuk pemenuhan terhadap PER-2/MBU/03/2023 BUMN. Selain itu, sesuai dengan PER-2 tersebut, Dewan Komisaris juga telah menyetujui kebijakan-kebijakan manajemen risiko, seperti, namun tidak terbatas kepada: kebijakan three lines model, kebijakan selera, kapasitas dan toleransi risiko, kebijakan pengukuran risiko dan kebijakan sistem informasi risiko.

Pengelolaan risiko di PGN juga telah dilengkapi dengan Dokumen Acuan Kerja (DAK) berupa Pedoman, Prosedur Operasi serta Instruksi Kerja yang digunakan sebagai dasar dari seluruh kegiatan manajemen risiko di perusahaan. Pada tahun 2024, satuan kerja *Risk Management* telah menyeleraskan dan menerapkan Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pedoman Pengelolaan SMKB sejalan dengan arahan Pertamina selaku Holding Migas.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management at PGN cannot be separated from the commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners as Top Management, which is in line with ISO 31000:2018 risk management framework. This commitment is realized by the signing of the Gas Subholding Risk & Resilience Management Charter by all PGN Directors and acknowledged and approved by all President Directors of PGN Subsidiaries/Affiliates. The charter is also updated periodically at least once a year as a form of compliance with BUMN PER-2/MBU/03/2023. Furthermore, in accordance with PER-2, the Board of Commissioners has also approved a number of risk management policies, including but not limited to: three lines model policy, risk appetite, capacity, and tolerance policy, risk measurement policy, and risk information system policy.

Risk management at PGN has also been equipped with Work Reference Documents in the form of Guidelines, Operational Procedures and Work Instructions, which are used as the basis for all risk management activities in the Company. In 2024, the Risk Management work unit has prepared and aligned the Risk Management Guidelines and BCMS Management Guidelines in line with Pertamina's directives as the Oil and Gas Holding.

Sebagai wujud pemenuhan persyaratan dari PER-2 BUMN tersebut, pada tahun 2024 juga telah dibentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) di PGN berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PGN Nomor Kep-04/D-KOM/2024 pada 28 Maret 2024 yang dipimpin oleh Komisaris Utama PGN dengan anggota adalah semua Komisaris Utama Anak Perusahaan/ Afiliasi. Pembentukan KTKT bertujuan untuk memperkuat serta melengkapi implementasi manajemen risiko di seluruh lini Perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem manajemen risiko yang dimiliki PGN telah memadai dan mampu mengantisipasi setiap risiko yang dimiliki Perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya hasil pengukuran RMA PGN berada pada "Fase Praktik yang baik" dan diperoleh sertifikasi ISO 22301:2019 *Business Continuity Management System*.

PGN juga terus melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko secara periodik, mulai dari tingkat fungsi, satuan kerja, hingga level manajemen senior yang tercermin dalam agenda rutin rapat Direksi yang selalu menyertakan pengelolaan risiko menjadi salah satu mata acara pembahasan utama. Monitoring dan implementasi perbaikan tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan akan kecukupan sistem manajemen risiko yang diterapkan di Perusahaan terutama untuk pelaksanaan evaluasi maturitas risiko selanjutnya.

As a manifestation of the requirements compliance with PER-2 BUMN, an Integrated Governance Committee (ICG) was also established at PGN in 2024 based on the Decree of the PGN Board of Commissioners No. Kep-04/D-KOM/2024 on March 28, 2024, which was led by the President Commissioner of PGN with members consisting of all President Commissioners of Subsidiaries/Affiliates. The KTKT has been set up to strengthen and complement the implementation of risk management across all lines of the Company..

Throughout 2024, the Board of Directors and Board of Commissioners assessed that PGN's risk management system has been capable and adequate in anticipating all of the Company's risks. This is demonstrated by the results of PGN's RMA measurement, which indicated that PGN is in the "Good Practice Phase" and obtaining ISO 22301:2019 Business Continuity Management System

.

PGN also continues to evaluate risk management periodically, starting from the functional level, work units, to senior management level, which is reflected in the routine agenda of the Board of Directors' meetings, which always include risk management as one of the main discussion items. Monitoring and implementation of these improvements are carried out continuously. This aims to increase the level of confidence in the adequacy of the risk management system implemented in the Company, especially for the implementation of subsequent risk maturity evaluations.

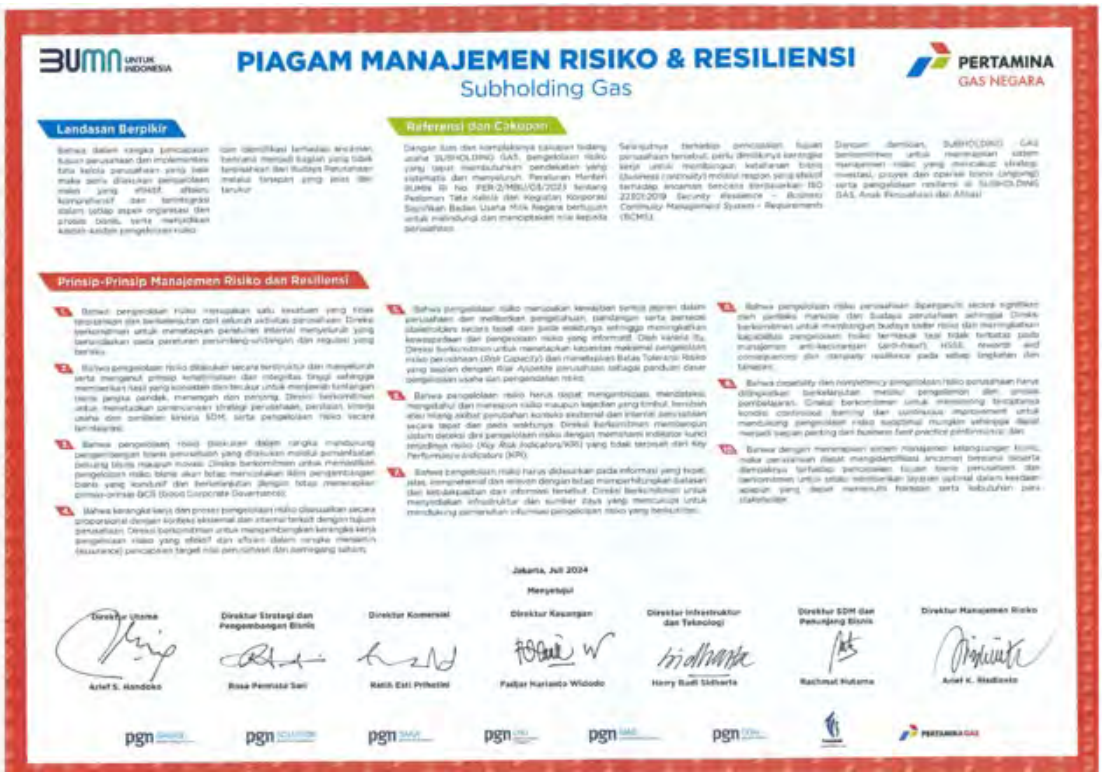
BUMN UNTUK INDONESIA

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO & RESILIENSI
Subholding Gas

PERTAMINA GAS NEGARA

Landasan Berpikir

Referensi dan Cakupan

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Resiliensi

Jakarta, Juli 2024

Menyetujui

Direktur Utama — Arief S. Handoko
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis — Rosa Permata Sari
Direktur Komersial — Ratih Esti Prihatini
Direktur Keuangan — Fadjar Hariaeto Widodo
Direktur Infrastruktur dan Teknologi — Henry Budi Sidharta
Direktur SDM dan Pendukung Bisnis — Rachmat Hutama
Direktur Manajemen Risiko — Ariel K. Hadiosto

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI

Legal Cases

Hingga 31 Desember 2024, terdapat 6 perkara atau gugatan hukum bernilai material terhadap Perseroan. Perkara tersebut adalah perkara lanjutan atau belum diputuskan dan/atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun sebelumnya. Informasi mengenai perkara hukum material yang dihadapi PGN, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris meliputi pokok perkara, status perkara, serta pengaruhnya terhadap kondisi Perseroan sebagai berikut:

As of 31 December 2024, 6 (six) cases or lawsuits of material value against the Company had remained unsettled, meaning none of the cases had been legally settled and/or has permanent legal force when the previous year ended. The following is information on material legal cases faced by PGN, its subsidiaries, members of the Boards of Directors and Commissioners including the subject matter, the status of the case, and its impact on the Company:

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Sengketa PPN dalam Niaga Gas Bumi PGN untuk Periode Tahun 2012-2013.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

VAT Dispute on Natural Gas Trading PGN for 2012-2013 Period.

Lembaga Agency	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Supreme Court of The Republic of Indonesia
Para Pihak Parties in Dispute	• Direktorat Jenderal Pajak (sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) • PGN (sebagai Termohon Peninjauan Kembali)	• The Directorate General of Tax Affairs (as Applicant for Judicial Review) • PGN (as Respondent for Judicial Review)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Pajak	Taxation
Nilai Perkara Case Value	Rp4,15 triliun	Rp4.15 trillion
Pokok Perkara Subject Matter	Sengketa PPN 2012-2013 terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara DJP dan PGN terkait kegiatan niaga gas bumi yang dilakukan oleh PGN. DJP berpandangan bahwa untuk periode tahun 2012, gas yang dijual oleh PGN merupakan gas hasil pengolahan yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai barang sehingga dikenakan PPN sebesar 10% dan terdapat jasa distribusi atau pengangkutan gas dalam kegiatan niaga gas PGN sehingga dikenakan PPN untuk periode tahun 2013. PGN berpandangan bahwa tidak terdapat proses pengolahan dalam gas yang dijual oleh PGN kepada pelanggan dan PGN menerima gas sesuai *Gas Sales Agreement* (GSA) dari KKKS dengan spesifikasi yang telah diatur oleh regulasi pemerintah dan lamgsung proses/pengolahan untuk periode tahun 2012. Untuk periode tahun 2013, PGN melakukan kegiatan niaga gas bumi dengan titik serah di lokasi pelanggan sehingga kegiatan niaga gas dan penyaluran gas kepada pelanggan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan adanya komponen rupiah dalam harga jual gas bumi guna menghindari risiko kurs mengingat krisis moneter seperti tahun 1998. Bahwa atas perkara tersebut pada tingkat PK yang dimohonkan oleh DJP, terdapat 18 (delapan belas) putusan yang mengabulkan permohonan DJP dan 6 (enam) perkara yang menolak permohonan DJP.	The 2012-2013 VAT dispute occurred due to different opinion between DGT and PGN regarding natural gas trading activities by PGN. DGT stated that, the natural gas sold by PGN was processed gas which results in an increase in the value of goods so that 10% VAT was imposed and there were gas distribution or activities, so that it was subject to VAT for the 2013 period. Meanwhile, PGN stated that there was no processed gas in the natural gas sold by PGN to costumers and PGN received the gas according to the Gas Sales Agreement from KKKS with its specification set by government regulations and directly sell the gas to costumers without any processing for the 2012 period, For the 2013, PGN conducted natural gas trading activities with delivery points at the costumer's locations, that the natural gas trading activities and its distribution to the costumers were inseparable and the use of rupiah currency in the selling price of natural gas so as to avoid exchange rate risks following a monetary crisis like the one occurred in 1998. Whereas for the said cases at the judicial review level filed by DGT, there are 18 (eighteen) verdicts that granted DGT's requests and 6 (six) verdicts that rejected DGT's requests.

Status Saat Ini Current Condition	Atas 18 (delapan belas) perkara yang telah putus tersebut, PGN melakukan PK kedua dan atas 6 (enam) perkara yang memenangkan PGN, DJP juga mengajukan PK kedua. Sampai Desember 2023, 15 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus NO (*Niet Onvantkelijkverklaard*). Adapun untuk 6 permohonan PK Kedua yang diajukan DJP juga telah diputus NO. Sampai Desember 2024, terdapat 2 permohonan PK Kedua yang diajukan PGN diputus NO. Putusan *Niet Onvantkelijkverklaard* (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat formal. Konsekuensi atas Putusan NO tidak dapat disamakan dengan putusan ditolak, mengingat masih dimungkinkan untuk mengajukan kembali permohonan sepanjang telah memenuhi syarat formal.	For the 18 (eighteen) cases that have been decided, PGN will conduct a second judicial review and for the 6 (six) cases that won PGN, DGT also submitted a second judicial review. Until December 2023, 15 judicial review applications submitted by PGN decided NO (Niet Onvantkelijkverklaard). Meanwhile 6 judicial review applications submitted by DJP also decided NO. Until December 2024, there were 2 judicial reviews submitted by PGN with a decision of NO. The Niet Onvantkelijkverklaard (NO) decision is a decision stating that the lawsuit cannot be accepted because it has yet to fulfill the formal requirements. NO Decision cannot be equated with a rejected decision, considering that it is still possible to resubmit the application as long as the formal requirements are satisfied.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK DAN PT SAKA ENERGI INDONESIA

Gugatan Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO).

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK DAN PT SAKA ENERGI INDONESIA

Lawsuit Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO).

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Lamongan	The District Court of Lamongan
Para Pihak Parties in Dispute	• LEMASKO (Penggugat) • Saka Energi Indonesia & PGN (Tergugat)	• LEMASKO (Plaintiff) • Saka Energi Indonesia & PGN (Defendants)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp1.401.000.000.000	Rp1,401,000,000,000
Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 3 April 2023, SEI dan PGN menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa Saka Energi Indonesia ("SEI") telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro ("LEMASKO") yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar, mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan Kontrak Bagi Hasil sesuai kesepakatan dengan SKK Migas.	On April 3, 2023, SEI and PGN received a lawsuit letter on the subject that SEI has taken control of ex-PT Freeport Indonesia's pipe inventories which are claimed to be belonged to the Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) as a grant from PT Freeport Indonesia. Management believes that the lawsuit is baseless, considering that SEI only controls of goods related to Oil and Gas activities, and Oil and Gas assets being controlled by SEI are State-Owned Goods and legally obtained in accordance with applicable legal provisions and the Production Sharing Contract as agreed with SKK Migas.

Status Saat Ini Current Condition	SEI dan PGN telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan Desember 2023, SEI dan PGN masih menjalani proses hukum yang ada dan manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Pada 3 April 2024 SEI dan PGN telah dinyatakan memenangkan perkara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg yang pada pokoknya menolak gugatan LEMASKO. LEMASKO kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 17 April 2024 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan No. 374/PDT/2024/PT Surabaya tertanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan. Atas putusan banding tersebut, LEMASKO kemudian mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Juli 2024. SEI kemudian mengirimkan kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024. Pada tanggal 16 Desember 2024 Mahkamah Agung telah mengeluarkan amar menolak permohonan kasasi dari LEMASKO. PGN saat ini masih menunggu salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.	SEI and PGN have appointed the legal consultant to handle the lawsuit. As of December 2023, SEI and PGN is still undergoing the legal process and management continues to be of the opinion that the lawsuit is baseless. On April 3, 2024, SEI and PGN prevailed in accordance with the decision of the Lamongan District Court No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg which in principle rejected LEMASKO's lawsuit. LEMASKO then filed an appeal against the decision on April 17, 2024, and it was decided by the East Java High Court with decision No. 374/PDT/2024/PT Surabaya dated June 24, 2024 which in essence upheld the decision of the Lamongan District Court. Based on the appeal decision, LEMASKO then filed a cassation application to the Supreme Court on July 19, 2024. SEI then sent a counter cassation memorandum on July 29, 2024. On December 16, 2024, the Supreme Court issued a ruling rejecting the cassation application from LEMASKO. PGN is currently still waiting for an official copy of the decision from the Supreme Court.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII).

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII).

Lembaga Agency	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	The District Court of Blambangan Umpu
Para Pihak Parties in Dispute	• PTPN VII (Penggugat) • 12 Masyarakat (Tergugat) • PGN (Tergugat 13, Terbanding 16, Turut Termohon Kasasi 16) • Bumi Madu Mandiri (Tergugat 14) • Kantah Kabupaten Way Kanan (Tergugat 15) • Kanwil BPN Provinsi Lampung (Tergugat 16) • BPN RI (Turut Tergugat)	• PTPN VII (Plaintiff) • 12 Communities (Defendant) • PGN (Defendant 13, Appellant 16, Co-Appellant in Cassation 16) • Bumi Madu Mandiri (defendant 14) • Land office Way Kanan Regency (defendant 15) • Regional office of Lampung Province (defendant 16) • BPN RI (Co-defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Immaterial Proporsional terhadap Para Tergugat	Rp95.659.700.000 Material Rp188.879.570.165 Immaterial Proportional for Defendants
Pokok Perkara Subject Matter	Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah"). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingingasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Penguasahaan Hitan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972. PTP VII sedang dalam proses sertifikasi sehingga PTPN VII melakukan pengukuran tematik atas obyek sengketa dan telah terbit Peta Tematik Nomor Peta 6/2021 yang dikeluarkan oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Turut Tergugat). PTPN VII menyatakan peta tematik tersebut menggambarkan bukti kepemilikan PTPN VII atas tanah dan memperkuat SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/I/72 tanggal 24 Januari 1972.	On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad's forest consession area (''Land''). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree No. 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972. PTPN VII is currently in the certification process, and as part of this, PTPN VII conducted thematic mapping of the disputed area. Thematic Map No. 6/2021 has been issued by the BPN RI, who is also a Co-defendant. PTPN VII asserts that this thematic map serves as evidence of PTPN VII's ownership of the land, thereby strengthening the Minister of Agriculture's Decree No. 31/Kpts/UM/I/72 dated January 24, 1972.

Status Saat Ini Current Condition	Pada 03 Januari 2024 telah dilakukan agenda sidang pemeriksaan dokumen para pihak. Kemudian, telah dilakukan pertemuan lanjutan dengan BPN Way Kanan. BPN menjelaskan bahwa peta tematik merupakan visualisasi lokasi dan luas lahan berdasar dokumen yang diajukan pemohon sehingga bukan sebagai alas hak. Berdasar peta tersebut tergambar luasan tanah dibawah penguasaan PGN yang telah disertifikatkan. Kemudian, sidang perkara akan dilaksanakan kembali tanggal 10 Januari 2024 dengan agenda mediasi. Pada 26 Januari 2024 PTPN VII dan PGN telah menandatangani perjanjian perdamaian yang pada intinya menjelaskan bahwa PTPN VII akan mengeluarkan PGN sebagai Tergugat, menghapus gugatan kepada PGN, dan menjadikan PGN sebagai Turut Tergugat. Perubahan gugatan PTPN VII di tolak oleh Majelis Hakim. Untuk selanjutnya PTPN VII akan mencabut gugatan dan mengajukan gugatan kembali tanpa PGN di dalamnya.	On January 3, 2024, the agenda for the hearing to examine the documents of the parties was carried out. Then, a follow-up meeting was held with the Way Kanan BPN. The BPN explained that the thematic map is a visualization of the location and area of land based on documents submitted by the applicant, which is not a basis for rights. Based on the map, the area of land under the control of PGN that has been certified is depicted. Then, the trial will be held again on January 10, 2024, with a mediation agenda. On January 26, 2024, PTPN VII and PGN signed a peace agreement, which in essence explains that PTPN VII will remove PGN as a Defendant, remove the lawsuit against PGN, and make PGN a Co-Defendant. The amendment to PTPN VII's lawsuit was rejected by the Panel of Judges. Furthermore, PTPN VII will withdraw the lawsuit and file a new lawsuit without PGN in it.
	Pada tanggal 6 Februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan : 1. Mengabulkan permohonan penggugat; 2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut; 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.	On February 6, 2024, PTPN VII has withdrawn the lawsuit on the case as referred to. Furthermore, on February 12, 2024, PGN has received notification of the withdrawal of the lawsuit from PTPN VII with the verdict: 1. Granting the plaintiff's request; 2. Declaring the case No. 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu revoked; 3. Ordering the plaintiff to pay court costs.
	Pada tanggal 29 Februari 2024, PTPN VII kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pertanahan milik PTPN VII dengan mengubah kedudukan PGN yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat I. Pada 28 Maret 2024 PGN telah menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu ("PN Blambangan Umpu") No. 6/Pdt.G/2024/PN Bbu, dan tidak terdapat petitum gugatan kepada PGN.	On February 29, 2024, PTPN VII filed anotherr lawsuit for unlawful acts related to land owned by PTPN VII by changing PGN's status from previously being Defendant to Co-Defendant I. On March 28, 2024, PGN received a summons from the Blambangan Umpu District Court ("PN Blambangan Umpu") No. 6/Pdt.G/2024/PN Bbu, and there was no petitum for the lawsuit against PGN.
	Pada tanggal 31 Juli 2024, PN Blambangan Umpu memutuskan gugatan yang diajukan PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). Pada 30 Agustus 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas dari PT Tanjungkarang untuk tingkat Banding, posisi PGN dalam perkara tersebut semula Turut Tergugat I menjadi Terbanding XVI. Dalam memori banding yang diajukan PTPN VII tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan lahan milik PGN. Pada 24 September 2024, PT Tanjung Karang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu. Pada 10 Oktober 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan permohonan kasasi dan posisi PGN semula Terbanding XVI menjadi Termohon Kasasi XVI. Sampai dengan Desember 2024, perkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung.	On July 31, 2024, the Blambangan Umpu District Court decided on the lawsuit filed by PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard ("NO"). On August 30, 2024, PGN received a notification release to examine the files from Tanjungkarang High Court for an Appeal, PGN's position in this case changed from Co-Defendant I to Appellant XVI. In the appeal memorandum filed by PTPN VII, it was not related to the control of land owned by PGN. On September 24, 2024, Tanjung Karang High Court upheld the decision of the Blambangan Umpu District Court. On October 10, 2024, PGN received a notification release for the cassation application and PGN's position was originally Appellant XVI to Appellant XVI. As of December 2024, the case is still in the process of being examined by the Cassation at the Supreme Court.
	Berdasarkan gugatan PTPN VII tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil dan imateriil yang ditujukan kepada PGN. Adapun konsekuensi hukum PGN sebagai Turut Tergugat I adalah PGN diminta untuk tunduk dan patuh atas putusan yang nantinya dijatuhkan Majelis Hakim	Based on the PTPN VII lawsuit, there are no material and immaterial demands directed at PGN. The legal consequences of PGN as Co-Defendant I are that PGN was requested to submit and comply with the decision that will be handed down by the Panel of Judges.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Tidak berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan	Has no effect on the consolidated profit/loss of the Company

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Permohonan Arbitrase oleh Gunvor Singapore Pte. Ltd. ke The London Court of International Arbitration.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

Application for Arbitration by Gunvor Singapore Pte. Ltd. to The London Court of International Arbitration.

Lembaga Agency	The London Court of International Arbitration (LCIA)	The London Court of International Arbitration (LCIA)
Para Pihak Parties in Dispute	• Gunvor Singapore Pte. Ltd. (Gunvor) (sebagai Penggugat) • PGN (sebagai Tergugat)	• Gunvor Singapore Pte. Ltd. (Gunvor) (as Plaintiff) • PGN (as Defendant)
Jenis Perkara Type of Legal Cases	Perdata	Civil Case
Nilai Perkara Case Value	Belum dapat ditentukan	Not yet determined
Pokok Perkara Subject Matter	Penyampaian pemberitahuan *Force Majeure* dalam pelaksanaan *Master LNG Sale and Purchase Agreement* ("MSPA") dan *Confirmation Notice* ("CN") antara PGN selaku Penjual dengan Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor") selaku Pembeli. Sesuai dengan Klausul 2.1 MSPA, komitmen untuk menjual dan membeli LNG berdasarkan MSPA disepakati dengan menandatangani CN oleh para pihak. Pada tanggal 3 November 2023, PGN telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Pembeli terkait pelaksanaan CN. Dalam pelaksanaan MSPA dan CN, Gunvor mengajukan permohonan arbitrase ke The London Court of International Arbitration ("LCIA") terhadap PGN berkaitan dengan MSPA dan CN, dengan Gunvor sebagai Pemohon Arbitrase dan PGN sebagai Termohon Arbitrase.	Submission of Force Majeure notification in the implementation of the Master LNG Sale and Purchase Agreement ("MSPA") and Confirmation Notice ("CN") between PGN as the Seller and Gunvor Singapore Pte Ltd ("Gunvor") as the Buyer. In accordance with Clause 2.1 of the MSPA, the commitment to sell and purchase LNG based on the MSPA is agreed upon by signing the CN by the parties. On November 3, 2023, PGN has submitted a Force Majeure notification to the Buyer regarding the execution of the CN. In the execution of the MSPA and CN, Gunvor filed an arbitration application with The London Court of International Arbitration ("LCIA") against PGN in relation to the MSPA and CN, with Gunvor as the Arbitration Applicant and PGN as the Arbitration Respondent.
Status Saat Ini Current Condition	Pada tanggal 13 September 2024, PGN telah menerima informasi pengajuan *Request for Arbitration* (RFA) oleh Gunvor dengan Nomor Register Perkara 246358 dari LCIA. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2024 PGN telah menyampaikan *Response to the RFA* melalui Konsultan Hukumnya. PGN menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dengan menunjuk tim hukum internasional yang berpengalaman dalam bidang arbitrase untuk mewakili PGN, terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktivitas bisnis PGN, memastikan penguatan implementasi proses manajemen risiko internal, berkomitmen memastikan transparansi dengan memberikan informasi terkini setiap perkembangan yang material dari proses arbitrase kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	On September 13, 2024, PGN received information on the Request for Arbitration (RFA) submission by Gunvor with Case Registration No. 246358 from LCIA. Following up on this, on October 31, 2024, PGN submitted a Response to the RFA through its Legal Consultant PGN respects the ongoing legal process, by appointing an international legal team that is experienced in arbitration to represent PGN, continuing to monitor the situation to ensure there is no disruption to PGN's operations and business activities, ensuring the strengthening of the implementation of internal risk management processes and committing to ensuring transparency by providing the latest information on any material developments in the arbitration process to shareholders and other stakeholders.
Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact	Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.	To date, there has been no impact on the Company's operational activities, legal matters, financial condition, or business continuity.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Entitas Anak selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

LEGAL CASES FACED BY SUBSIDIARIES

The following are details of civil and criminal legal issues faced by the Subsidiaries during 2024:

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK

Legal Cases Faced by Subsidiaries

Entitas Anak Subsidiary	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact on the Company's Conditions
PT Kalimantan Jawa Gas (KJG)	Pada 29 Agustus 2018, KJG mengajukan gugatan terhadap PCML dan PLN di Arbitrase International Chamber of Commerce ("ICC") Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban SOP sebagaimana diatur dalam *Gas Transportation Agreement* ("GTA") oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi GTA, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018. Pada intinya gugatan terkait dengan: (i) PCML sepatutnya tidak dapat menghindari kewajiban atas tuntutan SOP KJG sejak tahun 2016 sampai dengan 13 Desember 2019 serta ganti rugi atas berakhirnya GTA senilai komitmen SOP dalam GTA yaitu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2026 berdasarkan GTA dengan nilai gugatan sebesar USD373 juta; (ii) PLN bertanggung jawab atas pengembalian pemotongan pembayaran tarif kepada KJG sebesar USD2,1 juta (belum termasuk bunga); dan (iii) Bunga dan biaya ICC serta biaya Konsultan Hukum KJG maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan KJG.	Pada tanggal 6-7 September 2023 KJG telah melakukan rapat persiapan *hearing* bersama Konsultan Hukum dan *Technical Expert*. Pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2023 telah dilaksanakan hearing di ICC Singapore, dengan agenda: *Opening Statement* dari masing-masing Pihak, keterangan dari *Technical Expert* dan *Closing Submissions*. Pada tanggal 15 Desember 2023, KJG telah mengirimkan data *Submission Cost* kepada Tribunal, yang didalamnya memuat biaya Konsultan Hukum, biaya *Expert* dan *tribunal cost* yang sudah terbayar maupun yang masih *outstanding*. Pada 18 Juni 2024 Sekretariat ICC menyampaikan hasil putusan arbitrase KJG tertanggal 14 Juni 2024 melalui email yakni: Bahwa PCML harus membayar kepada KJG sebesar USD17.3 juta atas *Pre-Termination Claim* ditambah bunga sebesar USD5.2 juta dan bunga terhitung sejak 1 Januari 2024 s.d. tanggal putusan; (i) PCML harus membayar kepada KJG USD17.300.000 atas *Pre-Termination Claim* dan bunga USD5.200.000; (ii) KJG harus membayar *legal costs & expenses* serta ICC advance cost PCML dengan total USD5.266.250; (iii) KJG harus membayar *legal costs & expenses* PLN IDR3.600.000.000 dan biaya ICC *advance cost* USD286.250. Sampai tanggal pelaporan KJG telah menjalankan putusan arbitrase dengan mengirimkan tagihan kepada PCML dan telah menerima pembayaran dari PCML. KJG juga telah melakukan pembayaran kepada PCML sesuai dengan isi putusan Arbitrase.	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.

Entitas Anak Subsidiary	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact on the Company's Conditions
PT Kalimantan Jawa Gas (KJG)	On August 29, 2018, KJG filed a lawsuit against PCML and PLN in Hong Kong ICC Arbitration in connection with the failure to implement SOP obligations as stipulated in the Gas Transportation Agreement (GTA) by PCML and compensation for the termination of GTA, while the lawsuit against PLN was made in connection with a deduction of Monthly bills from March 2018 to September 2018. This lawsuit is in connection with: (i) PCML should not be able to avoid the obligation for KJG's SOP claims from 2016 to December 13, 2019 as well as the compensation for the termination of GTA as per the amount of SOP in the GTA from December 14, 2019 untill the end of 2026 based on the GTA with a claim amounting to USD373 million; (ii) PLN is responsible for refunding the tariff payment to KJG of USD2.1 Million (not including interest); and (iii) The ICC interest and fees as well as KJG's Legal Consultant fees and any other costs incurred by KJG.	On September 6-7, 2023, KJG held a preparation meeting for hearing with legal consultants and technical experts. The Abritrase Hearing was held on 30 October - 3 November 2023, with the agenda: Opening Statement from each Party, information from Technical Expert and Closing Submissions. On 15 December 2023, KJG submitted a Submission Cost to the Tribunal, which included paid and outstanding Legal Counsel fees, Expert fees, and tribunal cost. On June 18, 2024, the ICC Secretariat conveyed the results of the KJG arbitration decision dated June 14, 2024, via email, namely: That PCML must pay KJG USD17.3 million for the Pre-Termination Claim plus interest in the amount of USD5.2 million and interest calculated from January 1, 2024, until the date of the decision; (i) PCML must pay KJG USD17,300,000 for Pre-Termination Claim and interest in the amount of USD5,200,000; (ii) KJG must pay the legal costs & expenses, as well as PCML's ICC advance cost with a total of USD5,266,250; (iii) KJG must pay legal costs & expenses of PLN in the amount of Rp3,600,000,000 and ICC advance cost in the amount of USD286,250. As of the reporting date, KJG has implemented the arbitration decision by sending an invoice to PCML and has received payment from PCML. KJG has also made payments to PCML in accordance with the contents of the Arbitration decision.	Affects the Company's consolidated profit/loss.

Entitas Anak Subsidiary	**Pokok Perkara** Subject Matter	**Status Penyelesaian Perkara** Case Settlement Status	**Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan** Potential Impact on the Company's Conditions
PT PGN LNG Indonesia (PLI)	Pada Agustus 2021, PT PGN LNG Indonesia ("PLI"), anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan seluruhnya oleh PGN telah mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") terhadap PT Hoegh LNG Lampung ("PT Hoegh") terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan *Floating Storage and Regasification Unit* ("FSRU") Lampung ("LOM *Agreement*") dengan tuntutan antara lain berupa pembatalan LOM *Agreement*, dan/atau pengakhiran LOM *Agreement*, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PLI. Pada September 2021, PT Hoegh juga mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC terhadap PLI dan PGN terkait dengan LOM *Agreement* dan jaminan yang diberikan oleh PGN terhadap pemenuhan kewajiban PLI atas LOM *Agreement* sebagaimana tertuang dalam *Transferor Guarantee*, dengan tuntutan antara lain berupa ganti rugi. Pada Juni 2022, PLI telah mengajukan dokumen gugatan (*Statement of Claim*) terhadap PT Hoegh. PT Hoegh juga telah mengajukan dokumen gugatan (*Statement of Claim*) terhadap PGN dan gugatan balik (*counterclaim*) terhadap PLI, dengan tuntutan antara lain agar PGN memenuhi semua kewajiban PLI berdasarkan LOM *Agreement*, termasuk ganti rugi.	Atas gugatan-gugatan tersebut, PGN dan PLI telah menyampaikan dokumen berupa jawaban pembelaan (*Statement of Defense*) pada September 2022 dan replik (*Reply*) pada September 2023. Para Pihak telah sepakat untuk memundurkan jadwal penyerahan Duplik dari semula 27 November 2023 menjadi 9 Februari 2024 terkait dengan rencana pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Pada tanggal 5 Februari 2024, PGN, PLI dan PT Hoegh LNG Lampung bersama-sama telah menandatangani *Settlement Agreement*/Perjanjian Perdamaian yang pada intinya memuat kesepakatan para pihak untuk mencabut perkara-perkara tersebut dan melanjutkan dengan iktikad baik negosiasi dan diskusi berbagai hal komersial yang berkaitan dengan Perjanjian LOM. Para Pihak juga telah memberitahu Tribunal dan SIAC perihal diatas pada tanggal yang sama. Pada tanggal 12 Februari 2024, Tribunal dan SIAC telah menyatakan menerima notifikasi permohonan pencabutan perkara-perkara yang diajukan oleh PGN, PLI dan Hoegh. Pada tanggal 1 April 2024 SIAC telah menerbitkan *Termination Order*. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 Perkara Arbitrase FSRU Lampung telah dinyatakan berakhir.	Berpengaruh terhadap laba/rugi konsolidasian Perseroan.

Entitas Anak Subsidiary	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Perkara Case Settlement Status	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan Potential Impact on the Company's Conditions
PT PGN LNG Indonesia (PLI)	In August 2021, PT PGN LNG Indonesia ("PLI"), a wholly owned and controlled subsidiary of PGN has submitted an arbitration notice to the Singapore International Arbitration Center ("SIAC") against PT Hoegh LNG Lampung ("PT Hoegh") related to the lease, operation and maintenance agreement of FSRU Lampung ("LOM Agreement") with claim, among other, of cancellation of the LOM Agreement, and/or termination of the LOM Agreement, and/or providing damages to PLI. In September 2021, PT Hoegh also submitted a notification of arbitration to SIAC against PLI and PGN regarding LOM Agreement and the guarantee provided by PGN for the fulfillment of PLI's obligations under the LOM Agreement as stated in the Transferor Guarantee, with claim, among other, of damages. In June 2022, PLI has submitted a Statement of Claim against PT Hoegh. PT Hoegh has also submitted a Statement of Claim against PGN and a counterclaim against PLI, with claim, among other, to have PGN fulfills all of PLI's obligations under the LOM Agreement, including damages.	Due to those claims, PGN and PLI have submitted the Statement of Defence in September 2022 and Reply in September 2023. The Parties have agreed to postpone the deadline of Rejoinder submission from 27 November 2023 to 9 February 2024 due to parties' intention to withdraw the cases. The Parties have agreed to withdraw the above cases. On February 5, 2024, PGN, PLI and PT Hoegh LNG Lampung jointly signed a Settlement Agreement, which in essence contains the agreement of the parties to withdraw the cases and continue in good faith negotiations and discussions on various commercial matters related to the LOM Agreement. The Parties have also notified the Tribunal and SIAC regarding the above on the same date. On February 12, 2024, the Tribunal and SIAC have stated that they have received notification of the application to withdraw the cases filed by PGN, PLI and Hoegh. On 1 April 2024, SIAC has issued a Termination Order. Thus, as of April 1, 2024, the FSRU Lampung Arbitration Case has been declared over.	Affects the Company's consolidated profit/loss.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PGN

Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

LEGAL CASES FACED BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF PGN

Throughout 2024, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners currently in office have never been involved or implicated in any important cases, whether criminal cases and/or civil cases.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK

Sepanjang tahun 2024, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

LEGAL CASES FACED BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF SUBSIDIARIES

Throughout 2024, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries currently in office have never been involved in any important cases, whether criminal cases and/or civil cases.

INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF

Information on Administrative Sanctions

SANKSI ADMINISTRATIF DARI OTORITAS TERKAIT

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan otoritas pasar modal atau otoritas lainnya kepada PGN, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2024, no administrative sanctions were imposed by the Capital Markets Authority or other authorities on PGN, members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

SANKSI ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM ATAU PERATURAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN ATAU MATERIAL

Tidak ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan atau material.

SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH LAWS OR REGULATIONS RELATING TO SIGNIFICANT OR MATERIAL RELATED PARTY TRANSACTIONS

There were no cases of non-compliance with laws, rules and regulations relating to transactions with related parties that were significant or material.

SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERKAIT MASALAH PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN/ KONSUMEN/KEPAILITAN/KOMERSIAL/PERSAINGAN ATAU LINGKUNGAN

PGN tidak mencatatkan adanya pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ketenagakerjaan/ konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau lingkungan.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE LAW RELATED TO LABOR/ EMPLOYMENT/ CONSUMER/ BANKRUPTCY/ COMMERCIAL/ COMPETITION OR ENVIRONMENTAL ISSUES

PGN did not record any violations of the law relating to labor/ employment/ consumer/ bankruptcy/ commercial/ competition or environmental issues.

SANKSI DARI REGULATOR TERKAIT PERISTIWA PENTING

Sepanjang tahun 2024, PGN tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator yang disebabkan oleh tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting.

SANCTIONS FROM REGULATORS RELATED TO IMPORTANT EVENTS

Throughout 2024, PGN did not receive any sanctions from regulators due to not making announcements within the specified time period for important events.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PENCATATAN

Sepanjang tahun 2024, PGN tidak pernah mendapatkan sanksi terkait peraturan pencatatan. PGN selalu berupaya mematuhi aturan, regulasi, ketentuan dan/atau peraturan pencatatan dari regulator baik aturan pengungkapan maupun aturan terkait lainnya.

SANCTIONS RELATED TO LISTING REGULATIONS

During 2024, PGN did not receive any sanctions related to listing regulations. PGN always strives to comply with the rules, regulations, provisions and/or listing regulations from regulators, both disclosure rules and other related rules.

SANKSI TERKAIT PERATURAN PERPAJAKAN

PGN tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir.

SANCTIONS RELATED TO TAX REGULATIONS

PGN did not receive any guilty verdict from the highest tax court regarding any tax issues during the last three years.

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN SERTA ASPEK KEBERLANJUTAN

Management and Control of Tax and Sustainability Aspects

PGN memandang perpajakan tidak hanya sebagai kewajiban hukum semata, melainkan juga sebagai elemen integral dalam manajemen keuangan yang berdampak pada keseimbangan dan pertumbuhan Perusahaan. Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan menjadi tanggung jawab strategis yang memegang peranan penting dalam keberlanjutan dan keberhasilan suatu organisasi.

PGN terus mengelola dan meminimalkan risiko perpajakan yang mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan, pengoptimalan struktur perpajakan, serta penerapan kebijakan internal yang memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemahaman atas pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan membuahkan hasil yang baik bagi Perusahaan, yakni PGN mampu memitigasi risiko pengenaan sanksi perpajakan secara optimal yang dibuktikan dengan tidak adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dalam tiga tahun terakhir.

Berkaitan dengan aspek keberlanjutan, pelaksanaan keberlanjutan di PGN sangat penting untuk memperkuat penerapan GCG yang dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi. Aspek keberlanjutan juga akan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya, risiko, dan limbah, serta meningkatkan efisiensi energi. PGN memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan aspek keberlanjutan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perusahaan dengan mendorong inovasi, akses ke energi bersih, dan menciptakan nilai jangka panjang. PGN juga berkomitmen untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, kebijakan, dan preferensi konsumen terhadap bisnis.

Lebih lanjut, pelaksanaan keberlanjutan di lingkungan Perusahaan juga penting untuk mengelola risiko serta meningkatkan reputasi dan daya tarik PGN, sehingga dapat menarik investor dan mitra bisnis yang berkelanjutan. Informasi secara lengkap mengenai hal ini telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.

PGN views taxation as not only a legal obligation but also as an integral element of financial management that affects the Company's balance and growth. Management and control of tax aspects are strategic responsibilities that are essential for an organization's sustainability and success.

PGN continues to manage and minimize tax risks, which includes a thorough understanding of tax regulations, optimizing the tax structure, and implementing internal policies to ensure that the Company's tax rights and obligations are carried out in accordance with the provisions of the relevant tax laws and regulations. The understanding of tax management and control led to positive results for the Company, namely enabling PGN to mitigate the risk of imposition of tax sanctions, as evidenced by no issuance of Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) or Tax Collection Letters (STP) in the last three years.

Regarding sustainability, implementing sustainability at PGN is critical to strengthening GCG implementation, which can ensure transparency, accountability, and regulatory compliance of the Company. Sustainability aspects will also improve operational efficiency by reducing costs, risks, and waste while increasing energy efficiency. PGN is highly committed to implementing sustainability measures that will support the Company's sustainable growth by encouraging innovation, providing access to clean energy, and creating long-term value. PGN is also committed to anticipating how climate change, policies, and consumer preferences will affect business.

Furthermore, implementing sustainability within the Company is also crucial for risk management and increasing PGN's reputation and attractiveness, allowing it to attract investors and sustainable business partners. Complete information regarding this matter has been disclosed in the Sustainability Report.

IMPLEMENTASI KONSEP KEBERLANJUTAN DAN INTEGRASINYA DALAM PROSES BISNIS PERUSAHAAN

Implementation of the Sustainability Concept and Its Integration in the Company's Business Process

Dalam upaya mendukung target *Net Zero Emission* Indonesia pada tahun 2060, PGN berkomitmen untuk mempercepat transisi energi dengan memperluas penggunaan gas bumi sebagai energi yang lebih bersih. Sebagai katalisator dalam transisi ini, PGN terus mengembangkan infrastruktur gas bumi serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya.

To support Indonesia's Net Zero Emission target by 2060, PGN is delivering on its commitment to accelerating the energy transition by expanding the use of natural gas as a cleaner energy source. As a catalyst in this transition, PGN continues to develop natural gas infrastructure and implement sustainability principles in every aspect of its business.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, PGN secara aktif mengintegrasikan prinsip *environmental, social, and governance* (ESG) ke dalam strategi dan operasional bisnisnya. Dalam aspek lingkungan, PGN berupaya mengurangi jejak lingkungan melalui pelestarian ekosistem dan mendukung program keanekaragaman hayati. Inisiatif seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan investasi pada teknologi bersih menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

As part of its commitment to sustainability, PGN actively integrates environmental, social, and governance (ESG) principles into its business strategies and operations. In the environmental aspect, PGN implements various initiatives such as energy efficiency, responsible waste management, and carbon emission reduction to maintain environmental sustainability. In the environmental aspect, PGN strive to reduce its environmental footprint through ecosystem preservation and supporting biodiversity programs. Initiatives such as energy efficiency, responsible waste management, and investments in clean technologies are key priorities to ensure environmental sustainability.

Dalam aspek sosial, PGN berfokus pada membangun masyarakat yang kohesif dan tangguh. Program-program peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, pemenuhan hak asasi manusia, serta prioritas penggunaan produk dan jasa lokal merupakan wujud tanggung jawab sosial PGN. Selain itu, PGN juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat sekitar, sembari mendukung riset dan inovasi berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

In the social aspect, PGN focuses on building cohesive and resilient communities. Programs to improve health and safety at work, fulfil human rights, and prioritize the use of local products and services are part of PGN's social responsibility. Furthermore, PGN is committed to improving the quality of life for employees and surrounding communities, while also supporting ongoing research and innovation that can provide long-term benefits.

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis, PGN menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan memperkuat struktur tata kelola, budaya keamanan siber, serta komunikasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan.

To support business sustainability, PGN applies good corporate governance practices by strengthening governance structures, cybersecurity culture, and communication and engagement with stakeholders.

Untuk mendukung implementasi keberlanjutan secara efektif, PGN juga menerapkan sistem pelaporan keberlanjutan yang transparan dan terukur, memungkinkan pemantauan dampak serta kemajuan dari berbagai inisiatif yang telah dijalankan. Selain itu, manajemen risiko yang terintegrasi dengan aspek keberlanjutan turut diimplementasikan guna mengantisipasi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk etika, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, PGN memastikan bahwa seluruh kebijakan dan keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat.

Melalui pendekatan yang menyeluruh ini, PGN tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target *Net Zero Emission* Indonesia pada tahun 2060, tetapi juga memperkuat daya saingnya sebagai pemimpin dalam transisi energi yang lebih berkelanjutan.

To support the effective implementation of sustainability, PGN also runs a transparent and measurable sustainability reporting system, allowing monitoring of the impact and progress of various initiatives underway. In addition, risk management integrated with sustainability aspects is also run to anticipate economic, social, and environmental challenges that can affect business continuity. By referring to the principles of good governance, including ethics, transparency, accountability, and fairness, PGN ensures that all policies and strategic decisions are taken with due consideration of the balance between business growth and both environmental and societal impacts.

Through this comprehensive approach, not only does PGN contribute to achieving Indonesia's Net Zero Emission target by 2060, but it also strengthens its competitiveness as a leader in a more sustainable energy transition.

PROSEDUR DAN SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Procedure and Information System for Preparing Sustainability Report

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keberlanjutan, PGN menelaah adopsi standar pelaporan internasional, termasuk IFRS S1 dan IFRS S2, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip dari *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures* (TCFD) yang mencakup empat pilar utama: *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, dan *Metrics* & *Targets*.

Pada pilar *Governance*, PGN senantiasa memperkuat Tata Kelola Keberlanjutan yang terus disempurnakan serta ditingkatkan melalui pembentukan komite/organ khusus atau penguatan tanggung jawab Direksi terkait dengan pemenuhan aspek keberlanjutan. Langkah ini diwujudkan dengan pembentukan Komite Keberlanjutan atau organ khusus yang berperan dalam mengawasi implementasi keberlanjutan serta memperkuat peran Direksi dalam memastikan pemenuhan aspek-aspek keberlanjutan di setiap keputusan strategis. Selain itu, kebijakan keberlanjutan telah dirancang untuk mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh level organisasi.

To improve transparency and accountability in sustainability management, PGN reviews implementation international reporting standards, including IFRS S1 and IFRS S2, and integrated the principles of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) which covers four main pillars: Governance, Strategy, Risk Management, and Metrics & Targets.

On the Governance pillar, PGN continues to strengthen its Sustainability Governance and has continuously refined and improved it by establishing special committees/governance bodies or by strengthening the responsibility of the Board of Directors in the fulfillment of sustainability aspects. PGN realizes this step by setting up Sustainability Committee or governance bodies whose role is to oversee the implementation of sustainability and strengthen the role of the Board of Directors in ensuring the fulfillment of sustainability aspects in every strategic decision. In addition, sustainability policies have been designed to integrate environmental, social, and economic issues into planning and decision-making at all levels of the organization.

Pada pilar *Strategy* dan *Risk Management*, PGN mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan mempertimbangkan berbagai skenario terkait perubahan iklim dan transisi energi. Untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan bisnis, PGN menerapkan perangkat analisis risiko guna mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial terhadap kinerja finansial serta rantai pasok perusahaan.

On the Strategy and Risk Management pillar, PGN integrates sustainability into its short-, medium-, and long-term business strategies, taking into account different scenarios related to climate change and energy transition. To identify and mitigate risks that have the potential to affect business sustainability, PGN applies risk analysis tools to evaluate environmental and social impacts on the company's financial performance and supply chain.

Sementara itu, dalam pilar *Metrics* & *Targets*, PGN berkomitmen mendukung transisi energi berkelanjutan melalui metrik dan target terukur yang sesuai dengan *Greenhouse Gas Protocol* (GHG *Protocol*). PGN secara transparan melaporkan emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan Cakupan 3 untuk memastikan keberlanjutan operasional dan bisnis. Perusahaan juga berupaya mengurangi emisi Cakupan 1 dan 2 dengan target kuantitatif yang terukur melalui efisiensi energi, *loss reduction*, *green*/*low power generation*, elektrifikasi peralatan, dan bahan bakar rendah atau nol karbon untuk kendaraan.

On the Metrics & Targets pillar, PGN is committed to support sustainable energy transition through measurable metrics and targets which align with the Greenhouse Gas (GHG) Protocol. PGN reports emissions for Scope 1, Scope 2, and Scope 3 transparently to ensure sustainable operation and business. PGN also strive to reduce Scope 1 and Scope 2 emissions through energy efficiency, loss reduction, green/low power generation, equipment electrication, dan low or zero carbon fuel for fleets.

PGN juga berkomitmen mematuhi ESG *Reporting Standards*, khususnya melalui kepatuhan terhadap standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI). Kepatuhan ini memastikan bahwa laporan keberlanjutan Perusahaan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan praktik terbaik internasional.

PGN also complies with ESG Reporting Standards, particularly by adhering to the Global Reporting Initiative (GRI) reporting framework, ensuring that PGN's sustainability reports are transparent, accountable, and aligned with international best practices.

Untuk mendukung pengelolaan data yang lebih akurat dan efisien, PGN telah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan aktivitas keberlanjutan. Sistem ini terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan platform internal lainnya guna memastikan keselarasan antara pelaporan keberlanjutan, laporan keuangan, serta strategi bisnis perusahaan.

To support more accurate and efficient data management, PGN has implemented a technology-based information system that allows monitoring and reporting of sustainability activities. This system is continuously developed and integrated with other internal platforms to ensure alignment between sustainability reporting, financial reports, and the company's business strategy.

Melalui langkah-langkah ini, PGN menegaskan komitmennya terhadap prinsip Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keadilan (ETAK) dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Dengan mematuhi standar internasional yang berlaku, PGN tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Through these steps, PGN confirms its commitment to the principles of Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Fairness (ETAK) in preparing sustainability reports. With adherence to applicable international standards, PGN not only increases stakeholder trust but also ensures long-term business sustainability.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Company's Code of Ethics

PGN memiliki Pedoman Perilaku Etika yang ditandatangani oleh seulruh BOD dan BOC pada tanggal 29 Agustus 2024. Pedoman tersebut menjadi acuan perilaku bagi Perwira Subholding Gas dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan.

Penerapan Pedoman Perilaku Etika bersifat wajib bagi Perwira Subholding Gas. Dalam pelaksanaannya, pemahaman atas pedoman etika tersebut juga diuji melalui aplikasi COMPOLS (*Compliance Online Systems*) dan GOLS (GCG *Online Systems*). Deklarasi pemahaman ini dilakukan 1x dalam setahun berupa Surat Pernyataan. Selain itu Pedoman Perilaku Etika menjadi referensi atas pedoman lain, seperti Pedoman Benturan Kepentingan & Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Penanggung jawab pelaksanaan penerapan etika ini berada dalam kewenangan *Group Head, Legal Counsel and Compliance* sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kode Etik di tahun 2024, persentase pernyataan komitmen atas Kode Etik Perusahaan mencapai 97,25% yang membuktikan bahwa seluruh Perwira Subholding Gas berkomitmen untuk patuh pada Kode Etik Perusahaan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Perilaku Etika merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang menjadi standar perilaku yang ideal bagi Perusahaan. Perilaku yang ideal tersebut wajib diterapkan dalam menjalani kegiatan sehari-hari di Perusahaan, sekaligus merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi budaya kerja Perusahaan.

Etika Usaha

Pedoman Perilaku Etika bab Etika Usaha PGN berisi tentang standar perilaku yang harus dilaksanakan pada saat PGN berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan Perusahaan dalam hal keterbukaan informasi, perlakuan setara dan pemenuhan hak pemangku kepentingan, anti monopoli, perlindungan hak asasi manusia, gratifikasi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan lain-lainnya. Beberapa Etika Usaha yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas meliputi:

- Etika Perseroan dengan Perwira Subholding Gas
- Etika Perseroan dengan Pelanggan
- Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
- Etika Perseroan dengan Kreditur
- Etika Perseroan dengan Kompetitor

PGN has established the Code of Conduct, which was signed by all BOD and BOC on August 29, 2024. the Code of Conduct serves as a guideline for all Gas Subholding Employees in carrying out all business activities to achieve the Company's Vision, Mission, and Goals.

The implementation of the Business Ethics and Work Ethics Guidelines is mandatory for all Gas Subholding Employees. In practice, their understanding of work ethics and business ethics will be tested through the COMPOLS Compliance Online System) and GOLS (GCG Online System) applications. Declaration of the understanding is carried out once a year in the form of a Statement Letter. In addition, the Business Ethics and Work Ethics Guidelines serves as a reference for other guidelines, such as the Conflict of Interest & Gratification Control Guidelines.

The Group Head, Legal Counsel, and Compliance are responsible for implementing this ethical implementation as a form of compliance with the Code of Ethics in 2024. The percentage of commitment statements to the Company's Code of Ethics reached 97.25%, demonstrating that all Gas Subholding Employees are commmitted to complying with the Company's Code of Ethics.

CODE OF ETHICS PRINCIPLES

The Code of Conducts are a set of norms, values, and actions that represent the Company's ideal standards of behavior. This ideal behavior must be implemented in the Company's daily operations while also representing the high values that define the Company's work culture.

Business Ethics

PGN's Code of Conduct in the Business Ethics chapter outlines the standards of behavior that must be complied with when PGN interacts with stakeholders. This is demonstrated by the Company's efforts in terms of information disclosure, equal treatment and fulfillment of stakeholder rights, anti-monopoly, human rights protection, gratification, intellectual property rights protection, and others. Gas Subholding Employees should adhere to the following business ethics:

- Company Ethics with Gas Subholding Employees
- Company Ethics with Customers
- Company Ethics with Goods and Service Providers
- Company Ethics with Creditors
- Company Ethics with Competitors

- Etika Perseroan dengan Holding/Anak Perusahaan/Afiliasi
- Etika Perseroan dengan Pemerintah
- Etika Perseroan dengan Masyarakat
- Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
- Etika Perseroan dengan Pemasok Gas Bumi
- Etika perseroan dengan Media
- Etika Perseroan dengan Komunitas/Organisasi Profesi

Etika Kerja

Pedoman Perilaku Etika bab Etika Kerja yang menjadi panduan bagi Perwira Subholding Gas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa Etika Kerja yang berlaku bagi Perwira Subholding Gas sebagai berikut:

- Komitmen Individu
- Kerja Sama Antar Perwira Subholding Gas
- Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan
- Benturan Kepentingan
- Penerima Hadiah
- Pemberi Hadiah
- Perlindungan Aset PGN
- Mencatat Data dan Pelaporan
- Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
- Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan
- Aktivitas Politik
- Integritas Laporan Keuangan
- Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)
- Penggunaan Media Sosial

Kebijakan Sosial dan Politik

PGN mengalokasikan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan *Corporate Social and Responsibility* (CSR) sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN, serta mengacu pada berbagai regulasi terkait TJSL. Dana tersebut merupakan salah satu komitmen serta kontribusi PGN dalam jangka panjang kepada lingkungan dan masyarakat, khususnya komunitas di sekitar lokasi jaringan (*site*) dan kantor PGN. Informasi secara rinci terkait dengan kegiatan CSR PGN selama tahun 2024 disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Laporan Tahunan ini dan juga Laporan Keberlanjutan 2024 yang dibuat secara terpisah namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

PGN berkomitmen penuh untuk tidak memberikan dana untuk kegiatan partai politik manapun selaras dengan Surat Edaran Direksi Nomor: 034300.SE/KP.04/HCGS/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta Seluruh Pekerja di Lingkungan Subholding Gas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau Sebagai Pengurus Partai Politik atau Pejabat

- Company Ethics with the Holding/ Subsidiaries/ Affiliates
- Company Ethics with the Government
- Company Ethics with the Community
- Company Ethics with Shareholders
- Company Ethics with Natural Gas Suppliers
- Company Ethics with the Media
- Company Ethics with Communities/ Professional Organizations

Work Ethics

The Code of Conduct in the Work Ethics chapter serves as a guideline for Gas Subholding Employees in carrying out their duties and responsibilities. The following are some of the Work Ethics that apply to Gas Subholding Gas Employees:

- Individual Commitment
- Cooperation between Gas Subholding Employees
- Compliance with Laws and Regulations
- Conflict of Interest
- Prize Recipient
- Gift Giver
- PGN Asset Protection
- Data Recording and Reporting
- Maintain the confidentiality of Company Data and Information
- Intellectual Property Rights
- Occupational Safety and Health and Environmental Management
- Political Activities
- Integrity of Financial Reports
- Insider Information (Insider Trading)
- Use of Social Media

Social and Political Policy

PGN allocates funds to carry out Corporate Social Responsibility (CSR) programs and activities in accordance with SOEs Ministerial Regulation No. PER-01/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on Special Assignments and CSR Programs of SOEs, as well as referring to various regulations related to CSR. This fund is one of PGN's long-term commitments and contributions to the environment and society, particularly in the communities surrounding its network locations (sites) and offices. Detailed information related to PGN's CSR activities in 2024 is presented in the Corporate Social Responsibility section of this Annual Report, as well as the 2024 Sustainability Report, which is prepared separately but is an integral part of this Annual Report.

PGN is fully committed not to provide funds for the activities of any political party in line with the Board of Directors' Circular Letter No. 034300.SE/KP.04/HCGS/2023 dated November 10, 2023, on the involvement of the Board of Directors, Board of Commissioners/ Supervisory Board, Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board, and all employees within the Gas Subholding during General Elections, Regional Head Elections, and/or as Political Party Administrators or

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun demikian, PGN memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk menyalurkan aspirasinya dalam kegiatan politik, namun dengan senantiasa menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menjadi anggota parlemen, legislatif atau eksekutif dengan batasan-batasan tertentu agar terhindar dari munculnya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Regional Head and Deputy Regional Head Officials. However, PGN allows all employees to channel their political aspirations while remaining neutral, not engaging in practical politics, and not becoming members of parliament, legislature, or executive, subject to certain restrictions to avoid potential conflicts of interest.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Pedoman Perilaku Etika PGN wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Perwira Subholding Gas di semua level organisasi termasuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan Etika Kerja dan Etika Usaha secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas sehari hari.

CODE OF ETHICS COMMITMENTS FOR ALL LEVELS

PGN's Code of Conduct must be adhered to and implemented by all Gas Subholding Employees at all levels of the organization, including the Board of Commissioners and Board of Directors, in consistently implementing Work Ethics and Business Ethics as a work culture in daily activities.

PELATIHAN TAHUNAN DAN SOSIALISASI KODE ETIK

Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) yang merupakan kode etik Perusahaan senantiasa disebarluaskan serta dipublikasikan melalui berbagai media antara lain:

1. *Website* Perusahaan https://pgn.co.id.
2. Portal internal PGN-Quality: www.pgnq.pgn.co.id; yaitu Aplikasi PGN-Q merupakan sistem informasi kumpulan Dokumen Acuan Kerja yang dimiliki oleh Perseroan untuk kepentingan Perwira Subholding Gas dalam memperoleh informasi dokumen yang berkaitan dengan prosedur dan operasi bisnis Perseroan.
3. Aplikasi *Compliance Online Systems* (COMPOLS) merupakan sistem informasi digital yang diterapkan bagi seluruh Perwira Pertamina Group sebagai sarana untuk meningkatkan *awareness* GCG dan digunakan oleh Perwira Subholding Gas untuk menyatakan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Budaya Perusahaan.
4. Aplikasi GCG *Online System* (GOLS) merupakan sistem informasi digital sebagai sarana Perseroan untuk meningkatkan *awareness* GCG dan salah satu sarana bagi Perwira Subholding Gas di AP/Afiliasi untuk menyatakan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Budaya Perusahaan.
5. Melalui media lain yang dimiliki Perseroan, seperti: media sosial, *banner, flyer*, dan *media advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

CODE OF ETHICS ANNUAL TRAINING AND SOCIALIZATION

The Code of Conduct, which constitute the Company's code of ethics, are always disseminated and published in various media, including:

1. Company Website https://pgn.co.id.
2. The internal portal of PGN-Quality: www.pgnq.pgn.co.id, namely the PGN-Q application, which is an information system for the collection of the Company's Working Reference Documents that allows Gas Subholding Employees in obtaining document information related to the Company's business procedures and operations.
3. The Compliance Online Systems (COMPOLS) application, which is a digital information system implemented for all Pertamina Group Employees as a means to increase GCG awareness and utilized by Gas Subholding Employees to declare their commitment to implementing GCG principles and Corporate Culture values.
4. The GCG Online System (GOLS) application is a digital information system as a means for the Company to increase GCG awareness and a means for Gas Subholding Employees in Subsidiaries/ Affiliates to express their commitment to implementing GCG principles and Corporate Culture values.
5. Through other media owned by the Company, such as: social media, banners, flyers, and other advertising media in the Company's office area.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Perseroan menerapkan dan menegakkan kode etik yang dilakukan antara lain dengan:

a. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di satuan/ unit kerja masing-masing;

CODE OF ETHICS IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

Efforts to implement and enforce the Company's Code of Ethics include:

a. The Board of Directors decides to provide fostering actions, disciplinary sanctions and/or corrective and preventive measures, which must be implemented by the direct superior in each working unit;

b. Perwira Subholding Gas yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Etika Kerja memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama;
c. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung, mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama; dan
d. Perseroan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistleblowing System*), yang diatur secara tersendiri.
e. Perseroan menetapkan fungsi FKAP (Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan) memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen anti penyuapan.

b. Gas Subholding Employees violating the Business Ethics and Work Ethics have the right to have their explanation heard before their immediate superior prior to administering guidance or disciplinary action, pursuant to the Collective Labor Agreement;
c. Implementation of fostering actions, disciplinary punishments and/or corrective and preventive measures are conducted by the direct superior, pursuant to the Collective Work Agreement; and
d. The Company prepares provisions governing the reporting mechanism for alleged irregularities (Whistleblowing System), which are regulated separately.
e. The Company determines that the Anti-Bribery Compliance Function has the responsibility and authority to implement the anti-bribery management system.

SANKSI UNTUK PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi yang dikenakan untuk setiap pelanggaran etika usaha disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dokumen perikatan terkait lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran etika kerja diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Perwira Subholding Gas.

SANCTIONS FOR CODE OF ETHICS VIOLATION

Sanctions imposed for any violation of business ethics are in accordance with applicable regulations and other related binding documents. Sanctions for violations of work ethics are regulated in the Collective Labor Agreement between the Company and Gas Subholding Employees.

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEMBERIAN SANKSI TAHUN 2024

Terkait pengelolaan pelanggaran kode etik, PGN memiliki Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*) sebagai acuan perilaku bagi insan Perwira PGN dalam mengelola Perseroan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan. Dalam pelaksanaannya terkait penganganan insiden atau pelanggaran terkait etika PGN memiliki sistem pelaporan *Whistleblowing* (Pedoman *Whistleblowing System* P-002/A011) yang memungkinkan pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika bisnis. Insan Perwira PGN yang terbukti melakukan penyimpangan dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kebijakan internal PGN dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Hingga akhir tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran Etika Usaha yang dilakukan Perusahaan, seluruh karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk Pelanggaran terhadap Etika Kerja telah diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Pekerja.

VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS AND SANCTIONS IN 2024

Regarding the management of violations of the code of ethics, PGN has a Code of Conduct as a behavioral reference for PGN's officers in managing the Company to achieve the Company's vision, mission and objectives. In its implementation related to the handling of incidents or violations related to ethics, PGN has a Whistleblowing reporting system (Whistleblowing System Guideline P-002/A011) that allows internal and external parties to report suspected violations of business ethics. PGN Officers who are proven to have committed irregularities may be subject to action in accordance with the provisions contained in PGN's internal policies and Collective Labor Agreement (CLA).

Until the end of 2024, there were no violations of Business Ethics committed by the Company, all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. As for violations of Work Ethics, sanctions have been imposed in accordance with the Collective Labor Agreement between the Company and Workers.

MONITORING DAN EVALUASI

Perseroan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Pedoman Perilaku Etika dengan melaksanakan *Assessment* GCG. Perseroan juga terus melakukan dengan berkelanjutan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, serta rekomendasi hasil *assessment* GCG.

MONITORING AND EVALUATION

Periodically, the Company monitors and evaluates the implementation of the Code of Conduct, by conducting GCG Assessments. The Company always makes continuous improvements in accordance with applicable laws and regulations, adjusting to the Company's developments and needs, as well as recommendations from the GCG assessment results.

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN PGN DAN PENINGKATAN *EMPLOYEE ENGAGEMENT* TERHADAP PERUSAHAAN

PGN Corporate Culture Development and Employee Engagement Improvement

PGN turut serta dalam menerapkan *core values* BUMN AKHLAK sebagai budaya Perusahaan. Kemudian, Perwira Subholding Gas juga memiliki peran sebagai *Agent of Change* dalam penerapan budaya Perusahaan. Penyelarasan budaya Perusahaan dijalankan dengan membawa semangat One Pertamina yakni SATU Tujuan Bersama, TIGA Perilaku Spesifik, dan LIMA Hasil Utama. Dengan semangat One Pertamina ini, penerapan budaya Perusahaan dituangkan menjadi tiga program utama yakni Program Standard (*One Hour Meeting*), Program *Mandatory* (*One Action*), serta Program Spesifik (*One* Kolab), yaitu:

- *One Hour Meeting - Clear and Effective Meeting,* yaitu program standar yang dilakukan dengan tujuan membangun budaya *meeting* yang efektif dan efisien di lingkungan Pertamina Group dengan menyusun perencanaan *meeeting* terencana, pelaksanaan *meeting* tepat waktu dengan risalah *meeting* dan tindak lanjut yang jelas;
- *One Action - Coffee Morning Briefing Online/Offline* (C'Mon Bro), yaitu program mandatory yang ditujukan untuk memberikan kualitas terbaik dalam setiap aspek pekerjaan yang bentuknya bisa melalui rapat koordinasi rutin masing-masing Satuan Kerja yang berfokus pada program kerja dan upaya pencapaian target kinerja dengan menekankan kaidah C2NO (*Compliance, No Delay, No Mistakes*) sebagai nilai utama pelaksanaan *One Action*;
- *One Kolab,* yaitu program spesifik/unggulan dari fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kolaborasi, serta pencapaian dari setiap fungsi yang ada di dalam Pertamina Group dengan membuat program yang disusun berdasarkan *pain poin survey* atau peluang bisnis yang dimiliki setiap fungsi.

PGN participates in implementing BUMN AKHLAK's core values as corporate culture. Furthermore, Gas Subholding Employees act as agents of change in implementing the corporate culture. Alignment of the Corporate culture is carried out through the One Pertamina spirit, namely ONE Common Goal, THREE Specific Behaviors, and FIVE Primary Objectives. With One Pertamina spirit, implementation of the Corporate culture is outlined into three main program, namely Standard Program (One Hour Meeting), Mandatory Program (One Action), and Specific Program (One Kolab), namely:

- One Hour Meeting - Clear and Effective Meeting, which is a standard program carried out with the aim of building an effective and efficient meeting culture within the Pertamina Group by preparing planned meeting plans, implementing meetings in a timely manner with clear minutes of the meeting and follow-ups;
- One Action – Coffee Morning Briefing Online/Offline (C'Mon Bro), which is a mandatory program with the aim of generating the best quality in every working aspect, which can be in the form of routine coordination meetings for each Work Unit focusing on work programs and efforts to achieve performance targets by emphasizing on the C2NO (Compliance, No Delay, No Mistakes) principle as the core value of One Action implementation;
- One Kolab, namely a specific/ superior program from a function that aims to improve performance, collaboration, and achievements of each function within the Pertamina Group by creating a program that is structured based on a pain point survey or business opportunities of each function;

PGN juga melaksanakan kegiatan penguatan program budaya lain yang bertujuan sebagai tindak lanjut dari program yang dibuat agar pelaksanaan budaya di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan berjalan terarah dan mencapai target yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan penguatan program budaya yang dilakukan yaitu:

- *Uji Pemahaman Program Budaya,* yaitu program berupa quiz atau uji pengetahuan mengenai pelaksanaan Program Budaya, One Pertamina, serta AKHLAK dari setiap Pekerja dan Mitra Kerja yang ada di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan dengan tujuan sebagai salah satu sarana meningkatkan *knowledge* serta *awareness* terhadap program budaya yang dilakukan.
- *Monitoring dan Evaluasi Program Budaya,* yaitu berupa kegiatan monitoring pelaksanaan budaya serta kegiatan evaluasi yang dilakukan bersama *Leader*. Tujuan yang diharapkan adalah implementasi program budaya yang dilaksanakan sesuai dengan semangat nilai AKHLAK, One Pertamina, serta kaidah yang sudah ditentukan.
- *Reward and Consequences,* yaitu implementasi pemberian reward serta consequences kepada pekerja ataupun mitra kerja atas pelaksanaan budaya di setiap Satuan Kerja/Anak Perusahaan. Tujuan yang diharapkan adalah dapat mendorong pekerja maupun mitra kerja untuk melaksanakan budaya dengan lebih baik dan maksimal.
- *Sharing Budaya,* yaitu *sharing* mengenai pelaksanaan serta dampak dari program budaya yang dilaksanakan antar fungsi/perusahaan/SH. Dengan tujuan dapat menginnspirasi dan mendorong pelaksanaan budaya di fungsi yang mendapatkan *sharing*.
- *Artefak Visual,* yaitu pengadaan artefak dengan nilai dan semangat AKHLAK, One Pertamina, Program Budaya serta Sistem Kerja yang terintegrasi nilai AKHLAK yang tujuannya untuk memastikan *core values* AKHLAK menjadi kebiasaan sehari-hari dari setiap fungsi dalam menjalankan proses bisnisnya.

Perusahaan secara konsisten melaksanakan Program Budaya AKHLAK Subholding Gas dan mengevaluasi pelaksanaannya setiap 1 (satu) bulan sekali melalui *self-assessment.* Pelaksanaan *self-assessment* dilakukan setiap awal bulan oleh Perwira Ksatriya (Pertamina Wira Komunitas Internalisasi Budaya) selaku *agent of change* yang ada di Satuan Kerja/Anak Perusahaan/ Afiliasi. Bagi 3 (tiga) Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi yang mendapatkan skor *self-assessment* tertinggi di bulan berjalan akan mendapatkan apresiasi untuk menambah motivasi dan semangat dalam mengimplementasikan program budaya AKHLAK.

PGN also carries out other cultural program strengthening activities as a follow-up to the programs that have been formulated to ensure that the implementation of culture in each Work Unit/ Subsidiary runs in a focused manner and achieves the set targets. Some of the cultural program strengthening activities carried out are:

- Cultural Program Understanding Test, namely a program in the form of a quiz or knowledge test regarding the implementation of the Cultural Program, One Pertamina, as well as AKHLAK of each Worker and Business Partner in each Work Unit/ Subsidiary which serves as a means of increasing knowledge and awareness of the cultural program being carried out.
- Cultural Program Monitoring and Evaluation, which is in the form of monitoring activities for the implementation of culture and evaluation activities carried out together with the Leader. The expected goal is the implementation of cultural programs that are carried out in accordance with the spirit of AKHLAK and One Pertamina values, as well as the set rules.
- Reward and Consequences, namely the implementation of giving rewards and consequences to workers or business partners for the implementation of culture in each Work Unit/ Subsidiary. The expected goal is to encourage workers and business partners to the implement culture better and optimally.
- Culture Sharing, namely sharing regarding the implementation and impact of cultural programs implemented between functions/ companies/ SH. With the aim of inspiring and encouraging the implementation of culture in the functions that receive sharing.
- Visual Artifacts, namely the procurement of artifacts with the values and spirit of AKHLAK, One Pertamina, Cultural Programs, and Work Systems that are integrated with AKHLAK values, with the aim to ensure that AKHLAK core values become a daily habit of each function in carrying out its business processes.

The Company consistently implements the Gas Subholding AKHLAK Culture Program and evaluates its implementation monthly through self-assessment. The self-assessment is conducted at the beginning of each month by the Ksatriya Employee (Community for Internalizing Pertamina Wira Culture) as agents of change in the Work Unit/ Subsidiary/ Affiliate. Three Work Units/ Subsidiaries/ Affiliates that receive the highest self-assessment scores in the current month will receive appreciation to increase motivation and enthusiasm in implementing the AKHLAK culture program.

Berdasarkan hasil *self-assessment* yang telah dilakukan, Perusahaan mengadakan Perwira Ksatriya *Award* setiap 1 tahun sekali yang bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi yang telah mengimplementasikan Budaya AKHLAK secara sungguh-sungguh dan konsisten. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi di lingkungan Subholding Gas dengan kategori meliputi *The Best* Perwira Ksatriya 2024, Top 3 Perwira Ksatriya *in Working Unit*, dan Top 3 Perwira Ksatriya *in Subsidiary and Affiliation*.

Based on the results of the self-assessment that has been carried out, the Company holds the Perwira Ksatriya Award once a year, which aims to provide appreciation for Work Units/ Subsidiaries/ Affiliates that have implemented the AKHLAK Culture in a determined and consistent manner. This activity also involves all Work Units/ Subsidiaries/ Affiliates within the Gas Subholding with categories including The Best Perwira Ksatriya in 2024, Top 3 Perwira Ksatriya in Working Unit, and Top 3 Perwira Ksatriya in Subsidiary and Affiliation.

PGN sebagai Subholding Gas ikut serta dalam *Assessment Living Core Values* (LCV) AKHLAK yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero), LCV bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan komitmen *leader* terhadap pelaksanaan program budaya AKHLAK di lingkungan Pertamina Group. LCV dilakukan oleh seluruh pejabat setara Vice President (VP) sejumlah 261 orang dan pejabat setara General Manager (GM) sejumlah 105 orang. Pada LCV tahun 2024, Subholding Gas berhasil memenangkan pada beberapa kategori, yaitu:

1. *Best Engagement* Team yang diraih oleh:
   - Group Head, Financial Control and Management Analytics; dan
   - General Manager, Sales and Operation Region II.
2. Juara 2 Best Leader setara VP yang diraih oleh Group Head, Accounting and Tax; dan
3. Juara 2 Best Leader setara GM yang diraih oleh Direktur Utama PT PGAS Solution.

As a Gas Subholding, PGN participates in the AKHLAK Assessment of Living Core Values (LCV) implemented by PT Pertamina (Persero), LCV aims to evaluate the implementation and commitment of leaders to the implementation of the AKHLAK culture program within the Pertamina Group. LCV was carried out by all officials equivalent to Vice President (VP) totaling to 261 people and officials equivalent to General Manager (GM) totaling to 105 people. In the 2024 LCV, the Gas Subholding won in several categories, namely

1. Best Engagement Team, which was achieved by:
   - Group Head, Financial Control and Management Analytics; and
   - General Manager, Sales and Operation Region II.
2. 2nd Place for Best Leader equivalent to VP, received by the Group Head, Accounting and Tax; and
3. 2nd Place for Best Leader equivalent to GM, received by the President Director of PT PGAS Solution.

PGN secara keseluruhan mendapatkan rata-rata skor *Assessment* LCV AKHLAK adalah sebesar 339,35 dari 500 dengan *Maturity Level Engagement.* Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata *leader* yang berada di Subholding Gas telah berperan aktif dalam menggerakkan seluruh unit/fungsi di bawahnya untuk mengimplementasikan program budaya sesuai dengan *workplan* demi mencapai *succes indicator.*

PGN as a whole received an average LCV AKHLAK Assessment score of 339.35 out of 500 with Maturity Level Engagement. This exhibits that the average leader in Gas Subholding has played an active role in driving all units/ functions below them to implement cultural programs in accordance with the work plan to achieve success indicators.

Untuk mengukur efektivitas implementasi Budaya Perusahaan, PT Pertamina (Persero) melakukan pengukuran *Practice Pulse Check* (PPC) implementasi Budaya setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2024, PGN mendapatkan nilai PPC sebesar 86,02 dari 100. Hasil skor tersebut menunjukkan bahwa nilai budaya AKHLAK Perwira PGN telah terinternalisasi pada diri sendiri dan menerapkan budaya secara konsisten.

To measure the effectiveness of the implementation of Corporate Culture, PT Pertamina (Persero) conducts the annual Practice Pulse Check (PPC) measurement on the implementation of Culture. In 2024, PGN received a PPC score of 86.02 out of 100. The score results indicate that the AKHLAK cultural values have been internalized in PGN Officers and that the culture have been applied in a consistent manner.

Dalam rangka meningkatkan *Employee Engagement* menciptakan lingkungan kerja yang positif, PGN juga memiliki program tambahan untuk para pegawai yaitu:

- Surat Edaran Anti Pelecehan Seksual di Lingkungan Subholding Gas, PGN aktif mengkampanyekan gerakan anti pelecehan seksual untuk mencegah adanya tindakan pelecehan seksual;
- *Cross Talent Mobility,* program ini bertujuan untuk mendapatkan talent yang berpengalaman di lingkungan holding migas, penguatan kompetensi, dan *melting culture*;
- *Growth Corner* merupakan salah satu program budaya di Perusahaan Gas Negara (PGN) yang hadir untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan diri para Perwira di luar kompetensi utama yang terkait dengan pekerjaan;
- *Agent of Change* (AOC), merupakan komunitas internalisasi budaya yang terdiri dari perwakilan setiap Satuan Kerja/ Anak Perusahaan/ Afiliasi. AOC bertugas untuk menjadi agen perubahan dalam menerapkan nilai-nilai budaya AKHLAK di masing-masing Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi, sehingga nilai-nilai AKHLAK dapat dapat terinternalisasi ke seluruh Perwira Subholding Gas; dan
- Komunitas Keberagaman dan Inklusi Perempuan Pertamina Tangguh Inspiratif Wibawa dan Integritas (Komunitas Pertiwi) Chapter Subholding Gas, komunitas ini bertujuan untuk mendorong kesetaraan Perwira perempuan dalam meningkatkan kemampuan dan menyiapkan kader pemimpin berkontribusi ke sosial masyarakat, perusahaan, dan dunia. Kegiatan Pertiwi mencakup beberapa bidang untuk mencapat tujuan Pertiwi yaitu: Bidang *Development,* Bidang *Wellbeing*, Bidang *Sustainability*, dan Bidang *Partnership & Communication*.

Program-program tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan *employee engagement* pekerja, berdasarkan hasil *Employee Engagement Survey,* PGN mendapatkan skor *Employee Engagement* sebesar 80,68 dari 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja PGN merasa terlibat dan terikat secara positif dengan pekerjaan yang diemban dan tujuan Perusahaan. Sehingga secara tidak langsung pekerja PGN berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja finansial dan operasional perusahaan.

In order to increase Employee Engagement and create a positive work environment, PGN also has additional programs for employees, namely:

- Circular Letter Against Sexual Harassment within the Gas Subholding, PGN actively campaigns against sexual harassment movements to prevent acts of sexual harassment;
- Cross Talent Mobility, this program aims to obtain experienced talents within the oil and gas holding, competency strengthening, and melting culture;
- Growth Corner merupakan salah satu program budaya di Perusahaan Gas Negara (PGN) yang hadir untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan diri para Perwira di luar kompetensi utama yang terkait dengan pekerjaan;
- Agent of Change (AOC), merupakan komunitas internalisasi budaya yang terdiri dari perwakilan setiap Satuan Kerja/ Anak Perusahaan/ Afiliasi. AOC bertugas untuk menjadi agen perubahan dalam menerapkan nilai-nilai budaya AKHLAK di masing-masing Satuan Kerja/Anak Perusahaan/Afiliasi, sehingga nilai-nilai AKHLAK dapat dapat terinternalisasi ke seluruh Perwira Subholding Gas; and
- Pertamina Women's Diversity and Inclusion Community Resilient Inspirative Authority and Integrity (Pertiwi Community) Gas Subholding Chapter, this community aims to encourage equality of female Employees in improving their abilities and preparing cadres of leaders to contribute to society, the company, and the world. Pertiwi's activities cover several areas to achieve Pertiwi's goals, namely: Development Sector, Wellbeing Sector, Sustainability Sector, and Partnership & Communication Sector.

These programs can indirectly increase employee engagement of workers. Based on the Employee Engagement Survey results, PGN received an Employee Engagement score of 80.68 out of 100. This indicates that PGN workers feel involved and positively bound to the work they do and the Company's goals. Therefore, indirectly, PGN employees strive to always improve the Company's financial and operational performance.

PROGRAM ESOP/MSOP

ESOP/MSOP Program

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 November 2003, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 dari Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui program kepemilikan saham oleh karyawan (ESA) dan program kepemilikan saham oleh manajemen (MSOP) dengan syarat dan ketentuan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tersebut, Perusahaan menetapkan 3 program untuk peserta ESA, sebagai berikut:

a. Memberikan peserta ESA saham sebagai penghargaan atas kontribusi kepada Perusahaan masing-masing sebesar rata-rata dua kali jumlah penghasilan bulanan. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
b. Peserta ESA juga dapat membeli saham dengan pembayaran menggunakan bonus tahun 2003 dengan sebanyak-banyaknya tiga kali penghasilan bulanan. Pembelian saham melalui cara ini memperoleh diskon sebesar 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di Bursa Efek dan tidak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.
c. Apabila peserta ESA bersedia menggunakan haknya pada program 1 dan 2, maka peserta ESA diberi kesempatan membeli saham secara tunai menggunakan dana sendiri dengan diskon 18% dari harga penawaran. Saham untuk program ini tidak dapat dijual dalam periode 1 tahun setelah tanggal pencatatan saham Perusahaan di bursa efek dan tak dapat diambil secara tunai oleh peserta ESA.

Berdasarkan rapat Dewan Komisaris pada 17 November 2003, yang berhak mengikuti program MSOP adalah Direksi, Dewan Komisaris dan manajemen senior pada tingkatan tertentu. Dalam program ini, jumlah saham baru yang akan diterbitkan tidak melebihi 5% dari modal ditempatkan dan disetor dengan maksimum periode penerbitan saham 3 tahun dan dilaksanakan dalam 3 tahap dengan jangka waktu pelaksanaan program keseluruhan selama 5 tahun dengan perincian berikut:

1. Tahap Pertama
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 50% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham 110% dari harga penawaran umum perdana atau sebesar Rp1.650. Pemberian hak dilakukan pada 15 Desember 2003 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Desember 2004.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 3, 2003, as stated in Deed No. 5 of Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved the employee share ownership program (ESA) and management share ownership program (MSOP) with terms and conditions determined by the Board of Commissioners. Based on the resolution of the EGMS, the Company established three programs for ESA participants, as follows:

a. Providing ESA participants shares as a reward for their contribution to the Company, which amounts to an average of twice their monthly income. Shares for this program cannot be sold within one year after the date of listing of the Company's shares on the Stock Exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.
b. ESA participants can also purchase shares by payment using the 2003 bonus with a maximum of three times their monthly income. The purchase of shares through this method is at a discount of 18% from the offering price. Shares for this program cannot be sold within one year after the date of listing of the Company's shares on the Stock Exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.
c. If ESA participants are willing to exercise their rights in programs 1 and 2, they are provided with the opportunity to purchase shares in cash using their own funds at a discount of 18% from the offering price. Shares for this program cannot be sold within a period of one year after the date of listing of the Company's shares on the stock exchange and cannot be taken in cash by ESA participants.

Based on the Board of Commissioners meeting on November 17, 2003, those eligible to participate in the MSOP program are the Board of Directors, Board of Commissioners, and senior management at certain levels. Under this program, the number of new shares to be issued does not exceed 5% of the issued and paid-up capital with a maximum issuance period of three years and implemented in three phases with an overall program implementation period of five years with the following details:

1. First Stage
   The number of shares to be issued is a maximum of 50% x 5% x the total issued and fully paid-up capital with an exercise price of 110% of the initial public offering price or Rp1,650. The grant of rights was made on December 15, 2003, with a vesting period of one year. The 1-year exercise period commenced on December 15, 2004.

2. Tahap Kedua
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan Dewan Komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata- rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2005 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2006.
3. Tahap Ketiga
   Jumlah saham yang akan diterbitkan sebesar maksimum 25% x 5% x jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan saham yang akan ditentukan komisaris dengan ketentuan harga minimal sebesar harga saham rata-rata selama 25 hari bursa sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham yang bersangkutan. Pemberian hak dilakukan pada 15 Februari 2006 dengan masa memperoleh hak kompensasi selama 1 tahun. Periode pelaksanaan selama 1 tahun dimulai sejak 15 Februari 2007. Program MSOP tahap pertama sebanyak 108.024.675 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2005, tahap kedua sebanyak 53.930.825 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2007 dan tahap ketiga sebanyak 53.551.388 lembar saham telah selesai dilaksanakan pada 2008.

Seluruh tahapan program ESOP/MSOP tersebut di atas telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2024, tidak ada program kepemilikan saham ESOP/MSOP oleh karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris yang dilaksanakan di PGN.

2. Second Stage
   The number of shares to be issued is a maximum of 25% x 5% x the total issued and fully paid-up capital with an exercise price to be determined by the Board of Commissioners with a minimum price of the average share price during the 25 trading days prior to the announcement of the general meeting of shareholders. The grant of rights was made on February 15, 2005, with a vesting period of one year. The 1-year exercise period commenced on February 15, 2006.

3. Third Stage
   The number of shares to be issued is a maximum of 25% x 5% x the total issued and fully paid-up capital with an exercise price to be determined by the commissioner, under the condition that the minimum price is the average share price during the 25 trading days prior to the announcement of the general meeting of shareholders. The rights were granted on February 15, 2006, with a one-year vesting period. The 1-year exercise period commenced on February 15, 2007. The first phase of the MSOP program, with 108,024,675 shares, was completed in 2005. The second phase, with 53,930,825 shares, was completed in 2007. In addition, the third phase, with 53,551,388 shares, was completed in 2008.

All stages of the ESOP/MSOP program mentioned above have been completed. In 2024, no ESOP/MSOP share ownership program by employees, Board of Directors, or Board of Commissioners was implemented in PGN.

URAIAN SINGKAT KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN

Brief Description of Management Share Ownership Disclosure Policy

PGN telah mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. PGN juga memastikan bahwa Perusahaan memiliki dan melaksanakan kebijakan untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan. Pada tahun 2024, terdapat transaksi pembelian saham untuk tantiem yang ditangguhkan periode tahun buku 2023 dan investasi yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap kepemilikan saham Perusahaan.

PGN disclosed the share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the Company Profile chapter of this Annual Report. PGN also ensures that the Company has and implements a policy to disclose the share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) business days after the occurrence of ownership or any change in ownership of the Company's shares. In 2024, there were share purchase transactions for deferred tantiem for the 2023 financial year and investments made by the Board of Commissioners and Directors in the Company's share ownership.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

CARA PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN

Sejalan dengan komitmen dalam implementasi GCG, PGN senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, termasuk dalam hal pelaporan pelanggaran. Perseroan memiliki dan menjalankan Pedoman *Whistleblowing System* No. P-002/A011 tanggal 2 Agustus 2021. Pedoman *Whistleblowing System* merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di Perusahaan yang tidak dapat terselesaikan melalui prosedur normal.

Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme *Whistleblowing System* ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga pihak-pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran.

Tujuan pelaksanaan *Whistleblowing System* ini sebagai berikut:

1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari *stakeholder*.
2. Sebagai saluran pelaporan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan melalui Prosedur normal organisasi.
3. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.
4. Menghindari publikasi negatif terhadap Perseroan.
5. Mendukung asas kesetaraan (*fairness*) dalam hubungan antara Perseroan dengan *stakeholder* sebagai pelaku usaha dan mitra Perseroan.
6. Sebagai salah satu upaya pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, PGN telah melaksanakan sosialisasi terkait *whistleblowing system* setiap tahun kepada para karyawan yang disampaikan melalui:

1. Agenda *entry meeting* audit.
2. *Broadcast email* setiap bulan.
3. Survei Indeks *Fraud Perception* (PERFECT) pada bulan Oktober-November 2024.

MECHANISM TO SUBMIT VIOLATION REPORT

In line with its commitment to GCG implementation, PGN always pays attention to stakeholders' interests based on the principles of fairness and equality, including in terms of reporting violations. The Company has and implements the Guidelines for Whistleblowing System No. P-002/A011 dated August 2, 2021. The Whistleblowing System guideline is a system that can be used as a medium for whistleblowers to submit information regarding violations indicated to have occurred in the Company that cannot be resolved through normal procedures.

Reports obtained from the Whistleblowing System mechanism need to get attention and follow-up, including the appropriate sentencing to provide a deterrent effect for perpetrators of violations and also for those who intend to commit violations.

The purpose of implementing Whistleblowing System are as follows:

1. As a basis or implementation guideline in handling reporting violations from stakeholders.
2. As a channel for reporting matters that cannot be resolved through normal organizational procedures.
3. Ensuring the implementation of an effective mechanism for resolving whistleblowing within an adequate period.
4. Avoiding negative publications against the Company.
5. Supporting the principle of equality (fairness) in the relationship between the Company and stakeholders as the Company's business actors and partners.
6. As one of the efforts to disclose various issues in the Company that are not in accordance with the ethical standards that apply in the Company.

Throughout 2024, PGN conducted socialization related to the whistleblowing system to employees annually, which was delivered through:

1. Audit entry meeting agenda.
2. Monthly email broadcast.
3. Fraud Perception Index Survey (PERFECT) in October-November 2024.

PROSES *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Ketentuan dalam Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran Perusahaan terdiri dari:

1. Kewajiban Perusahaan menerima dan menyelesaikan Pelaporan Pelanggaran. Dalam hal ini Perusahaan:
   a. Wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal;
   b. Wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak (anonim);
   c. Menyediakan saluran pengelolaan pelaporan pelanggaran yaitu melalui Komite Etik; dan
   d. Komite Etik akan meneruskan pelaporan pelanggaran sesuai dengan konteks pihak yang dilaporkan.

2. Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, yaitu:
   a. Pelaporan pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi maupun Perwira Subholding Gas;
   b. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan pada saat/di luar jam kerja;
   c. Pelaporan pelanggaran disampaikan melalui *e-mail, website*, surat, atau datang langsung ke Komite Etik;
   d. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis;
   e. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan pelanggaran;
   f. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa resmi lainnya dengan mekanisme sebagai berikut:
      1) Melalui *website* Perseroan yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: https://wbs.pgn.co.id;
      2) Melalui *e-mail* pengelola WBS yang beroperasi menerima pelaporan pelanggaran setiap hari (Senin-Minggu) selama 24 jam dengan alamat: pgn.etik@pertamina.com; dan
      3) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perseroan c.q Komite Etik PGN, dengan cara diantar langsung atau pos ke Perseroan dengan alamat: Komite Etik PT PGN Tbk, Gedung Graha PGAS Lantai 3, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat 11140. Sistem *whistleblowing* tersebut tersedia bagi seluruh karyawan, vendor, pemasok, masyarakat, dan pemangku lainnya.
3. Pelaporan pelanggaran secara tertulis disarankan untuk dilengkapi bukti pendukung yang berkaitan dengan bukti indikasi awal terjadinya pelanggaran;

WHISTLEBLOWING SYSTEM PROCESS

Provisions in managing the Company violation report consist of:

1. Company obligations on receiving and completing violation reports. In this case the Company:
   a. Must receive violation reports from internal and external parties;
   b. Must accept and complete violation reports from reporters who include their identity and those who do not (anonymous);
   c. Providing a channel for managing violation reports, namely through the Ethics Committee;
   d. The Ethics Committee will follow up on violation reports in accordance with the context of the reported parties.
2. The Company regulated the mechanism in Receiving Whistleblowing, namely:
   a. Violation reporting are submitted to the Ethics Committee, both concerning the Board of Commissioners, Board of Directors, and Gas Sub-holding Employees;
   b. Violation reporting can be done during/outside working hours;
   c. Violation reporting is submitted via e-mail, website, letter, or directly to the Ethics Committee;
   d. The Company accepts every violation report submitted by stakeholders and/or stakeholder representatives either verbally or in writing;
   e. The Company provides an explanation regarding the policies and procedures for resolving violation reports when stakeholders and/or stakeholder representatives submit a violation reporting;
   f. Reporting of the alleged violations can be submitted in writing or orally in Indonesian or other official languages with the following mechanism:
      1) Through the Company's operating website, it accepts violation reports every day (Monday-Sunday) for 24 hours at the address: https://wbs.pgn.co.id;
      2) Via e-mail, the operational WBS manager receives violation reports every day (Monday-Sunday) for 24 hours at the address: pgn.etik@pertamina.com; and
      3) Submitting an official letter addressed to the Company c.q PGN Ethics Committee by direct delivery or post to the Company at the address: the Ethics Committee of PT PGN Tbk, Graha PGAS Building, 3rd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, West Jakarta 11140. The whistleblowing system is available to all employees, vendors, suppliers, communities, and other stakeholders.
3. Written violation reports are recommended to be completed with supporting evidence relating to evidence of the initial indications of the violation;

4. Jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas maka Perseroan memberikan tanda terima, dan jika pelaporan pelanggaran tidak dilengkapi dengan identitas maka akan dicatat dalam daftar pelaporan pelanggaran;
5. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
   a. Fotokopi bukti identitas *stakeholders* dan perwakilan *stakeholders*;
   b. Surat Kuasa dari *stakeholders* kepada perwakilan *stakeholders* yang menyatakan bahwa *stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*; dan
   c. Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
6. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Dalam Pedoman *Whistleblowing System,* perlindungan bagi Pelapor menjadi hal yang wajib diperhatikan. Beberapa hal yang diatur sebagai bentuk perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor pelanggaran;
2. Perlindungan pelapor pelanggaran dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
3. Perlindungan Pelapor yang meliputi:
   a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan; dan
   b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
4. Terhadap pelapor pelanggaran yang merupakan pekerja di lingkungan perusahaan akan mendapatkan perlindungan dari upaya balas dendam (*retaliation*) yang berpotensi timbul, antara lain:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atau pangkat;
   c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan
   d. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi (*personal file record*).

PENANGANAN PENGADUAN

Perseroan telah mengatur mekanisme dalam Penerimaan Pelaporan Pelanggaran, di antaranya:

1. Pelaporan Pelanggaran disampaikan kepada Komite Etik atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PGN Group baik yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja Perusahaan atau *Stakeholders* lain. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Komite Etik melalui sarana/media Pelaporan Pelanggaran resmi yang telah disediakan

4. If the reporting of the violation is submitted in writing with an identity, the Company will provide a receipt, and if the reporting of the violation is not accompanied by an identity, it will be recorded in the violation reporting list;
5. If a violation report is submitted by a stakeholder representative, then in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:
   a. Copy of evidence of identity of stakeholders and stakeholder representatives;
   b. Power of Attorney from the stakeholder to the stakeholder representative stating that the stakeholder gives authority to act for and on behalf of the stakeholder; and
   c. If the stakeholder representative is an institution or legal entity, it must be attached with a document stating that the party submitting a report of violation is authorized to represent the institution or legal entity.
6. The Company is required to submit proof of receipt of the violation reporting to stakeholders and/or representatives of stakeholders who submitted reporting.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

In the Guidelines for the Whistleblowing System, protection for whistleblowers is a matter that must be considered. Several matters that are regulated as a form of protection for whistleblowers are as follows:

1. The Company is obliged to protect whistleblowers;
2. Protection of whistleblowers is intended to boost the courage to report violations;
3. Whistleblower Protection which includes:
   a. Guarantee that the identity of the reporter and the contents of the report shall be kept confidential; and
   b. Security guarantee for the reporter and his/her family.
4. Whistleblowers who are workers within the Company will receive protection from potential retaliation, among others:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion;
   c. Harassment or discrimination in any form whatsoever; and
   d. Adverse records in personal data files (personal file record).

HANDLING OF COMPLAINTS

The Company regulated the mechanism for Receiving Violation Reports, including:

1. Whistleblowing is submitted to the Ethics Committee for alleged violations that occur within PGN Group, whether involving the Board of Commissioners, Board of Directors, Company Employees or other Stakeholders. Violation reporting is addressed to the Ethics Committee through the official Violation Reporting facilities/media that have been

baik yang disampaikan pada saat/di luar jam kerja, secara lisan maupun tertulis dan dengan identitas maupun tanpa identitas (anonim).

2. Dalam menyampaikan Pelaporan Pelanggaran, pelapor disarankan untuk melampirkan bukti/indikasi awal yang dapat berupa dokumen, surat, barang maupun informasi yang dapat menunjukkan bahwa suatu dugaan pelanggaran telah terjadi untuk memudahkan proses verifikasi.
3. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh Perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas, pelapor diminta untuk menyerahkan dokumen tambahan sebagai berikut:
   a. Fotokopi identitas *Stakeholders* dan Perwakilan *Stakeholders*.
   b. Surat kuasa dari *Stakeholders* kepada Perwakilan *Stakeholders* yang menyatakan bahwa *Stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *Stakeholders*. Jika Perwakilan *Stakeholders* adalah Lembaga atau badan Hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili Lembaga atau badan hukum tersebut.
4. Komite Etik akan membuat tanda terima Pelaporan Pelanggaran dan menyampaikan tanda terima tersebut kepada Pelapor Pelanggaran atau perwakilannya. Terhadap Pelaporan Pelanggaran yang tidak dilengkapi dengan identitas pelapor (anonim), Komite Etik akan mencatat pelaporan tersebut ke dalam daftar/*database* Pelaporan Pelanggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik akan menindaklanjuti setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan
   Komite Etik menerima setiap pelaporan pelanggaran dari pelapor melalui berbagai saluran pelaporan WBS yang telah disediakan, melakukan pengelolaan *database* pelaporan dan *monitoring* atas status setiap Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima.
2. Verifikasi Laporan
   Komite Etik melaksanakan pemeriksaan administratif atas Pelaporan Pelanggaran yang telah diterima melalui WBS untuk melihat terpenuhi atau tidaknya kriteria pelanggaran yang dilaporkan untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Penelaahan Laporan
   Komite Etik melakukan pemeriksaan substantif atas Pelaporan Pelanggaran yang diterima dan telah memenuhi kriteria, untuk melihat kecukupan bukti permulaan untuk dapat dilakukan investigasi lebih lanjut.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Perusahaan membentuk Komite Etik sebagai organ independen yang berfungsi untuk mengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan PGN *Group*. Dalam kondisi Perusahaan belum membentuk unit

provided, whether submitted during/out of working hours, verbally or in writing and with identity or without identity (anonymous).

2. In submitting a Violation Report, the whistleblower is advised to attach initial evidence/indications which can be in the form of documents, letters, goods, or information that can show that an alleged violation occurred to facilitate the verification process.
3. If the Whistleblowing is submitted by the Stakeholders Representative, then in addition to the above documents, the whistleblower is requested to submit additional documents as follows:
   a. Photocopy of identity of Stakeholders and Stakeholders Representatives.
   b. Power of attorney from the Stakeholders to the Stakeholders' Representative stating that the Stakeholders grant authority to act for and on behalf of the Stakeholders. If the Stakeholders Representative is an Institution or Legal Entity, it must be attached by a document stating that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the Institution or Legal Entity.
4. The Ethics Committee will make a receipt of the Whistleblowing and deliver the receipt to the Whistleblower or his/her representative. For Whistleblowing that is not complemented by the whistleblower's identity (anonymous), the Ethics Committee will record the report into the Whistleblowing list/database.

In carrying out its duties, the Ethics Committee will follow-up on any Violation Report received through the following stages:

1. Receipt of Report
   The Ethics Committee receives each whistleblowing from the whistleblower through various WBS reporting channels that have been provided, manages the reporting database, and monitors the status of each Whistleblowing that has been received.
2. Verification of Report
   The Ethics Committee carries out an administrative examination of Whistleblowing that has been received through the WBS to see whether or not the reported violation criteria are met to be followed up.
3. Review of Report
   The Ethics Committee conducts a substantive examination of the Whistleblowing received and has met the criteria, to see the sufficiency of preliminary evidence for further investigation.

PARTIES AUTHORIZED TO MANAGE REPORTS

The Company established the Ethics Committee as an independent organ to manage the Whistleblowing System (WBS) within PGN Group. If the Company has not established a special unit to manage the WBS (Ethics Committee), the

khusus pengelola WBS (Komite Etik), maka pengelolaan WBS diserahkan kepada Satuan Kerja Audit Internal, dengan personil yang dapat berasal dari fungsi atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi Internal Audit, Hukum, GCG, dan Sumber Daya Manusia.

Saat ini, pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau WBS di Perusahaan dilaksanakan oleh Komite Etik yang berasal dari unsur pekerja Satuan Kerja *Internal Audit* PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang independensi dan objektivitasnya diatur dalam Piagam *Audit Internal.*

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN DAN TINDAK LANJUTNYA

Apabila terdapat Pelaporan Pelanggaran yang didapati telah memenuhi unsur kecukupan bukti permulaan, maka atas rekomendasi Komite Etik, Perusahaan dapat membentuk Tim Investigasi untuk melakukan investigasi atas permasalahan atau pelanggaran yang dilaporkan. Komite Etik akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut seluruh Pelaporan Pelanggaran yang diterima.

PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat 14 (empat belas) pengaduan yang diterima melalui sistem pelaporan *Whistleblowing* dan 5 (lima) laporan pengaduan yang berasal dari tahun 2023, yang telah dikelola dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

management of the WBS is handed over to the Internal Audit Unit, with employees who can come from functions or work units that have the duties and functions of Internal Audit, Law, GCG, and Human Resources.

Currently, the management of the Whistleblowing System or WBS in the Company is carried out by the Ethics Committee, which comes from the employees of the Internal Audit Unit of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. whose independence and objectivity are regulated in the Internal Audit Charter.

COMPLAINT HANDLING RESULTS AND ITS FOLLOW-UP

If there is a Whistleblowing that is found to have met the elements of sufficient preliminary evidence, then upon the recommendation of the Ethics Committee, the Company may establish an Investigation Team to investigate the reported issue or violation. The Ethics Committee will monitor the follow-up of all Whistleblowing received.

COMPLAINTS VIA THE WHISTLEBLOWING SYSTEM IN 2024

Throughout 2024, there were 14 (fourteen) complaints received through the Whistleblowing reporting system and 5 (five) complaint reports from 2023, which have been managed and followed up in accordance with applicable procedures.

PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TAHUN 2024
Complaints via the Whistleblowing System in 2024

No.		Uraian Description	Total
A		*Outstanding* pelaporan WBS per 1 Januari 2024 Outstanding WBS reporting as of January 1, 2024	5
B		Tambahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Additional WBS reporting until December 31, 2024	14
C		Total pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Total WBS reporting until December 31, 2024	19
D		Selesai ditindaklanjuti hingga 31 Desember 2024 Complete follow-up until December 31, 2024	12
E	E1	*Outstanding* pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Outstanding WBS reporting as of December 31, 2024	7
	E2	Verifikasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Verification of WBS reporting until December 31, 2024	1
		Penelaahan pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Review of WBS reporting until December 31, 2024	6
	E3	Investigasi pelaporan WBS hingga 31 Desember 2024 Investigation of WBS reporting as at December 31, 2024	-

PENYUSUNAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements Preparations

PGN melakukan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh *Accounting Group* yang didukung oleh tenaga akuntan profesional yang dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang Akuntansi.

Selain sertifikasi profesi, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, personel *Accounting Group* juga turut aktif dalam mengikuti forum seminar, kongres, konferensi, simposium dan pelatihan nasional maupun internasional, seperti Seminar *International Financial Reporting Standards* yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kongres Akuntansi yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

PGN prepares its Consolidated Financial Statements based on the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia, which include Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies. The preparation of the Financial Statements is carried out by the Accounting Group supported by professional accountants who have professional certificates in Accounting.

In addition to professional certifications, to improve competence and professionalism, Accounting Group employees also actively participate in national and international seminars, congresses, conferences, symposiums, and training forums, such as the International Financial Reporting Standards Seminar organized by the Institute of Indonesia Chartered Accountants, the Indonesian Management Accountants Association, and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Accounting Congress organized by the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN

Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

PGN melakukan pemenuhan terhadap kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan selaras dengan ketentuan berlaku. Upaya ini dilakukan dengan penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web www.pgn.co.id.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disampaikan kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tanggal yang telah ditetapkan serta telah dipublikasikan pada situs web PGN.
2. Laporan Tahunan PGN yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, investor, *rating agency*, dan lainnya, serta dipublikasikan melalui situs *web* Perusahaan.

TRANSPARANSI KONDISI NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, di antaranya adalah Visi, Misi, Budaya Perusahaan, Komposisi dan Profil Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web PGN.
2. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, atau bentuk tertulis lainnya dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan pada situs *web* PGN, media sosial, dan lainnya agar investor, dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perusahaan.
3. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan Perusahaan dipublikasikan pada Laporan Tahunan dan situs *web* Perusahaan.

PGN fulfills the obligation of transparency and publication of financial and non-financial conditions in line with applicable provisions. This effort is carried out with the delivery and publication of information both through printed media and the website at www.pgn.co.id.

TRANSPARENCY OF COMPANY'S FINANCIAL CONDITIONS

1. The Quarterly Publication Financial Statements have been submitted to the regulator in accordance with the stipulated provisions and dates and have been published on PGN's website.
2. PGN's Annual Report is prepared and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators, investors, rating agencies, and others, as well as published through the Company's website.

TRANSPARENCY OF COMPANY'S NON-FINANCIAL CONDITIONS

1. Information on Corporate Governance, including Vision, Mission, Corporate Culture, Composition and Profile of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as internal provisions related to governance ranging from the Articles of Association to the Committees' Charters, which are also published through PGN's website.
2. Information on the Company's Products and Services is published through the Annual Report or other written forms in the form of electronic information provided on PGN's website, social media, and others so that investors and the general public can easily access information on the Company's products and services.
3. Information on the transparency of the Company's ownership structure is published in the Annual Report and on the Company's website.

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict of Interest Guidelines

PGN memiliki dan menerapkan kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi Nomor P-004/A011 tanggal 15 September 2021, yang telah diperbaharui pada 31 Desember 2024 menjadi Pedoman Benturan Kepentingan. Isi dari Pedoman Benturan Kepentingan yang dimiliki Perusahaan diuraikan di bawah ini.

PRINSIP DASAR

a. Insan PGN yang di dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.
b. Setiap potensi maupun kenyataan terjadinya Benturan Kepentingan wajib dilaporkan kepada Atasan Langsung.

SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi Benturan Kepentingan yang dapat dihadapi oleh Insan PGN, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Situasi yang menyebabkan Insan Perwira PGN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan yang bertentangan dengan ketentuan internal Perseroan dan peraturan perundangan yang menyebabkan adanya suatu keputusan/tindakan atau jabatan yang menguntungkan pihak Pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau informasi Perseroan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
5. Situasi rangkap jabatan yang dimana keputusan atau tindakan yang diambil dapat menyebabkan Insan Perwira PGN tidak dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel dan/atau mengakibatkan adanya keuntungan pribadi/pihak lain yang merugikan Perseroan.
6. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Perwira PGN atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
7. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

PGN has and implements a Conflict-of-Interest policy as stated in the Guidelines for Conflict of Interest and Gratification Control Number P-004/A011 dated September 15, 2021, which was updated on December 31, 2024, to become the Conflict of Interest Guidelines. The contents of the Company's Conflict of Interest Guidelines are described below.

BASIC PRINCIPLES

a. PGN employees who in carrying out their activities have the potential to face Conflict of Interest, are not allowed to participate in the decision-making process.
b. Any potential or actual occurrence of a Conflict of Interest must be reported to the Direct Supervisor.

CONFLICT OF INTEREST SITUATIONS

Conflict of interest situations that PGN employees may face, among others, but are not limited to:

1. Situations that cause PGN Employees to receive gratuities or the provision or acceptance of gifts/souvenirs or entertainment that are contrary to the Company's internal provisions and laws and regulations that cause a decision/action or position that benefits the Giver.
2. Situations that cause the use of the Company's assets for personal/group/other party interests.
3. Situations that cause confidential position information or Company information to be used for personal or group interests.
4. Situations that lead to abuse of position authority for personal/group/other party interests.
5. A concurrent position situation in which the decision or action taken may cause PGN Employees to be unable to carry out their duties professionally, independently, and accountably and/or result in personal/other party benefits that are detrimental to the Company.
6. Situations that give specific access to PGN Employees or certain parties to not follow the procedures and provisions that should be applied.
7. Situations that cause the supervision process to not be in accordance with procedures due to the influence and expectations of the supervised party;

8. Situasi dimana pihak yang melakukan penilaian/audit adalah pihak yang sama dengan pihak yang sedang dinilai/diaudit.
9. Situasi yang memanfaatkan jabatan di Perseroan untuk kepentingan pekerjaan yang lain di luar Perseroan sehingga merugikan Perseroan.
10. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perseroan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.
11. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perwira PGN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perwira PGN sehubungan dengan jabatannya di Perseroan.
12. Situasi di mana Insan Perwira PGN memiliki hubungan sedarah dalam hubungan Keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
    a. Situasi yang menyebabkan Insan PGN menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak Pemberi;
    b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset PGN untuk kepentingan pribadi atau golongan;
    c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau informasi PGN dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
    d. Situasi rangkap jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
    e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan PGN atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
    f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
    g. Situasi di mana terdapat kesempatan penyalahgunaan jabatan;
    h. Situasi di mana seseorang dapat menentukan sendiri besaran gaji/remunerasi;

8. Situation where the party conducting the assessment/audit is the same party as the party being assessed/audited.
9. Situations that utilize positions in the Company for the benefit of other work outside the Company, thus detrimental to the Company.
10. Situations that make it possible to provide more information than has been determined by the Company, privileges, and opportunities for prospective goods/services providers to win in the procurement process of goods/services in the Company.
11. Situations where there is an affiliation/family relation between PGN Employees and other parties who have an interest in the decisions and/or actions of PGN Employees in connection with their position in the Company.
12. Situations where PGN Employees are related by blood within the family to members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
    a. Circumstances in which PGN personnel can receive gratuities, gifts, souvenirs, or inducements in exchange for a decision or position that benefits the giver.
    b. Circumstances that lead to the misuse of professional assets or PGN resources for personal or group interests.
    c. Circumstances where confidential job-related or PGN-specific information is misused for personal or collective advantage.
    d. Concurrent positions in multiple companies with either direct or indirect inter-connections, whether similar or not, which can induce one to abuse their one position to gain unlawfully in their other's.
    e. Circumstances that give PGN personnel or certain external parties special access that allows them to circumvent procedures and regulations.
    f. Circumstances where supervisory processes are compromised due to external influences or expectations from the parties being monitored.
    g. Circumstances that may lead to the abuse of authority for personal gain.
    h. Circumstances where an individual is allowed to determine their own salary or remuneration.

i. Situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PGN;
j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi untuk menyalahgunakan wewenang;
k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan PGN, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di PGN; dan
l. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan PGN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan PGN sehubungan dengan jabatannya di PGN.

i. Circumstances where one does work other than their assigned job, except when permitted by company bylaws.
j. Circumstances where discretion is exercised in a manner that leads to an abuse of authority.
k. Circumstances where one can disclose more information than what is made permissible by PGN, unlawful advantages that give certain prospective vendors higher chance to win bids in PGN's procurement processes.
l. Circumstances where personal or familial affiliations between PGN personnel and external parties influence decisions or actions taken in their professional capacity at PGN.

PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

a. Setiap Insan PGN yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan situasi Benturan Kepentingan tersebut melalui aplikasi COMPOLS atau GOLS, penyusunan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung (dengan tembusan: UPG PGN) segera setelah berada dalam situasi Benturan Kepentingan tersebut;
b. Insan PGN wajib melakukan pelaporan (*disclosure*) melalui aplikasi COMPOLS atau GOLS, membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan Keluarga Inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PGN; dan
c. Pelaporan atas terjadinya situasi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan PGN ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

CONFLICT OF INTEREST REPORTING

a. Every PGN employee who is potentially and/or has been in a Conflict-of-Interest situation, must report such situation through the COMPOLS or GOLS application immediately after being in the Conflict-of-Interest situation;
b. PGN employees are required to report (disclosure) through the COMPOLS or GOLS application, if they have a blood relationship in the Immediate Family relationship with members of PGN's Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
c. Reporting the occurrence of a Conflict-of-Interest situation must be conducted in good faith and not as a personal complaint against a PGN policy or based on ill will/slander.

AUDITOR EKSTERNAL

External Auditor

PROSES PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja EY, firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia, untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Penunjukan dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Mei 2024, yang menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member of Ernst & Young)* untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditugaskan dalam audit laporan keuangan Perseroan tahun berjalan dan melaporkannya pada RUPS mendatang. Direksi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP hingga kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melakukan kajian terhadap calon Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dalam RUPS.
- Komite Audit mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan urutan peringkat hasil penilaian.
- Dewan Komisaris menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan diusulkan kepada RUPS.
- Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan tahunan dan meminta wewenang kepada RUPS untuk menetapkan besaran nilai jasa KAP tersebut.
- Apabila RUPS menerima usulan dari Dewan Komisaris, maka RUPS akan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris. Namun, apabila RUPS menolak usulan tersebut, maka RUPS akan menetapkan Kantor Akuntan Publik.
- Direksi melaksanakan kontrak jasa pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik sesuai keputusan RUPS. Salinan kontrak antara Direksi dengan Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani.

EXTERNAL AUDITOR APPOINTMENT PROCESS

The Company appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja EY, a member firm of the Ernst & Young global network in Indonesia, to Audit the Financial Statements for the 2024 Financial Year. The appointment was made based on the Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2024, which appointed Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young) to carry out the Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year, PSA 62 Compliance Audit, Audit of Financial Statements of Micro and Small Business Funding related to Social and Environmental Responsibility Programs, and Implementation of Agreed Procedures for the Report on the Results of the Evaluation of Corporate KPI Performance and Individual KPIs for the 2024 Financial Year.

The Board of Commissioners is responsible for proposing the Public Accounting Firm (KAP) to be assigned in the audit of the Company's financial statements for the current year and reporting it to the upcoming GMS. The Board of Directors assists the Board of Commissioners in the procurement of KAP services until the contract is executed in accordance with applicable provisions.

- The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, reviews the Public Accounting Firm candidates proposed in the GMS.
- The Audit Committee proposes Public Accounting Firm candidates to the Board of Commissioners, which is arranged based on the ranking order of the assessment results.
- The Board of Commissioners determines the Public Accounting Firm to be proposed to the GMS.
- The Board of Commissioners proposes to the GMS to appoint a Public Accounting Firm that will audit the annual financial statements and request authority from the GMS to determine the amount of the KAP service value.
- If the GMS accepts the Board of Commissioners' proposal, the GMS will determine the Public Accounting Firm proposed by the Board of Commissioners. However, if the GMS rejects the proposal, the GMS will determine the Public Accounting Firm.
- The Board of Directors executes the service contract for the audit of the Company's financial statements with the Public Accounting Firm in accordance with the GMS resolution. A copy of the contract between the Board of Directors and the Public Accounting Firm is submitted to BPK RI no later than 7 (seven) days after the contract is signed.

Adapun ruang lingkup jasa audit yang dilakukan Ernst & Young (EY) adalah sebagai berikut:

- Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024.
- Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024.
- Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) tahun buku 2024.
- Penerapan Prosedur yang Disepakati Atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun Buku 2024.

Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti jika KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

Pada tahun 2024, total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku sebesar Rp2.899.520.721,- (tidak termasuk PPN). Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) juga ditunjuk untuk melakukan jasa audit, sebagai berikut:

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Saka Energi Indonesia Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp1.917.000.000 (tidak termasuk PPN);
2. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Solution Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp305.800.000 (tidak termasuk PPN);
3. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Gagas Energi Indonesia Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp278.000.000 (tidak termasuk PPN);
4. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGN LNG Indonesia Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp280.000.000 (tidak termasuk PPN);
5. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Permata Graha Nusantara Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp278.000.000 (tidak termasuk PPN);
6. Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Kalimantan Jawa Gas Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp276.500.000 (tidak termasuk PPN);
7. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Tahun Buku 2024 dengan biaya Rp 275.900.000 (tidak termasuk PPN); dan
8. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Gas dan entitas anak Tahun Buku 2024 dengan biaya sebesar Rp3.240.000.000 (tidak termasuk PPN).

The scope of audit services performed by Ernst & Young (EY) is as follows:

- General Audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2024 Financial Year.
- Audit of the Financial Statements of Micro and Small Enterprises Funding related to the Social and Environmental Responsibility Program in 2024.
- Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control (PSA 62) for the 2024 financial year.
- Implementation of Agreed Procedures on the Report of Corporate KPI and Individual KPI Performance Evaluation Results for the 2024 Financial Year.

The Board of Commissioners also has the authority to determine the amount of audit fees, additional scope of work required, and other requirements, including determining a replacement Public Accounting Firm if the appointed KAP is unable to complete its work.

In 2024, the total fees incurred for the Audit of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year was Rp2,899,520,721 (excluding VAT). Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young global network in Indonesia) was also appointed to conduct audit services, as follows:

1. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Saka Energi Indonesia for the 2024 Financial Year with a fee of Rp1,917,000,000 (excluding VAT);
2. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGAS Solution for the 2024 Financial Year at a fee of Rp305,800,000 (excluding VAT);
3. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Gagas Energi Indonesia for the Year 2024 with a fee of Rp278,000,000 (excluding VAT);
4. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGN LNG Indonesia for the 2024 Financial Year with a fee of Rp280,000,000 (excluding VAT);
5. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Permata Graha Nusantara for the 2024 Financial Year at a cost of Rp278,000,000 (excluding VAT);
6. General Audit of the Financial Statements of PT Kalimantan Jawa Gas for the 2024 Financial Year at a cost of Rp276,500,000 (excluding VAT);
7. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara for the 2024 Financial Year with a fee of Rp275,900,000 (excluding VAT); and
8. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Gas and subsidiaries for the 2024 Financial Year at a cost of Rp3,240,000,000 (excluding VAT).

Pada tahun 2024, total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan jasa audit terhadap PGN dengan ruang lingkup tersebut dan audit umum atas laporan keuangan Entitas Anak sebesar Rp9.750.720.721 (tidak termasuk OPE dan PPN) . Daftar Akuntan dan Kantor Akuntan Publik PGN dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

In 2024, the total fees incurred for the implementation of audit services to PGN with the above scope and general audit of the financial statements of Subsidiaries was Rp9,750,720,721 (excluding OPE and VAT). The list of PGN Accountants and Public Accounting Firms in the last 5 (five) years is as follows:

DAFTAR AKUNTAN DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PGN DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

The List of PGN Accountants and Public Accounting Firms in the last 5 (five) Years

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Akuntan Publik Public Accountant
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (member firm of PricewaterhouseCoopers global network in Indonesia)	Toto Harsono
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (member firm of PricewaterhouseCoopers global network in Indonesia)	Daniel Kohar
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro &Surja (member firm of Ernst & Young global network in Indonesia)	Irwan Haswir
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro &Surja (member firm of Ernst & Young global network in Indonesia)	Irwan Haswir
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young di Indonesia) Purwantono, Sungkoro &Surja (member firm of Ernst & Young global network in Indonesia)	Irwan Haswir

JASA LAIN

Pihak yang telah ditunjuk Perusahaan sebagai Auditor Eksternal PGN Tahun Buku 2024 tersebut telah menyelesaikan tugasnya secara independen, sesuai standar profesional akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada PGN.

OTHER SERVICES

The party appointed by the Company as PGN's External Auditor for the 2024 Financial Year completed its duties independently, in accordance with the professional standards of public accountants, work agreements, and the scope of the audit that has been determined. Purwantono, Sungkoro & Surja Accounting Firm does not provide other consulting services to PGN.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

PGN berkomitmen untuk terus memberikan data dan informasi terbaru mengenai Perusahaan kepada Publik, selaras dengan pemenuhan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi yang disampaikan kepada publik atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakses melalui media-media berikut ini:

a. Pelaporan terhadap informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal baik melalui surat maupun pelaporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

b. PGN juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi Korporasi yang dilakukan melalui *press release* dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dapat diakses melalui *website* PGN. Pada *website* bahasa Indonesia dan Inggris, tersedia akses informasi untuk Laporan Tahunan.

c. Pemberian informasi yang cukup kepada investor dan calon investor melalui media komunikasi seperti telepon, *conference call, e-mail,* dan *website* Perusahaan.

d. Pemberian informasi melalui pertemuan tatap muka secara langsung maupun virtual seperti *one-on-one/group meeting*, kunjungan lapangan, *non-deal roadshow* dan *conference*. Secara proaktif, Perseroan juga mengikuti kegiatan-kegiatan temu publik yang diselenggarakan mandiri maupun institusi pemerintah serta sekuritas di dalam ataupun di luar negeri melalui konferensi, paparan publik, dan *investor summit.*

PGN is committed to continuously providing the latest data and information about the Company to the public, in line with the fulfillment of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies. Information submitted to the public or stakeholders can be accessed through the following media:

a. Reporting of information and material facts to the capital market authorities either by mail or electronic reporting to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange through the Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies owned by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange.

b. PGN also actively publishes every corporate action taken through press releases in two languages, Bahasa Indonesia and English, which can be accessed through PGN's website. On the Bahasa Indonesia and English websites, information for the Annual Report is available.

c. Providing sufficient information to investors and potential investors through communication media such as telephone, conference call, e-mail, and the Company's website.

d. Providing information through face-to-face meetings in person or virtually such as one-on-one/group meetings, field visits, non-deal roadshows, and conferences. The Company also proactively participates in public meetings organized by independent and government institutions and securities at domestic or abroad through conferences, public exposures, and investor summits.

Sepanjang 2024, Perseroan melalui *Investor Relation Division* telah mengadakan 175 kali pertemuan/*conference/video call* dengan mengundang dan telah dihadiri oleh analis sekuritas, investor institusi pasar modal, serta pemegang saham untuk berpartisipasi dalam forum pasar modal pada kegiatan sebagai berikut:

- *Analyst Briefing* 2024 pada tanggal 31 Jan 2024
- *Mandiri Investment Forum* pada tanggal 7 Mar 2024
- *DBS Energy Security Virutal Conference* pada tanggal 12 Maret 2024
- *Earning Call FY 2023* pada tanggal 15 Maret 2024
- *Analyst Meeting* Kinerja 1Q 2024 pada tanggal 17 Mei 2024
- Pertamina *Investor Day - Conference* pada tanggal 19 Juni 2024
- *Public Expose* pada tanggal 17 September 2024
- *Earning Call 9M 2024* pada tanggal 6 November 2024
- Nomura x Verdhana Indonesia Conference 2024 pada tanggal 7 November 2024

Secara umum, penyelenggaraan seluruh pertemuan-pertemuan tersebut di atas, dilakukan dalam rangka mendorong para pemegang saham agar terlibat dan berinteraksi dengan Perseroan di luar RUPS. Di samping itu, di antara pertemuan-pertemuan tersebut, Perseroan juga mengundang *existing shareholders* untuk datang serta terlibat secara aktif dalam RUPS Perseroan.

Throughout 2024, the Company, through the Investor Relations Division, held 175 meetings/conferences/video calls by inviting and has been attended by securities analysts, capital market institutional investors, and shareholders to participate in capital market forums in the following activities:

- Analyst Briefing 2024 on January 31, 2024
- Mandiri Investment Forum on March 7, 2024
- DBS Energy Security Virtual Conference on March 12, 2024
- Earning Call FY 2023 on March 15, 2024
- Analyst Meeting for the Q1 2024 Performance on May 17, 2024
- Pertamina Investor Day - Conference on June 19, 2024
- Public Expose on September 17, 2024
- Earning Call 9M 2024 on November 6, 2024
- Nomura x Verdhana Indonesia Conference 2024 on November 7, 2024

In general, the organization of all of the aforementioned meetings was carried out to encourage shareholders to engage and interact with the Company outside the GMS. In addition, among these meetings, the Company also invited existing shareholders to come and be actively involved in the Company's GMS.

AKSES INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Investor, analis dan Pemegang Saham dapat memperoleh informasi mengenai Perseroan dengan langsung menghubungi:

INFORMATION AND COMMUNICATION ACCESS

Investors, analysts, and shareholders can obtain information about the Company by directly contacting:

Investor Relation Division	**Situs Web Resmi PGN** PGN's Official Website	**Telepon** Phone	***E-mail*** E-mail
	www.pgn.co.id	(+62-21) 633-4838	PGN.InvestorRelation@pertamina.com

Untuk pelanggan dan calon pelanggan, informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, dapat diperoleh dengan mengirimkan *e-mail* ke pcc135@pertamina.com maupun menghubungi *contact center* di nomor 135.

PGN juga senantiasa memperkuat platform teknologi informasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui *website* Perseroan (www.pgn.co.id), dan sosial media yaitu:

- Instagram (gas_negara),
- Twitter (@Gas_Negara),
- Facebook (Perusahaan Gas Negara),
- YouTube (Perusahaan Gas Negara), serta
- Portal Kementerian BUMN.

For customers and prospective customers, further information about the Company can be obtained by sending an e-mail to pcc135@pertamina.com or contacting the contact center at 135.

PGN also continues to strengthen its information technology platform to maintain and improve reliability in providing integrated, timely, and targeted information through the Company's website (www.pgn.co.id), and its social media, namely:

- Instagram (gas_negara),
- Twitter (@Gas_Negara),
- Facebook (Perusahaan Gas Negara),
- YouTube (Perusahaan Gas Negara), and
- Portal of the Ministry of SOE.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance

PGN melaksanakan *assessment* GCG secara berkala, untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan GCG di lingkungan Subholding Gas *Group*. Perseroan juga melakukan perbaikan, penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan Perseroan, dan rekomendasi hasil *assessment* GCG. Secara berkelanjutan, PGN melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen. Pada tahun 2024, PGN telah melakukan *assessment* GCG dengan berbagai parameter sebagai berikut:

PGN conducts periodic GCG assessments to monitor and evaluate the implementation of GCG within the Gas Sub-holding Group. The Company also makes improvements, adjustments to the Company's development and needs, and recommendations from the GCG assessment results. On an ongoing basis, PGN assesses the quality of GCG implementation in collaboration with third parties to obtain more independent assessment results. In 2024, PGN conducted a GCG assessment with the following parameters:

PENERAPAN PARAMETER ACGS (*ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD*) (DATA RILIS MARET 2025)

Pada tahun 2024, PGN melakukan pengukuran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2024 menggunakan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dengan parameter ASEAN Capital Market Forum (ACMF), revisi Oktober 2023 (versi 2 Maret 2024), dengan hasil bahwa PGN telah menerapkan 91,11% dan melebihi standar minimum.

IMPLEMENTATION OF ACGS (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD) PARAMETERS (MARCH 2025 DATA RELEASE)

In 2024, PGN measured the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2024 using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) with ASEAN Capital Market Forum (ACMF) parameters, revised October 2023 (March 2, 2024 version), with the result that PGN has implemented 91.11% and exceeded the minimum standards.

Untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola perusahaan terbuka di level internasional, khususnya negara ASEAN serta untuk memberikan visibilitas internasional yang lebih baik mengenai perusahaan terbuka di ASEAN, PGN melakukan penilaian penerapan GCG yang mengacu kepada Parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard* ("ACGS") *new version October 2023*. Tingkat pemenuhan penilaian untuk periode masa pengukuran 1 Juli 2023-31 Desember 2024 sebagai berikut:

To improve the standards and practices of governance of publicly listed companies at the international level, especially ASEAN countries, and to provide better international visibility of publicly listed companies in ASEAN, PGN conducted an assessment of GCG implementation that refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard ("ACGS") new version October 2023 parameters. The level of fulfillment for the measurement period of July 1, 2023-December 31, 2024, is as follows:

PENERAPAN PARAMETER ACGS
Implementation of ACGS

Aspek ACGS ACGS Aspects	Jumlah Kriteria Number of Criteria	Praktik Pengungkapan Disclosure Practice			Diterapkan (%) Applied (%)
		N/A	Diterapkan Applied	Belum Diterapkan Not Applied	
Level 1 - Standar Minimum Yang Diharapkan | Level 1 - Minimum Expected Standard					
Rights and Equitable Treatment of Shareholders	30	6	24	0	100%
Sustainability and Resilience	22	1	19	2	90,48%
Disclosure and Transparency	34	1	33	0	100%
Responsibility of the Board	63	5	54	4	93,10%
Level 2 - Melebihi Standar Minimum | Level 2 - Exceeding the Minimum Standard					
Bonus	18	0	8	10	44,44%
Penalty	26	0	26	0	100%
Total	**193**	**13**	**164**	**16**	**91,11%**

Sumber: Tahun 2024 oleh konsultan PT Sinergi Daya Prima berdasarkan kriteria pengungkapan praktik tata kelola ACGS yang dipublikasikan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) pada bulan Maret 2024.
Source: Year 2024 by consultant PT Sinergi Daya Prima based on the ACGS governance practices disclosure criteria published by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) in March 2024.

PEMENUHAN PUGKI DAN POJK

PGN melakukan evaluasi tata kelola berdasarkan POJK 21/2015 mencapai predikat *Comply* untuk "Seluruh Aspek", serta melakukan evaluasi tata kelola dengan metode terbaru yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governansi) yaitu PUGKI (Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia) 2021 dengan mencapai predikat : *Apply* untuk "Seluruh Prinsip".

PUGKI AND POJK FULFILLMENT

PGN conducted a governance evaluation based on POJK 21/2015, achieving a Comply predicate for "All Aspects", as well as conducting a governance evaluation using the latest method issued by the KNKG (National Committee on Governance Policy), namely PUGKI (General Guidelines for Indonesian Corporate Governance) 2021 by achieving a predicate: Apply for "All Principles".

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to the Financial Services Authority (OJK) Regulations

Terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. PGN telah menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "telah sesuai atau dengan penjelasan" (*comply or explain*), sebagai berikut:

There are 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) recommendations on the implementation of aspects and principles of good corporate governance, in line with the enactment of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on Guidelines for Public Company Governance. PGN implemented these aspects, principles, and recommendations based on the "comply or explain" approach, as follows:

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles According to the Financial Services Authority (OJK) Regulations

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
A.	**HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM** RELATIONS BETWEEN A PUBLICLY LISTED COMPANY AND SHAREHOLDERS IN ENSURING THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS		
	Prinsip 1 - Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Principle 1 - Improving the Value of Organizing GMS		
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. A Public Listed Company has a method or technical procedure for collecting votes both publicly and privately that prioritizes independence and the interests of shareholders.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply PGN telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 25. Prosedur pengambilan suara juga terdapat dalam Tata Tertib RUPS tentang Pemungutan Suara. Pada saat pembukaan RUPS, Pembawa Acara menyampaikan mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan dalam RUPS yang dibagikan kepada para Pemegang Saham. PGN has established a method or technical procedure for GMS voting, as outlined in Article 25 of the Company's Articles of Association, dated May 11, 2021. The voting procedure is also specified in the GMS Rules for Voting. At the start of the GMS, the Master of Ceremonies informs the Shareholders about the Meeting Rules, which are also distributed to them.	274
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of a Publicly Listed Company shall attend the Annual GMS.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan 2024 seperti dijelaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor: 51 pada tanggal 30 Mei 2024. All members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors attended the 2024 Annual GMS as described in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of PGN No. 51 on May 30, 2024.	274

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs *Web* Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary of GMS minutes shall be made available on the Publicly Listed Company's Website for at least 1 (one) year.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah mengunggah Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perusahaan pada menu "*Investor*" sub menu "AGMS/RUPS" dan akan tersedia lebih dari 1 (satu) tahun. The Company has uploaded the Summary of Minutes of the Annual GMS for the Financial Year 2024 in Indonesian and English through the Company's website on the "Investors" submenu "AGMS/RUPS" and will be made available for more than 1 (one) year.	271-280
	Prinsip 2 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2 - Improving the Quality of Communication with Shareholders or Investors		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau *investor*. A Publicly Listed Company shall have a communication policy with Shareholders or investors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang tercantum dalam Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor Nomor: O-001/0.13 berdasarkan Instruksi Direksi Nomor: 0007000.1/KU.06/FIN/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGN melalui divisi Investor Relations melakukan proses komunikasi dengan pemegang saham, investor, serta aparat pendukung pasar modal. Bentuk komunikasi PGN dengan pemegang saham atau investor dilakukan melalui pelaksanaan RUPS, *public expose*, pertemuan investor/*investor summit*, *analyst meeting* serta melalui publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Selain itu, pemegang saham dan *investor* juga dapat mengakses informasi terkini Perseroan melalui situs web PGN. The Company has established a communication policy with shareholders or investors as stated in the Operating Procedure for Disseminating Company Information to Investors No. O-001/0.13, which is based on the Board of Directors Instruction No. 0007000.1/KU.06/FIN/2017 dated January 16, 2017, on the Operating Procedure for Disseminating Company Information to Investors of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. PGN, through the Investor Relations Division, conducts a communication process with shareholders, investors, and capital market supporting apparatus. PGN's communication with shareholders or investors is carried out through the implementation of the GMS, public exposes, investor meetings/investor summits, and analyst meetings, as well as through the publication of Financial Statements and Annual Reports. In addition, shareholders and investors can also access the Company's latest information through the PGN's website.	411
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau *investor* dalam Situs Web. A Publicly Listed Company shall disclose its communication policy with Shareholders or investors on its Website.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah mempublikasikan kebijakan komunikasi Perusahaan dan informasi penting Perusahaan dalam situs web Perusahaan. Salah satunya adalah di bagian Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor pada menu "*Investor*" sub menu "*Investor Relation Home*". The Company has published the Company's communication policy and important information on the Company's website. One of them is a disclosure of Operating Procedures for Disseminating Company Information to Investors in the "Investors" submenu of "Investor Relations Home".	170, 411

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
B.	**FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS** I FUNCTION AND ROLE OF BOARD OF COMMISSIONERS		
	Prinsip 3 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3 - Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The determination of the number of members of the Board of Commissioners shall consider the condition of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan jumlah Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu Pasal 14: a. Ayat (1) Huruf a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. b. Ayat (1) Huruf b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Dewan Komisaris PGN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 6 (enam) orang anggota, termasuk 4 orang di antaranya adalah Komisaris Independen. The determination of the number of Board of Commissioners has taken into account the condition of the Company, referring to the Company's Articles of Association, Article 14: a. Paragraph (1) Letter a. Supervision of the Company shall be carried out by the Board of Commissioners, the number of which shall be adjusted to the needs, consisting of at least 2 (two) persons, one of whom shall be appointed as President Commissioner, and if necessary, one of whom may be appointed as Deputy President Commissioner. b. Paragraph (1) Letter b. The Board of Commissioners consists of Commissioners and Independent Commissioners. The number of Independent Commissioners shall be in accordance with the prevailing laws and regulations. The number of members of PGN's Board of Commissioners as of December 31, 2024 is 6 (six) members, including 4 Independent Commissioners.	291-320
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners shall take into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota Dewan Komisaris. The determination of the composition of the Board of Commissioners has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required, which can be seen in the profile of each member of the Board of Commissioners.	364-365

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
	Prinsip 4 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Principle 4 - Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners shall have a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam *Board Manual* Bab III Angka 3.12 tentang Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has established a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners as stated in the Board Manual Chapter III Section 3.12 on Performance Evaluation of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners.	315
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners shall be disclosed in the Annual Report of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang berdasar pada *Board Manual* dengan menggunakan kriteria yang tertuang dalam *Key Performance Indicator (KPI),* telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, which is based on the Board Manual using the criteria set out in the Key Performance Indicator (KPI), has been disclosed in the Company's Annual Report.	315
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners shall have a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Ayat (25). The Board of Commissioners has established a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association Article 16 Paragraph (25).	353
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang tercantum di dalam *Board Manual* Bab II Dewan Komisaris Angka 3.13 Kebijakan Suksesi Direksi. The Board of Commissioners has formulated a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors, which is stated in the Board Manual Chapter II Board of Commissioners Section 3.13 on the Succession Policy of the Board of Directors.	352-353

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
C.	**FUNGSI DAN PERAN DIREKSI** I FUNCTION AND ROLE OF BOARD OF DIRECTORS		
	Prinsip 5 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5 - Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors shall take into account the condition of the Publicly Listed Company as well as its effectiveness in decision-making.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Direksi ayat (2) Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur atau lebih dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah anggota Direksi PGN per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 6 (enam) orang anggota. The determination of the number of members of the Board of Directors has taken into account the condition of the Publicly Listed Company as well as its effectiveness in decision-making based on the Company's Articles of Association, Article 16 paragraph (2), which states that the Board of Directors shall consist of at least 3 (three) persons, including 1 (one) President Director and 2 (two) Directors or more, by adhering to the prevailing laws and regulations. As of December 31, 2024, there are a total of 6 (six) members of PGN's Board of Directors.	321-350
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors shall take into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Penentuan komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan yang dapat dilihat dalam profil masing-masing anggota Direksi. The determination of the composition of the Board of Directors has taken into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required, which can be seen in the profile of each member of the Board of Directors.	364-365
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance shall have expertise and/or knowledge in accounting.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keputusan RUPS Tahun 2021 yang telah disahkan melalui Akta Keputusan RUPS Tahunan Tanggal 3 Mei 2021, menetapkan Fadjar Harianto Widodo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Fadjar Harianto Widodo memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 1992. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting or finance. The 2021 Annual GMS resolution, which was ratified through the Deed of Decision of the Annual GMS dated May 3, 2021, appointed Fadjar Harianto Widodo as Director of Finance and Risk Management. Fadjar Harianto Widodo obtained his Bachelor of Economics Degree from Diponegoro University in 1992.	364-365

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
	Prinsip 6 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6 - Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors shall have a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi yang tercantum di dalam *Board Manual* Bab II Direksi Angka 2.16 tentang Kinerja Perseroan. Direksi menyampaikan laporan triwulan pencapaian KPI kepada Dewan Komisaris setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dalam Rapat Gabungan. Dewan Komisaris kemudian melakukan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan pencapaian KPI Direksi yang dilaporkan dalam RUPS. The Board of Directors has established a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors as stated in the Board Manual Chapter II Directors Section 2.16 on Company Performance. The Board of Directors submits a quarterly report on the achievement of KPIs to the Board of Commissioners every 20th day of the following month, after the quarter ends, for discussion at the Joint Meeting. The Board of Commissioners then assesses the performance of the Board of Directors in accordance with the achievement of the KPIs reported in the GMS.	350
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors shall be disclosed in the annual report of the Publicly Listed Company.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi tercantum dalam *Board Manual* dan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Mekanisme penilaian kinerja Direksi merupakan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan mengacu kepada pencapaian KPI Direksi dan Perseroan. The self-assessment policy for assessing the performance of the Board of Directors is stated in the Board Manual and has been disclosed in the Company's Annual Report. The mechanism for assessing the performance of the Board of Directors is the responsibility of the Board of Commissioners with reference to the achievement of the KPIs of the Board of Directors and the Company.	350
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors shall have a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Direksi sudah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (23). The Board of Directors has already established a policy pertaining to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes as stated in the Company's Articles of Association Article 11 paragraph (23).	353

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
D.	**PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN** | STAKEHOLDER PARTICIPATION		
	Prinsip 7 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 - Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading.* Publicly Listed Company shall have a policy to prevent insider trading.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang tercantum di dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) dengan Nomor Dokumen: P-004/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. Penjelasan mengenai *insider trading* terdapat pada Bab IV Etika Kerja, Angka 4.13 tentang Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*). Perusahaan juga mempunyai Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 011000.K/132/UT/2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Kebijakan ini mengklasifikasikan informasi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 1. Informasi Rahasia; 2. Informasi Terbatas; dan 3. Informasi Biasa. Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan juga menjelaskan bahwa pengungkapan informasi kepada publik dan *stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perusahaan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. The Company has established a policy to prevent insider trading as stated in the Code of Conduct Document No. P-004/A017 Revision Number: 00, which was signed by the President Director on April 26, 2021. An explanation of insider trading is contained in Chapter IV of Work Ethics, Section 4.13 on Insider Trading. The Company also owns a Corporate Information Management Policy based on the Decision of the Board of Directors No. 011000.K/132/UT/2006, signed by the President Director. This policy classifies information into 3 (three) categories, as follows: 1. Confidential Information. 2. Restricted Information. 3. Regular Information. The Company's Information Management Policy also explains that the disclosure of information to the public and other stakeholders shall be carried out reasonably by taking into account the classification of information, the interests of the Company, and the needs of the concerned parties in accordance with applicable regulations.	433

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*. A Publicly Listed Company shall have an Anti-corruption and anti-fraud policy.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan memiliki kebijakan Anti *Fraud* dan Anti Korupsi, yang tercantum dalam berbagai kebijakan sebagai berikut: 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan Nomor Dokumen: P- 003/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. 2. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, dengan Nomor Dokumen: P-004/A017 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 26 April 2021. 3. Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi, dengan Nomor Dokumen: P-004/A011 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 15 September 2021. Pedoman Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan, serta anti penyuapan (SMMHSSEAP) No. P-002/15.03 tanggal 9 Januari 2023. 4. Penerapan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2023. The Company owns Anti-Fraud and Anti-Corruption policies, which are stated in various policies as follows: 1. Good Corporate Governance Guidelines, Document No. P- 003/A017, Revision No. 00, which was signed by the President Director on April 26, 2021. 2. Code of Business Ethics and Work Ethics, Document No. P-004/A017, Revision No. 00, signed by the President Director on April 26, 2021. 3. Guidelines for Conflict of Interest and Gratification Control, Document No. P-004/A011, Revision No. 00, which was signed by the President Director on September 15, 2021. Guidelines for Quality Management Systems, Occupational Safety and Health, Security, and anti-bribery (SMMHSSEAP) No. P-002/15.03 dated January 9, 2023. 4. Implementation of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System that is valid until December 21, 2023.	429-432
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. A Publicly Listed Company shall have a policy on the selection and improvement of suppliers or vendors.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* melalui kebijakan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor Dokumen: P-001/31.00/2023 Tanggal Berlaku: 30 Oktober 2023. Penjelasan terkait seleksi pengadaan barang dan jasa dimuat pada Bab III Pengadaan Barang dan Jasa angka 3.1 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Perusahaan telah melakukan peningkatan kemampuan kepada pemasok berupa penjelasan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan saat penjelasan pengadaan pekerjaan. Selain itu Perusahaan juga mengadakan sosialisasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) terkait K3, Etika Usaha, serta Anti Penyuapan dengan Penyedia Barang/Jasa. The Company has established a policy for selecting and improving suppliers or vendors under the Goods and Services Procurement Guidelines policy, Document No. P-001/31.00/2023, with an effective date of October 30, 2023. Explanations regarding the selection of goods and services for procurement are provided in Chapter III of Goods and Services Procurement, Section 3.1 on How to Procure Goods and Services. The Company has conducted an improvement for suppliers in the form of the dissemination of information regarding the goods and services procurement policy that applies to the Company during the briefing of work procurement. In addition, the Company also conducts Contractor Safety Management System (CSMS) dissemination on Occupational Safety and Health (K3), Business Ethics, and Anti-bribery policies with Goods/Services Providers.	426-428

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. A Publicly Listed Company shall have a policy on the fulfillment of creditors' rights.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Hak dan kewajiban Perusahaan kepada Kreditur tercantum di dalam kontrak dengan Kreditur di mana penyusunan kontrak mengacu pada kebijakan pihak Kreditur yang bekerja sama dengan Perusahaan. Pelaksanaan hubungan dengan Kreditur diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja pada Bab III Etika Usaha Angka 3.4 tentang Etika Perseroan dengan Kreditur yang di antaranya mengatur tentang kewajiban untuk menghormati hak-hak kreditur sesuai perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan. The Company's rights and obligations to Creditors are stated in the contract with Creditors, in which the drafting of the contract adheres to the policies of the Creditors who cooperate with the Company, The implementation of relations with Creditors is regulated in the Code of Business Ethics and Work Ethics in Chapter III Business Ethics, Section 3.4 regarding the Company's Ethics with Creditors, which, among others, regulates the obligation to respect the rights of creditors in accordance with the binding agreement and statutory provisions.	271-273, 463-464
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing.* A Publicly Listed Company shall have a policy on whistleblowing system.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan telah memiliki Pedoman *Whistlebowing System* dengan Nomor Dokumen: P-002/A011 Revisi Ke: 0 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Agustus 2021 yang bertujuan untuk memberikan arahan terkait pengelolaan *whistleblowing system* agar dapat berjalan efektif dan akuntabel. The Company has established a Whistlebowing System Guideline, with Document No. P-002/A011, Revision No. 0, signed by the President Director on August 2, 2021, which aims to provide direction regarding the management of the whistleblowing system so that the system can run effectively and accountably.	474-478
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. A Publicly Listed Company shall have a policy of granting longterm incentives to the Board of Directors and employees.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Kebijakan insentif jangka panjang untuk Direksi tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dimana Mata Acara Rapat 4 yaitu mengenai Penetapan besaran Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2024 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023. Sementara kebijakan insentif jangka panjang untuk karyawan tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021-2023 yaitu Pasal 44 tentang Insentif Kerja Pekerja (IKP). Besaran dan tata cara pembayaran IKP diatur melalui Keputusan Direksi. The long-term incentive policy for the Board of Directors is stated in the Annual General Meeting of Shareholders of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, in which Meeting Agenda 4 discussed Determination of the amount of Board of Directors' Salary and Board of Commissioners' Honorarium in 2024, and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year Performance. Meanwhile, the long-term incentive policy for employees is stated in the 2021-2023 Collective Labor Agreement, Article 44 on Worker Incentives (IKP). The amount and procedures for payment of IKP are regulated through a Decision of the Board of Directors.	274-280, 471-473

No.	Prinsip Principles	Telah Sesuai atau Dengan Penjelasan Comply with or with Explanation	Pengungkapan pada AR PGN 2024 Disclosures on PGN AR 2024
E.	**KETERBUKAAN INFORMASI** I INFORMATION DISCLOSURE		
	Prinsip 8 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 - Improving the Implementation of Information Disclosure		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. A Publicly Listed Company shall take advantage of the broader use of information technology in addition to the Website as a medium for information disclosure.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi di antaranya melalui: **Kebutuhan Informasi** Investor : pgn.investorrelation@pertamina.com Pelanggan : pcc135@pertamina.com Selain itu, Perusahaan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui media sosial, sebagai berikut: - *Facebook* (Perusahaan Gas Negara) - *Twitter* (@Gas_Negara) - *Instagram* (@gas_negara) - *Youtube* (Perusahaan Gas Negara) - *Whatsapp* (+62 815-1150-0645) The Company has utilized the broader use of information technology in addition to the website as a medium for information disclosure, including through: **Information Requires** Investor : pgn.investorrelation@pertamina.com Pelanggan (Customer) : pcc135@pertamina.com In addition, the Company also utilizes information technology through social media, as follows: - Facebook (Perusahaan Gas Negara) - Twitter (@Gas_Negara) - Instagram (@gas_negara) - Youtube (Perusahaan Gas Negara) - WhatsApp (+62 815-1150-0645)	170, 227-234
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company discloses the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership of at least 5% (five percent), in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in Public Company share ownership through the main and controlling shareholders.	Keterangan: Telah sesuai Note: Comply Laporan Tahunan 2024 telah mengungkapkan komposisi Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham porsi besar pada bab Profil Perusahaan. The 2024 Annual Report has disclosed the composition of Majority Shareholders and Large Shareholders in the Company Profile chapter.	148-152

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

PGN melakukan penilaian dan evaluasi GCG berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Penilaian dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip governansi korporat dari perspektif kalangan bisnis di Indonesia yang diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para investor dan pemangku kepentingan. Hal ini selaras dengan komitmen PGN untuk mewujudkan 4 (empat) pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, dan PGN terus berupaya menjalankan 8 (delapan) prinsip governansi korporat Indonesia, antara lain sebagai berikut:

PGN conducts GCG assessment and evaluation based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). This assessment and evaluation are carried out to strengthen the implementation of good corporate governance in accordance with the principles of corporate governance from the perspective of business circles in Indonesia, which is expected to play a crucial role in increasing investor and stakeholder confidence. It is in line with PGN's commitment to realizing the 4 (four) pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, and PGN continues to strive to implement 8 (eight) principles of Indonesian corporate governance, among others, as follows:

PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

Implementation of Good Corporate Governance Aspects and Principles Based on the Provisions in the Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI)

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 1 - PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 1 - ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of the Board of Directors **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahap dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors performs its leadership role and seeks to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible in running the business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. able to gradually grow (corporate resilience).	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi. Perusahaan telah menetapkan standar etika bisnis yang tinggi melalui Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) dengan nomor dokumen: P-002/A014 Revisi Ke: 00 yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 30 Desember 2022. Sebagai wujud untuk menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa Pegawai bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai standar etika. To achieve sustainable value creation, the Board of Directors performs its leadership role and seeks to accomplish governance results. The Company has established high standards of business ethics through the Code of Conduct with document no. P-002/A014 Revision: 00, which was signed by the President Director pn December 30, 2022. As a manifestation to foster a corporate culture which ensures that Employees are responsible for behaving in accordance with ethical standards.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors ensures that the Company's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are aligned with long-term goals through effective utilization of innovation and technology.	Direksi telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi dan rencana tahunan dan jangka menengah konsisten dengan tujuan jangka panjang seperti tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2026. The Board of Directors has ensured that the mission, vision, goals, targets, strategies, and annual and medium-term plans are aligned with the long-term objectives outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2023 and Long Term Plan (RJPP) 2021-2026.
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and in accordance with applicable laws, regulations, and standards.	Direksi telah memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors has ensured that the Company implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives and strategies, and in accordance with applicable laws, regulations, and standards.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the timely and accurate disclosure of all material information about the Company.	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi telah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku dan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan semua informasi material terkait korporasi sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dan telah mempublikasikannya di dalam situs web Perseroan. The Board of Directors has ensured that the integrity of the Company's accounting and financial reporting system is in compliance with applicable accounting provisions and that the Financial Report, Annual Report, and all material information related to the Company in line with the specified deadlines and have been published on the Company's website.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is prepared appropriately.	Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan persetujuan terhadap isi Laporan Keberlanjutan dengan menandatangani Lembar Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors has ensured that the sustainability report was properly prepared in accordance with applicable regulations and has approved its contents by signing the Board of Commissioners and Directors Approval Sheet.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors sets a framework for the Company's information technology (IT) governance that is in line with the Company's business needs and priorities, promotes business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the Company's objectives and strategies.	Direksi telah membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi. The Board of Directors has developed a framework for the Company's information technology (IT) governance that is in line with its business needs and priorities.
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For companies that conduct business activities based on Sharia principles, the Board of Directors must ensure the authority and availability of sufficient supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can perform its duties effectively.	Perusahaan bergerak di bidang pengembangan dan pemanfaatan gas bumi, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3. The company according to its Articles of Association, it is involved in the development and utilization of natural gas in Article 3.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. Periodically, the Charter of the Board of Directors is reviewed. The Charter, among other things, specifies the allocation of roles among individual Directors, which can be regulated by the Directors' Charter or a Directors' Decree.	Perusahaan telah memiliki Piagam Direksi yang disebut *Board Manual* yang disahkan pada tanggal 13 Desember 2021. The company has a Directors' Charter known as the Board Manual, which was ratified on December 13, 2021.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are found to have made a mistake.	Direksi sudah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat (23). The Board of Directors already has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes, as stated in Article 11 paragraph 23 of the Company's Articles of Association.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya** Performance Assessment – the Board of Directors and Members **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts an annual objective and independent evaluation of the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur sesuai *Board Manual* yang mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengimplementasikan *Key Performance Index* (KPI), dan melakukan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan pencapaian KPI Direksi yang dilaporkan dalam RUPS. The Board of Commissioners has conducted an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director in accordance with the Board Manual, which regulates that the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company implement the Key Performance Index (KPI), and assess the performance of the Board of Directors based on the KPI achievements of the Board of Directors that are reported at the General Meeting of Shareholders (GMS).
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, telah memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, yaitu berdasarkan RKAP. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, has ensured that the President Director's performance evaluation is based on predetermined criteria and communicated to the Board of Commissioners, as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the Company's strategy at least once a year and approves the mission, vision, and strategy developed by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises on, and approves the Company's business, long-term, and short-term financial plans. The Board of Commissioners also advises and oversees the Board of Directors' implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in critical decisions for the Company, as outlined in the Company's Articles of Association.	Dewan Komisaris telah meninjau strategi korporasi di dalam RJPP dan RKAP paling tidak setiap tahun, untuk memastikan strategi masih relevan dengan kondisi terkini. Keseluruhan tugas tersebut diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan. The Board of Commissioners has reviewed the Company's strategy in the RJPP and RKAP at least once a year to ensure that it remains relevant to current conditions. All of these tasks are governed by the Company's Articles of Association.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	PGN telah mengungkapkan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2023 sub bab Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan di bab Laporan Dewan Komisaris. PGN has disclosed the types of decisions that require Board of Commissioners approval in the 2023 Annual Report sub-chapter Implementation of the Board of Commissioners' Duties as well as the Board of Commissioners Report Chapter.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. The Board of Commissioners proposes to the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, taking into account the Nomination and Remuneration Committee's recommendations. In proposing the above, the Board of Commissioners emphasizes diversity, non-discriminatory elements, and equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election procedures for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are formal and transparent.	Dewan Komisaris memastikan telah memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan serta sesuai kebutuhan Perusahaan. The Board of Commissioners ensures that diversity is considered, non-discriminatory elements, and equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is formal and transparent and that it meets the Company's needs.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners, or the Committee that carries out the nomination function, develops a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the President Director's reports on the implementation of development and succession plans.	Kebijakan suksesi proses nominasi anggota Direksi oleh Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Manual*. Anggota Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. The Board Manual governs the succession policy for the nomination process of the members of the Board of Directors by the Board of Commissioners. Members of the Company's Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, which is attended and approved by Series A Dwiwarna Shareholders.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.5	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; 2. secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. 1. submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable Company development and the long-term interests of the Company and shareholders; 2. review the Board of Directors and Board of Commissioners' remuneration systems on a regular basis.	Dewan Komisaris telah mengusulkan remunerasi kepada PT Pertamina (Persero) selaku kuasa pemegang saham seri A Dwiwarna yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan untuk menetapkan besaran tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya. Secara berkala telah dilakukan tinjauan sistem remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris, sebelum diusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. The Board of Commissioners has proposed remuneration to PT Pertamina (Persero) as the proxy for Dwiwarna Series A shareholders in accordance with the Annual GMS, to determine the amount of tantiem, salary/honorarium, allowances, facilities, and other incentives. The remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners has been reviewed on a regular basis prior to being proposed to Series A Dwiwarna Shareholders.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of the Company's governance policies and their implementation and proposes changes as necessary.	Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite telah mengawasi efektivitas kebijakan governansi Perusahaan dan implementasinya serta mengusulkan perubahan (jika diperlukan). The Board of Commissioners, supported by the Committees, has monitored the effectiveness of the Company's governance policies, their implementation, and proposed changes (if necessary).
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners oversees and guides the Company to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the Company's goals, objectives, and strategies, as well as compliance with applicable laws, regulations, codes of conduct, and standards.	Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Perusahaan dengan memantau dan menyampaikan masukan terkait manajemen risiko dan sistem pengendalian internal melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Komite dengan Direksi maupun Pejabat satu level di bawah Direksi atau melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas pada Perusahaan. The Board of Commissioners has provided guidance on the implementation of the Company's risk management and internal control system by monitoring and providing input on the risk management and internal control system through Board of Commissioners meetings with the Board of Directors, Committee meetings with the Board of Directors or officials one level below the Board of Directors, or letters from the Board of Commissioners to Directors. The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee in evaluating/assessing the effectiveness of controls at the entity and operational/activity levels of the Company.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi Audit Internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and guides the achievement of the integrity of the Company's accounting and financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	Dewan Komisaris telah mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat serta independensi fungsi Audit Internal dan eksternal dalam bentuk penelaahan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan internal. The Board of Commissioners has overseen and guided the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions, through the review of the effectiveness of the implementation of external and internal audits.
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Company's annual and sustainability reports, ensuring their integrity, as well as overseeing the Company's disclosure and communication processes.	Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dengan menandatangani Lembar Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners approved the Annual Report and Sustainability Report by signing the Board of Commissioners and Directors Approval Sheet.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang termuat di dalam *Board Manual* rutin ditinjau, dengan pemutakhiran terakhir pada 13 Desember 2021 (sebelumnya di 2020). The guidelines for implementing the duties of the Board of Commissioners contained in the Board Manual are routinely reviewed, with the last update on December 13, 2021 (previously in 2020).
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are found to have made a mistake.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16 Ayat (25). The Board of Commissioners has a policy in place regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes, as stated in Article 16 Paragraph 25 of the Company's Articles of Association.
1.3.12	Komisaris Independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at the Board of Commissioners meetings.	Komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi berperan dan berkontribusi aktif seperti komisaris non independen untuk bekerja bagi kepentingan terbaik Perusahaan. Independent commissioners, who have no affiliate relationship with shareholders, other members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, participate and contribute actively in the best interests of the Company, similar to non-independent commissioners.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner coordinates the Board of Commissioners and ensures their effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of transparency and constructive dialogue that allows for the expression of a variety views, including coordinating the setting up of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, the Board of Commissioners must have the opportunity to meet with the Board of Directors and senior management.	Komisaris Utama mengkoordinasikan pembagian peran pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris dan penetapan agenda rapat dengan jajaran Direksi dan manajemen senior sebagaimana tercantum di dalam *Board Manual.* The President Commissioner coordinates the allocation of supervisory roles among Board of Commissioners members through Board of Commissioners Decisions, as well as the determination of meeting agendas with the Board of Directors and senior management, in accordance with Board Manual guidelines.
1.4	**Pembentukan Komite** Establishment of Committees **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Company has committees under the Board of Commissioners, consisting of at least: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.	Perseroan memiliki 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: 1. Komite Audit 2. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha. The Company has 3 (three) Committees under the Board of Commissioners, as follows: 1. Audit Committee 2. Nomination, Remuneration, and GCG Committee. 3. Risk Management and Business Development Monitoring Committee.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent, and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles in an effective and independent manner.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen. Independensi Komite Audit dan Komite lain yang di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada Profil Komite. The Board of Commissioners ensured that all members of the Audit Committee are independent, and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties. The independence of the Audit Committee and other committees under the Board of Commissioners can be seen in the Committee Profile.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure the monitoring of the implementation of duties by the Audit Committee is carried out in an objective and independent manner, the President Commissioner is not allowed to be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report.	Komisaris Utama PGN tidak menjadi Ketua Komite Audit, dapat dilihat pada Profil Komite. PGN's President Commissioner is not the Chairman of the Audit Committee, which can be seen in the Committee Profile.
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Assessment – the Board of Commissioners and its Members **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif melalui penilaian sendiri (*self-assessment*) kinerja Dewan Komisaris yang diatur di dalam *Board Manual.* The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively through self-assessment of the performance of the Board of Commissioners, as regulated in the Board Manual.
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflicts of Interest **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors with concurrent positions outside the Company must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function prior to accepting a new appointment as Director or Commissioner of a public company, other Director positions, or other positions with a significant time commitment.	Dewan Komisaris telah memberikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai Direktur atau Komisaris di korporasi lain seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual.* The Board of Commissioners has established clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who are or wish to be Directors or Commissioners in other companies, as stated in the Articles of Association and Board Manual.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan. All of the Board of Commissioners and Board of Directors have signed a Statement of No Conflicts of Interest.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Competency Improvement for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics, and operations of the corporation, relevant laws and regulations, and other applicable standards and obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the required skills and knowledge to carry out their roles on the Board.	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka sejak baru diangkat melalui program pengenalan yang formal dan memadai. Dewan Komisaris dan Direksi juga rutin mengikuti berbagai program pelatihan dan peningkatan kompetensi.Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi secara reguler menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun kajian dari fungsi *Legal Counsel & Compliance*. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities from the time they are appointed by providing a formal and appropriate induction program. The Board of Commissioners and Board of Directors also regularly participate in a variety of training and competency development programs. Furthermore, the Board of Commissioners and Board of Directors receives accurate, timely, and clear information about the most recent developments in relevant laws and regulations, as well as other applicable standards and obligations, risk factors, and the corporate business environment, through Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors and reviews of the Legal Counsel & Compliance function.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 2 - KOMPOSISI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 2 - COMPOSITION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
2.1	**Komposisi Direksi** Composition of the Board of Directors **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas, namun juga bisa menggunakan sumber/konsultan independen. In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders but can also use independent sources/consultants.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and take into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi yang dapat dilihat dalam profil Anggota Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and take into account the fulfillment of the diversity of the Board of Directors, which can be seen in the profiles of the members of the Board of Directors.
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Company policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bab Tata Kelola. The Company policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report in the Governance chapter.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in order to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan, Kebijakan dan prosedur telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan pada bab Tata Kelola. The Board of Commissioners ensured that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners were clear and transparent. The policies and procedures have been disclosed in the Annual Report in the Governance chapter.
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners, and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.	Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tercantum di dalam: 1. Undang-Undang RI Nomor: 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 11 Mei 2021 Pasal 14 Ayat (12); 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. The arrangements for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are contained in: 1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 dated August 16, 2007, on Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; 3. Company's Articles of Association dated May 11, 2021, Article 14 Paragraph (12); 4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Anggota Dewan Komisaris PGN mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Members of the PGN Board of Commissioners reflect diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background and gender. The diversity of members of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section.
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potential for conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners with a limited term of office, and there is disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a company perspective.	Dari 6 (enam) anggota Dewan Komisaris, 4 (empat) anggota atau lebih dari 50% (lima puluh persen) adalah Komisaris Independen. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Of the 6 (six) members of the Board of Commissioners, 4 (four) members or more than 50% (fifty percent) are Independent Commissioners. According to the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed for a term that starts on the date determined by the GMS that appointed them and ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS following the date of appointment, but cannot exceed 5 (five) years, , with due observance of the prevailing laws and regulations in the capital market sector, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a Member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of office expires. After term of office expires, a Member of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 (one) term of office.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the Board of Directors and Board of Commissioners function effectively and increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures a formal, strict, and transparent process for selecting and appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Ketentuan terkait tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2022. The Nomination and Remuneration Committee Charter, which was ratified on December 22, 2022, contains provisions regarding the Nomination and Remuneration Committee's responsibilities and roles in the process of appointing and assigning members to the Board of Directors and Board of Commissioners.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors, the economic situation, and the company's performance.	Pedoman penetapan gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dengan tembusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham seri B/mayoritas PGN. Usulan remunerasi mempertimbangkan peran setiap anggota, situasi ekonomi serta kinerja korporasi. RUPS kemudian akan menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Guidelines for determining the salary/honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 of 2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Board of Commissioners proposes the remuneration of the Board of Directors to the Minister of SOEs as an A series Dwiwarna shareholder, with a copy to the President Director of PT Pertamina (Persero) as the B series/major shareholder of PGN. The remuneration proposal considers the role of each member, the economic situation, and the Company's performance. The GMS will subsequently determine the salary/honorarium, allowances, facilities, and tantiem/performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite- komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners includes a structure that is oriented towards sustainable company development and encourages the achievement of long-term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering each member's role, the economic situation, and the Company's performance. Furthermore, his or her position as President Commissioner, and Chairman, as well as committee membership, should be taken into account.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Proses penyampaian usulan hingga penetapan tantiem dan gaji/honorarium Dewan Komisaris dapat dilihat pada prinsip 2.2.1 di atas. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners includes a remuneration structure that is oriented toward the Company's sustainable development and encourages the achievement of long-term objectives. The process for submitting proposals and determining tantiem and salaries/honorariums for the Board of Commissioners can be seen in Principle 2.2.1 above.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi,kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the performance, qualifications, and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the performance of company operations, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah mengusulkan remunerasi berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar. The Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and has proposed remuneration based on the performance, qualifications, and competencies of Directors and Commissioners, taking into account the Company's operational performance, individual performance, and market conditions.
PRINSIP 3 - HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PRINCIPLE 3 - WORK RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** Nature of Work Relationships **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to ensure that confidential information does not leak.	Diskusi antara Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Rapat Gabungan dapat dilihat di Laporan Tahunan pada bagian Rapat Gabungan. Discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners are conducted in Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Board of Directors, with information kept confidential. Joint Meetings can be seen in the Annual Report in the Joint Meetings section.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the Company's missions, visions, and strategies and regularly discusses the implementation.	Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners to develop the Company's mission, vision, and strategy, and the Board of Commissioners and Directors hold joint meetings on a regular basis to discuss their implementation.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays an important role in ensuring the effectiveness of the Board of Directors' and Board of Commissioners' working relationships, as well as encouraging the implementation of good corporate governance practices such as effective communication with shareholders and other stakeholders.	Sekretaris Perusahaan PGN berperan penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, khususnya dalam hal mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik serta komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. The PGN Corporate Secretary contributes significantly to the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, particularly in terms of encouraging the implementation of good corporate governance practices and effective communication with shareholders and stakeholders.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
3.2	**Akses Informasi Dewan Komisaris** Access to Information for the Board of Commissioners **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the Company. The Board of Commissioners may at any time request additional information to the Board of Directors.	Direksi memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai kewenangan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. Penyampaian informasi biasanya dilakukan melalui Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Meski demikian, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta informasi tambahan dari Direksi. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners ensures that it has sufficient information. The Board of Directors regularly provides the Board of Commissioners with timely and comprehensive information on all matters related to the Company. The Board of Commissioners may at any time request more information from the Board of Directors.
3.3	**Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Impact of the Ownership Structure on the Company **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap Korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of the ownership structure on the Company. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between Company shareholders, which may have an impact on the Company's management and operations.	Sampai dengan laporan ini disusun, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham PGN, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Saham yang ditandatangani pada awal tahun 2023 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan Kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara bulanan juga disampaikan dalam situs web Perusahaan, menu "Investor" sub menu "IDX *Announcements*". Until the preparation of this report, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as their families, did not own PGN shares, according to the Share Ownership Statement signed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors at the beginning of 2023. Monthly share ownership reports for members of the Board of Directors and Board of Commissioners are also available on the Company's website under the "Investor" sub-menu "IDX Announcements".
PRINSIP 4 - PERILAKU ETIS PRINCIPLE 4 - CODE OF ETHICS		
4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** Code of Conducts **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Karyawan. This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly state the Company's expectation that each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees.	Perusahaan telah memiliki Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja No. Dok.: P-002/A014 Revisi ke: 00 yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 30 Desember 2022 dan telah diungkapkan di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PGN. The Company already has the Code of Business Ethics and Work Ethics Number Doc.: P-002/A014, Revision No.: 00, approved by the President Director on December 30, 2022, and disclosed in PGN's Annual Report and Sustainability Report.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement with reference to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other related standards.	Perusahaan telah memiliki kebijakan/pedoman untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis di antaranya melalui Pedoman Etika Usaha dan Etika Perilaku dan Pedoman Sistem Manajamen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan serta Anti Penyuapan. The Company has policies/guidelines in place to prevent money laundering and terrorist financing, anti-corruption, offering or accepting bribes, and payments for acts that violate laws and regulations or are unethical, such as the Business Ethics and Behavior Code and The Company's Anti-Bribery Management System is under the management and responsibility of Legal Counsel and Compliance..
4.2	**Nilai-nilai dan Budaya Organisasi** Organization Values and Culture **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The company articulates, develops, and discloses its culture and values.	Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN turut mengimplementasikan *core values* BUMN AKHLAK sebagai budaya Perusahaan. Program Budaya AKHLAK Subholding Gas secara konsisten dilakukan dan dievaluasi pelaksanaannya setiap 1 (satu) bulan sekali melalui *self-assessment*. As part of the Oil and Gas Holding, PGN implements the core values of SOEs, AKHLAK, into its Company culture. The AKHLAK Gas Subholding Cultural Program is consistently carried out, and its implementation is evaluated once a month through self-assessment.
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** Communication and Enforcement of the Code of Ethics, Values, and Culture **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The Company's code of conduct and ethics are effectively communicated to the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into the Company's strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and strictly enforced.	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi melalui penerapan Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. Setiap pelanggaran yang terbukti akan dikenakan sanksi. The Company's code of conduct and code of ethics are effectively communicated and integrated into the Company's strategies and operations through the implementation of the Code of Business Ethics and Work Ethics. Any proven violation will be subject to sanctions.
PRINSIP 5 - MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN PRINCIPLE 5 - RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL, AND COMPLIANCE		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and Company's compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Company's annual report.	Laporan Tahunan PGN telah memuat informasi mengenai efektivitas operasional sistem governasi, pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang dapat dilihat di bab Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. PGN's Annual Report has contained information on the operational effectiveness of the governance system, risk management, and internal control, which can be seen in the Internal Control System and Risk Management chapter.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management	
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk is a unity, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko dengan berlandaskan Piagam Manajemen Risiko & Resiliensi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi. Perusahaan juga memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko, menyusun kebijakan dan *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko yang berada di bawah Direktur Keuangan & Manajemen Risiko yaitu *Division Head, Risk Management.* The Board of Directors manages the implementation of risk management in accordance with the Risk Management & Resilience Chart, which is signed by all members of the Board of Directors. The Company also has a function in charge of implementing risk management programs, developing policies, and monitoring risk management implementation, which is under the Director of Finance & Risk Management, i.e., Division Head, Risk Management.
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Oversight Committee assists in the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for oversight of the Company's risk management.	Perseroan memiliki Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam menciptakan mekanisme yang transparan, fokus dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Company has a Risk Management and Business Development Monitoring Committee, which assists the Board of Commissioners in creating a transparent, focused, and independent mechanism for supervising the Company's risk management.
5.3	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.3.1	Direksi membangun sistem Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) system by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity to ensure that the Company can achieve its objectives.	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC melalui fungsi GCG dan *Compliance* yang berada dalam *Legal Counsel and Compliance* di bawah Direktorat Utama serta Divisi *Risk Management* di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. The Board of Directors ensures coordination and capability improvement within the GRC primary system through GCG and Compliance functions, which are in the Legal Counsel and Compliance and report to the Principal Directorate and the Risk Management Division under the Directorate of Finance and Risk Management.
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently perform functions that could lead to a conflict of interest.	Bagian yang membawahi fungsi kepatuhan di PGN tidak merangkap fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The section that oversees the compliance function at PGN does not have any concurrent functions that could lead to conflicts of interest.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
5.4	**Audit Internal** Internal Audit **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi Audit Internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, oversees and ensures that the internal audit function assists the Company in achieving its goals by using an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memastikan fungsi Audit Internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. Selain itu Komite Audit juga mengkaji efektivitas pelaksanaan *internal audit* secara berkala. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources, and access to information to perform its roles effectively. Furthermore, the Audit Committee also reviews the effectiveness of internal audits on a regular basis.
PRINSIP 6 - PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI PRINCIPLE 6 - DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		
6.1	**Kebijakan Pengungkapan** Policy on Disclosure **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures in place to ensure that material information is disclosed while also safeguarding sensitive information and corporate secrets.	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia Perusahaan, di antaranya tercantum dalam: 1. Keputusan Direksi Perusahaan Nomor: 011000.K/132/UT/2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 21 April 2006 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan. 2. Pedoman Tata Kelola yang Baik Nomor P-001/A014 tanggal 30 Desember 2022. The Company has a disclosure and transparency policy and procedure that ensures the disclosure of material information and safeguards the Company's sensitive and confidential information, as stated in: 1. Decree of the Company's Board of Directors No. 011000.K/132/UT/2006, signed by the President Director on April 21, 2006, on Company Information Management Policy 2. Good Governance Guidelines Number P-001/A014 dated December 30, 2022.
6.1.2	Hak Pemegang Saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' right to obtain regularly and timely relevant material information regarding the Company must be met.	Perusahaan telah melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi material yang relevan tentang korporasi secara teratur dan tepat waktu kepada pemegang saham, baik melalui publikasi Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, pengumuman di media masa, serta informasi di situs web Perusahaan dan *online reporting* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI). The Company has carried out its obligation to disclose relevant material information about the Company regularly and in a timely manner to shareholders, both through the publication of Financial Reports, Annual reports, and Sustainability Reports, announcements in the mass media, as well as information on the Company's website, the Financial Services Authority's online reporting (OJK), and the Indonesian Stock Exchange (BEI).
6.2	**Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** Financial and Sustainability Reports **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh Auditor Eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The company discloses systems and procedures for ensuring that interim financial reports that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate and complete and that investors have the information they need to make the right investment decisions.	PGN memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau ditinjau oleh Auditor Eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang tepat oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sesuai. PGN ensures that interim financial statements that have not been materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and prepared using appropriate accounting standards by human resources with the necessary capacity.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi Auditor Eksternal. The Audit Committee ensures the quality of audits on financial reports carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.	Komite Audit memastikan kualitas audit yang dilaksanakan Auditor Eksternal sesuai dengan yang dibutuhkan. The Audit Committee ensures that external auditors perform audits that meet the required standards.
6.2.3	Laporan berkelanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Laporan berkelanjutan PGN telah disiapkan dengan mengacu kepada: 1. POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan; 2. SE OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan; 3. *Global Reporting Initiative* (GRI) 2021; 4. GRI Sector Index 2021 Oil and Gas Sector. PGN's sustainability report has been prepared with reference to: 1. POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance 2. OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of Annual Reports. 3. 2021 Global Reporting Initiative (GRI) 4. 2021 GRI Sector Index in the Oil and Gas Sector.
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The company publishes an integrated annual report that puts historical performance into context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects, allowing shareholders and stakeholders to understand the Company's strategic goals and progress in creating sustainable value.	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang dan prospek korporasi di masa depan. Laporan Tahunan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. The Company has published an integrated Annual Report that puts historical performance intox context and describes the Company's future risks, opportunities, and prospects. The Annual Report is approved and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
6.3	**Diseminasi Informasi** Dissemination of Information **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.	Perusahaan menyediakan akses yang setara, tepat waktu dan relatif murah untuk semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Perseroan yaitu melalui situs web PGN dan media sosial : • *Website:* www.pgn.co.id • Instagram: gas_negara • Facebook: Perusahaan Gas Negara • Twitter: @gas_negara • Youtube: Perusahaan Gas Negara PGN The Company provides equal, timely, and relatively inexpensive access for all parties who need information about the Company, which is through the PGN website and social media platforms: • Website: www.pgn.co.id • Instagram: gas_negara • Facebook: Perusahaan Gas Negara • Twitter: @gas_negara • YouTube: Perusahaan Gas Negara PGN

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Company ensures that an annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including an explanation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for at least five years.	Penerapan PUGKI dapat dilihat di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PGN 2023. Untuk saat ini Perusahaan belum memuat pernyataan tahunan terhadap penerapan PUGKI di situs web Perseroan. The implementation of PUGKI can be seen in the PGN Annual Report and Sustainability Report for 2023. Currently, the Company has not made an annual statement on the implementation of PUGKI available on its website.
6.3.3.	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing,* kriteria dan prosedur *cross listing,* kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. Companies listed on the capital market in jurisdictions other than their origin must clearly disclose the applicable laws and regulations on corporate governance. Cross-listing criteria and procedures, as well as those for recognizing primary listing requirements, should be transparent and documented.	Perusahaan hanya terdaftar di Pasar Modal di yurisdiksi asal atau Bursa Efek Indonesia. Companies are only listed on the capital market in their home country or on the Indonesian Stock Exchange.
PRINSIP 7 - HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PRINCIPLE 7 - RIGHTS OF HAREHOLDERS		
7.1	**Hak Pemegang Saham** Rights of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The Company has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau *Investor* yang tercantum dalam Prosedur Operasi Penyampaian Informasi Perusahaan Kepada Investor dan PGN melalui divisi *Investor Relations* melakukan proses komunikasi dengan pemegang saham, *investor*, serta aparat pendukung pasar modal. Uraian detil dapat dilihat pada bab GCG tentang Hubungan *Investor* pada laporan Tahunan ini. The company has a policy for communicating with shareholders or investors, which is outlined in the Operational Procedure for Submitting Company Information to Investors, and PGN, through the Investor Relations division, manages the communication process with shareholders, investors, and capital market supporting officials. A detailed description can be seen on GCG chapter regarding Investor Relations in this Annual Report.
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. Parent companies ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and common control entities in which they have a significant investment.	Perusahaan memastikan bahwa kebijakan governansi korporat yang dimiliki telah selaras dengan kebijakan governansi korporat anak dan entitas sepengendali di antaranya melalui Pedoman Tata Kelola Hubungan PGN sebagai Perusahaan Induk (*Subholding Gas*) dengan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 051000.K/OT.00/PDO/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan pedoman lainnya. The company ensures that its corporate governance policies are consistent with the corporate governance policies of subsidiaries and common control entities, including the Governance Guidelines for the Relationship of PGN as a Holding Gas Company with Subsidiaries and/or Affiliates as determined by Board of Directors' Decree No. 051000.K/OT.00/PDO/2019 dated December 27, 2019, as well as other guidelines.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Companies have rules and procedures that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions, such as mergers and sales of significant corporate assets, to ensure that the transactions take place in a transparent and reasonable manner while also protecting the rights of all shareholders based on class.	PGN memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti *merger* dan penjualan aset korporasi yang substansial di dalam Anggaran Dasar Perusahaan. PGN has rules and procedures in place governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of significant Company's assets in the Company's Articles of Association.
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: 1. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara 2. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Companies have rules and procedures that ensure 1. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally. 2. Disclosure of the rules and procedures, as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Perusahaan memastikan untuk memberikan informasi dan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham. Contohnya dengan memberikan informasi dengan muatan dan waktu yang sama melalui situs web www.pgn.co.id pada menu "*Investor*". The Company is committed to providing all shareholders with equal information and treatment, including information with the same content and timing through the "Investor" menu on the www.pgn.co.id website.
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the Company and shareholders.	Perusahaan memiliki kebijakan yang ditetapkan melalui Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi nomor dokumen: P-004/A011 Revisi: 00 tanggal 15 September 2021 yang memastikan proses transaksi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola dengan tepat serta mampu melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has a policy established through the Conflict of Interest and Gratification Control Guidelines Document number: P- 004/A011 Revision: 00 dated 15 September 2021 which ensures that the transaction process runs in accordance with applicable regulations and is managed appropriately and is able to protect the interests of the corporation and its shareholders.
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The Company has established and disclosed policies to prevent insider trading. The Company has clear rules in place for any trading in the Company's shares by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not/ not yet available on the market.	PGN telah memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* yang tercantum dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. Pedoman tersebut telah dipublikasikan dalam situs web Perusahaan, dalam menu "Tata Kelola". PGN has established and disclosed policies to prevent insider trading, as outlined in the Business Ethics and Work Ethics Guidelines. These guidelines are available on the Company's website, under the "Governance" menu.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The company implements the notice for the GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are distributed electronically, such as through the Company's website.	PGN berupaya melakukan panggilan RUPS 28 hari sebelum RUPS. Meski demikian panggilan RUPS pada 8 Mei 2023 hanya terpaut 23 hari dari pelaksanaan RUPS di 30 Mei 2023. Panggilan RUPS telah dipublikasikan di situs web Perusahaan menu "Investor" sub menu "AGMS/RUPS" yang juga memuat mata acara rapat, penjelasan dan ketentuan umum. PGN strives to implement the GMS notice no later than 28 days prior to the GMS. However, the summons for the GMS, which was issued on May 8, 2023, was only 23 days prior to the GMS that was implemented on May 30, 2023. The GMS invitation is available on the Company's website under the "Investor" menu, submenu "AGMS/GMS," which also includes meeting agenda items, explanations, and general provisions.
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholder participation and effective voting at the GMS.	PGN memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang tercantum dalam Tata Tertib RUPS yang menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" (untuk yang hadir secara fisik). Perusahaan telah menunjuk pihak independen untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS yaitu biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi. PGN has a technical method or procedure for voting listed in the GMS Rules of Procedure, which states that voting is conducted by "raising hands" (for those who are physically present). The company has appointed independent parties to count and/or verify votes at the GMS, which is the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and the Notary Office, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi.
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS dengan memfasilitasi pemegang saham untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners through the GMS by facilitating shareholder participation and voting at the GMS.
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas Auditor Eksternal di RUPS. The Company ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Perusahaan memastikan bahwa Auditor Eksternal menghadiri RUPS dan menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The Company ensures that external auditors attend the GMS and answer questions from shareholders related to the audit of financial statements.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The submission of voting results, as well as a full summary of the GMS minutes, will be made public the following working day.	PGN telah menyampaikan hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap ke publik pada hari kerja berikutnya melalui situs web Perseroan, *online reporting* OJK dan BEI serta pengumuman di media massa. PGN has submitted the voting results and a full summary of the GMS minutes to the public on the following working day through the Company's website, OJK and IDX online reporting, and media announcements.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
PRINSIP 8 – HAK-HAK PEMANGKU KEPENTINGAN PRINCIPLE 8 – RIGHTS OF STAKEHOLDER		
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci** Stakeholders Engagement **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Company, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the Company on them.	PGN melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci. Saluran/media komunikasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan atau menyuarakan keluhan, diantaranya melalui *call center* 135, situs web Perusahaan (www.pgn.co.id) dan *email* sebagai berikut: - *Investor*/pemegang saham: pgn.investorrelation@pertamina.com - Pelanggan: pcc135@pertamina.com Selain itu Perusahaan juga melakukan pertemuan langsung seperti Temu Pelanggan serta pertemuan *investor/investor summit.* PGN, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders. Communication channels/media for stakeholders to convey their opinions, inputs, or complaints include the 135 call center, the Company website (www.pgn.co.id), and email as follows: - Investors/shareholders: pgn.investorrelation@pertamina.com - Customers: pcc135@pertamina.com In addition, the Company also holds in-person meetings such as Temu Pelanggan/customer meetings and investor meetings/investor summits.
8.2	**Integrasi keberlanjutan dalam Model Bisnis** Integration of sustainability in Business Model **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko The Board of Commissioners and the Board of Directors are jointly responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including the development of corporate sustainability strategies, priorities, and objectives. The Board of Directors and Board of Commissioners consider sustainability when carrying out their roles, such as developing and implementing corporate strategies, business plans, major action plans, and risk management.	Dewan Komisaris dan Direksi melalui Laporan Manajemen di Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023 telah menyatakan komitmennya atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas dan target keberlanjutan. Dewan Komisaris dan Direksi juga memasukkan pertimbangan keberlanjutan dalam menjalankan perannya termasuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners and Directors through the Management Report in the 2023 Annual Report and Sustainability Report have stated their commitment to sustainability governance, including setting sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Commissioners and Directors also include sustainability considerations in carrying out their roles, including integrating sustainability aspects in the development and implementation of Company's strategies, business plans, major action plans, and risk management.

No.	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan dan Pelaksanaan Explanation and Implementation
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** Protection for Stakeholders **KETERANGAN: DITERAPKAN** NOTE: APPLY	
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the Company's operations reflect the implementation of high standards of ethical, social, and environmental responsibilities throughout the organization, as well as the implementation of appropriate policies and procedures to respect and comply with stakeholder rights.	Direksi memastikan bahwa operasi korporasi telah mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi untuk menghormati hak-hak pemangku kepentingan. Perusahaan telah menjalankan dan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab Perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan juga karyawan Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diintegrasikan di seluruh lini bisnis Perseroan dan telah diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan 2023 PGN. PGN juga mengedepankan kebijakan persaingan sehat yang tercantum di dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. The Board of Directors ensures that the Company's operations reflect the implementation of high standards of ethical, social, and environmental responsibilities throughout the organization to respect stakeholder rights. The Company has implemented a policy governing its responsibilities to customers, suppliers, and employees. In addition, the Company has Social and Environmental Responsibility Guidelines (TJSL), which are integrated across all of the Company's business lines and are disclosed in PGN's 2023 Sustainability Report. PGN also prioritizes healthy competition policies, as outlined in the Business Ethics and Work Ethics Guidelines.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the Company's long-term interests while prioritizing sustainability.	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan di antaranya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan pemberian insentif yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selain itu Perusahaan menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi, yang tujuannya adalah kepada manajemen karier dan promosi. The Board of Directors encourages employees to work for the Company's long-term interests while prioritizing sustainability, including by focusing on employee welfare through a policy of providing incentives that are tailored to applicable regulations and prioritizing employee safety and comfort at work. Furthermore, the company provides a variety of education and training programs to help employees improve their competence, with the goal of career management and promotion.

RENCANA PENGUATAN GCG TAHUN 2025

GCG Strengthening Plan for 2025

Pada tahun 2025, agar selaras dengan Holding maka Perseroan akan melakukan pembaruan aplikasi GOLS berkaitan dengan pernyataan komitmen Perwira Subholding Gas terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Di samping itu, pada tahun 2025, PGN akan menjajaki kemungkinan untuk implementasi ISO 37301:2021 sistem Manajemen Kepatuhan, atas hal ini telah disiapkan personil *Compliance* yang telah tersertifikasi BNSP. Sertifikasi personil akan terus dilakukan tidak terbatas pada kepatuhan namun juga sertifikasi di bidang tata kelola dan risiko.

By 2025, to align with the Holding, the Company will update the GOLS application in relation to the Gas Sub-holding Officers' statement of commitment to the implementation of good corporate governance.

In addition, by 2025, PGN will explore the possibility of implementing the ISO 37301:2021 Compliance Management System. For this reason, BNSP-certified Compliance employees have been prepared. Certification of employees will continue to be carried out not only in compliance but also in the areas of governance and risk.

PERTAMINA
GAS NEGARA

06.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibilities

Informasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2024 PT Perusahaan Gas Negara Tbk secara komprehensif telah diungkapkan di dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan.

Information on PT Perusahaan Gas Negara Tbk's Social and Environmental Responsibility 2024 has been comprehensively disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report.

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Highlights

KINERJA EKONOMI

Economic Performance

Pengelolaan Jaringan Pipa*)
Pipeline Network Managed*)

2024	33.254 km
2023	32.344 km
2022	25.851 km

Pendapatan
Revenue
Juta USD | USD Million

2024	3.789
2023	3.646
2022	3.569

Laba Bersih)**
Net Profit**)
Juta USD | USD Million

2024	339
2023	278
2022	326

Nilai Ekonomi yang Diperoleh
Economic Value Generated
Juta USD | USD Million

2024	3.899
2023	3.777
2022	3.679

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan
Economic Value Distributed
Juta USD | USD Million

2024	3.821
2023	3.776
2022	3.719

Total Kontribusi Kepada Negara
Total Contribution to The State
Juta USD | USD Million

2024	300
2023	340
2022	400

Porsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal
Portion of Expenditure on Local Supplier
Juta USD | USD Million

2024	99,1%	senilai / worth 315
2023	97,6%	senilai / worth 333
2022	99,9%	senilai / worth 78

*) Termasuk Jargas Pemerintah
Include Goverment City Gas Network
**) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
Profit for the year attributable to owners of the parent entity

KINERJA LINGKUNGAN

Environmental Performance

Intensitas Pengambilan dan Konsumsi Air*)**
Water Withdrawal and Consumption Intensity***)
m^3/million USD

2024	58,75
2023	116,03
2022	112,00

Intensitas Energi*)**
Energy Intensity***)
GJ/million USD

2024	384,55
2023	398,11
2022	446,20

Penghematan Energi
Energy Saving
GJ

2024	310.899,06
2023	26.203,93
2022	25.319,23

Pengurangan Emisi
Emision Reduction
Ton CO_2eq

2024	29.722,54
2023	598,39
2022	220,00

Intensitas Emisi GRK Cakupan 1 & 2
GHG Emission Intensity Scope 1 & 2
Ton CO_2eq/million USD

2024	177,20
2023	178,34
2022	178,96

Intensitas Emisi GRK Cakupan 3
GHG Emission Intensity Scope 3
Ton CO_2eq/million USD

2024	5.403,57
2023	0,01
2022	0,02

Inventarisasi data emisi GRK cakupan 3 pada tahun 2022 dan 2023 berupa emisi pada kategori 6-perjalanan bisnis (penerbangan). Sebagai wujud nyata atas komitmen Perusahaan untuk meningkatkan pendataan emisi, sejak tahun 2024 dilakukan perluasan inventarisasi emisi GRK cakupan 3 menjadi kategori 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11.

Inventory data of scope 3 GHG emissions in 2022 and 2023 consisted of emissions in category 6-business trips (flights). As our commitment to improve emissions data collection, since 2024 the GHG emissions inventory of scope 3 has been expanded to categories 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, and 11.

***) Data intensitas dihitung per pendapatan Perusahaan
Intensity data is calculated per Company revenue

KINERJA SOSIAL
Social Performance

Terkait SDM | Human Resources Related

Jumlah Perwira Subholding Gas
Number of Gas Subholding Employees
Orang | People

2024	3.322
2023	3.318
2022	3.198

Keterikatan Pekerja*)
Employee Engagement*)

2024	80,68 dari 100 out of 100
2023	4,45 dari skala 5 on a scale of 5
2022	4,07 dari skala 5 on a scale of 5

Terkait K3 | OHS Related

Kumulatif Jam Kerja Aman
Cumulative Safe Working Hours
Jam | Hours

2024	490.585.951
2023	452.487.024
2022	396.884.555

***Total Recordable Injury Rate* (TRIR)**
Total Recordable Injury Rate (TRIR)

2024	0,04
2023	0,04
2022	0,10

Terkait Pelanggan | Customer Related

Indeks Kepuasan Pelanggan)**
Customer Satisfaction Index**)

2024	4,66	Sangat Baik Very Good
2023	4,58	
2022	4,53	

Indeks Loyalitas Pelanggan)**
Customer Loyalty Index**)

2024	4,36	Sangat Baik Very Good
2023	4,34	
2022	4,64	

*) Terdapat perubahan metode dan skala penilaian pada tahun 2024 | Changes in assessment method and scale in 2024
**) Skala maksimum 5 | A maximum scale of 5
***) Skala maksimum 4 | A maximum scale of 4

Terkait Masyarakat | Community Related

8 Desa binaan dengan ribuan penerima manfaat (PGN Standalone)
Assisted Villages with Thousands of Beneficiaries (PGN Standalone)

Investasi Sosial
Social investment

2024	Rp65.189.286.704
2023	Rp66.567.107.458
2022	Rp56.603.241.363

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*)**
Community Satisfaction Index (CSI)***)
(PGN Standalone)

2024	3,65
2023	3,55
2022	3,71

Nilai mutu pelayanan: **Kategori A**
Predikat: **Sangat Puas**
Service quality score: **Category A**
Grade: **Very Satisfied**

TATA KELOLA
Governance

Peringkat Risiko ESG oleh Sustainalytics
ESG Risk Rating by Sustainalytics

2024	20,2 Medium Risk *)
2023	24,7
2022	28,1

*) Menggunakan parameter Sustainalytics, dimana semakin rendah skor maka semakin rendah risiko ESG nya. Skor 20-30 merupakan kategori Medium Risk.
Using Sustainalytics parameters, where the lower the score, the lower the ESG risk. Score 20-30 is categorized as Medium Risk.

Asian Corporate Governance Scorecard (ACGS)

2024
91,11%)**

**) Menggunakan parameter ACGS dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF), revisi Oktober 2023 (versi 2 Maret 2024), dengan maksimal skor 100%.
Using ACGS parameters from the ASEAN Capital Market Forum (ACMF), Oktober 2023 revision (2 Maret 2024 version), with a maximum score of 100%.

Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kasus Korupsi
Code of Ethics Violation and Corruption Cases

2024
Nihil
Zero cases

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan:
Sustainability Governance Structure:
Komite Keberlanjutan dan Tim Environment, Social and Governance (ESG)
Sustainability Committee and Environment, Social and Governance (ESG) Team

Anti Korupsi:
Anti-Corruption:
Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
Implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS)
18 sesi sosialisasi dan pelatihan mengenai pencegahan korupsi yang diikuti oleh total 1.621 karyawan PGN
18 socialization and training sessions on corruption prevention attended by a total of 1,621 PGN employees

Budaya Organisasi (AKHLAK):
Organizational Culture (AKHLAK):
Terdapat 6 nilai budaya yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif
There are 6 cultural values, namely Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative

IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN

Sustainability Implementation

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai mitra strategis dan *agent of change* dalam transisi energi nasional berkomitmen menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) untuk mendorong terwujudnya ekonomi rendah karbon dan berkeadilan. Melalui inisiatif seperti konversi energi ke gas bumi yang lebih bersih dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, PGN berkontribusi pada pengurangan emisi karbon sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui program pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, PGN tidak hanya memastikan operasinya berkelanjutan, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan yang inklusif bagi Indonesia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) as a strategic partner and agent of change in the national energy transition is committed to implementing business practices that are in line with ESG (Environmental, Social, and Governance) principles to encourage the realization of a low-carbon and equitable economy. Through several initiatives, such as converting energy to cleaner natural gas and utilization of environmentally friendly technology, PGN contributes to reducing carbon emissions while creating a positive impact on the community through empowerment, education, and health programs. With transparent and accountable governance, PGN not only ensures its operations are sustainable, but also supports environmental preservation and inclusive development for Indonesia.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN DAN *NET ZERO EMISSION*

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai Subholding Gas dan bagian dari PT Pertamina (Persero), berkomitmen penuh mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) 2030 dan target *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Melalui pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam operasional dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, PGN mengambil peran strategis dalam transisi energi nasional. Komitmen ini sejalan dengan visi global untuk memerangi perubahan iklim, sekaligus menjadi fondasi dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Fokus keberlanjutan PGN diwujudkan melalui empat pilar utama:

1. *Achieving Nationally Determined Contribution (NDC) Target by Enabling the Use of Natural Gas in Energy Transition Phase*,
2. *Protecting the Nature*,
3. *Building Cohesive and Resilient Societies Programs*, dan
4. *Responsible Business Practice*.

SUSTAINABILITY COMMITMENT AND NET ZERO EMISSION

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), as a Gas Subholding and part of PT Pertamina (Persero), is fully committed to supporting the achievement of the 2030 Nationally Determined Contribution (NDC) and the 2060 Net Zero Emission (NZE) target. Through the integration of sustainability principles in the Company's operations and Long-Term Plan, PGN takes a strategic role in the national energy transition. This commitment is in line with the global vision to address climate change, while also being the foundation for creating a sustainable future.

PGN's sustainability focus is realized through four main pillars:

1. Achieving Nationally Determined Contribution (NDC) Target by Enabling the Use of Natural Gas in Energy Transition Phase,
2. Protecting the Nature,
3. Building Cohesive and Resilient Societies Programs, dan
4. Responsible Business Practice.

Untuk merealisasikan empat fokus keberlanjutan tersebut, PGN telah melaksanakan sejumlah inisiatif utama pada tahun 2024, antara lain:

1. Memperluas penggunaan gas bumi pada masa transisi energi (*Emission Reduction on Scope* 3)
2. Optimasi biaya menuju NZE
3. Mengurangi jejak lingkungan
4. Mendukung program keanekaragaman hayati
5. Meningkatkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja
6. Memprioritaskan penggunaan produk dan jasa lokal
7. Mendukung HAM (*Diversity*, *Equality* & *Inclusion*)
8. Melakukan riset dan inovasi yang berkelanjutan
9. Meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat sekitar
10. Meningkatkan manajemen tata kelola yang baik
11. Meningkatkan struktur dan budaya cybersecurity
12. Pembiayaan berbasis ESG
13. Meningkatkan rating ESG
14. Meningkatkan komunikasi dan *engagement* ESG

To realize these four sustainability focuses, PGN has implemented a number of main initiatives in 2024, including:

1. Expanding the use of natural gas during transition phase (Emission Reduction on Scope 3)
2. Cost optimization toward NZE
3. Reducing environmental footprint
4. Promoting biodiversity program
5. Enhancing Safety and Health Programs
6. Prioritizing the use of domestic products and services
7. Promoting human rights
8. Sustainability-focused Research & Innovation
9. Improving the quality of life of employees and the surrounding societies
10. Enhance GCG management
11. Improving cybersecurity structure and culture
12. ESG-based financing
13. Improving ESG rating
14. Improving communication and engagement ESG

Sebagai bagian dari transisi energi, gas bumi menjadi pilar utama dalam fase ini. PGN mendorong konversi energi dari bahan bakar fosil ke gas alam untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan ekonomi rendah karbon.

Untuk memperkuat kerangka keberlanjutannya, PGN telah memperbarui Peta Jalan Keberlanjutan melalui Dokumen *Sustainability Blueprint* 2025-2034. Dokumen ini menjadi panduan strategis yang mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek bisnis. Dengan pendekatan ini, PGN proaktif merespons risiko-risiko keberlanjutan dan mengembangkan langkah mitigasi untuk mencapai operasional yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

KERANGKA DAN STANDAR PENGELOLAAN KEBERLANJUTAN PGN

Selama beberapa tahun terakhir, PGN telah memprioritaskan inisiatif-inisiatif keberlanjutan untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan memperkuat kapasitas organisasi. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip ESG, PGN terus mengembangkan sistem manajemen yang komprehensif guna mengelola berbagai aspek keberlanjutan. Upaya ini meliputi penyesuaian struktur organisasi, pengelolaan risiko, pembaruan sistem dan prosedur, serta penyusunan dokumen-dokumen terkait agar penerapan keberlanjutan berjalan efektif dan terintegrasi dalam seluruh operasi perusahaan.

As part of energy transition, natural gas serves as a key pillar in this phase. PGN encourages energy conversion from fossil fuels to natural gas to reduce carbon emissions and create a low-carbon economy.

To strengthen its sustainability framework, PGN has updated its Sustainability Roadmap through its 2025-2034 Sustainability Blueprint Document. This document serves as a strategic guide that integrates ESG principles into all business aspects. Through this approach, PGN proactively responds to sustainability risks and develops mitigation measures to achieve more environmentally friendly, inclusive, and sustainable operations.

PGN'S SUSTAINABILITY MANANAGEMENT FRAMEWORKS AND STANDARDS

Over the past few years, PGN has prioritized sustainability initiatives to improve the management of environmentally friendly business activities and strengthen organizational capacity. As a form of commitment to ESG principles, PGN continues to develop a comprehensive management system to manage various aspects of sustainability. These efforts include adjusting the organizational structure, managing risks, updating systems and procedures, and preparing related documents to ensure that the implementation of sustainability runs in an integrated manner and is integrated into all operations of the company.

Kerangka pengelolaan keberlanjutan PGN juga telah diselaraskan dengan ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan berbagai international best practices. Pengelolaan ini mencakup penerapan standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Lingkungan dan ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pada tahun 2024, PGN terus mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis (ISO 22301:2019) untuk meningkatkan ketahanan organisasi. Standar-standar ini memastikan keberlanjutan menjadi bagian integral dari operasional perusahaan, sejalan dengan regulasi dan praktik terbaik global.

Rincian lebih lanjut tentang pencapaian keberlanjutan PGN selama periode pelaporan 2024 dapat ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan.

PGN's sustainability management framework has also been aligned with the provisions of POJK No. 51/POJK.03/2017 and various international best practices. This management includes the implementation of international management system standards, such as ISO 14001:2015 for Environmental Management System and ISO 37001:2016 for Anti-Bribery Management System. In 2024, PGN continues to optimize the implementation of the Business Continuity Management System (ISO 22301:2019) to improve organizational resilience. These standards ensure that sustainability serves as an integral part of the company's operations, that is in line with regulations and global best practices.

Further details on PGN's sustainability achievements during the 2024 reporting period is presented in the Sustainability Report.

PILAR LINGKUNGAN

Environmental Pillar

Sebagai respons terhadap tantangan lingkungan global, PGN terus berinovasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan gas alam yang bertanggung jawab. Meskipun gas bumi lebih bersih dibandingkan energi fosil lainnya, proses ekstraksi, produksi, dan distribusinya tetap menghasilkan emisi karbon dioksida (CO_2) dan metana (CH4). Untuk mengurangi jejak karbon, PGN mengadopsi teknologi efisien, menyediakan gas alam terkompresi (CNG) sebagai bahan bakar alternatif bersih, dan menerapkan target reduksi emisi yang terintegrasi dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Selain fokus pada emisi, PGN menjaga kualitas lingkungan melalui pemantauan rutin dan mitigasi risiko kebocoran pipa gas yang dapat mencemari air dan tanah. PGN juga melindungi habitat lokal dengan meminimalkan dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem. Upaya ini didukung kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan.

Inovasi PGN tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung transisi energi bersih serta membuka peluang pengembangan industri yang lebih hijau di Indonesia. Melalui langkah strategis ini, PGN menjadi teladan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat visinya sebagai penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau.

In response to global environmental challenges, PGN continues to innovate to support environmental sustainability through accountable management of natural gas. Although natural gas is cleaner than other fossil fuels, the extraction, production, and distribution processes still produce carbon dioxide (CO_2) and methane (CH4) emissions. To reduce its carbon footprint, PGN adopts efficient technology, provides compressed natural gas (CNG) as a clean alternative fuel, and implements emission reduction targets, which are integrated into the Company's Long-Term Plan (RJPP).

In addition to the focus on emissions, PGN maintains environmental quality through routine monitoring and mitigating the risk of gas pipeline leaks that can pollute water and soil. PGN also protects local habitats by minimizing the impact of infrastructure development on the ecosystems. These efforts are supported by collaboration with the government, academics, and local communities to implement best practices in environmental management.

PGN's innovation not only contributes to environmental preservation, but also supports the clean energy transition and opens up opportunities for greener industrial development in Indonesia. Through this strategic measure, PGN becomes the benchmark in maintaining environmental sustainability while strengthening its vision as a provider of clean energy solutions for a greener world

PENGUKURAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Sepanjang tahun 2024, PGN berhasil mencatatkan pengurangan emisi sebesar 29.722,54 ton CO_2eq, jauh melampaui target tahun 2024 sebesar 1.205 ton CO_2eq dan pencapaian tahun 2023 yang hanya mencapai 598 ton CO_2eq. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai inisiatif strategis yang difokuskan pada efisiensi konsumsi energi, sehingga meminimalkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas operasional

EFISIENSI ENERGI

Capaian PGN pada sektor energi untuk tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan. Dengan penurunan konsumsi energi sebesar 310.899,06 GJ, hal itu menunjukkan bahwa inovasi dan upaya berkelanjutan mereka tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa PGN terus melangkah maju menuju masa depan energi yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Dengan terus berkomitmen pada praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, PGN menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam industri energi yang bertanggung jawab.

MEASUREMENT OF GREEN HOUSE GAS (GHG) EMISSIONS

Throughout 2024, PGN successfully posted a reduction in emissions by 29.722,54 tons of CO_2eq, far exceeding the 2024 target, which was 1,205 tons of CO_2eq and the 2023 achievement, which was only 598 tons of CO_2eq. This success is supported by various strategic initiatives that are focused on energy consumption efficiency, subsequently minimizing Greenhouse Gas (GHG) emissions resulting from operational activities.

ENERGY EFFICIENCY

PGN's 2024 achievements in the energy sector reflect the Company's strong commitment to addressing sustainability challenges. With a decrease in energy consumption of 310,899.06 GJ, it demonstrates that their innovation and sustainable efforts not only provide benefits to the Company but also have a significant positive impact on the environment. This achievement is concrete evidence that PGN continues to move forward towards a cleaner, more efficient, and more sustainable energy future. By continuing to commit to environmentally friendly and sustainable practices, PGN confirms its position as a leader in the responsible energy industry.

PENGELOLAAN LIMBAH

Terkait pembuangan air limbah, PGN hanya membuang air yang berasal dari kegiatan domestik serta kegiatan pemeliharaan infrastruktur seperti pembersihan pipa dan mesin. Melalui kebijakan HSSE, PGN berkomitmen mencegah pencemaran lingkungan dengan prinsip *reduce, reuse, recycle & recovery* (4R) melalui peningkatan kualitas pembuangan limbah cair. Dalam hal pengelolaan limbah, PGN senantiasa berpedoman pada prinsip pengurangan, daur ulang, dan penggantian bahan baku.

WATER DISCHARGE

In terms of wastewater disposal, PGN only disposes of water deriving from domestic activities as well as infrastructure maintenance activities, such as cleaning of pipelines and machines. Through the HSSE policy, PGN is committed to prevent environmental pollution with the reduce, reuse, recycle & recovery (4R) principles by improving the quality of liquid waste disposal. In terms of waste management, PGN always refers to the principles of reduction, recycle, and replacement of raw materials.

PENGGUNAAN AIR

PGN tidak menggunakan air dalam proses distribusi dan transmisi gas, namun memanfaatkan air dalam jumlah kecil untuk keperluan pemeliharaan dan kebutuhan domestik. Air yang digunakan berasal dari PDAM dan air tanah, diambil sesuai regulasi, serta tidak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Pada tahun 2024, PGN berhasil menurunkan konsumsi air sebesar 20% melalui inisiatif efisiensi. Air limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan domestik dan pemeliharaan, dan dikelola dengan prinsip 4R (reduce, reuse, recycle, recovery). Pengolahan limbah dilakukan melalui unit API Separator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar baku mutu.

WATER USAGE

PGN does not use water in the gas distribution and transmission process, except in a small amount for maintenance and domestic needs. The water is sourced from PDAM and compliantly from groundwater, so it does not have negative impacts on the environment or the community.

In 2024, PGN reduced its water consumption by 20% through efficiency initiatives. The wastewater produced comes from domestic and maintenance activities and is managed with the 4R principle (reduce, reuse, recycle, recover). Wastewater treatment is carried out through the API Separator unit and Wastewater Treatment Plant (IPAL) to ensure compliance with quality standards.

PGN secara konsisten melaporkan kualitas efluen setiap triwulan melalui sistem SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) dan selama tiga tahun terakhir tidak mengalami insiden tumpahan efluen. Tidak ada sanksi regulasi terkait pengelolaan air dan limbah cair selama tahun 2024. Seluruh air limbah yang dibuang telah diolah dan tidak berasal dari atau berdampak pada wilayah lindung atau spesies dilindungi.

In a consistent manner, PGN quarterly reports effluent quality through the SIMPEL system (Environmental Electronic Reporting Information System) and has not experienced any effluent spill incidents in the past three years. There were no regulatory sanctions related to water and wastewater management during 2024. All wastewater discharged has been treated and does not come from or impact protected areas or species.

PENGURANGAN PENGGUNAAN KERTAS

PGN mengadopsi praktik penggunaan ulang untuk sampah kertas yang baru dipakai pada satu sisi agar dapat digunakan kembali pada sisi yang lain.

PGN juga berkomitmen dalam hal penggunaan material yang ramah lingkungan dan diwujudkan dengan menerapkan inisiatif efisiensi dalam penggunaan kertas atau paperless pada kegiatan pendukung. Inisiatif tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

REDUCTION IN PAPER USAGE

PGN adopts the practice of reusing paper waste that has just been used on one side, allowing it to be reused on the other side.

PGN is also committed to using environmentally friendly materials, which it realized by implementing efficiency initiatives in the use of paper or going paperless in supporting activities. This initiative is carried out through the utilization of information technology.

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK RAMAH LINGKUNGAN

PGN telah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015, yang menunjukkan komitmen kami terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab. PGN telah mengimplementasikan berbagai inovasi berkelanjutan, seperti pemasangan Solar Panel *Offshore* – Sidayu dan mengembangkan inovasi dalam peningkatan efisiensi energi melalui penerapan metode Penggantian Bundel O-Ring untuk optimalisasi distribusi gas, serta metode TWIN (Pengurasan Air Waktu) untuk memperbaiki kinerja kompresor udara.

Informasi lengkap mengenai pengurangan dampak lingkungan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PGN yang diterbitkan terpisah namun masih satu kesatuan dengan Laporan Tahunan.

ENVIRONEMTALLY FRIENDLY POLICIES AND PRACTICES

PGN has implemented the ISO 14001:2015 environmental management system, showcasing our commitment to responsible environmental practices. PGN has implemented various sustainable innovations Including the installation of Offshore Solar Panels - Sidayu and has developed innovations in energy efficiency improvement through the application of O-Ring Bundle Replacement method for gas distribution optimization, and the TWIN method (Time Water Drainage) to enhance air compressor performance.

Complete information regarding the reduction of environmental impacts is presented in the PGN Sustainability Report, which is published separately but still an integral part of the Annual Report.

PILAR SOSIAL

Social Pillars

PGN terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan melalui berbagai inisiatif di pilar sosial. Sepanjang tahun 2024, PGN berfokus pada *Enhancing Safety and Health Programs* melalui pengembangan budaya HSSE generatif, penguatan sistem manajemen HSSE, serta pelaksanaan program *Fit to Work* (MCU & DCU) dan *Medical Emergency Response*. Selain itu, PGN mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia melalui penerapan prinsip *Diversity, Equality* & *Inclusion*, memperkuat penggunaan produk dan jasa dalam negeri melalui peningkatan TKDN di proyek-proyek PGN, serta mendorong inovasi dan riset yang berkelanjutan. PGN juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat melalui implementasi serta publikasi program rekrutmen yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencerminkan dedikasi PGN dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

PGN continues to be committed to providing sustainable positive impacts through a variety of initiatives in the social pillar. Throughout 2024, PGN focused on Enhancing Safety and Health Programs through the development of a generative HSSE culture, strengthening the HSSE management system, and implementing the Fit to Work (MCU & DCU) and Medical Emergency Response programs. Furthermore, PGN promotes Human Rights values through the application of the Diversity, Equality & Inclusion principles, strengthening the use of domestic products and services by increasing TKDN in PGN projects, as well as encouraging sustainable innovation and research. PGN also plays an active role in improving the quality of life of employees and the community through the implementation and publication of inclusive and sustainable recruitment programs. These measures reflect PGN's dedication to building a better future for all stakeholders.

BUDAYA KEBERLANJUTAN

Penerapan budaya keberlanjutan di PGN dimulai dengan meningkatkan kapasitas Perwira Subholding Gas dalam topik ESG yang relevan dengan bisnis perusahaan. Organisasi berfokus pada adaptasi untuk mengintegrasikan ESG ke dalam sistem dan prosedur perusahaan. Keterlibatan seluruh Perwira Subholding Gas penting untuk membangun budaya keberlanjutan dan kesadaran lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, program peningkatan kapasitas teknis dan keahlian terkait ESG dijalankan di semua level pegawai dan unit kerja melalui pelatihan, *workshop*, webinar, dan sertifikasi. Komite Keberlanjutan dan Tim ESG bertindak sebagai koordinator dan penghubung informasi ESG di area kerja masing-masing. Kampanye budaya keberlanjutan dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada karyawan, mitra, dan pemasok perusahaan.

PGN mendukung tercapainya ESG *awareness* di lingkungan internal melalui sosialisasi yang mencakup komitmen global dan nasional, ketentuan regulator, serta implementasi ESG yang telah dilakukan perusahaan. Sosialisasi ini disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan unit kerja terkait untuk memastikan kolaborasi efektif dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

PGN belajar dari praktik terbaik perusahaan energi global dalam membangun budaya keberlanjutan. Penguatan sistem manajemen HSSE, efisiensi energi, dan inovasi teknologi menjadi pilar utama. Program seperti *Fit to Work*, tanggap darurat medis, dan pengelolaan risiko operasional menjadi bagian dari budaya keselamatan dan keberlanjutan.

PGN berkomitmen pada efisiensi energi melalui teknologi hemat energi dan diversifikasi portofolio energi rendah karbon seperti *biomethane* dan hidrogen. Kolaborasi dengan pemerintah, komunitas lokal, dan mitra strategis dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memperkuat dampak keberlanjutan terhadap perekonomian nasional.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, PGN berkontribusi pada pencapaian *Net Zero Emission* dan memperkuat daya saing sebagai pemimpin dalam solusi energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Budaya keberlanjutan yang terintegrasi menjadi fondasi dalam perjalanan PGN menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

SUSTAINABILITY CULTURE

The implementation of a sustainability culture in PGN begins by increasing the capacity of Gas Subholding Officers in ESG topics that are relevant to the Company's business. The organization focuses on adaptations to integrate ESG into the Company's systems and procedures. The involvement of all Gas Subholding Officers is crucial to develop a culture of sustainability and environmental awareness in daily activities.

As part of the sustainability strategy, ESG-related technical capacity and expertise building programs are implemented at all levels of employees and work units through training, workshops, webinars, and certification. The Sustainability Committee and ESG Team act as coordinators and liaisons for ESG information in their respective work areas. The sustainability culture campaign is carried out by disseminating information to the Company's employees, partners, and suppliers.

PGN supports the achievement of ESG awareness internally through socialization, which includes global and national commitments, regulatory provisions, and ESG implementation that has been carried out by the Company. This socialization is adjusted to the scope of work of the related work unit to ensure effective collaboration to achieve Net Zero Emission (NZE).

PGN learns from the best practices of global energy companies in building a sustainability culture. Strengthening the HSSE management system, energy efficiency, and technological innovation are the main pillars. Programs such as Fit to Work, medical emergency response, and operational risk management are included as safety and sustainability culture.

PGN is committed to energy efficiency through energy-saving technologies and diversification of low-carbon energy portfolios, such as biomethane and hydrogen. Collaboration with the government, local communities, and strategic partners in increasing the Domestic Component Level (TKDN) strengthens the impact of sustainability on the national economy.

Through this collaborative approach, PGN is contributing to the achievement of Net Zero Emission and strengthening its competitiveness as a leader in clean and sustainable energy solutions in Indonesia. An integrated sustainability culture is the foundation of PGN's journey towards a greener, more inclusive, and sustainable future.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PERWIRA SUBHOLDING GAS

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan tercapainya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), PGN melakukan pengelolaan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjalankan program pendidikan dan pelatihan (diklat) *inhouse* dan *public training*, sertifikasi serta *sharing knowledge*.

Pada tahun 2024, PGN melaksanakan pengukuran hasil Evaluasi Pelatihan Level 2 (L2) dengan hasil capaian sebesar 125,31% guna mengukur efektivitas dari pelatihan yang dilaksanakan. Di samping itu, PGN juga memiliki fasilitas *online learning management system* dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta *sharing knowledge*. Informasi lengkap mengenai pengembangan SDM PGN dapat dilihat pada sub bab Profil Perwira Subholding Gas dalam Laporan Tahunan ini.

MEMPROMOSIKAN HAK ASASI MANUSIA

PGN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan seluruh karyawan, dengan mengedepankan aspek keragaman, kesetaraan, dan inklusi. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti pelaksanaan pelatihan keberagaman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja baru, guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberagaman dalam lingkungan kerja. PGN juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi PRISMA, yang memungkinkan perusahaan memetakan potensi risiko pelanggaran HAM yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis.

Sepanjang tahun 2024, PGN juga telah melaksanakan sosialisasi program kesehatan hari tua, baik di Tangerang pada 5 Maret 2024, yang dihadiri oleh para pensiunan, maupun di Kantor Pusat pada 23 Desember 2024, yang diikuti oleh pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu, program *e-learning Respectful Workplace* (RWP) telah diikuti oleh 779 pegawai dari total 1.310 pegawai (tercapai 59,4% dari target 50%), untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang saling menghormati. PGN juga melaksanakan tiga kali sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2023–2025 untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis. Melalui langkah-langkah ini, PGN tidak hanya memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya budaya kerja yang inklusif dan menghargai hak asasi manusia.

COMPETENCY DEVELOPMENT FOR GAS SUBHOLDING EMPLOYEES

In order to support sustainable business growth and achieve the Company's Long-Term Plan (RJPP), PGN manages and develops Human Resources (HR) by organizing inhouse education and training programs, public trainings, certifications, as well as knowledge sharing.

In 2024, PGN measured the results of Level 2 (L2) Training Evaluation with an achievement of 125.31% in order to measure the effectiveness of the training that has been implemented. In addition, PGN also has online learning management system facilities to improve services in the implementation of the education and training as well as knowledge sharing programs. Detailed information regarding PGN HR development can be viewed in the Gas Subholding Employee Profile sub-chapter in this Annual Report.

PROMOTING HUMAN RIGHTS

PGN is committed to creating a comfortable, inclusive work environment that supports the welfare of all employees, by prioritizing aspects of diversity, equality, and inclusion. This effort is manifested through various initiatives, such as the implementation of diversity training for all employees, including new employees, to increase the understanding of the importance of diversity in the work environment. PGN also collaborates with the Ministry of Law and Human Rights through the PRISMA application, which allows the Company to map potential risks of human rights violations that may arise from its business activities.

Throughout 2024, PGN has also implemented socialization of the post-retirement health program, both in Tangerang on March 5, 2024, which was attended by retirees, and at the Head Office on December 23, 2024, which was attended by workers entering retirement age. In addition, the Respectful Workplace (RWP) e-learning program has been attended by 779 employees out of a total of 1,310 employees (59.4% of the target of 50%), to encourage the creation of a mutually respectful work environment. PGN also carried out three socializations of the 2023–2025 Collective Labor Agreement (PKB) to strengthen harmonious industrial relations. Through these measures, PGN not only strengthens its commitment to employee sustainability and welfare but also contributes to the creation of an inclusive work culture that respects human rights.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

PGN berkomitmen untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tingkat remunerasi yang kompetitif, fasilitas pasca pensiun dan fasilitas kerja yang memadai untuk meningkatkan *employee engagement* serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

EMPLOYEE WELFARE

PGN is committed to providing health facilities, competitive remuneration levels, post-retirement facilities, and adequate work facilities to increase employee engagement and create a safe and comfortable work environment.

PERLINDUNGAN PELANGGAN

PGN memberikan perlindungan terkait keamanan produk dan layanan pelanggan, diantaranya dengan melakukan kontrol rutin terhadap seluruh infrastruktur agar memenuhi aspek keamanan.

Sementara terkait layanan, PGN menyediakan akses bagi pelanggan untuk menyampaikan kebutuhannya melalui berbagai saluran seperti Pertamina *Call Center* 135 dan platform digital *official* PGN termasuk sarana komunikasi terbaru WhatsApp Chatbot untuk melayani permintaan yang bersifat umum.

Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai matriks *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan *Customer Loyalty Index* (CLI) PGN berada pada kriteria sangat baik. Tingkat CSI dan CLI PGN pada tahun 2024 masing-masing berada pada level 4,66 dan 4,36 yang mengindikasikan kriteria sangat baik (dengan skala indeks 1-5). Pada tahun 2024, juga tidak terjadi pelanggaran terkait pelanggan.

CUSTOMER PROTECTION

PGN provides protection in terms of product safety and customer services. This includes carrying out routine controls on all infrastructure to ensure that it meets the security aspects.

Furthermore, in relations to services, PGN provides access for customers to convey their needs through various channels, such as Pertamina Call Center 135 and the official PGN digital platforms, including the latest WhatsApp Chatbot communication media to help with general requests.

In the last five years, PGN's Customer Satisfaction Index (CSI) and Customer Loyalty Index (CLI) matrix scores are in the very good criteria. PGN' CSI and CLI level in 2024 are at the levels of 4.66 and 4.36, respectively, indicating a very good criterion (with an index scale of 1-5). In 2024, there were also no customer-related violations.

PROGRAM MASYARAKAT TANGGUH

Pada tahun 2024, PGN mencatat pencapaian positif dalam implementasi program CSR yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Program HERBAMAN di SOR III, Program Bank Sampah Anyelir dan TBM Gemercik di Stasiun Cimanggis, serta Program Pesona Tani Dewa di Stasiun Pagardewa menunjukkan hasil memuaskan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sebagian besar berada pada kategori "Sangat Puas".

Capaian ini mencerminkan keberhasilan PGN dalam menjalankan program-program CSR yang relevan dan berkualitas tinggi. Selain itu, unsur pelayanan seperti sistem, mekanisme, dan prosedur mendapatkan apresiasi masyarakat dengan skor tertinggi, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan dampak ekonomi dan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan komitmen PGN dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan.

RESILIENT SOCIETIES PROGRAM

In 2024, PGN recorded positive achievements in the implementation of its CSR programs that had a significant impact on the community. The HERBAMAN program at SOR III, the Anyelir Waste Bank Program and TBM Gemercik at Cimanggis Station, as well as the Pesona Tani Dewa Program at Pagardewa Station exhibited satisfactory results with Community Satisfaction Index (CSI) values mostly in the “Very Good” category.

This accomplishment reflects PGN’s success in implementing relevant and high-quality CSR programs. In addition, service elements such as systems, mechanisms, and procedures received the highest public appreciation, although there is still room to improve the economic and environmental impacts. Overall, these results confirm PGN’s commitment to providing real contributions to community welfare through CSR programs that are integrated with the sustainability principles.

PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

SH Gas berkomitmen memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk berbagai kebutuhan, seperti pipa, peralatan, bahan baku, dan lainnya. Pada tahun 2024, implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% difokuskan pada pekerjaan *Provision of Coiled Tubing Services* - Saka (i) dan Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Pipa Gas Distribusi Area Kendal dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang (ii). Pekerjaan tersebut telah selesai, dan proses verifikasi final TKDN oleh surveyor independen juga telah rampung dengan pencapaian sebesar 57,93% (i) dan 73,66% (ii), melampaui target KPI yang telah ditetapkan.

PRIORITIZING THE USE OF LOCAL PRODUCTS

SH Gas is committed to using domestic products for various needs, such as pipes, equipment, raw materials, etc. In 2024, we focused the 40% Domestic Component Level (TKDN) on the Provision of Coiled Tubing Services - Saka (i) and the Development of Gas Distribution Pipeline Infrastructure Work for the Kendal and Batang Integrated Industrial Areas (KIT) (ii). The work was completed and has been fully verified by an independent surveyor, with achievements of 57.93% (i) and 73.66% (ii), exceeding the stated KPI targets.

PILAR TATA KELOLA

Governance Pillar

PGN mengimplementasikan prinsip Governansi Korporat Indonesia guna mengarahkan dan mengelola usaha Perseroan untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi, dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Adapun prinsip dari Governansi korporat meliputi perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

TATA KELOLA ESG

PGN telah mengintegrasikan tata kelola ESG ke dalam strategi bisnis dan operasional sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan. Dalam upaya memastikan pengelolaan aspek ESG berjalan dengan baik, PGN terus meningkatkan penerapan Tata Kelola Keberlanjutan di seluruh lini bisnis, yang merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Tata Kelola Keberlanjutan ini didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, serta didukung oleh sistem manajemen risiko yang komprehensif.

PGN implements the principles of Indonesian Corporate Governance to direct and manage the Company's business to achieve business progress and corporate accountability, with the ultimate goal of creating corporate value and shareholder wealth in a sustainable manner by taking into account the interests of stakeholders. The principles of Corporate Governance include ethical behaviour, accountability, transparency, and sustainability.

ESG GOVERNANCE

PGN has integrated ESG governance into its business and operational strategies as part of its commitment to creating sustainable value. In an effort to ensure that ESG aspects are properly managed, PGN continues to improve the implementation of Sustainability Governance across all business lines, which is part of Good Corporate Governance (GCG). Sustainability Governance is based on the principles of transparency, accountability, and compliance with regulations, and supported by a comprehensive risk management system.

PGN mengadopsi standar internasional seperti ISO 14001:2015 untuk manajemen lingkungan, ISO 37001:2016 untuk anti penyuapan, dan ISO 22301:2019 untuk ketahanan bisnis. Selain itu, PGN mematuhi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keberlanjutan dan melaporkan keberlanjutan berdasarkan standar global seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya menerapkan GCG yang baik, PGN juga berfokus pada peningkatan kesadaran pegawai terkait GCG dan pencegahan praktik penyuapan. Di tahun 2024, ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diperluas dari dua satuan kerja menjadi sembilan satuan kerja, termasuk *Risk Management*, *Procurement*, dan CSR. Selain itu, berbagai kegiatan telah dilakukan, seperti Bimtek Pelaku Usaha Antikorupsi dengan KPK, sosialisasi SMAP kepada pekerja baru, pembaruan komitmen GCG oleh BOD dan BOC, serta *e-learning* dengan tema "Penguatan Pemahaman Gratifikasi."

Untuk mengetahui pencapaian kinerja ESG, PGN melaksanakan proses *assessment* ESG *Risk Rating* bekerja sama dengan assessor Sustainalytics pada periode Juli hingga Oktober 2024. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut, SH Gas berhasil meraih skor 20,2, yang termasuk dalam kategori *medium risk*. Skor ini melampaui pencapaian kinerja sebelumnya dan target yang telah ditetapkan, yaitu 24,7. Hal ini menunjukkan keberhasilan PGN dalam menjaga reputasi perusahaan terkait pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Melalui upaya ini, PGN tidak hanya memperkuat tata kelola yang baik, tetapi juga berkomitmen untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, berintegritas, dan terpercaya bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja.

STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

PGN memiliki struktur tata kelola keberlanjutan yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan aspek *Environmental*, *Social*, *and Governance* (ESG) secara menyeluruh. Struktur ini diawali dengan Komite Keberlanjutan PGN yang bertugas memberikan arahan strategis terkait ambisi, strategi, *roadmap*, kebijakan, inisiatif, serta indikator kinerja keberlanjutan. Komite ini dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua, dengan seluruh anggota Direksi (BOD) sebagai anggota, serta Divisi Head Investor Relations sebagai Sekretaris. Penanggung jawab bidang berada di bawah BOD-1 dan Direktur Utama Anak Perusahaan (Dirut AP).

PGN adopts international standards, such as ISO 14001:2015 for environmental management, ISO 37001:2016 for anti-bribery, and ISO 22301:2019 for business resilience. Furthermore, PGN complies with POJK No. 51/POJK.03/2017 on sustainability and reports sustainability based on global standards, such as the Global Reporting Initiative (GRI), to demonstrate its commitment to sustainable development and accountability to stakeholders.

As part of the effort to implement GCG, PGN also focuses on increasing employee awareness regarding GCG and preventing bribery practices. In 2024, the scope of the Anti-Bribery Management System (SMAP) certification was expanded from two work units to nine work units, including Risk Management, Procurement, and CSR. Moreover, various activities have been carried out, such as the Technical Guidance for Anti-Corruption Business with the KPK, SMAP socialization to new employees, renewal of GCG commitments by the BOD and BOC, as well as e-learning with the theme “Strengthening the Understanding of Gratification.”

To determine the ESG performance achievement, PGN conducted an ESG Risk Rating assessment process in collaboration with the Sustainalytics assessor in the period of July to October 2024. Based on the assessment results, the Gas Subholding managed to achieve a score of 20.2, which is in the medium risk category. This score exceeded the previous performance achievement and the set target, which was 24.7. This demonstrates PGN’s success in maintaining the Company’s reputation in relations to environmental, social, and governance risk management.

Through these efforts, PGN not only strengthens good governance, but is also committed to building a sustainable, integrated, and trusted business for stakeholders, including investors, government, communities, and business partners.

STRUCTURE OF SUSTAINABILITY GOVERNANCE

PGN has a sustainability governance structure that is designed to ensure the implementation of the Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in a comprehensive manner. The structure begins with the PGN Sustainability Committee, which is responsible for providing strategic direction related to ambitions, strategies, roadmaps, policies, initiatives, as well as sustainability performance indicators. This committee is led by the President Director as the Chairman, with all members of the Board of Directors (BOD) as members, and the Head of Investor Relations Division as Secretary. The person in charge of the field is under BOD-1 and the President Director of the Subsidiaries.

Pelaksanaan strategi keberlanjutan ini didukung oleh ESG *Management* yang bersifat *Task Force* atau *Adhoc*, bertugas melaksanakan implementasi ESG sesuai arahan strategis, target, dan deliverable yang telah ditetapkan. ESG Management terdiri dari *Project Sponsor* yang mencakup Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis. Selain itu, ada *Project Leader* yang dipimpin oleh Divisi Head Investor Relations, yang mengelola tiga stream utama: ESG *Corporate Strategy and Implementation*, ESG *Financing*, serta ESG *Communication and Engagement*.

The implementation of the sustainability strategy is supported by the ESG Management, which is a Task Force or Adhoc, that is responsible for the implementation of ESG according to the set strategic directives, targets, and deliverables. The ESG Management consists of a Project Sponsor, which includes the Director of Strategy and Business Development, the Director of Finance and Risk Management, and the Director of Human Resources and Business Support. In addition, there is a Project Leader, which is led by the Head of the Investor Relations Division, who manages three main streams: ESG Corporate Strategy and Implementation, ESG Financing, and ESG Communication and Engagement.

MODEL OPERASI KOMITE SUSTAINABILITY DAN TIM ESG MANAGEMENT

Operating Model of the Sustainability Committee and ESG Management Team

KOMITE SUSTAINABILITY PGN

Sustainability Committee of PGN

Memutuskan dan memberi arahan atas ambisi, strategi, initiatives, kebijakan, inisiatif serta ukuran kinerja terkait penerapan Aspek Keberlanjutan.

Decide and provide direction on ambitions, strategies, initiatives, policies, initiatives, and performance measures related to the Sustainability Aspect implementation.

Deskripsi Description	Jabatan Position
Ketua Komite Chairman of the Committee	**Direktur Utama** President Director
Anggota Komite Member of the Committee	**All BOD**
Sekretaris Komite Secretary of the Committee	**Div. Head Investor Relations** Head Investor Relations Division
Penanggung Jawab Bidang Person in charge in their respective fields	**BOD-1 terkait dan Dirut AP** Related BOD-1 and President Director of Subsidiary

ESG MANAGEMENT (TASK FORCE/ADHOC)

Melaksanakan implementasi ESG sesuai dengan arahan strategis, target, dan *deliverable* yang telah ditentukan.

Carry out the ESG implementation in accordance with the predetermined strategic direction, targets, and deliverables.

Project Sponsor

1. **Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis**
   Chairman of the Committee
2. **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**
   Director of Finance and Risk Management
3. **Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis**
   Director of Human Resources and Business Support

Project Leader

Corporate Secretary

Vice Project Leader

Corporate Strategy
Health, Safety, Security and Environment

Stream ESG Corporate Strategy and Implementation	Stream ESG Financing
Stream ESG Communication and Engagement	Project Deployment Office

Subject Matter Expert

Menyediakan informasi, data dan kajian yang diperlukan serta memberikan konsultansi sesuai dengan lingkup kewenangannya kepada Project Leader, Stream Leader maupun Team Leader dalam rangka implementasi ESG Management atau untuk mendukung keberhasilan implementasi ESG Management.
Provide necessary information, data, and studies as well as provide consultancy in accordance with the scope of authority to the Project Leader, Stream Leader, and Team Leader in the context of ESG Management implementation or to support the successful ESG Management implementation.

ESG Initiatives

ESG Rating

Sustainability Budget Tagging

Peran *Subject Matter Expert* (SME) juga sangat penting dalam struktur ini. SME bertugas menyediakan informasi, data, kajian, serta memberikan konsultasi yang relevan kepada *Project Leader, Stream Leader*, maupun *Team Leader* untuk memastikan keberhasilan implementasi ESG Management. Fokus lainnya mencakup pengelolaan 14 inisiatif ESG yang dipimpin oleh *Project Leader*, yang didukung oleh *Project Deployment*

The role of Subject Matter Expert (SME) is also crucial in this structure. SME is responsible for providing information, data, studies, as well as relevant consultations to Project Leaders, Stream Leaders, and Team Leaders to ensure the realization of ESG Management implementation. Other focuses include the management of 14 ESG initiatives led by the Project Leader, supported by the Project Deployment Office (PMO)

Office (PMO) dengan fungsi administrasi, pengumpulan data, pelaporan, dan rapat berkala. Implementasi ini dimonitor melalui mekanisme *Initiatives Monitoring*, ESG *Rating*, dan *Sustainability Budget Tagging*, yang bertujuan memastikan keberhasilan program ESG sekaligus mendukung pencapaian peringkat ESG perusahaan secara efektif.

Untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam implementasi ESG, PGN menyadari pentingnya memiliki struktur organisasi yang lebih permanen dan berdedikasi. Oleh karena itu, PGN secara resmi membentuk organisasi khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan keberlanjutan melalui Surat Keputusan Nomor 085700.K/OT/00/PDO/2024 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi Dasar PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yaitu Corporate Strategy and Sustainability (CST). CST, yang berada di bawah struktur Direktorat Strategi dan Pengembangan Bisnis dengan level jabatan setara BOD-1, ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024. Fungsi utama CST adalah mengelola strategi dan roadmap ESG perusahaan, termasuk memastikan implementasi inisiatif ESG yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi ke dalam strategi korporasi.

Pembentukan CST mencerminkan komitmen PGN untuk memperkuat tata kelola keberlanjutan perusahaan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam merespons tantangan global seperti perubahan iklim, transisi energi, dan tuntutan *stakeholder* terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui CST, PGN berharap dapat memadukan prinsip keberlanjutan dengan aspek operasional dan strategis, menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian.

with administrative functions, data collection, reporting, and regular meetings. This implementation is monitored through the Initiatives Monitoring, ESG Rating, and Sustainability Budget Tagging mechanisms, which aim to ensure the success of the ESG program while supporting the achievement of the Company's ESG rating effectively.

To ensure the sustainability and consistency of ESG implementation, PGN recognizes the importance of having a more permanent and dedicated organizational structure. To that end, PGN officially established a special organization that is responsible for sustainability management through Decree No. 085700.K/OT/00/PDO/2024 on the Adjustment of the Basic Organizational Structure of PT Perusahaan Gas Negara Tbk, namely Corporate Strategy and Sustainability (CST). CST, which is under the structure of the Strategy and Business Development Directorate with a position level equivalent to BOD-1, was established on December 24, 2024. The main function of CST is to manage the Company's ESG strategy and roadmap, including ensuring the implementation of a structured and measurable ESG initiatives that are integrated into the corporate strategy.

The establishment of CST reflects PGN's commitment to strengthen the Company's sustainability governance while increasing its capacity to respond to global challenges, such as climate change, energy transition, and stakeholder demands for accountable business practices. Through CST, PGN hopes to be able to combine sustainability principles with operational and strategic aspects, creating long-term positive impacts for the environment, society, and economy.

Struktur ini mencerminkan komitmen PGN untuk mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasional perusahaan dan mendukung pencapaian target keberlanjutan jangka panjang.

This structure reflects PGN's commitment to integrating ESG principles into the Company's operations and supporting the achievement of long-term sustainability targets.

CYBERSECURITY STRUCTURE & CULTURE

Pada tahun 2024, Subholding Gas (SHG) menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan inisiatif ESG di bidang *cybersecurity* untuk memitigasi risiko serangan siber dan meningkatkan kesadaran keamanan siber di seluruh lingkungan perusahaan. Kebijakan *cybersecurity* telah disusun dan diterapkan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara aman dan bertanggung jawab. Sesuai dengan target *timeline* yang telah ditetapkan, perusahaan berhasil mencapai seluruh target yang direncanakan melalui berbagai kegiatan strategis.

Beberapa aktivitas *cybersecurity awareness* yang dilaksanakan mencakup *e-mail broadcast*, uji coba *phishing e-mail*, webinar tentang keamanan siber, serta simulasi serangan *red/blue teaming*. Selain itu, Komitmen dan Kebijakan Keamanan Informasi SHG Group telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi di masing-masing entitas. SHG juga membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (CIRT) dan menunjuk Lead Information Security Officer (LISO) untuk setiap entitas dalam grup. LISO dari Anak Perusahaan (AP) dan afiliasi bertanggung jawab kepada Komite Keamanan Informasi dan berkoordinasi dengan LISO SHG guna memastikan sinergi dalam pengelolaan keamanan informasi.

Penilaian *Cyber Security Maturity* yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap PGN dan seluruh AP SHG menunjukkan bahwa PGN sudah memiliki kontrol dalam tata kelola keamanan siber, deteksi ancaman, dan respon insiden, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang diusung dalam kerangka ESG. Melalui langkah-langkah ini, SHG berhasil memperkuat ketahanan sibernya sekaligus membangun kesadaran keamanan siber yang lebih luas di lingkungan Perseroan.

CYBERSECURITY STRUCTURE & CULTURE

In 2024, the Gas Subholding demonstrated a strong commitment to implementing ESG initiatives in cybersecurity to mitigate the risk of cyber-attacks and raise cybersecurity awareness throughout the Company. Cybersecurity policies have been prepared and implemented to regulate the use of information technology and communication in a safe and responsible manner. In accordance with the set timeline target, the Company has succeeded in achieving all planned targets through various strategic activities.

Some of the cybersecurity awareness activities that have been carried out include e-mail broadcasts, e-mail phishing trials, webinars on cybersecurity, and red/blue teaming attack simulations. In addition, the Gas Subholding Group's Information Security Commitment and Policy has been signed by all members of the Board of Directors in each entity. The Gas Subholding has also established a Cybersecurity Incident Response Team (CIRT) and appointed a Lead Information Security Officer (LISO) for each entity in the group. LISOs from Subsidiaries and affiliates are responsible to the Information Security Committee and coordinate with LISOs of the Gas Subholding to ensure synergy in the management of information security.

The Cyber Security Maturity Assessment conducted by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) on PGN and all SHG APs shows that PGN already has controls in place for cybersecurity governance, threat detection and incident response, in line with the sustainability principles promoted in the ESG framework. Through these measures, SHG has succeeded in strengthening its cyber resilience while building wider cybersecurity awareness within the Company.

07.

LAPORAN KEUANGAN

Financial Statement

PERTAMINA
GAS NEGARA

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1/1 – 5	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2/1 – 2	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3/1	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4/1 – 2	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5/1 – 241	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PERTAMINA
GAS NEGARA

Surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak

Directors' statement letter regarding the responsibility for the consolidated financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended PT Perusahaan Gas Negara Tbk and its Subsidiaries

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned below:*

1. Nama	:	Arief Setiawan Handoko	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta	:	*Office address*
Alamat Domisili	:	Kebayoran Heights, Blok A.10 No.10 RT/RW 002/007, Pondok Jaya Pondok Aren, Tangerang Selatan	:	*Residential Address*
Telepon	:	+62216339524	:	*Telephone*
Jabatan	:	Direktur Utama/*President Director*	:	*Title*
2. Nama	:	Fadjar Harianto Widodo	:	*Name*
Alamat Kantor	:	Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta	:	*Office address*
Alamat Domisili	:	Jl. Pulo Sirih Barat VIII Blok FE No 445, Taman Galaxi RT/RW 002/015, Jaka Setia Bekasi Selatan, Kota Bekasi	:	*Residential Address*
Telepon	:	+62216339524	:	*Telephone*
Jabatan	:	Direktur Keuangan /*Director of Finance*	:	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Entitas Anak ("Grup");

2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; dan

   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk and its Subsidiaries (the "Group");

2. The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. All information in the consolidated financial statements of the Group has been fully disclosed in a complete and truthful manner; and

b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;

4. We are responsible for the internal control systems of the Group.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 25 Maret/*March* 2025

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan/ *Director of Finance*
Arief Setiawan Handoko	**Fadjar Harianto Widodo**

METERAI TEMPEL
BECAMX008597158

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants (KAP) No. 3.031/KM.1/2016
a member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk setiap hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For each of the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matters is provided in such context.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal-hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal-hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Provisi kontrak merugi

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat provisi kontrak merugi atas kontrak penjualan liquefied natural gas ("LNG") jangka panjang sebesar US$72.027.462. Provisi ini mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Pengungkapan terkait provisi kontrak merugi atas kontrak penjualan LNG jangka panjang disajikan dalam Catatan 18a, 35p dan 36k atas laporan keuangan konsolidasian. Asesmen provisi kontrak merugi atas kontrak penjualan LNG jangka panjang memerlukan pertimbangan dan estimasi signifikan karena ketidakpastian estimasi penalti yang harus dihitung oleh Grup, harga LNG sesuai harga acuan, suplai yang akan diperoleh oleh Grup dan putusan di masa depan atas arbitrase yang masih berlangsung di London Court of International Arbitration.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Provision for onerous contract

Description of key audit matter:

As of December 31, 2024, the Group recorded provision for onerous contract related to long-term liquefied natural gas ("LNG") sales contract amounted to US$72,027,462. This provision reflects the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it. The related disclosures of provision for onerous long-term LNG sales contract are included in Notes 18a, 35p and 36k to the consolidated financial statements. Assessment of provision for onerous long-term LNG sales contract requires significant judgment and estimates due to the uncertainty of the estimation of the penalty that must be accounted for by the Group, LNG prices according to the benchmark prices, supply that will be obtained by the Group and the future outcome of ongoing arbitration in London Court of International Arbitration.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Provisi kontrak merugi (lanjutan)

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman terhadap kajian provisi kontrak merugi atas kontrak penjualan LNG jangka panjang dan melakukan diskusi dengan manajemen atas perkembangannya di tahun ini, termasuk pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan penting dalam kontrak. Kami mendapatkan daftar semua kontrak penjualan LNG jangka panjang dan memastikan kelengkapan daftar tersebut. Kami memeroleh dan melakukan evaluasi terhadap kajian manajemen dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dari posisi Grup dalam transaksi ini. Kami menguji akurasi dari perhitungan provisi dan menilai serta menguji kewajaran asumsi utama yang digunakan, seperti nilai penalti, harga LNG acuan, ketersediaan suplai, tingkat diskonto dan dokumentasi atas proses arbitrase yang sedang berlangsung. Kami juga memeriksa kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

Provision for onerous contract (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the assessment of the provision for onerous long-term LNG sales contract and conducted discussions with management on the developments during the year, including understanding of the key terms of the contracts. We obtained a list of all long-term LNG sales contracts and ensured completeness of the list. We obtained and evaluated the management's assessment considering the most recent update on the Group's position on the transaction. We tested the mathematical accuracy of the calculation of the provision and assessed and tested the reasonableness of the key assumptions used, such as penalty amount, LNG benchmark prices, availability of supply, discount rates and documentation on ongoing arbitration process. We also checked the adequacy of the disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup mengakui beban depresiasi, deplesi, dan amortisasi ("beban DD&A") konsolidasian sebesar US$198.583.937 atau sama dengan 6,6% dari total beban pokok pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Cadangan minyak dan gas bumi digunakan dalam perhitungan beban DD&A yang merupakan pos material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3i atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, estimasi cadangan minyak dan gas bumi merupakan hal yang kompleks, karena terdapat ketidakpastian estimasi signifikan dalam menilai jumlah dan tingkat cadangan di setiap blok minyak dan gas, serta asumsi data ekonomi yang digunakan, antara lain, asumsi harga minyak dan gas bumi, dan asumsi biaya operasi dan modal di masa mendatang, yang dapat berubah dari tahun ke tahun.

Respons audit:

Kami memeroleh suatu pemahaman mengenai proses estimasi Grup atas cadangan minyak dan gas bumi serta pengendalian terkait yang ditetapkan oleh manajemen, termasuk proses sertifikasi yang dilakukan oleh konsultan perminyakan independen atas estimasi cadangan minyak dan gas bumi yang dibuat oleh manajemen. Kami juga mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas konsultan. Kami menguji asumsi-asumsi utama yang mendasari penentuan cadangan dengan membandingkan proyeksi harga yang digunakan terhadap indeks harga minyak acuan dan mengevaluasi proyeksi biaya modal terhadap rencana jangka panjang Grup dan pengeluaran biaya modal yang telah terjadi.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

Estimation of oil and gas reserves

Description of key audit matter:

The Group recognized consolidated depreciation, depletion and amortization expenses (the "DD&A expenses") amounted to US$198,583,937 or equivalent to 6.6% of total consolidated cost of revenues for the year ended December 31, 2024. Oil and gas reserves are used in the calculation of DD&A expenses, which are material line items in the accompanying consolidated financial statements. As described in Note 3i to the accompanying consolidated financial statements, the estimation of oil and gas reserves is complex, as there is significant estimation uncertainty in assessing the quantities and level of reserves in each oil and gas block, as well as economic data assumptions, such as oil and gas price assumptions, and future operating and capital cost assumptions, which may change from year to year.

Audit response:

We obtained an understanding of the oil and gas reserves estimation process of the Group and the relevant controls established by management, including the certification process performed by the independent petroleum engineering consultant on the estimate of oil and gas reserves prepared by management. We also evaluated the consultant's competence, capabilities, and objectivity. We tested key assumptions underlying reserves determination by comparing forecast prices used in the reserves' calculation to the crude oil benchmark prices index and evaluated the future capital expenditures with the Group's long-term planning and historical capital expenditures.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal-hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00354/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Irwan Haswir

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1726/*Public Accountant Registration No. AP.1726*

25 Maret 2025/*March 25, 2025*

00354

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 1/1 *Page*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4a	1.383.182.362	1.244.731.682	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	21.223.203	14.400.810	*Restricted cash*
Investasi jangka pendek	5a	618.927	-	*Short term investment*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5b	-	23.178.224	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak berelasi	6	162.054.692	180.065.076	*Related parties*
Pihak ketiga	6	223.778.873	268.118.427	*Third parties*
Piutang sewa pembiayaan - pihak berelasi	14c	6.461.033	-	*Finance lease receivable - related party*
Piutang lain-lain - neto				*Other receivables - net*
Pihak berelasi	7	-	13.127.319	*Related parties*
Pihak ketiga	7	27.781.710	24.569.947	*Third parties*
Persediaan - neto	8	81.932.846	70.980.682	*Inventories - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak	21a	34.173.305	15.999.792	*Prepaid taxes and estimated claims for tax refund*
Uang muka	9	18.549.712	10.978.544	*Advances*
Beban dibayar di muka	10	27.205.099	26.274.552	*Prepaid expenses*
Total aset lancar		**1.986.961.762**	**1.892.425.055**	***Total current assets***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 1/2 *Page*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	4b	148.412.844	128.772.206	*Restricted cash*
Piutang usaha - pihak ketiga	6	-	45.825.293	*Trade receivables - third parties*
Piutang sewa pembiayaan - pihak berelasi	14c	76.991.693	-	*Finance lease receivable - related party*
Piutang lain-lain				*Other non-current receivable -*
pihak berelasi	11	-	3.908.656	*related parties*
pihak ketiga	11	46.139.826	59.944.715	*third parties*
Uang muka - bagian tidak lancar	9	37.483.781	35.019.565	*Advances - non-current portion*
Beban dibayar di muka - bagian tidak lancar	10	30.329.186	37.365.518	*Prepaid expenses - non-current portion*
Penyertaan saham dan ventura bersama	12	311.953.210	307.204.288	*Investment in shares and joint ventures*
Aset tetap - neto	13a	2.509.268.088	2.621.188.016	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	14a	371.293.921	413.211.228	*Right-of-use assets - net*
Aset eksplorasi dan evaluasi	15a	65.231.075	11.127.331	*Exploration and evaluation assets*
Properti minyak dan gas - neto	15b	695.790.038	870.126.444	*Oil and gas properties - net*
Aset takberwujud - neto	13d	2.224.584	2.487.768	*Intangible assets - net*
Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak	21a	30.832.164	51.502.778	*Prepaid taxes and Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	21d	95.848.091	111.401.302	*Deferred tax assets*
Lain-lain		7.189.467	7.728.306	*Others*
Total aset tidak lancar		**4.428.987.968**	**4.706.813.414**	***Total non-current assets***
TOTAL ASET		**6.415.949.730**	**6.599.238.469**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 1/3 *Page*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	16	146.405.600	189.459.614	*Related parties*
Pihak ketiga	16	90.991.888	55.750.530	*Third parties*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak ketiga	17	98.350.200	117.290.669	*Third parties*
Utang bank jangka pendek	19a	100.000.000	2.590.841	*Short-term bank loan*
Utang obligasi	20	-	552.633.015	*Bonds payable*
Liabilitas yang masih harus dibayar – jangka pendek	18a	425.588.383	352.673.261	*Accrued liabilities - current*
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	19b	72.449.958	39.689.089	*Current portion of long-term bank loans*
Liabilitas sewa bagian jangka pendek	14b	41.359.840	34.826.814	*Current portion of lease liabilities*
Utang pajak jangka pendek	21b	41.548.336	33.601.051	*Current taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	22	86.983.717	75.864.486	*Current employee benefit liabilities*
Bagian jangka pendek dari pendapatan yang ditangguhkan	18b	30.809.453	8.038.209	*Current portion of deferred revenues*
Total liabilitas jangka pendek		**1.134.487.375**	**1.462.417.579**	***Total current liabilities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
LIABILITAS (lanjutan)				***LIABILITIES (continued)***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka panjang	19b	703.690.713	519.958.791	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa jangka panjang	14b	353.874.575	395.855.249	*Non-current lease liabilities*
Utang pajak jangka panjang	21b	5.547.456	57.321.373	*Non-current taxes payable*
Liabilitas pajak tangguhan	21d	123.064.838	116.394.012	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	18a	72.027.462	68.540.528	*Accrued liabilities - non-current*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	23	146.128.524	146.690.321	*Asset abandonment and site restoration obligations*
Liabilitas imbalan pascakerja	22d	107.500.437	136.120.605	*Post-employment benefit obligation*
Pendapatan ditangguhkan	18b	98.101.066	155.536.632	*Deferred revenues*
Total liabilitas jangka panjang		**1.609.935.071**	**1.596.417.511**	***Total non-current liabilities***
TOTAL LIABILITAS		**2.744.422.446**	**3.058.835.090**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to the owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal IDR100 per saham				*Share capital - par value of IDR100 per share*
Modal dasar - 70.000.000.000 saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B				*Authorised - 70,000,000,000 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 Series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	24a	344.018.831	344.018.831	*Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares consisting of 1 Series A Dwiwarna and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	24b	(467.574.628)	(467.574.628)	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan		2.647.820.134	2.592.201.898	*Appropriated -*
- Tidak dicadangkan		339.427.774	278.091.179	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya		(37.646.189)	(47.882.475)	*Other components of equity*
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.826.045.922	2.698.854.805	*Net equity attributable to the owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	845.481.362	841.548.574	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS		**3.671.527.284**	**3.540.403.379**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.415.949.730**	**6.599.238.469**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 2/1 *Page*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
PENDAPATAN	27	3.788.619.187	3.646.304.165	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	28	(3.031.238.285)	(2.912.724.687)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**757.380.902**	**733.579.478**	***GROSS PROFIT***
Pendapatan lain-lain	31a	40.293.915	24.623.337	*Other income*
Beban umum dan administrasi	29,43	(201.214.919)	(196.895.201)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	31b,43	(73.802.786)	(18.890.000)	*Other expenses*
LABA OPERASI		**522.657.112**	**542.417.614**	***OPERATING PROFIT***
Bagian laba dari ventura bersama	12	72.200.336	64.835.104	*Share of profit from joint ventures*
Pendapatan keuangan	30b	60.189.845	48.464.033	*Finance income*
Laba selisih kurs - neto	31c	11.125.284	7.352.655	*Gain on foreign exchange - net*
Beban keuangan	30a	(75.327.749)	(97.628.154)	*Finance costs*
Penurunan nilai properti minyak dan gas	15b	(9.068.015)	-	*Impairment losses of oil and gas property*
Provisi atas kontrak yang merugi	35p	(3.486.935)	(11.689.711)	*Provision for onerous contract*
Provisi atas sengketa pajak	21f	-	(29.864.532)	*Provision for tax disputes*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**578.289.878**	**523.887.009**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21c	**(138.652.608)**	**(147.271.108)**	***INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN		**439.637.270**	**376.615.901**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 2/2 *Page*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak		17.247.355	(2.454.911)	*Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak		(22.555)	(89.645)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak		(6.988.514)	17.478.693	*Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		**10.236.286**	**14.934.137**	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**449.873.556**	**391.550.038**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		339.427.774	278.091.179	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	100.209.496	98.524.722	*Non-controlling interests*
		439.637.270	**376.615.901**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk		349.664.060	293.025.316	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	25	100.209.496	98.524.722	*Non-controlling interests*
		449.873.556	**391.550.038**	
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK - DASAR DAN DILUSIAN	32	**0,0140**	**0,0115**	***EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY - BASIC AND DILUTED***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 3/1 *Page*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to the owners of the parent entity*										
					Komponen ekuitas lainnya/ *Other components of equity*						
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak/ *Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak/ *Remeasurement of post-employment benefit obligation, net of tax*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Total komponen ekuitas lainnya/ *Total other components of equity*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas neto/ *Net equity*	
			Dicadangkan/ *Appropriated*	Tidak dicadangkan/ *Unappropriated*							
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.494.329.989**	**326.239.697**	**(48.417.858)**	**(14.457.119)**	**58.365**	**(62.816.612)**	**807.573.361**	**3.441.770.638**	***Balance as of January 1, 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	278.091.179	-	-	-	-	98.524.722	376.615.901	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	17.478.693	(2.454.911)	(89.645)	14.934.137	-	14.934.137	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(228.367.788)	-	-	-	-	(64.549.509)	(292.917.297)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	97.871.909	(97.871.909)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.592.201.898**	**278.091.179**	**(30.939.165)**	**(16.912.030)**	**(31.280)**	**(47.882.475)**	**841.548.574**	**3.540.403.379**	***Balance as of December 31, 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	339.427.774	-	-	-	-	100.209.496	439.637.270	*Profit for the year*
Pendapatan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	(6.988.514)	17.247.355	(22.555)	10.236.286	-	10.236.286	*Other comprehensive income/(loss) for the year*
Pembayaran dividen	-	-	-	(222.472.943)	-	-	-	-	(96.276.708)	(318.749.651)	*Payment of dividend*
Penyisihan cadangan umum	-	-	55.618.236	(55.618.236)	-	-	-	-	-	-	*General reserve allocation*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**344.018.831**	**(467.574.628)**	**2.647.820.134**	**339.427.774**	**(37.927.679)**	**335.325**	**(53.835)**	**(37.646.189)**	**845.481.362**	**3.671.527.284**	***Balance as of December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Halaman 4/1 *Page*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**69**	***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan		3.834.863.981	3.739.835.270	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga		60.189.845	48.464.033	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok		(2.189.465.072)	(2.082.229.607)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya		(405.562.341)	(436.379.766)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran pajak setelah dikurangi penerimaan dari tagihan pajak		(247.402.313)	(253.201.247)	*Payments for taxes after deduction from tax refunds*
Pembayaran kepada karyawan		(175.241.931)	(141.141.075)	*Payments to employees*
Pembayaran beban keuangan		(48.688.515)	(76.950.929)	*Payments for finance cost*
Pembayaran sengketa pajak		-	(27.599.264)	*Payment for tax dispute*
Pembayaran bunga atas sewa	14b	(17.015.634)	(19.171.128)	*Payments for interest on lease*
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		(26.463.031)	(27.937.683)	*Placement of restricted cash*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		**785.214.989**	**723.688.604**	***Net cash generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari ventura bersama	12	67.781.412	61.015.276	*Dividend received from joint ventures*
Penerimaan pelepasan aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5b	23.178.224	3.600.000	*Proceeds from disposals of financial assets through other comprehensive income*
Penambahan aset tetap		(62.753.331)	(52.055.522)	*Additions of fixed assets*
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi		(54.103.744)	(1.054.564)	*Additions of exploration and evaluation assets*
Penambahan properti minyak dan gas		(22.022.119)	(69.172.678)	*Additions of oil and gas properties*
Penempatan investasi jangka pendek lainnya	5a	(618.927)	-	*Placement for other short term investment*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(48.538.485)**	**(57.667.488)**	***Net cash used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	19	400.000.000	303.238.552	*Proceeds of bank loans*
Penerimaan pinjaman dari ventura bersama		4.223.033	4.223.035	*Proceeds of loans from joint ventures*
Pembayaran *buyback* obligasi	20	(552.961.000)	(773.291.000)	*Payments of bonds buyback*
Pembayaran dividen	25,26	(318.749.651)	(292.917.297)	*Payment of dividend*
Pembayaran pinjaman bank	19	(63.651.115)	(76.900.048)	*Payments of bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	14b	(36.923.038)	(38.903.352)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran biaya transaksi utang bank		-	(3.655.000)	*Payment of bank loan transaction cost*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(568.061.771)**	**(878.205.110)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**168.614.733**	**(212.183.994)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas		(30.164.053)	9.264.859	*Net effects of foreign exchange on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4a	**1.244.731.682**	**1.447.650.817**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4a	**1.383.182.362**	**1.244.731.682**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("Perusahaan") pada awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. Kemudian, Perusahaan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM) pada tahun 1950, saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama Perusahaan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, Perusahaan didirikan sebagai Perusahaan Negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/1984, PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum ("Perum") dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara.

Status Perusahaan diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara ("Persero") dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37/1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7729HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (the "Company") initially named Firm L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage, was established in 1859. The Company was renamed NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM), when the Dutch Government took control in 1950. In 1958, when the Government of the Republic of Indonesia took over the entity, the Company's name was changed to Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) and then later became BPU-PLN in 1961. On May 13, 1965, based on Government Regulation No. 19/1965, the Company was established as a state owned company ("Perusahaan Negara") and became known as Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Based on Government Regulation No. 27/1984, PN. Gas was converted into a public service enterprise ("Perum") under the name Perusahaan Umum Gas Negara.

The status of the Company was changed from a Perum to a state owned limited liability company ("Persero") and the name was changed to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) based on Government Regulation No. 37/1994 and the Deed of Establishment No. 486 dated May 30, 1996 as notarised by Adam Kasdarmaji, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-7729HT.01.01.Th.96. dated May 31, 1996 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 8508 Supplement No. 80 dated October 4, 1996.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas dan nama Perusahaan berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6/2018. Perubahan status Perusahaan ini kemudian diikuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 48 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 29 Juni 2018. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dibuat berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 11 Mei 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0342118 tanggal 1 Juni 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") meliputi perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan niaga gas buatan; dan jasa telekomunikasi; serta pengelolaan properti Perusahaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pada saat ini, usaha utama Perusahaan adalah niaga dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga.

Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. Pemegang saham langsung Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") dan pemegang saham akhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The status of the Company was changed to a limited liability company and the Company's name was changed to PT Perusahaan Gas Negara Tbk. based on Government Regulation No. 6/2018. The change in the Company's status was followed by amendment to the Company's Articles of Association based on Notarial Deed No. 48 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 29, 2018. The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 28 dated May 11, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The amendment was reported to and received by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Acknowledgment Letter No. AHU-AH.01.03-0342118 dated June 1, 2021.

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's objective is to implement and support the Government's economic and national development programs, particularly in developing the use of natural gas for the benefit of the public as well as in the supply of a sufficient volume and quality of gas for public consumption. The scope of activities of the Company and its subsidiaries (together, the "Group") comprises planning, construction, operation, and development of natural gas downstream business which includes processing, transporting, storing and trading, planning, construction, production development, supplying and distribution of processed gas; telecommunication services; managing the Company's property and providing manpower services. Currently, the Company's principal business is the trading and transmission of natural gas to industrial, commercial and household users.

The Company's Head Office is located at Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Jakarta. The Company's immediate parent is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") and the Company's ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Grup

Pada tanggal 5 Desember 2003, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari divestasi saham Pemerintah Republik Indonesia, dan 820.987.000 saham baru. Saham Perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2003.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 13 Juni 2008 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 49 oleh Fathiah Helmi, S.H., tanggal 13 Juni 2008, para pemegang saham menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B dari IDR500 per saham menjadi IDR100 per saham, sehingga jumlah saham Perusahaan meningkat dari 14 miliar saham menjadi 70 miliar saham dan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar 4.593.437.193 saham akan meningkat menjadi 22.967.185.965 saham.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD1.350.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited.* Pada tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan melunasi seluruh obligasinya (Catatan 20a).

Pada tanggal 26 April 2017, PT Saka Energi Indonesia (“SEI”), anak perusahaan, menerbitkan dan mencatatkan *Senior Unsecured Fixed Rate Notes* senilai USD625.000.000 yang jatuh tempo pada 2024 di *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. Pada tanggal 6 Mei 2024, SEI melunasi seluruh obligasinya (Catatan 20b).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan sesuai tanggal Surat Pernyataan Direksi.

1. GENERAL (continued)

b. The Group’s Public Offerings

On December 5, 2003, the Company obtained an effective statement from the Capital Market Supervisory Agency to conduct a public offering of 1,296,296,000 of its shares, which comprised 475,309,000 shares divested by the Government of the Republic of Indonesia, and 820,987,000 newly issued shares. The Company’s shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 15, 2003.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 13, 2008, which was notarised in Notarial Deed No. 49 of Fathiah Helmi, S.H., dated June 13, 2008, the shareholders ratified the stock split of the nominal value of the Series A Dwiwarna share and Series B shares from IDR500 per share to IDR100 per share resulting in an increase in the Company’s authorised shares from 14 billion shares to 70 billion shares and an increase in the issued and paid-up capital from 4,593,437,193 shares to 22,967,185,965 shares.

On May 12, 2014, the Company issued and listed USD1,350,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. On May 16, 2024, the Company repaid all of its bonds (Note 20a).

On April 26, 2017, PT Saka Energi Indonesia (“SEI”), the Company’s subsidiary, issued and listed USD625,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due in 2024 on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. On May 6, 2024, SEI repaid all of its bonds (Note 20b).

c. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Group’s consolidated financial statements have been completed and authorized to be issued by the Company’s Board of Directors on the date of the Board of Directors’ Statement Letter.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the percentage of ownership of the Company, either directly or indirectly, and total assets of the subsidiaries is as follows:

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*
Dimiliki langsung oleh Perusahaan/ *Held directly by the Company*					
PT Saka Energi Indonesia ("SEI") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2011	1.209	1.434
PT PGN LNG Indonesia ("PLI") Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Indonesia. 26 Juni/*June* 2012	100,00%	100,00%	2014	604	617
PT Permata Graha Nusantara ("PGN MAS") Pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan/ *Management and leasing buildings and equipment* Indonesia, 17 Juni/*June* 2014	100,00%	100,00%	2014	58	92
PT PGAS Solution ("PGASSOL") Konstruksi/*Construction* Indonesia, 6 Agustus/*August* 2009	99,91%	99,91%	2010	116	129
PT Gagas Energi Indonesia ("GEI") Niaga gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 27 Juni/*June* 2011	100,00%	100,00%	2012	80	73
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASKOM") Telekomunikasi/ *Telecommunication*, Indonesia.10 Januari/*January* 2007	99,93%	99,93%	2009	47	44
PT Pertamina Gas ("Pertagas") Distribusi minyak dan gas/ *Distribution of oil and natural gas* Indonesia, 23 Februari/*February* 2007	51,00%	51,00%	2007	2.409	2.389

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL (continued)***

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / ***d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)***

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*
Dimiliki melalui Pertagas/ *Held through Pertagas*					
PT Pertagas Niaga ("PTGN") Perniagaan gas bumi/ *Trading of natural gas* Indonesia, 23 Maret/*March* 2010	99,00%	99,00%	2010	190	180
PT Perta Arun Gas ("PAG") Pengolahan LNG/ *Processing of LNG* Indonesia, 18 Maret/*March* 2013	99,95%	99,95%	2013	287	270
Dimiliki melalui PGASKOM/ *Held through PGASKOM*					
PGAS Telecommunications International Pte. Ltd. ("PTI") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Singapura/*Singapore*, 24 November/*November* 2009	100,00%	100,00%	2010	4	4
PT Telemedia Dinamika Sarana ("TDS") Jasa telekomunikasi/ *Telecommunications services* Indonesia, 2 Oktober/*October* 2002	90,00%	90,00%	2013	6	5
Dimiliki melalui PGN MAS/ *Held through PGN MAS*					
PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") Transmisi gas/*Gas transmission* Indonesia, 23 Juli/*July* 2013	80,00%	80,00%	2015	15	79
Dimiliki melalui PGASSOL/ *Held through PGASSOL*					
PT Solusi Energy Nusantara ("Sena") Enginering, konsultasi dan jasa/ *Engineering, consultancy and services*, Indonesia, 20 April 2015	99,90%	99,90%	2016	12	13
Dimiliki melalui GEI/ *Held through GEI*					
PT Widar Mandripa Nusantara ("Widar") Jasa kelistrikan/*Electricity service* Indonesia, 29 Juli/*July* 2015	99,99%	99,99%	2016	7	7
Dimiliki melalui PLI/ *Held through PLI*					
PT Lamong Nusantara Gas Pengolahan *Liquefied Natural Gas ("LNG")/Processing of LNG* Surabaya, 1 Oktober/*October* 2019	51,00%	51,00%	2)	9	10
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI*					
Saka Indonesia Pangkah B.V. ("SIPBV") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 3 Agustus/ *August* 2007	100,00%	100,00%	2007	130	205
PT Saka Energi Muara Bakau ("SEMB") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 10 Februari/ *February* 2014	100,00%	100,00%	2017	302	354

1. UMUM (lanjutan) / ***1. GENERAL (continued)***

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / ***d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)***

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*
Dimiliki melalui SEI/*Held through SEI* (lanjutan/*continued)*					
PT Saka Ketapang Perdana (“SKP”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 17 Oktober/ *October* 2012	99,98%	99,98%	2015	98	96
PT Saka Energi Internasional (“SI”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 20 Februari/ *February* 2014	99,99%	99,99%	2014	1)	1)
Saka Energi Overseas Holding B.V. (“SEOHBV”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands*, 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2017	1)	2)
PT Saka Bangkanai Klemantan (“SBK”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 11 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	2016	59	71
PT Saka Energi Sumatera (“SES”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 24 September 2012	99,95%	99,95%	2014	1)	1)
PT Saka Indonesia Sesulu (“SIS”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 7 Maret/*March* 2013	99,50%	99,50%	4)	124	108
PT Saka Energi Bangkanai Barat (“SEBB”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 12 Mei/*May* 2014	100,00%	100,00%	2)	10	10
PT Saka Energi Investasi (“SEINVS”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 18 Juli/*July* 2014	99,99%	99,99%	4)	1)	2)
PT Saka Energi Wokam (“SEW”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 14 September 2015	100,00%	100,00%	2)	1)	2)
Dimiliki melalui SEOHBV/ *Held through SEOHBV*					
Saka Energi Exploration Production B.V. (“SEEPBV”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Belanda/*Netherlands,* 24 Desember/ *December* 2013	100,00%	100,00%	2015	41	41

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan) / *d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)*

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*
Dimiliki melalui SEEPBV/ *Held through SEEPBV*					
Saka Energi Muriah Limited (“SEML”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Virgin Britania Raya/ *British Virgin Islands*, 15 Juli/ *July* 2009	100,00%	100,00%	2015	63	63
Dimiliki melalui SI/*Held through SI*					
PT Saka Energi Yamdena Barat (“SEYB”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 26 Mei/*May* 2017	100,00%	100,00%	2)	1	5
PT Saka Energi Sepinggan (“SEP”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 1 April 2015	100,00%	100,00%	2)	2	3
PT Saka Eksplorasi Ventura (“SEV”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 Desember/ *December* 2016	100,00%	100,00%	2)	1)	2)
PT Saka Eksplorasi Baru (“SEB”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 30 Agustus/ *August* 2016	100,00%	100,00%	2)	1)	2)
PT Saka Eksplorasi Timur (“SET”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 September 2016	100,00%	100,00%	2)	2	2)
Saka Energi Asia Pte. Ltd. (“SEAPL”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	289	217
PT Saka Energi Investama (“SEINV”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas* Indonesia, 9 November 2017	100,00%	100,00%	2)	1)	2)
PT Saka Energi Sepinggan Timur (“SEST”) Eksplorasi minyak dan gas/ *Exploration of oil and gas* Indonesia, 15 November 2019	100,00%	100,00%	2)	1)	2)
Saka Energy Fasken LLC (“Fasken”) Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Amerika Serikat/*USA*, 25 April 2014	100,00%	100,00%	2014	141	174

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

Entitas anak, kegiatan usaha, kedudukan dan tanggal pendirian/ *Subsidiaries, business activities, domicile and date of establishment*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun usaha komersial dimulai/*Year commercial operations started*	Jumlah aset dalam juta sebelum jurnal eliminasi/*Total assets in million before elimination entries*	
	31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*		31 Desember/ *December 31, 2024*	31 Desember/ *December 31, 2023*
Dimiliki melalui SIPBV/ *Held through SIPBV*					
Saka Indonesia Pangkah Limited ("SIPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Inggris/*United Kingdom*, 5 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	405	461
Saka Pangkah LLC ("SPLLC") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Kepulauan Cayman/*Cayman Islands*, 12 Juli/*July* 1995	100,00%	100,00%	2007	70	60
Dimiliki melalui SEAPL/ *Held through SEAPL*					
Saka Energi East Kalimantan Pte. Ltd. ("SEEKPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/ *June* 2016	100,00%	100,00%	2016	38	43
Saka Energi Sanga Star Pte. Ltd. ("SESSPL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Singapura/*Singapore*, 15 Juni/*June* 2016	100,00%	100,00%	2016	11	13
Dimiliki melalui SEEKPL/ *Held through SEEKPL*					
Saka Energi Sanga-sanga Ltd. ("SESL") Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/*Exploration and production of oil and gas* Persemakmuran Bahama/ *Commonwealth of The Bahamas*, 18 November 1983	100,00%	100,00%	1983	39	77
Dimiliki melalui SEINVS/*Held through SEINVS*					
Saka Energi International Ventures Ltd. ("SEIV") Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 14 Februari/ *February* 2018	100,00%	100,00%	2018	164	164
Dimiliki melalui SEINVS dan PLI/ *Held through SEINVS and PLI*					
Bentang Energi Indonesia Ltd. ("BEI")[3] Perdagangan minyak dan gas/ *Trading of oil and gas* Hong Kong, 31 Januari/ *January* 2018	100,00%	100,00%	2018	[1]	[1]

Keterangan:
1) Total aset di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat.
2) Belum beroperasi komersial.
3) PLI dan SEINVS masing-masing memiliki saham BEI sebesar 75% dan 25% sehingga kepemilikan efektif Grup atas BEI adalah 100%.
4) Dalam tahap eksplorasi atau pengembangan

Remarks:
1) The total assets are below one million United States dollar.
2) Not yet started commercial operations.
3) PLI and SEINVS own 75% and 25% interests in BEI's shares, respectively, therefore the Group's effective ownership in BEI is 100%.
4) In exploration and development stage

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Grup mempunyai kerjasama operasi minyak dan gas sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

The Group has interests in oil and gas joint operations as follow:

Wilayah Kerja/ *Working Area*	Negara/ *Country*	Tanggal Efektif Kontrak/ *Effective Date of Contract*	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak/ *Expiry Date of Contract*	Hak kepemilikan (%)/ *Participating interest (%)* 31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
Blok/*Block* Bangkanai	Indonesia	30 Desember 2005/ *December 30, 2005*	30 Desember 2035/ *December 30, 2035*	30%	30%
Blok/*Block* Ujung Pangkah	Indonesia	8 Mei 1996/ *May 8, 1996*	8 Mei 2026/ *May 8, 2026*	100%	100%
Blok/*Block* Ketapang	Indonesia	11 Juni 1998/ *June 11, 1998*	11 Juni 2028/ *June 11, 2028*	19,4%	19,4%
Blok/*Block* Sesulu Selatan	Indonesia	5 Mei 2009/ *May 5, 2009*	5 Mei 2039/ *May 5, 2039*	100%	100%
Blok/*Block* Fasken	Amerika Serikat/ *United States of America*	15 Juli 2014/*July 15, 2014*	Produksi selesai/ *When production ends*	36%	36%
Blok/*Block* Muriah	Indonesia	20 Mei 1991/ *May 20, 1991*	31 Desember 2026/*December 31, 2026*	100%	100%
Blok/*Block* Bangkanai Barat	Indonesia	15 Mei 2013/ *May 15, 2013*	15 Mei 2043/ *May 15, 2043*	30%	30%
Blok/*Block* Muara Bakau	Indonesia	30 Desember 2002/ *December 30, 2002*	30 Desember 2032/ *December 30, 2032*	11,67%	11,67%
Blok/*Block* Pekawai	Indonesia	14 Mei 2018/*May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Yamdena Barat	Indonesia	14 Mei 2018/ *May 14, 2018*	14 Mei 2048/ *May 14, 2048*	100%	100%
Blok/*Block* Sangkar	Indonesia	30 Mei 2023/ *May 30, 2023*	30 Mei 2053/ *May 30, 2053*	100%	100%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") telah mengeluarkan persetujuan pengalihan hak kepemilikan Wilayah Kerja ("WK") Ketapang porsi Perusahaan dari 20% menjadi 19,4% melalui surat nomor T-669/MG.04/MEM.M/2022 tanggal 21 November 2022. Pada tanggal 26 Desember 2022, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas"), melalui surat nomor SRT-0053/SKKIE0000/2022/S9, mengesahkan pengalihan hak kepemilikan tersebut.

The Minister of Energy and Mineral Resources ("EMR") has approved the transfer of participating interest in Ketapang Working Area ("WK") portion of the Company from 20% to be 19.4% through letter No. T-669/MG.04/MEM.M/2022 dated November 21, 2022. On December 26, 2022, the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas"), through its letter No. SRT-0053/SKKIE0000/2022/S9, approved the transfer of this participating interest.

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

PT Petrogas Jatim Sampang Energi selaku entitas penerima hak yang dialihkan, telah menandatangani *Side Letter* terhadap Perjanjian *Farmout* Wilayah Kerja Ketapang pada tanggal 6 Juni 2023.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan melalui entitas anak SET telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil ("PSC") atas pengelolaan minyak dan gas di Wilayah Kerja Sangkar, Jawa Timur. PSC tersebut telah disetujui oleh Menteri ESDM tanggal 19 Juni 2023.

Informasi mengenai ventura bersama dan entitas asosiasi yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

PT Petrogas Jatim Sampang Energi as the interest receiving entity, has signed a Side Letter to the Farmout Agreement of Ketapang Working Area on June 6, 2023.

On May 30, 2023, the Company through SET has signed a Production Sharing Contract ("PSC") for oil and gas operations in Sangkar Block, East Java. The PSC was approved by the Minister of EMR on June 19, 2023.

Information about joint ventures and associates entities in which the Group has an interest as of December 31, 2024 and December 31, 2023 is as follows:

Ventura bersama dan entitas asosiasi/ *Joint ventures and associate entities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Tahun komersial dimulai dan domisili/ *Year commercial operations started and domicile*	Kegiatan usaha/ *Business activities*
	31 Desember/ December 31, *2024*	31 Desember/ *December 31,* 2023		
Ventura bersama/ *Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia ("Transgasindo")	59,87%	59,87%	2002, Jakarta	Transportasi gas bumi melalui jaringan pipa transmisi/*Transportation of natural gas through transmission pipelines*
PT Permata Karya Jasa ("Perkasa")	60,00%	60,00%	2015, Jakarta	Jasa perbengkelan, pembinaan, penyaluran jasa tenaga kerja/*Workshop services, guidance, distribution of labour services*
PT Nusantara Regas ("Regas")	40,00%	40,00%	2012, Jakarta	Pengelolaan fasilitas *Floating Storage Regasification Terminal* ("FSRT") termasuk Pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT/*Managing Floating Storage Regasification Terminal ("FSRT") facilities including purchase of LNG and marketing of output from the operations of FSRT facilities*
PT Perta-Samtan Gas ("PSG")	66,00%	66,00%	2008, Banyuasin	Pengolahan *Liquefied Petroleum Gas* ("LPG")/ *LPG processing*
PT Perta Daya Gas ("PDG")	65,00%	65,00%	2012, Jakarta	Pengolahan LNG dan *Compressed Natural Gas* ("CNG")/*LNG and CNG processing*
Kerja Sama Operasi antara GEI dan PT Jakarta Utilitas Propertindo ("KSO GAGAS–JUP")	51,00%	51,00%	2015, Jakarta	Pemanfaatan Stasiun Pengisian Bahan Gas ("SPBG")/*Fuel Gas Filling Station utilization*
PT Padoma Global Neo Energi Indonesia ("PGNE")	30,00%	30,00%	2018, Papua	Operasi, distribusi, dan transportasi LNG/*LNG operation, distribution, and transportation*
Entitas asosiasi/*Associate*				
PT Gas Energi Jambi ("GEJ")	40,00%	40,00%	1) Jambi	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*
PT Baskara Asri Ghas	0,14%	0,14%	2012, Banten	Transportasi dan distribusi gas bumi/ *Transportation and distribution natural gas*

Keterangan:
1) Sudah tidak beroperasi.

Remarks:
1) No longer in operation

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak, Pengaturan Bersama, dan Entitas Asosiasi (lanjutan)

Grup mengakui keberadaan hak keikutsertaan yang substantif dari pemegang saham lain Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG dan KSO GAGAS–JUP yang menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki hak yang setara dengan Grup dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham lainnya, Grup hanya memiliki pengaturan bersama atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting meskipun Perusahaan memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Mei 2024 dan telah menerima perolehan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0212762 tanggal 11 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiaries, Joint Arrangements, and Associate Entities (continued)

The Group acknowledged the existence of substantive participating rights held by the other shareholders of Transgasindo, Perkasa, PSG, PDG and KSO GAGAS–JUP which provide such shareholders with the same rights as the Group over the significant financial and operating policies. Considering the other shareholders' rights, the Group only has joint control over the financial and operating policies even though the Company has more than 50% share ownership.

e. Boards of Commissioners, Directors and Employees

As of December 31, 2024, based on the Annual General Meeting of Shareholders on May 30, 2024 which was notarised in the Notarial Deed No.76 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 30, 2024 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-AH.01.09-0212762 dated June 11, 2024, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	*President Commisioner*
Komisaris Independen	Dini Shanti Purwono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Christian H. Siboro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Abdullah Aufa Fuad	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Tony Setio Boedi Hoesodo	*Independent Commissioner*
Komisaris	Luky Alfirman	*Commissioner*
Komisaris	Warih Sadono	*Commissioner*

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arief Setiawan Handoko	*President Director*
Direktur Keuangan	Fadjar Harianto Widodo	*Director of Finance*
Direktur Komersial	Ratih Esti Prihatini	*Director of Commercial*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Harry Budi Sidharta	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Rachmat Hutama	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Rosa Permata Sari	*Director of Strategy and Business Development*
Direktur Manajemen Risiko	Arief Kurnia Risdianto	*Director of Risk Management*

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023, para pemegang saham menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

As of December 31, 2023, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 14, 2023, the shareholders approved the members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Amien Sunaryadi	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Dini Shanti Purwono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Christian H. Siboro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Abdullah Aufa Fuad	*Independent Commissioner*
Komisaris	Luky Alfirman	*Commissioner*
Komisaris	Warih Sadono	*Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arief Setiawan Handoko	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Fadjar Harianto Widodo	*Director of Finance and Risk Management*
Direktur *Sales* dan Operasi	Ratih Esti Prihatini	*Director of Sales and Operation*
Direktur Infrastruktur dan Teknologi	Harry Budi Sidharta	*Director of Infrastructure and Technology*
Direktur SDM dan Penunjang Bisnis	Beni Syarif Hidayat	*Director of Human Resources and Business Support*
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis	Rosa Permata Sari	*Director of Strategy and Business Development*

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

Ketua	Dini Shanti Purwono	*Chairman*
Anggota	Abdullah Aufa Fuad	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi	*Member*
Anggota	Rini Yulius	*Member*
Anggota	Yan Rahadian	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2023, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the members of the Company's Audit Committee were as follows:

Ketua	Dini Shanti Purwono	*Chairman*
Anggota	Abdullah Aufa Fuad	*Member*
Anggota	Fajar Ariwinadi	*Member*
Anggota	Rini Yulius	*Member*
Anggota	Luki Karunia	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, jumlah karyawan tetap Grup masing-masing adalah 3.322 orang dan 3.316 orang.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, the Group had a total of 3,322 employees and 3,316 employees, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan SAK Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2e untuk informasi mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS").

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian FAS, including Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

Figures in the consolidated financial statements are stated in United States dollar, unless otherwise specified. Refer to Note 2e for the information on the Group's functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan standar akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup:

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Terdapat 4 (empat) SAK yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 SAK Internasional,
2. Pilar 2 SAK Indonesia,
3. Pilar 3 SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)/SAK Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dan
4. Pilar 4 SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian FAS requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting standards

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that do not have significant impact to the consolidated financial statements of the Group:

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There are 4 (four) FAS that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International FAS,*
2. *Pillar 2 Indonesian FAS,*
3. *Pillar 3 Indonesian FAS for Private Entities (PE)/Indonesian FAS for Entities Without Public Accountability (EWPA), and*
4. *Pillar 4 Indonesian FAS for Micro, Small and Medium Entities (MSME).*

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi (lanjutan)

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”).

Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1): Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari perjanjian pinjaman yang diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting standards (continued)

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAK IAI”).

Amendment of PSAK 201 (formerly PSAK 1): Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity’s right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan standar akuntansi (lanjutan)

Amendemen PSAK 116 (dahulu PSAK 73): Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amendemen PSAK 116: Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amendemen PSAK 207 (dahulu PSAK 2) dan PSAK 107 (dahulu PSAK 60): Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

Amendment of PSAK 116 (formerly PSAK 73): Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 116: Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

Amendment of PSAK 207 (formerly PSAK 2) and PSAK 107 (formerly PSAK 60): Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 207 and PSAK 107 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Mulai berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

Amendemen PSAK 221 (dahulu PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amendemen tersebut mengklarifikasi bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat ditukarkan dan bagaimana entitas harus menentukan nilai tukar spot ketika kemampuan tukarnya kurang, serta mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari adanya mata uang yang bisa ditukar. Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan dapat diterapkan lebih dini.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

PSAK 117 (dahulu PSAK 74): Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104 (dahulu PSAK 62): Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 117 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71) dan PSAK 115 (dahulu PSAK 72) pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 117. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Accounting standards issued but not yet effective

Effective beginning on or after January 1, 2025

Amendment PSAK 221 (formerly PSAK 10): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The amendments clarify how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking, as well as require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of a currency not being exchangeable. The amendments will be effective on January 1, 2025 and earlier application is permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 117 will replace PSAK 104 (formerly PSAK 62): Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 117 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 109 (formerly PSAK 71) and PSAK 115 (formerly PSAK 72) on or before the date of initial application of PSAK 117. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi

i. Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan, dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (lanjutan)

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, at the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquirer is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognised in accordance with PSAK 109: Financial Instruments, in profit or loss and other comprehensive income. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan nonpengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK 338 (dahulu PSAK 38) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh disajikan sebagai tambahan modal disetor. Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal tahun komparatif penyajian pelaporan keuangan.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas dalam Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquirer and the acquisition-date fair value of any previously held interest in the acquire over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss and other comprehensive income.

A business combination transaction between entities under common control is accounted for in accordance with PSAK 338 (formerly PSAK 38) "Business Combination of Entities Under Common Control". The difference between the transfer price paid and the carrying value of net assets acquired is presented as additional paid-in capital. The financial statement items of the combined entities are consolidated to the Group's consolidated financial statements as if the combination had occurred from the beginning of the comparative financial reporting year presented.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between companies within the Group are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary, the amounts reported by subsidiaries are adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang memiliki mata uang fungsional selain dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* ("JISDOR") pada akhir periode pelaporan. Di sisi lain, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata penutup JISDOR ketika periode laba-rugi.

Selisih yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat disajikan dalam akun "Penghasilan komprehensif lain - Selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas anak" sebagai bagian dari komponen ekuitas lainnya pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

ii. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

i. Subsidiaries (continued)

For purposes of consolidating subsidiaries using currency other than United States dollar as functional currency, assets and liabilities are translated using the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ("JISDOR") closing rate at the end of the reporting period. On the other hand, revenue and expenses are translated using the average JISDOR closing rate during the profit and loss period.

The difference arising from the translation of subsidiaries' financial statements into United States dollar is presented as "Other comprehensive income - Difference in foreign currency translation of subsidiaries' financial statements" account as part of other components of equity in the equity section of the consolidated statements of financial position.

ii. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss and other comprehensive income. The initial carrying amount is the fair value for the remeasurement purposes of the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This means amounts previously recognised in other comprehensive income might be reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Investasi Grup pada entitas asosiasi juga termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasikan ke laba rugi.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian laba dari ventura bersama” di laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of profit or loss and other comprehensive income. The Group’s investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

The Group’s share of post-acquisition profits or losses is recognised in profit or loss, and its share of post acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the difference to “share of profit from joint ventures” in profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group’s financial statements only for the portion of other investors' interests in the associates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

iv. Entitas asosiasi (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

v. Pengaturan bersama

Menurut PSAK 111 (dahulu PSAK 66), pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki operasi bersama dan ventura bersama.

(1) Operasi bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama dalam sebuah pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama bagian kepemilikan dalam operasi bersama, Grup mengakui:

1) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
2) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
3) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
4) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
5) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

iv. Associates (continued)

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in profit or loss.

v. Joint arrangements

Under PSAK 111 (formerly PSAK 66) investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor. At the reporting date, the Group has joint operations and joint ventures.

(1) Joint operations

A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties own joint control of the arrangement that have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.

The Group has interests in several joint operations whereby the Group is included as a party which has joint control of a joint operation (joint operator), or as a party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation.

In relation to its interests in joint operations, the Group recognises its:

1) Assets, including its share of any assets held jointly;
2) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
3) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
4) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
5) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

v. Pengaturan bersama (lanjutan)

(1) Operasi bersama (lanjutan)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

(2) Ventura bersama

Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of consolidation (continued)

v. Joint arrangements (continued)

(1) Joint operations (continued)

When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognise gains and losses resulting from such transaction only for the portion of the other parties' interests in the joint operation.

(2) Joint ventures

Joint ventures are accounted for using the equity method. Under the equity method, interests in joint ventures are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated for the portion of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing

Masing-masing entitas dalam Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya adalah dolar Amerika Serikat ("USD" atau "dolar AS") dan memutuskan mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian menggunakan dolar AS.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam pelaksanaan.

Nilai tukar yang digunakan adalah kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign currency translation

Each entity within the Group considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. The Company determined that its functional currency is the United States dollar ("USD" or "US dollar") and decided that the presentation currency for these consolidated financial statements is the US dollar.

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss, except for foreign exchange differentials that can be attributed to qualifying assets which are capitalised to construction in progress.

The exchange rates prevailing at the date of statement of financial position as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
1 dolar AS/JPY (nilai penuh)	157,84	140,93	*1 US dollar/JPY (full amount)*
1 dolar AS/Rupiah (nilai penuh)	16.157	15.439	*1 US dollar/Rupiah (full amount)*
1 dolar AS/SGD (nilai penuh)	1,36	1,32	*1 US dollar/SGD (full amount)*

f. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115 (dahulu PSAK 72).

f. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115 (formerly PSAK 72).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss ("FVTPL").*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain jangka panjang.

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL adalah investasi pada instrumen utang yang dicatat pada akun "Aset Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain".

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 (dahulu PSAK 50) dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, restricted cash, short-term investment, account receivables, other receivables, finance lease receivables, and other non-current receivables.

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognised in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognised in other comprehensif income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognised in OCI is recycled to profit or loss.

The Group's financial asset at FVOCI is investments in debt securities recorded under "Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income" account.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 (formerly PSAK 50) and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognised as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk investasi ekuitas yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas diakui sebagai pengurang nilai investasi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments) (continued)

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognised in the statement of profit or loss.

This category includes equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on equity investments are recognized as deduction of investment value when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan *'pass-through'*, dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 360 hari dari tanggal jatuh tempo.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial asets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 360 days past due.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas (Sangat Baik dan Baik) oleh Fitch, S&P, dan Moody's, oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya. Grup menggunakan peringkat dari Fitch, S&P, dan Moody's baik untuk menentukan apakah risiko kredit dalam instrumen utang telah meningkat secara signifikan dan juga untuk mengestimasi KKE.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 360 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial asets (continued)

Impairment (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category (Very Good and Good) by the Fitch, S&P, dan Moody's and, therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. The Group uses the ratings from the Fitch, S&P, dan Moody's both to determine whether the debt instrument has significantly increased in credit risk and to estimate ECLs.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 360 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade and other payables, accrued liabilities, bank loans, bonds payable, and lease liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109 (formerly PSAK 71). Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost

i) Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas kecil, kas pada bank, deposito berjangka dan investasi jangka pendek lainnya dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas" melainkan disajikan pada akun "Dana dibatasi penggunaannya". Deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in bank, time deposits and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

Restricted cash in banks and time deposits used for collateral are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents" instead presented in "Restricted Cash" account. Time deposits with original maturities of more than three months are presented as short-term investment.

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual atau diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang, piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup. Sesuai peraturan OJK, piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada kondisi tertentu pada piutang lain-lain dari pihak berelasi untuk disajikan sebagai aset lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

h. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods and services sold or provided in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group. In accordance with OJK regulation, other receivables from related parties are classified as non-current assets unless there are specific circumstances on other receivables from related parties to be presented as current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost, less any provision for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

h. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban lain-lain". Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui pada "Pendapatan lain-lain" pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Trade and other receivables (continued)

Collectibility of trade and other receivables are reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amount of the impairment loss is charged to profit or loss as "Other expenses". When a trade and other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are recognised on "Other income" in profit or loss.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya bahan baku dan perlengkapan, termasuk suku cadang, pemeliharaan dan alat pengeboran yang digunakan untuk operasi dinilai dengan biaya rata-rata tertimbang. Minyak mentah dan gas bumi yang diproduksi dan tidak dijual tidak dicatat sebagai persediaan karena hak atas minyak tidak berpindah ke Kontraktor sampai minyak diangkat atau dimuat ke kapal atau gas ditransfer ke dalam pipa. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. The cost of materials and supplies, which include spare parts, consumables, maintenance and drilling tools used for ongoing operations is valued at the weighted average. Crude oil and natural gas produced and not sold is not recorded as inventory because the title does not pass to the Contractor until the oil is lifted or off-loaded into the crude tankers or the gas is transferred into pipelines. Allowance for inventory obsolescence is provided based on periodic review of the condition of the inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Lihat Catatan 2l terkait kebijakan kapitalisasi dan depresiasi atas properti minyak dan gas hulu.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Umur manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes the cost of replacing part of the property, plant and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Furthermore, when a significant inspection is carried out, the cost of the inspection is recognised in the carrying amount of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are met. All maintenance and repair costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss when incurred.

See Note 2l regarding capitalisation and depreciation policies for upstream oil and gas properties.

Fixed assets except land, are depreciated using the straight-line method.

The useful lives of the assets are as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan dan prasarana	20	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	16 - 30	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*Vehicles*
Peralatan kantor	4 - 8	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	4 - 8	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	16	*Uninstalled assets*

Grup menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116 (dahulu PSAK 73), Sewa. Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216 (dahulu PSAK 16), Aset Tetap.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent the underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under PSAK 116 (formerly PSAK 73), Leases. If land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies PSAK 216 (formerly PSAK 16), Fixed Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode/tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perusahaan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset kerjasama operasi dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is presented under "Fixed Assets" and is stated at cost. The accumulated cost of the asset constructed is transferred to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

Joint operation assets are the Company's land used to carry out the joint operation activities. Office buildings obtained as compensation in the joint operation and the respective unearned income are recognised when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Unearned income is recognised over the period of the joint operation.

Joint operation assets are stated at the estimated recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognised as a loss in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya telah selesai secara substansial.

Aset tetap dinilai penurunan nilainya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada Catatan 2m.

k. Aset eksplorasi dan evaluasi

Grup menerapkan PSAK 106 (dahulu PSAK 64): Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, yang menetapkan bahwa beban eksplorasi dan evaluasi termasuk biaya geologi dan geofisika, biaya pengeboran sumur eksplorasi termasuk biaya pengeboran sumur tes stratigrafi tahap eksplorasi dan biaya lainnya yang terkait untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi dikapitalisasi dan disajikan terpisah sebagai akun “Aset Eksplorasi dan Evaluasi” di laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed assets (continued)

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognised as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalisation of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalisation of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets for their intended use are substantially completed.

Fixed assets are assessed for impairment in line with the policy set out in Note 2m.

k. Exploration and evaluation assets

The Group adopted PSAK 106 (formerly PSAK 64): Exploration for and Evaluation Activity of Mineral Resources Mining, which allows exploration and evaluation expenditures, including geological and geophysical costs, costs of drilling exploratory wells, including in the stratigraphic test well drilling costs of exploration stage and other costs related to evaluating the technical feasibility and commerciality of extraction of oil and gas, to be capitalised and presented separately as "Exploration and Evaluation Assets” in the consolidated statements of financial position.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

k. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya eksplorasi dan evaluasi pada suatu *area of interest* dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut dapat ditangguhkan pembebanannya, dengan basis *area of interest*, apabila izin untuk melakukan eksplorasi di *area of interest* tersebut masih berlaku dan memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

- Kegiatan eksplorasi dan evaluasi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut; atau

- Biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest* atau melalui penjualan *area of interest.*

Aset eksplorasi dan evaluasi yang ditangguhkan terdiri dari biaya-biaya yang terjadi setelah izin eksplorasi diperoleh dan sebelum dimulainya pengembangan *area of interest* antara lain mencakup akumulasi biaya yang terkait dengan penyelidikan umum, administrasi dan perizinan, dan geologi dan geofisika.

Aset eksplorasi dan evaluasi dinilai untuk penurunannya pada saat terdapat bukti dan keadaan yang menunjukkan bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke properti minyak dan gas pada saat kelayakan teknis dan komersialitas dari minyak dan gas yang diekstraksi tersebut dapat dibuktikan.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka Grup akan mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK 236 (dahulu PSAK 48), Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Exploration and evaluation assets (continued)

Costs of exploration and evaluation in an area of interest are charged to profit or loss as incurred, unless these costs can be deferred, on an area of interest basis, if the permit to carry out exploration activities in the area of interest is current and meets one of the following conditions:

- *Exploration and evaluation activities as of the date of the consolidated financial statements have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of whether economically recoverable reserves exist, and active and significant activities in the related area of interest are still ongoing; or*

- *These costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, through its sale.*

Exploration and evaluation assets include costs incurred after obtaining the exploration license and prior to commencement of development of the area of interest and includes accumulated costs associated with general investigation, administration and licensing, and geological and geophysical expenditure.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when evidence and circumstances indicate that the carrying amount of the asset may exceed its recoverable amount. Exploration and evaluation assets are reclassified to oil and gas properties at the time the technical feasibility and commerciality of the extraction of the oil and gas can be proved.

The recoverability of exploration and evaluation assets depends on the successful development and commercial exploitation in such an area (area of interest). Exploration and evaluation assets are tested for impairment if certain facts and circumstances indicate that the carrying amount of the assets may exceed the recoverable value. In such conditions, the Group will measure, present and disclose the impairment loss as required under PSAK 236 (formerly PSAK 48), Impairment of Assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

l. Properti minyak dan gas

1. Aset pengembangan

Biaya-biaya pengeboran sumur dalam pengembangan termasuk biaya pengeboran sumur pengembangan yang tidak menghasilkan dan sumur pengembangan stratigrafi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian sumur pengembangan hingga proses pengeboran selesai. Pada saat pengembangan sumur telah selesai pada lapangan tertentu, maka sumur tersebut akan ditransfer sebagai sumur produksi.

2. Aset produksi

Aset produksi merupakan agregasi aset eksplorasi dan evaluasi dan pengeluaran pengembangan (termasuk pembayaran untuk memperoleh *participating interests*) yang berhubungan dengan sumur berproduksi.

m. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap untuk digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Oil and gas properties

1. Development assets

The costs of drilling development wells, including the costs of drilling unsuccessful development wells and development-type stratigraphic wells, are capitalised as part of development well assets under construction until drilling is completed. When the development well is completed on a specific field, it is transferred to production wells.

2. Production assets

Production assets are aggregated into exploration and evaluation assets, development expenditures associated with the producing wells and production facilities (including payments to acquire participating interests) associated with the producing wells.

m. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life – for example, goodwill or intangible assets not ready for use – are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses on assets other than goodwill is recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

n. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

o. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar atas pembelian gas yang telah diperoleh dari pemasok. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar atas barang dan jasa selain pembelian gas yang dilakukan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha dan utang lain-lain tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

o. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for gas purchased from suppliers. Other payables are obligations for goods or services other than gas purchases that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade and other payables are classified as short-term liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as long-term liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Pinjaman (lanjutan)

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Borrowings (continued)

Fees paid to obtain loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

q. Leases

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Apabila Grup menganalisis bahwa pemasok memiliki *substantive substitution rights*, maka Grup menentukan bahwa Grup tidak memiliki hak untuk menggunakan aset identifikasian. Sehingga Grup tidak mengakui aset hak guna.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
  1. *The Group has the right to operate the asset; or*
  2. *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

If The Group analyzes that the supplier has substantive substitution rights, The Group determines that The Group does not have the right to use the identified asset. Therefore, The Group does not recognize the right-of-use asset.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if both:
- *the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai Pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Seluruh sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Ketika suatu kontrak mencakup komponen sewa dan non-sewa, Grup menerapkan PSAK 115 untuk mengalokasikan imbalan berdasarkan kontrak bagi setiap komponen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Lease modification (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *determines the lease term of the modified lease;*
- *remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
- *decreases the carrying amount of the right of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

The Group as a Lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as finance or operating leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

When a contract includes lease and non-lease components, the Group applies PSAK 115 to allocate the consideration under the contract to each component.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Sewa pembiayaan

Pada saat aset disewakan sebagai sewa pembiayaan, maka nilai kini dari pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Perbedaan antara piutang kotor dan nilai kini dari piutang diakui sebagai pendapatan keuangan yang belum direalisasikan.

Metode untuk mengalokasikan penerimaan kotor ke periode akuntansi disebut sebagai "metode aktuarial". Metode aktuarial mengalokasikan sewa antara pendapatan keuangan dan pembayaran kembali dari modal di setiap periode akuntansi dimana pendapatan keuangan akan muncul sebagai tingkat imbal balik tetap pada investasi bersih penyewa di dalam suatu sewa.

Sewa operasi

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

r. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Grup memberikan imbalan manfaat pasti sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan imbalan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan peraturan ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Leases (continued)

The Group as a lessor (continued)

Finance lease

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognised as unearned finance income.

The method for allocating gross earnings to accounting periods is referred to as the "actuarial method". The actuarial method allocates rentals between finance income and repayment of capital in each accounting period in such a way that finance income will emerge as a constant rate of return on the lessors net investment in the lease.

Operating lease

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line basis over the lease term.

r. Employee benefits

i. Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

ii. Pension benefits and other post-employment benefits

The Group provides defined benefits in accordance with the Collective Labour Agreement ("CLA"), which are higher than those required under prevailing regulations related to manpower. Since manpower regulations and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the manpower regulations or the CLA represent defined benefit plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos pendapatan komprehensif lain pada tahun terjadinya.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statements of financial position date less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms to the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the year in which they arise.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang penghargaan, penghargaan pengabdian dan masa persiapan pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, namun pengukuran kembali atas kewajiban imbalan kerja diakui langsung sebagai beban atau pendapatan pada laba rugi.

iii. Program imbalan iuran pasti

Grup mempunyai program asuransi pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Pembayaran premi awal sekaligus dan premi periodik ditentukan berdasarkan perhitungan secara periodik yang disetujui oleh Grup dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Selisih antara premi pertanggungan dengan kontribusi karyawan ditanggung oleh Grup.

Grup juga menyediakan tambahan tunjangan kesehatan bagi para pensiunan karyawan berdasarkan perhitungan tertentu yang disetujui oleh Perusahaan dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara sebagai pengelola dana.

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, pipa dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam PSC atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Estimasi awal biaya pembongkaran aset dan restorasi area properti minyak dan gas bumi diakui sebagai komponen biaya perolehan, yang disusutkan atau dideplesikan dengan menggunakan metode satuan unit produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Employee benefits (continued)

ii. Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

The Group also provides other post-employment benefits, such as long service reward, jubilee rewards and pension preparation program. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan; however, remeasurement of the employee benefit obligation is directly recognized as expense or income in profit or loss.

iii. Defined contribution benefit program

The Group has a retirement insurance plan covering all of its qualified permanent employees. One-time initial retirement premium and periodic premium payments are based on periodic calculations agreed between the Group and the Financial Institution Pension Fund. The difference between the premium and employee contributions is covered by the Group.

The Group provides additional post-retirement health care benefits to its retired employees based on certain computations agreed between the Company and Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara as the fund manager.

s. Asset abandonment and site restoration obligation

The Group recognises its obligations for future dismantlement of assets and site restoration of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets in accordance with the provisions in the PSC or in line with applicable regulations.

The initial estimated costs for dismantlement and site restoration of oil and gas properties are recognised as part of the acquisition costs of the assets and are subsequently depreciated or depleted using the unit-of-production method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (lanjutan)

Pada umumnya, aktivitas pembongkaran aset dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas, sumur, pipa saluran dan aset terkait terjadi pada beberapa tahun di masa yang akan datang. Provisi atas liabilitas pembongkaran dan restorasi area di masa yang akan datang adalah berupa estimasi terbaik pada tanggal pelaporan keuangan atas nilai kini dari pengeluaran di masa yang akan datang untuk melaksanakan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal pelaporan. Perkiraan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area di masa yang akan datang tersebut melibatkan estimasi manajemen mengenai saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas tersebut harus dilakukan, dan juga teknologi yang akan digunakan di masa depan.

Estimasi tersebut diperiksa setiap periode/tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Penyesuaian dicerminkan dalam nilai kini atas provisi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan dilakukan penyesuaian dengan jumlah yang sama atas nilai buku aset yang bersangkutan.

Pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi diakui sebagai beban keuangan pada laba rugi.

Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dikelompokkan ke dalam arus kas terkait aktivitas operasi.

t. Modal saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Asset abandonment and site restoration obligation (continued)

In most instances, the dismantlement of assets and site restoration activities of oil and gas production facilities, wells, pipelines and related assets will occur many years in the future. The provision for future dismantlement of assets and site restoration obligations is the best estimate of the present value of the future expenditures required to undertake the dismantlement of assets and site restoration at the reporting date, based on current legal requirements. The estimate of the obligation for future dismantlement of assets and site restoration, therefore, requires management to make judgements regarding the timing of those activities, the extent of those activities required and future technologies.

Such estimates are reviewed on a periodic/annual basis and adjusted each period/year as required. Adjustments are reflected in the present value of the provision for the obligation for dismantlement of assets and site restoration with a corresponding change in the book value of the associated assets.

The unwinding of the effect of discounting the provision is recognised as a finance cost in profit or loss.

Placement of restricted cash for the funding of asset abandonment and site restoration obligations are classified as cash flows related to operating activities.

t. Share capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

t. Modal saham (lanjutan)

Ketika entitas anak Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

u. Pendapatan dan beban

Pendapatan Grup berasal dari kegiatan niaga gas bumi, jasa transmisi minyak dan gas bumi, penjualan minyak mentah, gas bumi, LPG, LNG, dan jasa lainnya.

Pendapatan dari niaga gas bumi dan jasa transmisi minyak dan gas bumi diakui pada saat gas atau minyak bumi telah didistribusikan kepada pelanggan berdasarkan pencatatan pada angka meteran. Kontrak Grup dapat dinegosiasikan dari waktu ke waktu dan harga diskon khusus dapat diberikan kepada pelanggan setelah Perjanjian Jual Beli Gas (“PJBG”) terkait yang mengatur harga diskon disepakati antara Grup dan pelanggan. Bergantung pada sifat perubahannya, Grup akan melakukan modifikasi kontrak yang ada berdasarkan komitmen volume yang disetujui sebelum dan sesudah modifikasi kontrak dan perubahan harga yang timbul dari modifikasi tersebut.

Pendapatan sehubungan dengan pengoperasian aset dan jaringan pipa transmisi diakui setelah jasa diberikan, dan diukur sebesar satuan gas yang telah diangkut selama suatu periode.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Share capital (continued)

Where the Company or any subsidiaries within the Group purchase the Company’s equity share capital (treasury stock), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes), is deducted from equity attributable to the entity’s equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the entity’s equity holders.

u. Revenue and expense

Revenues of the Group are earned from gas trading, crude oil and natural gas transmission services, sale of crude oil, natural gas, LPG, LNG, and other services.

Revenues from gas trading and oil and natural gas transmission services are recognized when natural gas or crude oil is distributed to the customer based on the meter readings. The Group’s contracts may be negotiated from time to time and special discounted prices may be given to customers after the respective Gas Sales and Purchase Agreement (“GSPA”) which governs the discounted prices is agreed between the Group and the customers. Subject to the nature of these changes, the Group accounts for modification of the existing contract based on agreed volume commitments before and after the contract modification and the price changes arising from the modification.

Revenue arising from the operation of the asset and pipeline transmission is recognised after the service is rendered and is measured based on the units of gas which have been transported during such period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dari produksi minyak mentah, gas bumi, LPG dan LNG (bersama-sama disebut sebagai hidrokarbon) diakui berdasarkan volume aktual yang dijual kepada pelanggan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada pendapatan untuk setiap perbedaan antara volume yang dijual ke pelanggan dan volume yang tidak terjual yang berhak dijual oleh Grup berdasarkan hak kepemilikannya. Pendapatan sehubungan dengan volume tersebut hanya diakui jika ada transfer output ke pelanggan Grup. Namun, jika *lifting* tidak sesuai dengan hak kepemilikan, penyesuaian dilakukan pada beban pokok pendapatan yang mencerminkan jumlah terutang/tagihan dari *partner* yang merupakan pergerakan *overlifting/underlifting*.

Perbedaan *lifting* aktual hidrokarbon menghasilkan piutang ketika *entitlements* final melebihi *lifting* (posisi *underlifting*) dan menghasilkan hutang ketika *lifting* hidrokarbon melebihi *entitlements* final (posisi *overlifting*). Volume *underlifting* dan *overlifting* dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang tahunan Minyak Mentah Indonesia (untuk minyak mentah) dan harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas yang bersangkutan (untuk gas bumi, LPG dan LNG).

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

Revenues from the production of crude oil, natural gas, LPG and LNG (together referred to as hydrocarbons) are recognised based on the actual volumes sold to customers. No adjustments are made to revenue for any differences between volumes sold to customers and unsold volumes which the Group is entitled to sell based on its participating interest. Revenue in respect of such volumes is only recognised when there is a transfer of output to the Group's customers. However, where liftings do not match participating interest, an adjustment is made to cost of revenue representing the amount due to/from partners representing overlifting/underlifting movements.

Differences between the actual liftings of hydrocarbons result in a receivable when final entitlements exceed the liftings (underlifting position) and in a payable when liftings exceed final entitlements (overlifting position). Underlifting and overlifting volumes are valued based on the annual weighted average Indonesia Crude Price (for crude oil) and the prices as determined in the respective Sale and Purchase Contracts (for natural gas, LPG and LNG).

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer which will be paid during the contract period;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan Grup dilakukan berdasarkan lima langkah analisa sebagai berikut (lanjutan):

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri *relative* diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

a. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan keuangan atas sewa diakui sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

v. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense (continued)

The Group's revenue recognition fulfils the following five steps of assessment (continued):

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

A performance obligation may be satisfied:

a. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Finance income on lease is recognized over the lease term based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the lease.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

v. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income. The management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If necessary, management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated statements of financial position. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini" dalam laba rugi. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak penghasilan - Kini".

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development)* pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 ("PMK 136/2024"). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, Grup telah menerapkan amandemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there are legally-enforceable rights to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Income tax expense - Current" in profit or loss. The Group also presents interest/penalties, if any, as part of "Income tax expense - Current".

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 ("PMK 136/2024"). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes*, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

w. Laba per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

x. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan di periode dimana pembagian dividen diumumkan.

y. Segmen operasi

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

a. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Earnings per share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

As of December 31, 2024 and December 31, 2023, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is the same as basic earnings per share.

x. Dividends

Dividends distributed to the Group's shareholders are recognized as a liability in the Group's statement of financial position in the period in which the dividends are declared.

y. Operating segments

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);
b. Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and
c. For which discrete financial information is available.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The directors are the Group's chief operating decision-maker. The segments are based on the nature of business. All transactions between segments have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224 (dahulu PSAK 7).

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

aa. Provisi kontrak merugi

Kontrak merugi adalah kontrak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Jika Grup terikat dalam suatu kontrak merugi, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 224 (formerly PSAK 7).

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

aa. Provision for onerous contract

An onerous contract is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it. If the Group has a contract that is onerous, the present obligation under the contract shall be recognised and measured as a provision.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

a. Pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan kapan Grup memiliki pengendalian bersama terhadap sebuah pengaturan, yang memerlukan penilaian dari aktivitas yang relevan dan apabila keputusan sehubungan dengan aktivitas tersebut mengharuskan persetujuan dengan suara bulat.

Grup menetapkan bahwa aktivitas relevan bagi Grup untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berhubungan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk menentukan klasifikasi suatu pengaturan bersama. Pengklasifikasian tersebut mengharuskan Grup menilai hak dan kewajibannya yang timbul dari pengaturan bersama. Secara khusus, Grup mempertimbangkan berikut ini:

(1) Apakah pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah; dan

(2) Ketika pengaturan bersama dibentuk melalui entitas terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari:
- Bentuk hukum dari entitas terpisah;
- Persyaratan pengaturan kontraktual; atau
- Fakta dan keadaan lainnya, jika relevan.

Penilaian tersebut sering memerlukan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda baik atas kesimpulan mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat secara material mempengaruhi perlakuan akuntansinya.

b. Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan. Grup menentukan mata uang fungsionalnya adalah USD.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

a. Joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control over an arrangement, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent.

The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operational and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, the Group considers the following:

(1) Whether the joint arrangement is structured through a separate entity; and

(2) When the arrangement is structured through a separate entity, the Group also considers the rights and obligations arising from:
- *The legal form of the separate entity;*
- *The terms of the contractual arrangement; or*
- *Other relevant facts and circumstances.*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion about both joint control, and whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting treatment.

b. Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated. Group determined that its functional currency is the USD.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

c. Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan pada Catatan 2f.

d. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 116: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, tidak ada revisi persyaratan sewa untuk mencerminkan efek dari melaksanakan opsi perpanjangan dan opsi penghentian.

Sehubungan dengan perjanjian antara PLI dengan PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") untuk penggunaan fasilitas *Floating Storage and Regasification Unit* ("FSRU") Lampung (Catatan 35e), manajemen mengevaluasi bahwa perjanjian tersebut mengandung sewa dan Grup sebagai penyewa telah mengakuinya sebagai aset sewa guna usaha sesuai dengan PSAK 116: Sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

c. Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition financial liabilities based on PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

d. Leases

The Group as a lessee

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of a leased asset based on PSAK 116: Leases, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group. For the year ended December 31, 2024, there is no revision of lease terms to reflect the effect of exercising extension and termination options.

In relation to the agreement between PLI and PT Hoegh LNG Lampung ("Hoegh Lampung") for the use of the Lampung Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") facility (Note 35e), management has evaluated that such agreement contains a lease and the Group as the lessee has classified it as a right-of-use asset in line with PSAK 116: Leases.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

d. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Pesewa

Pertagas menandatangani perjanjian dengan PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") terkait pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Pipa Gas Bumi Senipah Balikpapan selama jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan kontrak, terdapat klausul pengalihan aset di akhir periode kontrak. Bagi Grup sebagai pesewa, perjanjian tersebut mungkin mengandung unsur sewa sehingga harus dicatat dengan menggunakan akuntansi sewa.

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah atau mengandung unsur sewa, yang dibuat pada awal sewa, memerlukan pertimbangan yang signifikan bagi manajemen. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut kadang-kadang secara legal tidak berbentuk sewa, namun memberikan hak untuk menggunakan aset dengan imbalan serangkaian pembayaran kepada pesewa sehingga perjanjian tersebut mungkin merupakan perjanjian sewa. Sebaliknya, terdapat perjanjian yang secara legal merupakan sewa, namun secara substansi bukan merupakan sewa.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh manajemen, perjanjian dengan KPI tersebut yang melibatkan penggunaan aset Grup merupakan perjanjian sewa pembiayaan. Oleh karena itu, Grup mengakui adanya piutang. Grup menggunakan asumsi suku bunga implisit dalam sewa sebagai dasar untuk menentukan piutang.

e. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun taksiran tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya di Kantor Pajak, dalam proses banding di Pengadilan Pajak maupun proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk pajak yang belum diakui harus diakui.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

d. Leases (continued)

The Group as a Lessor

Pertagas entered into a contract with PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") for construction and utilisation of Senipah Balikpapan Natural Gas Pipeline for a period of 30 years which involcing the use of the Group's assets. Based on the contract, there are clauses of transfer of assets at the end of contract period. For the Group as a lessor, these arrangements may contain a lease and therefore need to be accounted for using lease accounting.

Determination whether an arrangements is or contains lease, made at the inception of the lease, requires significant judgment from management. This is due to the fact that the arrangement sometimes does not take the legal form of a lease but nevertheless conveys a right to use an asset in return for series of payments to the lessor and therefore it may be a leasing arrangement. Conversely, there are arrangements that involve the legal form of a lease, which are not, in substance, a leasing arrangements.

Based on the assesments performed by management, the contract with KPI involving the use of the Group's assets reflects a finance lease. As such, the Group, as a lessor, recognised receivables. The Group used the assumption of implicit interest rate in the leases as basis to recognise the receivable.

e. Uncertain tax exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assesses whether the amounts recorded as claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, management also assesses the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection with the Tax Office, appeal process in the Tax Court and under judicial review by the Supreme Court.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all income tax positions to determine if a tax liability for unrecognised tax should be recognised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

e. Ketidakpastian eksposur perpajakan (lanjutan)

Seperti dijelaskan dalam Catatan 21f, Grup melakukan estimasi ketidakpastian eksposur perpajakan yang material atas sengketa pajak yang sedang dihadapi oleh Grup. Manajemen Grup dibantu oleh ahli pihak ketiga dalam menyiapkan analisa pajak yang komprehensif untuk mempertahankan posisi pajak Grup. Jangka waktu penyelesaian atas sengketa pajak ini tidak dapat diestimasi saat ini karena tergantung proses penyelesaian di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

f. Aset eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan tersebut belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan.

Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah dilakukan kapitalisasi atas biaya berdasarkan kebijakan ini, suatu pertimbangan dibuat bahwa pemulihan biaya dianggap tidak dimungkinkan, biaya yang telah dikapitalisasi tersebut akan dibebankan ke dalam laba rugi.

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis. Dalam melakukan pertimbangan ini, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu yang serupa dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi yang dijelaskan di atas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

e. Uncertain tax exposures (continued)

As disclosed in Note 21f, the Group has made material estimations in relation to uncertain tax exposures related to tax disputes involving the Group. The Group's management is assisted by third party experts in preparing a comprehensive tax analysis to defend the Group's tax position. The settlement period of these tax disputes can not currently be estimated as it depends on the settlement process at the Tax Court and Supreme Court.

f. Exploration and evaluation assets

The Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure results in certain items of expenditure being capitalised for an area of interest where it is considered likely to be recoverable through future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage that permits a reasonable assessment of the existence of reserves.

This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalised the expenditure under the policy, a judgement is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalised amount will be written off to profit or loss.

Development activities commence after a project is sanctioned by the appropriate level of management. Judgement is applied by management in determining when a project is economically viable. In exercising this judgement, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for the capitalisation of exploration and evaluation expenditure.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Estimasi atas suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") dari suatu sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

b. Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara empat sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Estimating the incremental borrowing rate ("IBR") of a lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

Therefore, the IBR reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

b. Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets to be within four to 30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore future depreciation charges could be revised.

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

b. Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

c. Imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi tersebut termasuk tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa depan, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

b. Estimating useful lives of fixed assets (continued)

The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

c. Employee benefits

The present value of the pension and other long-term benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Those assumptions include discount rate, future salary increase, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of employee service. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension and other long-term benefit obligations.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This interest rate should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension and other long-term benefit obligations.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Imbalan kerja (lanjutan)

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya yang bersangkutan.

Untuk kenaikan gaji masa depan, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa depan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

d. Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area

Grup mengakui provisi untuk liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area terkait dengan sumur minyak dan gas, fasilitas dan infrastruktur. Dalam menentukan nilai provisi, asumsi dan estimasi yang diperlukan adalah tingkat diskonto, biaya yang diharapkan untuk membongkar semua peralatan dari daerah pengeboran dan restorasi area, dan waktu pelaksanaan pembongkaran aset serta restorasi area.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

c. Employee benefits (continued)

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds (considering there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension and other long-term benefit obligations.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it with future business plans.

Other key assumptions for pension obligation and other long-term benefits are based on current market conditions.

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

d. Asset abandonment and site restoration obligations

The Group recognises a provision for asset abandonment and site restoration obligations associated with its oil and gas wells, facilities and infrastructure. In determining the amount of the provision, the required assumptions and estimates consist of discount rate, the expected cost to dismantle all the structures from the site and restore the site and timing of assets dismantlement and restoration of the area.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

e. Ketersediaan laba kena pajak di masa depan untuk merealisasi aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

f. Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu

Provisi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan *unutilised gas volume*, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri ESDM ("Kepmen ESDM") untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah.

g. Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK 109 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha.

Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

e. Availability of future taxable profits to realise deferred tax assets

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, provisions and other deductible temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the sufficiency of the future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depends on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales of goods and services, prices, operating costs, capital expenditure and other future transactions.

f. Provision for adjustment to the purchase price of certain natural gas

This provision will be recorded periodically based on the estimation in accordance with the addition of unutilized gas volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by Decree of the Minister of EMR ("Kepmen ESDM") for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. The Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government.

g. Impairment of financial assets

The implementation of PSAK 109 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to the provision for loss on impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables.

In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Grup menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang. Untuk seluruh piutang lain-lain Grup menerapkan cadangan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Grup menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasikan. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Grup juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

h. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut, akan dilakukan perkiraan atas nilai aset yang dapat terpulihkan dan kerugian akibat penurunan nilai akan diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut. Jumlah nilai yang dapat dipulihkan kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

The Group determines lifetime and point of initial recognition of receivables. For all other receivables the Group applies the 12 months expected loss provision. To measure the expected credit losses, other receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Group uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Group's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Group's receivables to amounts that it expects to collect.

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Group also recognises a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

h. Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated each reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indications exist, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss will be recognised to the extent of the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit of a group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset nonkeuangan (lanjutan)

Aset yang memiliki masa manfaat yang terbatas, seperti *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap untuk digunakan, tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai.

Properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap, ditelaah untuk penurunan nilai ketika kejadian dan perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai terpulihkan aset akan diestimasi.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai untuk properti minyak dan gas yang telah menemukan cadangan terbukti dan aset tetap mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, tingkat diskonto menggunakan *weighted average cost of capital* ("WACC"), harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya *tolling*, cadangan atas properti minyak dan gas (lihat "Estimasi Cadangan Minyak dan Gas Bumi" di bawah), umur manfaat pipa, biaya operasi, biaya pembongkaran dan restorasi serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai terpulihkan aset. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

Lihat Catatan 13b untuk penurunan nilai aset tetap dan Catatan 15c untuk penurunan nilai properti minyak dan gas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

h. Impairment of non-financial assets (continued)

Assets that have indefinite useful lives for example, goodwill or intangible assets not ready to use, are not subject to amortisation and are tested annually for impairment.

Proven oil and gas properties and fixed assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. If any such indication exists, the asset's recoverable amount is estimated.

The determination of fair value and value in use for proven oil and gas properties and fixed assets requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, discount rate using weighted average cost of capital ("WACC"), commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), tolling fees, reserves for oil and gas properties (see "Oil and Gas Reserve Estimates" below), pipelines' useful lives, operating costs, decommissioning and site restoration cost and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty, hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

See Note 13b for impairment of fixed assets and Note 15c for impairment of oil and gas properties.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

i. Estimasi cadangan minyak dan gas bumi

Nilai tercatat untuk deplesi, penyusutan dan untuk amortisasi beserta pemulihan nilai tercatat properti minyak dan gas, yang digunakan untuk memproduksi minyak dan gas tergantung pada estimasi cadangan minyak dan gas. Faktor utama yang mempengaruhi estimasi tersebut adalah penilaian teknis atas kuantitas produksi cadangan minyak dan gas yang ada dan kendala ekonomis, seperti ketersediaan pasar komersial atas produksi minyak dan gas bumi maupun asumsi yang terkait dengan antisipasi harga komoditas dan biaya pengembangan dan produksi cadangan tersebut.

Asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu dan data geologi bertambah selama masa operasi, oleh karena itu perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Penyisihan untuk aktivitas purna-operasi, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan-kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup menggunakan ahli pihak ketiga dalam memperkirakan cadangan minyak dan gas untuk semua blok.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

i. Oil and gas reserve estimates

The amounts recorded for depletion, depreciation and amortisation, as well as the recovery of the carrying value of oil and gas properties involving production of oil and gas reserves depend on the estimated reserves of oil and gas. The primary factors affecting these estimates are technical engineering assessments of producible quantities of oil and gas reserves in place and economic constraints, such as the availability of commercial markets for oil and gas production, as well as assumptions related to anticipated commodity prices and the costs of development and production of the reserves.

The economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and additional geological data are generated during the course of operations, therefore estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial performance and financial position in a number of ways, including the following:

- *Asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows.*
- *Depreciation and amortisation charged in the profit or loss and other comprehensive income may change where such charges are determined on a units of production basis, or where the useful economic lives of assets change.*
- *Decommissioning, site restoration and environmental provisions may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.*
- *The carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.*

As of December 31, 2024 and 2023, the Group engaged a third-party expert to estimate the oil and gas reserves for all blocks.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

j. Nilai wajar instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

k. Kerugian kredit ekspektasian

KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah KKE 12 bulan. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang umurnya.

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah KKE sepanjang umur. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

j. Fair value of financial instrument

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

k. Expected credit loss

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

For trade receivables and contract assets, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

k. Kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Grup mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi default ketika telah menunggak lebih dari 12 bulan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Grup juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan default ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit.

l. Kontrak merugi

Estimasi kewajiban kini dari kontrak merugi yang diperkirakan akan ditanggung Grup dibuat dengan membandingkan nilai terendah antara total biaya pemenuhan kontrak dan biaya untuk membatalkan kontrak tersebut.

Dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak, pembayaran yang jatuh tempo pada periode dimana kontrak tidak dapat dibatalkan harus turut dipertimbangkan. Jika terdapat pilihan untuk membatalkan kontrak dan membayar denda, maka nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar pada saat pembatalan kontrak juga harus dipertimbangkan, dan kontrak diukur pada biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak. Biaya-biaya yang harus diperhitungkan dalam hal ini harus merupakan biaya yang tidak dihindarkan yang bisa dikaitkan langsung dengan kewajiban Perusahaan. Biaya yang tidak dihindarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan biaya-biaya langsung variabel dalam kontrak dan karena itu merupakan biaya inkremental terkait dengan kontrak.
- Tidak termasuk biaya alokasi atau biaya pembagian.
- Tidak bisa dihindari oleh rencana masa depan Grup.

Biaya yang akan terjadi terlepas apakah kontrak akan dipenuhi atau tidak, bukan merupakan biaya inkremental. Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental adalah biaya yang sifatnya tetap dan tidak dapat dibatalkan seperti biaya depresiasi atas aset tetap, biaya sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan, dan lain-lain.

Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental tersebut tidak perlu dimasukkan dalam analisis kontrak merugi karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya untuk menjalankan bisnis.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

k. Expected credit loss (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 12-month past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group.

l. Onerous contract

An estimate of the present obligation of a onerous contract that is expected to be borne by the Group is made by comparing the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfil it.

In determining the cost of fulfilling a contract, payments that are due in the period in which the contract cannot be canceled must also be considered. If there is an option to cancel the contract and to pay a penalty, then the present value of the amount to be paid at the time of the contract cancelled must also be considered, and the contract is measured at the lower net cost to be unbound from the contract. Costs that must be considered in this case is an unavoidable costs that can be directly related to the Company's obligation. The unavoidable costs criteria are as follow:

- *Direct costs of the contract and therefore incremental cost in relation to the contract.*
- *Does not represent allocation or distribution costs.*
- *Unavoidable cost by the Group's future plans.*

Costs that will be occured regardless the contract is fulfilled or not do not represent incremental costs. Non-incremental costs are fixed and irrevocable costs, such as depreciation expense on fixed assets, noncancelable operating lease costs, and others.

Non-incremental costs are excluded in the onerous contract analysis since they are costs to run the business.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH*

a. Kas dan setara kas / *a. Cash and cash equivalents*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	*31 Desember/ December 31,* 2023	
Kas	**81.866**	**74.343**	***Cash on hand***
Kas pada bank			*Cash in bank*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”)	208.521.381	114.611.135	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”)	133.724.701	9.442.533	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”)	25.787.150	12.232.557	*PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (“BNI”)*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”)	21.027.220	14.678.572	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (“BSI”)	286.809	29.116	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (“BSI”)*
Subtotal	389.347.261	150.993.913	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
Citibank N.A.	3.353.859	2.558.465	*Citibank N.A.*
JP Morgan Chase, Texas	1.146.830	182.501	*JP Morgan Chase, Texas*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), Singapore	151.739	300.616	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), Singapore*
PT Bank ANZ Indonesia	29.704	29.773	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Dahulu sebagai PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	22.896	61.928	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Formerly known as PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)*
Subtotal	4.705.028	3.133.283	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
BTN	183.246.920	100.505.532	*BTN*
Bank Mandiri	138.024.515	124.423.140	*Bank Mandiri*
BNI	26.516.509	46.650.517	*BNI*
BRI	22.362.771	28.787.113	*BRI*
BSI	1.555.124	1.539.875	*BSI*
Unit Usaha Syariah BTN	295.403	303.516	*BTN’ Sharia Business Unit*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	14.612	15.311	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Subtotal	372.015.854	302.225.004	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

a. Cash and cash equivalents (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	*31 Desember/ December 31,* 2023	
Kas pada bank (lanjutan)			*Cash in bank (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Central Asia Tbk.	543.146	41.640	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	141.733	24.757	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	79.631	256.774	*PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*
PT Bank DBS Indonesia	22.996	29.846	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	12.607	13.135	*PT Bank UOB Indonesia*
Subtotal	800.113	366.152	*Subtotal*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
Pihak ketiga			***Third party***
Citibank N.A., Jakarta	69.848	329.641	*Citibank N.A., Jakarta*
Yen Jepang			*Japanese Yen*
Pihak berelasi			***Related party***
Bank Mandiri	587	880	*Bank Mandiri*
Subtotal	70.435	330.521	*Subtotal*
Jumlah kas pada bank	**766.938.691**	**457.048.873**	***Total cash in banks***
Deposito berjangka dan setara kas lainnya			*Time deposits and other cash equivalents*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
BNI	161.004.000	96.350.000	*BNI*
Bank Mandiri	86.000.000	54.500.000	*Bank Mandiri*
BRI	32.563.023	189.175.642	*BRI*
BTN	30.000.000	-	*BTN*
Subtotal	309.567.023	340.025.642	*Subtotal*
Pihak ketiga			***Third parties***
SMBC Singapore	-	3.400.000	*SMBC Singapore*
Subtotal	-	3.400.000	*Subtotal*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi			***Related parties***
BRI	79.751.927	145.936.079	*BRI*
BTN	99.203.751	140.405.305	*BTN*
BNI	59.905.878	43.778.128	*BNI*
BSI	39.807.560	100.755.990	*BSI*
Unit Usaha Syariah BTN	15.423.345	6.635.906	*BTN' Sharia Business Unit*
Bank Mandiri	8.169.834	1.489.734	*Bank Mandiri*
Subtotal	302.262.295	439.001.142	*Subtotal*

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

a. Cash and cash equivalents (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	*31 Desember/ December 31,* 2023	
Deposito berjangka dan setara kas lainnya (lanjutan)			*Time deposits and other cash equivalents (continued)*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	4.332.487	4.533.972	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.*
PT Bank KB Bukopin Tbk. (“Bank Bukopin”)	-	647.710	*PT Bank KB Bukopin Tbk. (“Bank Bukopin”)*
Subtotal	4.332.487	5.181.682	Subtotal
Total deposito berjangka dan setara kas lainnya	**616.161.805**	**787.608.466**	***Total time deposits and other cash equivalents***
Jumlah kas dan setara kas	**1.383.182.362**	**1.244.731.682**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat bunga deposito berjangka dan setara kas lainnya adalah sebagai berikut:

The interest rates of time deposits and other cash equivalents are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	*31 Desember/ December 31,* 2023	
Rekening Rupiah	2,25% - 7,70%	2,15% - 7,70%	*Rupiah Accounts*
Rekening Dolar AS	2,00% - 7,15%	1,50% - 7,15%	*US Dollar Accounts*

Nisbah bagi hasil deposito berjangka syariah untuk Grup tahun 2024 dan 2023 adalah 66,76% - 76,88% dan 69,50% - 79,94%.

The Group’s portion of profit sharing from shariah time deposit in 2024 and 2023 were 66.76% - 76.88% and 69.50% - 79.94%.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

b. Kas yang dibatasi penggunaannya

b. Restricted cash

	31 Desember/ *December 31,* 2024	***31 Desember/ December 31,* 2023**	
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
Rekening bersama dengan SKK Migas dan jaminan atas bank garansi			***Joint accounts with SKK Migas and collateral on bank guarantee***
Bank Mandiri	129.938.991	117.891.403	*Bank Mandiri*
BNI	38.185.652	23.000.026	*BNI*
Rupiah			*Rupiah*
Jaminan Pelaksanaan Proyek			***Project performance Bond***
BNI	482.302	254.987	*BNI*
Bank Mandiri	-	2.026.600	*Bank Mandiri*
Rekening tantiem yang ditangguhkan			***Deferred bonuses accounts***
BRI	566.662	-	*BRI*
BNI	462.440	-	*BNI*
Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya	**169.636.047**	**143.173.016**	***Total restricted cash***
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(148.412.844)	(128.772.206)	*Non-current portion*
Kas yang dibatasi penggunaannya, bagian lancar	**21.223.203**	**14.400.810**	***Restricted cash, current portion***

Grup diharuskan menempatkan bank garansi terkait komitmen pasti pada PSC Pangkah, PSC Sangkar, PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, dan PSC Bangkanai. Selama tahun 2024, Grup memperoleh Surat Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau dan PSC Bangkanai yang masing-masing berlaku sampai Mei 2026, Juni 2033, Desember 2037, dan Desember 2027 sebesar USD1.500.000, USD1.552.000, USD583.300, dan USD450.000. Bank garansi terkait komitmen pasti PSC Pangkah dan PSC Sangkar masing-masing akan berakhir pada Mei 2031 dan Juni 2033 dengan jumlah sebesar USD6.405.297 dan USD1.500.000. Jumlah bank garansi sehubungan dengan komitmen pasti ini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar USD11.990.597 dan USD10.905.297.

The Group is required to place bank guarantees related to firm commitments for PSC Pangkah, PSC Sangkar, PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, and PSC Bangkanai. During 2024, the Group obtained an Extension Letter for the Validity of the Performance Guarantee for PSC Pekawai, PSC Ketapang, PSC Muara Bakau, and PSC Bangkanai, which are valid until May 2026, June 20333, December 2037, and December 2027 amounting to USD1,500,000, USD1,552,000, USD583,300, and USD450,000, respectively. The bank guarantees related to firm commitments for PSC Pangkah and PSC Sangkar will expire on May 2031 and June 2033, amounting to USD6,405,297 and USD1,500,000. The total amount of bank guarantees in connection with these firm commitments as of December 31, 2024, and 2023, are USD11,990,597 and USD10,905,297, respectively.

4. KAS DAN SETARA KAS DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

b. Kas yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Rekening bersama dengan SKK Migas merupakan rekening yang ditempatkan di Bank Mandiri dan BNI (entitas berelasi dengan Pemerintah) untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area sehubungan dengan operasi hulu minyak dan gas. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan rekening bersama masing-masing sebesar USD135.584.046 dan USD120.866.909.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“SDA”) mengatur paling sedikit sebesar 30% DHE SDA dalam Grup ditempatkan ke dalam rekening khusus DHE SDA paling tidak selama 3 bulan sejak DHE SDA diterima dan ditempatkan. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan DHE SDA masing-masing sebesar USD20.550.000 dan USD9.000.000.

Berdasarkan Permen 3/2023, BUMN harus melakukan penangguhan Tantiem/Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar persentase tertentu, minimal 10% dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun. Pembayaran dilakukan secara prorata sesuai jangka waktu penangguhan Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan penangguhan pembayaran tantiem tersebut sebesar USD1.029.102 dan USD119.223.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH (continued)

b. Restricted cash (continued)

The joint account with SKK Migas is an account placed at Bank Mandiri and BNI (entities related to the Government) to fund the liabilities of asset dismantling and area restoration in connection with upstream oil and gas operations. As of December 31, 2024 and 2023, the amounts of cash whose use is restricted in connection with the joint account are USD135,584,046 and USD120,866,909, respectively.

Indonesia Government Regulation No. 36 of 2023 regarding Export Proceeds ("DHE") from Natural Resources ("SDA") Business, Management, and/or Processing regulates that at least 30% of the DHE SDA in the Group need to be placed into a special DHE SDA account for at least 3 months since the DHE SDA was received and placed. As of December 31, 2024 and 2023, the amount of restricted cash in connection with DHE SDA is USD20,550,000 and USD9,000,000.

Based on Permen 3/2023, BUMN must postpone Bonuses/Performance Incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners by a certain percentage, at least 10% for a minimum period of 3 years. Payment is made pro rata according to the suspension period As of December 31, 2024 and 2023, the amount of restricted cash for the deferral were USD1,029,102 and USD119,223.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK DAN ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Investasi Jangka Pendek

5. SHORT TERM INVESTMENT AND FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

a. Short Term Investment

	31 Desember/ *December 31, 2024*	***31 Desember/ December 31, 2023***	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Entitas pihak berelasi			***Related parties***
BNI	618,927	-	*BNI*
Jumlah	**618,927**	**-**	***Total***

Tingkat bunga kas pada bank dan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rates of cash in banks and time deposits are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2024*	***31 Desember/ December 31, 2023***	
Rekening Rupiah	5,5%	-	*Rupiah accounts*

5. INVESTASI JANGKA PENDEK DAN ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)

5. SHORT TERM INVESTMENT AND FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)

b. Aset Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

b. Financial Assets At Fair Value Through Other Comprehensive Income

Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan investasi pada instrumen utang yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial assets at fair value through other comprehensive income represent investments in debt instruments which are categorised as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari:

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income include the following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi			***Related parties***
- Obligasi BRI	-	16.618.970	*BRI bonds -*
- Obligasi Mandiri	-	6.559.254	*Mandiri bonds -*
Total	**-**	**23.178.224**	***Total***

Berikut adalah mutasi aset keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

The movement of the financial assets measured at fair value through other comprehensive income of the Group is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Saldo awal	23.178.224	27.720.100	*Beginning balance*
Pelepasan	(23.178.224)	(3.600.000)	*Redemption*
Kerugian dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	(89.645)	*Unrealised loss from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Selisih kurs	-	(852.231)	*Foreign exchange differences*
Saldo akhir	**-**	**23.178.224**	***Ending balance***

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh aset keuangan ini telah jatuh tempo. Obligasi BRI telah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024, sementara Obligasi Mandiri telah jatuh tempo pada 11 April 2024.

As of December 31, 2024, all of these financial assets has been due. BRI Global Bond was due at March 28, 2024 while Mandiri Global Bond was due at April 11, 2024.

6. PIUTANG USAHA - NETO / *6. TRADE RECEIVABLES - NET*

Piutang usaha terdiri dari: / *Trade receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Niaga gas bumi			*Gas trading*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")	52.507.527	62.724.167	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN")*
PT Pupuk Iskandar Muda	10.860.759	20.269.552	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Iglas (Persero)	8.362.856	8.411.897	*PT Iglas (Persero)*
PT Pupuk Kujang	5.486.001	4.923.461	*PT Pupuk Kujang*
KPI	5.179.803	9.487.537	*KPI*
PT Kertas Leces (Persero)	3.942.171	3.973.117	*PT Kertas Leces (Persero)*
PT Patra Logistic	128.622	1.365.188	*PT Patra Logistic*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	3.811.090	502.572	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	90.278.829	111.657.491	*Subtotal*
Minyak dan gas			*Oil and gas*
PLN	3.539.113	4.009.396	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	1.601.298	1.432.713	*PT Pertamina Patra Niaga*
Subtotal	5.140.411	5.442.109	*Subtotal*
Transmisi minyak & gas dan jasa regasifikasi			*Oil & Gas transmission and regasification service*
KPI	27.403.638	-	*KPI*
PT Perta Samtan Gas	15.585.109	-	*PT Perta Samtan Gas*
PT Pertamina EP	12.955.578	13.449.347	*PT Pertamina EP*
PT Pertamina Hulu Rokan	10.660.458	12.932.278	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PLN	9.645.369	16.726.490	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	4.333.211	6.166.809	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")	3.036.297	4.284.150	*PT Pertamina Hulu Energi ("PHE")*
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")	2.634.027	1.057.676	*PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")*
PT Petrokimia Gresik ("PKG")	2.176.198	2.045.228	*PT Petrokimia Gresik ("PKG")*
PT Pupuk Sriwidjaja	2.167.362	2.234.078	*PT Pupuk Sriwidjaja*
PT Pupuk Iskandar Muda	1.767.359	598.834	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.037.471	-	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Pertamina	107.496	28.992.226	*Pertamina*
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	1.853.700	1.055.355	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	95.363.273	89.542.471	*Subtotal*
Total pihak berelasi	**190.782.513**	**206.642.071**	**Total related parties**
Pihak ketiga			***Third parties***
Transmisi gas	173.263.350	189.220.931	*Gas transmission*
Niaga gas bumi	162.622.527	174.859.462	*Gas trading*
Minyak dan gas	21.520.966	43.400.568	*Oil and gas*
Konstruksi, operasi dan pemeliharaan	19.600.076	23.262.782	*Construction, operation and maintenance*
Sewa fiber optik	8.304.163	8.322.422	*Fiber optic rental*
Total pihak ketiga	**385.311.082**	**439.066.165**	**Total third parties**
Jumlah piutang usaha sebelum cadangan penurunan nilai	**576.093.595**	**645.708.236**	***Total trade receivables before allowance for impairment***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai			*Allowance for impairment*
Pihak berelasi	(28.727.821)	(26.576.995)	*Related parties*
Pihak ketiga	(161.532.209)	(125.122.445)	*Third parties*
	(190.260.030)	(151.699.440)	
Jumlah piutang usaha sesudah cadangan penurunan nilai	385.833.565	494.008.796	*Total trade receivables after allowance for impairment*
Dikurangi:			*Deducted by:*
Bagian tidak lancar			*Non-current portion*
Pihak ketiga	-	45.825.293	*Third parties*
Bagian lancar	**385.833.565**	**448.183.503**	***Current portion***
Piutang usaha bagian lancar, bersih			*Trade receivables current portion, net*
Pihak berelasi	162.054.692	180.065.076	*Related parties*
Pihak ketiga	223.778.873	268.118.427	*Third parties*
Total	**385.833.565**	**448.183.503**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, komposisi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha Grup adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the allowance for impairment losses on the Group's trade receivables are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Penurunan individual	166.231.774	144.474.669	*Individual impairment*
Penurunan kolektif	24.028.256	7.224.771	*Collective impairment*
Total	**190.260.030**	**151.699.440**	***Total***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	151.699.440	147.549.791	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	42.380.279	5.485.151	*Addition during the year*
Dampak selisih kurs	(3.819.689)	(1.335.502)	*Foreign exchange impact*
Total	**190.260.030**	**151.699.440**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Perhitungan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dilakukan untuk pelanggan yang secara nilai tidak signifikan dan ada kemungkinan gagal bayar. Perhitungan ini mempertimbangkan tren pembayaran piutang yang dilakukan oleh konsumen, informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi.

Analisis umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment for individual receivables is provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

Allowance for impairment for collective receivables is provided for customers that have insignificant balances and possibilities of payment default. This calculation considers trends of payment made by customers, relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions.

The aging analysis of trade receivables based on invoice dates is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Belum jatuh tempo	362.841.630	367.514.515	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
sampai dengan 3 bulan	26.594.523	48.629.444	*up to 3 months*
3 bulan - 6 bulan	6.585.108	6.546.432	*3 months - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	8.352.366	8.348.122	*6 months - 1 year*
Di atas 1 tahun	171.719.968	214.669.723	more than 1 year
Total	**576.093.595**	**645.708.236**	***Total***

Rincian piutang usaha sebelum penyisihan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The detail of trade receivables before allowance based on denominated currency are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Dolar AS	510.506.566	573.337.348	*US dollar*
Rupiah	65.587.029	72.370.888	*Rupiah*
Total	**576.093.595**	**645.708.236**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)

Berdasarkan rincian dari umur piutang usaha, sebesar 13,96% (31 Desember 2023: 12,78%) dari piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari satu tahun merupakan piutang usaha dari entitas berelasi dengan pemerintah, yaitu masing-masing 6,79% (31 Desember 2023: 7,02%) dari PLN, 4,87% (31 Desember 2023: 3,92%) dari PT Iglas (Persero), dan 2,30% (31 Desember 2023: 1,85%) dari PT Kertas Leces (Persero). Manajemen terus berupaya melakukan langkah-langkah negosiasi untuk mengusahakan penagihan terkait dengan piutang-piutang usaha tersebut.

Nilai tercatat dari piutang usaha sama dengan nilai wajarnya.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Termasuk di dalam piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari kasus arbitrase terkait deklarasi keadaan kahar oleh Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), *shipper* di Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG") Kalija I (Catatan 36a).

Pada tanggal 14 Juni 2024, hasil putusan *Internasional Chamber of Commerce* ("ICC") *International Court of Arbitration* menyebutkan bahwa PCML harus membayar *Pre-Termination Claim* kepada KJG sebesar USD17.300.000 diluar bunga, sehingga per tanggal 31 Desember 2024 KJG membukukan tambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dari PCML sebesar USD41.964.817.

Pada tanggal 31 Desember 2024, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman maupun kontrak lainnya.

6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)

Based on the detailed aging of the trade receivable, 13.96% (December 31, 2023: 12.78%) of the trade receivables that are past due by more than one year represent amounts from government-related entities, comprising 6.79% (December 31, 2023: 7.02%) due from PLN, 4.87% (December 31, 2023: 3.92%) due from PT Iglas (Persero) and 2.30% (December 31, 2023: 1.85%) due from PT Kertas Leces (Persero). Management is continuously taking negotiation steps to pursue the collection of those receivables.

The carrying value of trade receivables is the same as their fair value.

The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

Included in trade receivables is receivables in relation to the arbitration case from to the Force Majeure condition declared by Petronas Carigali Muriah Limited ("PCML"), the shipper for Gas Transportation Agreement ("GTA") Kalija I (Note 36a).

On June 14, 2024, International Chamber of Commerce ("ICC") International Court of Arbitration's verdict stated that PCML had to pay Pre-Termination Claim to KJG amounted to USD17,300,000 excluding interest, thus per December 31, 2024 KJG has recorded additional allowance for impairment losses of receivables from PCML amounted to USD41,964,817.

As of December 31, 2024, no account receivables are pledged in relation with debt or other contracts.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - NETO / *7. OTHER RECEIVABLES - NET*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Pemerintah Republik Indonesia	1.302.638	1.302.638	*Government of Republic of Indonesia*
Uang muka pembelian LNG dari Pertamina	-	7.789.257	*Advances to purchase of LNG from Pertamina*
Piutang pinjaman dari PDG	-	4.223.033	*Loan receivable from PDG*
Piutang bunga pinjaman dari PDG	-	812.377	*Interest loan receivables from PDG*
Piutang bunga aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	302.652	*Interest receivable from financial assets at fair value through other comprehensive income*
Subtotal pihak berelasi	1.302.638	14.429.957	*Subtotal related parties*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.302.638)	(1.302.638)	*Allowance for impairment losses*
Subtotal pihak berelasi – neto	-	13.127.319	*Subtotal related parties – net*
Pihak ketiga			***Third parties***
Panjar dinas	8.367.383	8.324.720	*Advances to employees*
Piutang dari operasi bersama	7.355.605	7.198.218	*Joint operation receivables*
Piutang klaim investasi	3.450.295	-	*Investment claims receivable*
Piutang bunga	667.247	-	*Interest receivable*
Lain-lain	7.941.180	9.047.009	*Others*
Subtotal pihak ketiga	27.781.710	24.569.947	*Subtotal third parties*
Jumlah piutang lain-lain, bersih	**27.781.710**	**37.697.266**	***Total other receivables, net***

Piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai bagian dari aset lancar karena berdasarkan perjanjian kontraktual, pembayaran piutang lain-lainnya dari pihak berelasi dijadwalkan selesai dalam atau kurang dari satu tahun.

Other receivables from related parties are classified as current assets because according to the contractual agreements, the repayment of other receivables from related parties is expected within one year or less.

Piutang lain-lain dari pihak ketiga merupakan piutang yang timbul sehubungan dengan operasi di PSC dimana Grup adalah *partner* bukan operator dari blok-blok tersebut.

Other receivables from third parties represent the receivables arising from PSC operations where the Group is a non-operating partner of those PSC blocks.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	1.302.638	1.302.638	*Beginning balance*
Pembalikan	-	-	*Reversal*
Saldo akhir	**1.302.638**	**1.302.638**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover any loss from uncollectible other receivables.

8. PERSEDIAAN - NETO

8. INVENTORIES - NET

Persediaan terdiri dari:

Inventories consist of the following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Suku cadang minyak dan gas, perlengkapan sumur dan lainnya	46.354.740	42.692.676	*Oil and gas spareparts, well supplies and others*
Gas alam dan LNG	15.195.370	5.554.576	*Natural gas and LNG*
Suku cadang	14.728.441	16.687.210	*Spareparts*
Persediaan real-estate	4.103.019	4.293.832	*Real-estate inventory*
Persediaan *marine gas oil*	2.028.330	2.229.442	*Marine gas oil inventory*
Jumlah persediaan, bruto	**82.409.900**	**71.457.736**	***Total inventories, gross***
Dikurangi dengan:			*Deducted by:*
Provisi penurunan nilai persediaan	(477.054)	(477.054)	*Provision for impairment - of inventories*
Jumlah persediaan, bersih	**81.932.846**	**70.980.682**	***Total inventories, net***

Mutasi provisi untuk penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of provision for impairment of inventories is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	477.054	477.054	*Beginning balance*
Pengurangan selama tahun berjalan	-	-	*Reductions during the year*
Saldo akhir	**477.054**	**477.054**	***Ending balance***

Suku cadang, perlengkapan sumur dan lainnya terdiri dari persediaan yang berhubungan dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Spare parts, well supplies and others represent inventories which are related to the exploration and production of oil and gas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, persediaan tidak dijadikan jaminan dan persediaan Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar IDR61.953.336.492 oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

As of December 31, 2024, inventories are not pledged and are insured against losses from fire and other risks under blanket policies for IDR61,953,336,492 by PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa provisi tersebut di atas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on a review at the reporting dates, management believes that the above provision is adequate to cover possible losses from impairment of inventories.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Uang muka bangunan (Catatan 35i dan 35j)	34.286.507	29.955.628	*Advance for building (Note 35i and 35j)*
Pembelian barang dan jasa	7.483.630	9.125.406	*Purchase of goods and services*
Uang muka *cash call*	5.328.733	2.814.387	*Cash call advances*
Transmisi gas bumi			*Transmission of natural gas*
- Transgasindo	27.257	189.659	*Transgasindo -*
Tantiem yang ditangguhkan	4.155.301	-	*Deferred bonuses*
Lain-lain	4.752.065	3.913.029	*Others*
Total uang muka	56.033.493	45.998.109	*Total advances*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar			*Non-current portion*
- Uang muka bangunan	(34.286.507)	(29.955.628)	*Advance for building -*
- Tantiem yang ditangguhkan	(2.770.201)	-	*Deferred bonuses*
- Pembelian barang dan jasa	(427.073)	(5.063.937)	*Purchase of goods and services -*
Subtotal	(37.483.781)	(35.019.565)	*Subtotal*
Uang muka, bagian lancar	**18.549.712**	**10.978.544**	***Advances, current portion***

Uang muka *cash call* merupakan akumulasi pembayaran *cash call* setelah dikurangi pengeluaran yang dilakukan oleh operator dari kerjasama operasi minyak dan gas bumi.

Cash call advances are the accumulated payments for cash calls net of expenditure incurred by the operator of the oil and natural gas joint operations.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh uang muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such advances can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *10. PREPAID EXPENSES*

Beban dibayar di muka terdiri dari: / *Prepaid expenses consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Sewa dan beban dibayar di muka lainnya	45.778.774	54.451.159	*Rent and other prepaid expense*
Joint interest billing dari aktivitas minyak dan gas	11.364.843	8.721.557	*Joint interest billing from oil and gas activities*
Lain-lain	390.668	467.354	*Others*
Total beban dibayar di muka	57.534.285	63.640.070	*Total prepaid expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian tidak lancar	(30.329.186)	(37.365.518)	*Non-current portion*
Beban dibayar dimuka, bagian lancar	**27.205.099**	**26.274.552**	***Prepaid expenses, current***

Manajemen berpendapat bahwa seluruh beban dibayar di muka tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such prepaid expense can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG / *11. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES*

Piutang lain-lain jangka panjang terdiri dari: / *Other long-term receivables consist of the following:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Piutang dari ventura Bersama			*Receivable from joint ventures*
- Transgasindo	-	3.894.134	*Transgasindo -*
- Regas	-	14.522	*Regas -*
Subtotal pihak berelasi	-	3.908.656	*Subtotal related parties*
Pihak ketiga			***Third parties***
PPN yang dapat ditagihkan	38.566.458	46.866.786	*Reimbursable VAT*
Piutang *carry* dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. (“KUFPEC”)	7.771.788	7.771.788	*Carry receivables from Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company K.S.C. (“KUFPEC”)*
Garansi bank atas proyek	-	5.005.724	*Bank Guarantee for projects*
Lain-lain	-	3.324.118	Others
Sub-total pihak ketiga	46.338.246	62.968.416	*Sub-total third parties*
Penyesuaian nilai wajar	(198.420)	(3.023.701)	*Fair value adjustment*
Sub-total pihak ketiga setelah penyesuaian	46.139.826	59.944.715	*Sub-total third parties after adjustment*
Total	**46.139.826**	**63.853.371**	***Total***

11. PIUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. OTHER NON-CURRENT RECEIVABLES (continued)

Mutasi penyesuaian nilai wajar adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value adjustment were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	(3.023.701)	(3.373.540)	*Beginning balance*
Penambahan	-	-	*Addition*
Amortisasi	337.920	274.631	*Amortisation*
Penyesuaian lain-lain	2.487.361	75.208	Other adjustments
Saldo akhir	**(198.420)**	**(3.023.701)**	***Ending balance***

Piutang dari KUFPEC merupakan kewajiban pajak yang terutang di SIPBV yang akan ditanggung oleh KUFPEC sesuai dengan Perjanjian Jual Beli KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. antara SEI dengan KUFPEC tertanggal 24 April 2013, dengan tingkat bunga diskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 4,53%. Piutang ini akan dibayar ketika PSC Pangkah mencapai *equity to be split* ("ETS") yang diperkirakan di tahun 2025.

Receivables from KUFPEC represent the tax obligation of SIPBV, which will be borne by KUFPEC based on the Sale and Purchase Agreement of KUFPEC Indonesia Pangkah B.V. between SEI and KUFPEC dated April 24, 2013, with a discounted interest rate as of December 31, 2024 and 2023 of 4.53%. This receivable will be settled when PSC Pangkah achieves equity to be split ("ETS"), which is expected to be in 2025.

PPN yang dapat ditagihkan adalah saldo PPN yang dapat ditagihkan ke SKK Migas pada saat Grup telah menghasilkan laba penjualan minyak atau laba penjualan gas di masing-masing PSC. Manajemen Grup mengevaluasi kemampuan pembayaran kembali PPN berdasarkan status operasi masing-masing PSC.

Reimbursable VAT is the remaining balance of VAT reimbursable by SKK Migas when the Group generates profit oil or proft gas from its respective PSCs. The Group's management assessed the reimbursability of the VAT based on the status of each PSC operation.

Nilai wajar piutang lain-lain jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung dengan menggunakan metode arus kas terdiskonto. Perhitungan nilai wajar ini diklasifikasikan sebagai tingkat tiga dalam hirarki nilai wajar.

The fair value of other long-term receivables as of December 31, 2024 and 2023 were calculated using the discounted cash flow method. This fair value measurement is within level three of the fair value hierarchy.

Manajemen Grup berpendapat bahwa saldo seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

The Group's management believes that all of the receivables are collectible. Hence, no allowance for impairment losses has been provided.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA / *12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES*

Rincian penyertaan adalah sebagai berikut: / *The details of joint ventures are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Investasi saham (nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)	2.718	2.718	***Investments in shares (FVOCI)***
Investasi pada ventura bersama			***Investments in joint ventures***
Transgasindo	136.285.448	130.552.797	*Transgasindo*
Regas	89.612.231	96.810.292	*Regas*
PSG	66.106.819	62.585.407	*PSG*
Perkasa	10.011.143	8.730.045	*Perkasa*
PDG	9.786.043	8.368.868	*PDG*
KSO GAGAS–JUP	148.808	154.161	*KSO GAGAS–JUP*
Subtotal	311.950.492	307.201.570	*Subtotal*
Jumlah penyertaan saham	**311.953.210**	**307.204.288**	***Total investment in shares***

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut. / *The movement of investment in joint ventures are as followings.*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pada awal tahun	307.201.570	302.800.123	*At beginning of year*
Bagian laba ventura bersama	72.200.336	64.835.104	*Share of profit of joint ventures*
Bagian pendapatan komprehensif lainnya dari ventura bersama	329.998	581.619	*Share of other comprehensive income from joint ventures*
Dividen tunai	(67.781.412)	(61.015.276)	*Cash dividends*
Pada akhir tahun	311.950.492	307.201.570	*At the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investment in joint ventures (continued)

Investasi pada ventura bersama yang dimiliki Grup adalah sebagai berikut:

Investments in joint ventures owned by the Group are as follows:

Nama entitas/ *Name of entity*	Kedudukan usaha/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *% of ownership*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Metode pengukuran/ *Measurement method*
Transgasindo	Jakarta, Indonesia	59,87%	Keterangan/*Remarks* 1	Ekuitas/*Equity*
Regas	Jakarta, Indonesia	40,00%	Keterangan/*Remarks* 2	Ekuitas/*Equity*
Perkasa	Jakarta, Indonesia	60,00%	Keterangan/*Remarks* 3	Ekuitas/*Equity*
PSG	Banyuasin, Indonesia	66,00%	Keterangan/*Remarks* 4	Ekuitas/*Equity*
PDG	Jakarta, Indonesia	65,00%	Keterangan/*Remarks* 5	Ekuitas/*Equity*
KSO GAGAS–JUP	Jakarta, Indonesia	51,00%	Keterangan/*Remarks* 6	Ekuitas/*Equity*

Keterangan:
1) Transgasindo bergerak di bidang transportasi gas dan memiliki infrastruktur pipa gas jaringan pipa Transmisi Grissik-Duri dan Grissik-Singapura.
2) Regas didirikan untuk pengelolaan fasilitas FSRT termasuk pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT.
3) Perkasa bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, pembinaan dan penyaluran jasa tenaga kerja.
4) PSG bergerak dalam bidang pengolahan gas serta menyediakan layanan jasa dan infrastruktur terkait pemrosesan gas.
5) PDG bergerak dalam bidang LNG dan gas pengangkutan/transportasi LNG, penyimpanan dan regasifikasi.
6) KSO GAGAS-JUP bergerak dalam bidang pemanfaatan SPBG.

Remarks:
1) Transgasindo is engaged in gas transportation and owns the Grissik- Duri and Grissik-Singapore pipelines.
2) Regas was established to manage FSRT facilities including purchase of LNG and marketing of products arising from the operations of FSRT facilities.
3) Perkasa is engaged in workshop services, development and distribution of labour services.
4) PSG is engaged in the business of gas processing and providing services and infrastructure for gas processing.
5) PDG is engaged in LNG and gas transportation, storage and regasification.
6) KSO GAGAS–JUP is engaged in Fuel Gas Filling Station utilisation.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh investasi pada ventura bersama tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such investment in joint ventures can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan dari ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Set out below is the summarised financial information of the joint ventures which are accounted for using the equity method.

(1) Transgasindo
Ringkasan informasi keuangan Transgasindo adalah sebagai berikut:

(1) Transgasindo
Summarised financial information for Transgasindo is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	136.346.617	133.758.521	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	22.437.289	22.406.147	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	117.635.346	111.827.309	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(24.401.658)	(23.468.323)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(3.731.147)	(4.575.257)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas keuangan jangka panjang	(10.925.102)	(11.681.328)	*Long-term financial liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(8.982.322)	(9.463.209)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	228.379.023	218.803.860	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investment in joint ventures (continued)

(1) Transgasindo (lanjutan)

(1) Transgasindo (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	131.142.201	121.330.690	*Revenue*
Biaya, depresiasi dan amortisasi	(57.507.675)	(55.220.040)	*Expenses, depreciation and amortisation*
Pendapatan/(beban) lainnya	347.507	2.994.079	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	5.616.929	2.605.628	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	79.598.962	71.710.357	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(16.473.143)	(17.917.135)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	63.125.819	53.793.222	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	242.568	830.722	*Other comprehensive income/(expense)*
Dividen yang dibayarkan	(53.793.222)	(54.815.104)	*Dividend paid*

Transgasindo merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Transgasindo.

Transgasindo is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai buku pada awal tahun	130.552.797	130.667.239	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	37.793.428	32.206.002	*Share of profit for the year*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	145.225	497.359	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Penerimaan dividen	(32.206.002)	(32.817.803)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	136.285.448	130.552.797	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(2) Regas

Ringkasan informasi keuangan Regas adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(2) Regas

Summarised financial information for Regas is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	228.998.478	235.752.895	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	8.260.069	22.149.677	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	41.201.035	76.104.905	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(12.782.162)	(43.337.724)	*Other long-term liabilities*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(33.657.512)	(32.514.634)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(6.656.447)	(14.796.506)	*Other short-term liabilities*
Aset bersih	225.363.461	243.358.613	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya			***Statement of profit or loss and other comprehensive income***
Pendapatan	81.961.691	81.075.626	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(47.427.119)	(47.701.817)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(11.071.905)	(11.145.792)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	12.055.677	9.839.324	*Finance income*
Beban keuangan	(2.410.815)	(3.487.530)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	33.107.529	28.579.811	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(5.207.276)	(4.703.904)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	27.900.253	23.875.907	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	286.527	210.642	*Other comprehensive income/(expense)*
Dividen yang dibayarkan	(46.181.933)	(29.359.493)	*Dividend paid*

Regas merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Regas.

Regas is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(2) Regas (lanjutan)

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(2) Regas (continued)

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Nilai buku pada awal tahun	96.810.292	98.919.470	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	11.160.101	9.550.362	*Share of profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	(18.472.773)	(11.743.797)	*Dividends paid*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	114.611	84.257	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Nilai buku pada akhir tahun	89.612.231	96.810.292	*Carrying amount at the end of the year*

(3) Perkasa

Ringkasan informasi keuangan Perkasa adalah sebagai berikut:

(3) Perkasa

Summarised financial information for Perkasa is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	1.625.864	3.238.212	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	18.676.273	12.958.316	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	936.398	669.300	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(1.653.347)	(1.669.817)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(6.266.108)	(4.861.654)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(1.567.901)	(139.466)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	11.751.179	10.194.891	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	64.725.590	55.777.831	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(58.345.394)	(49.405.676)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(3.233.361)	(2.290.232)	*Other income/(expenses)*
Pendapatan keuangan	123.723	33.665	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	3.270.558	4.115.588	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(247.936)	(846.337)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	3.022.622	3.269.251	*Profit for the year*
Pendapatan/(beban) komprehensif lainnya	116.935	-	*Other comprehensive income/(expense)*
Dividen yang dibayarkan	(1.004.394)	(1.022.793)	*Dividend paid*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(3) Perkasa (lanjutan)

Rekonsiliasi dari nilai investasi pada Perkasa adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(3) Perkasa (continued)

Reconciliation of investment in Perkasa is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai buku pada awal tahun	8.730.045	7.382.168	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	1.813.574	1.961.553	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(602.637)	(613.676)	*Dividends received*
Bagian atas pendapatan/(beban) komprehensif lainnya dari ventura bersama	70.161	-	*Share of other comprehensive income/(expense) from joint venture*
Nilai buku pada akhir tahun	10.011.143	8.730.045	*Carrying amount at the end of the year*

Perkasa merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham Perkasa.

Perkasa is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

(4) PSG

PSG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PSG.

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut:

(4) PSG

PSG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

Summarised financial information for PSG is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	97.125.935	72.454.704	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	18.616.044	16.638.432	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	27.671.241	43.428.278	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(26.809.797)	(17.133.847)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(11.660.437)	(15.780.266)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	104.942.986	99.607.301	*Net assets*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investment in joint ventures (continued)

(4) PSG (lanjutan)

(4) PSG (continued)

Ringkasan informasi keuangan PSG adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summarised financial information for PSG is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	123.854.860	115.038.080	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(85.091.972)	(79.769.789)	*Cost of revenue*
Pendapatan/(beban) lainnya	(3.594.355)	785.199	*Other income/(expenses)*
Beban keuangan	(615.747)	(632.825)	*Finance costs*
Pendapatan keuangan	3.557.936	1.706.535	*Finance income*
Laba sebelum pajak penghasilan	38.110.722	37.127.200	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(7.782.595)	(8.133.612)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	30.328.127	28.993.588	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	(25.000.000)	(24.000.000)	*Dividens paid*

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan Grup dalam ventura bersama adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of the Group's interest in the joint venture is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai buku pada awal tahun	62.585.407	59.289.639	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	20.021.412	19.135.768	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	(16.500.000)	(15.840.000)	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	66.106.819	62.585.407	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

Investment in joint ventures (continued)

(5) PDG
Ringkasan informasi keuangan PDG adalah sebagai berikut:

(5) PDG
Summarised financial information for PDG is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	1.556.543	1.766.480	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	6.276.831	5.605.911	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	14.426.232	18.462.773	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(4.782.548)	(10.723.372)	*Other short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	(602.924)	(417.926)	*Other long-term liabilities*
Aset bersih	16.874.134	14.693.866	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Pendapatan	15.152.999	14.034.550	*Revenue*
Beban pokok penjualan	(6.226.059)	(5.790.958)	*Cost of revenue*
Beban lainnya	(4.715.055)	(3.100.580)	*Other expenses*
Pendapatan keuangan	41.008	46.088	*Finance income*
Beban keuangan	(265.655)	(729.121)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak penghasilan	3.987.238	4.459.979	*Profit before income taxes*
Beban pajak penghasilan	(1.284.931)	(1.309.025)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	2.702.307	3.150.954	*Profit for the year*
Dividen yang dibayarkan	-	-	*Dividens paid*

Rekonsiliasi dari investasi pada PDG adalah sebagai berikut:

Reconciliation of investment in PDG is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai buku pada awal tahun	8.368.868	6.320.748	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian laba diserap tahun berjalan	1.417.175	2.048.120	*Share of profit for the year*
Penerimaan dividen	-	-	*Dividends received*
Nilai buku pada akhir tahun	9.786.043	8.368.868	*Carrying amount at the end of the year*

12. PENYERTAAN SAHAM DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Investasi pada ventura bersama (lanjutan)

(5) PDG (lanjutan)

PDG merupakan perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham PDG.

(6) KSO GAGAS–JUP

Ringkasan informasi keuangan KSO GAGAS–JUP adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES AND JOINT VENTURES (continued)

Investment in joint ventures (continued)

(5) PDG (continued)

PDG is an unlisted private company and there is no quoted market price available for its shares.

(6) KSO GAGAS–JUP

Summarised financial information for KSO GAGAS–JUP is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Laporan posisi keuangan			***Statement of financial position***
Kas dan setara kas	-	67.363	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya	28	30	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	544.417	596.065	*Other non-current assets*
Liabilitas keuangan jangka pendek	(30.946)	(32.386)	*Short-term financial liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya	(275.707)	(288.529)	*Other short-term liabilities*
Aset bersih	237.792	342.543	*Net assets*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Laporan laba rugi			***Statement of profit or loss***
Beban pokok penjualan	-	-	*Cost of revenue*
Beban lainnya	(25.319)	(130.781)	*Other expenses*
Rugi tahun berjalan	(25.319)	(130.781)	*Loss for the year*

Rekonsiliasi dari investasi pada KSO GAGAS–JUP adalah sebagai berikut:

Reconciliation of investment in KSO GAGAS–JUP is summarised as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Nilai buku pada awal tahun	154.161	220.860	*Carrying amount at the beginning of the year*
Bagian rugi diserap tahun berjalan	(5.353)	(66.698)	*Share of loss for the year carrying amount*
Nilai buku pada akhir tahun	148.808	154.162	*at the end of the year*

KSO GAGAS-JUP merupakan sebuah Kerja Sama Operasi (“KSO”) antara GEI dengan PT Jakarta Utilitas Propertindo (“JUP”) sehingga tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk kepemilikan dari KSO ini. Per 31 Desember 2024, GEI dan JUP telah sepakat melakukan pengakhiran KSO dengan sisa saldo aset akan dibagi sesuai dengan nilai persentase kepemilikan.

KSO GAGAS-JUP is a Joint Operation ("JO") between GEI and PT Jakarta Utilitas Propertindo ("JUP"), thus there is no quoted market price available for the ownership of this JO. As of December 31, 2024, GEI and JUP have agreed to terminate the JO, with the remaining asset balance to be divided according to the percentage of ownership value.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO / *13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET*

a. Aset tetap / *a. Fixed assets*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of fixed assets are as follows:*

	31 Desember/ *December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	111.207.463	-	-	1.697.498	112.904.961	*Land*
Bangunan dan prasarana	231.827.407	859.782	(36.120)	217.189	232.868.258	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	5.049.336.867	9.667.821	(480.609)	112.513.740	5.171.037.819	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	11.427.752	3.374.990	(2.096.815)	(455.939)	12.249.988	*Vehicles*
Peralatan kantor	23.404.747	74.868	(518.086)	20.446	22.981.975	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	15.135.666	247.541	(307.964)	271.804	15.347.047	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	7.111.524	-	(564.377)	-	6.547.147	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	312.576.801	139.042.471	(16.361.295)	(188.529.070)	246.728.907	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.762.028.227	153.267.473	(20.365.266)	(74.264.332)	5.820.666.102	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	132.773.173	10.582.883	(11.298)	(219.270)	143.125.488	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	2.856.385.148	164.698.136	(20.443)	(5.097.041)	3.015.965.800	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4.645.781	1.146.462	(1.706.548)	(154.192)	3.931.503	*Vehicles*
Peralatan kantor	22.306.438	1.095.411	(508.895)	(419.969)	22.472.985	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	13.505.197	396.304	(307.964)	(78.378)	13.515.159	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	4.741.668	146.788	(347.806)	-	4.540.650	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	3.034.357.405	178.065.984	(2.902.954)	(5.968.850)	3.203.551.585	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	106.482.806	1.363.623	-	-	107.846.429	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	106.482.806	1.363.623	-	-	107.846.429	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.621.188.016**				**2.509.268.088**	***Net book value***

	31 Desember/December 31, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	111.542.778	36	(374.117)	38.766	111.207.463	*Land*
Bangunan dan prasarana	229.347.643	264.809	(52.418)	2.267.373	231.827.407	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	4.979.480.770	46.892.202	(94.112)	23.058.007	5.049.336.867	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	8.594.728	3.925.266	(1.092.242)	-	11.427.752	*Vehicles*
Peralatan kantor	23.765.421	69.919	(610.299)	179.706	23.404.747	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	15.186.427	79.486	(324.771)	194.524	15.135.666	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	8.337.798	-	(1.226.274)	-	7.111.524	*Uninstalled assets*
Aset dalam penyelesaian	224.993.416	125.161.230	(651.149)	(36.926.696)	312.576.801	*Construction in progress*
Jumlah nilai tercatat	5.601.248.981	176.392.948	(4.425.382)	(11.188.320)	5.762.028.227	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan dan prasarana	121.595.972	11.229.619	(52.418)	-	132.773.173	*Buildings and improvements*
Pipa dan peralatan	2.695.345.391	161.671.611	(631.854)	-	2.856.385.148	*Pipelines and equipment*
Kendaraan bermotor	4.559.040	271.016	(184.275)	-	4.645.781	*Vehicles*
Peralatan kantor	21.633.207	1.134.754	(461.523)	-	22.306.438	*Office equipment*
Peralatan dan perabot	13.108.124	719.433	(322.360)	-	13.505.197	*Furniture and fixtures*
Aset belum terpasang	5.107.051	186.694	(552.077)	-	4.741.668	*Uninstalled assets*
Jumlah akumulasi penyusutan	2.861.348.785	175.213.127	(2.204.507)	-	3.034.357.405	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Pipa dan peralatan	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Pipelines and equipment*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	106.482.806	-	-	-	106.482.806	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**2.633.417.390**				**2.621.188.016**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

a. Aset tetap (lanjutan)

a. Fixed assets (continued)

Penyusutan dibebankan ke:

Depreciation was charged to the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	170.527.238	168.078.885	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	7.538.746	7.134.242	*General and administrative expenses (Note 29)*
Total	**178.065.984**	**175.213.127**	***Total***

Asuransi aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dengan nilai pertanggungan untuk pipa *onshore* sebesar USD1.223.433.450 dan nilai pertanggungan untuk pipa *offshore* sebesar USD337.400.000 dengan keseluruhan nilai pertanggungan sebesar USD1.560.833.450, serta asuransi untuk peralatan mesin sebesar USD40.793.672 dan untuk aset lainnya sebesar IDR16.506.745.678.214. Aset tetap entitas anak diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lain berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan total nilai pertanggungan untuk fasilitas pendukung FSRU Lampung sebesar USD236.600.000, aset SPBG PT Gagas Energi Indonesia sebesar IDR297.187.163.433, aset PT Kalimantan Jawa Gas sebesar USD267.570.793, dan aset PT Widar Mandripa Nusantara sebesar USD1.302.405.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Fixed assets insurance

As of December 31, 2024, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies from PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. with the sum insured totaling USD1,223,433,450 for onshore pipeline and sum insured totaling USD337,400,000 for offshore pipeline with overall asset coverage of USD1,560,833,450, USD40,793,672 for machinery breakdown and IDR16,506,745,678,214 for other assets. The Subsidiaries' fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under certain blanket policies with sum insured for support facilities Lampung FSRU of USD236,600,000, SPBG PT Gagas Energi Indonesia asset for IDR297,187,163,433, PT Kalimantan Jawa Gas asset for USD267,570,793, and PT Widar Mandripa Nusantara asset for USD1,302,405.

Management believes that the amounts insured are adequate to cover possible losses from insured assets.

Aset tetap yang telah sepenuhnya disusutkan namun masih digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah masing-masing sebesar USD371.461.106 dan USD297.694.777.

Fixed assets that have been fully depreciated but are still in use

As of December 31, 2024 and 2023, the cost of the Group's fixed assets which have been fully depreciated but are still in use in the operational activities amounted to USD371,461,106 and USD297,694,777, respectively.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

a. Aset tetap (lanjutan)

Pengurangan Aset tetap

Pada 31 Desember 2024, yang masuk pada kolom pengurangan aset dalam penyelesaian adalah pembebanan atas biaya *overhead* dan biaya proyek yang tidak dilanjutkan. Selain itu, terdapat aset dalam penyelesaian berupa sewa lahan yang direklasifikasi ke akun sewa dibayar dimuka.

Reklasifikasi dan penyesuaian aset tetap

Termasuk pada kolom reklasifikasi dan penyesuaian adalah reklasifikasi aset pipa Senipah - Balikpapan sebesar USD83.452.726 ke akun Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 14c), sehubungan dengan perjanjian dengan KPI terkait pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pipa gas bumi selama jangka waktu 30 tahun. Berdasarkan kontrak, terdapat klausul pengalihan aset di akhir periode kontrak.

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang - Tambak Lorok

Grup mencatat provisi penurunan nilai aset tetap KJG sebesar USD107.846.429. Perhitungan penurunan nilai aset tetap dilakukan oleh manajemen atas dasar volume penyaluran gas yang didukung oleh komitmen penjualan gas. Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat penambahan provisi penurunan nilai aset tetap di KJG sebesar USD1.363.623.

Jumlah terpulihkan unit penghasil kas ("UPK") dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan transmisi gas yang bersumber dari gas lapangan Kepodang di blok Muriah hingga tahun 2026 (2025 hingga tahun 2026) dengan metode *value-in-use* ("VIU") dimana lebih tinggi dari metode *fair value less cost to sell*.

Perhitungan arus kas diskontoan yang digunakan meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

a. Fixed assets (continued)

Deduction of Fixed Assets

As of December 31, 2024, included in the deduction column of assets under construction are expenses for overhead costs and discontinued project costs. In addition, there are assets under construction in the form of land lease assets that are reclassified to the advance account.

Reclassification and adjustment of fixed assets

"Reclassification and adjustment" column include reclassification of Senipah – Balikpapan pipeline assets amounted to USD83,452,726 to Finance Lease Receivables (Note 14c), in relation with KPI agreement for construction and utilisation of natural gas pipeline for a period of 30 years. Based on the contract, there are clauses of transfer of assets at the end of contract period.

b. Impairment test on fixed assets

Impairment of Kepodang - Tambak Lorok transmission pipe

The Group recorded a provision for the impairment of KJG's fixed assets amounting to USD107,846,429. The calculation of the impairment of fixed assets was carried out by management based on the volume of gas distribution supported by the commitment of gas sales. As of December 31, 2024, there were additions of provisions for the impairment of fixed assets in KJG amounting to USD1,363,623.

The recoverable amount of the cash generating units ("CGU") is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from gas transmission with the gas source from Kepodang field in Muriah block up to 2026 (2025 up to 2026) using the value-in-use method ("VIU") method, which is higher than the fair value less cost to sell method.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

b. Uji penurunan nilai atas aset tetap (lanjutan)

Penurunan nilai pipa transmisi Kepodang – Tambak Lorok (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

b. Impairment test on fixed assets (continued)

Impairment of Kepodang – Tambak Lorok transmission pipe (continued)

The key assumptions used for value-in-use calculations as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Volume gas dari blok Muriah (mscf)			*Volume gas from Muriah block (mscf)*
2024	-	4.691.830	*2024*
2025	3.354.350	-	*2025*
2026	1.015.650	-	2026
Tarif jasa pengangkutan	USD2,326/MMBTU	USD2,326/MMBTU	*Toll-fee*
Tingkat diskonto	9,38%	8,91%	*Discount rate*
Periode arus kas	Sampai/*Until* 2026	Sampai/Until 2024	*Cash flows period*
Metode yang digunakan untuk nilai terpulihkan	VIU	VIU	*Method used for recoverable amount*

c. Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek yang masih belum selesai pada tanggal laporan keuangan konsolidasian. Rincian aset dalam penyelesaian signifikan adalah sebagai berikut:

c. Construction in progress

Construction in progress represent projects that have not been completed at the date of the consolidated financial statements. Significant items of construction in progress are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024			
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date***
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	36.299.035	2027
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	70,68%	25.192.626	2025
Pekerjaan Pembangunan booster pump Pipa Minyak Duri-Rokan/*Construction project of booster pump for Duri-Rokan oil transportation pipeline*	98,12%	32.071.283	2025
Pekerjaan revitalisasi tangki LNG F-6004 Arun *Revitalization project of LNG Arun F-6004*	79,00%	31.430.318	2025

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

c. Aset dalam penyelesaian (lanjutan)

c. Construction in progress (continued)

31 Desember/*December* 31, 2023			
Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated completion date***
Pekerjaan pembangunan Terminal LNG di Jawa Timur/ *Construction of LNG Terminal in East Java*	99,51%	35.922.447	2026
Pekerjaan pembangunan gas pipa untuk rumah tangga Gaskita Mandiri/*Construction of gas pipeline development for households Gaskita Mandiri*	95,17%	29.347.024	2024
Pekerjaan pembangunan Pipa Gas Senipah Balikpapan/ *Construction of Senipah Balikpapan Pipeline*	99,26%	76.364.799	2024

Selain dari aset dalam penyelesaian yang dinyatakan di atas, Grup masih memiliki aset dalam penyelesaian yang terdiri dari pengembangan jaringan dan infrastruktur untuk pelanggan kecil dan rumah tangga dalam jalur distribusi gas Grup.

Outside of the construction in progress stated above, the Group still has construction in progress assets which consist of the development of networks and infrastructure for small customers and household within the Group's gas distribution lines.

d. Aset takberwujud - neto

d. Intangible assets - net

Perubahan dalam akun aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The changes in intangible assets account for the year ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/*December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	10.375.017	820.048	-	11.195.065	*Software*
Hak atas tanah	2.116.698	63.009	-	2.179.707	*Land rights*
	12.491.715	883.057	-	13.374.772	
Akumulasi amortisasi					***Accummulated amortisation***
Piranti lunak	(8.811.438)	(1.044.436)	-	(9.855.874)	*Software*
Hak atas tanah	(1.192.509)	(101.805)	-	(1.294.314)	*Land rights*
	(10.003.947)	(1.146.241)	-	(11.150.188)	
Nilai buku bersih	**2.487.768**	**(263.184)**	**-**	**2.224.584**	***Net book value***

13. ASET TETAP DAN ASET TAKBERWUJUD – NETO (lanjutan)

13. FIXED ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS – NET (continued)

d. Aset takberwujud (lanjutan)

d. Intangible Assets (continued)

	31 Desember/*December 31, 2023*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Piranti lunak	9.514.234	860.783	-	10.375.017	*Software*
Hak atas tanah	1.971.164	146.012	(478)	2.116.698	*Land rights*
	11.485.398	1.006.795	(478)	12.491.715	
Akumulasi amortisasi					***Accumlated amortisation***
Piranti lunak	(7.953.450)	(857.988)	-	(8.811.438)	*Software*
Hak atas tanah	(1.088.075)	(104.912)	478	(1.192.509)	*Land rights*
	(9.041.525)	(962.900)	478	(10.003.947)	
Nilai buku bersih	**2.443.873**	**43.895**	**-**	**2.487.768**	***Net book value***

Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD327.758 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD818.483. Beban amortisasi aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat pada Beban Pokok Pendapatan sebesar USD326.836 dan Beban Umum dan Administrasi sebesar USD636.064.

Amortization expenses of intangible assets for the year ended December 31, 2024 were recorded in Cost of Revenues amounting to USD327,758 and General and Administrative Expenses amounting to USD818,483. The amortization expenses of the intangible assets for the year ended on December 31, 2023 were recorded in the Cost of Revenue amounting to USD326,836 and General and Administrative Expenses amounting to USD636,064.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh aset takberwujud tersebut dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

The management is of the opinion that all of such intangible assets can be recovered, hence no allowance for impairment is necessary.

14. SEWA

14. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

Catatan ini menyajikan informasi untuk sewa dimana Grup bertindak sebagai *lessee:*

This note provides information for leases where the Group acts as a lessee:

	31 Desember/*December 31, 2024*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit (“FSRU”)	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit (“FSRU”)*
Tug boats	70.041.849	-	(37.595.420)	32.446.429	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	19.129.167	3.824.607	(5.762.138)	17.191.636	*Buildings and improvements*
Kendaraan	9.656.176	3.258.931	(904.234)	12.010.873	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	39.871.898	4.105.760	14.960.287	58.937.945	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	148.528	165.842	(5.628)	308.742	*Other equipment*
Total nilai tercatat	585.179.443	11.355.140	(29.307.133)	567.227.450	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(123.837.732)	(30.983.827)	24.394	(154.797.165)	*FSRU*
Tug boats	(22.762.457)	(4.090.047)	22.786.725	(4.065.779)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(6.200.988)	(2.018.468)	66.736	(8.152.720)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(7.115.708)	(2.568.680)	1.141.250	(8.543.138)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(11.995.251)	(4.362.877)	(3.922.930)	(20.281.058)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(56.079)	(39.760)	2.170	(93.669)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(171.968.215)	(44.063.659)	20.098.345	(195.933.529)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**413.211.228**			**371.293.921**	***Net book value***

14. SEWA (lanjutan) / *14. LEASES (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / *a. Right-of-use assets (continued)*

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Penyesuaian/ *Adjustments*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai tercatat					***Carrying value***
Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")	446.331.825	-	-	446.331.825	*Floating Storage Regasification Unit ("FSRU")*
Tug boats	67.150.566	-	2.891.283	70.041.849	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	24.788.938	2.181.488	(7.841.259)	19.129.167	*Buildings and improvements*
Kendaraan	8.798.414	2.126.233	(1.268.471)	9.656.176	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	50.836.484	-	(10.964.586)	39.871.898	*Pipelines and Equipment*
Peralatan lainnya	3.916.943	125.704	(3.894.119)	148.528	*Other equipment*
Total nilai tercatat	601.823.170	4.433.425	(21.077.152)	585.179.443	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
FSRU	(92.878.299)	(30.959.433)	-	(123.837.732)	*FSRU*
Tug boats	(15.446.195)	(3.917.408)	(3.398.854)	(22.762.457)	*Tug boats*
Bangunan dan prasarana	(9.294.547)	2.237.858	855.701	(6.200.988)	*Buildings and improvements*
Kendaraan	(5.422.191)	(3.801.967)	2.108.450	(7.115.708)	*Vehicles*
Pipa dan peralatan	(13.015.179)	(8.458.994)	9.478.922	(11.995.251)	*Pipelines and equipment*
Peralatan lainnya	(3.399.931)	(78.942)	3.422.794	(56.079)	*Other equipment*
Total akumulasi penyusutan	(139.456.342)	(44.978.886)	12.467.013	(171.968.215)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih	**462.366.828**			**413.211.228**	***Net book value***

Penyusutan dibebankan ke: / *Depreciation was charged to the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	40.536.596	42.607.329	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	3.527.063	2.371.557	*General and administrative expenses (Note 29)*
	44.063.659	44.978.886	

Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai FSRU. Tidak ada penurunan nilai yang perlu dibukukan pada tanggal 31 Desember 2024.

The Group has carried out an impairment test for the FSRU. There were no impairment needs to be recorded at December 31, 2024.

b. Liabilitas sewa / *b. Lease liabilities*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	430.682.063	474.439.515	*Beginning balance*
Beban bunga	17.015.634	19.171.128	*Interest expense*
Penambahan	11.619.468	3.839.597	*Additions*
Penyesuaian	(10.144.078)	(8.693.697)	*Adjustments*
Pembayaran	(53.938.672)	(58.074.480)	*Payments*
Saldo akhir	395.234.415	430.682.063	*Ending balance*
Bagian jangka pendek	41.359.840	34.826.814	*Current portion*
Bagian jangka Panjang	**353.874.575**	**395.855.249**	***Non-current portion***

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

b. Lease liabilities (continued)

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of profit or loss show the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Beban bunga (Catatan 30a)	17.015.634	19.171.128	*Interest expense (Note 30a)*
Beban terkait sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah	49.865.960	48.574.215	*Expenses relating to short-term and low-value assets leases*

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statements of cash flows show the following amounts related to leases:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Pembayaran kepada pemasok	(49.865.960)	(48.574.215)	*Payments to suppliers*
Pembayaran bunga atas sewa	(17.015.634)	(19.171.128)	*Payments for interest on lease*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pembayaran liabilitas sewa	(36.923.038)	(38.903.352)	*Repayments of lease liabilities*

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa FSRU, gedung, peralatan berat, kendaraan, dan kapal (*time charter*). Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 sampai dengan 5 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 3. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

The Group entered into several lease agreements which are mainly related to rental of FSRU, buildings, heavy equipment, vehicles and shipping vessels (time charter). Rental agreements are typically made for fixed periods of 1 to 5 years but may have extension options as described in Note 3. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants, but leased assets may not be used as security for borrowing purposes.

14. SEWA (lanjutan)

c. Piutang sewa pembiayaan

Akun ini terkait dengan implikasi dari perlakuan Akuntansi sewa pembiayaan atas perjanjian pembangunan dan pemanfaatan fasilitas Pipa Gas Bumi Senipah Balikpapan antara Pertagas dengan KPI yang berlaku selama 30 tahun sejak tahun 2024.

Analisis maturitas dari piutang sewa, termasuk pembayaran sewa yang belum didiskontokan yang akan diterima adalah sebagai berikut:

14. LEASES (continued)

c. Finance lease receivable

This account related to the impact of the finance lease accounting treatment on the construction and utilisation of Senipah Balikpapan Natural Gas Pipeline agreement between Pertagas and KPI effective for 30 years starting from 2024.

The maturity analysis of lease receivables, including the undiscounted lease payments to be received are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Kurang dari 1 tahun	10.591.779	-	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	5.295.890	-	*1 - 2* year
2 - 3 tahun	5.295.890	-	*2 - 3 year*
3 - 4 tahun	5.295.890	-	*3 - 4 year*
4 - 5 tahun	5.295.890	-	*4 - 5 year*
Di atas 5 tahun	127.101.347	-	*above 5 year*
Total piutang sewa pembiayaan bruto	158.876.686	-	*Total gross financial lease receivable*
Penghasilan keuangan yang belum terealisasi	(75.423.960)	-	*Unearned finance income*
Piutang sewa pembiayaan bersih	**83.452.726**	**-**	***Net investment in finance leases receivables***
Bagian jangka pendek	6.461.033	-	*Current portion*
Bagian jangka panjang	76.991.693	-	*Non-current portion*

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen berpendapat tidak ada indikasi penurunan nilai terhadap piutang sewa pembiayaan, oleh karena itu uji penurunan nilai tidak diperlukan.

As of December 31, 2024, management believes that there is no indication of impairment in the value of the finance lease receivables and therefore an impairment test was not required.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO

a. Aset eksplorasi dan evaluasi

Pergerakan aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET

a. Exploration and evaluation assets

Movements of exploration and evaluation assets are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	6.021.891	120.732	6.142.623	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Yamdena Barat, Maluku	3.626.552	75.034	3.701.586	*West Yamdena, Maluku -*
- Pekawai, Kalimantan Timur	1.428.888	349.890	1.778.778	*Pekawai, East Kalimantan -*
- Sangkar, Jawa Tengah	50.000	342.356	392.356	*Sangkar, Central Java -*
- Pangkah, Jawa Timur	-	38.244.291	38.244.291	*Pangkah, East Java -*
- Ketapang, Jawa Timur	-	14.971.441	14.971.441	*Sangkar, Central Java -*
Total	**11.127.331**	**54.103.744**	**65.231.075**	***Total***

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

a. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

a. Exploration and evaluation assets (continued)

Pergerakan aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements of exploration and evaluation assets are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Blok/Lokasi				***Block/Location***
- Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	98.017.068	(98.017.068)	-	*South Sesulu, East Kalimantan -*
- Bangkanai Barat, Kalimantan Tengah	5.883.762	138.130	6.021.891	*West Bangkanai, - Central Kalimantan*
- Pekawai, Kalimantan Timur	1.090.574	338.314	1.428.888	*Pekawai, East Kalimantan -*
- Yamdena Barat, Maluku	3.521.555	104.997	3.626.552	*West Yamdena, Maluku -*
- Sangkar, Jawa Tengah	-	50.000	50.000	*Sangkar, Central Java -*
Total	**108.512.959**	**(97.385.627)**	**11.127.331**	***Total***

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Pangkah dan Ketapang terdiri atas sumur eksplorasi Ronggolawe 3, Hikmah dan Perkasa, dengan total pengeluaran masing-masing USD38.244.291, USD 6.608.852 dan USD8.362.589 yang masih dalam tahap proses pengajuan serta finalisasi *Plan of Development ("POD")*. Manajemen telah melakukan berbagai upaya strategis guna memastikan kelayakan pengembangan aset tersebut, termasuk evaluasi keekonomian proyek, kegiatan diskusi dengan para pemangku kepentingan serta optimalisasi strategi eksplorasi untuk meningkatkan kepastian cadangan.

Aset eksplorasi dan evaluasi di blok Sesulu Selatan terdiri dari tiga sumur eksplorasi, yaitu sumur SIS-A#1, SIS-G#1, dan West SIS-A#1 dengan total pengeluaran masing-masing USD53.438.874, USD22.924.801, dan USD21.653.393. Di tahun 2019, Grup telah menyampaikan kepada SKK Migas penemuan cadangan gas bumi di struktur SIS-A dan Grup telah melaksanakan komitmen program kerja eksplorasi sesuai dengan PSC Sesulu Selatan. Sesuai dengan ketentuan komersialitas wilayah kerja di dalam PSC, Grup diberi waktu 3 tahun untuk menyerahkan *plan of development* ("POD") sejak penemuan cadangan gas bumi di struktur SIS-A, yaitu sampai dengan bulan Mei 2022 dan mendapat perpanjangan hingga Mei 2023. Manajemen telah menyampaikan dokumen POD I Lapangan SIS-A pada tanggal 8 Maret 2023 dan telah menerima persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana disampaikan oleh Surat SKK Migas nomor SRT-0334/SKKIA0000/2023/S1 tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan POD tersebut, *sunk cost* WK South Sesulu senilai USD110,23 juta dapat dipulihkan dari POD SIS-A tersebut serta POD selanjutnya melalui mekanisme *Ring Fencing Block Basis*.

The exploration and evaluation assets in the Pangkah and Ketapang blocks consist of the Ronggolawe 3, Hikmah and Perkasa exploration wells, with total expenditures of USD38,244,291, USD6,608,852 and USD8,362,589, respectively, which are still in the process of submitting and finalizing the Plan of Development ("POD"). Management has made various strategic efforts to ensure the feasibility of developing these assets, including evaluating the economics of the project, discussions with stakeholders and optimizing exploration strategies to increase reserve certainty.

The exploration and evaluation assets in South Sesulu block consist of three exploration wells, namely SIS-A#1, SIS-G#1, and West SIS-A#1 wells with total expenditure of USD53,438,874, USD22,924,801 and USD21,653,393, respectively. In 2019, the Group has communicated to SKK Migas the discovery of natural gas reserves in the SIS-A structure and that the Group fulfilled the firm commitment for exploration activities under South Sesulu PSC. Pursuant to the commerciality of working area provisions in PSC, the Group is required to submit a plan of development ("POD") within 3 years from natural gas reserves discovery at SIS-A, that is until May 2022 and was extended until May 2023. The Management has submitted the SIS-A Field POD I document on March 8, 2023 and has been approved by the Minister of EMR as conveyed by SKK Migas letter number SRT-0334/SKKIA0000/2023/S1 dated August 22, 2023. Based on the POD, South Sesulu Block's sunk cost amounting to USD110.23 million can be recovered by SIS-A POD and subsequent PODs through the Block Basis Ring Fencing mechanism.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan)

a. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Untuk sumur SIS-G#1 dan West SIS-A#1, Grup menemukan potensi gas biogenik (2C *resources*) dan telah menyusun rencana kerja untuk melanjutkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan di struktur SIS-G dan West SIS-A.

Atas dasar kedua hal tersebut, manajemen Grup mereklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi di blok Sesulu Selatan ke Properti Minyak dan Gas pada tahun 2023.

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)

a. Exploration and evaluation assets (continued)

For SIS-G#1 and West SIS-A#1 wells, the Group discovered potential biogenic gas (2C resources) and has prepared a work plan to continue exploration and development activities in the SIS-G and West SIS-A structures.

On that basis, Group's management have reclassified the exploration and evaluation assets in South Sesulu block to Oil and Gas Properties in 2023.

b. Properti minyak dan gas

Mutasi properti minyak dan gas adalah sebagai berikut:

b. Oil and gas properties

Movement of oil and gas properties is as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	119.021.049	20.005	(94.327)	-	118.946.727	*Muriah, Jawa Tengah*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	98.482.652	552.215	-	-	99.034.867	*South Sesulu, Kalimantan Timur*
Ketapang, Jawa Timur	351.418.726	106.501	(192.965)	-	351.332.262	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	1.416.024.623	22.738.612	(1.530.141)	-	1.437.233.094	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	93.196.858	161.798	(155.940)	-	93.202.716	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	623.582.656	13.068.578	(1.006.629)	-	635.644.605	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	360.867.565	396	(352.557)	-	360.515.404	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat	3.098.992.926	36.648.105	(3.332.559)	-	3.132.308.472	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(84.120.285)	(698.452)	-	-	(84.818.737)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(270.035.937)	(11.348.723)	-	-	(281.384.660)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(1.011.138.419)	(125.077.659)	-	-	(1.136.216.078)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(38.680.240)	(4.485.064)	-	-	(43.165.304)	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(472.625.271)	(36.753.501)	-	-	(509.378.772)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(207.343.994)	(20.220.538)	-	-	(227.564.532)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(2.120.342.943)	(198.583.937)	-	-	(2.318.926.880)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	-	(9.068.015)	-	-	(9.068.015)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	-	-	-	-	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(108.523.539)	(9.068.015)	-	-	(117.591.554)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**870.126.444**				**695.790.038**	***Net book value***

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS - NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES - NET (continued)

b. Properti minyak dan gas (lanjutan)

b. Oil and gas properties (continued)

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Muriah, Jawa Tengah	119.424.281	3.182.118	(3.585.350)	-	119.021.049	*Muriah, Jawa Tengah*
Sesulu Selatan, Kalimantan Timur	-	465.583	-	98.017.068	98.482.651	*South Sesulu, Kalimantan Timur*
Ketapang, Jawa Timur	346.919.827	7.066.256	(2.567.356)	-	351.418.726	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	1.347.451.592	68.746.825	(173.794)	-	1.416.024.623	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	97.310.166	234.082	(4.347.390)	-	93.196.858	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	36.398.797	-	-	-	36.398.797	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	620.323.592	4.344.027	(1.084.963)	-	623.582.656	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	361.190.516	444.739	(767.690)	-	360.867.565	*Fasken, Texas*
Jumlah nilai tercatat	2.929.018.771	84.483.630	(12.526.544)	98.017.068	3.098.992.926	*Total carrying value*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Muriah, Jawa Tengah	(80.555.774)	(3.564.511)	-	-	(84.120.285)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(244.057.932)	(25.978.005)	-	-	(270.035.937)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	(874.261.591)	(136.876.828)	-	-	(1.011.138.419)	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	(33.833.382)	(4.846.858)	-	-	(38.680.240)	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	(36.398.797)	-	-	-	(36.398.797)	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(414.215.260)	(58.410.011)	-	-	(472.625.271)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	(190.484.796)	(16.859.198)	-	-	(207.343.994)	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penyusutan	(1.873.807.532)	(246.535.411)	-	-	(2.120.342.943)	*Total accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai						***Accumulated impairment***
Muriah, Jawa Tengah	(33.542.120)	-	-	-	(33.542.120)	*Muriah, Jawa Tengah*
Ketapang, Jawa Timur	(24.622.241)	-	-	-	(24.622.241)	*Ketapang, Jawa Timur*
Pangkah, Jawa Timur	-	-	-	-	-	*Pangkah, Jawa Timur*
Bangkanai, Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	*Bangkanai, Kalimantan Tengah*
Sanga-Sanga, Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	*Sanga-Sanga, Kalimantan Timur*
Muara Bakau, Kalimantan Timur	(50.359.178)	-	-	-	(50.359.178)	*Muara Bakau, Kalimantan Timur*
Fasken, Texas	-	-	-	-	-	*Fasken, Texas*
Jumlah akumulasi penurunan nilai	(108.523.539)	-	-	-	(108.523.539)	*Total accumulated impairment*
Nilai buku bersih	**946.687.700**				**870.126.444**	***Net book value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 28) masing-masing sebesar USD198.583.937 dan USD246.535.411.

Depreciation expense for the year ended December 31, 2024 and 2023 was allocated to cost of revenues (Note 28) amounting to USD198,583,937 and USD246,535,411, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD1.819.096.517.

As of December 31, 2024, all wells and related equipment and facilities were insured for an amount of USD1,819,096,517.

PSC Sanga-Sanga, dimana SESL memiliki *participating interest,* telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2018 dan dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Seluruh properti minyak dan gas PSC Sanga-Sanga telah disusutkan penuh.

The Sanga-Sanga PSC, in which SESL owns a participating interest, expired on August 8, 2018 and was returned to the Government of the Republic of Indonesia. All oil and gas properties related to the Sanga-Sanga PSC had been fully depreciated.

Berdasarkan surat SKK Migas pada tanggal 13 Agustus 2018, Grup akan menerima pembayaran atas pengembalian biaya investasi PSC Sanga-Sanga sebesar USD42.312.836 yang akan diverifikasi lebih lanjut oleh Pertamina.

Based on a letter from SKK Migas dated August 13, 2018, the Group will receive a payment for unrecovered investment costs of Sanga-Sanga PSC amounting to USD42,312,836, which will be further verified by Pertamina.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

b. Properti minyak dan gas (lanjutan)

Pada tanggal 20 September 2021, SKK Migas melalui suratnya No. SRT-0595/SKKMA0000/2021/S4 menyatakan bahwa kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2017 dan perubahannya dalam rangka pengembalian biaya investasi PSC Sanga-Sanga belum terpenuhi sehingga nilai pembayaran atas pengembalian biaya investasi yang disetujui adalah nihil.

Pada tanggal 9 Agustus 2023, VICO Indonesia ("VICO") selaku Operator sebelumnya WK Sanga-Sanga, bersama dengan SKK Migas telah menyusun Berita Acara Penyelesaian Aspek Keuangan dalam rangka terminasi WK Sanga-Sanga yang berakhir pada tanggal 7 Agustus 2018.

Berita Acara tersebut telah ditandatangani pada tanggal 14 September 2023 oleh VICO. Selain Berita Acara tersebut, VICO dengan dibantu oleh Perusahaan telah menyampaikan rancangan Settlement Agreement kepada SKK Migas sebagai dokumen terminasi PSC WK Sanga-Sanga. Rancangan tersebut telah didiskusikan antara VICO dan SKK Migas pada tanggal 20 September 2023.

Pada tanggal 28 Desember 2023, VICO dan SKK Migas telah menandatangani Perjanjian Tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban Aspek Keuangan Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sanga-Sanga, penyelesaian Aspek Keuangan ini telah dibayarkan secara penuh oleh VICO kepada SKK Migas.

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

b. Oil and gas properties (continued)

On September 20, 2021, SKK Migas through its letter No. SRT-0595/SKKMA0000/2021/S4 stated that the criteria required in Regulation of the Ministry of EMR No. 26 of 2017 and its amendments regarding payment for unrecovered investment costs of the Sanga-Sanga PSC have not been fulfilled so that the agreed payment for unrecovered investment costs is nil.

On August 9, 2023, VICO Indonesia ("VICO") as the previous Operator of Sanga-Sanga Block, with SKK Migas had prepared Financial Aspects Completion Minutes on Sanga-Sanga Block termination as of August 7, 2018.

This Minutes had been signed on September 14, 2023 by VICO. In addition to the Minutes, VICO assisted by the Company, has submitted a draft of Settlement Agreement to SKK Migas as a termination document for the Sanga-Sanga Block PSC. The draft was discussed by VICO and SKK Migas on September 20, 2023.

On December 28, 2023, VICO and SKK Migas signed an Agreement Concerning Settlement of Rights and Obligations of Financial Aspects of Sanga-Sanga Contract Area Production Sharing Contract Termination, the Financial Aspect settlement has been paid in full by VICO to SKK Migas.

15. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI DAN PROPERTI MINYAK DAN GAS – NETO (lanjutan)

15. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS AND OIL AND GAS PROPERTIES – NET (continued)

c. Uji penurunan nilai atas properti minyak dan gas

Pengujian penurunan nilai atas properti minyak dan gas dilakukan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatat properti minyak dan gas tersebut mengalami penurunan. Dalam hal ini, manajemen Grup menentukan hak kepemilikan pada masing-masing blok sebagai satu UPK.

Nilai terpulihkan UPK dinilai dengan menggunakan proyeksi arus kas berdasarkan pendapatan yang akan diterima dari kegiatan produksi minyak dan gas dengan periode proyeksi hingga akhir masa PSC atau konsesi dengan metode *value-in-use* atau *fair value less cost to sell*, yang mana yang lebih tinggi. Rencana produksi pada proyeksi arus kas ini tidak melampaui cadangan minyak dan gas atau akhir masa PSC atau konsesi.

Perhitungan arus kas diskonto yang meliputi proyeksi arus kas di masa depan dan mendiskontokannya menjadi nilai kini. Proses pendiskontoan menggunakan tingkat pengembalian yang sesuai dengan risiko terkait dengan bisnis atau aset dan nilai waktu uang.

Manajemen menentukan asumsi utama berdasarkan kombinasi pengalaman masa lalu dan sumber eksternal.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai properti minyak dan gas adalah sebagai berikut:

c. Impairment test on oil and gas properties

An impairment test on oil and gas properties is performed when there is an indication that the carrying value of oil and gas properties may be impaired. For this purpose, management of the Group has determined the participating interests in the respective blocks as the relevant CGUs.

The recoverable amount of the CGUs is determined using cash flow projections based on revenue expected to be generated from oil and gas production with projection periods up to the PSC or concession expiration date and using value-in-use or fair value less cost to sell methods, whichever is higher. The production plans used in the cash flow projections also do not exceed oil and gas reserves or the end of the PSC or concession period.

A discounted cash flow calculation involves projecting cash flows and discounting them back to present value. The discounting process uses a rate of return that is commensurate with the risk associated with the business or asset and the time value of money.

Management determined the key assumptions based on a combination of past experience and external sources.

Movements in the allowance for impairment losses on oil and gas properties were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Saldo awal	108.523.539	108.523.539	*Beginning balance*
Penambahan	9.068.015	-	*Addition*
Pembalikan	-	-	*Reversal*
Saldo akhir	**117.591.554**	**108.523.539**	***Ending balance***

Di akhir tahun 2024, berdasarkan kajian indikasi penurunan nilai yang dilakukan oleh manajemen, manajemen berkesimpulan terdapat indikasi penurunan nilai dan melakukan pengujian penurunan nilai di semua blok yang dimiliki oleh Grup. Grup mencatat tambahan provisi penurunan nilai atas Blok Pangkah sebesar USD9.068.015.

At the end of 2024, based on management's assessment of impairment indicators, management concluded that there were impairment indications and conducted impairment tests for all blocks owned by the Group. The Group recorded a further impairment charge for Pangkah block amounting to USD9,068,015.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
PT Pertamina EP	40.419.874	38.405.572	*PT Pertamina EP*
Pertamina	39.400.882	38.218.531	*Pertamina*
PHE	20.545.607	17.812.289	*PHE*
PT Elnusa Tbk.	8.155.571	2.756.781	*PT Elnusa Tbk.*
KPI	7.707.752	64.938.554	*KPI*
PT Pertamina Trans Kontinental	7.019.452	2.035.675	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Pertamina Training & Consulting	4.112.703	3.594.465	*PT Pertamina Training & Consulting*
PT Pertamina International Shipping	3.164.384	-	*PT Pertamina International Shipping*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	2.882.636	-	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*
Transgasindo	2.779.058	6.827.615	*Transgasindo*
PT Pertamina Bina Medika IHC	2.159.685	1.202.002	*PT Pertamina Bina Medika IHC*
PT Patra Drilling Contractor	1.339.246	3.652.009	*PT Patra Drilling Contractor*
PT Pertamina Patra Niaga	736.734	1.044.102	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	652	4.037.828	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	5.981.364	4.934.191	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	146.405.600	189.459.614	*Subtotal*
Pihak ketiga	90.991.888	55.750.530	***Third parties***
Total utang usaha	**237.397.488**	**245.210.144**	***Total trade payables***

Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga yang nilainya memerlukan penyajian terpisah. Semua utang usaha berstatus lancar. Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

There are no payables to third parties which meet the threshold for separate disclosure. All trade payables are current. Due to their short-term nature, their fair value is equal to their carrying amount.

17. UTANG LAIN-LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	30.328.527	48.466.206	*Liabilities to contractors and suppliers*
Jaminan gas	35.023.790	34.619.061	*Gas guarantee deposits*
Pendapatan diterima di muka dari pelanggan	24.112.188	22.177.997	*Unearned revenue from customers*
Utang *cash call*	8.733.693	10.407.479	*Cash calls payable*
Lain-lain	152.002	1.619.926	*Others*
Total utang lain-lain	**98.350.200**	**117.290.669**	***Total other payables***

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok sebagian besar merupakan liabilitas sehubungan dengan pembangunan proyek-proyek oleh Divisi *Project Management Office* ("PMO") Perusahaan beserta liabilitas kepada kontraktor terkait aktivitas hulu minyak dan gas.

Liabilities to contractors and suppliers primarily represent liabilities related to the construction of projects by the Company's Project Management Office ("PMO") and liabilities to contractors related to upstream oil and gas activities.

Utang jaminan gas merupakan uang jaminan gas yang diterima oleh Grup dari pelanggan dalam rangka transaksi penjualan gas.

Gas guarantee deposits payable represents gas deposits received by the Group from customers in relation to gas sales transactions.

17. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang *cash call* merupakan utang kepada operator yang berkaitan dengan kegiatan operasional di blok Fasken dan Ketapang.

Pendapatan diterima di muka dari pelanggan merupakan kas yang diterima dari pelanggan terkait penjualan minyak mentah dan gas bumi yang akan terealisasi dengan penjualan di kemudian hari.

17. OTHER PAYABLES (continued)

Cash call payables represent payables to operators related to operational activities in Fasken and Ketapang blocks.

Unearned revenue from customers represents cash received from customers from sales of crude oil and natural gas that will be realized through future sales.

18. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PENDAPATAN DITANGGUHKAN

a. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

18. ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED REVENUE

a. Accrued Liabilities

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok	243.139.554	210.963.891	*Liabilities to contractors and suppliers*
Provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu (Catatan 36c)	117.273.420	82.284.759	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas (Note 36c)*
Provisi kontrak LNG (Catatan 35p)	72.027.462	68.540.528	*Provision for LNG contract (Note 35p)*
Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas	33.411.820	30.286.539	*Liabilities for oil and gas activities*
Liabilitas *Take or Pay* dan Kelebihan Bayar Pelanggan	3.430.988	3.850.534	*Take or Pay Liabilities and Customer's overpayments*
Bunga	5.424.934	4.874.183	*Interest*
Biaya legal dan arbitrase (Catatan 36a)	5.266.250	-	*Legal and arbitration expense (Note 36a)*
Provisi sengketa pajak	4.638.669	6.903.937	*Provision for tax dispute*
Lain-lain	13.002.748	13.509.418	*Others*
Jumlah liabilitas yang masih harus dibayar	**497.615.845**	**421.213.789**	***Total accrued liabilities***
Bagian jangka pendek	425.588.383	352.673.261	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	72.027.462	68.540.528	*Long-term portion*

Liabilitas kepada kontraktor dan pemasok merupakan liabilitas dimana tagihan atas liabilitas tersebut belum diterima Grup.

Liabilitas atas aktivitas minyak dan gas merupakan liabilitas yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Biaya bunga yang masih harus dibayar terdiri dari biaya bunga pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan bunga obligasi.

Liabilities to contractors and suppliers represent liabilities for which the related invoices for such amounts have not yet been received by the Group.

Liabilities for oil and gas activities represent liabilities relating to oil and gas exploration and production activities.

Accrued interest consists of interest on short-term bank borrowings, long-term bank borrowings and bonds.

18. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN PENDAPATAN DITANGGUHKAN (lanjutan)

18. ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED REVENUE (continued)

b. Pendapatan Ditangguhkan

b. Deferred Revenue

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bagian lancar			*Current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* dari pelanggan	30.809.453	8.038.209	*Take or Pay and Ship or Pay from customer*
Bagian tidak lancar			*Non - current portion*
Kewajiban *Take or Pay* dan *Ship or Pay* dari pelanggan	96.645.863	153.931.086	*Take or Pay and Ship or Pay from customer*
Perjanjian KSO	1.455.203	1.605.546	JO *Agreement*
Subtotal	**98.101.066**	**155.536.632**	***Subtotal***
Jumlah	**128.910.519**	**163.574.841**	***Total***

Pendapatan yang ditangguhkan timbul dari transaksi penjualan gas bumi dan transportasi gas bumi oleh Grup dimana PJBG memiliki skema *Take-or-Pay* dan PPG memiliki skema *Ship-or-Pay.*

Dalam skema *Take-or-Pay* dan *Ship-or-Pay*, pembeli harus membayar jumlah minimum jika kuantitas gas aktual yang diambil (*Take-or-Pay*) atau dialirkan (*Ship-or-Pay*) kurang dari kuantitas minimum yang telah disepakati.

Pembeli memiliki hak untuk mengambil (*Take-or-Pay*) atau menyalurkan (*Ship-or-Pay*) gas yang telah dibayar dari periode 6 - 12 bulan dari diakuinya *Take-or-Pay* atau *Ship-or-Pay*.

Bagian lancar atas pendapatan ditangguhkan adalah estimasi penjualan gas kepada pembeli dalam 12 bulan kedepan.

Deferred revenue arose from natural gas sales transactions by the Group for which the GSPA contain a Take-or-Pay scheme and GTA contain a Ship-or-Pay scheme.

In a Take-or-Pay and Ship-or-Pay scheme, the buyers have to pay a minimum amount if the actual gas taken (Take-or-Pay) or transported (Ship-or-Pay) is less than the agreed minimum quantities.

The buyers are entitled to take (Take-or-Pay) or transport (Ship-or-Pay) gas that has been paid for from period of 6 - 12 months following the recognition of Take-or-Pay or Ship-or-Pay.

The current portion of deferred revenue represents the estimated gas sales portion for the next 12 months.

19. PINJAMAN / *19. LOANS*

a. Pinjaman bank jangka pendek / *a. Short-term bank loan*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pihak berelasi			***Related-party loans***
Bank Mandiri	-	2.590.841	*Bank Mandiri*
BRI	50.000.000	-	*BRI*
Pihak ketiga			***Third-party loans***
PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Dahulu sebagai PT Bank BTPN Tbk.)	50.000.000	-	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (Formerly known as PT Bank BTPN Tbk.)*
Jumlah pinjaman	**100.000.000**	**2.590.841**	***Total loans***

Selama tahun 2023, SENA telah melakukan penarikan utang bank sebesar IDR50.000.000.000, dan pada tanggal 15 Agustus 2024 SENA telah melakukan pelunasan hutang atas sisa pokok senilai IDR40.000.000.000 (setara dengan USD2.475.707) (2023: IDR10.000.000.000, setara dengan USD647.710).

During 2023, SENA has made bank loan drawdown amounted to IDR50,000,000,000 and as of August 15, 2025 SENA has made the repayment of loan of the remaining principal amount of IDR40,000,000,000 (equivalent to USD2,475,707) (2023: IDR10,000,000,000, equivalent to USD647,710).

Pada 26 November 2024, SEI melakukan penarikan *Revolving Loan Facility* dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. dan penarikan fasilitas kredit jangka pendek dengan BRI masing-masing sejumlah USD50.000.000 dan USD50.000.000 untuk kebutuhan tambahan modal kerja operasional.

On November 26 2024, SEI made a withdrawal of the Revolving Loan Facility with PT Bank SMBC Indonesia Tbk. and a withdrawal of a short-term credit facility with BRI for additional operational working capital amounting to USD50,000,000 and USD50,000,000, respectively.

Jangka waktu pinjaman PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Indonesia adalah selama tiga bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2025 dan dapat diperpanjang (*rollover*) selama tiga bulan berikutnya (Catatan 44). Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") + 0,57% per tahun (5,09% per tahun). Bunga pinjaman harus dibayar setiap tiga bulan sejak tanggal penarikan dan Pokok Pinjaman dibayarkan pada tanggal berakhirnya pinjaman beserta bunga yang belum tertagih. Tidak ada jaminan yang diserahkan sehubungan dengan pinjaman bank ini. Berdasarkan perjanjian, Grup diwajibkan memenuhi kovenan tertentu seperti rasio debt service minimal 1,3 kali dan rasio gross debt to equity maksimal 2,3 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan kovenan tersebut.

The PT Bank SMBC Indonesia Tbk. loan term is for three months which will be due on February 26, 2025 and can be extended (rollover) for the next three months (Note 44). This loan is subject to an interest rate of Secured Overnight Financing Rate ("SOFR") + 0.57% per annum (5.09% per annum). Interest on the loan must be paid every three months from the date of withdrawal and the Principal Loan is paid on the loan expiration date along with uncollected interest. No collateral are pledged against this bank loan. Based on agreement, the Group is required to comply with several covenants such as minimum debt service ratio of 1,3 times and maximum ratio gross debt to equity 2,3 times. As of December 31, 2024, the group has complied with all covenants requirements.

19. PINJAMAN (lanjutan)

a. Pinjaman bank jangka pendek (lanjutan)

Jangka waktu pinjaman BRI adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2025. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun. Pokok dan Bunga Pinjaman dibayarkan pada tanggal berakhirnya pinjaman. Tidak ada jaminan yang diserahkan sehubungan dengan pinjaman bank ini. Berdasarkan perjanjian, Grup diwajibkan memenuhi kovenan tertentu seperti rasio *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1,3 kali dan rasio gross debt to equity maksimal 2,3 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah memenuhi persyaratan kovenan tersebut.

19. LOANS (continued)

a. Short-term bank loan (continued)

The BRI loan term is for 180 (one hundred and eighty) days and which will be due on May 23, 2025. This loan is subject to an interest rate of 6.00% per annum. The Principal and Interest on the Loan are paid on the loan expiration date. No collateral are pledged against this bank loan. Based on agreement, the Group is required to comply with several covenants such as minimum Debt Service Coverage Ratio of 1,3 times and maximum ratio gross debt to equity 2,3 times. As of December 31, 2024, the group has complied with all covenants requirements.

b. Pinjaman bank jangka panjang / *b. Long-term bank loans*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Two-step loans			***Two-step loans***
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	186.622.230	220.290.287	*Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")*
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	8.173.441	13.322.401	*International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")*
Pihak berelasi			***Related-party loans***
Bank Mandiri	145.336.250	74.008.798	*Bank Mandiri*
BRI	145.336.250	74.008.798	*BRI*
Jumlah pinjaman pihak berelasi	290.672.500	148.017.596	*Total related party loans*
Pihak ketiga			***Third-party loans***
PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC")	145.336.250	74.008.798	*PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC")*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	145.336.250	89.008.798	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk.*
PT Bank DBS Indonesia	-	15.000.000	*PT Bank DBS Indonesia*
Jumlah pinjaman pihak ketiga	290.672.500	178.017.596	*Total third party loans*
Jumlah pinjaman	**776.140.671**	**559.647.880**	***Total loans***
Bagian jangka pendek	72.449.958	39.689.089	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	703.690.713	519.958.791	*Long-term portion*

Two-step loans merupakan pinjaman jangka panjang yang diorganisir oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diteruskan ke Grup.

Two-step loans represent long-term loans organized by the Government of the Republic of Indonesia and passed through to the Group.

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka Panjang (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

Other significant information related to bank loans as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Mata uang/ *Currency*	Jumlah fasilitas/ *Total facility (*mata uang asal/*original currency)*	Periode pinjaman/ *Loan term*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Tingkat suku bunga per tahun/*Annual interest rate*	Pembatasan pinjaman/ *Debt covenants*
JBIC	Yen Jepang/ *Japanese Yen*	*Principal* I: 45.335.142.633 *Principal* II: 3.203.219.503	28 Mei/ *May* 2003 - 20 Maret/ *March* 2043	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (20 Maret/*March* dan/*and* 20 September)	*Principal* I: 1,30% *Principal* II: 1,1%	Tidak ada/*None*
IBRD	Dolar AS/ *US Dollar*	*Principal* I: 41.709.099 *Principal* II: 20.055.983	3 April/ *April* 2006 - 15 Februari/ *February* 2026	Setengah tahunan/ *Semiannually*, (15 Februari/*February* dan/*and* 15 Agustus/ *August*)	*Principal* I: 5.48% *Principal* II: Tingkat Bunga IBRD +1% / *IBRD Rate Plus 1%*	*Debt to equity ratio: max 70:30* *Debt to service ratio: min 1.5x*
DBS Indonesia & PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	Dolar AS/ US Dollar	*Principal* I: 120.000.000	10 Desember/ *December* 2021 - 10 Desember/ *December* 2026	Bulanan/ *Monthly*, Triwulanan/ *Quarterly* Setengah tahunan/ *Semiannually (10 Juni/June* dan/*and* 10 Desember/ *December)*	*Principal* I: JIBOR atau SOFR ditambah margin/ *JIBOR or SOFR plus margin*	*EBITDA to Interest payable: min 3x* *Net debt to net tangible worth: max 2x*
Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk., OCBC	Dolar AS/ US Dollar	*Principal* I: 600.000.000	9 Mei/ *May* 2023 -8 Mei/ *May 2028*	Triwulanan/ *Quarterly*	Principal I: *Term SOFR + 1,35%*	*Gross Debt to Equity*: *max* 2,3x *Debt to service ratio min 1.3x*

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003)

Pada tanggal 27 Maret 2003, JBIC menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan JPY49.088.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga masing-masing untuk JBIC A dan JBIC B sebesar 0,95% dan 0,75% per tahun. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 28 Mei 2003, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1156/DP3/2003, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari JBIC ini dengan jumlah tidak melebihi JPY49.088.000.000 kepada Perusahaan.

1. JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003)

On March 27, 2003, JBIC agreed to provide a loan to the Government for a total aggregate amount equivalent to JPY49,088,000,000 to assist the Government in financing the development of a gas transmission pipeline from South Sumatera to West Java and a distribution pipeline in West Java. This loan is subject to an interest rate for JBIC A and JBIC B of 0.95% and 0.75% per annum, respectively. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

On May 28, 2003, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement No. SLA-1156/DP3/2003, which provides for the Government's relending of the JBIC loan proceeds not exceeding JPY49,088,000,000 to the Company.

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank panjang (lanjutan)

1. JBIC (Perjanjian No. SLA-1156/DP3/2003) (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar JPY1.591.118.000 (setara dengan USD11.026.448) (2023: JPY1.591.118.000, setara dengan USD11.320.805).

2. IBRD (Perjanjian No. SLA-1201/DP3/2006)

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 7 Februari 2006, IBRD menyetujui memberikan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan USD80.000.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai Proyek Pengembangan Pasar Gas Domestik. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5,48% + 1% untuk IBRD A dan tingkat suku bunga IBRD ditambah margin sebesar 1% per tahun untuk IBRD B.

Pada tanggal 3 April 2006, Perusahaan dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan hasil pinjaman dari IBRD sebesar USD80.000.000 kepada Perusahaan yang akan melaksanakan Proyek. Pada bulan Desember 2011, jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi USD69.381.312. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar USD5.148.960 (2023: USD4.931.433).

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

1. JBIC (Agreement No. SLA-1156/DP3/2003) (continued)

During the year ended December 31, 2024, the Company has already paid installments amounted to JPY1,591,118,000 (equivalent to USD11,026,448) (2023: JPY1,591,118,000, equivalent to USD11,320,805).

2. IBRD (Agreement No. SLA-1201/DP3/2006)

Based on the loan agreement dated February 7, 2006, IBRD agreed to provide a lending facility to the Government in an aggregate amount equivalent to USD80,000,000 to assist the Government in financing the Domestic Gas Market Development Project. This loan is subject to interest of 5.48% plus 1% for IBRD A and IBRD interest rate plus a margin of 1% per annum for IBRD B.

On April 3, 2006, the Company and the Government entered into a Subsidiary Loan Agreement, which provides for the Government's relending of the IBRD loan proceeds of USD80,000,000 to the Company, which shall undertake the Project. In December 2011, the total facilities were amended to USD69,381,312. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

As December 31, 2024, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

During the year ended December 31, 2024, the Company has already paid installments amounted to USD5,148,960 (2023: USD4,931,433).

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

3. DBS Indonesia dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Pada tanggal 30 November 2021, Pertagas menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *club deal* berjangka dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. dan PT Bank DBS Indonesia. Pinjaman ini untuk pendanaan belanja modal Pertagas dengan nilai sebesar USD135.000.000. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Pertagas.

Penambahan pinjaman dilakukan melalui mekanisme *dropping* dana dengan *dropping* dana pertama dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021, senilai USD103.000.000. Jangka waktu pinjaman 60 bulan sejak tanggal penarikan pertama dilakukan, yaitu bulan Desember 2026.

Pada tanggal 27 Mei 2022, Pertagas melakukan penarikan fasilitas pinjaman senilai USD17.000.000. Fasilitas tersisa yang belum ditarik telah dibatalkan dikarenakan telah melewati periode ketersediaan.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Pertagas telah melunasi pinjaman ini melalui pembayaran dipercepat atas sisa pinjaman kepada PT Bank DBS Indonesia dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. sebesar USD30.000.000 (2023: USD60.000.000).

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

3. DBS Indonesia and PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

On November 30, 2021, Pertagas and Pertagas entered into a club deal facility loan agreement with PT Bank SMBC Indonesia Tbk. and PT Bank DBS Indonesia. This loan will be used for financing of Pertagas capital expenditures amounting to USD135,000,000. There is no collateral of this bank loan that the Pertagas must submit.

Additional drawdowns of the loan are performed through a cash call mechanism with the first drawdown on 10 December 2021 amounted to USD103,000,000. The loan terms are 60 months after the first drawdown date, that is the loan will be due in December 2026.

On May 27, 2022, Pertagas has withdrawn the credit facility in amount of USD17,000,000. The remaining undrawn facilities has been cancelled because the availability period has passed.

During the year ended December 31, 2024, Pertagas has fully repaid these loans through early repayment on the remaining loans to PT Bank DBS Indonesia and PT Bank SMBC Indonesia Tbk. amounted to USD30,000,000 (2023: USD60,000,000).

19. PINJAMAN (lanjutan)

b. Pinjaman bank jangka panjang (lanjutan)

4. *Club Deal* (Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk., dan OCBC)

Pada tanggal 9 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *club deal* berjangka dengan Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. dan OCBC dengan total fasilitas pinjaman sebesar USD800.000.000 yang terdiri atas fasilitas A sebesar USD600.000.000 dan fasilitas B sebesar USD200.000.000. Pinjaman ini untuk pendanaan *Liability Management*. Tidak ada jaminan atas utang bank ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman fasilitas A senilai USD300.000.000.

Pada 28 Desember 2023 Perusahaan telah melakukan amendemen pertama dengan memperpanjang periode ketersediaan dari sebelumnya 180 hari setelah tanda tangan perjanjian menjadi sampai dengan 30 Juni 2024.

Pada tanggal 8 Mei 2024, PGN melakukan penarikan kedua fasilitas pinjaman fasilitas A senilai USD300.000.000 untuk pembayaran kembali utang.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar angsuran pokok pinjaman sebesar USD15.000.000.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diharuskan dalam perjanjian ini.

19. LOANS (continued)

b. Long-term bank loans (continued)

4. Club Deal (Bank Mandiri, BRI,* PT Bank SMBC Indonesia Tbk.*, dan OCBC)

On May 9, 2023, the Company entered into a club deal facility loan agreement with Bank Mandiri, BRI, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. *and OCBC in which the total loan facility amounted to USD800,000,000 which consist of facility A amounted USD600,000,000 and facility B amounted USD200,000,000. This loan will be used for financing of Liability Management. There is no collateral of this bank loan that the Company must submit.*

On May 30, 2023, The Company has withdrawn facility A the credit facility in amount of USD300,000,000.

On December 28, 2023, Perusahaan has made the first amendment by extending the availability period from 180 days after signing the agreement to June 30, 2024.

On May 8, 2024, PGN made a second withdrawal of the facility A credit facility in amount of USD300,000,000 for debt repayment.

During the year ended December 31, 2024, the Company has made loan principal repayment amounted USD15,000,000.

As specified by the loan agreement, the Company is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants, no substantial change in the general business.

As of December 31, 2024, the Company has complied with the required relevant covenants stated in the agreement.

19. PINJAMAN (lanjutan)

19. LOANS (continued)

c. Fasilitas yang belum digunakan

c. Unused facilities

Berikut ini adalah fasilitas yang belum digunakan pada tanggal 31 Desember 2024:

Below are unused facilities as of December 31, 2024:

Bank	Jenis fasilitas/*Types of facilities*	Akhir periode/ *End of period*	Pembatasan/ *Covenants*	Jumlah fasilitas/ *Total facilities*	Sisa fasilitas/ *Remaining facilities*
Pihak berelasi/ *Related parties*:					
Bank Mandiri	*Standby Letter of Credit* (“SBLC”), Bank Garansi (“BG”), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”), dan *Letter of Credit* (“L/C”)/ *Standby Letter of Credit (“SBLC”), Bank Guarantee (“BG”), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) and Letter of Credit (“L/C”)*	15 Agustus/ *August* 2025	*Debt service ratio > 1,3x* *Leverage ratio: 300%*	70.000.000	43.778.514
Bank Mandiri	*Revolving Joint Credit Facility*	15 Agustus/ *August* 2025	*Debt service ratio: min 1,3x* *Leverage ratio: 300%*	30.946.339	30.946.339
BNI	SBLC, BG, SKBDN, dan/*and* L/C	18 Januari/ *January* 2025	*Current ratio: min 1,0x* *Debt to equity ratio: min 3,0x* *EBITDA to interest: 200%*	140.000.000	76.643.923
BRI	SBLC, BG, SCF, KJP, Forex Line	5 April/ *April* 2025	Gross Debt to Equity maks 2.3x Debt service ratio min 1.3x	300.000.000	73.138.691
Bank Mandiri	SBLC, BG, L/C, SKBDN	6 Februari/ *February 2025*	Net Debt to Tangible maks 2x EBITDA to Interest Expense min 300%	10.000.000	4.962.196
BNI	SBLC, BG, L/C, SKBDN	10 Oktober/ *October 2025*	*Net Debt to Tangible maks 2x* *EBITDA to Interest Expense min 300 %*	50.000.000	47.438.623
Pihak ketiga/ *Third party*:					
Bank ANZ Indonesia	SBLC dan/*and* BG atau/*or revolving credit facility*	28 November/ *November* 2025	Tidak ada/*None*	40.000.000	40.000.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	*Revolving Joint Credit Facility*	*31* Juli/ *July* 2025	*Debt service ratio: 1,3x* *Debt to equity ratio max 233%*	30.946.339	30.946.339
PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	*Revolving uncommitted credit facility atau/or SBLC* dan/*and BG*	*31* Juli/ *July* 2025	*Debt service ratio: 1,3x* *Debt to equity ratio: max 233%*	80.000.000	30.000.000
PT Bank DBS Indonesia	*Revolving Joint Credit Facility*	30 Juni/ *June* 2025	Tidak ada/*None*	26.923.315	26.923.315
Citibank Indonesia	SLBC dan/*and* BG	*As noticed*	Tidak ada/*None*	50.000.000	50.000.000
Maybank Indonesia	SBLC, BG	22 Januari/ *January 2025*	Tidak Ada/*None*	60.000.000	31.303.920
Bank Mizuho Indonesia	SBLC, BG, L/C	18 Juli/ *July 2025*	Tidak Ada/*None*	100.000.000	100.000.000
MUFG Bank	SBLC, BG, L/C	14 November/ *November 2025*	Tidak Ada/*None*	100.000.000	100.000.000

20. UTANG OBLIGASI / *20. BONDS PAYABLE*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Senior Unsecured Fixed Rate Notes			***Senior Unsecured Fixed Rate Notes***
Nilai nominal	-	396.709.000	*Nominal value*
Diskonto	-	(3.820.308)	*Discount*
Biaya penerbitan	-	(1.659.481)	*Issuance cost*
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	-	5.215.681	*Amortisation of discount and issuance cost*
Nilai tercatat	-	396.444.892	*Carrying value*
SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*			***SEI Senior Unsecured Fixed Rate Notes***
Nilai nominal	-	156.252.000	*Nominal value*
Biaya penerbitan	-	(1.682.774)	*Issuance cost*
Amortisasi biaya penerbitan	-	1.618.897	*Amortisation of issuance cost*
Nilai tercatat	-	156.188.123	*Carrying value*
Jumlah utang obligasi	**-**	**552.633.015**	***Total bonds payable***
Bagian jangka pendek	-	552.633.015	*Current portion*

a. *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan menerbitkan USD1.350.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,037%. Wali amanat atas obligasi ini adalah *The Bank of New York Mellon*.

Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,125% per tahun yang terhutang setengah tahunan setiap tanggal 16 Mei dan 16 November, dimulai pada tanggal 16 November 2014. Obligasi ini dicatatkan pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. Dana dari obligasi diterima pada tanggal 16 Mei 2014 dan dipergunakan untuk penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya.

Sehubungan dengan obligasi ini, Perusahaan dibatasi dalam melakukan konsolidasi, penggabungan usaha, mengalihkan, menyewakan, atau menjual semua atau sebagian besar asetnya. Tidak ada jaminan atas obligasi ini yang harus diserahkan Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan obligasi atas sisa pokok senilai USD396.709.000 (2023: USD553.291.000).

a. Senior Unsecured Fixed Rate Notes

On May 12, 2014, the Company issued USD1,350,000,000 of Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will be due on May 16, 2024, with an issue price of 99.037%. The trustee of these bonds is The Bank of New York Mellon.

These bonds bear an interest rate of 5.125% per annum payable semiannually on May 16, and November 16, starting on November 16, 2014. These bonds were listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited. The bonds proceeds were received by the Company on May 16, 2014 and were used for additional working capital and other general corporate purposes.

In relation to these bonds, the Company is restricted in conducting consolidation, merger, transfer, lease or disposal of all or substantially all of it assets. There is no collateral of this bonds that the must be pledged by the Company.

As of May 16, 2024 the Company made the repayment of bonds of the remaining principal amount of USD396,709,000 (2023: USD553,291,000).

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

b. SEI *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*

Pada tanggal 26 April 2017, SEI menerbitkan USD625.000.000 *Senior Unsecured Fixed Rate Notes*, yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2024, dengan harga penerbitan sebesar 100%. Wali amanat atas obligasi ini adalah Citicorp International Limited. Obligasi ini dikenakan bunga sebesar 4,45% per tahun yang terhutang setengah tahunan setiap tanggal 5 Mei dan 5 November, dimulai pada tanggal 5 November 2017. Obligasi ini dicatatkan pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*.

Dana dari obligasi diterima pada tanggal 5 Mei 2017 dan dipergunakan untuk melunasi pinjaman sindikasi, mendanai aktivitas investasi, aktivitas akuisisi, penambahan modal kerja dan keperluan umum lainnya.

SEI tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang obligasi ini.

Sehubungan dengan obligasi ini, SEI dibatasi dalam melakukan konsolidasi, penggabungan usaha, mengalihkan, menyewakan, atau menjual semua atau sebagian besar asetnya. Tidak ada jaminan atas obligasi ini yang harus diserahkan SEI.

Pada tanggal 6 Mei 2024, SEI telah melakukan pelunasan obligasi atas sisa pokok senilai USD156.252.000 (2023: USD220.000.000).

20. BONDS PAYABLE (continued)

b. SEI Senior Unsecured Fixed Rate Notes

On April 26, 2017, SEI issued USD625,000,000 of Senior Unsecured Fixed Rate Notes, which will be due on May 5, 2024, with an issue price of 100%. The trustee of these bonds is Citicorp International Limited. These bonds bear interest of 4.45% per annum payable semi annually on May 5, and November 5, starting on November 5, 2017. These bonds were listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

The bonds proceeds were received on May 5, 2017 and were used to refinance syndicated loans, finance capital expenditures, acquisition activities, working capital requirements and other general corporate purposes.

SEI is not required to make sinking fund payments with respect to these bonds.

In relation to these bonds, SEI is restricted in conducting consolidation, merger, transfer, lease or disposal of all or substantially all of it assets. There is no collateral of this bonds that must be pledged by SEI.

As of May 6, 2024 SEI made the repayment of bonds of the remaining principal amount of USD156,252,000 (2023: USD220,000,000).

21. PERPAJAKAN

21. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka dan taksiran pengembalian pajak

a. Prepaid taxes and estimated claims for tax refund

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pajak penghasilan pasal 21	-	121.690	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 22	7	1.998	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	500.497	910.437	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 24	427.701	10.065.979	*Income tax article 24*
Pajak penghasilan pasal 25	467.255	-	*Income tax article 25*
Pajak penghasilan pasal 28a	22.203.246	31.916.221	*Income tax article 28a*
Pajak pertambahan nilai	41.406.763	24.486.245	*Value added tax*
Total	**65.005.469**	**67.502.570**	***Total***

Bagian lancar dan tidak lancar pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan pajak adalah sebagai berikut:

Current and non-current portion of prepaid taxes and estimated claims for tax refund are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Bagian lancar	34.173.305	15.999.792	*Current portion*
Bagian tidak lancar	30.832.164	51.502.778	*Non-current portion*
Total	**65.005.469**	**67.502.570**	***Total***

Lihat Catatan 21f untuk pembahasan mengenai taksiran tagihan pajak.

See Note 21f for discussion of claims for tax refund.

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pajak penghasilan pasal 4(2)	1.306.289	680.091	*Income tax article 4(2)*
Pajak penghasilan pasal 21	4.601.605	4.036.111	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 22	17.447	17.772	*Income tax article 22*
Pajak penghasilan pasal 23	1.543.974	3.962.117	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 25 dan 29	23.137.351	16.797.725	*Income tax article 25 and 29*
Pajak penghasilan pasal 26	529	1.804.767	*Income tax article 26*
Pajak pertambahan nilai	10.938.540	6.299.373	*Value added tax*
Pajak *first tranche petroleum (FTP)*	5.547.456	57.321.373	*First tranche petroleum (FTP)*
Lainnya	2.601	3.095	*Others*
Total	**47.095.792**	**90.922.424**	**Total**
Dikurangi:			*Less:*
Bagian jangka pendek	(41.548.336)	(33.601.051)	*Short-term portion*
Bagian jangka panjang	5.547.456	57.321.373	*Long-term portion*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Kini			*Current*
Perusahaan	41.191.627	10.727.833	*The Company*
Entitas anak	67.788.766	78.800.856	*Subsidiaries*
Subtotal	108.980.393	89.528.689	*Subtotal*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	(186.023)	21.688.411	*The Company*
Entitas anak	27.631.227	36.054.008	*Subsidiaries*
Subtotal	27.445.204	57.742.419	*Subtotal*
Penyesuaian atas tahun sebelumnya	2.227.011	-	*Adjustment in respond of the previous years*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**138.652.608**	**147.271.108**	***Consolidated Income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Pajak atas laba sebelum pajak Grup berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian dalam jumlah sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	578.289.878	523.887.009	*Consolidated profit before income tax*
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	111.155.749	145.838.369	*Tax calculated at applicable tax rate*
Dampak pajak penghasilan dari:			*Income tax effect from:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	41.792.995	50.128.951	*Non-deductible expenses*
Penghasilan tidak kena pajak dan dikenai pajak final	(20.785.648)	(25.688.371)	*Income subject to final tax*
Bagian laba dari ventura bersama	(33.008.697)	(32.293.228)	*Share of profit from joint ventures*
Perubahan pada aset pajak tangguhan yang tidak diakui	37.271.198	9.285.387	*Change in unrecognized deferred tax asset*
Penyesuaian pajak penghasilan yang kurang pada tahun sebelumnya	2.227.011	-	*Underprovision of income tax in prior years*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**138.652.608**	**147.271.108**	***Consolidated income tax expense***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak, seperti yang tercantum dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi laba kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax, as shown in consolidated profit or loss and other comprehensive income, and estimated taxable income is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31* 2024	2023	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	578.289.878	523.887.009	*Consolidated profit before income tax*
Ditambahkan/(dikurangi):			*Added/(deducted) by:*
Laba sebelum pajak entitas anak	(295.452.957)	(337.710.252)	*Profit before tax of subsidiaries*
Penyesuaian konsolidasian	(84.227.936)	123.548.514	*Consolidation adjustments*
Laba sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	198.608.985	309.725.271	*Profit before income tax expense - the Company*
Beda temporer:			***Temporary differences:***
Provisi atas penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu	33.590.868	(90.356.869)	*Provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	(2.364.695)	12.234.311	*Post-employment and other long-term benefits*
Aset hak guna dan liabiltas sewa	55.264	(217.437)	*Right of use assets and lease liability*
Beban penyusutan	(46.380.402)	(50.338.753)	*Depreciation expense*
Penyisihan bonus dan insentif	12.591.100	2.839.508	*Allowance of bonus and incentives*
Penyisihan piutang	(278.126)	(6.712.205)	*Receivable impairment*
Provisi atas kontrak LNG	3.486.935	11.689.711	*Provision for LNG Contract*
Penurunan nilai piutang pokok SHL KJG	161.598.808	-	*Impairment of SHL receivables KJG*
Sub-total	162.299.752	(120.861.734)	*Sub-total*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Beban pajak dan sanksi	627.382	27.602.495	*Tax and penalty expense*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	20.497.447	27.824.759	*Non-deductible expenses*
Bagian laba anak perusahaan dan ventura bersama	(148.906.360)	(169.964.360)	*Share of profit from subsidiaries and joint ventures*
Penghasilan yang dikenakan pajak final - neto	(16.329.168)	(17.864.151)	*Income subject to final tax - net*
Sub-total	(144.110.699)	(132.401.257)	*Sub-total*
Estimasi laba kena pajak	216.798.038	56.462.280	*Estimated taxable income*
Beban pajak kini – Perusahaan Tahun Berjalan	**41.191.627**	**10.727.833**	***Current tax expense - the Company***
Dikurangi pembayaran pajak dimuka - Perusahaan			*Less prepaid taxes - Company*
Pasal 22	(6.221.527)	(6.365.089)	*Article 22*
Pasal 23	(3.806.386)	(4.609.548)	*Article 23*
Pasal 25	(23.619.753)	(8.105.152)	*Article 25*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	7.543.961	(8.351.956)	*Underpayment of corporate income tax - the Company*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Entitas anak	4.233.341	16.263.653	*Underpayment of corporate income tax - Subsidiaries*
Kurang bayar pajak penghasilan badan - Konsolidasian	**11.777.302**	**7.911.697**	*Underpayment of corporate income tax - Consolidated*

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU 7/2021), Pemerintah Indonesia menyesuaikan tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan seterusnya (tidak berlaku untuk Perusahaan dan SEI).

Berdasarkan UU tersebut, Perusahaan dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 19% untuk tahun pajak 2023 dan 2024. Tarif pajak ini berlaku untuk Perusahaan karena Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i) Lebih dari 40% modal disetor Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimiliki oleh publik; dan
ii) Modal saham tersebut dimiliki lebih dari 300 individual, masing-masing memiliki kurang dari 5% saham;
iii) Seluruh persyaratan diatas sudah terpenuhi sejak awal tahun (lebih dari 183 hari).

Pada tanggal 6 Januari 2025 dan 4 Januari 2024 Perusahaan telah menerima surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria di atas untuk tahun pajak 2024 dan 2023.

Entitas anak yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 44% sampai 48% dan di luar Indonesia dikenai tarif pajak penghasilan badan sebesar 35%.

Perusahaan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2024 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2024.

Berbagai negara telah memberlakukan atau bermaksud memberlakukan undang-undang perpajakan untuk mematuhi aturan model Pilar Dua, termasuk Indonesia (Catatan 2v). Grup berada dalam lingkup PMK 136/2024, yang tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian 2024 tetapi mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup mulai 1 Januari 2025 dan seterusnya.

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Based on Law No. 7/2021 regarding Harmonisation of Tax Regulations (Law 7/2021), the Government of Indonesia adjusted the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and onward (except for the Company and SEI).

Based on the above Law, the Company is entitled to a corporate income tax rate of 19% for the fiscal year 2023 and 2024. This tax rate is applicable to the Company after the Company fulfills the following requirements:

i) More than 40% of the Company's paid-up shares listed for trading on the Indonesian Stock Exchange are held by the public; and
ii) Those shares are owned by more than 300 individuals, each holding less than 5% of the paid-in shares;
iii) All criteria above shall have been fulfilled since the beginning of year (more than 183 days).

On January 6th, 2025 and January 4th, 2024 the Company obtained the notification letter from the Securities Administration Agency regarding the fulfillment of such criterias for fiscal years 2024 and 2023.

The subsidiaries involved in oil and gas exploration and production in Indonesia are subject to income tax at rates of 44% to 48% and outside Indonesia are subject to income tax at a rate of 35%.

The Company will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2024 to the Tax Office based on information reported in the 2024 consolidated financial statements.

Various countries have enacted or intend to enact tax legislation to comply with Pillar Two model rules, including Indonesia (Note 2v). the Group is within the scope of PMK 136/2024, which did not impact 2024 consolidated financial statements but may impact the Group's consolidated financial statements from January 1, 2025 onward.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

PMK 136/2024 menerapkan mekanisme perpajakan baru yang mensyaratkan Perusahaan Multinasional ("PMN") untuk membayar pajak tambahan di suatu yurisdiksi ketika tarif pajak efektif, yang ditentukan berdasarkan yurisdiksi menurut aturan Pilar Dua, lebih rendah dari tarif minimum 15%. PMK 136/2024 menetapkan mekanisme untuk menentukan entitas mana (atau entitas-entitas mana) dalam Grup PMN yang harus menerapkan pajak tambahan tersebut dan porsi pajak yang dibebankan kepada setiap entitas terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah menerapkan amendemen PSAK 212: *Pajak Penghasilan*, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait aturan Pilar Dua sehingga tidak ada dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian 2024.

Grup telah melakukan penilaian potensi eksposur terhadap pajak penghasilan Pilar Dua berdasarkan pelaporan per negara terbaru dan laporan keuangan entitas konstituen Grup. Berdasarkan penilaian, tarif pajak efektif Pilar Dua di semua yurisdiksi tempat Grup beroperasi di atas 15%. Oleh karena itu, Grup tidak mengharapkan mereka akan dikenakan pajak tambahan Pilar Dua.

21. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

PMK 136/2024 applies new taxing mechanisms under which a Multinational Enterprises ("MNE") would pay a top-up tax in a jurisdiction whenever the efective tax rate, determined on a jurisdictional basis under the Pillar Two rules is below a 15% minimum rate. PMK 136/2024 sets out the mechanics for determining which entity (or entities) in an MNE Group should apply the top-up tax and the portion of such tax that is charged to each relevant entity.

For the year ended December 31, 2024, the Group has applied amendment to PSAK 212: Income Taxes, which provides mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two rules such that there is no impact to the 2024 consolidated financial statements.

The Group has performed an assessment of the potential exposure to Pillar Two income taxes based on the most recent country-by-country reporting and financial statements of the Group's constituent entities. Based on the assessment, Pillar Two effective tax rates in all of the jurisdictions in which the Group operates are above 15%. Therefore, the Group does not expect that it will be subject to Pillar Two top-up taxes.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax

The tax effects of significant temporary differences between commercial and tax reporting are as follows:

	1 Januari/ *January 1, 2024*	Reklasifikasi Pajak/ *Reclassification*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	*Dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2024*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	21.579.089	-	(449.292)	3.744.071	24.873.868	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	8.986.683	-	2.392.309	-	11.378.992	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.445.271	-	(52.844)	-	6.392.427	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(50.389)	-	10.500	-	(39.889)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 91/255 dan 135	14.855.513	-	6.382.265	-	21.237.778	*Provision for implementation of Kepmen 91/255 and 135*
Aset tetap	(30.922.704)	-	(8.812.276)	-	(39.734.980)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persedian	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak merugi	13.022.700	-	662.518	-	13.685.218	*Provision of onerous contract*
Penurunan nilai piutang pokok SHL KJG	-	-	30.703.774	-	30.703.774	*Impairment of SHL Receivables KJG*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(6.974.402)	-	(30.650.930)	-	(37.625.332)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**27.032.401**	**-**	**186.024**	**3.744.071**	**30.962.496**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	47.352.975	-	15.478.823	-	31.874.152	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	24.032.176	-	362.379	-	24.394.555	*Allowance for impairment losses*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	732.229	-	4.932.813	-	5.665.042	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Pencadangan piutang	11.614.231	-	(2.453.260)	(961)	9.160.010	*Allowance receivables*
Cadangan persediaan	-	-	37.296	(12.134)	25.162	*Allowance for inventory*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	4.831.062	-	(2.455.172)	(278.641)	2.097.249	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	1.029.877	-	(421.644)	(7.064)	601.169	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	3.163.109	-	3.859.138	-	7.022.247	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	27.198.316	-	(17.982.821)	-	9.215.495	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(30.774.245)	-	20.954.465	-	(9.819.780)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(6.729.982)	-	(9.171.068)	-	(15.901.050)	*Oil and gas properties*
Lain-lain	1.919.153	-	(1.367.809)	-	551.344	*Others*
Aset pajak tangguhan	**84.368.901**	**-**	**(19.184.506)**	**(298.800)**	**64.885.595**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	131.294	-	89.864	-	221.158	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(7.972.526)	-	(1.101.618)	-	(9.074.144)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan persediaan	114.111	-	299.968	-	414.079	*Allowance for inventory obsolescence*
Cadangan kerugian penurunan piutang	(68.800)	-	(11.300)	-	(80.100)	*Allowance for receivable impairment*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.465.715	-	1.701.998	(2.167.278)	1.000.435	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	(4.344.993)	-	(6.925.056)	-	(11.270.049)	*Asset abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	40.613.186	-	(40.168.006)	-	445.180	*Tax loss carry forward*
Implementasi PSAK 116	4.131.799	-	1.679.739	-	5.811.538	*Implementaion of PSAK 116*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	588.317	-	(642.552)	(46.754)	(100.989)	*Unrecognised deferred tax assets*
Properti minyak dan gas	(150.288.397)	3.989.927	35.658.323	-	(110.640.147)	*Oil and gas properties*
Lain - lain	(763.717)	-	971.918	-	208.201	*Others*
Liabilitas pajak tangguhan	**(116.394.012)**	**3.989.927**	**(8.446.722)**	**(2.214.032)**	**(123.064.838)**	***Deferred tax liabilities***
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian		**3.989.927**	**(27.445.204)**	**1.231.239**		***Consolidated deferred tax income (expense)***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**111.401.302**				**95.848.091**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(116.394.012)**				**(123.064.838)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan) / *21. TAXATION (continued)*

d. Pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax (continued)*

	1 Januari/ *January 1, 2023*	Reklasifikasi pajak/ *Reclassification*	Dibebankan/ (dikreditkan) pada laporan laba rugi konsolidasian/ *Charged/ (credited) to consolidated statement of profit or loss*	dibebankan/ (dikreditkan) pada penghasilan komprehensif lain/*Charged/ (credited) to other comprehensive income*	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Perusahaan						***The Company***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	19.839.453	-	2.324.517	(584.881)	21.579.089	*Post employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	8.447.177	-	539.506	-	8.986.683	*Salaries and bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai	7.720.590	-	(1.275.319)	-	6.445.271	*Expected credit loss*
Aset hak guna dan liabilitas sewa	(9.076)	-	(41.313)	-	(50.389)	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Provisi dampak implementasi Kepmen 89/91 dan 134/135	32.023.318	-	(17.167.805)	-	14.855.513	*Provision for implementation of Kepmen 89/91 and 134/135*
Aset tetap	(21.358.342)	-	(9.564.361)	-	(30.922.704)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	90.640	-	-	-	90.640	*Allowance for inventory obsolescence*
Provisi atas kontrak merugi	10.801.655	-	2.221.045	-	13.022.700	*Provision of onerous contract*
Lain-lain	-	-	-	-	-	*Others*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(8.249.721)	-	1.275.319	-	(6.974.402)	*Unrecognised deferred tax assets*
Aset pajak tangguhan	**49.305.693**	**-**	**(21.688.411)**	**(584.881)**	**27.032.401**	***Deferred tax assets***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan						*Deferred tax assets*
Aset tetap	53.915.685	-	(6.562.710)	-	47.352.975	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai	413.744	-	23.618.432	-	24.032.176	*Allowance for impairment losses*
Implementasi PSAK 116	1.816.603	-	(1.084.374)	-	732.229	*Implementation of PSAK 116*
Pencadangan piutang	7.250.958	-	4.363.273	-	11.614.231	*Allowance receivables*
Cadangan kerugian persediaan usang	9.990.678	-	(9.990.678)	-	-	*Allowance for inventory obsolence*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	3.772.659	-	1.635.264	(576.862)	4.831.062	*Post-employment and other long-term benefits*
Gaji dan bonus	468.465	-	561.412	-	1.029.877	*Salaries and bonus*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	(4.294.223)	-	7.457.332	-	3.163.109	*Asset abandonment and restoration obligations and other provisions*
Akumulasi rugi pajak	27.770.337	-	(572.021)	-	27.198.316	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	7.289.732	-	(38.063.984)	-	(30.774.245)	*Unrecognised deferred tax assets*
Lain-lain	-	-	1.919.153	-	1.919.153	*Tax loss carry forward*
Properti minyak dan gas	(9.877.067)	-	3.147.085	-	(6.729.982)	*Oil and gas properties*
Aset pajak tangguhan	**98.517.568**	**-**	**(13.571.814)**	**(576.862)**	**84.368.901**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan						*Deferred tax liabilities*
Gaji dan bonus	160.707	-	(29.413)	-	131.294	*Salaries and bonus*
Aset tetap	(7.354.983)	-	(617.543)	-	(7.972.526)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan piutang	-	-	(68.800)	-	(68.800)	Allowance for receivable impairment
Cadangan kerugian penurunan persediaan	78.294	-	35.817	-	114.111	*Allowance for inventory obsolescence*
Imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	1.459.312	-	264.391	(257.987)	1.465.715	*Post-employment and other long-term benefits*
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	(5.881.845)	-	1.536.852	-	(4.344.993)	*Assets abandonment and restoration obligations*
Akumulasi rugi pajak	118.098.643	-	(77.485.457)	-	40.613.186	*Tax loss carry forward*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(4.989.243)	-	5.577.560	-	588.317	*First tranche petroleum*
Implementasi PSAK 73	4.131.799	-	-	-	4.131.799	*Implementation of PSAK 73*
Lain-lain	-	-	(763.717)	-	(763.717)	*Others*
Properti minyak dan gas	(199.356.513)	-	49.068.116	-	(150.288.397)	*Oil and gas properties*
Liabilitas pajak tangguhan	**(93.653.829)**	**-**	**(22.482.194)**	**(257.987)**	**(116.394.012)**	***Deferred tax liabilities***
Manfaat (beban) pajak tangguhan konsolidasian		**-**	**(57.742.417)**	**(1.419.730)**		***Consolidated deferred tax income (expense)***
Aset pajak tangguhan konsolidasian	**147.823.261**				**111.401.302**	***Consolidated deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian	**(93.653.829)**				**(116.394.012)**	***Consolidated deferred tax liabilities***

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo liabilitas pajak tangguhan Blok Pangkah sebesar USD97.163.793. Berdasarkan proyeksi arus kas manajemen, sebagian besar porsi liabilitas pajak tangguhan akan terealisasi sebelum skema gross split berlaku efektif di tahun 2026 yang mengubah tarif pajak dari 44% menjadi 40%. Terdapat sisa porsi liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan properti minyak dan gas yang kemungkinan akan terealisasi setelah tahun 2026. Manajemen tidak melakukan penyesuaian saldo pajak tangguhan (akibat perubahan tarif pajak) dengan pertimbangan adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang.

e. Rugi pajak

Entitas anak Grup memiliki rugi pajak yang dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak masa depan. Perusahaan tidak memiliki rugi pajak.

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa lima tahun mendatang sejak kerugian fiskal terjadi. SEI memperkirakan bahwa akumulasi kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan dengan laba fiskal di masa mendatang. Beberapa entitas anak SEI belum mencapai posisi ETS sehingga masih mengakumulasikan kerugian fiskal.

21. TAXATION (continued)

d. Deferred tax (continued)

As of December 31, 2024, the balance of the Pangkah Block's deferred tax liabilities amounted to USD97,163,793. Based on management's cash flow projections, most of the deferred tax liability will be realized before the gross split scheme becomes effective in 2026 which changes the tax rate from 44% to 40%. Some portion of the deferred tax liabilities related to oil and gas properties will likely to be realized after 2026. Management did not adjust the deferred tax balance (from changes in tax rates) with consideration of uncertainty element in the future.

e. Tax losses

Subsidiaries of the Group had tax losses that can be used as deductions from future taxable income. The Company has no tax losses.

The tax losses can be utilised against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the tax loss was incurred. SEI believes that it is not probable that future taxable profit will be available to utilise accumulated tax losses before their expiry. SEI's subsidiaries have not reached the ETS position and are therefore still accumulating tax losses.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak (“SKP”)

Grup menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dan memiliki sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters (“SKP”)

The Group received underpayment tax assessment letters (“SKPKB”) from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia - Directorate General of Taxation (“DGT”) and has outstanding tax disputes in the Tax Court and the Supreme Court, as follows:

Perusahaan / ***The Company***

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat diterima/ *Period letter received*	Jumlah kurang bayar (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment (in million Rupiah)*	Jumlah kurang bayar (dalam Dolar AS)/ *Amount of underpayment (in USD)*	Status/*Status*
PPN atas penjualan gas/ *VAT for gas sales*	2012	SKPKB	Januari/ *January* 2017	3.258.454	201.674.445	1)
PPN atas penjualan gas/ *VAT for gas sales*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	892.062	55.212.157	1)
PPh 26/ *Income tax article 26*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	146	9.031	2)
PPh Badan/ *Corporate Income Tax*	2015	SKPKB	April/ *April* 2017	269.618	16.687.358 5)	3)
PPh Badan/ *Corporate Income Tax*	2013	SKPKB	Februari/ *February* 2017	546.185	33.804.882 5)	4)

Keterangan:
1) Per 31 Desember 2024, 17 dari 18 permohonan Peninjauan Kembali (“PK”) PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2) Perusahaan memenangkan keputusan banding dan saat ini DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
3) DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. MA telah memutuskan untuk menolak Peninjaukan Kembali dari DJP, tanggal 14 Agustus 2023
4) DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. MA telah memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali dari DJP, tanggal 27 November 2023
5) Nilai asli dalam dolar Amerika Serikat

Remarks:
1) As of December 31, 2024, 17 of 18 PGN Judicial Review (“PK”) applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by supreme court.
2) Appeal results in favour of the Company and DGT has submitted judicial review.
3) DGT has submitted judicial review. The Supreme Court had decided to reject the judicial review from DGT, decision dated August 14, 2023.
4) DGT has submitted judicial review. The Supreme Court had decided to reject the judicial review from DGT, decision dated November 27, 2023
5) The original currency is in US dollar

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi

Pada bulan Januari dan Februari 2017, DJP menerbitkan 18 Surat Tagihan Pajak ("STP") sebesar IDR414 miliar karena Perusahaan dinilai belum menerbitkan Faktur Pajak atas penjualan gas bumi periode 2012-2013.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah memenangkan sengketa pajak PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di Pengadilan Pajak. DJP telah mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung dan Perusahaan telah mengajukan kontra memori terhadap permohonan tersebut.

Pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Pengurangan STP karena Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan yang menguntungkan Perusahaan, bahwa penjualan gas bumi tidak dikenakan PPN, sehingga nilai Surat Tagihan Pajak nihil.

Pada triwulan keempat 2020, Perusahaan kalah atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (18 perkara dari 24 perkara). Sengketa PPN terkait dengan gas bumi yang dijual seharusnya dikenakan PPN menurut pandangan DJP. Dari total IDR3,25 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR892 miliar (untuk tahun 2013), Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan kalah untuk Perusahaan sebesar IDR2,4 triliun (untuk tahun 2012) dan IDR666 miliar (untuk tahun 2013). Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencatat beban sengketa pajak sebesar IDR4,2 triliun (setara dengan USD278,4 juta) dan USD15,9 juta sebagai kerugian selisih kurs pada laporan laba rugi dan mencatat provisi sengketa pajak sebesar USD294,3 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada 6 Mei 2021 dan 16 September 2021, Perusahaan menang atas sengketa PPN untuk tahun 2012 dan 2013 di tingkat Mahkamah Agung (4 perkara dari 6 perkara yang keputusannya belum keluar di 31 Desember 2020). Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya melalui salinan tertulis yang menyatakan menang untuk Perusahaan sebesar IDR859 miliar (untuk tahun 2012) dan IDR78 miliar (untuk tahun 2013). Untuk sisa sengketa sejumlah IDR148 miliar (untuk tahun 2013), perkara tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada bulan Maret 2022.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales

In January and February 2017, the DGT issued 18 Tax Collection Letters ("STP") of IDR414 billion because the Company was considered to not have issued Tax Invoices on the sale of natural gas for the period of 2012-2013.

In 2019, the Company obtained favourable decisions of VAT tax disputes for 2012 and 2013 at the Tax Court. The DGT has submitted PK requests to the Supreme Court and the Company has submitted contra memory on the judicial review requests.

In December 2019 and January 2020, the DGT issued 18 Reduction Decisions on STP because the Tax Court issued a favorable decision for the Company, that the sale of natural gas was not subject to VAT, so the value of Tax Collection Letters was nil.

In the fourth quarter of 2020, the Company received unfavourable decisions for its VAT disputes for years 2012 and 2013 at the Supreme Court level (18 cases out of 24 cases). The VAT disputes were related to gas sold which should be subject to VAT according to the DGT's point of view. From the total of IDR3.25 trillion (for year 2012) and IDR892 billion (for year 2013), the Supreme Court has issued its written decisions which were unfavourable for the Company of IDR2.4 trillion (for year 2012) and IDR666 billion (for year 2013). For the year ended December 31, 2020, the Company has recorded tax dispute expenses of IDR4.2 trillion (equivalent to USD278.4 million) and USD15.9 million as loss on foreign exchange in the statement of profit or loss and recorded a provision for tax disputes of USD294.3 million as of December 31, 2020.

On May 6, 2021 and September 16, 2021, the Company received favourable decisions for its VAT disputes for 2012 and 2013 at the Supreme Court level (4 cases out of 6 cases pending decision on December 31, 2020). The Supreme Court has issued its written decisions which were favourable for the Company of IDR859 billion (for year 2012) and IDR78 billion (for year 2013). For the remaining disputed amount of IDR148 billion (for 2013), the cases were decided by the Supreme Court on March 2022.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi (lanjutan)

Pada bulan Mei dan Juni 2022, DJP menerbitkan 18 Surat Keputusan Perubahan atas STP karena Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang tidak menguntungkan bagi Perusahaan dengan nilai total IDR414 miliar (atau setara dengan USD27.599.264), bahwa penjualan gas bumi dikenakan PPN. Surat Perubahan DJP telah melewati batas waktu pemungutan pajak. Selain itu, Perusahaan juga telah mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan MA pada tanggal 21 April 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR937 miliar (setara dengan USD65,1 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mencatat pembalikan provisi sengketa pajak sebesar IDR148 miliar (setara dengan USD10,3 juta) untuk perkara yang keputusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah mengajukan PK ke Mahkamah Agung atas 18 kasus untuk tahun 2012 dan 2013 sebesar IDR3 triliun atas keputusan MA yang mengabulkan permohonan PK dari DJP. Selain itu DJP mengajukan PK kedua atas 6 putusan sebesar IDR1 triliun, dimana putusan MA menolak permohonan PK DJP.

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perusahaan telah mencatat provisi atas 18 STP yang diterbitkan oleh DJP sebesar USD27.599.264 dan telah melakukan pembayaran pada bulan Agustus dan September 2023

Per 31 Desember 2023, 15 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan N.O. Perusahaan telah membayar senilai USD27.599.264 atas seluruh STP PPN tahun 2012 dan 2013 pada tanggal 25 Agustus, 7 September, dan 27 September 2023 dan telah membebankannya ke laba rugi konsolidasian.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales (continued)

In May and June 2022, DGT issued 18 Amendment Letter of Reduction Decisions on STP because the Supreme Court issued an unfavorable decision for the Company amounted to IDR414 billion (or equivalent to USD27,599,264), that the sale of natural gas was subject to VAT. The DGT's Amendment Letter is over the due of the tax collection period. Besides that, the Company has also filed further legal action against the Supreme Court Decision on April 21, 2022.

For the year ended December 31, 2021, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR937 billion (equivalent to USD65.1 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has recorded a reversal of provision for tax disputes of IDR148 billion (equivalent to USD10.3 million) for cases in which the Supreme Court issued decisions in favour of the Company.

For the year ended December 31, 2022, the Company has submitted a PK to the Supreme Court for 18 cases for 2012 and 2013 in the amount of IDR3 trillion based on the Supreme Court decision which granted the PK request from the DGT. In addition, DGT submitted a second PK of 6 decisions in the amount of IDR1 trillion, where the Supreme Court's decision rejected the DGT's PK application.

As of June 30, 2023, the Company has recorded provision amounted to USD27,599,264 related to 18 STPs issued by DGT and fully paid in August and September 2023.

As of December 31, 2023, 15 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. by Supreme Court. The Company has paid amounted USD27,599,264 for all VAT STP for 2012 and 2013 on August 25, September 7, and September 27, 2023 and expensed to consolidated profit or loss.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PPN atas Penjualan Gas Bumi (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, 17 dari 18 permohonan PK PGN dan 6 dari 6 permohonan PK DJP telah diputus oleh MA dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pajak penghasilan badan 2013

Berdasarkan perhitungan pajak badan tahun 2013, Perusahaan mencatat lebih bayar sebesar USD30,7 juta. Perusahaan telah mengajukan pengembalian pendahuluan. Selanjutnya DJP mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pada tanggal 9 Juni 2014. Sehingga nilai USD30,7 juta telah direstitusi dan diterima oleh Perusahaan.

Pada tahun 2015, DJP telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB sebesar USD33,8 juta pada tanggal 28 Februari 2017. Dari kurang bayar tersebut, Perusahaan hanya menyetujui kurang bayar sebesar USD6,1 juta. Perusahaan mengajukan keberatan sebesar USD27,7 juta ke Kantor Wilayah ("Kanwil") DJP. Sedangkan kurang bayar yang telah disetujui oleh PGN sebesar USD6,1 juta ini telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tahun 2017. Selanjutnya Kanwil menerbitkan Surat Keputusan yang menolak keberatan Perusahaan, sehingga kurang bayar tetap USD33,8 juta.

Dari kurang bayar tersebut, Perusahaan hanya menyetujui sebesar USD14,4 juta. Perusahaan mengajukan banding sebesar USD19,4 juta, sedangkan KB yang telah disetujui Perusahaan sebesar USD14,4 juta telah dibayarkan seluruhnya (sisa USD8,3 juta dibayar pada tanggal 16 Agustus 2018). Selanjutnya putusan banding di Pengadilan Pajak, KB menjadi USD21,2 juta. Perusahaan menyetujui hasil banding, sehingga Perusahaan harus mengakui kurang bayar sebesar USD21,2 juta (kekurangan pembayaran adalah sebesar USD6,8 juta ditambah denda senilai USD4 juta). Perusahaan telah mencatat provisi sebesar USD10,8 juta pada tahun 2021.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

VAT for Gas Sales (continued)

As of December 31, 2024, 17 of 18 PGN applications dan all of 6 DJP Applications are decided N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard) by Supreme Court.

Corporate income tax 2013

Based on the corporate tax calculation for the year 2013, the Company recorded an overpayment of USD30.7 million. The Company applied for a preliminary refund. Subsequently, DGT issued a Decision Letter for the Preliminary Refund of Excess Tax on June 9, 2014. As a result, the amount of USD30.7 million was refunded and received by the Company.

In 2015, the DGT conducted an audit and issued SKPKB for USD33.8 million on February 28, 2017. Of this underpayment, the Company only acknowledged an underpayment of USD 6.1 million. The Company filed an objection for USD27.7 million to the DGT's Regional Tax Office. Meanwhile, the underpayment of USD 6.1 million that had been agreed by PGN was paid in 2017. Subsequently, Regional tax office issued a Decision Letter to reject the Company's objection, thus the underpayment remains USD33.8 million.

Of this underpayment, the Company only acknowledged USD 14.4 million. The Company filed an appeal for USD19.4 million, in which the underpayment of USD14.4 million that had been acknowledged by the Company was fully paid (the remaining USD8.3 million was paid on August 16, 2018). Following the appeal decision at the Tax Court, the underpayment became USD 21.2 million. The Company agreed to the appeal result, so the Company had to acknowledge an underpayment of USD21.2 million (the deficiency in payment was amounted to USD6.8 million plus penalty amounted to USD 4 million). The Company had recorded provision amounted to USD10.8 million in 2021.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak penghasilan badan 2013 (lanjutan)

Perusahaan telah membayar USD6,8 juta pada tanggal 22 Februari 2022. Pada tahun 2022, DJP melakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Perusahaan telah menyerahkan kontra memori PK pada tanggal 25 April 2022 ke MA melalui Pengadilan Pajak. Pada tanggal 27 November 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk menolak PK dari DJP.

Pajak penghasilan badan 2015

Pada tahun 2015, Perusahaan mencatatkan lebih bayar pada Pajak Penghasilan Badan. Setelah melakukan pemeriksaan, pada tanggal 26 April 2017 DJP menerbitkan SKPKB sebesar USD16,7 juta. Perusahaan menyetujui lebih bayar sebesar USD11,9 juta. Perusahaan mengajukan keberatan ke Kanwil DJP dengan posisi Perusahaan tetap menyetujui LB USD11,9 juta pada 25 Juli 2017.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kanwil DJP menolak keberatan tersebut sehingga nilai kurang bayar tetap USD16,7 juta. Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Agustus 2018, dimana nilai lebih bayar yang diakui Perusahaan adalah USD10,9 juta.

Pada tanggal 23 September 2021, Pengadilan Pajak mengeluarkan putusan nilai lebih bayar adalah USD1,5 juta. Perusahaan telah menerima pengembalian atas nilai lebih bayar tersebut. Selanjutnya, DJP mengajukan PK kepada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Maret 2022.

Pada 14 Agustus 2023, Mahkamah Agung telah memberikan putusan untuk menolak permohonan peninjauan kembali oleh DJP tersebut.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

The Company (continued)

Corporate income tax 2013 (continued)

The Company paid USD6.8 million on February 22, 2022. In 2022, the DGT undertook a legal action of PK to the Supreme Court. The Company submitted a counter-memorandum for the judicial review on April 25, 2022, to the Supreme Court through the Tax Court. On November 27, 2023, the Supreme Court issued verdict to reject the judicial review from the DGT.

Corporate income tax 2015

In 2015, the Company recorded an overpayment on Corporate Income Tax. After conducting an audit, on April 26, 2017 the DGT issued SKPKB amounted to USD16.7 million. The Company acknowledged an overpayment of USD11.9 million. The Company filed an objection with the Regional Tax Office DGT maintaining its position on the overpayment of USD11.9 million on July 25, 2017.

On May 7, 2018, the regional tax office DGT rejected the objection, so the underpayment position remained at USD16.7 million. The Company submit an appeal to the Tax Court on August 6, 2018, in which the overpayment amount acknowledged by the Company was USD10.9 million.

On September 23, 2021, the Tax Court has issued verdict of the overpayment amounted to USD1.5 million. The Company has accepted the refund of such overpayment. Subsequently, DGT has submit PK to the Supreme Court on March 24, 2022.

On August 14, 2023, the Supreme Court issued a verdict to reject DGT's judicial review.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

21. TAXATION (continued)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI

SEI dan anak perusahaannya menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

SEI

SEI and its subsidiaries received several SKPKBs as follows:

Perusahaan/ *Company*	Beban pajak Terkait/ *related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima/ *Letter received*	Periode surat Diterima/ *period letter received*	Jumlah yang disengketakan termasuk sanksi (dalam dolar AS)/ *Disputed amount including penalty (in USD)*	Status/*Status*
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2013	Putusan Banding/*Tax Court Decision*	29 Apr/*Apr* 2024	3.381.698[1)]	[2)]
SEI	Pajak penghasilan badan/ *Corporate income tax*	2015	Putusan Banding/*Tax Court Decision*	29 Apr/*Apr* 2024	1.689.746	[2)]
SESSL	Pajak penghasilan badan/ Corporate income tax	2014	Putusan Mahkamah Agung/ *Supreme Court Decision*	13 Mar/*Mar* 2023	237.190[1)]	Kalah di Mahkamah Agung/*Unfavourable decision at the Supreme Court*
SESSL	PPh Pasal 26 (4)/ *Income tax Article 26 (4)*	2014	Putusan Mahkamah Agung/ *Supreme Court Decision*	16 Des/*Dec* 2022	11.887.654	Kalah di Mahkamah Agung/*Unfavourable decision at the Supreme Court*
SESSL	PPh Pasal 26 (4)/ *Income tax Article 26 (4)*	2015	Putusan Pengadilan Pajak/ *Tax Court Decision*	17 Mar/*Mar* 2021	3.961.467[1)]	Banding diterima/ *Appeal granted* [3)]
SESSL	PPh Pasal 4 (2)/ *Income tax Article 4 (2)*	2018	KEP	3 Nov/*Nov* 2023	7.967[1)]	Kalah di Pengadilan Pajak/*Unfavourable Decision at the Tax Court*
SEBB	PPh Pasal 4 (2)/ *Income tax Article 4 (2)*	2018	KEP	21 Feb/*Feb 2022*	315[1)]	Banding/*Appeal*

Keterangan:
1) Mata uang asli dalam Rupiah
2) SEI kalah di Banding dan telah mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung.
3) DJP telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali

Remarks:
1) Original currency in Rupiah
2) Appeal results are unfavourable for SEI and SEI has submitted PK to Supreme Court.
3) DGT has submitted judicial review

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

Pajak penghasilan badan

SEI

Pada bulan Desember 2018, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sebesar IDR54.638.102.020 (setara dengan USD3.607.904) SEI telah mengajukan banding pada bulan Agustus 2020.

Pada bulan Agustus 2019, SEI menerima SKPKB terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015 sebesar USD1.689.746. SEI telah mengajukan banding pada bulan Desember 2020.

Pada April 2024, SEI menerima putusan kalah Banding dari Pengadilan Pajak atas SKPKB PPh Badan tahun 2013 dan 2015 tersebut. Pada Juli 2024 SEI telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Makamah Agung. SEI tidak mencatat provisi untuk sengketa pajak ini.

SESSL

Pada September 2021, SEI melalui entitas anak SESSL menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB tahun pajak 2014 atas sengketa Pajak penghasilan badan SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BP East Kalimantan Ltd ("BPEK")). Pada Desember 2022, SESSL telah menerima pengembalian dana atas sengketa tersebut sebesar IDR3.392.291.380.

Pada Mei 2023, SESSL menerima putusan kalah PK dari Mahkamah Agung. SESSL menerima Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali ("SP2PK") dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar USD237.190. SESSL telah membayar pajak tersebut pada 27 Juni 2023.

PPh Pasal 26(4)

SESSL

Pada September 2021, SEI melalui entitas anak SESSL menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB tahun pajak 2014 atas sengketa Pajak penghasilan pasal 26(4). Pada Desember 2022, SESSL telah menerima seluruh pengembalian dana sebesar IDR170.017.227.364.

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan *Tax Treaty* oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

Pada Maret 2023, SESSL menerima putusan kalah PK dari Mahkamah Agung. SESSL menerima SP2PK dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar USD11.887.654. SESSL telah membayar pajak tersebut pada tanggal 13 April 2023.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Corporate income tax

SEI

In December 2018, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax of 2013 amounting to IDR54,638,102,020 (equivalent to USD3,607,904). SEI has submitted an appeal in August 2020.

In August 2019, SEI received a Tax Underpayment Assessment Letter related to Corporate Income Tax year 2015 amounting to USD1,689,746. SEI has submitted an appeal in December 2020.

In April 2024, SEI received unfavorable tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2013 and 2015. In July 2024, SEI submitted Judicial Review to Supreme Court. SEI has not recorded any provision for these tax disputes.

SESSL

In September 2021, SEI on SESSL received Tax Court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2014 of dispute on Corporate Income Tax SESSL, prior owned by SEI (previously BP East Kalimantan Ltd ("BPEK")). In December 2022, SESSL received the tax return for such dispute amounting to IDR3,392,291,380.

In May 2023, SESSL received an unfavourable PK Verdict from the Supreme Court. SESSL received the PK Execution Order ("SP2PK") with a total tax to be paid amounting to USD237,190. SESSL has paid the tax on June 27, 2023.

Income Tax Article 26(4)

SESSL

In September 2021, SEI on entity SESSL received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2014 of dispute on Income Tax Article 26(4). In December 2022, SESSL received the tax refund amounting to IDR170,017,227,364.

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously BPEK).

In March 2023, SESSL received an unfavourable PK Verdict from the Supreme Court. SESSL received SP2PK with a total tax to be paid amounting to USD11,887,654. SESSL has paid the tax on April 13, 2023.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 26(4) (lanjutan)

SESSL (lanjutan)

Pada Maret 2021, SESSL juga menerima putusan menang Banding dari Pengadilan Pajak terkait SKPKB Pasal 26 ayat (4) atas tahun pajak 2015 sebesar senilai USD4.331.929. Pada Desember 2022, SESSL telah menerima pengembalian dana sebesar IDR62.341.601.281 (setara USD3.858.489).

Pengembalian pajak ini terkait dengan sengketa penerapan *Tax Treaty* oleh SESSL, sebelum dimiliki oleh SEI (sebelumnya BPEK).

PPh Pasal 4(2) (pajak pengalihan) atas restrukturisasi sub-holding gas oleh Pemerintah

SESSL

Pada Januari 2020, SEI melalui entitas anak SESSL menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2). Pada Maret 2020, Grup mengirimkan surat kepada KPP Migas sehubungan dengan pengurangan nilai kurang bayar pajak dengan mempertimbangkan porsi hutang pajak.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 26(4) (continued)

SESSL (continued)

In March 2021, SESSL also received tax court decision on appeal request regarding SKPKB tax year 2015 of dispute on Income Tax Article 26(4) amounting to USD4,331,929. In December 2022, the SESSL received the tax refund amounting to IDR62,341,601,281 (equivalent to USD3,858,489).

The tax refund is regarding dispute on application of Tax Treaty by SESSL, prior owned by SEI (previously by BPEK).

Income Tax Article 4(2) (transfer tax) from sub-holding gas restructuring by the Government

SESSL

In January 2020, SEI on entity SESSL received Tax Underpayment Assessment Letter related to Tax Art 4(2). In March 2020, the Group filed a letter to KPP Migas in relation to reduction of tax underpayment by considering portion of payables.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 4(2) (pajak pengalihan) atas restrukturisasi sub-holding gas oleh Pemerintah (lanjutan)

SESSL (lanjutan)

Pada Agustus 2020, DJP menolak permintaan SESSL atas pengurangan/pembebasan denda administrasi perpajakan. Pada April dan September 2020, SESSL membayar kekurangan pajak tersebut masing-masing sebesar IDR4.025.774.676 dan IDR1.690.825.364.

Pada April 2021, SESSL telah menerima STP PPh 4(2) tahun 2018 sebesar IDR124.814.899 sehubungan dengan denda administrasi dari pembayaran pajak sebelumnya. Pada Mei 2021, Grup menyampaikan Permohonan Pembebasan Denda Pajak sehubungan dengan STP tersebut.

Pada Oktober 2021, DJP menyampaikan surat nomor KEP-02902/NKEB/WPJ.07/2021 yang menolak permohonan tersebut. Pada November 2021, SESSL menyampaikan Kembali Permohonan Pembebasan Denda Pajak tersebut.

Pada Maret 2022, SESSL menerima surat nomor KEP-00482/NKEB/WPJ.07/2022 yang menolak permohonan tersebut. SESSL mencatat taksiran tagihan pajak sebesar IDR122.995.467 (setara USD7.967) dan membebankan selisihnya pada laba rugi tahun berjalan. Pada April 2022, SESSL menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Pajak. Pada November 2023, SESSL menerima Putusan kalah atas Gugatan dari Pengadilan Pajak dengan putusan No. PUT-003514.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 3 November 2023. SESSL membalik taksiran pajak yang telah dicatat sebesar IDR122.995.467 (setara USD7.967) dan mencatat sebagai Beban Pajak pada laba rugi tahun 2023.

SEBB

Pada Januari 2020, SEI melalui entitas anak SEBB telah menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2) sebesar IDR1.220.899.561 dan denda administrasi sebesar IDR512.777.816 atas perubahan Hak Kepemilikan. Pada Maret 2020, SEBB telah menyampaikan surat kepada DJP sehubungan dengan pengurangan denda pajak menjadi sebesar IDR120.098.389 yang telah dibayar pada 1 April 2020.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 4(2) (transfer tax) from sub-holding gas restructuring by the Government (continued)

SESSL (continued)

In August 2020, DGT rejected the SESSL request for tax reduction/waiver on administration penalty request. In April and September of 2020, the SESSL paid the Tax Underpayment amounting to IDR4,025,774,676 and IDR1,690,825,364 respectively.

In April 2021, SESSL received STP of Tax Art 4(2) of 2018 amounting to IDR124,814,899 related to previous payment of administration penalty. In May 2021, the Group file Tax Penalty Waiver Request in relation to the Tax Collection Letter.

In October 2021, DGT released KEP-02902/NKEB/WPJ.07/2021 which rejected the request. In November 2021, the Group file another Tax Penalty Waiver Request.

In March 2022, SESSL received KEP-00482/NKEB/WPJ.07/2022 which rejected the request. The SESSL recorded IDR122,995,467 (equivalent to USD7,967) as claim for tax refund and charged the remaining to current year statement of profit or loss. In April 2022, SESSL filed lawsuit to Tax Court. In November 2023, SESSL received lawsuit unfavorable decision from Tax Court with decision No. PUT-003514.99/2022/PP/M.VIIIB year 2023 dated November 3, 2023. SESSL reversed claim for tax refund amounted IDR122,995,467 (equivalent to USD7,967) and charged as tax expense in 2023 statement of profit or loss.

SEBB

In January 2020, SEI on SEBB received Tax Underpayment Assessment Letter related to Tax Art 4(2) amounting to IDR1,220,899,561 and administration penalty amounting to IDR512,777,816 on changes in Participating Interest. In March 2020, SEBB filed a letter to DGT in relation to reduction of tax penalty to IDR120,098,389 which is paid on April 1, 2020.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

SEI (lanjutan)

PPh Pasal 4(2) (pajak pengalihan) atas restrukturisasi sub-holding gas oleh Pemerintah (lanjutan)

SEBB (lanjutan)

Pada Agustus 2020, SEBB telah menerima surat nomor KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 yang menerima pengurangan sebagian denda pajak menjadi sebesar IDR201.577.206. Pada September 2020, SEBB telah membayar sisanya sebesar IDR81.478.817.

Pada Agustus 2021, SEBB telah menerima STP sebesar IDR5.084.555 (atau setara USD336) sehubungan dengan denda administrasi dari pembayaran pajak sebelumnya. Pada September 2021, SEBB menyampaikan Permohonan Pembebasan Denda Pajak sehubungan dengan STP tersebut.

Pada November 2021, DJP menyampaikan surat nomor KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 yang menolak permohonan tersebut. Pada Desember 2021, SEBB menyampaikan kembali Permohonan Pembebasan Denda Pajak tersebut.

Pada 21 Februari 2022, SEBB menerima surat nomor KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 yang menolak permohonan tersebut. Pada Maret 2022, SEBB menyampaikan surat Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Pengadilan Pajak belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

Pada Juni 2024, SEBB membalik taksiran pajak yang telah dicatat sebesar IDR5.084.555 (setara USD315) dan mencatat sebagai beban pajak pada laba rugi periode berjalan. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, Pengadilan Pajak belum menyampaikan putusan atas permohonan tersebut.

SEI berkeyakinan bahwa resolusi dari seluruh sengketa pajak atas SEI yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas SEI.

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

SEI (continued)

Income Tax Article 4(2) (transfer tax) from sub-holding gas restructuring by the Government (continued)

SEBB (continued)

In August 2020, SEBB received KEP-01988/NKEB/WPJ.07/2020 which partially agreed to reduce tax penalty to IDR201,577,206. In September 2020, SEB paid the remaining difference of IDR81,478,817.

In August 2021, SEBB received Tax Collection Letter amounting to IDR5,084,555 (equivalent to USD336) related to previous payment of administration penalty. In September 2021, SEBB file Tax Penalty Waiver Request in relation to the Tax Collection Letter.

In November 2021, DGT released KEP-3129/NKEB/WPJ.07/2021 which rejected the request. In December 2021, SEBB filed another Tax Penalty Waiver Request.

On February 21, 2022, SEBB received KEP-00383/NKEB/WPJ.07/2022 which rejected the request. In March 2022, SEBB filed objection letter to Tax Court. As of the completion date of the financial statements, the Tax Court has not yet issued decisions on the appeal.

In June 2024, SEBB reversed claim for tax refund amounting to IDR5,084,555 (equivalent to USD315) and charged as tax expense in the current period. As of the completion date of the financial statements, the Tax Court has not yet issued decisions on the appeal.

SEI believes that the resolution of the SEI's ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the SEI's financial position and cash flows.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat ketetapan pajak ("SKP") (lanjutan)

Pertagas

Pertagas menerima beberapa SKPKB sebagai berikut:

21. TAXATION (continued)

f. Tax assessment letters ("SKP") (continued)

Pertagas

Pertagas received several SKPKBs as follows:

Beban pajak terkait/ *Related tax expense*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat yang diterima /*Letter received*	Periode surat diterima/ *Period of letter received*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam jutaan Rupiah)/ *Amount of underpayment including penalty (in millions of Rupiah)*	Jumlah kurang bayar termasuk sanksi (dalam ribu Dolar AS)/ *Amount of underpayment including penalty in thousands of USD)*	Status/*Status*
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2014	SKPKB	Februari/ *February* 2019	67.455	4.175[1)]	[3)]
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	4.466	276	[2)]
PPh Pasal 29/ *Income tax article 29*	2015	SKPKB	Desember/ *December* 2019	7.072	438[1)]	[2)]
PPN atas penjualan gas bumi/*VAT for gas sales*	2016	SKPKB	Desember/ *December* 2020	20.535	1.330	[4)]

1) Mata uang asli dalam dolar AS
2) Banding dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak, pengembalian sudah diterima, namun DJP mengajukan Peninjauan Kembali
3) Pertagas mengajukan Peninjauan Kembali dan pada tahun 2024 diputus *Niet Ontvunkelijke Verklaard* ("N.O").
4) DJP mengajukan PK dan pada tahun 2024 diputus N.O.

1) Original currency in US dollar
2) Appeal was partially granted by the tax court, the refund has received, but DGT office filled a judicial review
3) Pertagas has submitted judicial review and in 2014 the result is decided by Niet Ontvunkelijke Verklaard is ("N.O").
4) DGT has submitted judicial review in 2024 and the result is decided by N.O.

Per 31 Desember 2024, manajemen berkeyakinan bahwa sengketa pajak yang masih berlangsung tidak akan memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

As of December 31, 2024, management is of the opinion that the ongoing tax disputes will not have a material adverse impact on the Group's financial position and cash flows.

22. IMBALAN KERJA / *22. EMPLOYEE BENEFITS*

Akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek terdiri dari:

Current employee benefits liabilities account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Akrual gaji, tantiem dan bonus karyawan	82.056.839	67.426.456	*Employee salaries and bonus accruals*
Porsi jangka pendek atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka Panjang lainnya	4.926.878	8.438.030	*Short-term portion of liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Total	**86.983.717**	**75.864.486**	***Total***

Akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang terdiri dari:

Long-term employee benefits liabilities account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Liabilitas Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya setelah dikurangi porsi jangka pendek	**107.500.437**	**136.120.605**	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits - net of short-term portion*

a. Akrual gaji, tantiem dan bonus karyawan / *a. Employee salary and bonus accruals*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Perusahaan	51.609.047	47.456.573	*The Company*
Entitas anak	30.447.792	19.969.883	*Subsidiaries*
Total	**82.056.839**	**67.426.456**	***Total***

b. Tunjangan kesehatan hari tua / *b. Post-retirement health care benefits*

Perusahaan menyediakan tambahan tunjangan kesehatan hari tua bagi seluruh karyawan tetap, para pensiunan dan mantan direksi yang ditetapkan oleh perjanjian bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 3% dan 6% dari penghasilan dasar.

The Company provides additional post-retirement health care benefits for its eligible permanent employees, retired employees and ex-members of the board of directors, as covered in a cooperative agreement with Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan Gas Negara (YKPP Gas Negara). The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 3% and 6% of basic income, respectively.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Imbalan pensiun iuran pasti

Sejak Februari 2009, Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat yang dananya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia dan Bringin Jiwa Sejahtera yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002000.K/KP.05/UM/2009 tanggal 6 Februari 2009. Dana pensiun ini didirikan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan masing-masing dalam Surat Keputusannya No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 dan No. KEP.184/KM.17/1995. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 4,55% dan 14,07% dari penghasilan dasar pensiun. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beban untuk program pensiun iuran pasti ini adalah masing-masing sebesar USD2.359.471 dan USD2.644.493.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

c. Defined contribution pension plan

Since February 2009, the Company established a defined contribution plan for all of its eligible permanent employees which is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, Manulife Indonesia and Bringin Jiwa Sejahtera, the establishment of which was approved based on Director's Decision Letter No. 002000.K/KP.05/UM/2009, dated February 6, 2009. Both pension plans were established based on the approval from the Ministry of Finance in its Decision Letters No. KEP.1100/KM.17/1998, No. KEP.231/KM.17/1994 and No. KEP.184/KM.17/1995. The fund is contributed by both employees and the Company with contributions of 4.55% and 14.07%, respectively, of the basic Pension income. For the year ended December 31, 2024 and 2023, pension expenses for this defined contribution plan were USD2,359,471 and USD2,644,493, respectively.

d. Imbalan kerja jangka panjang

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan PKB yang dibandingkan dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003), mana yang lebih tinggi.

Saldo kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

d. Long-term employee benefits

The Group provides long-term employees' benefits to its employees in accordance with the CLA and Labour Law No. 13 year 2003 (Law No. 13/2003), whichever is higher.

The balance of employee benefits obligations recognised in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya	139.639.957	158.968.432	*Liability for post-employment benefits and other long-term benefits*
Aset Program	(27.212.642)	(14.409.797)	*Plan Asset*
Liabilitas neto	**112.427.315**	**144.558.635**	***Net liabilities***
Dikurangi porsi jangka pendek	(4.926.878)	(8.438.030)	*Less short-term portion*
Porsi jangka panjang, neto	**107.500.437**	**136.120.605**	***Long term-portion, net***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan mengakui sejumlah alokasi kewajiban terkait imbalan-imbalan kerja yang diberikan oleh Pertamina kepada Pekerja Perbantuannya yang diperbantukan di Perusahaan. Alokasi kewajiban ini meliputi seluruh imbalan kerja yang berlaku di Pertamina yaitu Dana Pensiun Pertamina ("DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP") dan Kesehatan Pasca Pensiun. Akumulasi alokasi kewajiban pekerja perbantuan yang telah dicatat pada periode selama masa perbantuan sampai dengan berakhir masa perbantuan, akan tetap dicatat di Perusahaan dengan nilai Kewajiban yang tetap (*freeze liability*) dan tidak akan berubah karena faktor apapun di masa mendatang. Kewajiban tersebut tidak akan dipindahbukukan ke Pertamina kecuali pada saat pekerja perbantuan tersebut berakhir hubungan kerjanya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, alokasi kewajiban karyawan perbantuan Pertamina adalah sebesar USD211.852.

Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang diakui oleh Perusahaan meliputi program Tunjangan Purna Bakti, Masa Persiapan Pensiun dan Imbalan Kesetiaan Kerja.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The Company acknowledged an amount of allocations of obligations related to employee benefits provided by the Pertamina to its Assigned Employees who are seconded in the Company. This liability allocation covers Dana Pensiun Pertamina ("DPP"), Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP"), and Post Retirement Healthcare. Accumulated allocation of assigned employee's liabilities that have been recorded during the period of assignment until the end of the assignment period will be recorded in the Company amounted to a fixed amount of Liability (freeze liability) and will not change due to any factors in the future. This obligation will not be transferred to the Pertamina, except when the secondee employee's employment period has been ended.

As of December 31, 2024, the allocated liabilities of Pertamina's secondee employees is amounted to USD211,852.

Post-employment and other long-term benefit recognized by the Company consists of Post-employment benefits, Pension Retirement Program and Jubilee Program.

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Perhitungan program imbalan pascakerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya pada 10 Februari 2025 dan 15 Februari 2024.

Aset program SEI dan Pertagas terdiri dari kas dan setara kas yang seluruhnya dialokasikan ke pasar uang. Aset Program dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas jangka panjang lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The calculation of the Company's Employees Benefit Program as of December 31, 2024 and December 31, 2023 were performed by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, based on its reports dated February 10, 2025 and February 15, 2024 , respectively.

SEI's and Pertagas's plan assets consist of cash and cash equivalents wholly allocated to money market. Plan assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services.

The movement in the post-employment and other long-term benefit over the year is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	**158.968.432**	**144.150.099**	***Present value of liability - beginning of the year***
Biaya (penghasilan) yang diakui di laba rugi - neto:			*Expenses (income) recognized in profit or loss - net:*
- Biaya jasa kini	6.282.695	8.092.475	*- Current service cost*
- Beban bunga atas liabilitas	7.840.885	7.451.152	*- Interest expense on liability*
- Dampak selisih kurs dan penyesuaian lainnya	(4.302.856)	1.569.886	*Impact of foreign exchange and other adjustments*
- Aset Program		-	*- Plan Assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto:			*Remeasurement of defined benefit liability - net*
- Perubahan asumsi ekonomi	(18.949.562)	4.093.046	*Economic assumptions change*
- Penyesuaian pengalaman	(1.963.536)	(1.354.336)	*Experience adjustments*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(8.236.101)	(5.033.890)	*Benefit paid for the current year*
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	**139.639.957**	**158.968.432**	***Present value of liability - end of the year***

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

d. Long-term employee benefits (continued)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program SEI dan Pertagas adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of plan assets of SEI and Pertagas:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai wajar aset program - awal tahun	**14.409.797**	**11.923.954**	***Fair value of plan assets - beginning of the year***
Pembayaran iuran program oleh pemberi kerja	13.340.728	3.126.844	*Payment of program contribution from the employer*
Penghasilan keuangan aset program	164.304	171.760	*Finance income of plant asset*
Dampak selisih kurs	(702.187)	(812.761)	*Impact of foreign exchange*
Nilai wajar aset program - akhir tahun	**27.212.642**	**14.409.797**	***Fair value of plan assets - end of the year***

Rekonsiliasi liabilitas imbalan pascakerja dan liabilitas jangka panjang lain - neto yang diakui oleh Grup adalah sebagai berikut:

The reconciliation of post-employment and other long-term benefit - net recognized by the Group are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai - akhir tahun	139.639.957	158.968.432	*Present value of unfunded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas yang didanai - akhir tahun	(27.212.642)	(14.409.797)	*Present value of funded liability - end of the year*
Nilai kini liabilitas neto- akhir tahun	**112.427.315**	**144.558.635**	***Present value of net liability - end of the year***

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lain adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining expenses and liabilities for post employment benefit and other long-term benefit are as following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Tingkat diskonto aktuaria	6,55%-7,15% per tahun/ *per annum*	6,55%-6,70% per tahun/ *per annum*	*Actuarial discount rate*
Tingkat kematian (mortalitas)	TM IV 2019	TM IV 2019	*Mortality rate*
Kenaikan gaji	3%-10% di tahun pertama dan 4%-6% di tahun berikutnya/ *3%-10% in the first year and 4%-6% in the following years*	3.5%-10% di tahun pertama dan 6% di tahun berikutnya/ *3.5%-10% in the first year and 4% in the following years*	*Salary increment*
Umur pensiun	56 tahun/*years*	56 tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	10% dari tingkat kematian/ *mortality rate*	*Disability rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Rata-rata tertimbang durasi program

Pada tanggal 31 Desember 2024, rata-rata tertimbang durasi kewajiban adalah 12,11 tahun.

Penyesuaian pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

Rincian penyesuaian pengalaman dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

Weighted average program duration

As of December 31, 2024, the weighted average duration of the liability are 12.11 years.

Experience adjustments to defined benefit obligation

Details of experience adjustments to the present value of the defined benefit obligation for the year ended December 31, 2024, and for the years ended December 31, 2023, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(9.914.607)	(5.413.617)	3.171.653	(1.173.341)	(1.423.921)	*Experience adjustment on plan liabilities*

Tidak ada penyesuaian pengalaman atas nilai wajar aset program karena aset program ditempatkan pada deposito berjangka.

There is no experience adjustment on fair value of plan assets as the assets are placed in time deposits.

Analisis sensitivitas

Sensitivitas liabilitas secara keseluruhan terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan gaji adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis

Sensitivity of the overall liability to changes in the discount rate and salary increase rate assumptions is as follows:

	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	Dampak terhadap liabilitas/ *Impact on liability*	
31 Desember 2024			***December 31, 2024***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD9,8 juta/*million* naik/*increase by* USD11,6 juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD14,4 juta/*million* turun/*decrease by* USD8,2 juta/*million*	*Salary increase rate*
31 Desember 2023			***December 31, 2023***
Tingkat diskonto	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	turun/*decrease by* USD13,4 juta/*million* naik/*increase by* USD13,6 juta/*million*	*Discount rate*
Tingkat pertumbuhan gaji	kenaikan/*increase by* 1% penurunan/*decrease by* 1%	naik/*increase by* USD14,1 juta/*million* turun/*decrease by* USD14,1 juta/*million*	*Salary increase rate*

22. IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pascakerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pascakerja) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi utama aktuaria yang digunakan sama dengan asumsi penghitungan liabilitas imbalan pascakerja.

e. Manajemen risiko terkait program imbalan kerja

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Dalam memenuhi kewajiban imbalan kerja, Grup menggunakan dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan investasi pada obligasi Negara dan obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi korporasi akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara parsial dengan kenaikan dari nilai obligasi Perusahaan yang dimiliki.

22. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Long-term employee benefits (continued)

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the post-employment benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the post-employment benefit obligation) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

The actuarial assumptions used are the same as the calculation of post-employment benefit obligation.

e. Risk management related to employee benefit program

The Group is exposed to a number of risks through its post-employment benefit and other long-term benefits. The most significant risks are as follows:

Asset volatility

In order to fulfill the Group's employment benefit obligations, the Group uses funds generated from its operations and invested in government and corporate bonds listed on the Indonesian Stock Exchange.

Changes in bond yields

A decrease in corporate bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the Company's bond holdings.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA

Mutasi liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area adalah sebagai berikut:

23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS

The movement in asset abandonment and site restoration obligations is presented below:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Saldo awal	146.690.321	108.322.308	*Beginning balance*
Penambahan	-	34.043.355	*Addition*
Beban akresi	7.168.994	6.837.736	*Accretion cost*
Penyesuaian karena perubahan estimasi dan lainnya	(7.730.791)	(2.513.078)	*Adjustment due to change in estimates and others*
Saldo akhir	**146.128.524**	**146.690.321**	***Ending balance***

Sesuai dengan surat Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 perihal Penugasan kepada Perusahaan dan Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai pada tanggal 26 Februari 2019 dan surat Perusahaan No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 perihal Penugasaan Perusahaan kepada Pertagas untuk Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Minyak Mentah Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai tanggal 30 April 2019, Pertagas telah melakukan pembangunan Pipa Minyak Rokan Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai.

In accordance with a letter from Pertamina No. 073/C00000/2019-S0 regarding the Assignment of Pertamina to Perusahaan and Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on February 26, 2019, and a letter from the Company No. 015504.S/PR.06.02/PDO/2019 regarding the Assignment from the Company to Pertagas for the Development and Operation of the Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor on April 30, 2019, Pertagas has carried out the construction of the Rokan Crude Oil Pipeline in the Balam-Bangko-Dumai Corridor and the Minas-Duri-Dumai Corridor.

Atas pembangunan pipa Rokan tersebut, Pertagas bermitra dengan PT Rukun Raharja, Tbk. (“RAJA”) dalam bentuk perjanjian KSO (Catatan 35q). Berdasarkan perjanjian kedua pihak sepakat untuk menerapkan provisi terkait kegiatan pasca operasi yang termasuk namun tidak terbatas pada pembongkaran pipa Rokan secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan fasilitas-fasilitas terkait pipa Rokan lainnya, serta melakukan pemulihan lingkungan pipa Rokan. Pertagas dan RAJA juga menyepakati untuk mencatat liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dari aset tersebut sesuai dengan bagian partisipasi para pihak.

Regarding the construction of the Rokan pipeline, Pertagas partnered with PT Rukun Raharja, Tbk. ("RAJA") in form of JO agreement Agreement (Note 35q). Based on the agreement both parties agreed to implement provisions related to post-operation activities including but not limited to the permanent dismantling of the Rokan crude pipeline, cessation of operations, and removal of the capabilities of other related Rokan crude pipeline facilities, as well as environmental restoration of the Rokan pipeline. Pertagas and RAJA also agree to record the liabilities of asset dismantling and area restoration from this asset according to the respective parties' participation portion.

23. LIABILITAS PEMBONGKARAN ASET DAN RESTORASI AREA (lanjutan)

Provisi ini merupakan kewajiban Pertagas dan RAJA untuk pembongkaran aset pipa Rokan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat perjanjian pipa Rokan selesai.

Provisi diakui sebesar nilai kini atas beban pembongkaran yang akan terjadi di masa depan. Amortisasi diskonto yang merupakan dampak dari nilai waktu uang atas kewajiban pembongkaran aset ini diakui sebagai beban akresi.

Estimasi terkini untuk kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

Nilai liabilitas pembongkaran aset PLI merupakan penyisihan terkait dengan pembongkaran aset dan restorasi area atas *Tower Yoke Mooring System* di FSRU Lampung yang dioperasikan oleh PLI. Nilai tersebut sesuai dengan estimasi terkini yang dilakukan oleh manajemen, dan manajemen berkeyakinan bahwa angka tersebut telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

Nilai liabilitas pembongkaran aset SEI merupakan penyisihan terkait pembongkaran aset dan restorasi area - area ekploitasi dan eksplorasi yang dimiliki oleh SEI. Nilai tersebut sesuai dengan estimasi terkini yang dilakukan oleh manajemen, dan manajemen berkeyakinan bahwa angka tersebut telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan restorasi area dan pembongkaran aset.

23. ASSET ABANDONMENT AND SITE RESTORATION OBLIGATIONS (continued)

These provisions constitute the obligations of the Pertagas and RAJA for the dismantling of Rokan pipeline asset that will occur in the future when the Rokan crude pipeline agreement is completed.

The provisions are recognized at present value for future dismantling expenses. Discounted amortization, which is the impact of the time value of money on the asset dismantling obligations, is recognized as an accretion expense.

The current estimate for asset dismantling liabilities and area restoration is made by management. Management believes that the accumulated provisions are sufficient to cover all liabilities arising from area restoration activities and asset dismantling.

The value of PLI's asset abandonment and site restoration obligation is a provision related to asset dismantling and restoration of the upper area of the Tower Yoke Mooring System at the FSRU Lampung operated by PLI. This value is in accordance with the latest estimate made by management and management believes that this figure is sufficient to cover all liabilities arising from area restoration activities and asset dismantling.

The value of SEI's asset abandonment and site restoration obligation is a provision related to the dismantling of assets and restoration of exploitation and exploration areas owned by SEI. This value is in accordance with the latest estimate made by management, and management believes that this figure is sufficient to cover all liabilities arising from area restoration and asset dismantling activities.

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

24. CAPITAL STOCKS AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

a. Modal saham

Susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

a. Share capital

The details of the shareholders based on the report prepared by PT Datindo Entrycom, a Securities Administration Agency, are as follows:

31 Desember/*December 31*, 2024

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Saham Seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna Share*
Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B)				*Common Stock (Series B)*
Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Pertamina*
Fadjar Harianto Widodo (Direktur)	1.861.300	0,01%	26.415	*Fadjar Harianto Widodo (Director)*
Warih Sadono (Komisaris)	1.016.000	0,00%	14.419	*Warih Sadono (Commissioner)*
Luky Alfirman (Komisaris)	886.700	0,00%	12.583	*Luky Alfirman (Commissioner)*
Arief Setiawan Handoko (Direktur)	472.200	0,00%	6.701	*Arief Setiawan Handoko (Director)*
Harry Budi Sidharta (Direktur)	401.400	0,00%	5.696	*Harry Budi Sidharta (Director)*
Rosa Permata Sari (Direktur)	95.900	0,00%	1.361	*Rosa Permata Sari (Director)*
Ratih Esti Prihatini (Direktur)	95.900	0,00%	1.361	*Ratih Esti Prihatini (Director)*
Rachmat Hutama (Direktur)	2.500	0,00%	35	*Rachmat Hutama (Director)*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.427.637.540	43,02%	147.981.869	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

31 Desember/*December 31, 2023*

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/*Number of issued and fully paid shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Saham Seri A Dwiwarna				*Series A Dwiwarna Share*
Pemerintah Indonesia	1	0,00%	-	*Government of Indonesia*
Saham Biasa (Seri B)				*Common Stock (Series B)*
Pertamina	13.809.038.755	56,97%	195.968.391	*Pertamina*
Lain-lain (Masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	10.432.469.440	43,03%	148.050.440	*Others (Each holding below 5%)*
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh	**24.241.508.196**	**100,00%**	**344.018.831**	***Number of shares issued and fully paid***

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Saham Seri A Dwiwarna merupakan saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak untuk mencalonkan direksi dan komisaris, menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi, perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Januari 2018 Pemerintah Indonesia telah mengalihkan 56,97% kepemilikan atas saham Perusahaan kepada Pertamina. Selain itu, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, memberikan kuasa kepada pemegang saham mayoritas Perusahaan untuk:

- Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan;
- Mengangkat anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan calon anggota Direksi dan Komisaris;
- Mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- Meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan.

24. CAPITAL STOCKS AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Share capital (continued)

The Series A Dwiwarna share represents a share which provides the holder rights to propose directors and commissioners, attend and approve the appointment and dismissal of commissioners and directors, change in Articles of Association including changes in capital, closure and liquidation, merger and acquisition of the Company.

Series B shares entitle the holder to participate in dividends and the proceeds on winding up of the Company in proportion to the number of and amounts paid on the shares held.

In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 25, 2018 the Government of Indonesia transferred 56.97% ownership in the Company's shares to Pertamina. Furthermore, the Government of Indonesia as the owner of the Series A Dwiwarna share gave the authority to the Company's majority shareholder to do the following:

- *Change the Company's Articles of Association;*
- *Appoint members of the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose candidates for the Boards of Directors and Commissioners;*
- *Propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders; and*
- *Request and access the Company's data and documents.*

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

24. CAPITAL STOCKS AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

b. Tambahan modal disetor

b. Additional paid-in capital

Modal disetor lainnya terdiri dari:

Other paid-in capital consists of the following:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal	202.346.493	202.346.493	*Excess of proceeds over par value*
Dampak implementasi PSAK 110, "Laporan keuangan konsolidasian"(dahulu PSAK 65)	127.085.001	127.085.001	*Impact of PSAK 110, "Consolidated Financial Statements" implementation (formerly PSAK 65)*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	(787.215.590)	(787.215.590)	*Difference arising from transactions among entities under common control*
Biaya emisi saham	(9.790.532)	(9.790.532)	*Share issuance cost*
Total	**(467.574.628)**	**(467.574.628)**	***Total***

25. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

25. NON-CONTROLLING INTERESTS

Rincian kepentingan nonpengendali atas ekuitas dan bagian atas hasil bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests portion in equity and share of subsidiaries' net results are as follows:

	31 Desember/*December* 31, 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	863.094.391	109.840.523	-	(96.276.708)	876.658.206	*Pertagas*
PGN MAS	(23.240.987)	(9.630.938)	-	-	(32.871.925)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.695.170	(89)	-	-	1.695.081	*Others*
Jumlah	**841.548.574**	**100.209.496**	**-**	**(96.276.708)**	**845.481.362**	***Total***

	31 Desember/*December* 31, 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari laba rugi/ *Share of profit or loss*	Perubahan ekuitas lainnya/ *Other equity movement*	Dividen/ *Dividends*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pertagas	827.206.227	100.437.673	-	(64.549.509)	863.094.391	*Pertagas*
PGN MAS	(21.323.317)	(1.917.670)	-	-	(23.240.987)	*PGN MAS*
Lain-lain	1.690.451	4.719	-	-	1.695.170	*Others*
Jumlah	**807.573.361**	**98.524.722**	**-**	**(64.549.509)**	**841.548.574**	***Total***

26. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan dan entitas anak diwajibkan untuk menyisihkan cadangan dari keuntungan wajib paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2024 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 76 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Mei 2024 dan telah menerima perolehan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.09-0212762 tanggal 11 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar USD278.091.179 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR3.595.162.762.112 (setara dengan USD 222.472.943) atau IDR148,31 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2023 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 14 oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 9 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui keputusan-keputusan, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar USD326.239.697 diperuntukkan sebagai berikut:

a. Pembagian dividen tunai sebesar IDR3.419.350.889.793 (setara dengan USD228.367.788) atau IDR141,05 per saham kepada pemegang saham; dan
b. Sisanya akan dicatat sebagai cadangan umum.

26. APPROPRIATIONS OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTIONS OF INCOME

Under Indonesian Limited Company Law, the Company and each of its subsidiaries is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 30, 2024 which was notarised in the Notarial Deed No.76 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated May 30, 2024 and has obtained acceptance of notification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-AH.01.09-0212762 dated June 11, 2024, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2023 financial year in the amount of USD278,091,179 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR3,595,162,762,112 (equivalent to USD222,472,943) or IDR148.31 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on May 30, 2023 which was notarised in the Notarial Deed No.14 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated June 9, 2023, the shareholders ratified the following decisions:

Approved the use of profit for the year attributable to owners of the parent entity for the 2022 financial year in the amount of USD326,239,697 to be utilised as follows:

a. Distribution of cash dividends of IDR3,419,350,889,793 (equivalent to USD228,367,788) or IDR141.05 per share to shareholders; and
b. The remaining amount will be appropriated as general reserve.

27. PENDAPATAN / *27. REVENUES*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
PIHAK BERELASI			***RELATED PARTY***
Niaga gas bumi	733.556.515	684.630.037	*Gas trading*
Transmisi gas	227.167.229	189.725.314	*Gas transmission*
Transportasi minyak	142.961.203	125.760.811	*Oil transportation*
Pendapatan jasa regasifikasi	129.594.646	127.630.285	*Income from gas regasification*
Penjualan minyak dan gas bumi	70.143.618	81.024.054	*Crude oil and natural gas sales*
Jasa konstruksi dan pemeliharaan	42.765.565	7.475.471	*Construction and maintenance services*
Pendapatan pemrosesan gas bumi	25.724.901	31.614.517	*Income from gas processing*
Jasa jaringan telekomunikasi	4.234.903	-	*Telecommunication network services*
Subtotal	**1.376.148.580**	**1.247.860.489**	***Subtotal***
PIHAK KETIGA			***THIRD PARTY***
Niaga gas bumi	1.786.223.661	1.888.468.241	*Gas trading*
Penjualan minyak dan gas bumi	284.373.905	350.585.941	*Crude oil and natural gas sales*
LNG Trading	221.507.601	-	*LNG Trading*
Pendapatan jasa regasifikasi	42.852.182	-	*Income from gas regasification*
Transmisi gas	23.523.914	25.351.629	*Gas transmission*
Jasa jaringan telekomunikasi	21.899.139	22.442.463	*Telecommunication network services*
Jasa konstruksi dan pemeliharaan	20.832.016	41.734.375	*Construction and maintenance services*
Transportasi minyak	11.258.189	35.264.660	*Oil transportation*
Pendapatan pemrosesan gas bumi	-	34.596.367	*Income from gas processing*
Subtotal	**2.412.470.607**	**2.398.443.676**	***Subtotal***
Jumlah pendapatan	**3.788.619.187**	**3.646.304.165**	***Total revenues***

Pendapatan niaga gas bumi terdiri dari penjualan gas kepada:

Revenues from gas trading consists of natural gas sales to the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Pelanggan industri dan komersial	2.476.861.110	2.544.452.195	*Industrial and commercial customers*
Pelanggan rumah tangga	38.746.057	25.173.404	*Households customers*
SPBG	4.173.009	3.472.679	*SPBG*
Jumlah	**2.519.780.176**	**2.573.098.278**	***Total***

Penjualan minyak dan gas merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas Grup dari aktivitas hulu dari kerjasama operasi minyak dan gas.

Crude oil and natural gas sales represent the Group's sales of oil and gas from upstream oil and gas joint operations.

Penyediaan jaringan kepada para pelanggan merupakan pendapatan PGASKOM dengan menggunakan fiber optik.

Network services to the customers represents PGASKOM's revenues by using the fiber optic.

LNG Trading merupakan transaksi jual beli LNG antara Perusahaan dengan China National Technical IMP & EXP Corp ("CNTIC") (Catatan 35p).

LNG Trading is a LNG sales and purchase transaction between the Company and China National Technical IMP & EXP Corp ("CNTIC") (Note 35p).

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan PGASSOL atas penyediaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jaringan pipa dan PGN MAS atas penyediaan jasa pengamanan, sewa kendaraan, dan perumahan kepada pelanggannya.

Other revenue represents PGASSOL's revenue of pipeline construction and maintenance services and PGN MAS' revenue of security services, vehicle rental and housing to the customers.

27. PENDAPATAN (lanjutan)

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) masing-masing sebesar USD697.057.687 atau 18,40% dan USD530.672.823 atau 14,55% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

27. REVENUES (continued)

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) amounting to USD697,057,687 or 18.40% and USD530.672,823 or 14.55% from total consolidated revenues for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:

28. COST OF REVENUES

The components of cost of revenue based on their nature are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Pembelian gas bumi			***Purchase of natural gas***
Pihak ketiga	1.004.700.734	1.283.459.806	*Third parties*
Pihak berelasi	814.864.769	631.363.554	*Related parties*
Subtotal	1.819.565.503	1.914.823.360	*Subtotal*
Aktivitas hulu minyak dan gas bumi			***Oil and gas upstream operations***
Beban penyusutan, deplesi dan amortisasi	198.583.937	246.535.411	*Depreciation, depletion and amortisation*
Beban produksi dan lifting	107.124.986	120.195.953	*Production and lifting costs*
Subtotal	305.708.923	366.731.364	*Subtotal*
LNG			***LNG***
Beban penyusutan	47.762.110	47.765.993	*Depreciation expenses*
Beban terkait LNG	17.044.919	15.831.612	*LNG related expenses*
Subtotal	64.807.029	63.597.605	*Subtotal*
LNG Trading	208.669.488	-	***LNG Trading***
Pemrosesan gas	25.697.262	27.688.510	***Gas processing***
Sewa dan jasa lainnya	43.256.309	28.082.897	***Rent and other services***
Beban niaga dan infrastruktur			***Trading and infrastructure expenses***
Penyusutan	163.301.724	162.920.221	*Depreciation*
Perbaikan, pemeliharaan, dan jasa umum	104.336.175	77.498.149	*Repairs, maintenance, and general services*
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	92.548.977	75.177.433	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Jasa umum	64.073.013	67.686.113	*General services*
Sewa	33.278.070	37.408.438	*Rent*
Bahan bakar dan kimia	27.348.304	26.179.416	*Fuel and chemicals*
Amortisasi	15.659.551	8.691.979	*Amortisation*
Iuran badan pengatur hilir minyak dan gas bumi	14.621.729	13.880.122	*Downstream oil and gas regulatory agency levy*
Peralatan dan suku cadang	7.362.826	7.041.392	*Tools and spareparts*
Honorarium professional	6.495.723	7.304.095	*Professional fees*
Komunikasi	6.479.630	6.580.220	*Communication*
Pajak dan retribusi	5.056.690	2.083.033	*Tax and retributions*
Perjalanan dinas dan transportasi	5.013.785	4.133.915	*Traveling and transportation*
Asuransi aset	2.946.308	3.126.889	*Asset insurance*
Survei dan studi	2.541.677	2.824.087	*Survey and study*
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	2.275.042	1.916.673	*Corporate social and environmental responsibilty*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	10.194.547	7.348.776	*Others (each below USD1,000,000)*
Subtotal	563.533.771	511.800.951	*Subtotal*
Total beban pokok pendapatan	**3.031.238.285**	**2.912.724.687**	***Total cost of revenues***

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Pembelian neto dari pihak berelasi yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari Pertamina dan entitas anaknya, masing-masing sebesar USD723.945.536 atau 19,11% dan USD559.392.373 atau 15,34% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Selain itu, pembelian neto dari pihak ketiga yang melebihi 10% jumlah pendapatan konsolidasian adalah pembelian dari PT Medco Energi Internasional Tbk., masing-masing sebesar USD785.630.658 atau 20,74% dan USD951.465.575 atau 26,08% dari jumlah pendapatan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

28. COST OF REVENUES (continued)

Net purchases from related parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from Pertamina and its subsidiaries, amounting to USD723,945,536 or 19.11% and USD559,392,373 or 15.34% of total consolidated revenues for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively. Meanwhile, net purchases from third parties in excess of 10% of the total consolidated revenues are for purchases from PT Medco Energi Internasional Tbk., amounting to USD785,630,658 or 20.74% and USD951,465,575 or 26.08% of total consolidated revenues for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Gaji, imbalan pascakerja dan jangka panjang lainnya	115.557.581	104.045.408	*Salaries, post-employment and other long-term benefits*
Honorarium profesional	11.690.939	10.272.524	*Professional fees*
Sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah	11.276.958	11.165.777	*Short-term leases and leases of low value assets*
Jasa umum	11.147.615	10.455.958	*General services*
Penyusutan	11.065.809	9.505.799	*Depreciation*
Perbaikan dan pemeliharaan	8.958.601	5.964.998	*Repairs and maintenance*
Pengelolaan fasilitas	7.289.282	17.856.143	*Facilities management*
Perjalanan dinas dan transportasi	5.061.950	6.020.488	*Traveling and transportation*
Pendidikan dan pelatihan	3.634.617	2.963.088	*Education and training*
Pajak dan retribusi	2.988.711	2.506.488	*Tax and retributions*
Survei dan studi	2.529.765	1.147.197	*Survey and study*
Representasi dan jamuan	2.203.062	4.202.670	*Representation and entertainment*
Asuransi aset	1.846.775	1.182.771	*Asset insurance*
Tanggung jawab sosial dan bina lingkungan	1.616.264	2.623.590	*Corporate social and environmental responsibility*
Komunikasi	1.305.868	1.294.238	*Communication*
Amortisasi sewa lahan dan aset tak berwujud	818.483	1.266.036	*Land rent and intangible asset amortization*
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1.000.000)	2.222.639	4.422.028	*Others (each below USD1,000,000)*
Jumlah beban umum dan administrasi	**201.214.919**	**196.895.201**	***Total general and administrative expenses***

30. BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN / *30. FINANCE COST AND INCOME*

a. Beban keuangan / *a. Finance costs*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Bunga utang obligasi	11.645.616	55.676.573	*Interest on bonds payable*
Beban bunga sewa pembiayaan	17.015.634	19.171.128	*Interest expenses on finance leases*
Beban akresi	7.168.994	6.837.735	*Accretion expense*
Bunga pinjaman dari pinjaman bank:			*Interest on bank loans:*
- *Club Deal*	35.134.865	9.848.084	*Club Deal -*
- PT Bank DBS Indonesia	157.276	995.186	*PT Bank DBS Indonesia -*
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk.	411.823	995.186	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk. -*
- BRI	300.000	-	*BRI -*
Bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dari Pemerintah:			*Interest on two-step loans from the Government:*
- JBIC	2.597.692	2.910.092	*JBIC -*
- IBRD	738.574	1.101.558	*IBRD -*
Penyesuaian nilai wajar piutang lain-lain jangka panjang	157.275	92.612	*Fair value adjustment of other long-term receivables*
Jumlah beban keuangan	**75.327.749**	**97.628.154**	***Total finance costs***

b. Pendapatan keuangan / *b. Finance income*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of the following:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Bunga jasa giro	34.627.129	29.292.738	*Interest from current accounts*
Bunga deposito	25.136.709	18.207.738	*Interest from time deposits*
Bunga investasi jangka pendek	426.007	963.557	*Interest from short-term investment*
Jumlah pendapatan keuangan	**60.189.845**	**48.464.033**	***Total finance income***

31. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN DAN SELISIH KURS

31. OTHER INCOME AND EXPENSES AND FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCE

a. Pendapatan lain-lain

a. Other income

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Jasa operasi dan pemeliharaan	5.445.122	-	*Operation and maintenance services*
Bunga arbitrase	5.200.000	-	*Arbitration interest*
Jasa pemakaian aset tetap	3.909.501	1.251.004	*Fixed asset usage services*
Denda	2.123.112	1.289.294	*Penalty*
Kompensasi Gas	310.819	206.189	*Gas compensation*
Lain-lain	23.305.361	21.876.850	*Others*
Jumlah	**40.293.915**	**24.623.337**	***Total***

b. Beban lain-lain

b. Other expenses

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Kerugian penurunan nilai piutang	41.348.762	4.824.953	*Impairment loss on receivables*
Pajak final jasa konstruksi	7.560.579	4.431.308	*Final tax on construction services*
Estimasi klaim	6.739.177	-	*Estimated claims*
Provisi atas putusan arbitrase	3.816.018	-	*Provisions on arbitration result*
Lain-lain	14.338.250	9.633.739	*Others*
Jumlah	**73.802.786**	**18.890.000**	***Total***

c. Laba/(rugi) selisih kurs - neto

c. Gain/(loss) on foreign exchange - net

Akun ini terdiri dari:

This account consists of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Selisih kurs transaksi	12.192.098	(2.776.971)	*Transaction foreign exchange*
Selisih kurs penjabaran	(1.066.814)	10.129.626	*Translation foreign exchange*
Jumlah	**11.125.284**	**7.352.655**	***Total***

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan termasuk pembelian kembali saham Perusahaan yang dilakukan selama tahun berjalan.

32. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing net income attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period including buyback of the Company's shares made during the year.

32. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (lanjutan) / *32. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (continued)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	339.427.774	278.091.179	*Net income attributable to owners of the parent*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (lembar saham)	24.241.508.196	24.241.508.196	*Weighted average number of ordinary shares outstanding (number of shares)*
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**0,0140**	**0,0115**	***Basic earnings per share (full amount)***

Grup tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group did not have any dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024 and 2023.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

In the normal course of business, the Group entered into trade and other transactions with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those for transactions between unrelated parties.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of the nature of relationships and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties*	Transaksi/ *Transactions*
Pemerintah Republik Indonesia/*Government of the Republic of Indonesia*	Pemegang saham utama/*Ultimate parent*	Pembayaran dividen, penerusan pinjaman dan debitur obligasi/*Payment of dividends, two-step loans and debtor of bonds*
Pertamina	Pemegang saham langsung/*Immediate parent*	Debitur obligasi, penjualan dan pembelian minyak dan gas bumi, dan pinjaman dari pemegang saham/*Debtor of bonds, purchase and sale of oil and gas, and loan from shareholder*
SKK Migas, Direktorat Jendral Minyak dan Gas ESDM (“Ditjen Migas”)	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Pemasok/*Suppliers*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ ***Related parties***	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties***	**Transaksi/** ***Transactions***
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, penempatan kas yang dibatasi penggunaannya, fasilitas *Non Cash Loan*, fasilitas *Bill Purchasing Line*, fasilitas Kredit Modal Kerja, fasilitas *Supply Chain Financing*, fasilitas *Treasury Line*/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, placement of restricted cash, Non Cash Loan facility, Bill Purchasing Line facility, Working Capital Loans facility, Supply Chain Financing facility, Treasury Line facility*
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, penempatan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas kredit investasi/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, investment credit facility*
BRI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro, deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, fasilitas *Standby Letter of Credit*, fasilitas bank garansi dan fasilitas penangguhan jaminan impor/*Placement of current accounts, placement of unrestricted time deposits, Standby Letter of Credit Facility, bank guarantee facility and guarantee of suspension of import facility*
BSI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya/*Placement of unrestricted time deposits*
BTN, Unit Usaha Syariah BTN	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Penempatan giro/*Placement of current accounts*
PHE dan entitas anak/*and subsidiaries*, PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Rokan	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Uang muka pembelian gas bumi, pemasok gas, pelanggan, uang muka *ship-or-pay* pemasok gas, Pelanggan/*Advance of take or pay, gas supplier, customer, advance of ship or pay gas supplier, Customer*
PLN, PT Barata Indonesia (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	Pelanggan/*Customers*
PT Bhirawa Steel, PT Energi Agro Nusantara, PT Wijaya Karya Intrade, PT Wijaya Karya Beton,	Entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of State-Owned Enterprises (“SOEs”) controlled by the Government*	Pelanggan/*Customers*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	**Sifat hubungan dengan pihak berelasi/*Relationship with the related parties***	**Transaksi/ *Transactions***
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Krakatau Posco, PT Krakatau Semen Indonesia, PT Krakatau Nippon Steel Synergy, PT Krakatau Wajatama (“Krakatau Steel Grup”)	Entitas BUMN yang dikendalikan Pemerintah dan anak perusahaannya/*SOE entity and its subsidiaries controlled by the Government*	Pemasok dan pelanggan/*Suppliers and customers*
PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Petrogas Jatim Utama, Kaltim Methanol Industri,	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan minyak dan gas/*Oil and gas customers*
PT Patra Drilling Contractor, PT Pertamina Training & Consulting, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Patra Niaga, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk., PT Elnusa Tbk.	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok/*Suppliers*
KPI	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Pemasok dan Pelanggan/ *Supplier and Customer*
Lembaga Manajemen Aset Negara (“LMAN”)	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entity*	Perjanjian Kerja Sama Operasional Kilang LNG Arun/*Operational Cooperation Agreement of Arun LNG Plant*
PT PLN Batam, PT Pupuk Iskandar Muda, PT PLN Indonesia Power, PT Pupuk Sriwidjaja, PKG, PT Patra Logistik	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ *Subsidiaries of SOEs controlled by the Government*	Pelanggan transmisi dan niaga gas/*Gas transmission and trading customer*
Regas	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*
Transgasindo	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham dan transportasi gas bumi/*Investment in shares and gas transportation*
PSG	Ventura Bersama/*Joint Venture*	Penyertaan saham, pemasok gas/*Investment in shares, gas supplier*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Significant transactions with related parties are as follows:

Pendapatan

Revenues

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Niaga gas bumi			***Gas trading***
PLN	184.446.775	242.747.342	*PLN*
PT PLN Indonesia Power	154.492.987	50.971.638	*PT PLN Indonesia Power*
PT PLN Batam	119.455.044	123.523.449	*PT PLN Batam*
PT Pupuk Iskandar Muda	95.637.232	96.645.830	*PT Pupuk Iskandar Muda*
KPI	87.714.624	103.365.587	*KPI*
PT Pupuk Kujang	71.531.100	45.721.385	*PT Pupuk Kujang*
Krakatau Steel *Group*	14.563.884	10.064.454	*Krakatau Steel Group*
PT Bhirawa Steel	1.799.783	-	*PT Bhirawa Steel*
PT Energi Agro Nusantara	1.145.161	-	*PT Energi Agro Nusantara*
Lainnya	2.769.925	5.693.934	*Others*
Jumlah	**733.556.515**	**684.630.037**	***Total***
Transmisi gas			***Gas transmision***
PLN	69.749.736	57.511.985	*PLN*
KPI	41.782.875	8.175.188	*KPI*
PT Pertamina EP	37.903.018	36.355.895	*PT Pertamina EP*
PT Pupuk Sriwidjaja	24.860.883	27.122.989	*PT Pupuk Sriwidjaja*
PT Petrokimia Gresik	21.256.505	19.395.531	*PT Petrokimia Gresik*
PT PLN Indonesia Power	15.615.914	12.190.925	*PT PLN Indonesia Power*
PT Pupuk Kalimantan Timur	11.727.942	11.434.077	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Lainnya	4.270.356	17.538.724	*Others*
Jumlah	**227.167.229**	**189.725.314**	***Total***
Penjualan minyak dan gas			***Oil and gas sales***
PLN	47.869.570	55.918.409	*PLN*
PT Pertamina Patra Niaga	22.274.048	23.853.719	*PT Pertamina Patra Niaga*
Pertamina	-	1.251.926	*Pertamina*
Jumlah	**70.143.618**	**81.024.054**	***Total***
Pemrosesan gas			***Gas processing***
PT Pertamina Patra Niaga	24.096.260	22.550.392	*PT Pertamina Patra Niaga*
PHE	1.628.641	1.792.006	*PHE*
PT Pertamina Trans Kontinental	-	4.228.708	*PT Pertamina Trans Kontinental*
Lainnya	-	3.043.411	*Others*
Jumlah	**25.724.901**	**31.614.517**	***Total***

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pendapatan (lanjutan) / ***Revenues (continued)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2024	2023	
Transportasi minyak			***Oil processing***
PT Pertamina Hulu Rokan	126.044.685	108.879.094	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina EP	16.916.518	16.881.717	*PT Pertamina EP*
Jumlah	**142.961.203**	**125.760.811**	***Total***
Jasa regasifikasi			***Gas regasification***
PLN	105.427.661	126.359.066	*PLN*
PT Trans Kontinental	9.213.402	-	*PT Trans Kontinental*
PT Patra Niaga	7.166.007	-	*PT Patra Niaga*
PT Pupuk Iskandar Muda	5.607.410	1.271.219	*PT Pupuk Iskandar Muda*
PHE	1.849.479	-	*PHE*
Lainnya	330.687	-	*Others*
Jumlah	**129.594.646**	**127.630.285**	***Total***
Jasa konstruksi dan pemeliharaan			***Construction and maintenance services***
PT Pertamina Hulu Rokan	19.443.573	5.394.579	*PT Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina Patra Niaga	12.413.871	-	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Kilang Pertamina Balikpapan	2.735.356	-	*PT Kilang Pertamina Balikpapan*
KPI	2.243.972	-	*KPI*
PT Pertamina EP	1.718.620	-	*PT Pertamina EP*
Lainnya	4.210.173	2.080.892	*Others*
Jumlah	**42.765.565**	**7.475.471**	***Total***
Jasa jaringan telekomunikasi			***Telecommunication network services***
Pertamina	3.082.761	-	*Pertamina*
PT Pertamina Hulu Energi	160.500	-	*PT Pertamina Hulu Energi*
Lainnya	991.642	-	*Others*
Jumlah	**4.234.903**	**-**	***Total***
Jumlah	**1.376.148.580**	**1.247.860.489**	***Total***
Persentase dari total pendapatan konsolidasian	36,32%	34,22%	*Percentage from total consolidated revenues*
Pembelian gas bumi			***Purchases of natural gas***
PT Pertamina EP	463.887.329	385.966.584	*PT Pertamina EP*
PHE	245.728.799	156.666.778	*PHE*
SKK Migas/Ditjen Migas	90.919.233	71.971.181	*SKK Migas/Ditjen Migas*
PT Pertamina Patra Niaga	10.970.085	11.235.713	*PT Pertamina Patra Niaga*
Pertamina	3.359.323	5.523.298	*Pertamina*
Jumlah	**814.864.769**	**631.363.554**	***Total***
Persentase dari total beban pokok pendapatan konsolidasian	26,88%	21,68%	*Percentage from total consolidated cost of revenues*

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Transaksi pembelian gas kepada SKK Migas/Ditjen Migas merepresentasikan tambahan provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang diakui oleh Grup secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penambahan *unutilised gas volume* /sesuai dengan Kepmen ESDM No. 255/2024, No. 91/2023, dan No.135/2021 (Catatan 18a dan 36c).

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 24,04% dan 20,84% dari total aset konsolidasian.

Aset keuangan pada nilai wajar pada penghasilan komprehensif lainnya dan aset keuangan tersedia untuk dijual
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo investasi jangka pendek yang ditempatkan pada pihak berelasi adalah sebesar 0,00% dan 0,35% dari total aset konsolidasian.

Piutang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo piutang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 2,53% dan 3,13% dari total aset konsolidasian.

Piutang sewa pembiayaan
Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang sewa pembiayaan pada pihak berelasi sebesar 1,30% dari total aset konsolidasian.

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Gas purchase transactions to SKK Migas/Ditjen Migas represents additional provisions for adjustments to the purchase price of certain natural gas in which periodically recognized by the Group based on estimation in accordance with the addition of unutilised gas volumes based on Kepmen ESDM No. 255/2024, No. 91/2023, and No.135/2021 (Notes 18a dan 36c).

Significant balances with related parties are as follows:

Cash and cash equivalents and restricted cash

As of December 31, 2024 and 2023, the balances of cash and cash equivalents and restricted cash placed with related parties amounted to 24,04% and 20.84%, respectively, of total consolidated assets.

Financial assets at fair value through other comprehensive income and available-for-sale financial assets
As of December 31, 2024 and 2023, the balances of short-term investments placed with related parties are amounted to 0.00% and 0.35%, respectively, of total consolidated assets.

Trade receivables
As of December 31, 2024 and 2023, the balances of trade receivables from related parties amounted to 2.53% and 3.13% respectively, of total consolidated assets.

Finance lease receivable
As of December 31, 2024, the balances of finance lease receivable from related parties amounted to 1.30% of total consolidated assets.

33. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Piutang lain-lain dan piutang lain-lain jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo piutang lain-lain pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,20% dari total aset konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo piutang lain-lain jangka panjang pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,06% dari total aset konsolidasian.

Utang usaha
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 5,33% dan 5,97% dari total liabilitas konsolidasian.

Utang lain-lain
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 0,00% dan 0,00% dari total liabilitas konsolidasian.

Pinjaman
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang dipinjamkan dari pihak berelasi, termasuk penerusan pinjaman, pinjaman pemegang saham, dan pinjaman bank jangka pendek masing-masing sebesar 12,41% dan 12,56% dari total liabilitas konsolidasian.

Kompensasi dan imbalan lain

Grup memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

33. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Significant balance with related parties are as follows: (continued)

Other receivables and other long-term receivables

As of December 31, 2024 and 2023, the balances of other receivables from related parties amounted to 0.00% and 0.20%, respectively, of total consolidated assets. As of December 31, 2024 and 2023, the balances of other long-term receivables from related parties are amounted to 0.00% and 0.06% respectively, of total consolidated assets.

Trade payables
As of December 31, 2024 and 2023, the balances of trade payables due to related parties amounted to 5.33% and 5.97%, respectively, of total consolidated liabilities.

Other payables
As of December 31, 2024 and 2023, the balances of other payables due to related parties amounted to 0.00% and 0.00%, respectively, of total consolidated liabilities.

Loans
As of December 31, 2024 and 2023, the balances of long-term and short-term loans due to related parties, including two-step loans, shareholder loan and short-term bank loans, amounted to 12.41% and 12.56%, respectively, of total consolidated liabilities.

Compensation and other benefits

The Group provided compensation and other benefits to Commissioners and Directors of the Group with details as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
Dewan Komisaris	6.365.679	5.545.119	*Board of Commissioners*
Direksi	11.622.426	11.798.989	*Directors*
Total	**17.988.105**	**17.344.108**	***Total***

34. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Sejak tahun 2016, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk tidak mengalokasikan anggaran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK"), sehingga Perusahaan hanya melaksanakan penagihan pada pinjaman yang sedang bergulir dan menyelesaikan kontrak yang sudah ditandatangani dengan menggunakan sisa alokasi laba bersih tahun 2012. Perusahaan juga menetapkan kebijakan dengan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dananya berasal dari anggaran yang ditetapkan sebagai biaya yang dananya dikelola di rekening terpisah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mencatat beban atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada operasi berjalan yang disajikan pada akun "Beban pokok pendapatan serta Beban umum dan administrasi - tanggung jawab sosial dan bina lingkungan" pada laba rugi masing-masing sebesar USD3.891.306 dan USD4.540.263.

Dana yang berasal dari anggaran Perusahaan yang penetapannya disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut ditempatkan dalam rekening bank terpisah. Saldo dana dalam rekening bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah USD64.227 dan USD95.948 yang dilaporkan sebagai bagian kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

34. PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Since 2016, the Company established a policy not to allocate budget to the Micro Business and Small Business Funding ("UMK") Program, so the Company's only remaining activity for this program is to collect the remaining loans being rolled over and to complete the remaining contract that was already signed using the remaining allocation of net profit from 2012. The Company also established a policy to implement a Social and Environmental Responsibility Program to be funded from the budget set as the cost of funds deposited into a separate account.

For the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company has recorded the Corporate Social and Environmental Responsibility expense in current operations which is presented as part of "Cost of revenues and General and administrative expenses - Corporate Social and Environmental Responsibility" account in profit or loss amounted to USD3,891,306 and USD4,540,263 respectively.

The funds, which originated from the Company's budget and have been approved by the Board of Commissioners, are deposited into designated bank accounts. The balance of such funds as of December 31, 2024 and 2023 were USD64,227 and USD95,948, respectively, which are reported as part of cash and cash equivalents in the consolidated statement of financial position.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

a. PJBG Pemasok

Grup harus membeli dan membayar jumlah pembelian minimum per tahun/kuartal/bulan untuk setiap PJBG dengan pemasok dari kontraktor PSC pada masing-masing lapangan gas sesuai rincian di bawah ini. Perbedaan antara jumlah kuantitas pembelian nyata dan kuantitas pembelian minimum dicatat sebagai "*Make-Up Gas*", yang dapat direalisasikan setiap saat jika kuantitas minimum atau bagian dari jumlah kontrak tahunan/kuartalan/bulanan (mana yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing PJBG) telah diambil pada tahun/kuartal/bulan tertentu selama jangka waktu perjanjian. Saldo "*Make-Up Gas*" disajikan sebagai bagian dari "Uang Muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements:

a. Suppliers GSPA

The Group is required to purchase and pay for a minimum purchase quantity per year/quarter/month for each of the GSPA with the gas suppliers from the PSC contractors of each gas field as stated below. The difference between the purchased quantity and the minimum purchase quantity is recorded as "Make-Up Gas", which can be realised any time if the minimum quantity or part of annual/quarterly/monthly contract quantity (which is applicable in accordance with the respective GSPA) has been taken or at a specified year/quarter/month during the period of the agreement. The outstanding balance of the "Make-Up Gas" is presented as part of "Advances" in the consolidated statements of financial position.

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/ *Gas field***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
EMP Bentu Limited	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Pelalawan /*Mutual Agreement of Gas Delivery for Householdsl in Pelalawan*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	1 November/ *November 1,* 2022	Berakhirnya PSC Bentu/*Completion of Bentu PSC*	-
EMP Bentu Limited	Perjanjian Jual Beli Gas untuk Jaringan Distribusi Gas Sektor Rumah Tangga di Kota Dumai/ *Gas and Sales Purchase Agreement for Gas Distribution Netork Residential Sector ini Dumai*	Wilayah Kerja Bentu/*Bentu working area*	0,2 MMSCFD	19 November/ *November 19,* 2019	23 Juli/*July 23,* 2029	-
Energy Equity Epic Sengkang Pty Ltd.	PJBG Jargas Sengkang dan Wajo/*GSPA Jargas Sengkang and Wajo*	Wilayah kerja Sengkang/ *Sengkang working field*	0,6 MMSCFD	8 September/ *September 8,* 2020	17 Agustus/ *August 17,* 2032	-
Husky CNOOC Madura Ltd. ("HCML")	PJBG/*GSPA* HCML	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	20 MMSCFD (*Gas in* 13 November / *November 13,* 2017) 60 MMSCDF (mulai/*start from* 14 November, 2017)	30 Oktober/ *October 30,* 2007	31 Oktober/ *October 30,* 2032	-
HCML.	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Lapangan MDA-MBH-MDK (3M)/*MDA-MBH-MDK field (3M)*	5 MMSCFD	21 Oktober/ *October 21, 2022*	31 Oktober/ *October 31, 2032*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/ *Gas field***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
HCML	Kesepakatan Bersama untuk Amendemen PJBG Jargas /*Mutual Agreement for Amendment of GSPA Jargas*	Lapangan Madura BD/ *Madura BD field*	1,55 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	17 Agustus 2032/*August 17, 2032*	-
Joint Operating Body ("JOB") PSC Tomori (PT Medco EP Tomori Sulawesi, Tomori E&P Limited, dan/*and* PT PHE Tomori Sulawesi)	Kesepakatan Bersama Jargas Banggai/*Mutual Agreement Jargas Banggai*	Lapangan di wilayah kerja Senoro-Tolli/ *Field in Senoro-Tolli working area*	0,2 MMSCFD	20 Desember/ *December 20, 2019*	23 Juli/ *July 23, 2029*	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dibangun oleh Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya/*Memorandum of agreement gas Supply Through Gas*	Lapangan TSB/ *TSB field*	0,2 MMSCFD	9 September/ *September 9, 2022*	13 November/ *November 13, 2030*	-
Kangean Energy Indonesia Ltd.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas untuk Jargas Jombang, Bojonegoro, dan Surabaya/*Mutual Agreement of Gas and Sales Purchase for Jargas Jombang, Bojonegoro, and Surabaya*	Lapangan TSB	Jombang 0,2 MMSCFD Bojonegoro 0,2 MMSCFD Surabaya 0,1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	13 November/ *November 13,* 2030	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Medco EP Grissik Ltd. (dahulu/*previously* ConocoPhillips (Grissik) Ltd.)	GSA Jargas dan BBG	Blok Koridor/ *Corridor Block*	Jargas 0.5 MMSCFD 1 Jan 2020 – 26 Agu/Aug 2020 0.8 MMSCFD 27 Agu/Aug 2020 – 31 Des/Dec 2021 1 MMSCFD 1 Jan 2022 – 17 Agu/Aug 2022 1.4 MMSCFD 18 Agu/Aug 2022 – 31 Des/Dec 2028 BBG 2.47 MMSCFD 2020 3.39 MMSCFD 2021 4.82 MMSCFD 2022 7.02 MMSCFD 2023 9.57 MMSCFD 2024	1 Januari/ *January 1,* 2020	31 Desember/ *December 31*, 2028	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Medco EP Grissik Ltd. (dahulu/*previously* ConocoPhillips (Grissik) Ltd.)	Perjanjian Jual Beli Gas/ *Gas Sales and Purchase Agreement*	Blok Koridor/ *Corridor Block*	335 BBTUD 1 Okt/Oct- 19 Des/Dec 2023 410 BBTUD 20 Des/Dec 2023- 31 Des/Dec 2024 271 BBTUD 2025 238 BBTUD 2026 185 BBTUD 2027 129 BBTUD 2028	1 Oktober/ *October 1,* 2023	31 Desember 2028/ *December 31, 2028*	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau tanggal penandatangan an PJBG, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or the signing date of the GSPA, whichever comes first.*
Medco Madura Offshore Pty. Ltd. (dahulu/ *previously* Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.)	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase*	Lapangan/*Field* Meliwis	1 Sep 2023 – 31 Dec 2023 = 13.1 BBTUD 2024 = 16.1 BBTUD 2025 = 22.2 BBTUD 2026 = 22.1 BBTUD 2027 = 13.7 BBTUD Total Jumlah Kontrak/*Total Contract Quantity* = 28.3 TBTU	1 September /*September 1, 2023*	3 Desember /*December 3,* 2027	Dokumen kesepakatan sementara selama amendemen PJBG Lapangan Meliwis dalam proses finalisasi/*Interim document until the amendment of GSPA Meliwis Field is finalised*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Medco Madura Offshore Pty. Ltd. (dahulu/ *previously* Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.)	PJBG/*GSPA* Santos Maleo dan/*and* Peluang	Lapangan Maleo dan Lapangan Peluang / *Maleo Field and Peluang Field*	2024- 2025 = 8.5 BBTUD 2026 = 5 BBTUD 2027 = TBC Total Jumlah Kontrak/Total Contract Quantity = 8.0 TBTU	31 Mei/*May 31,* 2005	3 Desember /*December 31,* 2027	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
Minarak Brantas Gas Inc. (dahulu/ *previously* Lapindo Brantas, Inc.	Kesepakatan Bersama Kelanjutan Pasokan Gas/ *Agreement of Gas Supply Continuity*	Lapangan Brantas/ Brantas *field*	16,6 BBTUD	20 April/ *April 20*, 2020	31 Maret/*March* 31, 2025 atau ditanda-tangani dan berlaku efektifnya PJBG/*or GSA effectively signed*	-
Minarak Brantas Gas Inc. (dahulu/ *previously* Lapindo Brantas, Inc.	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kabupaten Sidoarjo/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Sidoarjo Regency*	Lapangan Brantas/ Brantas *field*	0.6 MMSCFD 8 Sep 2020 – 31 Des/Dec 2021 0.3 MMSCFD 1 Jan 2022 – 26 Apr 2028 0.1 MMSCFD 27 Apr 2028 – 7 Sep 2030	8 September/ *September 8, 2020*	7 September/ September 7, 2030	-
PT. Pertamina (Persero)	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyaluran Gas Bumi Jambaran Tiung Biru /*Joint Cooperation Agreement of Jambaran Tiung Biru Gas Operation and Delivery*	Wilayah kerja Cepu/ *Cepu working area*	172 MMSCFD	20 September/ *September 20*, 2022	31 Desember/ *December 31, 2025*	Berlaku sampai dengan berakhirnya tanggal berakhir atau ditandatanganinya Novasi Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina EP Cepu dengan Pertamina dan PGN, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end date or the signing date of Novation Agreement between PT Pertamina EP Cepu, Pertamina, and PGN, whichever come first*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. PJBG (lanjutan)

a. GSPA (continued)

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PetroChina Jabung Ltd.	PJBG Jargas Kabupaten Tanjung Jabung Barat / GSPA *Citygas West Tanjung Jabung Regency*	Wilayah kerja Jabung/ *Jabung working area*	0.2 MMSCFD	16 Desember/ *December 16,* 2022	28 Februari/ *February 28*, 2043	Berlaku sampai dengan berakhirnya produksi gas atau berakhirnya PSC Jabung, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end of gas production or the end of Jabung PSC, whichever come first*
PT Inti Alasindo Energy ("IAE")	PJBG/*GSPA* PGN-IAE	Lapangan Madura BD/*Madura BD field*	15 MMSCFD	5 April/ *April 5*, 2019	4 April / *April 4*, 2025	-
PT Medco E&P Indonesia	PJBG untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Kota Palembang, Sumatera Selatan/ *GSPA for Residential Demand in Palembang, South Sumatera*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan / *Field in South Sumatera working area*	0.4 MMSCFD	8 September/ *September 8*, 2020	7 September/ *September 7*, 2030	-
PT Medco E&P Indonesia	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas Kota Tarakan/*Mutual Agreement of City Gas Distribution in Tarakan*	Lapangan di Wilayah Kerja Tarakan/*Field in Tarakan working area*	0.3 MMSCFD	14 Januari/ *January 14,* 2016	sampai berakhirnya PSC Tarakan/ *Until the end of Tarakan PSC*	Berlaku sampai dengan berakhirnya produksi gas atau berakhirnya PSC Tarakan, mana yang terjadi lebih dahulu/*It is valid until the end of gas production or the end of Tarakan PSC*
PT Medco E&P Indonesia	PJBG untuk Jargas Musi Banyu Asin/ *GSPA of City Gas Distribution in Musi Banyu Asin*	Lapangan di Wilayah Kerja Sumatera Selatan/*Field in South Sumatera working area*	0,25 BBTUD	25 September/ *September 25,* 2017	19 Juli/*July 19*, 2027	-
PT Pema Global Energi	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas dari Wilayah Kerja "B: untuk Kebutuhan Pelanggan PGN dan/atau Afiliasinya/ *Mutual Agreement of Gas Delivery from "B" Working Area to the Customer of PGN and its Affiliation*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	16,92 BBTUD	1 Januari / *January 1*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2024	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen Kesepakatan Bersama masih dalam proses untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2028/*Until the date of this financial statements, the amendment of Mutual Agreement is in process to extend the period until 31 December 2028*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT Pema Global Energi	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas WK B untuk Jargas/*Mutual Agreement of WK B Gas Sales and Purchase Offshore for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja B/*Field in B working area*	Aceh Utara 0.2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0.2 MMSCFD Lhokseumawe -Lhoksukon 0.5 MMSCFD Medan 0.2 MMSCFD Sejak 1 Des 2022/*since 1 Dec 2022* (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja North Sumatera Offshore/*In total with volume from North Sumatera Offshore working area)*	18 Mei/ *May* 18, 2021	26 Agustus/ *August* 26, 2030	-
PT Pertamina EP	PJBG Sumatera Selatan-Jawa Barat/*GSPA South Sumatra-West Java*	DOH Sumatera Selatan/*South Sumatera*	1.006 TSCF	26 Juni/ *June 26,* 2003	31 Desember/ *December 31,* 2025	Berlaku sampai dengan kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Penyaluran Gas untuk Jargas/*Mutual Agreement of City Gas distribution*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP/*Oil and gas field of PT Pertamina EP*	5,1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/ *In accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	31 Desember/ *December 31, 2024*	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG Jargas masih dalam proses pembahasan/ *Up to the date of this financial statements, the amendment of GSA Jargas is ongoing.*
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase Medan*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP area kerja Asset 1/*Oil and gas field of PT Pertamina EP working area Asset 1*	3 MMSCFD (2018-2021) 7 MMSCFD (2022-2024)	4 April/*April* 4, 2002	31 Desember/ *December 31,* 2024	Berlaku sampai dengan kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the contracted quantity is delivered, whichever comes first.*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) / *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT Pertamina EP	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/*Mutual Agreement of Gas Sales and Purchase*	Lapangan minyak dan gas bumi PT Pertamina EP Region Jawa, Jawa Bagian Barat/*Oil and gas field of PT Pertamina EP Java Region, West Java*	Titik serah/ *Delivery point* Bongas 0,5 MMSCFD (2021-2023) Titik Serah/ *Delivery point* Sunyaragi, Pondok Tengah, Citarik dan Serpong 8 MMSCFD (2021-2024)	1 Januari/ *January 1,* 2021	31 Desember/ *December 31,* 2024	-
PT Pertamina EP Cepu	Perjanjian Jual Beli Gas untuk Jargas Lamongan/ *Gas Sales and Purchase Agreement for City Gas Distribution in Lamongan*	Wilayah kerja Cepu/*Cepu working area*	0,2 MMSCFD	1 Januari/ *January 1,* 2023	12 September/ *September 12,* 2029	-
PT PHE Jambi Merang	Kesepakatan Bersama/*Mutual Agreement*	Wilayah kerja Jambi Merang/*Jambi Merang working field*	34,5 BBTUD	10 Februari/ *February 10*, 2019	31 Desember/ *December 31*, 2025	Berlaku sampai dengan tanggal akhir kontrak atau kuantitas yang diperjanjikan telah tercapai, mana yang terjadi lebih dahulu/ *It is valid until the end contract date or contracted quantity is delivered, whichever comes first.*
PT PHE Jambi Merang	PJBG dari Wilayah Kerja Jambi Merang untuk Kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Wilayah kerja Jambi Merang/ *Jambi Merang working area*	Batam 0.1 MMSCFD Musi Banyuasin 0.1 MMSCFD Muaro Jambi 0.1 MMSCFD	sesuai BA Gas in masing-masing penugasan/*in accordance with Minutes of Gas in for each assignment*	26 Agustus /*August 26*, 2030	-
PT PHE *North Sumatera Offshore* (“NSO”)	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas North Sumatera Offshore untuk Pupuk Iskandar Muda dan industry di Aceh dan Sumatera Utara/*Mutual Agreement of North Sumatera Offshoref Gas Sales and Purchase or Pupuk Iskandar Muda and industry in Aceh and North Sumatera*	Lapangan di wilayah kerja NSO/ *Field in NSO working area*	9.5 BBTUD	1 Januari/ *January 1*, 2024	31 Desember/ *December 31,* 2024	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen Kesepakatan Bersama masih dalam proses untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025/*Until the date of this financial statements, he amendment of Mutual Agreement is in process to extend the period until 31 December 2025*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

a. PJBG (lanjutan) *a. GSPA (continued)*

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT PHE NSO	Kesepakatan Bersama North Sumatera Offshore untuk Jargas Lhokseumawe Lhoksukon / *Mutual Agreement of North Sumatera Offshore Gas Sales and Purchase for Jargas Lhokseumawe Lhoksukon*	Lapangan di wilayah kerja NSO /*Field in NSO working area*	Lhokseumawe-Lhoksukon 0.5 MMSCFD (Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area)*	1 Januari/ *January 1*, 2024	7 September/ *September 7*, 2030	-
PT PHE NSO	PJBG North Sumatera Offshore untuk Jargas/*GSPA North Sumatera Offshore for Gas Sales and Purchase for Jargas*	Lapangan di wilayah kerja NSO/*Field in NSO working area*	Aceh Utara 0,2 MMSCFD Aceh Tamiang-Langsa 0,2 MMSCFD Gabungan dengan volume dari Lapangan di wilayah kerja B/*in total with volume from B working area*	3 November/ *November 3*, 2019	23 Juli/ *July 23*, 2029	-
PT PHE Ogan Komering	Kesepakatan Bersama/ *Mutual Agreement*	Wilayah kerja Ogan Komering/Ogan Komering working field	3,7 MMSCFD 2019 2,6 MMSCFD 2020 1,9 MMSCFD 2021 1,3 MMSCFD 2022 4,12 MMSCFD 2023 1,56 MMSCFD 2024	30 November/ *November 30*, 2018	31 Desember/ *December 31*, 2024	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen Kesepakatan Bersama masih dalam proses untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2028/*Until the date of this financial statements, he amendment of Mutual Agreement is in process to extend the period until 31 December 2028*
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, dan Kontraktor WMO/ *and WMO Contractors*	PJBG/*GSPA*	Wilayah kerja West Madura *Offshore/West Madura Offshore Area*	30 BBTUD (2019-2020) 19 BBTUD (2021-2023)	19 Desember/ *December 19*, 2006	31 Desember/ *December 31*, 2023	Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, amendemen PJBG masih dalam proses penandatanganan untuk memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2027 dengan volume per tahun sebesar 19 BBTUD / *Until the date of this financial statements, the amendment of GSA is in process of signing to extend the period until 31 December 2027 with volume per year of 19 BBTUD*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

a. PJBG (lanjutan)

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. GSPA (continued)

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PT PHE WMO, dan Kontraktor WMO/ *and WMO Contractors*	PJBG /GSPA *City Gas Surabaya*	Wilayah kerja West Madura Offshore/*West Madura Offshore Area*	0,9 BBTUD	23 November/ *November 23,* 2015	31 Desember/ *December 31*, 2034	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Balikpapan/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Balikpapan*	Wilayah kerja Kalimantan Timur/ East Kalimantan *working Area*	0,5 MMSCFD	25 Oktober/ *October 25*, 2020	24 Oktober/ *October 24*, 2028	-
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Kalimantan Timur/ East Kalimantan *working Area*	0,1 MMSCFD	17 Februari/ *February 17*, 2021	26 Agustus/ *August 26*, 2030	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Bontang/*Mutual Agreement for City Gas Distribution in Bontang*	Wilayah kerja Mahakam/ Mahakam *working Area*	0,5 MMSCFD	8 September/ *September 8*, 2020	7 September/ *September 7*, 2030	
PT Pertamina Hulu Mahakam	Kesepakatan Bersama untuk Jargas Kutai Kartanegara/ *Mutual Agreement for City Gas Distribution in Kutai Kartanegara*	Wilayah kerja Mahakam/ Mahakam *working Area*	0,2 MMSCFD	6 Februari/ *February 6*, 2020	23 Juli/*July 23*, 2029	
PT Pupuk Iskandar Muda Area: Sumatera Bagian Utara/ *Northern Sumatra Area*	Novasi dan Amendemen PJBG antara Pertamina, PIM dan PTGN/ *Novation and Amendment of GSPA between Pertamina, PIM and PTGN*	Wilayak Kerja Blok A PT Medco E&P Malaka/*A PSC Block Working Field with PT Medco E&P Malaka*	54 BBTUD	1 Juni/*June* 2020	31 Agustus/ *August 31,* 2032	-
PT Sele Raya Belida	Kesepakatan Bersama/Mutual Agreement	Lapangan gas Cantik/ Cantik gas field	2.5 BBTUD 1 Nov 2020-31 Des/Dec 2022 3.38 BBTUD 2023-2030	1 November/ *November 1*, 2020	31 Desember/ *December 31*, 2030	-
Triangle Pase Inc.	PJBG/GSPA	Blok Pase/Pase Block	5 BBTUD 2019 6 BBTUD 2020 7 BBTUD 2021-2032	15 Desember/ *December 15*, 2017	Sampai dengan berakhirnya PSC TPI/ *Until the end of TPI's PSC*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. PJBG (lanjutan)

a. GSPA (continued)

Pemasok/ *Suppliers*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Lapangan gas/*Gas field***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
PetroChina Jabung Ltd.	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas/ Mutual Conset of Gas Sales and Purchase	Wilayah kerja Jabung/ *Jabung working area*	1 Sep – 31 Dec 2023 = 10 BBTUD 2025 = 6,25 BBTUD 2026 = 3,15 BBTUD	Sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Tanggal Dimulai/ *in accordance with the Commencement Date Minutes*	31 Desember/ *December 31, 2026*	Pengaliran gas belum dimulai sehubungan dengan belum adanya persetujuan SKK Migas atas penyaluran Gas/*Gas delivery is yet to be commenced due to inavailability of SKK Migas' approval for Gas delivery*
Petrogas (Basin) Ltd	Perjanjian Jual Beli Gas Wilayah Kerja Kepala Burung untuk Jaringan Distribusi Gas Bumi Rumah Tangga Di Sorong / *Gas Sales And Purchase Agreement Of Kepala Burung Working Area For Household Gas Distribution In Sorong*	Blok Kepala Burung/ Kepala Burung *block*	0.2 MMSCFD	15 Oktober/*October 20*, 2020	7 September/ *September 7*, 2030	-

b. PJB LNG dengan Pemasok

Untuk memenuhi komitmen Grup kepada pelanggan yang sudah terkontrak, Grup menandatangani kontrak Penjualan dan Pembelian LNG dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

b. LNG SPA with Suppliers

To fulfill the group commitment's to the contracted customers, The Group entered into LNG Sales and Purchase Agreement with several suppliers as follows:

Counterparts	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
			Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Chevron, TipTop, ENI, Pertamina	Perjanjian Jual Beli LNG/*LNG Sales and Purchase Agreement*	Tahun 2023: 0.64 kargo Tahun 2024: 1 kargo	1 September/ *September 1*, 2023	31 Desember/ *December 31*, 2024	PGN dan Pertagas Niaga sebagai Pembeli/*PGN and Pertagas Niaga as Buyers*
Tangguh PSC *Contractor Parties*	Perjanjian Jual Beli LNG/*Master Sale and Purchase Agreement Confirmation Notice DES*	1 kargo/cargoes	19 Juni/*June 19*, 2024	18 Juni/*June 18*, 2029	PGN sebagai Pembeli / *PGN as Buyer*
Donggi Senoro LNG	Perjanjian Jual Beli LNG/*Master Sale and Purchase Agreement-Confirmation Notice FOB*	1 kargo/*cargoes*	8 Agustus/*August 8*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2029	PGN sebagai Pembeli / *PGN as Buyer*

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

c. PJBG Pelanggan

Dalam menyalurkan gas kepada pelanggan, PGN memiliki komitmen volume penyaluran gas kepada pelanggan. Komitemen tersebut tertuang di dalam perjanjanjian jual beli gas antara PGN dengan Pelanggan dengan volume terkontrak sebesar 1,150 BBTUD dan kisaran harga jual sebesar USD 7,22-14,78/MMBTU.

d. Perjanjian Pengangkutan Gas

Grup menandatangani kontrak-kontrak PPG dengan beberapa transporter dengan rincian sebagai berikut :

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Customers GSPA

In delivering gas to customers, PGN has a commitment to the volume of gas distribution to customers. This commitment is stated in the gas sales agreement between PGN and the Customer, with a contracted volume of 1,150 BBTUD and estimated range gas price of USD7.22-14.78/MMBTU.

d. Gas Transportation Agreement

The Group entered into GTA with several transporter with details as follows :

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Pertagas	Amendemen IV atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa antara PT Pertamina Gas dengan PKG/ *Amendment IV to the Natural Gas Pipeline Transportation Agreement between PT Pertamina Gas and PKG*	Gresik-Pegerungan	85,00 MMSCFD 1 Jul 2017 – 31 Des/ *Dec* 2026	1 Juli/ *July* 1, 2017	31 Desember/ *December* 2026	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	**Keterangan/ *Remarks***
Pertagas	Amendemen Keempat Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ("PUSRI") /*Fourth amendmend of Natural Gas Transportation Agreement thorugh Pipeline with PUSRI*	Grissik - PUSRI	70 MMSCFD 1 Jan 2019- 31 Des/*Dec* 2023 59 MMSCFD 1 Jan 2024- 31 Des/*Dec* 2024 74 MMSCFD 1 Jan 2025- 31 Des/*Dec* 2025 65 MMSCFD 1 Jan 2026- 31 Des/*Dec* 2026 58 MMSCFD 1 Jan 2027- 31 Des/*Dec* 2027 49 MMSCFD 1 Jan 2028- 31 Des/*Dec* 2028 45 MMSCFD 1 Jan 2029- 31 Des/*Dec* 2030 29 MMSCFD 1 Jan 2031- 31 Des/*Dec* 2032 9 MMSCFD 1 Jan 2033- 31 Des/*Dec* 2034	1 Jan/Jan *1, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2034*	-
Pertagas	Amendemen Kedua Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan PUSRI - PT Tropik Energi Panda ("TEP") untuk Area Sumatera Bagian Selatan /*Third amendmend of Natural Gas Transportation Agreement thorugh Pipeline with PUSRI – TEP for South Sumetera Area ("SSA")*	TEP – PUSRI	9,50 MMSCFD 1 Jul 2019 – *29 Jul 2021* 6,57 MMSCFD 30 Jul – 31 Des/*Dec* 2021 7,39 MMSCFD 1 Jan 2022 – 18 Mei/*May* 2023 0.82 MMSCFD 19 Mei/*May* 2023 – 31 Des/*Dec* 2024 8,21 MMSCFD 1 Jan 2025 – 31 Des/*Dec* 2027	1 Agustus/ *August 1, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2027*	-
Pertagas	Amendemen Perjanjian Pengangkutan Gas dengan KPI/*Amendmend of Gas Transportation Agreeement with KPI*	Duri - Dumai	21.09 – 35,20 MMSCFD 14 Apr 2019 – 31 Des/*Dec 31, 2019* 35,20 – 44 MMSCFD 1 Jan 2020 – 31 Des/*Dec 31, 2020* 46.20 – 36.30 MMSCF 1 Jan 2021 – 31 Des/*Dec 31, 2025* 36.30 1 Jan 2026 – 31 Des/*Dec 31, 2028*	14 Apr/*Apr 14*, 2019	31 Des/*Dec 31, 2028*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/*End***	
Pertagas	Amendemen III Perjanjian Pengangkutan Gas dengan Pertamina EP untuk Sumatera bagian Selatan /*Amendment III of Gas Transportation Agreement with Pertamina EP for South Sumatera Area*	Betung-Pusri	0,97 – 161,81 MMSCFD 1 Jul 2017 – 31 Des/*Dec* 2017 0,97 – 156,08 MMSCFD 1 Jan 2018 – 31 Des/*Dec* 2018 0,97 – 179,07 MMSCFD 1 Jan 2019 – 31 Des/*Dec* 2019 0,97 – 152,51 MMSCFD 1 Jan 2020 – 30 Sep 2020 1,27 – 152,81 MMSCFD 1 Oct 2020 – 31 Des/*Dec* 2020 1,27 – 168,46 MMSCFD 1 Jan 2021 – 31 Des/*Dec* 2021 1,27 – 144,19 MMSCFD 1 Jan 2022 – 31 Des/Dec 2022 1,27 – 101,38 MMSCFD 1 Jan 2023 – 31 Des/*Dec* 2023 1,27 – 109,62 MMSCFD 1 Jan 2024 – 31 Des/*Dec* 2024 1,27 – 87,36 MMSCFD 1 Jan 2025 – 31 Des/*Dec* 2025 1,27 – 68,42 MMSCFD 1 Jan 2026 – 31 Des/Dec 2026 1,27 – 53,16 MMSCFD 1 Jan 2027 – 30 Jun 2027	1 Juli 2017/*July 1, 2017*	30 Juni 2027/*June 30, 2027*	-
Pertagas	Amendemen atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk Area Kalimantan Timur/ *Amendmend of Natural Gas Transportation Agreement thorugh Pipeline with*	Tanjung Santan - SKG Bontang	191,89 MMSCFD 1 Jan 2020 – 31 Des/*Dec 2021* 273,04 MMSCFD 1 Jan 2022 – 31 Des/*Dec 2022* 320,63 MMSCFD 1 Jan 2023 – 31 Des/*Dec 2028*	1 Januari 2020/*January 1, 2020*	31 Desember 2028/ *December 31, 2028*	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/*End***	
Pertagas	Amendemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara Pertagas dengan Pertamina EP untuk Area Sumatera Bagian Utara/ *Amendment to the Natural Gas Pipeline Transportation Agreement between Pertagas and Pertamina EP for the Northern Sumatra Area*	Pangkalan batu – Pangkalan Brandan Wampu	4,64 MMSCFD 1 Jul 2017 – 31 Des/*Dec* 2017 3,68 MMSCFD 1 Jan 2018 – 31 Des/*Dec* 2018 4,28 – 4,48 MMSCFD 1 Jan 2019 – 31 Des/*Dec* 2019 2,88 – 3,08 MMSCFD 1 Jan 2020 – 31 Des/*Dec* 2020 3,12 – 3,32 MMSCFD 1 Jan 2021– 31 Des/*Dec* 2021 2,92 – 3,12 MMSCFD 1 Jan 2022 – 31 Des/*Dec* 2022 2,23 – 2,43 MMSCFD 1 Jan 2023 – 31 Des/*Dec* 2023 1,93 – 2,13 MMSCFD 1 Jan 2024 – 31 Des/*Dec* 2024 1,44 – 1,64 MMSCFD 1 Jan 2025 – 31 Des/*Dec* 2025 1,44 – 1,64 MMSCFD 1 Jan 2026 – 31 Des/*Dec* 2026 1,44 – 1,64 MMSCFD 1 Jan 2027 – 30 Jun 2027	1 Juli/ *July* 1, 2017	30 Juni/ *June* 30, 2027	-
Pertagas	Amendemen IV atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa untuk Area Jawa Bagian Timur antara Pertagas dengan PLN (Untuk Area Jawa Bagian / *Amendment IV to the Natural Gas Pipeline Transportation Agreement for the Eastern Java Area between Pertagas and PLN*	Pagerungan – Gresik	25,00 MMSCFD 12 Mar 2014 – 30 Jun 2018 54,00 MMSCFD 1 Jul 2018 – 31 Des/*Dec* 2018 100,00 MMSCFD 1 Jan 2019 – 31 Des/*Dec* 2033	12 Maret/ *March* 12, 2014	31 Desember/ *December* 31, 2033	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Pertagas	Amendemen kedua Perjanjian Pengangkutan Gas dengan Pertamina EP terkait titik terima baru pada ruas pipa untuk Jawa bagian barat/*Amendment of Gas Transportation Agreement with Pertamina EP regarding a receipt point of the pipeline segment for West Java area.*	Cisauh – Sunyaragi	80,911 MMSCFD 1 Jul 2017 – 31 Des/Dec 31, 2017 86,345 MMSCFD 1 Jan 2018 – 31 Des/*Dec* 2018 80,960 MMSCFD 1 Jan 2019 – 31 Des/Dec 2019 85,551 MMSCFD 1 Jan 2020 2020 – 31 Des/*Dec* 2020 76,705 MMSCFD 1 Jan 2021 – 31 Des/*Dec* 2021 60,372 MMSCFD 1 Jan 2022 – 31 Des/*Dec* 2022 49,907 MMSCFD 1 Jan 2023 – 31 Des/Dec 2023 41,735 MMSCFD 1 Jan 2024 – 31 Des/*Dec* 2024 38,291 MMSCFD 1 Jan 2025 – 31 Des/*Dec* 2025 26,417 MMSCFD 1 Jan 2026 – 31 Des/Dec 2026 13,880 MMSCFD 1 Jan 2027 – 31 Des/*Dec* 2027	1 Juli/*July 1, 2017*	30 Juni/*June 30,* 2027	-
Pertagas	Amendemen II atas Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara Pertagas dengan PLN Untuk Area Sumatera Bagian Utara/ Amanadment II to to The *Natural Gas Pipeline Transportation Agreement between Pertagas and PLN for the Northern Sumatra Area*	Arun - Belawan	95,00 MMSCFD 1 Februari/February 2015 – 31 Desember/December 2016 117,68 MMSCFD 1 Januari/January – 31 Desember/December 2017 140,00 MMSCFD 1 Januari/January 2018 - 31 Desember/December 2034	1 Februari/ February 2015	31 Desember/ December 2034	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) / ***35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)***

d. Perjanjian Pengangkutan Gas (lanjutan) / *d. Gas Transportation Agreement (continued)*

Transporter/ *Transporter*	**Perjanjian/ *Agreements***	**Pipa Transmisi/ *Transmission Pipeline***	**Volume kontrak/ *Contract Volume***	**Jangka waktu/*Term***		**Keterangan/ *Remarks***
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	
Pertagas	Amendemen Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan PUSRI - untuk Area Sumatera Bagian Selatan /*Amendment of Natural Gas Transportation Agreement through Pipeline with PUSRI for South Sumetera Area ("SSA")*	South Sumatera Block (SSB) - Lematang	13,66 MMSCFD 1 Ags/*Aug* 2021 – 31 Des/*Dec* 2022 20,03 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2023 21,86 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2024 15,48 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2025 13,66 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2026 15,48 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2027 25,17 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2028 21,86 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2029 19,45 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2030 16,72 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2031 15,52 MMSCFD 1 Jan – 31 Des/*Dec* 2032 12,83 MMSCFD 1 Jan – 27 Nov 2033	1 Agustus/ *August 1,* 2021	27 November 2033	-
Transgasindo	Perjanjian Pengangkutan Gas / *Gas Transportation* Agreement	Grissik - Panaran	67 MMSCFD 1 Jan 2023 – 30 Sep 2023 95 MMSCFD 1 Okt/Oct 2023 – 31 Des/Dec 31, 2023 75 MMSCFD 2024-2025 0 MMSCFD* 2026-2028	26 November/ November 26, 2019	31 Desember/ *December* 31, 2028	*Volume kontrak periode 2026-2028 akan dikonfirmasi PGN paling lambat 1 Desember 2025/*Contract volume for 2026-2028 will be confirmed by PGN at the latest on December 1, 2025*
Transgasindo	Perjanjian Pengangkutan Gas PGN Duri-Dumai / *Gas Transportation* Agreement Duri-Dumai	Grissik - Duri	14.79 MMSCFD 1 Jan 2023-29 Mei/May2023 26.867 MMSCFD 30 Mei/May2023-19 Des/Dec 2023 23.29 MMSCFD 20 Des/Dec– 31 Des/Dec 2025	13 November/ November 13, 2017	31 Desember/ *December 31,* 2025	-

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

e. Perjanjian Sewa, Operasi dan Perawatan dengan Hoegh Lampung

Pada tanggal 25 Januari 2012, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan yang berlaku dari tanggal pengiriman dan berakhir 20 tahun setelah tanggal pengiriman.

Pada tanggal 21 Februari 2014, PLI, Perusahaan dan Hoegh Lampung menandatangani Perjanjian Novasi atas *Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement* dimana hak dan kewajiban Perusahaan terkait dengan perjanjian tersebut di atas beralih ke PLI. Melalui perjanjian novasi tersebut Hoegh Lampung akan menyediakan FSRU Lampung dan melakukan proses regasifikasi selama 20 tahun dengan opsi perpanjangan untuk dua periode masing-masing lima tahun.

f. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa Onshore Receving Facility (“ORF”) Senipah - *Refinery Unit* (“RU”) V Balikpapan ("Perjanjian Senbal") antara Pertagas dan KPI.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Pertagas dan KPI menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa ORF Senipah - RU V Balikpapan ("Perjanjian Senbal") No. 198/PG0000/2020-S0. KPI menugaskan Pertagas untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasioan, dan pemeliharaan pipa penyalur gas bumi ("fasilitas") dari Senipah sampai dengan RU V Balikpapan.

Pada tanggal 4 Maret 2022, dilakukan novasi Perjanjian Senbal dari KPI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB") dengan Pertagas melalui penandatanganan Perjanjian dan Pernyataan Kembali Perjanjian Senbal No. 042/PG0000/2022-S0 yang mengatur fasilitas hanya dipergunakan oleh KPB dan dapat dialihkan kepada KPB atas persetujuan Pertagas dan KPB. Jadwal pelaksanaan penyaluran gas bumi dimulai sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2053.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. Lease, Operation and Maintenance Agreement with Hoegh Lampung

On January 25, 2012, the Company and Hoegh Lampung entered into a lease, operation and maintenance agreement starting from the delivery date until 20 years from the delivery date.

On February 21, 2014, PLI, the Company and Hoegh Lampung entered into a Novation Agreement for the Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement, where the rights and obligations related to the above agreement of the Company were transferred to PLI. Through the novation agreement, Hoegh Lampung will provide FSRU Lampung and perform regasification process for 20 years with two extension period of five years each.

f. Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the Onshore Receving Facility (“ORF”) Senipah - Refinery Unit (“RU”) V Balikpapan Pipeline Section between Pertagas and KPI.

On 27 July 27 2020, Pertagas and KPI signed a Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the ORF Senipah - RU V Balikpapan Pipeline Section ("Senbal Agreement") No. 198/PG0000/2020-S0. KPI assigned Pertagas to carry out the construction, operation, and maintenance of the natural gas distribution pipeline ("facilities") from Senipah to RU V Balikpapan.

On 4 March 2022, the Senbal Agreement was novated from KPI to PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KPB") with Pertagas through the signing of the Agreement and Reaffirmation of the Senbal Agreement No. 042/PG0000/2022-S0, which stipulates that the facilities are to be used dedicated by KPB and may be transferred to KPB with the consent of Pertagas and KPB. The schedule for the commencement of natural gas distribution started from 1 July 2023 until 30 June 2053.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

f. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemanfaatan Fasilitas serta Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi Ruas Pipa ORF Senipah - RU V Balikpapan ("Perjanjian Senbal") antara Pertagas dan KPI (lanjutan)

Pada tanggal 14 Maret 2024, dilakukan novasi Perjanjian Senbal kembali dari KPB ke KPI dengan Pertagas melalui penandatanganan Perjanjian Novasi atas Perjanjian Senbal yang mengalihkan posisi, seluruh hak, dan kewajiban KPB sebagai pihak dalam Perjanjian Senbal dan digantikan oleh KPI.

Pada tanggal 27 Maret 2024, Pertagas dan KPI mendantangani Perjanjian Penguasaan dan Kepemilikan Fasilitas yang menyepakati pengalihan kepemilikan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal masing-masing pihak dan ketentuan Pertamina.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, Pertagas dan KPI sedang mendiskusikan amendemen Perjanjian Senbal terkait biaya pemanfaatan dan jadwal penyaluran gas bumi. Aktual pengaliran gas bumi telah dimulai sejak tanggal 27 Desember 2023.

g. Perjanjian Sewa Fasilitas Kilang LNG Arun antara PAG dengan LMAN

Pada tanggal 14 April 2023, Perusahaan menandatangani Perubahan Kedua *Adendum* dan *Restated* Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang Arun No. PRJ-18/LMAN/2023, terkait dengan perpanjangan masa sewa sampai dengan 28 Desember 2035 dengan LMAN dan perubahan nilai sewa.

Sewa dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan permohonan tertulis yang harus diterima paling lambat 6 (enam) bulan oleh LMAN sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

PAG mengelola aset yang disewa tersebut, termasuk melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pengurusan perizinan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional atas objek sewa tersebut.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Cooperation Agreement for the Construction and Utilization of Facilities and Agreement for the Control and Ownership of Facilities for the Distribution of Natural Gas for the ORF Senipah - RU V Balikpapan Pipeline Section between Pertagas and KPI (continued)

On 14 March 2024, the Senbal Agreement was novated back from KPB to KPI with Pertagas through the signing of a Novation Agreement over the Senbal Agreement, which transferred the position, all rights, and obligations of KPB as a party to the Senbal Agreement to be replaced by KPI.

On 27 March 2024, Pertagas and KPI signed an Agreement on the Control and Ownership of Facilities, which agreed to the transfer of ownership of the facilities in accordance with the internal provisions of each party and the regulations of Pertamina.

As the date of the issuance of these consolidated financial statement, Pertagas and KPI are discussing amendments to the Senbal Agreement related to utilization costs and the schedule for natural gas distribution. The actual first commencement of natural gas commenced on 27 December 2023.

g. Lease Agreement for the Arun LNG Plant Facilities between PAG and LMAN

On April 14, 2023, the Company signed the Second Amendment to the Addendum and Restatement of the Lease Agreement for State Property in the Form of Arun Refinery Assets No. PRJ-18/LMAN/2023, related to the extension of the rental period until December 28, 2035 with LMAN and changes in lease value.

The lease arrangement is extendable based on the agreement of the parties, with requests to extend the lease period to be submitted to the LMAN in writing no later than 6 (six) months before the end of the lease term.

PAG manages the leased assets, including carrying out maintenance, security and management of permits needed in the operational activities of the leased object.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

h. Perjanjian Sewa Menyewa *Tug Boat* antara PAG dan PTK

Pada tanggal 22 November 2021, melalui adendum III perjanjian No. PAG: 028/PAG0000/2021-S0, PAG sebagai penyewa menandatangani perjanjian dengan PTK terkait dengan penyediaan 4 unit *tug boat* yang dimiliki oleh PTK dalam area pengelolaan pelabuhan Blang Lancang. Tarif sewa rata-rata USD5.057 per hari per kapal. Jangka waktu sewa berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2031.

i. Perjanjian KSO dengan PT Citraagung Tirta Jatim (“CTJ”)

Pada tanggal 2 April 2004, Perusahaan dan CTJ mengadakan perjanjian KSO. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan tanah yang terletak di Surabaya untuk dibangun pusat perbelanjaan oleh CTJ dengan nilai sekitar IDR336.245.000.000. CTJ akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun hingga 2 April 2032. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan akan menjadi milik Perusahaan.

CTJ berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan berupa pendirian bangunan dengan nilai IDR20.750.000.000, yang terdiri dari gedung kantor dan rumah dinas Perusahaan, serta pembayaran royalti sebesar IDR200.000.000 termasuk pajak penghasilan setiap tahunnya dari tanggal 20 Maret 2010 sampai 20 Maret 2031.

Perusahaan akan memberikan hak prioritas kepada CTJ untuk memperoleh hak pengelolaan tahap kedua selama 25 tahun apabila tahap pengelolaan pertama telah berakhir, yaitu pada tanggal 2 April 2032.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Lease Agreement of Tug Boat Between PAG and PTK

On November 22, 2021, through adendum III the agreement No. PAG: 028/PAG0000/2021-S0, PAG who acts as a lessee entered into an agreement with PTK related to the rental of 4 tug boats owned by PTK in the area of Blang Lancang ports. The average rental rate is USD5,057 per day per vessel. The rental period is started from January 1, 2017, up to December 31, 2031.

i. JO Agreement with PT Citraagung Tirta Jatim (“CTJ”)

On April 2, 2004, the Company entered into a joint operation agreement with CTJ. In this agreement, the Company will provide its land located at Surabaya for CTJ to build a shopping centre with total value of approximately IDR336,245,000,000. CTJ will have the rights to operate the shopping centre from the completion date of the construction of the building until April 2, 2032, or for 28 years period. At the end of the operational period, the shopping centre will be transferred to the Company.

CTJ is obliged to give compensation to the Company in the form of building compensation with total value of IDR20,750,000,000, consisting of the Company’s office building and the employee’s house and annual royalty payment for IDR200,000,000 including income tax from March 20, 2010 until March 20, 2031.

The Company will give priority to CTJ to obtain the right to operate and manage the second operational period for 25 years at the end of the first operational phase which is April 2, 2032.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

j. Perjanjian KSO dengan PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek")

Pada tanggal 10 Maret 2005, Perusahaan dan Winatek mengadakan perjanjian KSO. Dalam perjanjian ini, Perusahaan akan menyediakan lahan yang terletak di Jakarta Pusat kepada Winatek untuk dibangun pusat perbelanjaan dan perkantoran termasuk fasilitas parkir dan fasilitas pendukungnya, senilai sekitar IDR80.000.000.000 atau sepadan bangunan minimal 20.000 meter persegi. Winatek akan diberi hak pengelolaan atas bangunan pusat perbelanjaan tersebut sejak selesainya pembangunan bangunan dengan kompensasi selama 28 tahun enam bulan. Pada akhir masa pengelolaan, bangunan pusat perbelanjaan dan perkantoran akan menjadi milik Perusahaan.

Winatek berkewajiban untuk memberikan kompensasi awal sebesar IDR18.935.005.000 kepada Perusahaan, berupa bangunan kompensasi seluas 12.250 meter persegi.

Perjanjian ini telah diamendemen sebanyak tiga kali, dan terakhir kali diamendemen pada tanggal 24 April 2018. Amendemen ini mengubah ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

1. 68 unit Ruko/Rukan seluas minimal 17.977 meter persegi dengan nilai minimal IDR22.029.000.000 dan masa pengelolaan selama 25 tahun sejak 3 November 2010 atau sampai dengan 3 November 2035.
2. Bangunan Hotel dan Kantor seluas minimal 18.046 meter persegi dengan nilai minimal IDR124.673.920.277 dan masa pengelolaan selama 25 tahun sejak 23 Juni 2019 atau sampai dengan 23 Juni 2044.
3. Menambah ketentuan mengenai Kompensasi tambahan sebesar IDR125.000.000 tidak termasuk pajak-pajak, yang dibayarkan setiap tahunnya selama 25 tahun.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j. JO Agreement with PT Winatek Sinergi Mitra Bersama ("Winatek")

On March 10, 2005, the Company entered into a JO agreement with Winatek. In this agreement, the Company will provide its land located at Central Jakarta to build a shopping centre and office building including parking area and other facilities with approximately value of IDR80,000,000,000 or equal to the value at a minimum of a 20,000 square meters building. Winatek will have the rights to operate the shopping centre, starting from the agreement date until the next 28 years and six month period. At the end of the operational period, the shopping centre and office building will be transferred to the Company.

Winatek is obliged to give initial compensation amounting to IDR18,935,005,000 to the Company, in the form of building compensation with an area of 12,250 square meters.

This agreement has been amended three times, with the latest amendment made on April 24, 2018. These amendments modified the provisions with the following details:

1. 68 shop/office units with a minimum area of 17,977 meters squared and a minimum value of IDR22,029,000,000 with an operational period of 25 years from November 3, 2010, or until November 3, 2035.
2. Hotel and office buildings with a minimum area of 18,046 meters squared and a minimum value of IDR124,673,920,277 with an operational period of 25 years from June 23, 2019, or until June 23, 2044.
3. An additional provision regarding additional compensation of IDR125,000,000, excluding taxes, to be paid annually for 25 years.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

k. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi antara Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk.

Pada tanggal 31 Januari 2020, Pertagas dan PT Cikarang Listrindo Tbk. menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Penyaluran Gas Bumi No. 008/PG0000/2020-SO untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas milik PT Cikarang Listrindo Tbk. untuk penyaluran gas dari *Metering Station* KP 72 sampai dengan *Metering Station* CL MM2100. Perjanjian ini berlaku sejak 19 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2028 dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan untuk tahun 2020 sebesar USD10.879/bulan dan eskalasi 2% per tahun.

l. Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas antara Perusahaan dengan PT Energi Nusantara Perkasa (“ENP”)

Pada tanggal 29 April 2016, Pertagas dan PT Media Karya Sentosa (saat ini berubah nama menjadi ENP) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemrosesan Gas No. 046/PG0000/2016-S0 untuk melakukan pemrosesan *feed gas*. Perjanjian berlaku sampai dengan 27 Januari 2032.

Pabrik LPG milik ENP yang berada di Gresik, Jawa Timur, dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan produk LPG di Pertamina.

m. Perjanjian Novasi Jual Beli LPG antara PSG dengan Pertamina dan Patra Niaga

Pada tanggal 2 Juli 2013, PSG menandatangani perjanjian penjualan LPG dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Juli 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PSG menandatangani perjanjian novasi jual beli LPG dimana hak dan kewajiban PSG terkait dengan perjanjian tersebut beralih dari Pertamina ke Patra Niaga. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k. Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility between Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk.

On January 31, 2020, Pertagas and PT Cikarang Listrindo Tbk. signed Cooperation Agreement of Utilisation, Operation and Maintenance of Supply Gas Facility No. 008/PG0000/2020-SO for operating and maintenance PT Cikarang Listrindo Tbk.’s facilities for supplying gas from Metering Station KP 72 until Metering Station CL MM2100. This agreement is valid since August 19, 2020 until August 18, 2028 with operation and maintenance cost amounting to USD10,879/month in 2020 and 2% escalation every year.

l. Gas Processing Agreement between the Company and PT Energi Nusantara Perkasa (“ENP”).

On 29 April 2016, Pertagas and PT Media Karya Sentosa (currently changing its name to ENP) signed a Gas Processing Agreement No. 046/PG0000/2016-S0 to perform feed gas processing. The agreement valid until January 27, 2032.

The LPG plant owned by ENP located in Gresik, East Java, is operated to meet the demand for LPG products at Pertamina.

m. LPG Sales and Purchase Novation Agreement between PSG with Pertamina and Patra Niaga

On July 2 2013, PSG entered into a LPG sales agreement with Pertamina. The term of this agreement shall be effective from July 2, 2013 until December 31, 2027.

On August 31, 2021, PSG entered into a LPG sales and purchase novation agreement where the rights and obligations related to the agreement were transferred from Pertamina to Patra Niaga. The term of this agreement shall be effective from August 31, 2021 until December 31, 2027.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

n. Perjanjian Penyaluran *Feed Gas* antara PSG dengan Pertagas

Pada tanggal 29 Juli 2012, PSG menandatangani perjanjian Penyaluran *Feed Gas* dengan Pertagas untuk menerima penyaluran *Feed Gas* yang akan diambil dari lapangan gas bumi milik PT Pertamina EP.

Feed Gas tersebut selanjutnya akan diproses di fasilitas ekstraksi oleh PSG menjadi *Natural Gas Liquid* ("NGL"). Harga beli gas terproses akan dihitung berdasarkan formula tertentu. Kondensat yang diproses oleh PSG dari Prabumulih, akan diberikan kembali ke Pertagas, dimana Pertagas akan menanggung biaya pemrosesan sesuai dengan perjanjian. Pertagas akan menyalurkan *Feed Gas* selama 15 tahun untuk PSG.

Perjanjian ini telah diamendemen sebanyak dua kali, dan terakhir kali diamendemen pada tanggal 28 September 2022. Amendemen ini merubah ketentuan nilai tukar mata uang yang digunakan, alamat penagihan, jaminan penyaluran *feed gas*, serta jatuh tempo pembayaran nota tagihan.

Pada tanggal 2 November 2023, PSG dan Pertagas telah menandatangani berita acara kesepakatan harga gas sementara untuk penyaluran *feed gas* periode 27 Juli 2023 sampai 31 Desember 2023. Pada tanggal 19 Desember 2023, PSG dan Pertagas telah menandatangani berita acara kesepakatan harga gas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2027.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. Feed Gas Supply Agreement between PSG and Pertagas

On July 29, 2012, PSG entered into a Feed Gas Supply agreement with Pertagas to receive Feed Gas, which will be supplied from natural gas fields owned by PT Pertamina EP.

The feed gas will be extracted in PSG's extraction facility into Natural Gas Liquid ("NGL"). The purchase price of the processed gas will be calculated based on a certain formula. Condensates from prabumulih that are processed by PSG will be redelivered to Pertagas and Pertagas will pay the handling fee pursuant to the agreement. Pertagas will deliver the feed gas for 15 years to PSG.

This agreement has been amended two times, and lastly amended on September 28, 2022. Those amendments changed the provision of the exchange rate of the currency used, billing address, guarantee of feed gas supply, and the due date for payment of invoices.

On November 2, 2023, a minute of agreement was signed by PSG and Pertagas regarding the temporary gas price for the feed gas supply from July 27, 2023, to December 31, 2023. On December 19, 2023, PSG and Pertagas has signed minute of agreement for gas price.for the period until December 31, 2027.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

o. Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR.

Pada tanggal 18 November 2022 Pertagas dan PHR menandatangani Perjanjian Pengangkutan Minyak Bumi melalui Pipa Koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai antara Pertagas dengan PHR No. 192/PG00000/2022-S0. Perjanjian berlaku sejak 18 November 2022 sampai dengan 8 Agustus 2041.

p. Komitmen Kontrak Pembelian dan Penjualan LNG *Trading*

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o. Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR.

On November 18, 2022 Pertagas and PHR signed Oil Transportation Agreement Pipeline Balam-Bangko-Dumai and Minas-Duri-Dumai between Pertagas and PHR No. 192/PG00000/2022-S0. The agreement valid from November 18, 2022 to August 8, 2041.

p. LNG Trading Purchase and Sales Contract Commitment

Counterparts	**Perjanjian/ *Agreements***	**Volume per tahun/ *Volume per year***	**Tanggal penanda-tanganan/ *Signing date***	**Jangka waktu/*Term***		
				Awal/ *Start*	**Akhir/ *End***	**Keterangan/ *Remarks***
CNTIC	Perjanjian Jual Beli LNG FOB/ *LNG Sales and Purchase Agreement FOB*	7 kargo /*cargoes*	8 September/ *September 8*, 2023	1 Januari/ *January 1*, 2024	30 November/ *November 30*, 2025	PGN sebagai penjual, *back to back* dengan PJB LNG Petronas/*PGN as seller, back to back with Petronas LNG SPA*
Petronas LNG Ltd.	Perjanjian Jual Beli LNG DES/ *LNG Sales and Purchase Agreement DES*	7 kargo /*cargoes*	8 September/ *September 8*, 2023	1 Januari/ *January 1* 2024	30 November/ *November 30*, 2025	PGN sebagai pembeli, *back to back* dengan PJB LNG CNTIC/*PGN as buyer, back to back with CNTIC LNG SPA*
Gunvor Singapore Pte. Ltd. ("Gunvor")	*Master LNG Sale and Purchase Agreement* ("MSPA") dan *Confirmation Notice* DES	8 kargo /*cargoes*	23 Juni/ *June 23*, 2022	1 Januari/ *January 1*, 2024	31 Desember/ *December 31*, 2027	PGN sebagai Penjual, /*PGN as seller*
PT Kayan LNG Nusantara	Perjanjian Jual Beli LNG FOB/ *LNG Sales and Purchase Agreement FOB*	3,0 BBTUD 2023 5,0 BBTUD 2024-2028	14 November/ *November 14*, 2023	1 Januari/ *January 1*, 2023	23 Februari/ *February 23*, 2028	PGN, PTGN, dan GEI sebagai pembeli/*PGN, PTGN, and GEI as buyers (multibuyer)*
KSO PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati	Perjanjian Jual Beli LNG/ *LNG Sales and Purchase Agreement*	727.050 MMBTU 2.230 MMBTUD 2025-2027 120.420 MMBTU 2.230 MMBTUD 1 Januari 2028 - 23 Februari 2028	25 November/ *November 25*, 2024	1 Januari/ *January 1*, 2025	23 Februari/ *February 23*, 2028	PGN sebagai Penjual, /*PGN as seller*

Perusahaan telah menandatangani komitmen kontrak pembelian LNG dengan Petronas LNG Ltd (jangka waktu 2024-2025) dan PT Kayan LNG Nusantara (jangka waktu 2023-2028) serta komitmen kontrak penjualan LNG dengan CNTIC (jangka waktu 2024-2025), Gunvor (jangka waktu 2024-2027) dan KSO PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati (jangka waktu 2025-2028).

The Company has signed LNG purchase contract commitment with Petronas LNG Ltd (term 2024-2025) and PT Kayan LNG Nusantara (term 2023-2028) as well as LNG sales contract commitments with CNTIC (term 2024-2025). Gunvor (term 2024-2027) and KSO PT Indogawa Teknologi Indonesia dan PT Siantar Tara Sejati (term 2025-2028).

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

p. Komitmen Kontrak Pembelian dan Penjualan LNG Jangka Panjang (lanjutan)

Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomis untuk seluruh komitmen kontrak pembelian dan penjualan tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam PSAK 237 (dahulu PSAK 57) mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi untuk kontrak merugi dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain harga, pembelian dan penjualan per tanggal pelaporan. Suatu estimasi nilai manfaat ekonomis telah dihitung dan dibandingkan dengan estimasi ganti rugi apabila perusahaan tidak menjalankan komitmen sesuai kontrak.

Untuk komitmen kontrak penjualan LNG internasional jangka panjang yang telah terindikasi sebagai kontrak merugi, Perusahaan mengakui nilai yang lebih rendah antara estimasi nilai manfaat ekonomis dibandingkan dengan estimasi ganti rugi sebagai provisi, diukur dan disajikan sebagai provisi atas kontrak LNG yang merugi pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD72.027.462, dan dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD3.486.935.

Pada tanggal 3 November 2023, perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Gunvor. terkait pelaksanaan kontrak. Perusahaan memperkirakan kondisi *Force Majeure* tersebut untuk beberapa bulan pada tahun 2024.

Pada 29 November 2024, PGN telah menerbitkan *Final Annual Delivery Program* (“ADP”) tahun 2025 yang berisi informasi bahwa pelaksanaan *Master Sales and Purchase Agreement* (“MSPA”) dan *Confirmation Notice* (“CN”) masih terhambat dan tertunda akibat kondisi *Force Majeure*.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p. Long Term LNG Purchase and Sales Contract Commitment (continued)

Management has estimated the economic benefits for all of the purchase and sale contract commitments in accordance with the criteria stated in PSAK 237 (formerly PSAK 57) regarding provisions, contingent liabilities and contingent assets for onerous contracts by considering several parameters including price, purchases and sales as of the reporting date. An estimate of the value of economic benefits has been calculated and compared with an estimated compensation if the company does not fulfill the commitments according to the contract

For the sales commitment of long-term LNG international which has been indicated as onerous contract, the Company recognizes a lower value between the estimated economic benefit value compared to the estimated compensation as a provision, measured and presented as a provision for onerous contract of LNG in the consolidated financial position as of December 31, 2024 of USD72,027,462, and in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2024 of USD3,486,935.

On November 3, 2023, the company submitted Force Majeure notice to Gunvor. in relation to implementation of the contract. Company’s estimate of the Force Majeure for several months of year 2024.

On November 29, 2024, PGN issued the Final Annual Delivery Program (“ADP”) for 2025 containing information that the implementation of the Master Sales and Purchase Agreement (“MSPA”) and Confirmation Notice (“CN”) was still hampered and delayed due to Force Majeure conditions.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

q. Perjanjian KSO antara Pertagas dengan RAJA

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Pertagas dan RAJA menandatangani Perjanjian No. 245/PG0000/2020-S0 melalui skema KSO non-administratif untuk bersama-sama membagi kontribusi pendanaan terhadap nilai investasi, risiko, dan manfaat/keuntungan dan pelaksanaan kegiatan Proyek Pipa Rokan sesuai dengan bagian partisipasi. Kepemilikan aset pipa Rokan dicatatkan seluruhnya di dalam pembukuan Pertagas sebagai aset yang dimiliki oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pengangkutan minyak bumi dengan PHR di wilayah kerja Rokan.

Pada tanggal 14 April 2021 dan 30 Agustus 2021, telah dilakukan amendemen pertama dan kedua atas KSO dengan RAJA yang antara lain berisi perubahan bahwa Pertagas dan RAJA masing-masing merupakan pemegang dan pemilik aset atas pipa Rokan, dan berhak untuk mencatatkan pipa Rokan tersebut sebagai aset, sesuai dengan bagian partisipasi para pihak dan RAJA sepakat untuk memberikan hak pengusahaan pipa Rokan milik RAJA kepada Pertagas, sehingga dengan demikian pipa Rokan dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Pertagas.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, Pertagas dan RAJA sedang mendiskusikan amendemen KSO terkait kontribusi manfaat/keuntungan.

r. Konfirmasi Gas Tahunan antara Perusahaan dan PLN

Pada tanggal 01 November 2023, Perusahaan dan PLN menandatangani Konfirmasi Gas Tahunan untuk memenuhi kebutuhan Gas PLN pada periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2024. Pemakaian Minimum per Bulan Kontrak adalah 30 BBTUD dengan Harga Gas Kepmen ESDM USD6.06/MMBTU.

Pada tanggal 29 November 2024, Perusahaan dan PLN menandatangani Konfirmasi Gas Tahunan untuk memenuhi kebutuhan Gas PLN pada periode 01 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025. Pemakaian Minimum per Bulan Kontrak adalah 5 BBTUD untuk periode 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan 0 BBTUD untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025. Harga gas yang berlaku adalah sebesar USD6,06/MMBTU sesuai dengan Kepmen ESDM 135/2021

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. JO Agreement between Pertagas and RAJA

On October 21, 2020, Pertagas and RAJA signed agreement No. 245/PG0000/2020-S0 through a non-administrative JO to jointly share contributions to the financing value, risks, and benefits/gains, and the implementation of the Rokan Pipeline Project activities with the respective parties' participation portion. Ownership of the Rokan pipeline assets is entirely recorded in the Pertagas's books as assets owned by the Company. This agreement is valid until the end of the crude transportation agreement with PHR in the Rokan working area.

On April 14, 2021 and August 30, 2021, the first and the second amendment to the JO with RAJA was made, which among other things, include changes stating that Pertagas and RAJA respectively are holders and owners of the Rokan pipeline assets, and have the right to record the Rokan pipeline as assets, in accordance with the respective parties' participation portion and RAJA agreed to grant the operating rights of the Rokan pipeline owned by RAJA to the Company, thus enabling the Company to fully control and manage the Rokan pipeline

As the date of the issuance of this consolidated financial statement, Pertagas and RAJA are in discussions regarding an amendment of JO concerning the contributions of benefits/gains.

r. Annual Gas Confirmation between the Company and PLN

On November 1, 2023, the Company and PLN signed the Annual Gas Confirmation to meet PLN's Gas needs for the period from November 1, 2023 to October 31, 2024. The Minimum Usage per Contract Month is 30 BBTUD with a Gas Price of USD6.06/MMBTU according to the Kepmen ESDM.

On November 29, 2024, the Company and PLN signed the Annual Gas Confirmation to meet PLN's Gas needs for the period from November 1, 2024 to October 31, 2025. The Minimum Usage per Contract Month is 5 BBTUD for period from November 1, 2024 to December 31, 2024, and 0 BBTUD for period from January 1, 2025 – October 31, 2025. The applied gas price is USD6.06/MMBTU according to the Kepmen ESDM No.135/2021.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

s. Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2023-2028 antara PAG dan PLN

Pada tanggal 28 Desember 2022, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PAG: 019/PAG0000/2022-S0 dan No. PLN: 0049.Pj/EPI.01.02/F01010600/2022 (KB 32) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 12 November 2024, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PAG: 023/PAG0000/2024-S0 dan No. PLN: 2370.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024, PAG menandatangani kesepakatan bersama dengan PLN, No. PLN: 2829.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) tentang Penyediaan Jasa Regasifikasi LNG untuk Kargo Lanjutan di tahun 2025 sampai dengan 31 Desember 2028.

t. Amendemen Perjanjian Regasifikasi antara PGN, PLN dan PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI")

Pada tanggal 11 Oktober 2023, PGN telah melakukan penandatanganan amendemen kesepakatan bersama antara PGN dengan PLN dan PLN EPI tentang pemanfaatan terminal LNG lampung dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG ke pembangkit listrik PLN dengan No. PGN: 029206.Amd/HK.02/SB/2023, No. PLN: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023 dan No.PLNEPI:1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023. Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak tanggal 10 September 2023 hingga 31 Desember 2024.

Pada tanggal 29 Desember 2023, PGN telah melakukan penandatanganan amendemen kelima perjanjian pemanfaatan terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 046500.AMD/KU.00.02/SBD/2023, No. PLN: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023 dan No. PLN EPI: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s. Agreement of LNG Regasification Service for Advance Cargo for the year 2023-2028 between PAG and PLN

On December 28, 2022, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PAG: 019/PAG0000/2022-S0 and No. PLN: 0049.Pj/EPI.01.02/F01010600/2022 (KB 32) concerning Provision of LNG Regasification Services for Advanced Cargo in 2023 to December 31, 2023.

On November 12, 2024, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PAG: 023/PAG0000/2024-S0 dan No. PLN: 2370.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) concerning Provision of LNG Regasification Services for Advanced Cargo in 2024 to December 31, 2024.

On December 31, 2024, PAG signed a joint agreement with PLN, No. PLN: 2829.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 (KB 33) regarding the Provision of LNG Regasification Services for Onward Cargo in 2025 until December 31, 2028.

t. Regasification Agreement Amendment between PGN, PLN and PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI")

On October 11, 2023, PGN signed an amendment agreement between PGN with PLN and PLN EPI regarding the utilization LNG terminal lampung and distribution of gas resulting from LNG regasification to power plant PT PLN (Persero) with No. PGN: 029206.Amd/HK.02/SB/2023, NO PLN: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023 and No, PLN EPI: 1603.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0100/2023. This agreement is effective and binding on the parties on September 10, 2023 until December 31, 2024.

On December 29, 2023, PGN signed an fifth amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PLN and PLN EPI with No. PGN: 046500.AMD/KU.00.02/SBD/2023, No. PLN: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023 and No. PLN EPI: 2273.Amd/EPI.01.02/PLNEPI0300/2023. This amendment is valid from January 1, 2024 to December 31, 2024.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

t. Amendemen kesepakatan bersama regasifikasi antara PGN, PLN dan PT PLN Energi Primer Indonesia (“PLN EPI”) (lanjutan)

Pada tanggal 16 Agustus 2024, PGN telah melakukan amendemen kedua kesepakatan bersama terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PT PGN LNG Indonesia, PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 039500.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0061608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 dan No. PLN EPI: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2024.

Pada tanggal 16 Agustus 2024, PGN telah melakukan amendemen keenam perjanjian pemanfaatan terminal LNG Lampung ke pusat listrik muara tawar antara PGN dengan PT PGN LNG Indonesia, PLN dan PLN EPI dengan No. PGN: 039600.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0051608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 dan No. PLN EPI: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. Amendemen ini mengubah dan menambahkan pihak dalam perjanjian yaitu PT PGN LNG Indonesia, yang mengoperasikan pemanfaatan Terminal LNG Lampung oleh PLN berdasarkan instruksi dari PGN. Amendemen ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2024. Dengan berlaku efektifnya Amendemen ini maka hak dan kewajiban PGN LNG akan timbul terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024, dan hak dan kewajiban sebelum tanggal 16 Agustus 2024 akan tetap menjadi hak dan kewajiban PGN.

u. Perjanjian Jual Beli Gas antara Perusahaan dan PT Freeport Indonesia

Pada tanggal 02 Januari 2024, Perusahaan dan PT Freeport Indonesia menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas untuk penyaluran gas di Titik Penyerahan sejak Tanggal Dimulai, yaitu Kav. J-1, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, *Java Intergrated Industrial and Port Estate* (“JIIPE”). Perjanjian berlaku mengikat sejak tanggal penandatangan dan berlaku efektif sejak Tanggal Dimulai, yaitu 01 Mei 2024 sesuai Berita Acara *Gas In*, sampai dengan 5 Tahun Kontrak. Pemakaian Gas *ramp-up* sampai dengan 7,03 - 9,49 BBTU ΣD/ Bulan Kontrak dengan Harga Gas USD 9,85/MMBTU dan akan direkonsiliasi mengikuti ketetapan BPH Migas terkait toll fee di JIIPE dengan baseline USD9,55 + Alpha/MMBTU.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

t. Regasification Agreement Amendment between PGN, PLN and PT PLN Energi Primer Indonesia (“PLN EPI”) (continued)

On August 16, 2024, PGN signed the second amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PT PGN LNG Indonesia, PLN and PLN EPI with No. PGN: 039500.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0061608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 and No. PLN EPI: 1723.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. This amendment is effective from 16 August 2024

On August 16, 2024, PGN signed the sixth amendment to the agreement on the utilization of the Lampung LNG terminal to the Muara Tawar power plant between PGN and PT PGN LNG Indonesia, PLN and PLN EPI with No. PGN: 039600.AMD/HK.02/SBD/2024, No. PGN LNG: 0051608.AMD/UT-PLI/24, No. PLN: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024 and No. PLN EPI: 1722.Amd/DAN.01.01/PLNEPI0300/2024. This amendment changes and adds a party to the agreement, namely PT PGN LNG Indonesia, which operates the utilization of the Lampung LNG Terminal by PLN based on instructions from PGN. This amendment is effective from 16 August 2024. With the effective date of this Amendment, PGN LNG's rights and obligations will arise from 16 August 2024, and the rights and obligations before 16 August 2024 will remain PGN's rights and obligations.

u. Gas Sales and Purchase Agreement between the Company and PT Freeport Indonesia

On January 2, 2024, the Company and PT Freeport Indonesia signed a Gas Sales and Purchase Agreement for the distribution of gas at the Delivery Point from the Commencement Date, namely Kav. J-1, Gresik Special Economic Zone, Java Integrated Industrial and Port Estate (“JIIPE”). The agreement is binding from the date of signing and is effective from the Commencement Date, May 1, 2024 according to the Gas In Minutes, up to 5 Contract Years. Ramp-up gas usage up to 7.03 - 9.49 BBTU ΣD/Contract Month with a Gas Price of USD9.85/MMBTU and will be reconciled following the provisions of BPH Migas regarding toll fees at JIIPE with a baseline of USD9.55 + Alpha/MMBTU.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

v. Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG PAG

Pada tanggal 10 Agustus 2022, melalui TUA, PAG sebagai pemberi fasilitas menandatangani perjanjian dengan TEGPA terkait dengan penyediaan fasilitas penyimpanan LNG di Terminal LNG Arun. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pada tanggal 8 September 2022, telah dilakukan amendemen yang keempat atas TUA dengan TEGPA yang berisi perpanjangan termin yang semula berakhir pada 31 Agustus 2022 menjadi berakhir pada 31 Desember 2028.

w. Perjanjian Penjualan Gas antara Perusahaan (Pembeli) dengan West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Penjual)

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perusahaan (Pembeli) dengan West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, dan Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Penjual) menandatangani Perjanjian Penjualan Gas dari Lapangan Duyung. Jumlah Total Kontrak 122,77 TBTU dengan Harga Gas USD 5,50/MMBTU. Periode Pasokan adalah sejak Tanggal Dimulai (diperkirakan 1 November 2025) dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2037. Perjanjian akan berlaku efektif setelah Perusahaan mendapatan persetujuan *Final Investment Decision* ("FID") dan terbangunnya pipa interkoneksi *West Natuna Transportation System* ("WNTS") - Pemping. Berdasarkan Kepmen ESDM RI No. 20.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pencabutan Kepmen ESDM Nomor 6105K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau, penugasan kepada PGN untuk melaksanakan Pembangunan Pipa WNTS – Pemping telah dicabut.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

v. PAG LNG Storage Facility Agreement

On August 10, 2022, through the TUA, PAG as the facility provider signed an agreement with TEGPA related to the provision of LNG storage facilities at the Arun LNG Terminal. The term of the agreement is valid from July 1, 2022, to December 31, 2022.

On September 8, 2022, the fourth amendment was made to the TUA with TEGPA which contains an extension of the term, which originally ended on August 31, 2022, to end on December 31, 2028

w. Gas Sales Agreement between the Company (Buyer) and West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, and Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Seller)

On June 21, 2024, the Company (Buyer) with West Natuna Exploration Limited, Empyrean Energy Plc, and Coro Energy Duyung (Singapore) Pte. Ltd. (Seller) signed a Gas Sales Agreement from Duyung Field. The Total Contract Quantity is 122.77 TBTU with a Gas Price of USD 5.50/MMBTU. The Supply Period is from the Commencement Date (estimated November 1, 2025) and ends on January 15, 2037. The agreement will be effective after the Company obtains Final Investment Decision ("FID") approval and the construction West Natuna Transportation System ("WNTS") - Pemping interconnection pipeline is completed. Based on Kepmen ESDM No. 20.K/MG.01/MEM.M/2025 regarding the Revocation of Kepmen ESDM No. 6105K/12/MEM/2016 regarding Assignment to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. in constructing and operating natural gas pipeline from West Natuna Transportation System pipelines to Pemping Island, Kepulauan Riau Province, PGN's assignment to complete the WNTS – Pemping Construction is revoked.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML

Pada tanggal 29 Agustus 2018, KJG mengajukan gugatan terhadap PCML dan PLN di Arbitrase ICC Hongkong sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban *Ship or Pay* ("SOP") diatur dalam PPG oleh PCML dan ganti rugi atas terminasi PPG, sementara gugatan kepada PLN dilakukan sehubungan adanya pemotongan Tagihan Bulanan sejak Maret 2018 sampai September 2018.

Karena ketidakmampuan PCML dalam memenuhi komitmen volume gas yang telah disepakati dalam PPG Kalija I, maka sesuai ketentuan PPG Kalija I timbul kewajiban SOP yang harus diselesaikan oleh pihak yang menyebabkan SOP tersebut. KJG telah melakukan musyawarah dengan PCML terkait kewajiban SOP tahun 2016 sejak awal tahun 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2017, PCML belum menyelesaikan kewajiban SOP tersebut. Selain itu PCML juga menyampaikan klaim kahar sesuai surat PCML tanggal 7 Juni 2017. Atas klaim kahar tersebut KJG menyampaikan penolakan sesuai surat tanggal 13 Juni 2017, dimana KJG menyampaikan bahwa sesuai PPG Kalija I maka syarat untuk keadaan kahar berlaku adalah adanya penetapan oleh konsultan mandiri yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh SKK Migas.

PCML telah menunjuk Lemigas sebagai konsultan independen untuk memeriksa keadaan kahar tersebut. Namun, KJG menganggap penunjukan dan hasil laporan Lemigas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PPG Kalija I.

Dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat keadaan kahar sesuai PPG Kalija I, KJG berpendapat bahwa semua hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku khususnya terkait dengan kewajiban SOP. KJG juga sudah meminta bantuan BPH Migas untuk menjadi mediator atas permasalahan SOP tersebut. BPH Migas mengundang para pihak dalam PPG pada tanggal 20 Maret 2018 dan 8 Mei 2018, namun PCML tidak hadir dalam kedua rapat tersebut. Mengingat KJG sudah melakukan upaya musyawarah dan mediasi dengan PCML tanpa hasil, maka KJG mengajukan gugatan arbitrase tersebut.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML

On August 29, 2018, KJG filed a lawsuit against PCML and PLN in the Hongkong Arbitration ICC in connection with the non performing Ship or Pay ("SOP") obligation as agreed in the Gas Transportation Agreement by PCML and compensation for a GTA termination, while the lawsuit to PLN was conducted in connection to a Monthly Invoice deduction since March 2018 until September 2018.

Due to PCML's inability to fulfil the gas volume commitment which has been agreed in GTA Kalija I, in accordance with GTA Kalija I, SOP liability arose and should be settled by the party who causes the SOP. KJG has conducted discussions with PCML in relation to the 2016 SOP liability since early 2017, nevertheless up until the end of 2017, PCML has not settled its SOP liability. Moreover, PCML has declared Force Majeure through its letter dated June 7, 2017. Regarding the Force Majeure claim, KJG has sent an objection letter dated June 13, 2017 in which KJG notified that in accordance with GTA Kalija I, Force Majeure should be determined by an independent consultant as agreed by each party and then should be examined and approved by SKK Migas.

PCML has appointed Lemigas as the independent consultant to assess the Force Majeure. However, KJG believes that the appointment of Lemigas including Lemigas's report are not in accordance with GTA Kalija I.

As the Force Majeure terms in accordance with GTA Kalija I have not been fulfilled, KJG believes that all rights and obligations of the parties are still valid, particularly related to the SOP obligation. KJG has requested BPH Migas's assistance as mediator for this ship-or-pay matter. BPH Migas has invited the parties in GTA Kalija I on March 20, 2018 and May 8, 2018, but PCML has failed to attend both meetings. Since KJG has already strived to engage PCML in negotiation and mediation without success, KJG then has submitted the arbitration claim.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

PCML telah menghentikan pengaliran gas sejak tanggal 23 September 2019 dan KJG telah melakukan terminasi PPG melalui surat tanggal 13 November 2019, yang berlaku efektif sejak tanggal 13 Desember 2019 karena KJG melihat tidak ada itikad baik dari PCML untuk melanjutkan dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dan disepakati dalam PPG. Terkait terminasi tersebut, KJG telah memasukan gugatan ganti rugi dalam *Statement of Claim* (“SOC”) tertanggal 28 Februari 2020 ke ICC.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, PCML telah menyerahkan *Statement of Defense* atas *Cross-Claim* yang disampaikan PLN. Pada tanggal 5 Februari 2021, KJG telah mengajukan respon atas *Statement of Defense* dari PCML dan PLN. Selanjutnya sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak maka pada bulan Mei 2021, PCML serta PLN akan menjawab respon dari KJG dan menjawab respon atas *cross claim* dari PCML kepada PLN maupun *cross claim* PLN kepada PCML.

Dalam *Reply Memorial* tersebut, KJG menyampaikan bahwa (i) PCML sepatutnya tidak dapat menghindari kewajiban atas SOP KJG sejak tahun 2016 sampai dengan 13 Desember 2019 serta ganti rugi atas berakhirnya PPG senilai komitmen SOP dalam PPG yaitu sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2026 berdasarkan PPG dengan nilai gugatan sebesar USD373 juta (ii) PLN bertanggung jawab atas pengembalian pemotongan pembayaran tarif kepada KJG sebesar USD 2,1 juta (belum termasuk bunga); dan (iii) bunga dan biaya ICC serta biaya Konsultan Hukum KJG maupun biaya-biaya lain yang dikeluarkan KJG.

Sebagai bentuk sinergi BUMN dan untuk mendukung pengaliran kembali gas dari Lapangan Kepodang untuk pembangkit listrik Tambak Lorok, pada tanggal 26 Februari 2021 KJG dan PLN telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang pada intinya menyepakati nilai yang harus dikembalikan oleh PLN atas klaim pemotongan tagihan bulanan KJG dalam Arbitrase ICC.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

PCML has stopped the gas flow since September 23, 2019 and KJG terminated the GTA in a letter dated November 13, 2019, effective as of December 13, 2019, because KJG determined that there was no good faith from PCML to continue and carry out its obligations in accordance with the terms stipulated and agreed in the GTA. In relation to the termination, KJG has submitted a claim for compensation in the Statement of Claim (“SOC”) dated February 28, 2020 to the ICC.

On October 9, 2020, PCML submitted a Statement of Defense on the Cross-Claim submitted by PLN. On February 5, 2021, KJG submitted a response to the Statement of Defense from PCML and PLN. Furthermore, according to the schedule agreed upon by the Parties in May 2021, PCML and PLN will answer the response from KJG and answer the response on the cross claims from PCML to PLN and the cross claims from PLN to PCML.

In the Reply Memorial, KJG stated that (i) PCML cannot avoid the liability for KJG's SOP claims from 2016 to December 13, 2019 and the compensation for the end of the GTA equal to the SOP commitment in the GTA, namely from December 14, 2019 until the end of 2026 based on the GTA with a claims value of USD373 million (ii) PLN is responsible for returning the tariff payment to KJG in the amount of USD2.1 million (not yet including interest); and (iii) all interests and ICC fees and also all KJG's Legal Consultant fees and other costs incurred by KJG.

As a form of a BUMN synergy and to support the return of gas from the Kepodang Field to the Tambak Lorok power plant, on February 26, 2021, KJG and PLN signed a Settlement Agreement which essentially agreed on the value that must be returned by PLN for the claim for deducting the KJG monthly invoice in the ICC Arbitration.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Perdamaian tersebut, pada tanggal 31 Maret 2021 PLN telah melakukan pembayaran atas nilai yang telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian yaitu sebesar USD1.054.495.

Karena adanya kendala kesehatan dari Ketua Arbiter yang diketahui oleh Para Pihak dalam proses Pra Hearing tanggal 13 April 2022, maka Konsultan hukum KJG merekomendasikan untuk melakukan penggantian Ketua Arbiter. Penggantian tersebut juga diusulkan oleh semua Pihak dalam arbitrase dan dengan adanya penggantian tersebut, maka proses *hearing* yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 telah dijadwalkan ulang oleh ICC menjadi bulan Oktober 2023 (berdasarkan Surat dari Sekretariat *International Court of Arbitration* tanggal 26 September 2022).

Perubahan Jadwal Hearing menjadi Oktober 2023 antara lain dikarenakan mempersiapkan Arbiter Ketua yang baru sebelum sidang hearing, untuk:
- Informasi kasus dan pelaksanaan Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase ICC;
- Seluruh proses persidangan yang sudah berjalan sejak awal;
- Korespondensi para pihak dan korespondensi Arbitrase;
- Profil para Co-Arbiter

Pada tanggal 26 Juni 2023, telah dilakukan koordinasi lanjutan dengan Konsultan hukum internal *King and Spalding (“*KS”) dalam rangka penyampaian hasil kajian KHI terhadap SOC KJG untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari KS.

Pada tanggal 6 - 7 September 2023 KJG telah melakukan rapat persiapan *hearing* bersama konsultan hukum dan *technical expert*.

Pada tanggal 30 Oktober - 3 November 2023 telah dilaksanakan hearing di ICC Singapore, dengan agenda: *Opening Statement* dari masing-masing pihak, keterangan dari *technical expert* dan *Closing Submissions*.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

As a follow-up to the Settlement Agreement, on March 31, 2021, PLN has paid the amount agreed in the Settlement Agreement in the amount of USD1,054,495.

Due to the health problem of the Tribunal President which was discovered by the Parties during the Pre Hearing on April 13, 2022, KJG's legal consultant recommended replacing the Tribunal President. The replacement was also proposed by all Parties in the arbitration and with the replacement, the hearing process which was planned to be held in May 2022 has been rescheduled by the ICC to October 2023 (based on the Letter from the Secretariat of the International Court of Arbitration dated September 26, 2022).

Hearing Schedule postpone to October 2023 due to preparing the new Chief Arbitrator before the hearing:
- *Give information on cases and implementation of Arbitration under the Rules ICC Arbitration;*
- *The entire trial process that has been running since the beginning;*
- *Correspondence of the parties and Arbitration correspondence;*
- *Profiles of Co-Arbitrators.*

On June 26, 2023, further coordination was carried out with the King and Spalding (“KS”) in order to submit the KHI study results to the KJG SOC to obtain clarification and confirmation from the KS.

On September 6-7, 2023 KJG held a preparation meeting for hearing with legal consultant and technical expert.

The abritrase hearing was held on October 30 - November 3, 2023, with the agenda: Opening Statement from each Party, information from technical expert and Closing Submissions.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Deklarasi keadaan kahar dalam Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok oleh PCML (lanjutan)

Pada tanggal 15 Desember 2023, KJG telah mengirimkan data *Submission Cost* kepada Tribunal, yang didalamnya memuat biaya konsultan hukum, biaya *expert* dan *tribunal cost* yang sudah terbayar maupun yang masih terutang.

Hasil putusan arbitrase KJG pada 14 Juni 2024 yang disampaikan oleh Sekretariat ICC International Court of Arbitration melalui *email* pada tanggal 18 Juni 2024, bahwa:

1. PCML harus membayar kepada KJG USD17.300.000 atas *Pre-Termination Claim* dan bunga USD5.200.000.
2. KJG harus membayar *legal costs & expenses* serta ICC *advance cost* PCML dengan total USD5.266.250
3. KJG harus membayar *legal costs & expenses* PLN IDR3.600.000.000 dan biaya ICC *advance cost* USD286.250.

KJG telah menerima pembayaran dari PCML terkait putusan arbitrase pada tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD18.430.000. Nilai yang diterima sesuai dengan saldo piutang sebesar USD22.500.000 dengan tambahan bunga hingga tanggal 29 Oktober 2024 sebesar USD1.200.00,- dan dikurangi dengan beban legal sebesar USD5.270.000.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Force majeure declaration on Gas Transportation Agreement Kepodang - Tambak Lorok by PCML (continued)

On December 15, 2023, KJG submitted a Submission Cost to the Tribunal, which included paid and outstanding legal counsel fees, expert fees and tribunal cost.

KJG arbitration award dated June 14, 2024 was communicated by the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration via email on June 18, 2024, that:

1. PCML shall pay to KJG USD17,300,000 on the Pre-Termination Claim and USD5,200,000 interest.
2. KJG shall pay PCML's legal costs & expenses and ICC advance costs totalling USD5,266,250.
3. KJG shall pay PLN's legal costs & expenses of IDR3,600,000,000 and ICC advance costs of USD286,250.

KJG has received payment from PCML related to the arbitration award on October 29, 2024 amounting to USD18,430,000. The value received corresponds to the outstanding balance of USD22,500,000 with additional interest up to October 29, 2024 amounting to USD1,200,000 and reduced by legal expenses amounting to USD5,270,000.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengajuan tuntutan kepada PT Hoegh LNG Lampung

Pada Agustus 2021, PT PGN LNG Indonesia (sebagai Penggugat), anak perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan seluruhnya oleh PGN, telah mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") terhadap PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Tergugat) terkait dengan perjanjian sewa, operasi, dan pemeliharaan FSRU Lampung ("LOM *Agreement*") dengan tuntutan berupa pembatalan LOM *Agreement*, dan/atau pengakhiran LOM *Agreement*, dan/atau pemberian ganti rugi kepada PT PGN LNG Indonesia. Atas pengajuan gugatan tersebut, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat Rekonpensi) telah menyampaikan tanggapan dan gugatan baliknya kepada PT PGN LNG Indonesia (sebagai Tergugat Rekonpensi).

Pada September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (sebagai Penggugat) juga mengajukan pemberitahuan arbitrase kepada SIAC terhadap Perusahaan (sebagai Tergugat) terkait dengan jaminan yang diberikan oleh Perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban PT PGN LNG Indonesia atas LOM *Agreement* sebagaimana tertuang dalam *Transferor Guarantee*, dengan tuntutan antara lain berupa ganti rugi.

Pada tanggal 13 Juni 2022, PT PGN LNG Indonesia dan PT Hoegh LNG Lampung masing-masing telah menyampaikan gugatan (*Statement of Claim*) kepada SIAC. Isi dari gugatan tersebut yaitu penjelaskan dasar gugatan yang berisi penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Atas gugatan-gugatan tersebut, PGN dan PLI telah menyampaikan dokumen berupa jawaban pembelaan *(Statement of Defence)* pada September 2022 dan replik *(Reply)* pada September 2023.

Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pencabutan perkara-perkara tersebut di atas. Pada tanggal 5 Februari 2024, PGN, PLI dan PT Hoegh LNG Lampung bersama-sama telah menandatangani *Settlement Agreement*/Perjanjian Perdamaian yang pada intinya memuat kesepakatan para pihak untuk mencabut perkara-perkara tersebut dan melanjutkan dengan iktikad baik negosiasi dan diskusi berbagai hal komersial yang berkaitan dengan LOM *Agreement*. Para Pihak juga telah memberitahu Tribunal dan SIAC perihal diatas pada tanggal yang sama.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Claim submission to PT Hoegh LNG Lampung

In August 2021, PT PGN LNG Indonesia (as Claimant), a wholly owned and wholly controlled subsidiary of PGN, has submitted an arbitration notice to the Singapore International Arbitration Center ("SIAC") against PT Hoegh LNG Lampung (as Respondent) related to the lease, operation and maintenance agreement of FSRU Lampung ("LOM Agreement") with a claim of cancellation of the LOM Agreement, and/or termination of the LOM Agreement, and/or providing damages to PT PGN LNG Indonesia. Upon the claim submission, PT Hoegh LNG Lampung (as Claimant of Counterclaim) has submitted its response and counterclaim to PT PGN LNG Indonesia (as Respondent of Counterclaim).

In September 2021, PT Hoegh LNG Lampung (as Claimant) also submitted a notification of arbitration to SIAC against the Company (as Respondent) regarding the guarantee provided by the Company for the fulfillment of PT PGN LNG Indonesia's obligations under the LOM Agreement as stated in the Transferor Guarantee, with claim of damages.

On June 13, 2022, PT PGN LNG Indonesia and PT Hoegh LNG Lampung each submitted a Statement of Claim to SIAC. The content of the lawsuit is an explanation of the basis of the lawsuit which contains an explanation regarding the violations committed by each party.

Due to those claims, PGN and PLI have submitted the Statement of Defence in September 2022 and Reply in September 2023.

The Parties have agreed to withdraw the cases. On February 5, 2024, PGN, PLI and PT Hoegh LNG Lampung jointly signed a Settlement Agreement which essentially contains an agreement between the parties to withdraw the cases and continue in good faith the negotiation and discussion on various commercial matters relating to the LOM Agreement. The Parties have also informed the Tribunal and SIAC on matter above on the same date.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pengajuan tuntutan kepada PT Hoegh LNG Lampung (lanjutan)

Pada tanggal 12 Februari 2024, Tribunal dan SIAC telah menyatakan menerima notifikasi permohonan pencabutan perkara-perkara yang diajukan oleh PGN, PLI dan Hoegh. Pada tanggal 1 April 2024 SIAC telah menerbitkan *Termination Order.* Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 Perkara Arbitrase FSRU Lampung telah dinyatakan berakhir.

c. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 135 tahun 2021 dan 91 Tahun 2023

Menteri ESDM mengeluarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 juncto Kepmen ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri dan No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*) yang berlaku efektif masing-masing pada tanggal 30 19 Mei 2023, 9 Oktober 2024 dan 2 Agustus 2021. Kedua peraturan ini mengatur tentang harga gas bumi tertentu bagi industri dan pembangkit tenaga Listrik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan harga gas bumi tertentu dituangkan dalam side letter implementasi harga gas bumi tertentu dan/atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati antara industri dan pembangkit tenaga listrik penerima harga gas bumi tertentu dengan PGN.

SKK Migas sesuai kewenangannya akan mengkoordinasikan penyesuaian harga gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontraktor PSC. Untuk melaksanakan fungsinya, SKK Migas menerbitkan Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Bagi Hasil Kontraktor PSC dari Penurunan Harga Gas Bumi Melalui Mekanisme Perhitungan *Provisional Entitlement* dan *Final Entitlement*. Berdasarkan kajian manajemen, penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak mempengaruhi bagian pendapatan Kontraktor PSC (segmen usaha hulu minyak dan gas bumi) secara signifikan di masa mendatang dikarenakan adanya kompensasi dari Pemerintah melalui mekanisme entitlement.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Claim submission to PT Hoegh LNG Lampung (continued)

On February 12, 2024, the Tribunal and SIAC have stated receiving the notification of the request for withdrawal of the cases submitted by PGN, PLI and Hoegh. On April 1, 2024, SIAC has issued Termination Order. Thus, as of April 1 2024, the Lampung FSRU Arbitration Case has been declared terminated.

c. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Kepmen ESDM No. 135 year 2021 and 91 year 2023

The Minister of EMR has issued Kepmen ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 *juncto Kepmen ESDM No.255.K/MG.01/MEM.M/2024 regarding Specific Customers and Price of Natural Gas in the Industrial Sectors and No.135.K/HK.02/MEM.M/2021 regarding Price of Natural Gas at the Electricity Power Plant Gate effective on July 30, 2021 and August 2, 2021, respectively. These two regulations regulate the price of certain natural gas for industry and electricity generation based on Presidential Decree 121 of 2020.*

In its implementation specific gas sales price will be stated in side letter and/or other written documents agreed upon between the industry and the electric power generation business entity with PGN.

SKK Migas, in accordance with its authority, will coordinate the adjustment of natural gas prices from upstream oil and gas business activities with PSC Contractors. To carry out its function, SKK Migas issued Kep-0053/SKKMA0000/2020/S9 regarding Technical Guidelines for Adjustment of Production Sharing for PSC Contractors from Decrease in Natural Gas Prices through the Provisional Entitlement and Final Entitlement Calculation Mechanism. Based on management's assessment, adjustments to the natural gas prices will not significantly affect the PSC Contractor's share of revenue (oil and gas upstream business segment) in the future due to the compensation provided by the Government through the entitlement mechanism.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Penerapan harga tertentu pembelian dan penjualan gas bumi kepada pelanggan tertentu di industri dan pembangkit listrik berdasarkan Kepmen ESDM No. 135 tahun 2021 dan 91 Tahun 2023 (lanjutan)

BPH Migas memiliki kewenangan dalam menentukan tarif transmisi gas. Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan, Grup menantikan tindak lanjut dari BPH Migas untuk mengimplementasikan Kepmen ini.

Penentuan harga beli dan jual dan alokasi ini ditentukan secara tahunan oleh Kementerian ESDM. Dalam operasi Grup, akibat dari pengaturan ini, terdapat *Unutilised Gas Volume*, yaitu gas yang dibeli oleh Grup dari pemasok gas dengan menggunakan harga khusus yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM untuk pelanggan tertentu tetapi disalurkan kepada pelanggan-pelanggan yang tidak mendapatkan alokasi dan harga khusus. Dalam hal ini, manajemen Grup berpendapat selisih harga pembelian gas khusus dan harga pembelian umum atas *Unutilised Gas Volume* akan dibayarkan kembali kepada Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, provisi untuk penyesuaian harga pembelian gas bumi tertentu yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sejumlah USD117.273.420 dan USD82.284.759 (Catatan 18). Manajemen Grup berpendapat jumlah provisi yang telah dibukukan mencukupi untuk penyelesaian kewajiban Grup kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan selisih harga pembelian gas bumi ini.

d. Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

Pada 3 April 2023, SEI menerima surat gugatan dengan pokok perkara bahwa SEI telah menguasai barang pipa eks PT Freeport Indonesia yang diklaim sebagai barang milik Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) yang merupakan hasil hibah dari PT Freeport Indonesia. Manajemen berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar mengingat SEI hanya menguasai barang yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, dan aset Minyak dan Gas Bumi yang dikuasai oleh SEI adalah Barang Milik Negara dan dikuasai oleh SEI secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan PSC yang telah ditandatangani bersama dengan SKK Migas.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Implementation of special purchase and sales price of natural gas to certain customers in the industry and power plants based on Kepmen ESDM No. 135 year 2021 and 91 year 2023 (continued)

BPH Migas has the authority to determine the tariff for gas transmission. As of the issuance date of these financial statements, the Group is awaiting for BPH Migas' action in order to implement this Kepmen.

The determination of the purchase and sale prices and the allocation is set annually by the Ministry of EMR. In the Group's operations, as a result of this arrangement, there is Unutilised Gas Volume, which is gas that has been purchased by the Group from gas suppliers using special prices determined by the Ministry of EMR for certain customers but distributed to customers who do not receive special allocations and prices. In this case, the Group's management believes that the difference between the special gas purchase price and the general purchase price for Unutilised Gas Volume should be repaid to the Government. As of December 31, 2024 and 2023, the provision for adjustments to the purchase price of certain natural gas recorded in the consolidated statements of financial position amounted to USD117,273,420 and USD82,284,759, respectively (Note 18). The Group's management believes that the provision that has been recorded is adequate to settle the Group's obligations to the Government of Indonesia in relation to the difference in the purchase price of this natural gas.

d. Claim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO)

On April 3 2023, SEI received a lawsuit letter with the main case being that SEI had taken control of ex-PT Freeport Indonesia pipe goods which were claimed to be goods belonging to the Kamoro Tribe Traditional Council of Deliberative Institutions (LEMASKO) which was the result of a grant from PT Freeport Indonesia. Management is of the opinion that the lawsuit is baseless considering that SEI only controls goods related to activities related to Oil and Natural Gas, and Oil and Natural Gas assets controlled by SEI are State Property and are legally controlled by SEI based on applicable legal provisions and the PSC which has been signed together with SKK Migas.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Klaim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) (lanjutan)

SEI telah menunjuk Kantor Hukum RAJ & *Associates* dan Kantor Hukum RIFA sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah menjalani beberapa proses persidangan termasuk menghadirkan beberapa saksi penting baik dari PT Freeport Indonesia maupun dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mineral Republik Indonesia. Manajemen tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar.

SEI telah dinyatakan memenangkan perkara sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor Putusan Perkara No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg tertanggal 3 April 2024 yang pada menolak gugatan LEMASKO.

Pada Tanggal 17 April 2024, LEMASKO kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, dan atas kasus banding tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No 374/PDT/2024/PT Surabaya tertanggal 24 Juni 2024 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan menolak gugatan LEMASKO.

Atas Keputusan Banding tersebut, kemudian LEMASKO mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024, yang disampaikan ke SEI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain dari Relaas Pemberitahuan Permohonan tersebut, disampaikan juga Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi Nomor Nomor. 374/PDT/2024/PT Sby Jo Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg per tanggal 19 Juli 2024. Atas hal tersebut maka SEI menindaklanjuti dengan mengirimkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024. SEI telah menunjuk Kantor Hukum Yustisia sebagai kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Sampai pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, belum ada Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

SEI tetap berpendapat bahwa gugatan yang diterima tidak berdasar sebagaimana telah dibuktikan dengan ditolaknya gugatan pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, maka dari itu,manajemen tidak mencatat penyisihan atas nilai tuntutan di dalam laporan keuangan konsolidasian.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Claim Dewan Pimpinan Adat Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) (continued)

SEI has appointed RAJ & Associates Law Firm and RIFA law firm as the attorney to handle the lawsuit. As of the completion date of these consolidated financial statements, SEI has undergone several trial processes including presenting several important witnesses both from PT Freeport Indonesia and from the Directorate General of Oil and Gas, Ministry of EMR of the Republic of Indonesia. Management continues to believe the lawsuit is baseless.

SEI received favorable result on the case based on the Lamongan District court decision rulling No.10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated April 3, 2024, stated that the Court had rejected LEMASKO's claim.

On April 17, 2024, LEMASKO then filed an appeal against the decision of the Lamongan District Court, and the appeal case was decided by the Surabaya High Court with decision No. 374/PDT/2024/PT Surabaya dated on June 24, 2024, which essentially upheld the decision of the Lamongan District Court by rejecting LEMASKO's claim.

Based on the Appeal Decision, LEMASKO then filed a a cassation petition to the Supreme Court in accordance with the Cassation Application Notification Release No. 374/PDT/2024/PT Sby Jo No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024, which was submitted to SEI through the South Jakarta District Court, in addition to the Application Notification Release, a Cassation Memorandum Submission Notification Release No.374/PDT/2024/PT Sby Jo No. 10/Pdt.G/2023/PN.Lmg dated July 19, 2024 was also submitted. Regarding this,SEI followed up by sending a Counter Cassation Memorandum on July 29, 2024. SEI has appointed Yustisia Law Firm as the attorney to handle the lawsuit. As of the completion date of the financial statements, no decision issued by the Supreme Court.

SEI continues to believe the lawsuit is baseless, as evidenced by the rejection of the claim at both the district court and the high court levels, therefore no provision for the claim amount is recorded in the consolidated financial statements.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII ("PTPN VII")

Pada tanggal 16 Desember 2024, Mahkamah Agung telah memutus dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan LEMASKO. PGN saat ini masih menunggu salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.

Pada tanggal 30 November 2023, PTPN VII mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat (PGN sebagai Tergugat 13) dan Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha di Eks Areal Kawasan Hutan HPH PT BG Dasaad ("Tanah''). PTPN VII menyatakan klaim hak atas tanah berasal dari PTP XI -XII (Persero) (Proses holdingingasi BUMN) yang sebelumnya mendapat pengalihan asset berupa tanah konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT G. Dasaad Joint Venture Inc berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/UM/1/72 tanggal 24 Januari 1972.

Adapun tanah milik PGN yang menjadi obyek gugatan, PGN telah memiliki SHGB atas tanah obyek tanah tersebut.

Pada tanggal 6 Februari 2024, PTPN VII telah mencabut gugatan atas perkara sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 2024, PGN telah menerima pemberitahuan pencabutan gugatan dari PTPN VII dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu dicabut;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Pada tanggal 29 Februari 2024, PTPN VII kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pertanahan milik PTPN VII dengan mengubah kedudukan PGN yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat menjadi Turut Tergugat I.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII ("PTPN VI"I)

On December 16, 2024, the Supreme Court has decided with a verdict rejecting the cassation application submitted by LEMASKO. PGN is currently still waiting for an official copy of the decision from the Supreme Court.

On November 30, 2023, PTPN VII has submitted a lawsuit for tort against the defendants (PGN as Defendant 13) and co-defendant related to the ownership of land measuring 4.650 hectares in the former area of PT BG Dasaad's forest consession area (''Land''). PTPN VII claims the right to the land originated from PTP XI-XII (Persero) (a process of BUMN consolidation) that previously received the transfer of assets in the form of the land concession Right of Cultivation (HPH) from PT G. Dasaad Joint Venture Inc based on the Minister of Agriculture Decree Number 31/Kpts/UM/1/72 dated January 24, 1972.

Regarding the land owned by PGN that is the subject of the lawsuit, PGN already holds a Right of Building Use Certificate (SHGB) for the said land.

On February 6, 2024, PTPN VII withdrew its lawsuit regarding the matter in question. Subsequently, on February 12, 2024, PGN received a notification of the lawsuit withdrawal from PTPN VII with the decree stating:

1. *Granting the plaintiff's petition;*
2. *Declaring case Number 33/Pdt.G/2023/PN.Bbu withdrawn;*
3. *Ordering the plaintiff to pay the case costs.*

On February 29, 2024, PTPN VII once again filed a lawsuit alleging wrongful acts concerning land owned by PTPN VII by changing the position of PGN, which was previously a Defendant, to Co-Defendant I.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan Terkait Sengketa Tanah dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Juli 2024, PN Blambangan Umpu memutuskan gugatan yang diajukan PTPN VII *Niet Onvantkelijkverklaard* (“NO”). Pada 30 Agustus 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan memeriksa berkas dari PT Tanjungkarang untuk tingkat Banding, posisi PGN dalam perkara tersebut semula Turut Tergugat I menjadi Terbanding XVI. Dalam memori banding yang diajukan PTPN VII tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan lahan milik PGN. Pada 24 September 2024, PT Tanjung Karang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu. Pada 10 Oktober 2024 PGN telah menerima relaas pemberitahuan permohonan kasasi dan posisi PGN semula Terbanding XVI menjadi Termohon Kasasi XVI. Sampai dengan tanggal laporan, perkara masih dalam proses pemeriksaan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Berdasarkan gugatan PTPN VII tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil dan imateriil yang ditujukan kepada PGN. Adapun konsekuensi hukum PGN sebagai Turut Tergugat I adalah PGN diminta untuk tunduk dan patuh atas putusan yang nantinya dijatuhkan Majelis Hakim.

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (“PKPU”) Terhadap PGASSOL

Terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) terhadap PGASSOL yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda dan Febri Utama (“kreditor”) dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta nomor 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2022, dengan hasil dikabulkannya permohonan PKPU. Adapun nilai permohonan yang dikabulkan dalam putusan adalah sebesar Rp38.874.128.785, dari Para Pemohon dan Kreditur Lain.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Lawsuit on Land Disputes From PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) (continued)

On July 31, 2024, the Blambangan Umpu District Court decided on the lawsuit filed by PTPN VII Niet Onvantkelijkverklaard (“NO”). On August 30, 2024, PGN received a notice of examination of the files from PT Tanjungkarang for the Appeal level, with PGN's position in the case initially as Co-Defendant I becoming Appellant XVI. In the appeal memorandum submitted by PTPN VII, it was not related to the ownership of land belonging to PGN. On September 24, 2024, PT Tanjung Karang upheld the decision of the Blambangan Umpu District Court. On October 10, 2024, PGN received a notice of the cassation application, and PGN's position changed from Appellant XVI to Respondent XVI. As of the date of this report, the case is still in the process of cassation examination at the Supreme Court.

Based on PTPN VII's lawsuit, there are no material and immaterial claims directed at PGN. The legal consequence for PGN as Co-Defendant I is that PGN is required to comply with and adhere to the judgment that will be rendered by the Panel of Judges.

f. Application For Postponement Of Debt Payment Obligations (“PKPU”) Against PGASSOL

There was an application for Postponement of Debt Payment Obligations (“PKPU”) against PGASSOL submitted by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda and Febri Utama (“creditors”) there for there has been a decision on the PKPU application based on the Jakarta Commercial Court Decision number 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst dated August 24, 2022, with the result that the PKPU application was granted so that currently PGASSOL is in a Temporary PKPU condition. The value of the application granted in the decision is Rp38,874,128,785.00, from the Petitioners and Other Creditors.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL (lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2022 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian antara PGASSOL dan kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berakhir.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, terdapat permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PGASSOL yang diajukan oleh PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, dan Syafnir.

Adapun proses kasasi terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PGASSOL yang telah berjalan adalah:

1. Penyampaian Memori Kasasi kepada Panitera Mahkamah Agung RI oleh PT UPN, cv ravianda, febri utama dan syafnir melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 19 Oktober 2022;

2. Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh PGASSOL: 27 Oktober 2022;

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Application For Postponement Of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL (continued)

On October 12, 2022, a Reconciliation Truce Agreement has been made and signed between PGASSOL and creditors at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and stated Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) has ended.

On October 19, 2022, there was a request for cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia against PGASSOL's Completion Endorsement (Homologasi) Decision submitted by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama, and Syafnir.

The process of cassation against PGASSOL's Peace Endorsement Decision (Homologation) which has been running is:

1. Submission of the Memorandum of Cassation to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia by PT UPN, cv ravianda, febri utama and syafnir through the Registrar of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court: October 19, 2022;

2. Submission of Contra Memorandum of Cassation to Registrar of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court by PGASSOL: October 27, 2022;

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

f. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ("PKPU") Terhadap PGASSOL (lanjutan)

Adapun proses kasasi terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PGASSOL yang telah berjalan adalah (lanjutan):

3. Pengiriman berkas perkara Kasasi Kepailitan Akta Nomor: 99 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Panitera Mahkamah Agung RI;

4. Permohonan Penyelesaian Kasasi Pailit No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 3 Januari 2023;

5. Pengiriman Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pailit No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Mahkamah Agung RI: 19 Januari 2023;

6. Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit: 31 Januari 2023.

Pada tanggal 16 Maret 2023, Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan Kasasi yang diajukan PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama dan Syafnir dengan amar putusan Tolak Kasasi.

Sampai dengan 31 Desember 2024, kreditor sudah mengajukan dokumen penagihan. Perusahaan sudah memproses identifikasi dan verifikasi dokumen penagihan tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 melalui surat No.041100-041400.S/HK.05/Dirut/2023 menyatakan bahwa dokumen penagihan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi). Sehingga, status kasus ini telah berakhir dengan tercapainya Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Putusan Homologasi) pada tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuktikan dengan Salinan Putusan Homologasi tanggal 12 Oktober 2022 dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

f. Application For Postponement Of Debt Payment Obligations ("PKPU") Against PGASSOL (continued)

The process of cassation against PGASSOL's Peace Endorsement Decision (Homologation) which has been running is (lanjutan):

3. Delivery of Bankruptcy Cassation case file Deed Number: 99 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Number: 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. from the Central Jakarta District Court to the Registrar of the Supreme Court of the Republic of Indonesia;

4. Request for Completeness of Bankruptcy Cassation Case No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst from the Supreme Court of the Republic of Indonesia to the Chairman of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court: January 3, 2023;

5. Delivery of complete Bankruptcy Cassation Case No. 183/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst from the Chairman of the Central Jakarta District Court to the Supreme Court of the Republic of Indonesia: January 19, 2023;

6. Notification of Bankruptcy Cassation Case Register Number: January 31, 2023.

On March 16, 2023, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided on the cassation request filed by PT Unggul Puspa Negara, CV Ravianda, Febri Utama and Syafnir with a decision of Rejecting Cassation.

As of December 31, 2024, the petitioners have submitted billing documents. The Company has completed identification and verification process of the documents on July 31, 2023, through letter No.041100-041400.S/HK.05/Dirut/2023 stating that the billing documents do not comply with requirements as stated in Peace Agreement Decision (Homologation). Thus, this case's status has ended with the reaching of decision to ratify the Peace Agreement Decision (Homologation), on October 12, 2022 as evidenced by a copy of the Homologation Decision dated October 12, 2022 and data from the Case Tracking Information System ("SIPP") of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

g. Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang yang Diajukan oleh Pertagas kepada PT Mutiara Energi ("ME")

Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang, ME menyatakan secara tegas dan sekaligus mengakui adanya utang kepada Perusahan. Terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak bahwa ME akan menyerahkan sebagian kepemilikan aset milik ME kepada Pertagas sebagai offsetting utang. Para pihak sepakat akan dilakukan serah terima aset kepada Pertagas setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") yang independen. Namun hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ME belum menyepakati nilai aset yang tercantum dalam laporan KJPP. Pertagas telah mengajukan gugatan perdata wanprestasi kepada ME di Pengadilan Negeri ("PN") Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 13 April 2020.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, ME menyampaikan surat permohonan perdamaian yang menyatakan bahwa ME bersedia memberikan hak kepemilikan pipa Pondok Tengah - Tegal Gede sebesar 60% kepada Pertagas sebagai penyelesaian utang ME. Namun, Pertagas belum menerima penawaran ini dan melanjutkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan. Pada tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan wanprestasi dari Pertagas kepada ME.

Pada tanggal 5 Desember 2022, manajemen telah mengajukan banding dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ("PTJ") dengan perkara No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, manajemen telah menerima putusan dari PTJ, dimana putusan tersebut menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan. Pertagas tidak melanjutkan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hingga terbitnya laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih merencanakan upaya terbaik untuk dapat menagihkan seluruh piutang dari ME.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Breach of Contract According to Debt-Receivable Settlement Agreement Submitted by Pertagas Against PT Mutiara Energi ("ME")

Based on Debt-Receivable Settlement Agreement, ME explicitly stated and also recognized its debt to Pertagas. There has been a mutual agreement between the two parties that ME would handover its assets entitlement partially to Pertagas in order to offset their debt. Both parties agreed that the assets would be transferred to Pertagas once the assets are appraised by the independent public appraiser ("KJPP"). However, as of the issuance date of these consolidated financial statements, ME has not agreed to the assets' valuation stated in the KJPP's report. Pertagas has filed a civil lawsuit against ME on the breach of contract in South Jakarta District Court, with the Case Register No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dated April 13, 2020.

On October 28, 2021, ME submitted a letter of reconciliation which stated that ME was willing to give 60% of ownership rights to the Pondok Tengah - Tegal Gede pipeline to Pertagas as a settlement of ME's debt. However, Pertagas did not accept the offer and continue the civil lawsuit in South Jakarta District Court. On November 22, 2022, South Jakarta District Court rejected provisional demands of Pertagas to ME.

On December 5, 2022, the management filed an appeal and has been accepted by the Jakarta High Court with case No. 303/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

On August 29, 2023, the management received a decision from the Jakarta High Court, affirming the verdict of the South Jakarta District Court. Pertagas has opted not to pursue further legal actions in the form of cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

As the date of the issuance of these consolidated financial statements, the management is still planning the best course of action to collect all receivables from ME.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas

Pertagas menjadi salah satu tergugat atas dua gugatan hukum yang diajukan oleh GPS ("Penggugat"). Gugatan pertama ditujukan ke beberapa tergugat dengan dalil terkait pembangunan pipa gas milik CL, yang dianggap melanggar Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menghentikan sementara pembangunan tersebut. Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR0,15 triliun.

Selanjutnya, GPS melakukan gugatan kedua kepada beberapa tergugat dengan dalil para tergugat telah melakukan tindakan persekongkolan atau konspirasi atas penerbitan izin pembangunan pipa gas milik CL sebagai cadangan. Dalam gugatan ini, Penggugat meminta ganti kerugian secara tanggung renteng sejumlah IDR1,88 triliun.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan memerintahkan tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat senilai IDR1 miliar untuk gugatan pertama dan IDR333,8 miliar untuk gugatan kedua. Pada tanggal 14 September 2021, Pertagas telah mengajukan banding kepada PTJ atas kedua gugatan tersebut.

Pada tanggal 14 Juni 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan pertama. Pada tanggal 25 Juli 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas

Pertagas is one of the defendants in two legal lawsuits filed by GPS ("the Plaintiff"). The first lawsuit was directed at several defendants, alleging that the construction of the gas pipeline owned by CL violates the Interim Decision of the Jakarta Administrative Court, which ordered a temporary halt to the construction. The Plaintiff is seeking joint and several damages amounting to IDR0.15 trillion.

Furthermore, GPS filed a second lawsuit against several defendants, alleging that the defendants engaged in collusion or conspiracy regarding the issuance of a construction permit for CL's gas pipeline as a backup. In this lawsuit, the Plaintiff is seeking joint and several damages amounting to IDR1.88 trillion.

On August 31, 2021, the Central Jakarta District Court partially granted the petitioner's claims and ordered the respondent to jointly and severally pay damages to the Plaintiff amounting to IDR1 billion for the first lawsuit and IDR333.8 billion for the second lawsuit. On September 14, 2021, Pertagas filed an appeal to the Jakarta High Court against both lawsuits.

On June 14, 2022, the Jakarta High Court affirmed the decision of Central Jakarta District Court regarding the first claim. On July 25, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the first claim.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Gugatan yang Diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") terkait Pembangunan Pipa Cadangan Milik PT Cikarang Listrindo Tbk. yang Dibangun oleh Pertagas (lanjutan)

Pada tanggal 24 Februari 2022, PTJ menguatkan putusan PN Jakarta Pusat atas gugatan kedua dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR77,3 miliar. Pada tanggal 17 Mei 2022, Pertagas telah mengajukan permohonan kasasi atas gugatan kedua kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memerintahkan para tergugat secara tanggung renteng membayar sejumlah IDR175,7 miliar. Nilai ini telah dibayarkan oleh CL kepada GPS pada 22 April 2024.

Pada 12 Februari 2024, dengan mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2023, Pertagas telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan GPS atas adanya dugaan penggunaan lahan *Right-of Way* (ROW) Pipa Gas ruas Citarik-Tegal Gede milik Pertagas tanpa hak.

Atas upaya hukum pidana tersebut, GPS, CL, Pertagas sepakat berdamai dan tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya dengan menandatangani Perjanjian Penyelesaian No. 01 tanggal 9 September 2024 dan Perjanjian Pembongkaran Pipa Gas Bumi Pada Ruas Citarik-Tegal Gede dan pada Ruas Tegal Gede-Cikarang antara GPS dengan Pertagas No. 02 tanggal 9 September 2024, dengan diawasi Kejaksaan Agung.

Dengan kesimpulan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas, CL telah melakukan pembayaran ke GPS pada tanggal 22 April 2024, dan GPS bersedia melakukan pembongkaran pipa beserta fasilitas penunjangnya yang ada di lahan Pertagas, dengan biaya pembongkaran yang ditanggung seluruhnya oleh GPS.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat dokumen atau kesepakatan antara para tergugat yang menyatakan berapa porsi Perusahaan dalam tanggung renteng diatas, oleh karena itu, Pertagas belum mencatat penyisihan atas nilai tuntutan ini dalam laporan keuangan konsolidasian.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. The Lawsuit Filed by PT Gasindo Pratama Sejati ("GPS") regarding the Construction of the Backup Pipeline owned by PT Cikarang Listrindo Tbk. which was Constructed by Pertagas (continued).

On February 14, 2022, the Jakarta High Court upheld the decision of Central Jakarta District Court for the second claim and partially granted the Plaintiff's claims, ordering the defendants jointly and severally to pay the amount of IDR77.3 billion. On May 17, 2022, Pertagas filed a cassation petition with the Supreme Court of the Republic of Indonesia for the second claim.

On December 20, 2023, the Supreme Court granted part of the Plaintiff's lawsuit and ordered the defendants to pay IDR175.7 billion jointly and severally. This amount has already been paid by CL to GPS on April 22, 2024.

On February 12, 2024, considering the Supreme Court's Decision on December 20, 2023, Pertagas has taken criminal legal action by reporting GPS for the alleged unauthorized use of the Right-of-Way (ROW) land for the Citarik-Tegal Gede gas pipeline owned by Pertagas.

As a result of this legal action, GPS, CL, and Pertagas have agreed to settle and will not pursue any further legal actions by signing Settlement Agreement No. 01 dated September 9, 2024, and the Agreement for the Dismantling of the Natural Gas Pipeline on the Citarik-Tegal Gede and Tegal Gede-Cikarang sections between GPS and Pertagas No. 02 dated September 9, 2024, under the supervision of the Attorney General's Office.

In conclusion, based on the Supreme Court's ruling mentioned above, CL made a payment to GPS on April 22, 2024, and GPS agreed to dismantle the pipes and supporting facilities located on Pertagas' RoW, with the dismantling costs fully borne by GPS.

As the date of the issuance of these consolidated finansial statements, there are no documents or agreements among the defendants stating the Company's portion in jointly and severally liability mentioned above. Therefore, Pertagas has not recorded a provision for this claim in the consolidated financial statements.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Perjanjian Tripartit terkait Penjualan, Pengisian Ulang dan Pembelian LNG (“Perjanjian Tripartit”) antara PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (“PTTETS”), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. (“QE”)

Pada tanggal 12 November 2020, PAG, PPTETS, dan QE (“para pihak”) menandatangani Perjanjian Tripartit yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penggantian LNG milik QE, yang terkontaminasi partikel asing (“Debris”) dengan kuantitas sebanyak 3.345.759 MMbtu.

PAG diwajibkan untuk membayar ke PPTETS apabila harga aktual yang akan dibayarkan oleh PPTETS untuk penggantian LNG milik QE saat periode penggantian lebih tinggi dari nilai LNG Debris yang telah dijual oleh PPTETS, atau PAG akan menerima pengembalian dari PPTETS apabila harga aktual lebih rendah.

Pada tanggal 18 Januari 2021, PPTETS telah menjual LNG Debris.

Penggantian LNG tersebut akan dilakukan oleh PPTETS (selaku pihak yang berkontrak penyimpanan LNG milik QE dengan PAG) yang dimulai dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023 atau periode lain yang disepakati para pihak.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. Tripartite Agreement in Relation to the Sale, Reloading and Purchase of LNG (“Tripartite Agreement”) between PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (“PTTETS”), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. (“QE”)

On November 12, 2020, PAG, PPTETS, and QE ("parties") signed a Tripartite Agreement aimed at establishing a mechanism for the replacement of QE's LNG, which was contaminated with foreign particles ("Debris"), in the quantity of 3,345,759 MMbtu.

PAG is required to pay to PPTETS if the actual price to be paid by PPTETS for the replacement of QE's LNG during the replacement period is higher than the value of the LNG Debris sold by PPTETS. Conversely, PAG will receive a refund from PPTETS if the actual price is lower.

On January 18, 2021, PPTETS has sold the LNG Debris.

The replacement of the LNG will be carried out by PPTETS (as the party contracted for the storage of QE's LNG with PAG), starting from April 1, 2023, until August 1, 2023, or another period agreed upon by the parties.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

i. Perjanjian Tripartit terkait Penjualan, Pengisian Ulang dan Pembelian LNG ("Perjanjian Tripartit") antara PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE") (lanjutan)

Pada tanggal 7 November 2023, para pihak telah melakukan amendemen Perjanjian Tripartit, yang mengubah periode penggantian LNG menjadi 1 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, atau periode lain yang disepakati para pihak.

Atas penjualan, pengisian ulang dan pembelian LNG antara PAG, PTTETS dan QE, Perusahaan mengakui estimasi klaim pada laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.739.177.

j. Insiden Ledakan Pipa Gas di Rumah Makan Famili Medan

Pada tanggal 15 Januari 2024, terjadi ledakan di Rumah Makan Famili, Kota Medan, yang berasal dari pipa milik PGN. Berdasarkan hasil olah TKP dan dugaan awal pihak kepolisian, hal ini disebabkan karena adanya upaya pencurian dengan cara memotong pipa PGN yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa dan adanya api yang berasal dari dari rokok yang dinyalakan oleh pelaku. Akibat dari meledaknya pipa tersebut mengakibatkan beberapa bangunan disekitar rumah makan tersebut mengalami kerusakan.

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. Tripartite Agreement in Relation to the Sale, Reloading and Purchase of LNG ("Tripartite Agreement") between PAG, PPT Energy Trading Singapore Pte. Ltd. ("PTTETS"), dan Kyushu Electric Power Co., Inc. ("QE") (continued)

On November 7, 2023, the parties amended the Tripartite Agreement, changing the LNG replacement period to June 1, 2026, until June 30, 2026, or any other period mutually agreed by the parties.

In relation to the sale, reloading and purchase of LNG between PAG, PPTETS and QE, the Company recognizes estimated claims in the consolidated statement of profit or loss for the year ended December 31, 2024 of USD6,739,177.

j. Gas Pipe Explosion Incident at Rumah Makan Famili Medan

On January 15, 2024, an explosion occurred at Rumah Makan Famili in Medan, originating from a pipe owned by PGN. Based on the results of the crime scene investigation and initial suspicions from the police, this incident was caused by an attempted theft involving the cutting of the PGN pipe, which led to a gas leak and a fire ignited by a cigarette lit by the perpetrator. The explosion resulted in damage to several buildings surrounding the restaurant.

36. IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

j. Insiden Ledakan Pipa Gas di Rumah Makan Famili Medan (lanjutan)

Kepolisian Resor Kota Besar Medan ("Polrestabes Medan") kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim pada tanggal 23 Januari 2024 ("Surat Perintah Penyelidikan"), dengan merujuk kepada dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 359 jo. Pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat dan/atau Pasal 187 jo. Pasal 188 mengenai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran atau ledakan.

Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan termaksud, telah dilakukan pemberian keterangan oleh PGN dengan panggilan terakhir pada tanggal 19 Februari 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2024 Polrestabes Kota Medan menerbitkan surat Ketetapan Nomor: S.TAP.Lidik/417-b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan. Adapun dasar penerbitan surat tersebut adalah belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap perkara.

k. Permohonan arbitrase oleh Gunvor ke London Court of International Arbitration ("LCIA") atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN

Sesuai dengan Klausul 2.1 MSPA, komitmen untuk menjual dan membeli LNG berdasarkan MSPA disepakati dengan menandatangani CN oleh para pihak. Pada 3 November 2023, PGN telah menyampaikan pemberitahuan *Force Majeure* kepada Pembeli terkait pelaksanaan CN (Catatan 35p).

Dalam pelaksanaan MSPA dan CN untuk tahun 2024, pada 13 September 2024 Gunvor mengajukan permohonan arbitrase ("PA") ke LCIA terhadap PGN sebagaimana diatur dalam MSPA dan CN, dengan Gunvor sebagai Pemohon Arbitrase dan PGN sebagai Termohon Arbitrase. Pada 31 Oktober 2024 Perusahaan telah menyampaikan Tanggapan atas PA melalui konsultan hukum Mayer Brown.

Pada 30 Desember 2024, PGN memberitahu Gunvor bahwa kondisi Force majeure masih berlangsung. Sampai 31 Desember 2024, belum terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perusahaan (Catatan 44b).

36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

j. Gas Pipe Explosion Incident at Rumah Makan Famili Medan (continued)

The Medan Metropolitan Police Department ("Polrestabes Medan") subsequently issued Investigation Order Number Sp.Lidik/417/I/RES.1.24/2024/Reskrim on January 23, 2024 ("Investigation Order"), referring to the alleged criminal acts based on Article 359 in conjunction with Article 360 of the Penal Code regarding negligence resulting in death or serious injury and/or Article 187 in conjunction with Article 188 regarding acts deliberately causing fire or explosion.

Based on the Investigation Order, PGN provided testimony with the last summons on February 19, 2024.

On June 10, 2024, the Medan Police Headquarters issued a letter of Determination Number: S.TAP.Lidik/417-b/VI/RES.1.24/2024/Reskrim regarding the Termination of Investigation. The basis for issuing this letter is that no criminal event has been found in the case.

k. Arbitration request from Gunvor to London Court of International Arbitration("LCIA") due to Notification of Force Majeure in the Implementation of the MSPA and CN

In accordance with Clause 2.1 of the MSPA, the commitment to sell and purchase LNG under the MSPA is agreed upon by signing the CN by the parties. On November 3rd 2023, PGN submitted Force Majeure notice to Buyer in relation to implementation of the CN (Note 35p).

In the implementation of the MSPA and CN for year 2024, on September 13, 2024 Gunvor filed an Reques for Arbitation ("RFA") to the LCIA against PGN as regulated on the MSPA and CN, with Gunvor as the Arbitration Claimant and PGN as the Arbitration Respondent. On October 31, 2024, the Company submitted a Response to the RFA through legal consultant Mayer Brown.

On December 30, 2024, PGN informed Gunvor that the Force majeure condition was still ongoing. As of December 31, 2024, there is no impact of these material events. Information or facts on operational activities, legal, financial conditions, or business continuity of the Company (Note 44b).

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi, utang usaha dan lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa dan utang obligasi. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Grup. Grup juga memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas dan piutang usaha, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terbaik.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

Direksi menyediakan kebijakan tertulis untuk manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis untuk area khusus, seperti risiko nilai tukar mata uang, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup mengidentifikasi, mengevaluasi dan melakukan aktivitas lindung nilai secara ekonomis atas risiko keuangan. Masing-masing unit bisnis melaksanakan manajemen risiko berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Komite Manajemen Risiko memonitor pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Grup

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The principal financial liabilities of the Group consist of trade and other payables, accrued liabilities, short-term bank loans, lease liabilities, long-term loans and bonds payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the operations of the Group. The Group also has various financial assets such as cash and cash equivalents and trade receivables, which arised directly from their operations.

The Group's business involves taking risks in a targeted manner and managing them professionally. The core functions of the Group's risk management are to identify all key risks for the Group, measure these risks and manage the risk positions. The Group regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practice.

The Group defines financial risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors which might have negative potential impact to the achievement of the Group's objectives.

The Directors provide written policies for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group identifies, evaluates and economically hedges its financial risks. Each business unit carries out the risk management based on the written policies approved by the Directors. Risk Management Committee monitors the risk management carried out by the Group.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Grup gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Grup. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan atas penjualan barang dan jasa.

Grup menerapkan berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Kebijakan umum Grup untuk meminimalisasi risiko kredit yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

- Meminta jaminan dalam bentuk kas atau *standby L/C* senilai dua bulan pemakaian gas;
- Memilih pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik; dan
- Menerima pelanggan baru dan penjualan disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan delegasi kekuasaan Grup.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya yang mencakup kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, aset keuangan pada nilai wajar melalui komprehensif lain, dan investasi jangka pendek, risiko kredit yang dihadapi Grup timbul karena wanprestasi dari *counterparties*. Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimal eksposur adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 5.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks, which includes credit risk, market risk and liquidity risk.

a. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, when the Group's customers fail to fulfil their contractual obligations to the Group. Credit risk arises mainly from trade receivables from the sale of goods and services to customers.

The Group implements a range of policies and practices to mitigate the credit risk. The Group's general policies to minimise the potential credit risk which may arise are as follows:

- *Taking of deposits in form of cash or standby L/C that equivalent to two months' gas usage;*
- *Selecting customers with a strong financial condition and good reputation; and*
- *Accepting new customers and sales that are approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.*

With respect to credit risk arising from the other financial assets, which comprise cash and cash equivalent, restricted cash, investment at fair value through other comprehensive income, and short-term investment, the Group's exposure to credit risk arises from default of the counterparties. The Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and only put the investments in banks with a high credit ratings. The maximum exposure equal to the carrying amount as disclosed in Notes 4 and 5.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap piutang usaha, piutang sewa pembiayaan dan piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit risk (continued)

Maximum credit risk exposure relating to trade receivables, finance lease receivable and other receivables in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Piutang usaha	385.833.565	494.008.796	*Trade receivables*
Piutang sewa pembiayaan	83.452.726	-	*finance lease receivable*
Piutang lain-lain	27.781.710	37.697.266	*Other receivables*
Piutang lain-lain jangka panjang	46.139.826	63.853.371	*Other long-term receivables*
Total	**543.207.827**	**595.559.433**	***Total***

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Grup pada nilai tercatat piutang usaha (memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan operasi utama.

The following table breaks down the Group's credit exposure at carrying amounts of trade receivables (taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the main operations.

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
Belum jatuh tempo	362.841.630	367.514.515	*Current*
Jatuh tempo:			*Overdue:*
0 bulan - 3 bulan	26.594.523	48.629.444	*0 month - 3 months*
3 bulan - 6 bulan	6.585.108	6.546.432	*3 months - 6 months*
6 bulan - 1 tahun	8.352.366	8.348.122	*6 months - 1 year*
> 1 tahun	171.719.968	214.669.723	*> 1 year*
Subtotal	576.093.595	645.708.236	*Subtotal*
Dikurangi:			*Deducted by:*
Cadangan penurunan nilai	(190.260.030)	(151.699.440)	*Allowance for impairment*
Piutang usaha - neto	**385.833.565**	**494.008.796**	***Trade receivables - net***

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar

Grup memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Grup memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para kreditur.

(i) Risiko tingkat bunga

Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan pinjaman Grup dengan tingkat bunga variabel.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk

The Group is exposed to market risk, in particular interest rate risk and foreign currency risk.

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Group's short-term and long-term debt is charged with floating interest rates. Group strictly monitors the market interest rate fluctuation and if the interest rate significantly increases, they will renegotiate the interest rate to the lenders.

(i) Interest rate risk

Borrowings issued at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The table below summarises the Group's borrowings with floating interest.

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	50.872.997	57.891.204	525.285.470	*Bank loans*
Total	**50.872.997**	**57.891.204**	**525.285.470**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2023			
	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *Over 1 month up to 3 months*	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *Over 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *Over 1 year***	
Pinjaman bank	-	42.279.930	519.958.791	*Bank loans*
Total	**-**	**42.279.930**	**519.958.791**	***Total***

Analisis sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga pinjaman bank dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar USD3.170.248.

Sensitivity analysis for interest rate risk

On December 31, 2024, had the interest rate of the bank loans with floating interest rate been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit before tax for the year ended would have been USD3,170,248 lower/higher.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko atas perubahan nilai tukar dolar AS sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, khususnya Rupiah dan Yen Jepang. Risiko ini muncul disebabkan aset dan kewajiban dan transaksi operasional Grup sebagian dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yen Jepang sehingga pelemahan dolar AS terhadap Rupiah dan Yen Jepang dapat secara negatif mempengaruhi kinerja dan posisi keuangan Grup.

Saldo moneter dalam denominasi non Dolar AS terdapat pada kas dan setara kas, piutang usaha – neto, investasi jangka pendek, taksiran pengembalian pajak, piutang lain-lain - neto, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, utang pajak, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka pendek.

Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada Catatan 39.

Analisis sensitivitas untuk risiko mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Grup didenominasikan dalam Rupiah Indonesia, Yen Jepang, dan Dolar Singapura.

Pada tanggal 31 Desember 2024, penurunan (kenaikan) nilai tukar dolar AS terhadap mata uang asing sebesar 100 *basis point* dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut akan naik (turun) masing-masing sebesar USD3.187.075 dan (USD3.123.965), terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha - neto, taksiran pengembalian pajak, piutang lain-lain - neto, liabilitas imbalan kerja jangka panjang, utang pajak, utang usaha, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang lain-lain, dan pinjaman bank jangka pendek.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that arises from the changes of the exchange rate of US dollar as the reporting currency against foreign currencies, in particular Rupiah and Japanese Yen. This risk Some of the Group's assets, liabilities and operational transactions are conducted in Rupiah or Japanese Yen, therefore, weakening of US dollar against Rupiah and Japanese Yen will negatively impact the result and financial position of the Group.

Monetary balances denominated in currencies other than US Dollar were included in cash and cash equivalents, trade receivables - net, short-term investment, estimated claim for tax refund, other receivable - net, long-term employee's benefits liabilities, taxes payable, short-term employee's benefits liabilities, accrued liabilities, lease liabilities, other payables, and non-current bank loan.

The Group had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of December 31, 2024 and 2023 were presented in Note 39.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of December 31, 2024, monetary assets and liabilities held by the Group are denominated in Indonesian Rupiah, Japanese Yen, and Singapore Dollar.

As of December 31, 2024, decrease (increase) in the exchange rates of the US dollar against foreign currencies by 100 basis point with all other constant variables, profit before tax for the year ended would increase (decrease) by USD3,187,075 and (USD3,123,965) respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables - net, estimated claim for tax refund, other receivable - net, long-term employee's benefits liabilities, taxes payable, short-term employee's benefits liabilities, accrued liabilities, lease liabilities, other payables, and non-current bank loan.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Grup terpapar risiko volatilitas harga terutama terkait dengan harga minyak brent yang menjadi basis penentuan harga jual LNG di pasar internasional. Grup memonitor pergerakan (tren) dan analisis pasar atas harga minyak brent secara ketat dan terus menerus untuk meminimalisasi efek signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangannya.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk

The Group is effected by the risk of price volatility especially related to brent oil price which become basis to formulate the LNG sale price in the international market. The Group monitors the market trend and analysis of coal price strictly and continously to minimize significant and negative impact to its financial performance.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. The Group evaluates and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of funds to settle the due obligations. In general, funds needed to settle the short-term and long-term liabilities are obtained from settlement of trade receivables from the customers with one month credit term.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities:

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ *On demand and within 1 year*	**Dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun/ *Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	237.397.488	-	-	237.397.488	*Trade payables*
Utang lain-lain	74.238.012	-	-	74.238.012	*Other payables*
Pinjaman bank jangka pendek	100.000.000	-	-	100.000.000	*Short-term bank loan*
Liabilitas yang masih harus dibayar	287.242.558	-	-	287.242.558	*Accrued liabilities*
Pinjaman bank jangka panjang	72.449.958	577.551.865	126.138.848	776.140.671	*Long-term bank loan*
Liabilitas sewa	41.359.840	327.789.491	26.085.084	395.234.415	*Lease liabilities*
Jumlah	**812.687.856**	**905.341.356**	**152.223.932**	**1.870.253.144**	**Total**

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (lanjutan)

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ *On demand within 1 year*	**Dalam waktu 1 tahun sampai sampai dengan 5 tahun/*Within 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	**Total/ *Total***	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	245.210.144	-	-	245.210.144	Trade payables
Utang lain-lain	95.112.672	-	-	95.112.672	Other payables
Pinjaman bank jangka pendek	2.590.841	-	-	2.590.841	Short-term bank loan
Utang obligasi	552.633.015	-	-	552.633.015	Bonds payable
Liabilitas yang masih harus dibayar	246.124.613	-	-	246.124.613	Accrued liabilities
Pinjaman bank jangka panjang	39.689.089	519.958.791	-	559.647.880	Long-term bank loan
Liabilitas sewa	34.826.814	193.731.454	202.123.795	430.682.063	Lease liabilities
Jumlah	**1.216.187.188**	**713.690.245**	**202.123.795**	**2.132.001.228**	**Total**

d. Manajemen modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio *leverage* maksimum. Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas. Untuk tujuan tersebut, Grup mendefinisikan utang sebagai utang berbunga yaitu utang bank, utang obligasi dan liabilitas sewa.

d. Capital management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximising shareholder value.

Some of the Group's debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. The Group has complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements, primarily for debt to equity ratio. For this purpose, the Group defines debt as interest-bearing debt, consists of bank loans, bonds payable and lease liabilities.

37. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen modal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun-akun Grup yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

d. Capital management (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the Group's debt to equity ratio accounts are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Pinjaman bank jangka panjang	776.140.671	559.647.880	*Long-term bank loans*
Utang obligasi	-	552.633.015	*Bond payables*
Pinjaman bank jangka pendek	100.000.000	2.590.841	*Short-term bank loans*
Liabilitas sewa	395.234.415	430.682.063	*Lease liabilities*
Total utang	**1.271.375.086**	**1.545.553.799**	***Total debt***
Total ekuitas	**3.671.527.284**	**3.540.403.379**	***Total equity***
Rasio utang terhadap ekuitas	0,35	0,44	***Debt to equity ratio***

38. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat instrumen keuangan Grup dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following tables set forth the carrying values of the Group's financial instruments in its consolidated statement of financial position as of December 31, 2024 and 2023:

	Jumlah/*Total*	Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/ *Financial assets/liabilities measured at amortised cost*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
31 Desember/*December 31,* 2024				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.383.182.362	1.383.182.362	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	169.153.745	169.153.745	-	-
Investasi jangka pendek/*Short term investment*	618.927	618.927	-	-
Piutang usaha/*Trade receivables*	385.833.565	385.833.565	-	-
Piutang sewa pembiayaan/ *Financial lease receivable*	83.452.726	83.452.726	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	27.781.710	27.781.710	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	46.139.826	46.139.826	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.096.162.861**	**2.096.162.861**	**-**	**-**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	237.397.488	237.397.488	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	74.238.012	74.238.012	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	287.242.558	287.242.558	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	395.234.415	395.234.415	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	100.000.000	100.000.000	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	776.140.671	776.140.671	-	-
Utang obligasi/*Bonds payable*	-	-	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**1.870.253.144**	**1.870.253.144**	**-**	**-**

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

	Jumlah/*Total*	Aset/liabilitas keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan diamortisasi/ *Financial assets/liabilities measured at amortised cost*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui laba-rugi/ *Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Aset keuangan diakui pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain/*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
31 Desember/*December 31, 2023*				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Aset keuangan/*Financial assets*				
Kas dan setara kas/*Cash and cash equivalents*	1.244.731.682	1.244.731.682	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya/ *Restricted cash*	143.173.016	143.173.016	-	-
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	23.178.224	-	-	23.178.224
Piutang usaha/*Trade receivables*	494.008.796	494.008.796	-	-
Piutang lain-lain/*Other receivables*	37.697.266	37.697.266	-	-
Piutang lain-lain jangka panjang/ *Other long-term receivables*	63.853.371	63.853.371	-	-
Total aset keuangan/*Total financial assets*	**2.006.642.355**	**1.983.464.131**	**-**	**23.178.224**
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*				
Utang usaha/*Trade payables*	245.210.144	245.210.144	-	-
Utang lain-lain/*Other payables*	95.112.672	95.112.672	-	-
Liabilitas yang masih harus dibayar/ *Accrued liabilities*	246.124.613	246.124.613	-	-
Liabilitas sewa/*Lease liabilities*	430.682.063	430.682.063	-	-
Pinjaman bank jangka pendek/ *Short-term bank loans*	2.590.841	2.590.841	-	-
Pinjaman bank jangka panjang/ *Long-term bank loans*	559.647.880	559.647.880	-	-
Utang obligasi/*Bonds payable*	552.633.015	552.633.015	-	-
Total liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**2.132.001.228**	**2.132.001.228**	**-**	**-**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

1. Kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

   Nilai tercatat seluruh aset keuangan di atas telah mendekati nilai wajar aset keuangan tersebut.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

1. Cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, and other receivables.

   The carrying values of the above financial assets approximate the fair value of the financial assets.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

2. Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Aset keuangan di atas diukur pada harga kuotasian yang dipublikasikan dalam pasar aktif.

3. Piutang sewa pembiayaan

   Nilai wajar aset keuangan ini ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga implisit dalam sewa.

4. Piutang usaha dan piutang lain-lain jangka panjang

   Aset keuangan di atas merupakan piutang tanpa bunga yang pada pencatatan awal diakui pada nilai wajar berdasarkan bunga pasar pada tanggal pengakuan awal. Selanjutnya, penyesuaian nilai wajar diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

5. Utang usaha, utang lain-lain liabilitas yang masih harus dibayar dan utang bank jangka pendek.

   Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar.

6. Utang obligasi dan utang bank jangka panjang

   Liabilitas keuangan di atas merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga tetap setara atau melebihi suku bunga pasar, atau suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga jumlah pokok terutangnya mendekati nilai wajar.

   Liabilitas keuangan di atas disajikan dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi ditentukan dengan memperhitungkan diskonto, premi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode SBE.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

2. Financial assets at fair value through other comprehensive income

   The above financial assets are measured at published quoted market price in active market.

3. Finance lease receivables

   The fair value of this financial asset is determined by discounted cash flow using implicit interest rate on lease.

4. Non-current account receivables other receivables

   The above financial assets represent non-interest bearing receivables that are initially recognised at fair value based on the market rate on their initial recognition date. Subsequently, fair value adjustments are amortised using the effective interest method.

5. Trade payables, other payables, accrued liabilities and short-term bank loan.

   All of the above financial liabilities are due within 12 months, therefore the carrying value of the financial liabilities approximate their fair value.

6. Bonds payable and long-term bank loan

   The above financial liabilities represents debt with fixed rate at or above market rate, or floating interest rates which are adjusted with the movement of market interest rates, therefore the principal outstanding approximate their fair values.

   The above financial liabilities is carried at amortized costs using the EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount, premium and transaction costs that are integral part of the EIR method.

38. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hierarki nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Grup menganalisis aset keuangan yang dimiliki yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hierarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair value hierarchy is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Group analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and*
- *Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).*

The Company's fair value hierarchy as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	Jumlah/*Total*	Harga pasar yang dikuotasikan untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/*Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)*	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ *Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)*	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ *Significant unobservable inputs (Level 3)*
31 Desember/*December 31*, 2024				
Aset keuangan lancar/*Current financial assets*				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	-	-	-	-
Jumlah/*Total*	-	-	-	-
31 Desember/*December 31*, 2023				
Aset keuangan lancar/*Current financial assets*				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	23.178.224	23.178.224	-	-
Jumlah/*Total*	**23.178.224**	**23.178.224**	-	-

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The Group's monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Aset dalam Rupiah			*Assets in Rupiah*
Kas dan setara kas	IDR 10.978.562.180.555	IDR 11.565.816.695.929	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	IDR 1.059.689.627.553	IDR 1.111.059.656.839	*Trade receivables-net*
Taksiran tagihan pajak	IDR 1.050.293.362.633	IDR 549.073.501.804	*Estimated claim for tax refund*
Piutang lain-lain - neto	IDR 135.191.806.162	IDR 208.436.762.332	*Other receivables-net*
Investasi jangka pendek	IDR 10.000.000.000	IDR -	*Short term investment*
Sub total	IDR 13.233.736.976.903	IDR 13.434.386.616.904	*Sub-total*
Aset dalam Yen Jepang			*Assets in Japanese Yen*
Kas dan setara kas	JPY 92.652	JPY 123.916	*Cash and cash equivalents*
Sub total	JPY 92.652	JPY 123.916	*Sub-total*
Aset dalam Dolar Singapura			*Assets in Singapore Dollar*
Kas dan setara kas	SGD 94.993	SGD 434.553	*Cash and cash equivalents*
Sub total	SGD 94.993	SGD 434.553	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD 819.141.858**	**USD 870.489.638**	***US dollar equivalents***
Liabilitas dalam Rupiah			*Liabilities in Rupiah*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	IDR 1.687.739.167.429	IDR 2.101.566.015.019	*Long-term employee's benefits liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	IDR 1.102.774.772.388	IDR 1.171.271.799.952	*Short-term employee's benefits liabilities*
Liabilitas yang masih harus dibayar	IDR 750.797.952.672	IDR 667.160.268.170	*Accrued Liabilities*
Utang pajak	IDR 696.461.460.805	IDR 1.403.751.302.378	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	IDR 494.071.699.338	IDR 477.449.575.875	*Lease liabilities*
Utang lain-lain	IDR 392.036.517.830	IDR 412.311.559.019	*Other payables*
Pinjaman bank jangka pendek	IDR -	IDR 40.000.000.000	*Non-current bank loan*
Sub total	IDR 5.123.881.570.462	IDR 6.273.510.520.413	*Sub-total*
Liabilitas dalam Yen Jepang			*Liabilities in Japanese Yen*
Pinjaman jangka panjang	JPY 29.435.683.000	JPY 31.026.801.000	*Long-term loans*
Sub total	JPY 29.435.683.000	JPY 31.026.801.000	*Sub-total*
Ekuivalen dolar AS	**USD 503.621.395**	**USD 626.491.680**	***US dollar equivalents***

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Sebagian besar pembelian gas dalam mata uang Dolar AS juga dijual dalam dolar AS, sehingga lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing terjadi secara alami. Saat ini, liabilitas yang timbul dari pembiayaan dalam mata uang asing tidak dilindung nilai.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain dolar AS pada tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, aset moneter neto akan turun sekitar USD22.183.548.

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Most purchases of gas were in US Dollars which also sold in US dollar, therefore naturally hedging the related foreign currency exposures. Currently, liabilities denominated in foreign currency arising from financing activities are not hedged.

If assets and liabilities in currencies other than US dollar as of December 31, 2024 are translated using the exchange rate as of the issuance date of these consolidated financial statements, the total net monetary assets will decrease by approximately USD22,183,548.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA

Untuk kepentingan manajemen, Grup digolongkan menjadi unit usaha berdasarkan produk dan jasa dan memiliki tiga segmen operasi yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Niaga dan transmisi

   Segmen niaga dan transmisi gas melakukan kegiatan niaga dan transmisi minyak dan gas dan pengolahan LNG kepada pelanggan industri, komersial dan rumah tangga, serta *LNG trading*.

2. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

   Segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

3. Operasi lainnya

   Segmen operasional lainnya terkait dengan jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan.

40. SEGMENT INFORMATION

For management purposes, the Group is organised into business units based on their products and services and has three reportable operating segments as follows:

1. Trading and transmission

   The gas trading and transmission segment is involved in trading and transmission of oil and gas and processing of LNG to industrial, commercial and household customers, and LNG trading.

2. Exploration and production of oil and gas

   The exploration and production of oil and gas segment is mainly involved in exploration, exploitation and business development in oil and gas.

3. Other operations

   The other operations segment provides fiber optic rental for network services and constructions and maintenance services to the customers and management and leasing buildings and equipment.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba segmen dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Grup.

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on segment income and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table represents revenue and profit, and certain asset and liability information regarding the Group's operating segments.

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	3.279.390.469	369.538.499	519.377.793	(379.687.574)	3.788.619.187	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(2.746.664.305)	(306.900.071)	(366.844.695)	389.170.786	(3.031.238.285)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(26.999.963)	(4.906.358)	(7.719.924)	-	(39.626.245)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(855.500)	(239.785)	(6.173.776)	1.969.391	(5.299.670)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(4.630.562)	(124.499)	(3.839.838)	-	(8.594.899)	*Depreciation*
Lain-lain	(28.842.013)	(4.150.995)	(11.430.656)	66.512	(44.357.152)	*Others*
Jumlah beban segmen	(2.807.992.343)	(316.321.708)	(396.008.889)	391.206.689	(3.129.116.251)	*Total segment expenses*
Laba segmen	471.398.126	53.216.791	123.368.904	(11.519.115)	659.502.936	***Segment profit***
Beban Perusahaan dan Entitas Anak Yang Tidak Dapat Dialokasikan	-	-	-	-	(103.336.953)	*Unallocated expenses of the Company and Subsidiaries*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	40.293.915	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(73.802.786)	*Other expense*
Laba operasi					522.657.112	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(75.327.749)	*Finance cost*
Laba selisih kurs	-	-	-	-	11.125.284	*Gain on foreign exchange*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	60.189.845	*Finance income*
Provisi atas kontrak LNG	-	-	-	-	(3.486.935)	*Provision for LNG Contract*
Penurunan nilai properti minyak dan gas	-	-	-	-	(9.068.015)	*Impairment losses of property of oil and gas*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	72.200.336	*Share of profit from joint ventures investment*
Laba sebelum pajak penghasilan					578.289.878	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	7.908.172.122	1.203.458.524	206.117.076	(2.901.797.992)	6.415.949.730	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					6.415.949.730	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	2.514.056.264	594.984.499	79.402.762	(444.021.079)	2.744.422.446	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					2.744.422.446	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	148.710.293	90.751.849	15.912.322	-	255.374.464	***Capital expenditures***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/*December 31, 2023*					
	Niaga dan transmisi/ *Trading and transmission*	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas/ *Exploration and production of oil and gas*	Operasi lainnya/ *Other operations*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
PENDAPATAN						***REVENUES***
Pendapatan	3.089.499.002	452.999.126	491.587.560	(387.781.523)	3.646.304.165	*Revenues*
Beban segmen						***Segment expenses***
Beban pokok pendapatan	(2.723.751.304)	(371.691.464)	(197.681.233)	380.399.314	(2.912.724.687)	*Cost of revenues*
Biaya gaji upah dan tunjangan	(32.533.536)	(5.269.691)	(6.267.990)	-	(44.071.217)	*Salaries and employees' benefits*
Biaya pemeliharaan	(278.667)	(192.835)	(18.847.895)	10.714.780	(8.604.617)	*Repairs and maintenance*
Biaya penyusutan	(659.273)	-	(3.615.245)	-	(4.274.518)	*Depreciation*
Lain-lain	(31.290.009)	(5.126.057)	(21.344.980)	1.326.913	(56.434.133)	*Others*
Jumlah beban segmen	(2.788.512.789)	(382.280.047)	(247.757.343)	392.441.007	(3.026.109.172)	*Total segment expenses*
Laba segmen	300.986.213	70.719.079	243.830.217	(4.659.484)	620.194.993	***Segment profit***
Beban perusahaan dan entitas anak yang tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	88.335.669	*Unallocated expenses of the Company and subsidiaries*
Pendapatan lain-lain	-	-	-	-	24.623.337	*Other income*
Beban lain-lain	-	-	-	-	(14.065.047)	*Other expense*
Laba operasi					542.417.614	***Operating profit***
Beban keuangan	-	-	-	-	(97.628.154)	*Finance cost*
Laba selisih kurs	-	-	-	-	7.352.655	*Gain on foreign exchange*
Provisi atas sengketa pajak	-	-	-	-	(29.864.532)	*Provisions for tax disputes*
Provisi atas kontrak LNG	-	-	-	-	(11.689.711)	*Provision for LNG Contract*
Pendapatan keuangan	-	-	-	-	48.464.033	*Finance income*
Bagian laba dari ventura bersama	-	-	-	-	64.835.104	*Share of profit from joint ventures investment*
Laba sebelum pajak penghasilan					523.887.009	***Profit before income taxes***
INFORMASI LAINNYA						***OTHER INFORMATION***
Aset segmen	8.342.180.034	1.434.514.829	196.360.495	(3.373.816.889)	6.599.238.469	*Segment assets*
Total aset yang dikonsolidasikan					6.599.238.469	***Total consolidated assets***
Liabilitas segmen	2.768.506.400	824.086.015	86.929.526	(620.686.851)	3.058.835.090	*Segment liabilities*
Total liabilitas yang dikonsolidasikan					3.058.835.090	***Total consolidated liabilities***
Pengeluaran modal	**138.010.077**	**85.115.071**	**8.772.941**	**-**	**231.898.089**	***Capital expenditures***

Pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah pendapatan dari PLN dan entitas anaknya (pihak berelasi) (Catatan 27), dimana tercatat sebagai pendapatan pada segmen niaga dan transmisi, dan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.

Revenues from customers in excess of 10% of the total consolidated revenues is revenue from PLN and its subsidiaries (related parties) (Note 27), in which recorded as revenues on trading and transmission, and exploration and production of oil and gas segments.

41. TRANSAKSI NON-KAS / *41. NON-CASH TRANSACTIONS*

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Penambahan aset minyak dan gas yang berasal dari penambahan atau penyesuaian biaya pembongkaran, dan lainnya	14.625.986	15.310.952	*Addition of oil and gas properties from additions or adjustments of dismantling costs, and others*
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud melalui utang, beban akrual, kapitalisasi biaya pinjaman dan penambahan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	91.397.199	125.344.221	*Acquisition of fixed assets and intangible assets through payables, accrued expense, capitalisation of finance cost and addition to assets abandonment and site restoration obligations*
Penambahan aset hak guna dengan mengkredit liabilitas sewa	11.619.468	3.839.597	*Addition of right-of-use assets by crediting lease liabilities*

42. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN / *42. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES*

				Perubahan non-kas/*Non-cash change*			
	1 Januari/ *January* 2024	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December 31,* 2024
Pinjaman bank/*bank loans*	562.238.721	400.000.000	(63.651.115)	-	(22.446.935)	-	876.140.671
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	430.682.063	-	(36.923.038)	(17.015.634)	18.491.024	-	395.234.415
Utang obligasi/ *Bonds payable*	552.633.015	-	(552.961.000)	-	-	327.985	-
	1.545.553.799	**400.000.000**	**(653.535.153)**	**(17.015.634)**	**(3.955.911)**	**327.985**	**1.271.375.086**

42. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)

42. RECONCILIATION OF LIABILITIES FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)

	1 Januari/ *January* 2023	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from Financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activity*	Arus kas digunakan untuk aktivitas operasi/ *Cash flows used in operating activity*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*: Dampak selisih kurs dan transaksi non kas/ *Foreign currency effect and non-cash transactions*	Perubahan non-kas/*Non-cash changes*: Amortisasi biaya penerbitan dan diskonto/ *Amortisation of issuance cost and discount*	31 Desember/ *December 31,* 2023
Pinjaman bank/*bank loans*	352.033.016	303.238.552	(80.555.048)	-	(12.477.799)	-	562.238.721
Liabilitas sewa/ *Lease liabilities*	474.439.515	-	(38.903.352)	(19.171.128)	14.317.028	-	430.682.063
Utang obligasi/ *Bonds payable*	1.323.114.950	-	(773.291.000)	-	-	2.809.065	552.633.015
	2.149.587.481	**303.238.552**	**(892.749.400)**	**(19.171.128)**	**1.839.229**	**2.809.065**	**1.545.553.799**

43. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, manajemen melakukan reklasifikasi penyajian laporan laba rugi konsolidasian Grup atas beban kerugian penurunan nilai piutang dari Beban Umum dan Administrasi ke Beban Lain-lain agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Rincian reklasifikasi adalah sebagai berikut:

43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Reclassification of Impairment Loss on Receivables

In the process of preparing the consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 2024, management reclassified the presentation of the Group's consolidated income statement regarding the impairment loss on receivables from General and Administrative Expenses to Other Expenses to align with the presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024. Details for the reclassification are as follow:

	Sebelum reklasifikasi/ *Beginning balance*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *Ending balance*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				**Statement of profit or loss and other comprehensive income**
Beban umum dan administrasi	201.720.154	4.824.953	196.895.201	*General and administrative expenses*
Beban lain- lain	14.065.047	4.824.953	18.890.000	Other expenses
Total	**215.785.201**	**-**	**215.785.201**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa reklasifikasi ini tidak mengubah substansi laporan keuangan konsolidasian atau mempengaruhi pengguna laporan keuangan konsolidasian.

Management believes that this reclassification does not change the substance of the consolidated financial statements or affect the users of the consolidated financial statements.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Perpanjangan pinjaman bank

Pada tanggal 26 Februari 2025, SEI melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Jangka waktu pinjaman adalah selama tiga bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2025.

b. Proses arbitrase oleh Gunvor LCIA atas Pemberitahuan Force Majeure dalam Pelaksanaan MSPA dan CN

Pada 20 Januari 2025 LCIA telah menyampaikan penetapan pembentukan formasi tribunal. Pada 17 Febuari 2025, Gunvor melalui konsultan hukumnya telah menyampaikan *Statement of Case* ("SOC") kepada konsultan hukum PGN, Mayer Brown. Pada 20 Februari 2025, *Case Management Conference* (“CMC”) pertama telah dilaksanakan secara daring.

LCIA menyepakati bahwa tanggal penerimaan SOC Gunvor oleh para pihak terhitung pada 28 Februari 2025, dan perusahaan diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan berupa *Statement of Defense* (”SOD") sampai dengan 31 Maret 2025.

Sampai dengan tanggal laporan, Perusahaan sedang dalam proses penyusunan SOD dan berpendapat bahwa belum terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha. Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan terus memantau situasi untuk memastikan tidak adanya gangguan terhadap operasional dan aktifitas bisnis Perusahaan.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tambahan ini adalah informasi keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (entitas induk saja) pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi serta investasi Perusahaan pada entitas pengendalian bersama dan asosiasi berdasarkan metode biaya dan bukan metode ekuitas.

44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Extension of bank loan

On February 26, 2025, SEI extended the loan term with PT Bank SMBC Indonesia Tbk. The loan term is for three months which will be due on May 26, 2025.

b. Arbitration request from Gunvor to LCIA due to Notification of Force Majeure in the Implementation of the MSPA and CN

On January 20, 2025, LCIA submitted a determination on the formation of the tribunal. On February 17, 2025, Gunvor, through its legal consultant, submitted a Statement of Case ("SOC") to PGN's legal consultant, Mayer Brown. On February 20, 2025, the first Case Management Conference (“CMC”) was held online.

The LCIA agreed that the date of receipt of Gunvor's SOC by the parties is counted from February 28, 2025, and the Company is given time to provide a response in the form of a Statement of Defense (“SOD”) until March 31, 2025.

As of the date of the report, the Company is in the process of preparing the SOD and believes that there has not been any material impact on its financial condition and business continuity. The Company respects the ongoing legal process and continues to monitor the situation to ensure that there are no disruptions to the Company’ operations and business activities.

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY

The supplementary financial information represents financial information of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (parent entity only) as of December 31, 2024 and for the year then ended, which present the Company’s investments in subsidiaries under the cost method and investment in joint ventures and associated entities under the cost method, as opposed to the equity method.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	448.503.466	308.444.576	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	135.770	-	*Restricted cash*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	23.178.224	*Financial assets at fair value through other comprehensive income*
Piutang usaha - neto	193.558.184	190.299.449	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	3.162.193	16.114.564	*Other receivables - net*
Piutang dari entitas anak	71.719.846	58.570.242	*Receivable from subsidiaries*
Taksiran tagihan pajak	24.386	8.364.050	*Estimated claims for tax refund*
Persediaan - neto	4.326.308	3.708.279	*Inventories - net*
Uang muka	18.206.571	14.237.112	*Advances*
Beban dibayar di muka	8.939.624	8.034.122	*Prepaid expenses*
Total aset lancar	748.576.348	630.950.618	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Kas yang dibatasi penggunaannya	271.539	-	*Restricted cash*
Uang muka, bagian tidak lancar	37.129.306	29.955.628	*Advances, non-current portion*
Pinjaman kepada entitas anak, bagian tidak lancar	123.997.439	443.800.145	*Loan provided to subsidiaries, non-current portion*
Penyertaan saham	2.928.498.080	2.928.498.080	*Investment in shares*
Aset tetap - neto	1.169.376.329	1.210.806.661	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - neto	6.964.653	6.659.117	*Right-of-use assets - net*
Aset takberwujud - neto	1.276.362	1.812.133	*Intangible assets - net*
Taksiran tagihan pajak	-	-	*Estimated claims for tax refund*
Aset pajak tangguhan	61.666.269	27.032.401	*Deferred tax assets*
Lain-lain	7.189.468	7.515.946	*Others*
Total aset tidak lancar	4.336.369.445	4.656.080.111	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**5.084.945.793**	**5.287.030.729**	***TOTAL ASSETS***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	70.472.971	184.475.820	*Trade payables*
Utang lain-lain	38.096.020	19.731.752	*Other payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar	204.777.128	185.854.935	*Accrued liabilities*
Utang obligasi	-	396.444.892	*Bonds payables*
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang	72.449.958	23.939.089	*Short-term portion of long-term bank loans*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan	17.768.895	6.575.869	*Income taxes -*
- Pajak lain-lain	-	-	*Other taxes -*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	55.260.855	45.928.660	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang kepada entitas anak	103.629.956	72.098.353	*Payable to subsidiaries*
Total liabilitas jangka pendek	562.455.783	935.049.370	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman bank jangka panjang	703.690.713	505.708.791	*Long-term bank loans*
Utang obligasi	-	-	*Bonds payables*
Liabilitas yang masih harus dibayar - jangka panjang	72.027.462	68.540.528	*Accrued liabilities - long term*
Liabilitas imbalan pascakerja	98.384.929	118.069.866	*Post-employment benefits obligation*
Liabilitas sewa jangka panjang	279.848	196.261	*Long-term portion of lease liabilities*
Pendapatan diterima di muka	1.455.203	1.605.547	*Unearned income*
Total liabilitas jangka panjang	875.838.155	694.120.993	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**1.438.293.938**	**1.629.170.363**	***TOTAL LIABILITIES***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2024	**31 Desember/ *December 31,* 2023**	
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal IDR100 per saham Modal dasar - 70.000.000.000 dari saham yang terdiri 1 saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 saham Seri B			*Share capital - par value of IDR100 per share Authorized - 70,000,000,000 shares consists of 1 Series A Dwiwarna share and 69,999,999,999 series B shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.241.508.196 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 24.241.508.195 saham Seri B	344.018.831	344.018.831	*Issued and fully paid - 24,241,508,196 shares of which consist of 1 Series A Dwiwarna and 24,241,508,195 Series B shares*
Tambahan modal disetor	284.339.313	284.339.313	*Additional paid-in capital*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	2.825.721.520	2.826.831.298	*Appropriated -*
- Tidak dicadangkan	189.399.853	221.363.165	*Unappropriated -*
Komponen ekuitas lainnya	3.172.338	(18.692.241)	*Others components of equity*
TOTAL EKUITAS	**3.646.651.855**	**3.657.860.366**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**5.084.945.793**	**5.287.030.729**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
PENDAPATAN	2.549.268.365	2.400.376.912	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.255.441.133)	(2.116.545.839)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**293.827.232**	**283.831.073**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(103.036.437)	(89.103.668)	*General and administrative expenses*
Beban lain-lain	(6.291.351)	(1.038.995)	*Other expenses*
Pendapatan lain-lain	8.959.690	4.017.183	*Other income*
LABA OPERASI	**193.459.134**	**197.705.593**	***OPERATING INCOME***
Beban keuangan	(47.709.117)	(55.098.695)	*Finance costs*
Penurunan nilai piutang pemegang saham	(161.598.808)	-	*Impairment of shareholders' receivable*
Pendapatan keuangan	34.740.573	33.681.538	*Finance income*
Laba selisih kurs	34.298.701	2.761.465	*Profit on foreign exchange*
Provisi atas kontrak LNG	(3.486.935)	(11.689.711)	*Provision for LNG contract*
Provisi sengketa pajak	-	(27.599.264)	*Provision for tax dispute*
Pendapatan dividen	152.225.146	114.018.483	*Dividend income*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**201.928.694**	**253.779.409**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(12.528.841)	(32.416.244)	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA TAHUN BERJALAN	**189.399.853**	**221.363.165**	***PROFIT FOR THE YEAR***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued) FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	21.864.579	(3.036.525)	*Remeasurement of post-employment obligation, net of tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	-	(89.644)	*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income, net of tax*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	21.864.579	(3.126.169)	***TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**211.264.432**	**218.236.996**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Changes in fair value of available-for-sale financial assets*	Perubahan nilai wajar dari aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Changes in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*	Keuntungan/ kerugian aktuarial/ *Actuarial gain/(loss)*	Saldo laba telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**390.360**	**(15.956.432)**	**2.830.561.756**	**224.637.330**	**3.667.991.158**	***Balance at January 1, 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	221.363.165	221.363.165	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(228.367.788)	(228.367.788)	Payment of cash dividends
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	(3.730.458)	3.730.458	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(89.644)	(3.036.525)	-	-	(3.126.169)	*Other comprehensive income / (loss) for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**(18.992.957)**	**2.826.831.298**	**221.363.165**	**3.657.860.366**	***Balance at December 31, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	189.399.853	189.399.853	*Profit for the year*
Pembayaran tunai dividen	-	-	-	-	-	-	(222.472.943)	(222.472.943)	*Payment of cash dividends*
Penyisihan cadangan umum	-	-	-	-	-	(1.109.778)	1.109.778	-	*General reserve*
Pendapatan / (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	21.864.579	-	-	21.864.579	*Other comprehensive income / loss for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**344.018.831**	**284.339.313**	**-**	**300.716**	**2.871.622**	**2.825.721.520**	**189.399.853**	**3.646.651.855**	***Balance at December 31, 2024***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	2.571.531.355	2.418.380.286	*Receipts from customers*
Penerimaan dari penghasilan bunga	13.395.058	37.525.699	*Receipts from interest income*
Pembayaran kepada pemasok	(1.900.686.627)	(1.928.288.351)	*Payments to suppliers*
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(261.420.965)	(215.105.877)	*Payments for operating expenses and other operating activities*
Pembayaran kepada karyawan	(79.416.452)	(70.775.093)	*Payments to employees*
Pembayaran untuk beban keuangan	(44.785.840)	(53.673.859)	*Payments for finance cost*
Pembayaran pajak penghasilan	(123.992.619)	(112.891.027)	*Payments of income taxes*
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya	(407.309)	-	*Placement of restricted cash*
Pembayaran sengketa pajak	-	(27.599.264)	*Payments for tax disputes*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**174.216.601**	**47.572.514**	***Net cash provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari anak perusahaan dan ventura bersama	152.203.488	113.671.979	*Dividends received from subsidiaries and joint ventures*
Penerimaan atas pelepasan investasi di entitas anak	-	123.221.468	*Proceeds from disposal of investment in a subsidiaries*
Pelepasan investasi jangka pendek	23.178.224	3.600.000	*Disposal of short-term investments*
Penambahan aset tetap	(11.486.367)	(18.966.428)	*Additions of fixed assets*
Pelunasan pinjaman pemegang saham dari anak perusahaan	155.553.268	77.614.408	*Receipt of shareholder loan from subsidiaries*
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	**319.448.613**	**299.141.427**	***Net cash provided by investing activities***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

LAPORAN ARUS KAS (lanjutan) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS (continued) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
(Expressed in United States dollar, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2024	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman jangka panjang	300.000.000	300.000.000	*Proceeds of long-term loans*
Pembayaran obligasi - buyback	(396.709.000)	(553.291.000)	*Payments of obligation - buyback*
Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk	(222.472.943)	(228.367.788)	*Payments of dividend to owners of the parent entity*
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(31.175.408)	(16.252.338)	*Repayments of long-term bank loans*
Pembayaran biaya transaksi utang bank	-	(3.655.000)	*Payment of bank loan transaction*
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	*Payments of lease liabilities*
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(350.357.351)**	**(501.566.126)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**143.307.863**	**(154.852.185)**	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs neto dari kas dan setara kas	(3.248.973)	2.168.593	*Net effects foreign exchange from cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**308.444.576**	**461.128.168**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**448.503.466**	**308.444.576**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan PSAK 227 (dahulu PSAK 4), Laporan Keuangan Tersendiri.

PSAK 227 mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

PSAK 227 memperkenankan (i) metode biaya perolehan, (ii) sesuai PSAK 109 (dahulu PSAK 71) - Instrumen Keuangan, atau (iii) metode ekuitas sebagai metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan menerapkan metode biaya perolehan dalam laporan keuangan entitas induk saja pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak dan entitas asosiasi.

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY (continued)

a. Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the parent entity are prepared in accordance with the PSAK 227 (formerly PSAK 4), Separate Financial Statements.

PSAK 227 regulates that when an entity elects to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

PSAK 227 allows the use of (i) the cost method, (ii) in accordance with PSAK 109 (formerly PSAK 71) - Financial Instruments, or (iii) equity method to record the investment in subsidiaries, joint ventures, and associates in the separate financial statements. The Company implemented cost method in the financial statements of the parent entity only as at and for the years ended December 31, 2024 and 2023.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries and associates.

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

b. Penyertaan saham pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi berikut:

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

b. Investments in shares of subsidiaries, associates and joint ventures

As of December 31, 2024 and 2023, the parent entity has the following investments in shares of subsidiaries, joint ventures and associates:

	2024			
Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2024/ *Acquisition cost January 1, 2024*	Penambahan/ (Pengurangan) *Additions / (Deduction)*	Nilai tercatat 31 Desember 2024/ *Carrying value December 31, 2024*
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	253.623.935	-	253.623.935
PT Permata Graha Nusantara	99,99%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59.87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40.00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40.00%	111.453	-	111.453
PT Baskara Asri Ghas (Dahulu PT Banten Gas Sinergy)	0.14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**2.928.498.080**	**-**	**2.928.498.080**

	2023			
Nama entitas/ *Entity name*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2023/ *Acquisition cost January 1, 2023*	Penambahan/ *Additions*	Nilai tercatat 31 Desember 2022/ *Carrying value December 31, 2022*
Entitas anak/*Subsidiaries*				
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	17.527.222	-	17.527.222
PT PGAS Solution	99,91%	9.028.138	-	9.028.138
PT Saka Energi Indonesia	99,99%	1.062.972.507	-	1.062.972.507
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	21.294.269	-	21.294.269
PT PGN LNG Indonesia	99,99%	376.845.403	(123.221.468)	253.623.935
PT Permata Graha Nusantara	99,99%	36.090.511	-	36.090.511
PT Pertamina Gas	51,00%	1.387.933.850	-	1.387.933.850
Ventura bersama/*Joint ventures*				
PT Transportasi Gas Indonesia	59.87%	81.755.336	-	81.755.336
PT Nusantara Regas	40.00%	58.158.141	-	58.158.141
Entitas asosiasi/*Associates*				
PT Gas Energi Jambi	40.00%	111.453	-	111.453
PT Baskara Asri Ghas (Dahulu PT Banten Gas Sinergy)	0.14%	2.718	-	2.718
Total/*Total*		**3.051.719.548**	**(123.221.468)**	**2.928.498.080**

45. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

45. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ONLY (continued)

c. Penerimaan dividen dari entitas anak dan ventura bersama

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas induk menerima dividen atas penyertaan saham pada entitas anak dan ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

c. Dividend received from subsidiaries and joint ventures

As of December 31, 2024 and 2023, the parent entity has received dividend in shares of subsidiaries and joint ventures with detail as follows:

	2024	
Nama entitas/ *Entity name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Penerimaan dividen/ *Dividend received***
Entitas anak/*Subsidiary*		
PT Pertamina Gas	51,00%	100.206.375
PT PGAS Solution	99,91%	-
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	934.278
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	405.718
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	32.206.002
PT Nusantara Gas	40,00%	18.472.774

	2023	
Nama entitas/ *Entity name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Penerimaan dividen/ *Dividend received***
Entitas anak/*Subsidiaries*		
PT Pertamina Gas	51,00%	67.184.185
PT PGAS Solution	99,91%	1.157.593
PT Gagas Energi Indonesia	99,88%	681.663
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	99,93%	433.442
Ventura bersama/*Joint ventures*		
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	32.817.803
PT Nusantara Gas	40,00%	11.743.797

Halaman ini sengaja dikosongkan
This Page is Intentionally left blank

08.

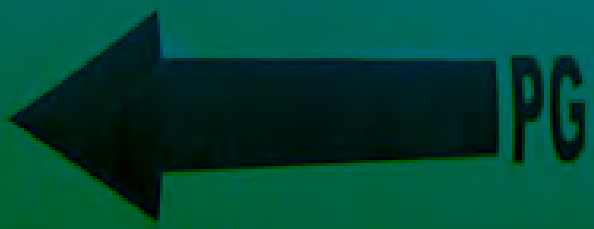

REFERENSI

References

REFERENSI SEOJK NO 16/SEOJK.04/2021 BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE OF CIRCULAR OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY NUMBER 16/SEOJK.04/2021 ON FORMS AND CONTENTS OF ISSUER'S OR PUBLIC LISTED COMPANY'S ANNUAL REPORT

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau erusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau Perusahaan Publik	√	a. The Annual Report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum	√	b. Issuers are parties who make public offerings
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	√	c. A Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik	√	d. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically- listed Company
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business
f. Direksi:		f. Board of Directors:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity
g. Dewan Komisaris:		g. Board of Commissioners:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut	√	2) For the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity

Keterangan	Halaman Page	Description
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:		h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	√	1) For an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut	√	2) For an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	√	2. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	√	3. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan	√	4. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	√	5. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports
II. Bentuk Laporan Tahunan		Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami	√	3. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format *Portable Document Format* (PDF).	√	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into Portable Document Format (PDF).
III. Isi Laporan Tahunan		Content Of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting	16-19	a. Summary of key financial information
b. Informasi saham (jika ada)	24-26	b. Stock information (if any)
c. Laporan Direksi	72-93	c. The Board of Directors report
d. Laporan Dewan Komisaris	58-69	d. The Board of Commissioners report
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	98-170	e. Profile of Issuer or Public Company
f. Analisis dan pembahasan manajemen	173-257	f. Management discussion and analysis
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	258-525	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	527-547	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	548-813	i. Audited annual report
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	96-97	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting	16-19	a. Summary of Key Financial Information
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	16-19	Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan	16	1) Income/sales
2) Laba bruto	16	2) Gross profit
3) Laba (rugi)	16	3) Profit (loss)
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	16	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non- controlling interest
5) Total laba (rugi) komprehensif	16	5) Total comprehensive profit (loss)
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	16	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest
7) Laba (rugi) per saham	16	7) Earning (loss) per share
8) Jumlah aset	17	8) Total assets
9) Jumlah liabilitas	17	9) Total liabilities
10) Jumlah ekuitas	17	10) Total equities
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	17	11) Profit (loss) to total assets ratio
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	17	12) Profit (loss) to equities ratio
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan	17	13) Profit (loss) to income ratio
14) Rasio lancar	17	14) Current ratio
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas	17	15) Liabilities to equities ratio
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	17	16) Liabilities to total assets ratio
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	17	17) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry.
b. Informasi Saham	24-26	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	24-26	Stock Information (if any) at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	24-26	1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar	24-26	a) number of outstanding shares
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	24-26	b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	24-26	c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on
d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan	24-26	d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek	24-26	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	26	2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi	26	a) date of corporate action
b) Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham	26	b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares

Keterangan	Halaman Page	Description
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi	26	c) number of outstanding shares prior to and after corporate action
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada)	26	d) The number of convertible securities exercised (if any)
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi	26	e) share price prior to and after corporate action
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut	26	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/ atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut	26	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/ or delisting
c. Laporan Direksi	72-93	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	72-93	The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	72-93	1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	76-79	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	77	b) Roleofthe Boardof Directorsinformulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik	78	c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan	81-82	d) comparison between achievement of results and targets
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik	82-83	e) challenges faced by the Issuer or Public Company
2) Gambaran tentang prospek usaha	85-87	2) description on business prospects
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	87-89	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company
4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)	91-92	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any)
d. Laporan Dewan Komisaris	58-69	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	58-69	The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	61-63	1) Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi	64-65	3) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	65-67	4) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	98-170	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	98-170	Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku	100-101	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	100-101	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat	100-101	a) Address
b) Nomor telepon	100-101	b) Telephone number
c) Alamat surat elektronik dan	100-101	c) E-mail address and
d) Alamat Situs Web	100-101	d) Website address
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	102-105	3) Brief history of the Issuer or Public Company
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik	112-113	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan	114-118	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan	119	6) Operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or region where operational activities are carried out or the scope of the company's operational activities
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan	120-121	7) Organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions
8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	169	8) List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	130-136	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	130-136	a) Name and short description of duties andfunctions
b) Foto terbaru	130-136	b) Latest photograph
c) Usia	130-136	c) Age
d) Kewarganegaraan	130-136	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan	130-136	e) Education
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	130-136	f) history position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yangbersangkutan	130-136	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	130-136	(2) Dual position, as member of the Boardof Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member ofcommittee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	130-136	(3) Working experience and period in andoutside the Issuer or Public Company.
g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi	130-136	g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly orindirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or PublicCompany shall disclose this matter
h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	91-92, 137	h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and thereasons for the changes. In the event thatthere is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikitmemuat:	123-129	10) The Board of Commissioners profiles, atleast include:
a) Nama	123-129	a) Name
b) Foto terbaru	123-129	b) Latest photograph
c) Usia	123-129	c) Age
d) Kewarganegaraan	123-129	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan	123-129	e) Education

Keterangan	Halaman Page	Description
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	123-129	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yangbersangkutan	123-129	(1) Legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company
(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yangbersangkutan	123-129	(2) Legal bases for the first appointmentas member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komiteserta jabatan lainnya (jika ada)	123-129	(3) Dual position as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member ofcommittee and other position (if any)
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	123-129	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	123-129	g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada)	320	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any)
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	68-69, 137	i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya	68-69, 91-92, 137	11) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/ kontrak) dalam tahun buku	138-141	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contracted) in the fiscal year Disclosure of information can be presented in tabular form
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik	148-151	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik	148-151	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik	148-151	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik	148-151	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	148-151	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

Keterangan	Halaman Page	Description
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	150	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal	150	a) Ownership of local institutions
b) Kepemilikan institusi asing	150	b) Ownership of foreign institutions
c) Kepemilikan individu lokal	150	c) Ownership of local individual
d) Kepemilikan individu asing	150	d) Ownership of foreign individual.
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan	148, 152	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada) Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	154-160	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any) For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada)	161-164	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	165-166	19) Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any)
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/ aliansinya meliputi:	167	20) Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services and their networks/ associations/alliances include:
a) nama dan alamat	167	a) name and address
b) periode penugasan	167	b) period of assignment
c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan	167	c) information on scope of audit and/or non- audit services
d) biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku	167	d) Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year
e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/ asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut	167	e) In the event that AP and KAP and their network/ association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	168	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen	173-257	f. *Ma*nagement Discussion and Analysis
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	173-257	Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	176-186	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya	176-186	a) Production, including process, capacity, and growth
b) Pendapatan/penjualan	176-186	b) Income/sales
c) Profitabilitas.	176	c) Profitability.

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	187-197	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	192-193	a) Current assets, non-current assets, and total assets
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	194	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities
c) Ekuitas	194	c) Equities
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif	188-192	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss)
e) Arus kas.	195-196	e) Cash flows.
3) Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	198	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios
4) Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	198	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios
5) Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud	199-200	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	200	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut	200	a) The purpose of such ties
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut	200	b) Source of funds expected to fulfill the said ties
c) Mata uang yang menjadi denominasi	200	c) Currency of denomination
d) Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	200	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks.
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	201-202	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal	201-202	a) Type of investment of capital goods
b) Tujuan investasi barang modal	201-202	b) Objective of the investment of capital goods
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan.	201-202	c) Value of the investment of capital good.
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada)	202-203	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any)
9) Prospek usaha dari emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	204-209	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	210-212	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan	210-212	a) Income/sales
b) Laba (rugi)	210-212	b) Profit (loss)
c) Struktur modal (*capital structure*) atau	210-212	c) Capital structure or
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	210-212	d) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company.
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	213-216	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan	215	a) Income/sales
b) Laba (rugi)	215	b) Profit (loss)
c) Struktur modal (*capital structure*)	215	c) Capital structure or
d) Kebijakan dividen atau	215	d) Dividend policy
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	215	e) Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company.

Keterangan	Halaman Page	Description
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar	217-226	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	235	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen	235	a) Dividend policy
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas	235	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas)	235	c) Amount of cash per share (cash and/or non cash)
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar	235	d) Amount of dividend per year paid
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	235	Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed
14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	236	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	236	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	236	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	237-239	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/ capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi	237-239	a) Transaction date, value, and object
b) Nama pihak yang melakukan transaksi	237-239	b) Name of transacting parties
c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada)	237-239	c) Nature of related parties (if any)
d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	237-239	d) Description of the fairness of the transaction
e) Pemenuhan ketentuan terkait	237-239	e) Compliance with related rules and regulations
f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	237-239	f) In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms- length principle*)	237-239	1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle
2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*)	237-239	2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle
g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut	237-239	g) For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut	237-239	h) For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	237-239	i) In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	239-241	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any)
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	242-243	17) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any)
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	258-525	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	258-525	Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	271-290	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	274-290	a) Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:
(1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku	274-290	(1) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year
(2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan	274-290	(2) Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them
b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	274, 282, 288	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed
2) Direksi, mencakup antara lain:	321-350	2) The Board of Directors, covering:
a) tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota Direksi	322-324	a) The tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi	324-325	b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS	325-350	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	359-362	d) Training and/or competency development of members of the Board of Directors:
(1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)	359-362	(1) Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any)
(2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).	359-362	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any).
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	350	e) The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:
(1) prosedur penilaian kinerja	350	(1) Performance appraisal procedures
(2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	350	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings

Keterangan	Halaman Page	Description
f) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	350	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	291-320	3) The Board of Commissioners, among others include:
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	291-292	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris	292-293	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter
c) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS	297-315	c) Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	359-362	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada)	359-362	(1) Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any)
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada)	359-362	(2) Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any)
e) Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	316-317	e) The assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	316-317	(1) procedure for the implementation of performance assessment
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	316-317	(2) Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings
(3) Pihak yang melakukan penilaian.	316-317	(3) Assessor.
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	317-318	f) Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja	317-318	(1) Performance appraisal procedures
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	317-318	(2) The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	351-362	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	351-362	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	351-362	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	351-362	(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya	351-362	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	351-362	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners

Keterangan	Halaman Page	Description
5) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N.A	5) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) Nama	N.A	a) name
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah	N.A	b) Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah	N.A	c) Period of assignment of the sharia supervisory board
d) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	N.A	d) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	N.A	e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market
6) Komite Audit, mencakup antara lain:	367-382	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	367-382	a) Name and position in the committee
b) Usia	367-382	b) Age
c) Kewarganegaraan	367-382	c) Citizenship
d) Riwayat pendidikan	367-382	d) Education background
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	367-382	e) History of position including:
(1) Dasar hukum untuk pengangkatan sebagai anggota komite	367-382	(1) Legal basis for appointment as committee member
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	367-382	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	367-382	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit	367-382	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee
g) Pernyataan independensi Komite Audit	367-382	g) statement of independence of the Audit Committee
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	367-382	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut	367-382	i) Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings
j) Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit	367-382	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	382-392	7) The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	382-392	a) Name and position in committee membership
b) Usia	382-392	b) Age
c) Kewarganegaraan	382-392	c) Nationality
d) Riwayat pendidikan	382-392	d) Educational history
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	382-392	e) Position history, including information on:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	382-392	(1) Legal basis for appointment as committee member
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	382-392	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	382-392	(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota komite	382-392	f) Period and term of office of the committee members
g) Pernyataan independensi komite	382-392	g) Statement of committee independence

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	382-392	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Uraian tugas dan tanggung jawab	382-392	i) Description of duties and responsibilities
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite	382-392	j) A statement that it has a guideline or charter
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	382-392	k) Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	382-392	l) Brief description of the implementation of activities in the fiscal year
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	382-392	m) In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite	382-392	(1) Reasons for not forming the committee
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	382-392	(2) The party carrying out the nomination and remuneration function
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	392-405	8) Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and tasks of the Board of Directors (if any) and / or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contains:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	392-405	a) Name and position in the Committee
b) Usia	392-405	b) Age
c) Kewarganegaraan	392-405	c) Citizenship
d) Riwayat pendidikan	392-405	d) Education background
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	392-405	e) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	392-405	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	392-405	(2) Dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any)
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	392-405	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
f) Periode dan masa jabatan anggota komite	392-405	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee
g) Pernyataan independensi komite	392-405	g) Statement of committee independence
h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	392-405	h) Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any)
i) Uraian tugas dan tanggung jawab	392-405	i) Description of duties and responsibilities
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite	392-405	j) A statement that the committee has had guidelines or charters
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	392-405	k) Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	392-405	l) A brief description of the committee's activities for the fiscal year
9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	409-411	9) Corporate Secretary, including:
a) Nama	409-411	a) name
b) Domisili	409-411	b) domicile
c) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	409-411	c) history of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan	409-411	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	409-411	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company

Keterangan	Halaman Page	Description
d) Riwayat pendidikan	409-411	d) education background
e) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	409-411	e) education and/or training during the year under review
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku	409-411	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review
10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	412-421	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala Unit Audit Internal	412-421	a) Name of Head of Internal Audit Unit
b) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	412-421	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal	412-421	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	412-421	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi Audit Internal (jika ada)	412-421	c) Qualification or certification as internal auditor (if any)
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku	412-421	d) Education and/or training during the year under review
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal	412-421	e) Structure and position of Internal Audit Unit
f) Uraian tugas dan tanggung jawab	412-421	f) Description of duties and responsibilities
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Unit Audit Internal	412-421	g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter
h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit Audit Internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit	412-421	h) Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year, including the policy and implementation of the meeting frequency with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or audit committee
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	422-424	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya	422-424	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	422-424	b) Review on the effectiveness of internal control systems
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal	422-424	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	435-448	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	435-448	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya	435-448	b) Types of risk and the management
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	435-448	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko	435-448	d) Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	449-457	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan	449-457	a) Substance of the case/claim
b) Status penyelesaian perkara/gugatan	449-457	b) Status of settlement of case/claim
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik	449-457	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada)	458	14) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any)

Keterangan	Halaman Page	Description
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	463-466	15) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik	463-466	a) Key points of the code of conduct
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	463-466	b) Socialization of the code of conduct and enforcement
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	463-466	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Ownership Program/ ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	471-472	16) A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/ or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP)
a) Jumlah saham dan/atau opsi	471-472	a) Number of shares and/or options
b) Jangka waktu pelaksanaan	471-472	b) Implementation period
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	471-472	c) Requirements for eligible employees and/or management
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	471-472	d) Exercise price or determination of exercise price
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	473	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka	473	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud	473	b) Implementation of the policy
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	474-478	18) Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran	474-478	a) Mechanism for violation reporting
b) Perlindungan bagi pelapor	474-478	b) Protection for the whistleblower
c) Penanganan pengaduan	474-478	c) Handling of violation reports
d) Pihak yang mengelola pengaduan	474-478	d) Unit responsible for handling of violation report
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	474-478	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	474-478	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year
(2) Tindak lanjut pengaduan	474-478	(2) Follow up of complaints
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	429-430	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik	429-430	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik	429-430	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies
20) Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	491-500	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan /atau	491-500	a) statement regarding recommendation that have been implemented /or

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	491-500	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any)
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	527-547	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	1) The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:
a) Penjelasan strategi keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Explanation of the sustainability strategy
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental)
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	c) Brief profile of the Issuer or Public Company
d) Penjelasan Direksi	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	d) Explanation of the Board of Directors
e) Tata kelola keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	e) Sustainability governance
f) Kinerja keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	f) Sustainability performance
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	g) Written verification from an independent party, if any
h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	h) Feedback sheet for readers, if any
i) Anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	i) The response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	2) The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter
3) Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	3) Information on the Sustainability Report in number 1) can:
a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi /atau	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report /or

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company
4) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	4) The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	5) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:
a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	a) Contains all the information as referred to in number 1)
b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	b) Prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	6) In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the Social and Environmental Responsibility section contains information that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	7) Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek	548-813	i. Audited Annual Financial Statement Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Boardmof Directors on the financial report or the legislationsmin the Capital Markets sector governing the periodicmreports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	96-97	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority

LAMPIRAN VII - PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

APPENDIX VII - REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES NUMBER PER-2/MBU/03/2023 CONCERNING GUIDELINES FOR GOVERNANCE AND SIGNIFICANT CORPORATE ACTIVITIES OF STATE-OWNED ENTERPRISES

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
I. BAB I - INTRODUCTION		CHAPTER I - INTRODUCTION
1.1. Kondisi Umum	60-61, 74-75, 174-175	1.1. General Condition
1.2. Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan	10-11, 16-19, 79-82	1.2. Brief Overview of Company Performance
II. BAB II - KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024		CHAPTER II - COMPANY PERFORMANCE IN 2024
2.1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri, paling sedikit mengenai:	176-186	2.1. Operating review by business segment according to industry type, at least regarding:
2.1.1. Produksi;	176-186	2.1.1. Production;
2.1.2. Pangsa pasar;	217-218	2.1.2. Market share;
2.1.3. Ekspor (jika ada);	217	2.1.3. Export (if any);
2.1.4. Pendapatan/Penjualan; dan	176-186	2.1.4. Income/Sales; and
2.1.5. Profitabilitas	176	2.1.5. Profitability
2.2. Teknologi	83-84, 227-234	2.2. Technology
2.3. Penelitian dan Pengembangan	206-209	2.3. Research and Development
2.4. Hukum	449-457	2.4. Legal
2.5. Sumber Daya Manusia	83-84, 138-146	2.5. Human Resources
2.6. Investasi dan Sumber Pembiayaan	199-202	2.6. Investment and Financing Sources
2.7. Laporan Keuangan (diupdate apabila audit sudah terbit)	548-813	2.7. Financial Statements (updated if the audit has been published)
2.7.1. Laporan Posisi Keuangan;	192-195, 563-567	2.7.1. Statement of Financial Position;
2.7.2. Laporan Laba Rugi;	188-192, 568-569	2.7.2. Statement of Profit or Loss;
2.7.3. Laporan Arus Kas;	195-196, 571-572	2.7.3. Statement of Cash Flows;
2.7.4. Laporan Perubahan Ekuitas;	196-197, 570	2.7.4. Statement of Changes in Equity;
2.7.5. Penjelasan terhadap perubahan akun-akun material;	573-813	2.7.5. Explanation of changes in material accounts
2.7.6. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; dan	198	2.7.6. Ability to pay debts or liabilities by presenting relevant ratio calculations; and
2.7.7. Tingkat kolektibilitas piutang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	198	2.7.7. Receivables collectibility by presenting relevant ratio calculations.
2.8. Informasi mengenai realisasi atas rencana aksi korporasi seperti penjualan aset, penerbitan surat hutang, setoran modal, akuisisi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, restrukturisasi utang/modal, dan lainnya yang terjadi pada triwulan berjalan.	236-239	2.8. Information on the realization of corporate action plans such as asset sales, issuance of debt securities, capital deposits, acquisitions, divestments, business mergers/consolidations, debt/capital restructuring, and others that occurred in the current quarter.

Kerangka Laporan Tahunan	Halaman Page	Annual Report Framework
2.9. Kontribusi kepada Negara	244	2.9. Contribution to the State
2.9.1. Pajak;	244	2.9.1. Taxes;
2.9.2. Dividen; dan	244	2.9.2. Dividend; and
2.9.3. PNBP Lainnya.	244	2.9.3. Other Non-Tax Revenue.
BAB III - LAPORAN PENCAPAIAN KPI DAN TINGKAT KESEHATAN	244	CHAPTER III - REPORT OF KPI ACHIEVEMENT AND SOUNDNESS LEVEL
BAB IV - RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN 2023	245-254	CHAPTER IV - DETAILS OF ISSUES ARISING DURING 2023
BAB V -LAPORAN MANAJEMEN RISIKO	435-448	CHAPTER V - RISK MANAGEMENT REPORT
5.1. Laporan penerapan Manajemen Risiko;	435-448	5.1. Report of Risk Management implementation;
5.2. Laporan Audit Internal; dan	418-421	5.2. Internal Audit Report; and
5.3. Laporan Tata Kelola Terintegrasi (jika ada)	401-405	5.3. Integrated Governance Report (if any)
BAB VI - PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	527-547	CHAPTER VI IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS
BAB VII - LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PMN (jika ada)	255	CHAPTER VII REPORT OF ADDITIONAL USE OF PMN (if any)
BAB VIII - PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL ATAU PENUGASAN LAIN (jika ada)	255	CHAPTER VIII IMPLEMENTATION OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS OR OTHER ASSIGNMENTS (if any)
BAB IX - TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN AUDITOR DAN KEPUTUSAN RUPS	274-290, 419-421	CHAPTER IX FOLLOW-UP ON AUDITOR'S FINDINGS AND GMS RESOLUTIONS

LAPORAN TAHUNAN 2024 ANNUAL REPORT

RESILIENCE TO DELIVER

PERTAMINA
GAS NEGARA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

KANTOR PUSAT
Head Office

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20
Jakarta 11140
Indonesia
F : +62 21 397 00645; 6334 838
T : +62 21 6333 080
E : pcc135@pertamina.com
www.pgn.co.id